KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO. 8
JAKARTA 10110
TELP: +62 813-6001- 3838
WEBSITE : djka.kemenhub.go.id
EMAIL : ditjenka@kemenhub.go.id

NOTA DINAS

Nomor : 0596/KI/VII/2024

Yth. : Direktur Jenderal Perkeretaapian
Dari : Sekretaris Direktorat Jenderal Perkeretaapian
Hal : Laporan Monitoring Kinerja Triwulan II Tahun 2024 Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian
Tanggal : 25 Juli 2024

Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 85 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah bahwa diperlukan monitoring capaian kinerja secara berkala terhadap target yang ditetapkan pada Perjanjian Kinerja. Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini disampaikan Laporan Monitoring Kinerja unit Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian periode Triwulan II Tahun 2024 mengacu target Perjanjian Kinerja Tahun 2024 dengan capaian rata-rata sebesar 106,10%. Adapun uraian target dan realisasi masing-masing Sasaran dan Indikator Kinerja Kegiatan dilaporkan sebagai berikut:

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Triwulan II	Realisasi Triwulan II	Capaian Kinerja Triwulan II (%)
1	Termanfaatkannya Kebijakan Pembinaan dan Peningkatan Konektivitas Perkeretaapian	Persentase rekomendasi Kebijakan Pembinaan dan Peningkatan Konektivitas Perkeretaapian yang Telah Ditindaklanjuti	%	80,00	80,00	100,00
2	Terlaksananya Perumusan Regulasi dan Kebijakan dalam Penyelenggaraan Perkeretaapian	Persentase Pencapaian Target Legislasi (Rancangan dan Peraturan Perundangan) Bidang Perkeretaapian	%	97,78	106,67	109,09
3	Tersedianya SDM Perkeretaapian yang Berkompeten dan Profesional	Persentase ASN Ditjen Perkeretaapian yang Memiliki Sertifikat Kompetensi/Keahlian	%	56,00	58,58	104,61

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Triwulan II	Realisasi Triwulan II	Capaian Kinerja Triwulan II (%)
4	Sistem Informasi dan Teknologi yang Andal	Persentase Pemenuhan Rencana Induk TIK Bidang Perkeretaapian	%	70,00	70,37	100,53
5	Dukungan Publik terhadap Penyelenggaraan Perkeretaapian	Persentase Pemenuhan Publikasi Ditjen Perkeretaapian	%	50,00	61,22	122,44 (Maks Capaian 110%)
6	Terwujudnya *good governance* dan *clean government* di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian	Nilai AKIP Ditjen Perkeretaapian	Nilai	-	-	- (Penilaian di Triwulan IV)
		Tingkat Maturasi SPIP Direktorat Jenderal Perkeretaapian	Level	-	-	- (Penilaian di Triwulan IV)
		Persentase Realisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Bidang Perkeretaapian	%	10,00	25,86	258,60 (Maks Capaian 110%)
		Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran Ditjen Perkeretaapian	%	40,68	57,22	140,66 (Maks Capaian 110%)
		Tingkat Kepuasan Pelayanan Perkantoran Ditjen Perkeretaapian	Nilai	3,70	3,87	104,59

Selain itu dilaporkan pula alokasi anggaran Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian pada periode Triwulan II Tahun 2024 sebesar Rp190.705.041.000,- dengan realisasi sebesar Rp73.723.801.585,- atau 38,66%. Mohon perkenan arahan lanjut Bapak Direktur Jenderal Perkeretaapian

Atas perhatian dan petunjuk lanjut diucapkan terima kasih.

Jujun Endah Wahjuningrum
NIP 196507031991032001

Kementerian Perhubungan
Direktorat Jenderal Perkeretaapian

LAPORAN MONITORING CAPAIAN KINERJA

TRIWULAN II 2024

SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

KATA PENGANTAR

Laporan monitoring kinerja merupakan laporan monitoring secara berkala (triwulan) atas pelaksanaan program/kegiatan dan pencapaian target kinerja yang ditetapkan melalui Perjanjian Kinerja. Penyusunan laporan monitoring kinerja dimaksud mengacu pada Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 85 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Laporan Monitioring Kinerja Triwulan II Tahun 2024 Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian mencakup progres pencapaian kinerja sesuai bidang tugas periode Triwulan II Tahun 2024, identifikasi kendala/permasalahan, serta penyusunan rekomendasi peningkatan kinerja masing-masing indikator kinerja sebagai upaya mencapai target yang telah ditetapkan pada Tahun 2024. Selain itu, pada laporan monitoring juga menyampaikan progress tindak lanjut rekomendasi peningkatan kinerja pada pelaporan periode sebelumnya.

Ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya disampaikan kepada semua pihak yang terlibat dalam penyusunan Laporan Monitoring Kinerja Triwulan II Tahun 2024 Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian. Laporan monitoring kinerja ini diharapkan dapat bermanfaat dalam rangka meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pemenuhan target kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian.

Jakarta, 25 Juli 2024

SEKRETARIS
DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

JUJUN ENDAH WAHJUNINGRUM
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19650703 199103 2 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR **2**
DAFTAR ISI **3**
DAFTAR GAMBAR **4**
DAFTAR TABEL **5**
DAFTAR LAMPIRAN **7**
BAB 1 PENDAHULUAN **8**
1.1 LATAR BELAKANG 8
1.2 MAKSUD DAN TUJUAN 9
1.3 TUGAS DAN FUNGSI 9
1.4 STRUKTUR ORGANISASI DAN SUMBER DAYA MANUSIA 10
1.5 PERJANJIAN KINERJA 12
1.5.1 SASARAN, INDIKATOR, TARGET KINERJA TAHUNAN 12
1.5.2 ALOKASI ANGGARAN 19
BAB 2 CAPAIAN KINERJA TRIWULAN **21**
2.1 TAHAP PENGUKURAN KINERJA 21
2.2 PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA 24
2.2.1 TERMANFAATKANNYA KEBIJAKAN PEMBINAAN DAN PENINGKATAN PERKERETAAPIAN 24
2.2.2 TERLAKSANANYA PERUMUSAN REGULASI DAN KEBIJAKAN DALAM PENYELENGGARAAN PERKERETAAPIAN 30
2.2.3 TERSEDIANYA SDM PERKERETAAPIAN YANG KOMPETEN DAN PROFESIONAL 39
2.2.4 SISTEM INFORMASI DAN TEKNOLOGI YANG ANDAL 42
2.2.5 DUKUNGAN PUBLIK TERHADAP PENYELENGGARAAN PERKERETAAPIAN 49
2.2.6 TERWUJUDNYA *GOOD GOVERNANCE* DAN *CLEAN GOVERNMENT* DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN 53
2.3 CAPAIAN LAINNYA 78
2.4 REALISASI ANGGARAN 78
2.4.1 REALISASI ANGGARAN UNIT KERJA 78
2.4.2 REALISASI ANGGARAN PER INDIKATOR KINERJA 79
2.4.3 ANALISIS EFISIENSI SUMBER DAYA 82
BAB 3 PENUTUP **86**
3.1 TINDAK LANJUT REKOMENDASI PERIODE SEBELUMNYA 86
3.2 KESIMPULAN 94
3.3 REKOMENDASI 96
LAMPIRAN

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1-1 Struktur Organisasi Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian 10

Gambar 1-2 Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan/Kepangkatan 11

Gambar 1-3 Jumlah Pegawai Berdasarkan Pendidikan 12

Gambar 2-1 Capaian Kinerja Persentase Rekomendasi Kebijakan Pembinaan dan Peningkatan Konektivitas Perkeretaapian yang telah Ditindaklanjuti Tahun 2024 27

Gambar 2-2 Capaian Kinerja Persentase Pencapaian Target Legislasi (Rancangan dan Peraturan Perundangan) Bidang Perkeretaapian Tahun 2024 34

Gambar 2-3 Capaian Kinerja Persentase ASN Direktorat Jenderal Perkeretaapian yang Memiliki Sertifikat Kompetensi/Keahlian Tahun 2024 41

Gambar 2-4 Capaian Kinerja Persentase Pemenuhan Rencana Induk TIK Bidang Perkeretaapian Tahun 2024 45

Gambar 2-5 Capaian Kinerja Persentase Pemenuhan Publikasi Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2024 51

Gambar 2-6 Capaian Kinerja Triwulan Nilai AKIP Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2024 54

Gambar 2-7 Capaian Kinerja Tingkat Maturitas SPIP Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2024 59

Gambar 2-8 Capaian Kinerja PNBP Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2024..... 64

Gambar 2-9 Capaian Kinerja Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2024 68

Gambar 2-10 Capaian Kinerja Tingkat Kepuasan Pelayanan Perkantoran Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2024 76

Gambar 2-11 Realisasi Anggaran Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian Berdasarkan Jenis Belanja Triwulan II 2024 79

DAFTAR TABEL

Tabel 1-1 Jumlah Pegawai Berdasarkan Unit Kerja 10

Tabel 1-2 Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan/Kepangkatan 11

Tabel 1-3 Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan 11

Tabel 1-4 Target Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2024 12

Tabel 1-5 Analisa SMART Indikator Kinerja Kegiatan Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2024 14

Tabel 1-6 Alokasi Anggaran Berdasarkan Sasaran dan Indikator Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2024 19

Tabel 2-1 Pengukuran Indikator Kinerja Kegiatan Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian 22

Tabel 2-2 Rincian Rekomendasi Kebijakan Pembinaan dan Peningkatan Konektivitas Perkeretaapian yang Telah Ditindaklanjuti 24

Tabel 2-3 Capaian Kinerja Persentase Rekomendasi Kebijakan Pembinaan dan Peningkatan Konektivitas Perkeretaapian yang telah Ditindaklanjuti Triwulan II Tahun 2024 27

Tabel 2-4 Peraturan Perundang-Undangan Bidang Perkeretaapian yang Telah Ditetapkan Periode Tahun 2020 s.d Triwulan II 2024 30

Tabel 2-5 Capaian Kinerja Persentase Pencapaian Target Legislasi (Rancangan dan Peraturan Perundangan) Bidang Perkeretaapian Tahun 2024 34

Tabel 2-6 Rancangan Peraturan/Legislasi Bidang Perkeretaapian yang Masih Berproses 35

Tabel 2-7 Legislasi/Peraturan di lingkungan Kementerian Perhubungan yang Terbit pada Periode Triwulan II 2024 37

Tabel 2-8 Jumlah ASN Direktorat Jenderal Perkeretaapian yang Memiliki Sertifikat Kompetensi/Keahlian Berdasarkan Unit Kerja pada Triwulan II 2024 39

Tabel 2-9 Capaian Kinerja Persentase ASN Direktorat Jenderal Perkeretaapian yang Memiliki Sertifikat Kompetensi/Keahlian Tahun 2024 40

Tabel 2-10 Kegiatan TIK Tahun 2024 44

Tabel 2-11 Capaian Kinerja Persentase Pemenuhan Rencana Induk TIK Bidang Perkeretaapian Tahun 2023 45

Tabel 2-12 Inventarisasi Sistem TIK/Aplikasi di lingkungan Kementerian Perhubungan Periode Triwulan II 2024 47

Tabel 2-13 Capaian Kinerja Persentase Pemenuhan Publikasi Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2024 50

Tabel 2-14 Capaian Kinerja Triwulan Nilai AKIP Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2024 54
Tabel 2-15 Perbandingan Nilai AKIP Unit Kerja di lingkungan Kementerian Perhubungan Tahun 2023 56
Tabel 2-16 Tingkat Maturitas SPIP 58
Tabel 2-17 Capaian Kinerja Tingkat Maturitas SPIP Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2024 59
Tabel 2-18 Realisasi PNBP Direktorat Jenderal Perkeretaapian Triwulan II 2024 62
Tabel 2-19 Capaian Kinerja Target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Tahun 2024 64
Tabel 2-20 Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Per-Unit Eselon I Kementerian Perhubungan Periode Triwulan II 2024 66
Tabel 2-21 Capaian Kinerja Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2024 68
Tabel 2-22 Realisasi Anggaran Direktorat Jenderal Perkeretaapian Per Jenis Belanja Tahun 2024 70
Tabel 2-23 Realisasi Anggaran Unit Kerja/Kementerian/Lembaga Lainnya Periode Triwulan II 2024 71
Tabel 2-24 Realisasi Anggaran Per-Unit Eselon I Periode Triwulan II 2024 73
Tabel 2-25 Uraian Hasil Survei Tingkat Kepuasan Pelayanan Triwulan II 2024 75
Tabel 2-26 Capaian Kinerja Tingkat Kepuasan Pelayanan Perkantoran Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2024 76
Tabel 2-27 Realisasi Anggaran Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian Berdasarkan Jenis Belanja Triwulan II 2024 79
Tabel 2-28 Realisasi Anggaran Berdasarkan Sasaran dan Indikator Kinerja Kegiatan Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian Periode Triwulan II 2024 80
Tabel 2-29 Analisis Efisiensi Anggaran Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian Triwulan II 2024 83
Tabel 3-1 Tindak Lanjut Rekomendasi Pada Pelaporan Kinerja Periode Sebelumnya 86
Tabel 3-2 Capaian Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian Triwulan II Tahun 2024 95

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I	Perjanjian Kinerja Tahun 2024
Lampiran II	Rekomendasi Peningkatan Kinerja Berdasarkan Laporan Monitoring Kinerja Triwulan II Tahun 2024
Lampiran III	Monitoring Renaksi Periode April - Juni 2024
Lampiran IV	Data Dukung Masing-Masing Indikator Kinerja Kegiatan
Lampiran V	Dokumentasi Pembahasan Kinerja Triwulan II Tahun 2024

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik (*Good Governance*) dan bersih (*Clean Governance*), Direktorat Jenderal Perkeretaapian diberikan tanggung jawab untuk mengatur, mengendalikan dan mengawasi penyelenggaraan transportasi perkeretaapian kepada masyarakat guna memenuhi aspek konektivitas, keselamatan dan pelayanan yang memadai dilengkapi oleh aspek pertanggungjawaban (*accountability*) terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah.

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), bahwa setiap Instansi Pemerintah sebagai Penyelenggara Pemerintahan Negara wajib untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan/atau kegagalan dalam melaksanakan program dan kegiatan yang telah diamanahkan oleh Pemberi Mandat (atasan langsung) atas kinerja yang ditargetkan. Selain itu, Instansi Pemerintah juga perlu memberikan informasi kinerja secara terukur sesuai dengan sasaran dan target kinerja yang telah ditetapkan melalui pelaporan kinerja dan disusun secara periodik sebagai upaya perbaikan secara berkesinambungan untuk meningkatkan kinerja.

Laporan Monitoring Kinerja Triwulan II Tahun 2024 Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian pada dasarnya merupakan bentuk pengukuran capaian kinerja dari setiap indikator kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian secara periodik yang disusun mengacu pada Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 85 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Laporan monitoring kinerja ini memuat gambaran pencapaian kinerja serta evaluasi pada periode tertentu yang dikaitkan dengan identifikasi kendala/permasalahan serta upaya peningkatan kinerja yang dilakukan untuk mencapai sasaran dan indikator kinerja kegiatan dalam kerangka pemenuhan tujuan pelaksanaan tugas dan fungsi unit kerja.

1.2 MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Laporan Monitoring Kinerja Triwulan II Tahun 2024 Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian disusun dengan maksud menyampaikan informasi kinerja dan melakukan evaluasi capaian kinerja masing-masing indikator kinerja kegiatan dalam kurun waktu tertentu sesuai dengan target rencana aksi pada Perjanjian Kinerja Tahun 2024 yang telah ditetapkan.

Tujuan penyusunan Laporan Monitoring Kinerja Triwulan II Tahun 2024 Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian adalah sebagai tolak ukur keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan pada periode Triwulan II Tahun 2024 serta memberikan rekomendasi peningkatan kinerja periode selanjutnya.

1.3 TUGAS DAN FUNGSI

Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 17 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan, kedudukan Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian merupakan salah satu unsur pelaksana tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Perkeretaapian. Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian pelayanan dukungan teknis dan administrasi kepada seluruh satuan organisasi dalam lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian menyelenggarakan fungsi:

1. Penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana, program, penyusunan dan pengembangan sistem informasi, evaluasi dan pelaporan kinerja, serta penanganan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian;
2. Penyiapan pengelolaan keuangan dan barang milik negara serta pembinaan tata kelola Badan Layanan Umum di lingkungan Ditjen Perkeretaapian;
3. Penyiapan pembentukan peraturan perundang-undangan, advokasi, perjanjian, urusan hubungan masyarakat dan antar lembaga, dukungan pelaksanaan keterbukaan informasi publik, kerja sama luar negeri serta pendokumentasian hukum di bidang perkeretaapian; dan

4. Penyiapan koordinasi dan pelaksanaan pengelolaan kepegawaian, standar kompetensi jabatan dan sumber daya manusia, organisasi dan tata laksana, reformasi birokrasi, pelaksanaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dan Aparatur Sipil Negara, pengendalian gratifikasi, kegiatan administrasi perkantoran, kearsipan dan tata persuratan, pelaksanaan urusan umum dan kerumahtanggaan, pelaksanaan penanggulangan darurat akibat bencana, kesejahteraan pegawai serta pengadaan barang milik negara di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian.

1.4 STRUKTUR ORGANISASI DAN SUMBER DAYA MANUSIA

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian mempunyai susunan struktur organisasi yang terdiri dari Bagian Perencanaan, Bagian Keuangan, Bagian Hukum serta Bagian Sumber Daya Manusia dan Umum serta dibantu beberapa kelompok fungsional tertentu.

Gambar 1-1 Struktur Organisasi Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian

Komposisi Sumber Daya Manusia (SDM) pada unit Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian pada Triwulan II Tahun 2024 adalah sebanyak 123 orang, dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 1-1 Jumlah Pegawai Berdasarkan Unit Kerja

No	Unit Kerja	Jumlah Pegawai
1.	Bagian Perencanaan	28
2.	Bagian Keuangan	33
3.	Bagian Hukum	25
4.	Bagian Kepegawaian dan Umum	37
Jumlah		**123**

Tabel 1-2 Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan/Kepangkatan

No	Golongan / Kepangkatan	Jumlah Pegawai
1.	PNS Golongan I	0
2.	PNS Golongan II	18
3.	PNS Golongan III	86
4.	PNS Golongan IV	10
5.	PPPK Golongan VIII	1
6.	PPPK Golongan IX	8
Jumlah		**123**

Tabel 1-3 Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah Pegawai
1	SD	0
2	SLTP	0
3	SLTA	7
4	D-1	0
5	D-2	0
6	D-3	23
7	D-4	4
8	S-1	63
9	S-2	26
10	S-3	0
Jumlah		**123**

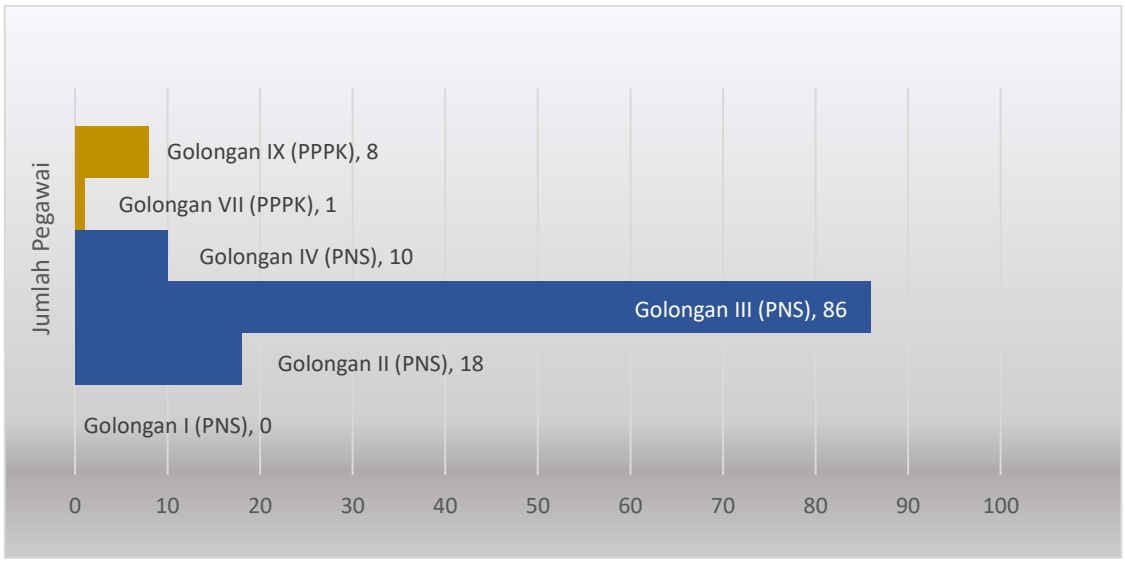

Gambar 1-2 Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan/Kepangkatan

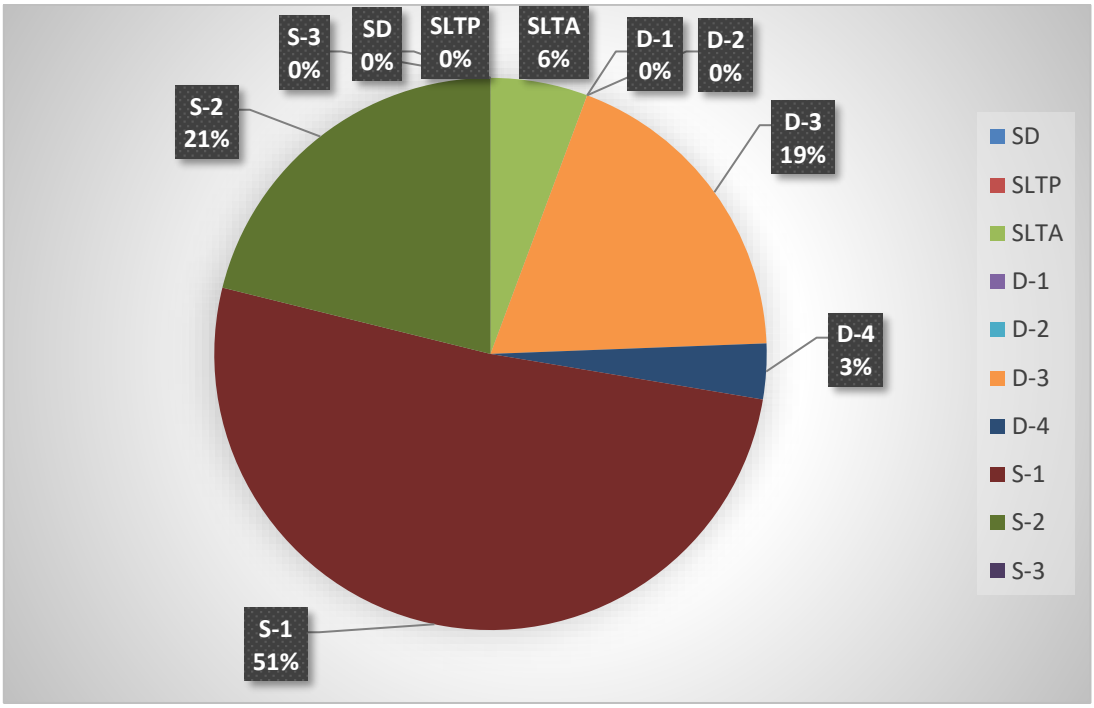

Gambar 1-3 Jumlah Pegawai Berdasarkan Pendidikan

1.5 PERJANJIAN KINERJA

1.5.1 SASARAN, INDIKATOR, TARGET KINERJA TAHUNAN

Perjanjian Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2024 menetapkan 6 (enam) sasaran dan 10 (sepuluh) Indikator Kinerja Kegiatan dengan mengacu pada Rencana Strategis Kementerian Perhubungan Bidang Perkeretaapian Tahun 2020-2024 dan Keputusan Direktur Jenderal Perkeretaapian Nomor KP-DJKA 10 Tahun 2023 tentang Indikator Kinerja Program dan Indikator Kinerja Kegiatan Unit Kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian.

Adapun target kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 sebagai berikut:

Tabel 1-4 Target Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2024

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Satuan	Target Kinerja Triwulan			
				TW I	TW II	TW III	TW IV
Termanfaatkannya Kebijakan Pembinaan dan Peningkatan Perkeretaapian	a.	Persentase Rekomendasi Kebijakan Pembinaan dan Peningkatan Konektivitas Perkeretaapian yang telah ditindaklanjuti	%	80,00	80,00	100,00	100,00

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Satuan	Target Kinerja Triwulan			
				TW I	TW II	TW III	TW IV
Terlaksananya Perumusan Regulasi dan Kebijakan dalam Penyelenggaraan Perkeretaapian	b.	Persentase Pencapaian Target Legislasi (Jumlah Rancangan dan Peraturan Perundangan) Bidang Perkeretaapian	%	97,78	97,78	100,00	100,00
Tersedianya SDM Perkeretaapian yang Kompeten dan Profesional	c.	Persentase ASN Ditjen Perkeretaapian yang Memiliki Sertifikat Kompetensi/ Keahlian	%	56,00	56,00	56,00	65,00
Sistem Informasi dan Teknologi yang Andal	d.	Persentase Pemenuhan Rencana Induk TIK Bidang Perkeretaapian	%	70,00	70,00	70,00	77,00
Dukungan Publik terhadap Penyelenggaraan Perkeretaapian	e.	Persentase Pemenuhan Publikasi Ditjen Perkeretaapian	%	25,00	50,00	75,00	100,00
Terwujudnya *Good Governance* dan *Clean Government* di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian	f.	Nilai AKIP Ditjen Perkeretaapian	Nilai	-	-	-	83,00
	g.	Tingkat Maturitas SPIP Direktorat Jenderal Perkeretaapian	Level	-	-	-	3
	i.	Persentase Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Bidang Perkeretaapian	%	3,00	10,00	41,00	100,00
	j.	Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran Ditjen Perkeretaapian	%	26,74	40,68	56,30	89,00
	k.	Tingkat Kepuasan Pelayanan Perkantoran Ditjen Perkeretaapian	Nilai	3,70	3,70	3,70	3,70

Indikator Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian telah memenuhi kriteria *Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Time*-Bound (SMART) dengan uraian analisa sebagai berikut:

Tabel 1-5 Analisa SMART Indikator Kinerja Kegiatan Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2024

INDIKATOR KINERJA	ANALISIS SMART				
	***SPECIFIC* (S)**	***MEASURABLE* (M)**	***ACHIEVABLE* (A)**	***RELEVANT* (R)**	***TIME-BOUND* (T)**
Persentase rekomendasi kebijakan pembinaan dan peningkatan konektivitas perkeretaapian yang telah ditindaklanjuti	Merupakan parameter untuk mengukur pemanfaatan/tindak lanjut dari penyusunan rekomendasi kebijakan pembinaan dan peningkatan konektivitas perkeretaapian	Jumlah rekomendasi kebijakan pembinaan dan peningkatan konektivitas perkeretaapian yang ditindaklanjuti/dilegalkan Tahun 2020 s.d tahun berjalan dibandingkan dengan jumlah rekomendasi kebijakan yang disusun pada periode Rencana Strategis 2020-2024. *Persentase Rekomendasi Kebijakan Pembinaan dan Peningkatan Konektivitas Perkeretaapian yang telah Ditindaklanjuti* = *Jumlah Rekomendasi Kebijakan yang sudah Ditindaklanjuti/Dilegalkan Pada Tahun 2020 s.d Tahun Berjalan* / *Jumlah Rekomendasi Kebijakan yang Disusun pada Periode Renstra 2020-2024* X 100%	Target ditetapkan memperhatikan capaian tahun sebelumnya, target Renstra dan mengacu pada kegiatan serta alokasi anggaran yang tersedia	Selaras dengan *core business* / tugas dan fungsi Setditjen Perkeretaapian mendukung sasaran strategis dan program konektivitas	Target ditetapkan secara bertahap pertahun s.d Tahun 2024
Persentase pencapaian target legislasi (Jumlah rancangan dan peraturan perundangan) di bidang perkeretaapian	Merupakan parameter untuk mengukur tingkat pemenuhan kebutuhan legislasi berupa rancangan dan peraturan perundangan di bidang perkeretaapian dalam periode Rencana Strategis 2020-2024	Jumlah capaian legislasi periode Tahun 2020 s.d tahun berjalan dibandingkan dengan dengan jumlah target legislasi bidang perkeretaapian Tahun 2020-2024 sesuai dokumen Rencana Strategis. *Persentase Pencapaian Target Legislasi (Jumlah Rancangan dan Peraturan Perundangan) di Bidang Perkeretaapian* = *Jumlah Capaian Legislasi Bidang Perkeretaapian Periode Tahun 2020 s.d Tahun Berjalan* / *Jumlah Target Legislasi Bidang Perkeretaapian Tahun 2020-2024 sesuai Dokumen Renstra* X 100%	Target ditetapkan memperhatikan capaian tahun sebelumnya, target Renstra dan mengacu pada kegiatan serta alokasi anggaran yang tersedia	Selaras dengan *core business* / tugas dan fungsi Setditjen Perkeretaapian mendukung sasaran strategis dan program dukungan manajemen	Target ditetapkan secara bertahap pertahun s.d Tahun 2024

INDIKATOR KINERJA	ANALISIS SMART				
	***SPECIFIC* (S)**	***MEASURABLE* (M)**	***ACHIEVABLE* (A)**	***RELEVANT* (R)**	***TIME-BOUND* (T)**
Persentase ASN Ditjen Perkeretaapian yang memiliki sertifikat kompetensi/keahlian tertentu	Merupakan parameter untuk mengukur kondisi SDM/ASN di lingkungan Ditjen Perkeretaapian mendukung fungsi regulator penyelenggaraan perkeretaapian	Jumlah ASN Ditjen Perkeretaapian yang memiliki sertifikat kompetensi/keahlian tertentu (teknis dan umum/manajerial) dibandingkan dengan jumlah ASN Ditjen Perkeretaapian. *Persentase ASN Ditjen Perkeretaapian yang Memiliki Sertifikat Kompetensi/ Keahlian Tertentu* = *Jumlah ASN Ditjen Perkeretaapian yang Memiliki Sertifikat Kompetensi/Keahlian tertentu* / *Jumlah ASN Ditjen Perkeretaapian* X 100%	Target ditetapkan memperhatikan capaian tahun sebelumnya, target Renstra dan mengacu pada kegiatan serta alokasi anggaran yang tersedia	Selaras dengan *core business* / tugas dan fungsi Setditjen Perkeretaapian mendukung sasaran strategis dan program dukungan manajemen	Target ditetapkan secara bertahap pertahun s.d Tahun 2024
Persentase Pemenuhan Rencana Induk Teknologi Informasi dan Komunikasi Bidang Perkeretaapian	Merupakan parameter untuk mengukur tingkat pemenuhan Sistem Informasi dan Teknologi yang ada di lingkungan Ditjen Perkeretaapian sesuai Rencana Induk	Jumlah ketersediaan sistem TIK dalam rangka mendukung fungsi regulator bidang perkeretaapian dibandingkan dengan jumlah rencana sistem TIK mengacu pada Rencana Induk TIK Kementerian Perhubungan Bidang Perkeretaapian. *Persentase Pemenuhan Rencana Induk Teknologi Informasi dan Komunikasi Bidang Perkeretaapian* = *Jumlah Sistem TIK di lingkungan Ditjen Perkeretaapian* / *Jumlah Rencana Sistem TIK berdasarkan Rencana Induk TIK Kemenhub Bidang Perkeretaapian* X 100%	Target ditetapkan memperhatikan capaian tahun sebelumnya, target Renstra dan mengacu pada kegiatan serta alokasi anggaran yang tersedia	Selaras dengan *core business* / tugas dan fungsi Setditjen Perkeretaapian mendukung sasaran strategis dan program dukungan manajemen	Target ditetapkan secara bertahap pertahun s.d Tahun 2024
Persentase Pemenuhan publikasi Ditjen Perkeretaapian	Merupakan parameter untuk mengukur pemenuhan informasi publik kepada masyarakat terkait dengan penyelenggaraan perkeretaapian	Jumlah pemberitaan bidang perkeretaapian pada media cetak, elektronik, online dan media sosial yang mempublikasikan kegiatan penyelenggaraan perkeretaapian dalam bentuk siaran pers dan konten media sosial pada tahun berjalan dibandingkan target pelaksanaan publikasi periode setahun (365 media sosial, 50 siaran pers/liputan).	Target ditetapkan memperhatikan capaian tahun sebelumnya, target Renstra dan mengacu pada kegiatan serta alokasi anggaran yang tersedia	Selaras dengan *core business* / tugas dan fungsi Setditjen Perkeretaapian mendukung sasaran strategis dan program	Target ditetapkan secara bertahap pertahun s.d Tahun 2024

INDIKATOR KINERJA	ANALISIS SMART				
	***SPECIFIC* (S)**	***MEASURABLE* (M)**	***ACHIEVABLE* (A)**	***RELEVANT* (R)**	***TIME-BOUND* (T)**
		$\text{Persentase Pemenuhan Publikasi Ditjen Perkeretaapian} = \frac{\text{Jumlah Publikasi Ditjen Perkeretaapian pada Tahun Berjalan}}{\text{Jumlah Target Publikasi Ditjen Perkeretaapian Periode Setahun}} \text{ X } 100\%$		dukungan manajemen	
Nilai AKIP Ditjen Perkeretaapian	Merupakan Nilai AKIP Direktorat Jenderal Perkeretaapian sesuai hasil penilaian APIP (Nilai skala 1-100)	Nilai AKIP Ditjen Perkeretaapian (Nilai skala 1-100) diperoleh berdasarkan hasil evaluasi implementasi penyelenggaraan SAKIP yang dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal Perkeretaapian.	Target ditetapkan memperhatikan capaian tahun sebelumnya, target Renstra dan mengacu pada kegiatan serta alokasi anggaran yang tersedia	Selaras dengan Indikator Kinerja Program pada Sekretariat Jenderal Kemenhub serta selaras dengan Tugas Pokok dan Fungsi serta *Core Bussiness* Setditjen Perkeretaapian mendukung sasaran strategis dan program dukungan manajemen	Target ditetapkan secara bertahap pertahun s.d Tahun 2024

INDIKATOR KINERJA	ANALISIS SMART				
	***SPECIFIC* (S)**	***MEASURABLE* (M)**	***ACHIEVABLE* (A)**	***RELEVANT* (R)**	***TIME-BOUND* (T)**
Tingkat Maturitas SPIP Direktorat Jenderal Perkeretaapian	Merupakan Nilai Tingkat/Level Maturitas SPIP Direktorat Jenderal Perkeretaapian sesuai hasil penilaian APIP/BPKP (Level 1-5)	Tingkat Maturasi SPIP Direktorat Jenderal Perkeretaapian (Level 1-5) diperoleh berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan SPIP yang dilaksanakan oleh BPKP.	Target ditetapkan memperhatikan capaian tahun sebelumnya, target Renstra dan mengacu pada kegiatan serta alokasi anggaran yang tersedia	Selaras dengan Indikator Kinerja Program pada Sekretariat Jenderal Kemenhub serta selaras dengan Tugas Pokok dan Fungsi serta *Core Bussiness* Setditjen Perkeretaapian mendukung sasaran strategis dan program dukungan manajemen	Target ditetapkan secara bertahap pertahun s.d Tahun 2024
Persentase realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) bidang Perkeretaapian	Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) bidang perkeretaapian (Rupiah) sesuai target tahunan	Realisasi penerimaan PNBP bidang perkeretaapian dibandingkan dengan target perolehan PNBP bidang perkeretaapian pada tahun berjalan. $\text{Persentase Realisasi PNBP Bidang Perkeretaapian} = \frac{\text{Realisasi PNBP Bidang Perkeretaapian pada Tahun Berjalan}}{\text{Target Perolehan PNBP Bidang Perkeretaapian pada Tahun Berjalan}} \text{ X } 100\%$	Target ditetapkan memperhatikan capaian tahun sebelumnya, target Renstra dan mengacu pada kegiatan serta alokasi anggaran yang tersedia	Selaras dengan *core business* / Tugas dan fungsi Setditjen Perkeretaapian mendukung sasaran strategis dan program dukungan manajemen	Target ditetapkan secara bertahap pertahun s.d Tahun 2024

INDIKATOR KINERJA	ANALISIS SMART				
	***SPECIFIC* (S)**	***MEASURABLE* (M)**	***ACHIEVABLE* (A)**	***RELEVANT* (R)**	***TIME-BOUND* (T)**
Persentase kualitas pelaksanaan anggaran Ditjen Perkeretaapian	Merupakan Nilai Kinerja Anggaran (NKA) mengacu pada PMK Nomor 22/PMK.02/2021 dengan rumusan tertentu dan nilainya diperoleh pada *Dashboard* Aplikasi SMART Unit Kerja (skala 0-100%)	Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran Ditjen Perkeretaapian merupakan Nilai Kinerja Anggaran (NKA) Unit Eselon I (skala 0-100%) mengacu pada PMK Nomor 22/PMK.02/2021 dengan perhitungannya terdiri dari Capaian Sasaran Program, Capaian Output Program, Rata-rata NKA Satker, Penyerapan, Efisiensi dan Konsistensi. Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran berupa NKA dikelompokkan pada kategori: • Lebih dari 90%: Kategori Sangat Baik; • 80% - 90%: Kategori Baik; • 60% - 80%: Kategori Cukup; • 50% - 60%: Kategori Kurang; • Kurang dari 50%: Kategori Sangat Kurang.	Target ditetapkan memperhatikan capaian tahun sebelumnya, target Renstra dan mengacu pada kegiatan serta alokasi anggaran yang tersedia	Selaras dengan *core business* / Tugas dan fungsi Setditjen Perkeretaapian mendukung sasaran strategis dan program dukungan manajemen	Target ditetapkan secara bertahap pertahun s.d Tahun 2024
Tingkat Kepuasan Pelayanan Perkantoran Ditjen Perkeretaapian	Merupakan parameter untuk mengukur tingkat kepuasan terhadap pelayanan administrasi kepegawaian, ketatausahaan dan kerumahtanggaan di lingkungan Ditjen Perkeretaapian	Tingkat Kepuasan Pelayanan Perkantoran (skala *likert* 1-5) diperoleh dari hasil survei kepuasan kepada pegawai Ditjen Perkeretaapian yang memperoleh pelayanan ketatausahaan dan kerumahtanggaan di lingkungan Kantor Pusat Ditjen Perkeretaapian.	Target ditetapkan memperhatikan capaian tahun sebelumnya, target Renstra dan mengacu pada kegiatan serta alokasi anggaran yang tersedia	Selaras dengan *core business* / tugas dan fungsi Setditjen Perkeretaapian mendukung sasaran strategis dan program dukungan manajemen	Target ditetapkan secara bertahap pertahun s.d Tahun 2024

1.5.2 ALOKASI ANGGARAN

Berdasarkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Induk Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun Anggaran 2024 Nomor SP DIPA-022.08-0/2024 Tanggal 24 November 2023, alokasi anggaran Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2024 sebesar Rp10.669.069.412.000,- dan untuk unit kerja Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian sebesar Rp190.705.041.000,- yang juga tercantum pada Perjanjian Kinerja Tahun 2024. Uraian sasaran dan indikator kinerja serta rincian alokasi anggaran Tahun 2024 berdasarkan Perjanjian Kinerja dan posisi saat ini disampaikan sebagai berikut:

Tabel 1-6 Alokasi Anggaran Berdasarkan Sasaran dan Indikator Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2024

Sasaran	Indikator Kinerja		Target	Anggaran berdasarkan PK (Rp)	Anggaran Saat Ini (Rp)
Tersusunnya Kebijakan Pembinaan dan Peningkatan Konektivitas	a.	Persentase rekomendasi kebijakan pembinaan dan peningkatan konektivitas perkeretaapian yang telah ditindaklanjuti	100%	7.166.891.000	7.166.891.000
Terlaksananya Perumusan Regulasi dan Kebijakan dalam Penyelenggaraan Perkeretaapian	b.	Persentase pencapaian target legalisasi (Jumlah rancangan dan peraturan perundangan) bidang perkeretaapian	100%	6.255.254.000	6.255.254.000
Tersedianya SDM perkeretaapian yang Kompeten dan profesional	c.	Persentase ASN Ditjen Perkeretaapian yang memiliki sertifikat kompetensi/keahlian tertentu	65%	11.117.036.000	11.808.202.000
Sistem Informasi dan Teknologi yang Andal	d.	Persentase Pemenuhan Rencana Induk Teknologi Informasi dan Komunikasi Bidang Perkeretaapian	77%	3.923.109.000	3.923.109.000
Dukungan Publik terhadap Penyelenggaraan Perkeretaapian	e.	Persentase Pemenuhan Publikasi Ditjen Perkeretaapian	100%	11.503.441.000	11.503.441.000
Terwujudnya *Good Governance* dan *Clean Government* di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian	f.	Nilai AKIP Ditjen Perkeretaapian	83	16.552.633.000	16.353.633.000
	g.	Tingkat Maturitas SPIP Direktorat Jenderal Perkeretaapian	Level 3	4.481.979.000	4.758.979.000
	h.	Persentase Realisasi Penerimaan Negara	100%	6.270.812.000	6.070.812.000

Sasaran	Indikator Kinerja		Target	Anggaran berdasarkan PK (Rp)	Anggaran Saat Ini (Rp)
		Bukan Pajak (PNBP) Bidang Perkeretaapian			
	i.	Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran Ditjen Perkeretaapian	89%	7.959.221.000	7.947.221.000
	j.	Tingkat Kepuasan Pelayanan Perkantoran Ditjen Perkeretaapian	3,70	115.474.665.000	114.917.499.000
Jumlah				**190.705.041.000**	**190.705.041.000**

BAB 2 CAPAIAN KINERJA TRIWULAN

2.1 TAHAP PENGUKURAN KINERJA

Pengukuran kinerja dilaksanakan terhadap pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan pada Perjanjian Kinerja dengan pencapaian hasil/*output* suatu kegiatan dalam kurun waktu tertentu. Dalam melaksanakan pengukuran capaian kinerja mengacu pada Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 85 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabllitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Untuk mengetahui capaian kinerja antara rencana dan realisasi suatu *outcome* kegiatan digunakan formula sebagai berikut:

1. Kondisi pertama, apabila makin tinggi realisasi menunjukkan semakin baik pencapaian kinerja, maka formula yang dipergunakan adalah :

$$Capaian\ Kinerja = \left[\frac{Realisasi}{Target}\right] \times 100\%$$

2. Kondisi kedua, apabila makin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian kinerja, maka formula yang dipergunakan adalah:

$$Capaian\ Kinerja = \frac{(Target - (Realisasi - Target))}{Target} \times 100\%$$

3. Nilai capaian kinerja minimal adalah 0%.

Tahapan dalam pengukuran capaian kinerja sebagai berikut:

1. Perbandingan antara target kinerja periode Tahun 2024 dan Triwulan II dengan realisasi kinerja periode Triwulan II Tahun 2024.
2. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan capaian kinerja.
3. Rekomendasi atau alternatif solusi sebagai upaya peningkatan kinerja.
4. Realisasi anggaran pada periode Triwulan II Tahun 2024 termasuk analisis efisiensi.

Adapun pengukuran capaian Indikator Kinerja Kegiatan Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian diuraikan pada Tabel berikut:

Tabel 2-1 Pengukuran Indikator Kinerja Kegiatan Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian

No	Indikator kinerja	Satuan	Tata cara perhitungan
1	Persentase Rekomendasi Kebijakan Pembinaan dan Peningkatan Konektivitas Perkeretaapian yang telah Ditindaklanjuti	%	Jumlah rekomendasi kebijakan pembinaan dan peningkatan konektivitas perkeretaapian yang ditindaklanjuti/dilegalkan tahun 2020 s.d tahun berjalan dibandingkan dengan jumlah rekomendasi kebijakan yang disusun pada periode Rencana Strategis 2020-2024. *Persentase Rekomendasi Kebijakan Pembinaan dan Peningkatan Konektivitas Perkeretaapian yang telah Ditindaklanjuti* = *Jumlah Rekomendasi Kebijakan yang sudah Ditindaklanjuti/Dilegalkan Pada Tahun 2020 s.d Tahun Berjalan* / *Jumlah Rekomendasi Kebijakan yang Disusun pada Periode Renstra 2020-2024* X 100%
2	Persentase Pencapaian Target Legalisasi (Jumlah Rancangan dan Peraturan Perundangan) di Bidang Perkeretaapian	%	Jumlah capaian legislasi periode tahun 2020 s.d tahun berjalan dibandingkan dengan dengan jumlah target legislasi bidang perkeretaapian tahun 2020-2024 sesuai dokumen Rencana Strategis. *Persentase Pencapaian Target Legislasi (Jumlah Rancangan dan Peraturan Perundangan) di Bidang Perkeretaapian* = *Jumlah Capaian Legislasi Bidang Perkeretaapian Periode Tahun 2020 s.d Tahun Berjalan* / *Jumlah Target Legislasi Bidang Perkeretaapian Tahun 2020-2024 sesuai Dokumen Renstra* X 100%
3	Persentase ASN Ditjen Perkeretaapian yang Memiliki Sertifikat Kompetensi/Keahlian Tertentu	%	Jumlah ASN Ditjen Perkeretaapian yang memiliki sertifikat kompetensi/keahlian tertentu (teknis dan umum/manajerial) dibandingkan dengan jumlah ASN Ditjen Perkeretaapian. *Persentase ASN Ditjen Perkeretaapian yang Memiliki Sertifikat Kompetensi/ Keahlian Tertentu* = *Jumlah ASN Ditjen Perkeretaapian yang Memiliki Sertifikat Kompetensi/Keahlian tertentu* / *Jumlah ASN Ditjen Perkeretaapian* X 100%
4	Persentase Pemenuhan Rencana Induk Teknologi Informasi dan Komunikasi Bidang Perkeretaapian	%	Jumlah ketersediaan sistem TIK dalam rangka mendukung fungsi regulator bidang perkeretaapian dibandingkan dengan jumlah rencana sistem TIK mengacu pada Rencana Induk TIK Kementerian Perhubungan Bidang Perkeretaapian. *Persentase Pemenuhan Rencana Induk Teknologi Informasi dan Komunikasi Bidang Perkeretaapian* = *Jumlah Sistem TIK di lingkungan Ditjen Perkeretaapian* / *Jumlah Rencana Sistem TIK berdasarkan Rencana Induk TIK Kemenhub Bidang Perkeretaapian* X 100%
5	Pemenuhan Publikasi Ditjen Perkeretaapian	%	Jumlah pemberitaan bidang perkeretaapian pada media cetak, elektronik, online dan media sosial yang mempublikasikan kegiatan penyelenggaraan perkeretaapian dalam bentuk siaran pers dan konten media sosial pada tahun berjalan dibandingkan target pelaksanaan

No	Indikator kinerja	Satuan	Tata cara perhitungan
			publikasi periode setahun (365 media sosial, 50 siaran pers/liputan). $\text{Persentase Pemenuhan Publikasi Ditjen Perkeretaapian} = \frac{\text{Jumlah Publikasi Ditjen Perkeretaapian pada Tahun Berjalan}}{\text{Jumlah Target Publikasi Ditjen Perkeretaapian Periode Setahun}} \times 100\%$
6	Nilai AKIP Ditjen Perkeretaapian	Nilai	Nilai AKIP Ditjen Perkeretaapian (Nilai skala 1-100) diperoleh berdasarkan hasil evaluasi implementasi penyelenggaraan SAKIP yang dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan.
7	Tingkat Maturitas SPIP Ditjen Perkeretaapian	Level	Tingkat Maturitas SPIP Ditjen Perkeretaapian (Level 1-5) diperoleh berdasarkan hasil penjaminan kualitas oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan dan evaluasi penyelenggaraan SPIP yang dilaksanakan oleh BPKP.
8	Persentase Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Bidang Perkeretaapian	%	Realisasi PNBP bidang perkeretaapian dibandingkan dengan target perolehan PNBP bidang perkeretaapian pada tahun berjalan. $\text{Persentase Realisasi PNBP Bidang Perkeretaapian} = \frac{\text{Realisasi PNBP Bidang Perkeretaapian pada Tahun Berjalan}}{\text{Target Perolehan PNBP Bidang Perkeretaapian pada Tahun Berjalan}} \times 100\%$
9	Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran Ditjen Perkeretaapian	%	Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran Ditjen Perkeretaapian merupakan Nilai Kinerja Anggaran (NKA) Unit Eselon I (skala 0-100%) mengacu pada PMK Nomor 22/PMK.02/2021 dengan perhitungannya terdiri dari Capaian Sasaran Program, Capaian *Output* Program, Rata-rata NKA Satker, Penyerapan, Efisiensi dan Konsistensi. Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran berupa NKA dikelompokkan pada kategori: • Lebih dari 90%: Kategori Sangat Baik; • 80% - 90%: Kategori Baik; • 60% - 80%: Kategori Cukup; • 50% - 60%: Kategori Kurang; • Kurang dari 50%: Kategori Sangat Kurang.
10	Tingkat kepuasan pelayanan perkantoran Ditjen Perkeretaapian	Nilai	Tingkat Kepuasan Pelayanan Perkantoran (skala 1-5) yang diperoleh dari hasil survey kepuasan kepada pegawai Ditjen Perkeretaapian yang memperoleh pelayanan ketatausahaan, SDM dan kerumahtanggaan di lingkungan Ditjen Perkeretaapian.

2.2 PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA

2.2.1 TERMANFAATKANNYA KEBIJAKAN PEMBINAAN DAN PENINGKATAN PERKERETAAPIAN

PERSENTASE REKOMENDASI KEBIJAKAN PEMBINAAN DAN PENINGKATAN KONEKTIVITAS PERKERETAAPIAN YANG TELAH DITINDAKLANJUTI

Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2024, ditetapkan target Triwulan II 2024 sebesar 80% atau sebanyak 12 rekomendasi kebijakan yang telah ditindaklanjuti/ditetapkan pada periode Tahun 2020-Triwulan II 2024 dan untuk target hingga akhir Tahun 2024 secara kumulatif sebesar 100% atau sebanyak 15 rekomendasi kebijakan guna menjadi acuan tahapan perencanaan teknis selanjutnya dalam peningkatan konektivitas perkeretaapian.

Pada periode Tahun 2020 s.d Triwulan II Tahun 2024, realisasi rekomendasi kebijakan pembinaan dan peningkatan konektivitas perkeretaapian yang telah ditindaklanjuti masih sama dengan pencapaian periode sebelumnya yaitu telah selesai sebanyak 12 rekomendasi kebijakan yang telah ditindaklanjuti/ditetapkan melalui penetapan Keputusan Direktur Jenderal Perkeretaapian dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2-2 Rincian Rekomendasi Kebijakan Pembinaan dan Peningkatan Konektivitas Perkeretaapian yang Telah Ditindaklanjuti

No	Nama Dokumen	Tahun Pelaksanaan	Penetapan
1	Rencana Strategis Kementerian Perhubungan Bidang Perkeretaapian Tahun 2020-2024	2020	Keputusan Direktur Jenderal Perkeretaapian nomor PR.005/SK.89/DJKA/2020 tanggal 18 Desember 2020
2.	Studi Kemanfaatan Pembangunan dan Pengoperasian Kereta Api Bandara Internasional Minangkabau	2021	Keputusan Direktur Jenderal Perkeretaapian nomor HK.209/3/24/DJKA/2021 tanggal 27 Desember 2021
3.	Studi Kemanfaatan Pembangunan dan Pengoperasian mendukung Kereta Api Bandara Internasional Soekarno-Hatta	2021	
4.	Studi Kemanfaatan Pembangunan dan Pengoperasian Kereta Api Bandara Internasional Kualanamu	2021	
5.	Studi Evaluasi Kemanfaatan Pengoperasian Kereta Api Perintis Lintas Kertapati-Indralaya	2021	

No	Nama Dokumen	Tahun Pelaksanaan	Penetapan
6.	Studi Kelayakan Reaktivasi Lintas Mati di Provinsi Jawa Tengah dan DIY	2022	Keputusan Direktur Jenderal Perkeretaapian nomor KP.DJKA 60 Tahun 2022 tanggal 31 Oktober 2022
7.	Studi Kelayakan Reaktivasi Lintas Mati di Provinsi Jawa Barat dan Banten	2022	
8.	Studi Kelayakan Reaktivasi Lintas Mati di Provinsi Jawa Timur	2022	
9.	Review Studi Kelayakan Reaktivasi Lintas Mati di Provinsi Sumatera Barat	2022	
10.	Kajian Dukungan Pengembangan Prasarana Perkeretaapian Mendukung Kawasan Industri Terpadu Batang	2023	Keputusan Direktur Jenderal Perkeretaapian nomor KP-DJKA 185 Tahun 2023 tanggal 12 September 2023
11.	Studi Evaluasi Kemanfaatan Pembangunan dan Pengoperasian Jalur Kereta Api Bandara Internasional Adi Sumarmo	2023	
12.	Studi Evaluasi Kemanfaatan Pembangunan dan Pengoperasian Jalur Kereta Api Bandara Internasional Yogyakarta	2023	

Pada Tahun 2024, telah diprogramkan beberapa kegiatan pendukung untuk penyusunan rekomendasi kebijakan terkait pembinaan dan peningkatan konektivitas perkeretaapian yaitu:

1. Kajian *Benchmarking* Kinerja Penyelenggaraan Transportasi Perkeretaapian.
2. Studi Penyusunan Rancangan Peraturan Menteri (RPM) tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Induk Perkeretaapian dan Rencana Pembangunan Perkeretaapian.
3. Studi Evaluasi Kemanfaatan Pembangunan dan Pengoperasian Elektrifikasi Jalur KA Yogyakarta - Solo - Palur.
4. Studi Penyusunan Rencana Strategis Kementerian Perhubungan Bidang Perkeretaapian Tahun 2025-2029.
5. Kajian Rekomendasi Lokasi Kantor Balai Pengujian Perkeretaapian.

Namun demikian, pada Januari 2024 terdapat kebijakan *Automatic Adjustment* (AA) dari Kementerian Keuangan sebagaimana Surat Direktur Jenderal Perkeretaapian Nomor KU.002/1/9/DJKA/2024 tanggal 25 Januari 2024 perihal Tindak Lanjut Hasil Penelaahan *Automatic Adjustment* Belanja di Lingkungan

Direktorat Jenderal Perkeretaapian TA 2024. Kebijakan tersebut berdampak pada pembatalan pelaksanaan 2 kegiatan pendukung rekomendasi kebijakan terkait pembinaan dan peningkatan konektivitas perkeretaapian yaitu Kajian *Benchmarking* Kinerja Penyelenggaraan Transportasi Perkeretaapian dan Studi Penyusunan RPM tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Induk Perkeretaapian dan Rencana Pembangunan Perkeretaapian. Untuk itu, kegiatan pendukung yang dilaksanakan pada Tahun 2024 terdapat 3 kegiatan yaitu Studi Evaluasi Kemanfaatan Pembangunan dan Pengoperasian Elektrifikasi Jalur KA Yogyakarta - Solo – Palur, Studi Penyusunan Rencana Strategis Kementerian Perhubungan Bidang Perkeretaapian Tahun 2025-2029, serta Kajian Rekomendasi Lokasi Kantor Balai Pengujian Perkeretaapian. Namun khusus untuk kegiatan studi/kajian Rencana Strategis Kementerian Perhubungan Bidang Perkeretaapian Tahun 2025-2029 direncanakan penetapannya dilaksanakan pada Tahun 2025 menunggu penetapan Visi Misi Presiden terpilih, RPJMN dan Rencana Strategis Kementerian Perhubungan yang dilakukan secara berjenjang.

A. Perbandingan Target Triwulan dan Tahunan dengan Realisasi Kinerja

Realisasi kinerja pada Triwulan II Tahun 2024 masih sama dengan capaian periode sebelumnya yakni sebanyak 12 rekomendasi kebijakan yang telah disusun pada periode 2020 – Triwulan II 2024. Dengan realisasi kinerja tersebut dan target akhir Tahun 2024 sebanyak 15 rekomendasi kebijakan, maka diperoleh realisasi persentase rekomendasi kebijakan pembinaan dan peningkatan konektivitas perkeretaapian pada Triwulan II 2024 sebesar 80%. Untuk itu diperoleh capaian kinerja sebesar 100% dari target Triwulan II dan sebesar 80% dari target Tahun 2024.

Rincian target dan realisasi kinerja per Triwulan Tahun 2024 dapat dilihat pada Tabel dan Gambar berikut.

Tabel 2-3 Capaian Kinerja Persentase Rekomendasi Kebijakan Pembinaan dan Peningkatan Konektivitas Perkeretaapian yang telah Ditindaklanjuti Triwulan II Tahun 2024

Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja Tahunan	Target Kinerja Triwulan				Realisasi Kinerja Triwulan				Capaian Kinerja Triwulan (%)				Capaian Kinerja Tahunan (%)
			I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	
Persentase rekomendasi kebijakan yang telah ditindaklanjuti	%	100	80	80	100	100	80	80	-	-	100	100	-	-	80

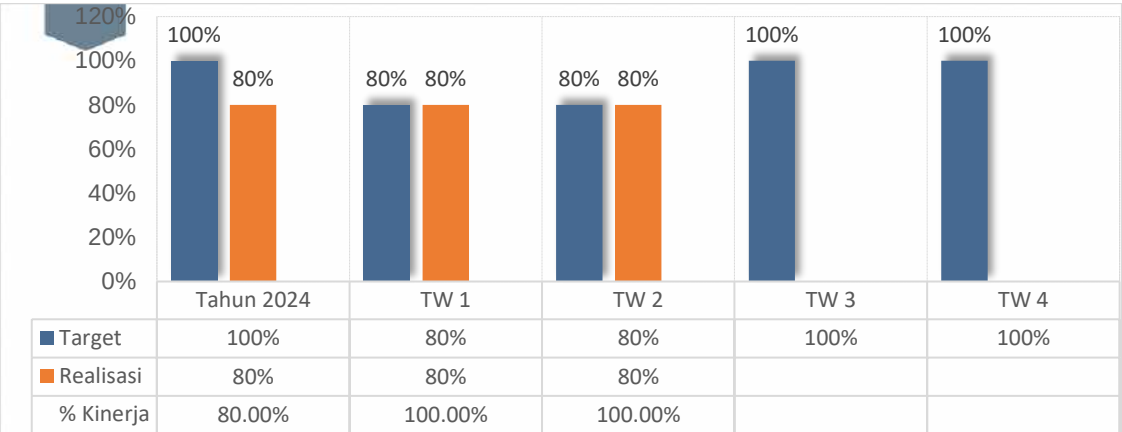

Gambar 2-1 Capaian Kinerja Persentase Rekomendasi Kebijakan Pembinaan dan Peningkatan Konektivitas Perkeretaapian yang telah Ditindaklanjuti Tahun 2024

B. Analisis Keberhasilan Pencapaian Target

Dalam pencapaian target kinerja, pada periode Triwulan II Tahun 2024 telah dilaksanakan kegiatan pendukung diantaranya melalui pendampingan dan pemantauan atas pelaksanaan studi/kajian pada setiap tahapan mulai dari persiapan/pendahuluan hingga pengumpulan dan analisa data. Proses pendampingan dan pemantauan tersebut dilaksanakan guna menghasilkan rekomendasi kebijakan yang akurat/valid dan tepat sasaran dan diharapkan dapat selesai dengan tepat waktu dan sesuai dengan kebutuhan pembinaan dan peningkatan konektivitas perkeretaapian.

Pendampingan dan pemantauan juga dilakukan melalui pembahasan/FGD dan konsultasi dengan Tim Pengarah dan Tim Pendamping yang kompeten dan ditetapkan melalui Surat Keputusan Direktur Jenderal Perkeretaapian. Proses tersebut juga melibatkan instansi/*stakeholder* baik Pemerintah Daerah, Kementerian/Lembaga sektor lain terkait serta Badan Usaha Penyelenggara Prasarana dan Sarana Perkeretaapian terkait guna sinergisitas dalam

penyusunan rekomendasi kebijakan. Selain itu, proses pendampingan juga dilaksanakan pada tahapan perolehan data dengan melakukan pendampingan pelaksanaan survey primer dan sekunder di lapangan.

Beberapa proses pendampingan dan pemantauan yang sudah dilaksanakan pada periode Triwulan II Tahun diantaranya:

1. Penetapan Tim Pengarah dan Tim Pendamping yang kompeten melalui Keputusan Direktur Jenderal Perkeretaapian;
2. Koordinasi awal dan *kick off meeting* dengan pelaksana kegiatan;
3. Survey pendahuluan termasuk pendampingan dari tim pendamping kegiatan;
4. Asistensi/pengarahan dan pembahasan Laporan Pendahuluan;
5. Koordinasi dan pendampingan pelaksanaan pengumpulan data/survey, baik survey primer dan survey sekunder dalam rangka penyusunan Laporan Antara;
6. Asistensi/pengarahan untuk persiapan pembahasan Laporan Antara.

Terkait dengan kebijakan *Automatic Adjustment* (AA) dari Kementerian Keuangan, telah dilakukan evaluasi guna pertimbangan prioritas kegiatan pendukung untuk memenuhi usulan blokir anggaran. Selanjutnya kegiatan yang diusulkan blokir anggaran tersebut, sebagian kegiatan telah diusulkan kembali pada Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun 2025.

Secara umum progres pelaksanaan kegiatan pendukung posisi akhir Triwulan II Tahun 2024 sebagai berikut:

1. ***Studi Evaluasi Kemanfaatan Pembangunan dan Pengoperasian Elektrifikasi Jalur KA Yogyakarta - Solo – Palur***: Penyusunan konsep Laporan Antara Studi/Kajian termasuk kompilasi hasil pengumpulan data/survey.
2. ***Studi Penyusunan Rencana Strategis Kementerian Perhubungan Bidang Perkeretaapian Tahun 2025-2029***: Penyusunan konsep Laporan Antara Studi/Kajian termasuk kompilasi hasil pengumpulan data/survey.
3. ***Kajian Rekomendasi Lokasi Kantor Balai Pengujian Perkeretaapian***: Penyusunan konsep Laporan Akhir termasuk penyelesaian analisa dan finalisasi rekomendasi.

C. Upaya Peningkatan Kinerja

Sebagai upaya peningkatan kinerja pada periode selanjutnya, diperlukan beberapa hal diantaranya:

1. Pembahasan progres studi/kajian (Laporan Antara, Konsep Laporan Akhir) oleh Tim Pengarah dan Tim Pendamping termasuk mengikutsertakan instansi lain baik Pemerintah Daerah, Kementerian/Lembaga serta Badan Usaha Penyelenggara Prasarana dan Sarana Perkeretaapian serta asistensi berkala untuk memastikan studi/kajian dapat selesai tepat waktu dan memenuhi sasaran pada kerangka acuan kerja.
2. Apabila dibutuhkan dapat dilaksanakan FGD guna lebih mengintensifkan penjaringan masukan dari *stakeholders* terkait untuk finalisasi hasil studi/kajian.

Selain itu, beberapa hal penyesuaian terhadap strategi/kebijakan, aktivitas dan anggaran untuk mendukung pencapaian kinerja mendukung konektivitas perkeretaapian, diantaranya:

1. Penyesuaian strategi/kebijakan:

a. Diusulkan revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2024 (penyesuaian rincian rekomendasi kebijakan yang target ditetapkan pada Tahun 2024) karena terdapat kegiatan pendukung Tahun 2024 terdampak kebijakan blokir/*Automatic Adjustment* (AA).

b. Pembahasan internal terkait konsep usulan revisi PM 112 Tahun 2017 tentang Pedoman dan Proses Perencanaan di lingkungan Kementerian Perhubungan dalam upaya percepatan penyiapan dokumen perencanaan mendukung konektivitas perkeretaapian, guna selanjutnya koordinasi lanjut dengan Setjen Kemenhub cq Biro Perencanaan.

2. Penyesuaian aktivitas dan anggaran:

Optimalisasi sisa anggaran kegiatan pendukung untuk pemenuhan kegiatan prioritas lainnya dan juga peningkatan penyerapan anggaran unit kerja.

2.2.2 TERLAKSANANYA PERUMUSAN REGULASI DAN KEBIJAKAN DALAM PENYELENGGARAAN PERKERETAAPIAN

PERSENTASE PENCAPAIAN TARGET LEGALISASI (JUMLAH RANCANGAN DAN PERATURAN PERUNDANGAN) BIDANG PERKERETAAPIAN

Penyusunan peraturan perundangan bidang perkeretaapian (baru, revisi) dilaksanakan untuk memenuhi amanah Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah serta upaya menyelesaikan permasalahan dan peningkatan kinerja pembangunan perkeretaapian.

Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2024, ditetapkan target persentase pencapaian legislasi (rancangan dan peraturan perundangan bidang perkeretaapian) Tahun 2024 sebesar 100% atau sebanyak 45 peraturan/legislasi yang ditetapkan pada periode Tahun 2020-2024. Untuk periode Triwulan II 2024 ditetapkan target sebesar 97,78% atau pencapaian sebanyak 44 peraturan/legislasi sesuai rencana aksi pada Perjanjian Kinerja.

Pada Triwulan II 2024 telah terbit sebanyak 48 peraturan/legislasi secara kumulatif dengan rincian sebagai berikut:

1. Tahun 2020 sebanyak 14 peraturan/legislasi;
2. Tahun 2021 sebanyak 9 peraturan/legislasi;
3. Tahun 2022 sebanyak 5 peraturan/legislasi;
4. Tahun 2023 sebanyak 17 peraturan/legislasi.
5. Tahun 2024 (s.d Triwulan II) sebanyak 3 peraturan/legislasi.

Rincian pencapaian peraturan/legislasi sebagaimana pada Tabel berikut.

Tabel 2-4 Peraturan Perundang-Undangan Bidang Perkeretaapian yang Telah Ditetapkan Periode Tahun 2020 s.d Triwulan II 2024

No	Nomor	Peraturan Tentang	Tanggal Terbit
1.	HK.205/SK.10/DJKA/20	Peraturan Dirjen Perkeretaapian tentang Tata Cara Layanan Sertifikasi Kelaikan Sarana Perkeretaapian Secara Elektronik	7 Februari 2020
2.	PM 18 Tahun 2020	Pengendalian Transportasi dalam Rangka Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)	9 April 2020
3.	HK.205/A.107/DJKA/20	Peraturan Dirjen Perkeretaapian tentang Pedoman Pembatasan Penumpang di Sarana Perkeretaapian Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran COVID	9 April 2020

No	Nomor	Peraturan Tentang	Tanggal Terbit
4.	PM 21 Tahun 2020	Tarif Angkutan Orang Dengan Kereta Api Pelayanan Kelas Ekonomi Untuk Melaksanakan Kewajiban Pelayanan Publik	23 April 2020
5.	PM 22 Tahun 2020	Tarif Angkutan Orang Dengan Kereta Api Perintis	23 April 2020
6.	PM 25 Tahun 2020	Pengendalian Transportasi Selama Masa mudik Idul Fitri Tahun 1441 Hijriah dalam rangka Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)	23 April 2020
7.	KP.651 Tahun 2020	Perubahan Atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP. 1790 Tahun 2019 tentang Penetapan Lintas Pelayanan Perkeretaapian Pada Grafik Perjalanan Kereta Api 2019	9 Mei 2020
8.	PM 41 Tahun 2020	Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 18 Tahun 2021 tentang Pengendalian Transportasi Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)	8 Juni 2020
9.	HK.205/SK.52/DJKA/2020	Peraturan Direktur Jenderal Perkeretaapian tentang Petunjuk dan Tata Cara Pengawasan Perawatan Prasarana Perkeretaapian Milik Negara oleh Balai Teknik Perkeretaapian	20 Juli 2020
10.	PM 60 Tahun 2020	Pengawasan Sarana dan Prasarana Perkeretaapian Berbasis Teknologi Informasi	18 Agustus 2020
11.	Pasal 54 UU Nomor 11 Tahun 2020	Cipta Kerja (perubahan pasal dan ketentuan di dalam UU 23 Tahun 2007)	5 Oktober 2020
12.	KM 347 Tahun 2020	Penetapan Lintas Pelayanan Angkutan Perintis Bidang Perkeretaapian	28 Desember 2020
13.	KM 348 Tahun 2020	Tarif Angkutan Orang Dengan Kereta Api Pelayanan Kelas Ekonomi Untuk Melaksanakan Kewajiban Pelayanan Publik	29 Desember 2020
14.	KM 349 Tahun 2020	Tarif Angkutan Orang Dengan Kereta Api Perintis	29 Desember 2020
15.	PP 33 Tahun 2021	Penyelenggaraan Bidang Perkeretaapian	2 Februari 2021
16.	PP 5 Tahun 2021	Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	2 Februari 2021
17.	PM 12 Tahun 2021	Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Transportasi	1 Mei 2021
18.	PM 20 Tahun 2021	Perubahan Atas PM. 31 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sarana Perkeretaapian Umum	4 Juni 2021
19.	PM 21 Tahun 2021	Perubahan Atas PM. 91 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian Khusus	4 Juni 2021
20.	PM 22 Tahun 2021	Perubahan Atas PM. 66 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Prasarana Perkeretaapian Umum	4 Juni 2021
21.	PM 38 Tahun 2021	Pengadaan Badan Usaha Dalam Penyelenggaraan Prasarana Perkeretaapian Umum	7 Juni 2021

No	Nomor	Peraturan Tentang	Tanggal Terbit
22.	Peraturan Presiden Republik Indonesia No 73 Tahun 2021	Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2012 tentang Kewajiban Pelayanan Publik dan Subsidi Angkutan Perintis Bidang Perkeretaapian, Biaya Penggunaan Prasarana Perkeretaapian Milik Negara, serta Perawatan dan Pengoperasian Prasarana Perkeretaapian Milik Negara	10 Agustus 2021
23.	PM 80 Tahun 2021	Pencabutan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 6 Tahun 2018 Tentang Peta Jabatan Dan Uraian Jenis Kegiatan Jabatan Di Lingkungan Unit Pelaksana Tenis Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan	30 September 2021
24.	PM 1 Tahun 2022	Perubahan Kedua PM 84 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Direktorat Jenderal Perkeretaapian	11 Januari 2022
25.	PM 7 Tahun 2022	Penyelenggaraan Kereta Api Kecepatan Tinggi	20 April 2022
26.	PM 16 Tahun 2022	Peraturan Menteri Perhubungan tentang Rancang Bangun dan Rekayasa Sarana Perkeretaapian	22 Agustus 2022
27.	PM 21 Tahun 2022	Tata Cara Pengawasan dan Pengenaan Sanksi Administratif Terhadap Pelanggaran Peraturan Perundang-undangan di Bidang Perkeretaapian	16 September 2022
28.	PM 36 Tahun 2022	Organisasi dan Tata Kerja Balai Teknik Perkeretaapian	2 Desember 2022
29.	PM 18 Tahun 2023	Perubahan Atas PM Nomor 4 Tahun 2017 tentang Sertifikasi Kecakapan Awak Sarana Perkeretaapian	9 Juni 2023
30.	PM 19 Tahun 2023	Perubahan Atas PM Nomor 5 Tahun 2017 tentang Sertifikasi Kecakapan Pengatur Perjalanan dan Pengendali Perjalanan Kereta Api	9 Juni 2023
31.	PM 20 Tahun 2023	Perubahan Atas PM Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sertifikasi Tenaga Pemeriksa Sarana Perkeretaapian	9 Juni 2023
32.	PM 21 Tahun 2023	Perubahan Atas PM Nomor 9 Tahun 2017 tentang Sertifikasi Tenaga Pemeriksa Prasarana Perkeretaapian	9 Juni 2023
33.	PM 22 Tahun 2023	Perubahan Atas PM Nomor 16 Tahun 2017 tentang Sertifikasi Tenaga Perawatan Sarana Perkeretaapian	9 Juni 2023
34.	PM 23 Tahun 2023	Perubahan Atas PM Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sertifikasi Tenaga Perawatan Prasarana Perkeretaapian	9 Juni 2023
35.	PM 24 Tahun 2023	Perubahan Atas PM Nomor 19 Tahun 2017 tentang Sertifikat Kecakapan Penjaga Perlintasan Kereta Api	9 Juni 2023
36.	PM 25 Tahun 2023	Penyelenggaraan Kereta Api Ringan Terintegrasi di Wilayah Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi	15 Juni 2023

No	Nomor	Peraturan Tentang	Tanggal Terbit
37.	PM 26 Tahun 2023	Pedoman Penyusunan Formasi Jabatan Fungsional Penguji Sarana Perkeretaapian	27 Juni 2023
38.	PM 27 Tahun 2023	Pedoman Penyusunan Formasi Jabatan Fungsional Penguji Prasarana Perkeretaapian	27 Juni 2023
39.	PM 28 Tahun 2023	Pedoman Penyusunan Formasi Jabatan Fungsional Inspektur Sarana Perkeretaapian	27 Juni 2023
40.	PM 29 Tahun 2023	Pedoman Penyusunan Formasi Jabatan Fungsional Inspektur Prasarana Perkeretaapian	27 Juni 2023
41.	PM 30 Tahun 2023	Pedoman Penyusunan Formasi Jabatan Fungsional Auditor Perkeretaapian	27 Juni 2023
42.	PM 31 Tahun 2023	Pedoman Penyusunan Formasi Jabatan Fungsional Asisten Penguji Sarana Perkeretaapian	27 Juni 2023
43.	PM 32 Tahun 2023	Pedoman Penyusunan Formasi Jabatan Fungsional Asisten Penguji Prasarana Perkeretaapian	27 Juni 2023
44.	PM 49 Tahun 2023	Standar, Tata Cara Pengujian dan Sertifikasi Kelaikan Kereta Api Kecepatan Normal dengan Penggerak Sendiri	6 November 2023
45.	PM 59 Tahun 2023	Pedoman Perhitungan Biaya Perawatan dan Pengoperasian Prasarana Perkeretaapian Milik Negara	29 Desember 2023
46.	Perpres 33 Tahun 2024	Perubahan Ketiga Perpres Nomor 53 Tahun 2012 tentang Kewajiban Pelayanan Publik dan Subsidi Angkutan Perintis Bidang Perkeretaapian, Biaya Penggunaan Prasarana Perkeretaapian Milik Negara, Serta Perawatan dan Pengoperasian Prasarana Perkeretaapian Milik Negara	22 Februari 2024
47.	PM 8 Tahun 2024	Petunjuk Pelaksanaan Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Direktorat Jenderal Perkeretaapian	11 Juni 2024
48.	PM 14 Tahun 2024	Pedoman Perhitungan Biaya Penggunaan Prasarana Perkeretaapian	25 Juni 2024

A. Perbandingan Target Triwulan dan Tahunan dengan Realisasi Kinerja

Dengan jumlah realisasi secara kumulatif sebanyak 48 penetapan peraturan/legislasi bidang perkeretaapian dan target pada periode Tahun 2020-2024 sebanyak 45 peraturan/legislasi, maka realisasi persentase pencapaian legislasi bidang perkeretaapian pada Triwulan II 2024 adalah sebesar 106,67%. Dengan realisasi kinerja tersebut, diperoleh capaian kinerja sebesar 109,09% dari target Triwulan II 2024 sebesar 97,78% dan capaian kinerja sebesar 106,67% dari target Tahun 2024.

Rincian target dan realisasi kinerja per Triwulan Tahun 2024 dapat dilihat pada Tabel dan Gambar berikut.

Tabel 2-5 Capaian Kinerja Persentase Pencapaian Target Legislasi (Rancangan dan Peraturan Perundangan) Bidang Perkeretaapian Tahun 2024

Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja Tahunan	Target Kinerja Triwulan				Realisasi Kinerja Triwulan				Capaian Kinerja Triwulan (%)				Capaian Kinerja Tahunan (%)
			I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	
Persentase pencapaian target legislasi (rancangan dan peraturan perundangan)	%	100	97,78	97,78	100,00	100,00	102,22	106,67	-	-	104,54	109,09	-	-	106,67

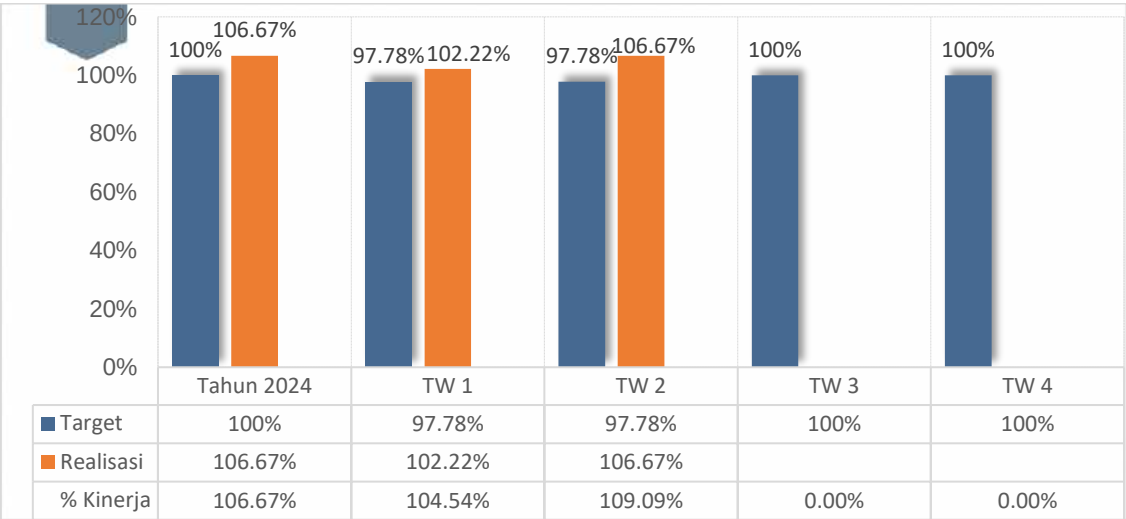

Gambar 2-2 Capaian Kinerja Persentase Pencapaian Target Legislasi (Rancangan dan Peraturan Perundangan) Bidang Perkeretaapian Tahun 2024

B. Analisis Keberhasilan Pencapaian Target

Dalam rangka pemenuhan kebutuhan legislasi melalui peraturan perundang-undangan bidang perkeretaapian tersebut, Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian telah berkoordinasi dengan seluruh unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian dalam kegiatan penyusunan dan/atau reviu terkait peraturan/regulasi guna pelaksanaan yang lebih efektif dan efisien.

Penyusunan dilaksanakan secara bertahap dengan pembahasan secara intensif dengan seluruh pihak terkait (Biro Hukum, Direktorat Teknis, Kemenkumham, Sekretariat Negara, operator, dan lainnya), termasuk dalam pelaksanaan harmonisasi dengan peraturan perundangan terkait lainnya. Capaian pada Triwulan II 2024 didorong dengan selesainya penetapan ketentuan terkait

petunjuk pelaksanaan jenis dan tarif atas PNBP yang berlaku pada Direktorat Jenderal Perkeretaapian serta perhitungan biaya penggunaan prasarana perkeretaapian.

Sampai dengan Triwulan II 2024, juga terdapat beberapa rancangan peraturan/legislasi yang saat ini masih berproses diantaranya:

Tabel 2-6 Rancangan Peraturan/Legislasi Bidang Perkeretaapian yang Masih Berproses

No	Judul Regulasi	PIC	Posisi	Urgensi	Keterangan
1.	Peraturan Menteri Perhubungan tentang Sistem Operasi Trem Otonom	Direktorat Sarana	Bagian Hukum	Mengakomodir pengoperasian Trem Otonom (ART) yang akan beroperasi di Indonesia	Plt. Direktur Sarana telah bersurat kepada Sesditjen Perkeretaapian perihal penyampaian *draft* RPM penyelenggaraan Trem Otonom yang selanjutnya akan dilakukan pembahasan lanjutan.
2.	Revisi PM 11 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penetapan Trase	Direktorat LLAKA	Bagian Hukum	Untuk mengakomodir perkembangan teknologi bidang perkeretaapian	Telah dilakukan pembahasan pada tanggal 27 Juni 2024 dan akan dimintakan persetujuan Menteri terkait proses lanjut revisi PM.
3.	Revisi Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 33 Tahun 2011 tentang Jenis, Kelas dan Kegiatan di Stasiun Kereta Api	Direktorat LLAKA	Bagian Hukum	• Penentuan Kelas stasiun berkaitan dengan penyesuaian/penyusunan Standar Pelayanan Minimum di Stasiun. • Belum terdapat pengaturan mengenai perubahan nama stasiun	Direncanakan pembahasan.
4.	Revisi PM 60 Tahun 2012 tentang Persyaratan Teknis Jalur Kereta Api	Direktorat Prasarana	Bagian Hukum	Untuk mengakomodir perkembangan teknologi bidang perkeretaapian khususnya pada jalur kereta api	Direncanakan pembahasan.
5.	Revisi PM 94 Tahun 2018 tentang Peningkatan Keselamatan Perlintasan Sebidang Antara Jalur Kereta Api Dengan Jalan	Direktorat Keselamatan	Direktorat Keselamatan	Perlu dievaluasi terkait penggunaan Rumija untuk pemasangan portal/pintu perlintasan di perlintasan sebidang	Telah dilakukan rapat pembahasan pada tanggal 21-22 Mei 2024. Substansi Revisi Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 94 Tahun 2018 akan diformulasikan ulang oleh Direktorat Keselamatan sebelum dilakukan proses laniut.
6.	Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Tata Cara Pelaksanaan Audit dan	Direktorat Keselamatan	Direktorat Keselamatan	Sebagai Pedoman bagi Inspektur dan Auditor Perkeretaapian	Sedang dilakukan kajian dan pembahasan internal di Direktorat Keselamatan Perkeretaapian

No	Judul Regulasi	PIC	Posisi	Urgensi	Keterangan
	Inspeksi Keselamatan Perkeretaapian				
7.	Revisi PM 14 Tahun 2011 tentang Tata Cara dan Standar Pengujian Lokomotif	Direktorat Sarana	Bagian Hukum	-	Surat dan *Draft* Revisi PM masuk Bagian Hukum pada Juni 2024 dan akan dilakukan pembahasan.
8.	Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan Tentang Tata Cara, Standar Peralatan Dan SDM Petugas Penanganan Kecelakaan Kereta Api	Direktorat Keselamatan	Bagian Hukum	Petugas Penanganan Kecelakaan Kereta Api terdapat pada PP 6 Tahun 2017 namun belurn terdapat peraturan turunan yang mengatur secara teknis	Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan baru dan belum dibahas
9.	Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan Tentang Tata Cara, Standar Peralatan dan SDM Petugas Pemeriksa dan Analisis Kecelakaan Kereta Api	Direktorat Keselamatan	Bagian Hukum	Petugas Penanganan Kecelakaan Kereta Api terdapat pada PP 6 Tahun 2017 namun belum terdapat peraturan turunan yang mengatur secara teknis.	Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan RI baru dan belum dibahas.
10.	Harmonisasi RPM Perhubungan RI tentang Sertifikasi Tenaga Pelaksana Pembangunan Prasarana Perkeretaapian	Direktorat Keselamatan	Biro Hukum	-	Direncanakan pembahasan.
11.	Revisi PM 36 Tahun 2011 tentang Perpotongan dan/atau Persinggungan antara Jalur Kereta Api dengan Bangunan Lain	Direktorat Prasarana	Direktorat Prasarana	Perlu dievaluasi terkait persyaratan teknis Perpotongan dan/atau Persinggungan antara Jalur Kereta Api dengan Bangunan Lain pada jalur Kereta Api dalam kota dan Jalur Ganda.	Sedang dilakukan kajian dan pembahasan internal di Direktorat Prasarana Perkeretaapian
12.	Revisi PM 30 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengujian	Direktorat Prasarana	Direktorat Prasarana	Untuk mengakomodir perkembangan teknologi di bidang perkeretaapian karena tata cara untuk	Sedang dilakukan kajian dan pembahasan internal di Direktorat Prasarana Perkeretaapian.

No	Judul Regulasi	PIC	Posisi	Urgensi	Keterangan
	dan Pemberian Sertifikat Prasarana Perkeretaapian			pengujian prasarana perkeretaapian dengan teknologi baru berbeda dengan konvensional.	

C. Perbandingan Kinerja di Level Nasional / Internasional

Dalam hal perbandingan kinerja (*benchmark*) secara nasional maupun di tingkat Kementerian Perhubungan terhadap capaian kinerja, diperoleh bahwa telah terbit sebanyak 12 legislasi berupa Peraturan Menteri Perhubungan di lingkungan Kementerian Perhubungan pada periode Triwulan II 2024 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2-7 Legislasi/Peraturan di lingkungan Kementerian Perhubungan yang Terbit pada Periode Triwulan II 2024

No	Unit Eselon I	Jumlah Peraturan
1.	Sekretariat Jenderal	2 Peraturan Menteri Perhubungan
2.	Inspektorat Jenderal	-
3.	Direktorat Jenderal Perhubungan Darat	2 Peraturan Menteri Perhubungan
4.	Direktorat Jenderal Perhubungan Laut	4 Peraturan Menteri Perhubungan
5.	Direktorat Jenderal Perhubungan Udara	2 Peraturan Menteri Perhubungan
6.	Direktorat Jenderal Perkeretaapian	2 Peraturan Menteri Perhubungan
7.	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	-
8.	Badan Kebijakan Transportasi	-
9.	Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek	-

Dari Tabel di atas, diperoleh bahwa Direktorat Jenderal Perhubungan Laut merupakan unit kerja terbanyak yang mengusulkan dengan penetapan legislasi/peraturan di tingkat Kementerian Perhubungan dibandingkan unit kerja eselon I lainnya dengan jumlah sebanyak 4 legislasi/peraturan. Sedangkan untuk Direktorat Jenderal Perkeretaapian pada Triwulan II 2024 berperan sama dengan 3 (tiga) unit eselon I lainnya yakni Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat dan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara dengan masing-masing sebanyak 2 Peraturan Menteri Perhubungan. Selain itu, terdapat 4 unit eselon I yang belum berperan dalam penetapan legislasi di tingkat Kementerian Perhubungan.

D. Upaya Peningkatan Kinerja

Sebagai upaya mempertahankan dan meningkatkan kinerja pada periode berikutnya, diperlukan:

1. Percepatan pembahasan lanjutan untuk penyelesaian beberapa ketentuan prioritas yang telah diusulkan Direktorat teknis, diantaranya terkait penyelenggaraan trem otonom, tata cara penetapan trase, serta persyaratan teknis jalur kereta api.
2. Berpartisipasi aktif dalam pembahasan internal Direktorat teknis untuk mendorong percepatan penyelesaian substansi beberapa regulasi bidang perkeretaapian, diantaranya terkait peningkatan keselamatan perlintasan sebidang antara jalur kereta api dengan jalan, tata cara pelaksanaan audit dan lnspeksi keselamatan perkeretaapian, tata cara pengujian dan pemberian sertifikat prasarana perkeretaapian.
3. Koordinasi intensif dengan Biro Hukum Kementerian Perhubungan guna percepatan harmonisasi peraturan bidang perkeretaapian (RPM tentang Sertifikasi Tenaga Pelaksana Pembangunan Prasarana Perkeretaapian).

Selain itu, diusulkan juga penyesuaian terhadap strategi/kebijakan, aktivitas dan anggaran untuk mendukung pencapaian kinerja, diantaranya:

1. Penyesuaian strategi/kebijakan:

a. Diusulkan revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2024 dikarenakan capaian kinerja telah tercapai (melebihi 100%) serta memastikan pencapaian pada akhir tahun agar *on the right track* (tidak melebihi 110%).

b. Diusulkan penyiapan rencana strategis bidang perkeretaapian Tahun 2025-2029 mencakup kebutuhan legislasi/peraturan perundangan bidang perkeretaapian.

2. Penyesuaian aktivitas dan anggaran:

Optimalisasi anggaran kegiatan pendukung untuk peningkatan penyerapan anggaran unit kerja.

2.2.3 TERSEDIANYA SDM PERKERETAAPIAN YANG KOMPETEN DAN PROFESIONAL

PERSENTASE ASN DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN YANG MEMILIKI SERTIFIKAT KOMPETENSI/KEAHLIAN

Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2024, ditargetkan persentase ASN Direktorat Jenderal Perkeretaapian yang memiliki sertifikat kompetensi/keahlian teknis termasuk fungsional tertentu sebesar 65% dari jumlah ASN Direktorat Jenderal Perkeretaapian. Sedangkan pada periode Triwulan II 2024 ditetapkan target sebesar 56% sesuai rencana aksi pada Perjanjian Kinerja.

Pada Triwulan II 2024, diperoleh ASN Direktorat Jenderal Perkeretaapian yang memiliki sertifikat kompetensi/keahlian teknis dan fungsional tertentu sebanyak 929 pegawai. Adapun rincian jenis kompetensi/keahlian teknis dan fungsional tertentu sebagai berikut:

1. Jabatan Fungsional Tertentu (JFT) yang meliputi jabatan fungsional kepegawaian, pegawai hasil penyetaraan jabatan fungsional tertentu dan ASN Tahun 2020-2022 dengan jabatan formasi yang langsung ditetapkan sebagai jabatan fungsional tertentu.
2. Keahlian/kompetensi teknis yang meliputi Auditor, Inspektur Sarana, Inspektur Prasarana, Penguji Prasarana (Jalur dan Bangunan, Fasilitas Operasi), Penguji Sarana, Assesor, PPNS, PPKA, Ahli K3, Ahli Teknologi Perkeretaapian (GoA 3, Kereta Cepat dan kompetensi lainnya).
3. Keahlian/kompetensi manajerial tertentu berupa kompetensi Manajemen Risiko yang dilaksanakan beberapa tingkat (*Officer, Analyst, Professional*), ahli KPBU, PPK Tipe C dan kompetensi lainnya.

Tabel 2-8 Jumlah ASN Direktorat Jenderal Perkeretaapian yang Memiliki Sertifikat Kompetensi/Keahlian Berdasarkan Unit Kerja pada Triwulan II 2024

No	Unit Kerja	Jumlah Pegawai
1	Setditjen Perkeretaapian	96
2	Direktorat LLAKA	72
3	Direktorat Prasarana Perkeretaapian	100
4	Direktorat Sarana Perkeretaapian	90
5	Direktorat Keselamatan Perkeretaapian	90
6	BTP Medan	58
7	BTP Padang	35
8	BTP Palembang	41
9	BTP Jakarta	55

No	Unit Kerja	Jumlah Pegawai
10	BTP Bandung	42
11	BTP Semarang	45
12	BTP Surabaya	47
13	Balai Pengujian Perkeretaapian	57
14	Balai Perawatan Perkeretaapian	49
15	BPKAR Sumatera Selatan	29
16	BPKA Sulawesi Selatan	23
Total		**929**

A. Perbandingan Target Triwulan dan Tahunan dengan Realisasi Kinerja

Dengan jumlah ASN yang memiliki sertifikat kompetensi/keahlian teknis dan fungsional tertentu sebanyak 929 pegawai dibandingkan dengan jumlah pegawai Direktorat Jenderal Perkeretaapian periode Triwulan II 2024 sebanyak 1.586 pegawai, maka diperoleh realisasi kinerja indikator persentase ASN Direktorat Jenderal Perkeretaapian yang memiliki sertifikat kompetensi/keahlian sebesar 58,58%. Dengan realisasi persentase ASN tersebut, diperoleh capaian kinerja sebesar 104,61% dari target Triwulan II 2024 dan capaian kinerja sebesar 90,12% dari target Tahun 2024.

Rincian target dan realisasi kinerja per Triwulan Tahun 2024 dapat dilihat pada Tabel dan Gambar berikut.

Tabel 2-9 Capaian Kinerja Persentase ASN Direktorat Jenderal Perkeretaapian yang Memiliki Sertifikat Kompetensi/Keahlian Tahun 2024

Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja Tahunan	Target Kinerja Triwulan				Realisasi Kinerja Triwulan				Capaian Kinerja Triwulan (%)				Capaian Kinerja Tahunan (%)
			I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	
Persentase ASN Ditjen Perkeretaapian yang Memiliki Sertifikat Kompetensi/Keahlian	%	65	56	56	56	65	57,54	58,58	-	-	102,75	104,61	-	-	90,12

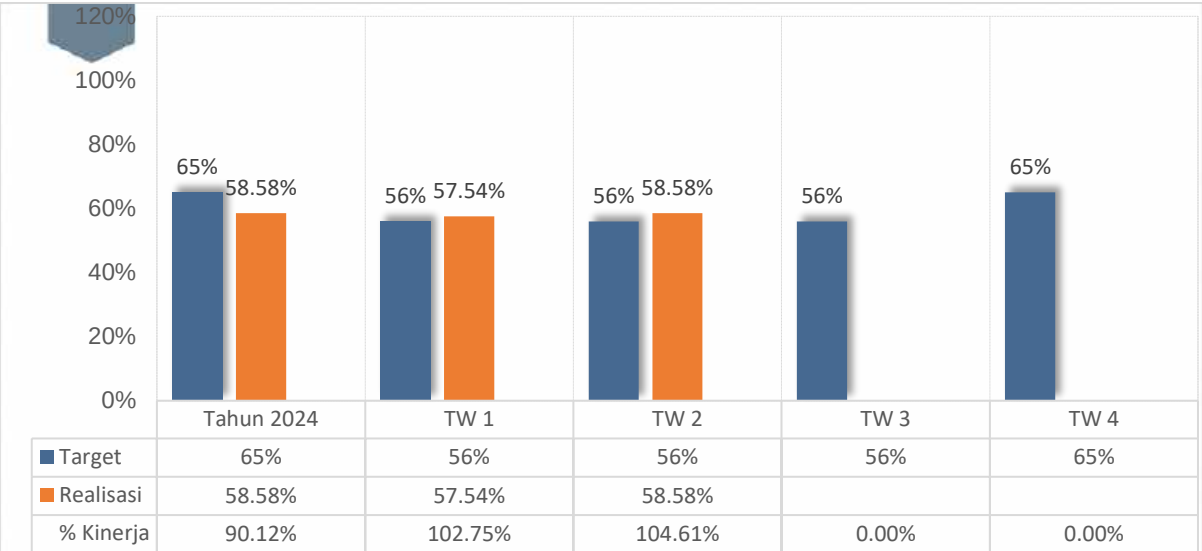

	Tahun 2024	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4
Target	65%	56%	56%	56%	65%
Realisasi	58.58%	57.54%	58.58%		
% Kinerja	90.12%	102.75%	104.61%	0.00%	0.00%

Gambar 2-3 Capaian Kinerja Persentase ASN Direktorat Jenderal Perkeretaapian yang Memiliki Sertifikat Kompetensi/Keahlian Tahun 2024

B. Analisis Keberhasilan Pencapaian Target

Faktor keberhasilan dalam pencapaian target kinerja adalah pelaksanaan program/mengikutsertakan ASN Direktorat Jenderal Perkeretaapian untuk pendidikan dan pelatihan pada periode Triwulan II 2024 baik bidang perkeretaapian maupun bidang manajerial/umum guna mendukung pelaksanaan tugas regulator perkeretaapian, diantaranya terkait:

1. Kompetensi inspektur prasarana dan sarana perkeretaapian;
2. Kompetensi penguji prasarana dan sarana perkeretaapian;
3. Kompetensi manajemen risiko (*Officer, Analyst, Professional, Governance Professional*).
4. *Entrepreneur Global Leadership Program.*
5. Kompetensi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL).
6. Pelatihan Pengadaan Barang dan Jasa.
7. Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA).
8. Pelatihan jaringan komputer dan animasi media pembelajaran.

Pelaksanaan program pendidikan dan pelatihan secara masif tersebut didorong oleh komitmen pimpinan untuk penguatan organisasi Direktorat Jenderal Perkeretaapian selaku regulator perkeretaapian yang perlu didukung oleh SDM yang kompeten.

C. Upaya Peningkatan Kinerja

Beberapa upaya/rekomendasi yang diperlukan untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja antara lain:

1. Pengukuhan ASN Direktorat Jenderal Perkeretaapian ke dalam jabatan fungsional tertentu bidang perkeretaapian yaitu Inspektur Prasarana dan Sarana Perkeretaapian.
2. Lanjutan pelaksanaan/mengikutsertakan ASN di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian untuk pendidikan dan pelatihan manajerial/umum dan teknis sesuai kebutuhan kompetensi dan ketersediaan anggaran.

Selain itu, diusulkan juga beberapa hal penyesuaian terhadap strategi/kebijakan, aktivitas dan anggaran, serta penempatan jabatan/pegawai untuk mendukung pencapaian kinerja, diantaranya:

1. ***Penyesuaian strategi/kebijakan:***

   Diusulkan penyiapan rencana strategis bidang perkeretaapian Tahun 2025-2029 untuk identifikasi kebutuhan SDM Direktorat Jenderal Perkeretaapian guna menjalankan tugas sebagai regulator secara optimal, efektif dan efisien.
2. ***Penyesuaian aktivitas dan anggaran:***

   Optimalisasi anggaran yang tidak terserap untuk penambahan kegiatan pendukung berupa pendidikan dan pelatihan guna peningkatan kompetensi SDM Direktorat Jenderal Perkeretaapian.
3. ***Penyesuaian penempatan jabatan/pegawai:***

   Penyesuaian penempatan pegawai setelah *inpassing* Jabatan Fungsional Tertentu bidang perkeretaapian sesuai kompetensi (misalnya untuk Inspektur Perkeretaapian di Direktorat teknis/Balai, penguji dan asisten penguji di Balai Pengujian Perkeretaapian).

2.2.4 SISTEM INFORMASI DAN TEKNOLOGI YANG ANDAL

PERSENTASE PEMENUHAN RENCANA INDUK TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI BIDANG PERKERETAAPIAN

Target persentase pemenuhan Rencana Induk Teknologi Informasi dan Komunikasi bidang perkeretaapian ditetapkan sebesar 77% atau pemenuhan sebanyak 21 sistem TIK di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian dari rencana 27 sistem TIK berdasarkan Rencana Induk TIK Kementerian

Perhubungan Tahun 2020 – 2024 (Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 222 Tahun 2020) sesuai bidang tugas yang meliputi Lalu lintas angkutan KA, Prasarana, Sarana, Keselamatan dan Dukungan manajemen/sekretariat.

Pada Triwulan II 2024, realisasi pemenuhan Rencana Induk TIK Bidang Perkeretaapian masih sama dengan capaian periode sebelumnya dimana secara kumulatif dari Tahun 2020 s.d Triwulan II Tahun 2024 terdapat 19 sistem TIK/aplikasi yang telah terbangun sebagai berikut:

1. Bidang LLAKA sebanyak 6 sistem TIK yaitu aplikasi perijinan *online*, aplikasi *streaming* CCTV stasiun, aplikasi posko angkutan Lebaran, Natal dan Tahun Baru, aplikasi angkutan MOTIS (Motor Gratis), aplikasi *open track* lalu lintas kereta api, data *warehouse* angkutan kereta api.
2. Bidang prasarana perkeretaapian sebanyak 4 sistem TIK yaitu aplikasi perizinan perpotongan dan persinggungan jalur KA dengan bangunan lain, aplikasi sertifikasi prasarana perkeretaapian, program pengelolaan dan pengembangan informasi kelaikan fasilitas operasi, MOP5 (termasuk master data jalur dan jembatan kereta api).
3. Bidang sarana perkeretaapian sebanyak 2 sistem TIK yaitu aplikasi sertifikasi kelaikan sarana perkeretaapian dan aplikasi penetapan identitas sarana perkeretaapian.
4. Bidang keselamatan perkeretaapian sebanyak 1 sistem TIK yaitu aplikasi sertifikasi SDM perkeretaapian.
5. Bidang dukungan manajemen/sekretariat sebanyak 6 sistem TIK yaitu Website, Portal Aplikasi, database perencanaan teknis bidang perkeretaapian, database Barang Milik Negara (BMN), *Enterprise Service Bus* (ESB) Direktorat Jenderal Perkeretaapian serta aplikasi layanan BLU Balai Pengujian Perkeretaapian.

Pada Tahun 2024, telah diprogramkan beberapa kegiatan TIK oleh beberapa unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian yang mendukung pencapaian kinerja indikator pemenuhan Rencana Induk TIK Bidang Perkeretaapian meliputi:

Tabel 2-10 Kegiatan TIK Tahun 2024

Unit Kerja	Nama Kegiatan
Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api	Pemeliharaan Aplikasi Perizinan Penyelenggaraan Perkeretaapian *Online*
	Bandwitdh dan Jaringan Pemantauan Perjalanan Kereta Api
	Perawatan Alat Pemantauan di Stasiun KA dan Perlintasan Sebidang
	Manajemen Studio *Geodatabase* Lanjutan
Direktorat Sarana Perkeretaapian	Pembaruan Aplikasi ANSYS dalam rangka pelaksanaan rancang bangun sarana perkeretaapian
	Pemeliharaan Aplikasi Sertifikasi Kelaikan Sarana Perkeretaapian
Direktorat Keselamatan Perkeretaapian	Penyusunan *Database* Perlintasan secara Digital
	Pengembangan Sistem Informasi Sertifikasi SDM Perkeretaapian
	Pembangunan Sistem Informasi Program Keselamatan dalam Pengawasan Penyelenggaraan Perkeretaapian
Setditjen Perkeretaapian	Pengembangan Portal Aplikasi Ditjen Perkeretaapian
	Pengelolaan Website Ditjen Perkeretaapian
	Reviu *Roadmap* TIK Direktorat Jenderal Perkeretaapian

A. Perbandingan Target Triwulan dan Tahunan dengan Realisasi Kinerja

Berdasarkan realisasi kumulatif sistem TIK sampai dengan Triwulan II 2024 sebanyak 19 sistem TIK dari rencana 27 sistem TIK, maka diperoleh persentase pemenuhan Rencana Induk TIK Kementerian Perhubungan Bidang Perkeretaapian sebesar 70,37%. Pada Triwulan II 2024 target indikator pemenuhan rencana induk TIK bidang perkeretaapian sebesar 70%, maka diperoleh capaian kinerja sebesar 100,53% sedangkan apabila dibandingkan dengan target Tahun 2024 sebesar 77% maka diperoleh capaian kinerja sebesar 91,39%.

Rincian target dan realisasi kinerja per Triwulan II 2024 dapat dilihat pada Tabel dan Gambar berikut.

Tabel 2-11 Capaian Kinerja Persentase Pemenuhan Rencana Induk TIK Bidang Perkeretaapian Tahun 2023

Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja Tahunan	Target Kinerja Triwulan				Realisasi Kinerja Triwulan				Capaian Kinerja Triwulan (%)				Capaian Kinerja Tahunan (%)
			I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	
Persentase pemenuhan rencana induk Teknologi Informasi dan Komunikasi bidang perkeretaapian	%	77	70	70	70	77	70,37	70,37	-	-	100,53	100,53	-	-	91,39

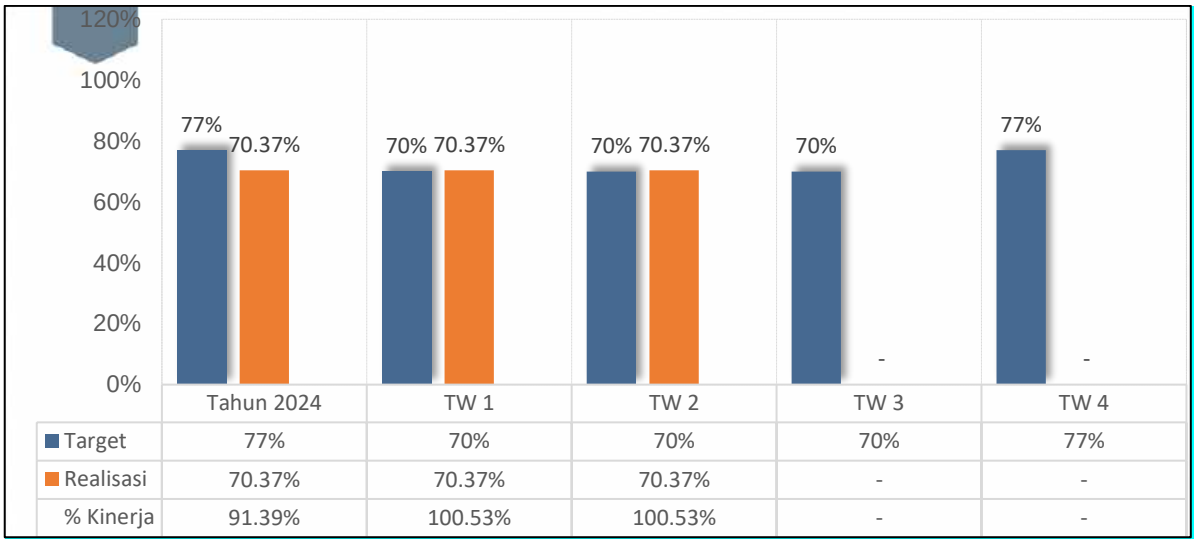

Gambar 2-4 Capaian Kinerja Persentase Pemenuhan Rencana Induk TIK Bidang Perkeretaapian Tahun 2024

B. Analisis Keberhasilan/Kegagalan pencapaian Target

Dalam rangka mendukung pencapaian target kinerja, telah dilaksanakan beberapa kegiatan pada Triwulan II 2024 diantaranya:

1. Koordinasi pemenuhan data dukung dan justifikasi usulan kegiatan TIK Tahun 2024 di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian sebagai tahapan *clearance* oleh Tim SPBE Nasional.
2. Rapat koordinasi pemanfaatan dan monitoring progress kegiatan TIK Tahun 2024 di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian yang mencakup beberapa topik pembahasan:
   a. Pembahasan data capaian SPBE dan TIK Kementerian Perhubungan Periode Tahun 2014 s.d 2024 serta pemenuhan data dukung Arsitektur SPBE yang dilaksanakan oleh Direktorat LLAKA, Direktorat Prasarana

Perkeretaapian, Direktorat Sarana Perkeretaapian, Direktorat Keselamatan Perkeretaapian dan Balai Pengujian Perkeretaapian.

b. Pembahasan pemanfaatan serta monitoring progress kegiatan TIK Tahun 2022 s.d 2024 dan pembahasan awal terkait indikasi kegiatan TIK Tahun 2025.

c. Koordinasi pengelolaan Website Direktorat Jenderal Perkeretaapian serta pengembangan Portal Aplikasi Direktorat Jenderal Perkeretaapian sebagai *Super Apps* termasuk integrasi persetujuan perizinan/sertifikasi.

3. Pembahasan laporan pendahuluan, *benchmarking* pengembangan dan pengelolaan TIK yang dihadiri oleh perwakilan dari Kementerian PUPR, PT MRT Jakarta, PT Railink, Divisi LRT Jabodebek, serta PT Angkasa Pura II. Selain itu juga dibahas terkait tindak lanjut rencana simplifikasi/integrasi aplikasi di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian.
4. Koordinasi dengan Direktorat teknis terkait peningkatan pengawasan kelaikan prasarana dan sarana perkeretaapian berbasis teknologi.
5. Pendampingan dan koordinasi terkait pelaksanaan *User Acceptance Test* (UAT) serta *Vulnerability Assessment* (VA) untuk aplikasi/sistem informasi di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian.
6. Koordinasi pengelolaan domain dan penggunaan server di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian.

C. Perbandingan Kinerja di Level Nasional / Internasional

Perbandingan kinerja (*benchmark*) secara nasional maupun di tingkat Kementerian Perhubungan terkait pemenuhan Rencana Induk TIK dilaksanakan dengan inventarisasi sistem TIK/aplikasi sesuai SPBE di lingkungan Kementerian Perhubungan sesuai data Pusdatin Kementerian Perhubungan. Posisi sampai dengan Triwulan II 2024 terdapat 386 sistem TIK/aplikasi di lingkungan Kementerian Perhubungan dengan 19 diantaranya merupakan sistem TIK/aplikasi di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian (4,92% dari total sistem TIK Kementerian Perhubungan). Adapun uraian sistem TIK/aplikasi di lingkungan Kementerian Perhubungan sebagai berikut:

Tabel 2-12 Inventarisasi Sistem TIK/Aplikasi di lingkungan Kementerian Perhubungan Periode Triwulan II 2024

No	Unit Eselon I	Jumlah Sistem TIK/Aplikasi
1.	Sekretariat Jenderal	115 Sistem TIK/Aplikasi
2.	Inspektorat Jenderal	12 Sistem TIK/Aplikasi
3.	Direktorat Jenderal Perhubungan Darat	44 Sistem TIK/Aplikasi
4.	Direktorat Jenderal Perhubungan Laut	95 Sistem TIK/Aplikasi
5.	Direktorat Jenderal Perhubungan Udara	28 Sistem TIK/Aplikasi
6.	Direktorat Jenderal Perkeretaapian	19 Sistem TIK/Aplikasi
7.	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan	40 Sistem TIK/Aplikasi
8.	Badan Kebijakan Transportasi	20 Sistem TIK/Aplikasi
9.	Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek	14 Sistem TIK/Aplikasi

Dari Tabel di atas, menunjukkan bahwa pada pelaksanaan tugas dan fungsi termasuk layanan di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian telah memanfaatkan TIK diantaranya untuk layanan data dan informasi publik melalui website, layanan pengujian serta sertifikasi kelaikan prasarana, sarana dan kompetensi SDM.

Seiring upaya meningkatkan efisiensi, efektifitas dan akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintahan menuju *e-Government,* pada Tahun 2024 direncanakan penataan domain mendukung penyederhanaan aplikasi dalam rangka menindaklanjuti arahan Presiden RI dan Kemenko Marvest diantaranya dengan pengembangan Portal Aplikasi sebagai *Super Apps* Direktorat Jenderal Perkeretaapian serta mendukung Hubnet Kementerian Perhubungan. Aplikasi-aplikasi di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian secara bertahap akan digabungkan dalam 1 (satu) domain dengan target penyelesaian pada Desember 2025.

D. Upaya Peningkatan Kinerja

Beberapa upaya untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja pada periode selanjutnya antara lain:

1. Lanjutan pengembangan Portal Aplikasi sebagai *Super Apps* Direktorat Jenderal Perkeretaapian yang terintegrasi dengan aplikasi teknis lainnya serta optimalisasi fitur untuk dukungan manajemen dan teknis.

2. Peningkatan keamanan sistem dengan pelaksanaan *Vulnerability Assesment* (VA) pada beberapa aplikasi dan tindak lanjut/remediasi hasil VA tersebut.
3. Pelaksanaan reviu tingkat I terhadap usulan kegiatan TIK Tahun 2025 sesuai Rencana Induk/*Roadmap* TIK, Arsitektur dan Peta Rencana SPBE Kementerian Perhubungan serta mengacu rencana penataan domain dan simplifikasi/penyederhanaan aplikasi.

Selain itu, diusulkan juga beberapa hal penyesuaian terhadap strategi/kebijakan, aktivitas, anggaran, serta organisasi dan penempatan jabatan/pegawai untuk mendukung pencapaian kinerja, diantaranya:

1. ***Penyesuaian strategi/kebijakan***:
   a. Koordinasi dalam penyusunan arsitektur SPBE Kementerian Perhubungan mencakup proses bisnis, layanan, aplikasi, data dan informasi, keamanan dan infrastruktur untuk unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian.
   b. Pelaksanaan reviu peta jalan (*roadmap*) TIK untuk penyesuaian kebijakan TIK terbaru di lingkungan Kementerian Perhubungan serta sebagai acuan dalam perencanaan TIK Tahun 2025-2029 sesuai arsitektur dan peta rencana SPBE Kementerian Perhubungan.
2. ***Penyesuaian aktivitas dan anggaran***:
   Koordinasi terkait kegiatan pendukung TIK Tahun 2024 yang terdampak kebijakan *Automatic Adjustment* (AA) atau blokir agar dapat tetap dilaksanakan sesuai persetujuan *clearance* yang diterbitkan Tim SPBE Nasional dengan pengoptimalan anggaran yang tersedia.
3. ***Penyesuaian organisasi dan penempatan jabatan/pegawai***:
   a. Diusulkan pembentukan unit/kelompok baru yang khusus yang bertanggung jawab atas pengembangan dan pengelolaan sistem TIK di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian dalam naskah urgensi penataan organisasi Direktorat Jenderal Perkeretaapian.
   b. Diusulkan penambahan pegawai pranata komputer di Bagian Perencanaan Setditjen Perkeretaapian agar mendukung pengelolaan sistem TIK di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian.

2.2.5 DUKUNGAN PUBLIK TERHADAP PENYELENGGARAAN PERKERETAAPIAN

PERSENTASE PEMENUHAN PUBLIKASI DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

Publikasi terkait penyelenggaraan perkeretaapian dilaksanakan dengan maksud untuk membangun dan mempertahankan sebuah reputasi/citra dan komunikasi yang baik dan bermanfaat antara organisasi dan masyarakat. Tujuan dilakukannya publikasi bidang perkeretaapian antara lain:

1. Meningkatkan dukungan dan partisipasi aktif dari masyarakat dengan membentuk opini positif.
2. Memperkenalkan program-program pembangunan / kebijakan terkait perkeretaapian kepada masyarakat luas.
3. Membangun kepercayaan publik dengan memberikan informasi terkait pembangunan di bidang perkeretaapian yang akuntabel dan transparan.
4. Menciptakan hubungan harmonis dengan publlik melalui penyampaian kebijakan, program pembangunan dan hasil kerja organisasi di bidang perkeretaapian.

Persentase pemenuhan publikasi Direktorat Jenderal Perkeretaapian merupakan indikator kinerja kegiatan terkait kehumasan yang diperoleh dari pemenuhan jumlah pemberitaan bidang perkeretaapian pada media cetak, elektronik, *online* dan media sosial dengan mempublikasikan kegiatan penyelenggaraan perkeretaapian diantaranya pembangunan prasarana dan sarana, peningkatan keselamatan dan pelayanan serta isu-isu strategis perkeretaapian lainnya baik dalam bentuk siaran pers maupun konten media sosial.

Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2024, indikator kinerja persentase pemenuhan publikasi Direktorat Jenderal Perkeretaapian ditargetkan sebesar 100% pada akhir Tahun 2024 dan 50% pada periode Triwulan II 2024, dengan perhitungan pelaksanaan publikasi sebagai berikut:

1. 50 pelaksanaan pemberitaan pada saluran media cetak, TV, radio, website/*online* yang dihasilkan dari penyusunan siaran pers maupun liputan per tahun (bobot 50%);
2. 365 postingan konten media sosial per tahun (bobot 50%).

Hingga periode Triwulan II 2024, realisasi pelaksanaan publikasi bidang perkeretaapian melalui media cetak, TV, radio, website/*online* telah terealisasi sebanyak 13 siaran pers dan postingan konten melalui media sosial (*instagram/twitter*) sebanyak 352 konten.

A. Perbandingan Target Triwulan dan Tahunan dengan Realisasi Kinerja

Dengan jumlah pelaksanaan publikasi bidang perkeretaapian sebanyak 13 siaran pers dan 352 postingan konten melalui media sosial pada periode Triwulan II 2024, maka diperoleh perhitungan progres publikasi siaran pers sebesar 26% (bobot 50%) dan progres publikasi konten media sosial sebesar 96,44% (bobot 50%) sehingga diperoleh rata-rata atau keseluruhan realisasi persentase pemenuhan publikasi Direktorat Jenderal Perkeretaapian periode Triwulan II sebesar 61,22%. Dengan realisasi kinerja tersebut, diperoleh capaian kinerja sebesar 122,44% dari target Triwulan II 2024 dan capaian kinerja sebesar 61,22% dari target Tahun 2024.

Rincian target dan realisasi kinerja per Triwulan Tahun 2024 dapat dilihat pada Tabel dan Gambar berikut.

Tabel 2-13 Capaian Kinerja Persentase Pemenuhan Publikasi Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2024

Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja Tahunan	Target Kinerja Triwulan				Realisasi Kinerja Triwulan				Capaian Kinerja Triwulan (%)				Capaian Kinerja Tahunan (%)
			I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	
Persentase Pemenuhan Publikasi Ditjen Perkeretaapian	%	100	25	50	75	100	25,15	61,22	-	-	100,60	122,44	-	-	61,22

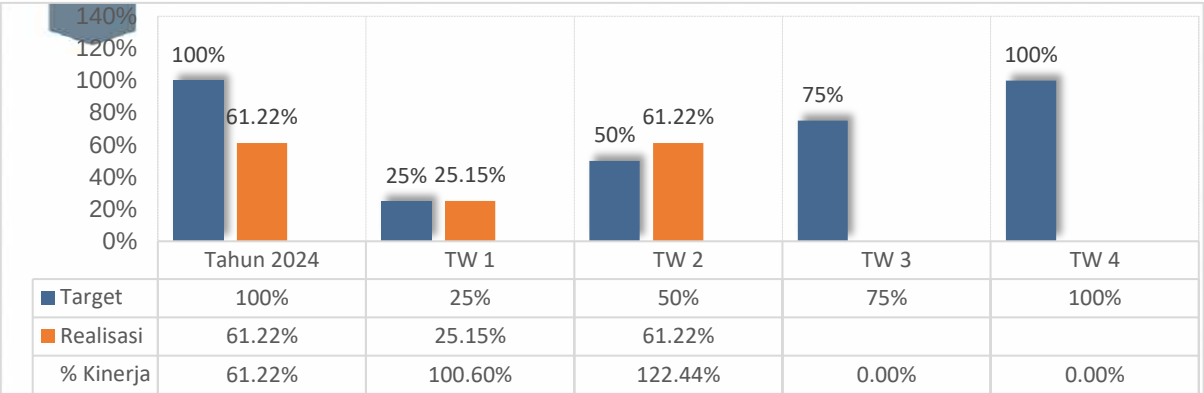

	Tahun 2024	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4
Target	100%	25%	50%	75%	100%
Realisasi	61.22%	25.15%	61.22%		
% Kinerja	61.22%	100.60%	122.44%	0.00%	0.00%

Gambar 2-5 Capaian Kinerja Persentase Pemenuhan Publikasi Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2024

B. Analisis Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Target

Keberhasilan pencapaian target persentase pemenuhan publikasi diperoleh dengan keaktifan Tim Humas Direktorat Jenderal Perkeretaapian dalam melakukan pemberitaan terkait bidang perkeretaapian khususnya dengan secara masif memposting konten pada media sosial milik Direktorat Jenderal Perkeretaapian (*Twitter/Instagram/Facebook/Youtube*). Tim Humas secara konsisten melakukan *update* setiap hari di media sosial dengan tema dan topik yang beragam mulai dari hal umum (*event*, hari besar), informasi peresmian prasarana/sarana perkeretaapian, kegiatan pimpinan (Menteri Perhubungan, Direktur Jenderal Perkeretaapian, pimpinan lainnya), progres pembangunan perkeretaapian dan lainnya.

Selain itu, pencapaian target kinerja juga didukung dengan tenaga ahli desain grafis dan anggaran yang memadai serta dilakukan monitoring media setiap hari dengan kategori isu negatif, netral dan positif, termasuk melakukan *update* berkala "*Hot Issue* Perkeretaapian". Tim Humas juga telah berkoordinasi dengan unit kerja terkait untuk mendukung penyusunan majalah yang direncanakan terbit di periode Triwulan III-IV 2024.

Terdapat beberapa kendala dalam pemenuhan capaian kinerja terkait publikasi, diantaranya gangguan keamanan sistem Website Direktorat Jenderal Perkeretaapian sehingga dalam periode Mei – Juni tidak dapat melakukan *update* berita artikel pada website tersebut. Selain itu, jumlah siaran pers yang masih minim juga perlu menjadi perhatian untuk ditingkatkan pada periode berikutnya.

C. Upaya Peningkatan Kinerja

Sebagai upaya mempertahankan dan meningkatkan kinerja pada periode berikutnya direkomendasikan beberapa hal antara lain:

1. Bimbingan teknis kehumasan untuk peningkatan kompetensi Tim Humas Direktorat Jenderal Perkeretaapian termasuk Direktorat dan Balai guna mendukung penyiapan publikasi yang handal.
2. Penyelesaian majalah perkeretaapian edisi pertama sesuai tema yang telah dibahas dan disepakati dengan dukungan peliputan di wilayah tertentu.
3. Perbaikan website Direktorat Jenderal Perkeretaapian sebagai media publikasi dalam bentuk berita/data/informasi melalui website serta siaran pers/liputan.

Selain itu, diusulkan juga beberapa hal penyesuaian terhadap aktivitas, anggaran, serta penempatan jabatan/pegawai untuk mendukung pencapaian kinerja, diantaranya:

1. Penyesuaian strategi/kebijakan:

Koordinasi dengan Biro KIP dan Tenaga Ahli Kementerian Perhubungan untuk penyiapan pemberitaan/siaran pers dalam upaya menyeimbangkan pemberitaan negatif diantaranya dengan pemberitaan/siaran pers terkait capaian dan manfaat pembangunan infrastruktur perkeretaapian periode 2014-2024.

2. Penyesuaian aktivitas dan anggaran:

a. Optimalisasi kegiatan pendukung publikasi (siaran pers, seminar, pameran dan lainnya) yang terdampak kebijakan *Automatic Adjustment* (AA) atau blokir dengan pengoptimalan anggaran yang tersedia.
b. Diusulkan revisi rencana aksi pada Perjanjian Kinerja Tahun 2024 dikarenakan capaian kinerja Triwulan II 2024 tidak memenuhi kriteria *on the right track* (melebihi capaian kinerja 110%).

3. ***Penyesuaian penempatan jabatan/pegawai:***

Dukungan penempatan pegawai pranata humas di Bagian Hukum Setditjen Perkeretaapian sesuai kompetensi untuk mendukung peningkatan kualitas publikasi di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian.

2.2.6 TERWUJUDNYA *GOOD GOVERNANCE* DAN *CLEAN GOVERNMENT* DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

NILAI AKIP DITJEN PERKERETAAPIAN

Evaluasi AKIP dilakukan menggunakan Lembar Kerja Evaluasi (LKE) berdasarkan Peraturan Menteri PANRB Nomor 88 Tahun 2021 dan Surat Edaran Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan Nomor SE-ITJEN 1 Tahun 2024. Variabel-variabel dalam LKE tersebut, diuraikan sebagai berikut:

1. ***Komponen*** terdiri dari Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal.
2. ***Sub-komponen*** dibagi dengan gradasi Keberadaan, Kualitas, dan Pemanfaatan pada setiap komponen.
3. ***Kriteria*** merupakan gambaran kondisi yang perlu dicapai di setiap subkomponen untuk dapat dinilai apakah kondisi tersebut sudah atau belum dicapai dan dapat digambarkan atau tidak.

Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2024, ditetapkan target Nilai AKIP Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2024 sebesar 83,00 dan pada Triwulan II 2024 belum ditetapkan target kinerja (target ditetapkan pada Triwulan IV) dikarenakan evaluasi/penilaian masih berlangsung pada Triwulan II baik oleh Tim Internal Direktorat Jenderal Perkeretaapian untuk penilaian mandiri maupun Tim Evaluasi Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan.

A. Perbandingan Target Triwulan dan Tahunan dengan Realisasi Kinerja

Pada Triwulan II 2024 belum terdapat target dan realisasi Nilai AKIP karena belum dilaksanakan evaluasi dan penilaian oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan. Adapun pelaksanaan evaluasi tersebut akan dilaksanakan pada periode Triwulan III (mulai 1 Juli 2024). Rincian target dan realisasi kinerja per Triwulan Tahun 2024 dapat dilihat pada Tabel dan Gambar berikut.

Tabel 2-14 Capaian Kinerja Triwulan Nilai AKIP Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2024

Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja Tahunan	Target Kinerja Triwulan				Realisasi Kinerja Triwulan				Capaian Kinerja Triwulan (%)				Capaian Kinerja Tahunan (%)
			I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	
Nilai AKIP Ditjen Perkeretaapian	Nilai	83	-	-	-	83	-	-	-	-	-	-	-	-	-

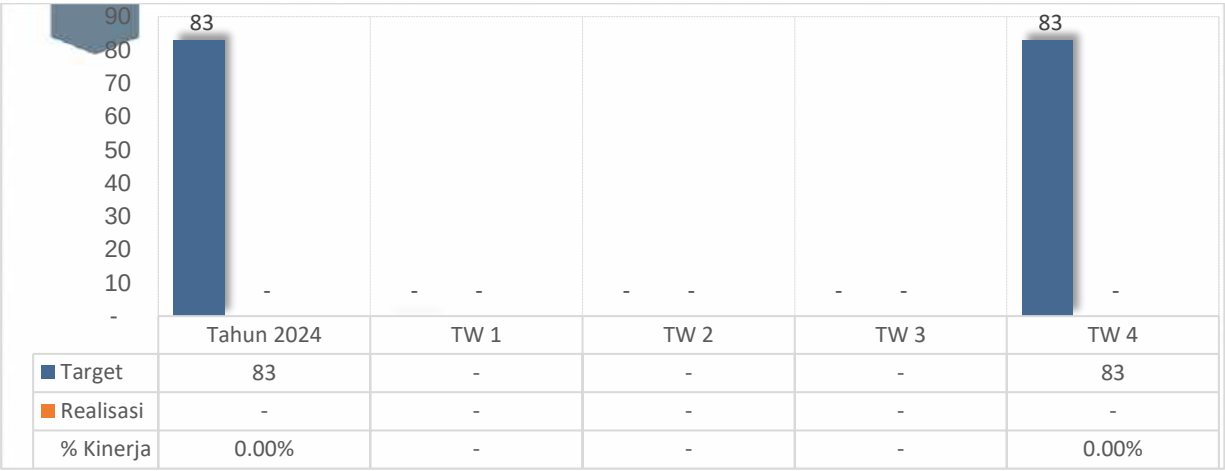

Gambar 2-6 Capaian Kinerja Triwulan Nilai AKIP Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2024

B. Analisis Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Target

Untuk mendukung penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian, pada periode Triwulan II 2024 telah dilaksanakan beberapa hal diantaranya:

1. Penyusunan pelaporan kinerja oleh unit Eselon I, II dan UPT/Balai di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian yaitu Laporan Monitoring Kinerja Triwulan I Tahun 2024 termasuk telah dilakukan pembahasan internal bersama dengan seluruh Direktorat/Bagian/Balai di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian dengan mengundang narasumber dari Kementerian PANRB.
2. Evaluasi kinerja dan kepatuhan pelaporan kinerja berdasarkan Laporan Monitoring Capain Kinerja Triwulan I Tahun 2024 serta kepatuhan pengisian aplikasi pelaporan kinerja (e-SAKIP Reviu, e-Performance, SILAKI, e-Monev Bappenas).

3. Penetapan Tim Evaluasi Penilaian Mandiri Implementasi SAKIP Unit Direktorat Jenderal Perkeretaapian dan Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2024.
4. Koordinasi Penilaian Mandiri Implementasi SAKIP Tahun 2024 pada Unit Kerja di Lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian pada tanggal 21 s.d. 22 Mei 2024 termasuk juga pemantauan tindak lanjut atas rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas tahun 2023 dengan disusun Berita Acara untuk masing-masing unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian.
5. Penilaian mandiri/evaluasi internal implementasi SAKIP Tahun 2024 oleh masing-masing unit eselon II dan UPT/Balai termasuk unit eselon I Direktorat Jenderal Perkeretaapian yang selanjutnya disampaikan kepada Sekretaris Direktorat Jenderal Perkeretaapian untuk proses lanjut evaluasi oleh tim evaluator tingkat eselon I Direktorat Jenderal Perkeretaapian.
6. Mengikuti rapat koordinasi dan bimbingan teknis/sosialisasi Surat Edaran Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan Nomor SE-ITJEN 1 Tahun 2024 yang dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan sebagai persiapan pelaksanaan evaluasi di tingkat Kementerian Perhubungan (pra evaluasi).

Selain itu, guna meningkatkan nilai Evaluasi Implementasi SAKIP maka pada Triwulan II Tahun 2024 telah dilakukan beberapa tindak lanjut diantaranya:

1. Penyusunan Laporan Kinerja bulanan sesuai dengan PM PANRB Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara.
2. Mempublikasikan Laporan Monitoring Kinerja Triwulan I 2024 secara tepat waktu.
3. Melaksanakan evaluasi akuntabilitas kinerja internal pada seluruh unit kerja secara berjenjang mengacu pada Surat Edaran Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan Nomor SE-ITJEN 1 Tahun 2024.

Adapun kendala/permasalahan dalam penyelenggaraan SAKIP di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian diantaranya terkait kepatuhan unit kerja dalam memenuhi pelaporan kinerja sesuai ketentuan waktu dan substansi sebagaimana PM 85 Tahun 2020 serta memperhatikan rekomendasi dari Inspektorat Jenderal dan Kementerian PANRB (ketersediaan/*update* SOP

dalam penyelenggaraan SAKIP, analisa efisiensi sumber daya anggaran dan SDM, *benchmarking* kinerja, reviu LKIP secara berkelanjutan, lainnya).

C. Perbandingan Kinerja di Level Nasional / Internasional

Perbandingan kinerja terkait nilai AKIP dilakukan dengan unit kerja lain baik di lingkungan Kementerian Perhubungan maupun unit lainnya. Di tingkat Kementerian Perhubungan, diperoleh bahwa nilai AKIP Direktorat Jenderal Perkeretaapian merupakan yang tertinggi dibandingkan unit Eselon I lainnya. Secara lengkap nilai AKIP unit kerja Eselon I di lingkungan Kementerian Perhubungan sebagai berikut:

Tabel 2-15 Perbandingan Nilai AKIP Unit Kerja di lingkungan Kementerian Perhubungan Tahun 2023

No.	Unit Kerja	Capaian Kinerja per komponen (%)				Nilai 2022	Nilai 2021
		Perencanaan Kinerja (30%)	Pengukuran Kinerja (30%)	Pelaporan Kinerja (15%)	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal (25%)		
1	Sekretariat Jenderal	24,33	24,15	12,02	19,58	80,08 (A)	80,27 (A)
2	Inspektorat Jenderal	25,20	23,70	13,61	19,53	82,05 (A)	81,26 (A)
3	Direktorat Jenderal Perhubungan Darat	24,30	25,53	12,09	20,73	82,66 (A)	80,44 (A)
4	Direktorat Jenderal Perhubungan Laut	24,75	24,15	12,38	19,50	80,79 (A)	80,42 (A)
5	Direktorat Jenderal Perhubungan Udara	24,57	25,20	11,94	18,59	80,22 (A)	80,36 (A)
6	Direktorat Jenderal Perkeretaapian	24,09	25,05	12,30	21,25	82,70 (A)	80,42 (A)
7	BPSDM Perhubungan	22,65	23,31	10,44	19,73	76,14 (BB)	80,53 (A)
8	Badan Kebijakan Transportasi	23,67	25,20	11,67	20,25	80,80 (A)	82,46 (A)
9	Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek	22,69	22,31	11,51	18,50	75,02 (BB)	74,96 (A)
					Rata-rata	80,05 (A)	80,12 (A)

Berdasarkan Tabel di atas, juga diperoleh bahwa nilai AKIP Direktorat Jenderal Perkeretaapian mengalami kenaikan dibandingkan tahun sebelumnya diantaranya pada komponen evaluasi akuntabilitas kinerja internal. Selanjutnya perlu dikaji lebih lanjut penilaian terhadap komponen-komponen tersebut untuk perbaikan pada periode berikutnya.

Dibandingkan dengan instansi Pemerintah lainnya, berdasarkan data Kementerian PANRB pada Tahun 2022-2023 diperoleh bahwa evaluasi SAKIP yang dilakukan kepada 499 Pemerintah Kabupaten/Kota dengan rata-rata nilai AKIP sebesar 63,36. Sedangkan hasil evaluasi kepada 34 Pemerintah Provinsi diperoleh rata-rata nilai AKIP sebesar 72,17. Berdasarkan data tersebut, diperoleh bahwa nilai AKIP Direktorat Jenderal Perkeretaapian masih di atas nilai rata-rata dari Pemerintah Provinsi maupun Kabupaten/Kota.

D. Upaya Peningkatan Kinerja

Sebagai upaya meningkatkan kinerja pada periode berikutnya, diperlukan hal-hal sebagai berikut termasuk tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi dari Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan dan Kementerian PANRB:

1. Pelaksanaan evaluasi internal implementasi SAKIP tingkat Eselon I Direktorat Jenderal Perkeretaapian serta evaluasi tingkat Kementerian Perhubungan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan.
2. Melakukan studi/kajian untuk mendukung penyusunan Rencana Strategis Kementerian Perhubungan Bidang Perkeretaapian Tahun 2025-2029 dengan melibatkan *stakeholder* (Pemda, operator, lainnya) sebagai acuan perencanaan kinerja periode berikutnya.
3. Melakukan revisi perjanjian kinerja Tahun 2024 untuk seluruh unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian sebagai tindak lanjut monitoring dan evaluasi terhadap capaian indikator kinerja yang tidak memenuhi kriteria *on the right track* (90% s.d 110%).

Selain itu, diusulkan juga beberapa hal penyesuaian terhadap strategi/kebijakan, aktivitas dan anggaran, serta kompetensi/penempatan pegawai untuk mendukung pencapaian kinerja diantaranya:

1. Penyesuaian strategi/kebijakan:

Penyiapan dan *update/reviu* SOP berkala dalam penyelenggaraan SAKIP untuk memenuhi komponen penilaian dalam evaluasi implementasi SAKIP.

2. Penyesuaian aktivitas dan anggaran:

Optimalisasi pelaksanaan kegiatan prioritas dan strategis yang telah diajukan relaksasi *Automatic Adjustment* (AA) agar dapat mendukung ketercapaian indikator kinerja Direktorat Jenderal Perkeretaapian.

3. Penyesuaian organisasi/penempatan pegawai:

Pemenuhan Tim SAKIP masing-masing unit kerja dengan penempatan pegawai yang kompeten khususnya untuk pelaksanaan evaluasi internal implementasi SAKIP di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2024.

TINGKAT MATURITAS SPIP DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) akan dilakukan penilaian terintegrasi mencakup unsur Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), Manajemen Risiko Indeks (MRI), dan Indeks Efektifitas Pengendalian Korupsi (IEPK) sebagaimana Perka BPKP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi pada Kementerian/Lembaga/ Pemerintah Daerah serta Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 205 Tahun 2021 tentang Pedoman Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kementerian Perhubungan.

Target Tingkat Maturitas SPIP Direktorat Jenderal Perkeretaapian berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 adalah mempertahankan dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan SPIP pada Level 3 (terdefinisi). Pada Triwulan II 2024 masih belum terdapat target dan realisasi kinerja terhadap indikator Tingkat Maturitas SPIP Direktorat Jenderal Perkeretaapian (target kinerja ditetapkan pada Triwulan IV) dikarenakan pada periode April s.d Juni 2024 masih berproses tahapan penilaian mandiri oleh masing-masing unit kerja dan penjaminan kualitas SPIP oleh Tim Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan. Adapun posisi saat ini telah diajukan kepada BPKP untuk proses evaluasi.

Berikut penjelasan tingkat maturitas SPIP dan karakteristiknya:

Tabel 2-16 Tingkat Maturitas SPIP

Tingkat	Karakteristik SPIP
Level 0 Belum Ada	K/L/Pemda sama sekali belum memiliki kebijakan dan prosedur yang diperlukan untuk melaksanakan praktik-praktik pengendalian intern.
Level 1 Rintisan	Ada praktik pengendalian intern, namun pendekatan risiko dan pengendalian yang diperlukan masih bersifat *ad-hoc* dan tidak terorganisasi dengan baik, tanpa komunikasi dan pemantauan, sehingga kelemahan tidak teridentifikasi.
Level 2 Berkembang	K/L/Pemda telah melaksanakan praktik pengendalian intern, namun tidak terDokumenumentasi dengan baik, dan pelaksanaannya sangat tergantung pada individu, serta belum melibatkan semua unit organisasi. Efektivitas pengendalian belum dievaluasi, sehingga banyak terjadi kelemahan yang belum ditangani secara memadai.
Level 3 Terdefinisi	K/L/Pemda telah melaksanakan praktik pengendalian intern dan terDokumenumentasi dengan baik. Namun, evaluasi atas pengendalian intern dilakukan tanpa Dokumenumentasi yang memadai.

Tingkat	Karakteristik SPIP
Level 4 Terkelola dan Terukur	K/L/Pemda telah menerapkan pengendalian intern yang efektif, masing-masing personel pelaksana kegiatan selalu mengendalikan kegiatan pada pencapaian tujuan kegiatan itu sendiri maupun tujuan K/L/Pemda. Telah ada evaluasi formal dan terDokumenumentasi.
Level 5 Optimum	K/L/Pemda telah menerapkan pengendalian intern yang berke- lanjutan, terintegrasi dalam pelaksanaan kegiatan, serta didukung oleh pemantauan otomatis dengan menggunakan aplikasi TI.

A. Perbandingan Target Triwulan dan Tahunan dengan Realisasi Kinerja

Pada Triwulan II 2024, belum terdapat target dan realisasi kinerja terhadap indikator Tingkat Maturitas SPIP Direktorat Jenderal Pekeretaapian dikarenakan masih berproses evaluasi oleh Tim BPKP. Rincian target dan realisasi kinerja per Triwulan Tahun 2024 disampaikan pada Tabel dan Gambar berikut.

Tabel 2-17 Capaian Kinerja Tingkat Maturitas SPIP Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2024

Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja Tahunan	Target Kinerja Triwulan				Realisasi Kinerja Triwulan				Capaian Kinerja Triwulan (%)				Capaian Kinerja Tahunan (%)
			I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	
Tingkat Maturitas SPIP Direktorat Jenderal Perkeretaapian	Level	3	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-

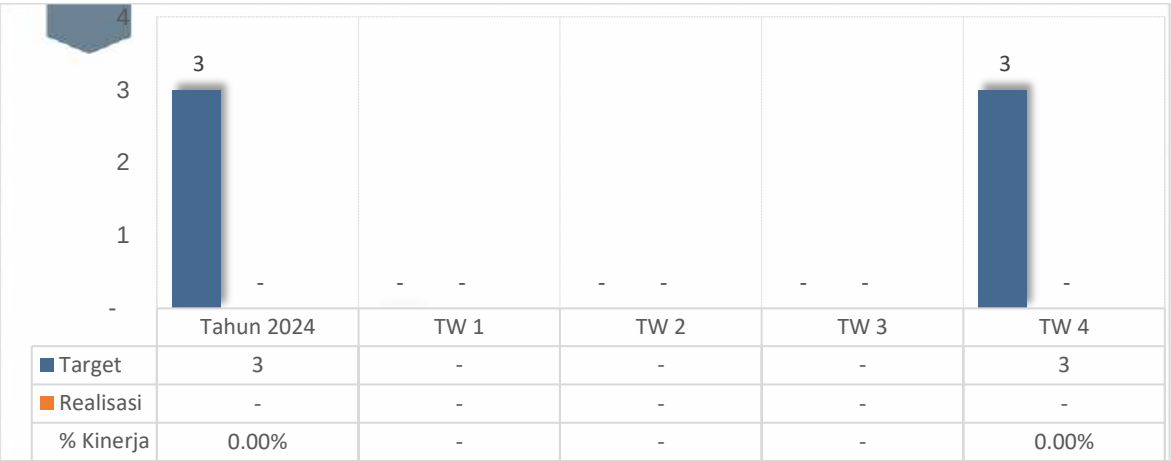

Gambar 2-7 Capaian Kinerja Tingkat Maturitas SPIP Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2024

B. Analisis Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Target

Pada Triwulan II 2024, masing-masing unit kerja telah melaksanakan penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP mengacu pada Peraturan Kepala BPKP Nomor 5 Tahun 2021. Selain itu, juga telah dilaksanakan pembahasan dan koordinasi diantaranya:

1. Asistensi/konsultasi dengan BPKP terkait penyelesaian pengisian dan pemenuhan data dukung pada Kertas Kerja Evaluasi (KKE) penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian pada bulan Mei 2024.
2. Pelaksanaan penjaminan kualitas SPIP oleh Tim Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan guna selanjutnya tindak lanjut penyempurnaan isian kertas kerja dan data dukung berdasarkan catatan/rekomendasi dari Tim Inspektorat Jenderal pada rapat di bulan Juni 2024.

Berdasarkan hasil penjaminan kualitas oleh Tim Inspektorat Jenderal sebagaimana surat Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan Nomor KP.904/3/10/ITJEN/2024 tanggal 21 Juni 2024 perihal Penyampaian Hasil Penjaminan Kualitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi di lingkungan Kementerian Perhubungan Tahun 2024, diperoleh nilai maturitas penyelenggaraan SPIP hasil penjaminan kualitas terhadap penilaian mandiri sebesar 3,835 atau Level 3 (Terdefinisi). Hasil penjaminan kualitas tersebut selanjutnya akan diajukan untuk evaluasi oleh BPKP sebagai instansi pembina penyelenggaraan SPIP Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah dan *Quality Assurance* (QA) guna proses lanjut penetapan nilai maturitas penyelenggaraan SPIP Kementerian Perhubungan.

Hal-hal lain yang dilaksanakan pada periode Triwulan II Tahun 2023 diantaranya pembahasan tindak lanjut *Area of Improvement* (AOI) berdasarkan hasil penilaian mandiri dan penjaminan kualitas oleh Inspektorat Jenderal serta evaluasi oleh BPKP periode sebelumnya, implementasi manajemen risiko sebagaimana KM 69 Tahun 2023 diantaranya pemenuhan dokumen laporan Pemilik Risiko, laporan Unit Pengelola Risiko dan laporan Unit Manajemen Risiko di tingkat Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian, direktorat Jenderal Perkeretaapian dan Kementerian Perhubungan untuk periode

Triwulan I Tahun 2024 serta pemantauan penyelenggaraan manajemen risiko pada beberapa unit kerja melalui audiensi secara langsung (Balai Pengujian dan BTP Semarang).

C. Upaya Peningkatan Kinerja

Sebagai upaya meningkatkan kinerja, terdapat hal-hal yang perlu ditindaklanjuti sesuai rekomendasi Inspektorat Jenderal dan BPKP diantaranya:

1. Melakukan evaluasi kelembagaan serta percepatan penyusunan/penetapan proses bisnis dengan mempertimbangkan kebutuhan organisasi termasuk mendukung penerapan manajemen risiko sesuai ketentuan.
2. Lanjutan pemantauan penyelenggaraan manajemen risiko pada beberapa unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian sekaligus melaksanakan sosialisasi/*in house training*.
3. Penyiapan Kamus Risiko di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian untuk memudahkan implementasi manajemen risiko sesuai KM 69 Tahun 2023.
4. Percepatan optimalisasi penggunaan aplikasi Sistem Informasi Manajemen Risiko (SIMARKO) pada pelaporan manajemen risiko di tingkat Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian dan Direktorat Jenderal Perkeretaapian.

Selain itu, diusulkan juga beberapa hal penyesuaian terhadap strategi/kebijakan, aktivitas dan anggaran, serta penempatan pegawai untuk mendukung pencapaian kinerja, diantaranya:

1. Penyesuaian strategi/kebijakan:

a. Memastikan seluruh unit kerja telah menyelenggarakan SPIP, manajemen risiko dan pengendalian korupsi secara terintergrasi, terstruktur dan sistematis, termasuk penguatan peran Lini I (Unit Pengelola Risiko) dan Lini II (Unit Manajemen Risiko).

b. Menindaklanjuti catatan penjaminan kualitas terhadap penilaian mandiri penyelenggaraan SPIP dari Inspektorat Jenderal, serta rekomendasi BPK terkait keandalan pelaporan keuangan, pengamanan atas aset negara dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

2. ***Penyesuaian aktivitas dan anggaran:***

   Diusulkan revisi anggaran pada DIPA/POK Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian untuk memenuhi kebutuhan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan kompetensi manajemen risiko yang terdampak kebijakan *Automatic Adjustment* (AA) sesuai usulan/kebutuhan masing-masing unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian.

3. ***Penyesuaian penempatan pegawai:***

   Meningkatkan kualitas dan kuantitas kemampuan Tim Assesor untuk penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP.

PERSENTASE REALISASI PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP) BIDANG PERKERETAAPIAN

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) bidang perkeretaapian bersumber dari Pendapatan Fungsional sesuai PP No.15 Tahun 2016 dan Pendapatan Non Fungsional. Penyelenggaraan PNBP Direktorat Jenderal Perkeretaapian dilaksanakan oleh seluruh unit kerja baik Sekretariat, Direktorat maupun Balai di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian.

Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 ditargetkan pemenuhan PNBP berdasarkan DIPA sebesar Rp1.261.333.553.000,- atau sebesar 100% dari target tersebut, sedangkan untuk periode Triwulan II 2024 ditargetkan realisasi PNBP sebesar Rp126.133.355.300 atau 10%.

Berdasarkan data pada aplikasi SPAN Kementerian Keuangan, diperoleh realisasi PNBP pada Triwulan II 2024 sebesar Rp326.129.056.118,- dari target yang ditetapkan sebesar Rp1.261.333.553.000,- maka diperoleh capaian persentase realisasi PNBP Direktorat Jenderal Perkeretaapian sebesar 25,86%. Adapun rincian realisasi PNBP Direktorat Jenderal Perkeretaapian pada Triwulan II 2024 diuraikan sebagai berikut:

Tabel 2-18 Realisasi PNBP Direktorat Jenderal Perkeretaapian Triwulan II 2024

No	Jenis Pendapatan	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	**Pendapatan Fungsional (Sesuai PP No.15 Tahun 2016)**			
	a. Pendapatan Penggunaan Prasarana Perkeretaapian	1.101.061.822.000	244.233.559.805	22,18%

No	Jenis Pendapatan	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
	b. Pendapatan Pengujian, Sertifikasi dan Kalibrasi Bidang Perhubungan	2.754.500.000	1.447.150.000	52,54%
	c. Pendapatan Jasa Transportasi Lainnya	1.381.750.000	1.240.260.000	89,76%
	d. Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan TUSI	9.672.420.000	528.076.000	5,46%
2	**Pendapatan BLU**			
	a. Pendapatan Jasa Penyediaan Barang dan Jasa Lainnya (BLU)	74.076.731.000	43.390.936.225	58,58%
	b. Pendapatan Hasil Kerja Sama Lembaga/Badan Usaha	11.191.586.000	387.500.000	3,46%
	c. Pendapatan Jasa Layanan Perbankan BLU	0	230.267.238	-
	d. Penerimaan Kembali Belanja Barang BLU Tahun Anggaran Yang Lalu	0	990.611.938	-
	e. Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Ruangan	0	126.300.000	-
3	**Pendapatan Non Fungsional**			
	a. Pendapatan dari Penjualan Tanah, Gedung, dan Bangunan	0	0	-
	b. Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	0	1.090.898.556	-
	c. Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	200.000.000	0	0,00%
	d. Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	58.699.354.000	1.822.534.238	3,10%
	e. Pendapatan Sewa Peralatan dan Mesin	2.295.390.000	1.086.948.682	47,35%
	f. Pendapatan Hasil Pengembalian Uang Negara	0	0	-
	g. Pendapatan Jasa Lainnya	0	1.789.578.000	-
	h. Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	0	2.408.959.082	-
	i. Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	33.404.225	-
	j. Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	0	2.259.856.067	-
	k. Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu	0	22.271.147.941	-
	l. Penerimaan Kembali Belanja Subsidi Tahun Anggaran Yang Lalu	0	791.068.121	-

No	Jenis Pendapatan	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
	m. Pendapatan Anggaran Lain-lain	0	0	-
JUMLAH		**1.261.333.553.000**	**326.129.056.118**	**25,86%**

A. Perbandingan Target Triwulan dan Tahunan dengan Realisasi Kinerja

Dengan realisasi PNBP sebesar 25,86% dari target Triwulan II 2024 sebesar 10%, maka diperoleh capaian kinerja sebesar 258,60% dan dibandingkan dengan target tahunan diperoleh capaian kinerja sebesar 25,86%. Rincian target dan realisasi kinerja per Triwulan Tahun 2024 dapat dilihat pada Tabel dan Gambar berikut.

Tabel 2-19 Capaian Kinerja Target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Tahun 2024

Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja Tahunan	Target Kinerja Triwulan				Realisasi Kinerja Triwulan				Capaian Kinerja Triwulan (%)				Capaian Kinerja Tahunan (%)
			I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	
Persentase Realisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Bidang Perkeretaapian	%	100	3	10	41	100	23,12	25,86	-	-	770,67	258,60	-	-	25,86

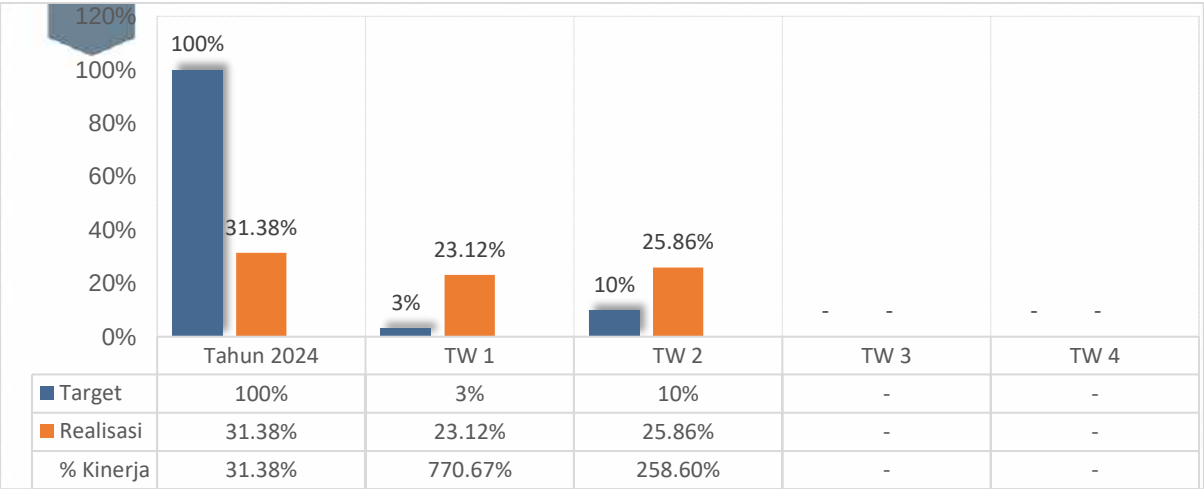

Gambar 2-8 Capaian Kinerja PNBP Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2024

B. Analisis Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Target

Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2024 sampai posisi 30 Juni 2024 sebesar

Rp326.129.056.118,00 (25,86% dari Target sebesar Rp1.261.333.553.000,00). Belum optimalnya pencapaian PNBP pada Semester I Tahun 2024 diantaranya pada akun Jenis Pendapatan Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana Perkeretaapian khususnya penggunaan prasarana milik negara melalui *Track Access Charge* (TAC) serta Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan. Selain itu, Pendapatan Hasil Kerja Sama Lembaga/Badan Usaha juga realisasi masih rendah dibandingkan target.

Terkait TAC, terdapat permohonan keringanan Tahun 2023 oleh PT. KAI dan PT. KCI yang masih menunggu persetujuan keringanan dari Kementerian Keuangan serta pelaksanaan *TAC* Tahun 2024 yang masih menunggu persetujuan Kementerian Keuangan atas besaran Satuan Biaya Penggunaan Prasarana (SBPP) dan Faktor Prioritas (Fp). Saat ini telah terbit Peraturan Menteri Keuangan Nomor 20 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 138/PMK.02/2021 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Bersifat Volatil dan Kebutuhan Mendesak yang berlaku pada Kementerian Perhubungan sebagai pedoman dalam pelaksanaan Track Access Charge Tahun 2024.

Dalam pelaksanaan TAC Tahun 2024 akan mengacu pada Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 8 Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Direktorat Jenderal Perkeretaapian yang mencabut Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 84 Tahun 2016 yang telah mengatur mekanisme self assesment dan jatuh tempo per semester untuk TAC Tahun 2024. Terkait Satuan Biaya Penggunaan Prasarana (SBPP) dan Faktor Prioritas (Fp) telah diterbitkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 14 Tahun 2024 tentang Pedoman Perhitungan Biaya Penggunaan Prasarana Perkeretaapian yang mencabut Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 122 Tahun 2015.

Terkait belum optimalnya pendapatan sewa tanah, gedung dan bangunan diantaraya karena masih dilakukan proses penilaian KPKNL pada Depo Solo Jebres dengan perkiraan nilai sewa sebesar Rp11,9 Milyar dan Depo Depok sekitar Rp37 Milyar. Untuk pendapatan hasil kerja sama lembaga/badan usaha juga perlu ditingkatkan dengan pengoptimalan peran BLU.

C. Perbandingan Kinerja di Level Nasional / Internasional

Analisa perbandingan kinerja dilakukan terhadap capaian PNBP di tingkat Kementerian Perhubungan mengacu pada data SPAN sebagaimana tertuang pada Tabel berikut:

Tabel 2-20 Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Per-Unit Eselon I Kementerian Perhubungan Periode Triwulan II 2024

No	Unit Kerja	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Sekretariat Jenderal	4.274.132.000	2.611.535.431	61,10%
2	Direktorat Jenderal Perhubungan Darat	1.496.646.998.000	668.164.943.688	44,64%
3	Direktorat Jenderal Perhubungan Laut	4.464.918.382.000	3.118.858.343.674	69,85%
4	Direktorat Jenderal Perhubungan Udara	1.485.343.929.000	896.576.012.626	60,36%
5	Direktorat Jenderal Perkeretaapian	1.261.333.553.000	326.129.056.118	25,86%
6	BKT	0	1.133.845.997	100,00%
7	BPSDM	1.322.130.259.000	700.948.872.712	53,02%
8	BPTJ	10.158.650.000	10.069.452.236	99,12%
Jumlah		**10.044.805.903.000**	**5.724.492.062.482**	**51,74%**

Mengacu pada Tabel di atas, diperoleh bahwa perolehan kinerja PNBP Direktorat Jenderal Perkeretaapian paling rendah dibandingkan unit kerja lainnya di lingkungan Kementerian Perhubungan (posisi 7 dari 7 unit kerja yag memiliki target PNBP). Berdasarkan besaran nilai PNBP yang tertinggi diperoleh dari unit Direktorat Jenderal Perhubungan Laut yang mencapai Rp3,11 triliun. Untuk itu mengejar ketertinggalan dibandingkan unit kerja lainnya, diperlukan upaya-upaya percepatan realisasi PNBP Direktorat Jenderal Perkeretaapian khususnya yang bersumber dari *Track Access Charge* (TAC).

D. Upaya Peningkatan Kinerja

Upaya perbaikan kedepan dalam rangka meningkatkan capaian kinerja Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) diantaranya:

1. Percepatan penagihan TAC Tahun 2024 sesuai ketentuan baru terkait besaran Satuan Biaya Penggunaan Prasarana (SBPP) dan Faktor Prioritas (Fp).

2. Koordinasi dan monitoring untuk percepatan proses penyelesaian penilaian KPKNL terhadap penggunaan Depo Solo Jebres dan Depo Depok.

Selain itu, diusulkan juga beberapa hal penyesuaian terhadap strategi/kebijakan, aktivitas dan anggaran untuk mendukung pencapaian kinerja, diantaranya:

1. Penyesuaian strategi/kebijakan:

a. Peningkatan peran BLU dengan kerjasama dengan lembaga/badan usaha melalui pengoptimalan layanan dan aset yang dimiliki guna peningkatan perolehan PNBP.

b. Diusulkan revisi rencana aksi pada Perjanjian Kinerja Tahun 2024 dikarenakan capaian kinerja Triwulan II 2024 tidak memenuhi kriteria *on the right track* (melebihi capaian kinerja 110%).

2. Penyesuaian aktivitas dan anggaran:

Lanjutan pelaksanaan sertifikasi aset tanah/barang milik negara dengan dukungan anggaran Tahun 2024 yang memadai.

PERSENTASE KUALITAS PELAKSANAAN ANGGARAN DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

Perhitungan persentase kualitas pelaksanaan anggaran berupa Nilai Kinerja Anggaran mengacu pada PMK Nomor 22/PMK.02/2021 dengan perhitungannya terdiri dari Capaian Sasaran Program, Capaian *Output* Program, Rata-rata NKA Satker, Penyerapan, Efisiensi dan Konsistensi, yang nilainya dapat diperoleh dengan perhitungan manual maupun data pada *Dashboard* Aplikasi Monev Kementerian Keuangan. Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran berupa Nilai Kinerja Anggaran (NKA) dikelompokkan berdasarkan kategori:

1. Lebih dari 90%: Kategori Sangat Baik;
2. 80% - 90%: Kategori Baik;
3. 60% - 80%: Kategori Cukup;
4. 50% - 60%: Kategori Kurang;
5. Kurang dari 50%: Kategori Sangat Kurang.

Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2024, ditargetkan persentase kualitas pelaksanaan anggaran Tahun 2024 sebesar 89,00% dan pada Triwulan II 2024 ditargetkan sebesar 40,68%. Adapun realisasi pada Triwulan II 2024 diperoleh sebesar 57,22% dengan rincian perhitungan sebagai berikut:

1. Capaian Sasaran Program (CSP): 95,99%.
2. Capaian *Output* Program (COP): 95,99%.
3. Konsistensi: 61,71%.
4. Nilai Efisiensi: 72,19%.
5. Rata-Rata NKA Satker: 25,23%.
6. Penyerapan: 20,68%.

A. Perbandingan Target Triwulan dan Tahunan dengan Realisasi Kinerja

Realisasi kualitas pelaksanaan anggaran Direktorat Jenderal Perkeretaapian pada Triwulan II 2024 sebesar 57,22% mengacu metode perhitungan PMK Nomor 22/PMK.02/2021. Dengan realisasi kinerja tersebut, diperoleh capaian kinerja sebesar 140,66% dari target Triwulan II 2024 dan capaian kinerja sebesar 64,29% dari target Tahun 2024. Rincian target dan realisasi kinerja per Triwulan 2024 dapat dilihat pada Tabel dan Gambar berikut.

Tabel 2-21 Capaian Kinerja Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2024

Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja Tahunan	Target Kinerja Triwulan				Realisasi Kinerja Triwulan				Capaian Kinerja Triwulan (%)				Capaian Kinerja Tahunan (%)
			I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	
Persentase kualitas pelaksanaan anggaran	%	89,00	26,74	40,68	56,30	89,00	53,14	57,22	-	-	198,73	140,66	-	-	64,29

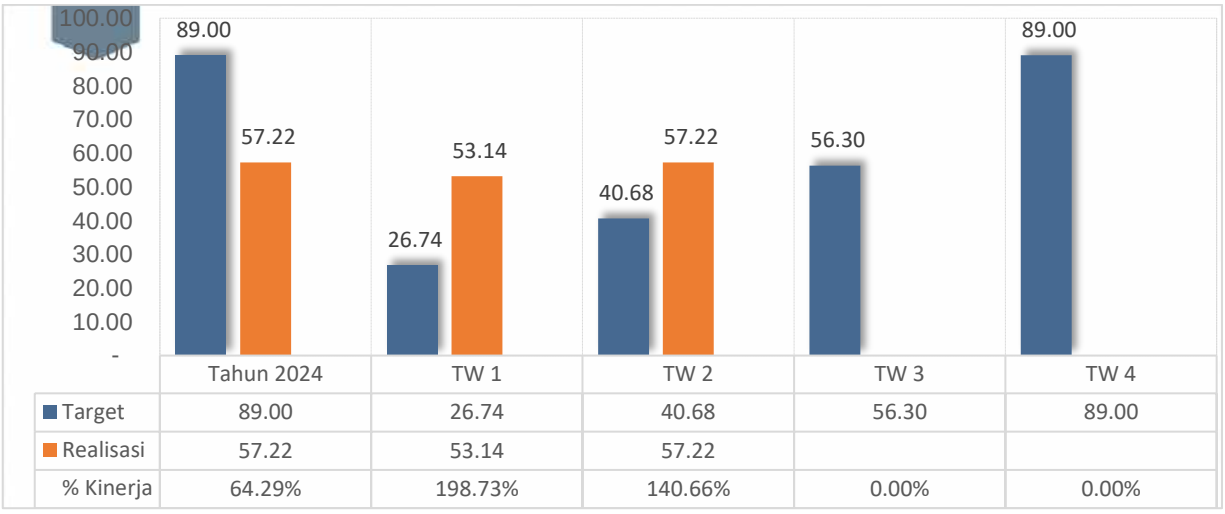

Gambar 2-9 Capaian Kinerja Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2024

B. Analisis Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Target

Berdasarkan Daftar Isian Pelaksana Anggaran (DIPA) Induk Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2024 Nomor SP. DIPA-022.08-0/2024, alokasi anggaran Direktorat Jenderal Perkeretaapian sebesar Rp.9.687.720.000.000,- sedangkan untuk posisi s.d Juni 2024 terdapat perubahan anggaran menjadi sebesar Rp10.669.069.412.000,- dengan uraian sebagai berikut:

1. Pencantuman catatan halaman IVA DIPA/blokir dalam rangka memenuhi kewajiban *Automatic Adjustment* (AA) sebesar Rp200.768.903.000,00 (tidak merubah pagu) pada tanggal 29 Januari 2024;
2. Lanjutan pelaksanaan kegiatan/proyek SBSN Tahun Anggaran sebelumnya (Tahun 2023) yang dilanjutkan pada Tahun 2024 untuk pekerjaan Penanganan Daerah Rawan dan Jembatan lintas Prabumulih-Tarahan sebesar Rp11.334.966.387,00 pada tanggal 7 Maret 2024;
3. Revisi anggaran pada tanggal 16 Maret 2024 berupa revisi:
    a. Lanjutan/luncuran pelaksanaan kegiatan/proyek SBSN Tahun Anggaran sebelumnya (Tahun 2023) untuk kontrak tahun jamak yang dilanjutkan pada Tahun 2024 untuk pekerjaan Pembangunan Jalur KA Medan – Binjai sebesar Rp62.169.940.305,00; dan
    b. Pergeseran anggaran belanja antar kegiatan kontrak tahun jamak dalam rangka pengembalian peminjaman pagu kegiatan sumber dana SBSN yang dilakukan Tahun 2023 di lingkungan Ditjen Perkeretaapian sebesar Rp272.403.123.263,00.
4. Revisi anggaran pada tanggal 2 April 2024 berupa revisi:
    a. Lanjutan/luncuran pelaksanaan kegiatan/proyek SBSN Tahun Anggaran sebelumnya (Tahun 2023) untuk kontrak tahun jamak yang dilanjutkan pada Tahun 2024 di lingkungan Ditjen Perkeretaapaian, sebesar Rp879.237.030.366,00;
    b. Penambahan anggaran/percepatan penarikan PLN JICA IP-569 kegiatan *Engineering Services For Jakarta Mass Rapid Transit East-West Line Project Phase I* pada Satker Pengembangan, Peningkatan dan Perawatan Prasarana Perkeretaapian sebesar Rp33.000.000.000,00;

c. Revisi informasi kinerja berupa perubahan nomenklatur Rincian *Output* (RO) yakni :

1) ***Semula***: Pembangunan Fasilitas Perkeretaapian untuk Manggarai- Jatinegara (Paket A Tahap III Stage I);
2) ***Menjadi***: Pembangunan Fasilitas Perkeretaapian untuk Manggarai- Jatinegara (Paket A Tahap III).

Adapun untuk realisasi anggaran Direktorat Jenderal Perkeretaapian periode Triwulan II 2024 diperoleh sebesar Rp1.681.062.146.308,- (15,76%), dengan uraian sebagai berikut.

Tabel 2-22 Realisasi Anggaran Direktorat Jenderal Perkeretaapian Per Jenis Belanja Tahun 2024

No.	Jenis Belanja / Pembiayaan	Pagu (Rp)		Realisasi Anggaran		Sisa Anggaran	
		Pagu Sesuai PK 2024	Pagu Terakhir	Nilai (Rp)	%	Nilai (Rp)	%
1	Belanja Pegawai	151.000.000.000	151.273.439.000	104.073.583.127	68,80	47.199.855.873	31,20
2	Belanja Barang	2.935.900.000.000	2.930.349.751.000	357.606.349.511	12,29	2.551.963.512.489	87,71
3	Belanja Modal	6.591.100.000.000	7.587.446.222.000	1.219.382.213.670	16,03	6.388.843.897.330	83,97
Total		**9.678.000.000.000**	**10.669.069.412.000**	**1.681.062.146.308**	**15,76**	**8.988.007.265.692**	**84,24**

Selain aspek penyerapan anggaran, penilaian kinerja kualitas pelaksanaan anggaran juga mempertimbangkan konsistensi, pencapaian *output* dan sasaran program. Dalam meningkatkan capaian kinerja kualitas pelaksanaan anggaran telah dilakukan koordinasi dengan seluruh Satuan Kerja untuk dapat meningkatkan kinerja dengan melakukan pelaporan capaian *output* pada Aplikasi SAKTI dan perubahan/*update* berkala (setiap bulan) terhadap Rencana Penarikan Dana pada Halaman III DIPA guna meningkatkan Nilai Konsistensi. Beberapa faktor pencapaian kinerja pada Triwulan II 2024 sebagai berikut:

1. Perolehan nilai kinerja anggaran Direktorat Jenderal Perkeretaapian cukup tinggi dikarenakan tingginya Capaian Sasaran Program (CSP) dan Capaian Keluaran Program (CKP) untuk Unit Eselon I.
2. Dibandingkan dengan perolehan NKA pada Triwulan I 2024 terdapat dua komponen yang megalami kenaikan cukup tinggi yaitu efisiensi anggaran.

Kenaikan nilai efisiensi cukup tinggi dikarenakan pada pertengahan tahun sudah cukup banyak target volume *output* yang terealisasi.

3. Pelaksanaan revisi anggaran, revisi Rencana Penarikan Dana (RPD) dan pelaporan realisasi *output* pada aplikasi SAKTI rutin dilakukan setiap bulan guna meningkatkan Capaian *Output*, Konsistensi serta efisiensi penggunaan anggaran.
4. Untuk komponen penyerapan anggaran masih rendah menjadi hal yang perlu segera ditingkatkan melalui percepatan pelaksanaan kegiatan dan identifikasi kendala/hambatan.

C. Perbandingan Kinerja di Level Nasional / Internasional

Dalam rangka *benchmarking* kinerja, dilakukan perbandingan antara unit eselon I di lingkungan Kementerian Perhubungan serta perbandingan antara Kementerian/Lembaga guna menghasilkan analisa yang komprehensif. Untuk indikator persentase kualitas pelaksanaan anggaran, dilakukan analisa perbandingan terhadap salah satu komponen penilaian kualitas pelaksaan anggaran yakni penyerapan anggaran. Penyerapan/realisasi anggaran diperoleh dari aplikasi SPAN dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2-23 Realisasi Anggaran Unit Kerja/Kementerian/Lembaga Lainnya Periode Triwulan II 2024

No	Nama Kementerian/Lembaga	Total Pagu	Total Realisasi	Persentase
1	PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN	243,769,626,000	164,066,081,610	67.3%
2	MAHKAMAH KONSTITUSI RI	607,819,406,000	391,871,443,929	64.47%
3	BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL	4,340,261,676,000	2,555,558,294,621	58.88%
4	KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA	123,433,165,839,000	70,925,568,966,551	57.46%
5	DEWAN PERWAKILAN DAERAH (DPD)	1,186,851,261,000	670,559,659,536	56.5%
6	MAHKAMAH AGUNG	11,905,080,170,000	6,649,182,964,643	55.85%
7	DEWAN KETAHANAN NASIONAL	51,076,890,000	28,191,038,372	55.19%
8	KEMENTERIAN AGAMA	74,615,699,223,000	41,015,717,208,641	54.97%
9	BADAN PENGAWASAN PEMILIHAN UMUM	11,611,620,116,000	6,315,664,186,775	54.39%
10	BADAN INTELIJEN NEGARA	18,751,832,924,000	10,185,546,655,013	54.32%
11	BADAN KEAMANAN LAUT	1,056,145,397,000	565,454,901,250	53.54%
12	SEKRETARIAT KABINET	452,572,973,000	241,447,171,871	53.35%
13	KEMENTERIAN KEUANGAN	58,376,527,015,000	31,076,697,630,510	53.23%
14	DEWAN PERWAKILAN RAKYAT	6,101,766,009,000	3,245,680,444,357	53.19%
15	KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA	121,569,314,000	64,652,241,988	53.18%
16	BADAN PEMERIKSA KEUANGAN	4,923,196,963,000	2,605,548,448,102	52.92%
17	KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI	1,377,179,459,000	715,908,458,306	51.98%
18	BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA	783,765,194,000	405,192,112,932	51.7%
19	BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN	232,574,309,000	119,419,670,664	51.35%
20	BADAN NARKOTIKA NASIONAL	1,558,487,912,000	791,677,109,445	50.8%

No	Nama Kementerian/Lembaga	Total Pagu	Total Realisasi	Persentase
21	KEMENTERIAN PERTAHANAN	144,737,600,271,000	73,015,309,293,747	50.45%
22	KOMISI PEMILIHAN UMUM	43,820,155,543,000	22,068,547,036,346	50.36%
23	LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL	187,208,445,000	93,959,816,220	50.19%
24	BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR	131,674,845,000	65,922,037,128	50.06%
25	KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA	133,730,876,000	66,703,984,679	49.88%
26	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN	524,042,273,000	260,706,405,516	49.75%
27	KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA	18,624,036,896,000	9,239,300,928,934	49.61%
28	KEMENTERIAN SOSIAL	79,287,718,596,000	39,264,669,717,277	49.52%
29	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM DAN KEAMANAN	332,790,179,000	163,898,708,401	49.25%
30	LEMBAGA SANDI NEGARA	778,405,567,000	381,685,601,218	49.03%
31	BADAN PUSAT STATISTIK	4,774,186,692,000	2,336,827,455,161	48.95%
32	BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN	2,354,321,946,000	1,143,487,393,437	48.57%
33	KEMENTERIAN KESEHATAN	92,851,091,285,000	44,814,638,004,201	48.27%
34	ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA	283,568,272,000	136,322,356,583	48.07%
35	LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA	312,277,135,000	149,881,883,242	48%
36	KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	311,636,724,000	149,521,052,137	47.98%
37	BADAN PERLINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA	530,513,681,000	253,752,189,722	47.83%
38	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN	342,941,526,000	162,966,466,580	47.52%
39	KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN	7,686,995,598,000	3,571,635,696,869	46.46%
40	KEMENTERIAN LUAR NEGERI	8,856,121,610,000	4,090,840,504,905	46.19%
41	KOMISI YUDISIAL RI	170,866,562,000	78,656,245,908	46.03%
42	BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN	2,579,602,392,000	1,178,992,034,092	45.7%
43	BADAN STANDARDISASI NASIONAL	230,848,645,000	105,011,338,216	45.49%
44	KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI	466,641,906,000	212,068,711,597	45.45%
45	KEMENTERIAN PERDAGANGAN	1,967,270,125,000	893,461,157,373	45.42%
46	OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA	248,841,107,000	112,264,608,855	45.11%
47	MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT	924,541,351,000	414,122,076,633	44.79%
48	LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA	1,047,743,936,000	464,012,337,764	44.29%
49	LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN	279,461,666,000	123,750,538,702	44.28%
50	KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI	2,987,429,783,000	1,308,372,597,647	43.8%
51	KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA	308,016,126,000	131,213,441,181	42.6%
52	KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI	20,726,993,725,000	8,791,780,164,505	42.42%
53	BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA	2,349,149,237,000	990,762,224,697	42.18%
54	BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA (BPIP)	342,269,037,000	144,184,639,653	42.13%
55	KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL	101,752,690,770,000	42,194,995,050,413	41.47%
56	BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL	5,892,457,975,000	2,401,192,750,553	40.75%
57	KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN	3,791,033,656,000	1,533,259,526,207	40.44%
58	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN	286,143,060,000	115,534,530,771	40.38%
59	LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH	244,786,416,000	97,846,077,491	39.97%
60	BADAN KARANTINA INDONESIA	1,366,345,187,000	538,962,313,186	39.45%
61	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN	6,935,776,721,000	2,727,639,041,761	39.33%
62	BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKA	2,790,519,777,000	1,084,783,229,239	38.87%
63	KEMENTERIAN PARIWISATA	3,534,132,141,000	1,371,693,672,141	38.81%
64	KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA	3,679,515,578,000	1,382,014,462,608	37.56%
65	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN	43,451,373,242,000	16,285,310,441,791	37.48%
66	KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	8,385,909,288,000	3,128,011,749,411	37.3%
67	LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TELEVISI REPUBLIK INDONESIA	1,573,228,177,000	581,047,193,166	36.93%
68	OTORITA IBU KOTA NUSANTARA	543,366,166,000	200,620,691,508	36.92%
69	KEMENTERIAN DALAM NEGERI	5,037,989,450,000	1,799,957,756,294	35.73%
70	KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL	2,166,022,013,000	755,588,012,912	34.88%
71	KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	17,585,074,301,000	6,126,371,860,524	34.84%
72	PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA	725,830,194,000	249,259,067,772	34.34%
73	BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN (BASARNAS)	2,102,360,067,000	710,796,483,858	33.81%
74	KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAH RAGA	2,444,006,003,000	823,171,842,200	33.68%
75	KEMENTERIAN PERTANIAN	15,517,449,694,000	5,116,747,109,103	32.97%
76	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT	162,399,605,015,000	52,300,614,976,320	32.2%
77	KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN	6,101,369,769,000	1,930,493,070,200	31.64%
78	BADAN KOORDINASI SURVEI DAN PEMETAAN NASIONAL	835,766,073,000	252,883,230,552	30.26%
79	BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL	1,229,295,942,000	363,575,496,291	29.58%
80	KEMENTERIAN KOPERASI DAN PENGUSAHA KECIL DAN MENENGAH	1,497,938,999,000	421,402,107,748	28.13%
81	BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME	827,085,425,000	232,614,642,163	28.12%
82	KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	6,916,511,482,000	1,923,333,584,983	27.81%
83	BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG	62,306,538,000	17,230,870,493	27.65%
84	BADAN PENGUSAHA KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM	2,853,953,971,000	686,899,837,024	24.07%
85	BADAN PANGAN NASIONAL	15,877,809,602,000	530,571,572,126	3.34%

Tabel 2-24 Realisasi Anggaran Per-Unit Eselon I Periode Triwulan II 2024

NO	Eselon 1	Keterangan	Jenis Belanja								Total
			Pegawai	Barang	Modal	Bekan Bunga	Subsidi	Hibah	BanSos	LainLain	Transfer	
1	02201 | SEKRETARIAT JENDERAL	PAGU	155,967,700,000	442,326,703,000	56,501,202,000	0	0	0	0	0	0	654,795,605,000
		REALISASI	84,442,750,853 (54.14%)	177,853,678,700 (40.21%)	17,200,854,871 (30.44%)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	279,497,284,423 (42.68%)
		SISA	71,524,949,147	264,473,024,291	39,300,347,129	0	0	0	0	0	0	375,298,320,567
2	02202 | INSPEKTORAT JENDERAL	PAGU	48,178,409,000	59,786,102,000	5,959,221,000	0	0	0	0	0	0	113,924,822,000
		REALISASI	28,841,693,921 (59.45%)	27,343,976,538 (45.75%)	1,983,851,052 (33.17%)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	57,969,521,509 (50.88%)
		SISA	19,536,715,079	32,422,215,464	3,996,369,948	0	0	0	0	0	0	55,955,300,491
3	02203 | DITJEN PERHUBUNGAN DARAT	PAGU	604,812,828,000	3,854,381,971,000	2,231,827,268,000	0	0	0	0	0	0	6,690,822,067,000
		REALISASI	367,336,304,501 (60.75%)	1,275,604,063,019 (33.09%)	753,360,611,303 (33.76%)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	2,396,200,978,823 (35.81%)
		SISA	237,276,523,499	2,578,777,907,981	1,478,466,656,697	0	0	0	0	0	0	4,294,021,088,177
4	02204 | DITJEN PERHUBUNGAN LAUT	PAGU	1,786,958,720,000	5,417,967,468,000	5,659,260,102,000	0	0	0	0	0	0	12,874,186,290,000
		REALISASI	1,049,594,614,579 (58.41%)	1,768,661,362,732 (32.64%)	2,740,893,775,993 (48.43%)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	5,559,149,753,304 (43.18%)
		SISA	747,364,705,421	3,649,406,105,268	2,918,366,326,007	0	0	0	0	0	0	7,315,137,136,696
5	02205 | DITJEN PERHUBUNGAN UDARA	PAGU	958,944,111,000	3,264,057,620,000	3,980,517,084,000	0	0	0	0	0	0	8,203,518,815,000
		REALISASI	579,187,851,336 (60.40%)	1,239,917,348,166 (38.10%)	1,402,096,291,567 (35.14%)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	3,221,201,491,069 (39.27%)
		SISA	379,756,259,664	2,014,140,271,834	2,578,420,792,433	0	0	0	0	0	0	4,982,317,323,931
6	02206 | DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN	PAGU	151,270,439,000	2,909,612,862,000	7,608,183,111,000	0	0	0	0	0	0	10,669,066,412,000
		REALISASI	104,073,583,127 (68.80%)	357,606,348,511 (12.29%)	1,219,382,213,670 (16.03%)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	1,681,062,146,308 (15.76%)
		SISA	47,196,855,873	2,552,006,512,489	6,388,800,897,330	0	0	0	0	0	0	8,988,007,265,692
7	02211 | BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERHUBUNGAN	PAGU	46,756,254,000	143,537,606,000	6,161,480,000	0	0	0	0	0	0	196,457,340,000
		REALISASI	23,256,168,381 (49.74%)	54,457,266,046 (37.94%)	3,776,116,260 (61.32%)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	81,491,550,687 (41.48%)
		SISA	23,500,085,619	89,080,339,954	2,385,363,740	0	0	0	0	0	0	114,965,789,313
8	02212 | BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN	PAGU	349,277,066,000	2,685,408,431,000	703,741,383,000	0	0	0	0	0	0	3,718,424,880,000
		REALISASI	188,216,124,751 (53.90%)	1,134,279,660,748 (42.56%)	167,433,174,199 (23.79%)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	1,489,928,949,708 (40.07%)
		SISA	161,060,941,249	1,551,128,780,252	536,308,208,804	0	0	0	0	0	0	2,228,495,930,295
9	02213 | BADAN PENGELOLA TRANSPORTASI JABODETABEK	PAGU	35,964,792,000	223,365,067,000	70,904,212,000	0	0	0	0	0	0	330,174,011,000
		REALISASI	20,955,408,465 (58.30%)	86,547,851,981 (38.76%)	21,826,134,149 (30.78%)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	129,329,194,595 (39.17%)
		SISA	14,949,383,535	136,817,355,019	49,078,077,851	0	0	0	0	0	0	200,844,816,405
GRAND TOTAL		PAGU	4,147,875,219,000	18,976,421,860,000	20,333,976,063,000	0	0	0	0	0	0	43,458,273,242,000
		REALISASI	2,445,763,899,924 (58.96%)	6,122,071,347,448 (32.27%)	6,327,955,023,061 (31.12%)	(0.00%)	(0.00%)	(0.00%)	(0.00%)	(0.00%)	(0.00%)	14,895,730,270,433 (34.28%)
		SISA	1,702,171,419,076	12,848,350,512,552	14,006,121,039,939	0	0	0	0	0	0	28,555,642,971,567

Mengacu Tabel di atas, diperoleh bahwa capaian realisasi anggaran pada Triwulan II 2024 pada 84 Kementerian/Lembaga rata-rata sebesar 44,06%. Nilai tersebut menunjukkan bahwa realisasi anggaran Direktorat Jenderal Perkeretaapian (15,76%) masih sangat rendah dibawah rata-rata apabila dibandingkan dengan Unit Kerja/Kementerian/Lembaga lainnya secara nasional maupun di internal Kementerian Perhubungan.

Di internal Kementerian Perhubungan, realisasi anggaran Direktorat Jenderal Perkeretaapian juga masih dibawah rata-rata dimana realisasi Kementerian Perhubungan sebesar 34,28%. Oleh karena itu, diperlukan upaya-upaya secara masif dan nyata guna meningkatkan kinerja penyerapan anggaran dengan tetap memperhatikan capaian *output* dan *outcome* kegiatan yang telah dilaksanakan serta perlu menunjukkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan anggaran.

D. Upaya Peningkatan Kinerja

Beberapa upaya yang perlu dilaksanakan dalam rangka meningkatkan capaian kinerja kualitas pelaksanaan anggaran antara lain:

1. Koordinasi intensif dengan instansi terkait (Kementerian Keuangan, Bappenas, KSP, Setjen dan Itjen Kemenhub) untuk dukungan percepatan optimalisasi anggaran melalui relaksasi AA, usulan rekomposisi SBSN dan dispensasi perpanjangan kontrak tahun jamak.
2. Percepatan penugasan penyelenggaraan IMO Tahun 2024 sehingga dapat segera kontrak dan dilaksanakan oleh masing-masing Balai Teknik Perkeretaapian.
3. Koordinasi dengan seluruh unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian untuk Pengusulan Standar Biaya Keluaran (SBK) Tahun 2025 masing-masing Rincian *Output* agar dapat meningkatkan Variabel penilaian kinerja anggaran sesuai dengan PMK Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan.

Selain itu, diusulkan juga beberapa hal penyesuaian terhadap strategi/kebijakan, aktivitas dan anggaran untuk mendukung pencapaian kinerja, diantaranya:

1. Penyesuaian strategi/kebijakan:

Kegiatan yang ditargetkan selesai Tahun 2024 namun diproyeksi tidak dapat terselesaikan sesuai target, maka akan diusulkan perpanjangan MYC/perubahan skema dari SYC menjadi MYC, termasuk juga diperlukan evaluasi target *output*nya.

2. Penyesuaian aktivitas dan anggaran:

Diusulkan revisi rencana aksi pada Perjanjian Kinerja Tahun 2024 dikarenakan capaian kinerja Triwulan II 2024 tidak memenuhi kriteria *on the right track* (melebihi capaian kinerja 110%).

3. Penyesuaian organisasi/penempatan pegawai:

a. Penempatan pegawai untuk posisi strategis pengelola anggaran yang memiliki kompetensi manajemen risiko
b. Pelatihan kepada operator pelaporan untuk aplikasi SAKTI agar dapat menginput data sesuai ketentuan, valid dan tidak anomali.

TINGKAT KEPUASAN PELAYANAN PERKANTORAN DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

Tingkat kepuasan pelayanan perkantoran Direktorat Jenderal Perkeretaapian merupakan indikator kinerja dalam upaya pengukuran kinerja terhadap layanan perkantoran serta pemenuhan kebutuhan pegawai dan pimpinan dalam melaksanakan tugas dan fungsi sehingga dapat berjalan lancar. Kegiatan layanan perkantoran diantaranya berupa layanan prasarana dan sarana internal terkait dukungan kegiatan perkantoran serta juga terkait pengelolaan SDM dan ketatausahaan di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian.

Tingkat kepuasan pelayanan perkantoran diperoleh dari hasil survey kepuasan kepada pegawai Direktorat Jenderal Perkeretaapian yang memperoleh layanan terkait SDM, ketatausahaan dan kerumahtanggaan. Pelaksanaan survei tersebut dilaksanakan kepada seluruh pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian setiap triwulan melalui *google form* yang disebarkan diantaranya melalui Portal Aplikasi Direktorat Jenderal Perkeretaapian.

Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2024, ditargetkan tingkat kepuasan pelayanan perkantoran Direktorat Jenderal Perkeretaapian dengan nilai 3,70 baik target pada Triwulan II maupun target Tahun 2024. Pada Triwulan II 2024, telah dilaksanakan survey dengan pengisian kuisioner oleh 236 pegawai dari 1.586 pegawai (15%) dan diperoleh tingkat kepuasan pelayanan perkantoran dengan nilai 3,87. Adapun hasil survey diuraikan sebagai berikut:

Tabel 2-25 Uraian Hasil Survei Tingkat Kepuasan Pelayanan Triwulan II 2024

No	Uraian	Respon					Total	*Top Two*	Nilai
		Tidak Baik	Kurang Baik	Cukup	Baik	Sangat Baik			
1	Kepuasaan Layanan SDM/ Kepegawaian	8	56	373	894	321	1.652	0,96	3,81
2	Kepuasaan Layanan Tata Usaha	0	31	361	940	320	1.652	0,98	3,91
3	Kepuasaan Layanan Rumah Tangga/ Umum	1	47	501	1.311	500	2.360	0,98	3,90
Nilai									**3,87**

Tingkat kepuasan pelayanan perkantoran Ditjen Perkeretaapian dihitung menggunakan metode *Customer Satisfaction* (CSAT) *Top 2 Boxes* (T2B) dan berdasarkan jumlah sampel diperoleh asumsi nilai *error* sebesar 6%.

A. Perbandingan Target Triwulan dan Tahunan dengan Realisasi Kinerja

Dengan realisasi tingkat kepuasan pelayanan perkantoran pada Triwulan II 2024 sebesar 3,87 dan target yang ditetapkan pada Tahun 2024 sebesar 3,70, maka diperoleh capaian kinerja sebesar 104,6%. Rincian target dan realisasi per triwulan tingkat kepuasan pelayanan perkantoran Tahun 2024 dapat dilihat pada Tabel dan Gambar berikut.

Tabel 2-26 Capaian Kinerja Tingkat Kepuasan Pelayanan Perkantoran Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2024

Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja Tahunan	Target Kinerja Triwulan				Realisasi Kinerja Triwulan				Capaian Kinerja Triwulan (%)				Capaian Kinerja Tahunan (%)
			I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	
Tingkat Kepuasan Pelayanan Perkantoran	Nilai	3,70	3,70	3,70	3,70	3,70	3,13	3,87	-	-	84,59	104,6	-	-	84,59

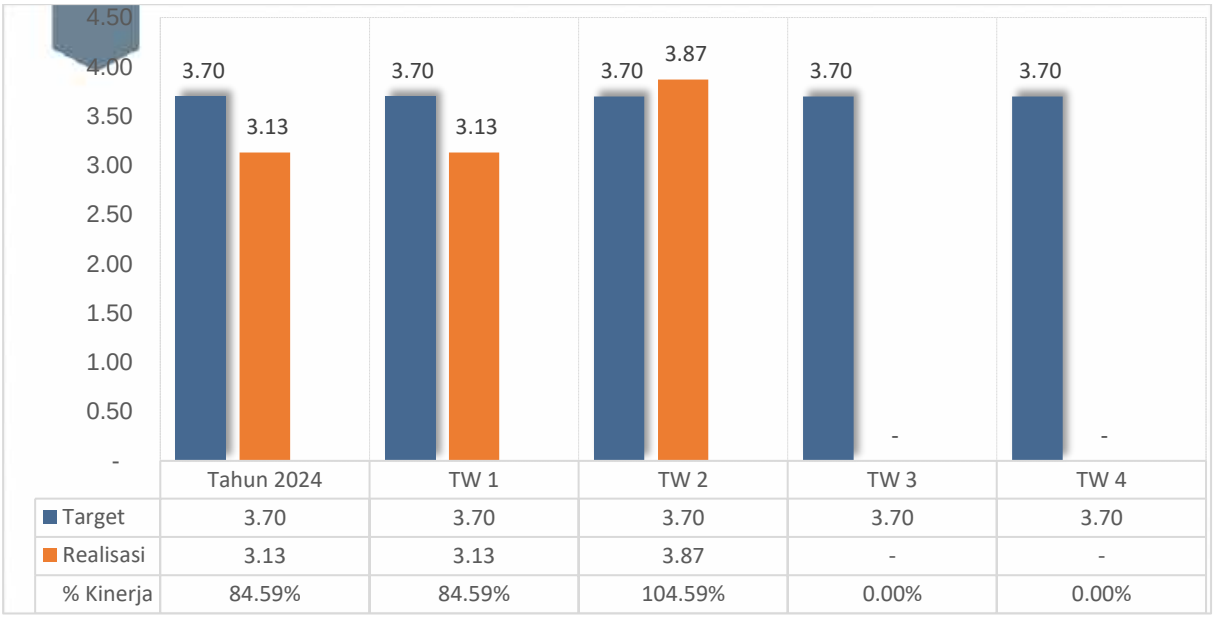

Gambar 2-10 Capaian Kinerja Tingkat Kepuasan Pelayanan Perkantoran Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2024

B. Analisis Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Target

Tersedianya fasilitas dan layanan perkantoran memiliki pengaruh yang positif terhadap kualitas layanan internal terhadap pegawai dan pimpinan di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian. Terpenuhinya target tingkat kepuasan pegawai atas pelayanan perkantoran diantaranya karena beberapa faktor diantaranya:

1. Pelaksanaan sosialisasi pengembangan kompetensi ASN diantaranya melalui pendidikan dengan mekanisme Tugas Belajar guna meningkatkan pemahaman pegawai.
2. Pelaksanaan sosialisasi disiplin pegawai, kode etik dan tata cara penunjukan dan pengangkatan Pelaksana Harian dan Pelaksana Tugas serta Tata Cara Pemberian Cuti bagi ASN di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian..
3. Koordinasi dan monitoring pemanfaatan Portal Ditjen Perkeretaapian sebagai media persuratan/tata usaha.
4. Penyusunan proses bisnis dan reviu SOP layanan kepegawaian, tata usaha dan umum/kerumahtanggaan di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian yang saat ini masih dalam proses penyusunan Peta Lintas Fungsi/*Cross Functional Map* Direktorat Teknis. Penyusunan Proses Bisnis Direktorat Jenderal Perkeretaapian ditargetkan selesai pada bulan September 2024 untuk kemudian dilanjutkan dengan reviu SOP.
5. Meningkatnya jumlah pegawai yang melakukan pengisian survey dari Triwulan I 2024 yang sebelumnya hanya diisi oleh 54 pegawai pada Triwulan II 2024 diisi oleh 236 pegawai dari 1.586 pegawai (15%).

C. Upaya Peningkatan Kinerja

Upaya perbaikan kedepan dalam rangka mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja tingkat kepuasan pelayanan perkantoran diantaranya:

1. Penyelesaian dan penetapan proses bisnis di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian.
2. *Update* data kompetensi pegawai untuk mendukung Indeks Profesional ASN di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian pada Sistem Informasi Kepegawaian (SIK) Kementerian Perhubungan.

Selain itu, diusulkan juga beberapa hal penyesuaian terhadap strategi/kebijakan, aktivitas dan anggaran untuk mendukung pencapaian kinerja, diantaranya:

1. ***Penyesuaian strategi/kebijakan:***

   Reviu SOP agar *update* khususnya terkait pelaksanaan layanan kepegawaian, ketatausahaan dan umum/kerumahtanggaan.

2. ***Penyesuaian aktivitas dan anggaran:***

   Pelaksanaan kegiatan pembinaan SDM/kepegawaian secara intensif termasuk pemenuhan hak pegawai sesuai ketentuan.

2.3 CAPAIAN LAINNYA

Pada periode Triwulan II Tahun 2024, belum terdapat capaian/penghargaan untuk unit kerja Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian.

2.4 REALISASI ANGGARAN

Berdasarkan Daftar Isian Pelaksana Anggaran (DIPA) Induk Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun Anggaran 2024 Nomor SP. DIPA-022.08-0/2024, alokasi anggaran Direktorat Jenderal Perkeretaapian adalah sebesar Rp9.687.720.000.000,- yang kemudian pada akhir Triwulan II 2024 mengalami perubahan menjadi Rp10.669.069.412.000,-. Perubahan alokasi pagu pada unit Eselon I tersebut tidak berpengaruh terhadap pagu Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian dimana pagu Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian sesuai DIPA awal sebesar Rp190.705.041.000,- dan pada akhir Triwulan II 2024 tidak mengalami perubahan (tetap).

2.4.1 REALISASI ANGGARAN UNIT KERJA

Realisasi anggaran Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian pada Triwulan II 2024 sebesar Rp73.723.801.585,- atau persentase sebesar 38,66% dari pagu Rp190.705.041.000,-. Rincian realisasi anggaran berdasarkan jenis belanja disampaikan sebagai berikut:

Tabel 2-27 Realisasi Anggaran Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian Berdasarkan Jenis Belanja Triwulan II 2024

No.	Jenis Belanja / Pembiayaan	Pagu (Rp)		Realisasi Anggaran		Sisa Anggaran	
		Pagu Sesuai PK	Pagu Saat Ini	Nilai (Rp)	%	Nilai (Rp)	%
1	Belanja Pegawai	66.368.423.000	66.368.423.000	43.496.181.210	65,54	22.872.241.790	34,46
2	Belanja Barang	113.364.214.000	113.364.214.000	26.756.522.225	23,60	86.607.691.775	76,40
3	Belanja Modal	10.972.404.000	10.972.404.000	3.471.098.150	31,63	7.501.305.850	68,37
Total		**190.705.041.000**	**190.705.041.000**	**73.723.801.585**	**38,66**	**116.981.239.415**	**61,34**

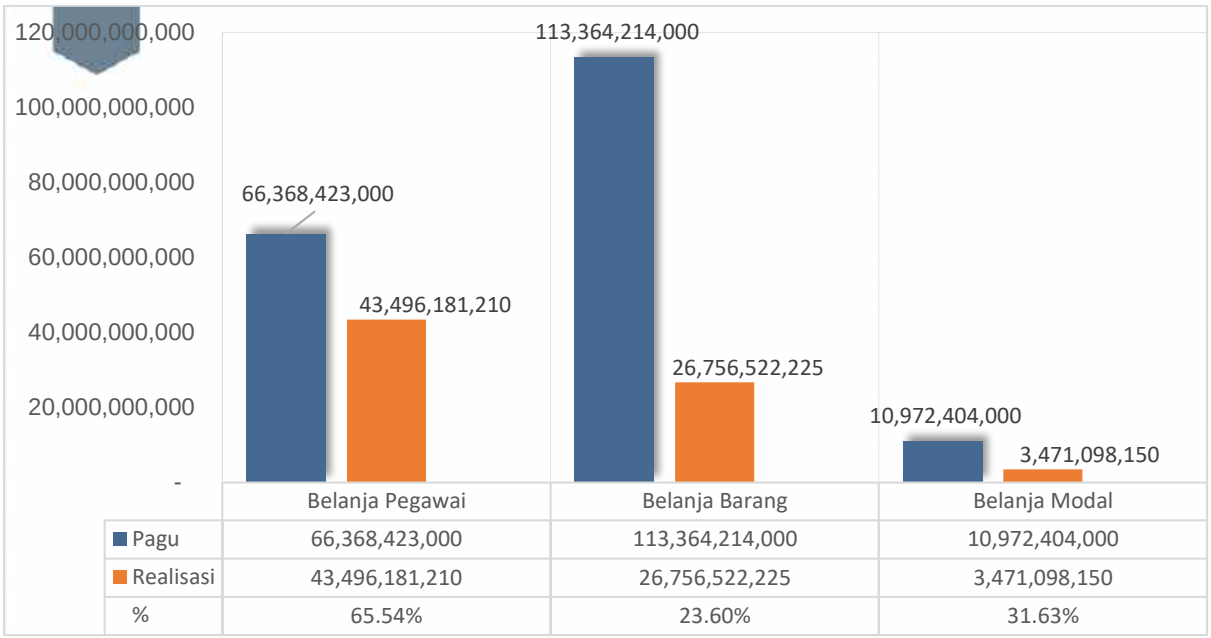

Gambar 2-11 Realisasi Anggaran Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian Berdasarkan Jenis Belanja Triwulan II 2024

2.4.2 REALISASI ANGGARAN PER INDIKATOR KINERJA

Penyerapan anggaran berbasis kinerja sudah seharusnya berpegang pada tiga prinsip, yaitu ekonomis, efisien dan efektif dengan memperhatikan dan membandingkan *input* atas *output* dan *outcome*. Realisasi anggaran berdasarkan sasaran dan indikator kinerja diuraikan sebagai berikut:

Tabel 2-28 Realisasi Anggaran Berdasarkan Sasaran dan Indikator Kinerja Kegiatan Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian Periode Triwulan II 2024

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Pagu (Rp)		Realisasi Anggaran (Rp)		Sisa Anggaran (Rp)	
			Pagu Sesuai PK	Pagu Saat Ini	Nilai	%	Nilai	%
1	Termanfaatkannya Kebijakan Pembinaan dan Peningkatan Konektivitas Perkeretaapian	Persentase rekomendasi kebijakan pembinaan dan peningkatan konektivitas perkeretaapian yang telah ditindaklanjuti	7.166.891.000	7.166.891.000	637.609.245	8,90%	6.529.281.755	91,10%
2	Terlaksananya Perumusan Regulasi dan Kebijakan dalam Penyelenggaraan Perkeretaapian	Persentase pencapaian target legislasi (rancangan dan peraturan perundangan) bidang perkeretaapian	6.255.254.000	6.255.254.000	1.235.941.369	19,76%	5.019.312.631	80,24%
3	Tersedianya SDM Perkeretaapian yang Berkompeten dan Profesional	Persentase ASN Ditjen Perkeretaapian yang memiliki sertifikat kompetensi/keahlian	11.117.036.000	11.808.202.000	3.780.776.675	32,02%	8.027.425.325	67,98%
4	Sistem Informasi dan Teknologi yang Andal	Persentase pemenuhan rencana induk Teknologi Informasi dan Komunikasi bidang perkeretaapian	3.923.109.000	3.923.109.000	447.559.000	11,41%	3.475.550.000	88,59%
5	Dukungan Publik terhadap Penyelenggaraan Perkeretaapian	Persentase pemenuhan publikasi Ditjen Perkeretaapian	11.503.441.000	11.503.441.000	2.913.072.238	25,32%	8.590.368.762	74,68%
6	Terwujudnya *good governance* dan *clean government* di lingkungan Ditjen Perkeretaapian	Nilai AKIP Ditjen Perkeretaapian	16.552.633.000	16.353.633.000	3.129.493.530	19,14%	13.224.139.470	80,86%
		Tingkat Maturasi SPIP Direktorat Jenderal Perkeretaapian	4.481.979.000	4.758.979.000	1.102.196.805	23,16%	3.656.782.195	76,84%

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Pagu (Rp)		Realisasi Anggaran (Rp)		Sisa Anggaran (Rp)	
			Pagu Sesuai PK	Pagu Saat Ini	Nilai	%	Nilai	%
		Persentase Realisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Bidang Perkeretaapian	6.270.812.000	6.070.812.000	2.147.388.727	35,37%	3.923.423.273	64,63%
		Persentase kualitas pelaksanaan anggaran Ditjen Perkeretaapian	7.959.221.000	7.947.221.000	1.538.797.280	19,36%	6.408.423.720	80,64%
		Tingkat Kepuasan Pelayanan Perkantoran Ditjen Perkeretaapian	115.474.665.000	114.917.499.000	56.790.966.716	49,42%	58.126.532.284	50,58%
Total (Rp)			**190.705.041.000**	**190.705.041.000**	**73.723.801.585**	**38,66**	**116.981.239.415**	**61,34**

2.4.3 ANALISIS EFISIENSI SUMBER DAYA

Pelaksanaan kegiatan Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian membutuhkan dukungan dari berbagai sumber daya agar sistem dapat berjalan dengan baik. Pemanfaatan potensi secara tepat guna dengan sumber daya manusia dan sumber daya anggaran diharapkan dapat meningkatkan kinerja dalam melaksanakan tugas dan fungsi pada setiap unit di lingkungan Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian.

Kinerja suatu organisasi dikatakan baik apabila penggunaan sumber daya dan dana yang tersedia lebih efektif dan efisien. Dari sisi ketersediaan dan kualitas Sumber Daya Manusia, SDM yang sesuai kebutuhan dan didukung dengan kompetensi/keahlian yang dimiliki berperan dalam pencapaian target/tujuan organisasi. Pada Triwulan II 2024, jumlah pegawai di lingkungan Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian sebanyak 123 pegawai atau sebesar 7,76% dari total pegawai Direktorat Jenderal Perkeretaapian (1.586 pegawai). Dari total pegawai tersebut, 96 pegawai diantaranya telah memiliki sertifikat kompetensi/keahlian (78,05% dari total pegawai). SDM yang ahli dan kompeten di bidangnya cukup mempengaruhi keberhasilan pencapaian tujuan organisasi dimana dibuktikan dengan 8 IKK telah mencapai target Triwulan II 2024 dari 10 IKK pada Tahun 2024 (2 IKK lainnya belum dilakukan pengukuran).

Dari sisi penggunaan sumber daya anggaran, Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapain telah melakukan efisiensi anggaran dimana beberapa target indikator kinerja kegiatan telah tercapai sesuai target Triwulan II 2024 dengan masih terdapat sisa anggaran dari Rencana Penarikan Dana (RPD) s.d akhir Triwulan II 2024. Rincian efisiensi sumber daya anggaran disampaikan pada Tabel berikut.

Tabel 2-29 Analisis Efisiensi Anggaran Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian Triwulan II 2024

No	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja			Keuangan				Keterangan
			Target TW II	Realisasi TW II	%	RPD Kumulatif TW II (Rp)	Realisasi Kumulatif TW II (Rp)	%	Efisiensi Pada Indikator yang Tercapai (Rp)	
1	Persentase rekomendasi kebijakan pembinaan dan peningkatan konektivitas perkeretaapian yang telah ditindaklanjuti	%	80	80	100,00	390.581.520	637.609.245	163,25	-	Pelaksanaan studi/kajian untuk rekomendasi kebijakan pembinaan dan peningkatan konektivitas perkeretaapian berupa evaluasi manfaat telah selesai 100% dan telah disahkan oleh pimpinan.
2	Persentase pencapaian target legislasi (rancangan dan peraturan perundangan) di bidang perkeretaapian	%	97,78	106,67	109,09	1.235.941.357	1.235.941.369	100,00	-	Pelaksanaan koordinasi penyusunan Peraturan Perudang-Undangan bidang perkeretaan dengan pihak terkait dan Direktorat Teknis di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian telah memenuhi kebutuhan/tuntutan
3	Persentase ASN Ditjen Perkeretaapian yang memiliki sertifikat kompetensi/keahlian tertentu	%	56	58,58	104,61	3.780.776.675	3.780.776.675	100,00	-	Koordinasi pelaksanaan diklat dan pembinaan ASN untuk memiliki sertifikat kompetensi dan keahlian tertentu/teknis

No	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja			Keuangan				Keterangan
			Target TW II	Realisasi TW II	%	RPD Kumulatif TW II (Rp)	Realisasi Kumulatif TW II (Rp)	%	Efisiensi Pada Indikator yang Tercapai (Rp)	
4	Persentase Pemenuhan Rencana Induk Teknologi Informasi dan Komunikasi Bidang Perkeretaapian	%	70	70,37	100,53	452.150.872	447.559.000	98,98	4.591.872	Penyusunan strategi atau arah pengembangan dari pemanfaatan TIK DJKA berupa reviu *roadmap* TIK, kegiatan pengelolaan website dan pengembangan portal aplikasi
5	Persentase pemenuhan publikasi Ditjen Perkeretaapian	%	50	61,22	122,44	2.913.072.235	2.913.072.238	100,00	-	Pemberitaan/publikasi terkait perkeretaapian melalui media cetak, elektronik maupun sosial media
6	Nilai AKIP Ditjen Perkeretaapian	Nilai	-	-	-	3.206.207.370	3.129.493.530	97,61	-	Pada triwulan I belum dilakukan penilaian sehinga efisiensi tidak dihitung
7	Tingkat Maturitas SPIP Direktorat Jenderal Perkeretaapian	Level	-	-	-	1.112.904.304	1.102.196.805	99,04	-	Pada triwulan I belum dilakukan penilaian sehinga efisiensi tidak dihitung
8	Persentase Realisasi Penadapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Bidang Perkeretaapian	%	10	25,86	258,60	2.679.282.507	2.147.388.727	80,15	531.893.780	Target kinerja tidak tercapai, tidak ada efisiensi

No	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja			Keuangan				Keterangan
			Target TW II	Realisasi TW II	%	RPD Kumulatif TW II (Rp)	Realisasi Kumulatif TW II (Rp)	%	Efisiensi Pada Indikator yang Tercapai (Rp)	
9.	Persentase kualitas pelaksanaan anggaran Ditjen Perkeretaapian	%	40,68	57,22	140,66	1.553.426.912	1.538.797.280	99,06	14.629.632	Pembinaan, pengawasan, monitoring dan evaluasi dalam optimalisasi pelaksanaan anggaran sesuai target dengan efektif dan efisien
10	Tingkat Kepuasan Pelayanan Perkantoran	Nilai	3,7	3,87	104,59	57.204.880.169	56.790.966.716	99,28	413.913.453	Kepuasan atas pelayanan perkantoran yang diukur melalui survey terhadap pegawai di lingkungan Setditjen Perkeretaapian
Jumlah						**74.529.223.921**	**73.723.801.585**	**98,92**	**965.028.737 (1,29%)**	

BAB 3 PENUTUP

3.1 TINDAK LANJUT REKOMENDASI PERIODE SEBELUMNYA

Tindak lanjut terhadap rekomendasi pada Pelaporan Kinerja periode sebelumnya (Triwulan I 2024) sebagai berikut:

Tabel 3-1 Tindak Lanjut Rekomendasi Pada Pelaporan Kinerja Periode Sebelumnya

Indikator Kinerja	Rekomendasi	Tindak Lanjut
Persentase Rekomendasi Kebijakan Pembinaan dan Peningkatan Konektivitas Perkeretaapian yang telah Ditindaklanjuti	• Pembahasan dan pendampingan intensif dalam pelaksanaan kegiatan pendukung studi/kajian oleh Tim Pengarah dan Tim Pendamping diantaranya dalam penyusunan laporan serta tahapan pengumpulan data/survey dengan juga mengikutsertakan instansi terkait baik Pemerintah Daerah, Kementerian/Lembaga sektor lain, Badan Usaha Penyelenggara Prasarana dan Sarana Perkeretaapian serta pihak akademis/independen.	• Pada Triwulan II 2024 telah dilaksanakan pembahasan maupun pendampingan intensif terhadap pelaksanaan kegiatan penyusunan kajian/rekomendasi kebijakan. Pendampingan tidak hanya dilaksanakan melalui asistensi substansi kegiatan oleh Tim Pengarah dan Tim Pendamping, namun juga melalui pembahasan yang melibatkan seluruh *stakeholder* terkait (Pemerintah Daerah dan Badan Usaha) guna menampung masukan dan aspirasi dari *stakeholder*. Selain itu, pendampingan juga dilakukan saat perolehan data mulai dari tahap persiapan dengan melakukan inventarisasi kebutuhan data maupun melalui survey sekunder (instansional) dan survey primer di lapangan.
	• Koordinasi inventarisasi kebutuhan data untuk mendukung pelaksanan survey, baik survey primer dan sekunder termasuk penyusunan timeline kegiatan pendukung studi/kajian.	
Persentase Pencapaian Target Legislasi (Jumlah Rancangan dan Peraturan Perundangan) Bidang Perkeretaapian	• Koordinasi intensif dengan Kementerian Hukum dan HAM guna percepatan pengundangan dan harmonisasi beberapa peraturan bidang perkeretaapian	• Tindak lanjut hasil harmonisasi dengan Kemenkumham telah dilaksanakan dimana sampai Triwulan II 2024 telah terbit pengundangan peraturan/ legislasi bidang perkeretaapian sebanyak 3 peraturan.
	• Percepatan penyelesaian ketentuan teknis terkait penyelenggaraan trem otonom untuk penetapan melalui Peraturan Menteri Perhubungan	• Direktur Sarana Perkeretaapian telah bersurat kepada Sesditjen Perkeretaapian perihal Penyampaian Draft RPM

Indikator Kinerja	Rekomendasi	Tindak Lanjut
		Penyelenggaraan Trem Otonom. Selanjutnya, Bagian Hukum akan melakukan pembahasan lanjutan sebagai tindak lanjut penyampaian *Draft* RPM dari Direktorat Sarana tersebut yang diharapkan nantinya RPM tersebut bisa mengakomodir pengoperasian Trem Otonom (ART) yang akan beroperasi di IKN.
	• Diusulkan revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2024 dikarenakan capaian kinerja telah tercapai (melebihi 100%) serta memastikan pencapaian pada akhir tahun *on the right track* (tidak melebihi 110%).	• Pelaksanaan revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2024 akan dilaksanakan pada periode Triwulan III 2024 (Agustus 2024).
Persentase ASN Direktorat Jenderal Perkeretaapian yang Memiliki Sertifikat Kompetensi/ Keahlian Tertentu	• Percepatan penyesuaian/*inpassing* jabatan ASN ke dalam Jabatan Fungsional Tertentu bidang perkeretaapian.	• Pada Triwulan II 2024, proses penyesuaian/*inpassing* telah dikoordinasikan dengan Biro SDM dan Organisasi dan pelaksanaan pengukuhan/pelantikan dijadwalkan akan dilaksanakan pada Agustus 2024.
	• Lanjutan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan diklat manajerial/umum dan diklat teknis kepada pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian sesuai kebutuhan kompetensi dan ketersediaan anggaran.	• Beberapa program peningkatan kompetensi SDM juga dilaksanakan pada Triwulan II 2024 diantaranya kegiatan pendidikan dan pelatihan di bidang manajerial/umum (Manajemen Risiko, *Global Leadership Program*, PKA, dll) dan bidang teknis (AMDAL, dll).
	• Kerjasama dengan BPSDM Perhubungan/sekolah teknis perkeretaapian serta institusi internasional baik operator, regulator, akademisi maupun industri perkeretaapian guna peningkatan kompetensi SDM terutama pemanfaatan teknologi perkeretaapian terkini.	• Telah dilaksanakan Perjanjian Kerja Sama dengan BPSDM Perhubungan/sekolah teknis perkeretaapian dalam penyelenggaraan diklat teknis diantaranya PTDI-STTD dan PPI Madiun.
Persentase Pemenuhan Rencana Induk Teknologi Informasi dan Komunikasi	• Pengembangan Portal Aplikasi sebagai Super Apps Direktorat Jenderal Perkeretaapian yang terintegrasi dengan aplikasi teknis lainnya dengan optimalisasi fitur untuk dukungan manajemen dan teknis	• Pada Triwulan II 2024 telah mulai pelaksanaan pengembangan Portal Aplikasi Direktorat Jenderal Perkeretaapian, saat ini beberapa aplikasi teknis telah terintegrasi pada Portal Aplikasi dan dalam tahap penyesuaian proses bisnis serta

Indikator Kinerja	Rekomendasi	Tindak Lanjut
Bidang Perkeretaapian		penyempurnaan/optimalisasi fitur/modul untuk dukungan manajemen dan teknis
	• Pelaksanaan monitoring progres kegiatan TIK secara berkala dan berkesinambungan, termasuk koordinasi dan pembahasan kemajuan kegiatan TIK dengan mengikutsertakan Pusdatin Kementerian Perhubungan	• Pada Triwulan II 2024, telah dilakukan monitoring progress kegiatan TIK melalui rapat koordinasi pembahasan monitoring progress kegiatan TIK di lingkungan Ditjen Perkeretaapian dengan mengikutsertakan Pusdatin sebagai pembina penyelenggaraan TIK Kementerian Perhubungan pada Juni 2024.
	• Pelatihan/seminar/bimbingan teknis guna meningkatkan pemahaman terkait TIK kepada pegawai pranata komputer/tim pengelola TIK	• Pada Triwulan II 2024, telah dilakukan rapat koordinasi terkait Kebijakan Reviu dan Clearance, Penjelasan Arsitektur SPBE Kementerian Perhubungan, Pengelolaan Website dan Pengembangan Portal Aplikasi DJKA dengan mengundang narasumber Kominfo dan Pusdatin Kemenhub yang dihadiri oleh pegawai pranata komputer/tim pengelola TIK di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian.
Persentase Pemenuhan Publikasi Direktorat Jenderal Perkeretaapian	• Bimbingan teknis/pelatihan/rapat koordinasi dalam penyiapan publikasi untuk mendukung kompetensi Tim Humas Direktorat Jenderal Perkeretaapian termasuk Tim Humas di tingkat Direktorat dan Balai.	• Pelaksanaan Bimbingan Teknis/pelatihan kehumasan rencana dilaksanakan pada Juli 2024 sebagaimana surat Sesditjen Perkeretaapian Nomor: IP.001/1/8/K1/DJKA/2024 yang akan melibatkan seluruh Tim Humas dari unsur Direktorat, Bagian dan Balai guna peningkatan kompetensi pegawai akan kehumasan serta meningkatkan sinergi dan membangun *engagement* antar pengelola kehumasan.
	• Peningkatan publikasi dalam bentuk berita/data/informasi melalui *website* serta siaran pers/liputan terkait perkeretaapian dengan menyiapkan berbagai topik antara lain pemanfaatan hasil pembangunan, program unggulan Tahun 2024, perkembangan teknologi perkeretaapian serta	• Pada periode Triwulan II 2024 telah dilaksanakan peningkatan publikasi baik melalui siaran pers maupun media sosial. Hal tersebut dibuktikan dengan penambahan yang cukup signifikan jumlah publikasi dimana hingga Triwulan II 2024 telah terbit sebanyak 13 Siaran

Indikator Kinerja	Rekomendasi	Tindak Lanjut
	kebijakan pengembangan perkeretaapian ke depan.	Pers dan 352 konten media sosial (*instagram/twitter*).
	• Kerjasama dengan media dan *influencer* untuk membantu pelaksanaan publikasi serta meningkatkan reputasi Direktorat Jenderal Perkeretaapian sebagai regulator penyelenggaraan perkeretaapian.	• Hingga Triwulan II 2024, Tim Humas secara rutin dan berkala (setiap minggu) telah melaporkan perkembangan berita yang berkaitan dengan Direktorat Jenderal Perkeretaapian kepada Sesditjen Perkeretaapian guna menemukenali strategi kehumasan kepada publik. • Beberapa program/kegiatan yang diselenggarakan oleh Ditjen Perkeretaapian diantaranya dengan melakukan kerjasama baik dengan media *mainstream* maupun *influencer* untuk membantu publikasi terkait penyelenggaraan Perkeretaapian.
Nilai AKIP Direktorat Jenderal Perkeretaapian	• Monitoring, evaluasi dan tindak lanjut untuk upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja di masa mendatang agar dapat tercapai dan kinerja secara keseluruhan memenuhi kriteria *on the right track* (90% s.d 110%).	• Pada Laporan Monitoring Kinerja Setditjen Perkeretaapian Triwulan II 2024 telah mencakup uraian pengaruh terhadap penyesuaian strategi, kebijakan, aktivitas, anggaran, organisasi dan jabatan/pegawai pada bagian upaya peningkatan kinerja sebagai bentuk perhatian lebih untuk upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja di masa mendatang. • Telah disampaikan surat Tindak Lanjut Rapat Evaluasi Implementasi SAKIP dan Pembahasan Pelaporan Kinerja Triwulan II Tahun 2024 untuk himbauan kepada seluruh unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian untuk menambahkan uraian pengaruh terhadap penyesuaian strategi, kebijakan, aktivitas, anggaran, organisasi dan jabatan/pegawai sesuai dengan kelengkapan outline dan substansi pelaporan berdasarkan hasil pembahasan dan pedoman SAKIP di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian.

Indikator Kinerja	Rekomendasi	Tindak Lanjut
	• Melaksanakan evaluasi akuntabilitas kinerja internal pada seluruh unit kerja secara berjenjang.	• Telah dilaksanakan evaluasi internal implementasi SAKIP Tahun 2024 pada unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian. Hasil evaluasi internal pada masing-masing unit kerja selanjutnya disampaikan ke Setditjen Perkeretaapian untuk proses lanjut evaluasi di tingkat Eselon I.
	• Melakukan beberapa upaya yang bisa dihargai terkait dokumen pelaporan kinerja untuk memastikan pemenuhan informasi efisiensi atas penggunaan sumber daya anggaran dan sumber daya manusia, serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan yang dilaksanakan/kesan yang nyata	• Pada Laporan Monitoring Kinerja Setditjen Perkeretaapian Triwulan II 2024 Bab 2 Capaian Kinerja Triwulan telah menginformasikan efisiensi atas penggunaan sumber daya anggaran dan manusia. • Pada Laporan Monitoring Kinerja Setditjen Perkeretaapian telah menginformasikan upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan untuk tiap-tiap IKK termasuk tindak lanjut yang telah dilaksanakan.
	• Melakukan revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2024 dalam rangka penyesuaian sumber daya anggaran, perubahan pimpinan dan memastikan capaian kinerja di akhir Tahun 2024 dapat memenuhi kriteria on the right track (capaian 90-110%).	• Pelaksanaan revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2024 akan dilaksanakan pada periode Triwulan III 2024 (Agustus 2024).
Tingkat Maturitas SPIP Direktorat Jenderal Perkeretaapian	• Melaksanakan pengukuran efektivitas kegiatan sosialisasi manajemen risiko dan pengukuran tingkat pemahaman manajemen risiko dari pegawai, termasuk pengoptimalan fungsi skema 3 Lini (*Three Lines of Defence*) dalam penerapan manajemen risiko di masing-masing unit kerja khususnya peran pengelola risiko (lini pertama) dan unit manajemen risiko (lini kedua).	• Pada Triwulan II Tahun 2024, telah dilakukan pengukuran efektivitas kegiatan sosialisasi manajemen risiko dan pengukuran tingkat pemahaman manajemen risiko pada pegawai termasuk optimalisasi fungsi 3 Lini yaitu pada Balai Pengujian Perkeretaapian dan Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Semarang.
	• Penyusunan proses bisnis unit Direktorat Jenderal Perkeretaapian serta unit dibawahnya mengacu pada proses bisnis Kementerian Perhubungan untuk selanjutnya	• Pada Triwulan II Tahun 2024, penyusunan proses bisnis unit Direktorat Jenderal Perkeretaapian masih dalam proses penyempurnaan tahap akhir (Laporan Akhir) guna

Indikator Kinerja	Rekomendasi	Tindak Lanjut
	dijadikan acuan dalam penerapan manajemen risiko	selanjutnya dapat dijadikan acuan dalam penerapan manajemen risiko.
	• Pemanfaatan Sistem Infromasi Manajemen Risiko yang digunakan untuk membantu Pemilik Risiko, Pengelola Risiko, dan Unit Manajemen Risiko dalam proses Manajemen Risiko	• Pada Triwulan II 2024, seluruh unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian khususnya Pemilik Risiko, Pengelola Risiko, dan Unit Manajemen Risiko telah memanfaatkan Sistem Infromasi Manajemen Risiko (SIMARKO) yang dikelola oleh Inspektorat Jenderal Kemenhub dalam dokumentasi proses manajemen risiko. Selanjutnya akan dipergunakan untuk pemantauan dan pelaporan triwulan.
Persentase Realisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Bidang Perkeretaapian	• Pengoptimalan layanan BLU (pengujian sarana, prasarana, SDM) serta pemanfaatan aset bangunan/lahan dengan skema konsesi untuk peningkatan perolehan PNBP.	• Telah dilaksanakan pengoptimalan layanan BLU dan pemanfaatan aset pada Triwulan II, hal tersebut dibuktikan dengan penambahan realisasi PNBP yg cukup signifikan pada jenis pendapatan dari layanan BLU dan pendapatan non fungsional/pemanfaatan aset.
	• Penetapan kebijakan terkait penagihan PNBP TAC Tahun 2023 guna dibayarkan pada Tahun 2024 dengan mempertimbangkan permohonan keringanan TAC dari PT.KAI (metode keringanan atau pengangsuran).	• Pelaksanaan TAC TA 2024 akan mengacu pada Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 8 Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Direktorat Jenderal Perkeretaapian yang mencabut PM 84 Tahun 2016 yang telah mengatur mekanisme self assesment dan jatuh tempo per semester untuk TAC TA 2024. Terkait Satuan Biaya Penggunaan Prasarana (SBPP) dan Faktor Prioritas (Fp) telah diterbitkan PM 14 Tahun 2024 tentang Pedoman Perhitungan Biaya Penggunaan Prasarana Perkeretaapian yang mencabut PM 122 Tahun 2015.
	• Lanjutan pelaksanaan sertifikasi aset tanah/barang milik negara	• Pelaksanan sertifikasi aset tanah/BMN terus dilaksanakan oleh Bagian Keuangan dan telah

Indikator Kinerja	Rekomendasi	Tindak Lanjut
	dengan dukungan anggaran Tahun 2024.	dilakukan pemantauan secara berkala dimana kegiatan tersebut ditargetkan selesai pada Triwulan IV 2024.
	• Diusulkan revisi rencana aksi pada Perjanjian Kinerja Tahun 2024 dikarenakan capaian kinerja Triwulan I 2024 tidak memenuhi kriteria on the right track (melebihi capaian kinerja 110%).	• Pelaksanaan revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2024 akan dilaksanakan pada periode Triwulan III 2024 (Agustus 2024).
Kualitas Pelaksanaan Anggaran Direktorat Jenderal Perkeretaapian	• Mempercepat proses lelang pekerjaan yang belum lelang/kontrak agar pekerjaan bisa dilaksanakan dengan maksimal dan selesai tepat waktu (belum lelang/persiapan sebanyak 124 Paket dengan nilai pagu sebesar Rp4.462.473.406.260,00 atau 50,40%).	• Sudah berkoordinasi dengan Biro LPPBMN untuk mensinkronkan data dan percepatan pemenuhan dokumen *readiness criteria*. • Sesuai dengan arahan Menteri Perhubungan untuk kegiatan yang tidak dapat diselesaikan pada tahun 2024 agar dapat diajukan dispensasi menjadi kontrak tahun jamak dan selanjutnya akan menyesuaikan dengan kebijakan pemerintahan berikutnya.
	• Koordinasi intensif dengan unit kerja terkait (Kementerian Keuangan, Bappenas, KSP, Setjen dan Itjen Kemenhub) untuk dukungan percepatan revisi optimalisasi anggaran terutama usulan rekomposisi SBSN dan dispensasi perpanjangan kontrak tahun jamak.	• Telah dilaksanakan koordinasi dengan Kementerian Keuangan dan Kementerian PPN/Bappenas dengan hasil Program/Kegiatan/Pekerjaan prioritas yang dialokasikan anggarannya pada tahun 2024 akan tetap ditenderkan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan; dan kebutuhan pelaksanaan anggaran atas fiskal penganggaran tahun 2025 untuk keberlanjutan program yang teridentifikasi memiliki risiko tidak dapat diselesaikan sampai akhir tahun 2024, dapat diusulkan dan selanjutnya akan menyesuaikan dengan kebijakan pemerintahan berikutnya. • Telah disampaikan surat kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan nomor KU.001/2/12/DJKA/2024 tanggal 27 Juni 2024 perihal Usulan Relaksasi *Automatic Adjustment* TA 2024 di Lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian.

Indikator Kinerja	Rekomendasi	Tindak Lanjut
	• Evaluasi pelaksanaan anggaran secara intensif termasuk *Coaching Clinic* dan pengoptimalan peran PMU baik dari sisi administrasi maupun teknis terhadap masing-masing kegiatan strategis unit kerja guna percepatan penyerapan anggaran sesuai RPD serta penyelesaian hal-hal yang menghambat pelaksanaan anggaran.	• *Coaching Clinic* telah dilaksanakan oleh Bagian Keuangan, sedangkan terkait PMU tidak dilaksanakan karena lelang gagal dan waktu tifdak efektif. Untuk itu fungsi PMU akan dilaksanakan secara swakelola.
	• Percepatan penugasan penyelenggaraan IMO termasuk penyelesaian pedoman pemeriksaan prasarana perkeretaapian sehingga IMO Tahun 2024 dapat segera kontrak dan dilaksanakan oleh masing-masing Balai Teknik Perkeretaapian.	• Telah ditetapkan Keputusan Direktur Jenderal Perkeretaapian Nomor KP-DJKA 55 Tahun 2024 tentang Standar Operasional Prosedur Tata Cara Pelaksanaan Pengoperasiaon dan Perawatan Prasarana Perkeretaapian Milik Negara pada Balai Teknik Perkeretaapian. • Keputusan Menteri Perhubungan terkait Penugasan IMO TA 2024 masih dalam proses pembahasan.
Tingkat Kualitas Pelayanan Perkantoran Ditjen Perkeretaapian	• Sosialisasi tata cara dan ketentuan layanan SDM/kepegawaian di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian dimana berdasarkan hasil survey masih terdapat penilaian yang kurang baik diantaranya terkait layanan/pembinaan urusan kepegawaian, layanan mutasi, disiplin/etika ASN dan jenjang karir pegawai.	• Pada Triwulan II 2024 telah dilaksanakan Sosialisasi Pengembangan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil dalam Bentuk Pendidikan melalui Mekanisme Tugas Belajar dan Sosialisasi Disiplin Pegawai, Kode Etik dan Tata Cara Penunjukan dan Pengangkatan Pelaksana Harian dan Pelaksana Tugas serta Tata Cara Pemberian Cuti Bagi ASN.
	• Penyusunan proses bisnis dan reviu SOP layanan kepegawaian, tata usaha dan umum/ kerumahtanggaan di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian.	• Penyusunan proses bisnis dan reviu SOP layanan kepegawaian, tata usaha dan umum/kerumahtanggaan di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian yang saat ini masih dalam proses penyusunan Peta Lintas Fungsi/*Cross Functional Map* Direktorat Teknis. Penyusunan Proses Bisnis Ditjen Perkeretaapian ditargetkan selesai pada September 2024 untuk kemudian dilanjutkan dengan reviu SOP.

Indikator Kinerja	Rekomendasi	Tindak Lanjut
	• Pengoptimalan pemanfaatan Portal Aplikasi Direktorat Jenderal Perkeretaapian guna mendukung layanan perkantoran termasuk pelaksanaan survey kepuasan pegawai serta update data ASN pada Sistem Informasi Kepegawaian (SIK) Kementerian Perhubungan.	• Telah dilaksanakan rapat Koordinasi Pemanfaatan dan Monitoring Progres Kegiatan TIK di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian termasuk membahas pengembangan/ pengelolaan Portal Aplikasi Ditjen Perkeretaapian.
	• Pelaksanaan *Character Building* pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian.	• Kegiatan *Character Building* di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian belum dapat dilaksanakan karena keterbatasan anggaran dan direncanakan akan dilaksanakan padaTriwulan III-IV 2024.

Setelah menindaklanjuti rekomendasi periode sebelumnya, ditemukenali adanya perbaikan terhadap perubahan budaya kinerja diantaranya:

1. Pelaksanaan Apel Pagi setiap bulan sebagai salah satu upaya peningkatan disiplin, etika dan integritas pegawai di lingkungan Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian serta rapat staf berkala guna koordinasi internal dalam peningkatan kinerja unit kerja;
2. Penggunaan absensi *biometric* serta pelaporan kinerja pegawai melalui aplikasi e-Kinerja sebagai salah satu acuan penilaian kinerja individu.
3. Penggunaan Sistem Informasi Manajemen Risiko (SIMARKO) yang dikelola oleh Insepktorat Jenderal Kementerian Perhubungan sebagai salah satu infrastruktur penerapan Manajemen Risko di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian;
4. Penggunaan aplikasi SILAKI untuk proses implementasi dan evaluasi SAKIP internal Direktorat Jenderal Perkeretaapian.

3.2 KESIMPULAN

Berdasarkan hasil monitoring capaian kinerja Triwulan II 2024 di lingkungan Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian, diperoleh hal-hal sebagai berikut:

1. Dalam rangka mencapai tujuan sebagaimana Rencana Strategis Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian untuk melaksanakan kegiatan dukungan manajemen dan teknis lainnya dengan sasaran sebagai berikut:
   a. Termanfaatkannya kebijakan pembinaan dan peningkatan konektivitas perkeretaapian;
   b. Terlaksananya perumusan regulasi dan kebijakan dalam penyelenggaraan perkeretaapian;
   c. Tersedianya SDM perkeretaapian yang kompeten dan profesional;
   d. Sistem informasi dan teknologi yang andal;
   e. Dukungan publik terhadap penyelenggaraan perkeretaapian;
   f. Terwujudnya *good governance* dan *clean government* di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian.
2. Rata-rata capaian kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian pada Triwulan II 2024 sebesar 106,10% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3-2 Capaian Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian Triwulan II Tahun 2024

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Triwulan II	Realisasi Triwulan II	Capaian Kinerja Triwulan II (%)
1	Termanfaatkannya Kebijakan Pembinaan dan Peningkatan Konektivitas Perkeretaapian	Persentase rekomendasi Kebijakan Pembinaan dan Peningkatan Konektivitas Perkeretaapian yang Telah Ditindaklanjuti	%	80	80	100,00
2	Terlaksananya Perumusan Regulasi dan Kebijakan dalam Penyelenggaraan Perkeretaapian	Persentase Pencapaian Target Legislasi (Rancangan dan Peraturan Perundangan) Bidang Perkeretaapian	%	97,78	106,67	109,09
3	Tersedianya SDM Perkeretaapian yang Berkompeten dan Profesional	Persentase ASN Ditjen Perkeretaapian yang Memiliki Sertifikat Kompetensi/Keahlian	%	56	58,58	104,61
4	Sistem Informasi dan Teknologi yang Andal	Persentase Pemenuhan Rencana Induk Teknologi Informasi dan Komunikasi Bidang Perkeretaapian	%	70	70,37	100,53
5	Dukungan Publik terhadap	Persentase Pemenuhan Publikasi Ditjen Perkeretaapian	%	50	61,22	122,44 (Maks Capaian 110%)

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Triwulan II	Realisasi Triwulan II	Capaian Kinerja Triwulan II (%)
	Penyelenggaraan Perkeretaapian					
6	Terwujudnya *good governance* dan *clean government* di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian	Nilai AKIP Ditjen Perkeretaapian	Nilai	-	-	-
		Tingkat Maturasi SPIP Direktorat Jenderal Perkeretaapian	Level	-	-	-
		Persentase Realisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Bidang Perkeretaapian	%	10	25,86	258,60 (Maks Capaian 110%)
		Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran Ditjen Perkeretaapian	%	40,68	57,22	140,66 (Maks Capaian 110%)
		Tingkat Kepuasan Pelayanan Perkantoran Ditjen Perkeretaapian	Nilai	3,70	3,87	104,59

3. Pada Triwulan II 2024, alokasi anggaran Sekretariat Direktorat Jenderal sebesar Rp190.705.041.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.73.723.801.585,- atau 38,66%.

3.3 REKOMENDASI

Berdasarkan hasil pengukuran capaian kinerja Triwulan II 2024, seluruh Indikator Kinerja Kegiatan telah memenuhi target (sebanyak 7 IKK) dan selanjutnya diperlukan upaya-upaya peningkatan kinerja guna mempertahankan capaian yang diperoleh sampai posisi akhir Tahun 2024. Upaya peningkatan kinerja pada periode berikutnya direkomendasikan hal-hal sebagai berikut:

1. **Persentase rekomendasi Kebijakan Pembinaan dan Peningkatan Konektivitas Perkeretaapian yang Telah Ditindaklanjuti:**

   a. Pembahasan progres studi/kajian (Laporan Antara, Konsep Laporan Akhir) oleh Tim Pengarah dan Tim Pendamping termasuk mengikutsertakan instansi lain baik Pemerintah Daerah, Kementerian/Lembaga serta Badan Usaha Penyelenggara Prasarana dan Sarana Perkeretaapian serta asistensi berkala untuk memastikan studi/kajian dapat selesai tepat waktu dan memenuhi sasaran pada kerangka acuan kerja.

b. Apabila dibutuhkan dapat dilaksanakan FGD guna lebih mengintensifkan penjaringan masukan dari stakeholders terkait untuk finalisasi hasil studi/kajian.

c. Pembahasan internal terkait konsep usulan revisi PM 112 Tahun 2017 tentang Pedoman dan Proses Perencanaan di lingkungan Kementerian Perhubungan dalam upaya percepatan penyiapan dokumen perencanaan mendukung konektivitas perkeretaapian, guna selanjutnya koordinasi lanjut dengan Setjen Kemenhub cq Biro Perencanaan.

2. Persentase Pencapaian Target Legislasi (Rancangan dan Peraturan Perundangan) Bidang Perkeretaapian:

a. Percepatan pembahasan lanjutan untuk penyelesaian beberapa ketentuan prioritas yang telah diusulkan Direktorat teknis, diantaranya terkait penyelenggaraan trem otonom, tata cara penetapan trase, serta persyaratan teknis jalur kereta api.

b. Berpartisipasi aktif dalam pembahasan internal Direktorat teknis untuk mendorong percepatan penyelesaian substansi beberapa regulasi bidang perkeretaapian, diantaranya terkait peningkatan keselamatan perlintasan sebidang antara jalur kereta api dengan jalan, tata cara pelaksanaan audit dan Inspeksi keselamatan perkeretaapian, tata cara pengujian dan pemberian sertifikat prasarana perkeretaapian.

c. Koordinasi intensif dengan Biro Hukum Kementerian Perhubungan guna percepatan harmonisasi peraturan bidang perkeretaapian (RPM tentang Sertifikasi Tenaga Pelaksana Pembangunan Prasarana Perkeretaapian).

d. Diusulkan revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2024 dikarenakan capaian kinerja telah tercapai (melebihi 100%) serta memastikan pencapaian pada akhir tahun agar on the right track (tidak melebihi 110%).

3. **Persentase ASN Ditjen Perkeretaapian yang Memiliki Sertifikat Kompetensi/Keahlian:**

   a. Pengukuhan ASN Direktorat Jenderal Perkeretaapian ke dalam jabatan fungsional tertentu bidang perkeretaapian yaitu Inspektur Prasarana dan Sarana Perkeretaapian.
   b. Lanjutan pelaksanaan/mengikutsertakan ASN di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian untuk pendidikan dan pelatihan manajerial/umum dan teknis sesuai kebutuhan kompetensi dan ketersediaan anggaran.
   c. Penyesuaian penempatan pegawai setelah inpassing Jabatan Fungsional Tertentu bidang perkeretaapian sesuai kompetensi (misalnya untuk Inspektur Perkeretaapian di Direktorat teknis/Balai, penguji dan asisten penguji di Balai Pengujian Perkeretaapian).

4. **Persentase Pemenuhan Rencana Induk TIK Bidang Perkeretaapian:**

   a. Lanjutan pengembangan Portal Aplikasi sebagai Super Apps Direktorat Jenderal Perkeretaapian yang terintegrasi dengan aplikasi teknis lainnya serta optimalisasi fitur untuk dukungan manajemen dan teknis.
   b. Peningkatan keamanan sistem dengan pelaksanaan *Vulnerability Assesment* (VA) pada beberapa aplikasi dan tindak lanjut/remediasi hasil VA tersebut.
   c. Pelaksanaan reviu tingkat I terhadap usulan kegiatan TIK Tahun 2025 sesuai Rencana Induk/Roadmap TIK, Arsitektur dan Peta Rencana SPBE Kementerian Perhubungan serta mengacu rencana penataan domain dan simplifikasi/penyederhanaan aplikasi.
   d. Koordinasi dalam penyusunan arsitektur SPBE Kementerian Perhubungan mencakup proses bisnis, layanan, aplikasi, data dan informasi, keamanan dan infrastruktur untuk unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian.
   e. Pelaksanaan reviu peta jalan (*roadmap*) TIK untuk penyesuaian kebijakan TIK terbaru di lingkungan Kementerian Perhubungan serta sebagai acuan dalam perencanaan TIK Tahun 2025-2029 sesuai arsitektur dan peta rencana SPBE Kementerian Perhubungan.

5. Persentase Pemenuhan Publikasi Direktorat Jenderal Perkeretaapian:

a. Bimbingan teknis kehumasan untuk peningkatan kompetensi Tim Humas Direktorat Jenderal Perkeretaapian termasuk Direktorat dan Balai guna mendukung penyiapan publikasi yang handal.
b. Penyelesaian majalah perkeretaapian edisi pertama sesuai tema yang telah dibahas dan disepakati dengan dukungan peliputan di wilayah tertentu.
c. Perbaikan *website* Direktorat Jenderal Perkeretaapian sebagai media publikasi dalam bentuk berita/data/informasi melalui website serta siaran pers/liputan.
d. Koordinasi dengan Biro KIP dan Tenaga Ahli Kementerian Perhubungan untuk penyiapan pemberitaan/siaran pers dalam upaya menyeimbangkan pemberitaan negatif diantaranya dengan pemberitaan/siaran pers terkait capaian dan manfaat pembangunan infrastruktur perkeretaapian periode 2014-2024.
e. Diusulkan revisi rencana aksi pada Perjanjian Kinerja Tahun 2024 dikarenakan capaian kinerja Triwulan II 2024 tidak memenuhi *kriteria on the right track* (melebihi capaian kinerja 110%).

6. Nilai AKIP Direktorat Jenderal Perkeretaapian:

a. Pelaksanaan evaluasi internal implementasi SAKIP tingkat Eselon I Direktorat Jenderal Perkeretaapian serta evaluasi tingkat Kementerian Perhubungan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan.
b. Melakukan studi/kajian untuk mendukung penyusunan Rencana Strategis Kementerian Perhubungan Bidang Perkeretaapian Tahun 2025-2029 dengan melibatkan *stakeholder* (Pemda, operator, lainnya) sebagai acuan perencanaan kinerja periode berikutnya.
c. Melakukan revisi perjanjian kinerja Tahun 2024 untuk seluruh unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian sebagai tindak lanjut monitoring dan evaluasi terhadap capaian indikator kinerja yang tidak memenuhi kriteria *on the right track* (90% s.d 110%).

7. Tingkat Maturitas SPIP Ditjen Perkeretaapian:

a. Melakukan evaluasi kelembagaan serta percepatan penyusunan/penetapan proses bisnis dengan mempertimbangkan kebutuhan organisasi termasuk mendukung penerapan manajemen risiko sesuai ketentuan.
b. Lanjutan pemantauan penyelenggaraan manajemen risiko pada beberapa unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian sekaligus melaksanakan sosialisasi/*in house training*.
c. Penyiapan Kamus Risiko di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian untuk memudahkan implementasi manajemen risiko sesuai KM 69 Tahun 2023.
d. Percepatan optimalisasi penggunaan aplikasi Sistem Informasi Manajemen Risiko (SIMARKO) pada pelaporan manajemen risiko di tingkat Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian dan Direktorat Jenderal Perkeretaapian.
e. Diusulkan revisi anggaran pada DIPA/POK Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian untuk memenuhi kebutuhan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan kompetensi manajemen risiko yang terdampak kebijakan *Automatic Adjustment* (AA) sesuai usulan/kebutuhan masing-masing unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian.

8. Persentase Realisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Bidang Perkeretaapian:

a. Percepatan penagihan TAC Tahun 2024 sesuai ketentuan baru terkait besaran Satuan Biaya Penggunaan Prasarana (SBPP) dan Faktor Prioritas (Fp).
b. Koordinasi dan monitoring untuk percepatan proses penyelesaian penilaian KPKNL terhadap penggunaan Depo Solo Jebres dan Depo Depok.
c. Diusulkan revisi rencana aksi pada Perjanjian Kinerja Tahun 2024 dikarenakan capaian kinerja Triwulan II 2024 tidak memenuhi kriteria *on the right track* (melebihi capaian kinerja 110%).

9. Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran Ditjen Perkeretaapian:

a. Koordinasi intensif dengan instansi terkait (Kementerian Keuangan, Bappenas, KSP, Setjen dan Itjen Kemenhub) untuk dukungan percepatan optimalisasi anggaran melalui relaksasi AA, usulan rekomposisi SBSN dan dispensasi perpanjangan kontrak tahun jamak.
b. Percepatan penugasan penyelenggaraan IMO Tahun 2024 sehingga dapat segera kontrak dan dilaksanakan oleh masing-masing Balai Teknik Perkeretaapian.
c. Diusulkan revisi rencana aksi pada Perjanjian Kinerja Tahun 2024 dikarenakan capaian kinerja Triwulan II 2024 tidak memenuhi kriteria on the right track (melebihi capaian kinerja 110%).
d. Koordinasi dengan seluruh unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian untuk Pengusulan Standar Biaya Keluaran (SBK) Tahun 2025 masing-masing Rincian *Output* agar dapat meningkatkan Variabel penilaian kinerja anggaran sesuai dengan PMK Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan.

10. Tingkat Kualitas Pelayanan Perkantoran Ditjen Perkeretaapian:

a. Penyelesaian dan penetapan proses bisnis di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian.
b. *Update* data kompetensi pegawai untuk mendukung Indeks Profesional ASN di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian pada Sistem Informasi Kepegawaian (SIK) Kementerian Perhubungan.
c. Pelaksanaan kegiatan pembinaan SDM/kepegawaian secara intensif termasuk pemenuhan hak pegawai sesuai ketentuan.

LAMPIRAN

LAPORAN MONITORING CAPAIAN KINERJA
TRIWULAN II TAHUN 2024
SETDITJEN PERKERETAAPIAN

LAMPIRAN I

Perjanjian Kinerja Tahun 2024

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Ir. JUJUN ENDAH WAHJUNINGRUM, M.T.**
Jabatan : Sekretaris Direktorat Jenderal Perkeretaapian
Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : **Ir. MOHAMAD RISAL WASAL, A.TD., M.M., IPM.**
Jabatan : Direktur Jenderal Perkeretaapian

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Januari 2024

Pihak Kedua,	Pihak Pertama,
Ir. MOHAMAD RISAL WASAL, A.TD., M.M., IPM	Ir. JUJUN ENDAH WAHJUNINGRUM, M.T.
Pembina Utama Madya (IV/d)	Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP 196706081990031005	NIP 196507031991032001

LAMPIRAN B
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)	SATUAN	TARGET
1	Termanfaatkannya Kebijakan Pembinaan dan Peningkatan Perkeretaapian	Persentase Rekomendasi Kebijakan Pembinaan dan Peningkatan Konektivitas Perkeretaapian yang telah Ditindaklanjuti	%	100,00
2	Terlaksananya Perumusan Regulasi dan Kebijakan dalam Penyelenggaraan Perkeretaapian	Persentase Pencapaian Target Legislasi (Jumlah Rancangan dan Peraturan Perundangan) Bidang Perkeretaapian	%	100,00
3	Tersedianya SDM Perkeretaapian yang Kompeten dan Profesional	Persentase ASN Ditjen Perkeretaapian yang Memiliki Sertifikat Kompetensi/Keahlian Tertentu	%	65,00
4	Sistem Informasi dan Teknologi yang Andal	Persentase Pemenuhan Rencana Induk Teknologi Informasi dan Komunikasi Bidang Perkeretaapian	%	77,00
5	Dukungan Publik terhadap Penyelenggaraan Perkeretaapian	Persentase Pemenuhan Publikasi Ditjen Perkeretaapian	%	100,00
6	Terwujudnya *Good Governance* dan *Clean Government* di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian	Nilai AKIP Ditjen Perkeretaapian	Nilai	83,00
		Tingkat Maturitas SPIP Ditjen Perkeretaapian	Level	3,00
		Persentase Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Bidang Perkeretaapian	%	100,00
		Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran Ditjen Perkeretaapian	%	89,00
		Tingkat Kepuasan Pelayanan Perkantoran Ditjen Perkeretaapian	Nilai	3,70

PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN	
1. Program Infrastruktur Konektivitas	**Rp.**	**10.189.312.000**
Infrastruktur Konektivitas Transportasi Perkeretaapian	Rp.	10.189.312.000
2. Program Dukungan Manajemen	**Rp.**	**180.515.729.000**
a. Pengelolaan Organisasi dan SDM Transportasi Perkeretaapian	Rp.	7.739.451.000
b. Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN dan Umum Transportasi Perkeretaapian	Rp.	154.754.309.000
c. Pengelolaan Sistem Informasi dan Teknologi Transportasi Perkeretaapian	Rp.	3.923.109.000
d. Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik Transportasi Perkeretaapian	Rp.	11.503.441.000
e. Legislasi dan Litigasi Transportasi Perkeretaapian	Rp.	2.595.419.000
TOTAL	**Rp.**	**190.705.041.000**

Jakarta, Januari 2024

Disetujui
DIREKTUR JENDERAL PERKERETAAPIAN

Ir. MOHAMAD RISAL WASAL, A.TD., M.M., IPM
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP 196706081990031005

SEKRETARIS
DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

Ir. JUJUN ENDAH WAHJUNINGRUM, M.T.
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP 196507031991032001

LAMPIRAN C
RENCANA AKSI ATAS PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

KODE	SASARAN / INDIKATOR / KEGIATAN	TARGET / RENCANA PELAKSANAAN (BULAN)												ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
SK 1	**Termanfaatkannya Kebijakan Pembinaan dan Peningkatan Konektivitas Perkeretaapian**													**7.166.891.000**	**Kabag Perencanaan**
IKK 1	**Persentase rekomendasi kebijakan pembinaan dan peningkatan konektivitas perkeretaapian yang telah ditindaklanjuti (%)**	**80%**	**80%**	**80%**	**80%**	**80%**	**80%**	**80%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**7.166.891.000**	**Kabag Perencanaan**
1)	Penyusunan dokumen perencanaan	-	-	-	-	-	-	-	3	3	3	3	3	7.166.891.000	Kabag Perencanaan
		-	-	-	1.075.033.650	1.075.033.650	3.941.790.050	5.590.174.980	6.880.215.360	7.166.891.000	7.166.891.000	7.166.891.000	7.166.891.000		
		0%	0%	0%	15%	15%	55%	78%	96%	100%	100%	100%	100%		
SK 2	**Terlaksananya Perumusan Regulasi dan Kebijakan dalam Penyelenggaraan Perkeretaapian**													**6.255.254.000**	**Kabag Hukum**
IKK 2	**Persentase pencapaian target legislasi (rancangan dan peraturan perundangan) (%)**	**97,78%**	**97,78%**	**97,78%**	**97,78%**	**97,78%**	**97,78%**	**97,78%**	**97,78%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**6.255.254.000**	**Kabag Hukum**
1)	Penyusunan kajian kebijakan/standar/pedoman teknis (Kajian Naskah Akademis Usulan Perubahan UU Nomor 23 Tahun 2007)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1.822.420.000	Kabag Hukum
		-	-	-	546.726.000	546.726.000	546.726.000	546.726.000	546.726.000	546.726.000	1.275.694.000	1.785.971.600	1.822.420.000		
		0%	0%	0%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	70%	98%	100%		
2)	Koordinasi Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Perkeretaapian	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1.454.808.000	Kabag Hukum
		-	290.961.600	436.442.400	509.182.800	581.923.200	727.404.000	872.884.800	1.018.365.600	1.163.846.400	1.236.586.800	1.309.327.200	1.454.808.000		
		0%	20%	30%	35%	40%	50%	60%	70%	80%	85%	90%	100%		
3)	Koordinasi Pengendalian dan Pengawasan Produk Hukum Atas Penyelenggaraan Perkeretaapian	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	280.330.000	Kabag Hukum
		-	56.066.000	84.099.000	98.115.500	112.132.000	140.165.000	168.198.000	196.231.000	224.264.000	238.280.500	252.297.000	280.330.000		
		0%	20%	30%	35%	40%	50%	60%	70%	80%	85%	90%	100%		
4)	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan di Bidang Perkeretaapian	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	412.382.000	Kabag Hukum
		-	82.476.400	123.714.600	144.333.700	164.952.800	206.191.000	247.429.200	288.667.400	329.905.600	350.524.700	371.143.800	412.382.000		
		0%	20%	30%	35%	40%	50%	60%	70%	80%	85%	90%	100%		
5)	Penyusunan Pendapat Hukum (Legal Opinion)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	447.899.000	Kabag Hukum
		-	89.579.800	134.369.700	156.764.650	179.159.600	223.949.500	268.739.400	313.529.300	358.319.200	380.714.150	403.109.100	447.899.000		
		0%	20%	30%	35%	40%	50%	60%	70%	80%	85%	90%	100%		
6)	Pengelolaan Hukum	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1.837.415.000	Kabag Hukum
		-	11.483.274	87.559.802	103.673.206	118.268.903	141.441.031	1.010.578.250	1.194.319.750	1.378.061.250	1.469.932.000	1.653.673.500	1.837.415.000		
		0%	1%	5%	6%	6%	8%	55%	65%	75%	80%	90%	100%		
SK 3	**Tersedianya SDM Perkeretaapian yang Berkompeten dan Profesional**													**11.117.036.000**	**Kabag SDM dan Umum**
IKK 3	**Persentase ASN Ditjen Perkeretaapian yang memiliki sertifikat kompetensi/keahlian (%)**	**56%**	**56%**	**56%**	**56%**	**56%**	**56%**	**56%**	**56%**	**56%**	**56%**	**56%**	**65%**	**11.117.036.000**	**Kabag SDM dan Umum**
1)	Penyusunan kajian kebijakan/standar/pedoman teknis (Roadmap kepegawaian di lingkungan Ditjen Perkeretaapian)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1.200.001.000	Kabag SDM dan Umum
		-	-	-	180.000.150	180.000.150	660.000.550	660.000.550	1.020.000.850	1.200.001.000	1.200.001.000	1.200.001.000	1.200.001.000		
		0%	0%	0%	15%	15%	55%	55%	85%	100%	100%	100%	100%		
2)	Pembinaan Jabatan Fungsional Arsiparis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	332.418.000	Kabag SDM dan Umum
		-	2.077.509	15.840.980	18.756.155	21.396.751	25.588.963	182.829.900	216.071.700	249.313.500	265.934.400	299.176.200	332.418.000		
		0%	1%	5%	6%	6%	8%	55%	65%	75%	80%	90%	100%		
3)	Pengelolaan Kepegawaian	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	5.011.220.000	Kabag SDM dan Umum
		-	31.318.572	238.803.661	282.750.083	322.557.229	385.755.056	2.756.171.000	3.257.293.000	3.758.415.000	4.008.976.000	4.510.098.000	5.011.220.000		
		0%	1%	5%	6%	6%	8%	55%	65%	75%	80%	90%	100%		
4)	Pembinaan Mental dan Spiritual Pegawai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	127.370.000	Kabag SDM dan Umum
		-	796.023	6.069.664	7.186.649	8.198.426	9.804.722	70.053.500	82.790.500	95.527.500	101.896.000	114.633.000	127.370.000		
		0%	1%	5%	6%	6%	8%	55%	65%	75%	80%	90%	100%		
5)	Monitoring dan Evaluasi Kinerja Pegawai di Lingkungan Ditjen Perkeretaapian	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	917.590.000	Kabag SDM dan Umum
		-	5.734.653	43.726.648	51.773.550	59.062.521	70.634.492	504.674.500	596.433.500	688.192.500	734.072.000	825.831.000	917.590.000		
		0%	1%	5%	6%	6%	8%	55%	65%	75%	80%	90%	100%		
6)	Character Building	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3.365.737.000	Kabag SDM dan Umum
		-	21.034.813	160.390.148	189.906.334	216.642.414	259.088.618	1.851.155.350	2.187.729.050	2.524.302.750	2.692.589.600	3.029.163.300	3.365.737.000		
		0%	1%	5%	6%	6%	8%	55%	65%	75%	80%	90%	100%		
7)	Pelantikan dan Serah Terima Jabatan di Lingkungan Ditjen Perkeretaapian	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	162.700.000	Kabag SDM dan Umum
		-	1.016.825	7.753.273	9.180.088	10.472.512	12.524.365	89.485.000	105.755.000	122.025.000	130.160.000	146.430.000	162.700.000		
		0%	1%	5%	6%	6%	8%	55%	65%	75%	80%	90%	100%		
SK 4	**Sistem Informasi dan Teknologi yang Andal**													**3.923.109.000**	**Kabag Perencanaan**
IKK 4	**Persentase Pemenuhan Rencana Induk Teknologi Informasi dan Komunikasi Bidang Perkeretaapian (%)**	**70%**	**70%**	**70%**	**70%**	**70%**	**70%**	**70%**	**70%**	**70%**	**70%**	**70%**	**77%**	**3.923.109.000**	**Kabag Perencanaan**
1)	Pengelolaan data dan informasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1.223.109.000	Kabag Perencanaan
		-	244.621.800	366.932.700	428.088.150	489.243.600	611.554.500	733.865.400	856.176.300	978.487.200	1.039.642.650	1.100.798.100	1.223.109.000		
		0%	20%	30%	35%	40%	50%	60%	70%	80%	85%	90%	100%		
2)	Penyusunan Desain Pengembangan/Pengelolaan Sistem Informasi	-	-	-	150.000.000	150.000.000	550.000.000	550.000.000	850.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	Kabag Perencanaan
		0%	0%	0%	15%	15%	55%	55%	85%	100%	100%	100%	100%		
3)	Pembangunan dan Pengembangan Sistem Informasi Direktorat Jenderal Perkeretaapian	-	-	-	510.000.000	510.000.000	510.000.000	510.000.000	510.000.000	510.000.000	1.190.000.000	1.666.000.000	1.700.000.000	1.700.000.000	Kabag Perencanaan
		0%	0%	0%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	70%	98%	100%		

KODE	SASARAN / INDIKATOR / KEGIATAN	TARGET / RENCANA PELAKSANAAN (BULAN)												ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
SK 5	**Dukungan Publik terhadap Penyelenggaraan Perkeretaapian**													**11.503.441.000**	**Kabag Hukum**
IKK 5	**Persentase pemenuhan publikasi Ditjen Perkeretaapian (%)**	**5%**	**15%**	**25%**	**30%**	**40%**	**50%**	**55%**	**65%**	**75%**	**80%**	**90%**	**100%**	**11.503.441.000**	**Kabag Hukum**
1)	Pelayanan humas dan protokoler	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	11.503.441.000	Kabag Hukum
		-	64.666.750	493.083.036	583.823.836	666.017.836	796.509.036	6.326.892.550	7.477.236.650	8.627.580.750	9.202.752.800	10.353.096.900	11.503.441.000		
		0%	1%	4%	5%	6%	7%	55%	65%	75%	80%	90%	100%		
SK 6	**Terwujudnya GOOD GOVERNANCE dan CLEAN GOVERNMENT di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian**													**150.739.310.000**	**Kabag Perencanaan, Kabag Keuangan, Kabag Hukum, Kabag SDM dan Umum**
IKK 6	**Nilai AKIP Ditjen Perkeretaapian (Nilai)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**83**	**83**	**83**	**16.552.633.000**	**Kabag Perencanaan, Kabag Keuangan, Kabag SDM dan Umum**
1)	Penyusunan rencana program dan Penyusunan rencana anggaran	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	5.226.353.000	Kabag Perencanaan
		349.120.380	1.191.608.484	1.607.103.548	1.874.170.186	2.081.656.400	2.270.327.743	2.749.061.678	3.418.034.862	3.710.187.995	4.264.704.048	4.480.552.427	5.226.353.000		
		6,68%	22,80%	30,75%	35,86%	39,83%	43,44%	52,60%	65,40%	70,99%	81,60%	85,73%	100,00%		
2)	Penyusunan Dokumen SAKIP Ditjen Perkeretaapian serta Sekretariat Ditjen Perkeretaapian	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	4	1	1.656.752.000	Kabag Perencanaan
		-	173.627.610	183.733.797	346.095.493	386.851.592	572.573.491	750.342.981	904.586.592	1.057.339.126	1.148.294.811	1.325.401.600	1.656.752.000		
		0,00%	10,48%	11,09%	20,89%	23,35%	34,56%	45,29%	54,60%	63,82%	69,31%	80,00%	100,00%		
3)	Penyusunan Laporan Tahunan dan Pengolahan Data Statistik Direktorat Jenderal Perkeretaapian	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	794.617.000	Kabag Perencanaan
		-	177.676.361	439.979.433	439.979.433	439.979.433	449.196.990	449.196.990	449.196.990	624.568.962	657.148.259	657.148.259	794.617.000		
		0,00%	22,36%	55,37%	55,37%	55,37%	56,53%	56,53%	56,53%	78,60%	82,70%	82,70%	100,00%		
4)	Penyiapan Bahan Rapat Pimpinan Ditjen Perkeretaapian	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	516.024.000	Kabag Perencanaan
		-	-	51.602.400	103.204.800	154.807.200	206.409.600	258.012.000	309.614.400	361.216.800	412.819.200	464.421.600	516.024.000		
		0%	0%	10%	20%	30%	40%	50%	60%	70%	80%	90%	100%		
5)	Monitoring Pemantauan Penyelenggaraan Perkeretaapian Pantauan Kantor Staf Presiden, Bappenas, Kemenko Marinvest, Kemenko	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1.363.456.000	Kabag Perencanaan
		-	166.750.669	248.012.646	325.320.602	467.392.717	467.392.717	531.747.840	531.747.840	795.167.539	871.248.384	1.330.187.674	1.363.456.000		
		0%	12%	18%	24%	34%	34%	39%	39%	58%	64%	98%	100%		
6)	Monitoring Perencanaan dan Pengendalian Bidang Perkeretaapian	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1.039.254.000	Kabag Perencanaan
		-	26.189.201	101.327.265	120.137.762	128.867.496	136.350.125	278.935.774	444.488.936	486.786.574	665.850.038	935.328.600	1.039.254.000		
		0%	3%	10%	12%	12%	13%	27%	43%	47%	64%	90%	100%		
7)	Monitoring Pinjaman Hibah Luar Negeri dan Kegiatan Pendanaan Tanah Melalui Lembaga Manajemen Aset Negara di Lingkungan Ditjen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1.720.302.000	Kabag Perencanaan
		-	43.207.200	43.207.200	150.870.700	150.870.700	280.247.700	860.151.000	1.032.181.200	1.204.211.400	1.376.241.600	1.548.271.800	1.720.302.000		
		0%	3%	3%	9%	9%	16%	50%	60%	70%	80%	90%	100%		
8)	Monitoring Pelaksanaan Rencana Strategis Bidang Perkeretaapian dan Rencana Induk Perkeretaapian Nasional	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1.068.767.000	Kabag Perencanaan
		-	43.207.200	43.207.200	150.870.700	150.870.700	280.247.700	534.383.500	641.260.200	748.136.900	855.013.600	961.890.300	1.068.767.000		
		0%	4%	4%	14%	14%	26%	50%	60%	70%	80%	90%	100%		
9)	Penyusunan kajian masterplan/kebijakan (Penyusunan Studi Potensi PNBP, Potensi Pasar, dan Bentuk Kerjasama Pemanfaatan Stasiun Jatinegara dan Stasiun Manggarai)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3.000.108.000	Kabag Keuangan
		-	-	-	450.016.200	450.016.200	1.650.059.400	1.650.059.400	2.550.091.800	3.000.108.000	3.000.108.000	3.000.108.000	3.000.108.000		
		0%	0%	0%	15%	15%	55%	55%	85%	100%	100%	100%	100%		
10)	Kegiatan Penunjang Non Operasional Organisasi (Pengembangan Organisasi di Lingkungan DJKA)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	167.000.000	Kabag SDM dan Umum
		-	-	-	25.050.000	25.050.000	91.850.000	91.850.000	141.950.000	167.000.000	167.000.000	167.000.000	167.000.000		
		0%	0%	0%	15%	15%	55%	55%	85%	100%	100%	100%	100%		
IKK 7	**Tingkat Maturitas SPIP Direktorat Jenderal Perkeretaapian (Level)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3**	**4.481.979.000**	**Kabag Perencanaan, Kabag Keuangan, Kabag SDM dan Umum**
1)	Penyusunan Laporan Pengelolaan Keuangan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1.205.496.000	Kabag Keuangan
		-	15.150.000	72.150.000	120.549.600	120.549.600	120.549.600	361.648.800	482.198.400	602.748.000	723.297.600	964.396.800	1.205.496.000		
		0%	1%	6%	10%	10%	10%	30%	40%	50%	60%	80%	100%		
2)	Contact Center Bidang Perkeretaapian	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	177.165.000	Kabag SDM dan Umum
		-	1.107.226	8.442.585	9.996.252	11.403.581	13.637.856	97.440.750	115.157.250	132.873.750	141.732.000	159.448.500	177.165.000		
		0%	1%	5%	6%	6%	8%	55%	65%	75%	80%	90%	100%		
3)	Pembinaan Keprotokolan dan MC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	182.871.000	Kabag SDM dan Umum
		-	1.142.887	8.714.498	10.318.204	11.770.859	14.077.094	100.579.050	118.866.150	137.153.250	146.296.800	164.583.900	182.871.000		
		0%	1%	5%	6%	6%	8%	55%	65%	75%	80%	90%	100%		
4)	Penyusunan SPIP Direktorat Jenderal Perkeretaapian dan Manajemen Resiko	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2.546.858.000	Kabag Perencanaan
		-	15.917.073	121.367.454	143.702.394	163.933.625	196.052.728	1.400.771.900	1.655.457.700	1.910.143.500	2.037.486.400	2.292.172.200	2.546.858.000		
		0%	1%	5%	6%	6%	8%	55%	65%	75%	80%	90%	100%		
5)	Pembinaan dan Evaluasi Hasil-Hasil Pemeriksaan dan Tindak Lanjut (LHP)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	369.589.000	Kabag Keuangan
		-	2.309.817	17.612.319	20.853.469	23.789.337	28.450.323	203.273.950	240.232.850	277.191.750	295.671.200	332.630.100	369.589.000		
		0%	1%	5%	6%	6%	8%	55%	65%	75%	80%	90%	100%		

KODE	SASARAN / INDIKATOR / KEGIATAN	TARGET / RENCANA PELAKSANAAN (BULAN)												ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
IKK 8	**Persentase Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Bidang Perkeretaapian Bidang Perkeretaapian (%)**	**1**	**1**	**3**	**4**	**5**	**10**	**15**	**20**	**41**	**45**	**50**	**100**	**6.270.812.000**	**Kabag Keuangan**
1)	Pengusulan PNBP Yang Berkaitan Dengan Tupoksi dan Monitoring Pelaksanaan PNBP Ditjen Perkeretaapian	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	811.067.000	Kabag Keuangan
		81.106.700	162.213.400	243.320.100	324.426.800	364.980.150	405.533.500	446.086.850	486.640.200	567.746.900	648.853.600	729.960.300	811.067.000		
		10%	20%	30%	40%	45%	50%	55%	60%	70%	80%	90%	100%		
2)	Penyusunan Laporan SIMAK Barang Milik Negara (BMN) di Lingkungan Ditjen Perkeretaapian	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	535.203.000	Kabag Keuangan
		-	53.520.300	267.601.500	535.203.000	535.203.000	535.203.000	535.203.000	535.203.000	535.203.000	535.203.000	535.203.000	535.203.000		
		0%	10%	50%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
3)	Peninjauan Lapangan Pemanfaatan Barang Milik Negara pada Ditjen Perkeretaapian	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	252.429.000	Kabag Keuangan
		25.242.900	50.485.800	75.728.700	100.971.600	113.593.050	126.214.500	138.835.950	151.457.400	176.700.300	201.943.200	227.186.100	252.429.000		
		10%	20%	30%	40%	45%	50%	55%	60%	70%	80%	90%	100%		
4)	Pemutakhiran Data Investasi dan Penilaian Direktorat Jenderal Perkeretaapian	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	438.345.000	Kabag Keuangan
		43.834.500	87.669.000	131.503.500	175.338.000	197.255.250	219.172.500	241.089.750	263.007.000	306.841.500	350.676.000	394.510.500	438.345.000		
		10%	20%	30%	40%	45%	50%	55%	60%	70%	80%	90%	100%		
5)	Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara (BMN)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3.996.750.000	Kabag Keuangan
		-	25.822.337	196.894.950	233.129.020	265.950.233	318.057.193	2.198.212.500	2.597.887.500	2.997.562.500	3.197.400.000	3.597.075.000	3.996.750.000		
		0%	1%	5%	6%	7%	8%	55%	65%	75%	80%	90%	100%		
6)	Pengelolaan Pembinaan Badan Layanan Umum	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	237.018.000	Kabag Keuangan
		-	1.531.334	11.676.399	13.825.176	15.771.562	18.861.645	130.359.900	154.061.700	177.763.500	189.614.400	213.316.200	237.018.000		
		0%	1%	5%	6%	7%	8%	55%	65%	75%	80%	90%	100%		
IKK 9	**Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran Ditjen Perkeretaapian (%)**	**19,24**	**22,3**	**26,74**	**31,47**	**36,31**	**40,68**	**44,57**	**50,31**	**56,3**	**69**	**75**	**89**	**7.959.221.000**	**Kabag Perencanaan, Kabag Keuangan, Kabag Hukum, Kabag SDM dan Umum**
1)	Monitoring Pelaksanaan Anggaran	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1.875.897.000	Kabag Keuangan
		18.758.970	37.517.940	56.276.910	75.035.880	93.794.850	112.553.820	750.358.800	937.948.500	1.125.538.200	1.313.127.900	1.500.717.600	1.875.897.000		
		1%	2%	3%	4%	5%	6%	40%	50%	60%	70%	80%	100%		
2)	Administrasi Kantor PPK Pelayanan Kepegawaian dan Kerumahtanggaan serta Peningkatan Kelembagaan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	566.199.000	Kabag SDM dan Umum
		45.295.920	90.591.840	135.887.760	181.183.680	226.479.600	271.775.520	317.071.440	362.367.360	407.663.280	452.959.200	498.255.120	566.199.000		
		8%	16%	24%	32%	40%	48%	56%	64%	72%	80%	88%	100%		
3)	Administrasi Kegiatan Satker Kantor Pusat Ditjen Perkeretaapian	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1.202.400.000	Kabag Keuangan
		96.192.000	192.384.000	288.576.000	384.768.000	480.960.000	577.152.000	673.344.000	769.536.000	865.728.000	961.920.000	1.058.112.000	1.202.400.000		
		8%	16%	24%	32%	40%	48%	56%	64%	72%	80%	88%	100%		
4)	Administrasi Kegiatan Kantor PPTKA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1.055.671.000	Kabag Perencanaan
		84.453.680	168.907.360	253.361.040	337.814.720	422.268.400	506.722.080	591.175.760	675.629.440	760.083.120	844.536.800	928.990.480	1.055.671.000		
		8%	16%	24%	32%	40%	48%	56%	64%	72%	80%	88%	100%		
5)	Administrasi Satuan Kerja Pelayanan Peraturan Perundang-Undangan, Perjanjian dan Kehumasan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	854.985.000	Kabag Hukum
		68.398.800	136.797.600	205.196.400	273.595.200	341.994.000	410.392.800	478.791.600	547.190.400	615.589.200	683.988.000	752.386.800	854.985.000		
		8%	16%	24%	32%	40%	48%	56%	64%	72%	80%	88%	100%		
6)	Rapat Koordinasi Antar Bagian, Direktorat dan Rapat koordinasi Teknis Ditjen Perkeretaapian	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1.619.095.000	Kabag Keuangan
		129.527.600	259.055.200	388.582.800	518.110.400	647.638.000	777.165.600	906.693.200	1.036.220.800	1.165.748.400	1.295.276.000	1.424.803.600	1.619.095.000		
		8%	16%	24%	32%	40%	48%	56%	64%	72%	80%	88%	100%		
7)	Pembinaan Pengelolaan Balai/Satker di Lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	784.974.000	Kabag Keuangan
		62.797.920	125.595.840	188.393.760	251.191.680	313.989.600	376.787.520	439.585.440	502.383.360	565.181.280	627.979.200	690.777.120	784.974.000		
		8%	16%	24%	32%	40%	48%	56%	64%	72%	80%	88%	100%		

KODE	SASARAN / INDIKATOR / KEGIATAN	TARGET / RENCANA PELAKSANAAN (BULAN)												ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
IKK 10	**Tingkat Kepuasan Pelayanan Perkantoran Ditjen Perkeretaapian (Nilai)**	**3,7**	**3,7**	**3,7**	**3,7**	**3,7**	**3,7**	**3,7**	**3,7**	**3,7**	**3,7**	**3,7**	**3,7**	**115.474.665.000**	**Kabag SDM dan Umum**
1)	Pembinaan Sistem Administrasi Perkantoran	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	508.131.000	Kabag SDM dan Umum
		-	101.626.200	152.439.300	177.845.850	203.252.400	254.065.500	304.878.600	355.691.700	406.504.800	431.911.350	457.317.900	508.131.000		
		0%	20%	30%	35%	40%	50%	60%	70%	80%	85%	90%	100%		
2)	Pengelolaan Arsip	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	360.629.000	Kabag SDM dan Umum
		-	111.467.000	181.425.000	223.808.039	223.808.039	243.768.039	180.314.500	216.377.400	252.440.300	288.503.200	324.566.100	360.629.000		
		0%	31%	50%	62%	62%	68%	50%	60%	70%	80%	90%	100%		
3)	Monitoring Ketatausahaan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	295.056.000	Kabag SDM dan Umum
		-	262.632.100	1.559.948.181	1.912.936.478	5.039.599.887	5.354.071.537	132.775.200	147.528.000	177.033.600	206.539.200	236.044.800	295.056.000		
		0%	89%	529%	648%	1708%	1815%	45%	50%	60%	70%	80%	100%		
4)	Bimbingan Teknis Kesekretariatan dan Ketatausahaan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	264.789.000	Kabag SDM dan Umum
		13.239.450	26.478.900	39.718.350	66.197.250	495.497.352	119.155.050	158.873.400	172.112.850	185.352.300	211.831.200	238.310.100	264.789.000		
		5%	10%	15%	25%	187%	45%	60%	65%	70%	80%	90%	100%		
5)	Inventarisasi arsip statis dan arsip terjaga di lingkungan DJKA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	150.102.000	Kabag SDM dan Umum
		7.505.100	15.010.200	22.515.300	37.525.500	495.497.352	67.545.900	90.061.200	97.566.300	105.071.400	120.081.600	135.091.800	150.102.000		
		5%	10%	15%	25%	330%	45%	60%	65%	70%	80%	90%	100%		
6)	Administrasi Pengelolaan Umum dan Rumah Tangga	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	474.135.000	Kabag SDM dan Umum
		23.706.750	47.413.500	71.120.250	118.533.750	495.497.352	213.360.750	284.481.000	308.187.750	331.894.500	379.308.000	426.721.500	474.135.000		
		5%	10%	15%	25%	105%	45%	60%	65%	70%	80%	90%	100%		
7)	Monitoring Pemeliharaan dan Perawatan Mesin Absensi UPT/Balai dan Satker Perkeretaapian	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	378.381.000	Kabag SDM dan Umum
		3.783.810	7.567.620	11.351.430	15.135.240	18.919.050	22.702.860	151.352.400	189.190.500	227.028.600	264.866.700	302.704.800	378.381.000		
		1%	2%	3%	4%	5%	6%	40%	50%	60%	70%	80%	100%		
8)	Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	575.377.000	Kabag SDM dan Umum
		5.753.770	11.507.540	17.261.310	23.015.080	28.768.850	34.522.620	230.150.800	287.688.500	345.226.200	402.763.900	460.301.600	575.377.000		
		1%	2%	3%	4%	5%	6%	40%	50%	60%	70%	80%	100%		
9)	Bimbingan Teknis Kerumahtanggaan dan Umum	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	425.507.000	Kabag SDM dan Umum
		4.255.070	8.510.140	12.765.210	17.020.280	21.275.350	25.530.420	170.202.800	212.753.500	255.304.200	297.854.900	340.405.600	425.507.000		
		1%	2%	3%	4%	5%	6%	40%	50%	60%	70%	80%	100%		
10)	Pemutakhiran Data Kartu dan Validasi Pencatatan Barang Inventaris, Dalam Rangka Penatausahaan BMN Perkantoran DJKA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	349.845.000	Kabag SDM dan Umum
		27.987.600	55.975.200	83.962.800	111.950.400	139.938.000	167.925.600	195.913.200	223.900.800	251.888.400	279.876.000	307.863.600	349.845.000		
		8%	16%	24%	32%	40%	48%	56%	64%	72%	80%	88%	100%		
11)	Pengadaan Makanan/Minuman Penambah Daya Tahan Tubuh	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	205.814.000	Kabag SDM dan Umum
		16.465.120	32.930.240	49.395.360	65.860.480	82.325.600	98.790.720	115.255.840	131.720.960	148.186.080	164.651.200	181.116.320	205.814.000		
		8%	16%	24%	32%	40%	48%	56%	64%	72%	80%	88%	100%		
12)	Kendaraan Bermotor	10	19	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	3.932.849.000	Kabag SDM dan Umum
		1.376.497.150	3.932.849.000	3.932.849.000	3.932.849.000	3.932.849.000	3.932.849.000	3.932.849.000	3.932.849.000	3.932.849.000	3.932.849.000	3.932.849.000	3.932.849.000		
		35%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
13)	Renovasi gedung dan bangunan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	13.839.555.000	Kabag SDM dan Umum
		-	-	2.075.933.250	2.075.933.250	2.075.933.250	5.535.822.000	5.535.822.000	5.535.822.000	10.379.666.250	10.379.666.250	10.379.666.250	13.839.555.000		
		0%	0%	15%	15%	15%	40%	40%	40%	75%	75%	75%	100%		
14)	Gaji dan Tunjangan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	66.368.423.000	Kabag SDM dan Umum
		5.309.473.840	10.618.947.680	15.928.421.520	21.237.895.360	26.547.369.200	31.856.843.040	37.166.316.880	42.475.790.720	47.785.264.560	53.094.738.400	58.404.212.240	66.368.423.000		
		8%	16%	24%	32%	40%	48%	56%	64%	72%	80%	88%	100%		
15)	Operasional dan Pemeliharaan Kantor	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	27.346.072.000	Kabag SDM dan Umum
		2.187.685.760	4.375.371.520	6.563.057.280	8.750.743.040	10.938.428.800	13.126.114.560	15.313.800.320	17.501.486.080	19.689.171.840	21.876.857.600	24.064.543.360	27.346.072.000		
		8%	16%	24%	32%	40%	48%	56%	64%	72%	80%	88%	100%		
														190.705.041.000	

Jakarta, Januari 2024

SEKRETARIS
DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

Ir. JUJUN ENDAH WAHJUNINGRUM, M.T.
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP 196507031991032001

LAMPIRAN II

Rekomendasi Peningkatan Kinerja Berdasarkan
Laporan Monitoring Kinerja Triwulan II
Tahun 2024

REKOMENDASI PENINGKATAN KINERJA BERDASARKAN LAPORAN MONITORING KINERJA TRIWULAN II TAHUN 2024

NO	REKOMENDASI PENINGKATAN KINERJA	WAKTU PELAKSANAAN	PIC
A	**Persentase Rekomendasi Kebijakan Pembinaan dan Peningkatan Konektivitas Perkeretaapian yang Telah Ditindaklanjuti**		
1	Pembahasan progres studi/kajian (Laporan Antara, Konsep Laporan Akhir) oleh Tim Pengarah dan Tim Pendamping termasuk mengikutsertakan instansi lain baik Pemerintah Daerah, Kementerian/Lembaga serta Badan Usaha Penyelenggara Prasarana dan Sarana Perkeretaapian serta asistensi berkala untuk memastikan studi/kajian dapat selesai tepat waktu dan memenuhi sasaran pada kerangka acuan kerja.	Triwulan III 2024	Bagian Perencanaan
2	Apabila dibutuhkan dapat dilaksanakan FGD guna lebih mengintensifkan penjaringan masukan dari *stakeholders* terkait untuk finalisasi hasil studi/kajian.	Triwulan III 2024	Bagian Perencanaan
3	Pembahasan internal terkait konsep usulan revisi PM 112 Tahun 2017 tentang Pedoman dan Proses Perencanaan di lingkungan Kementerian Perhubungan dalam upaya percepatan penyiapan dokumen perencanaan mendukung konektivitas perkeretaapian, guna selanjutnya koordinasi lanjut dengan Setjen Kemenhub cq Biro Perencanaan.	Triwulan III-IV 2024	Bagian Perencanaan, Bagian Hukum
B	**Persentase Pencapaian Target Legislasi (Rancangan dan Peraturan Perundangan) Bidang Perkeretaapian**		
1	Percepatan pembahasan lanjutan untuk penyelesaian beberapa ketentuan prioritas yang telah diusulkan Direktorat teknis, diantaranya terkait penyelenggaraan trem otonom, tata cara penetapan trase, serta persyaratan teknis jalur kereta api.	Triwulan III-IV 2024	Bagian Hukum
2	Berpartisipasi aktif dalam pembahasan internal Direktorat teknis untuk mendorong percepatan penyelesaian substansi beberapa regulasi bidang perkeretaapian, diantaranya terkait peningkatan keselamatan perlintasan sebidang antara jalur kereta api dengan jalan, tata cara pelaksanaan audit dan lnspeksi keselamatan perkeretaapian, tata cara pengujian dan pemberian sertifikat prasarana perkeretaapian.	Triwulan III-IV 2024	Bagian Hukum

NO	REKOMENDASI PENINGKATAN KINERJA	WAKTU PELAKSANAAN	PIC
3	Koordinasi intensif dengan Biro Hukum Kementerian Perhubungan guna percepatan harmonisasi peraturan bidang perkeretaapian (RPM tentang Sertifikasi Tenaga Pelaksana Pembangunan Prasarana Perkeretaapian).	Triwulan III-IV 2024	Bagian Hukum
4	Diusulkan revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2024 dikarenakan capaian kinerja telah tercapai (melebihi 100%) serta memastikan pencapaian pada akhir tahun agar on the right track (tidak melebihi 110%).	Triwulan III 2024	Bagian Perencanaan, Bagian Hukum
C	**Persentase ASN Ditjen Perkeretaapian yang Memiliki Sertifikat Kompetensi/Keahlian**		
1	Pengukuhan ASN Direktorat Jenderal Perkeretaapian ke dalam jabatan fungsional tertentu bidang perkeretaapian yaitu Inspektur Prasarana dan Sarana Perkeretaapian.	Triwulan III 2024	Bagian SDM dan Umum
2	Lanjutan pelaksanaan/mengikutsertakan ASN di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian untuk pendidikan dan pelatihan manajerial/umum dan teknis sesuai kebutuhan kompetensi dan ketersediaan anggaran.	Triwulan III-IV 2024	Bagian SDM dan Umum
3	Penyesuaian penempatan pegawai setelah inpassing Jabatan Fungsional Tertentu bidang perkeretaapian sesuai kompetensi (misalnya untuk Inspektur Perkeretaapian di Direktorat teknis/Balai, penguji dan asisten penguji di Balai Pengujian Perkeretaapian).	Triwulan III 2024	Bagian SDM dan Umum
D	**Persentase Pemenuhan Rencana Induk TIK Bidang Perkeretaapian**		
1	Lanjutan pengembangan Portal Aplikasi sebagai Super Apps Direktorat Jenderal Perkeretaapian yang terintegrasi dengan aplikasi teknis lainnya serta optimalisasi fitur untuk dukungan manajemen dan teknis.	Triwulan III-IV 2024	Bagian Perencanaan
2	Peningkatan keamanan sistem dengan pelaksanaan *Vulnerability Assesment* (VA) pada beberapa aplikasi dan tindak lanjut/remediasi hasil VA tersebut.	Triwulan III 2024	Bagian Perencanaan
3	Pelaksanaan reviu tingkat I terhadap usulan kegiatan TIK Tahun 2025 sesuai Rencana Induk/Roadmap TIK, Arsitektur dan Peta Rencana SPBE Kementerian Perhubungan serta mengacu rencana penataan domain dan simplifikasi/penyederhanaan aplikasi.	Triwulan III-IV 2024	Bagian Perencanaan
4	Koordinasi dalam penyusunan arsitektur SPBE Kementerian Perhubungan mencakup proses bisnis, layanan, aplikasi, data dan informasi, keamanan dan infrastruktur untuk unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian.	Triwulan III 2024	Bagian Perencanaan

NO	REKOMENDASI PENINGKATAN KINERJA	WAKTU PELAKSANAAN	PIC
5	Pelaksanaan reviu peta jalan (*roadmap*) TIK untuk penyesuaian kebijakan TIK terbaru di lingkungan Kementerian Perhubungan serta sebagai acuan dalam perencanaan TIK Tahun 2025-2029 sesuai arsitektur dan peta rencana SPBE Kementerian Perhubungan.	Triwulan III-IV 2024	Bagian Perencanaan
E	**Persentase Pemenuhan Publikasi Direktorat Jenderal Perkeretaapian**		
1	Bimbingan teknis kehumasan untuk peningkatan kompetensi Tim Humas Direktorat Jenderal Perkeretaapian termasuk Direktorat dan Balai guna mendukung penyiapan publikasi yang handal.	Triwulan III 2024	Bagian Hukum
2	Penyelesaian majalah perkeretaapian edisi pertama sesuai tema yang telah dibahas dan disepakati dengan dukungan peliputan di wilayah tertentu.	Triwulan III 2024	Bagian Hukum
3	Perbaikan *website* Direktorat Jenderal Perkeretaapian sebagai media publikasi dalam bentuk berita/data/informasi melalui website serta siaran pers/liputan.	Triwulan III 2024	Bagian Hukum
4	Koordinasi dengan Biro KIP dan Tenaga Ahli Kementerian Perhubungan untuk penyiapan pemberitaan/siaran pers dalam upaya menyeimbangkan pemberitaan negatif diantaranya dengan pemberitaan/siaran pers terkait capaian dan manfaat pembangunan infrastruktur perkeretaapian periode 2014-2024.	Triwulan III-IV 2024	Bagian Hukum
5	Diusulkan revisi rencana aksi pada Perjanjian Kinerja Tahun 2024 dikarenakan capaian kinerja Triwulan II 2024 tidak memenuhi *kriteria on the right track* (melebihi capaian kinerja 110%).	Triwulan III 2024	Bagian Perencanaan, Bagian Hukum
F	**Nilai AKIP Ditjen Perkeretaapian**		
1	Pelaksanaan evaluasi internal implementasi SAKIP tingkat Eselon I Direktorat Jenderal Perkeretaapian serta evaluasi tingkat Kementerian Perhubungan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan.	Triwulan III 2024	Bagian Perencanaan
2	Melakukan studi/kajian untuk mendukung penyusunan Rencana Strategis Kementerian Perhubungan Bidang Perkeretaapian Tahun 2025-2029 dengan melibatkan *stakeholder* (Pemda, operator, lainnya) sebagai acuan perencanaan kinerja periode berikutnya.	Triwulan III-IV 2024	Bagian Perencanaan
3	Melakukan revisi perjanjian kinerja Tahun 2024 untuk seluruh unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian sebagai tindak lanjut monitoring dan evaluasi terhadap capaian indikator kinerja yang tidak memenuhi kriteria *on the right track* (90% s.d 110%).	Triwulan III 2024	Bagian Perencanaan

NO	REKOMENDASI PENINGKATAN KINERJA	WAKTU PELAKSANAAN	PIC
G	**Tingkat Maturitas SPIP Ditjen Perkeretaapian**		
1	Melakukan evaluasi kelembagaan serta percepatan penyusunan/penetapan proses bisnis dengan mempertimbangkan kebutuhan organisasi termasuk mendukung penerapan manajemen risiko sesuai ketentuan.	Triwulan III-IV 2024	Bagian SDM dan Umum
2	Lanjutan pemantauan penyelenggaraan manajemen risiko pada beberapa unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian sekaligus melaksanakan sosialisasi/*in house training*.	Triwulan III-IV 2024	Bagian Perencanaan
3	Penyiapan Kamus Risiko di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian untuk memudahkan implementasi manajemen risiko sesuai KM 69 Tahun 2023.	Triwulan III-IV 2024	Bagian Perencanaan
4	Percepatan optimalisasi penggunaan aplikasi Sistem Informasi Manajemen Risiko (SIMARKO) pada pelaporan manajemen risiko di tingkat Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian dan Direktorat Jenderal Perkeretaapian.	Triwulan III 2024	Bagian Perencanaan, Bagian Keuangan
5	Diusulkan revisi anggaran pada DIPA/POK Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian untuk memenuhi kebutuhan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan kompetensi manajemen risiko yang terdampak kebijakan *Automatic Adjustment* (AA) sesuai usulan/kebutuhan masing-masing unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian.	Triwulan III 2024	Bagian Perencanaan
H	**Persentase Realisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Bidang Perkeretaapian**		
1	Percepatan penagihan TAC Tahun 2024 sesuai ketentuan baru terkait besaran Satuan Biaya Penggunaan Prasarana (SBPP) dan Faktor Prioritas (Fp).	Triwulan III-IV 2024	Bagian Keuangan
2	Koordinasi dan monitoring untuk percepatan proses penyelesaian penilaian KPKNL terhadap penggunaan Depo Solo Jebres dan Depo Depok.	Triwulan III 2024	Bagian Keuangan
3	Diusulkan revisi rencana aksi pada Perjanjian Kinerja Tahun 2024 dikarenakan capaian kinerja Triwulan II 2024 tidak memenuhi kriteria *on the right track* (melebihi capaian kinerja 110%).	Triwulan III 2024	Bagian Perencanaan, Bagian Keuangan
I	**Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran Ditjen Perkeretaapian**		
1.	Koordinasi intensif dengan instansi terkait (Kementerian Keuangan, Bappenas, KSP, Setjen dan Itjen Kemenhub) untuk dukungan percepatan optimalisasi anggaran melalui relaksasi AA, usulan rekomposisi SBSN dan dispensasi perpanjangan kontrak tahun jamak.	Triwulan III 2024	Bagian Keuangan

NO	REKOMENDASI PENINGKATAN KINERJA	WAKTU PELAKSANAAN	PIC
2.	Percepatan penugasan penyelenggaraan IMO Tahun 2024 sehingga dapat segera kontrak dan dilaksanakan oleh masing-masing Balai Teknik Perkeretaapian.	Triwulan III 2024	Bagian Keuangan, Bagian Hukum
3	Diusulkan revisi rencana aksi pada Perjanjian Kinerja Tahun 2024 dikarenakan capaian kinerja Triwulan II 2024 tidak memenuhi kriteria on the right track (melebihi capaian kinerja 110%).	Triwulan III 2024	Bagian Perencanaan, Bagian Keuangan
4	Koordinasi dengan seluruh unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian untuk Pengusulan Standar Biaya Keluaran (SBK) Tahun 2025 masing-masing Rincian *Output* agar dapat meningkatkan Variabel penilaian kinerja anggaran sesuai dengan PMK Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan.	Triwulan III-IV 2024	Bagian Perencanaan, Bagian Keuangan
J	**Tingkat Kualitas Pelayanan Perkantoran Ditjen Perkeretaapian**		
1	Penyelesaian dan penetapan proses bisnis di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian.	Triwulan III-IV 2024	Bagian SDM dan Umum
2	*Update* data kompetensi pegawai untuk mendukung Indeks Profesional ASN di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian pada Sistem Informasi Kepegawaian (SIK) Kementerian Perhubungan.	Triwulan III 2024	Seluruh Bagian
3	Pelaksanaan kegiatan pembinaan SDM/kepegawaian secara intensif termasuk pemenuhan hak pegawai sesuai ketentuan.	Triwulan III-IV 2024	Bagian SDM dan Umum

Jakarta, Juli 2024

SEKRETARIS

DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

JUJUN ENDAH WAHJUNINGRUM

Pembina Utama Madya (IV/d)

NIP. 19650703 199103 2 001

LAMPIRAN III

Monitoring Renaksi Periode April - Juni 2024

MONITORING RENCANA AKSI ATAS PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

Bulan: April, Tahun: 2024

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Dalam PK	Kegiatan	Indikator Kinerja Output	Target Kinerja Output	Target Bulan 4				Realisasi Bulan 4		Realisasi Bulan 4		Evaluasi	Rencana Tindak Lanjut	Penanggung Jawab
							Target Output		Target Anggaran		Realisasi Output	Realisasi Anggaran	Capaian Output	Capaian Anggaran			
							Volume	%	Volume	%	Volume	Volume	%	%			
TERLAKSANANYA PERUMUSAN REGULASI DAN KEBIJAKAN DALAM PENYELENGGARAAN PERKERETAAPIAN	PERSENTASE PENCAPAIAN TARGET LEGALISASI (JUMLAH RANCANGAN DAN PERATURAN PERUNDANGAN) BIDANG PERKERETAAPIAN	Dokumen	100	Penyusunan kajian kebijakan/standar/pedoman teknis (Kajian Naskah Akademis Usulan Perubahan UU Nomor 23 Tahun 2007)	-	1	-	-	546.726.000	6.7	-	-	-	-	Kegiatan masih dalam tahap persiapan	Percepatan penyelesaian kegiatan sesuai target waktu	Kabag Hukum
TERLAKSANANYA PERUMUSAN REGULASI DAN KEBIJAKAN DALAM PENYELENGGARAAN PERKERETAAPIAN	PERSENTASE PENCAPAIAN TARGET LEGALISASI (JUMLAH RANCANGAN DAN PERATURAN PERUNDANGAN) BIDANG PERKERETAAPIAN	Dokumen	100	Koordinasi Penyusunan Peraturan PerundangUndangan di Bidang Perkeretaapian	-	1	-	-	509.182.800	5.3	-	242.721.546	-	47.67%	Kegiatan masih dalam proses pelaksanaan	Percepatan penyelesaian kegiatan sesuai target waktu	Kabag Hukum
TERLAKSANANYA PERUMUSAN REGULASI DAN KEBIJAKAN DALAM PENYELENGGARAAN PERKERETAAPIAN	PERSENTASE PENCAPAIAN TARGET LEGALISASI (JUMLAH RANCANGAN DAN PERATURAN PERUNDANGAN) BIDANG PERKERETAAPIAN	Tahun	100	Koordinasi Pengendalian dan Pengawasan Produk Hukum Atas Penyelenggaraan Perkeretaapian	-	1	-	-	98.115.500	5.3	-	1.491.000	-	1.52%	Kegiatan masih dalam proses pelaksanaan	Percepatan penyelesaian kegiatan sesuai target waktu	Kabag Hukum

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Dalam PK	Kegiatan	Indikator Kinerja Output	Target Kinerja Output	Target Bulan 4				Realisasi Bulan 4		Realisasi Bulan 4		Evaluasi	Rencana Tindak Lanjut	Penanggung Jawab
							Target Output		Target Anggaran		Realisasi Output	Realisasi Anggaran	Capaian Output	Capaian Anggaran			
							Volume	%	Volume	%	Volume	Volume	%	%			
TERLAKSANANYA PERUMUSAN REGULASI DAN KEBIJAKAN DALAM PENYELENGGARAAN PERKERETAAPIAN	PERSENTASE PENCAPAIAN TARGET LEGALISASI (JUMLAH RANCANGAN DAN PERATURAN PERUNDANGAN) BIDANG PERKERETAAPIAN	Tahun	100	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan di Bidang Perkeretaapian	-	1	-	-	144.333.700	5.3	-	-	-	-	Kegiatan masih dalam tahap persiapan	Percepatan penyelesaian kegiatan sesuai target waktu	Kabag Hukum
TERLAKSANANYA PERUMUSAN REGULASI DAN KEBIJAKAN DALAM PENYELENGGARAAN PERKERETAAPIAN	PERSENTASE PENCAPAIAN TARGET LEGALISASI (JUMLAH RANCANGAN DAN PERATURAN PERUNDANGAN) BIDANG PERKERETAAPIAN	%	100	Penyusunan Pendapat Hukum (Legal Opinion)	-	1	-	-	156.764.650	5.3	-	-	-	-	Kegiatan masih dalam tahap persiapan	Percepatan penyelesaian kegiatan sesuai target waktu	Kabag Hukum
TERLAKSANANYA PERUMUSAN REGULASI DAN KEBIJAKAN DALAM PENYELENGGARAAN PERKERETAAPIAN	PERSENTASE PENCAPAIAN TARGET LEGALISASI (JUMLAH RANCANGAN DAN PERATURAN PERUNDANGAN) BIDANG PERKERETAAPIAN	Tahun	100	Pengelolaan Hukum	-	1	-	-	103.673.206	1.15	-	286.333.278	-	276.19%	Kegiatan masih dalam proses pelaksanaan	Percepatan penyelesaian kegiatan sesuai target waktu	Kabag Hukum
TERSEDIANYA SDM PERKERETAAPIAN YANG KOMPETEN DAN PROFESIONAL	PERSENTASE ASN DITJEN PERKERETAAPIAN YANG MEMILIKI SERTIFIKAT KOMPETENSI/KEAHLIAN TERTENTU	Dokumen	65	Penyusunan kajian kebijakan/standar/pedoman teknis (Roadmap kepegawaian di lingkungan Ditjen Perkeretaapian)	-	1	-	-	180.000.150	2.4	-	-	-	-	Kegiatan masih dalam tahap persiapan	Percepatan penyelesaian kegiatan sesuai target waktu	Kabag Kepegawaian dan Umum

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Dalam PK	Kegiatan	Indikator Kinerja Output	Target Kinerja Output	Target Bulan 4				Realisasi Bulan 4		Realisasi Bulan 4		Evaluasi	Rencana Tindak Lanjut	Penanggung Jawab
							Target Output		Target Anggaran		Realisasi Output	Realisasi Anggaran	Capaian Output	Capaian Anggaran			
							Volume	%	Volume	%	Volume	Volume	%	%			
TERSEDIANYA SDM PERKERETAAPIAN YANG KOMPETEN DAN PROFESIONAL	PERSENTASE ASN DITJEN PERKERETAAPIAN YANG MEMILIKI SERTIFIKAT KOMPETENSI/KEAHLIAN TERTENTU	Tahun	65	Pembinaan Jabatan Fungsional Arsiparis	-	1	-	-	18.756.155	1.15	-	-	-	-	Kegiatan masih dalam tahap persiapan	Percepatan penyelesaian kegiatan sesuai target waktu	Kabag SDM dan Umum
TERSEDIANYA SDM PERKERETAAPIAN YANG KOMPETEN DAN PROFESIONAL	PERSENTASE ASN DITJEN PERKERETAAPIAN YANG MEMILIKI SERTIFIKAT KOMPETENSI/KEAHLIAN TERTENTU	Tahun	65	Pengelolaan Kepegawaian	-	1	-	-	282.750.083	1.15	-	1.163.790.774	-	411.6%	Kegiatan masih dalam proses pelaksanaan	Percepatan penyelesaian kegiatan sesuai target waktu	Kabag SDM dan Umum
TERSEDIANYA SDM PERKERETAAPIAN YANG KOMPETEN DAN PROFESIONAL	PERSENTASE ASN DITJEN PERKERETAAPIAN YANG MEMILIKI SERTIFIKAT KOMPETENSI/KEAHLIAN TERTENTU		65	Pembinaan Mental dan Spiritual Pegawai	-	1	-	-	7.186.649	1.15	-	57.117.810	-	794.78%	Kegiatan masih dalam proses pelaksanaan	Percepatan penyelesaian kegiatan sesuai target waktu	Kabag SDM dan Umum
TERSEDIANYA SDM PERKERETAAPIAN YANG KOMPETEN DAN PROFESIONAL	PERSENTASE ASN DITJEN PERKERETAAPIAN YANG MEMILIKI SERTIFIKAT KOMPETENSI/KEAHLIAN TERTENTU	Tahun	65	Monitoring dan Evaluasi Kinerja Pegawai di Lingkungan Ditjen Perkeretaapian	-	1	-	-	51.773.550	1.15	-	81.403.499	-	157.23%	Kegiatan masih dalam proses pelaksanaan	Percepatan penyelesaian kegiatan sesuai target waktu	Kabag SDM dan Umum
TERSEDIANYA SDM PERKERETAAPIAN YANG KOMPETEN DAN PROFESIONAL	PERSENTASE ASN DITJEN PERKERETAAPIAN YANG MEMILIKI SERTIFIKAT KOMPETENSI/KEAHLIAN TERTENTU	Tahun	65	Character Building	-	1	-	-	189.906.334	1.15	-	1.610.794.940	-	848.2%	Kegiatan masih dalam proses pelaksanaan	Percepatan penyelesaian kegiatan sesuai target waktu	Kabag SDM dan Umum

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Dalam PK	Kegiatan	Indikator Kinerja Output	Target Kinerja Output	Target Bulan 4				Realisasi Bulan 4		Realisasi Bulan 4		Evaluasi	Rencana Tindak Lanjut	Penanggung Jawab
							Target Output		Target Anggaran		Realisasi Output	Realisasi Anggaran	Capaian Output	Capaian Anggaran			
							Volume	%	Volume	%	Volume	Volume	%	%			
TERSEDIANYA SDM PERKERETAAPIAN YANG KOMPETEN DAN PROFESIONAL	PERSENTASE ASN DITJEN PERKERETAAPIAN YANG MEMILIKI SERTIFIKAT KOMPETENSI/KEAHLIAN TERTENTU	Tahun	65	Pelantikan dan Serah Terima Jabatan di Lingkungan Ditjen Perkeretaapian	-	1	-	-	9.180.088	1.15	-	49.433.295	-	538.48%	Kegiatan masih dalam proses pelaksanaan	Percepatan penyelesaian kegiatan sesuai target waktu	Kabag SDM dan Umum
TERWUJUDNYA GOOD GOVERNANCE DAN CLEAN GOVERNMENT DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN	NILAI AKIP DITJEN PERKERETAAPIAN	Tahun	83	Penyusunan rencana program dan Penyusunan rencana anggaran	-	1	-	-	1.874.170.186	5.64	-	359.918.998	-	19.2%	Kegiatan masih dalam proses pelaksanaan	Percepatan penyelesaian kegiatan sesuai target waktu	Kabag Perencanaan
TERWUJUDNYA GOOD GOVERNANCE DAN CLEAN GOVERNMENT DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN	NILAI AKIP DITJEN PERKERETAAPIAN	Dokumen	83	Penyusunan Dokumen SAKIP Ditjen Perkeretaapian serta Sekretariat Ditjen Perkeretaapian	-	9	-	-	346.095.493	4.07	-	374.587.840	-	108.23%	Kegiatan masih dalam proses pelaksanaan	Percepatan penyelesaian kegiatan sesuai target waktu	Kabag Perencanaan
TERWUJUDNYA GOOD GOVERNANCE DAN CLEAN GOVERNMENT DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN	NILAI AKIP DITJEN PERKERETAAPIAN	Laporan	83	Penyusunan Laporan Tahunan dan Pengolahan Data Statistik Direktorat Jenderal Perkeretaapian	-	1	-	-	439.979.433	7.89	-	115.414.000	-	26.23%	Kegiatan masih dalam proses pelaksanaan	Percepatan penyelesaian kegiatan sesuai target waktu	Kabag Perencanaan
TERWUJUDNYA GOOD GOVERNANCE DAN CLEAN GOVERNMENT DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN	NILAI AKIP DITJEN PERKERETAAPIAN	Tahun	83	Penyiapan Bahan Rapat Pimpinan Ditjen Perkeretaapian	-	1	-	-	103.204.800	3.64	-	32.495.250	-	31.49%	Kegiatan masih dalam proses pelaksanaan	Percepatan penyelesaian kegiatan sesuai target waktu	Kabag Perencanaan
TERWUJUDNYA GOOD GOVERNANCE DAN CLEAN GOVERNMENT DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN	NILAI AKIP DITJEN PERKERETAAPIAN	Tahun	83	Monitoring Pemantauan Penyelenggaraan Perkeretaapian Pantauan Kantor Staf Presiden, Bappenas, Kemenko Marinvest, Kemenko	-	1	-	-	325.320.602	4.58	-	92.258.790	-	28.36%	Kegiatan masih dalam proses pelaksanaan	Percepatan penyelesaian kegiatan sesuai target waktu	Kabag Perencanaan
TERWUJUDNYA GOOD GOVERNANCE DAN CLEAN GOVERNMENT DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN	NILAI AKIP DITJEN PERKERETAAPIAN	Tahun	83	Monitoring Perencanaan dan Pengendalian Bidang Perkeretaapian	-	1	-	-	120.137.762	2.75	-	142.059.790	-	118.25%	Kegiatan masih dalam proses pelaksanaan	Percepatan penyelesaian kegiatan sesuai target waktu	Kabag Perencanaan

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Dalam PK	Kegiatan	Indikator Kinerja Output	Target Kinerja Output	Target Bulan 4				Realisasi Bulan 4		Realisasi Bulan 4		Evaluasi	Rencana Tindak Lanjut	Penanggung Jawab
							Target Output		Target Anggaran		Realisasi Output	Realisasi Anggaran	Capaian Output	Capaian Anggaran			
							Volume	%	Volume	%	Volume	Volume	%	%			
TERWUJUDNYA GOOD GOVERNANCE DAN CLEAN GOVERNMENT DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN	NILAI AKIP DITJEN PERKERETAAPIAN	Tahun	83	Monitoring Pinjaman Hibah Luar Negeri dan Kegiatan Pendanaan Tanah Melalui Lembaga Manajemen Aset Negara di Lingkungan Ditjen Perkeretaapian	-	1	-	-	150.870.700	1.79	-	506.786.425	-	335.91%	Kegiatan masih dalam proses pelaksanaan	Percepatan penyelesaian kegiatan sesuai target waktu	Kabag Perencanaan
TERWUJUDNYA GOOD GOVERNANCE DAN CLEAN GOVERNMENT DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN	NILAI AKIP DITJEN PERKERETAAPIAN	Tahun	83	Monitoring Pelaksanaan Rencana Strategis Bidang Perkeretaapian dan Rencana Induk Perkeretaapian Nasional	-	1	-	-	150.870.700	2.75	-	312.544.794	-	207.16%	Kegiatan masih dalam proses pelaksanaan	Percepatan penyelesaian kegiatan sesuai target waktu	Kabag Perencanaan
TERWUJUDNYA GOOD GOVERNANCE DAN CLEAN GOVERNMENT DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN	NILAI AKIP DITJEN PERKERETAAPIAN	Tahun	83	Penyusunan kajian masterplan/kebijakan (Penyusunan Studi Potensi PNBP, Potensi Pasar, dan Bentuk Kerjasama Pemanfaatan Stasiun Jatinegara dan Stasiun Manggarai)	-	1	-	-	450.016.200	2.4	-	-	-	-	Kegiatan masih dalam tahap persiapan	Percepatan penyelesaian kegiatan sesuai target waktu	Kabag Perencanaan
TERWUJUDNYA GOOD GOVERNANCE DAN CLEAN GOVERNMENT DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN	NILAI AKIP DITJEN PERKERETAAPIAN	Tahun	83	Kegiatan Penunjang Non Operasional Organisasi (Pengembangan Organisasi di Lingkungan DJKA)	-	1	-	-	25.050.000	2.4	-	28.083.000	-	112.11%	Kegiatan masih dalam proses pelaksanaan	Percepatan penyelesaian kegiatan sesuai target waktu	Kabag SDM dan Umum
TERWUJUDNYA GOOD GOVERNANCE DAN CLEAN GOVERNMENT DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN	TINGKAT MATURASI SPIP DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN	Laporan	3	Penyusunan Laporan Pengelolaan Keuangan	-	1	-	-	120.549.600	2.52	-	442.717.805	-	367.25%	Kegiatan masih dalam proses pelaksanaan	Percepatan penyelesaian kegiatan sesuai target waktu	Kabag Keuangan
TERWUJUDNYA GOOD GOVERNANCE DAN CLEAN GOVERNMENT DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN	TINGKAT MATURASI SPIP DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN	Tahun	3	Contact Center Bidang Perkeretaapian	-	1	-	-	9.996.252	1.15	-	-	-	-	Kegiatan masih dalam tahap persiapan	Percepatan penyelesaian kegiatan sesuai target waktu	Kabag SDM dan Umum

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Dalam PK	Kegiatan	Indikator Kinerja Output	Target Kinerja Output	Target Bulan 4				Realisasi Bulan 4		Realisasi Bulan 4		Evaluasi	Rencana Tindak Lanjut	Penanggung Jawab
							Target Output		Target Anggaran		Realisasi Output	Realisasi Anggaran	Capaian Output	Capaian Anggaran			
							Volume	%	Volume	%	Volume	Volume	%	%			
TERWUJUDNYA GOOD GOVERNANCE DAN CLEAN GOVERNMENT DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN	TINGKAT MATURASI SPIP DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN	Tahun	3	Pembinaan Keprotokolan dan MC	-	1	-	-	10.318.204	1.15	-	49.850.100	-	483.13%	Kegiatan masih dalam proses pelaksanaan	Percepatan penyelesaian kegiatan sesuai target waktu	Kabag SDM dan Umum
TERWUJUDNYA GOOD GOVERNANCE DAN CLEAN GOVERNMENT DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN	TINGKAT MATURASI SPIP DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN	Nilai	3	Penyusunan SPIP Direktorat Jenderal Perkeretaapian dan Manajemen Resiko	-	1	-	-	143.702.394	1.15	-	356.930.940	-	248.38%	Kegiatan masih dalam proses pelaksanaan	Percepatan penyelesaian kegiatan sesuai target waktu	Kabag Perencanaan
TERWUJUDNYA GOOD GOVERNANCE DAN CLEAN GOVERNMENT DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN	TINGKAT MATURASI SPIP DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN	Tahun	3	Pembinaan dan Evaluasi Hasil-Hasil Pemeriksaan dan Tindak Lanjut (LHP)	-	1	-	-	20.853.469	1.15	-	34.665.750	-	166.23%	Kegiatan masih dalam proses pelaksanaan	Percepatan penyelesaian kegiatan sesuai target waktu	Kabag Keuangan
TERWUJUDNYA GOOD GOVERNANCE DAN CLEAN GOVERNMENT DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN	PERSENTASE REALISASI PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP) BIDANG PERKERETAAPIAN	Tahun	100	Pengusulan PNBP Yang Berkaitan Dengan Tupoksi dan Monitoring Pelaksanaan PNBP Ditjen Perkeretaapian	-	1	-	-	324.426.800	6.15	-	10.180.000	-	3.14%	Kegiatan masih dalam proses pelaksanaan	Percepatan penyelesaian kegiatan sesuai target waktu	Kabag Keuangan
TERWUJUDNYA GOOD GOVERNANCE DAN CLEAN GOVERNMENT DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN	PERSENTASE REALISASI PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP) BIDANG PERKERETAAPIAN	Laporan	100	Penyusunan Laporan SIMAK Barang Milik Negara (BMN) di Lingkungan Ditjen Perkeretaapian	-	11	1	9.09	535.203.000	10.42	-	53.431.600	-	9.98%	Kegiatan masih dalam proses pelaksanaan	Percepatan penyelesaian kegiatan sesuai target waktu	Kabag Keuangan
TERWUJUDNYA GOOD GOVERNANCE DAN CLEAN GOVERNMENT DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN	PERSENTASE REALISASI PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP) BIDANG PERKERETAAPIAN	Tahun	100	Peninjauan Lapangan Pemanfaatan Barang Milik Negara pada Ditjen Perkeretaapian	-	1	-	-	100.971.600	6.15	-	163.491.828	-	161.92%	Kegiatan masih dalam proses pelaksanaan	Percepatan penyelesaian kegiatan sesuai target waktu	Kabag Keuangan

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Dalam PK	Kegiatan	Indikator Kinerja Output	Target Kinerja Output	Target Bulan 4				Realisasi Bulan 4		Realisasi Bulan 4		Evaluasi	Rencana Tindak Lanjut	Penanggung Jawab
							Target Output		Target Anggaran		Realisasi Output	Realisasi Anggaran	Capaian Output	Capaian Anggaran			
							Volume	%	Volume	%	Volume	Volume	%	%			
TERWUJUDNYA GOOD GOVERNANCE DAN CLEAN GOVERNMENT DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN	PERSENTASE REALISASI PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP) BIDANG PERKERETAAPIAN	Tahun	100	Pemutakhiran Data Investasi dan Penilaian Direktorat Jenderal Perkeretaapian	-	11	1	9.09	175.338.000	6.15	-	8.803.380	-	5.02%	Kegiatan masih dalam proses pelaksanaan	Percepatan penyelesaian kegiatan sesuai target waktu	Kabag Keuangan
TERWUJUDNYA GOOD GOVERNANCE DAN CLEAN GOVERNMENT DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN	PERSENTASE REALISASI PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP) BIDANG PERKERETAAPIAN	Tahun	100	Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara (BMN)	-	1	-	-	233.129.020	1.19	-	1.556.643.926	-	667.72%	Kegiatan masih dalam proses pelaksanaan	Percepatan penyelesaian kegiatan sesuai target waktu	Kabag Keuangan
TERWUJUDNYA GOOD GOVERNANCE DAN CLEAN GOVERNMENT DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN	PERSENTASE REALISASI PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP) BIDANG PERKERETAAPIAN	Tahun	100	Pengelolaan Pembinaan Badan Layanan Umum	-	1	-	-	13.825.176	1.19	-	1.820.000	-	13.16%	Kegiatan masih dalam proses pelaksanaan	Percepatan penyelesaian kegiatan sesuai target waktu	Kabag Keuangan
TERWUJUDNYA GOOD GOVERNANCE DAN CLEAN GOVERNMENT DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN	PERSENTASE KUALITAS PELAKSANAAN ANGGARAN DITJEN PERKERETAAPIAN	Tahun	89	Monitoring Pelaksanaan Anggaran	-	1	-	-	75.035.880	0.95	-	284.019.561	-	378.51%	Kegiatan masih dalam proses pelaksanaan	Percepatan penyelesaian kegiatan sesuai target waktu	Kabag Keuangan
TERWUJUDNYA GOOD GOVERNANCE DAN CLEAN GOVERNMENT DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN	PERSENTASE KUALITAS PELAKSANAAN ANGGARAN DITJEN PERKERETAAPIAN	Tahun	89	Administrasi Kantor PPK Pelayanan Kepegawaian dan Kerumahtanggaan serta Peningkatan Kelembagaan	-	1	-	-	181.183.680	5.1	-	14.045.028	-	7.75%	Kegiatan masih dalam proses pelaksanaan	Percepatan penyelesaian kegiatan sesuai target waktu	Kabag SDM dan Umum

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Dalam PK	Kegiatan	Indikator Kinerja Output	Target Kinerja Output	Target Bulan 4				Realisasi Bulan 4		Realisasi Bulan 4		Evaluasi	Rencana Tindak Lanjut	Penanggung Jawab
							Target Output		Target Anggaran		Realisasi Output	Realisasi Anggaran	Capaian Output	Capaian Anggaran			
							Volume	%	Volume	%	Volume	Volume	%	%			
TERWUJUDNYA GOOD GOVERNANCE DAN CLEAN GOVERNMENT DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN	PERSENTASE KUALITAS PELAKSANAAN ANGGARAN DITJEN PERKERETAAPIAN	Tahun	89	Administrasi Kegiatan Satker Kantor Pusat Ditjen Perkeretaapian	-	1	-	-	384.768.000	5.1	-	293.696.700	-	76.33%	Kegiatan masih dalam proses pelaksanaan	Percepatan penyelesaian kegiatan sesuai target waktu	Kabag Keuangan
TERWUJUDNYA GOOD GOVERNANCE DAN CLEAN GOVERNMENT DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN	PERSENTASE KUALITAS PELAKSANAAN ANGGARAN DITJEN PERKERETAAPIAN	Tahun	89	Administrasi Kegiatan Kantor PPTKA	-	1	-	-	337.814.720	5.1	-	50.168.160	-	14.85%	Kegiatan masih dalam proses pelaksanaan	Percepatan penyelesaian kegiatan sesuai target waktu	Kabag Perencanaan
TERWUJUDNYA GOOD GOVERNANCE DAN CLEAN GOVERNMENT DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN	PERSENTASE KUALITAS PELAKSANAAN ANGGARAN DITJEN PERKERETAAPIAN	Tahun	89	Administrasi Satuan Kerja Pelayanan Peraturan Perundang-Undangan, Perjanjian dan Kehumasan	-	1	-	-	273.595.200	5.1	-	187.293.607	-	68.46%	Kegiatan masih dalam proses pelaksanaan	Percepatan penyelesaian kegiatan sesuai target waktu	Kabag Hukum
TERWUJUDNYA GOOD GOVERNANCE DAN CLEAN GOVERNMENT DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN	PERSENTASE KUALITAS PELAKSANAAN ANGGARAN DITJEN PERKERETAAPIAN	Tahun	89	Rapat Koordinasi Antar Bagian, Direktorat dan Rapat koordinasi Teknis Ditjen Perkeretaapian	-	1	-	-	518.110.400	5.1	-	125.786.279	-	24.28%	Kegiatan masih dalam proses pelaksanaan	Percepatan penyelesaian kegiatan sesuai target waktu	Kabag Keuangan
TERWUJUDNYA GOOD GOVERNANCE DAN CLEAN GOVERNMENT DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN	PERSENTASE KUALITAS PELAKSANAAN ANGGARAN DITJEN PERKERETAAPIAN	Tahun	89	Pembinaan Pengelolaan Balai/Satker di Lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian	-	1	-	-	251.191.680	5.1	-	51.062.700	-	20.33%	Kegiatan masih dalam proses pelaksanaan	Percepatan penyelesaian kegiatan sesuai target waktu	Kabag Keuangan
TERWUJUDNYA GOOD GOVERNANCE DAN CLEAN GOVERNMENT DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN	TINGKAT KEPUASAN PELAYANAN PERKANTORAN DITJEN PERKERETAAPIAN	Tahun	3,7	Pembinaan Sistem Administrasi Perkantoran	-	1	-	-	177.845.850	5.3	-	57.611.265	-	32.39%	Kegiatan masih dalam proses pelaksanaan	Percepatan penyelesaian kegiatan sesuai target waktu	Kabag SDM dan Umum

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Dalam PK	Kegiatan	Indikator Kinerja Output	Target Kinerja Output	Target Bulan 4				Realisasi Bulan 4		Realisasi Bulan 4		Evaluasi	Rencana Tindak Lanjut	Penanggung Jawab
							Target Output		Target Anggaran		Realisasi Output	Realisasi Anggaran	Capaian Output	Capaian Anggaran			
							Volume	%	Volume	%	Volume	Volume	%	%			
TERWUJUDNYA GOOD GOVERNANCE DAN CLEAN GOVERNMENT DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN	TINGKAT KEPUASAN PELAYANAN PERKANTORAN DITJEN PERKERETAAPIAN	Tahun	3,7	Pengelolaan Arsip	-	1	-	-	223.808.039	8.58	-	77.299.600	-	34.54%	Kegiatan masih dalam proses pelaksanaan	Percepatan penyelesaian kegiatan sesuai target waktu	Kabag SDM dan Umum
TERWUJUDNYA GOOD GOVERNANCE DAN CLEAN GOVERNMENT DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN	TINGKAT KEPUASAN PELAYANAN PERKANTORAN DITJEN PERKERETAAPIAN	Tahun	3,7	Monitoring Ketatausahaan	-	1	-	-	1.912.936.478	12.48	-	3.080.000	-	0.16%	Kegiatan masih dalam proses pelaksanaan	Percepatan penyelesaian kegiatan sesuai target waktu	Kabag SDM dan Umum
TERWUJUDNYA GOOD GOVERNANCE DAN CLEAN GOVERNMENT DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN	TINGKAT KEPUASAN PELAYANAN PERKANTORAN DITJEN PERKERETAAPIAN	Tahun	3,7	Bimbingan Teknis Kesekretariatan dan Ketatausahaan	-	1	-	-	66.197.250	3.32	-	-	-	-	Kegiatan masih dalam tahap persiapan	Percepatan penyelesaian kegiatan sesuai target waktu	Kabag SDM dan Umum
TERWUJUDNYA GOOD GOVERNANCE DAN CLEAN GOVERNMENT DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN	TINGKAT KEPUASAN PELAYANAN PERKANTORAN DITJEN PERKERETAAPIAN	%	3,7	Inventarisasi arsip statis dan arsip terjaga di lingkungan DJKA	-	1	-	-	37.525.500	2.79	-	-	-	-	Kegiatan masih dalam tahap persiapan	Percepatan penyelesaian kegiatan sesuai target waktu	Kabag SDM dan Umum
TERWUJUDNYA GOOD GOVERNANCE DAN CLEAN GOVERNMENT DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN	TINGKAT KEPUASAN PELAYANAN PERKANTORAN DITJEN PERKERETAAPIAN	Tahun	3,7	Administrasi Pengelolaan Umum dan Rumah Tangga	-	1	-	-	118.533.750	3.73	-	23.274.396	-	19.64%	Kegiatan masih dalam proses pelaksanaan	Percepatan penyelesaian kegiatan sesuai target waktu	Kabag SDM dan Umum
TERWUJUDNYA GOOD GOVERNANCE DAN CLEAN GOVERNMENT DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN	TINGKAT KEPUASAN PELAYANAN PERKANTORAN DITJEN PERKERETAAPIAN	Tahun	3,7	Monitoring Pemeliharaan dan Perawatan Mesin Absensi UPT/Balai dan Satker Perkeretaapian	-	1	-	-	15.135.240	0.95	-	-	-	-	Kegiatan masih dalam tahap persiapan	Percepatan penyelesaian kegiatan sesuai target waktu	Kabag SDM dan Umum
TERWUJUDNYA GOOD GOVERNANCE DAN CLEAN GOVERNMENT DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN	TINGKAT KEPUASAN PELAYANAN PERKANTORAN DITJEN PERKERETAAPIAN	Tahun	3,7	Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN)	-	1	-	-	23.015.080	0.95	-	1.800.000	-	7.82%	Kegiatan masih dalam proses pelaksanaan	Percepatan penyelesaian kegiatan sesuai target waktu	Kabag SDM dan Umum

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Dalam PK	Kegiatan	Indikator Kinerja Output	Target Kinerja Output	Target Bulan 4				Realisasi Bulan 4		Realisasi Bulan 4		Evaluasi	Rencana Tindak Lanjut	Penanggung Jawab
							Target Output		Target Anggaran		Realisasi Output	Realisasi Anggaran	Capaian Output	Capaian Anggaran			
							Volume	%	Volume	%	Volume	Volume	%	%			
TERWUJUDNYA GOOD GOVERNANCE DAN CLEAN GOVERNMENT DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN	TINGKAT KEPUASAN PELAYANAN PERKANTORAN DITJEN PERKERETAAPIAN	Tahun	3,7	Bimbingan Teknis Kerumahtanggaan dan Umum	-	1	-	-	17.020.280	0.95	-	-	-	-	Kegiatan masih dalam tahap persiapan	Percepatan penyelesaian kegiatan sesuai target waktu	Kabag SDM dan Umum
TERWUJUDNYA GOOD GOVERNANCE DAN CLEAN GOVERNMENT DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN	TINGKAT KEPUASAN PELAYANAN PERKANTORAN DITJEN PERKERETAAPIAN	%	3,7	Pemutakhiran Data Kartu dan Validasi Pencatatan Barang Inventaris, Dalam Rangka Penatausahaan BMN Perkantoran DJKA	-	1	-	-	111.950.400	5.1	-	106.567.184	-	95.19%	Kegiatan masih dalam proses pelaksanaan	Percepatan penyelesaian kegiatan sesuai target waktu	Kabag SDM dan Umum
TERWUJUDNYA GOOD GOVERNANCE DAN CLEAN GOVERNMENT DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN	TINGKAT KEPUASAN PELAYANAN PERKANTORAN DITJEN PERKERETAAPIAN	Tahun	3,7	Pengadaan Makanan/Minuman Penambah Daya Tahan Tubuh	-	1	-	-	65.860.480	5.1	-	6.830.000	-	10.37%	Kegiatan masih dalam proses pelaksanaan	Percepatan penyelesaian kegiatan sesuai target waktu	Kabag SDM dan Umum
TERWUJUDNYA GOOD GOVERNANCE DAN CLEAN GOVERNMENT DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN	TINGKAT KEPUASAN PELAYANAN PERKANTORAN DITJEN PERKERETAAPIAN	Unit	3,7	Kendaraan Bermotor	6	259	23	8.88	3.932.849.000	9.66	6	2.033.970.000	26.09%	51.72%	Kegiatan masih dalam proses pelaksanaan	Percepatan penyelesaian kegiatan sesuai target waktu	Kabag SDM dan Umum
TERWUJUDNYA GOOD GOVERNANCE DAN CLEAN GOVERNMENT DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN	TINGKAT KEPUASAN PELAYANAN PERKANTORAN DITJEN PERKERETAAPIAN	Tahun	3,7	Renovasi gedung dan bangunan	-	1	-	-	2.075.933.250	3.06	-	1.310.174.400	-	63.11%	Kegiatan masih dalam proses pelaksanaan	Percepatan penyelesaian kegiatan sesuai target waktu	Kabag SDM dan Umum
TERWUJUDNYA GOOD GOVERNANCE DAN CLEAN GOVERNMENT DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN	TINGKAT KEPUASAN PELAYANAN PERKANTORAN DITJEN PERKERETAAPIAN	Tahun	3,7	Gaji dan Tunjangan	-	1	-	-	21.237.895.360	5.1	-	28.098.005.456	-	132.3%	Kegiatan masih dalam proses pelaksanaan, dilaksanakan periode satu tahun	Percepatan penyelesaian kegiatan sesuai target waktu	Kabag SDM dan Umum

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Dalam PK	Kegiatan	Indikator Kinerja Output	Target Kinerja Output	Target Bulan 4				Realisasi Bulan 4		Realisasi Bulan 4		Evaluasi	Rencana Tindak Lanjut	Penanggung Jawab
							Target Output		Target Anggaran		Realisasi Output	Realisasi Anggaran	Capaian Output	Capaian Anggaran			
							Volume	%	Volume	%	Volume	Volume	%	%			
TERWUJUDNYA GOOD GOVERNANCE DAN CLEAN GOVERNMENT DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN	TINGKAT KEPUASAN PELAYANAN PERKANTORAN DITJEN PERKERETAAPIAN	Tahun	3,7	Operasional dan Pemeliharaan Kantor	-	1	-	-	8.750.743.040	5.1	-	6.782.009.485	-	77.5%	Kegiatan masih dalam proses pelaksanaan	Percepatan penyelesaian kegiatan sesuai target waktu	Kabag SDM dan Umum
TERMANFAATKANYA KEBIJAKAN PEMBINAAN DAN PENINGKATAN PERKERETAAPIAN	PERSENTASE REKOMENDASI KEBIJAKAN PEMBINAAN DAN PENINGKATAN KONEKTIVITAS PERKERETAAPIAN YANG TELAH DITINDAKLANJUTI	Dokumen	100	Penyusunan dokumen perencanaan	-	15	-	-	1.075.033.650	2.28	-	-	-	-	Kegiatan masih dalam tahap persiapan	Percepatan penyelesaian kegiatan sesuai target waktu	Kabag Perencanaan
SISTEM INFORMASI DAN TEKNOLOGI YANG ANDAL	PERSENTASE PEMENUHAN RENCANA INDUK TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI BIDANG PERKERETAAPIAN	Tahun	77	Pengelolaan data dan informasi	-	1	-	-	428.088.150	5.3	-	93.064.300	-	21.74%	Kegiatan masih dalam proses pelaksanaan	Percepatan penyelesaian kegiatan sesuai target waktu	Kabag Perencanaan
SISTEM INFORMASI DAN TEKNOLOGI YANG ANDAL	PERSENTASE PEMENUHAN RENCANA INDUK TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI BIDANG PERKERETAAPIAN	Tahun	77	Penyusunan Desain Pengembangan/Pengelolaan Sistem Informasi	-	1	-	-	150.000.000	2.4	-	-	-	-	Kegiatan masih dalam tahap persiapan	Percepatan penyelesaian kegiatan sesuai target waktu	Kabag Perencanaan

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Dalam PK	Kegiatan	Indikator Kinerja Output	Target Kinerja Output	Target Bulan 4				Realisasi Bulan 4		Realisasi Bulan 4		Evaluasi	Rencana Tindak Lanjut	Penanggung Jawab
							Target Output		Target Anggaran		Realisasi Output	Realisasi Anggaran	Capaian Output	Capaian Anggaran			
							Volume	%	Volume	%	Volume	Volume	%	%			
SISTEM INFORMASI DAN TEKNOLOGI YANG ANDAL	PERSENTASE PEMENUHAN RENCANA INDUK TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI BIDANG PERKERETAAPIAN	Tahun	77	Pembangunan dan Pengembangan Sistem Informasi Direktorat Jenderal Perkeretaapian	-	1	-	-	510.000.000	6.7	-	-	-	-	Kegiatan masih dalam tahap persiapan	Percepatan penyelesaian kegiatan sesuai target waktu	Kabag Perencanaan
DUKUNGAN PUBLIK TERHADAP PENYELENGGARAAN PERKERETAAPIAN	PERSENTASE PEMENUHAN PUBLIKASI DITJEN PERKERETAAPIAN	Tahun	100	Pelayanan humas dan protokoler	-	1	-	-	583.823.836	1.04	-	1.184.415.938	-	202.87%	Kegiatan masih dalam proses pelaksanaan	Percepatan penyelesaian kegiatan sesuai target waktu	Kabag Hukum

SEKRETARIS

DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

JUJUN ENDAH WAHJUNINGRUM

Pembina Utama Madya (IV/d)

NIP. 19650703 199103 2 001

MONITORING RENCANA AKSI ATAS PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

Bulan: Mei, Tahun: 2024

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Dalam PK	Kegiatan	Indikator Kinerja Output	Target Kinerja Output	Target Bulan 5				Realisasi Bulan 5		Realisasi Bulan 5		Evaluasi	Rencana Tindak Lanjut	Penanggung Jawab
							Target Output		Target Anggaran		Realisasi Output	Realisasi Anggaran	Capaian Output	Capaian Anggaran			
							Volume	%	Volume	%	Volume	Volume	%	%			
TERLAKSANANYA PERUMUSAN REGULASI DAN KEBIJAKAN DALAM PENYELENGGARAAN PERKERETAAPIAN	PERSENTASE PENCAPAIAN TARGET LEGALISASI (JUMLAH RANCANGAN DAN PERATURAN PERUNDANGAN) BIDANG PERKERETAAPIAN	Dokumen	100	Penyusunan kajian kebijakan/standar/pedoman teknis (Kajian Naskah Akademis Usulan Perubahan UU Nomor 23 Tahun 2007)	-	1	-	-	546.726.000	6.7	-	230.690.079	-	42.19%	Kegiatan masih dalam proses pelaksanaan	Percepatan penyelesaian kegiatan sesuai target waktu	Kabag Hukum
TERLAKSANANYA PERUMUSAN REGULASI DAN KEBIJAKAN DALAM PENYELENGGARAAN PERKERETAAPIAN	PERSENTASE PENCAPAIAN TARGET LEGALISASI (JUMLAH RANCANGAN DAN PERATURAN PERUNDANGAN) BIDANG PERKERETAAPIAN	Dokumen	100	Koordinasi Penyusunan Peraturan PerundangUndangan di Bidang Perkeretaapian	-	1	-	-	581.923.200	6.06	-	368.395.249	-	63.31%	Kegiatan masih dalam proses pelaksanaan	Percepatan penyelesaian kegiatan sesuai target waktu	Kabag Hukum
TERLAKSANANYA PERUMUSAN REGULASI DAN KEBIJAKAN DALAM PENYELENGGARAAN PERKERETAAPIAN	PERSENTASE PENCAPAIAN TARGET LEGALISASI (JUMLAH RANCANGAN DAN PERATURAN PERUNDANGAN) BIDANG PERKERETAAPIAN	Tahun	100	Koordinasi Pengendalian dan Pengawasan Produk Hukum Atas Penyelenggaraan Perkeretaapian	-	1	-	-	112.132.000	6.06	-	1.961.000	-	1.75%	Kegiatan masih dalam proses pelaksanaan	Percepatan penyelesaian kegiatan sesuai target waktu	Kabag Hukum

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Dalam PK	Kegiatan	Indikator Kinerja Output	Target Kinerja Output	Target Bulan 5				Realisasi Bulan 5		Realisasi Bulan 5		Evaluasi	Rencana Tindak Lanjut	Penanggung Jawab
							Target Output		Target Anggaran		Realisasi Output	Realisasi Anggaran	Capaian Output	Capaian Anggaran			
							Volume	%	Volume	%	Volume	Volume	%	%			
TERLAKSANANYA PERUMUSAN REGULASI DAN KEBIJAKAN DALAM PENYELENGGARAAN PERKERETAAPIAN	PERSENTASE PENCAPAIAN TARGET LEGALISASI (JUMLAH RANCANGAN DAN PERATURAN PERUNDANGAN) BIDANG PERKERETAAPIAN	Tahun	100	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan di Bidang Perkeretaapian	-	1	-	-	164.952.800	6.06	-	-	-	-	Kegiatan masih dalam tahap persiapan	Percepatan penyelesaian kegiatan sesuai target waktu	Kabag Hukum
TERLAKSANANYA PERUMUSAN REGULASI DAN KEBIJAKAN DALAM PENYELENGGARAAN PERKERETAAPIAN	PERSENTASE PENCAPAIAN TARGET LEGALISASI (JUMLAH RANCANGAN DAN PERATURAN PERUNDANGAN) BIDANG PERKERETAAPIAN	%	100	Penyusunan Pendapat Hukum (Legal Opinion)	-	1	-	-	179.159.600	6.06	-	-	-	-	Kegiatan masih dalam tahap persiapan	Percepatan penyelesaian kegiatan sesuai target waktu	Kabag Hukum
TERLAKSANANYA PERUMUSAN REGULASI DAN KEBIJAKAN DALAM PENYELENGGARAAN PERKERETAAPIAN	PERSENTASE PENCAPAIAN TARGET LEGALISASI (JUMLAH RANCANGAN DAN PERATURAN PERUNDANGAN) BIDANG PERKERETAAPIAN	Tahun	100	Pengelolaan Hukum	-	1	-	-	118.268.903	1.31	-	-	-	-	Kegiatan masih dalam tahap persiapan	Percepatan penyelesaian kegiatan sesuai target waktu	Kabag Hukum
TERSEDIANYA SDM PERKERETAAPIAN YANG KOMPETEN DAN PROFESIONAL	PERSENTASE ASN DITJEN PERKERETAAPIAN YANG MEMILIKI SERTIFIKAT KOMPETENSI/KEAHLIAN TERTENTU	Dokumen	65	Penyusunan kajian kebijakan/standar/pedoman teknis (Roadmap kepegawaian di lingkungan Ditjen Perkeretaapian)	-	1	-	-	180.000.150	2.4	-	-	-	-	Kegiatan masih dalam tahap persiapan	Percepatan penyelesaian kegiatan sesuai target waktu	Kabag Kepegawaian dan Umum

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Dalam PK	Kegiatan	Indikator Kinerja Output	Target Kinerja Output	Target Bulan 5				Realisasi Bulan 5		Realisasi Bulan 5		Evaluasi	Rencana Tindak Lanjut	Penanggung Jawab
							Target Output		Target Anggaran		Realisasi Output	Realisasi Anggaran	Capaian Output	Capaian Anggaran			
							Volume	%	Volume	%	Volume	Volume	%	%			
TERSEDIANYA SDM PERKERETAAPIAN YANG KOMPETEN DAN PROFESIONAL	PERSENTASE ASN DITJEN PERKERETAAPIAN YANG MEMILIKI SERTIFIKAT KOMPETENSI/KEAHLIAN TERTENTU	Tahun	65	Pembinaan Jabatan Fungsional Arsiparis	-	1	-	-	21.396.751	1.31	-	-	-	-	Kegiatan masih dalam tahap persiapan	Percepatan penyelesaian kegiatan sesuai target waktu	Kabag SDM dan Umum
TERSEDIANYA SDM PERKERETAAPIAN YANG KOMPETEN DAN PROFESIONAL	PERSENTASE ASN DITJEN PERKERETAAPIAN YANG MEMILIKI SERTIFIKAT KOMPETENSI/KEAHLIAN TERTENTU	Tahun	65	Pengelolaan Kepegawaian	-	1	-	-	322.557.229	1.31	-	1.305.668.463	-	404.79%	Kegiatan masih dalam proses pelaksanaan	Percepatan penyelesaian kegiatan sesuai target waktu	Kabag SDM dan Umum
TERSEDIANYA SDM PERKERETAAPIAN YANG KOMPETEN DAN PROFESIONAL	PERSENTASE ASN DITJEN PERKERETAAPIAN YANG MEMILIKI SERTIFIKAT KOMPETENSI/KEAHLIAN TERTENTU		65	Pembinaan Mental dan Spiritual Pegawai	-	1	-	-	8.198.426	1.31	-	193.131.660	-	2355.72%	Kegiatan masih dalam proses pelaksanaan	Percepatan penyelesaian kegiatan sesuai target waktu	Kabag SDM dan Umum
TERSEDIANYA SDM PERKERETAAPIAN YANG KOMPETEN DAN PROFESIONAL	PERSENTASE ASN DITJEN PERKERETAAPIAN YANG MEMILIKI SERTIFIKAT KOMPETENSI/KEAHLIAN TERTENTU	Tahun	65	Monitoring dan Evaluasi Kinerja Pegawai di Lingkungan Ditjen Perkeretaapian	-	1	-	-	59.062.521	1.31	-	83.840.999	-	141.95%	Kegiatan masih dalam proses pelaksanaan	Percepatan penyelesaian kegiatan sesuai target waktu	Kabag SDM dan Umum
TERSEDIANYA SDM PERKERETAAPIAN YANG KOMPETEN DAN PROFESIONAL	PERSENTASE ASN DITJEN PERKERETAAPIAN YANG MEMILIKI SERTIFIKAT KOMPETENSI/KEAHLIAN TERTENTU	Tahun	65	Character Building	-	1	-	-	216.642.414	1.31	-	1.672.122.440	-	771.84%	Kegiatan masih dalam proses pelaksanaan	Percepatan penyelesaian kegiatan sesuai target waktu	Kabag SDM dan Umum

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Dalam PK	Kegiatan	Indikator Kinerja Output	Target Kinerja Output	Target Bulan 5				Realisasi Bulan 5		Realisasi Bulan 5		Evaluasi	Rencana Tindak Lanjut	Penanggung Jawab
							Target Output		Target Anggaran		Realisasi Output	Realisasi Anggaran	Capaian Output	Capaian Anggaran			
							Volume	%	Volume	%	Volume	Volume	%	%			
TERSEDIANYA SDM PERKERETAAPIAN YANG KOMPETEN DAN PROFESIONAL	PERSENTASE ASN DITJEN PERKERETAAPIAN YANG MEMILIKI SERTIFIKAT KOMPETENSI/KEAHLIAN TERTENTU	Tahun	65	Pelantikan dan Serah Terima Jabatan di Lingkungan Ditjen Perkeretaapian	-	1	-	-	10.472.512	1.31	-	49.433.295	-	472.03%	Kegiatan masih dalam proses pelaksanaan	Percepatan penyelesaian kegiatan sesuai target waktu	Kabag SDM dan Umum
TERWUJUDNYA GOOD GOVERNANCE DAN CLEAN GOVERNMENT DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN	NILAI AKIP DITJEN PERKERETAAPIAN	Tahun	83	Penyusunan rencana program dan Penyusunan rencana anggaran	-	1	-	-	2.081.656.400	6.27	-	490.507.812	-	23.56%	Kegiatan masih dalam proses pelaksanaan	Percepatan penyelesaian kegiatan sesuai target waktu	Kabag Perencanaan
TERWUJUDNYA GOOD GOVERNANCE DAN CLEAN GOVERNMENT DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN	NILAI AKIP DITJEN PERKERETAAPIAN	Dokumen	83	Penyusunan Dokumen SAKIP Ditjen Perkeretaapian serta Sekretariat Ditjen Perkeretaapian	-	9	-	-	386.851.592	4.55	-	418.643.740	-	108.22%	Kegiatan masih dalam proses pelaksanaan	Percepatan penyelesaian kegiatan sesuai target waktu	Kabag Perencanaan
TERWUJUDNYA GOOD GOVERNANCE DAN CLEAN GOVERNMENT DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN	NILAI AKIP DITJEN PERKERETAAPIAN	Laporan	83	Penyusunan Laporan Tahunan dan Pengolahan Data Statistik Direktorat Jenderal Perkeretaapian	-	1	-	-	439.979.433	7.89	-	144.984.400	-	32.95%	Kegiatan masih dalam proses pelaksanaan	Percepatan penyelesaian kegiatan sesuai target waktu	Kabag Perencanaan
TERWUJUDNYA GOOD GOVERNANCE DAN CLEAN GOVERNMENT DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN	NILAI AKIP DITJEN PERKERETAAPIAN	Tahun	83	Penyiapan Bahan Rapat Pimpinan Ditjen Perkeretaapian	-	1	-	-	154.807.200	5.45	-	64.990.500	-	41.98%	Kegiatan masih dalam proses pelaksanaan	Percepatan penyelesaian kegiatan sesuai target waktu	Kabag Perencanaan
TERWUJUDNYA GOOD GOVERNANCE DAN CLEAN GOVERNMENT DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN	NILAI AKIP DITJEN PERKERETAAPIAN	Tahun	83	Monitoring Pemantauan Penyelenggaraan Perkeretaapian Pantauan Kantor Staf Presiden, Bappenas, Kemenko Marinvest, Kemenko	-	1	-	-	467.392.717	6.58	-	107.033.440	-	22.9%	Kegiatan masih dalam proses pelaksanaan	Percepatan penyelesaian kegiatan sesuai target waktu	Kabag Perencanaan
TERWUJUDNYA GOOD GOVERNANCE DAN CLEAN GOVERNMENT DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN	NILAI AKIP DITJEN PERKERETAAPIAN	Tahun	83	Monitoring Perencanaan dan Pengendalian Bidang Perkeretaapian	-	1	-	-	128.867.496	2.95	-	159.584.698	-	123.84%	Kegiatan masih dalam proses pelaksanaan	Percepatan penyelesaian kegiatan sesuai target waktu	Kabag Perencanaan

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Dalam PK	Kegiatan	Indikator Kinerja Output	Target Kinerja Output	Target Bulan 5				Realisasi Bulan 5		Realisasi Bulan 5		Evaluasi	Rencana Tindak Lanjut	Penanggung Jawab
							Target Output		Target Anggaran		Realisasi Output	Realisasi Anggaran	Capaian Output	Capaian Anggaran			
							Volume	%	Volume	%	Volume	Volume	%	%			
TERWUJUDNYA GOOD GOVERNANCE DAN CLEAN GOVERNMENT DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN	NILAI AKIP DITJEN PERKERETAAPIAN	Tahun	83	Monitoring Pinjaman Hibah Luar Negeri dan Kegiatan Pendanaan Tanah Melalui Lembaga Manajemen Aset Negara di Lingkungan Ditjen Perkeretaapian	-	1	-	-	150.870.700	1.79	-	682.394.885	-	452.3%	Kegiatan masih dalam proses pelaksanaan	Percepatan penyelesaian kegiatan sesuai target waktu	Kabag Perencanaan
TERWUJUDNYA GOOD GOVERNANCE DAN CLEAN GOVERNMENT DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN	NILAI AKIP DITJEN PERKERETAAPIAN	Tahun	83	Monitoring Pelaksanaan Rencana Strategis Bidang Perkeretaapian dan Rencana Induk Perkeretaapian Nasional	-	1	-	-	150.870.700	2.75	-	462.819.544	-	306.77%	Kegiatan masih dalam proses pelaksanaan	Percepatan penyelesaian kegiatan sesuai target waktu	Kabag Perencanaan
TERWUJUDNYA GOOD GOVERNANCE DAN CLEAN GOVERNMENT DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN	NILAI AKIP DITJEN PERKERETAAPIAN	Tahun	83	Penyusunan kajian masterplan/kebijakan (Penyusunan Studi Potensi PNBP, Potensi Pasar, dan Bentuk Kerjasama Pemanfaatan Stasiun Jatinegara dan Stasiun Manggarai)	-	1	-	-	450.016.200	2.4	-	-	-	-	Kegiatan masih dalam tahap persiapan	Percepatan penyelesaian kegiatan sesuai target waktu	Kabag Perencanaan
TERWUJUDNYA GOOD GOVERNANCE DAN CLEAN GOVERNMENT DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN	NILAI AKIP DITJEN PERKERETAAPIAN	Tahun	83	Kegiatan Penunjang Non Operasional Organisasi (Pengembangan Organisasi di Lingkungan DJKA)	-	1	-	-	25.050.000	2.4	-	86.358.000	-	344.74%	Kegiatan masih dalam proses pelaksanaan	Percepatan penyelesaian kegiatan sesuai target waktu	Kabag SDM dan Umum
TERWUJUDNYA GOOD GOVERNANCE DAN CLEAN GOVERNMENT DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN	TINGKAT MATURASI SPIP DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN	Laporan	3	Penyusunan Laporan Pengelolaan Keuangan	-	1	-	-	120.549.600	2.52	-	395.351.805	-	327.96%	Kegiatan masih dalam proses pelaksanaan	Percepatan penyelesaian kegiatan sesuai target waktu	Kabag Keuangan
TERWUJUDNYA GOOD GOVERNANCE DAN CLEAN GOVERNMENT DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN	TINGKAT MATURASI SPIP DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN	Tahun	3	Contact Center Bidang Perkeretaapian	-	1	-	-	11.403.581	1.31	-	-	-	-	Kegiatan masih dalam tahap persiapan	Percepatan penyelesaian kegiatan sesuai target waktu	Kabag SDM dan Umum

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Dalam PK	Kegiatan	Indikator Kinerja Output	Target Kinerja Output	Target Bulan 5				Realisasi Bulan 5		Realisasi Bulan 5		Evaluasi	Rencana Tindak Lanjut	Penanggung Jawab
							Target Output		Target Anggaran		Realisasi Output	Realisasi Anggaran	Capaian Output	Capaian Anggaran			
							Volume	%	Volume	%	Volume	Volume	%	%			
TERWUJUDNYA GOOD GOVERNANCE DAN CLEAN GOVERNMENT DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN	TINGKAT MATURASI SPIP DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN	Tahun	3	Pembinaan Keprotokolan dan MC	-	1	-	-	11.770.859	1.31	-	49.850.100	-	423.5%	Kegiatan masih dalam proses pelaksanaan	Percepatan penyelesaian kegiatan sesuai target waktu	Kabag SDM dan Umum
TERWUJUDNYA GOOD GOVERNANCE DAN CLEAN GOVERNMENT DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN	TINGKAT MATURASI SPIP DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN	Nilai	3	Penyusunan SPIP Direktorat Jenderal Perkeretaapian dan Manajemen Resiko	-	1	-	-	163.933.625	1.31	-	504.714.840	-	307.88%	Kegiatan masih dalam proses pelaksanaan	Percepatan penyelesaian kegiatan sesuai target waktu	Kabag Perencanaan
TERWUJUDNYA GOOD GOVERNANCE DAN CLEAN GOVERNMENT DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN	TINGKAT MATURASI SPIP DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN	Tahun	3	Pembinaan dan Evaluasi Hasil-Hasil Pemeriksaan dan Tindak Lanjut (LHP)	-	1	-	-	23.789.337	1.31	-	34.665.750	-	145.72%	Kegiatan masih dalam proses pelaksanaan	Percepatan penyelesaian kegiatan sesuai target waktu	Kabag Keuangan
TERWUJUDNYA GOOD GOVERNANCE DAN CLEAN GOVERNMENT DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN	PERSENTASE REALISASI PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP) BIDANG PERKERETAAPIAN	Tahun	100	Pengusulan PNBP Yang Berkaitan Dengan Tupoksi dan Monitoring Pelaksanaan PNBP Ditjen Perkeretaapian	-	1	-	-	364.980.150	6.92	-	11.376.000	-	3.12%	Kegiatan masih dalam proses pelaksanaan	Percepatan penyelesaian kegiatan sesuai target waktu	Kabag Keuangan
TERWUJUDNYA GOOD GOVERNANCE DAN CLEAN GOVERNMENT DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN	PERSENTASE REALISASI PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP) BIDANG PERKERETAAPIAN	Laporan	100	Penyusunan Laporan SIMAK Barang Milik Negara (BMN) di Lingkungan Ditjen Perkeretaapian	-	11	1	9.09	535.203.000	10.42	-	54.508.600	-	10.18%	Kegiatan masih dalam proses pelaksanaan	Percepatan penyelesaian kegiatan sesuai target waktu	Kabag Keuangan
TERWUJUDNYA GOOD GOVERNANCE DAN CLEAN GOVERNMENT DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN	PERSENTASE REALISASI PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP) BIDANG PERKERETAAPIAN	Tahun	100	Peninjauan Lapangan Pemanfaatan Barang Milik Negara pada Ditjen Perkeretaapian	-	1	-	-	113.593.050	6.92	-	186.630.996	-	164.3%	Kegiatan masih dalam proses pelaksanaan	Percepatan penyelesaian kegiatan sesuai target waktu	Kabag Keuangan

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Dalam PK	Kegiatan	Indikator Kinerja Output	Target Kinerja Output	Target Bulan 5				Realisasi Bulan 5		Realisasi Bulan 5		Evaluasi	Rencana Tindak Lanjut	Penanggung Jawab
							Target Output		Target Anggaran		Realisasi Output	Realisasi Anggaran	Capaian Output	Capaian Anggaran			
							Volume	%	Volume	%	Volume	Volume	%	%			
TERWUJUDNYA GOOD GOVERNANCE DAN CLEAN GOVERNMENT DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN	PERSENTASE REALISASI PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP) BIDANG PERKERETAAPIAN	Tahun	100	Pemutakhiran Data Investasi dan Penilaian Direktorat Jenderal Perkeretaapian	-	11	1	9.09	197.255.250	6.92	-	16.830.380	-	8.53%	Kegiatan masih dalam proses pelaksanaan	Percepatan penyelesaian kegiatan sesuai target waktu	Kabag Keuangan
TERWUJUDNYA GOOD GOVERNANCE DAN CLEAN GOVERNMENT DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN	PERSENTASE REALISASI PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP) BIDANG PERKERETAAPIAN	Tahun	100	Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara (BMN)	-	1	-	-	265.950.233	1.36	-	1.628.327.906	-	612.27%	Kegiatan masih dalam proses pelaksanaan	Percepatan penyelesaian kegiatan sesuai target waktu	Kabag Keuangan
TERWUJUDNYA GOOD GOVERNANCE DAN CLEAN GOVERNMENT DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN	PERSENTASE REALISASI PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP) BIDANG PERKERETAAPIAN	Tahun	100	Pengelolaan Pembinaan Badan Layanan Umum	-	1	-	-	15.771.562	1.36	-	19.336.922	-	122.61%	Kegiatan masih dalam proses pelaksanaan	Percepatan penyelesaian kegiatan sesuai target waktu	Kabag Keuangan
TERWUJUDNYA GOOD GOVERNANCE DAN CLEAN GOVERNMENT DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN	PERSENTASE KUALITAS PELAKSANAAN ANGGARAN DITJEN PERKERETAAPIAN	Tahun	89	Monitoring Pelaksanaan Anggaran	-	1	-	-	93.794.850	1.19	-	331.916.489	-	353.87%	Kegiatan masih dalam proses pelaksanaan	Percepatan penyelesaian kegiatan sesuai target waktu	Kabag Keuangan
TERWUJUDNYA GOOD GOVERNANCE DAN CLEAN GOVERNMENT DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN	PERSENTASE KUALITAS PELAKSANAAN ANGGARAN DITJEN PERKERETAAPIAN	Tahun	89	Administrasi Kantor PPK Pelayanan Kepegawaian dan Kerumahtanggaan serta Peningkatan Kelembagaan	-	1	-	-	226.479.600	6.37	-	17.569.008	-	7.76%	Kegiatan masih dalam proses pelaksanaan	Percepatan penyelesaian kegiatan sesuai target waktu	Kabag SDM dan Umum

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Dalam PK	Kegiatan	Indikator Kinerja Output	Target Kinerja Output	Target Bulan 5				Realisasi Bulan 5		Realisasi Bulan 5		Evaluasi	Rencana Tindak Lanjut	Penanggung Jawab
							Target Output		Target Anggaran		Realisasi Output	Realisasi Anggaran	Capaian Output	Capaian Anggaran			
							Volume	%	Volume	%	Volume	Volume	%	%			
TERWUJUDNYA GOOD GOVERNANCE DAN CLEAN GOVERNMENT DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN	PERSENTASE KUALITAS PELAKSANAAN ANGGARAN DITJEN PERKERETAAPIAN	Tahun	89	Administrasi Kegiatan Satker Kantor Pusat Ditjen Perkeretaapian	-	1	-	-	480.960.000	6.37	-	293.696.700	-	61.06%	Kegiatan masih dalam proses pelaksanaan	Percepatan penyelesaian kegiatan sesuai target waktu	Kabag Keuangan
TERWUJUDNYA GOOD GOVERNANCE DAN CLEAN GOVERNMENT DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN	PERSENTASE KUALITAS PELAKSANAAN ANGGARAN DITJEN PERKERETAAPIAN	Tahun	89	Administrasi Kegiatan Kantor PPTKA	-	1	-	-	422.268.400	6.37	-	171.668.760	-	40.65%	Kegiatan masih dalam proses pelaksanaan	Percepatan penyelesaian kegiatan sesuai target waktu	Kabag Perencanaan
TERWUJUDNYA GOOD GOVERNANCE DAN CLEAN GOVERNMENT DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN	PERSENTASE KUALITAS PELAKSANAAN ANGGARAN DITJEN PERKERETAAPIAN	Tahun	89	Administrasi Satuan Kerja Pelayanan Peraturan Perundang-Undangan, Perjanjian dan Kehumasan	-	1	-	-	341.994.000	6.37	-	215.659.657	-	63.06%	Kegiatan masih dalam proses pelaksanaan	Percepatan penyelesaian kegiatan sesuai target waktu	Kabag Hukum
TERWUJUDNYA GOOD GOVERNANCE DAN CLEAN GOVERNMENT DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN	PERSENTASE KUALITAS PELAKSANAAN ANGGARAN DITJEN PERKERETAAPIAN	Tahun	89	Rapat Koordinasi Antar Bagian, Direktorat dan Rapat koordinasi Teknis Ditjen Perkeretaapian	-	1	-	-	647.638.000	6.37	-	175.796.479	-	27.14%	Kegiatan masih dalam proses pelaksanaan	Percepatan penyelesaian kegiatan sesuai target waktu	Kabag Keuangan
TERWUJUDNYA GOOD GOVERNANCE DAN CLEAN GOVERNMENT DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN	PERSENTASE KUALITAS PELAKSANAAN ANGGARAN DITJEN PERKERETAAPIAN	Tahun	89	Pembinaan Pengelolaan Balai/Satker di Lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian	-	1	-	-	313.989.600	6.37	-	51.062.700	-	16.26%	Kegiatan masih dalam proses pelaksanaan	Percepatan penyelesaian kegiatan sesuai target waktu	Kabag Keuangan
TERWUJUDNYA GOOD GOVERNANCE DAN CLEAN GOVERNMENT DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN	TINGKAT KEPUASAN PELAYANAN PERKANTORAN DITJEN PERKERETAAPIAN	Tahun	3,7	Pembinaan Sistem Administrasi Perkantoran	-	1	-	-	203.252.400	6.06	-	57.611.265	-	28.34%	Kegiatan masih dalam proses pelaksanaan	Percepatan penyelesaian kegiatan sesuai target waktu	Kabag SDM dan Umum

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Dalam PK	Kegiatan	Indikator Kinerja Output	Target Kinerja Output	Target Bulan 5				Realisasi Bulan 5		Realisasi Bulan 5		Evaluasi	Rencana Tindak Lanjut	Penanggung Jawab
							Target Output		Target Anggaran		Realisasi Output	Realisasi Anggaran	Capaian Output	Capaian Anggaran			
							Volume	%	Volume	%	Volume	Volume	%	%			
TERWUJUDNYA GOOD GOVERNANCE DAN CLEAN GOVERNMENT DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN	TINGKAT KEPUASAN PELAYANAN PERKANTORAN DITJEN PERKERETAAPIAN	Tahun	3,7	Pengelolaan Arsip	-	1	-	-	223.808.039	8.58	-	86.095.600	-	38.47%	Kegiatan masih dalam proses pelaksanaan	Percepatan penyelesaian kegiatan sesuai target waktu	Kabag SDM dan Umum
TERWUJUDNYA GOOD GOVERNANCE DAN CLEAN GOVERNMENT DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN	TINGKAT KEPUASAN PELAYANAN PERKANTORAN DITJEN PERKERETAAPIAN	Tahun	3,7	Monitoring Ketatausahaan	-	1	-	-	5.039.599.887	32.89	-	3.080.000	-	0.06%	Kegiatan masih dalam proses pelaksanaan	Percepatan penyelesaian kegiatan sesuai target waktu	Kabag SDM dan Umum
TERWUJUDNYA GOOD GOVERNANCE DAN CLEAN GOVERNMENT DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN	TINGKAT KEPUASAN PELAYANAN PERKANTORAN DITJEN PERKERETAAPIAN	Tahun	3,7	Bimbingan Teknis Kesekretariatan dan Ketatausahaan	-	1	-	-	495.497.352	24.88	-	-	-	-	Kegiatan masih dalam tahap persiapan	Percepatan penyelesaian kegiatan sesuai target Waktu	Kabag SDM dan Umum
TERWUJUDNYA GOOD GOVERNANCE DAN CLEAN GOVERNMENT DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN	TINGKAT KEPUASAN PELAYANAN PERKANTORAN DITJEN PERKERETAAPIAN	%	3,7	Inventarisasi arsip statis dan arsip terjaga di lingkungan DJKA	-	1	-	-	495.497.352	36.88	-	-	-	-	Kegiatan masih dalam tahap persiapan	Percepatan penyelesaian kegiatan sesuai target Waktu	Kabag SDM dan Umum
TERWUJUDNYA GOOD GOVERNANCE DAN CLEAN GOVERNMENT DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN	TINGKAT KEPUASAN PELAYANAN PERKANTORAN DITJEN PERKERETAAPIAN	Tahun	3,7	Administrasi Pengelolaan Umum dan Rumah Tangga	-	1	-	-	495.497.352	15.61	-	23.274.396	-	4.7%	Kegiatan masih dalam proses pelaksanaan	Percepatan penyelesaian kegiatan sesuai target Waktu	Kabag SDM dan Umum
TERWUJUDNYA GOOD GOVERNANCE DAN CLEAN GOVERNMENT DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN	TINGKAT KEPUASAN PELAYANAN PERKANTORAN DITJEN PERKERETAAPIAN	Tahun	3,7	Monitoring Pemeliharaan dan Perawatan Mesin Absensi UPT/Balai dan Satker Perkeretaapian	-	1	-	-	18.919.050	1.19	-	2.001.000	-	10.58%	Kegiatan masih dalam proses pelaksanaan	Percepatan penyelesaian kegiatan sesuai target Waktu	Kabag SDM dan Umum
TERWUJUDNYA GOOD GOVERNANCE DAN CLEAN GOVERNMENT DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN	TINGKAT KEPUASAN PELAYANAN PERKANTORAN DITJEN PERKERETAAPIAN	Tahun	3,7	Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN)	-	1	-	-	28.768.850	1.19	-	8.392.000	-	29.17%	Kegiatan masih dalam proses pelaksanaan	Percepatan penyelesaian kegiatan sesuai target Waktu	Kabag SDM dan Umum

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Dalam PK	Kegiatan	Indikator Kinerja Output	Target Kinerja Output	Target Bulan 5				Realisasi Bulan 5		Realisasi Bulan 5		Evaluasi	Rencana Tindak Lanjut	Penanggung Jawab
							Target Output		Target Anggaran		Realisasi Output	Realisasi Anggaran	Capaian Output	Capaian Anggaran			
							Volume	%	Volume	%	Volume	Volume	%	%			
TERWUJUDNYA GOOD GOVERNANCE DAN CLEAN GOVERNMENT DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN	TINGKAT KEPUASAN PELAYANAN PERKANTORAN DITJEN PERKERETAAPIAN	Tahun	3,7	Bimbingan Teknis Kerumahtanggaan dan Umum	-	1	-	-	21.275.350	1.19	-	54.023.500	-	253.93%	Kegiatan masih dalam proses pelaksanaan	Percepatan penyelesaian kegiatan sesuai target Waktu	Kabag SDM dan Umum
TERWUJUDNYA GOOD GOVERNANCE DAN CLEAN GOVERNMENT DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN	TINGKAT KEPUASAN PELAYANAN PERKANTORAN DITJEN PERKERETAAPIAN	%	3,7	Pemutakhiran Data Kartu dan Validasi Pencatatan Barang Inventaris, Dalam Rangka Penatausahaan BMN Perkantoran DJKA	-	1	-	-	139.938.000	6.37	-	108.857.184	-	77.79%	Kegiatan masih dalam proses pelaksanaan	Percepatan penyelesaian kegiatan sesuai target Waktu	Kabag SDM dan Umum
TERWUJUDNYA GOOD GOVERNANCE DAN CLEAN GOVERNMENT DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN	TINGKAT KEPUASAN PELAYANAN PERKANTORAN DITJEN PERKERETAAPIAN	Tahun	3,7	Pengadaan Makanan/Minuman Penambah Daya Tahan Tubuh	-	1	-	-	82.325.600	6.37	-	6.830.000	-	8.3%	Kegiatan masih dalam proses pelaksanaan	Percepatan penyelesaian kegiatan sesuai target Waktu	Kabag SDM dan Umum
TERWUJUDNYA GOOD GOVERNANCE DAN CLEAN GOVERNMENT DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN	TINGKAT KEPUASAN PELAYANAN PERKANTORAN DITJEN PERKERETAAPIAN	Unit	3,7	Kendaraan Bermotor	6	259	23	8.88	3.932.849.000	9.66	6	2.104.730.000	26.09%	53.52%	Kegiatan masih dalam proses pelaksanaan	Percepatan penyelesaian kegiatan sesuai target Waktu	Kabag SDM dan Umum
TERWUJUDNYA GOOD GOVERNANCE DAN CLEAN GOVERNMENT DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN	TINGKAT KEPUASAN PELAYANAN PERKANTORAN DITJEN PERKERETAAPIAN	Tahun	3,7	Renovasi gedung dan bangunan	-	1	-	-	2.075.933.250	3.06	-	1.366.368.150	-	65.82%	Kegiatan masih dalam proses pelaksanaan	Percepatan penyelesaian kegiatan sesuai target waktu	Kabag SDM dan Umum
TERWUJUDNYA GOOD GOVERNANCE DAN CLEAN GOVERNMENT DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN	TINGKAT KEPUASAN PELAYANAN PERKANTORAN DITJEN PERKERETAAPIAN	Tahun	3,7	Gaji dan Tunjangan	-	1	-	-	26.547.369.200	6.37	-	35.625.301.229	-	134.2%	Kegiatan masih dalam proses pelaksanaan	Percepatan penyelesaian kegiatan sesuai target waktu	Kabag SDM dan Umum
TERWUJUDNYA GOOD GOVERNANCE DAN CLEAN GOVERNMENT DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN	TINGKAT KEPUASAN PELAYANAN PERKANTORAN DITJEN PERKERETAAPIAN	Tahun	3,7	Operasional dan Pemeliharaan Kantor	-	1	-	-	10.938.428.800	6.37	-	7.444.042.708	-	68.05%	Kegiatan masih dalam proses pelaksanaan	Percepatan penyelesaian kegiatan sesuai target waktu	Kabag SDM dan Umum

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Dalam PK	Kegiatan	Indikator Kinerja Output	Target Kinerja Output	Target Bulan 5				Realisasi Bulan 5		Realisasi Bulan 5		Evaluasi	Rencana Tindak Lanjut	Penanggung Jawab
							Target Output		Target Anggaran		Realisasi Output	Realisasi Anggaran	Capaian Output	Capaian Anggaran			
							Volume	%	Volume	%	Volume	Volume	%	%			
TERMANFAATKANYA KEBIJAKAN PEMBINAAN DAN PENINGKATAN PERKERETAAPIAN	PERSENTASE REKOMENDASI KEBIJAKAN PEMBINAAN DAN PENINGKATAN KONEKTIVITAS PERKERETAAPIAN YANG TELAH DITINDAKLANJUTI	Dokumen	100	Penyusunan dokumen perencanaan	-	15	-	-	1.075.033.650	2.28	-	500.620.545	-	46.57%	Kegiatan masih dalam proses pelaksanaan	Percepatan penyelesaian kegiatan sesuai target waktu	Kabag Perencanaan
SISTEM INFORMASI DAN TEKNOLOGI YANG ANDAL	PERSENTASE PEMENUHAN RENCANA INDUK TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI BIDANG PERKERETAAPIAN	Tahun	77	Pengelolaan data dan informasi	-	1	-	-	489.243.600	6.06	-	96.998.800	-	19.83%	Kegiatan masih dalam proses pelaksanaan	Percepatan penyelesaian kegiatan sesuai target waktu	Kabag Perencanaan
SISTEM INFORMASI DAN TEKNOLOGI YANG ANDAL	PERSENTASE PEMENUHAN RENCANA INDUK TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI BIDANG PERKERETAAPIAN	Tahun	77	Penyusunan Desain Pengembangan/Pengelolaan Sistem Informasi	-	1	-	-	150.000.000	2.4	-	-	-	-	Kegiatan masih dalam tahap persiapan	Percepatan penyelesaian kegiatan sesuai target waktu	Kabag Perencanaan
SISTEM INFORMASI DAN TEKNOLOGI YANG ANDAL	PERSENTASE PEMENUHAN RENCANA INDUK TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI BIDANG PERKERETAAPIAN	Tahun	77	Pembangunan dan Pengembangan Sistem Informasi Direktorat Jenderal Perkeretaapian	-	1	-	-	510.000.000	6.7	-	-	-	-	Kegiatan masih dalam tahap persiapan	Percepatan penyelesaian kegiatan sesuai target waktu	Kabag Perencanaan

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Dalam PK	Kegiatan	Indikator Kinerja Output	Target Kinerja Output	Target Bulan 5				Realisasi Bulan 5		Realisasi Bulan 5		Evaluasi	Rencana Tindak Lanjut	Penanggung Jawab
							Target Output		Target Anggaran		Realisasi Output	Realisasi Anggaran	Capaian Output	Capaian Anggaran			
							Volume	%	Volume	%	Volume	Volume	%	%			
DUKUNGAN PUBLIK TERHADAP PENYELENGGARAAN PERKERETAAPIAN	PERSENTASE PEMENUHAN PUBLIKASI DITJEN PERKERETAAPIAN	Tahun	100	Pelayanan humas dan protokoler	-	1	-	-	666.017.836	1.19	-	1.961.462.952	-	294.51%	Kegiatan masih dalam proses pelaksanaan	Percepatan penyelesaian kegiatan sesuai target waktu	Kabag Hukum

SEKRETARIS

DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

JUJUN ENDAH WAHJUNINGRUM

Pembina Utama Madya (IV/d)

NIP. 19650703 199103 2 001

MONITORING RENCANA AKSI ATAS PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

Bulan: Juni, Tahun: 2024

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Dalam PK	Kegiatan	Indikator Kinerja Output	Target Kinerja Output	Target Bulan 6				Realisasi Bulan 6		Realisasi Bulan 6		Evaluasi	Rencana Tindak Lanjut	Penanggung Jawab
							Target Output		Target Anggaran		Realisasi Output	Realisasi Anggaran	Capaian Output	Capaian Anggaran			
							Volume	%	Volume	%	Volume	Volume	%	%			
TERLAKSANANYA PERUMUSAN REGULASI DAN KEBIJAKAN DALAM PENYELENGGARAAN PERKERETAAPIAN	PERSENTASE PENCAPAIAN TARGET LEGALISASI (JUMLAH RANCANGAN DAN PERATURAN PERUNDANGAN) BIDANG PERKERETAAPIAN	Dokumen	100	Penyusunan kajian kebijakan/standar/pedoman teknis (Kajian Naskah Akademis Usulan Perubahan UU Nomor 23 Tahun 2007)	-	1	-	-	546.726.000	6.7	-	230.690.079	-	42.19%	Kegiatan masih dalam proses pelaksanaan	Percepatan penyelesaian kegiatan sesuai target waktu	Kabag Hukum
TERLAKSANANYA PERUMUSAN REGULASI DAN KEBIJAKAN DALAM PENYELENGGARAAN PERKERETAAPIAN	PERSENTASE PENCAPAIAN TARGET LEGALISASI (JUMLAH RANCANGAN DAN PERATURAN PERUNDANGAN) BIDANG PERKERETAAPIAN	Dokumen	100	Koordinasi Penyusunan Peraturan PerundangUndangan di Bidang Perkeretaapian	-	1	-	-	727.404.000	7.58	-	492.035.400	-	67.64%	Kegiatan masih dalam proses pelaksanaan	Percepatan penyelesaian kegiatan sesuai target waktu	Kabag Hukum
TERLAKSANANYA PERUMUSAN REGULASI DAN KEBIJAKAN DALAM PENYELENGGARAAN PERKERETAAPIAN	PERSENTASE PENCAPAIAN TARGET LEGALISASI (JUMLAH RANCANGAN DAN PERATURAN PERUNDANGAN) BIDANG PERKERETAAPIAN	Tahun	100	Koordinasi Pengendalian dan Pengawasan Produk Hukum Atas Penyelenggaraan Perkeretaapian	-	1	-	-	140.165.000	7.58	-	5.645.430	-	4.03%	Kegiatan masih dalam proses pelaksanaan	Percepatan penyelesaian kegiatan sesuai target waktu	Kabag Hukum

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Dalam PK	Kegiatan	Indikator Kinerja Output	Target Kinerja Output	Target Bulan 6				Realisasi Bulan 6		Realisasi Bulan 6		Evaluasi	Rencana Tindak Lanjut	Penanggung Jawab
							Target Output		Target Anggaran		Realisasi Output	Realisasi Anggaran	Capaian Output	Capaian Anggaran			
							Volume	%	Volume	%	Volume	Volume	%	%			
TERLAKSANANYA PERUMUSAN REGULASI DAN KEBIJAKAN DALAM PENYELENGGARAAN PERKERETAAPIAN	PERSENTASE PENCAPAIAN TARGET LEGALISASI (JUMLAH RANCANGAN DAN PERATURAN PERUNDANGAN) BIDANG PERKERETAAPIAN	Tahun	100	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan di Bidang Perkeretaapian	-	1	-	-	206.191.000	7.58	-	-	-	-	Kegiatan masih dalam tahap persiapan	Percepatan penyelesaian kegiatan sesuai target waktu	Kabag Hukum
TERLAKSANANYA PERUMUSAN REGULASI DAN KEBIJAKAN DALAM PENYELENGGARAAN PERKERETAAPIAN	PERSENTASE PENCAPAIAN TARGET LEGALISASI (JUMLAH RANCANGAN DAN PERATURAN PERUNDANGAN) BIDANG PERKERETAAPIAN	%	100	Penyusunan Pendapat Hukum (Legal Opinion)	-	1	-	-	223.949.500	7.58	-	-	-	-	Kegiatan masih dalam tahap persiapan	Percepatan penyelesaian kegiatan sesuai target waktu	Kabag Hukum
TERLAKSANANYA PERUMUSAN REGULASI DAN KEBIJAKAN DALAM PENYELENGGARAAN PERKERETAAPIAN	PERSENTASE PENCAPAIAN TARGET LEGALISASI (JUMLAH RANCANGAN DAN PERATURAN PERUNDANGAN) BIDANG PERKERETAAPIAN	Tahun	100	Pengelolaan Hukum	-	1	-	-	141.441.031	1.57	-	507.570.460	-	358.86%	Kegiatan masih dalam proses pelaksanaan	Percepatan penyelesaian kegiatan sesuai target waktu	Kabag Hukum
TERSEDIANYA SDM PERKERETAAPIAN YANG KOMPETEN DAN PROFESIONAL	PERSENTASE ASN DITJEN PERKERETAAPIAN YANG MEMILIKI SERTIFIKAT KOMPETENSI/KEAHLIAN TERTENTU	Dokumen	65	Penyusunan kajian kebijakan/standar/pedoman teknis (Roadmap kepegawaian di lingkungan Ditjen Perkeretaapian)	-	1	-	-	660.000.550	8.8	-	-	-	-	Kegiatan masih dalam tahap persiapan	Percepatan penyelesaian kegiatan sesuai target waktu	Kabag Kepegawaian dan Umum

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Dalam PK	Kegiatan	Indikator Kinerja Output	Target Kinerja Output	Target Bulan 6				Realisasi Bulan 6		Realisasi Bulan 6		Evaluasi	Rencana Tindak Lanjut	Penanggung Jawab
							Target Output		Target Anggaran		Realisasi Output	Realisasi Anggaran	Capaian Output	Capaian Anggaran			
							Volume	%	Volume	%	Volume	Volume	%	%			
TERSEDIANYA SDM PERKERETAAPIAN YANG KOMPETEN DAN PROFESIONAL	PERSENTASE ASN DITJEN PERKERETAAPIAN YANG MEMILIKI SERTIFIKAT KOMPETENSI/KEAHLIAN TERTENTU	Tahun	65	Pembinaan Jabatan Fungsional Arsiparis	-	1	-	-	25.588.963	1.57	-	-	-	-	Kegiatan masih dalam tahap persiapan	Percepatan penyelesaian kegiatan sesuai target waktu	Kabag SDM dan Umum
TERSEDIANYA SDM PERKERETAAPIAN YANG KOMPETEN DAN PROFESIONAL	PERSENTASE ASN DITJEN PERKERETAAPIAN YANG MEMILIKI SERTIFIKAT KOMPETENSI/KEAHLIAN TERTENTU	Tahun	65	Pengelolaan Kepegawaian	-	1	-	-	385.755.056	1.57	-	1.724.420.491	-	447.02%	Kegiatan masih dalam proses pelaksanaan	Percepatan penyelesaian kegiatan sesuai target waktu	Kabag SDM dan Umum
TERSEDIANYA SDM PERKERETAAPIAN YANG KOMPETEN DAN PROFESIONAL	PERSENTASE ASN DITJEN PERKERETAAPIAN YANG MEMILIKI SERTIFIKAT KOMPETENSI/KEAHLIAN TERTENTU		65	Pembinaan Mental dan Spiritual Pegawai	-	1	-	-	9.804.722	1.57	-	193.131.660	-	1969.78%	Kegiatan masih dalam proses pelaksanaan	Percepatan penyelesaian kegiatan sesuai target waktu	Kabag SDM dan Umum
TERSEDIANYA SDM PERKERETAAPIAN YANG KOMPETEN DAN PROFESIONAL	PERSENTASE ASN DITJEN PERKERETAAPIAN YANG MEMILIKI SERTIFIKAT KOMPETENSI/KEAHLIAN TERTENTU	Tahun	65	Monitoring dan Evaluasi Kinerja Pegawai di Lingkungan Ditjen Perkeretaapian	-	1	-	-	70.634.492	1.57	-	141.668.789	-	200.57%	Kegiatan masih dalam proses pelaksanaan	Percepatan penyelesaian kegiatan sesuai target waktu	Kabag SDM dan Umum
TERSEDIANYA SDM PERKERETAAPIAN YANG KOMPETEN DAN PROFESIONAL	PERSENTASE ASN DITJEN PERKERETAAPIAN YANG MEMILIKI SERTIFIKAT KOMPETENSI/KEAHLIAN TERTENTU	Tahun	65	Character Building	-	1	-	-	259.088.618	1.57	-	1.672.122.440	-	645.39%	Kegiatan masih dalam proses pelaksanaan	Percepatan penyelesaian kegiatan sesuai target waktu	Kabag SDM dan Umum

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Dalam PK	Kegiatan	Indikator Kinerja Output	Target Kinerja Output	Target Bulan 6				Realisasi Bulan 6		Realisasi Bulan 6		Evaluasi	Rencana Tindak Lanjut	Penanggung Jawab
							Target Output		Target Anggaran		Realisasi Output	Realisasi Anggaran	Capaian Output	Capaian Anggaran			
							Volume	%	Volume	%	Volume	Volume	%	%			
TERSEDIANYA SDM PERKERETAAPIAN YANG KOMPETEN DAN PROFESIONAL	PERSENTASE ASN DITJEN PERKERETAAPIAN YANG MEMILIKI SERTIFIKAT KOMPETENSI/KEAHLIAN TERTENTU	Tahun	65	Pelantikan dan Serah Terima Jabatan di Lingkungan Ditjen Perkeretaapian	-	1	-	-	12.524.365	1.57	-	49.433.295	-	394.7%	Kegiatan masih dalam proses pelaksanaan	Percepatan penyelesaian kegiatan sesuai target waktu	Kabag SDM dan Umum
TERWUJUDNYA GOOD GOVERNANCE DAN CLEAN GOVERNMENT DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN	NILAI AKIP DITJEN PERKERETAAPIAN	Tahun	83	Penyusunan rencana program dan Penyusunan rencana anggaran	-	1	-	-	2.270.327.743	6.83	-	584.934.312	-	25.76%	Kegiatan masih dalam proses pelaksanaan	Percepatan penyelesaian kegiatan sesuai target waktu	Kabag Perencanaan
TERWUJUDNYA GOOD GOVERNANCE DAN CLEAN GOVERNMENT DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN	NILAI AKIP DITJEN PERKERETAAPIAN	Dokumen	83	Penyusunan Dokumen SAKIP Ditjen Perkeretaapian serta Sekretariat Ditjen Perkeretaapian	-	9	-	-	572.573.491	6.73	-	507.373.740	-	88.61%	Kegiatan masih dalam proses pelaksanaan	Percepatan penyelesaian kegiatan sesuai target waktu	Kabag Perencanaan
TERWUJUDNYA GOOD GOVERNANCE DAN CLEAN GOVERNMENT DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN	NILAI AKIP DITJEN PERKERETAAPIAN	Laporan	83	Penyusunan Laporan Tahunan dan Pengolahan Data Statistik Direktorat Jenderal Perkeretaapian	-	1	-	-	449.196.990	8.05	-	237.559.400	-	52.89%	Kegiatan masih dalam proses pelaksanaan	Percepatan penyelesaian kegiatan sesuai target waktu	Kabag Perencanaan
TERWUJUDNYA GOOD GOVERNANCE DAN CLEAN GOVERNMENT DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN	NILAI AKIP DITJEN PERKERETAAPIAN	Tahun	83	Penyiapan Bahan Rapat Pimpinan Ditjen Perkeretaapian	-	1	-	-	206.409.600	7.27	-	97.485.750	-	47.23%	Kegiatan masih dalam proses pelaksanaan	Percepatan penyelesaian kegiatan sesuai target waktu	Kabag Perencanaan
TERWUJUDNYA GOOD GOVERNANCE DAN CLEAN GOVERNMENT DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN	NILAI AKIP DITJEN PERKERETAAPIAN	Tahun	83	Monitoring Pemantauan Penyelenggaraan Perkeretaapian Pantauan Kantor Staf Presiden, Bappenas, Kemenko Marinvest, Kemenko	-	1	-	-	467.392.717	6.58	-	110.115.540	-	23.56%	Kegiatan masih dalam proses pelaksanaan	Percepatan penyelesaian kegiatan sesuai target waktu	Kabag Perencanaan
TERWUJUDNYA GOOD GOVERNANCE DAN CLEAN GOVERNMENT DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN	NILAI AKIP DITJEN PERKERETAAPIAN	Tahun	83	Monitoring Perencanaan dan Pengendalian Bidang Perkeretaapian	-	1	-	-	136.350.125	3.12	-	159.584.698	-	117.04%	Kegiatan masih dalam proses pelaksanaan	Percepatan penyelesaian kegiatan sesuai target waktu	Kabag Perencanaan

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Dalam PK	Kegiatan	Indikator Kinerja Output	Target Kinerja Output	Target Bulan 6				Realisasi Bulan 6		Realisasi Bulan 6		Evaluasi	Rencana Tindak Lanjut	Penanggung Jawab
							Target Output		Target Anggaran		Realisasi Output	Realisasi Anggaran	Capaian Output	Capaian Anggaran			
							Volume	%	Volume	%	Volume	Volume	%	%			
TERWUJUDNYA GOOD GOVERNANCE DAN CLEAN GOVERNMENT DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN	NILAI AKIP DITJEN PERKERETAAPIAN	Tahun	83	Monitoring Pinjaman Hibah Luar Negeri dan Kegiatan Pendanaan Tanah Melalui Lembaga Manajemen Aset Negara di Lingkungan Ditjen Perkeretaapian	-	1	-	-	280.247.700	3.33	-	786.592.896	-	280.68%	Kegiatan masih dalam proses pelaksanaan	Percepatan penyelesaian kegiatan sesuai target waktu	Kabag Perencanaan
TERWUJUDNYA GOOD GOVERNANCE DAN CLEAN GOVERNMENT DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN	NILAI AKIP DITJEN PERKERETAAPIAN	Tahun	83	Monitoring Pelaksanaan Rencana Strategis Bidang Perkeretaapian dan Rencana Induk Perkeretaapian Nasional	-	1	-	-	280.247.700	5.12	-	559.489.194	-	199.64%	Kegiatan masih dalam proses pelaksanaan	Percepatan penyelesaian kegiatan sesuai target waktu	Kabag Perencanaan
TERWUJUDNYA GOOD GOVERNANCE DAN CLEAN GOVERNMENT DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN	NILAI AKIP DITJEN PERKERETAAPIAN	Tahun	83	Penyusunan kajian masterplan/kebijakan (Penyusunan Studi Potensi PNBP, Potensi Pasar, dan Bentuk Kerjasama Pemanfaatan Stasiun Jatinegara dan Stasiun Manggarai)	-	1	-	-	1.650.059.400	8.8	-	-	-	-	Kegiatan masih dalam tahap persiapan	Percepatan penyelesaian kegiatan sesuai target waktu	Kabag Perencanaan
TERWUJUDNYA GOOD GOVERNANCE DAN CLEAN GOVERNMENT DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN	NILAI AKIP DITJEN PERKERETAAPIAN	Tahun	83	Kegiatan Penunjang Non Operasional Organisasi (Pengembangan Organisasi di Lingkungan DJKA)	-	1	-	-	91.850.000	8.8	-	86.358.000	-	94.02%	Kegiatan masih dalam proses pelaksanaan	Percepatan penyelesaian kegiatan sesuai target waktu	Kabag SDM dan Umum
TERWUJUDNYA GOOD GOVERNANCE DAN CLEAN GOVERNMENT DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN	TINGKAT MATURASI SPIP DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN	Laporan	3	Penyusunan Laporan Pengelolaan Keuangan	-	1	-	-	120.549.600	2.52	-	448.678.865	-	372.19%	Kegiatan masih dalam proses pelaksanaan	Percepatan penyelesaian kegiatan sesuai target waktu	Kabag Keuangan
TERWUJUDNYA GOOD GOVERNANCE DAN CLEAN GOVERNMENT DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN	TINGKAT MATURASI SPIP DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN	Tahun	3	Contact Center Bidang Perkeretaapian	-	1	-	-	13.637.856	1.57	-	-	-	-	Kegiatan masih dalam tahap persiapan	Percepatan penyelesaian kegiatan sesuai target waktu	Kabag SDM dan Umum

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Dalam PK	Kegiatan	Indikator Kinerja Output	Target Kinerja Output	Target Bulan 6				Realisasi Bulan 6		Realisasi Bulan 6		Evaluasi	Rencana Tindak Lanjut	Penanggung Jawab
							Target Output		Target Anggaran		Realisasi Output	Realisasi Anggaran	Capaian Output	Capaian Anggaran			
							Volume	%	Volume	%	Volume	Volume	%	%			
TERWUJUDNYA GOOD GOVERNANCE DAN CLEAN GOVERNMENT DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN	TINGKAT MATURASI SPIP DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN	Tahun	3	Pembinaan Keprotokolan dan MC	-	1	-	-	14.077.094	1.57	-	49.850.100	-	354.12%	Kegiatan masih dalam proses pelaksanaan	Percepatan penyelesaian kegiatan sesuai target waktu	Kabag SDM dan Umum
TERWUJUDNYA GOOD GOVERNANCE DAN CLEAN GOVERNMENT DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN	TINGKAT MATURASI SPIP DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN	Nilai	3	Penyusunan SPIP Direktorat Jenderal Perkeretaapian dan Manajemen Resiko	-	1	-	-	196.052.728	1.57	-	569.002.090	-	290.23%	Kegiatan masih dalam proses pelaksanaan	Percepatan penyelesaian kegiatan sesuai target waktu	Kabag Perencanaan
TERWUJUDNYA GOOD GOVERNANCE DAN CLEAN GOVERNMENT DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN	TINGKAT MATURASI SPIP DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN	Tahun	3	Pembinaan dan Evaluasi Hasil-Hasil Pemeriksaan dan Tindak Lanjut (LHP)	-	1	-	-	28.450.323	1.57	-	34.665.750	-	121.85%	Kegiatan masih dalam proses pelaksanaan	Percepatan penyelesaian kegiatan sesuai target waktu	Kabag Keuangan
TERWUJUDNYA GOOD GOVERNANCE DAN CLEAN GOVERNMENT DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN	PERSENTASE REALISASI PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP) BIDANG PERKERETAAPIAN	Tahun	100	Pengusulan PNBP Yang Berkaitan Dengan Tupoksi dan Monitoring Pelaksanaan PNBP Ditjen Perkeretaapian	-	1	-	-	405.533.500	7.69	-	19.767.378	-	4.87%	Kegiatan masih dalam proses pelaksanaan	Percepatan penyelesaian kegiatan sesuai target waktu	Kabag Keuangan
TERWUJUDNYA GOOD GOVERNANCE DAN CLEAN GOVERNMENT DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN	PERSENTASE REALISASI PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP) BIDANG PERKERETAAPIAN	Laporan	100	Penyusunan Laporan SIMAK Barang Milik Negara (BMN) di Lingkungan Ditjen Perkeretaapian	-	11	1	9.09	535.203.000	10.42	-	57.455.600	-	10.74%	Kegiatan masih dalam proses pelaksanaan	Percepatan penyelesaian kegiatan sesuai target waktu	Kabag Keuangan
TERWUJUDNYA GOOD GOVERNANCE DAN CLEAN GOVERNMENT DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN	PERSENTASE REALISASI PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP) BIDANG PERKERETAAPIAN	Tahun	100	Peninjauan Lapangan Pemanfaatan Barang Milik Negara pada Ditjen Perkeretaapian	-	1	-	-	126.214.500	7.69	-	277.413.167	-	219.8%	Kegiatan masih dalam proses pelaksanaan	Percepatan penyelesaian kegiatan sesuai target waktu	Kabag Keuangan

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Dalam PK	Kegiatan	Indikator Kinerja Output	Target Kinerja Output	Target Bulan 6				Realisasi Bulan 6		Realisasi Bulan 6		Evaluasi	Rencana Tindak Lanjut	Penanggung Jawab
							Target Output		Target Anggaran		Realisasi Output	Realisasi Anggaran	Capaian Output	Capaian Anggaran			
							Volume	%	Volume	%	Volume	Volume	%	%			
TERWUJUDNYA GOOD GOVERNANCE DAN CLEAN GOVERNMENT DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN	PERSENTASE REALISASI PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP) BIDANG PERKERETAAPIAN	Tahun	100	Pemutakhiran Data Investasi dan Penilaian Direktorat Jenderal Perkeretaapian	-	11	1	9.09	219.172.500	7.69	-	16.830.380	-	7.68%	Kegiatan masih dalam proses pelaksanaan	Percepatan penyelesaian kegiatan sesuai target waktu	Kabag Keuangan
TERWUJUDNYA GOOD GOVERNANCE DAN CLEAN GOVERNMENT DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN	PERSENTASE REALISASI PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP) BIDANG PERKERETAAPIAN	Tahun	100	Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara (BMN)	-	1	-	-	318.057.193	1.62	-	1.739.429.240	-	546.89%	Kegiatan masih dalam proses pelaksanaan	Percepatan penyelesaian kegiatan sesuai target waktu	Kabag Keuangan
TERWUJUDNYA GOOD GOVERNANCE DAN CLEAN GOVERNMENT DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN	PERSENTASE REALISASI PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP) BIDANG PERKERETAAPIAN	Tahun	100	Pengelolaan Pembinaan Badan Layanan Umum	-	1	-	-	18.861.645	1.62	-	36.492.962	-	193.48%	Kegiatan masih dalam proses pelaksanaan	Percepatan penyelesaian kegiatan sesuai target waktu	Kabag Keuangan
TERWUJUDNYA GOOD GOVERNANCE DAN CLEAN GOVERNMENT DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN	PERSENTASE KUALITAS PELAKSANAAN ANGGARAN DITJEN PERKERETAAPIAN	Tahun	89	Monitoring Pelaksanaan Anggaran	-	1	-	-	112.553.820	1.43	-	370.198.721	-	328.91%	Kegiatan masih dalam proses pelaksanaan	Percepatan penyelesaian kegiatan sesuai target waktu	Kabag Keuangan
TERWUJUDNYA GOOD GOVERNANCE DAN CLEAN GOVERNMENT DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN	PERSENTASE KUALITAS PELAKSANAAN ANGGARAN DITJEN PERKERETAAPIAN	Tahun	89	Administrasi Kantor PPK Pelayanan Kepegawaian dan Kerumahtanggaan serta Peningkatan Kelembagaan	-	1	-	-	271.775.520	7.64	-	19.939.868	-	7.34%	Kegiatan masih dalam proses pelaksanaan	Percepatan penyelesaian kegiatan sesuai target waktu	Kabag SDM dan Umum

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Dalam PK	Kegiatan	Indikator Kinerja Output	Target Kinerja Output	Target Bulan 6				Realisasi Bulan 6		Realisasi Bulan 6		Evaluasi	Rencana Tindak Lanjut	Penanggung Jawab
							Target Output		Target Anggaran		Realisasi Output	Realisasi Anggaran	Capaian Output	Capaian Anggaran			
							Volume	%	Volume	%	Volume	Volume	%	%			
TERWUJUDNYA GOOD GOVERNANCE DAN CLEAN GOVERNMENT DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN	PERSENTASE KUALITAS PELAKSANAAN ANGGARAN DITJEN PERKERETAAPIAN	Tahun	89	Administrasi Kegiatan Satker Kantor Pusat Ditjen Perkeretaapian	-	1	-	-	577.152.000	7.64	-	393.470.170	-	68.17%	Kegiatan masih dalam proses pelaksanaan	Percepatan penyelesaian kegiatan sesuai target waktu	Kabag Keuangan
TERWUJUDNYA GOOD GOVERNANCE DAN CLEAN GOVERNMENT DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN	PERSENTASE KUALITAS PELAKSANAAN ANGGARAN DITJEN PERKERETAAPIAN	Tahun	89	Administrasi Kegiatan Kantor PPTKA	-	1	-	-	506.722.080	7.64	-	200.418.760	-	39.55%	Kegiatan masih dalam proses pelaksanaan	Percepatan penyelesaian kegiatan sesuai target waktu	Kabag Perencanaan
TERWUJUDNYA GOOD GOVERNANCE DAN CLEAN GOVERNMENT DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN	PERSENTASE KUALITAS PELAKSANAAN ANGGARAN DITJEN PERKERETAAPIAN	Tahun	89	Administrasi Satuan Kerja Pelayanan Peraturan Perundang-Undangan, Perjanjian dan Kehumasan	-	1	-	-	410.392.800	7.64	-	278.160.382	-	67.78%	Kegiatan masih dalam proses pelaksanaan	Percepatan penyelesaian kegiatan sesuai target waktu	Kabag Hukum
TERWUJUDNYA GOOD GOVERNANCE DAN CLEAN GOVERNMENT DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN	PERSENTASE KUALITAS PELAKSANAAN ANGGARAN DITJEN PERKERETAAPIAN	Tahun	89	Rapat Koordinasi Antar Bagian, Direktorat dan Rapat koordinasi Teknis Ditjen Perkeretaapian	-	1	-	-	777.165.600	7.64	-	225.546.679	-	29.02%	Kegiatan masih dalam proses pelaksanaan	Percepatan penyelesaian kegiatan sesuai target waktu	Kabag Keuangan
TERWUJUDNYA GOOD GOVERNANCE DAN CLEAN GOVERNMENT DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN	PERSENTASE KUALITAS PELAKSANAAN ANGGARAN DITJEN PERKERETAAPIAN	Tahun	89	Pembinaan Pengelolaan Balai/Satker di Lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian	-	1	-	-	376.787.520	7.64	-	51.062.700	-	13.55%	Kegiatan masih dalam proses pelaksanaan	Percepatan penyelesaian kegiatan sesuai target waktu	Kabag Keuangan
TERWUJUDNYA GOOD GOVERNANCE DAN CLEAN GOVERNMENT DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN	TINGKAT KEPUASAN PELAYANAN PERKANTORAN DITJEN PERKERETAAPIAN	Tahun	3,7	Pembinaan Sistem Administrasi Perkantoran	-	1	-	-	254.065.500	7.58	-	61.845.765	-	24.34%	Kegiatan masih dalam proses pelaksanaan	Percepatan penyelesaian kegiatan sesuai target waktu	Kabag SDM dan Umum

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Dalam PK	Kegiatan	Indikator Kinerja Output	Target Kinerja Output	Target Bulan 6				Realisasi Bulan 6		Realisasi Bulan 6		Evaluasi	Rencana Tindak Lanjut	Penanggung Jawab
							Target Output		Target Anggaran		Realisasi Output	Realisasi Anggaran	Capaian Output	Capaian Anggaran			
							Volume	%	Volume	%	Volume	Volume	%	%			
TERWUJUDNYA GOOD GOVERNANCE DAN CLEAN GOVERNMENT DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN	TINGKAT KEPUASAN PELAYANAN PERKANTORAN DITJEN PERKERETAAPIAN	Tahun	3,7	Pengelolaan Arsip	-	1	-	-	243.768.039	9.35	-	124.531.050	-	51.09%	Kegiatan masih dalam proses pelaksanaan	Percepatan penyelesaian kegiatan sesuai target waktu	Kabag SDM dan Umum
TERWUJUDNYA GOOD GOVERNANCE DAN CLEAN GOVERNMENT DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN	TINGKAT KEPUASAN PELAYANAN PERKANTORAN DITJEN PERKERETAAPIAN	Tahun	3,7	Monitoring Ketatausahaan	-	1	-	-	5.354.071.537	34.94	-	51.711.320	-	0.97%	Kegiatan masih dalam proses pelaksanaan	Percepatan penyelesaian kegiatan sesuai target waktu	Kabag SDM dan Umum
TERWUJUDNYA GOOD GOVERNANCE DAN CLEAN GOVERNMENT DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN	TINGKAT KEPUASAN PELAYANAN PERKANTORAN DITJEN PERKERETAAPIAN	Tahun	3,7	Bimbingan Teknis Kesekretariatan dan Ketatausahaan	-	1	-	-	119.155.050	5.98	-	-	-	-	Kegiatan masih dalam tahap persiapan	Percepatan penyelesaian kegiatan sesuai target waktu	Kabag SDM dan Umum
TERWUJUDNYA GOOD GOVERNANCE DAN CLEAN GOVERNMENT DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN	TINGKAT KEPUASAN PELAYANAN PERKANTORAN DITJEN PERKERETAAPIAN	%	3,7	Inventarisasi arsip statis dan arsip terjaga di lingkungan DJKA	-	1	-	-	67.545.900	5.03	-	-	-	-	Kegiatan masih dalam tahap persiapan	Percepatan penyelesaian kegiatan sesuai target waktu	Kabag SDM dan Umum
TERWUJUDNYA GOOD GOVERNANCE DAN CLEAN GOVERNMENT DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN	TINGKAT KEPUASAN PELAYANAN PERKANTORAN DITJEN PERKERETAAPIAN	Tahun	3,7	Administrasi Pengelolaan Umum dan Rumah Tangga	-	1	-	-	213.360.750	6.72	-	23.961.896	-	11.23%	Kegiatan masih dalam proses pelaksanaan	Percepatan penyelesaian kegiatan sesuai target waktu	Kabag SDM dan Umum
TERWUJUDNYA GOOD GOVERNANCE DAN CLEAN GOVERNMENT DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN	TINGKAT KEPUASAN PELAYANAN PERKANTORAN DITJEN PERKERETAAPIAN	Tahun	3,7	Monitoring Pemeliharaan dan Perawatan Mesin Absensi UPT/Balai dan Satker Perkeretaapian	-	1	-	-	22.702.860	1.43	-	2.001.000	-	8.81%	Kegiatan masih dalam proses pelaksanaan	Percepatan penyelesaian kegiatan sesuai target waktu	Kabag SDM dan Umum
TERWUJUDNYA GOOD GOVERNANCE DAN CLEAN GOVERNMENT DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN	TINGKAT KEPUASAN PELAYANAN PERKANTORAN DITJEN PERKERETAAPIAN	Tahun	3,7	Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN)	-	1	-	-	34.522.620	1.43	-	8.392.000	-	24.31%	Kegiatan masih dalam proses pelaksanaan	Percepatan penyelesaian kegiatan sesuai target waktu	Kabag SDM dan Umum

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Dalam PK	Kegiatan	Indikator Kinerja Output	Target Kinerja Output	Target Bulan 6				Realisasi Bulan 6		Realisasi Bulan 6		Evaluasi	Rencana Tindak Lanjut	Penanggung Jawab
							Target Output		Target Anggaran		Realisasi Output	Realisasi Anggaran	Capaian Output	Capaian Anggaran			
							Volume	%	Volume	%	Volume	Volume	%	%			
TERWUJUDNYA GOOD GOVERNANCE DAN CLEAN GOVERNMENT DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN	TINGKAT KEPUASAN PELAYANAN PERKANTORAN DITJEN PERKERETAAPIAN	Tahun	3,7	Bimbingan Teknis Kerumahtanggaan dan Umum	-	1	-	-	25.530.420	1.43	-	54.383.500	-	213.01%	Kegiatan masih dalam proses pelaksanaan	Percepatan penyelesaian kegiatan sesuai target waktu	Kabag SDM dan Umum
TERWUJUDNYA GOOD GOVERNANCE DAN CLEAN GOVERNMENT DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN	TINGKAT KEPUASAN PELAYANAN PERKANTORAN DITJEN PERKERETAAPIAN	%	3,7	Pemutakhiran Data Kartu dan Validasi Pencatatan Barang Inventaris, Dalam Rangka Penatausahaan BMN Perkantoran DJKA	-	1	-	-	167.925.600	7.64	-	160.407.084	-	95.52%	Kegiatan masih dalam proses pelaksanaan	Percepatan penyelesaian kegiatan sesuai target waktu	Kabag SDM dan Umum
TERWUJUDNYA GOOD GOVERNANCE DAN CLEAN GOVERNMENT DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN	TINGKAT KEPUASAN PELAYANAN PERKANTORAN DITJEN PERKERETAAPIAN	Tahun	3,7	Pengadaan Makanan/Minuman Penambah Daya Tahan Tubuh	-	1	-	-	98.790.720	7.64	-	6.830.000	-	6.91%	Kegiatan masih dalam proses pelaksanaan	Percepatan penyelesaian kegiatan sesuai target waktu	Kabag SDM dan Umum
TERWUJUDNYA GOOD GOVERNANCE DAN CLEAN GOVERNMENT DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN	TINGKAT KEPUASAN PELAYANAN PERKANTORAN DITJEN PERKERETAAPIAN	Unit	3,7	Kendaraan Bermotor	6	259	23	8.88	3.932.849.000	9.66	6	2.104.730.000	26.09%	53.52%	Kegiatan masih dalam proses pelaksanaan	Percepatan penyelesaian kegiatan sesuai target waktu	Kabag SDM dan Umum
TERWUJUDNYA GOOD GOVERNANCE DAN CLEAN GOVERNMENT DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN	TINGKAT KEPUASAN PELAYANAN PERKANTORAN DITJEN PERKERETAAPIAN	Tahun	3,7	Renovasi gedung dan bangunan	-	1	-	-	5.535.822.000	8.16	-	1.366.368.150	-	24.68%	Kegiatan masih dalam proses pelaksanaan	Percepatan penyelesaian kegiatan sesuai target waktu	Kabag SDM dan Umum
TERWUJUDNYA GOOD GOVERNANCE DAN CLEAN GOVERNMENT DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN	TINGKAT KEPUASAN PELAYANAN PERKANTORAN DITJEN PERKERETAAPIAN	Tahun	3,7	Gaji dan Tunjangan	-	1	-	-	31.856.843.040	7.64	-	43.496.181.210	-	136.54%	Kegiatan masih dalam proses pelaksanaan	Percepatan penyelesaian kegiatan sesuai target waktu	Kabag SDM dan Umum
TERWUJUDNYA GOOD GOVERNANCE DAN CLEAN GOVERNMENT DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN	TINGKAT KEPUASAN PELAYANAN PERKANTORAN DITJEN PERKERETAAPIAN	Tahun	3,7	Operasional dan Pemeliharaan Kantor	6	1	-	-	13.126.114.560	7.64	6	2.104.730.000	-	16.03%	Kegiatan masih dalam proses pelaksanaan	Percepatan penyelesaian kegiatan sesuai target waktu	Kabag SDM dan Umum

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Dalam PK	Kegiatan	Indikator Kinerja Output	Target Kinerja Output	Target Bulan 6				Realisasi Bulan 6		Realisasi Bulan 6		Evaluasi	Rencana Tindak Lanjut	Penanggung Jawab
							Target Output		Target Anggaran		Realisasi Output	Realisasi Anggaran	Capaian Output	Capaian Anggaran			
							Volume	%	Volume	%	Volume	Volume	%	%			
TERMANFAATKANYA KEBIJAKAN PEMBINAAN DAN PENINGKATAN PERKERETAAPIAN	PERSENTASE REKOMENDASI KEBIJAKAN PEMBINAAN DAN PENINGKATAN KONEKTIVITAS PERKERETAAPIAN YANG TELAH DITINDAKLANJUTI	Dokumen	100	Penyusunan dokumen perencanaan	-	15	-	-	3.941.790.050	8.35	-	637.609.245	-	16.18%	Kegiatan masih dalam proses pelaksanaan	Percepatan penyelesaian kegiatan sesuai target waktu	Kabag Perencanaan
SISTEM INFORMASI DAN TEKNOLOGI YANG ANDAL	PERSENTASE PEMENUHAN RENCANA INDUK TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI BIDANG PERKERETAAPIAN	Tahun	77	Pengelolaan data dan informasi	-	1	-	-	611.554.500	7.58	-	126.413.800	-	20.67%	Kegiatan masih dalam proses pelaksanaan	Percepatan penyelesaian kegiatan sesuai target waktu	Kabag Perencanaan
SISTEM INFORMASI DAN TEKNOLOGI YANG ANDAL	PERSENTASE PEMENUHAN RENCANA INDUK TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI BIDANG PERKERETAAPIAN	Tahun	77	Penyusunan Desain Pengembangan/Pengelolaan Sistem Informasi	-	1	-	-	550.000.000	8.8	-	-	-	-	Kegiatan masih dalam tahap persiapan	Percepatan penyelesaian kegiatan sesuai target waktu	Kabag Perencanaan
SISTEM INFORMASI DAN TEKNOLOGI YANG ANDAL	PERSENTASE PEMENUHAN RENCANA INDUK TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI BIDANG PERKERETAAPIAN	Tahun	77	Pembangunan dan Pengembangan Sistem Informasi Direktorat Jenderal Perkeretaapian	-	1	-	-	510.000.000	6.7	-	321.145.200	-	62.97%	Kegiatan masih dalam proses pelaksanaan	Percepatan penyelesaian kegiatan sesuai target waktu	Kabag Perencanaan

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Dalam PK	Kegiatan	Indikator Kinerja Output	Target Kinerja Output	Target Bulan 6				Realisasi Bulan 6		Realisasi Bulan 6		Evaluasi	Rencana Tindak Lanjut	Penanggung Jawab
							Target Output		Target Anggaran		Realisasi Output	Realisasi Anggaran	Capaian Output	Capaian Anggaran			
							Volume	%	Volume	%	Volume	Volume	%	%			
DUKUNGAN PUBLIK TERHADAP PENYELENGGARAAN PERKERETAAPIAN	PERSENTASE PEMENUHAN PUBLIKASI DITJEN PERKERETAAPIAN	Tahun	100	Pelayanan humas dan protokoler	-	1	-	-	796.509.036	1.42	-	2.913.072.238	-	365.73%	Kegiatan masih dalam proses pelaksanaan	Percepatan penyelesaian kegiatan sesuai target waktu	Kabag Hukum

SEKRETARIS

DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

JUJUN ENDAH WAHJUNINGRUM

Pembina Utama Madya (IV/d)

NIP. 19650703 199103 2 001

LAMPIRAN IV

Data Dukung per-Indikator Kinerja Kegiatan

LAMPIRAN

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN I

PERSENTASE REKOMENDASI KEBIJAKAN PEMBINAAN DAN PENINGKATAN KONEKTIVITAS PERKERETAAPIAN YANG TELAH DITINDAKLANJUTI

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO. 8
JAKARTA 10110

TELP: +62 813-6001-3838

WEBSITE : djka.kemenhub.go.id
EMAIL : ditjenka@kemenhub.go.id

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERKERETAAPIAN
NOMOR : KP. DJKA 74 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGARAH DAN TIM PENDAMPING PENYUSUNAN STUDI EVALUASI KEMANFAATAN PEMBANGUNAN DAN PENGOPERASIAN ELEKTRIFIKASI JALUR KERETA API YOGYAKARTA – SOLO – PALUR PADA SATUAN KERJA KANTOR PUSAT DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN
TAHUN ANGGARAN 2024

DIREKTUR JENDERAL PERKERETAAPIAN

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Penyusunan Studi Evaluasi Kemanfaatan Pembangunan Dan Pengoperasian Elektrifikasi Jalur Kereta Api Yogyakarta – Solo - Palur pada Satuan Kerja Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perkeretaapian yang pembiayaannya dari dana Rupiah Murni Tahun Anggaran 2024, perlu dibentuk Tim Pengarah dan Tim Pendamping;

b. bahwa Pejabat dan Staf yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dipandang memenuhi syarat sebagai Tim Pengarah dan Tim Pendamping;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tercantum dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Perkeretaapian tentang Pembentukan Tim Pengarah dan Pendamping Penyusunan Studi Evaluasi Kemanfaatan Pembangunan dan Pengoperasian Elektrifikasi Jalur Kereta Api Yogyakarta – Solo – Palur pada Satuan Kerja Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perkeretaapian.

Mengingat :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2007 Tentang Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 65, Tambahan Lebaran Negara Nomor 4722);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Kereta Api (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 264, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5961);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6022);
6. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketujuh Atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 Tentang Unit Organisasi Dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 2007);
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 135 Tahun 2014 Tentang Perubahan Ketujuh Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 Tentang Kedudukan, Tugas, Dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, Dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 273);
8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 Tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 73);
9. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 112 Tahun 2017 Tentang Pedoman Dan Proses Perencanaan di Lingkungan Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1710);
10. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 17 Tahun 2022 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara;
11. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 296 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 2128 Tahun 2018 Tentang Rencana Induk Perkeretaapian Nasional;
12. DIPA TA. 2024 Satuan Kerja Kantor Pusat Ditjen Perkeretaapian Nomor : SP DIPA- 022.08.1.467504/2024 Tanggal 24 November 2023.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERKERETAAPIAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGARAH DAN TIM PENDAMPING PENYUSUNAN STUDI EVALUASI KEMANFAATAN PEMBANGUNAN DAN PENGOPERASIAN ELEKTRIFIKASI JALUR KERETA API YOGYAKARTA – SOLO – PALUR PADA SATUAN KERJA KANTOR PUSAT DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN.

KESATU : Membentuk Tim Pengarah dan Tim Pendamping Penyusunan Studi Evaluasi Kemanfaatan Pembangunan dan Pengoperasian Elektrifikasi Jalur Kereta Api Yogyakarta – Solo - Palur pada Satuan Kerja Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun Anggaran 2023, dengan susunan anggota sebagaimana tercantum pada lampiran Surat Keputusan ini.

KEDUA : Tugas dan tanggung jawab Tim Pengarah dan Tim Pendamping adalah sebagai berikut :

1. Tim Pengarah bertugas :
   a) Memberikan arahan dan saran kepada Tim Pendamping yang terkait dengan kebijakan yang telah ditetapkan pada sub sektor transportasi perkeretaapian.
   b) Memberikan arahan dan masukan kepada Tim Pendamping atas masalah yang terkait dengan kebijakan instansi terkait.
   c) Tim Pengarah bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Perkeretaapian.
2. Tim Pendamping bertugas sebagai berikut :
   a) Membantu/mendampingi Konsultan dalam melaksanakan studi/studi agar tetap sesuai dengan isi Kerangka Acuan Kerja (KAK) yang telah ditetapkan.
   b) Memberikan bantuan koordinasi dengan instansi terkait untuk menunjang kelancaran penyelesaian studi.
   c) Memberikan rekomendasi/laporan kepada Tim Pengarah dalam tiap tahap pelaksanaan studi.
   d) Tim Pendamping bertanggungjawab kepada Tim Pengarah.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan kegiatan Tim Pengarah dan Tim Pendamping, dibebankan pada DIPA Satuan Kerja Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perkeretaapian Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun Anggaran 2024.

KEEMPAT : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2024.

Ditetapkan di : JAKARTA
Pada Tanggal : 4 April 2024

DIREKTUR JENDERAL PERKERETAAPIAN

Ir. MOHAMAD RISAL WASAL, A.TD., M.M., IPM.
NIP 196706081990031005

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :
1. Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan;
3. Sekretaris Direktorat Jenderal Perkeretaapian;
4. Para Direktur di lingkungan Ditjen Perkeretaapian;
5. KPA Satker Kantor Pusat Ditjen Perkeretaapian;
6. PPK Satker Kantor Pusat Ditjen Perkeretaapian;
7. Yang bersangkutan.

Lampiran Surat Keputusan Direktur Jenderal Perkeretaapian
Nomor :
Tanggal : Maret 2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENGARAH DAN TIM PENDAMPING PENYUSUNAN STUDI EVALUASI KEMANFAATAN PEMBANGUNAN DAN PENGOPERASIAN ELEKTRIFIKASI JALUR KERETA API YOGYAKARTA – SOLO - PALUR

I. TIM PENGARAH		
Ketua	Sekretaris Direktorat Jenderal Perkeretaapian	Direktorat Jenderal Perkeretaapian
Anggota	1. Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api	Direktorat Jenderal Perkeretaapian
	2. Direktur Prasarana Perkeretaapian	Direktorat Jenderal Perkeretaapian
	3. Direktur Keselamatan Perkeretaapian	Direktorat Jenderal Perkeretaapian
	4. Direktur Sarana Perkeretaapian	Direktorat Jenderal Perkeretaapian
II. TIM PENDAMPING		
Ketua	Kepala Bagian Perencanaan	Setditjen Perkeretaapian
Wakil Ketua	Kasubdit Penataan dan Pengembangan Jaringan	Dit. LLAKA, Ditjen Perkeretaapian
Anggota	Kepala Bagian Program	Biro Perencanaan, Kemenhub
	Kasubdit Jalur dan Bangunan Kereta Api Wilayah I	Dit. Prasarana, Ditjen Perkeretaapian
	Kasubdit Angkutan	Dit. LLAKA, Ditjen Perkeretaapian
	Koordinator Kelompok Lalu Lintas Antar Kota	Dit. LLAKA, Ditjen Perkeretaapian
	Kasubdit Fasilitas Operasi Kereta Api	Dit. Prasarana, Ditjen Perkeretaapian
	Koordinator Kelompok Jalan Rel dan Tanah Kereta Api Wilayah I	Dit. Prasarana, Ditjen Perkeretaapian
	Kasubdit Pemeriksaan dan Analisis Kecelakaan	Dit. Keselamatan, Ditjen Perkeretaapian
	Kasubdit Kelaikan Sarana Wilayah I	Dit. Sarana, Ditjen Perkeretaapian
	Kabalai Teknik Perkeretaapian Kelas I Semarang	Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Semarang
	Koordinator Kelompok Rencana	Setditjen Perkeretaapian
	Koordinator Kelompok Program	Setditjen Perkeretaapian
	Koordinator Kelompok Evaluasi dan Pelaporan	Setditjen Perkeretaapian

	Koordinator Kelompok Perbendaharaan dan BMN	Setditjen Perkeretaapian
V. SEKRETARIAT		
	27. Viki Okissa Saifudin	Setditjen Perkeretaapian
	28. Novie Hasta Wahyudi	Setditjen Perkeretaapian
	29. Yurnaliza	Setditjen Perkeretaapian
	30. Eko Purnomo	Setditjen Perkeretaapian
	31. Dedy Kurniawan	Setditjen Perkeretaapian
	32. Ayu Permata Sani	Setditjen Perkeretaapian
	33. Khairana Tiardi	Setditjen Perkeretaapian
	34. Gentur Wiku Pribadi	Setditjen Perkeretaapian
	35. Renaldy Aprevia Lutfi	Setditjen Perkeretaapian
	36. Merinda Pangestika Sari	Setditjen Perkeretaapian
	37. Nadia Balqis	Setditjen Perkeretaapian
	38. Trinanda Meinar Ariani	Setditjen Perkeretaapian
	39. Moh. Maulana Rizki Z R	Setditjen Perkeretaapian

DIREKTUR JENDERAL PERKERETAAPIAN

Ir. MOHAMAD RISAL WASAL, ATD., M.M., IPM
NIP 196706081990031005

NOTULESI HASIL PEMBAHASAN LAPORAN PENDAHULUAN
Pekerjaan Studi Evaluasi Kemanfaatan Pembangunan dan Pengoperasian Elektrifikasi Jalur KA Yogyakarta - Solo - Palur

1. Pada hari ini : Rabu
   Tanggal : 17 Mei 2024 Jam 09.30 wib
   Tempat : Millennium Hotel, Jakarta
   Telah Rapat Pembahasan Laporan Pendahuluan dengan Tim Konsultan serta Tim Teknis Pekerjaan Studi Evaluasi Kemanfaatan Pembangunan dan Pengoperasian Elektrifikasi Jalur KA Yogya - Solo – Palur.
2. Rapat dipimpin oleh Kepala Bagian Perencanaan Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian Bpk. Federik Pong serta dihadiri oleh tim Teknis dan Tim Instansi terkait dengan Pekerjaan Studi Evaluasi Kemanfaatan Pembangunan dan Pengoperasian Elektrifikasi Jalur KA Yogya - Solo – Palur, baik yang hadir langsung maupun secara online dan offline.
3. Rapat Pembahasan Laporan Pendahuluan dibuka oleh Bpk. Fedrik (Ka. Bagian Perencanaan Sesdit. Perkeretaapian sebagai berikut :

1) Pak Federik (Kabag Perencanaan Sesdit. Perkeretaapian)
Menyampaikan pembukaan dan sambutan pembahasan Laporan Pendahuluan sbb:
Studi Evaluasi Kemanfaatan Pembangunan dan Pengoperasian Elektrifikasi Jalur KA Yogya - Solo – Palur yang dilakukan pada Kantor Pusat Sekretarian Ditjen. Perkeretaapian untuk mengkaji salah satu Pembangunan di DJKA, Sekali lagi kami ucapkan terima kasih di internal Kementerian Perhubungan sudah hadir dari Biro Perencanaan Kementerian Perhubungan, Direktorat Teknis dilingkungan Ditjen. Perkeretaapian yaitu dari Direktorat Lalu Lintas, Direktorat Prasarana dan Direktorat Keselamatan serta teman-teman dari Balai Transportasi Darat maupun Balai Perkeretaapian di wilayah Jawa Tengah,
Terima kasih juga kehadiran dari Eksternal sudah hadir Bpk. Ka. Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo, dan secara online juga banyak perwakilan dari eksternal baik dari Kementerian PUPR, Rekan-rekan dari Dinas Perhubungan di wilayah Provinsi dan Kabupaten, Dinas PUPR, Dinas Lingkungan Hidup, juga teman-teman dari PT. KAI, baik dari Operator Perkeretaapian dari Kantor Pusat, DAOP 5 dan DAOP 6 dan juga teman-teman KCI yang mengoperasikan KRL Yogya-Solo- Palur.

Diinformasikan bahwa pada saat ini tahun anggaran 2024 ini Direktur Jenderal Perkeretaapian mempunyai salah satu Studi terkait evaluasi terhadap hasil pembangunan

yang kami lakukan di wilayah Provinsi DIY khususnya pembangunan pengoperasian Pembangungan Pengoperasian Elektrifikasi KRL Lintas Jogja – Solo - Palur.

Jadi Bapak Ibu sekalian dari sejak beberapa waktu yang lalu sampai dengan Tahun 2022 kami sudah menyelesaikan Pekerjaan Elektrifikasi Jalur KRL Jogja-Solo-Palur dan kita sudah mengoperasikan KRL di wilayah tersebut. ini adalah operasi KRL yang pertama di luar Jabodetabek, jadi selama ini KRL hanya beroperasi di Jabotabek, maka Operasi KRL yang Kedua diluar yg kita punyai diluar DJKA. Mengapa ini sangat penting untuk elektrifikasi ini karena sekarang ini tidak hanya secara domestik negara, secara internasional juga issu green energi dan masalah teknologi jadi masalah elektrifikasi sangat diperlukan terkhusus untuk Urban Transport tetapi tidak menutup kemungkinan melihat dinegara-negara lain untuk Kereta Jarak Jauh itu sangat dikembangan elektrifikasi.

Jadi maksud studi ini yang yang **Pertama** adalah seberapa besar impact dari pembangunan yang DJKA lakukan di sana. Jadi sekarang ini kita tidak semata-mata berbicara outcome dari sebuah kegiatan, sudah seberapa besar uang negara untuk investasi itu kita harus juga tahu seberapa besar inpeck manfaatnya bagi masyarakat dan nanti ini kami dibantu oleh konsultan untuk mengkaji kinerja dari pelaksanaan pengoperasian KRL Jogja-Solo-Palur. **Kedua** ruang lingkup dari studi ini adalah rekan-rekan konsultan kami minta mengkaji untuk kemungkinan perpanjangan KRL tersebut karena kami melihat KRL ada kebutuhan untuk memperpanjang sampai dengan Kutoarjo atau mungkin seperti yang pernah disampaikan oleh rekan-rekan KCI juga bisa diperpanjangkan ke arah timur, nanti juga bisa disampaikan masukan oleh perwakilan KCI, karena kami juga baru mendengar ide jika KRL Jogja - Solo - Palur ini akan diperpanjang ke arah timur Karena konsep yang semula dari DJKA diperpanjang ke arah barat dan kemungkinan elektrifikasi diperpanjang ke Bandara YAI terkait dengan Raillink.

Mungkin itu yang bisa disampaikan bapak ibu, ini masih tarap Laporan Pendahuluan sehingga kami sangat berharap banyak masukannya dan kami betul-betul ingin mengetahui manfaat yg didapatkan dari pembangunan elektrifikasi pembangunan KRL Yogya-Solo-Palur serta seberapa besar kemungkinan untuk melakukan kajian Fisiability studi untuk pengembangan KLR ini sehingga nanti akan kami tinjau dari Sisinya finansial ekonomi dan juga dari Sisi teknis.

Sebelum bapak ibu kami mohon kepada teman-teman konsultan untuk memaparkan terlebih dahulu apa-apa saja yang sudah dilakukan sampai pada laporan pendahuluan ini dan apa-apa saja survei sekunder yang sudah dilakukan dan diskusi apa yang sudah dilakukan mungkin itu sedikit pembukaan dari kami Sebelum kita lanjut Sekarang

kesempatan berikutnya konsultan untuk memaparkan laporan pendahuluan dari studi evaluasi pemanfaatan pembangunan dan pengoperasian elektrifikasi jalur kereta api Yogyakarta-Solo-Palur.

2) Pak Budi Setiawan (Konsultan)

Menyampaikan hal-hal sebagai berikut :

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi kita semua semoga kita selalu sehat dan dalam perlindungan Tuhan untuk melakukan apa yang seharusnya menjadi tugas dan tanggung jawab kita, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami izin melaporkan, jadi sejak sebelum meeting sampai dengan sebelum paparan laporan pendahuluan pada pagi hari ini kami telah berkomunikasi secara Intens untuk asistensi kemudian Pada waktu kita mungkin juga ada diskusi sehingga tahapannya juga cukup matang untuk ukuran laporan pendahuluan ini jadi memang sudah sangat banyak yang kami dapatkan karena pekerjaan ini sangat besar cakupannya cukup luas jadi di awal Kami memang berpikir hanya dari Palur ke Yogya tetapi ternyata di dalam itu masih ada perpanjangan ke Kutoarjo dan mungkin ada studi kelayakan juga untuk untuk jalur ke situ sehingga memang untuk mencapai laporan pendahuluan ada banyak perubahannya dan banyak asistensi yang sudah kami lakukan. Terima kasih juga Pak Fiki yang sudah memandu kami untuk supaya bisa membuat laporan ini menjadi lebih baik, Baik saya akan men-share paparan kami dan untuk pekerjaan ini judulnya adalah : Studi evaluasi kemanfaatan pembangunan dan pengoperasian elektrifikasi jalur kereta api Jogja Solo Palur, Adapun akan yang akan kami presentasikan pada pagi hari ini yang pertama adalah :

- Pendahuluan,
- Metodologi Pelaksanaan pekerjaan, berikutnya
- Kajian literatur,
- Tinjauan kebijakan,
- Gambaran umum wilayah selanjutnya adalah
- Rencana kegiatan selanjutnya dan yang terakhir adalah
- Rencana Survei.

Dalam upaya memberikan kontribusi terhadap pemerataan pembangunan kepada masyarakat dan hasilnya secara keseluruhan pembangunan transportasi Indonesia, bertujuan untuk meningkatkan dan memeratakan transportasi di seluruh negeri dan juga untuk meningkatkan peran kereta api sebagai angkutan publik dan angkutan massal, jadi dalam hal ini Ditjen Perkeretaapian selalu berusaha untuk melakukan peningkatan pembangunan jalur transportasi KA untuk wilayah Solo dan Jogja yang saat ini sudah beroperasi jadi untuk Jogja, Solo sampai dengan Palur kemudian harapannya nanti akan

ke arah Barat sampai Bandaraan YIA di Kutoharjo dan ada rujukan juga dari KCI untuk ke arah timur yang memang cukup potensial. yang saat ini adalah 62,84 km yang saat ini sudah Solo itu sebenarnya sudah beroperasi dari tahun 2021 antara Jogja dan Solo sebelum sampai ke Palur itu sepanjang 59,34 KM Kebetulan kami juga mendapat peran juga waktu itu pada waktu revitalisasi sarana yang tadinya kereta api di Jakarta yang 10 trenship itu waktu di Bagian yang sudah pernah kami kaji lah ini untuk berikutnya Sudah barang tentu mungkin hasilnya akan jauh lebih baik dari yang sebelumnya karena trennya itu selalu meningkat.

Maksud dan tujuan dari kegiatan ini diselenggarakan adalah, Pertama melakukan evaluasi manfaat terhadap hasil pembangunan elektrifikasi jalur kereta api Yogyakarta-Solo-Palur dan Pengoperasian Yogyakarta-Solo-Palur yang telah dilaksanakan oleh Direktur Jenderal Perkertaapian, yang berikutnya adalah mengkaji potensi perpanjangan Jalur KRL sampai dengan Kutoarjo diantaranya meliputi aspek transportasi ekonomi finansial wilayah sosial budaya dan lingkungan serta identifikasi potensi dan permasalahan dalam pemanfaatan hasil pembangunan tersebut.

Adapun tujuannya itu adalah untuk menjadi masukan dalam penyusunan kebijakan program dan kegiatan berkelanjutan untuk optimalisasi hasil pembangunan serta meningkatkan pelayanan transportasi Perkeretaapian.

Adapun ruang lingkup pekerjaan ini yang pertama adalah melakukan survei reconnaissance data sekunder kajian manfaat terkait elektrifikasi jalur kereta api dan pengoperasian Jogja Solo Palur beserta potensi perpanjangannya menuju ke Kutoarja untuk memperoleh data yang diperlukan di wilayah tersebut, nah ini yang akan segera kami laksanakan setelah pembahasan kegiatan pendahuluan, kemudian berikutnya adalah identifikasi peraturan perundang-undangan dan pemerintah yang terkait dengan studi pemanfaatan terkadang sertifikasi dan setelah operasinya sampai dengan Palur, termasuk potensi nanti akan diperpanjang ke Kutoarjo dan termasuk juga akses menuju ke Bandara YIA kemudian yang berikutnya akan melakukan review terhadap dokumen perencanaan yang terkait yang sudah ada serta melakukan kajian potensi daerah terhadap RTRW di sekitar Solo-Jogja Sukoharjo termasuk nanti akses ke Bandara YIA kemudian juga identifikasi evaluasi manfaat diantaranya adalah transportasi, ekonomi finansial, kewilayahan, social, budaya dan lingkungan.

Ruang lingkup yang berikutnya itu adalah mengidentifikasi kondisi sarana prasarana operasi pelayanan transportasi KRL Jogja-Solo-Palur kemudian juga melakukan kajian evaluasi manfaat atau dampak yang terukur dan teknis untuk pengoperasian KRL baik untuk pengguna kereta api itu sendiri, masyarakat sekitar yang mungkin tidak langsung

bersentuhan dengan kereta api, kemudian juga pemerintah dan stakeholder lainnya baik dilevel lokal maupun nasional, kemudian juga kita akan melakukan kajian potensi permasalahan terhadap hasil evaluasi manfaat atau dampak pengoperasian keadaan Jogja – Solo – Palur.
selanjutnya melakukan analisa pola pergerakan orang dan barang dan intra zona kemudian juga proyeksi kebutuhan perjalanan dalam waktu paling tidak 20 tahun ke depan, kemudian juga potensi pelayanan dari Kutoarjo serta aksesnya ke Bandara Yogyakarta International Airport (YIA) selanjutnya melakukan kajian terhadap rute jalur kereta api baik secara teknis, finansial, ekonomis dan berikutnya adalah menyusun tahapan Pembangunan, skema pembiayaan dan kajian terutama untuk manajemen risikonya terkait keselamatan.

Pak Hasta Herlan Asymar (Konsultan)
Ruang lingkup kewilayahan transportasi KRL Yogya-Solo-Palur di sini akan melalui beberapa kabupaten dan kecamatan yang ada di Jawa Tengah dan DIY, di mulai dari sebelah barat itu mulai dari Kutoarjo di Kab. Purworejo, Kab. Wates, Kulonprogo dan Yogyakarta ke timur, Kab. Klaten, Kab. Sukoharjo, Kota Solo dan Palur di Kab. Karanganyar, untuk kewilayanan nanti akan ditinjau secara detail ini baru areanya.

Pak Budi Setiawan (Konsultan)
Kemudian untuk metodologinya pelaksanaan sampaikan pertama itu adalah :

- pelaksanaan survei kemudian
- radio kebijakan kemudian
- analisis kondisi sarana prasarana kemudian
- juga dampak manfaat KRL berikutnya
- evaluasi ke manfaatkan rekomendasi kebijakan strategi strategi perencanaan yang dimaksud dengan analisis potensi kemudian kelayakan rute perpanjangan ke Kutoarjo dampak tahapan ke depan kira-kira akan seperti apa,
- Alur Pikir pekerjaan seperti ini ya Jadi yang pertama adalah maksud dan tujuan kemudian ruang lingkup kegiatan itu teknologi metodologi nanti di situ ada data yang terkait dengan data primer sekunder gitu ya tetap

Data primer dilakukan wawancara, surve lapangan untuk data sekunder melakukan kunjungan untuk memperoleh data yang ada di instansi kemudian kajian-kajian yang terdahulu dan kemudian kita juga melihat pertemuan pemanfaatannya Nah dari masing-masing itu nanti kita akan bisa melakukan evaluasi kemanfaatan dan melihat potensi perpanjangan jadi berdasarkan data primer dan sekunder nanti akan kita peroleh beberapa hal yang pertama itu adalah:

Review kebijakan itu kita akan melihat dokumen perjalanan terkait Kemudian dari RTRW masing-masing itu akan seperti apa Tatrawil dan Tatralok masing-masing kecamatannya kemudian juga kita perlu meninjau kondisi Sarana Prasarana dan operasinya jadi sarana prasarana operasi layanan saat ini, kemudian dari situ akhirnya kita proyeksi ke depan terutama 5 tahun kedepan itu akan seperti apa.
Berikutnya adalah analisis manfaat terdampak dampak bagi pengguna kereta api sendiri, apakah di masyarakat nanti akan ada semacam peningkatan, terutama di bidang ekonomi atau dampak-dampak lain, maka pihak spekholder juga kita libatkan di sini, terutama kaitannya kalau dengan elektrifikasi KRL itu adalah arah lingkungan hidup jadi peralihan disel yang mengunakan solar beralih ke elektrik, yang lain evaluasi kemamfaatan berupa aspek transportasinya kemudian aspek ekonomi finansial, sosial budaya dan lingkungan.

Dari sisi potensi perpanjangan nanti dilakukan survei stet poreferen, pola perjalanan dan potensi demand seperti apa, kelayakan rute secara teknis, potensi ekonomi dan kelayakan lalu lintas nanti perhitungan traffic counting serta melakukan rute sheit interview juga pola pergerakan orang dan barang inter dan internasional serta kebutuhan kira-kira 20 th ke depan bagaimanan, nantinya dari data surve tersebut akan diperoleh gambaranannya, tahapan kedepan mengenai dampak-dampak Pembangunan bagaimana, scema pembiayanan bagaimana, kemudian terkait resiko semakin padat semakin banyak orang mengunakan transportasi Kereta api semakin banyak sehingga perlu digali lebih detail. Sehingga perlu disusun rekomendasi, rencana aksi dan reaksi.

Langkah kerja dengan melakukan surve reconnaisence inventaris data, surve Identifikasi UU RTRW, Tatrawil/Tatralok, melakukan surve state preference Lalu Lintas Kelayakan Rute

Kajian Literatur, bahwa Infrastruktur mempunyai peran penting dalam mendukung pertumbuhan perekonomian dimasa depan. Pola Bangkitan dari rumah ke tempat kerja dan tempat kerja ke tempat belanja yang sudah disetujui sebelumnya, akan tetapi kereta api belum mendominas angkutan perjalanan penumpang maupun jalan sedangkan transportasi Jalan masih mendominasi dengan rasio 91,24%, kereta api 0,63% sisanya untuk Transp Udara dan Laut. Hal yang penting dalam tranportasi Kereta Api Faktor Keselamatan perlu diperhatikan dlm penyeleseian elektrifikasi KA Yogya-Solo-Palur mengingat PM No 24 Tahun 2015.

Kebutuhan infrastruktur transportasi jadi suatu daerah itu akan meningkat produktivitasnya juga aksessibilitasnya tinggi Kemudian pada sektor investasi jadi pada transportasi itu di beberapa negara Ternyata memang sudah diteliti bahwa perkembangan ekonomi itu akan meningkat jika transportasinya lebih baik gitu ya

kemudian jika kita lihat analisis peran dan dampak investasi infrastruktur terhadap perekonomian yang di Indonesia itu ada beberapa metode yang kita kerjakan nanti ya jadi akan metode kemudian analisis data keterkaitannya kemudian dampak penyebaran kemudian analisis multi-motif ya kemudian juga tampak investasinya di sisi lain eee bagian dari Capital stop dari suatu negara yaitu biaya tetap sosial itu akan berlangsung mendukung produksi ee input output ya kegiatan produksi dapat mempengaruhi kegiatan ekonomi ee baik secara langsung maupun secara tidak langsung tidak ada beberapa hal gitu ya kemudian tidak hanya kegiatan produksi yang akan menciptakan output output dan kesempatan kerja tetapi infrastruktur itu ternyata juga menjadi faktor yang yang sangat penting ya Jadi ini sudah sudah diteliti oleh banyak orang yang terlihat hasilnya bahwa infrastruktur itu selalu menjadi bagian yang penting ya Jadi untuk meningkatkan perekonomian di suatu wilayah kemudian terkait dengan eee teknis mungkin pak beliau bisa menyampaikan Pak silakan Baik

Pak Heru Pratomo (Konsultan)
saya lanjutkan memang awal-awalnya adalah menggunakan kereta Disel gitu ya gimana sekarang berubah menjadi listrik dan isu lingkungan sekarang ini bukan lagi isu nasional tetapi sebetulnya di Indonesia akan jauh lebih efisien karena pembangkit listrik dari panas bumi dari eee air, PLTA gitu ya sudah dihubungkan di jalur Madura dan Bali itu juga isu terkait dengan lingkungan ini bisa betul-betul terwujud gitu ya melihat di mana disel ini kalau kita lihat pasti akan menghasilkan polusi CO2 gitu ya getarannya akan semakin besar nah kebisingannya juga semakin tinggi yang nanti di pekerjaan ini akan kita ukur.
gitu ya terlebih lagi terkait dengan kecepatan akan jauh lebih baik menggunakan KRL banyak kecepatannya bisa sampai 120 km per jam nah jika kita flashback sedikit ke prinsip diesel ini terlihat jelas bahwa ini pada prinsipnya bisa membangkitkan dalam bentuk generator DC atau AC gitu ya sekarang biasa dikenal dengan nama AC tetapi pembangkitan utamakan diesel sehingga polusi-volusi yang ada itu sangat-sangat dominan nanti kita akan mengukur setelah menggunakan KRL itu hasilnya kayak apa itu lagi terkait dengan getaran, suara yang ada standarnya di Kementerian lingkungan hidup itu akan mengakibatkan efek yang tidak baik nah ini terkait dengan desain multiple unit nah
Sedangkan ini ilustrasi yang sangat simpel bahwa isu lingkungan terkait dengan isu internasional saya mengilustrasikan bahwa di daerah Jawa ini banyak pembangkit yang sebetulnya atau ramah lingkungan gitu ya saya mengambil kasus contohnya adalah PLTA sehingga Disana tidak ada CO2 yang dihasilkan apalagi di daerah sana itu dekat dengan daerah Dieng inter koneksi ini sangat signifikan karena apa juga tidak menghasilkan Dalam bentuk energi baru terbarukan dan sangat baik pada prinsipnya dari pembangkit itu akan disalurkan ke saluran transmisi dan di pada bagian aliran atas didapatkan dari kartu itu atau penyulang dari tegangan 20 kV menggunakan trafo sekitar 1,2 kilo volt

baru disearahkan untuk menghasilkan tegangan 1.500 sebetulnya kajian lebih lanjut akan kita lihat Seberapa jauh sih penyebab-penyeulam itu efektif karena ada aturan main terkait dengan standarnya itu juga yaitu penurunan tegangan sebesar 10% beberapa kajian yang sudah dilakukan itu akan menentukan panjang feeder, kemarin dari diskusi memang Apakah dimungkinkan nanti akan ditarik sampai ke Kutoarjo Saya rasa jalur 20 KV ini hampir ada di setiap pulau Jawa sehingga dapat mudah di gunakan akan tetapi mendapatkan fitur-fitur yang optimal itu perlu nanti akan dikasih lebih lanjut sehingga kinerja dari KRL ini akan sangat-sangat baik yang rata-rata sih biasanya menurut penelitian terbaru ini sekitar 8 kilo baik ini gambaran singkat nanti di bagian belakang data apa saja yang dibutuhkan untuk menghiasi kinerja KRL akan disampaikan lebih lanjut.

Pak Ardi Perdana (Konsultan)
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk mengetahui pergerakan dari luar ke dalam atau sebaliknya jadi dalam apa namanya kuesioner yang kita pakai ada profil responden perjalanan untuk jumlah sekunder yang kita apa namanya kita wawancara nanti itu berdasarkan dari tabel tersebut jadi nanti kita Menjadi dasar untuk penentuan sampel misalnya kode-kodean itu misalnya kode antara Purworejo yang berkaitan dengan Kebumen itu misalnya kendaraan total 750 Maka 12,5% nanti setelah itu jumlah ekspor dari itu dibagi pernoda jadi perbandingan misalnya kendaraan apa namanya mode mobil penumpang itu sekitar 150 sekitar 300 jadi perbandingan seperti itu kemudian survei RS ini nah ini adalah lokasi survei LSI jadi nanti untuk anaknya kita berdasarkan zona kota di kabupaten kita akan melakukan survei di

1. perbatasan antara Purworejo dengan Kebumen dengan
2. Kabupaten Magelang kemudian Sleman dengan
3. Kabupaten Sleman dengan Kabupaten Magelang kemudian
4. kota Jogja dengan Kabupaten Sleman kemudian
5. kota Jogja dengan Kabupaten Gunungkidul

jadi ada 5 lokasi yang akan kita survei RSI ini untuk mengetahui pergerakan ada intranya di dari eksternal atau ke internet atau internal kemudian ini form survei jadi dari kesepakatan kemarin jadi langsung ke Moda-moda perjalanan bagi 3 (tiga) moda :

1. Moda sepeda motor
2. Moda mobil penumpang
3. Moda Mobil umum dan travel,

masing-masing Berapa jumlahnya berdasarkan Kemudian untuk grafik counting kita akan melakukan selama 16 jam karena dalam teori kita sesuai 16 jam itu mewakili 90% volume harian jadi kita makan 16 jam 6 sampai jam 10.00 malam Kemudian untuk 10%-nya itu untuk foto ekspansi jadi volume dalam 16 jam ditambah 10% dari apa namanya dari volume natural 16 jam itu ditambahkan nanti menjadi faktor ekspansi berkendara per

jam jadi faktor ekspansi kalau yang tadi ada pertanyaan jumlah penumpang di RSI itu untuk faktor-faktor perbandingannya satu mobil itu ada berapa toko pasirnya misalkan 1,8 ini adalah formulir dari counting jadi kita akan melakukan dari hari Senin Senin Itu hari yang pada luar biasa itu bukan dari yang biasa Kemudian hari kerja antara pasar sampai Jumat kita pilih satu hari yaitu hari besar hari Rabu kemudian hari libur antara Hari Sabtu atau hari Minggu jadi kita ada secara seminggu ada tiga kali survei Senen Rabu dan Sabtu atau Minggu ini adalah kita Survei apa namanya jadi kita di Purworejo itu di kutoarjo Prembun kemudian perbatasan Magelang Sleman Magelang Kemudian untuk Sleman dengan Jogja itu berada di Klaten itu kemudian daerah Piyungan yang berbatasan dengan Gunung Kidul kemudian daerah dalam kota Jogja kemudian antara kota Jogja dengan wates ya apa namanya Kulon Progo kemudian perbatasan kemudian antara Jogja dengan di Purworejo adalah berbentuk perpanjangan potensi dari Jogja ke Kutoarjo Kemudian untuk travel time ada dua yaitu untuk mencapai pribadi dan anggota Umum dilakukan selama 12 jam jam 6 sampai jam 6 sore jadi untuk Kendaraan pribadi nanti kita surveyor naik kendaraan pribadi untuk dari Stasiun Tugu sampai Kutoarjo itu nanti dihitung berapa Jam berapa menit dilakukan sama selama seminggu Senin hari rabu atau hari perjalanannya satu atau Minggu Kemudian untuk ini dilakukan olak alik/pulang pergi, untuk angkutan umum star dari Giwangan atau terminal Kotoarjo bolak-balik dan ketika angkutan mulai berhenti itu dicatat waktu tiba di lokasi tertentu kemudian waktu berangkat itu juga sampai jam 6 sore untuk hari surveinya sama seperti ini adalah

Pak Heru Pratomo (Konsultan)
Terkait tingkat Kebisingan Asistensi yang kemarin nanti akan dilakukan pengukuran-pengukuran terkait dengan kondisi eksisting dibandingkan dengan aturan main yang ada kemarin yang harus diukur itu terkait dengan kebisingan sehingga hal ini akan diukur terkait dengan keputusan menteri negara lingkungan hidup tahun nomor 48 tahun '96 di mana tingkat kebisingan di dalam stasiun kereta api itu 60 nanti kita akan mengukur apakah kondisi yang sekarang ini masih memenuhi kebisingan itu sendiri yang berikutnya terkait dengan Getaran ini nanti akan diukur Sesuai dengan standar yang sama gitu ya terkait dengan keputusan Menteri Lingkungan Hidup nomor 48 tahun 96 dimana frekuensi-presi yang diukur yang direkomendasikan itu tertera pada tabel, Sehingga dari hasil itu akan Kita bedakan antara mengganggu tidak mengganggu nyaman menyaksikan dan yang lain-lain dari distribusi frekuensi sehingga ini akan memunculkan spektrum spektrum frekuensi yang aman atau tidak nah ini nanti akan kita lihat terkait dengan efek-efek yang dihasilkan secara singkat yang berikutnya terkait dengan kadar CO2 terkait dengan isu yang dilontarkan oleh word green house bekas di tahun 2005 di mana hamba batas CO2 yang bersih itu dikatakan antara 310 -ai 330 PPM ya sedangkan tercemar itu di 350 - 700 PPM nah terkait dengan tindakan selanjutnya nanti saya rasa

eee di Jawa Tengah dan DIY terkait dengan isu kelistrikan sangat aman gitu ya Jadi potensi untuk dibangun sampai di Kutoarjo Saya rasa dilihat dari segi kelistrikan aman terlihat bahwa DIY Jawa Tengah dan DIY ini surplus energi listriknya 750 MW nah jaringannya pun juga sudah sangat-sangat baik terkait dengan kelistrikan.

Pak Budi
Gambaran Umum Wilayah Menyampaikan Kereta KRL melintasi Lintas Provinsi dari Yogyakarta ke Solo Melawati 13 stasiun, St Palur, St. Jebres, St. Solo Balapan, St. Purwosari, St. Gowok, St. Delanggu, Ceper, Klaten, Srowot, Brambanan, Maguwo, Lembpuyangan, St Yogya Dan jadwal Perjalanan 12 Perjalanan kearah Yogya dan 12 perjalanan kearah Solo.
Aktivitas penumpang Karena penumpangnya diawal KRD diterjunkan hanya 1 transet sangat banyak 4 gerbong menjadi 8 gerbong karena digabung 2 transite digabung.
Kecepatan KRD kecepatan 90 menit KRL 75 menit menjadi hal yang menjadi pemicu hal KLR moda transportasi yang peralihannya sangat cepat dari transp. darat ke kereta.

Pak FEDRIK (Kabag Perencanaan Sesdit. Perkeretaapian
Laporan Pendahuluan sudah lebih, studi ini punya 2 tujuan besar
Selain Evaluasi Manfaat dari exixting tolong konsultan didalami ke manfaatannya.
Juga perlu diingat dampak perekonomian ke masyarakat itu apa?
Apakan operasi KRL dampak ekonomi ada peningkatan
Apakah ada bangkitan2 perekonomian, apakah ada kenaikan ekonomi dari pengoperasian ekonomi dari daerah2 yg dilewati KRL tsb
Selain itu ada perpanjangan jalur KRL sampai ke Kutoarjo

Masukan-masukan dari Instansi terkait

1. Dinas Perhubungan Kab. Sukoharjo. Ka. Dinas Sukoharjo

Kami perwakililan dari Dinas Perhubungan Kab. Sukoharjo dalam hal ini dari kabupaten sukoharja sangat mendukung kegiatanan ini dengan kata lain semoga dengan langkah-langkah kajian ini dapat meningkatkan pertumbuhan perekonomian untuk wilayah Kabupaten Sukoharjo pada khususnya, dan pada umumnya untuk masalah masyarakat Solo Raya, kemudian yang perlu disampaikan terkait dengan Pembangunan Jalur KRL di wilayah Kab. Sukoharjo sebenarnya ada 2 (dua) jalur yang dilewati KRL yaitu :
Pertama adalah Jalur KRL Solo-Palur yang kedua Jalur KRL Purwosari-Jogja, itu melewati di wilayah Kab. Sukoharjo, untuk yang yang termasuk dikelola oleh Kabupaten Sukoharjo adalah Jalur KRL Lintas Solo-Palur kita menempatkan personil di pos penjagaan kereta api untuk menjaga di perlintasan KA,
Kedua adalah jalur KRL Purwosari-Jogjakarta yang jalurnya melintasi Kab. Sukoharjo yaitu Stasiun Gawok, dimana sebelum dari Pemda Kab. Sukoharjo memerlukan adanya

pelebaran jalan yang melintasi di perlintasan Mayang yang terus menerus mengalami kemacetan, Alhamdulillah oleh Kementrian sudah direkomendasikan untuk pelebaran jalan sehingga untuk mengurangi kemacetan sudah dapat dikendalikan.
Kemudian yang perlu disampaikan terkait dengan Operasional KRL berhubung di Dishub Kabupaten Sukoharjo dalam penjagaan perlintasan di wilayah Palur terkait dengan masalah sarana dan prasaran yang sering terjadi kerusakan, kami dari Dishub Kab. Sukoharjo mohon solusi dan petunjuk terkait dengan tugas yang ada di perlintasan Jalur KRL di Palur.
Padahal hal tersebut merupakan kerawanan yang membahayakan sebagai pengguna jalan, yang mana selama ini diperlintasan tersebut sering ada sarana prasarana yang sering terjadi kerusakan contoh palang putus, palang tidak bisa dioperasionalkan, berhubung terkait dengan asset dan asset tsb bukan milik APBD Kab. Sukoharjo, sehingga kesulitan untuk terkait biaya untuk perbaikan, kemarin juga mendatangkan dari Satpel Yogya ternyata tidak bisa disamping itu juga tidak punya petugas yg bisa memperbaiki. Kami mohon petunjuk solusinya untuk perbaikan kendala tersebut karena dijalur tersebut sangat rame.

2. **Pak Andi Hakim Nasution** (Manajer Areas KCI Wilayah 6 Yogyakarta)
Menyampaikan materi untuk pemaparan Pengoperasian KRL Yogya-Solo yang sekarang yang sudah berjalan selama kurang lebih 3 tahun sampai saat ini Alhamdulillah Perkembangan positif sekali mendapat dukungan yang maksimal dari Kementerian Perhubungan terutama dari daerah Jenderal Perkeretaapian dan berikut kami sampaikan beberapa data yang mungkin bisa menjadi perhatian kita bersama ini kalau yang tadi sudah disampaikan dari bapak-bapak dimana kami tidak mengulangi lagi apa, jadi untuk saat ini mungkin potretnya saja KCI Yogyakarta mengoperasikan 5 (lima) treenshit rangkaian yang terdiri dari tiga rangkaian sampai ke Palur kemudian 2 dua rangkaian ini masih menggunakan KRD dari Yogyakarta ke Purworejo, untuk jumlah perjalanan benar sekali ada 12 perjalanan atau keberangkatan masing-masing dari Solo dan dari Palur sehingga kalau di total setiap harinya ada 24 perjalanan, tadi yang ditunjukkan itu masih ada kereta-kereta yang di jalan waktu weekend dan longweekend, Alhamdulillah mulai satu mulai 2024 ini sudah dapat dukungan dari tim Dir. Lalin DJKA sehingga setiap hari bisa menjalankan 24 perjalanan, jadi tidak ada lagi perbedaan jadwal antara weekend atao weekday, dan untuk Kereta Pramexnya dapat menjalankan 8 perjalanan setiap hari dan pada waktu lebaran kemarin juga diberi kesempatan untuk menambah sampai ke-12 perjalanan. kemudian untuk tariknya Rp. 8.000 dan ini bisa diteruskan kalau di stasiun Jogjakarta turun KRL lanjut ke Prameks ke Kutoarjo bisa langsung tinggal ganti kereta tarifnya total menjadi Rp. 16.000.
Jumlah, Stasiun yg dilayani ada 17 stasiun dan juga disampaikan waktu tempuhnya, kemudian ini beberapa mindstone jadi memang Kami hadir di DAOP 6 Yogyakarta ini juga

ada bapak-bapak Manager dan pimpinan Yogyakarta DAOP 5 Purwokerto beserta jajaran juga Selamat siang Bapak jadi kita mulai di Oktober 2020 KCI hadir di wilayah DAOP 6 Yogyakarta waktu itu masih mengoperasikan Pramek saja Pak, kemudian Maret 2021 baru diresmikan KRL Jogja Solo oleh Presiden Jokowi dan kemudian masuk selanjutnya dapat dilihat pada materi ini jadi Sudah cukup berkembang sampai saat ini dan bahkan kita juga Mulai integrasi secara pembayaran dengan trans-Jogja dan trans-Jateng.

Untuk volume pengguna per tahun, memang setiap tahun selalu tumbuh bisa diangkat belasan persen jadi cukup tinggi pertumbuhannya setiap tahun, kemarin tahun 2023 kami melayani kurang lebih 6 juta pelanggan untuk KRL Yogyakarta Solo Palur dan untuk komputer pramek melayanai 882 ribu pelanggan. Dengan rekor tertinggi pada tgl 13 April 2024 waktu lebaran rekor volumen Yogya-Solo-Palur 41.486 penguna dalam satu hari dan Pramek 6,113 pengguna dalam satu hari.
Untuk stasiun-stasiun yang paling laris pelanggan adalah :
St. Tugu Yogyakarta menjadi magnet bagi KRL, Pramex 172 ribu
St. Solo Balapan 86 ribu
St. Lempuyangan 85 ribu
St. Palur 62 ribu
St. Purwosari 59 ribu
St. Kutoarjo 36 ribu

Kemudian Integrasi fisik Stasiun-stasiun di Yogyakarta – Solo dengan moda lain yaitu :

- St. Yogyakarta : KA Jarak Jauh, Bus Trans Jogya, KA Bandara YAI
- St. Lempuyangan : KA Jarak Jauh, Bus Trans Yogya
- St. Wates : KA Bandara YIA
- St. Solo Jebres : KA Jarak Jauh dan Bus
- St. Solo Balapan : KA Jarak Jauh, KA BIAS dan Bus Batik Solo Trans
- St. Purwosari : KA Jarak Jauh, KA BIAS dan Bus Batik Solo Trans
- St. Klaten : KA Jarak Jauh dan KA BIAS

Kemudian Integrasi pembayaran dengan Kartu Multi Trip (KMT) yang dikeluarkan KCI bisa digunakan di Tran Jateng, Trans Jatim, Trans Yogya, jadi terkoneksi jadi beli kartu di Jakarta juga bisa digunakan di Jogya. Dan dari KCI sendiri belum pernah melakukan studi sendiri terutama dampak dari kehadiran KRL terhadap pertumbuhan ekonomi wilayah sekitar, dan dampak lain seperti issu-issu Lingkungan. Demikian yg mengenai perkembangan KRL Yogya Solo.

Pak FEDRIK

Terimas kasih atas paparan dan data-data yang disampaikan oleh Pak Andi Hakim : Manager Area KCI Wilayah 6 Yogyakarta, sehingga data-data perkembangan KRL tersebut oleh konsultan bisa dijadikan data sekunder masukan untuk dikaji lebih lanjut

3. Pak Agung (Ka. DAOP 5 Purwokerto)

Selanjutnya disampaikan studi kemanfaatan dari KRL exsisting kemudian tadi juga potensi untuk pengembangan perpanjangan sampai dengan Kutoarjo mungkin kami akan menyampaikan beberapa usulan jika nanti akan dilanjutkan perpanjangan relasi elektrifikasi KRL sampai ke Kotoarjo agar lebih optimal di dalam nantinya manfaat yang didapatkan oleh masyarakat maupun stakeholder yang lain, Ijin kami akan menyampaikan beberapa usulan

Pertama terkait kajian pengembangan perpanjangan ke Kotoarjo mohon dimasukan terkait issu perlintasan sebidang sekaligus dimitigasi sekaligus, kalau perlintasan sebidang semakin sibuk belum dimitigasi awal, dengan semangat UU Perkeretaapian Perlintasan sebidang bisa dikurangi /dihilangkan dimungkinkan dihilangkan dari Yogya – Kutoarjo. Karena beberapa titik akan berpotensi terjadi Krodit area.

Kedua Issu Keselamatan, dimasukan beberapa titik atau menyeluruh untuk di serilisasi jalur KA.

Ketiga kalau nanti KRL tersebut sampai Kotoarjo agar bisa memberikan kemanfaatan bagi masyarakat mungkin perlu pengembangan terminal penumpang KA yg di St Kotoajo ke arah barat yang jaraknya 1.0 Km dari terminal yg sdh dikembangkan oleh Pemda Koutoajo sehingga integrasi ataramoda lebih lancer. perkembangannya lebih cepat

Keempat Pengembangan Jalur Stabling kotaarjo, karena KA intercity banyak di Kutoarjo sehingga pengembangan untuk stabling sarana akan menimbulkan resiko.

Kemudian berikutnya sebagai gambaran perkembangan antarmoda dimana masyarakat sudah mulai secara mandiri untuk di Kotoarjo sudah melirik bahwa masyarakat Kotoarjo untuk pengembangan perpergian ke Magelang khususnya ke Borobudur dimana dari Kutoarjo mengunakan Trans-Jateng dengan waktu tempuhnya 1 jam dari Stasiun Kutoarjo ke Candi Borobudur, harapan akan berkolaborasi dengan Pemda Purworejo untuk kedepanya potensi KRL sampai ke Kutoarjo kami sangat mendukung bisa mendorong perkembangan Stasiun Kutoaro di Kab. Purworejo.

Pak FEDRIK

Terima kasih Pak Ka. DAOP 5 Purwokerto, atas masukan-masukannya untuk tim Konsultan bisa mengkaji lebih lanjut, terutama terkait jika melanjutkan Operasional KRL ini sampai ke Kotoarjo, integrasi jalur dan perpanjangan jalur KRL ke Kutoarjo, soal stabling, terkait terminal serta Integrasi antar moda.

4. DAOP 6 Yogyakarta

Pada prinsipnya DAOP 6 Pertama antusias menyamput kegiatan elektrifikasi KRL Yogya-Solo-Palur

Kedua dari sisi kedua dari sisi atas juga lancar Pak Kemudian untuk saat ini juga

KCI terus dan selalu membenarkan untuk meningkatkan pelayanan pelayanan terhadap penumpang KRL. Intinya pada saat akan dilakukan surve

5. **Pak Ismain Hasim Wibisono** (Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah I Semarang Jawa Tengah)

Menyampaikan bahwa Perkembangan KRl lintas Yogya Solo Palur ini sangat pesat terutama dari segi demand sangat meningkat, pada weekday banyak digunakan sebagai moda transportasi untuk bekerja dan untuk weekend banyak digunakan orang untuk berwisata orang dari Yogya ke Solo atau sebaliknya.

Sebagai tambahan informasi untuk rencana perpanjangan dari Yogya ke Kutoarjo sebagai informasi di tahun 2019, kalau tidak salah di Satker Prasarana sdh ada DED tentang Elektrifikasi Yogya - Kutoarjo termasuk ke Bandara YAI.

6. Pak Soni (Dit. Lalu Lintas Perkeretaapian)

Memberikan informasi atao masukan bahwa KRL untuk weekend itu sangat penuh

Apakah demand penumpang Kutoarjo sudah terbentuk untuk saat ini Pramex kalau diperpanjang elektrifikasi KRL, sangat setuju sehingga memperbanya frekwesi sehinggan highway dipersempit.

Apakah demand cuma sampai berhenti sampai Kutoarjo dan apakah tidak ada demand sampai ke Kebumen juga ditarik kearah barat, apabila ada demand akan rencana dari Dit Lalu Lintas akan transportasi perkotaan meindahkan pramex dari kebumen ke Kotoarjo.

Ke dua tentang efektivitas disisi jadwal masih menjalankan 24 KA apabila dimomen-momen tertentu harus week end long week meminta menjalankan 30 KA. Namun pertanyaanya pemerataan Okupansi ini belum maksimal, mungkin slot-slot mengenai jadwal di wilayah 6 terlalu padat sehingga menjadi tantangan sendiri bagi teman2 KCI

Terkait Pelayanan, tim konsultan pelayanan apasaja yang bisa ditingkatnya dari KRL Yogyakarta agar terlihat semakin efektiv dan masyarakat bisa perpenuhi pelayanan.

Mohon Konsultan apakah penumpang tarif pelayanan seperti apa? Apa Flat OD atau OD.

Pak FEDRIK

Mempertegas untuk pelayanan ke barat, mungkin ada kemungkinan soal demand ada kemungkinan sampai ke Kebumen.

7. **Pak Nunung** (Dinas Perhubungan Prov. DIY)

Dari Dinas Perhubungan DIY sangat mendukung adanya studi ini, sehingga berharap mungkin adanya data peningkatan jumlah penumpang akibat elektrifikasi ini yang beralih turun di Stasiun Tugu beralih ke Bandara YIA, kami ada harapan bahwa kereta api Bandara dari YIA itu tidak hanya sampai ke Tugu tapi sampai ke Bandara Adisucipto karena kami dari Pemda DIY mempunyai tempat parkir di Bandara Adi Sucipto bisa kami gunakan sebagai apa ya sekarang multi pulldasmen.. sudah digunakan hanya Memang karena beralihnya penerbangan Adi Sucipto ke YIA menjadi turun tetapi kami dari Pemda DIY berkeinginan membuat simpul transportasi yang besar arah Timur, makanya kemarin Pak Gubernur pernah berkirim surat ke pak menteri untuk istilahnya meneruskan kereta api Bandara dari YIA tidak hanya sampai Stasiun Tugu tetapi sampai ke Stasiun Bandaraan Adi Sucipto, jadi nanti kalau bisa ada data dari survei ini yg mendukung Apakah memang ada dimand yang dari daerah yang Timur tidak perlu turun Tugu tapi cukup turun di stasiun Adi Sucipto agar bisa mengurangi beban di Stasiun Tugu.

Pak Fedrik

nanti kami akan mengkaji juga melihat terus sekaligus juga melihat studi-studi terdahulu yang sudah pernah kalian lakukan termasuk ke studi dari teman-teman Reilink sendiri sebenarnya sudah pernah juga melakukan kajian berharap operasinya Kereta Bandara nanti konsultan bisa memadukan hasil dilapangan juga bisa memadukan hasil survei terdahulu dengan survei kemungkinan untuk melanjutkan pengoperasiannya kearah Stasiun bandara termasuk yang di stasiun Legowo yang dari Dishub Yogyakarta sudah banyak investasi juga di sana, terima kasih

8. **Pak Fransiscus** (Dinas Perhubungan Prov. Jawa Tengah)

Untuk konsultan mohon ditambahkan dalam bahan paparan bahwa :
Pertama menambahkan Dinas Perhub Provinsi Jawa Tengah sudah menyusun RTRW dari th 2024 – 2044 dan prosesnya sendiri RTRW baru tingkat pembahsan lintas sektoral Kementrian ATR.
Kedua rencana perpanjangan KRL ke Kutoarjo, dan sudah disinggung dari DAOP 5, untuk integrasi dengan moda lain sudah ada yaitu trans Jateng ke Candi Borobudur.

9. **Pak Dahlan** (Biro Perencanaan Kementrian Perhubungan)

Biro Perencanaan mengapresiasi kegiatan jalur elektrifikasi KA Yogya-Solo-Palur, mudah mudahan berakhir pada bulan november dan mudah-mudahan konsultan bisa melaksakanan sesuai dengan waktu yang ditetapkan dan sesuai arahan.
Masukan agar dalam kegiatan tersebut konsultan diakhir kegiatan menyiapkan atau membuat laporan Eksekutif Summary akan dibaca oleh pimpinan.
Pemanfaatan suatu proses perencanaan telah melalui tahapan FS, DED, SID, Amdal dan Kemanfaatan dari amanah PM 112 th 2017, tentang proses perencanaan dilingkungan Kemenhub.
Dalam hal pelaksanaan surve, menegaskan kembali :

- Untuk Jalur Yogya Solo Palur Berapa Km sepur jaraknya?
- Ada berapa Gerbong KRD, KRL yang existing yang beroperasi, apakah perlu penambahan gerbong itu sendiri?
- Mengenai Tarifnya apakah tetap mengunakan OD ada perubahan ?
- Apakah ada studi kemanfaatan apa manfaat langsung tidak langsung studi
- Analisis kemanfaatan mengunakan metoda apa, diharappkan SWOT kekuatan dan kelemahan dari bangkitan pada kereta api itu sendiri?
- Dan kemudian manfaat langsung atau tidak langsung yang akan diperoleh.

Pak Fedrik
Nanti akan mengakaji lebih dalam soal kinerja dengan beroperasinya yg sdh hampi KRL 60 Km jalur denganmengkaji jumlah kereta yang beroperasi dan juga jika ada penambahan, soalnya KCI di Yogya weekend lebih tinggi dari weekday.

10. Pak Sisruddin (Biro Perencanaan Kemenhub)
Mengkomentari dari sisi laporan

- Pertama dari sisi regulasi disitu tercantum regulasi tentang cetak biru Sisloknas pada Perpres 26 tahun 2021 kurang tepat seharusnya Perpres 26 tahun 2012.
- Slide 11 latar belakang tentang manajemen resiko yg dikaji dalam konsultan, diantara resiko mengenai elektrifikasi keselamatan yaitu ada resiko ketidak kesesuaian sistem penghubung antara sistem persinyalan elektrik dan mekanik di jalur perkeretaapian mungkin menjadi salah satu resiko yang akan digali, karena ada resiko kami minta masukannya agar regulasi mengenai manajemen resiko juga dituangkan didasar regulasinya yaitu ada KM 69 no 2023 tentang manajemen resiko di kemenhub mohon dilengkapi jika memang ada menajemen resiko dlm penyusunan laporan ke depan.
- Slide 10 ada beberapa data yang menyatakan angkutan KA mendominasi trans darat mendominasi dengan angka, tetapi belum ada sumber datanya belum dicantumkan, mungkin bisa dilengkapi oleh tim konsultan.

- Mengenai substansinya mengenai kemanfaatan yg dirasakan oleh masyarakat, mungkin dimanfaat langsungnya mengenai perpindahan antar moda yang terjadi setelah elektrifikasi ini dilaksanakan, perpindahan moda Kereta api ke moda lain kiranya bisa diukur
- Perpanjangan KRL ke Kutoarjo ini sudah tertampung dalam Ripnas nanti diakhir laporan mohon rekomendasi perpanjangan sampai di Kutoarjo bisa disampaikan agar rekomendasi ditungkan dalan Dokumen perencanaan di DJKA sendiri yaitu Renstra 2025-2029 supaya menjadi dasar perencanaan 5 tahun kedepan.

Demikian bapak ibu sekalian terima kasih atas masukan dari pembahasan Laporan Pendahuluan kegiatan Studi Evaluasi Kemanfaatan Pembangunan dan Pengoperasian Elektrifikasi Jalur KA Yogya - Solo – Palur.

Konsultan akan mengakomudasi semua masukan dari bapak dan ibu sekalian.

Jakarta, 17 Mei 2024

Pejabat Penandatangan Kontrak
Kantor Pusat Direktorat Jenderal
Perkeretaapian

VIKI OKISSA SAIFUDIN
Pejabat Pembuat Komitmen

NOTULENSI STUDI PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN PERHUBUNGAN BIDANG PERKERETAAPIAN TAHUN 2025-2029

Hari, Tanggal	:	Jumat, 19 Mei 2023
Waktu	:	Pukul 14.00 s.d selesai
Tempat	:	Hotel Milenium, Ruang Melati 02
Pemimpin Rapat	:	Kepala Bagian Perencanaan
Peserta	:	Daftar Hadir Terlampir (**Lampiran 1**)
Agenda	:	Laporan Pendahuluan

INSTANSI	SARAN DAN MASUKAN	TANGGAPAN KONSULTAN

Pimpinan Rapat	• Saya setuju dengan pemahaman konsultan dengan membedakan konsep TQI antara KCI dengan yang akan diimplementasikan oleh DJKA
	• Saya berharap penyusunan renstra ini memiliki target yang lebih realistis melalui pertimbangan readiness criteria,
	• Untuk istilah sepur harap disesuaikan dengan standard istilah baku yang terbaru.
	• Renstra DJKA merujuk ke Ripnas dimana Ripnas ini berlaku hingga 2030. Hasil analisis evaluasi RIPnas terdapat GAP yang besar, misalnya target moda share 11% untuk angkutan barang, tapi realisasinya baru tercapai 1% dan waktu yang tersisa tinggal 5 tahun. Diharapkan angka terget dalam evaluasi Ripnas dan renstra lebih realistis.
	• Antisipasi renstra 2020-2024 – angkutan umum perkotaan ada 6 kota. Hasil evaluasi kita sudah tercapai, tapi memang ada 1-2 kota progress sampai saat ini baru sebatas studi. Contoh: angkutan umum massal perkotaan di Makassar baru sebatas studi.
	• Saya berharap kegiatan backlog menjadi salah satu pertimbangan dalam penyusunan program dan anggaran.
	• Evaluasi sebelumnya: Regulasi, SDM, kelembagaan – mendapatkan banyak masukan berupa long-list, diantara:
	  ○ Saya berharap konsultan melakukan seleksi regulasi yang urgent dan bisa dilakukan dalam tahun anggaran 5 tahun kedepan.
	  ○ Kelembagaan - disesuaikan dengan isu dan lingkungan strategis
	  ○ Penambahan SDM sesuai dengan kebutuhan
	• Kami akan mengakomodir perkembangan kereta cepat hingga ke Surabaya.
	• Dilihat dari studi renstra sebelumnya, kami secara spesifik belum menyinggung secara khusus terkait TOD. Hanya menyinggung jaringan kereta api.
	• Dilihat dari hasil studi sebelumnya, untuk pembangunan kereta api trans sulawesi akan dilakukan sesuai dengan rekomendasi prioritas yakni manado-bitung dan dilanjutkan ke trase lainnya.
	• Saya berharap untuk rekomendasi rekativasi, elektrifikasi dan LRT jalur kereta api dari Balai telah melalui kajian secara mendalam dan koordinasi dengan PJ.
	• Saya berharap bahasa teknis yang disampaikan dalam renstra disesuaikan dengan standar bahasa teknis baku yang baru.
		• Tanggapan, saran, dan update data yang disampaikan oleh bapak ibu telah kami catat dan menjadi pertimbangkan dalam penyusunan renstra DJKA.

Mbak Luki (Bappenas)	• Saya apresiasi paparan konsultan telah menyampaikan rancangan RPJMN yang terkait dengan bidang perkeretaapian.	

INSTANSI	SARAN DAN MASUKAN	TANGGAPAN KONSULTAN
	•Kami akan menyampaikan transformasi pemetaan permasalahan dari nawacita menjadi asta cita dimana utk bidang perkeretaapian sbb: (1) Asta cita 2 untuk mendukung infrastruktur ekonomi hijau, (2) Asta cita 3 infrastruktur, (3) Asta cita 6 layanan keperintisan dan infrastruktur perkotaan, (4) Asta cita 8 pemenuhan keselamatan dan keamanan. •Saya berharap dalam renstra ini disampaikan pentahapan prioritas pada setiap tahunnya mulai dari dokumen perencanaan hingga konstruksi -> ringbook.	
Pak Ivan (Biro perencanaan)	•Secara substansi dan muatan penyusunan renstra DJKA sudah berkiblat dengan renstra kemenhub dan selaras dengan studi background renstra DJKA •Teknokratik RPJMN menyampaikan OTP. OTP merupakan tanggung jawab pemerintah, namun disisi lain kita menjadi pengawas operator untuk mencapai OTP. Dalam Kemenhub kami masih mencantumkan OTP sebagai kinerja pelayanan. OTP ini masih akan mengikuti perkembangan studi RPJMN. •Terkait pengendalian inflasi, memang ada proyek prioritas dan menjadi bagian dari tanggung jawab kemenhub -> keselarasan PPIP, proyek PSO, pengendalian harga transportasi, dsb. •Untuk keselamatan, Bappenas mengingatkan permasalahan perlintasan sebidang. Rekomendasi kegiatan perlintasan sebidang: penjagaan, pemasangan rambu, penutupan, dsb. •Dalam menyusun Kerangka pendanaan, diharapkan menyusun anggaran berdasarkan prioritas dengan pendekatan readiness cirteria dan rekomendasi dari studi renstrar kemenhub. •Kereta api logistik. Kami sepakat pemilihan beberapa pelabuhan yang kedepan akan dikoneksikan dengan jalur kereta api. Saya berharap ada readiness kriteria dalam pemilihan pelabuhan tersebut. •Penerapan ekonomi hijau - Program strategis terkait tenaga kerja hijau. Saat ini kemenhub dan bpsdm sedang meninjau kompetensi SDM di level kemehub dsb dan hubungannya dengan tenaga kerja hijau.	
Pak Farhan - BPTJ	•Paparan konsultan selaras dengan program dan arahan pak presiden yakni mempertimbangkan integrasi angkutan perkotaan dengan perkeretaapian. •Saya berharap konsultan mempertimbangkan Kebutuhan integerasi angkutan umum perkotaan antar dan intra moda dalam penyusunan renstra •mohon dipertimbangkan: (1) program dan arahan pak presiden yakni Extention LRT Jabodebek dan (2) kegiatan bidang perkeretaapian dalam RITJ	
KCIC	•Kami sedang menyusun studi pra kelayakan dari Bandung-Surabaya (gabungan konsultan tiongkok-indonesia) dengan rute melewati alternatif: (1) alternatif selatan kroya-jogja-solo-surabaya, (2) alternatif utara dan (3) kombinasi utara dan selatan lewat purwokerto. •12-14 Juni, kemenko akan berkunjung ke tiongkok untuk membicarakan perkembangan perpanjangan kereta cepat hingga ke surabaya.	
Bapak Wahid – MRT	•Pemotongan subsidi penumpang kereta api, apakah terkait dengan pemotongan account base atau perubahan metode pembayaran? •Apakah ada perkembangan TOD yang akan terhubung kereta api atau rekomendasi simpul TOD baru. •Kami sudah menyusun RJPP hingga tahun 2030	
Perwakilan LRT	•kami sedang menyusun RJPP yang annti akan inline dengan renstra DJKA. •LRT Dukuh Atas-Velodrome direncanakan akan beroperasi tahun 2026.	
Bapak Bovananto - Celebes (CRI)	•Kami berharap dalam penyusunan renstra ini mempertimbangan keterhubungan kereta api makassar-pare-pare ke sisi utara, sisi selatan (new	

INSTANSI	SARAN DAN MASUKAN	TANGGAPAN KONSULTAN
	port), dan ke bandara hassanudin, mandai. Mungkin dengan adanya keterpaduan jaringan ka tsb menaikkan demand penumpang dan barang. •Konteks mamisata – inline dengan pembahasan kami. Kami berharap central stasiun ini terhubung dengan angkutan feeder (kereta api ringan) ke mamisata. Berdasarkan dari hasil VCR eksisting, sudah layak untuk dibangun angkutan kereta api perkotaan mamisata. •Menuntaskan keterpaduan angkutan barang dengan kereta api pada jaringan ka eksisting.	
BTP Jakarta	•Renstra balai saat ini sedang disusun KAK dan ruang lingkup. Utk menyusun hal tersebut kami akan menunggu setelah laporan antara dan setelah survey ke BTP Jakarta. •Ketinggalan: Wilayah Banten, program reaktivasi labuhan dsk, cikarang dsk karena terkendala pendanaan pembebasan lahan. Jadi kami akan banyak melakukan review studi tersebut. •Peningkatan operasi, jakarta menjadi benchmarking dari BTP didaerah lainnya.	
BTP Bandung	•Kami akan support data dan memberikan masukan saat survey ke Jawa Barat. •Kendala dari kami Banyak lintas yang belum direaktivasi dan backlog kegiatan	
BTP Semarang	•Laporan pendahuluan renstra DJKA. Hal. 21. Kerangka pendanaan. 153 T sebagian besar utk pemenuhan konektivitas pelayanan, mohon diteliti kembali Sumber dana dalam kerangka pendanaan tsb. •Saya berharap konsultan mempertimbangkan optimalisasi kerangka pendanaan. •TQI, apakah TQI yang diformulasikan masih relevan? Saya berharap konsultan melakukan benchmarking untuk melakukan perhitungan TQI, karena ada indikator tambahan dalam studi terbaru. Karena TQI ini sangat teknis dan memperngaruhi tingkat keselamatan operasional kereta api. •Fasop handal, karena signal elektrik belum tentu handal karena usia pembuatan peralatan.	
BTP Surabaya	•Kami sama dengan balai lain. 5 tahun ini, kami memiliki backlog.	
BTP Medan	•Indikator target panjang jalur terbangun inline dengan target panjang jalur terlayani. KA Cut Mutia sampai saat ini masih angkutan perintis. •Keselamatan. Selain perlintasan sebidang. Masalah vandalisme pada jalur yang beroperasi dan jalur yang belum beroperasi.	
Ibu Siti – BTP Palembang	•Kami akan melanjutkan kegiatan backlog dan kami cenderung ke peningkatan SDM dan kelembagaan.	
Balai Uji	•Badan kami telah menjadi badan layanan umum sejak terbitnya SK. Tindak lanjut: sudah terbit ortaker th, 2023 dan sedang disusun peta jabatan dari SOTK yang baru. •Untuk skema pendanaan, apakah bisa dimasukan skema pendanaan BLU. Kami masih menggunakan strategi bisnis yang kami susun dengan kemenkeu. •Utk workshop berbasis teknologi, saya berharap dimasukkan dalam isu strategis. •Balai pengujian hanya ada di bekasi dengan jangkauan pelayanan se-indonesia. Potensi permasalahan: o Apakah kita perlu membeli mobil khusus pengujian agar fasilitas pengujian bisa mobile ke daerah. o Kebutuhan kantor cabang masih dalam diskusi internal kami.	
Balai perawatan	•Belum ada strategi khusus pengembangan kelembagaan pada balai pengujian, balai perawatan, dsb. Kedepan kami akan berkembang menjadi BLU seperti balai uji.	

INSTANSI	SARAN DAN MASUKAN	TANGGAPAN KONSULTAN
	•Kami sudah mulai menempatkan karyawan kami pada beberapa BTP untuk mengakomodir jangkauan pelayanan se-indonesia •SMN baru, uji kompetensi, sarana yang kami gunakan menjadi sumber PNPB dan kami memiliki target PNPB tahunan •Saya penyusunan renstra ini menguatkan kelembagaan dan pengembangan SDM pada balai.	
Ibu Retno – Ditlaka	•Renstra DJKA saat ini akan menjadi lebih rigit dari renstra sebelumnya dan berdampak pada kinerja dan project kedepannya. Misalnya IKN akan tersampaikan secara jelas nama kegiatan dan spesifik lokasinya. •Nomenklatur dan kegiatan strategis nasional dengan instansi/K/L yang biasanya akan muncul pada pertengahan periode tahun ini. misalnya lokasi pembangunan KSN di Merauke. •Pengembangan organisasi BLU. Saya berharap isu ini menjadi pertimbangan agar penyampaian dalam dokumen renstra tidak terlalu rigit dan mengikat BLU untuk berkembang.	
Bapak Saka – Ditlaka	•Angkutan orang yang disampaikan dalam bahan belum update. •Capaian penumpang hingga TW I mencapai 1 M untuk penumpang, 223juta ton (dari renstra 300jutaan). Moda share KA barang masih kecil karena belum ada kereta api dari wilayah produksi hingga jalur pelabuhan. •Kelembagaan, kedepannya kami memisahkan antara direktorat angkutan ka dan direktorat lalu lintas ka.	
Direktorat prasarana	•Kami masih membahas KAK dan RAB. •Saya berharap konsultan bisa menyampaikan indikator pemilihan program backlog yang menjadi prioritas pada tahun selanjutnya.	
Ibu Rini - Setditjen	•Sinkronisasi kegiatan SBSN th. 2025 dengan tahun sebelumnya. RM kami mendapatkan porsi sangat kecil. •saya berharap konsultan dapat mempertimbangkan sumber pendanaan yang terus menyusut dikarenakan kurangnya kelengkapan studi pendukung. • Readiness criteria. Kami sedang kekurangan dan menimbulkan banyak backlog – penyiapan lahan dan studi pendukung. •Data base readiness criteria untuk seluruh kegiatan ada ditlaka (Ibu Retno).	
Pak Dedi – Bagren	•Indikator yang disampaikan dalam renstra ada benchmarking dengan indikator sektor transportasi di negara maju. Untuk mengetahui dan tolak ukur keberhasilan di negara mereka. •Indikator RMK, agak sulit untuk menghitung nilai emisi karena dibutuhkan kajian khsus dan melibatkan K/L lain. •Pada periode sebelumnya, terdapat indikator rpjmn yang tidak turun ke renstra DJKA dan menjadi temuan BPK. •Terkait penganggaran. Input krisna, RKKL, RSPP. Saya berindikator yang disusun dalam renstra juga mempertimbangkan indikator dalam Krisna, RKKL, RSPP dan indikator lintas K/L, contoh indikator terkait konektivitas.	
Bapak Wiku – bagren	•Melakukan pendalaman dalam studi background studi renstra.	
Ibu Ayu – Bagren	•Lampiran dokumen renstra salah satunya matriks pembangunan koridor KA. Kami beharap konsultan memberikan gambaran dan klusterisasi secara umum. •Renstra kedepannya. Saya beharap mempertimbangkan isu gender. •RSPP. RSPP Akan diturunkan menjadi KRO dan RO. KRO dan RO sekarang bisa dievaluasi. Yang eksisting belum pernah ada evaluasi.	
Pak Fahri – Bagren	•Potensi permasalahan pelakasanaan renstra sebelumnya belum disampaikan dalam laporan.	

INSTANSI	SARAN DAN MASUKAN	TANGGAPAN KONSULTAN
	• Konsultan memberikan evaluasi capaian yang tidak tercapai pada periode sebelumnya. • Diharapkan masukan stakeholder dapat dijadikan point yang ditindaklanjuti dalam laporan selanjutnya.	

LAMPIRAN

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN 2

PERSENTASE PENCAPAIAN TARGET LEGISLASI (RANCANGAN DAN PERATURAN PERUNDANGAN) DI BIDANG PERKERETAAPIAN

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO.8
JAKARTA 10110

TELP: +62 813-6001- 3838

WEBSITE : djka.kemenhub.go.id
EMAIL : ditjenka@kemenhub.go.id

NOTA DINAS
Nomor 566/KI-3/VII/2024

Yth. : Sekretaris Direktorat Jenderal Perkeretaapian

Dari : Plh. Kepala Bagian Hukum

Hal : Tindak Lanjut Pemenuhan Data Dukung Pelaporan Kinerja Triwulan II Bagian Hukum

Tanggal : 19 Juli 2024

Menindaklanjuti surat dari Sekretaris Direktorat Jenderal Perkeretaapian Nomor : UM.207/7/4/K1/DJKA/2024 tanggal 16 Juli 2024 perihal Tindak Lanjut Rapat Evaluasi Implementasi SAKIP dan Pembahasan Pelaporan Kinerja Triwulan II Tahun 2024, disampaikan bahwa Bagian Hukum dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya mendukung capaian indikator kinerja pada Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian, yaitu presentase capaian Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan yang sedang dalam pembahasan ataupun yang akan dibahas, presentase kegiatan pendampingan hukum di lingkungan Ditjen Perkeretaapian dan capaian publikasi di lingkungan Ditjen Perkeretaapian.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, terlampir disampaikan data dukung capaian kinerja Triwulan II dari Bagian Hukum untuk mendukung indikator kinerja dimaksud.

Atas perkenan arahan dan petunjuk lanjut diucapkan terima kasih.

Irawati Sjurman, S.H., M.H.
NIP 196811271994032003

Tembusan :
Kepala Bagian Perencanan

Daftar Regulasi yang Perlu Dilakukan Evaluasi

No.	JUDUL REGULASI	PIC	Posisi	Urgensi	KETERANGAN
1.	Peraturan Menteri Perhubungan tentang Sistem Operasi Trem Otonom	Direktorat Sarana	Bagian Hukum	Mengakomodir pengoperasian Trem Otonom (ART) yang akan beroperasi di Indonesia	Plt. Direktur Sarana telah bersurat kepada Sekretaris Direktorat Jenderal Perkeretaapian dengan nomor Nota Dinas 0088/K4/VII/2024 perihal Penyampaian Draft RPM Penyelenggaraan Trem Otonom yang selanjutnya akan dilakukan pembahasan lanjutan.
2.	Revisi PM 11 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penetapan Trase	Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api	Bagian Hukum	Untuk mengakomodir perkembangan teknologi di bidang perkeretaapian	Telah dilakukan pembahasan pada tanggal 27 Juli 2024. Akan dimintakan persetujuan Menteri terkait proses lanjut rencana revisi PM
3.	Revisi Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 33 Tahun 2011 tentang Jenis, Kelas dan Kegiatan di Stasiun Kereta Api	Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api	Bagian Hukum	• Penentuan Kelas stasiun berkaitan dengan penyesuaian/penyusunan Standar Pelayanan Minimum di Stasiun. • Belum terdapat pengaturan mengenai perubahan nama stasiun	Akan direncanakan pembahasan
4.	Revisi PM 60 Tahun 2012 ttg Persyaratan Teknis Jalur Kereta Api	Direktorat Prasarana	Bagian Hukum	Untuk mengakomodir perkembangan teknologi di bidang perkeretaapian khususnya pada jalur kereta api	Akan direncanakan pembahasan
5.	Revisi PM 94 Tahun 2018 tentang Peningkatan Keselamatan Perlintasan	Direktorat Keselamatan	Direktorat Keselamatan	Perlu dievaluasi terkait penggunaan Rumija untuk pemasangan portal / pintu perlintasan di perlintasan sebidang	Telah dilakukan rapat pembahasan tanggal 21-22 Mei 2024.

	Sebidang Antara Jalur Kereta Api Dengan Jalan				Substansi Revisi Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 94 Tahun 2018 akan diformulasikan ulang oleh Direktorat Keselamatan sebelum dilakukan proses lanjut.
6.	Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Tata Cara Pelaksanaan Audit dan Inspeksi Keselamatan Perkeretaapian	Direktorat Keselamatan	Direktorat Keselamatan	Sebagai Pedoman bagi Inspektur dan Auditor Perkeretaapian	Sedang dilakukan kajian dan pembahasan internal di Direktorat Keselamatan Perkeretaapian
10.	Revisi PM 14 Tahun 2011 tentang Tata Cara dan Standar Pengujian Lokomotif	Direktorat Sarana Perkeretaapian	Bagian Hukum		Surat dan Draft Revisi PM masuk Bagian Hukum pada bulan Juni 2024 akan dilakukan rencana pembahasan lanjut.
11.	Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan Tentang Tata Cara, Standar Peralatan Dan SDM Petugas Penanganan Kecelakaan Kereta Api	Direktorat Keselamatan Perkeretaapian	Bagian Hukum	Petugas Penanganan Kecelakaan Kereta Api terdapat pada PP 6 Tahun 2017 namun belum terdapat peraturan turunan yang mengatur secara teknis.	Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan RI baru dan belum dibahas.
12.	Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan Tentang Tata Cara, Standar Peralatan dan SDM Petugas Pemeriksa dan Analisis Kecelakaan Kereta Api	Direktorat Keselamatan Perkeretaapian	Bagian Hukum	Petugas Penanganan Kecelakaan Kereta Api terdapat pada PP 6 Tahun 2017 namun belum terdapat peraturan turunan yang mengatur secara teknis.	Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan RI baru dan belum dibahas.
13.	Harmonisasi RPM Perhubungan RI tentang Sertifikasi Tenaga Pelaksana Pembangunan Prasarana Perkeretaapian.		Biro Hukum Kementerian Perhubungan RI		Pembahasan dilakukan pada 9 Juli 2024.

Daftar Regulasi yang perlu dilakukan evaluasi dan masih dikaji oleh Direktorat Teknis

No.	JUDUL REGULASI	PIC	Posisi	Urgensi	KETERANGAN
1	Revisi PM 36 Tahun 2011 tentang Perpotongan dan/atau Persinggungan antara Jalur Kereta Api dengan Bangunan Lain	Direktorat Prasarana	Direktorat Prasarana	Perlu dievaluasi terkait persyaratan teknis Perpotongan dan/atau Persinggungan antara Jalur Kereta Api dengan Bangunan Lain pada jalur Kereta Api dalam kota dan Jalur Ganda.	Sedang dilakukan kajian dan pembahasan internal di Direktorat Prasarana Perkeretaapian
2	Revisi PM 30 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengujian dan Pemberian Sertifikat Prasarana Perkeretaapian	Direktorat Prasarana	Direktorat Prasarana	Untuk mengakomodir perkembangan teknologi di bidang perkeretaapian karena tata cara untuk pengujian prasarana perkeretaapian dengan teknologi baru berbeda dengan konvensional.	Sedang dilakukan kajian dan pembahasan internal di Direktorat Prasarana Perkeretaapian.

Daftar Regulasi yang telah terbit

No.	JUDUL REGULASI	KETERANGAN
1	Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor 8 Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Direktorat Jenderal Perkeretaapian	Tanggal Penetapan: 11 Juni 2024 Tanggal Pengundangan: 28 Juni 2024
2	Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 14 Tahun 2024 Tentang Pedoman Perhitungan Biaya Penggunaan Prasarana Perkeretaapian	Tanggal Penetapan: 25 Juni 2024 Tanggal Pengundangan: 4 Juli 2024

RENCANA
PERJANJIAN DAN ADVOKASI HUKUM TAHUN 2024

1. Daftar Persidangan yang **Harus Segera Dilakukan Evaluasi di TW II**

No.	JUDUL DAFTAR SIDANG	PIC	Posisi	Urgensi	KETERANGAN
1	Perkara perdata No. 6/Pdt.G/2024/PN.Kis di Pengadilan Negeri Kisaran Kelas I.B	Btp medan, Biro Hukum dan Bagian Hukum	Bagian Hukum	Dokumentasi harus di upload melalui e-court	Para Pihak Tergugat dan Pengugat untuk menyampaikan dokumen asli (pada saat up-load melalui e-court) kepada panitera sebelum putusan sela pada tanggal 3 juli 2024 secara off line.
2	Perkara perdata No. 1145/Pdt.G/2023/PN.Sby	Biro Hukum dan Bagian Hukum	Bagian Hukum	Penyusunan Kesimpulan Ket: unggah kesimpulan pada laman ecourt sebelum tgl 17 Juli 2024, dan penyampaian berkas asli Kesimpulan kepada Panitera	agenda kesimpulan dan pada hari Rabu tgl 3 Juli 2024 dengan agenda pemeriksaan ahli dari Penggugat.
3	Perkara perdata No. 212/Pdt.G/2024/PN.Bks	Biro Hukum dan Bagian Hukum	Bagian Hukum	kelengkapan data Para Pihak, Surat Kuasa	agenda kelengkapan Para Pihak serta Kelengkapan legal standing dari Turut Tergugat.

4	Perkara perdata No. 238/Pdt.G/2024/PN.Jkt Sel	Biro Hukum dan Bagian Hukum	Bagian Hukum	penyampaian bukti permulaan Keterangan: Bukti Permulaan disampaikan ke majelis hakim terkait kewenangan kompetensi absolut	draf Duplik Perkara masukan dari biro Hukum.

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR PM 8 TAHUN 2024
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dengan adanya perubahan organisasi dan kebutuhan untuk penyesuaian tata kelola dalam pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Direktorat Jenderal Perkeretaapian, perlu mengganti Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 84 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Direktorat Jenderal Perkeretaapian sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 84 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Direktorat Jenderal Perkeretaapian;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Petunjuk Pelaksanaan Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Direktorat Jenderal Perkeretaapian;

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 39

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 84 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Direktorat Jenderal Perkeretaapian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 983) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 84 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Direktorat Jenderal Perkeretaapian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 19), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 40

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 Juni 2024

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BUDI KARYA SUMADI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 28 Juni 2024

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ASEP N. MULYANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2024 NOMOR 342

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,

F. Budi Prayitno

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR PM 14 TAHUN 2024
TENTANG
PEDOMAN PERHITUNGAN BIAYA PENGGUNAAN
PRASARANA PERKERETAAPIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 160 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api serta untuk menjamin keadilan bagi penyelenggara sarana perkeretaapian dan keselamatan masyarakat, perlu diatur pedoman perhitungan biaya penggunaan prasarana perkeretaapian;

b. bahwa dengan berlakunya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 20 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 138/PMK.02/2021 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Bersifat Volatil dan Kebutuhan Mendesak yang Berlaku pada Kementerian Perhubungan, Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 62 Tahun 2013 tentang Pedoman Perhitungan Biaya Penggunaan Prasarana Perkeretaapian sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 122 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 62 Tahun 2013 tentang Pedoman Perhitungan Biaya Penggunaan Prasarana Perkeretaapian perlu diganti;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Pedoman Perhitungan Biaya Penggunaan Prasarana Perkeretaapian;

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Pada saat Peraturan Menteri ini berlaku, Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 62 Tahun 2013 tentang Pedoman Perhitungan Biaya Penggunaan Prasarana Perkeretaapian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 855) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 122 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 62 Tahun 2013 tentang Pedoman Perhitungan Biaya Penggunaan Prasarana Perkeretaapian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1292), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 Juni 2024

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BUDI KARYA SUMADI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 4 Juli 2024

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ASEP N. MULYANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2024 NOMOR 358

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,

E. Budi Prayitno

LAMPIRAN

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN 3

PERSENTASE ASN DITJEN PERKERETAAPIAN YANG MEMILIKI SERTIFIKAT KOMPETENSI/KEAHLIAN

ASN DITJEN PERKERETAAPIAN YANG MEMILIKI SERTIFIKAT KOMPETENSI/KEAHLIAN

Per Juni 2024

No	Nama	NIP	STATUS	UNIT	KOMPETENSI TEKNIS														KOMPETENSI UMUM/MANAJERIAL								Sebutan Pangkalan/ OMS dan PPPK	Unit Kerja
					Auditor	Inspektur Sarana	Inspektur Prasarana	Penguji Jalbang	Penguji Persop	Penguji Prasarana	Penguji Sarana	Asesor	PPNS	Diklat Teknis Khusus Perkeretaapian	Diklat Kecakapan SDM (PPKA)	Adel KA	Diklat Teknologi LRT Cat 2	Diklat Kereta Cepat	Analisis	Kepegawaian	Penyelarasan Jabatan	Manajemen Risiko (QRMP/QRMA/QRM O)	Adel KPAU	Diklat Manajerial (Mana), Kriko, MLM, Database, PMT, dll)	PPNS Tipe C		
1	RONALD I. SIMBOLON	19790303 200502 1 002	PNS	DJKA	√		√		√	√		√										√ (QRMA)		√ (PKA)			BTP Kelas I Jakarta
2	ANTON APRIANTO	19738418 199803 1 002	PNS	DJKA	√		√	√																			Dit. Prasarana Perkeretaapian
3	HARI SUSANTO	19790920 200604 1 001	PNS	DJKA	√		√		√	√												√ (QRMA)					BTP Kelas I Semarang
4	MOHAMAD RISAL WASAL	19670608 199003 1 005	PNS	DJKA	√	√					√																Dit. LLAJA
5	MOH FATAWI	19670627 199903 1 002	PNS	DJKA	√		√	√																			Dit. Prasarana Perkeretaapian
6	ACHYAR PASARIBU	19730506 199703 1 001	PNS	DJKA	√		√		√	√																	Dit. Prasarana Perkeretaapian
7	FREDERIK PONGTIKURAN	19750225 200604 1 001	PNS	DJKA	√		√	√				√				√	√					√ (QRMA/M)					Dit. Keselamatan Perkeretaapian
8	ENDANG SETIAWAN, S.T.	197401201999031002	PNS	DJKA																				√ (PKA)			Kepala Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Padang
9	Ir. ANDI HERMANSYAH,ST., MM	198510082008121002	PNS	DJKA																				√ (PKA)			Direktorat Keselamatan Perkeretaapian
10	ZEN MADIANTO, SH., MH	197407042005013005	PNS	DJKA																				√ (PKA)			Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian
11	BUDI PITOYO, S.E.	196007082000121001	PNS	DJKA																				√ (PKA)			Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Semarang
12	PRAYUDI	19711208 199903 1 007	PNS	DJKA	√		√	√		√														√ (PSM Tk II)			Dit. Sarana Perkeretaapian
13	CHANDRAWAN ADHI PUTRANTO	197108I2 200502 1 001	PNS	DJKA	√	√					√	√					√					√ (QRMA) / √ (QRMP)		√ (PKA)			Dit. LLAJA
14	ADDIN ARISTOTIKA	19851103 2010121001	PNS	DJKA	√	√					√	√															Dit. Sarana Perkeretaapian
15	RIZKY HARIWAN(HADI	19850508 200912 1 009	PNS	DJKA	√	√					√	√												√ (Bahasa Inggris)			BTP Kelas I Medan
16	DEAN ANDRE YUNIE ARDI	19880823 201012 1 004	PNS	DJKA	√		√	√				√					√										Dit. Keselamatan Perkeretaapian
17	HERU PRASETIO	19710418 200312 1 001	PNS	DJKA	√		√	√														√ (QRMA)					Dit. Sarana Perkeretaapian
18	NOVA MANDOYO	1978I105 200312 1 002	PNS	DJKA	√	√					√																Dit. Sarana Perkeretaapian
19	HARYO KUMORO RAHMANDHEWO	19850220 201012 1 003	PNS	DJKA	√	√					√						√					√ (QRMA)					Dit. Keselamatan Perkeretaapian
20	ARYNA SEQUNDA	19830307 201012 2 002	PNS	DJKA	√	√					√	√															Balai Pengujian Perkeretaapian
21	ANDHIKA SETIAWAN	19850607 201012 1 002	PNS	DJKA	√	√					√	√															Balai Perawatan Perkeretaapian
22	ERNI BASRI	19790913 200112 2 001	PNS	DJKA	√		√	√																			Dit. Keselamatan Perkeretaapian
23	MAMAT HARYANTO	19810106 200912 1 004	PNS	DJKA	√	√					√	√					√										Dit. Sarana Perkeretaapian
24	MUTTAQIN	19691226 199703 1 002	PNS	DJKA	√	√					√	√															BTP Kelas I Semarang
25	RATIH ANGGA APRIANI	19850412 200612 2 001	PNS	DJKA	√		√		√	√																	Dit. Keselamatan Perkeretaapian
26	DONY CHRISNA SANJAYA	19880903 201012 1 003	PNS	DJKA	√	√					√	√															Dit. Sarana Perkeretaapian
27	S. TIATUR WIDIANTO	19651207 199303 1 002	PNS	DJKA	√	√					√	√															Dit. LLAJA
28	GUNADI RAHARJO	19811208 200604 1 002	PNS	DJKA	√		√		√	√		√					√					√ (QRMA)					Dit. Keselamatan Perkeretaapian
29	RANGSIM MANNINGA	19861021 201012 1 002	PNS	DJKA	√		√		√	√		√												√ (PMP)			Dit. Prasarana Perkeretaapian
30	YUYUT WIBOWO	19821120 2009121 006	PNS	DJKA	√	√					√	√															Dit. Sarana Perkeretaapian
31	YOHARY MARUNA PUTRA	19821227 200912 1 002	PNS	DJKA	√	√					√	√					√					√ (QRMA)					Balai Pengujian Perkeretaapian
32	AWANG KURNIAWAN	19830204 201012 1 002	PNS	DJKA	√		√		√	√							√					√ (QRMA)					Dit. LLAJA
33	IRWAN WIJAYA	19791124 201012 1 001	PNS	DJKA	√	√					√	√															Dit. Sarana Perkeretaapian
34	HENDRY NURYANUAR	19780103 200604 1 002	PNS	DJKA		√					√	√										√ (QRMA)					Dit. Sarana Perkeretaapian
35	F.S ARISMAN HARIBA	19700501 199603 1 002	PNS	DJKA		√			√	√	√													√ (Manaj Krisis)			Dit. Keselamatan Perkeretaapian
36	ARI SUPRIANTORO	19790915 200112 1 002	PNS	DJKA		√					√	√				√	√					√ (QRMA)					Dit. Sarana Perkeretaapian
37	CHOIRUDIN	19780909 200312 1 002	PNS	DJKA			√		√	√							√										Dit. Sarana Perkeretaapian
38	MOHAMAD ZULKARNAIN	19761111 200604 1 002	PNS	DJKA			√		√	√												√ (QRMP)					BTP Kelas I Surabaya
39	DANNY FALGUNADI	19771022 200312 1 001	PNS	DJKA	√		√	√														√ (QRMA)					BTP Kelas II Padang
40	M. FACHRUR RAMANSYAH	19801218 200612 1 002	PNS	DJKA			√	√																			Dit. Keselamatan Perkeretaapian
41	JUFER PANJAITAN	19750308 200404 1 001	PNS	DJKA			√	√																			Dit. Prasarana Perkeretaapian
42	DENI SETIADI	19841211 200604 1 001	PNS	DJKA			√		√	√		√															Dit. LLAJA
43	AKHMAD AFIF SETIAWAN	19840330 201012 1 001	PNS	DJKA			√	√																			Dit. Prasarana Perkeretaapian
44	FAHMI MAMSYAH	19871216 201012 1 004	PNS	DJKA			√	√																			Dit. Keselamatan Perkeretaapian
45	RUSDY ARSYAD	19730114 200604 1 002	PNS	DJKA				√																√ (Manaj Kinerja)			Dit. Keselamatan Perkeretaapian
46	MULYANTO	19650903 200604 1 001	PNS	DJKA				√																			BTP Kelas I Jakarta

No	Nama	NIP	STATUS	UNIT	KOMPETENSI TEKNIS														KOMPETENSI UMUM/MANAJERIAL							Jabatan Pengelompok CPNS dan PPPK	Unit Kerja
					Auditor	Inspektur Senara	Inspektur Prasarana	Penguji Jalbang	Penguji Fasop	Penguji Prasarana	Penguji Sarana	Asesor	PPNS	Diklat Teknis Khusus Perkeretaapian	Diklat Kecakapan SDM (PPKA)	AMDAL	Diklat Teknologi LRT Gol 3	Diklat Kerja Cepat	Arsiparis	Kepegawaian	Penyelarasan Jalbang	Manajemen Risiko (QRMP/QRMA/QRM O)	Ahli K3PKP	Diklat Manajerial (Kalemda,Kabit, DJJ, Bendahara, MR, dll)	PPR Tipe C		
47	INDAH WIDYA ASTUTI	19860126 200912 2 006	PNS	DKA				V														V (QRMA)			V		Dit. Prasarana Perkeretaapian
48	INANTA HERDIANA	19891213 200912 2 001	PNS	DKA				V														V (QRMA)			V		Dit. Prasarana Perkeretaapian
49	BERNADI ARMISETYO	19821112 200912 1 005	PNS	DKA			V	V								V						V (QRMA)					BTP Kelas I Bandung
50	AGUNG ARI PANGGESAS	19790707 200604 1 001	PNS	DKA				V																			Dit. Prasarana Perkeretaapian
51	PRATOMO GUNO SAPUTRO	19800529 200312 1 005	PNS	DKA			V	V														V (QRMA)		V (PKA)			Dit. Prasarana Perkeretaapian
52	GITA LAMBAH	19810821 200912 2 002	PNS	DKA			V	V				V												V (Analis Kompetensi)			Dit. Kelaikapian Perkeretaapian
53	ANUNG SADPUTRO	19770901 200712 1 001	PNS	DKA			V	V														V (QRMO)					BTP Kelas I Bandung
54	EKO RAHADI N.	19820410 200912 1 003	PNS	DKA				V														V (QRMA)			V		BTP Kelas I Surabaya
55	ILLIYA ILMA AZIZAH	19870408 200912 2 006	PNS	DKA			V	V					V									V (QRMO)					BTP Kelas II Palembang
56	DONNY SAYYIDA	19830426 201012 1 009	PNS	DKA			V	V																			Dit. Prasarana Perkeretaapian
57	ANTONIUS MAY HERMAN	19820517 201012 1 009	PNS	DKA				V				V	V														Balai Pengujian Perkeretaapian
58	RYCO PRADHANA C.	19880416 201012 1 001	PNS	DKA				V																			BPKA Sulawesi Selatan
59	WIDI ADITYA	19890213 201012 1 004	PNS	DKA				V				V										V (QRMO)					Balai Pengujian Perkeretaapian
60	M. ZAENUDDIN	19890331 201012 1 003	PNS	DKA				V																			Dit. Kelaikapian Perkeretaapian
61	FERIAL RAMDHAN	19860422 200812 1 002	PNS	DKA			V	V				V												V (Hospitality)			Dit. Keselamatan Perkeretaapian
62	SETYO GUNAWAN	19720122 199803 1 002	PNS	DKA		V		V			V	V												V (Public Speaking, PHMTT, K)			Dit. Sarana Perkeretaapian
63	AMANDA PRITASARI	19840919 200712 2 001	PNS	DKA			V	V			V						V					V (QRMA)					Balai Pengujian Perkeretaapian
64	ANNAS RIFAI	19880705 200604 1 001	PNS	DKA		V		V			V	V					V					V (QRMA)					Balai Pengujian Perkeretaapian
65	ABDUL KAMAL	19760308200912101	PNS	DKA				V														V (QRMA)					BTP Kelas I Medan
66	DEWI HESTIWULAYANTI	19781227200312001	PNS	DKA				V			V	V															Dit. Prasarana Perkeretaapian
67	CHANDRA ANDAR LANDOASI	19860706200912004	PNS	DKA				V		V			V														Sekditjen Perkeretaapian
68	MELISA GARNISIA	19880514200912001	PNS	DKA				V														V (QRMA)					Dit. Prasarana Perkeretaapian
69	EDI WIDIARTO	19860412200812001	PNS	DKA				V				V												V (PKP)			Dit. LLAKA
70	NUR MUHAMMAD S.R.	19870225201012 1004	PNS	DKA			V	V				V										V (QRMO)					Balai Pelayanan Perkeretaapian
71	DARMAINILLAS	19680507200604200 2	PNS	DKA				V														V (QRMO)			V		Balai Pengujian Perkeretaapian
72	MOCHAMMAD RAFLI KADAH	19860627201012 1006	PNS	DKA				V																	V		Balai Pengujian Perkeretaapian
73	ARIEF SUDYATMOKO	19790518 200604 1 004	PNS	DKA			V	V														V (QRMA)		V (DJJ)			Dit. Prasarana Perkeretaapian
74	BAMBANG G. KUNTO	19760121 200604 1 001	PNS	DKA			V	V														V (QRMA)					BTP Kelas I Jakarta
75	JIMMY MICHAEL GULTOM	19791031 200604 1 002	PNS	DKA			V	V									V					V (QRMA)		V (PKA)			Dit. Prasarana Perkeretaapian
76	YOFI OKATRISZA	19820530 200712 1 001	PNS	DKA			V	V																			BTP Kelas I Semarang
77	BERNARD HASIBUAN	19821226 200604 1 003	PNS	DKA				V														V (QRMA)					BTP Kelas I Semarang
78	DONNY SILANDO, ST	19820315 200712 1 001	PNS	DKA			V	V														V (QRMA)					Dit. Prasarana Perkeretaapian
79	MUHAMMAD YUSUF	19801002 200604 1 001	PNS	DKA			V		V	V						V						V (QRMA)					BTP Kelas I Medan
80	LUTHFIN NIAM	19770912 200912 1 002	PNS	DKA					V																		BTP Kelas I Semarang
81	RENALDI PRABUDIMAN	19811212 200912 1 003	PNS	DKA			V		V	V							V										BTP Kelas I Semarang
82	MELISA SILVIA ANGGRAINI	19870625 200812 2 001	PNS	DKA					V	V																	Dit. Prasarana Perkeretaapian
83	M. ZAKI ALAM YUSRANI	19871214 201012 2 002	PNS	DKA					V																		BTP Kelas I Jakarta
84	AKHMAD BAHRUNI	19830907 201012 1 007	PNS	DKA					V	V																	Dit. Prasarana Perkeretaapian
85	INDRA EDEN NUYAMARTO	19861210 201012 1 003	PNS	DKA					V	V			V														BTP Kelas I Medan
86	WAHYU PUJA P.	19880806 201012 1 003	PNS	DKA					V	V															V		Dit. Prasarana Perkeretaapian
87	AFRIZA TELA KURNIA	19840409 201012 1 001	PNS	DKA					V	V																	Dit. Prasarana Perkeretaapian
88	DINO PRAMONATA	19760710 200812 1 001	PNS	DKA			V		V	V		V															Dit. Prasarana Perkeretaapian
89	ARI WIBOWO	19881215201501001	PNS	DKA			V		V	V		V										V (QRMA)					Dit. Prasarana Perkeretaapian
90	ROSNAENI	19770108200912002	PNS	DKA			V		V	V																	Dit. Prasarana Perkeretaapian
91	ISKANDAR	19800610200712101	PNS	DKA			V		V	V			V									V (QRMA)					BTP Kelas I Medan
92	NADIA MASSANG LOLOR	19851110 200604 2 002	PNS	DKA			V		V	V																	Dit. Prasarana Perkeretaapian

No	Nama	NIP	STATUS	UNIT	KOMPETENSI TEKNIS														KOMPETENSI UMUM/MANAJERIAL							Jabatan Fungsional CPNS dan PPPK	Unit Kerja
					Auditor	Inspektur Sarana	Inspektur Prasarana	Penguji Jalbang	PengujI Fasop	PengujI Prasarana	Pengujl Sarana	Asesor	PPNS	Diklat Teknis Khusus Perkeretapian	Diklat Kecakapan SDM (PPKA)	ANKER	Diklat Teknologi LRT Gol 9	Diklat Kerja Cepat	Arsiparis	Kepegawaian	Penyelaras Jabfung	Manajemen Risiko (QRMP/C/QRMA/QRMO)	Audit KPBU	Diklat Manajerial (Akuntansi,Kritis, Bisnis, Database, MBT, dll)	PPK Tipe C		
93	RETNO SARI SUNARTO	19820921 200604 2 003	PNS	DJKA			√		√	√																	Dit. LLAJA
94	FERDIAN SURYO ADHI P	19800215 200712 1 002	PNS	DJKA			√		√	√													√ (PKA)				BTP Kelas I Semarang
95	ARI PRANOVI INDRIANTO	19791024 200912 1 003	PNS	DJKA							√																BTP Kelas II Palembang
96	FRIH GALIH	19680410 199703 1 002	PNS	DJKA			√				√	√										√ (QRMP)					Setditjen Perkeretapian
97	ADITYA YUNIANTO	19850609 200712 1 001	PNS	DJKA			√				√	√										√ (QRMP)	√				BPKAR Sumatera Selatan
98	RUSTAMAJI MEMIKO	19810725 201012 1 002	PNS	DJKA							√	√													√		Balai Pengujian Perkeretapian
99	AHMAD YASNUR	19781004 201012 1 001	PNS	DJKA		√					√																Dit. Sarana Perkeretapian
100	M. SYARIF HIDAYAT	19791201 200912 1 006	PNS	DJKA							√	√															Dit. Sarana Perkeretapian
101	ANIK SETIANI	19740112 200502 2 001	PNS	DJKA		√					√	√															Dit. Sarana Perkeretapian
102	UDUT PANGIHUTAN S.	19630717 200812 1 002	PNS	DJKA		√					√											√ (QRMA)					Balai Pemantau Perkeretapian
103	SITI HENIYAWATI	19721016 200604 1 003	PNS	DJKA							√	√															Dit. Sarana Perkeretapian
104	YAYAN NUSHARYANTO	19801110 200604 1 003	PNS	DJKA							√	√															Dit. Sarana Perkeretapian
105	VENNY ARIANTI	19870605 200912 2 002	PNS	DJKA		√					√	√															Dit. Sarana Perkeretapian
106	ARMAINI DEWI	19710515 200312 2 001	PNS	DJKA							√	√															Dit. Sarana Perkeretapian
107	BOMBY DUSWARA	19870601 201504 1 002	PNS	DJKA		√					√																Dit. Sarana Perkeretapian
108	M.DANU PRAWIRA	19920420 201503 1 005	PNS	DJKA							√																Dit. Sarana Perkeretapian
109	DANIEL PAUNDANAN	19740524 200712 1 001	PNS	DJKA		√					√											√ (QRMA)					Dit. Sarana Perkeretapian
110	TEDDY PRIYANTORO	19830601 201012 1 002	PNS	DJKA	√						√	√										√ (QRMO, QRMA)					Dit. Sarana Perkeretapian
111	TUDO BINSAR PARULIAN	19830429 201012 1 003	PNS	DJKA		√					√	√										√ (QRMA)					Dit. Sarana Perkeretapian
112	RAHMAWATY	19710729200642001	PNS	DJKA		√					√											√ (QRMO)					Dit. Sarana Perkeretapian
113	LILIK MUJAKI	19620607200581 1008	PNS	DJKA						√	√	√													√		Dit. Keselamatan Perkeretapian
114	AGUS SUNARYO HADI S. P.	19860202014021001	PNS	DJKA		√					√																Dit. Sarana Perkeretapian
115	TATI HENDRAWATI	19690222032122003	PNS	DJKA							√																Balai Pengujian Perkeretapian
116	TUTI	19720517200604 2005	PNS	DJKA							√																Balai Pengujian Perkeretapian
117	DWI KURNIADI GUNAWAN	19891126201503 1001	PNS	DJKA		√					√	√										√ (QRMO)					Dit. Sarana Perkeretapian
118	HARDIANTO EKO PRASETIO	19831213201012 1004	PNS	DJKA		√					√											√ (QRMO)					Dit. Sarana Perkeretapian
119	FERRY CANDRA HASIBUAN	19821226 200312 1 001	PNS	DJKA							√	√											√				BTP Kelas II Palembang
120	ARIE KURNIAWAN	19810128 200604 1 001	PNS	DJKA							√																Dit. Sarana Perkeretapian
121	M. HIDAYAT	19800527 200604 1 002	PNS	DJKA			√				√	√									√	√ (QRMA)					Dit. Keselamatan Perkeretapian
122	RIO AFRILIANA	19810417 200812 2 001	PNS	DJKA									√						√								Setditjen Perkeretapian
123	DIPY FEBRIANTY	19800226 201012 2 001	PNS	DJKA		√													√			√ (QRMA)					Balai Pengujian Perkeretapian
124	FAUZI BAAMIR	19840408 201012 1 003	PNS	DJKA															√								Setditjen Perkeretapian
125	LINTUNG MARGONO	19620311 198302 1 001	PNS	DJKA															√								Setditjen Perkeretapian
126	IRAWATI SIJURMAN	19681127 199403 2 003	PNS	DJKA			√														√						Setditjen Perkeretapian
127	IRVAN ARIESTIANA	19790623 200502 1 002	PNS	DJKA		√	√														√	√ (QRMP)		√ (BLU, PKA)			Setditjen Perkeretapian
128	HEPPY EKA PRASETYA	19830224 200912 1 002	PNS	DJKA			√														√	√ (QRMA)					Setditjen Perkeretapian
129	AGUSTINUS DANANG FS	19850509 200712 1 001	PNS	DJKA			√														√	√ (QRMA)					Setditjen Perkeretapian
130	ANDI GUNTUR ASAPA	19840724 200712 1 001	PNS	DJKA			√														√	√ (QRMP, QRMA)					Setditjen Perkeretapian
131	EDDY SUSANTO	19801118 201012 1 001	PNS	DJKA																	√						Setditjen Perkeretapian
132	WARDOYO	19620812 201012 1 006	PNS	DJKA			√					√									√	√ (QRMA)		√ (Manaj Proyek)	√		Setditjen Perkeretapian
133	ROESIANTOR HENDRO PATRO	19780925 200812 1 001	PNS	DJKA																	√						Setditjen Perkeretapian
134	JUMANTO	19690103 199310 1 001	PNS	DJKA																	√	√ (QRMA)					Dit. LLAJA
135	JOICE	19820328 200912 2 002	PNS	DJKA			√					√					√				√	√ (QRMA)		√ (Analis Kompetensi)			Dit. LLAJA
136	HARIS FARIZI	19820127 200604 1 002	PNS	DJKA			√														√	√ (QRMA)		√ (Analis Kompetensi)			Dit. LLAJA
137	VONNY MAHENDRI	19850508 200912 2 005	PNS	DJKA			√														√	√ (QRMA)					Dit. LLAJA
138	ADITYA KARSA	19860902 200812 1 001	PNS	DJKA																	√			√ (PKA)			Dit. LLAJA
139	FIRMANSYAH TEGUH S	19800812 200712 1 001	PNS	DJKA			√														√	√ (QRMA)					Dit. Prasarana Perkeretapian
140	L. SAMUEL MANGGOLAH	19770109 200604 1 001	PNS	DJKA			√														√	√ (QRMA)					Dit. Prasarana Perkeretapian
141	EKA ARISTA ANGGRAINATI	19850402 200812 2 002	PNS	DJKA			√														√						Dit. Prasarana Perkeretapian
142	DIMAS RESKA PUTRA	19821225 200912 1 002	PNS	DJKA	√		√														√	√ (QRMA) / √ (QRMP)					Dit. Prasarana Perkeretapian
143	ARY LUNDI AYU OKTRADA	19821004 200604 2 002	PNS	DJKA		√															√	√ (QRMA) / √ (QRMP)					Dit. Sarana Perkeretapian
144	POIBE IRENE F SIMATUPANG	19691008 199603 2 002	PNS	DJKA																	√	√ (QRMA)					Dit. Sarana Perkeretapian
145	DANAN WIDIYANTO	19690203 199803 1 001	PNS	DJKA			√					√									√	√ (QRMA)					Dit. Keselamatan Perkeretapian
146	HOTMA PARULIAN L	19790718 200712 1 001	PNS	DJKA			√					√									√	√ (QRMA)					Dit. Keselamatan Perkeretapian
147	WINDI MAHATEJYASNA	19923221 200312 1 001	PNS	DJKA			√														√						Dit. Keselamatan Perkeretapian

No	Nama	NIP	STATUS	UNIT	KOMPETENSI TEKNIS														KOMPETENSI UMUM/MANAJERIAL							Sebelum Pelaporan/ CPNS dan PPPK	Unit Kerja
					Auditor	Inspektur Senior	Inspektur Prasarana	Penguji Jalbang	Penguji Fasop	Penguji Prasarana	Penguji Sarana	Assesor	PPNS	Dikat Teknis (Dasar Perkeretapian)	Dikat Kesiapan SDM (PPKA)	AMK KB	Dikat Teknologi LRT (SoA 3	Dikat Keraja Cepat	Anjasmi	Kepegawaian	Penyelesaian Jabfung	Manajemen Risiko (OSRM/P/QRMA/QRMO)	ANK KMLU	Dikat Manajerial (Marmet,Kirkis, dLL), Database, MR, dll)	PPK Tipe C		
148	FATHIR PAYUNGAN SIREGAR	19790407 200812 1 001	PNS	DJKA			√														√						Dit. Keselamatan Perkeretaapian
149	ARTHA EKA WIJAYA, ST	19880909 200812 1 003	PNS	DJKA			√					√									√						Dit. Keselamatan Perkeretaapian
150	EVY KRISTIANA, SE., M.MTR	19721234 199803 2 002	PNS	DJKA		√															√						Dit. Keselamatan Perkeretaapian
151	INTAN NOVIANINGSIH, S.SI.T., M.T	19871122 200912 2 002	PNS	DJKA																	√						Dit. Keselamatan Perkeretaapian
152	GUNDHIARTI ORTIVA DEWI, SE., M.M.	19671015 200604 2 002	PNS	DJKA		√						√									√		√ (Arsitek Kompetensi)				Dit. Keselamatan Perkeretaapian
153	RIZAL FATHONI ASAD, S.E	197504182007121003	PNS	DJKA			√						√									√ (QRMO)					BTP Kelas I Surabaya
154	WALIDO MORO, ST., M.SI	197610262008121001	PNS	DJKA									√										√	√ (Bahasa)	√		Dit. Keselamatan Perkeretaapian
155	ADRIANTO BUDI PRABOWO, SE, MBA	197702072009121001	PNS	DJKA									√	√								√ (QRMO)		√ (Bahasa Kanis)			Dit. LLAJA
156	TAUFIK ERFIN	198308222009121003	PNS	DJKA									√														BTP Kelas II Palembang
157	YUSTINA NURHAYATI, ST., MT	197805112009122001	PNS	DJKA			√						√									√ (QRMO, QRMA)		√ (PKP)			BTP Kelas I Surabaya
158	ARI HENDRATNO, ST	197611182014091001	PNS	DJKA									√														BTP Kelas I Medan
159	RONY LESMANA, A.MD.KA	198709162010121005	PNS	DJKA									√									√ (QRMA)		√ (Operasi PPK)			BTP Kelas II Padang
160	TRIJANTO BRODJO SUSATJO, S.E	197209227014091002	PNS	DJKA									√														BTP Kelas I Medan
161	RENDY SULYANTO, SE	198507292019021003	PNS	DJKA									√														Dit. Keselamatan Perkeretaapian
162	RANGGA PERDANA A, S.S.T (TD)	199312227201803 1002	PNS	DJKA									√											√ (Barjas)			BTP Kelas I Medan
163	M RIZKI FATURRAHMAN, ST	199402252019021002	PNS	DJKA									√														Dit. Sarana Perkeretaapian
164	RISKA SASANTI DAMARTINI, ST., M.SC	197809232009122002	PNS	DJKA			√						√									√ (QRMA)					BTP Kelas I Semarang
165	RIDWAN ARASED, ST	199403032019021002	PNS	DJKA	√								√									√ (QRMO)					Dit. Sarana Perkeretaapian
166	READY REBERTO, SE	199010102020121003	PNS	DJKA									√									√ (QRMO)	√				Dit. Keselamatan Perkeretaapian
167	NOVA WAHYU CAHYONO, S.KOM.	199211302020121003	PNS	DJKA	√								√														Dit. Keselamatan Perkeretaapian
168	MUHAMMAD ANSHARI, S.S.T (TD)	199110212015031002	PNS	DJKA									√									√ (QRMA)					BTP Kelas II Padang
169	IR. IMAM AZIZ WIJAYANTO, ST	196604262009121003	PNS	DJKA			√						√														Dit. Keselamatan Perkeretaapian
170	ALEXANDER REINHARD G. MANIK, ST	198610302009121004	PNS	DJKA									√									√ (QRMA)					BTP Kelas I Jakarta
171	JOKO WAHYU SETYAWAN, ST	198404152010121004	PNS	DJKA									√														Balai Pengujian Perkeretaapian
172	EKO WIDIARSO	198011072009121002	PNS	DJKA		√							√									√ (QRMO) / √ (QRMA) / √ (QRMP)		√ (Mandiri Proyek)			Setditjen Perkeretaapian
173	EKO PURNOMO, SE	197812272010121004	PNS	DJKA								√	√									√ (QRMO)					Setditjen Perkeretaapian
174	NOVIE HASTA WAHYUDI, ST	198511162008121007	PNS	DJKA									√									√ (QRMO)					Setditjen Perkeretaapian
175	DEDI HUMAIDI, S.SI.T.	198603182009121002	PNS	DJKA									√									√ (QRMA)					BTP Kelas II Padang
176	DUTA PRATAMA, ST	198910202009121002	PNS	DJKA			√						√														Dit. LLAJA
177	ABDURAHMAN AHMAD	19960803 201301 1 001	PNS	DJKA				√													√	√ (QRMO)					Balai Pengujian Perkeretapian
178	HASMAN SYUHAS	198108202008041 001	PNS	DJKA					√	√											√	√ (QRMA)		√ (Bahasa Inggris)	√		BPKA Sulawesi Selatan
179	RIKA RAHIM	198805302010122 008	PNS	DJKA			√		√	√																	BTP Kelas I Semarang
180	ARI SURYONO	19810508 201012 1 002	PNS	DJKA					√	√																	Dit. Prasarana Perkeretapian
181	FERRY WIJO UTOMO	19961004 201801 1 003	PNS	DJKA							√					√									√		Balai Pengujian Perkeretapian
182	MUHAMMAD HAFID	19910505 201801 1 003	PNS	DJKA							√													√ (BUU)	√		Balai Pengujian Perkeretapian
183	NUR SETIAWAN SADIK	197701122002121003	PNS	DJKA			√														√	√ (QRMP)					Dit. Prasarana Perkeretapian
184	ROSITA	198001192001122001	PNS	DJKA			√														√	√ (QRMP)					Dit. LLAJA
185	DANDUN PRAKOSA	196801051997031001	PNS	DJKA			√														√	√ (QRMP)					Setditjen Perkeretapian
186	DEDIK TRI ISTIANTARA	197710102000121002	PNS	DJKA			√														√	√ (QRMP)					BPKAP Sumatera Selatan
187	LUKMAN AL AMIN	198101242000121001	PNS	DJKA			√														√	√ (QRMP)					Dit. Prasarana Perkeretapian
188	SYAFEK JAMHARI	196809101994031004	PNS	DJKA			√					√									√	√ (QRMP)					Setditjen Perkeretapian
189	MOCHAMAD ANDI HARY MURTY	197507312002121001	PNS	DJKA		√															√	√ (QRMP)		√ (BUU)			Balai Perawatan Perkeretapian
190	NURHADI UNGGUL WIBOWO	197111161998031002	PNS	DJKA			√														√	√ (QRMP)		√ (PIM Tk II)			BTP Kelas I Surabaya
191	SUBANTO	196804251991031002	PNS	DJKA			√														√	√ (QRMP)					Dit. Keselamatan Perkeretapian
192	RIZKY HANDARU BASUKI	198301092007121001	PNS	DJKA																		√ (QRMA)					BTP Kelas I Medan

No	Nama	NIP	STATUS	UNIT	KOMPETENSI TEKNIS														KOMPETENSI UMUM/MANAJERIAL							Rekam Fungsional (PNS dan PPPK)	Unit Kerja
					Auditor	Inspektur Sarana	Inspektur Prasarana	Penguji Jalbang	Penguji Fasilitas	Penguji Prasarana	Penguji Sarana	Asesor	PPNS	Diklat Fasnis Khusus Perkeretaapian	Diklat Kepelatihan SDM (PPKA)	Ahli K3	Diklat Teknologi LRT Gol. 5	Diklat Kereta Cepat	Antigarin	Kepegawaian	Penyelenaan Jabfung	Manajemen Risiko (QRMP/QRMA/QRMO)	Adit KPBU	Diklat Manajerial (Manaj. Krisis, BLU, Database, MR, dll)	PPKT Tipe C		
193	HASBUDI SAMAD	197501031999031001	PNS	DIKA																		√ (QRMA) / √ (QRMP)		√ (BLU, Anjab, Manaj Proyek)			BPKA Sulawesi Selatan
194	ARIN INDRIA VERDANI	198505152009122003	PNS	DIKA																		√ (QRMA)		√ (PKP)			BTP Kelas I Semarang
195	ANDRE BUDI DHARMAWAN	198510052010121001	PNS	DIKA							√											√ (QRMO)					Dit. LLAKA
196	SALIS MAHFUDHOH	199208062020122007	PNS	DIKA	√																	√ (QRMO)	√	√ (Pengelola Database)		√	Dit. LLAKA
197	RISWANTARA	199108032020121004	PNS	DIKA																		√ (QRMO)				√	BTP Kelas I Bandung
198	YOHANES YUANA MATANGELEN	199803292020121007	PNS	DIKA																		√ (QRMO)		√ (Bahasa Inggris)			BTP Kelas I Jakarta
199	MUHAMMAD RAFI AL-FARIZI. S	199502172020121008	PNS	DIKA																		√ (QRMO)				√	BTP Kelas I Bandung
200	ARINTA LUWIYANA	197004071993032001	PNS	DIKA																		√ (QRMO)					Setditjen Perkeretaapian
201	AKBARANI CANTIKA	199807102020122003	PNS	DIKA																		√ (QRMO)				√	Dit. Sarana Perkeretaapian
202	VIKI DRISSA SAIFUDIN	199510022018011001	PNS	DIKA																		√ (QRMO)			√		Setditjen Perkeretaapian
203	YOSEP YOGO WIDHI ARMOKO	198510272012011002	PNS	DIKA																		√ (QRMO)		√ (Public Speaking)		√	Balai Perawatan Perlengkapan
204	TRINANDA MEINAR ARIANI	199605132020122006	PNS	DIKA																		√ (QRMO)				√	Setditjen Perkeretaapian
205	ANGELA MERICI YOSHINTA RINAWATI	199701042020122007	PNS	DIKA																		√ (QRMO)				√	Dit. Sarana Perkeretaapian
206	DEDI SATRIA	199306102020121008	PNS	DIKA																		√ (QRMO)				√	BTP Kelas I Medan
207	HERRY KURNIAWAN KADAR ISMANTO	198611132020121008	PNS	DIKA																		√ (QRMO)				√	BPKAD Sumatera Selatan
208	RIKI FERNANDO	199010112020121002	PNS	DIKA																		√ (QRMO) / √ (QRMA)				√	BTP Kelas II Palembang
209	RANTI AHMAD ALRASYID	199102262020121004	PNS	DIKA																		√ (QRMO)			√	√	BTP Kelas I Surabaya
210	MUHAMMAD HANNAFI	199702282020121006	PNS	DIKA																		√ (QRMO)					BTP Kelas I Surabaya
211	YUSUF FAJAR RAMADHAN	199407142020121009	PNS	DIKA																		√ (QRMO)	√	√ (MC)		√	BTP Kelas II Padang
212	MAULANA ACHSAN	199804222020121003	PNS	DIKA																		√ (QRMO)					Dit. Sarana Perkeretaapian
213	RIKI SEKAR PUSPITASARI	199808272010122005	PNS	DIKA																		√ (QRMO)		√ (Pengelola Barjas)			Setditjen Perkeretaapian
214	SUPANDIANSYAH	198702202020121004	PNS	DIKA																		√ (QRMO) / √ (QRMA)				√	BTP Kelas II Palembang
215	ESTHIKA SARE	199408232020122014	PNS	DIKA																		√ (QRMO)	√			√	Balai Pengujian Perkeretaapian
216	TULUS NIRWANSYAH AWI	200006022021121001	PNS	DIKA																		√ (QRMO)					BTP Kelas I Jakarta
217	ANIS CHOIRUNISA	199603122020122005	PNS	DIKA																		√ (QRMO)				√	BTP Kelas I Surabaya
218	NOVIANA NISA'UL BOHMAH	199411282016122001	PNS	DIKA																		√ (QRMO)					Dit. LLAKA
219	SIDDIK SALEH	199301132020121001	PNS	DIKA																		√ (QRMO)				√	BTP Kelas I Jakarta
220	RIZKY MUHAMMAD	199912072020121005	PNS	DIKA							√											√ (QRMO)		√ (Barjas)			Dit. Sarana Perkeretaapian
221	FAISAL KRISTOFFEL LUMBAN TOBING	199507052016121001	PNS	DIKA																		√ (QRMO)					Setditjen Perkeretaapian
222	AYU PERMATA SANI	199401202016122002	PNS	DIKA																		√ (QRMO)					Setditjen Perkeretaapian
223	INDAH DWI ARIANI	199707242018122003	PNS	DIKA																		√ (QRMO)					Setditjen Perkeretaapian
224	KHAIRANA TIARDI	199609042020122012	PNS	DIKA																		√ (QRMO)				√	Setditjen Perkeretaapian
225	REZA AHMAD	199403242020121005	PNS	DIKA												√						√ (QRMO)				√	Setditjen Perkeretaapian
226	HARMITA MORGAN	199003062020122005	PNS	DIKA																		√ (QRMO)		√ (Barjas)		√	BTP Kelas I Medan
227	GUNAWAN	199105302020121004	PNS	DIKA																		√ (QRMO)				√	Setditjen Perkeretaapian
228	MELINA KRISNAWATI	199405072020122007	PNS	DIKA																		√ (QRMO)				√	Dit. LLAKA
229	RESTU FAJAR WIDI USWORO	199703262018011001	PNS	DIKA																		√ (QRMO)					BTP Kelas I Semarang
230	JOHANNES ANGGA PRIMA	199411152020121005	PNS	DIKA																		√ (QRMO)				√	Dit. Sarana Perkeretaapian
231	AULIA HUSNA PARINDURI	199808282020122005	PNS	DIKA																		√ (QRMO)				√	BTP Kelas I Medan
232	MUHAMMAD FATHURRAHMAN PRINGGATAMA	199705062020121008	PNS	DIKA																		√ (QRMO)					Balai Perawatan Perkeretaapian
233	ANNE RUFAIDAH	198009072007122002	PNS	DIKA			√															√ (QRMO)					BTP Kelas I Bandung
234	INKA PRATIWI	199101022020122007	PNS	DIKA																		√ (QRMO)				√	BTP Kelas I Semarang
235	MOH MAULANA RIZKI ZAINUR ROFIQ	199804012018011003	PNS	DIKA																		√ (QRMO)			√		Setditjen Perkeretaapian
236	GENTUR WIKU PRIBADI	199308292020121004	PNS	DIKA																		√ (QRMO)				√	Setditjen Perkeretaapian
237	SITTI HASMIDA	199803072020122002	PNS	DIKA																		√ (QRMO)					BPKA Sulawesi Selatan
238	ANDHIKA MARDIJINI	198503272010121003	PNS	DIKA																		√ (QRMO)					Setditjen Perkeretaapian
239	MERINDA PANGESTIKASARI	199603252020122008	PNS	DIKA																		√ (QRMO)				√	Setditjen Perkeretaapian
240	RIZKA MAULIDA	199608202020122006	PNS	DIKA																		√ (QRMO)				√	Setditjen Perkeretaapian
241	DIMAS AJI SUKMA, S.Kom.	19970707 202012 1 004	PNS	DIKA																		√ (QRMO)				√	BPKAR Sumatera Selatan
242	INDAH YENI SUMIATI NUKSIH, S.Hum	19820107 202012 2 004	PNS	DIKA																						√	BPKAR Sumatera Selatan
243	JAYARI, S.SI	19900415 202012 1 007	PNS	DIKA																						√	BPKAR Sumatera Selatan
244	AHKMAD IPANDY, S.Kom	19880616 202012 1 008	PNS	DIKA																						√	BPKAR Sumatera Selatan
245	KHOIRUNNISA, S.Hum	19930407 202012 2 012	PNS	DIKA																						√	BPKAR Sumatera Selatan
246	REZI RADIKA, A.Md. KA	19980611 202012 1 006	PNS	DIKA																						√	BPKAR Sumatera Selatan
247	MUHAMAD RIDHO YUSHARDI, A.Md.T	19946826 202012 1 004	PNS	DIKA																						√	BPKAR Sumatera Selatan
248	TEO TRI GOMI, A. Md.KA	19980522 202012 1 006	PNS	DIKA																						√	BPKAR Sumatera Selatan

No	Nama	NIP	STATUS	UNIT	KOMPETENSI TEKNIS														KOMPETENSI UMUM/MANAJERIAL							Jabatan Fungsional QHSE dan PPBJK	Unit Kerja
					Auditor	Inspektur Sarana	Inspektur Prasarana	Pengaji Jalan	Pengaji Lain	Pengaji Prasarana	Pengaji Sarana	Asesor	SPMS	Diklat Teknis Khusus Perkeretaapian	Diklat Kecakapan SDM (PPKA)	ANS K3	Diklat Teknologi LRT Gol. II	Diklat Kereta Cepat	Arsiparis	Kepegawaian	Penyelarasan Lahirang	Manajemen Risiko (QRMP/QRMA/QRMO)	ANS KHLU	Diklat Manajerial (Manaj.Kritis, ELA), Direktur, MR, dll)	PPK Tipe C		
249	KEVIN REYNALDO, S. Kom.	19951028 202012 1 006	PNS	DJKA																						V	Balai Pengujian Perkeretaapian
250	FAHMI OMAR., S.Hum.	19870529 202012 1 002	PNS	DJKA																		V (QRMO)				V	Balai Pengujian Perkeretaapian
251	NURZAMAN, S.St.	19771029 202012 1 006	PNS	DJKA																		V (QRMO)				V	Balai Pengujian Perkeretaapian
252	SEPTIAN ILHAM MULFAHMI, S.Kom.	19970911 202012 1 001	PNS	DJKA																						V	Balai Pengujian Perkeretaapian
253	NUGROHO EKO PUWUNGKAS, S.I.Kom	19960126 202012 1 006	PNS	DJKA																				V (Digital Marketing)		V	Balai Pengujian Perkeretaapian
254	EDWIN DWI ARMAD, S.Kom.	19961013 202012 1 005	PNS	DJKA							V															V	Balai Pengujian Perkeretaapian
255	EZRA AGUNG PRATAMA, A.Md. KA.	19980423 202012 1 003	PNS	DJKA																						V	Balai Pengujian Perkeretaapian
256	DIYANITA INDRIASENNA, A.Md.KA	19960807 202012 2 006	PNS	DJKA																						V	Balai Pengujian Perkeretaapian
257	JOELFIKA RAMADHANIA, Amd. KA	19970126 202012 2 009	PNS	DJKA																						V	Balai Pengujian Perkeretaapian
258	LINGGAR SUBEKTI, A. Md. T	19980228 202012 1 002	PNS	DJKA																						V	Balai Pengujian Perkeretaapian
259	AJI PERMANA PUTRA, A.Md. KA	19960526 202012 1 006	PNS	DJKA																						V	Balai Pengujian Perkeretaapian
260	IWIN MANURUNG, S.T	19930418 202012 1 004	PNS	DJKA																						V	Balai Pemeliharaan Perkeretaapian
261	SAUT MARTUA JAHENDA SIRINGO-RINGO, S.T.	19900204 202012 1 003	PNS	DJKA																				V (Sarjana, Otsupasi PPK)		V	Balai Perawatan Perkeretaapian
262	IBNU IBRAHIM MURCAHYO, S.T.	19970525 202012 1 008	PNS	DJKA																						V	Balai Perawatan Perkeretaapian
263	RIZKI CATUR PUTRA, S.Kom.	19971201 202012 1 013	PNS	DJKA																						V	Balai Perawatan Perkeretaapian
264	LUTLUT ATUZZAHROH, S.Hum	19950903 202012 2 009	PNS	DJKA																						V	Balai Perawatan Perkeretaapian
265	RENDYA PURNAMA JAYA, S.Kom	19900917 202012 2 007	PNS	DJKA																						V	Balai Perawatan Perkeretaapian
266	TIMBUL TRIYANTO, S.E.	19860508 202012 1 002	PNS	DJKA																				V (Sarjana)	V	V	Balai Perawatan Perkeretaapian
267	GEMA AKBAR PUTRA PAMUNGKAS, A.Md. KA	19930611 202012 1 009	PNS	DJKA																						V	Balai Perawatan Perkeretaapian
268	PANDU BAGUS ANDIKA, A.Md.KA	20040814 202012 1 009	PNS	DJKA																				V (Hospitality)		V	Balai Perawatan Perkeretaapian
269	ANINDITA HARSAYANUGRAHA MURWASITO, A.Md. KA	19930103 202012 1 007	PNS	DJKA																						V	Balai Perawatan Perkeretaapian
270	ARIS PRAMITA NINGTYAS, A.Md.KA	19941009 202012 2 007	PNS	DJKA																						V	Balai Perawatan Perkeretaapian
271	DEBI DWI CAHYA, S. Kom	19941215 202101 1 001	PNS	DJKA																						V	Balai Perawatan Perkeretaapian
272	ERIC VAN CHRISMAN LBN. BATU, S.E.	19931120 202012 1 002	PNS	DJKA																		V (QRMO)		V (BLU, Bahasa Inggris)		V	BTP Kelas II Jakarta
273	SHOFWATINIDA, S.Kom.	19970412 202012 2 007	PNS	DJKA																				V (Public Speaking)		V	BTP Kelas I Jakarta
274	GILANG WISNU SAPUTRA, S.Kom.	19950724 202012 1 001	PNS	DJKA																				V (Wirausaha Talenta)	V	V	BTP Kelas II Jakarta
275	APRIYANTO, S.IP.	19950410 202012 1 006	PNS	DJKA																						V	BTP Kelas I Jakarta
276	DIAN VUARDI, S.T.	19920917 202012 1 009	PNS	DJKA																						V	BTP Kelas I Jakarta
277	AGUSTINAH RIZKY AMALIA, S.T.	19920824 202012 2 007	PNS	DJKA																		V (QRMO)				V	BTP Kelas I Jakarta
278	IRFAN FAJAR HERNAWAN, A.Md. KA	19940820 202012 1 002	PNS	DJKA																		V (QRMO)				V	BTP Kelas I Jakarta
279	SYAFIRA CAESARIA WAHYUNINGTYAS, A.Md. KA	19990311 202012 2 002	PNS	DJKA																						V	BTP Kelas I Jakarta
280	LISA FADZIATUZZAHROH, A.Md.	19900710 202012 2 007	PNS	DJKA											V							V (QRMO)				V	BTP Kelas I Jakarta
281	LIA LAELASARI, S.I.Pus.	19950101 202012 2 016	PNS	DJKA																						V	BTP Kelas I Bandung
282	ISMIE KHANZA HASTUTI, S.Sos.	19950518 202012 2 010	PNS	DJKA																						V	BTP Kelas I Bandung
283	ANISA ALFIANI RAHAYU, S.SI.	19910718 202012 2 003	PNS	DJKA																		V (QRMO)				V	BTP Kelas I Bandung
284	ADI WINASIS, S.T.	19860223 202012 1 003	PNS	DJKA																						V	BTP Kelas I Bandung
285	FIRMANSYAH, S.T	19911106 202012 1 006	PNS	DJKA							V															V	BTP Kelas I Bandung
286	DANANG PANGESTU WIBOWO, A.Md. KA	19970131 202012 1 009	PNS	DJKA																						V	BTP Kelas I Bandung
287	HARTATA PUTRA MAI MARTA, A.Md. KA	19970527 202012 1 009	PNS	DJKA																						V	BTP Kelas I Bandung
288	PRIYANTO SUPRAYOGI, A.Md. KA	19910430 202012 1 006	PNS	DJKA																						V	BTP Kelas I Bandung
289	PUPU PURYANTIKA, A.Md. KA	19921026 202012 2 007	PNS	DJKA																						V	BTP Kelas I Bandung
290	ARIA INDHI WICAKSANA, S.I.Kom.	19950116 202012 1 009	PNS	DJKA																						V	BTP Kelas II Semarang
291	RENU WAHYU ROCHMDHI, S.Kom.	19910609 202012 1 009	PNS	DJKA																		V (QRMO)		V (Bahasa Inggris)		V	BTP Kelas II Semarang
292	BURHANUDIN MURSETO PRATOMO, S.E.	19930224 202012 1 008	PNS	DJKA																						V	BTP Kelas II Semarang
293	IKA RAHMAWATI NURLELI, S.Hum.	19950210 202012 2 011	PNS	DJKA																						V	BTP Kelas I Semarang
294	ROHMAD JARWANTO, S.T.	19850430 202012 1 001	PNS	DJKA																						V	BTP Kelas I Semarang

No	Nama	NIP	STATUS	UNIT	KOMPETENSI TEKNIS														KOMPETENSI UMUM/MANAJERIAL								Jabatan Fungsional CPNS dan PPPK	Unit Kerja
					Auditor	Inspektur Senior	Inspektur Prasarana	Penguji Jalan	Penguji Rel	Penguji Prasarana	Penguji Sarana	Asesor	PPNS	Diklat Kecakapan SDM (PKSA)	Diklat Teknologi LRT Gol 2	Diklat Teknologi LRT Gol 1	Diklat Teknis Lainnya	Analisis	Kepegawaian	Perencanaan Jabatan	Manajemen Risiko (QRMP/QRMA/QRMC)	ANR KPBU	Diklat Manajerial (Mane(MHrh, BLU, Database, MR, dll)	PPK Tipe C		
295	BHIOFAIAR AGUSTA YOSABRATA, S.St.	19870833 202012 1 001	PNS	DJKA																						√	BTP Kelas I Semarang
296	EVAN BENYAMIN NATANAEL, A.Md. KA	19950831 202012 1 007	PNS	DJKA																						√	BTP Kelas I Semarang
297	MUHAMMAD ADITYA PRADANA, A.Md. KA	19960103 202012 1 008	PNS	DJKA																						√	BTP Kelas I Semarang
298	YUSUP HARIM JUARNO, A.Md.KA	19960110 202012 1 006	PNS	DJKA																						√	BTP Kelas I Semarang
299	FADHIL MUHAMMAD, A.Md. T	19970530 202012 1 005	PNS	DJKA																						√	BTP Kelas I Semarang
300	ALFANTEGA SEPTIAN PRAYANGASTA, S.Kom.	19930909 202012 1 006	PNS	DJKA																						√	BTP Kelas I Surabaya
301	CHOIRUNNISA FATANUS SAFA, S.I.Kom.	19971208 202012 2 004	PNS	DJKA																	√ (QRMO)		√ (MC)			√	BTP Kelas I Surabaya
302	WIWIT PURWANTI, S.T.	19970328 202012 2 015	PNS	DJKA																	√ (QRMO)					√	BTP Kelas I Surabaya
303	KUSUMA MAULIDANTI, S.E.	19950811 202012 2 007	PNS	DJKA																			√ (BLU)			√	BTP Kelas I Surabaya
304	RIZQI PRASTYO, S.T.	19940818 202012 1 005	PNS	DJKA								√														√	BTP Kelas I Surabaya
305	ALFAN ALIEF SEKTIANANDA, S.Stat.	19970828 202012 1 007	PNS	DJKA																						√	BTP Kelas I Surabaya
306	AGUSTINA SLAMET, S.T.	19930818 202012 2 009	PNS	DJKA																	√ (QRMO)					√	BTP Kelas I Surabaya
307	ARIZAL ERRY WICAKSONO, S.T.	19880330 202012 1 007	PNS	DJKA																	√ (QRMO)					√	BTP Kelas I Surabaya
308	AGUS MIFTAKUL KHOIRI, A. Md. T	19960811 202012 1 002	PNS	DJKA										√												√	BTP Kelas I Surabaya
309	NISRINA MAHFUDHAH, A.Md. KA	19981230 202012 2 011	PNS	DJKA																						√	BTP Kelas I Surabaya
310	A. MUSTAGHFIRIN, A.Md. T	19971029 202012 1 005	PNS	DJKA																						√	BTP Kelas I Surabaya
311	YUSA SEPTIANDITYAS PUTRA, A.Md. KA	19901017 202012 1 008	PNS	DJKA											√											√	BTP Kelas I Surabaya
312	HENDRA HUSAMADI, S.T.	19890511 202012 1 006	PNS	DJKA								√														√	BTP Kelas II Padang
313	TESSA PRIHARTINA PARHUSIP, S.Stat.	19961029 202012 2 008	PNS	DJKA																					√	√	BTP Kelas II Padang
314	MUHAMMAD DZUL AKBAR, S.T.	19960326 202012 1 006	PNS	DJKA																	√ (QRMO)					√	BTP Kelas II Padang
315	RAHMAT SETIAWAN, S.Sos.	19910911 202012 1 004	PNS	DJKA																						√	BTP Kelas II Padang
316	ALFAIRI PRIMA NOVEL, S.E.	19970210 202012 1 002	PNS	DJKA																	√ (QRMO)					√	BTP Kelas II Padang
317	VEVI GUS LIA NOVA, S. Kom	19911124 202012 2 011	PNS	DJKA																	√ (QRMO)					√	BTP Kelas II Padang
318	MUHAMAD YUSUF, A.Md.KA	19980814 202012 1 002	PNS	DJKA																						√	BTP Kelas II Padang
319	FAIAR ALAMSYAH, A.Md. KA	19981008 202012 1 002	PNS	DJKA																						√	BTP Kelas II Padang
320	MARIBOSEN PURBA, S.T.	19960801 202012 1 007	PNS	DJKA				√		√											√ (QRMO)					√	BTP Kelas II Palembang
321	ZULFAZLI, S.Stat.	19961122 202012 1 004	PNS	DJKA								√			√						√ (QRMO)					√	BTP Kelas II Palembang
322	TITO AKBAR TAMARA, S.I.Kom	19960322 202012 1 005	PNS	DJKA																	√ (QRMO)					√	BTP Kelas II Palembang
323	JULIO RECKA OKTAHUTAMA, S.T.	19810131 202012 1 008	PNS	DJKA																						√	BTP Kelas II Palembang
324	ARIE GENTA, A.Md.KA	19880709 202012 1 001	PNS	DJKA																						√	BTP Kelas II Palembang
325	RIZKY SULISTYO WALIHADI, A. Md. KA	19970228 202012 1 004	PNS	DJKA																	√ (QRMO)					√	BTP Kelas II Palembang
326	MIFTHAQUL ALFARETSI, A.Md.KA	19970724 202012 1 003	PNS	DJKA																						√	BTP Kelas II Palembang
327	RISKI DIRGAGUNARSYAH, A.Md. KA	19911016 202012 1 003	PNS	DJKA																						√	BTP Kelas II Palembang
328	HEINRICH LIDANG HUTASOIT, S.Kom	19910514 202012 1 006	PNS	DJKA																	√ (QRMO)		√ (Bisnis)			√	BTP Kelas I Medan
329	ALDI B.J. HAMDANI, S.T.	19940605 202012 1 005	PNS	DJKA							√										√ (QRMO)					√	BTP Kelas I Medan
330	RAHAYU INDAH RAMADHAN, S.I.Kom.	19910330 202012 2 003	PNS	DJKA																			√ (MC)			√	BTP Kelas I Medan
331	CINDYE AMANDA, A.Md.KA	19980920 202012 2 002	PNS	DJKA																	√ (QRMO)					√	BTP Kelas I Medan
332	FIRMAWAN TRIATMAJA, A.Md. KA	19940202 202012 1 005	PNS	DJKA																						√	BTP Kelas I Medan
333	LASRIADO TRI RAMOSKI BANJARNAHOR, A.Md.KA	19961218 202012 1 001	PNS	DJKA																						√	BTP Kelas I Medan
334	ANASTASIA AJENG CEMPAKA SARI, S.Kom.	19881104 202012 2 005	PNS	DJKA																						√	Dit. Keselamatan Perkeretapian
335	HENDRY MUHDANY, S.Kom	19880716 202012 1 006	PNS	DJKA																						√	Dit. Keselamatan Perkeretapian
336	MIFTAKHUL JANAH, S.Kom	19900103 202012 2 004	PNS	DJKA																			√ (MC)			√	Dit. Keselamatan Perkeretapian
337	AHMAD BUKHARI MUSLIM, S.SI.	19960221 202012 1 006	PNS	DJKA																						√	Dit. Keselamatan Perkeretapian
338	ADITYA PRANATAMA, S.Kom.	19970822 202012 1 003	PNS	DJKA																			√ (Pengelola Database)			√	Dit. Keselamatan Perkeretapian
339	ARDIL PERMANA, S.Kom	19960270 202012 1 013	PNS	DJKA			√								√											√	Dit. Keselamatan Perkeretapian
340	LUKMAN HUL HAKIM, S.T	19961019 202012 1 005	PNS	DJKA																						√	Dit. Keselamatan Perkeretapian
341	NOVA WAHYU CANDRA, S.Kom.	19921130 202012 1 009	PNS	DJKA																						√	Dit. Keselamatan Perkeretapian
342	AGUSWAN AMIRUL ARIF, S.T.	19940901 202012 1 007	PNS	DJKA																						√	Dit. Keselamatan Perkeretapian
343	RANDY JANUAR SYAEFULLOH, ST	19930122 202012 1 007	PNS	DJKA			√								√											√	Dit. Keselamatan Perkeretapian

No	Nama	NIP	STATUS	UNIT	KOMPETENSI TEKNIS														KOMPETENSI UMUM/MANAJERIAL							Jabatan Pengelolaan CHS dan PPHK	Unit Kerja
					Auditor	Inspektur Utama	Inspektur Prasarana	Penguji Ahlinya	Penguji Pusop	Penguji Prasarana	Penguji Utama	Asesor	PPNS	Diklat Teknis Khusus Perkeretapian	Diklat Kecakapan SDM (PPKA)	ANP KI	Diklat Teknologi LRT Gol 3	Diklat Kereta Cepat	Assessors	Kepegawaian	Penyetaraan Jabatan	Manajemen Risiko (QRMP/QRMA/QRMO)	Ahli K3KU	Diklat Pengembangan (Mamo, Kelas, BLU, Database, SIA, dll)	PPK Tipe C		
344	SARAH FAUZIYYAH, S.IP.	19960830 202012 2 006	PNS	DJKA										√										√ (MC)		√	Dit. Keselamatan Perkeretapian
345	AMBARITA RUSMIAH MERLYN, A.Md.KA	19930912 202012 2 006	PNS	DJKA																						√	Dit. Keselamatan Perkeretapian
346	PRADIPTA AGUNG NUGROHO, A.Md. KA	19960904 202012 1 009	PNS	DJKA																						√	Dit. Keselamatan Perkeretapian
347	NOVAL MARINGAN SINAGA, S.Kom.	19961110 202012 1 005	PNS	DJKA																				√ (Pengelola Database)		√	Dit. LLAJA
348	HELPY JAYANTIAR SITUMORANG, S.Kom	19910901 202012 2 014	PNS	DJKA																						√	Dit. LLAJA
349	ISTY WAHYU ERLINA, S.Stat	19980417 202012 2 008	PNS	DJKA																			√			√	Dit. LLAJA
350	NABILAH IHSANI, S.Sos.	19970116 202012 2 006	PNS	DJKA																						√	Dit. LLAJA
351	RIZKY SUZENNO, SKom	19940301 202012 1 005	PNS	DJKA					√	√					√							√ (QRMO)	√			√	Dit. LLAJA
352	AHMAD RONALDY SAPUTRA, S.Stat	19970425 202012 1 003	PNS	DJKA			√																			√	Dit. LLAJA
353	PRIMA LESTARI HANIF, S.Si.	19960922 202012 2 006	PNS	DJKA																		√ (QRMO)				√	Dit. LLAJA
354	IMAM ALI RAMADHAN, S.IP	19900805 202012 1 007	PNS	DJKA																						√	Dit. LLAJA
355	AHMAD SUBKAN FATAH MAHFUZD, S.IP.	19940109 202012 1 004	PNS	DJKA																		√ (QRMO)		√ (Barjas)		√	Dit. LLAJA
356	MUHAMMAD AKBAR, S.I.Pus.	19940408 202012 1 007	PNS	DJKA																						√	Dit. LLAJA
357	RIKY REZAMIL, S.Kom.	19950505 202012 1 006	PNS	DJKA				√																		√	Dit. LLAJA
358	AFFANDA ABDUL HAKIM AMINULLAH, S.Stat.	19960623 202012 1 002	PNS	DJKA																						√	Dit. LLAJA
359	MOHAMAD TRI RAMDHANI, S.Kom.	19900406 202012 1 005	PNS	DJKA																					√	√	Dit. LLAJA
360	RAY PRABOWO SULISTYANTO, S.Kom.	19860707 202012 1 008	PNS	DJKA				√		√																√	Dit. LLAJA
361	MASYKUR HIDAYATULLAH, S.Hum.	19960514 202012 1 001	PNS	DJKA																		√ (QRMO)		√ (Public Speaking)		√	Dit. LLAJA
362	YOSUA SINTANG, S.T	19940628 202012 1 004	PNS	DJKA																						√	Dit. Prasarana Perkeretapian
363	CHOLIS SARJAN, S.T.	19940822 202012 1 004	PNS	DJKA				√		√															√	√	Dit. Prasarana Perkeretapian
364	HAMIL FIQRI SULAIMAN, S.Kom.	19940516 202012 1 006	PNS	DJKA				√														√ (QRMO)				√	Dit. Prasarana Perkeretapian
365	ROBBY NUR RIANSYAH, S.Kom	19900827 202012 1 002	PNS	DJKA																						√	Dit. Prasarana Perkeretapian
366	REMA INSANANDARI, S.Kom.	19960213 202012 2 001	PNS	DJKA											√									√ (Digital Marketing)		√	Dit. Prasarana Perkeretapian
367	MOCH. ERDIANA PUTRA BAKTI, S.T.	19950402 202012 1 003	PNS	DJKA					√	√																√	Dit. Prasarana Perkeretapian
368	TITIS PRASETYO, S.Kom.	19970821 202012 1 004	PNS	DJKA					√	√																√	Dit. Prasarana Perkeretapian
369	LAILA TRI NUR HAYATI, S.I.Kom.	19920515 202012 2 006	PNS	DJKA																				√ (MC)		√	Dit. Prasarana Perkeretapian
370	VERRY AMELYA MOKA, S.Si	19930822 202012 2 008	PNS	DJKA				√		√																√	Dit. Prasarana Perkeretapian
371	MENTARI NIDAMTI, S.T	19950119 202012 2 011	PNS	DJKA					√	√														√ (Bahasa Inggris)		√	Dit. Prasarana Perkeretapian
372	ARY WIDAH WIJAYANITA, S.Kom.	19930420 202012 2 011	PNS	DJKA																						√	Dit. Prasarana Perkeretapian
373	ANNAM ADAM PRAKOSO, S.Stat.	19930910 202012 1 006	PNS	DJKA																		√ (QRMO)	√			√	Dit. Prasarana Perkeretapian
374	VINSENSIA SIPRIANA ZEGA, S.Kom.	19970920 202012 2 004	PNS	DJKA																						√	Dit. Prasarana Perkeretapian
375	CANDRA MARNO, A.Md. KA	19910607 202012 1 004	PNS	DJKA																						√	Dit. Prasarana Perkeretapian
376	FADHILAH ABDI AKBAR, A.Md.KA	19951124 202012 1 004	PNS	DJKA																						√	Dit. Prasarana Perkeretapian
377	TRI TUNGGAL DEWI ARYANTI, A.Md.KA	19880531 202012 2 003	PNS	DJKA																		√ (QRMO)				√	Dit. Prasarana Perkeretapian
378	IBNU PRAKOSO, A.Md.KA	19960721 202012 1 003	PNS	DJKA																						√	Dit. Prasarana Perkeretapian
379	RIAN SESTIANTO, A.Md.KA	19921122 202012 1 006	PNS	DJKA																		√ (QRMO)				√	Dit. Prasarana Perkeretapian
380	MOHAMAD RIZKI HARIADI, A.Md. KA	19960204 202012 1 001	PNS	DJKA																		√ (QRMO)				√	Dit. Prasarana Perkeretapian
381	JOSINTYA RILA PITUAPARA, A.Md.KA	19930724 202012 2 002	PNS	DJKA																						√	Dit. Prasarana Perkeretapian
382	AGUNG SUNDARA, A.Md.KA	19880714 202012 1 006	PNS	DJKA																						√	Dit. Prasarana Perkeretapian
383	HOTNATANAEL MARULITUA MALAU, S.T.	19941126 202012 1 008	PNS	DJKA		√																				√	Dit. Sarana Perkeretapian
384	MAHENDRA WISNU BUWANA, S.T.	19901006 202012 1 005	PNS	DJKA		√																				√	Dit. Sarana Perkeretapian
385	HAEZAH QISTHINA, S.P.W.K.	19960501 202012 2 015	PNS	DJKA																						√	Dit. Sarana Perkeretapian
386	ERNA SOELINA, S.M.	19890901 202012 2 005	PNS	DJKA																		√ (QRMO)		√ (Manaj Talenta)		√	Dit. Sarana Perkeretapian
387	ARION JANUAR PRASASTI, S.T.	19910121 202012 1 006	PNS	DJKA		√																√ (QRMO)				√	Dit. Sarana Perkeretapian
388	MUHAMMAD ANDRI, S.T.	19941027 202012 1 002	PNS	DJKA		√																				√	Dit. Sarana Perkeretapian
389	DITO AFANDI, S.T.	19870112 202012 1 001	PNS	DJKA																						√	Dit. Sarana Perkeretapian

No	Nama	NIP	STATUS	UNIT	KOMPETENSI TEKNIS														KOMPETENSI UMUM/MANAJERIAL							Jabatan Fungsional CPNS dan PPPK	Unit Kerja
					Auditor	Inspektur Sarana	Inspektur Prasarana	Penguji Jalbang	Penguji Fasop	Pengaji Prasarana	Pengaji Sarana	Assesor	PPNS	Diklat Teknis (Diklat Perkeretapian)	Diklat Kecakapan SDM (PPKA)	ANS K3	Diklat Teknologi LRT Gol 3	Diklat Keren Gepeng	Antikorupsi	Kepemimpinan	Penyelenggaraan Jalbang	Manajemen Risiko (QRMP)/QRMA/QRMO	Adit KPSLI	Diklat Manajerial (Bahasa Inggris, Risk, BIM, Database, MSP, dll)	PPK Tipe C		
390	INE DAMAYANTI, S.IP	19960907 202012 2 008	PNS	DJKA																		√ (QRMO)				√	Dit. Sarana Perkeretapian
391	DANIEL MARTINUS TOGIHAS, S.P.W.K	19970915 202012 1 006	PNS	DJKA																						√	Dit. Sarana Perkeretapian
392	ANITYA PUTRI, S.P.W.K	19970124 202012 2 007	PNS	DJKA																		√ (QRMO)				√	Dit. Sarana Perkeretapian
393	ADHITYA BAGAS PRATAMA, A. Md. T	19980302 202012 1 001	PNS	DJKA																				√ (Manaj Proyek)		√	Dit. Sarana Perkeretapian
394	ALFIRA BERLIANTI, A.Md. KA	19971215 202012 2 005	PNS	DJKA																						√	Dit. Sarana Perkeretapian
395	RIKA FARDIYANTI, A.Md.KA	19910330 202012 2 001	PNS	DJKA																						√	Dit. Sarana Perkeretapian
396	OKI KURNIAWAN, A.Md.T	19981011 202012 1 003	PNS	DJKA																						√	Dit. Sarana Perkeretapian
397	SARA HAYATI, A.Md. KA	19950321 202012 2 006	PNS	DJKA																						√	Dit. Sarana Perkeretapian
398	DESMON EVENT BUTAR BUTAR, S.I.Kom.	19981219 202012 1 008	PNS	DJKA																						√	Setditjen Perkeretapian
399	RENALDY APREVIA LUTFI, S.Stat.	19950405 202012 1 006	PNS	DJKA																		√ (QRMO)				√	Setditjen Perkeretapian
400	TRI RAHMIATI, S.S.	19871029 202012 2 002	PNS	DJKA																		√ (QRMO)		√ (Bahasa Inggris)		√	Setditjen Perkeretapian
401	MAULANA ERWINSYAH PUTRA, S.T.	19930629 202012 1 004	PNS	DJKA									√									√ (QRMO)				√	Setditjen Perkeretapian
402	YULIANTO, S.Kom	19890720 202012 1 007	PNS	DJKA																				√ (Manaj Risiko)		√	Setditjen Perkeretapian
403	ANISA NUR ARIFAH, S.Kom.	19951017 202012 2 014	PNS	DJKA																		√ (QRMO)				√	Setditjen Perkeretapian
404	TIARA FITRI BERLIAN, S.Kom.	19960225 202012 2 010	PNS	DJKA																				√ (Manaj Aset)		√	Setditjen Perkeretapian
405	ARDIAN BAGUS WIDIYANTORO, S.Kom	19900728 202012 1 006	PNS	DJKA																		√ (QRMO)				√	Setditjen Perkeretapian
406	BANANG SEPTIAN WIBANARKO, S.Si	19890926 202012 1 005	PNS	DJKA																		√ (QRMO)				√	Setditjen Perkeretapian
407	IIN INTAN ULIANAH, S.Kom	19950627 202012 2 005	PNS	DJKA																		√ (QRMO)				√	Setditjen Perkeretapian
408	CHINDY CLAUDIA PASKAHA SIANTURI, S.I.Pus	19950418 202012 2 008	PNS	DJKA																		√ (QRMO)				√	Setditjen Perkeretapian
409	PRADESTYA HAYU PURBOSINI, S.S.	19950407 202012 2 006	PNS	DJKA																						√	Setditjen Perkeretapian
410	KHOIRU NIKMAH, S.IP.	19951205 202012 2 005	PNS	DJKA																				√ (MC)		√	Setditjen Perkeretapian
411	NABILA NAQIYA NAZDA, S.T	19981001 202203 2 015	PNS	DJKA																		√ (QRMO)				√	BTP Kelas I Bandung
412	YANUARINI TRI KUSWANTI	198301222009122003	PNS	DJKA																		√ (QRMO)	√		√		Setditjen Perkeretapian
413	HANIF JUNIAR AHMAD	19970403202012 1003	PNS	DJKA																			√	√ (Public Speaking, Desain Graphic)			Setditjen Perkeretapian
414	HERMAN SITORUS	198601272020121002	PNS	DJKA		√																	√				Dit. Sarana Perkeretapian
415	GAGANG ENDRAYANTO	19880408 2010121003	PNS	DJKA																		√ (QRMO)	√				Dit. LLAJA
416	HARRY PRIHANTYO	19880417 2010121006	PNS	DJKA			√															√ (QRMO)	√				Dit. LLAJA
417	CITY OWI CAHYANI	19960626 2020122015	PNS	DJKA																		√ (QRMO)	√				BTP Kelas I Bandung
418	BAYU NUR KHOLIS	19831218 2007121001	PNS	DJKA			√																√				BTP Kelas I Semarang
419	YULI NUGRAHINI	19800705 2006042001	PNS	DJKA																			√				BTP Kelas I Surabaya
420	DWI NADA NIKMATUM	19810525 2010122002	PNS	DJKA																		√ (QRMO)	√				Balai Perawatan Perkeretapian
421	RAMA BHAKTI WIBAWA	19960715 2020121004	PNS	DJKA				√		√			√											√ (Public Speaking)			Dit. Prasarana Perkeretapian
422	BUDI FEBRIAN	19740224 199703 1 003	PNS	DJKA			√					√	√									√ (QRMA)					Dit. Kesdamatan Perkeretapian
423	YENY RACHMAN	19881006 2010122004	PNS	DJKA	√							√	√														Dit. Kesdamatan Perkeretapian
424	DANY KRISTIAN PAAYS	19751111 2009121003	PNS	DJKA			√						√													√	BTP Kelas I Jakarta
425	IHSANUL AMALIA	19920908 2020122004	PNS	DJKA									√														Balai Pengujian Perkeretapian
426	RESTIANA ULFA	19970504 2020122004	PNS	DJKA									√														BTP Kelas I Bandung
427	SUKRIANSYAH	198111222009121002	PNS	DJKA			√						√														BTP Kelas I Semarang
428	PRAYITNO	19770911 2009121001	PNS	DJKA									√														Balai Perawatan Perkeretapian
429	EKO PRASETYA	19810518 2010121001	PNS	DJKA									√														Balai Perawatan Perkeretapian
430	MUTHIA RIFQAH	19960328 2020122002	PNS	DJKA									√														BPKAD Sumatera Selatan
431	AKHMAD IPANDY	19880616 2020121008	PNS	DJKA									√									√ (QRMO)					BPKAD Sumatera Selatan
432	DWI INDRIYANI	19871205 2020122009	PNS	DJKA									√									√ (QRMO)					BPKAD Sulawesi Selatan
433	M. SHUFIYAH RONI AL MUBAROK	19940724 2020121003	PNS	DJKA									√									√ (QRMO)					BPKAD Sulawesi Selatan
434	SITI MA'SHUMAH	19980510 2020122002	PNS	DJKA							√			√								√ (QRMO)					BTP Kelas I Semarang
435	RIZAL SYAM ARIFIN	19961105 2023031013	PNS	DJKA										√													Balai Pengujian Perkeretapian
436	MUHAMMAD NUR SALIM	19921122 2020121004	PNS	DJKA				√		√				√													Balai Pengujian Perkeretapian
437	MA'ARIF AZIZ	19950531 2020121007	PNS	DJKA		√								√								√ (QRMO)					Dit. Sarana Perkeretapian
438	HAFIDH ADITYA NUGROHO	19971104 2020121002	PNS	DJKA										√													BPKAD Sulawesi Selatan
439	GHORA VIRA MADYA JALA	19970512 2020121008	PNS	DJKA										√													BPKAD Sulawesi Selatan
440	GEMA AKBAR PUTRA PAMUNGKAS	19930615 2020121009	PNS	DJKA										√													Balai Pengujian Perkeretapian
441	EGA CANYA PRAMULA	19930908 2020121002	PNS	DJKA										√													Balai Perawatan Perkeretapian
442	ALDI B.I. HAMDANI	19940605 2020121005	PNS	DJKA										√								√ (QRMO)					BTP Kelas I Medan
443	AGLAIA PUTRI WIDYA	19980808 2020122010	PNS	DJKA										√													BTP Kelas II Palembang
444	FAJAR RAMADHAN		PNS	DJKA																		√ (QRMO)					BTP Kelas I Jakarta

No	Nama	NIP	STATUS	UNIT	KOMPETENSI TEKNIS														KOMPETENSI UMUM/MANAJERIAL							Diberikan Pengalihan (DHC) dan PPPK	Unit Kerja
					Auditor	Inspektur Senior	Inspektur Pratama	Penguji Jalbeng	Penguji Fasop	Penguji Prasarana	Penguji Sarana	Asesor	PPNS	Dikdat Teknis Khusus Perkeretaapian	Dikdat Kecakapan SDM (PPKA)	Dikdat KI	Dikdat Teknologi LRT Gol 3	Dikdat Juruta Cepat	Arsiparis	Pranggamadan	Penyetaraan Jalbeng	Manajemen Risiko (QRMP/QRMA/QRMO)	Ahli K3PKU	Dikdat Bahasa Jurnal (Manaj, Teknis, Bhs, Database, MPI, dll)	PPK Tipe C		
445	FLORENTINA RIAN YULITA		PNS	DJKA																		√ (QRMO)					BPKAR Sumatera Selatan
446	MOZAROTUL ALIYAH		PNS	DJKA																		√ (QRMO)					Balai Pemantau Perkeretaapian
447	YONNE SYAFITRI HARAHAP		PNS	DJKA																		√ (QRMO)					Setditjen Perkeretaapian
448	LUDY SAPUTRA		PNS	DJKA																		√ (QRMO)					Setditjen Perkeretaapian
449	MEGA IZMARAYA		PNS	DJKA		√																√ (QRMO)					BTP Kelas II Palembang
450	MUHAMAD RIYANDORA		PNS	DJKA																		√ (QRMO)					BTP Kelas I Bandung
451	NADIA BALKIS		PNS	DJKA																		√ (QRMO)					Setditjen Perkeretaapian
452	PRAPITA GNESI RUSDIANA		PNS	DJKA																		√ (QRMO)					BTP Kelas II Padang
453	RECHTY DWI RETNOWATY		PNS	DJKA																		√ (QRMO)					Setditjen Perkeretaapian
454	SIGIT SUHMORO		PNS	DJKA																		√ (QRMO)					Setditjen Perkeretaapian
455	TAUFIQ HIDAYAT SUWARSONO		PNS	DJKA																		√ (QRMO)					Dit. Prasarana Perkeretaapian
456	WIDYA DAMAYANTI		PNS	DJKA																		√ (QRMO)					BTP Kelas I Jakarta
457	YURNALIZA		PNS	DJKA																		√ (QRMO)					Setditjen Perkeretaapian
458	ERWAN WAHYUDIANTO		PNS	DJKA								√										√ (QRMO)			√		Dit. Prasarana Perkeretaapian
459	ERNI DWI ASTUTI		PNS	DJKA	√																	√ (QRMO)			√		Setditjen Perkeretaapian
460	FAUZIA AMIENI		PNS	DJKA																		√ (QRMO)					BTP Kelas I Surabaya
461	FEBRIA SUCI ULANDARI		PNS	DJKA																		√ (QRMO)					Setditjen Perkeretaapian
462	IKA OKTAVIA SETYARINI		PNS	DJKA				√		√												√ (QRMO)					BTP Kelas I Surabaya
463	LIDIA WATI HUTAGALUNG		PNS	DJKA																		√ (QRMO)					Dit. LLAKA
464	MUHAMMAD SOFYAN HADI MUSTOFA		PNS	DJKA																		√ (QRMO)		√ (Talenta)			Setditjen Perkeretaapian
465	NIA NUR AMNISA		PNS	DJKA																		√ (QRMO)					Dit. Prasarana Perkeretaapian
466	RIDLWAN IMAM RAUTYAQIH		PNS	DJKA																		√ (QRMO)					Dit. Prasarana Perkeretaapian
467	SATRIO HARIMURTI		PNS	DJKA			√					√										√ (QRMO, QRMA)			√		Dit. LLAKA
468	SRI RAHAYU		PNS	DJKA																		√ (QRMO)					Setditjen Perkeretaapian
469	WAHYU PUJA PRADNYA		PNS	DJKA																		√ (QRMO)					Dit. Prasarana Perkeretaapian
470	WIDYA MAUFALMIDA		PNS	DJKA				√		√												√ (QRMO)					Dit. Prasarana Perkeretaapian
471	A. ZAKY		PNS	DJKA			√															√ (QRMA)		√ (Talenta)			Setditjen Perkeretaapian
472	ADHE ANGGAPERMANA		PNS	DJKA			√															√ (QRMA)					BTP Kelas I Surabaya
473	FITRI ANTARA		PNS	DJKA		√																√ (QRMA)					BTP Kelas I Bandung
474	MADE HAPPY MURTIKI		PNS	DJKA								√										√ (QRMA)					BTP Kelas I Bandung
475	SANDE RITIN IRAWAN		PNS	DJKA			√															√ (QRMA)			√		Dit. LLAKA
476	THERESIA FAJAR PURBOSARI		PNS	DJKA																		√ (QRMA)					Dit. Prasarana Perkeretaapian
477	UMAR PRIONO ADJI		PNS	DJKA			√															√ (QRMA)		√ (Bahasa Inggris)			BTP Kelas II Palembang
478	ANDRY MORIN SIMATUPANG		PNS	DJKA																		√ (QRMA)					BTP Kelas I Medan
479	EKO BUDI SANTOSO		PNS	DJKA			√															√ (QRMA)					BTP Kelas I Semarang
480	FAJAR TRI PAMBUDI		PNS	DJKA																		√ (QRMA)					BTP Kelas I Medan
481	GALIH PRANANDA		PNS	DJKA			√					√										√ (QRMA)					Dit. LLAKA
482	LUSIAWAN JATI		PNS	DJKA																		√ (QRMA)					Dit. Prasarana Perkeretaapian
483	MUHAMMAD CHUSNUL		PNS	DJKA																		√ (QRMA)					BTP Kelas I Medan
484	MUHLIS HANGGANI CAHAH		PNS	DJKA																		√ (QRMA)			√		BTP Kelas I Medan
485	REINALDO BUTAR BUTAR		PNS	DJKA			√									√						√ (QRMA)		√ (Manaj Krisis)			BTP Kelas II Palembang
486	TONGGAM FERDINAND LEONARDO		PNS	DJKA		√						√				√						√ (QRMA)		√ (PSA)			BTP Kelas I Surabaya
487	FADLIANSYAH		PNS	DJKA																		√ (QRMA)					Dit. Prasarana Perkeretaapian
488	ARIF ANWAR		PNS	DJKA			√										√					√ (QRMP)		√ (PIM Tk.II)			Dit. LLAKA
489	SUPANDI		PNS	DJKA		√						√										√ (QRMP)		√ (PIM Tk.II)			BTP Kelas II Padang
490	Catur Wicaksono	197004191995031001	PNS	DJKA		√						√				√						√ (QRMP)					Dit. Sarana Perkeretaapian
491	Hendriadi	197807291994031003	PNS	DJKA			√									√						√ (QRMP)		√ (PIM Tk.II)			Dit. Keselamatan Perkeretaapian
492	Yohn Ferry	197206201992011001	PNS	DJKA			√					√				√											DJKA Keselamatan Perkeretaapian
493	Aslinawani Siralt	197105111993032000	PNS	DJKA			√					√				√											BTP Kelas II Padang
494	Ni Made Sri Budi Utami	199607222019022002	PNS	DJKA			√									√						√ (QRMO)					Dit. LLAKA
495	Andika Pranandhia	199204242019021005	PNS	DJKA	√											√											Dit. Keselamatan Perkeretaapian
496	SITI SARAYA DWI AMALINA	198706152019022002	PNS	DJKA	√							√				√								√ (Analis Kompetensi)			Dit. Keselamatan Perkeretaapian
497	Rezha Muradhonadv	198211012009121004	PNS	DJKA			√					√				√						√ (QRMA)			√		Dit. Keselamatan Perkeretaapian
498	Putri Ayuning Mulya	198908212019092003	PNS	DJKA				√		√						√											Dit. Keselamatan Perkeretaapian
499	Sarwo De Hart	197809242009011007	PNS	DJKA								√				√									√		BTP Kelas I Jakarta
500	Sa'diyah Utami	199807292020122016	PNS	DJKA												√											BTP Kelas I Jakarta
501	Iis Sumiati	198410062009122002	PNS	DJKA												√											BTP Kelas I Bandung

No	Nama	NIP	STATUS	UNIT	KOMPETENSI TEKNIS													KOMPETENSI UMUM/MANAJERIAL								Jabatan Fungsional QHSE dan PPNPN	Unit Kerja
					Auditor	Inspektur Senior	Inspektur Prasarana	PengujI Jembatan	Pengujl Kapal	Pengujl Prasarana	Pengujl Senior	Assesor	PPNPN	DiNat Teknis Kinerja Perkeretapian	DiNat Kecakapan SDM (PPNA)	AMDK3	DiNat Teknologi LRT GoA 3	DiNat Kereta Cepat	Arsiparis	Kepegawaian	Penyelarasan Bidang	Manajemen Risiko (QRMP/QRMA/QRMO)	Ahli K3UM	Officer Manajerial (Mutasi,Kriteria, GLU, Database, SAP, dll)	PPK Tipe C		
502	Sigit Purnomo	197412032012121001	PNS	DJKA												√											BTP Kelas I Semarang
503	Muhammad Arif Hidayatullah	198703052010021002	PNS	DJKA												√											Dit. Prasarana Perkeretapian
504	Erwin Hegratio	197607202012121005	PNS	DJKA												√											Balai Pengujian Perkeretapian
505	RUDI DAMANIK	196705011996031001	PNS	DJKA		√						√										√ (QRMP)					Dit. Sarana Perkeretapian
506	ARYO [illegible]NGGA	198406092009121003	PNS	DJKA		√																√ (QRMA)		√ (Manaj Proyek, PKP)			BTP Kelas I Medan
507	ROESIANTO HENDRO PUTRO	197809252008121001	PNS	DJKA		√																					Setditjen Perkeretapian
508	SONYANTO SEPFRIMADA	198009062010121005	PNS	DJKA		√																					Dit. LLAKA
509	ALI NURSETO	199506112020121004	PNS	DJKA		√																					Dit. Sarana Perkeretapian
510	AMEE RIFAI	197704162010121001	PNS	DJKA		√	√															√ (QRMO)					Dit. LLAKA
511	ARIEF HERNOWO	199511182020121009	PNS	DJKA		√																					Dit. Sarana Perkeretapian
512	ARIFIN BUDIMAN	199301242020121002	PNS	DJKA		√																					Dit. Sarana Perkeretapian
513	CANDRA BANGUN	198405032006041001	PNS	DJKA		√																					Dit. LLAKA
514	DEKRI FAKTI BOWO	198810192020121001	PNS	DJKA		√																		√ (Barjas)			Dit. Sarana Perkeretapian
515	DONI ADI KUNCORO	198203052009121002	PNS	DJKA		√																√ (QRMO)					Dit. Sarana Perkeretapian
516	HANIBAL NURIL HAKIM	199308142020121001	PNS	DJKA		√																					Dit. Sarana Perkeretapian
517	HOTMA SAHALA TUA HUTAGALUNG	197109072006041002	PNS	DJKA		√																					Dit. Sarana Perkeretapian
518	INDRA NOFRESA	197811072003121003	PNS	DJKA		√																					Dit. Sarana Perkeretapian
519	IVANA	198008052006042001	PNS	DJKA		√																					Dit. Sarana Perkeretapian
520	MOHAMMAD IVAN YANUAR	199401032020121013	PNS	DJKA		√																					Dit. Sarana Perkeretapian
521	MUHAMMAD IMSA RAMADHONY	196705262010121006	PNS	DJKA		√																					Dit. LLAKA
522	NUR CHOLIS	196210222006121009	PNS	DJKA		√																					Dit. Sarana Perkeretapian
523	AWANG MEINDRA	198105162002121003	PNS	DJKA			√					√															Dit. LLAKA
524	JOKO PRANOTO	196603041990031002	PNS	DJKA			√															√ (QRMP)					Dit. LLAKA
525	PUTU SUMARJAYA	198310292006041002	PNS	DJKA			√																				BTP Kelas I Semarang
526	RODE PAULUS GAGOK PUDIJONO	197811091999031002	PNS	DJKA			√																				BPKAR Sumatera Selatan
527	SOFIA AVIANTIE	196708151994032001	PNS	DJKA			√					√															Dit. Keselamatan Perkeretapian
528	YENNESI ROSITA	196607161995032001	PNS	DJKA			√																				Setditjen Perkeretapian
529	DIAN ANGGRAENI	198203032008122003	PNS	DJKA			√																				Setditjen Perkeretapian
530	EBEN TORSA TONGAM S.	198405282007121003	PNS	DJKA			√																				BPKAR Sumatera Selatan
531	RACHMAT DALU	197006261993031001	PNS	DJKA			√															√ (QRMA)					BPKA Sulawesi Selatan
532	YAYAT HENDAYANA	198101142007121001	PNS	DJKA			√																				Setditjen Perkeretapian
533	ACHMAD AFFANDY	198711052010011003	PNS	DJKA			√																				BPKA Sulawesi Selatan
534	ADE CHANDRA	198806262012031013	PNS	DJKA			√															√ (QRMO)					BTP Kelas II Padang
535	ADITIA FIRMANSYAH	198903292010121001	PNS	DJKA			√																				Dit. LLAKA
536	BEJO PRIYONO	196809142013031001	PNS	DJKA			√																				Dit. Keselamatan Perkeretapian
537	DEDY PUPUT PURBAYA	198812082015031003	PNS	DJKA			√															√ (QRMO)				√	BTP Kelas I Surabaya
538	FAJRI ALBANNA	198807112008041001	PNS	DJKA			√																	√ (Ahli Rantp. Tertentu)			BPKAR Sumatera Selatan
539	HERY PRIYADI	198212292013031001	PNS	DJKA			√																				Dit. Keselamatan Perkeretapian
540	ICHSAN WAHAMADI KUSUMAH	199208172016021003	PNS	DJKA			√																				Dit. Keselamatan Perkeretapian
541	JONNY FRANHUT SITOMPUL	198110282009121001	PNS	DJKA			√																				BTP Kelas I Jakarta
542	KUKUH SETYO PRIYANTO	198011032010121001	PNS	DJKA			√																			√	Dit. LLAKA
543	LURIANTO LUKITO	197502112014091002	PNS	DJKA			√															√ (QRMO)				√	BTP Kelas I Surabaya
544	M ZAKI ALAM Y	198712342010121002	PNS	DJKA			√		√			√														√	BTP Kelas I Jakarta
545	MOCH. ATMA ADHYAKSA	198703132010121005	PNS	DJKA			√															√ (QRMO)					Dit. LLAKA
546	MUHAMAD ZAENUDIN	196908312010121003	PNS	DJKA			√															√ (QRMA)					Dit. Keselamatan Perkeretapian
547	MUHAMMAD MAULANA YUSUF	196710082009121003	PNS	DJKA			√																				BTP Kelas II Palembang
548	NURUL HIDAYATI	196908082010092007	PNS	DJKA			√																				Dit. Keselamatan Perkeretapian
549	OSIO HOTMARTUA SISYANTO LUMBANBATU	198305302008031001	PNS	DJKA			√					√															Balai Pengujian Perkeretapian
550	R REZA MAULLANA MAHRIBI	198303162009121001	PNS	DJKA			√															√ (QRMA)					BTP Kelas I Semarang
551	RAMOS TAUFIQ N	197603072009121002	PNS	DJKA			√																			√	BTP Kelas I Jakarta
552	RENY HARWANTI	198710222010122001	PNS	DJKA			√																				Dit. LLAKA
553	RIEKI MEIDI YUWANA	198405152010121001	PNS	DJKA			√															√ (QRMO)					Dit. Prasarana Perkeretapian
554	RINTHO F. LUMBAN GAOL	198111192006041001	PNS	DJKA			√																				BTP Kelas I Jakarta
555	RIO APRILLIANA	198104172008122001	PNS	DJKA			√																				Setditjen Perkeretapian
556	RUDI ARYADI	197712152006041016	PNS	DJKA			√																				BPKAR Sumatera Selatan
557	SOFYAN HIDAYAT RANGKUTI	198202082010121002	PNS	DJKA			√																				Dit. Keselamatan Perkeretapian
558	SUSIANA	197105182002072001	PNS	DJKA			√																				BTP Kelas I Bandung

No	Nama	NIP	STATUS	UNIT	KOMPETENSI TEKNIS														KOMPETENSI UMUM/MANAJERIAL								Jabatan Fungsional (PNS) dan PPPK	Unit Kerja
					Auditor	Inspektur Senior	Inspektur Prasarana	Penguji Jalbang	Penguji Fasop	Penguji Prasarana	Penguji Sarana	Asesor	PPNS	Diklat Teknis Khusus Perkeretapian	Diklat Kecakapan SDM (PPKA)	Ahli K3	Diklat Teknis/ LRT Gol 3	Diklat Kesela Cepat	Analisis	Kepegawaian	Penyusunan Jabatan	Manajemen Risiko (QRMP/QRMA/QRMO)	ANK (CPU)	Diklat Manajerial (Bahasa Inggris, SLU, Database, MR, dll)	PPK Tipe C		
559	TITO AJI YANTO	198512092009121006	PNS	DJKA			√				√																	Dit. LLAJA
560	WASKITO ADJIJO PRABOWO	198111292009123001	PNS	DJKA			√																					BTP Kelas I Bandung
561	YASER ARAFAT	199208MM2D1041ZD02	PPPK	DJKA			√																					Dit. Keselamatan Perkeretapian
562	ARIEF YUNIARTO	19830606 202062 2 003	PPPK	DJKA							√																	Balai Pengujian Perkeretapian
563	SEPTIAN ILHAM MULFAHMI	19920911 202012 1 001	PNS	DJKA							√																	Balai Pengujian Perkeretapian
564	RESTI KANDI SARI	19900829 202012 2 003	PNS	DJKA							√																	Balai Pengujian Perkeretapian
565	BAGUS AULIA SAPUTRO	19980820 202203 1 006	PNS	DJKA							√																	Balai Pengujian Perkeretapian
566	MOCH SYAWALUDDIN FATRA,	19950317 202012 1 003	PNS	DJKA							√													√ (Barjas)				Dit. Sarana Perkeretapian
567	DIAH FITRIANA PURWANINGSIH	19900427 202012 2 013	PNS	DJKA							√																	Dit. Sarana Perkeretapian
568	IQBAL RAMADHAN HARAHAP	19910415 202012 1 005	PNS	DJKA							√																	Dit. Keselamatan Perkeretapian
569	RIZKI NATHAN RAMADHANI	19981224 202210 1 001	PNS	DJKA							√																	BTP Kelas I Medan
570	GHINA DWI AQILA	19980113 202012 2 006	PNS	DJKA							√													√ (Bahasa Inggris)				BTP Kelas II Palembang
571	MUHAMMAD SYAHRUL FADHIL	19960127 202203 1 007	PNS	DJKA							√																	BTP Kelas II Palembang
572	RIO SANDI	19950121 202012 1 004	PNS	DJKA							√											√ (QRMO)						BTP Kelas II Padang
573	ANANDA AZARIA FEBRIANA	19970203 202203 2 017	PNS	DJKA							√																	BTP Kelas II Padang
574	NELY ULWIYATI	19950910 202203 2 014	PNS	DJKA							√																	BTP Kelas I Semarang
575	IRFAN YUSUF FEBRYAN	19960205 202203 1 003	PNS	DJKA							√																	BTP Kelas I Jakarta
576	CHANDRA SETIAWAN	19850912 202012 1 003	PNS	DJKA				√		√																		Balai Pengujian Perkeretapian
577	RIVA ADITYA PRATAMA	19940809 202012 1 003	PNS	DJKA				√		√																		Balai Pengujian Perkeretapian
578	NATASHA PRAMESTUTI WIDU	19940717 202012 2 013	PNS	DJKA				√		√																		Balai Pengujian Perkeretapian
579	ALI RAHMDANI	19980430 202203 1 006	PNS	DJKA				√		√																		Balai Pengujian Perkeretapian
580	MUHAMMAD AVIZ SHEMA	19961210 202012 1 009	PNS	DJKA					√	√												√ (QRMO)						Balai Pengujian Perkeretapian
581	MOCHAMAD ARIEF	19880227 202012 1 002	PNS	DJKA					√	√																		Balai Pengujian Perkeretapian
582	ACHMADI CHUSNUL KHULUQI	19901202 202012 1 001	PNS	DJKA					√	√																		Balai Pengujian Perkeretapian
583	WAHYU ARIEF KUSUMA	19970213 202012 1 019	PNS	DJKA						√												√ (QRMO)						Balai Pengujian Perkeretapian
584	SAFIDA REVINTA SARI	19970226 202262 2 014	PNS	DJKA					√	√																		Balai Pengujian Perkeretapian
585	FIKI SOLIHIN	19931115 202012 1 005	PNS	DJKA					√	√																		Dit. Prasarana Perkeretapian
586	DIAN EKAYANI	19960516 202012 2 010	PNS	DJKA				√		√																		Dit. Prasarana Perkeretapian
587	HIDAYAT ROFIUL HAKIM	19961107 202012 2 004	PNS	DJKA				√		√																		Dit. Prasarana Perkeretapian
588	M. AZIZUN HAKIM	19970719 202012 1 002	PNS	DJKA				√		√																		Dit. Prasarana Perkeretapian
589	YUSUF ARIF SETYO NUGROHO	19970824 202012 1 004	PNS	DJKA				√		√																		Dit. Prasarana Perkeretapian
590	ASIH CHANDRAWATY	19690515 202012 2 003	PNS	DJKA					√	√														√ (MC, Mbak Knik)				Dit. Prasarana Perkeretapian
591	IQBAL PUJI ABDAS	19970204 202012 1 007	PNS	DJKA					√	√																		Dit. Prasarana Perkeretapian
592	DAARLAT ELY ARYANTO	19921218 202183 1 004	PNS	DJKA				√		√												√ (QRMO)						Dit. Prasarana Perkeretapian
593	ALFIAN NURDIANSYAH	19940525 201401 1 001	PNS	DJKA				√		√																		Dit. Prasarana Perkeretapian
594	RIKY REZAMI.	19950505 202012 1 006	PNS	DJKA						√																		Dit. LLAJA
595	REZZA NOVIAN NOOR ROCHMAT	19921115 202012 1 004	PNS	DJKA				√		√																		Dit. LLAJA
596	DIMAS HADIPUTRA	19880920 200912 1 001	PNS	DJKA				√		√												√ (QRMO)					√	BTP Kelas I Surabaya
597	OKY PANJI SETYA DHARMA	19940929 202012 1 006	PNS	DJKA				√		√												√ (QRMO)						BTP Kelas I Surabaya
598	ROFI MURMAN	19971002 202203 1 006	PNS	DJKA				√		√																		BTP Kelas I Surabaya
599	SUARI SURYA	19941128 202203 1 007	PNS	DJKA				√		√																		BTP Kelas I Medan
600	WIBY ADHITYA PRAYOGA	19970617 202203 1 008	PNS	DJKA				√		√												√ (QRMO)						BTP Kelas I Medan
601	NABILA ALIFANI	19970202 202264 2 001	PNS	DJKA					√	√																		BTP Kelas I Medan
602	SEPTIANUS TODING RANTE	19920918 202012 1 006	PNS	DJKA				√		√																		BTP Kelas II Palembang
603	YUNITA ZULAYKA RAMIN	20000630 202209 2 002	PNS	DJKA				√		√																		BTP Kelas II Palembang
604	I WAYAN KRISNA WICAKSANA	19960525 202203 1 020	PNS	DJKA				√		√																		BTP Kelas II Palembang
605	KABUL	19880804 201503 1 004	PNS	DJKA				√		√																		BTP Kelas II Palembang
606	ISMAIL HASYIM WIBISONO	19980407 202203 1 009	PNS	DJKA					√	√																		BTP Kelas II Palembang
607	ALKAHFIAN RAMADHANI WIASANTO	19960204 202012 1 003	PNS	DJKA				√		√																		BTP Kelas II Palembang

No	Nama	NIP	STATUS	UNIT	KOMPETENSI TEKNIS													KOMPETENSI UMUM/MANAJERIAL								Bidang Fungsional Ciptaan PPNK	Unit Kerja
					Auditor	Inspektur Sarana	Inspektur Prasarana	Penguji Jalbang	Penguji Fasop	Penguji Prasarana	Penguji Sarana	Asesor	PPNS	Diklat Teknis Utama Perkeretapian	Diklat Kecakapan SDM (PPKA)	Ahli K3	Diklat Teknologi LRT dan A3	Diklat Kereta Cepat	Arsiparis	Keuangawalan	Pengelolaan Pelabuhan	Manajemen Risiko (QRMP/QRMA/QRMO)	Ahli BPBU	Diklat Manajerial (Manaj. Risiko, BLU, Database, K/L, dll)	PPK Tipe C		
606	IHAN ELYA PASHA	19820530 200712 2 001	PNS	DJKA	√							√															Dit. Keselamatan Perkeretaapian
608	SYERIN NISRINA TAHAN	19980419 200812 2 001	PNS	DJKA	√																						Dit. Keselamatan Perkeretaapian
610	NIKEN DWIKINASIH	19800120 201012 2 005	PNS	DJKA	√																						Dit. Keselamatan Perkeretaapian
611	AGUS TRIONO	19630827 200604 1 002	PNS	DJKA	√																						Dit. LLAKA
612	FARID BISDIYANTO	19660301200911001	PNS	DJKA	√																						Dit. LLAKA
613	LUSIAWAN JATI	19760719 200912 1 001	PNS	DJKA	√																						Dit. Prasarana Perkeretaapian
614	HENDARWAN RIANTO	19801121 201012 1 001	PNS	DJKA	√							√										√ (QRMO)					Dit. Sarana Perkeretaapian
615	RENDY FAJAR RIADI	19860611 200502 1 001	PNS	DJKA	√																						Dit. Sarana Perkeretaapian
616	RIRIS ARYANTI	19881216 201012 2 003	PNS	DJKA	√																	√ (QRMO)					Setditjen Perkeretaapian
617	FAKHRUL RIVAI HASIBUAN	19850609 200912 1 001	PNS	DJKA	√																						BTP Kelas I Jakarta
618	ANDI RASTYO WIBOWO	19870223 200804 1 001	PNS	DJKA								√															Balai Pengujian Perkeretaapian
619	FAIDRY SUKITO	19811231 201012 1 003	PNS	DJKA								√															Dit. Keselamatan Perkeretaapian
620	FARAH DINA EKA SYAMBIATI	19790701 201212 2 004	PNS	DJKA								√															BTP Kelas II Palembang
621	IMAM	19790720 201012 1 003	PNS	DJKA								√															Setditjen Perkeretaapian
622	RENDY FAJAR RIADI	19860611 200502 1 001	PNS	DJKA								√															Dit. Sarana Perkeretaapian
623	RISKA PRIWITA SARI	19871239 201012 2 003	PNS	DJKA								√															Dit. LLAKA
624	SHANTI MUMARANI	19731008 200912 2 001	PNS	DJKA								√															Balai Pengujian Perkeretaapian
625	SAPRUDIN PRAWIRA NEGARA	19690507 200701 1 003	PNS	DJKA								√														√	Balai Pengujian Perkeretaapian
626	ANDRIANSYAH SYAIFULLAH	19771202 200812 1 002	PNS	DJKA								√															Dit. Sarana Perkeretaapian
627	BASUKI RACHMAT	19720317 200604 1 001	PNS	DJKA								√															Dit. Keselamatan Perkeretaapian
628	ANDREAS POESDIRMO NOEGROHO	19730401 200604 1 013	PNS	DJKA								√										√ (QRMA)					Balai Pengujian Perkeretaapian
629	ASRI RATNA ANINDITA	19851127 200912 2 002	PNS	DJKA								√												√ (Manaj Stress)			Balai Pengujian Perkeretaapian
630	FAUZI BAAMIR	19840408 201012 1 003	PNS	DJKA								√										√ (QRMO)		√ (Talenta)	√		Setditjen Perkeretaapian
631	IMELDA KARTIKA SARI	19850128 200812 2 003	PNS	DJKA								√															Dit. Keselamatan Perkeretaapian
632	ADITYA NUGROHO	19820121 201503 1 002	PNS	DJKA								√										√ (QRMO)		√ (Barjas)			Setditjen Perkeretaapian
633	NUGROHO PURHADIOYO	19850306 200812 1 003	PNS	DJKA								√															Setditjen Perkeretaapian
634	SURYO CIPTO RAHARJO	19860818 201012 1 002	PNS	DJKA								√															Dit. LLAKA
635	HAFID ALFIAN	19981104202112101	PNS	DJKA														√									Dit. Keselamatan Perkeretaapian
636	YANUARTO WIDI NANDONO	19750127200701101	PNS	DJKA														Y									Dit. Prasarana Perkeretaapian
637	MUHAMMAD WILDAN AL BAIHAQI	19990826202112101	PNS	DJKA														√									Balai Pengujian Perkeretaapian
638	ALFIAN GANI FIRDAUS	19990112202112101	PNS	DJKA														√									BPKAD Sumatera Selatan
639	SEPTIAN WAHYU SISWANTO	19980911202203101	PNS	DJKA														Y									Dit. Prasarana Perkeretaapian
640	DODI SURYOPURNOMO	19831219201012102	PNS	DJKA														√									Setditjen Perkeretaapian
641	ELISABET CELIA GOLDIANINGTYAS	20001104202112301	PNS	DJKA														√									Dit. LLAKA
642	PUTRI IKHDINA NINGTYAS	20000619202112201	PNS	DJKA														√									Dit. Sarana Perkeretaapian
643	BASUS ALIJA SAPUTRO	19980820202203101	PNS	DJKA														√									Balai Pengujian Perkeretaapian
644	MUHAMMAD ILHAM AMANULLAH	20000107202112101	PNS	DJKA														√									Balai Pengujian Perkeretaapian
645	NADIF ABINAYA RAMADHANI	20001221202112301	PNS	DJKA														√									Dit. Sarana Perkeretaapian
646	RIZAL WAHYU PRATAMA	20000524202112101	PNS	DJKA														√									BTP Kelas I Jakarta
647	AGUS JUNAEDI	19770730 200312 1 002	PNS	DJKA																				√ (Barjas)	√		BTP Kelas I Medan
648	Ni Made Agni Febby Widandari	19960219 201903 2 002	PNS	DJKA																		√ (QRMO)		√ (BLU)			Setditjen Perkeretaapian
649	DIRANI YULIA	19970719 202012 2 009	PNS	DJKA																		√ (QRMO)		√ (MC)			Setditjen Perkeretaapian
650	MUHAMMAD RAYNALDI HARJA KUSUMA	20000528 202112 1 001	PNS	DJKA																				√ (Workshop Pelayanan)			Dit. LLAKA
651	MAULANDA	20000614 202112 2 001	PNS	DJKA																				√ (Workshop Pelayanan)			BPKA Sulawesi Selatan
652	CHERILLYA RISEL	20010624 202240 2 001	PNS	DJKA																				√ (Workshop Pelayanan)			BPKA Sulawesi Selatan
653	RIFKY KURNIA ADIPUTRA	20000804 202210 1 002	PNS	DJKA																				√ (Workshop Pelayanan)			BPKA Sulawesi Selatan
654	NOPPI REPPIYANTI, A.Md	19840205 200604 2 001	PNS	DJKA																				√ (AKPK)			Setditjen Perkeretaapian
655	SITI KHOIRIYAH, SE.	19681215 201212 2 010	PNS	DJKA																				√ (Hospitality)			BTP Kelas I Semarang
656	HADZAROTUL ALFIAH, AMD	19810907 201212 2 010	PNS	DJKA																				√ (Hospitality)			Balai Pervestasi Perkeretaapian
657	CHRYS ADRIAN BOLO, S.T.	19931103 202203 1 005	PNS	DJKA																				√ (Barjas)			BTP Kelas I Jakarta

No	Nama	NIP	STATUS	UNIT	KOMPETENSI TEKNIS														KOMPETENSI UMUM/MANAJERIAL								Nomor Pengadaan CPNS dan PPPK	Unit Kerja
					Auditor	Inspektur Sarana	Inspektur Prasarana	Penguji Jalbang	Penguji Fasop	Penguji Prasarana	Penguji Sarana	Asesor	PPNS	Diklat Teknis Khusus Perkeretaapian	Diklat Kecakapan SDM (PKSA)	Ahli K3	Diklat Teknologi LRT Kat 3	Diklat Kereta Cepat	Analisis Kebijakan	Kepegawaian	Penyelaras Jabfung	Manajemen Risiko (QRMP/QRMA/QRMO)	Auditor SMKP	Diklat Manajerial (Manaj.Krisis, Manaj. Talenta, Manaj. Risiko)	PPK Tipe C		
658	ELA ANGGRAINI SIPANGKAR, S.E	19931027 201612 2 001	PNS	DJKA																								Setditjen Perkeretaapian
659	DIAZ IDHAFIZA, A.Md.AK	20000316 202202 1 001	PNS	DJKA																								BTP Kelas I Jakarta
660	RIZKI QUILA SALSABILA, A.Md.Ak	19990910 202103 2 002	PNS	DJKA																								Dit. Prasarana Perkeretaapian
661	MUHAMMAD AYUB QORAA MUSTI, A. Md. Ak.	19980730 201801 1 001	PNS	DJKA																		√ (QRMO)						Setditjen Perkeretaapian
662	CLIFFSEA FAHMI AMRILLAH	19991126202112 2001	PNS	DJKA																		√ (QRMO)						BTP Kelas II Padang
663	M. KARIL SAHMA ATHARI	19951125202012 1004	PNS	DJKA																		√ (QRMO)		√ (Pengelola Database)				Balai Pemeriksa Perkeretaapian
664	REZKY BUDIMAN	19911222022031011	PNS	DJKA																		√ (QRMO)						BTP Kelas II Padang
665	SHAKINA DWI ARESTA PUTRI	19961203201812001	PNS	DJKA																		√ (QRMO)						Setditjen Perkeretaapian
666	WAHYU TIA ANDIKA	19970219202212 1005	PNS	DJKA																		√ (QRMO)						Dit. Keselamatan Perkeretaapian
667	ADITYA ASTIKA BRATA	19880124200912 1001	PNS	DJKA																		√ (QRMA)						BTP Kelas I Jakarta
668	DEFRI WIGUNAWAN	19870616201012 1005	PNS	DJKA																		√ (QRMA)						BTP Kelas I Bandung
669	HASTORO PAMULJUNG SUMBOWO	19820617200912 1002	PNS	DJKA																		√ (QRMA)						BTP Kelas I Bandung
670	HERLY NOVRIADI	19841127200912 1004	PNS	DJKA																		√ (QRMA)						BTP Kelas II Palembang
671	IHSAN TRI YANUAR	19880129201012 1003	PNS	DJKA																		√ (QRMA)			√			BTP Kelas I Bandung
672	VIDIA WIDIASTUTI W., S.AP.	19910117201503 2006	PNS	DJKA																				√ (Manaj Krisis)				BPKA Sulawesi Selatan
673	ADITYARINI MAHANDANI K. E., ST	19820109200912 2002	PNS	DJKA																		√ (QRMO)		√ (Manaj Krisis)				BTP Kelas I Semarang
674	MAGDALENA, S.SOS	19721105199803 2001	PNS	DJKA																				√ (Manaj Talenta)				BTP Kelas I Semarang
675	MUAYYADAH, SE	19790914200712 2001	PNS	DJKA																				√ (Manaj Talenta)				BPKA Sulawesi Selatan
676	GUNAWATI, SH., MH	19690828199103 2001	PNS	DJKA																				√ (BLU)				Balai Prasarana Perkeretaapian
677	SOESIANTO W. ADI PUTRO, SE	19780925201712 1001	PNS	DJKA																				√ (BLU)				Balai Pemeliharaan Perkeretaapian
678	IKMDA USWATUN KHASANAH, S.Si.	19980817202112 2002	PNS	DJKA																				√ (Pengelola Database)				Dit. Keselamatan Perkeretaapian
679	JUNIKO, A.Md.T	19960604202112 1006	PNS	DJKA																				√ (Pengelola Database, Desain Graphic)				Balai Pemeriksa Perkeretaapian
680	ATO SUMARDI	19811008201212 1005	PNS	DJKA																				√ (Pengelola Database)				BTP Kelas I Bandung
681	OKSATRIANI S.Sos	19831024201001 2019	PNS	DJKA																				√ (Manaj Risiko)				Setditjen Perkeretaapian
682	LISA PARAMITA HARDIITO, SE	19800930200912 2003	PNS	DJKA																				√ (Barjas)	√			Setditjen Perkeretaapian
683	AZIS OKTA RISMANA, ST	19871004201012 1002	PNS	DJKA																				√ (Barjas)				Dit. Prasarana Perkeretaapian
684	SUTRISNO, A.MD.KA	19900411201902 1001	PNS	DJKA																				√ (Barjas)				BPKAD Sumatera Selatan
685	CECEP BUNYAMIN, ST	19710428200701 1001	PNS	DJKA																				√ (Barjas)				BTP Kelas I Jakarta
686	ADZMITA UMIRA, A.Md	19940827201812 2001	PNS	DJKA																				√ (Penyusunan SMK)				Setditjen Perkeretaapian
687	DEWI AMALIA PUDIASIH	19921226201902 2001	PNS	DJKA																				√ (Penyusunan SMK)				Setditjen Perkeretaapian
688	RIO FREDIAN PRATAMA, A.Md.KA	19891221201902 1001	PNS	DJKA																				√ (Penyusunan SMK)				Balai Pemeriksa Perkeretaapian
689	FEBRYO SETYAWAN	19860225201012 1005	PNS	DJKA																				√ (Manaj Proyek)				Setditjen Perkeretaapian
690	ROBBY NUGRAHA	19980529202 1011003	PNS	DJKA																		√ (QRMO)						Dit. Keselamatan Perkeretaapian
691	RASIDI	19780611200912 1005	PNS	DJKA																		√ (QRMO)						Dit. Keselamatan Perkeretaapian
692	ADHI PRADONO	19841022009121003	PNS	DJKA																		√ (QRMO)						BTP Kelas I Surabaya
693	MUHAMMAD RIFKI BASUKI ADI	19920203202203 1007	PNS	DJKA																		√ (QRMO)						BTP Kelas II Padang
694	FUNNY AYU AGUSTIANI	19930612022032012	PNS	DJKA																		√ (QRMO)						Dit. Prasarana Perkeretaapian
695	HIKMAN SANDALAS	19930824202012 1003	PNS	DJKA																		√ (QRMO)						BTP Kelas I Jakarta
696	FAISAL ABDU	19980507202012 1003	PNS	DJKA																		√ (QRMO)						BTP Kelas I Medan
697	BAGUS DHARMA BHILAWA	19760416200912 1004	PNS	DJKA																		√ (QRMO)						BTP Kelas I Surabaya
698	DONNY WAHYUKUSUMADI	19790716201012 1002	PNS	DJKA																		√ (QRMO)						Setditjen Perkeretaapian
699	MUHAMMAD TAUFIK HIDAYAT	19850203200604 1001	PNS	DJKA																		√ (QRMO)		√ (Barjas)				BTP Kelas I Medan
700	PANDU WICAKSONO	19990817202012 1001	PNS	DJKA																		√ (QRMO)						Dit. Prasarana Perkeretaapian
701	DIA CAHAYA PUTRI	19941101201902 2004	PNS	DJKA																		√ (QRMO)						BTP Kelas II Padang
702	MAHARSIDEWI KUSHARYANI	19900903201902 2005	PNS	DJKA																		√ (QRMO)						Setditjen Perkeretaapian
703	MUHARNIA DEWI ADRIA	19880814202012 2002	PNS	DJKA																		√ (QRMO)						Dit. Keselamatan Perkeretaapian
704	ANGGI SANJAYA	19910128201902 1001	PNS	DJKA																		√ (QRMO)						BTP Kelas I Jakarta
705	AR BENNY SETIAWAN	19980209202012 1002	PNS	DJKA																		√ (QRMO)						BPKAD Sumatera Selatan
706	DITA AULIA KISTIANY	19990810202112 2001	PNS	DJKA																		√ (QRMO)						Dit. LLAKA
707	BUDIYONO	19820630201012 1001	PNS	DJKA																		√ (QRMO)						BTP Kelas I Semarang
708	ASNANI FRITA S	19701022200502 2001	PNS	DJKA																		√ (QRMA)						BTP Kelas I Bandung
709	MUHAMMAD RIFKY ARIANSYAH	19940502201612 1001	PNS	DJKA																		√ (QRMA)						BTP Kelas I Jakarta

No	Nama	NIP	STATUS	UNIT	KOMPETENSI TEKNIS														KOMPETENSI UMUM/MANAJERIAL								Jabatan Fungsional CPNS dan PPPK	Lokasi Kerja
					Auditor	Inspektur Senama	Inspektur Prasarana	Penguji Jalan	Penguji Jembatan	Penguji Prasarana	Penguji Sarana	Asesor	PPNS	Diklat Teknis Khusus Perkeretaapian	Diklat Kecakapan SDM (PPKA)	ANK K3	Diklat Teknologi LRT Level 3	Diklat Kereta Cepat	Analis	Kepegawaian	Perencanaan Jabatan	Manajemen Risiko (QRMP/QRMA/QRMO/QRMF)	Ahli K3PU	Diklat Manajerial (Bimtek/Latsar, PKA, Database, MK, dll)	PPK Tipe C		
710	WIBOWO ADI SAPUTRO	198807282010121008	PNS	DJKA																								BTP Kelas II Palembang
711	GALUHWATI	197606012010122002	PNS	DJKA																		V (QRMA)						BTP Kelas I Medan
712	DIAN WIDYAWATI	19850929 200912 2 001	PNS	DJKA																		V (QRMA)						BTP Kelas I Surabaya
713	OKTAVIRA TRIANDANI CAHAYAPUTRI	19871027 200912 2 002	PNS	DJKA																				V (Manajerial)				Balai Prasarana Perkeretaapian
714	FEBRY VABIAN MANURUNG	19990217 202112 1 001	PNS	DJKA																				V (Desain Graphic)				BTP Kelas I Surabaya
715	DWIKI BAGAS SETYAWAN	20030508 202212 1 009	PNS	DJKA																				V (Desain Graphic)				BTP Kelas I Surabaya
716	MOCHAMAD BASUKI	19680827 202112 1 001	PNS	DJKA																				V (Barjas)				Dit. Prasarana Perkeretaapian
717	CATUR RAHMA SARI	19980116 202003 2 009	PNS	DJKA																		V (QRMO)		V (Bahasa Inggris)				BTP Kelas I Jakarta
718	LIZA FADZIATUZZAHROH	19900710 202012 2 007	PNS	DJKA																				V (Bahasa Inggris)				BTP Kelas I Jakarta
719	ANDHIKA TEGUH PUTRANTO	19880406 202203 1 003	PNS	DJKA																				V (Bahasa Inggris)				Dit. LLAKA
720	ESAR SUBEKTI	19650816 202012 2 004	PNS	DJKA																				V (Manajerial Proyek)				Balai Pelestarian Perkeretaapian
721	PUTRA RAMADHANSYAH	19880501 201012 1 007	PNS	DJKA																				V (Barjas)				BTP Kelas I Medan
722	BENNY FACHRURI	19770308 200712 1001	PNS	DJKA																				V (Barjas)				BTP Kelas I Medan
723	MOCHENDRA	19890519 202012 1 004	PNS	DJKA																				V (Barjas)				Dit. Sarana Perkeretaapian
724	LAURENSIUS ALBERT G. SINAGA	20000506 202112 1 001	PNS	DJKA																				V (Barjas)				BTP Kelas I Jakarta
725	IMAM PRASETYO	19801129 200502 1 001	PNS	DJKA	V		V															V (QRMF)					V	Dit. Keselamatan Perkeretaapian
726	QURNIAWAN YULIANTO	19790708 200912 1 003	PNS	DJKA					V																		V	Dit. Prasarana Perkeretaapian
727	ANWAR TAUFIEK HIDAYAT	19640826 199303 1 003	PNS	DJKA							V																V	Dit. Sarana Perkeretaapian
728	SENEWAN	19660614199103 1 010	PNS	DJKA				V																			V	Dit. Keselamatan Perkeretaapian
729	SANTOSO SINAGA	197904192006041002	PNS	DJKA																		V (QRMF)						Dit. Sarana Perkeretaapian
730	ALFAN EFENDI, A.MD.T.	199301122021121001	PNS	DJKA																		V (QRMO)						BTP Kelas I Medan
731	BONDAN RENGGA ADYTAMA, A. MD. T	19981130822031006	PNS	DJKA																		V (QRMO)						Dit. Prasarana Perkeretaapian
732	DANDI NUR DWIATMAJA, A.MD.T	20000706202112 1001	PNS	DJKA																		V (QRMO)						BTP Kelas I Bandung
733	DWI YULI HARIANTO, A.MD. KA	19910713201801 1002	PNS	DJKA																		V (QRMO)				V		BPKA Sulawesi Selatan
734	HAGI SUNDRA GONZALES, A.MD.TRA	20010317202210 1002	PNS	DJKA																		V (QRMO)						Dit. Sarana Perkeretaapian
735	LUH GEDE PRAYASCITA UTAMI, A.MD.TRA	20011014202210 2002	PNS	DJKA																		V (QRMO)						Dit. LLAKA
736	MARINA ARSAYANTI, A.MD	19931227201612 2001	PNS	DJKA																		V (QRMO)						Setditjen Perkeretaapian
737	MUHAMAD TAUFIQ WIJAYANTO, A.MD.KB.N	19960918201812 1002	PNS	DJKA																		V (QRMO)						Setditjen Perkeretaapian
738	NURDINSYAH, A.MD	19850914 201012 1 006	PNS	DJKA																		V (QRMO)						BPKA Sulawesi Selatan
739	RENZI AMELIA, S.SOS	19881025202203 2005	PNS	DJKA																		V (QRMO)						Dit. LLAKA
740	REZKY INDRA PRASIBI, S.TR.TRA	19981213202210 1002	PNS	DJKA																		V (QRMO)						BTP Kelas II Semarang
741	SEPTIANA DWINITA FERRYTAWATI, A.MD.TRA	19990928202112 2001	PNS	DJKA																		V (QRMO)						BTP Kelas I Bandung
742	VENNY ARIANTI, ST	19870605200912 2002	PNS	DJKA																		V (QRMO)						Dit. Sarana Perkeretaapian
743	WIDIYA SUSILOWATI, A.MD. KA	19981219202012 2005	PNS	DJKA																		V (QRMO)						BTP Kelas I Jakarta
744	YULI NUGRAHINI, SE., MT	19800705200604 2001	PNS	DJKA																		V (QRMO)						BTP Kelas I Surabaya
745	PANJI AULIAWISELA	19921206200911 1025	PPPK	DJKA																							V	Dit. Prasarana Perkeretaapian
746	RASTAMIN AQIMUDDIN	19861117202211 1017	PPPK	DJKA																							V	BTP Kelas I Medan
747	TULUS SAPUTRA	19910122202211 1017	PPPK	DJKA																							V	BTP Kelas I Jakarta
748	HASTIKA DARMAWATI	19900805202312 2049	PPPK	DJKA																							V	Dit. Prasarana Perkeretaapian
749	SAKTI PATAHILLAH ASRI	19981001202312 1004	PPPK	DJKA																							V	BTP Kelas II Palembang
750	RYAN AULYA	19960803202312 1007	PPPK	DJKA																							V	Dit. Keselamatan Perkeretaapian
751	PUJI PURWADI	19930604202312 1023	PPPK	DJKA																							V	BTP Kelas II Padang
752	ARYANTO EDI WIBOWO	19980822202312 1007	PPPK	DJKA																							V	BTP Kelas II Palembang
753	RATIH PUSPITA SARI	19961129202312 2030	PPPK	DJKA																						V	V	BTP Kelas II Padang
754	ABDUL MUIZ ISHAQ MUBAWIR	19970903202312 1006	PPPK	DJKA																							V	Balai Pengujian Perkeretaapian
755	EKA SUSILOWATI	19841105202312 2039	PPPK	DJKA																							V	BTP Kelas I Semarang
756	IDRUS CHAIRIANSYAH ATMODJO	19950427202312 1021	PPPK	DJKA																							V	BTP Kelas I Jakarta
757	TRI WIBOWO	19931218202312 1018	PPPK	DJKA																							V	BTP Kelas I Bandung
758	ACHMAD HARRIS CAHYADI	19880127202312 1015	PPPK	DJKA																							V	Dit. Sarana Perkeretaapian
759	VIDYA PURWITASARI	19951230202312 2032	PPPK	DJKA																							V	BTP Kelas I Bandung
760	ADITYA PERDANA PERKASA	19890215202312 1013	PPPK	DJKA																							V	BTP Kelas II Padang
761	NIKKO RIADI	19880716202312 1023	PPPK	DJKA																							V	BTP Kelas I Semarang
762	SOFYUDIN DWI LAKSONO	19680927202312 1019	PPPK	DJKA																							V	Balai Pengujian Perkeretaapian
763	MUHAMMAD ABDAL	19950610202312 1032	PPPK	DJKA																							V	BTP Kelas I Medan
764	BAGASKARA PRAMSRA	19961018202312 1009	PPPK	DJKA																							V	Balai Perawatan Perkeretaapian

No	Nama	NIP	STATUS	UNIT	KOMPETENSI TEKNIS													KOMPETENSI UMUM/MANAJERIAL							Jabatan Fungsional CPNS dan PPPK	Unit Kerja
					Auditor	Inspektur Satama	Inspektur Prasarana	Penguji Jalbang	Penguji Fasop	Penguji Prasarana	Penguji Satama	Asesor	PPNS	Diklat Teknis Khusus Perkeretaapian	Diklat Kecakapan SDM (PPKA)	AhliK3	Diklat Teknologi LRT Gol 2	Diklat Kereta Cepat	Arsiparis	Kepegawaian	Penyelaraan Jabatan	Manajemen Risiko (QRMP/QRMA/QRMC)	Adal KPBU	Diklat Manajerial (Manaj.Kinerja, BAU, Database, MR, dll)	PPK Tipe C		
765	AFMI	197704292021211001	PPPK	DJKA																					√	BTP Kelas II Padang
766	DHANA ADYAESA FERICHI	199806162021211003	PPPK	DJKA																					√	Dit. Keselamatan Perkeretaapian
767	MUHAMMAD FADEL FARHAN	199804242021211003	PPPK	DJKA																					√	BTP Kelas II Palembang
768	GUNAWAN WIBISONO	199212062021211023	PPPK	DJKA																					√	Balai Pengujian Perkeretaapian
769	IDA ADHA KAMILASARI	199006132021212039	PPPK	DJKA																					√	Setditjen Perkeretaapian
770	DESTIK DWI PUSPASARI	199512062021212032	PPPK	DJKA																					√	BTP Kelas II Semarang
771	ASIH RAHAYU	199303102021212047	PPPK	DJKA																					√	Setditjen Perkeretaapian
772	WINYASARI FISTIA WISDAWATI	199212012021212045	PPPK	DJKA																					√	BTP Kelas I Surabaya
773	DESLAND TIGS CHRISTINA	198312092021212019	PPPK	DJKA																					√	BTP Kelas I Surabaya
774	ASEP WAHYUDIN	199609122021211007	PPPK	DJKA																					√	Dit. LLAJA
775	NULHANUDDIN	199707162021211005	PPPK	DJKA																					√	BPKAD Sumatera Selatan
776	HUSNI	198409242021211019	PPPK	DJKA																					√	BTP Kelas I Medan
777	RICCO AUDRYANI CHRISTOPHER	199612242021211009	PPPK	DJKA																					√	Dit. Prasarana Perkeretaapian
778	EMIL ANDREAN KUSUMA	199309092021211032	PPPK	DJKA																					√	BTP Kelas I Surabaya
779	REZA MUHAMAD FAHLEVI	199108142021211032	PPPK	DJKA																					√	Dit. Prasarana Perkeretaapian
780	ZANI NURLESMANA	199106192021211009	PPPK	DJKA																					√	BTP Kelas I Bandung
781	RIZKA MUSLIMATUSSHOLIHAH	199110292021210036	PPPK	DJKA																					√	Dit. Prasarana Perkeretaapian
782	FADLY YOGA PRATAMA	199405062021211015	PPPK	DJKA																					√	Balai Pengujian Perkeretaapian
783	DEFNI WAHYUNI	199110112021212046	PPPK	DJKA																					√	BTP Kelas II Padang
784	IRZAN KAMASRULLAH	199012072021211018	PPPK	DJKA																					√	Dit. Kesdamatran Perkeretaapian
785	PRADIYOGA ALMAWARDI	199807242021211004	PPPK	DJKA																					√	BTP Kelas I Jakarta
786	INDRA NURRAHMAN	199506202021211019	PPPK	DJKA																					√	Dit. Prasarana Perkeretaapian
787	DIAN ADRIAN ZAKARYA	198408192021211008	PPPK	DJKA																					√	BTP Kelas I Bandung
788	NAUVAL FEBRIAN	198202092021211009	PPPK	DJKA																					√	BTP Kelas I Semarang
789	ADE AYU YULIA SARASWATI LABINA	199405272021212003	PPPK	DJKA																					√	BTP Kelas I Surabaya
790	AOFA UL MAZIDAH	199007202021212051	PPPK	DJKA																					√	Dit. LLAJA
791	BAMBANG HADI WIBOWO	198412232021211010	PPPK	DJKA																					√	Setditjen Perkeretaapian
792	FERY JULIANTO	197409262021211002	PPPK	DJKA																					√	Balai Pengujian Perkeretaapian
793	ALDINO ASHARI	199312132021211023	PPPK	DJKA																					√	BTP Kelas II Padang
794	HANS CHRISTO ALEXANDER SILABAN	199811112021211024	PPPK	DJKA																					√	Dit. Prasarana Perkeretaapian
795	DWIKY HARISSA	199506302021211002	PPPK	DJKA																					√	Dit. Kesdamatan Perkeretaapian
796	ANNISA RAHMANIA	199309222021212036	PPPK	DJKA																					√	BTP Kelas I Medan
797	HULY RIZKA	199112272021211015	PPPK	DJKA																					√	BTP Kelas I Medan
798	AGUS WIYANTO	198201202021211008	PPPK	DJKA																					√	Balai Pengujian Perkeretaapian
799	WILDAN YUQO MADAZZAMAN	199213122021211010	PPPK	DJKA																					√	Dit. Prasarana Perkeretaapian
800	USWATUNNISAH	199412032021212040	PPPK	DJKA																					√	BTP Kelas I Surabaya
801	RIFAL KASA DINAR	199504232021211018	PPPK	DJKA																					√	BTP Kelas II Palembang
802	LUTHFI FAKHRIZA ARFAI	199709172021211006	PPPK	DJKA																					√	Dit. LLAJA
803	ADITYA FAHMI PRATAMA	199306302021211020	PPPK	DJKA																					√	BTP Kelas I Medan
804	SITI RAHMAHWATI	199509202021212038	PPPK	DJKA																					√	BTP Kelas I Semarang
805	FEBRINA HASIDA IDHAM	199202062021212052	PPPK	DJKA																					√	BTP Kelas I Bandung
806	SODIKIN	199106202021211031	PPPK	DJKA																					√	BTP Kelas II Padang
807	GUSTARA IQBAL	199108192021211019	PPPK	DJKA																					√	BTP Kelas I Medan
808	ISKANDAR ZULKARNAEN SYAMSU	199111252021211015	PPPK	DJKA																					√	Balai Pengujian Perkeretaapian
809	ATIKA YUSRINA	199304032021212057	PPPK	DJKA																					√	BTP Kelas I Surabaya
810	ERICK DWI WIBOWO	199305312021211017	PPPK	DJKA																					√	Dit. Sarana Perkeretaapian
811	RIZKY KA WIDIANTO	199807182021211018	PPPK	DJKA																					√	Balai Perawatan Perkeretaapian
812	NOVITA SARI	199108112021212046	PPPK	DJKA																					√	BTP Kelas I Medan
813	FEBRIAN DWI PUTRA	199402052021211014	PPPK	DJKA																					√	BPKAD Sumatera Selatan
814	HERMI VIYANDI HB	198801092021211008	PPPK	DJKA																					√	BTP Kelas I Medan
815	KHOTIBUL UMAM	199308072021211027	PPPK	DJKA																					√	Dit. Sarana Perkeretaapian
816	CUT FAHRA MARISSA	199307052021212050	PPPK	DJKA																					√	BTP Kelas I Medan
817	MOHAMMAD SYAN ALFREKY	199407062021211019	PPPK	DJKA																					√	Dit. Keselamatan Perkeretaapian
818	GALANG GILLESSPI	199509032021211010	PPPK	DJKA																					√	Balai Pengujian Perkeretaapian
819	DEDEN FACHMI RIDWAN	199602252021211013	PPPK	DJKA																					√	Setditjen Perkeretaapian
820	MUSTIKA MERDEKA RIYANTI	199508152021212019	PPPK	DJKA																					√	Setditjen Perkeretaapian

No	Nama	NIP	STATUS	UNIT	KOMPETENSI TEKNIS														KOMPETENSI UMUM/MANAJERIAL							Jabatan Pengelolaan CPNS dan PPPK	Unit Kerja
					Auditor	Inspektur Sarana	Inspektur Prasarana	Penguji Lalbang	Penguji Fasop	Penguji Prasarana	Penguji Sarana	Asesor	PPNS	Diklat Teknis Khusus Perkeretapian	Diklat Kecakapan SDM (PPKA)	ANBIS	Diklat Teknologi LRT Gol.3	Diklat Kereta Cepat	Arsiparis	Kepegawaian	Penyelaraan Jabatan	Manajemen Risiko (QRM/PQRMA/QRM Ci)	Ahli K3MU	Diklat Manajerial (Manajerial Skills, BLU, Database, MR, dll)	PPE Tipe C		
821	DEDI PRIYADI RUSTIAWAN	198603162023211018	PPPK	DJKA																						√	BTP Kelas I Bandung
822	ARIEF PEBRIANSYAH	199802242023211005	PPPK	DJKA																						√	BTP Kelas I Jakarta
823	ARFINDO FIRMANSYAH	199703132023211008	PPPK	DJKA																						√	Balai Perawatan Perkeretapian
824	WIJANARKO SETYO SALAM	199608202023211009	PPPK	DJKA																						√	BTP Kelas I Jakarta
825	DWI CAHYO WIDIJONO	199108092023211020	PPPK	DJKA																						√	Balai Perawatan Perkeretapian
826	IRENA GHIKA PRATIWI	199505022023212043	PPPK	DJKA																						√	Dit. Sarana Perkeretapian
827	SYAHRIZAL RAMADHAN	199403052023211017	PPPK	DJKA																						√	Setditjen Perkeretapian
828	PURWO SETYO AJI	198905012023211027	PPPK	DJKA																						√	Dit. Sarana Perkeretapian
829	SUGENG RIADI	198807242023211011	PPPK	DJKA																						√	Dit. Keselamatan Perkeretapian
830	AYU AGDI KARLINA	199908012023212004	PPPK	DJKA																						√	BPKAR Sumatera Selatan
831	DWIKI NURRAHMAN	199603262023211012	PPPK	DJKA																						√	Dit. Sarana Perkeretapian
832	SAFRIZAL	199104082023211027	PPPK	DJKA																						√	BTP Kelas I Medan
833	REXSY RUSTIANA SUPARMAN	199504302023211017	PPPK	DJKA																						√	Dit. Keselamatan Perkeretapian
834	NOFRIZAL PRASETIO	199401062023211025	PPPK	DJKA																						√	Dit. Prasarana Perkeretapian
835	AHMAD GOFAR KUSMAYADI	198605012023211026	PPPK	DJKA																						√	BPKA Sulawesi Selatan
836	MIRANTIKA KUSUMA DEWI	199503072023212039	PPPK	DJKA																						√	Balai Pengujian Perkeretapian
837	YUDY PRASETYO NUGROHO	199212272023211019	PPPK	DJKA																						√	Dit. LLAJKA
838	ANITA FAJAR KRISTIAWAN	198209052023212033	PPPK	DJKA																						√	Balai Perawatan Perkeretapian
839	MEGA SILVIA KUNCAHYA	198608022023212035	PPPK	DJKA																						√	Balai Perawatan Perkeretapian
840	DWI APRILIA NINGTIYAS	199704072023212025	PPPK	DJKA																						√	BTP Kelas I Semarang
841	NOVA SURYANGGA	199412052023211012	PPPK	DJKA																						√	BTP Kelas II Palembang
842	MIFTAHURRAHMI	199703212023212017	PPPK	DJKA																						√	BTP Kelas II Padang
843	TOTOK HARYADI	197510082023211006	PPPK	DJKA																						√	BTP Kelas I Surabaya
844	MARKO JUNIOR SIAGIAN	199206302023211022	PPPK	DJKA																						√	BTP Kelas I Medan
845	BAMBANG HERIYANTO	198202242023211008	PPPK	DJKA																						√	Dit. Prasarana Perkeretapian
846	SHEILA MARILA	199508072023212038	PPPK	DJKA																						√	Dit. Prasarana Perkeretapian
847	MOCHAMAD FAISAL SIMENDI	199105262023211019	PPPK	DJKA																						√	BTP Kelas I Bandung
848	EVI PUJI UTAMI	199712122023212022	PPPK	DJKA																						√	Dit. Keselamatan Perkeretapian
849	YOLA AFIA MASDAR	199712192023212016	PPPK	DJKA																						√	BTP Kelas II Palembang
850	AYU PRATIWI PARAMITHA	198806252023212030	PPPK	DJKA																						√	Dit. Prasarana Perkeretapian
851	RONALDO	199511242023211018	PPPK	DJKA																						√	BPKA Sulawesi Selatan
852	HENDIAN FANDITYA	199611102023211015	PPPK	DJKA																						√	BTP Kelas II Palembang
853	KRISTIAN WIJAYANTO	198412152023211017	PPPK	DJKA																						√	Dit. LLAJKA
854	WAHYUDI EKA SAPUTRA	199012172023211023	PPPK	DJKA																						√	BTP Kelas I Medan
855	BAYU RIYADI PEBRIANTO	199802042023211005	PPPK	DJKA																						√	Balai Perawatan Perkeretapian
856	RYO EKA DARMAWAN	198905222023211010	PPPK	DJKA																						√	BTP Kelas I Surabaya
857	TAFDLILA SYAHRIFAH AKHAR S.T	199508192023211013	PPPK	DJKA																						√	Dit. Prasarana Perkeretapian
858	MUH. YARDI IDRIS	199101092023211016	PPPK	DJKA																						√	BTP Kelas I Medan
859	SAMSUL SAHNIPAR	198702282023211015	PPPK	DJKA																						√	Dit. Prasarana Perkeretapian
860	UCOK BONGGAL	198205192023211010	PPPK	DJKA																						√	Dit. Sarana Perkeretapian
861	ERWIN ARSYAD	198305192023211014	PPPK	DJKA																						√	BPKA Sulawesi Selatan
862	AFRIADI PONGTULLIRAN	198711162023211013	PPPK	DJKA																						√	Dit. Keselamatan Perkeretapian
863	AHMAD NURSANI	199503242023211015	PPPK	DJKA																						√	BTP Kelas I Medan
864	AJI PRAWOTO	199105112023211031	PPPK	DJKA																						√	BTP Kelas I Jakarta
865	ANDREAS MISWARDI PUTRA	199110232023211015	PPPK	DJKA																						√	Dit. Sarana Perkeretapian
866	AULIA NUR ARHAMNI	199701232023211008	PPPK	DJKA																						√	BTP Kelas I Medan
867	CITRA PUTRI KUSUMADEWI	199404212023212045	PPPK	DJKA																						√	BTP Kelas I Semarang
868	DELIS ANISA	199206172023212032	PPPK	DJKA																						√	BTP Kelas I Jakarta
869	DEWI KHALIMA	199404202023212009	PPPK	DJKA																						√	Dit. Keselamatan Perkeretapian
870	DOLLYGRARIO STEUX VIKOYUSUPO	199207082023211034	PPPK	DJKA																						√	Setditjen Perkeretapian
871	EKIN CHRISTIAN SEMBIRING	199307012023211027	PPPK	DJKA																						√	BTP Kelas I Jakarta
872	FADHILA RACHMAT WINDIARTO	199905112023211012	PPPK	DJKA																						√	Dit. Keselamatan Perkeretapian
873	FAJAR ANUGRAH TUMANGGOR	199606112023211009	PPPK	DJKA																						√	BPKAR Sumatera Selatan
874	FARADINA AMANDA	199509022023212032	PPPK	DJKA																						√	BTP Kelas II Padang
875	GALIH WIDYASARI	199903132023212005	PPPK	DJKA																						√	Balai Perawatan Perkeretapian

No	Nama	NIP	STATUS	UNIT	KOMPETENSI TEKNIS														KOMPETENSI UMUM/MANAJERIAL							Jabatan Pengelolaan CPNS dan PPPK	Unit Kerja
					Auditor	Inspektur Sarana	Inspektur Prasarana	Penguji Alfaeng	Penguji Fasop	Penguji Prasarana	Penguji Sarana	Asesor	PPNS	Diklat Teknis Khusus Perkeretaapian	Diklat Kecakapan SDM (PKA)	ANKI	Diklat Teknologi LRT GoA 3	Diklat Kereta Cepat	Assessor	Kepegawaian	Penyetaraan Jabatan	Manajemen Risiko (QRMP/QRMA/QRMO)	ANK KNKT	Diklat Manajerial (Manaj.Krisis, SUU, Dasdros, Adk. dll)	PPK Tipe C		
876	GUSTIA DEWINDA	19980816202321201 2	PPPK	DJKA																						√	BTP Kelas II Palembang
877	HANNA SURYADIKA MUTIHA ROTUA	19930317202321206 3	PPPK	DJKA																						√	Dit. Sarana Perkeretaapian
878	HARRY MULIA	19870303202321102 1	PPPK	DJKA																						√	BTP Kelas I Jakarta
879	HIDAYATULLAH	19950606202321101 5	PPPK	DJKA																						√	BTP Kelas II Palembang
880	IHSAN ALI NURFAUZI	19980609202321100 1	PPPK	DJKA																						√	BTP Kelas I Jakarta
881	ITA RETNO SARI	19921202202321204 3	PPPK	DJKA																						√	BTP Kelas I Bandung
882	LADY PERMATA INSANI	19940617202321203 8	PPPK	DJKA																						√	Sekditjen Perkeretaapian
883	M. MAWARDI	19880719202321101 2	PPPK	DJKA																						√	BTP Kelas I Medan
884	MILA DATI PRAWESTY	19960806202321202 4	PPPK	DJKA																						√	BTP Kelas I Bandung
885	MUHAMAD SATRIO BUDI SANTOSO	19970811202321100 6	PPPK	DJKA																						√	BTP Kelas I Jakarta
886	MUHAMMAD HILAL BADRI	19870114202321101 4	PPPK	DJKA																						√	BTP Kelas I Medan
887	MUHAMMAD MIZAN APIL	19861030202321101 1	PPPK	DJKA																						√	BPKAD Sumatera Selatan
888	MUHAMMAD MUZAKKI	19910103202321101 6	PPPK	DJKA																						√	BPKAD Sumatera Selatan
889	MUHAMMAD RIKALDO	19970926202321100 5	PPPK	DJKA																						√	Dit. Kelembagaan Perkeretaapian
890	MUTIARA PUTRI KHATULISTIWA	19940416202321205 2	PPPK	DJKA																		√ (QRMO)				√	Dit. Keselamatan Perkeretaapian
891	NASLIADI	19881010202321103 5	PPPK	DJKA																						√	BTP Kelas I Medan
892	NICO PARERA	19970709202321101 6	PPPK	DJKA																						√	Dit. Prasarana Perkeretaapian
893	NISA ALAWIYAH ISKANDAR	19960518202321203 1	PPPK	DJKA																						√	Dit. Sarana Perkeretaapian
894	NIVITA SALDYNI ADIBAH	19960326202321202 3	PPPK	DJKA																						√	BTP Kelas I Surabaya
895	NORMA KHAIRUNISA	19990922202321200 2	PPPK	DJKA																						√	BTP Kelas I Semarang
896	NUR AZIZ SETIADI	19950504202321101 3	PPPK	DJKA																						√	BTP Kelas I Bandung
897	PEGGI LAVUCITA RAHAYAH	19910613202321204 0	PPPK	DJKA																						√	Dit. Keselamatan Perkeretaapian
898	PUJA DIAS CHANDRA OCTANTO	19931024202321101 8	PPPK	DJKA																						√	BPKAD Sumatera Selatan
899	REZA IMAN KAUSTAR	19930911202321101 2	PPPK	DJKA																						√	BTP Kelas I Medan
900	RINDA NANDY PANGASTUTI	19940914202321204 7	PPPK	DJKA																						√	Dit. Keselamatan Perkeretaapian
901	RIZKY SYAIFUL RAMADHAN	19910410202321102 4	PPPK	DJKA																		√ (QRMO)				√	Sekditjen Perkeretaapian
902	TRI AM	19941015202321101 1	PPPK	DJKA																						√	BTP Kelas I Medan
903	TRI UTARI SAPUTRI	19980422202321201 2	PPPK	DJKA																						√	BPKAD Sumatera Selatan
904	WINANDA MASHLAHAT	19980901202321201 0	PPPK	DJKA																						√	BTP Kelas I Jakarta
905	YOLAN MEIDIFA IKASARI	19940608202321209 1	PPPK	DJKA																						√	Balai Pengujian Perkeretaapian
906	Muhammad Alfaruq Fiil, A.Md	19930919201612100 1	PNS	DJKA																					√		Dit. LLAKA
907	Patrick Morowinsy, S.Kom	19730818200801210 01	PNS	DJKA																					√		Dit. Prasarana Perkeretaapian
908	Rio Amrullah, SE., MM	19740722007101001	PNS	DJKA																					√		BTP Kelas I Jakarta
909	Adinugroho Sulistyo, A.Md. KA	19940811202012100 5	PNS	DJKA																					√		BTP Kelas I Jakarta
910	Entin Sutinah, S.E., M.M	19840628200912200 4	PNS	DJKA																					√		BTP Kelas I Bandung
911	Ganjar Eka Ramdhani	19920805201801100 2	PNS	DJKA																					√		BPKA Sulawesi Selatan
912	Indra Hidayat, ST	19820629200803101 6	PNS	DJKA																					√		BPKA Sulawesi Selatan
913	Mulyadi, A.Md.KA	19821125201012100 2	PNS	DJKA																					√		BTP Kelas I Surabaya
914	Rusdi S.T.	19780914200304100 2	PNS	DJKA																					√		BPKA Sulawesi Selatan
915	Syahrullah Nanda Hasbi, S.T	19970928202031010	PNS	DJKA																					√		BTP Kelas II Padang
916	Dwiko Nugroho Sadewo	20010507202210100 1	PNS	DJKA																					√		BTP Kelas II Padang

Jakarta, Juli 2024

Ketua Tim Kelompok SDM dan Organisasi

A. Zaky, S.T., M.T.
NIP 197607152005021002

REKAP JUMLAH PEGAWAI DITJEN PERKERETAAPIAN
PEMILIK SERTIFIKAT KOMPETENSI/KEAHLIAN

NO	UNIT KERJA	JUMLAH SDM PEMILIK SERTIFIKAT KOMPETENSI/ KEAHLIAN
1	Setditjen Perkeretaapian	96
2	Direktorat LLAKA	72
3	Direktorat Prasarana Perkeretaapian	100
4	Direktorat Sarana Perkeretaapian	90
5	Direktorat Keselamatan Perkeretaapian	90
6	BTP Kelas I Medan	58
7	BTP Kelas II Padang	35
8	BTP Kelas II Palembang	41
9	BTP Kelas I Jakarta	55
10	BTP Kelas I Bandung	42
11	BTP Kelas I Semarang	45
12	BTP Kelas I Surabaya	47
13	Balai Pengujian Perkeretaapian	57
14	Balai Perawatan Perkeretaapian	49
15	BPKAR Sumatera Selatan	29
16	BPKA Sulawesi Selatan	23
TOTAL		**929**

Keterangan :

1) Total pegawai DJKA pemilik sertifikat kompetensi/keahlian sebanyak 929 pegawai

2) Posisi s.d akhir Juni 2024

Jakarta, Juli 2024

Ketua Tim Kelompok SDM dan Umum

A. Zaky, S.T., M.T.
Pembina (IV/a)
NIP 197607152005021002

Daftar Nama Pegawai yang telah Lulus Uji Kompetensi dan Siap Dilantik ke Dalam Jabatan Fungsional Bidang Perkeretaapian di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian

NO	NAMA	NIP	PANGKAT/ GOLONGAN	USULAN JABATAN	USULAN JENJANG	UNIT KERJA SAAT INI
1	Rusdy	19780114 200604 1 002	Penata Tingkat I (III/d)	AUDITOR PERKERETAAPIAN	AHLI MUDA	Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan
2	Dony Chrisna Sanjaya	19880903 201012 1 003	Penata (III/c)	AUDITOR PERKERETAAPIAN	AHLI MUDA	Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan
3	Lusiawan Jati	19760719 200912 1 001	Penata Tingkat I (III/d)	AUDITOR PERKERETAAPIAN	AHLI MUDA	Direktorat Prasarana Perkeretaapian
4	Risky Hariwahyudi	19850508 200912 1 009	Penata (III/c)	AUDITOR PERKERETAAPIAN	AHLI MUDA	Direktorat Prasarana Perkeretaapian
5	Dimas Reska Putra	19821225 200912 1 002	Penata Tingkat I (III/d)	AUDITOR PERKERETAAPIAN	AHLI MUDA	Direktorat Prasarana Perkeretaapian
6	Ridwan Arasjid	19940303 201902 1 002	Penata Muda Tingkat I (III/b)	AUDITOR PERKERETAAPIAN	AHLI PERTAMA	Direktorat Sarana Perkeretaapian
7	Rendy Fajar Riadi	19860611 200502 1 001	Penata Tingkat I (III/d)	AUDITOR PERKERETAAPIAN	AHLI MUDA	Direktorat Sarana Perkeretaapian
8	Teddy Privantoro	19830601 201012 1 002	Penata Tingkat I (III/d)	AUDITOR PERKERETAAPIAN	AHLI MUDA	Direktorat Sarana Perkeretaapian
9	Hendarwan Rianto	19801121 201012 1 001	Penata Tingkat I (III/d)	AUDITOR PERKERETAAPIAN	AHLI MUDA	Direktorat Sarana Perkeretaapian
10	Addin Aristotika	19851103 201012 1 001	Penata Tingkat I (III/d)	AUDITOR PERKERETAAPIAN	AHLI MUDA	Direktorat Sarana Perkeretaapian
11	Riris Aryanti	19881216 201012 2 003	Penata (III/c)	AUDITOR PERKERETAAPIAN	AHLI MUDA	Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian
12	Erni Dwi Astuti	19890603 201012 2 009	Penata Muda Tingkat I (III/b)	AUDITOR PERKERETAAPIAN	AHLI PERTAMA	Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian

NO	NAMA	NIP	PANGKAT/ GOLONGAN	USULAN JABATAN	USULAN JENJANG	UNIT KERJA SAAT INI
13	Gunadi Raharjo	19811208 200604 1 002	Pembina (IV/a)	AUDITOR PERKERETAAPIAN	AHLI MADYA	Direktorat Keselamatan Perkeretaapian
14	Haryo Kumoro Rahmandhewo	19830220 201012 1 003	Penata Tingkat I (III/d)	AUDITOR PERKERETAAPIAN	AHLI MUDA	Direktorat Keselamatan Perkeretaapian
15	Dean Andree Yunie Ardi	19880623 201012 1 004	Penata (III/c)	AUDITOR PERKERETAAPIAN	AHLI MUDA	Direktorat Keselamatan Perkeretaapian
16	Ardisa Pramudhita	19920424 201902 2 005	Penata Muda Tingkat I (III/b)	AUDITOR PERKERETAAPIAN	AHLI PERTAMA	Direktorat Keselamatan Perkeretaapian
17	Yeny Rachman	19881008 201012 2 004	Penata (III/c)	AUDITOR PERKERETAAPIAN	AHLI MUDA	Direktorat Keselamatan Perkeretaapian
18	Siti Saraya Dwi Amalina	19870625 201012 2 002	Penata Tingkat I (III/d)	AUDITOR PERKERETAAPIAN	AHLI MUDA	Direktorat Keselamatan Perkeretaapian
19	Lucky Bindri Soegito	19770712 200212 2 001	Pembina (IV/a)	AUDITOR PERKERETAAPIAN	AHLI MADYA	Direktorat Keselamatan Perkeretaapian
20	Nova Wahyu Cahyono	19921130 202012 1 003	Penata Muda (III/a)	AUDITOR PERKERETAAPIAN	AHLI PERTAMA	Direktorat Keselamatan Perkeretaapian
21	Agus Triono	19830827 200604 1 002	Penata (III/c)	AUDITOR PERKERETAAPIAN	AHLI MUDA	Direktorat Lalu Lintas Dan Angkutan Kereta Api
22	Nur Muhammad Syaifullah Rahman	19870225 201012 1 004	Penata Tingkat I (III/d)	INSPEKTUR PRASARANA PERKERETAAPIAN	AHLI MUDA	Balai Perawatan Perkeretaapian
23	Ramos Taufiq Nasution	19760307 200912 1 002	Penata Tingkat I (III/d)	INSPEKTUR PRASARANA PERKERETAAPIAN	AHLI MUDA	Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Jakarta
24	Dany Kristian Paays	19751111 200912 1 003	Penata Tingkat I (III/d)	INSPEKTUR PRASARANA PERKERETAAPIAN	AHLI MUDA	Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Jakarta
25	Jonny Franhut Sitompul	19811028 200912 1 001	Penata Tingkat I (III/d)	INSPEKTUR PRASARANA PERKERETAAPIAN	AHLI MUDA	Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Jakarta

NO	NAMA	NIP	PANGKAT/ GOLONGAN	USULAN JABATAN	USULAN JENJANG	UNIT KERJA SAAT INI
26	Waldo Moro	19761029 200812 1 001	Penata Tingkat I (III/d)	INSPEKTUR PRASARANA PERKERETAAPIAN	AHLI MUDA	Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Jakarta
27	Sarwo De Hart	19780924 200901 1 007	Penata Tingkat I (III/d)	INSPEKTUR PRASARANA PERKERETAAPIAN	AHLI MUDA	Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Jakarta
28	Aditya Astika Brata	19880124 200912 1 001	Penata (III/c)	INSPEKTUR PRASARANA PERKERETAAPIAN	AHLI MUDA	Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Jakarta
29	Muhammad Zaki Alam Yusrani	19871214 201012 1 002	Penata (III/c)	INSPEKTUR PRASARANA PERKERETAAPIAN	AHLI MUDA	Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Jakarta
30	Arief Sudyatmoko	19790518 200604 1 001	Pembina (IV/a)	INSPEKTUR PRASARANA PERKERETAAPIAN	AHLI MADYA	Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Palembang
31	Muhammad Maulana Yusuf	19871103 200912 1 003	Penata (III/c)	INSPEKTUR PRASARANA PERKERETAAPIAN	AHLI MUDA	Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Palembang
32	Nangim Ulinnuha	19861021 201012 1 002	Penata Tingkat I (III/d)	INSPEKTUR PRASARANA PERKERETAAPIAN	AHLI MUDA	Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Palembang
33	Supriyadi	19820407 200501 1 004	Penata Tingkat I (III/d)	INSPEKTUR PRASARANA PERKERETAAPIAN	AHLI MUDA	Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Palembang
34	Muslim	19770902 201212 1 003	Penata (III/c)	INSPEKTUR PRASARANA PERKERETAAPIAN	AHLI MUDA	Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Palembang
35	Amir Rifai	19770416 201012 1 001	Penata Tingkat I (III/d)	INSPEKTUR PRASARANA PERKERETAAPIAN	AHLI MUDA	Direktorat Lalu Lintas Dan Angkutan Kereta Api
36	Duta Pratama	19881020 200912 1 002	Penata (III/c)	INSPEKTUR PRASARANA PERKERETAAPIAN	AHLI MUDA	Direktorat Lalu Lintas Dan Angkutan Kereta Api
37	Galih Prananda	19870928 200812 1 001	Penata (III/c)	INSPEKTUR PRASARANA PERKERETAAPIAN	AHLI MUDA	Direktorat Lalu Lintas Dan Angkutan Kereta Api
38	Harry Prihantyo	19880417 201012 1 006	Penata Tingkat I (III/d)	INSPEKTUR PRASARANA PERKERETAAPIAN	AHLI MUDA	Direktorat Lalu Lintas Dan Angkutan Kereta Api

NO	NAMA	NIP	PANGKAT/ GOLONGAN	USULAN JABATAN	USULAN JENJANG	UNIT KERJA SAAT INI
39	Kukuh Setyo Priyanto	19801103 201012 1 001	Penata Tingkat I (III/d)	INSPEKTUR PRASARANA PERKERETAAPIAN	AHLI MUDA	Direktorat Lalu Lintas Dan Angkutan Kereta Api
40	Reny Harwanti	19871022 201012 2 001	Penata (III/c)	INSPEKTUR PRASARANA PERKERETAAPIAN	AHLI MUDA	Direktorat Lalu Lintas Dan Angkutan Kereta Api
41	Satrio Harimurti	19871212 200912 1 003	Penata (III/c)	INSPEKTUR PRASARANA PERKERETAAPIAN	AHLI MUDA	Direktorat Lalu Lintas Dan Angkutan Kereta Api
42	Tito Aji Yanto	19851209 200912 1 006	Penata (III/c)	INSPEKTUR PRASARANA PERKERETAAPIAN	AHLI MUDA	Direktorat Lalu Lintas Dan Angkutan Kereta Api
43	Aditia Firmansyah	19890329 201012 1 001	Penata Tingkat I (III/d)	INSPEKTUR PRASARANA PERKERETAAPIAN	AHLI MUDA	Direktorat Lalu Lintas Dan Angkutan Kereta Api
44	Moch. Atma Adhyaksa	19870313 201012 1 005	Penata Tingkat I (III/d)	INSPEKTUR PRASARANA PERKERETAAPIAN	AHLI MUDA	Direktorat Lalu Lintas Dan Angkutan Kereta Api
45	Sande Ritin Irawan	19880814 201012 1 002	Penata (III/c)	INSPEKTUR PRASARANA PERKERETAAPIAN	AHLI MUDA	Direktorat Lalu Lintas Dan Angkutan Kereta Api
46	Suryo Cipto Raharjo	19860818 201012 1 002	Penata Tingkat I (III/d)	INSPEKTUR PRASARANA PERKERETAAPIAN	AHLI MUDA	Direktorat Lalu Lintas Dan Angkutan Kereta Api
47	Riska Previta Sari	19871219 201012 2 003	Penata Tingkat I (III/d)	INSPEKTUR PRASARANA PERKERETAAPIAN	AHLI MUDA	Direktorat Lalu Lintas Dan Angkutan Kereta Api
48	Dian Ika Sulistiyowati	19851022 201012 2 001	Penata Tingkat I (III/d)	INSPEKTUR PRASARANA PERKERETAAPIAN	AHLI MUDA	Direktorat Lalu Lintas Dan Angkutan Kereta Api
49	Heru Prasetijo	19710418 200312 1 001	Pembina (IV/a)	INSPEKTUR PRASARANA PERKERETAAPIAN	AHLI MADYA	Direktorat Sarana Perkeretaapian
50	Choirudin	19780909 200312 1 002	Pembina (IV/a)	INSPEKTUR PRASARANA PERKERETAAPIAN	AHLI MADYA	Direktorat Sarana Perkeretaapian
51	Rio Aprilliana	19810417 200812 2 001	Penata Tingkat I (III/d)	INSPEKTUR PRASARANA PERKERETAAPIAN	AHLI MUDA	Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian

NO	NAMA	NIP	PANGKAT/ GOLONGAN	USULAN JABATAN	USULAN JENJANG	UNIT KERJA SAAT INI
52	Eko Purnomo	19781227 201012 1 004	Penata Tingkat I (III/d)	INSPEKTUR PRASARANA PERKERETAAPIAN	AHLI MUDA	Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian
53	Yayat Hendayana	19810114 200712 1 001	Pembina (IV/a)	INSPEKTUR PRASARANA PERKERETAAPIAN	AHLI MADYA	Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian
54	Yanuarini Tri Kuswanti	19830122 200912 2 003	Penata Tingkat I (III/d)	INSPEKTUR PRASARANA PERKERETAAPIAN	AHLI MUDA	Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian
55	Deddy Kurniawan	19810918 201503 1 002	Penata (III/c)	INSPEKTUR PRASARANA PERKERETAAPIAN	AHLI MUDA	Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian
56	Rezha Nurachmady	19821102 200912 1 004	Penata Tingkat I (III/d)	INSPEKTUR PRASARANA PERKERETAAPIAN	AHLI MUDA	Direktorat Keselamatan Perkeretaapian
57	Sofyan Hidayat Rangkuti	19820406 201012 1 002	Penata (III/c)	INSPEKTUR PRASARANA PERKERETAAPIAN	AHLI MUDA	Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Bandung
58	Anne Rufaidah	19800907 200712 2 002	Penata Tingkat I (III/d)	INSPEKTUR PRASARANA PERKERETAAPIAN	AHLI MUDA	Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Bandung
59	Susiana	19710510 200701 2 001	Penata (III/c)	INSPEKTUR PRASARANA PERKERETAAPIAN	AHLI MUDA	Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Bandung
60	Iis Sumiati	19841006 200912 2 002	Penata (III/c)	INSPEKTUR PRASARANA PERKERETAAPIAN	AHLI MUDA	Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Bandung
61	Bernadi Armisetyo	19821112 200912 1 005	Penata Tingkat I (III/d)	INSPEKTUR PRASARANA PERKERETAAPIAN	AHLI MUDA	Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Padang
62	Muhamad Zaenudin	19890331 201012 1 003	Penata (III/c)	INSPEKTUR PRASARANA PERKERETAAPIAN	AHLI MUDA	Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan
63	Danny Palgunadi	19771022 200312 1 001	Pembina (IV/a)	INSPEKTUR PRASARANA PERKERETAAPIAN	AHLI MADYA	Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Bandung
64	Adi Winasis	19860223 202012 1 003	Penata Muda (III/a)	INSPEKTUR PRASARANA PERKERETAAPIAN	AHLI PERTAMA	Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Bandung

NO	NAMA	NIP	PANGKAT/ GOLONGAN	USULAN JABATAN	USULAN JENJANG	UNIT KERJA SAAT INI
65	Muhamad Riyandora	19970910 202012 1 002	Penata Muda (III/a)	INSPEKTUR PRASARANA PERKERETAAPIAN	AHLI PERTAMA	Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Bandung
66	Esty Dwi Cahyani	19960626 202012 2 015	Penata Muda (III/a)	INSPEKTUR PRASARANA PERKERETAAPIAN	AHLI PERTAMA	Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Bandung
67	Muhammad Rifky Ariansyah	19940502 201612 1 001	Penata Muda (III/a)	INSPEKTUR PRASARANA PERKERETAAPIAN	AHLI PERTAMA	Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Jakarta
68	Moch. Fachrul Firmansyah	19801218 200812 1 002	Penata Tingkat I (III/d)	INSPEKTUR PRASARANA PERKERETAAPIAN	AHLI MUDA	Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Semarang
69	Anung Sadputro	19770901 200712 1 001	Pembina (IV/a)	INSPEKTUR PRASARANA PERKERETAAPIAN	AHLI MADYA	Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Semarang
70	Eko Budi Santoso	19830416 200712 1 001	Pembina (IV/a)	INSPEKTUR PRASARANA PERKERETAAPIAN	AHLI MADYA	Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Semarang
71	Rizal Fathoni Asad	19750418 200712 1 003	Penata Tingkat I (III/d)	INSPEKTUR PRASARANA PERKERETAAPIAN	AHLI MUDA	Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Surabaya
72	Donny Satria	19830426 201012 1 003	Penata Tingkat I (III/d)	INSPEKTUR PRASARANA PERKERETAAPIAN	AHLI MUDA	Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Surabaya
73	Lurianto Lukito	19750211 201409 1 002	Penata (III/c)	INSPEKTUR PRASARANA PERKERETAAPIAN	AHLI MUDA	Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Surabaya
74	Dedy Puput Purbaya	19881208 201503 1 003	Penata (III/c)	INSPEKTUR PRASARANA PERKERETAAPIAN	AHLI MUDA	Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Surabaya
75	Arizal Erry Wicaksono	19890330 202012 1 007	Penata Muda (III/a)	INSPEKTUR PRASARANA PERKERETAAPIAN	AHLI PERTAMA	Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Surabaya
76	Umar Priono Adji	19750310 200312 1 001	Pembina (IV/a)	INSPEKTUR PRASARANA PERKERETAAPIAN	AHLI MADYA	Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Surabaya
77	Sofia Aviantie	19670813 199603 2 001	Pembina Tingkat I (IV/b)	INSPEKTUR PRASARANA PERKERETAAPIAN	AHLI MADYA	Direktorat Keselamatan Perkeretaapian

NO	NAMA	NIP	PANGKAT/ GOLONGAN	USULAN JABATAN	USULAN JENJANG	UNIT KERJA SAAT INI
78	Muhammad Hidayat	19800327 200604 1 002	Pembina (IV/a)	INSPEKTUR PRASARANA PERKERETAAPIAN	AHLI MADYA	Direktorat Keselamatan Perkeretaapian
79	Nurul Hidayati	19880103 201012 2 007	Penata (III/c)	INSPEKTUR PRASARANA PERKERETAAPIAN	AHLI MUDA	Direktorat Keselamatan Perkeretaapian
80	Fahmi Alamsyah Siregar	19871216 201012 1 004	Penata (III/c)	INSPEKTUR PRASARANA PERKERETAAPIAN	AHLI MUDA	Direktorat Keselamatan Perkeretaapian
81	Ratih Angga Apriani	19850412 200812 2 001	Penata (III/c)	INSPEKTUR PRASARANA PERKERETAAPIAN	AHLI MUDA	Direktorat Keselamatan Perkeretaapian
82	Bejo Priyono	19890314 201801 1 001	Penata Muda Tingkat I (III/b)	INSPEKTUR PRASARANA PERKERETAAPIAN	AHLI PERTAMA	Direktorat Keselamatan Perkeretaapian
83	Budi Febrian	19740224 199703 1 003	Pembina (IV/a)	INSPEKTUR PRASARANA PERKERETAAPIAN	AHLI MADYA	Direktorat Keselamatan Perkeretaapian
84	Gita Laniati	19810821 200312 2 002	Penata Tingkat I (III/d)	INSPEKTUR PRASARANA PERKERETAAPIAN	AHLI MUDA	Direktorat Keselamatan Perkeretaapian
85	Hotma Parulian Lumbantoruan	19770821 200312 2 002	Penata Tingkat I (III/d)	INSPEKTUR PRASARANA PERKERETAAPIAN	AHLI MUDA	Direktorat Keselamatan Perkeretaapian
86	Ichsan Wirahadi Kusumah	19920712 201902 1 003	Penata Muda Tingkat I (III/b)	INSPEKTUR PRASARANA PERKERETAAPIAN	AHLI PERTAMA	Direktorat Keselamatan Perkeretaapian
87	Hery Priyadi	19921229 201801 1 001	Penata Muda Tingkat I (III/b)	INSPEKTUR PRASARANA PERKERETAAPIAN	AHLI PERTAMA	Direktorat Keselamatan Perkeretaapian
88	Windi Mahatesyasna	19821221 200312 1 001	Penata Tingkat I (III/d)	INSPEKTUR PRASARANA PERKERETAAPIAN	AHLI MUDA	Direktorat Keselamatan Perkeretaapian
89	Randy Januar Syaefulloh	19930122 202012 1 007	Penata Muda (III/a)	INSPEKTUR PRASARANA PERKERETAAPIAN	AHLI PERTAMA	Direktorat Keselamatan Perkeretaapian
90	Basuki Rachmat	19720317 200604 1 001	Penata Tingkat I (III/d)	INSPEKTUR PRASARANA PERKERETAAPIAN	AHLI MUDA	Direktorat Keselamatan Perkeretaapian

NO	NAMA	NIP	PANGKAT/ GOLONGAN	USULAN JABATAN	USULAN JENJANG	UNIT KERJA SAAT INI
91	Yaser Arafat	19820810 201012 1 002	Penata (III/c)	INSPEKTUR PRASARANA PERKERETAAPIAN	AHLI MUDA	Direktorat Keselamatan Perkeretaapian
92	Ni Made Sri Budi Utami	19960722 201902 1 002	Penata Muda Tingkat I (III/b)	INSPEKTUR PRASARANA PERKERETAAPIAN	AHLI PERTAMA	Direktorat Lalu Lintas Dan Angkutan Kereta Api
93	Fery Chrisnata Santoso	19901226 202012 1 003	Penata Muda (III/a)	INSPEKTUR PRASARANA PERKERETAAPIAN	AHLI PERTAMA	Direktorat Lalu Lintas Dan Angkutan Kereta Api
94	Rosnaeni	19770108 200912 2 002	Penata (III/c)	INSPEKTUR PRASARANA PERKERETAAPIAN	AHLI MUDA	Direktorat Prasarana Perkeretaapian
95	Theresia Fajar Purbosari	19851128 200812 2 001	Penata Tingkat I (III/d)	INSPEKTUR PRASARANA PERKERETAAPIAN	AHLI MUDA	Direktorat Prasarana Perkeretaapian
96	Naomi Massang Lolok	19801110 200604 2 002	Pembina (IV/a)	INSPEKTUR PRASARANA PERKERETAAPIAN	AHLI MADYA	Direktorat Prasarana Perkeretaapian
97	Donny Silando	19820315 200712 1 001	Penata Tingkat I (III/d)	INSPEKTUR PRASARANA PERKERETAAPIAN	AHLI MUDA	Direktorat Prasarana Perkeretaapian
98	Anton Aprianto	19710418 199803 1 002	Pembina (IV/a)	INSPEKTUR PRASARANA PERKERETAAPIAN	AHLI MADYA	Direktorat Prasarana Perkeretaapian
99	Renaldi Prabudiman	19811212 200912 1 003	Penata Tingkat I (III/d)	INSPEKTUR PRASARANA PERKERETAAPIAN	AHLI MUDA	Direktorat Prasarana Perkeretaapian
100	Awang Kurniawan	19830204 201012 1 002	Penata Tingkat I (III/d)	INSPEKTUR PRASARANA PERKERETAAPIAN	AHLI MUDA	Direktorat Prasarana Perkeretaapian
101	Patrick Moronney	19770318 201012 1 001	Penata (III/c)	INSPEKTUR PRASARANA PERKERETAAPIAN	AHLI MUDA	Direktorat Prasarana Perkeretaapian
102	L. Samuel Nainggolan	19770109 200604 1 001	Pembina (IV/a)	INSPEKTUR PRASARANA PERKERETAAPIAN	AHLI MADYA	Direktorat Prasarana Perkeretaapian
103	Azis Okta Risdiana	19871004 201012 1 002	Penata (III/c)	INSPEKTUR PRASARANA PERKERETAAPIAN	AHLI MUDA	Direktorat Prasarana Perkeretaapian

NO	NAMA	NIP	PANGKAT/ GOLONGAN	USULAN JABATAN	USULAN JENJANG	UNIT KERJA SAAT INI
104	Sri Martini	19700305 199703 2 001	Penata (III/c)	INSPEKTUR PRASARANA PERKERETAAPIAN	AHLI MUDA	Direktorat Prasarana Perkeretaapian
105	Mohamad Zulkarnain	19761111 200604 1 002	Pembina (IV/a)	INSPEKTUR PRASARANA PERKERETAAPIAN	AHLI MADYA	Direktorat Prasarana Perkeretaapian
106	Ikhsan Tri Yanuar	19880129 201012 1 003	Penata Muda Tingkat I (III/b)	INSPEKTUR PRASARANA PERKERETAAPIAN	AHLI PERTAMA	Direktorat Prasarana Perkeretaapian
107	Taufik Hidayat	19850103 201012 1 001	Penata Tingkat I (III/d)	INSPEKTUR PRASARANA PERKERETAAPIAN	AHLI MUDA	Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Medan
108	Muhammad Chusnul	19860811 200912 1 002	Penata Tingkat I (III/d)	INSPEKTUR PRASARANA PERKERETAAPIAN	AHLI MUDA	Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Medan
109	Galuhwati	19760601 201012 2 002	Penata Tingkat I (III/d)	INSPEKTUR PRASARANA PERKERETAAPIAN	AHLI MUDA	Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Medan
110	Evy Kristiana	19721224 199803 2 002	Pembina (IV/a)	INSPEKTUR SARANA PERKERETAAPIAN	AHLI MADYA	Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian
111	Eko Noviardi	19801107 200912 1 002	Penata Tingkat I (III/d)	INSPEKTUR SARANA PERKERETAAPIAN	AHLI MUDA	Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian
112	Andhika Setiawan	19850607 201012 1 002	Penata Tingkat I (III/d)	INSPEKTUR SARANA PERKERETAAPIAN	AHLI MUDA	Balai Perawatan Perkeretaapian
113	Rifan Fathurrahman	19960525 202012 1 001	Penata Muda (III/a)	INSPEKTUR SARANA PERKERETAAPIAN	AHLI PERTAMA	Balai Perawatan Perkeretaapian
114	Luhur Pambudi Kusuma Jati	19950912 202012 1 003	Penata Muda (III/a)	INSPEKTUR SARANA PERKERETAAPIAN	AHLI PERTAMA	Balai Perawatan Perkeretaapian
115	Ibnu Ibrahim Nurcahyo	19970525 202012 1 008	Penata Muda (III/a)	INSPEKTUR SARANA PERKERETAAPIAN	AHLI PERTAMA	Balai Perawatan Perkeretaapian
116	Ferry Candra Hasibuan	19821226 200312 1 001	Pembina (IV/a)	INSPEKTUR SARANA PERKERETAAPIAN	AHLI MADYA	Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Bandung

NO	NAMA	NIP	PANGKAT/ GOLONGAN	USULAN JABATAN	USULAN JENJANG	UNIT KERJA SAAT INI
117	Firmansyah	19911106 202012 1 006	Penata Muda (III/a)	INSPEKTUR SARANA PERKERETAAPIAN	AHLI PERTAMA	Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Bandung
118	Arbie	19880411 200912 1 003	Penata (III/c)	INSPEKTUR SARANA PERKERETAAPIAN	AHLI MUDA	Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Jakarta
119	Bomby Duswara	19870601 201504 1 002	Penata (III/c)	INSPEKTUR SARANA PERKERETAAPIAN	AHLI MUDA	Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Semarang
120	Hardianto Eko Prasetio	19831213 201012 1 004	Penata Tingkat I (III/d)	INSPEKTUR SARANA PERKERETAAPIAN	AHLI MUDA	Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Semarang
121	Budhiarti Oktiva Dewi	19671015 200604 2 002	Pembina (IV/a)	INSPEKTUR SARANA PERKERETAAPIAN	AHLI MADYA	Direktorat Keselamatan Perkeretaapian
122	Candra Bangun	19840503 200604 1 001	Penata (III/c)	INSPEKTUR SARANA PERKERETAAPIAN	AHLI MUDA	Direktorat Lalu Lintas Dan Angkutan Kereta Api
123	Sonyanto Sepfrimada	19860905 201012 1 006	Penata Tingkat I (III/d)	INSPEKTUR SARANA PERKERETAAPIAN	AHLI MUDA	Direktorat Lalu Lintas Dan Angkutan Kereta Api
124	Muhammad Imsa Rhomadon T.	19870526 201012 1 004	Penata (III/c)	INSPEKTUR SARANA PERKERETAAPIAN	AHLI MUDA	Direktorat Lalu Lintas Dan Angkutan Kereta Api
125	Yuyut Wibowo	19821120 200912 1 006	Penata Tingkat I (III/d)	INSPEKTUR SARANA PERKERETAAPIAN	AHLI MUDA	Direktorat Sarana Perkeretaapian
126	Ivana	19800805 200604 2 001	Penata (III/c)	INSPEKTUR SARANA PERKERETAAPIAN	AHLI MUDA	Direktorat Sarana Perkeretaapian
127	Anik Setiani	19740112 200502 2 001	Penata Tingkat I (III/d)	INSPEKTUR SARANA PERKERETAAPIAN	AHLI MUDA	Direktorat Sarana Perkeretaapian
128	Irwan Wijaya	19791124 201012 1 001	Penata Tingkat I (III/d)	INSPEKTUR SARANA PERKERETAAPIAN	AHLI MUDA	Direktorat Sarana Perkeretaapian
129	Venny Arianti	19870605 200912 2 002	Penata (III/c)	INSPEKTUR SARANA PERKERETAAPIAN	AHLI MUDA	Direktorat Sarana Perkeretaapian

NO	NAMA	NIP	PANGKAT/ GOLONGAN	USULAN JABATAN	USULAN JENJANG	UNIT KERJA SAAT INI
130	Dwi Kurniadi Gunawan	19891126 201503 1 001	Penata Muda (III/a)	INSPEKTUR SARANA PERKERETAAPIAN	AHLI PERTAMA	Direktorat Sarana Perkeretaapian
131	Ari supriantoro	19790915 200112 1 002	Pembina (IV/a)	INSPEKTUR SARANA PERKERETAAPIAN	AHLI MADYA	Direktorat Sarana Perkeretaapian
132	Hendry Nuryanuar	19780103 200604 1 002	Pembina (IV/a)	INSPEKTUR SARANA PERKERETAAPIAN	AHLI MADYA	Direktorat Sarana Perkeretaapian
133	Rahmawaty	19710729 200604 2 001	Penata Tingkat I (III/d)	INSPEKTUR SARANA PERKERETAAPIAN	AHLI MUDA	Direktorat Sarana Perkeretaapian
134	Akhmad Yaskur	19781004 201012 1 001	Penata Tingkat I (III/d)	INSPEKTUR SARANA PERKERETAAPIAN	AHLI MUDA	Direktorat Sarana Perkeretaapian
135	Agus Sunaryo Hadi Sang Putro	19860820 201402 1 001	Penata Muda Tingkat I (III/b)	INSPEKTUR SARANA PERKERETAAPIAN	AHLI PERTAMA	Direktorat Sarana Perkeretaapian
136	Andriansyah Syaifullah	19771202 200312 1 002	Penata Tingkat I (III/d)	INSPEKTUR SARANA PERKERETAAPIAN	AHLI MUDA	Direktorat Sarana Perkeretaapian
137	Hotma Sahala Tua Hutagalung	19710907 200901 1 002	Penata Tingkat I (III/d)	INSPEKTUR SARANA PERKERETAAPIAN	AHLI MUDA	Direktorat Sarana Perkeretaapian
138	Indra Noeresa	19781107 200312 1 003	Penata Tingkat I (III/d)	INSPEKTUR SARANA PERKERETAAPIAN	AHLI MUDA	Direktorat Sarana Perkeretaapian
139	Nur Cholis	19821022 200812 1 003	Penata (III/c)	INSPEKTUR SARANA PERKERETAAPIAN	AHLI MUDA	Direktorat Sarana Perkeretaapian
140	Ary Lundi Ayu Oktrada	19821004 200604 2 002	Pembina (IV/a)	INSPEKTUR SARANA PERKERETAAPIAN	AHLI MADYA	Direktorat Sarana Perkeretaapian
141	Daniel Paundanan	19740524 200712 1 001	Penata Tingkat I (III/d)	INSPEKTUR SARANA PERKERETAAPIAN	AHLI MUDA	Direktorat Sarana Perkeretaapian
142	Todo Binsar Parulian	19830429 201012 1 003	Penata Tingkat I (III/d)	INSPEKTUR SARANA PERKERETAAPIAN	AHLI MUDA	Direktorat Sarana Perkeretaapian

NO	NAMA	NIP	PANGKAT/ GOLONGAN	USULAN JABATAN	USULAN JENJANG	UNIT KERJA SAAT INI
143	Doni Adi Kuncoro	19820105 200912 1 002	Penata Tingkat I (III/d)	INSPEKTUR SARANA PERKERETAAPIAN	AHLI MUDA	Direktorat Sarana Perkeretaapian
144	Elfrida Pane	19860913 200812 2 002	Penata (III/c)	INSPEKTUR SARANA PERKERETAAPIAN	AHLI MUDA	Direktorat Sarana Perkeretaapian
145	Ma'arif Aziz	19950531 202012 1 007	Penata Muda (III/a)	INSPEKTUR SARANA PERKERETAAPIAN	AHLI PERTAMA	Direktorat Sarana Perkeretaapian
146	Muhammad Andri	19941027 202012 1 002	Penata Muda (III/a)	INSPEKTUR SARANA PERKERETAAPIAN	AHLI PERTAMA	Direktorat Sarana Perkeretaapian
147	Aji Nurseto	19950611 202012 1 004	Penata Muda (III/a)	INSPEKTUR SARANA PERKERETAAPIAN	AHLI PERTAMA	Direktorat Sarana Perkeretaapian
148	Mohammad Ivan Yanuar	19940103 202012 1 013	Penata Muda (III/a)	INSPEKTUR SARANA PERKERETAAPIAN	AHLI PERTAMA	Direktorat Sarana Perkeretaapian
149	Moch Syawaluddin Fatra	19950317 202012 1 003	Penata Muda (III/a)	INSPEKTUR SARANA PERKERETAAPIAN	AHLI PERTAMA	Direktorat Sarana Perkeretaapian
150	Prabowo Ardiatomo	19931229 201902 1 004	Penata Muda Tingkat I (III/b)	INSPEKTUR SARANA PERKERETAAPIAN	AHLI PERTAMA	Direktorat Sarana Perkeretaapian
151	Mochendra	19890519 202012 1 004	Penata Muda (III/a)	INSPEKTUR SARANA PERKERETAAPIAN	AHLI PERTAMA	Direktorat Sarana Perkeretaapian
152	Arifin Budiman	19930124 202012 1 002	Penata Muda (III/a)	INSPEKTUR SARANA PERKERETAAPIAN	AHLI PERTAMA	Direktorat Sarana Perkeretaapian
153	Dian Fitriana Purwaningsih	19900427 202012 2 013	Penata Muda (III/a)	INSPEKTUR SARANA PERKERETAAPIAN	AHLI PERTAMA	Direktorat Sarana Perkeretaapian
154	Herman Sitorus	19860127 202012 1 002	Penata Muda (III/a)	INSPEKTUR SARANA PERKERETAAPIAN	AHLI PERTAMA	Direktorat Sarana Perkeretaapian
155	Dekri Fakti Bowo	19881019 202012 1 001	Penata Muda (III/a)	INSPEKTUR SARANA PERKERETAAPIAN	AHLI PERTAMA	Direktorat Sarana Perkeretaapian

NO	NAMA	NIP	PANGKAT/ GOLONGAN	USULAN JABATAN	USULAN JENJANG	UNIT KERJA SAAT INI
156	Hanibal Nuril Hakim	19950814 202012 1 001	Penata Muda (III/a)	INSPEKTUR SARANA PERKERETAAPIAN	AHLI PERTAMA	Direktorat Sarana Perkeretaapian
157	Ryco Pradhana Candra	19880416 201012 1 001	Penata (III/c)	PENGUJI PRASARANA PERKERETAAPIAN	AHLI MUDA	Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan
158	Maridosen Purba	19960801 202012 1 007	Penata Muda (III/a)	PENGUJI PRASARANA PERKERETAAPIAN	AHLI PERTAMA	Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Palembang
159	Widya Naufalinda	19970305 201902 2 003	Penata Muda Tingkat I (III/b)	PENGUJI PRASARANA PERKERETAAPIAN	AHLI PERTAMA	Direktorat Lalu Lintas Dan Angkutan Kereta Api
160	Ari Wibowo	19831225 201503 1 003	Penata (III/c)	PENGUJI PRASARANA PERKERETAAPIAN	AHLI MUDA	Balai Pengujian Perkeretaapian
161	Muhammad Aviz Shena	19861110 202012 1 003	Penata Muda (III/a)	PENGUJI PRASARANA PERKERETAAPIAN	AHLI PERTAMA	Balai Pengujian Perkeretaapian
162	Riva Aditya Pratama	19940109 202012 1 003	Penata Muda (III/a)	PENGUJI PRASARANA PERKERETAAPIAN	AHLI PERTAMA	Balai Pengujian Perkeretaapian
163	Widi Aditya	19890213 201012 1 004	Penata (III/c)	PENGUJI PRASARANA PERKERETAAPIAN	AHLI MUDA	Balai Pengujian Perkeretaapian
164	Antonius May Herman	19820517 201012 1 003	Penata Tingkat I (III/d)	PENGUJI PRASARANA PERKERETAAPIAN	AHLI MUDA	Balai Pengujian Perkeretaapian
165	Achmad Chusnul Khuluqi	19901202 202012 1 001	Penata Muda (III/a)	PENGUJI PRASARANA PERKERETAAPIAN	AHLI PERTAMA	Balai Pengujian Perkeretaapian
166	Chandra Setiawan	19890911 202012 1 003	Penata Muda (III/a)	PENGUJI PRASARANA PERKERETAAPIAN	AHLI PERTAMA	Balai Pengujian Perkeretaapian
167	Mochamad Arief	19880227 202012 1 002	Penata Muda (III/a)	PENGUJI PRASARANA PERKERETAAPIAN	AHLI PERTAMA	Balai Pengujian Perkeretaapian
168	Darmainillas	19680507 200604 2 002	Penata Tingkat I (III/d)	PENGUJI PRASARANA PERKERETAAPIAN	AHLI MUDA	Balai Pengujian Perkeretaapian

NO	NAMA	NIP	PANGKAT/ GOLONGAN	USULAN JABATAN	USULAN JENJANG	UNIT KERJA SAAT INI
169	Osio Hotmartua Siswanto Lumbanbatu	19830530 200803 1 001	Penata Tingkat I (III/d)	PENGUJI PRASARANA PERKERETAAPIAN	AHLI MUDA	Balai Pengujian Perkeretaapian
170	Deni Setiadi	19841211 200604 1 001	Penata (III/c)	PENGUJI PRASARANA PERKERETAAPIAN	AHLI MUDA	Balai Pengujian Perkeretaapian
171	Mochammad Rafli Kadafi	19860607 201012 1 005	Penata Tingkat I (III/d)	PENGUJI PRASARANA PERKERETAAPIAN	AHLI MUDA	Balai Pengujian Perkeretaapian
172	Muhammad Nur Salim	19921122 202012 1 004	Penata Muda (III/a)	PENGUJI PRASARANA PERKERETAAPIAN	AHLI PERTAMA	Balai Pengujian Perkeretaapian
173	M. Azizun Hakim	19970719 202012 1 003	Penata Muda (III/a)	PENGUJI PRASARANA PERKERETAAPIAN	AHLI PERTAMA	Direktorat Prasarana Perkeretaapian
174	Asih Chandrawaty	19890515 202012 2 003	Penata Muda (III/a)	PENGUJI PRASARANA PERKERETAAPIAN	AHLI PERTAMA	Direktorat Prasarana Perkeretaapian
175	Wahyu Puja Pradinta	19880824 201012 1 003	Penata Tingkat I (III/d)	PENGUJI PRASARANA PERKERETAAPIAN	AHLI MUDA	Direktorat Prasarana Perkeretaapian
176	Cholib Sariaji	19940822 202012 1 004	Penata Muda (III/a)	PENGUJI PRASARANA PERKERETAAPIAN	AHLI PERTAMA	Direktorat Prasarana Perkeretaapian
177	Melisa Silvia Anggraini	19870525 200812 2 001	Penata (III/c)	PENGUJI PRASARANA PERKERETAAPIAN	AHLI MUDA	Direktorat Prasarana Perkeretaapian
178	Erfan Wahyudianto	19801004 201012 1 004	Penata Tingkat I (III/d)	PENGUJI PRASARANA PERKERETAAPIAN	AHLI MUDA	Direktorat Prasarana Perkeretaapian
179	Indah Widya Astuti	19860126 200912 2 006	Penata Tingkat I (III/d)	PENGUJI PRASARANA PERKERETAAPIAN	AHLI MUDA	Direktorat Prasarana Perkeretaapian
180	Novie Rofi'ul Jamiah	19881107 202012 2 004	Penata Muda (III/a)	PENGUJI PRASARANA PERKERETAAPIAN	AHLI PERTAMA	Direktorat Prasarana Perkeretaapian
181	Iqbal Puji Akbar	19970208 202012 1 007	Penata Muda (III/a)	PENGUJI PRASARANA PERKERETAAPIAN	AHLI PERTAMA	Direktorat Prasarana Perkeretaapian

NO	NAMA	NIP	PANGKAT/ GOLONGAN	USULAN JABATAN	USULAN JENJANG	UNIT KERJA SAAT INI
182	Meilisa Garnisia	19880514 200912 2 001	Penata Tingkat I (III/d)	PENGUJI PRASARANA PERKERETAAPIAN	AHLI MUDA	Direktorat Prasarana Perkeretaapian
183	Dian Inayah	19960526 202012 2 010	Penata Muda (III/a)	PENGUJI PRASARANA PERKERETAAPIAN	AHLI PERTAMA	Direktorat Prasarana Perkeretaapian
184	Riki Solihin	19931115 202012 1 005	Penata Muda (III/a)	PENGUJI PRASARANA PERKERETAAPIAN	AHLI PERTAMA	Direktorat Prasarana Perkeretaapian
185	Mentari Hidanti	19950119 202012 2 011	Penata Muda (III/a)	PENGUJI PRASARANA PERKERETAAPIAN	AHLI PERTAMA	Direktorat Prasarana Perkeretaapian
186	Dianita Herdiana	19801213 200912 2 001	Penata Tingkat I (III/d)	PENGUJI PRASARANA PERKERETAAPIAN	AHLI MUDA	Direktorat Prasarana Perkeretaapian
187	Iqbal Ramadhan Harahap	19910415 202012 1 005	Penata Muda (III/a)	PENGUJI SARANA PERKERETAAPIAN	AHLI PERTAMA	Direktorat Keselamatan Perkeretaapian
188	Ari Pranovi Indrianto	19791024 200912 1 003	Penata Tingkat I (III/d)	PENGUJI SARANA PERKERETAAPIAN	AHLI MUDA	Direktorat Prasarana Perkeretaapian
189	Edwin Dwi Ahmad	19961015 202012 1 005	Penata Muda (III/a)	PENGUJI SARANA PERKERETAAPIAN	AHLI PERTAMA	Balai Pengujian Perkeretaapian
190	Tuti	19770517 200604 2 005	Penata (III/c)	PENGUJI SARANA PERKERETAAPIAN	AHLI MUDA	Balai Pengujian Perkeretaapian
191	Arief Yuniarto	19870608 202012 1 003	Penata Muda (III/a)	PENGUJI SARANA PERKERETAAPIAN	AHLI PERTAMA	Balai Pengujian Perkeretaapian
192	Muhammad Syarif Hidayat	19791201 200912 1 001	Penata Tingkat I (III/d)	PENGUJI SARANA PERKERETAAPIAN	AHLI MUDA	Balai Pengujian Perkeretaapian
193	Yayan Kusharyanto	19801110 200604 1 003	Penata Tingkat I (III/d)	PENGUJI SARANA PERKERETAAPIAN	AHLI MUDA	Balai Pengujian Perkeretaapian
194	Myrna Secunda	19830307 201012 2 002	Penata Tingkat I (III/d)	PENGUJI SARANA PERKERETAAPIAN	AHLI MUDA	Balai Pengujian Perkeretaapian

NO	NAMA	NIP	PANGKAT/ GOLONGAN	USULAN JABATAN	USULAN JENJANG	UNIT KERJA SAAT INI
195	Ferry Wijo Utomo	19961014 201801 1 003	Penata Muda (III/a)	PENGUJI SARANA PERKERETAAPIAN	AHLI PERTAMA	Balai Pengujian Perkeretaapian
196	Rustamiaji Jatmiko	19810725 201012 2002	Penata Tingkat I (III/d)	PENGUJI SARANA PERKERETAAPIAN	AHLI MUDA	Balai Pengujian Perkeretaapian
197	Mamat Haryanto	19810106 200912 1 004	Penata Tingkat I (III/d)	PENGUJI SARANA PERKERETAAPIAN	AHLI MUDA	Balai Pengujian Perkeretaapian
198	Andi Rastyo Wibowo	19870223 200604 1 001	Penata (III/c)	PENGUJI SARANA PERKERETAAPIAN	AHLI MUDA	Balai Pengujian Perkeretaapian
199	Muchamad Hafid	19920505 201801 1 003	Penata Muda (III/a)	PENGUJI SARANA PERKERETAAPIAN	AHLI PERTAMA	Balai Pengujian Perkeretaapian
200	Dewi Hestiwijayanti	19781227 200012 2 001	Penata Tingkat I (III/d)	PENGUJI SARANA PERKERETAAPIAN	AHLI MUDA	Balai Pengujian Perkeretaapian
201	Septian Ilham Mulfahmi	19970911 202012 1 001	Penata Muda (III/a)	PENGUJI SARANA PERKERETAAPIAN	AHLI PERTAMA	Balai Pengujian Perkeretaapian
202	Resti Kandi Sari	19970820 202012 2 003	Penata Muda (III/a)	PENGUJI SARANA PERKERETAAPIAN	AHLI PERTAMA	Balai Pengujian Perkeretaapian
203	Lilik Mujaki	19820609 200501 1 006	Penata Tingkat I (III/d)	PENGUJI SARANA PERKERETAAPIAN	AHLI MUDA	Balai Pengujian Perkeretaapian
204	Rizky Muhammad	19931207 202012 1 005	Penata Muda (III/a)	PENGUJI SARANA PERKERETAAPIAN	AHLI PERTAMA	Direktorat Sarana Perkeretaapian
205	Siti Heniyawati	19721016 200604 2 001	Pembina (IV/a)	PENGUJI SARANA PERKERETAAPIAN	AHLI MADYA	Direktorat Sarana Perkeretaapian
206	Armaini Dewi	19710515 200312 2 001	Penata Tingkat I (III/d)	PENGUJI SARANA PERKERETAAPIAN	AHLI MUDA	Direktorat Sarana Perkeretaapian
207	Pamela Meta Prabandari	19970519 201902 2 001	Pengatur Tingkat I (II/d)	ASISTEN PENGUJI PRASARANA PERKERETAAPIAN	TERAMPIL	Balai Pengujian Perkeretaapian

NO	NAMA	NIP	PANGKAT/ GOLONGAN	USULAN JABATAN	USULAN JENJANG	UNIT KERJA SAAT INI
208	Ezra Agung Pratama	19980423 202012 1 005	Pengatur (II/c)	ASISTEN PENGUJI PRASARANA PERKERETAAPIAN	TERAMPIL	Balai Pengujian Perkeretaapian
209	Dyanita Indria Sennia	19960807 202012 2 006	Pengatur (II/c)	ASISTEN PENGUJI PRASARANA PERKERETAAPIAN	TERAMPIL	Balai Pengujian Perkeretaapian
210	Aghni Maulana Hariono	19970226 202012 1 002	Pengatur (II/c)	ASISTEN PENGUJI PRASARANA PERKERETAAPIAN	TERAMPIL	Balai Pengujian Perkeretaapian
211	Joelfika Ramadhania	19970126 202012 2 009	Pengatur (II/c)	ASISTEN PENGUJI PRASARANA PERKERETAAPIAN	TERAMPIL	Balai Pengujian Perkeretaapian
212	Akhmad Barelvi	19881007 201012 1 007	Penata Muda Tingkat I (III/b)	ASISTEN PENGUJI PRASARANA PERKERETAAPIAN	MAHIR	Balai Pengujian Perkeretaapian
213	Fajar Bagus Sampurno	19991025 202112 1 001	Pengatur (II/c)	ASISTEN PENGUJI PRASARANA PERKERETAAPIAN	TERAMPIL	Balai Pengujian Perkeretaapian
214	Yorris Adam Firmansyah	20000617 202112 1 001	Pengatur (II/c)	ASISTEN PENGUJI PRASARANA PERKERETAAPIAN	TERAMPIL	Balai Pengujian Perkeretaapian
215	Gema Akbar Putra Pamungkas	19930615 202012 1 009	Pengatur (II/c)	ASISTEN PENGUJI PRASARANA PERKERETAAPIAN	TERAMPIL	Balai Pengujian Perkeretaapian
216	Salma Febry Rahmasari	20000213 202112 2 003	Pengatur (II/c)	ASISTEN PENGUJI PRASARANA PERKERETAAPIAN	TERAMPIL	Balai Pengujian Perkeretaapian
217	Elang Daffa Widiantara	20000809 202112 1 001	Pengatur (II/c)	ASISTEN PENGUJI SARANA PERKERETAAPIAN	TERAMPIL	Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Medan
218	Leonardo Alif Ibrahim	19990817 202112 1 001	Pengatur (II/c)	ASISTEN PENGUJI SARANA PERKERETAAPIAN	TERAMPIL	Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Padang
219	Sandy Sabilillah	19990905 202112 1 001	Pengatur (II/c)	ASISTEN PENGUJI SARANA PERKERETAAPIAN	TERAMPIL	Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Padang
220	Tati Hendrawati	19691022 201212 2 003	Pengatur (II/c)	ASISTEN PENGUJI SARANA PERKERETAAPIAN	TERAMPIL	Balai Pengujian Perkeretaapian

NO	NAMA	NIP	PANGKAT/ GOLONGAN	USULAN JABATAN	USULAN JENJANG	UNIT KERJA SAAT INI
221	Aji Permana Putra	19960526 202012 1 006	Pengatur (II/c)	ASISTEN PENGUJI SARANA PERKERETAAPIAN	TERAMPIL	Balai Pengujian Perkeretaapian
222	Linggar Subekti	19980228 202012 1 003	Pengatur (II/c)	ASISTEN PENGUJI SARANA PERKERETAAPIAN	TERAMPIL	Balai Pengujian Perkeretaapian
223	Muhammad Rizky Nur Rachmat	19960502 202012 1 004	Pengatur (II/c)	ASISTEN PENGUJI SARANA PERKERETAAPIAN	TERAMPIL	Balai Pengujian Perkeretaapian
224	Gita Fitri Ramadhani	19980129 202012 2 001	Pengatur (II/c)	ASISTEN PENGUJI SARANA PERKERETAAPIAN	TERAMPIL	Balai Pengujian Perkeretaapian
225	Yohanes Andung Pangestu	20000820 202112 1 002	Pengatur (II/c)	ASISTEN PENGUJI SARANA PERKERETAAPIAN	TERAMPIL	Balai Pengujian Perkeretaapian
226	Muhammad Wildan Al Baihaqi	19990826 202112 1 001	Pengatur (II/c)	ASISTEN PENGUJI SARANA PERKERETAAPIAN	TERAMPIL	Balai Pengujian Perkeretaapian
227	Adhimas Ilham Pramaditya	20000218 202112 1 001	Pengatur (II/c)	ASISTEN PENGUJI SARANA PERKERETAAPIAN	TERAMPIL	Balai Pengujian Perkeretaapian

Jakarta, Juli 2024

Ketua Tim Kelompok SDM dan Organisasi

A. Zaky, S.T., M.T.
NIP 197607152005021002

LAMPIRAN

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN 4

PERSENTASE PEMENUHAN RENCANA INDUK TIK BIDANG PERKERETAAPIAN

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
SEKRETARIAT JENDERAL
PUSAT DATA DAN TEKNOLOGI INFORMASI

Gedung Karya Lt.25
Jl. Medan Merdeka Barat No.8
Jakarta 10110

Telp. : 3456703, 3811308
Contact Center : 151

e-Mail : pusdatin@kemenhub.go.id
Website : http://www.kemenhub.go.id

Nomor : TI.005/11/5 PDTI.2024 Jakarta, 01 April 2024
Klasifikasi : Biasa
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Penyampaian Rekomendasi Hasil Reviu dan *Clearance* Kegiatan **Aplikasi Sertifikasi Kelaikan** Sarana Perkeretaapian Tahun Anggaran 2024

Yth. 1. Sekretaris Direktorat Jenderal Perkeretaapian;
2. **Direktur Sarana Perkeretaapian.**

Menindaklanjuti Surat:

1. Menindaklanjuti surat Plt. Sekretaris Direktorat Jenderal **Perkeretaapian nomor TI. 005/1/13/K1/DJKA/2023 tanggal** 17 Oktober 2023 hal Usulan Kegiatan TIK di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2024;
2. Menindaklanjuti Surat Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana Kementerian PAN-RB nomor: 271/DJAI/PR.01.01/03/2024, B/507/KT.03/2024 dan 04669/D1.11/03/2024 tanggal 19 Maret 2024 hal Penyampaian Hasil Evaluasi Anggaran Belanja SPBE Tahun 2024 di Lingkup Kementerian Perhubungan;
3. Menindaklanjuti Surat Direktur Jenderal Aplikasi Informatika **Kementerian Kominfo nomor: 271/DJAI/PR.01.01/03/2024,** B/507/KT.03/2024 dan 04669/D1.11/03/2024 tanggal 19 Maret 2024 hal Penyampaian Hasil Evaluasi Anggaran Belanja SPBE Tahun 2024 di Lingkup Kementerian Perhubungan;
4. Menindaklanjuti Surat Deputi Bidang Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan nomor: 271/DJAI/PR.01.01/03/2024, B/507/KT.03/2024 dan 04669/D1.11/03/2024 tanggal 19 Maret 2024 hal Penyampaian Hasil Evaluasi Anggaran Belanja SPBE Tahun 2024 di Lingkup Kementerian Perhubungan.

telah dilakukan reviu kegiatan TIK oleh Pusat Data dan Teknologi Informasi (Pusdatin).

Sesuai dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KM. 9 Tahun 2023 tentang Pedoman Reviu Teknologi Informasi dan Komunikasi di Lingkungan Kementerian Perhubungan, dengan ini kami sampaikan bahwa Kegiatan Aplikasi Sertifikasi Kelaikan Sarana Perkeretaapian Tahun Anggaran 2024 **dapat dilanjutkan** dengan memperhatikan catatan hasil reviu dan surat hasil rekomendasi *clearance* TIK Tahun Anggaran 2024 yang dikeluarkan oleh KemenPAN-RB, Kemenkominfo dan Kementerian PPN/BAPPENAS sebagaimana terlampir pada surat ini.

Rekomendasi Reviu TIK ini berlaku sepanjang Tahun Anggaran 2024 untuk Kegiatan Aplikasi Sertifikasi Kelaikan Sarana Perkeretaapian dengan pagu anggaran sebesar Rp. 98.900.000,- (Sembilan Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah) sesuai data dukung yang disampaikan ke Pusdatin sejak surat ini ditandatangani.

Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Direktorat Sarana Perkeretaapian bertanggungjawab sepenuhnya terhadap pelaksanaan kegiatan sesuai catatan hasil reviu untuk Kegiatan Aplikasi Sertifikasi Kelaikan Sarana Perkeretaapian.

Demikian disampaikan atas perhatian dan kerjasama Saudara, diucapkan terima kasih.

Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi,

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
PUSAT DATA DAN TEKNOLOGI INFORMASI
SEKRETARIAT JENDERAL

Raymond Ivan, H.A.S, S.T.
NIP. 19671213 199603 1 001

Tembusan:
1. Sekretaris Jenderal;
2. Direktur Jenderal Perkeretaapian;
3. Inspektur Jenderal;
4. Staf Ahli Bidang Teknologi dan Energi Perhubungan.

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
SEKRETARIAT JENDERAL
PUSAT DATA DAN TEKNOLOGI INFORMASI

Gedung Karya Lt.25
Jl. Medan Merdeka Barat No.8
Jakarta 10110

Telp. : 3456703, 3811308
Contact Center : 151

e-Mail : pusdatin@kemenhub.go.id
Website : http://www.kemenhub.go.id

CATATAN HASIL REVIU
ATAS USULAN KEGIATAN
PEMELIHARAAN APLIKASI SERTIFIKASI KELAIKAN SARANA PERKERETAAPIAN
TAHUN ANGGARAN 2024
DIREKTORAT SARANA PERKERETAAPIAN
DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

Berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 9 tahun 2023 tentang Pedoman Reviu Teknologi Informasi dan Komunikasi di Lingkungan Kementerian Perhubungan, bersama ini kami sampaikan Catatan Hasil Reviu sebagai berikut :

DATA UMUM

Kegiatan Pemeliharaan Aplikasi Sertifikasi Kelaikan Sarana Perkeretaapian Tahun Anggaran 2024 dengan pagu anggaran sebesar Rp. 98.900.000,- (Sembilan Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah).

A. Ruang Lingkup

1. Melakukan *backup data* dan apliaksi secara berkala;
2. Melakukan *update* aplikasi sesuai aturan yang berlaku;
3. Melakuakn *preventive maintenance* pada aplikasi;
4. Melakukan *corrective maintenance* bila ditemukan ditemukan *error* atau terjadi gangguan sistem pada aplikasi;
5. Melakukan *technical support* kepada user aplikasi;
6. Menyediakan layanan *Minor CR (Change Request)* untuk melakukan perubahan atau penyesuaian aplikasi yang tidak merubah mekanisme atau prosedur alur kerja aplikasi seperti:
   a. Merubah keterangan konten, logo, tema, warna, jika ada perubahan pada aplikasi;
   b. Meningkatkan fitur pada menu manajemen konten;
   c. Penambahan *filter* pada beberapa menu;
   d. Merubah tata letak tampilan inputan;
   e. Menambah informasi pada menu- menu tertentu;
   f. Menambah otorisasi *user* untuk melihat infomarsi tertentu pada aplikasi SISAKA;
   g. Menerapkan fitur *Single Sign On* (SSO) yang terintegrasi dengan Portal DJKA;
   h. Penyederhanaan relasi database;
   i. Terintegrasi dengan Aplikasi di lingkungan Kementerian Perhubungan terutama Direktorat Jenderal Perkeretaapian seperti Aplikasi Penetapan Identitas Sarana Perkeretaapian dan Aplikasi Pengujian Sarana Perkeretaapian
7. Membuat laporan operasional aplikasi secara berkala satu bulan sekali

B. *Output* Kegiatan

Output yang hendak dihasilkan dari kegiatan pengembangan sistem informasi sertifikasi sarana perkeretaapian dalam rangka layanan perlaksanaan sertifikasi sarana perkeretaapian ini dituangkan dalam bentuk:

1. Laporan Pemeliharaan aplikasi Sertifikasi Kelaikan Sarana Perkeretapian secara berkala;
2. Dokumentasi kegiatan *Corrective Maintenance*;
3. Kehandalan dan kestabilan Aplikasi Sertifikasi Kelaikan Sarana Perkeretaapian

C. Bisnis Proses

Berikut bisnis proses Aplikasi Sertifikasi Kelaikan Sarana Perkeretaapian, tidak ada perubahan proses bisnis dari yang sebelumnya seperti yang tertuang pada Peraturan Direktur Jenderal Perkeretaapian Nomor: PR-DJKA 3 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Layanan Sertifikasi Kelaikan Sarana Perkeretaapian Secara Eleketronik

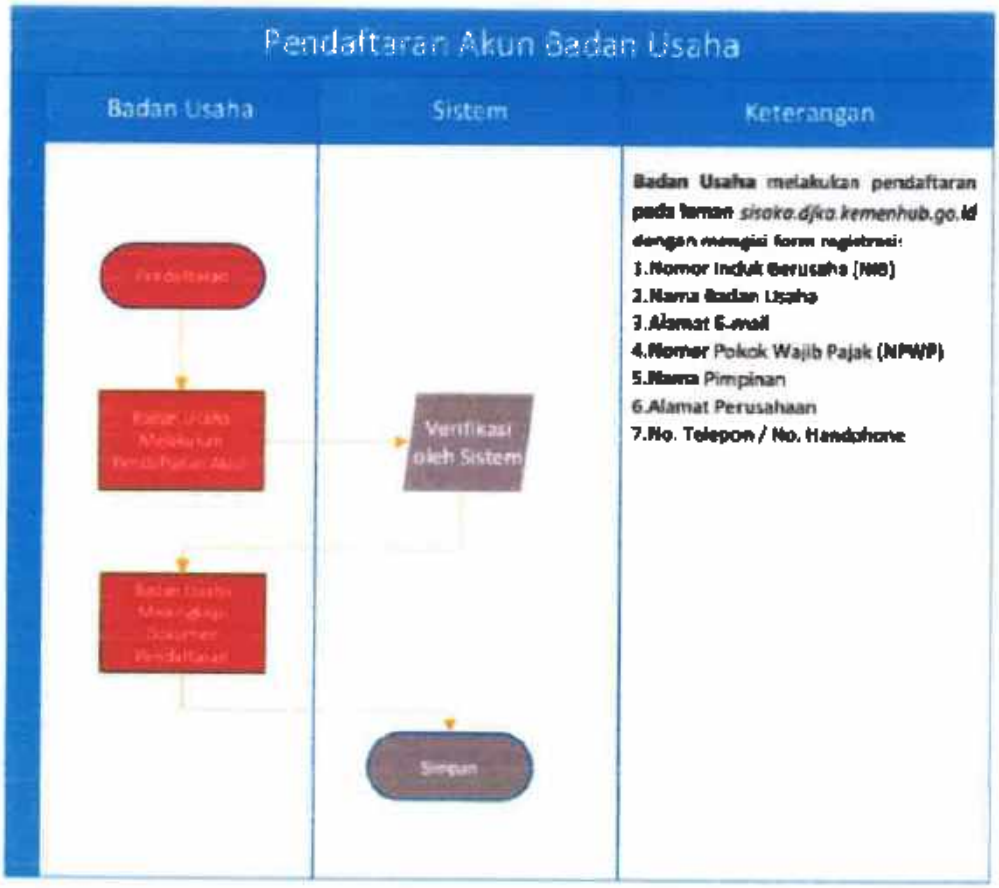

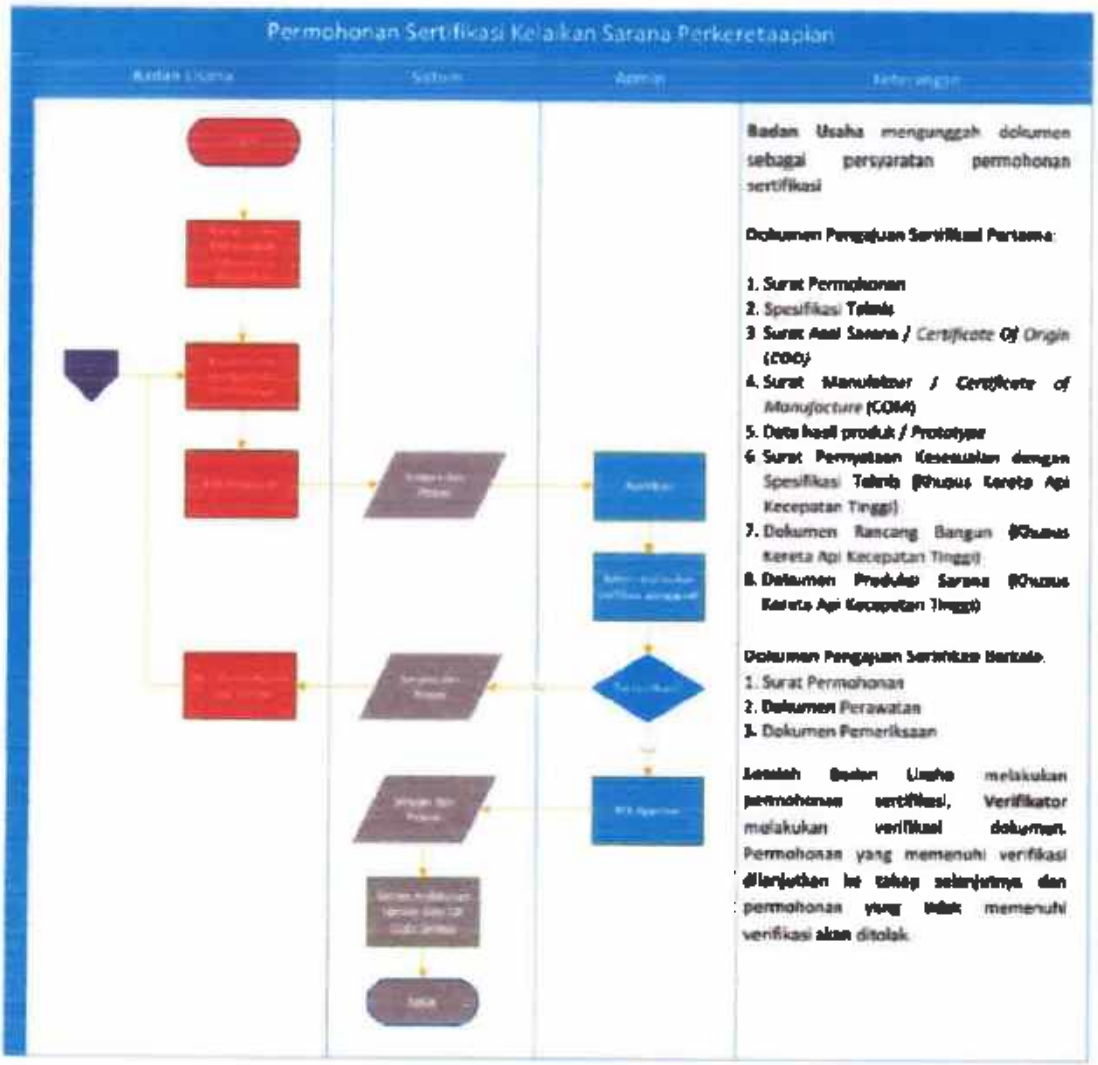
Permohonan Sertifikasi Kelaikan Sarana Perkeretaapian
Badan Usaha mengunggah dokumen sebagai persyaratan permohonan sertifikasi
Dokumen Pengajuan Sertifikasi Pertama:
1. Surat Permohonan
2. Spesifikasi Teknis
3 Surat Asal Sarana / Certificate Of Origin (COO)
4. Surat Manufaktur / Certificate of Manufacture (COM)
5. Data hasil produk / Prototype
6 Surat Pernyataan Kesesuaian dengan Spesifikasi Teknis (Khusus Kereta Api Kecepatan Tinggi)
7. Dokumen Rancang Bangun (Khusus Kereta Api Kecepatan Tinggi)
8. Dokumen Produksi Sarana (Khusus Kereta Api Kecepatan Tinggi)
Dokumen Pengajuan Sertifikasi Berkala:
1. Surat Permohonan
2. Dokumen Perawatan
3. Dokumen Pemeriksaan
Setelah Badan Usaha melakukan permohonan sertifikasi, Verifikator melakukan verifikasi dokumen. Permohonan yang memenuhi verifikasi dilanjutkan ke tahap selanjutnya dan permohonan yang tidak memenuhi verifikasi akan ditolak.

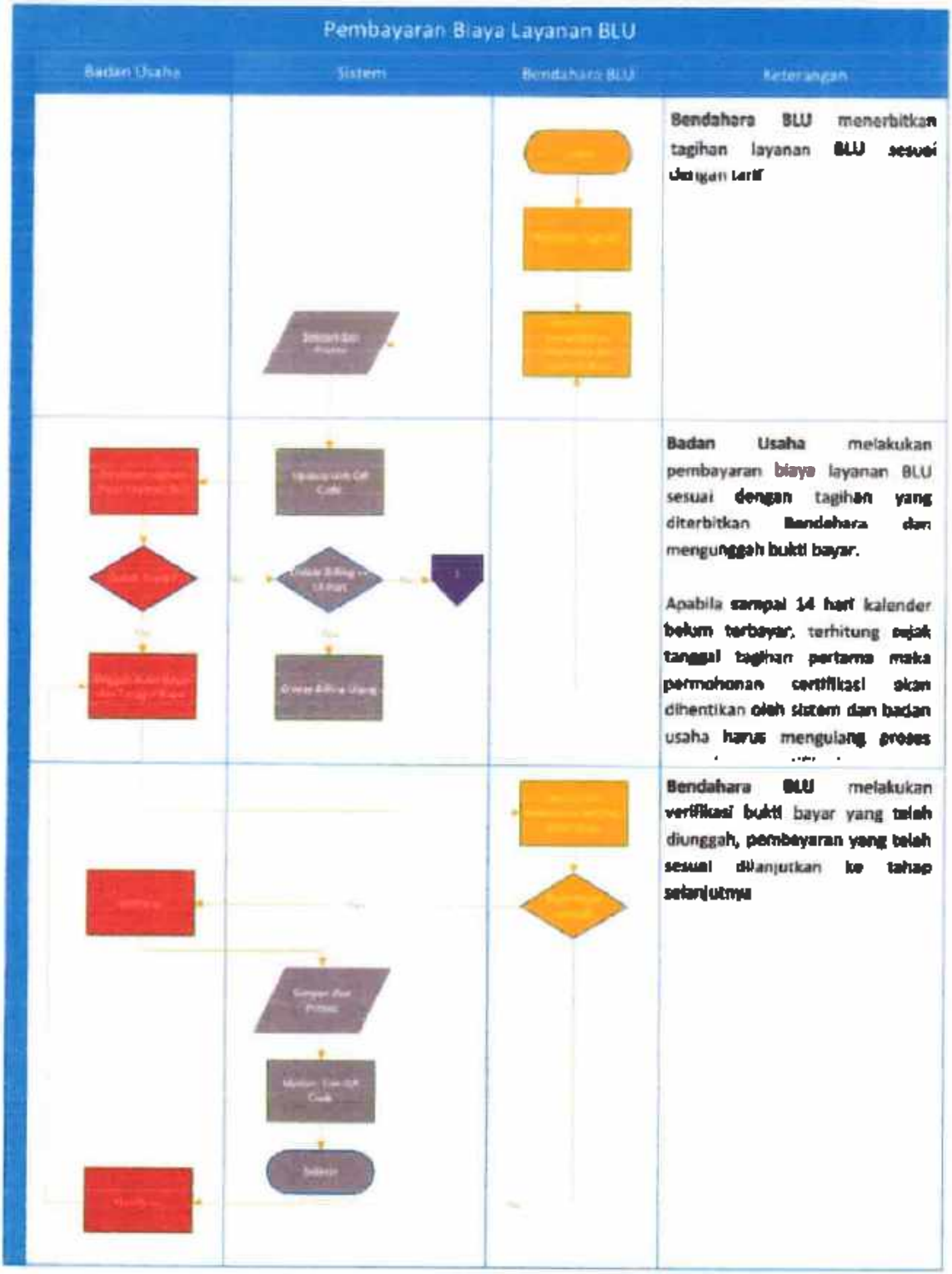
Pembayaran Biaya Layanan BLU
Badan Usaha
Sistem
Bendahara BLU
Keterangan
Bendahara BLU menerbitkan tagihan layanan BLU sesuai dengan tarif
Badan Usaha melakukan pembayaran biaya layanan BLU sesuai dengan tagihan yang diterbitkan Bendahara dan mengunggah bukti bayar.
Apabila sampai 14 hari kalender belum terbayar, terhitung sejak tanggal tagihan pertama maka permohonan sertifikasi akan dihentikan oleh sistem dan badan usaha harus mengulang proses
Bendahara BLU melakukan verifikasi bukti bayar yang telah diunggah, pembayaran yang telah sesuai dilanjutkan ke tahap selanjutnya

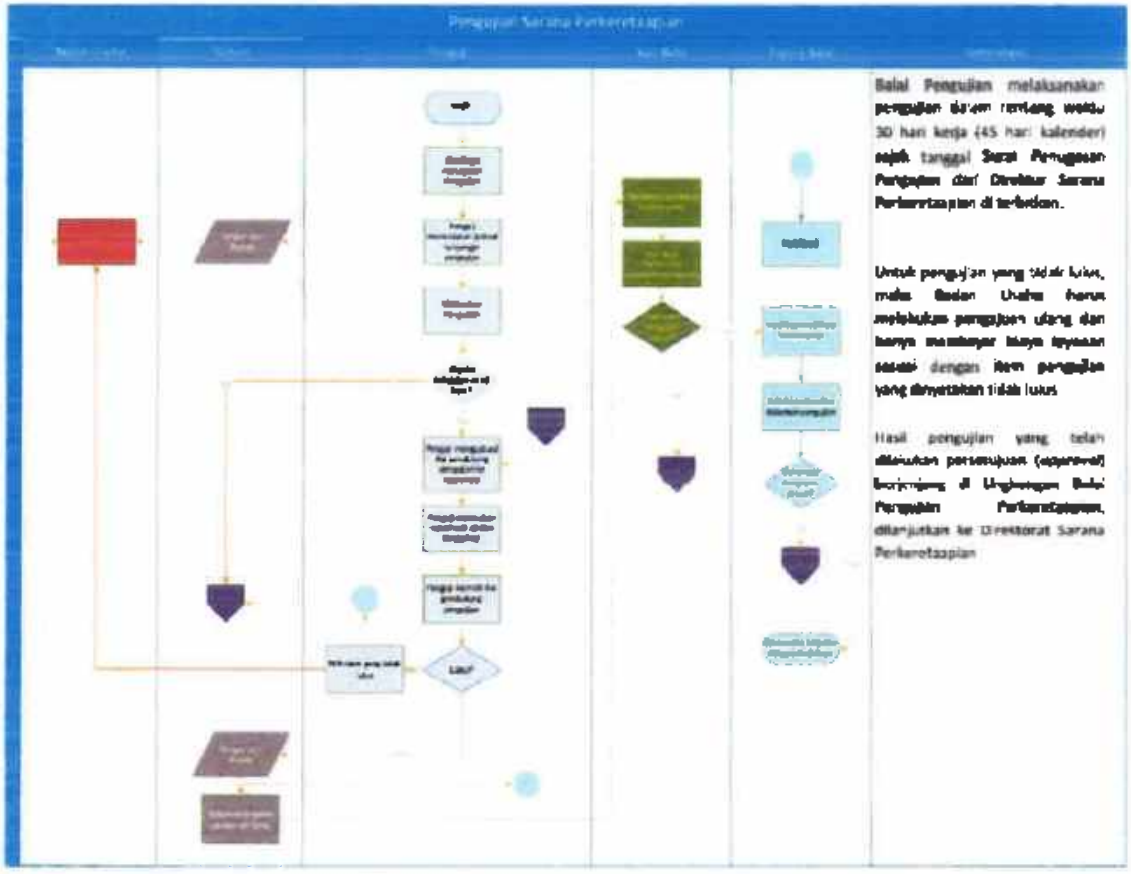

Balai Pengujian melaksanakan pengujian dalam rentang waktu 30 hari kerja (45 hari kalender) sejak tanggal Surat Penugasan Pengujian dari Direktur Sarana Perkeretaapian diterbitkan.

Untuk pengujian yang tidak lulus, maka Badan Usaha harus melakukan pengujian ulang dan hanya membayar biaya layanan sesuai dengan item pengujian yang dinyatakan tidak lulus

Hasil pengujian yang telah dilakukan persetujuan (approval) berjenjang di Lingkungan Balai Pengujian Perkeretaapian, dilanjutkan ke Direktorat Sarana Perkeretaapian

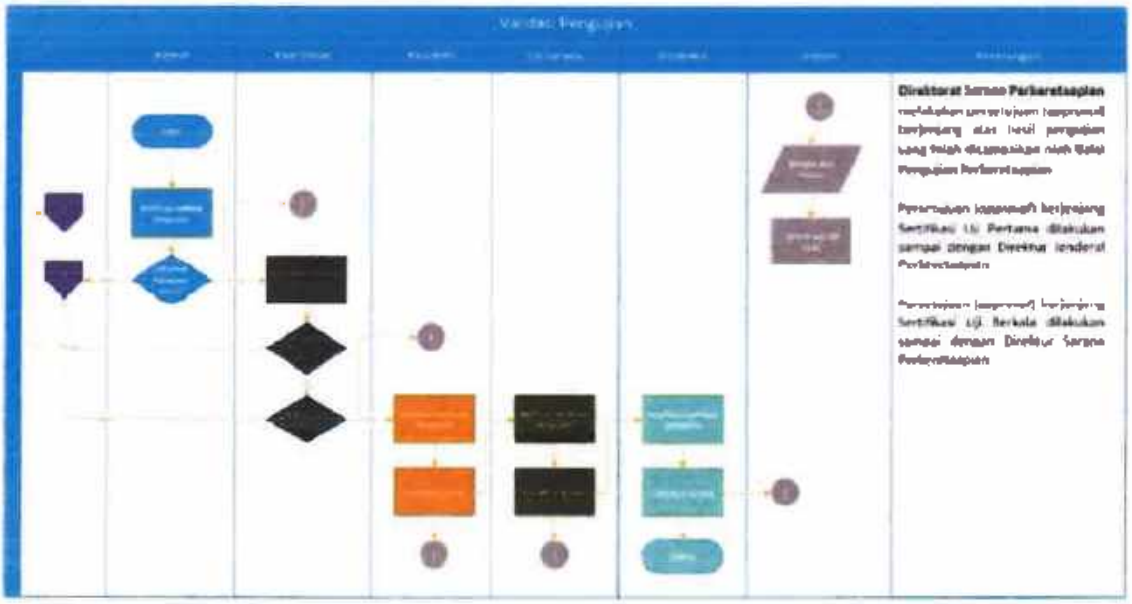

Direktorat Sarana Perkeretaapian

Persetujuan (approval) berjenjang Sertifikasi Uji Pertama dilakukan sampai dengan Direktur Jenderal Perkeretaapian

Persetujuan (approval) berjenjang Sertifikasi Uji Berkala dilakukan sampai dengan Direktur Sarana Perkeretaapian

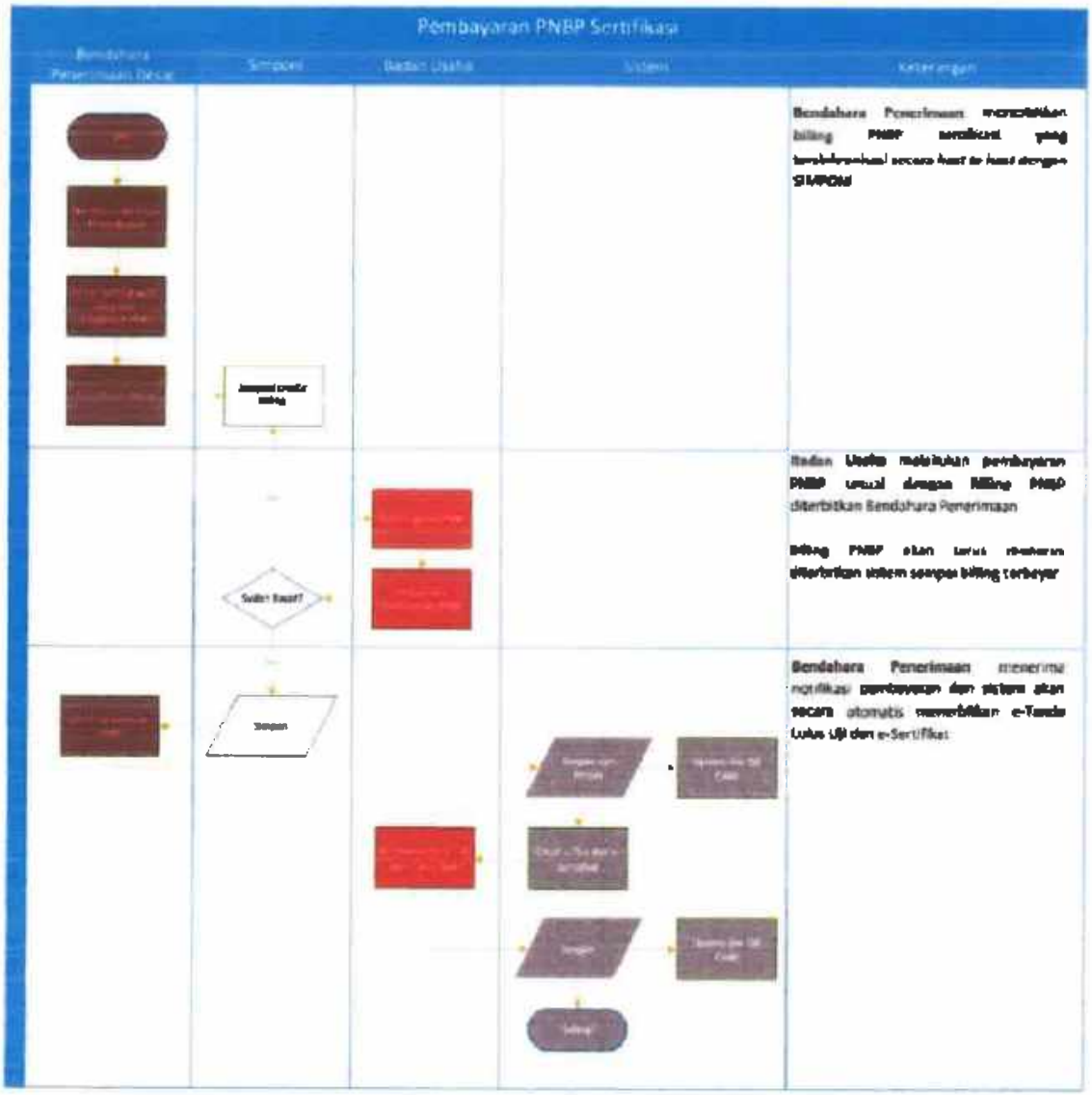

D. Tenaga Ahli

Tenaga ahli yang dibutuhkan dalam proses pemeliharaan sistem informasi sertifikasi sarana perkeretaapian dalam rangka layanan pelaksanaan pengujian sarana perkeretaapian memiliki kcahlian dibidang ilmu teknologi, adapun rincian tenaga ahli tersebut adalah sebagai berikut:

No	Tenaga Ahli	Pengalaman	Jumlah	Pendidikan Minimal
1	Ahli Pemrograman Perangkat Lunak / *Team Leader*	≥ 7 tahun	1 orang	S1 Teknik Komputer/Sistem Informatika
2	Ahli *Database*	≥ 3 tahun	1 orang	S1 Informatika

E. Spesifikasi Teknis

a. Fungsi aplikasi dan spesifikasi
   - Pengguna aplikasi ini dalam proses pengajuan permohonan akan banyak dokumen-dokumen yang disertakan sehingga hardware yang cocok adalah laptop/ desktop pc sehingga untuk memudahkan pengguna dibangun berbasis web base yang dapat berjalan pada berbagai browser internet dan responsive terhadap layar lebar
   - Framework yang digunakan adalah laravell versi 8
   - Bahasa pemrograman php versi 7.4
   - Database MySQL versi 5.7

b. Kebutuhan Hardware Server
   - Processor : Intel (R) Core (TM)2 Duo CPU T7700 @2.4GHz, 8 cores
   - RAM : 16 GB RAM
   - HDD : kapasitas 500 GB
   - Perangkat Jaringan Ruang Server Bagren DJKA

c. Kebutuhan Software Server
   - Dedicated server dengan spesifikasi minimum standar Web Server
   - Server OS : Centos 8
   - Akses FTP (Akses by Filezilla dll)
   - Web Service System (XAMPP/LAMPP dsb)
   - PHP Versi 8.1 Up
   - Database system MySQL versi 8 atau yang lebih terbaru
   - Firewall

d. Keamanan aplikasi
   - Menggunakan captcha pada halaman login
   - Menggunakan system https
   - Satu user dapat login pada satu perangkat
   - Menerapkan user session dan log user untuk setiap aksi dalam penggunaan aplikasi oleh semua user
   - Menggunakan WAF aplikasi firewall

F. Catatan Rekomendasi

Tim Reviu Pusat Data dan Teknologi Informasi mencatat rekomendasi untuk Pemeliharaan Aplikasi Sertifikasi Kelaikan Sarana Perkeretaapian Tahun Anggaran 2024 yang diusulkan oleh Direktorat Sarana Perkeretaapian – Direktorat Jenderal Perkeretaapian dengan catatan sebagai berikut :

1. Diwajibkan mengacu pada Perpres nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan KM nomor 112 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Di Lingkungan Kementerian Perhubungan;
2. Kegiatan ini wajib mengacu pada KM nomor 222 tahun 2020 tentang Rencana Induk Teknologi Informasi dan Komunikasi di lingkungan Kementerian Perhubungan Tahun 2020-2024 sebagai data dukung utama dalam kegiatan ini;
3. Berpedoman pada Arsitektur TIK dan KM nomor 106 Tahun 2023 tentang Peta Rencana SPBE Kementerian Perhubungan;

4. Sesuai Peraturan Presiden nomor 39 tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (SDI) dan KM nomor 150 tahun 2021 tentang Tata Kelola Data di lingkungan Kementerian Perhubungan, agar memenuhi Prinsip Tata Kelola Data Kementerian Perhubungan sebagai penunjang Satu Data Indonesia sehingga pengusul kegiatan sebagai produsen data wajib menerapkan Prinsip Satu Data Indonesia (SDI) yang mencakup Standar Data dan Metadata, Kode Referensi/ Data Induk serta Interoperabilitas guna mengintegrasikan data ke Pusdatin serta menyiapkan *web service* integrasi untuk dapat berbagi pakai;
5. Dalam proses pengembangan aplikasi harus menggunakan Sistem Operasi, *development tools* terkini dan memanfaatkan infrastruktur TIK berbagi pakai berupa *Government Cloud* atau Pusat Data Nasional (PDN);
6. Dengan berpedoman pada prinsip SDLC KP nomor 536 Tahun 2016 tentang Panduan Teknis Penerapan *System Development Life Cycle* (SDLC) Sistem Informasi di Lingkungan Kementerian Perhubungan dan KM nomor 107 Tahun 2023 tentang Kebijakan dan Standar Sistem Manajemen Keamanan Informasi di Lingkungan Kementerian Perhubungan, kegiatan tersebut wajib melakukan *User Acceptance Test* (UAT), *System Integration Test* (SIT), *Vulnerability Assessment* (VA) dan *Penetration Testing* (Pentest);
7. Agar memperhatikan terkait Aset Tak Berwujud (ATB) dalam rangka tertib inventaris APBN;
8. Menerapkan standar biaya berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan KM nomor 6 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan dan Penetapan Harga Perkiraan Sendiri untuk Pengadaan Jasa Konsultansi Non konstruksi di Lingkungan Kementerian Perhubungan.

Jakarta, Januari 2024

SEKRETARIAT DITJEN PERKERETAAPIAN	DIREKTORAT SARANA PERKERETAAPIAN	PUSDATIN
Andi Guntur Asapa	**Lukman Al Amin**	**R. Rachmat Herwannuri**
NIP. 198407242007121001	NIP. 19810124 200112 1 001	NIP. 19700814 199903 1 001

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
SEKRETARIAT JENDERAL
PUSAT DATA DAN TEKNOLOGI INFORMASI

Gedung Karya Lt.25
Jl. Medan Merdeka Barat No.8
Jakarta 10110

Telp. : 3456703, 3811308
Contact Center : 151

e-Mail : pusdatin@kemenhub.go.id
Website : http://www.kemenhub.go.id

CATATAN HASIL REVIU
ATAS USULAN KEGIATAN PEMELIHARAAN APLIKASI SERTIFIKASI KELAIKAN SARANA PERKERETAAPIAN
TAHUN ANGGARAN 2024
DIREKTORAT SARANA PERKERETAAPIAN
DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

Berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 9 tahun 2023 tentang Pedoman Reviu Teknologi Informasi dan Komunikasi di Lingkungan Kementerian Perhubungan, bersama ini kami sampaikan Catatan Hasil Reviu sebagai berikut :

DATA UMUM

Kegiatan Pemeliharaan Aplikasi Sertifikasi Kelaikan Sarana Perkeretaapian Tahun Anggaran 2024 dengan pagu anggaran sebesar Rp. 98.900.000,- (Sembilan Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah).

A. Ruang Lingkup

1. Melakukan *backup data* dan apliaksi secara berkala;
2. Melakukan *update* aplikasi sesuai aturan yang berlaku;
3. Melakuakn *preventive maintenance* pada aplikasi;
4. Melakukan *corrective maintenance* bila ditemukan ditemukan *error* atau terjadi gangguan sistem pada aplikasi;
5. Melakukan *technical support* kepada user aplikasi;
6. Menyediakan layanan *Minor CR (Change Request)* untuk melakukan perubahan atau penyesuaian aplikasi yang tidak merubah mekanisme atau prosedur alur kerja aplikasi seperti:
   a. Merubah keterangan konten, logo, tema, warna, jika ada perubahan pada aplikasi;
   b. Meningkatkan fitur pada menu manajemen konten;
   c. Penambahan *filter* pada beberapa menu;
   d. Merubah tata letak tampilan inputan;
   e. Menambah informasi pada menu- menu tertentu;
   f. Menambah otorisasi *user* untuk melihat infomarsi tertentu pada aplikasi SISAKA;
   g. Menerapkan fitur *Single Sign On* (SSO) yang terintegrasi dengan Portal DJKA;
   h. Penyederhanaan relasi database;
   i. Terintegrasi dengan Aplikasi di lingkungan Kementerian Perhubungan terutama Direktorat Jenderal Perkeretaapian seperti Aplikasi Penetapan Identitas Sarana Perkeretaapian dan Aplikasi Pengujian Sarana Perkeretaapian
7. Membuat laporan operasional aplikasi secara berkala satu bulan sekali

B. *Output* Kegiatan

Output yang hendak dihasilkan dari kegiatan pengembangan sistem informasi sertifikasi sarana perkeretaapian dalam rangka layanan perlaksanaan sertifikasi sarana perkeretaapian ini dituangkan dalam bentuk:

1. Laporan Pemeliharaan aplikasi Sertifikasi Kelaikan Sarana Perkeretapian secara berkala;
2. Dokumentasi kegiatan *Corrective Maintenance*;
3. Kehandalan dan kestabilan Aplikasi Sertifikasi Kelaikan Sarana Perkeretaapian

C. Bisnis Proses

Berikut bisnis proses Aplikasi Sertifikasi Kelaikan Sarana Perkeretaapian, tidak ada perubahan proses bisnis dari yang sebelumnya seperti yang tertuang pada Peraturan Direktur Jenderal Perkeretaapian Nomor: PR-DJKA 3 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Layanan Sertifikasi Kelaikan Sarana Perkeretaapian Secara Eleketronik

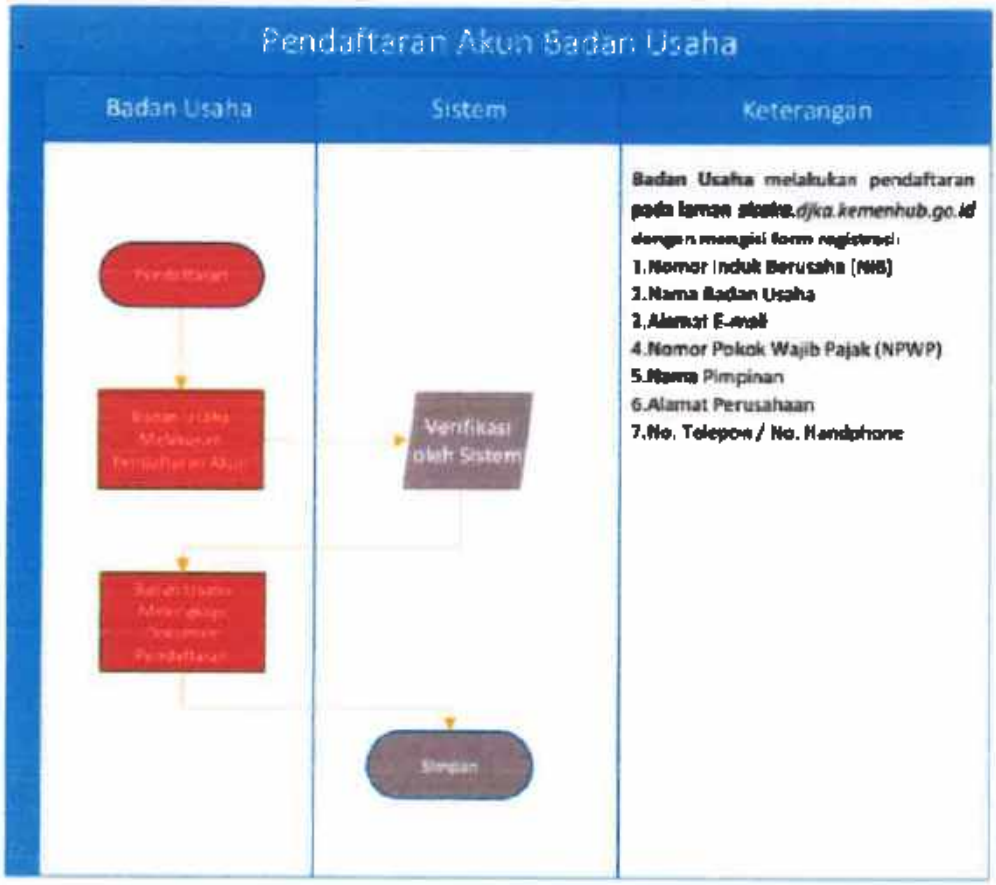

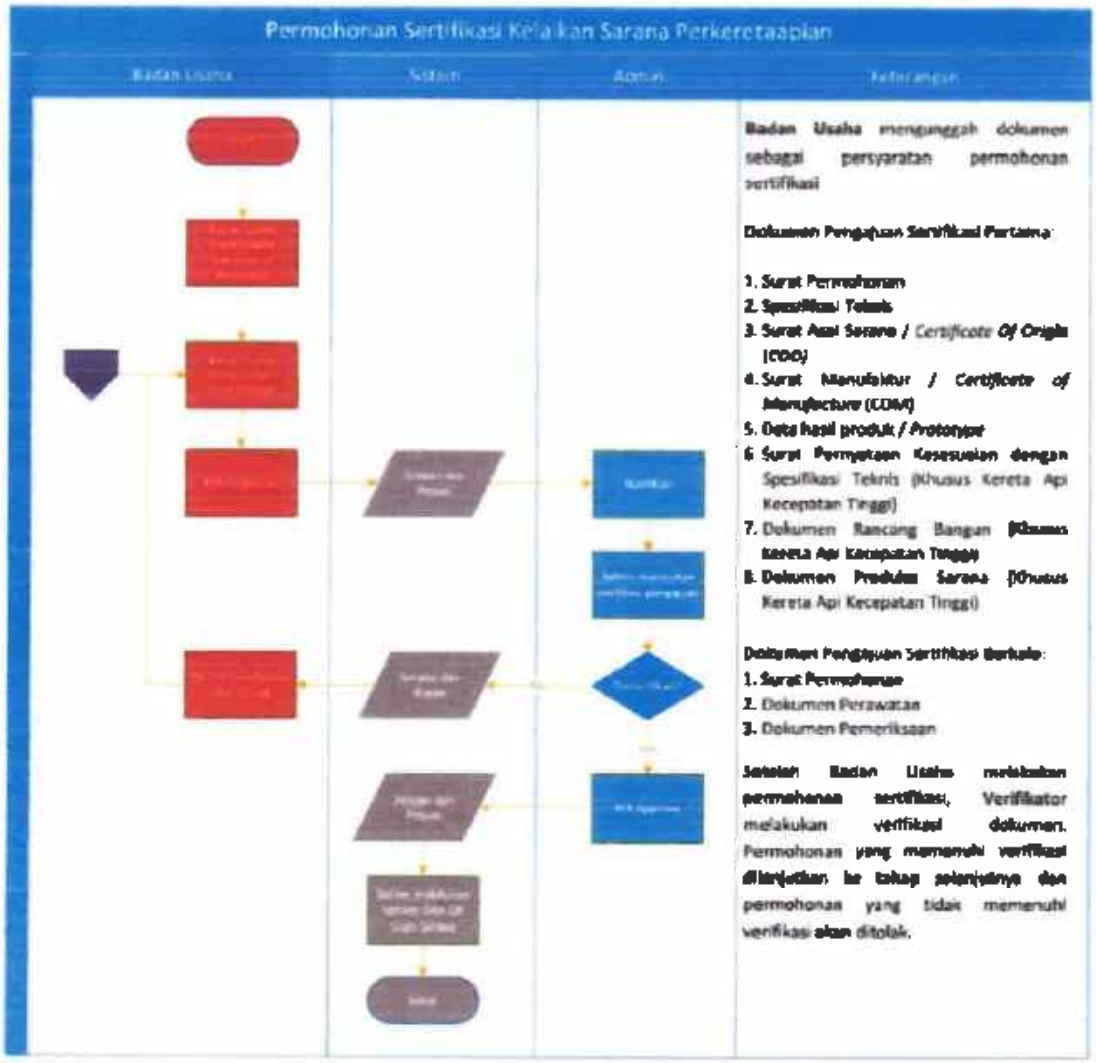
Permohonan Sertifikasi Kelaikan Sarana Perkeretaapian
Badan Usaha
Sistem
Admin
Keterangan
Badan Usaha menganggap dokumen sebagai persyaratan permohonan sertifikasi
Dokumen Pengajuan Sertifikasi Pertama:
1. Surat Permohonan
2. Spesifikasi Teknis
3. Surat Asal Sarana / Certificate Of Origin (COO)
4. Surat Manufaktur / Certificate of Manufacture (COM)
5. Data hasil produk / Prototype
6 Surat Pernyataan Kesesuaian dengan Spesifikasi Teknis (Khusus Kereta Api Kecepatan Tinggi)
7. Dokumen Rancang Bangun (Khusus Kereta Api Kecepatan Tinggi)
8. Dokumen Produksi Sarana (Khusus Kereta Api Kecepatan Tinggi)
Dokumen Pengajuan Sertifikasi Berkala:
1. Surat Permohonan
2. Dokumen Perawatan
3. Dokumen Pemeriksaan
Setelah Badan Usaha melakukan permohonan sertifikasi, Verifikator melakukan verifikasi dokumen. Permohonan yang memenuhi verifikasi dilanjutkan ke tahap selanjutnya dan permohonan yang tidak memenuhi verifikasi akan ditolak.

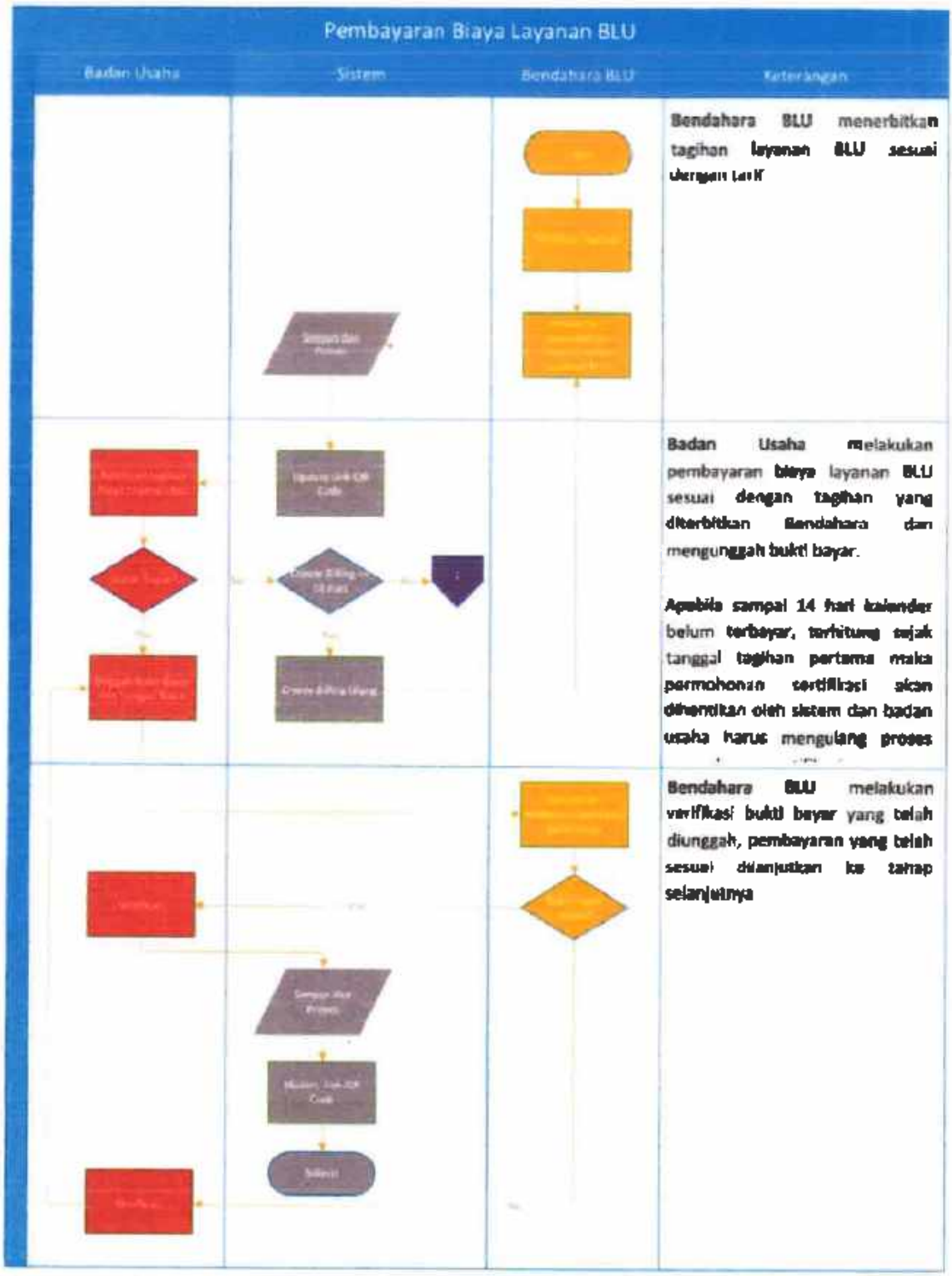
Pembayaran Biaya Layanan BLU
Badan Usaha
Sistem
Bendahara BLU
Keterangan
Bendahara BLU menerbitkan tagihan layanan BLU sesuai
Badan Usaha melakukan pembayaran biaya layanan BLU sesuai dengan tagihan yang diterbitkan Bendahara dan mengunggah bukti bayar.
Apabila sampai 14 hari kalender belum terbayar, terhitung sejak tanggal tagihan pertama maka permohonan sertifikasi akan dihentikan oleh sistem dan badan usaha harus mengulang proses
Bendahara BLU melakukan verifikasi bukti bayar yang telah diunggah, pembayaran yang telah sesuai dilanjutkan ke tahap selanjutnya

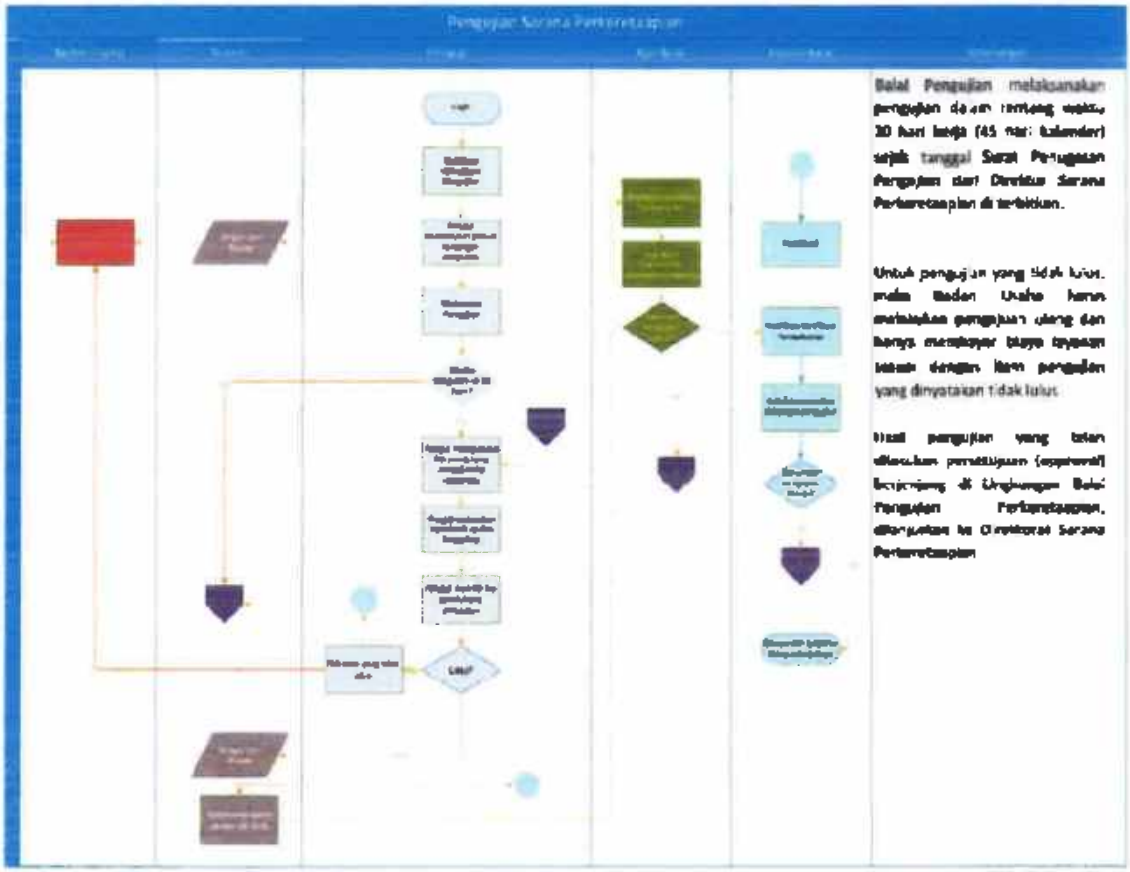
Pengujian Sarana Perkeretapian
Balai Pengujian melaksanakan pengujian dalam rentang waktu 30 hari kerja (45 hari kalender) sejak tanggal Surat Penugasan Pengujian dari Direktur Sarana Perkeretapian diterbitkan.
Untuk pengujian yang tidak lulus, maka Badan Usaha harus melakukan pengujian ulang dan hanya membayar biaya layanan sesuai dengan item pengujian yang dinyatakan tidak lulus
Hasil pengujian yang telah dilakukan penelitian (approval) berjenjang di Lingkungan Balai Pengujian Perkeretapian, diberitahukan ke Direktorat Sarana Perkeretapian

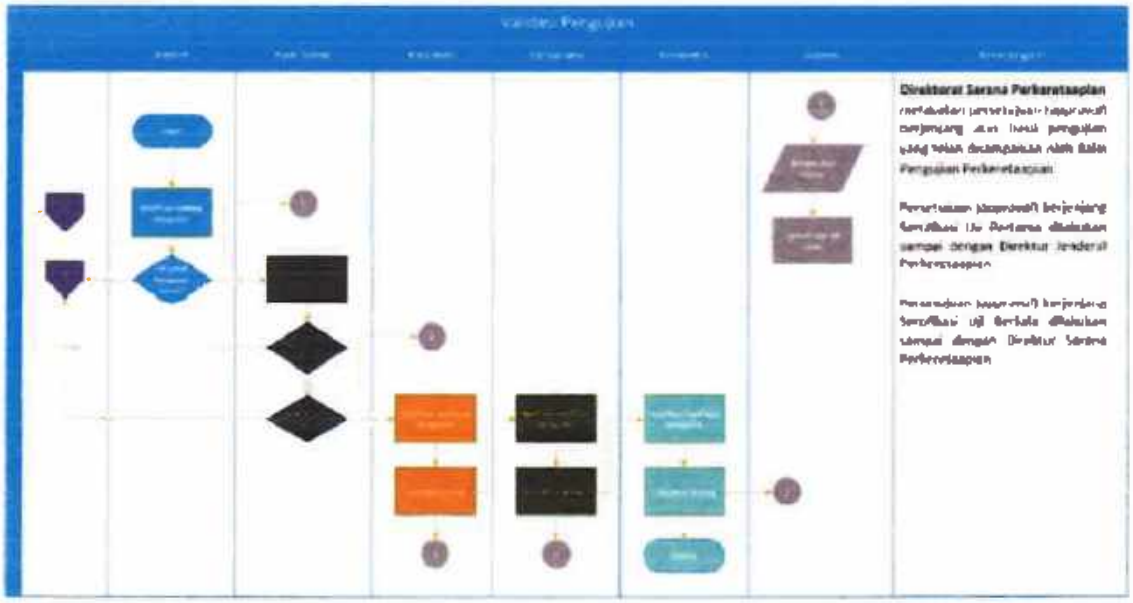
Validasi Pengujian
Direktorat Sarana Perkeretapian

4 R 6

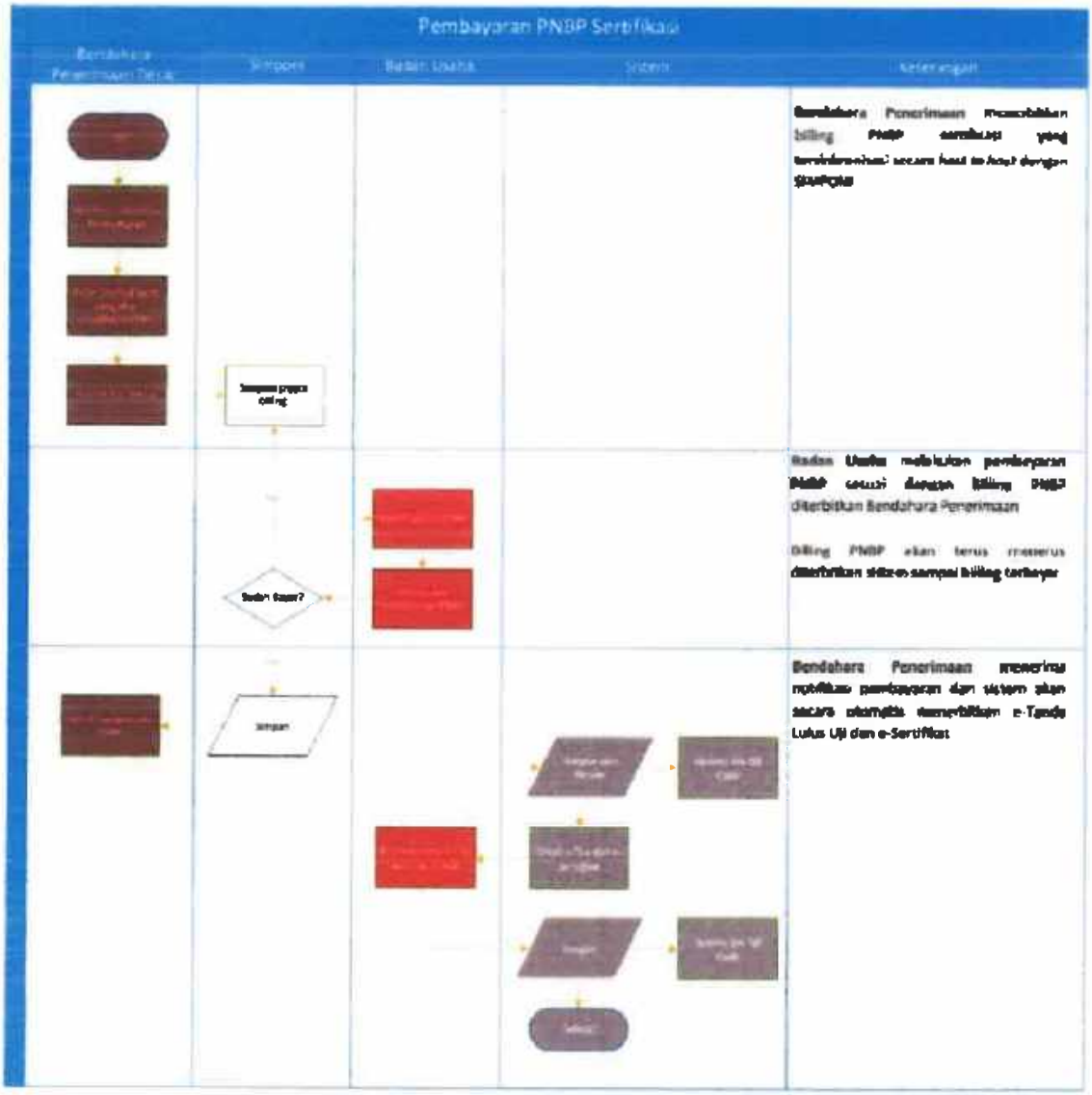

D. Tenaga Ahli

Tenaga ahli yang dibutuhkan dalam proses pemeliharaan sistem informasi sertifikasi sarana perkeretaapian dalam rangka layanan pelaksanaan pengujian sarana perkeretaapian memiliki keahlian dibidang ilmu teknologi, adapun rincian tenaga ahli tersebut adalah sebagai berikut:

No	Tenaga Ahli	Pengalaman	Jumlah	Pendidikan Minimal
1	Ahli Pemrograman Perangkat Lunak / *Team Leader*	≥ 7 tahun	1 orang	S1 Teknik Komputer/Sistem Informatika
2	Ahli *Database*	≥ 3 tahun	1 orang	S1 Informatika

E. Spesifikasi Teknis

a. Fungsi aplikasi dan spesifikasi
   - Pengguna aplikasi ini dalam proses pengajuan permohonan akan banyak dokumen-dokumen yang disertakan sehingga hardware yang cocok adalah laptop/ desktop pc sehingga untuk memudahkan pengguna dibangun berbasis web base yang dapat berjalan pada berbagai browser internet dan responsive terhadap layar lebar
   - Framework yang digunakan adalah laravell versi 8
   - Bahasa pemrograman php versi 7.4
   - Database MySQL versi 5.7

b. Kebutuhan Hardware Server
   - Processor : Intel (R) Core (TM)2 Duo CPU T7700 @2.4GHz, 8 cores
   - RAM : 16 GB RAM
   - HDD : kapasitas 500 GB
   - Perangkat Jaringan Ruang Server Bagren DJKA

c. Kebutuhan Software Server
   - Dedicated server dengan spesifikasi minimum standar Web Server
   - Server OS : Centos 8
   - Akses FTP (Akses by Filezilla dll)
   - Web Service System (XAMPP/LAMPP dsb)
   - PHP Versi 8.1 Up
   - Database system MySQL versi 8 atau yang lebih terbaru
   - Firewall

d. Keamanan aplikasi
   - Menggunakan captcha pada halaman login
   - Menggunakan system https
   - Satu user dapat login pada satu perangkat
   - Menerapkan user session dan log user untuk setiap aksi dalam penggunaan aplikasi oleh semua user
   - Menggunakan WAF aplikasi firewall

F. Catatan Rekomendasi

Tim Reviu Pusat Data dan Teknologi Informasi mencatat rekomendasi untuk Pemeliharaan Aplikasi Sertifikasi Kelaikan Sarana Perkeretaapian Tahun Anggaran 2024 yang diusulkan oleh Direktorat Sarana Perkeretaapian – Direktorat Jenderal Perkeretaapian dengan catatan sebagai berikut :

1. Diwajibkan mengacu pada Perpres nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan KM nomor 112 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Di Lingkungan Kementerian Perhubungan;
2. Kegiatan ini wajib mengacu pada KM nomor 222 tahun 2020 tentang Rencana Induk Teknologi Informasi dan Komunikasi di lingkungan Kementerian Perhubungan Tahun 2020-2024 sebagai data dukung utama dalam kegiatan ini;
3. Berpedoman pada Arsitektur TIK dan KM nomor 106 Tahun 2023 tentang Peta Rencana SPBE Kementerian Perhubungan;

48 b

4. Sesuai Peraturan Presiden nomor 39 tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (SDI) dan KM nomor 150 tahun 2021 tentang Tata Kelola Data di lingkungan Kementerian Perhubungan, agar memenuhi Prinsip Tata Kelola Data Kementerian Perhubungan sebagai penunjang Satu Data Indonesia sehingga pengusul kegiatan sebagai produsen data wajib menerapkan Prinsip Satu Data Indonesia (SDI) yang mencakup Standar Data dan Metadata, Kode Referensi/ Data Induk serta Interoperabilitas guna mengintegrasikan data ke Pusdatin serta menyiapkan *web service* integrasi untuk dapat berbagi pakai;
5. Dalam proses pengembangan aplikasi harus menggunakan Sistem Operasi, *development tools* terkini dan memanfaatkan infrastruktur TIK berbagi pakai berupa *Government Cloud* atau Pusat Data Nasional (PDN);
6. Dengan berpedoman pada prinsip SDLC KP nomor 536 Tahun 2016 tentang Panduan Teknis Penerapan *System Development Life Cycle* (SDLC) Sistem Informasi di Lingkungan Kementerian Perhubungan dan KM nomor 107 Tahun 2023 tentang Kebijakan dan Standar Sistem Manajemen Keamanan Informasi di Lingkungan Kementerian Perhubungan, kegiatan tersebut wajib melakukan *User Acceptance Test* (UAT), *System Integration Test* (SIT), *Vulnerability Assessment* (VA) dan *Penetration Testing* (Pentest);
7. Agar memperhatikan terkait Aset Tak Berwujud (ATB) dalam rangka tertib inventaris APBN;
8. Menerapkan standar biaya berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan KM nomor 6 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan dan Penetapan Harga Perkiraan Sendiri untuk Pengadaan Jasa Konsultansi Non konstruksi di Lingkungan Kementerian Perhubungan.

Jakarta, Januari 2024

SEKRETARIAT DITJEN PERKERETAAPIAN	DIREKTORAT SARANA PERKERETAAPIAN	PUSDATIN
Andi Guntur Asapa	**Lukman Al Amin**	**R. Rachmat Herwannuri**
NIP. 198407242007121001	NIP. 19810124 200112 1 001	NIP. 19700814 199903 1 001

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
SEKRETARIAT JENDERAL
PUSAT DATA DAN TEKNOLOGI INFORMASI

Gedung Karya Lt.25
Jl. Medan Merdeka Barat No.8
Jakarta 10110

Telp. : 3456703, 3811308
Contact Center : 151

e-Mail : pusdatin@kemenhub.go.id
Website : http://www.kemenhub.go.id

Nomor : TI.005/11/6 PDTI.2024
Klasifikasi : Biasa
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Penyampaian Rekomendasi Hasil Reviu dan *Clearance* Kegiatan Penyusunan Database Perlintasan Secara Digital Tahun Anggaran 2024

Jakarta, 01 April 2024

Yth. 1. Sekretaris Direktorat Jenderal Perkeretaapian;
2. Direktur Keselamatan Perkeretaapian.

Menindaklanjuti Surat:

1. Menindaklanjuti surat Sekretaris Direktorat Jenderal Perkeretaapian **nomor TI. 101/1/6/K1/DJKA/2023 tanggal 24 Oktober 2023 hal** Usulan Kegiatan TIK di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2026;
2. Menindaklanjuti Surat Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana Kementerian PAN-RB nomor: 271/DJAI/PR.01.01/03/2024, B/507/KT.03/2024 dan 04669/D1.11/03/2024 tanggal 19 Maret 2024 hal Penyampaian Hasil Evaluasi Anggaran Belanja SPBE Tahun 2024 di Lingkup Kementerian Perhubungan;
3. Menindaklanjuti Surat Direktur Jenderal Aplikasi Informatika **Kementerian Kominfo nomor:** 271/DJAI/PR.01.01/03/2024, B/507/KT.03/2024 dan 04669/D1.11/03/2024 tanggal 19 Maret 2024 hal Penyampaian Hasil Evaluasi Anggaran Belanja SPBE Tahun 2024 di Lingkup Kementerian Perhubungan;
4. Menindaklanjuti Surat Deputi Bidang Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan nomor: 271/DJAI/PR.01.01/03/2024, B/507/KT.03/2024 dan 04669/D1.11/03/2024 tanggal 19 Maret 2024 hal Penyampaian Hasil Evaluasi Anggaran Belanja SPBE Tahun 2024 di Lingkup Kementerian Perhubungan.

telah dilakukan reviu kegiatan TIK oleh Pusat Data dan Teknologi Informasi (Pusdatin).

Sesuai dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KM. 9 Tahun 2023 tentang Pedoman Reviu Teknologi Informasi dan Komunikasi di Lingkungan Kementerian Perhubungan, dengan ini kami sampaikan bahwa Kegiatan Penyusunan Database Perlintasan Secara Digital Tahun Anggaran 2024 **dapat dilanjutkan** dengan memperhatikan catatan hasil reviu dan surat hasil rekomendasi *clearance* TIK Tahun Anggaran 2024 yang dikeluarkan oleh KemenPAN-RB, Kemenkominfo dan Kementerian PPN/BAPPENAS sebagaimana terlampir pada surat ini.

Rekomendasi Reviu TIK ini berlaku sepanjang Tahun Anggaran 2024 untuk Kegiatan Penyusunan Database Perlintasan Secara Digital dengan pagu anggaran sebesar Rp. 1.182.335.000,- (Satu Milyar Seratus Delapan Puluh Dua Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah) sesuai data dukung yang disampaikan ke Pusdatin sejak surat ini ditandatangani.

Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Direktorat Keselamatan Perkeretaapian bertanggungjawab sepenuhnya terhadap pelaksanaan kegiatan sesuai catatan hasil reviu untuk Kegiatan Penyusunan Database Perlintasan Secara Digital.

Demikian disampaikan atas perhatian dan kerjasama Saudara, diucapkan terima kasih.

Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi,

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
PUSAT DATA DAN TEKNOLOGI INFORMASI
SEKRETARIAT JENDERAL

Raymond Ivan, H.A.S, S.T.
NIP. 1987 1213 199603 1 001

Tembusan:
1. Sekretaris Jenderal;
2. Direktur Jenderal Perkeretaapian;
3. Inspektur Jenderal;
4. Staf Ahli Bidang Teknologi dan Energi Perhubungan.

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
SEKRETARIAT JENDERAL
PUSAT DATA DAN TEKNOLOGI INFORMASI

Gedung Karya Lt.25
Jl. Medan Merdeka Barat No.8
Jakarta 10110

Telp. : 3456703, 3811308
Contact Center : 151

e-Mail : pusdatin@kemenhub.go.id
Website : http://www.kemenhub.go.id

CATATAN HASIL REVIU
ATAS USULAN KEGIATAN
PENYUSUNAN *DATABASE* PERLINTASAN SECARA DIGITAL
TAHUN ANGGARAN 2024
DIREKTORAT KESELAMATAN PERKERETAAPIAN
DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

Berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 9 tahun 2023 tentang Pedoman Reviu Teknologi Informasi dan Komunikasi di Lingkungan Kementerian Perhubungan, bersama ini kami sampaikan Catatan Hasil Reviu sebagai berikut :

DATA UMUM

Kegiatan Penyusunan *Database* Perlintasan Secara Digital Tahun Anggaran 2024 dengan pagu anggaran sebesar Rp. 1.182.335.000,- (Satu Milyar Seratus Delapan Puluh Dua Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah).

A. Ruang Lingkup

Ruang lingkup pekerjaan Pemabngunan *Database* **secara digital adalah sebagai berikut:**

1. Perencanaan
   a. Melakukan pengumpulan data terkait Rekayasa dan Peningkatan keselamatan di Perlintasan;
   b. Melakukan pengumpulan kebutuhan data (penerima manfaat) dalam pembangunan Sistem Informasi;
   c. Melakukan pengembangan spesifikasi kebutuhan data di perlintasan;
2. Analisis Kebutuhan Informasi
   a. Pemetaan kebutuhan data;
   b. Pemetaan fitur/ modul software dalam pembangunan Sistem Informasi
3. Perancangan Sistem
   a. Melakukan pengambangan desain *software system* terhadap pemetaan kebutuhan-kebutuhan data ke dalam suatu bentuk software/ aplikasi;
   b. Melakukan konsultasi dalam pembangunan sistem aplikasi/ software kepada Pusdatin Kementerian Perhubungan dan Pemberi Pekerjaan
4. Pengujian
   a. Melakukan testing terhadap aplikasi dengan penyediaan test plan dan test script oleh penyediaan system sesuai scenario- scenario dari unit TI dan kelompok pengguna, sesuai dengan *output database* yang diinginkan antara lain sebagai berikut:
      1. Mampu memberikan informasi dan seluruh perlintasan;
      2. Mampu memberikan penilaian tingkat kerawanan;

3. Mampu menghitung tingkat prioritas;
4. Mampu menyimpang data riwayat peningkatan keselamatan, penutupan, kecelakaan, dan dokumentasi serta rekomendasi perlintasan dll

b. Penyediaan bukti pengujian fungsional maupun fungsional dari penyedia sistem termasuk unit testing, user acceptance testing, system testing, integration testing, kompabilitas testing, error dan exception testing dan performance testing
c. Pengujian fungsional maupun nonfungsional oleh unit TI dan setiap kelompok pengguna dari satuan kerja

5. **Implementasi**
   Dalam hal ini, setelah dilakukan pengujian perlu dilakukan implementasi oleh setiap kelompok pengguna dari satuan kerja maupun operator. Implementasi ini dilakukan setelah pelaksanaan monitoring dan evaluasi untuk mengenalkan tahapan dan penggunaan sistem informasi yang dibangun. Pelaksanaan survey dimaksud merupakan tanggung jawab dari Penyedia Jasa.
6. **Pemeliharaan**
   Pemeliharaan dilakukan selama 1 tahun setelah serah terima pekerjaan, oleh penerima pekerjaan sesuai dengan RAB dalam studi ini

B. *Output* Kegiatan

Target dalam kegiatan Pembangunan *database* perlintasan secara digital adalah sebagai berikut:

a. Perencanaan, pengembangan dan pembangunan, sistem informasi *database* secara online yang mampu memudahkan user mendapatkan informasi *database* perlintasan secara digital
b. Mempermudah pengumpulan data, dan informasi terkait data perlintasan
c. Sinkronisasi *database*;
d. Pembangunan aplikasi yang dapat diakses secara online 24 jam lewat OC maupun smartphone

Outcome yang diharapkan dari Pembangunan *database* perlintasan adalah untuk dapat menghasilkan:

1. Bahan Roadmap Penataan Perlintasan KA
2. Bahan Evaluasi Perlintasan
3. Bahan Pemberian Rekomendasi Peningkatan Keselamatan Perlintasan KA

Hasil dari hal tersebut sasaran yang ingin dicapai adalah sebagai berikut:

- Menurunnya Jumlah Perlintasan Sebidang
- Mengurangi daerah rawan di perlintasan
- Menurunkan tingkat risiko terjadinya kecelakaan di Perlintasan Sebidang
- Menurunkan jumlah terjadinya kecelakaan di Perlintasan Sebidang

C. Bisnis Proses

Secara umum dapat digambarkan output penggunaan aplikasi penanganan perlintasan KA secara pelaksanaan tugas monitoring, evaluasi dan pengambilan keputusan untuk melakukan aksi penanganan fisik adalah sebagai berikut:

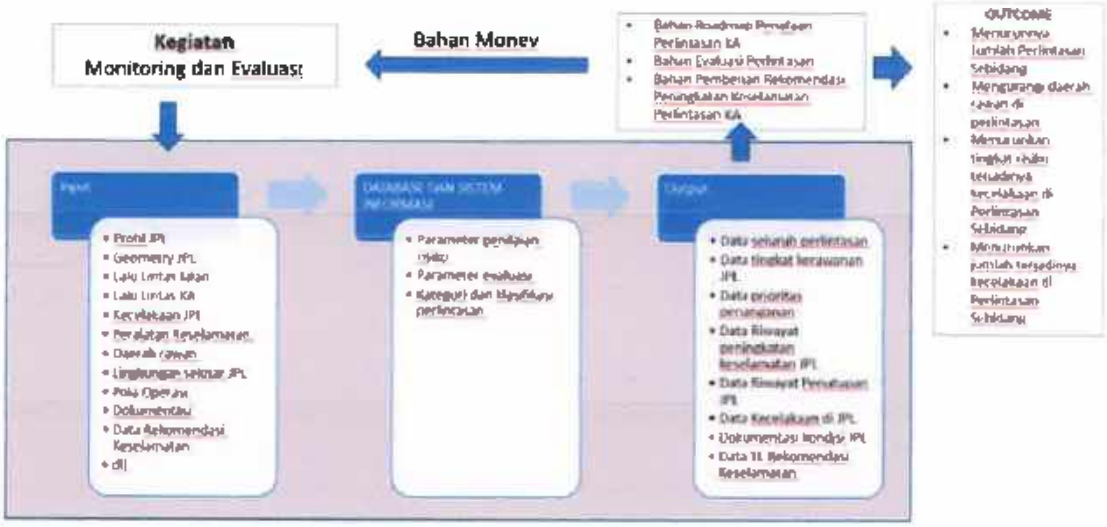

Tetapi untuk mewujudkan hal tersebut perlu ada integrasi dengan bidang terkait seperti pembangunan perlintasan KA, sertifikasi perlintasan KA dan perawatan perlintasan KA. Dengan integrasi ini nanti diharapkan tidak ada lagi pekerjaan double entri untuk data yang sama yang sudah menjadi pekerjaan unit kerja lain, dan subdit rekayasa dan peningkatan keselamatan kereta api dapat menggunakan untuk data-data yang sudah ada sebagai bahan evaluasi dan pemberian rekomendasi penanganan perlintasan KA. Untuk memudahkan pemahaman kita tentang hal ini skema integrasi dan proses pendataan rekomendasi penanganan perlintasan KA adalah sebagai berikut:

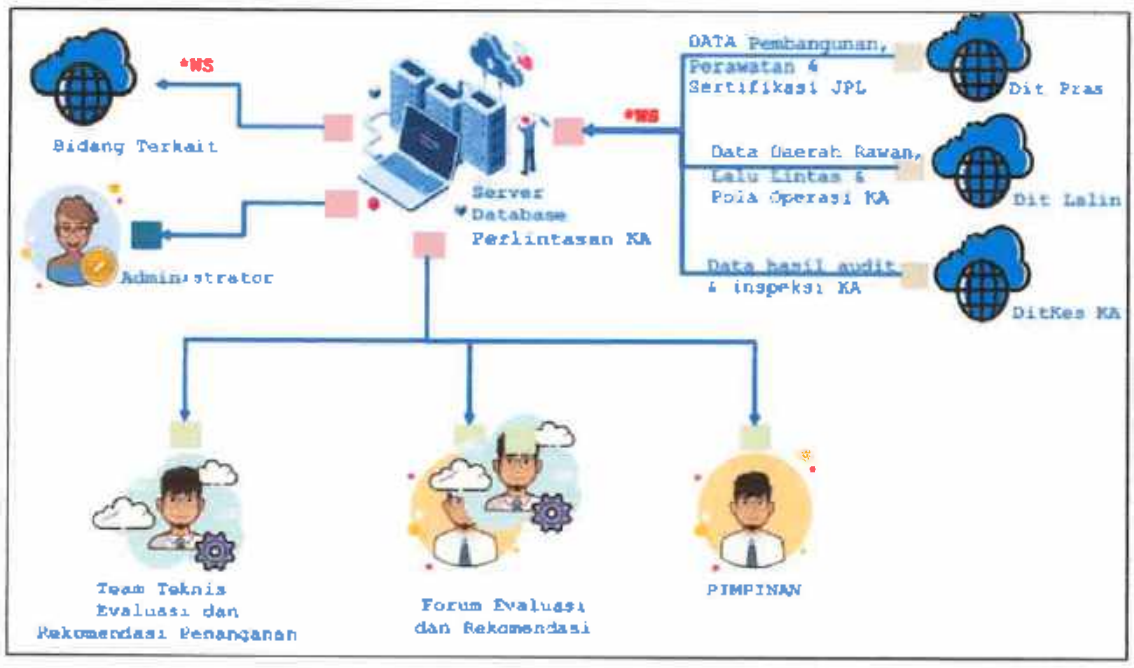

Jadi aplikasi *database* perlintasan KA ini mewakili level pengguna yang memiliki tugas dan kewenangan sebagai berikut:

1. Level Administrator, yang mewakili kewenangan dalam mastering data, pendataan dan memberikan hak akses kepada user serta sinkronisasi data secara manual jika diperlukan dengan pihak terkait lainnya
2. Level Team Teknis Evaluasi dan Rekomendasi, yang mewakili kewenangan dalam melakukan input:
   a. Utilitas perlintasan
   b. Laka yang terjadi dan temuan lapangan
   c. Bahan rekomendasi penanganan yang harus dilakukan

   User ini berada dimasing- masing daerah seperti BPTD yang bertugas untuk jalan nasional, Dinas Perhubungan Provinsi yang bertugas untuk jalan provinsi dan Dinas Perhubungan Kab/ Kota yang bertugas untuk jalan Kab/ Kota
3. Level Forum Evaluasi dan Rekomendasi, yang mewakili kewenangan dalam validasi terkait evaluasi dan memberikan rekomendasi penanganan perlintasan. Pada level ini mendapatkan:
   a. Fitur input hasil evaluasi dan rekomendasinya
   b. Fitur report terkait profile detail perlintasan baik data yang dihasilkan oleh aplikasi ini atau dari aplikasi eksternal sehingga dalam melakukan kajian/ evaluasi lebih efisien waktu dan akurasi data
4. Level Pimpinan Direktorat Keselamatan Perkeretaapian, memiliki ha katas informasi secara detail baik data dari pihak terkait atau dari hasil evaluasi dan rekomendasi yang sudah disahkan oleh forum evaluasi dan rekomendasi

Untuk detail bisnis proses konsultan yang ditunjuk dalam melakukan pekerjaan ini dapat membantu menyusun bisnis proses secara detail sesuai dengan regulasi dan struktur organisasi bidang keselamatan kereta api serta organisasi lain yang terkait.

D. Tenaga Ahli

No	Uraian	Pendidikan	Kualifikasi	Pengalaman	Vol	Waktu	Satuan *)
I	TENAGA AHLI PROFESIONAL						
1.	Ahli Perencanaan Transportasi (*Team Leader*)	Min S2 Transportasi	AU	10 Tahun	1	6	OB
2.	Ahli Sistem analis dan Database Design	Min S1 System informasi/Elektro	AD	6 Tahun	1	4	OB
3.	Ahli Prasarana KA	Min S1 Teknik Sipil	AM	6 Tahun	1	3	OB
4.	Ahli Programmer	Min S1 Sytem Informasi/Elektro	AD	6 Tahun	1	5	OB

No	Uraian	Pendidikan	Kualifikasi	Pengalaman	Vol	Waktu	Satuan *)
II	TENAGA PENDUKUNG/ SUPPORTING STAFF						
1.	Asisten Ahli Jalur Bangunan KA	S1 Transportasi/Sipil	Ijazah akademik	4 Tahun	1	3	OB
2.	Asisten Ahli Fasilitas Operasi KA	S1 Transportasi/Sipil/Mesin/Elektro	Ijazah akademik	4 Tahun	1	6	OB
3.	Asisten Ahli Programmer	S1 Informatika/Elektro	Ijazah akademik	4 Tahun	1	6	OB
4.	Asisten Ahli Web Design	S1 Informatika/Elektro	Sertifikat Sesuai Keahlian	4 Tahun	1	3	OB
5.	Administrasi/Sekretaris	D3 Perkantoran/ Kesekretariatan	Sertifikat Sekretaris/ Kebendaharaan /Arsiparis	3 Tahun	1	3	OB
6.	Surveyor	D3 Perkeretaapian					

E. Spesifikasi Teknis

c. Fungsi aplikasi dan spesifikasi
- Aplikasi- aplikasi ini untuk memudahkan pengguna dibangun berbasis webbase yang dapat berjalan pada berbagai browser internet dan responsive terhadap layar lebar
- Framework yang digunakan adalah laravell versi terbaru
- Bahasa pemrograman php versi xx keatas
- *Database* MySQL versi 5.7.xxx atau yang lebih terbaru

d. Kebutuhan Hardware Server
- Processor : 8x2.4 CHz CPU
- RAM : 32 GB RAM
- HDD : SCSI, RAID 1, Kapasitas 1 TB
- Perangkat Jaringan Ruang Server

e. Kebutuhan Software Server
- Dedicated Server dengan spesifikasi minimum standar Web Server
- Server OS : Centos 7
- Akses FTP (Akses by Filezilla dll)
- Web Service System (XAMPP/ LAMPP dsb)
- PHP Versi 5 Up
- *Database system* MySWL versi 5.7.xxx atau yang lebih terbaru
- Firewall

f. Keamanan aplikasi
- Menggunakan captcha pada halaman login
- Menggunakan system https
- Satu user hanya dapat login pada satu perangkat
- Menerapkan user session dan log user untuk setiap aksi dalam penggunaan aplikasi oleh semua user

F. Catatan Rekomendasi

Tim Reviu Pusat Data dan Teknologi Informasi mencatat rekomendasi untuk Penyusunan *Database* Perlintasan Secara Digital Tahun Anggaran 2024 yang diusulkan oleh Direktorat Keselamatan Perkeretaapian – Direktorat Jenderal Perkeretaapian dengan catatan sebagai berikut :

1. Diwajibkan mengacu pada Perpres nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan KM nomor 112 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Di Lingkungan Kementerian Perhubungan;
2. Kegiatan ini wajib mengacu pada KM nomor 222 tahun 2020 tentang Rencana Induk Teknologi Informasi dan Komunikasi di lingkungan Kementerian Perhubungan Tahun 2020-2024 sebagai data dukung utama dalam kegiatan ini;
3. Berpedoman pada Arsitektur TIK dan KM nomor 106 Tahun 2023 tentang Peta Rencana SPBE Kementerian Perhubungan;
4. Sesuai Peraturan Presiden nomor 39 tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (SDI) dan KM nomor 150 tahun 2021 tentang Tata Kelola Data di lingkungan Kementerian Perhubungan, agar memenuhi Prinsip Tata Kelola Data Kementerian Perhubungan sebagai penunjang Satu Data Indonesia sehingga pengusul kegiatan sebagai produsen data wajib menerapkan Prinsip Satu Data Indonesia (SDI) yang mencakup Standar Data dan Metadata, Kode Referensi/ Data Induk serta Interoperabilitas guna mengintegrasikan data ke Pusdatin serta menyiapkan *web service* integrasi untuk dapat berbagi pakai;
5. Dalam proses pengembangan aplikasi harus menggunakan Sistem Operasi, *development tools* terkini dan memanfaatkan infrastruktur TIK berbagi pakai berupa *Government Cloud* atau Pusat Data Nasional (PDN);
6. Dengan berpedoman pada prinsip SDLC KP nomor 536 Tahun 2016 tentang Panduan Teknis Penerapan *System Development Life Cycle* (SDLC) Sistem Informasi di Lingkungan Kementerian Perhubungan dan KM nomor 107 Tahun 2023 tentang Kebijakan dan Standar Sistem Manajemen Keamanan Informasi di Lingkungan Kementerian Perhubungan, kegiatan tersebut wajib melakukan *User Acceptance Test* (UAT), *System Integration Test* (SIT), *Vulnerability Assessment* (VA) dan *Penetration Testing* (Pentest);
7. Agar memperhatikan terkait Aset Tak Berwujud (ATB) dalam rangka tertib inventaris APBN;
8. Menerapkan standar biaya berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan KM nomor 6 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan dan Penetapan Harga Perkiraan Sendiri untuk Pengadaan Jasa Konsultansi Non konstruksi di Lingkungan Kementerian Perhubungan.

Jakarta, Januari 2024

SEKRETARIAT DITJEN PERKERETAAPIAN	DIREKTORAT KESELAMATAN PERKERETAAPIAN	PUSDATIN
Andi Guntur Asapa	**Haryo Kumoro R.D**	**R. Rachmat Herwannuri**
NIP. 198407242007121001	NIP. 19830220 201012 1 003	NIP. 19700814 199903 1 001

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
SEKRETARIAT JENDERAL
PUSAT DATA DAN TEKNOLOGI INFORMASI

Gedung Karya Lt.25
Jl. Medan Merdeka Barat No.8
Jakarta 10110

Telp. : 3456703, 3811308
Contact Center : 151

e-Mail : pusdatin@kemenhub.go.id
Website : http://www.kemenhub.go.id

CATATAN HASIL REVIU
ATAS USULAN KEGIATAN
PENYUSUNAN *DATABASE* PERLINTASAN SECARA DIGITAL
TAHUN ANGGARAN 2024
DIREKTORAT KESELAMATAN PERKERETAAPIAN
DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

Berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 9 tahun 2023 tentang **Pedoman Reviu Teknologi Informasi dan Komunikasi di Lingkungan Kementerian Perhubungan,** bersama ini kami sampaikan Catatan Hasil Reviu sebagai berikut :

DATA UMUM

Kegiatan **Penyusunan** *Database* **Perlintasan Secara Digital Tahun Anggaran 2024 dengan pagu anggaran sebesar Rp.** 1.182.335.000,- (Satu Milyar Seratus Delapan Puluh Dua Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah).

A. Ruang Lingkup

Ruang lingkup pekerjaan Pemabngunan *Database* **secara digital adalah sebagai berikut:**

1. Perencanaan
   a. Melakukan pengumpulan data terkait Rekayasa dan Peningkatan keselamatan di Perlintasan;
   b. **Melakukan pengumpulan kebutuhan data (penerima manfaat) dalam pembangunan Sistem Informasi;**
   c. **Melakukan pengembangan spesifikasi kebutuhan data di perlintasan;**
2. Analisis Kebutuhan Informasi
   a. Pemetaan kebutuhan data;
   b. **Pemetaan fitur/ modul software dalam pembangunan Sistem Informasi**
3. **Perancangan Sistem**
   a. Melakukan pengambangan desain *software system* terhadap pemetaan kebutuhan-kebutuhan data ke **dalam** suatu bentuk software/ aplikasi;
   b. **Melakukan konsultasi dalam pembangunan sistem aplikasi/ software kepada Pusdatin Kementerian Perhubungan dan Pemberi Pekerjaan**
4. **Pengujian**
   a. **Melakukan testing terhadap aplikasi dengan penyediaan test plan dan test script oleh penyediaan system sesuai scenario- scenario dari unit TI dan kelompok pengguna, sesuai dengan *output database* yang diinginkan antara lain sebagai berikut:**
      1. **Mampu memberikan informasi dan seluruh perlintasan;**
      2. **Mampu memberikan penilaian tingkat kerawanan;**

3. Mampu menghitung tingkat prioritas;
4. Mampu menyimpang data riwayat peningkatan keselamatan, penutupan, kecelakaan, dan dokumentasi serta rekomendasi perlintasan dll

b. Penyediaan bukti pengujian fungsional maupun fungsional dari penyedia sistem termasuk unit testing, user acceptance testing, system testing, integration testing, kompabilitas testing, error dan exception testing dan performance testing
c. Pengujian fungsional maupun nonfungsional oleh unit TI dan setiap kelompok pengguna dari satuan kerja

5. **Implementasi**
   Dalam hal ini, setelah dilakukan pengujian perlu dilakukan implementasi oleh setiap kelompok pengguna dari satuan kerja maupun operator. Implementasi ini dilakukan setelah pelaksanaan monitoring dan evaluasi untuk mengenalkan tahapan dan penggunaan sistem informasi yang dibangun. Pelaksanaan survey dimaksud merupakan tanggung jawab dari Penyedia Jasa.
6. **Pemeliharaan**
   Pemeliharaan dilakukan selama 1 tahun setelah serah terima pekerjaan, oleh penerima pekerjaan sesuai dengan RAB dalam studi ini

B. *Output* Kegiatan

Target dalam kegiatan Pembangunan *database* perlintasan secara digital adalah sebagai berikut:

a. Perencanaan, pengembangan dan pembangunan, sistem informasi *database* secara online yang mampu memudahkan user mendapatkan informasi *database* perlintasan secara digital
b. Mempermudah pengumpulan data, dan informasi terkait data perlintasan
c. Sinkronisasi *database*;
d. Pembangunan aplikasi yang dapat diakses secara online 24 jam lewat OC maupun smartphone

Outcame yang diharapkan dari Pembangunan *database* perlintasan adalah untuk dapat menghasilkan:

1. Bahan Roadmap Penataan Perlintasan KA
2. Bahan Evaluasi Perlintasan
3. Bahan Pemberian Rekomendasi Peningkatan Keselamatan Perlintasan KA

Hasil dari hal tersebut sasaran yang ingin dicapai adalah sebagai berikut:

- Menurunnya Jumlah Perlintasan Sebidang
- Mengurangi daerah rawan di perlintasan
- Menurunkan tingkat risiko terjadinya kecelakaan di Perlintasan Sebidang
- Menurunkan jumlah terjadinya kecelakaan di Perlintasan Sebidang

C. Bisnis Proses

Secara umum dapat digambarkan output penggunaan aplikasi penanganan perlintasan KA secara pelaksanaan tugas monitoring, evaluasi dan pengambilan keputusan untuk melakukan aksi penanganan fisik adalah sebagai berikut:

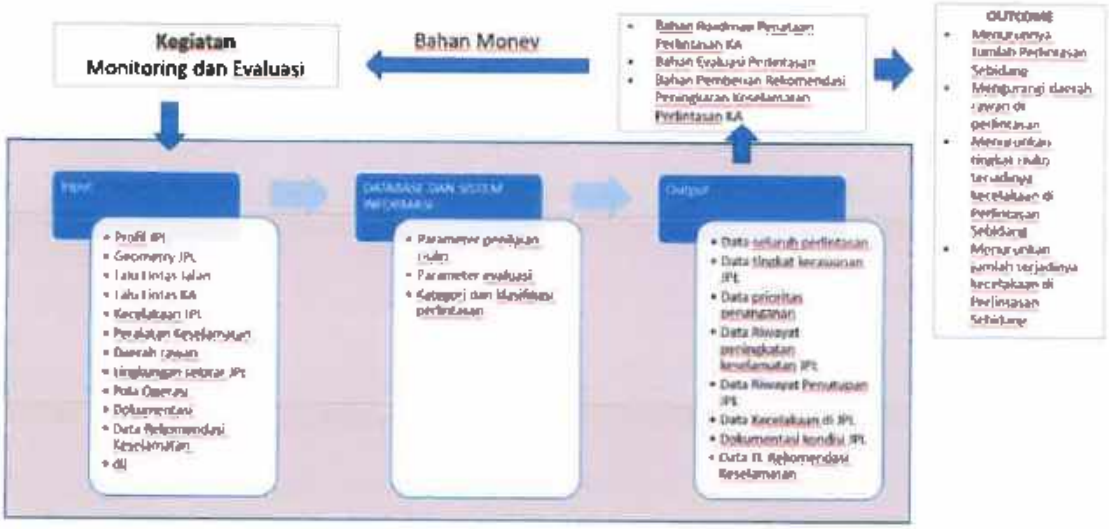

Tetapi untuk mewujudkan hal tersebut perlu ada integrasi dengan bidang terkait seperti pembangunan perlintasan KA, sertifikasi perlintasan KA dan perawatan perlintasan KA. Dengan integrasi ini nanti diharapkan tidak ada lagi pekerjaan double entri untuk data yang sama yang sudah menjadi pekerjaan unit kerja lain, dan subdit rekayasa dan peningkatan keselamatan kereta api dapat menggunakan untuk data-data yang sudah ada sebagai bahan evaluasi dan pemberian rekomendasi penanganan perlintasan KA. Untuk memudahkan pemahaman kita tentang hal ini skema integrasi dan proses pendataan rekomendasi penanganan perlintasan KA adalah sebagai berikut:

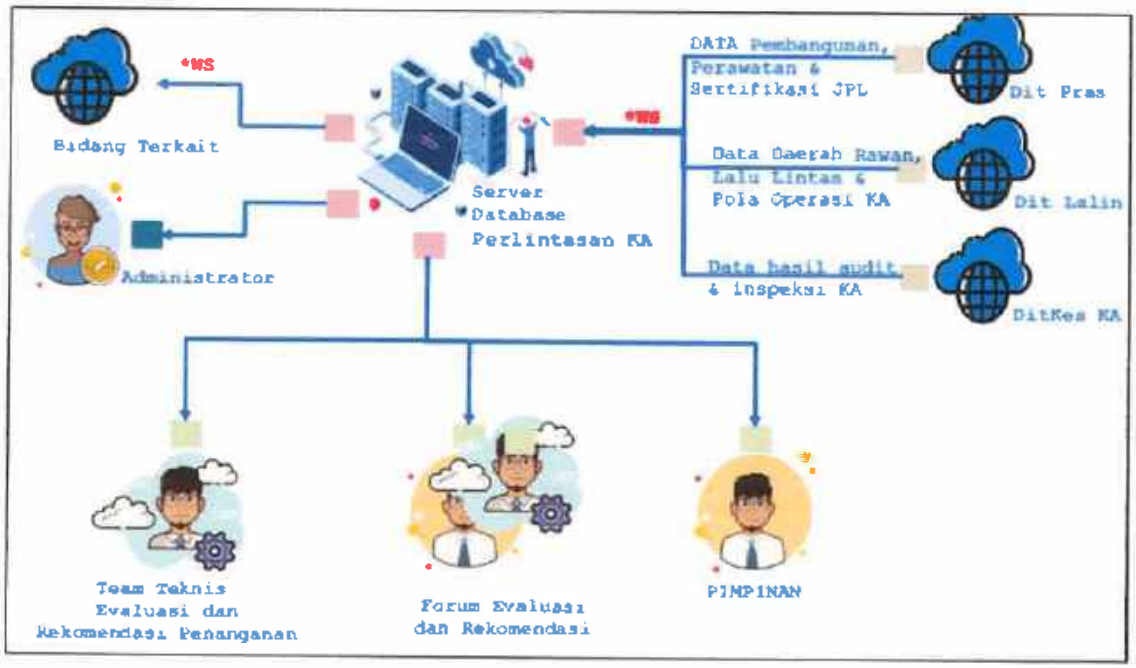

Jadi aplikasi *database* perlintasan KA ini mewakili level pengguna yang memiliki tugas dan kewenangan sebagai berikut:

1. Level Administrator, yang mewakili kewenangan dalam mastering data, pendataan dan memberikan hak akses kepada user serta sinkronisasi data secara manual jika diperlukan dengan pihak terkait lainnya
2. Level Team Teknis Evaluasi dan Rekomendasi, yang mewakili kewenangan dalam melakukan input:
   a. Utilitas perlintasan
   b. Laka yang terjadi dan temuan lapangan
   c. Bahan rekomendasi penanganan yang harus dilakukan

   User ini berada dimasing- masing daerah seperti BPTD yang bertugas untuk jalan nasional, Dinas Perhubungan Provinsi yang bertugas untuk jalan provinsi dan Dinas Perhubungan Kab/ Kota yang bertugas untuk jalan Kab/ Kota
3. Level Forum Evaluasi dan Rekomendasi, yang mewakili kewenangan dalam validasi terkait evaluasi dan memberikan rekomendasi penanganan perlintasan. Pada level ini mendapatkan:
   a. Fitur input hasil evaluasi dan rekomendasinya
   b. Fitur report terkait profile detail perlintasan baik data yang dihasilkan oleh aplikasi ini atau dari aplikasi eksternal sehingga dalam melakukan kajian/ evaluasi lebih efisien waktu dan akurasi data
4. Level Pimpinan Direktorat Keselamatan Perkeretaapian, memiliki hak akses informasi secara detail baik data dari pihak terkait atau dari hasil evaluasi dan rekomendasi yang sudah disahkan oleh forum evaluasi dan rekomendasi

Untuk detail bisnis proses konsultan yang ditunjuk dalam melakukan pekerjaan ini dapat membantu menyusun bisnis proses secara detail sesuai dengan regulasi dan struktur organisasi bidang keselamatan kereta api serta organisasi lain yang terkait.

D. Tenaga Ahli

No	Uraian	Pendidikan	Kualifikasi	Pengalaman	Vol	Waktu	Satuan *)
I	TENAGA AHLI PROFESIONAL						
1.	Ahli Perencanaan Transportasi (*Team Leader*)	Min S2 Transportasi	AU	10 Tahun	1	6	OB
2.	Ahli Sistem analis dan Database Design	Min S1 System informasi/Elektro	AD	6 Tahun	1	4	OB
3.	Ahli Prasarana KA	Min S1 Teknik Sipil	AM	6 Tahun	1	3	OB
4.	Ahli Programmer	Min S1 Sytem Informasi/Elektro	AD	6 Tahun	1	5	OB

No	Uraian	Pendidikan	Kualifikasi	Pengalaman	Vol	Waktu	Satuan *)
II	TENAGA PENDUKUNG/ SUPPORTING STAFF						
1.	Asisten Ahli Jalur Bangunan KA	S1 Transportasi/Sipil	Ijazah akademik	4 Tahun	1	3	OB
2.	Asisten Ahli Fasilitas Operasi KA	S1 Transportasi/Sipil/Mesin/Elektro	Ijazah akademik	4 Tahun	1	6	OB
3.	Asisten Ahli Programmer	S1 Informatika/Elektro	Ijazah akademik	4 Tahun	1	6	OB
4.	Asisten Ahli Web Design	S1 Informatika/Elektro	Sertifikat Sesuai Keahlian	4 Tahun	1	3	OB
5.	Administrasi/Sekretaris	D3 Perkantoran/ Kesekretariatan	Sertifikat Sekretaris/ Kebendaharaan /Arsiparis	3 Tahun	1	3	OB
6.	Surveyor	D3 Perkeretaapian					

E. Spesifikasi Teknis

c. Fungsi aplikasi dan spesifikasi
- Aplikasi- aplikasi ini untuk memudahkan pengguna dibangun berbasis webbase yang dapat berjalan pada berbagai browser internet dan responsive terhadap layar lebar
- Framework yang digunakan adalah laravell versi terbaru
- Bahasa pemrograman php versi xx keatas
- *Database* MySQL versi 5.7.xxx atau yang lebih terbaru

d. Kebutuhan Hardware Server
- Processor : 8x2.4 CHz CPU
- RAM : 32 GB RAM
- HDD : SCSI, RAID 1, Kapasitas 1 TB
- Perangkat Jaringan Ruang Server

e. Kebutuhan Software Server
- Dedicated Server dengan spesifikasi minimum standar Web Server
- Server OS : Centos 7
- Akses FTP (Akses by Filezilla dll)
- Web Service System (XAMPP/ LAMPP dsb)
- PHP Versi 5 Up
- *Database system* MySWL versi 5.7.xxx atau yang lebih terbaru
- Firewall

f. Keamanan aplikasi
- Menggunakan captcha pada halaman login
- Menggunakan system https
- Satu user hanya dapat login pada satu perangkat
- Menerapkan user session dan log user untuk setiap aksi dalam penggunaan aplikasi oleh semua user

F. Catatan Rekomendasi

Tim Reviu Pusat Data dan Teknologi Informasi mencatat rekomendasi untuk Penyusunan *Database* Perlintasan Secara Digital Tahun Anggaran 2024 yang diusulkan oleh Direktorat Keselamatan Perkeretaapian – Direktorat Jenderal Perkeretaapian dengan catatan sebagai berikut :

1. Diwajibkan mengacu pada Perpres nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan KM nomor 112 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Di Lingkungan Kementerian Perhubungan;
2. Kegiatan ini wajib mengacu pada KM nomor 222 tahun 2020 tentang Rencana Induk Teknologi Informasi dan Komunikasi di lingkungan Kementerian Perhubungan Tahun 2020-2024 sebagai data dukung utama dalam kegiatan ini;
3. Berpedoman pada Arsitektur TIK dan KM nomor 106 Tahun 2023 tentang Peta Rencana SPBE Kementerian Perhubungan;
4. Sesuai Peraturan Presiden nomor 39 tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (SDI) dan KM nomor 150 tahun 2021 tentang Tata Kelola Data di lingkungan Kementerian Perhubungan, agar memenuhi Prinsip Tata Kelola Data Kementerian Perhubungan sebagai penunjang Satu Data Indonesia sehingga pengusul kegiatan sebagai produsen data wajib menerapkan Prinsip Satu Data Indonesia (SDI) yang mencakup Standar Data dan Metadata, Kode Referensi/ Data Induk serta Interoperabilitas guna mengintegrasikan data ke Pusdatin serta menyiapkan *web service* integrasi untuk dapat berbagi pakai;
5. Dalam proses pengembangan aplikasi harus menggunakan Sistem Operasi, *development tools* terkini dan memanfaatkan infrastruktur TIK berbagi pakai berupa *Government Cloud* atau Pusat Data Nasional (PDN);
6. Dengan berpedoman pada prinsip SDLC KP nomor 536 Tahun 2016 tentang Panduan Teknis Penerapan *System Development Life Cycle* (SDLC) Sistem Informasi di Lingkungan Kementerian Perhubungan dan KM nomor 107 Tahun 2023 tentang Kebijakan dan Standar Sistem Manajemen Keamanan Informasi di Lingkungan Kementerian Perhubungan, kegiatan tersebut wajib melakukan *User Acceptance Test* (UAT), *System Integration Test* (SIT), *Vulnerability Assessment* (VA) dan *Penetration Testing* (Pentest);
7. Agar memperhatikan terkait Aset Tak Berwujud (ATB) dalam rangka tertib inventaris APBN;
8. Menerapkan standar biaya berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan KM nomor 6 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan dan Penetapan Harga Perkiraan Sendiri untuk Pengadaan Jasa Konsultansi Non konstruksi di Lingkungan Kementerian Perhubungan.

Jakarta, Januari 2024

SEKRETARIAT DITJEN PERKERETAAPIAN	DIREKTORAT KESELAMATAN PERKERETAAPIAN	PUSDATIN
Andi Guntur Asapa	**Haryo Kumoro R.D**	**R. Rachmat Herwannuri**
NIP. 198407242007121001	NIP. 19830220 201012 1 003	NIP. 19700814 199903 1 001

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
SEKRETARIAT JENDERAL
PUSAT DATA DAN TEKNOLOGI INFORMASI

Gedung Karya Lt 25
Jl. Medan Merdeka Barat No.8
Jakarta 10110

Telp. : 3456703, 3811308
Contact Center : 151

e-Mail : pusdatin@kemenhub.go.id
Website : http://www.kemenhub.go.id

Nomor : TI.005/11/7 PDTI.2024
Klasifikasi : Biasa
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Penyampaian Rekomendasi Hasil Reviu dan *Clearance* Kegiatan Pengembangan Sistem Informasi Sertifikasi SDM Perkeretaapian Tahun Anggaran 2024

Jakarta, 01 April 2024

Yth. 1. Sekretaris Direktorat Jenderal Perkeretaapian;
2. **Direktur Keselamatan Perkeretaapian.**

Menindaklanjuti Surat:

1. Menindaklanjuti surat Sekretaris Direktorat Jenderal Perkeretaapian **nomor TI. 101/1/6/K1/DJKA/2023 tanggal 24 Oktober 2023 hal** Usulan Kegiatan TIK di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2027;
2. Menindaklanjuti Surat Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana Kementerian PAN-RB nomor: 271/DJAI/PR.01.01/03/2024, B/507/KT.03/2024 dan 04669/D1.11/03/2024 tanggal 19 Maret 2024 hal Penyampaian Hasil Evaluasi Anggaran Belanja SPBE Tahun 2024 di Lingkup Kementerian Perhubungan;
3. Menindaklanjuti Surat Direktur Jenderal Aplikasi Informatika **Kementerian Kominfo nomor: 271/DJAI/PR.01.01/03/2024,** B/507/KT.03/2024 dan 04669/D1.11/03/2024 tanggal 19 Maret 2024 hal Penyampaian Hasil Evaluasi Anggaran Belanja SPBE Tahun 2024 di Lingkup Kementerian Perhubungan;
4. Menindaklanjuti Surat Deputi Bidang Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan nomor: 271/DJAI/PR.01.01/03/2024, B/507/KT.03/2024 dan 04669/D1.11/03/2024 tanggal 19 Maret 2024 hal Penyampaian Hasil Evaluasi Anggaran Belanja SPBE Tahun 2024 di Lingkup Kementerian Perhubungan.

telah dilakukan reviu kegiatan TIK oleh Pusat Data dan Teknologi Informasi (Pusdatin).

Sesuai dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KM. 9 Tahun 2023 tentang Pedoman Reviu Teknologi Informasi dan Komunikasi di Lingkungan Kementerian Perhubungan, dengan ini kami sampaikan bahwa Kegiatan Pengembangan Sistem Informasi Sertifikasi SDM Perkeretaapian Tahun Anggaran 2024 **dapat dilanjutkan** dengan memperhatikan catatan hasil reviu dan surat hasil rekomendasi *clearance* TIK Tahun Anggaran 2024 yang dikeluarkan oleh KemenPAN-RB, Kemenkominfo dan Kementerian PPN/BAPPENAS sebagaimana terlampir pada surat ini.

Rekomendasi Reviu TIK ini berlaku sepanjang Tahun Anggaran 2024 untuk Kegiatan Pengembangan Sistem Informasi Sertifikasi SDM Perkeretaapian dengan pagu anggaran sebesar Rp. 447.552.000,- (Empat Ratus Empat Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Lima Puluh Dua Ribu Rupiah) sesuai data dukung yang disampaikan ke Pusdatin sejak surat ini ditandatangani.

Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Direktorat Keselamatan Perkeretaapian bertanggungjawab sepenuhnya terhadap pelaksanaan kegiatan sesuai catatan hasil reviu untuk Kegiatan Pengembangan Sistem Informasi Sertifikasi SDM Perkeretaapian.

Demikian disampaikan atas perhatian dan kerjasama Saudara, diucapkan terima kasih.

Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi,

PUSAT DATA DAN TEKNOLOGI INFORMASI

Raymond Ivan, H.A.S, S.T.
NIP. 19[illegible]1213 199603 1 001

Tembusan:
1. Sekretaris Jenderal;
2. Direktur Jenderal Perkeretaapian;
3. Inspektur Jenderal;
4. Staf Ahli Bidang Teknologi dan Energi Perhubungan.

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
SEKRETARIAT JENDERAL
PUSAT DATA DAN TEKNOLOGI INFORMASI

Gedung Karya Lt.25
Jl. Medan Merdeka Barat No.8
Jakarta 10110

Telp. : 3456703, 3811308
Contact Center : 151

e-Mail : pusdatin@kemenhub.go.id
Website : http://www.kemenhub.go.id

CATATAN HASIL REVIU
ATAS USULAN KEGIATAN
PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI SERTIFIKASI SDM PERKERETAAPIAN
TAHUN ANGGARAN 2024
DIREKTORAT KESELAMATAN PERKERETAAPIAN
DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

Berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 9 tahun 2023 tentang Pedoman Reviu Teknologi Informasi dan Komunikasi di Lingkungan Kementerian Perhubungan, bersama ini kami sampaikan Catatan Hasil Reviu sebagai berikut :

DATA UMUM

Kegiatan Pengembangan Sistem Informasi Sertifikasi SDM Perkeretaapian Tahun Anggaran 2024 dengan pagu anggaran sebesar Rp. 447.552.000,- (Empat Ratus Empat Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Lima Puluh Dua Ribu Rupiah).

A. Ruang Lingkup

Ruang lingkup pekerjaan Pembangunan Sistem Sertifikasi SDM Perkeretaapian adalah sebagai berikut:

1. Kajian Legal tentang Pengembangan Aplikasi Sertifikasi SDM Perkeretaapian;
2. Kajian ulang arsitektur aplikasi Sertifikasi SDM Perkeretaapian;
3. Penambahan fitur permohonan sertifikasi SDM TKA untuk permohonan dari Tenaga Kerja Asing;
4. Pengembangan Aplikasi Sertifikasi SDM Perkeretaapian untuk memudahkan penyampaian usulan sampai dengan penerbitan sertifikat dalam kegiatan sertifikasi kompetensi SDM perkeretaapian sesuai dengan yang di atur oleh UU/ aturan yang berlaku;
5. Aplikasi berbasis web dengan menggunakan PHP, framework laravel dan MySQL DB;
6. Aplikasi memudahkan kegiatan sertifikasi SDM Perkeretaapian;
7. Aplikasi Sertifikasi SDM Perkeretaapian: melakukan pengajuan sertifikat, upload dokumen pendukung, pembayaran PNBP pencetakan, penerbitan, dan pelaporan.

B. *Output* Kegiatan

Keluaran yang diharapkan dari pekerjaan Pengembangan Sistem Sertifikasi SDM Perkeretaapian ini adalah:

1. Sistem sertifikasi SDM Perkeretaapian yang dapat mengakomodir semua sertifikasi SDM dibidang perkeretaapian;

2. Penarikan data yang optimal dan sesuai dengan kebutuhan;
3. Penomoran berita acara serah terima dapat dibuat secara otomatis;
4. Pengarsipan Berita Acara Serah Terima semakin mudah

C. Bisnis Proses

1. Skema Penambahan Fitur Permohonan Sertifikasi TKA;

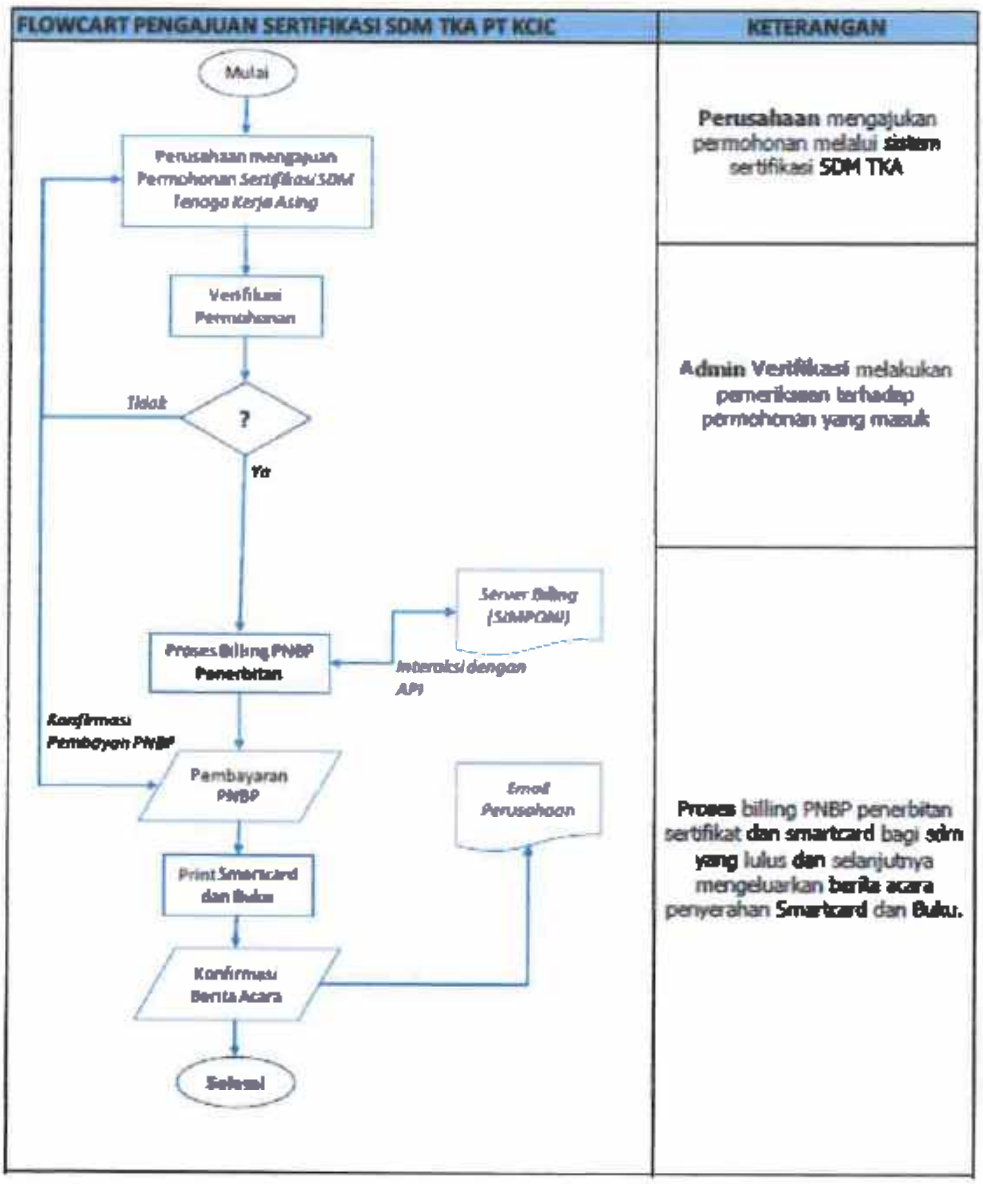

2. Skema Proses Penambahan Fitur Sertifikasi Tenaga Regulator Perkeretaapian

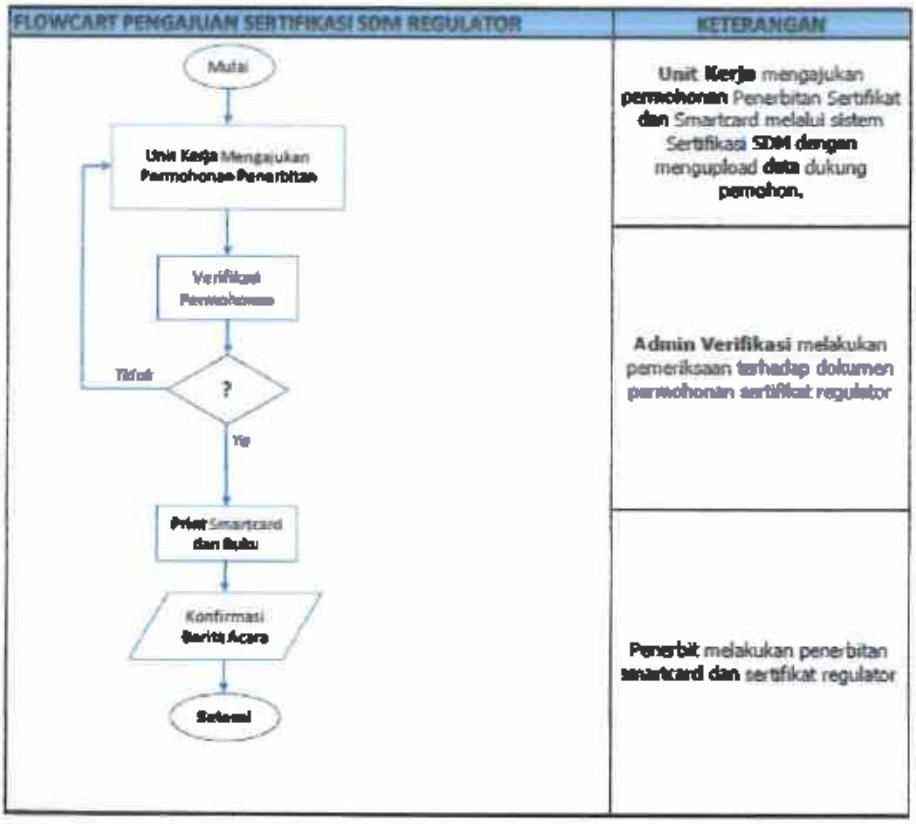

3. Skema Proses Penambahan Fitur 0 Rupiah PNBP bagi PJL Dinas Perhubungan

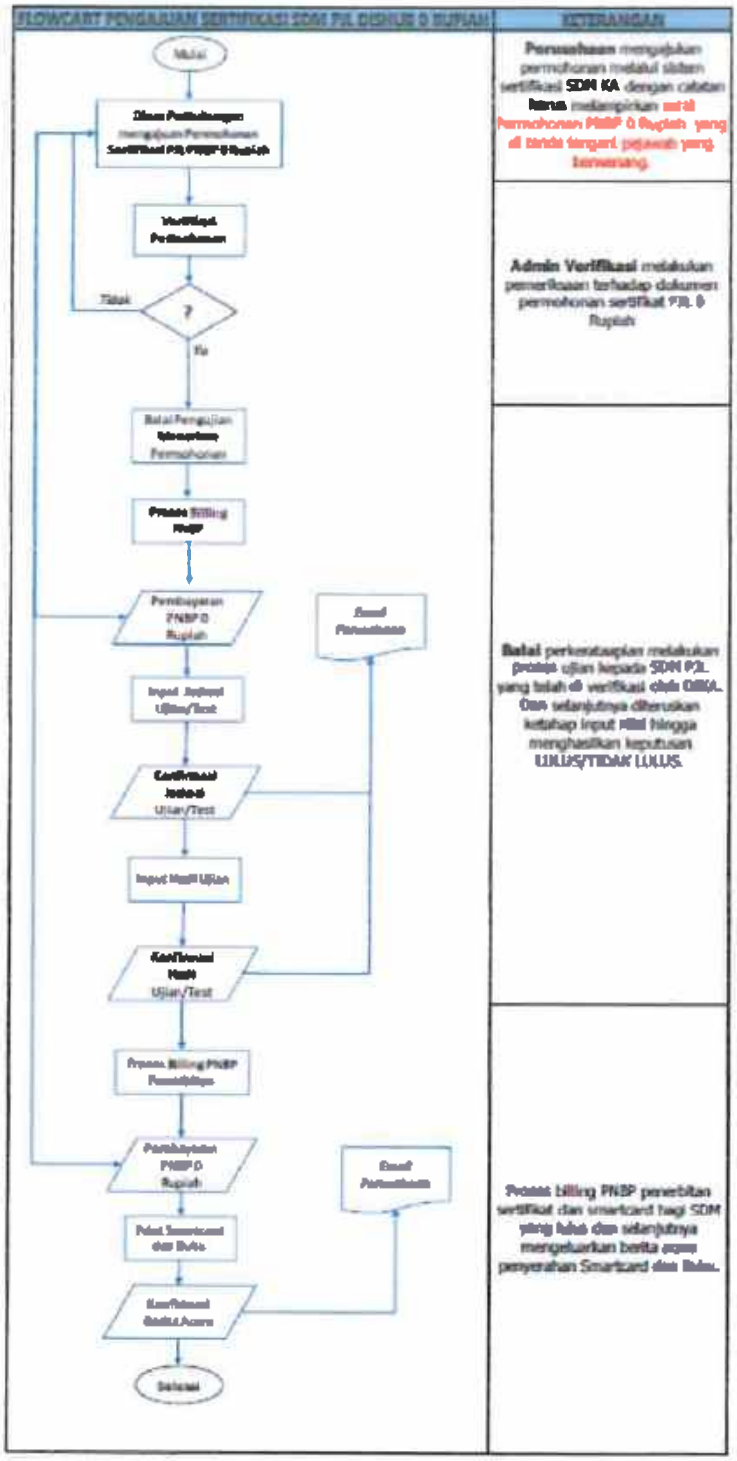

4. Skema proses Integrasi antara Sistem SDM DJKA dan Sistem SDM PT. KAI

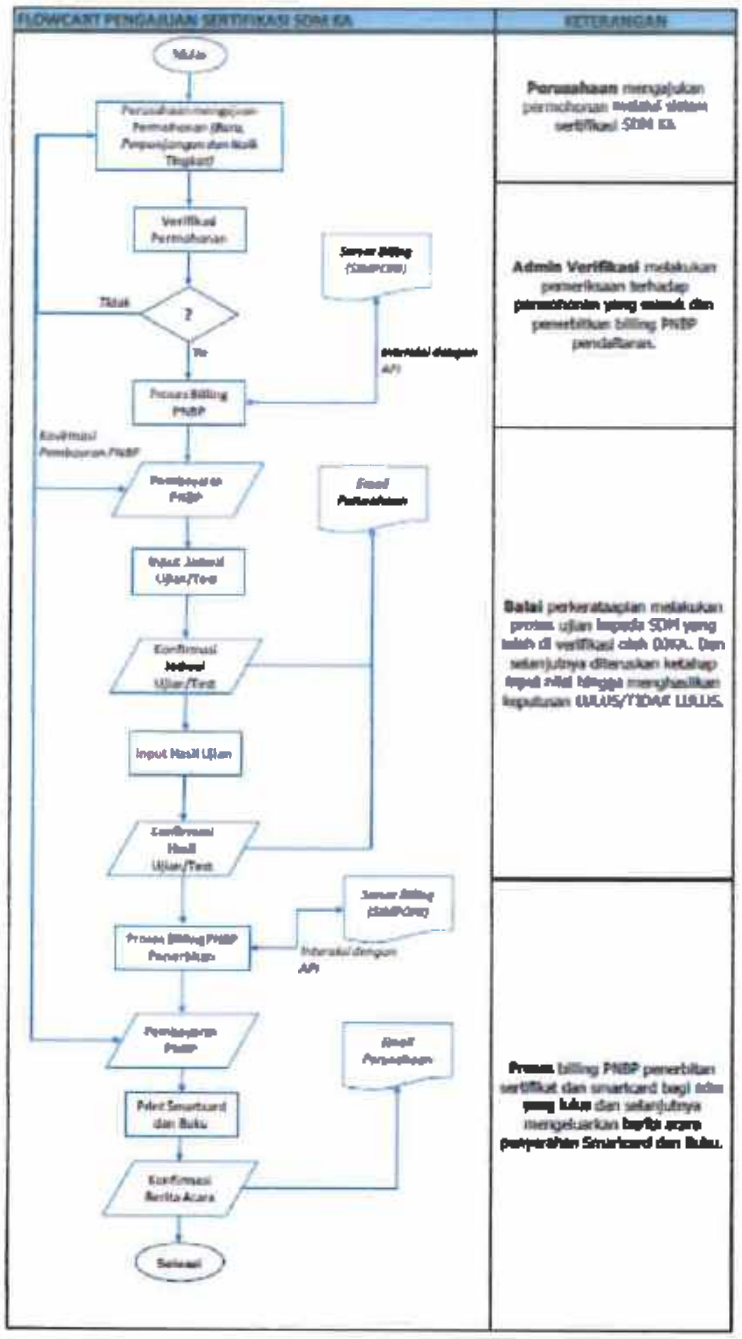

B. Tenaga Ahli

Tenaga ahli yang dibutuhkan dalam proses studi pengembangan sistem sertifikasi SDM perkeretaapian dalam rangka layanan pelaksanaan pengujian sarana perkeretaapian memiliki keahlian dibidang ilmu teknologi, adapun rincian tenaga ahli tersebut adalah sebagai berikut:

No	POSISI	KUALIFIKASI	KET	JUMLAH
1	Project Manager	S1 Teknik Informatika/ Sistem Informasi ≥ 8 tahun	Tenaga ahli	1
2	Ahli Web Desain	S1 Teknik Informatika ≥ 4tahun	Tenaga ahli	1
3	Ahli Database	S1 Teknik Informatika ≥ 4tahun	Tenaga ahli	1
4	Ahli Programmer	S1 Teknik Informatika ≥ 4tahun	Tenaga ahli	1
5	Ahli Server	S1 Teknik Informatika ≥ 4tahun	Tenaga ahli	1
6	Administrasi	D3 Sekretaris/ Administrasi Perkantoran ≥ 3 tahun	Tenaga Pendukung	1

1) **Project Manager, dengan kualifikasi Strata 1 (S1) Sarjana Teknik Informatika atau** Sistem Informasi dan pengalaman kerja minimal 8 tahun, dengan uraian tugas meliputi:
   - Bertanggung jawab atas waktu pelaksanaan tugas secara tepat waktu dan menjaga kualitas materi hasil seluruh laporan, mulai dari tahap persiapan sampai dengan penyusunan laporan akhir pekerjaan;
   - Mengkoordinasikan seluruh aktifitas pekerjaan sesuai jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah disetujui Tim Teknis;
   - Bersama dengan anggota tim merumuskan konsep, metodologi dan melakukan pembahasan serta berkoordinasi dengan instansi terkait;
   - Melakukan koordinasi eksternal dengan pemberi kerja dan instansi terkait;
   - Melakukan koordinasi internal dan pembagian tugas terhadap para tenaga ahli dan tenaga pendukung;
   - Melakukan survey lapangan;
   - Melakukan verifikasi dan analisis data terkait wilayah studi;
   - Melakukan analisis kelayakan teknis;
   - Melaporkan seluruh kemajuan pelaksanaan pekerjaan kepada pembeli kerja sesuai dengan prosedur pelaporan yang terdapat dalam kerangka acuan kerja;
   - Memahami sistem operasi, aplikasi dan perangkat database, perangkat lunak dan perangkat keras yang harus tersedia dan digunakan.
2) **Ahli Web Desain, dengan kualifikasi Strata 1 (S1) Sarjana Teknik Informatika dan** pengalaman kerja minimal 4 tahun dengan uraian tugas meliputi:
   - Merancang tampilan aplikasi yang dibuat, sesuai dengan fungsi dan kebutuhan dari user;
   - Memastikan rancangan yang telah dibuat dapat diakses secara responsive di semua *gadget/ platform browser;* dan
   - Melakukan koordinasi dengan Team Leader dan Tenaga Ahli lainnya.
3) Ahli Database, dengan kualifikasi Strata 1 (S1) Sarjana Teknik Informatika dan dengan pengalaman kerja minimal 4 tahun dengan uraian tugas meliputi:
   - Menyusun perencanaan, melakukan implementasi dan analisis database sesuai dengan *architecture flow*;

- Merencanakan, mendesain tabel- tabel database yang sesuai dengan kebutuhan proyek;
- Memastikan program dan databaser yang telah dibuat sesuai;
- Mendokumentasikan perubahan data dan proses loading data; dan
- Melakukan koordinasi dengan Team Leader dan Tenaga Ahli lainnya.

4) Ahli Programmer dengan kualifikasi Strata 1 (S1) Sarjana Teknik Informatika dan pengalaman kerja minimal 4 tahun dengan uraian tugas meliputi:
   - Mendefinisikan kebutuhan, menentukan jenis platform dan tools;
   - Merancang desain antar muka tampilan, visualisasi aplikasi, desain layout, image dan templating;
   - Menuliskan kode program;
   - Melakukan proses debug terhadap aplikasi dan mengevaluasi kode program;
   - Melakukan pengujian terhadap sistem informasi secara keseluruhan;
   - Melakukan koordinasi dengan Ketua Tim dan Tenaga Ahli lainnya
5) Ahli Server dengan kualifikasi Strata 1 (S1) Sarjana Teknik Informatika dan pengalaman kerja minimal 4 tahun dengan uraian tugas meliputi:
   - Menyusun perencanaan, melakukan implementasi dan analisis kebutuhan server sesuai dengan architecture flow;
   - Memastikan server yang tersedia dapat beroperasi dengan baik sesuai dengan program dan database yang telah dibuat;
   - Melakukan koordinasi dengan Team Leader dan Tenaga Ahli lainnya
6) Tenaga Administrasi dengan kualifikasi Diploma III (D3) Sekretaris atau Administrasi Perkantoran dan pengalaman kerja minimal 3 tahun, dengan uraian tugas meliputi:
   - Membantu tenaga ahli dalam melakukan kegiatan administrative proyek;
   - Membantu tenaga ahli dalam pengaturan jadwal pelaksaan proyek;
   - Membantu pelaksanaan proyek secara keseluruhan;
   - Membantu pelaksanaan pengumpulan data kegiatan survey lapangan;
   - Membantu Ketua Tim dalam penyusunan laporan- laporan;
   - Bertanggung jawab terhadap pekerjaan yang diberikan masing- masing tenaga ahli;
   - Menyiapkan perangkat computer untuk keperluan pekerjaan.

C. Spesifikasi Teknis

Coding aplikasi diharapkan menggunakan Bahasa Pemrograman PHP 7.4 dengan Framework Laravel 8 atau diatasnya serta database MySQL versi 5.7 atau Maria DB 10.3

D. Catatan Rekomendasi

Tim Reviu Pusat Data dan Teknologi Informasi mencatat rekomendasi untuk Pengembangan Sistem Informasi Sertifikasi SDM Perkeretaapian Tahun Anggaran 2024 yang diusulkan oleh Direktorat Keselamatan Perkeretaapian – Direktorat Jenderal Perkeretaapian dengan catatan sebagai berikut :

1. Diwajibkan mengacu pada Perpres nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan KM nomor 112 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Di Lingkungan Kementerian Perhubungan;

2. Kegiatan ini wajib mengacu pada KM nomor 222 tahun 2020 tentang Rencana Induk Teknologi Informasi dan Komunikasi di lingkungan Kementerian Perhubungan Tahun 2020-2024 sebagai data dukung utama dalam kegiatan ini;
3. Berpedoman pada Arsitektur TIK dan KM nomor 106 Tahun 2023 tentang Peta Rencana SPBE Kementerian Perhubungan;
4. Sesuai Peraturan Presiden nomor 39 tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (SDI) dan KM nomor 150 tahun 2021 tentang Tata Kelola Data di lingkungan Kementerian Perhubungan, agar memenuhi Prinsip Tata Kelola Data Kementerian Perhubungan sebagai penunjang Satu Data Indonesia sehingga pengusul kegiatan sebagai produsen data wajib menerapkan Prinsip Satu Data Indonesia (SDI) yang mencakup Standar Data dan Metadata, Kode Referensi/ Data Induk serta Interoperabilitas guna mengintegrasikan data ke Pusdatin serta menyiapkan *web service* integrasi untuk dapat berbagi pakai;
5. Dalam proses pengembangan aplikasi harus menggunakan Sistem Operasi, *development tools* terkini dan memanfaatkan infrastruktur TIK berbagi pakai berupa *Government Cloud* atau Pusat Data Nasional (PDN);
6. Dengan berpedoman pada prinsip SDLC KP nomor 536 Tahun 2016 tentang Panduan Teknis Penerapan *System Development Life Cycle* (SDLC) Sistem Informasi di Lingkungan Kementerian Perhubungan dan KM nomor 107 Tahun 2023 tentang Kebijakan dan Standar Sistem Manajemen Keamanan Informasi di Lingkungan Kementerian Perhubungan, kegiatan tersebut wajib melakukan *User Acceptance Test* (UAT), *System Integration Test* (SIT), *Vulnerability Assessment* (VA) dan *Penetration Testing* (Pentest);
7. Agar memperhatikan terkait Aset Tak Berwujud (ATB) dalam rangka tertib inventaris APBN;
8. Menerapkan standar biaya berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan KM nomor 6 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan dan Penetapan Harga Perkiraan Sendiri untuk Pengadaan Jasa Konsultansi Non konstruksi di Lingkungan Kementerian Perhubungan.

Jakarta, Januari 2024

SEKRETARIAT DITJEN PERKERETAAPIAN	DIREKTORAT KESELAMATAN PERKERETAAPIAN	PUSDATIN
Andi Guntur Asapa	**Rezha Nurachmady**	**R. Rachmat Herwannuri**
NIP. 198407242007121001	NIP. 19821102 200912 1 004	NIP. 19700814 199903 1 001

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
SEKRETARIAT JENDERAL
PUSAT DATA DAN TEKNOLOGI INFORMASI

Gedung Karya Lt.25
Jl. Medan Merdeka Barat No.8
Jakarta 10110

Telp. : 3456703, 3811308
Contact Center : 151

e-Mail : pusdatin@kemenhub.go.id
Website : http://www.kemenhub.go.id

CATATAN HASIL REVIU
ATAS USULAN KEGIATAN
PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI SERTIFIKASI SDM PERKERETAAPIAN
TAHUN ANGGARAN 2024
DIREKTORAT KESELAMATAN PERKERETAAPIAN
DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

Berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 9 tahun 2023 tentang Pedoman Reviu Teknologi Informasi dan Komunikasi di Lingkungan Kementerian Perhubungan, bersama ini kami sampaikan Catatan Hasil Reviu sebagai berikut :

DATA UMUM

Kegiatan Pengembangan Sistem Informasi Sertifikasi SDM Perkeretaapian Tahun Anggaran 2024 dengan pagu anggaran sebesar Rp. 447.552.000,- (Empat Ratus Empat Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Lima Puluh Dua Ribu Rupiah).

A. Ruang Lingkup

Ruang lingkup pekerjaan Pembangunan Sistem Sertifikasi SDM Perkeretaapian adalah sebagai berikut:

1. Kajian Legal tentang Pengembangan Aplikasi Sertifikasi SDM Perkeretaapian;
2. Kajian ulang arsitektur aplikasi Sertifikasi SDM Perkeretaapian;
3. Penambahan fitur permohonan sertifikasi SDM TKA untuk permohonan dari Tenaga Kerja Asing;
4. Pengembangan Aplikasi Sertifikasi SDM Perkeretaapian untuk memudahkan penyampaian usulan sampai dengan penerbitan sertifikat dalam kegiatan sertifikasi kompetensi SDM perkeretaapian sesuai dengan yang di atur oleh UU/ aturan yang berlaku;
5. Aplikasi berbasis web dengan menggunakan PHP, framework laravel dan MySQL DB;
6. Aplikasi memudahkan kegiatan sertifikasi SDM Perkeretaapian;
7. Aplikasi Sertifikasi SDM Perkeretaapian: melakukan pengajuan sertifikat, upload dokumen pendukung, pembayaran PNBP pencetakan, penerbitan, dan pelaporan.

B. *Output* Kegiatan

Keluaran yang diharapkan dari pekerjaan Pengembangan Sistem Sertifikasi SDM Perkeretaapian ini adalah:

1. Sistem sertifikasi SDM Perkeretaapian yang dapat mengakomodir semua sertifikasi SDM dibidang perkeretaapian;

2. Penarikan data yang optimal dan sesuai dengan kebutuhan;
3. Penomoran berita acara serah terima dapat dibuat secara otomatis;
4. Pengarsipan Berita Acara Serah Terima semakin mudah

C. Bisnis Proses

1. Skema Penambahan Fitur Permohonan Sertifikasi TKA;

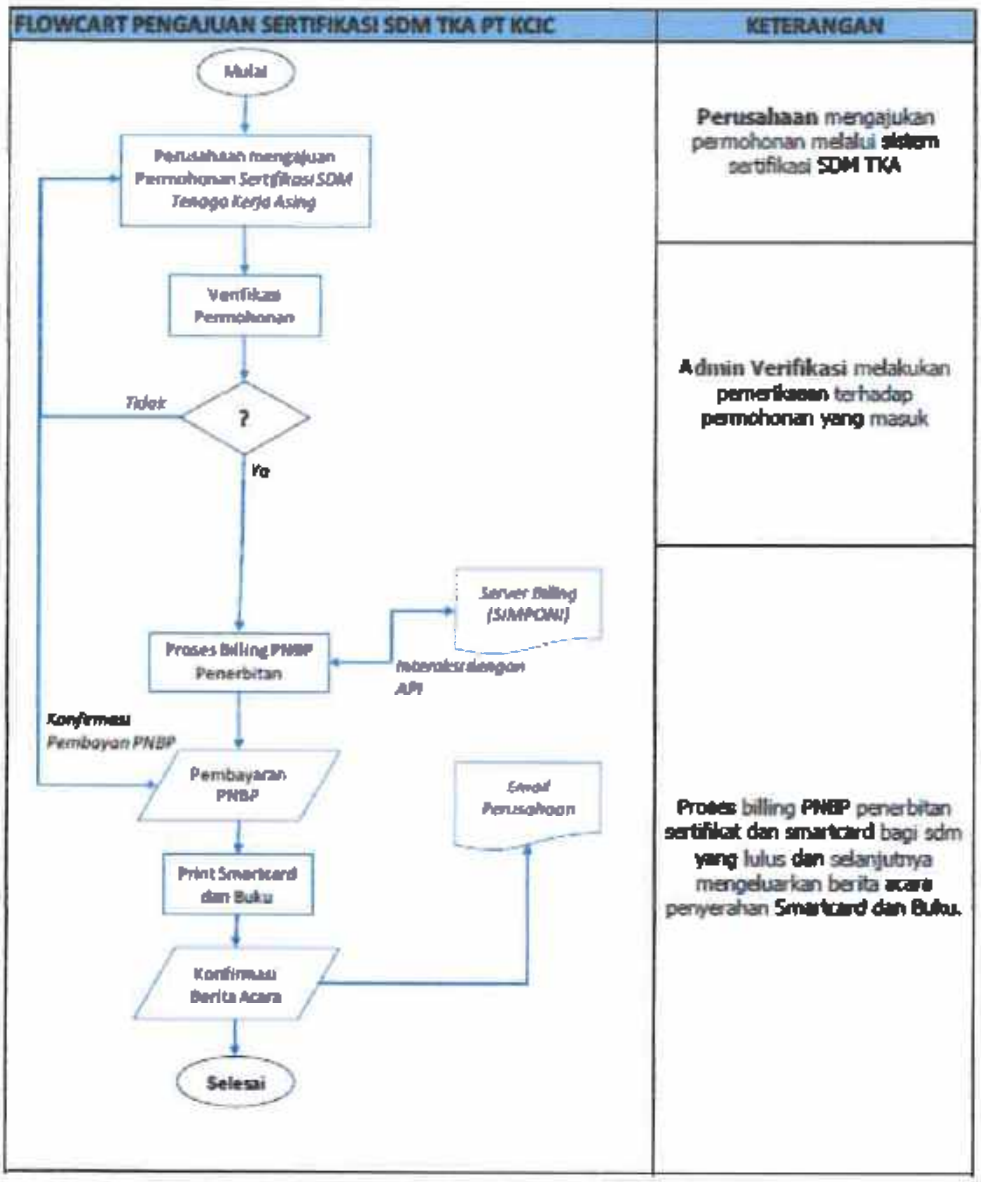

2. Skema Proses Penambahan Fitur Sertifikasi Tenaga Regulator Perkeretaapian

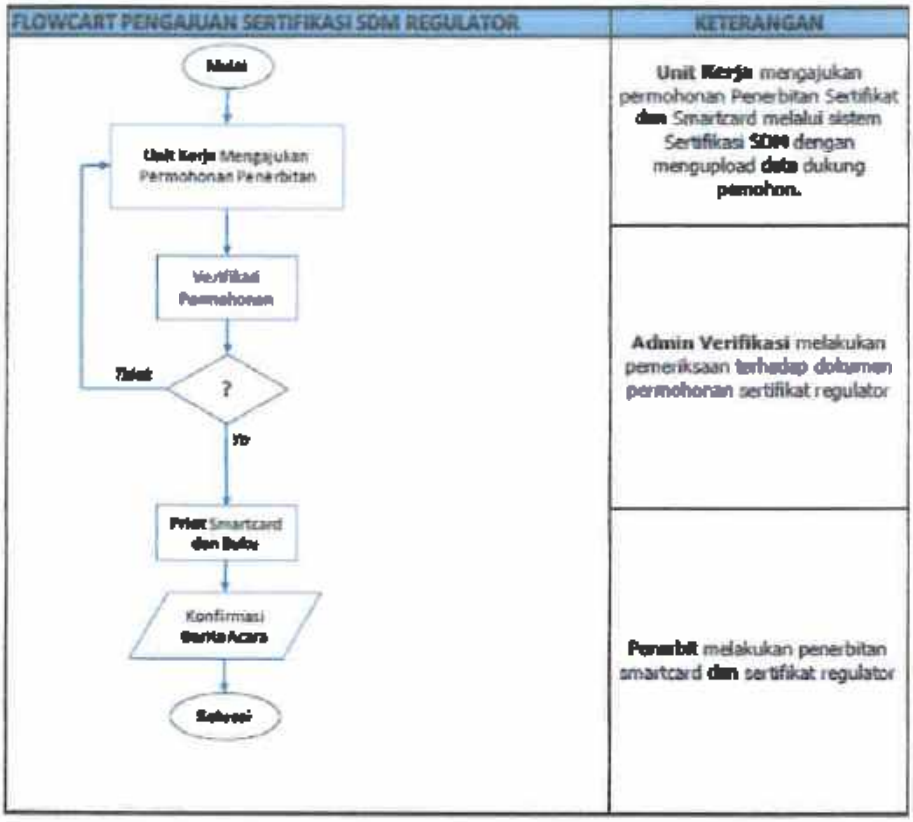

3. Skema Proses Penambahan Fitur 0 Rupiah PNBP bagi PJL Dinas Perhubungan

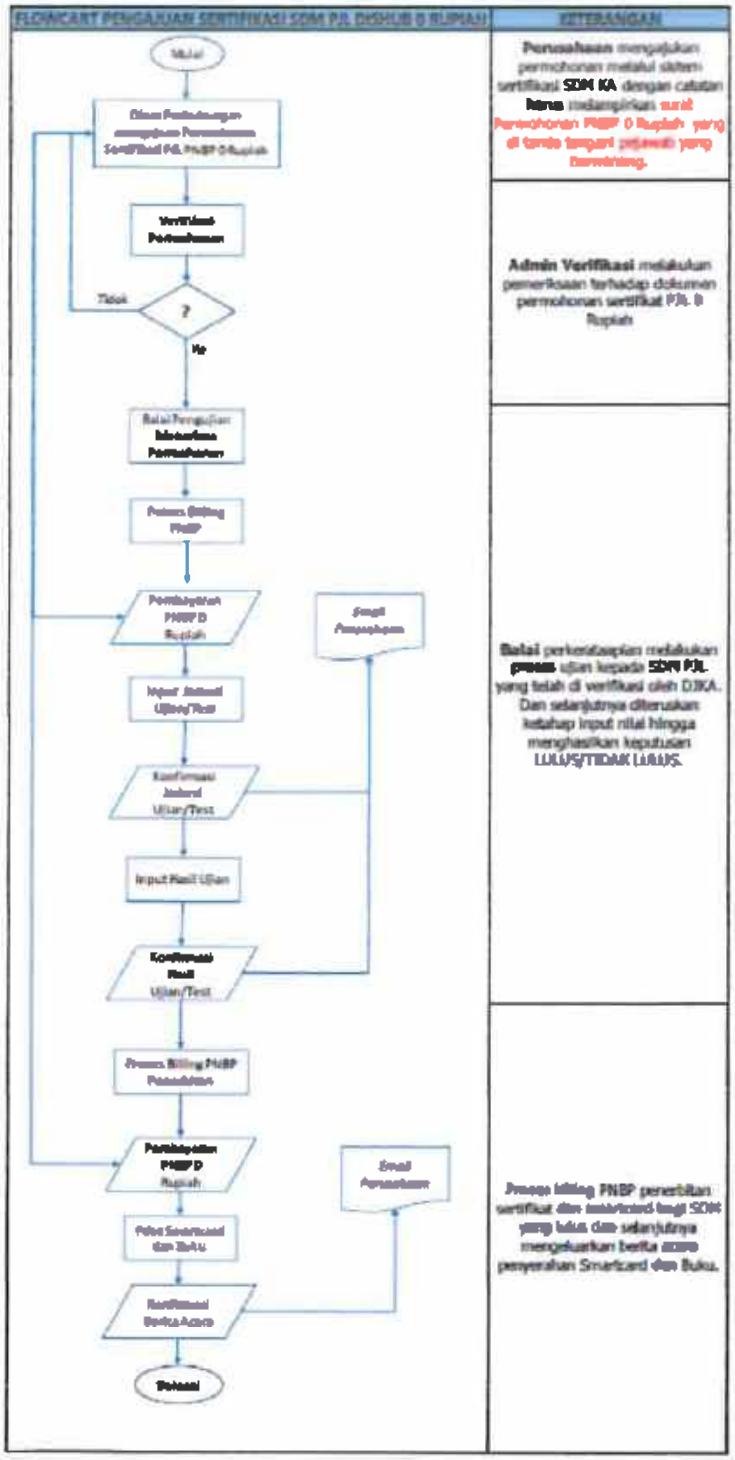

4. Skema proses Integrasi antara Sistem SDM DJKA dan Sistem SDM PT. KAI

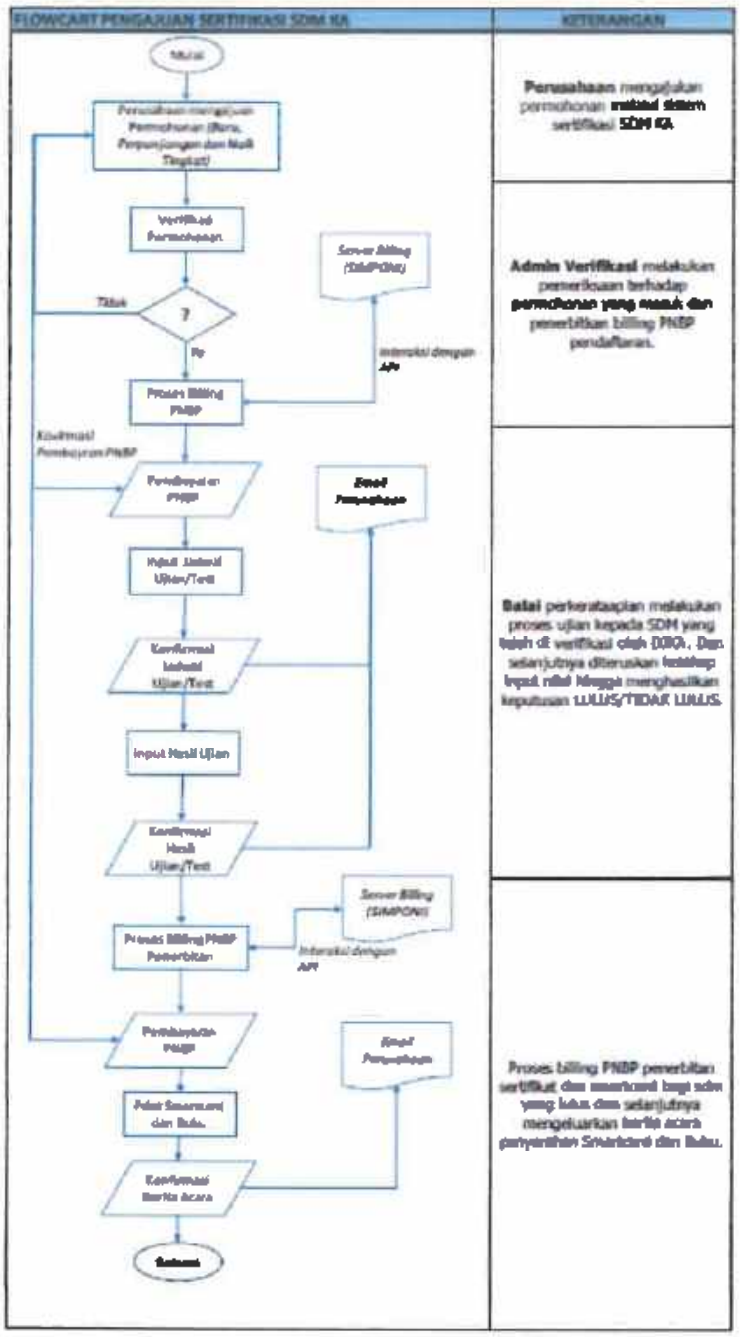

B. Tenaga Ahli

Tenaga ahli yang dibutuhkan dalam proses studi pengembangan sistem sertifikasi SDM perkeretaapian dalam rangka layanan pelaksanaan pengujian sarana perkeretaapian memiliki keahlian dibidang ilmu teknologi, adapun rincian tenaga ahli tersebut adalah sebagai berikut:

No	POSISI	KUALIFIKASI	KET	JUMLAH
1	Project Manager	S1 Teknik Informatika/ Sistem Informasi ≥ 8 tahun	Tenaga ahli	1
2	Ahli Web Desain	S1 Teknik Informatika ≥ 4tahun	Tenaga ahli	1
3	Ahli Database	S1 Teknik Informatika ≥ 4tahun	Tenaga ahli	1
4	Ahli Programmer	S1 Teknik Informatika ≥ 4tahun	Tenaga ahli	1
5	Ahli Server	S1 Teknik Informatika ≥ 4tahun	Tenaga ahli	1
6	Administrasi	D3 Sekretaris/ Administrasi Perkantoran ≥ 3 tahun	Tenaga Pendukung	1

1) **Project Manager, dengan kualifikasi Strata 1 (S1) Sarjana Teknik Informatika atau** Sistem Informasi dan pengalaman kerja minimal 8 tahun, dengan uraian tugas meliputi:
   - Bertanggung jawab atas waktu pelaksanaan tugas secara tepat waktu dan menjaga kualitas materi hasil seluruh laporan, mulai dari tahap persiapan sampai dengan penyusunan laporan akhir pekerjaan;
   - Mengkoordinasikan seluruh aktifitas pekerjaan sesuai jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah disetujui Tim Teknis;
   - Bersama dengan anggota tim merumuskan konsep, metodologi dan melakukan pembahasan serta berkoordinasi dengan instansi terkait;
   - Melakukan koordinasi eksternal dengan pemberi kerja dan instansi terkait;
   - Melakukan koordinasi internal dan pembagian tugas terhadap para tenaga ahli dan tenaga pendukung;
   - Melakukan survey lapangan;
   - Melakukan verifikasi dan analisis data terkait wilayah studi;
   - Melakukan analisis kelayakan teknis;
   - Melaporkan seluruh kemajuan pelaksanaan pekerjaan kepada pembeli kerja sesuai dengan prosedur pelaporan yang terdapat dalam kerangka acuan kerja;
   - Memahami sistem operasi, aplikasi dan perangkat database, perangkat lunak dan perangkat keras yang harus tersedia dan digunakan.
2) **Ahli Web Desain, dengan kualifikasi Strata 1 (S1) Sarjana Teknik Informatika dan** pengalaman kerja minimal 4 tahun dengan uraian tugas meliputi:
   - Merancang tampilan aplikasi yang dibuat, sesuai dengan fungsi dan kebutuhan dari user;
   - Memastikan rancangan yang telah dibuat dapat diakses secara responsive di semua *gadget/ platform browser*; dan
   - Melakukan koordinasi dengan Team Leader dan Tenaga Ahli lainnya.
3) Ahli Database, dengan kualifikasi Strata 1 (S1) Sarjana Teknik Informatika dan dengan pengalaman kerja minimal 4 tahun dengan uraian tugas meliputi:
   - Menyusun perencanaan, melakukan implementasi dan analisis database sesuai dengan *architecture flow*;

- Merencanakan, mendesain tabel- tabel database yang sesuai dengan kebutuhan proyek;
- Memastikan program dan databaser yang telah dibuat sesuai;
- Mendokumentasikan perubahan data dan proses loading data; dan
- Melakukan koordinasi dengan Team Leader dan Tenaga Ahli lainnya.

4) Ahli Programmer dengan kualifikasi Strata 1 (S1) Sarjana Teknik Informatika dan pengalaman kerja minimal 4 tahun dengan uraian tugas meliputi:
   - Mendefinisikan kebutuhan, menentukan jenis platform dan tools;
   - Merancang desain antar muka tampilan, visualisasi aplikasi, desain layout, image dan templating;
   - Menuliskan kode program;
   - Melakukan proses debug terhadap aplikasi dan mengevaluasi kode program;
   - Melakukan pengujian terhadap sistem informasi secara keseluruhan;
   - Melakukan koordinasi dengan Ketua Tim dan Tenaga Ahli lainnya
5) Ahli Server dengan kualifikasi Strata 1 (S1) Sarjana Teknik Informatika dan pengalaman kerja minimal 4 tahun dengan uraian tugas meliputi:
   - Menyusun perencanaan, melakukan implementasi dan analisis kebutuhan server sesuai dengan architecture flow;
   - Memastikan server yang tersedia dapat beroperasi dengan baik sesuai dengan program dan database yang telah dibuat;
   - Melakukan koordinasi dengan Team Leader dan Tenaga Ahli lainnya
6) Tenaga Administrasi dengan kualifikasi Diploma III (D3) Sekretaris atau Administrasi Perkantoran dan pengalaman kerja minimal 3 tahun, dengan uraian tugas meliputi:
   - Membantu tenaga ahli dalam melakukan kegiatan administrative proyek;
   - Membantu tenaga ahli dalam pengaturan jadwal pelaksaan proyek;
   - Membantu pelaksanaan proyek secara keseluruhan;
   - Membantu pelaksanaan pengumpulan data kegiatan survey lapangan;
   - Membantu Ketua Tim dalam penyusunan laporan- laporan;
   - Bertanggung jawab terhadap pekerjaan yang diberikan masing- masing tenaga ahli;
   - Menyiapkan perangkat computer untuk keperluan pekerjaan.

C. Spesifikasi Teknis

Coding aplikasi diharapkan menggunakan Bahasa Pemrograman PHP 7.4 dengan Framework Laravel 8 atau diatasnya serta database MySQL versi 5.7 atau Maria DB 10.3

D. Catatan Rekomendasi

Tim Reviu Pusat Data dan Teknologi Informasi mencatat rekomendasi untuk Pengembangan Sistem Informasi Sertifikasi SDM Perkeretaapian Tahun Anggaran 2024 yang diusulkan oleh Direktorat Keselamatan Perkeretaapian – Direktorat Jenderal Perkeretaapian dengan catatan sebagai berikut :

1. Diwajibkan mengacu pada Perpres nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan KM nomor 112 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Di Lingkungan Kementerian Perhubungan;

2. Kegiatan ini wajib mengacu pada KM nomor 222 tahun 2020 tentang Rencana Induk Teknologi Informasi dan Komunikasi di lingkungan Kementerian Perhubungan Tahun 2020-2024 sebagai data dukung utama dalam kegiatan ini;
3. Berpedoman pada Arsitektur TIK dan KM nomor 106 Tahun 2023 tentang Peta Rencana SPBE Kementerian Perhubungan;
4. Sesuai Peraturan Presiden nomor 39 tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (SDI) dan KM nomor 150 tahun 2021 tentang Tata Kelola Data di lingkungan Kementerian Perhubungan, agar memenuhi Prinsip Tata Kelola Data Kementerian Perhubungan sebagai penunjang Satu Data Indonesia sehingga pengusul kegiatan sebagai produsen data wajib menerapkan Prinsip Satu Data Indonesia (SDI) yang mencakup Standar Data dan Metadata, Kode Referensi/ Data Induk serta Interoperabilitas guna mengintegrasikan data ke Pusdatin serta menyiapkan *web service* integrasi untuk dapat berbagi pakai;
5. Dalam proses pengembangan aplikasi harus menggunakan Sistem Operasi, *development tools* terkini dan memanfaatkan infrastruktur TIK berbagi pakai berupa *Government Cloud* atau Pusat Data Nasional (PDN);
6. Dengan berpedoman pada prinsip SDLC KP nomor 536 Tahun 2016 tentang Panduan Teknis Penerapan *System Development Life Cycle* (SDLC) Sistem Informasi di Lingkungan Kementerian Perhubungan dan KM nomor 107 Tahun 2023 tentang Kebijakan dan Standar Sistem Manajemen Keamanan Informasi di Lingkungan Kementerian Perhubungan, kegiatan tersebut wajib melakukan *User Acceptance Test* (UAT), *System Integration Test* (SIT), *Vulnerability Assessment* (VA) dan *Penetration Testing* (Pentest);
7. Agar memperhatikan terkait Aset Tak Berwujud (ATB) dalam rangka tertib inventaris APBN;
8. Menerapkan standar biaya berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan KM nomor 6 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan dan Penetapan Harga Perkiraan Sendiri untuk Pengadaan Jasa Konsultansi Non konstruksi di Lingkungan Kementerian Perhubungan.

Jakarta, Januari 2024

SEKRETARIAT DITJEN PERKERETAAPIAN	DIREKTORAT KESELAMATAN PERKERETAAPIAN	PUSDATIN
Andi Guntur Asapa	**Rezha Nurachmady**	**R. Rachmat Herwannuri**
NIP. 198407242007121001	NIP. 19821102 200912 1 004	NIP. 19700814 199903 1 001

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
SEKRETARIAT JENDERAL
PUSAT DATA DAN TEKNOLOGI INFORMASI

Gedung Karya Lt 25
Jl. Medan Merdeka Barat No.8
Jakarta 10110

Telp. : 3456703, 3811308
Contact Center : 151

e-Mail : pusdatin@kemenhub.go.id
Website : http://www.kemenhub.go.id

Nomor : TI.005/11/8 PDTI.2024
Klasifikasi : Biasa
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Penyampaian Rekomendasi Hasil Reviu dan *Clearance* Kegiatan Pembangunan Sistem Informasi Program Keselamatan dalam Pengawasan Penyelenggaraan Perkeretaapian Tahun Anggaran 2024

Jakarta, 01 April 2024

Yth. 1. Sekretaris Direktorat Jenderal Perkeretaapian;
2. Direktur Keselamatan Perkeretaapian.

Menindaklanjuti Surat:

1. Menindaklanjuti surat Sekretaris Direktorat Jenderal Perkeretaapian nomor TI. 101/1/6/K1/DJKA/2023 tanggal 24 Oktober 2023 hal Usulan Kegiatan TIK di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2028;
2. Menindaklanjuti Surat Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana Kementerian PAN-RB nomor: 271/DJAI/PR.01.01/03/2024, B/507/KT.03/2024 dan 04669/D1.11/03/2024 tanggal 19 Maret 2024 hal Penyampaian Hasil Evaluasi Anggaran Belanja SPBE Tahun 2024 di Lingkup Kementerian Perhubungan;
3. Menindaklanjuti Surat Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Kominfo nomor: 271/DJAI/PR.01.01/03/2024, B/507/KT.03/2024 dan 04669/D1.11/03/2024 tanggal 19 Maret 2024 hal Penyampaian Hasil Evaluasi Anggaran Belanja SPBE Tahun 2024 di Lingkup Kementerian Perhubungan;
4. Menindaklanjuti Surat Deputi Bidang Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan nomor: 271/DJAI/PR.01.01/03/2024, B/507/KT.03/2024 dan 04669/D1.11/03/2024 tanggal 19 Maret 2024 hal Penyampaian Hasil Evaluasi Anggaran Belanja SPBE Tahun 2024 di Lingkup Kementerian Perhubungan.

telah dilakukan reviu kegiatan TIK oleh Pusat Data dan Teknologi Informasi (Pusdatin).

Sesuai dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KM. 9 Tahun 2023 tentang Pedoman Reviu Teknologi Informasi dan Komunikasi di Lingkungan Kementerian Perhubungan, dengan ini kami sampaikan bahwa Kegiatan Pembangunan Sistem Informasi Program Keselamatan dalam Pengawasan Penyelenggaraan Perkeretaapian Tahun Anggaran 2024 **dapat dilanjutkan** dengan memperhatikan catatan hasil reviu dan surat hasil rekomendasi *clearance* TIK Tahun Anggaran 2024 yang dikeluarkan oleh KemenPAN-RB, Kemenkominfo dan Kementerian PPN/BAPPENAS sebagaimana terlampir pada surat ini.

Rekomendasi Reviu TIK ini berlaku sepanjang Tahun Anggaran 2024 untuk Kegiatan Pembangunan Sistem Informasi Program Keselamatan dalam Pengawasan Penyelenggaraan Perkeretaapian dengan pagu anggaran sebesar Rp. 2.420.617.000,- (Dua Milyar Empat Ratus Dua Puluh Juta Enam Ratus Tujuh Belas Ribu Rupiah) sesuai data dukung yang disampaikan ke Pusdatin sejak surat ini ditandatangani.

Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Direktorat Keselamatan Perkeretaapian bertanggungjawab sepenuhnya terhadap pelaksanaan kegiatan sesuai catatan hasil reviu untuk Kegiatan Pembangunan Sistem Informasi Program Keselamatan dalam Pengawasan Penyelenggaraan Perkeretaapian.

Demikian disampaikan atas perhatian dan kerjasama Saudara, diucapkan terima kasih.

Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi,

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN ★ SEKRETARIAT JENDERAL ★ PUSAT DATA DAN TEKNOLOGI INFORMASI

Raymond Evan, H.A.S, S.T.
NIP. 19671213 199603 1 001

Tembusan:
1. Sekretaris Jenderal;
2. Direktur Jenderal Perkeretaapian;
3. Inspektur Jenderal;
4. Staf Ahli Bidang Teknologi dan Energi Perhubungan.

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
SEKRETARIAT JENDERAL
PUSAT DATA DAN TEKNOLOGI INFORMASI

Gedung Karya Lt.25
Jl. Medan Merdeka Barat No.8
Jakarta 10110

Telp. : 3456703, 3811308
Contact Center : 151

e-Mail : pusdatin@kemenhub.go.id
Website : http://www.kemenhub.go.id

CATATAN HASIL REVIU
ATAS USULAN KEGIATAN
PEMBANGUNAN SISTEM INFORMASI PROGRAM KESELAMATAN DALAM PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PERKERETAAPIAN
TAHUN ANGGARAN 2024
DIREKTORAT KESELAMATAN PERKERETAAPIAN
DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

Berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 9 tahun 2023 tentang Pedoman Reviu Teknologi Informasi dan Komunikasi di Lingkungan Kementerian Perhubungan, bersama ini kami sampaikan Catatan Hasil Reviu sebagai berikut :

DATA UMUM

Kegiatan Pembangunan Sistem Informasi Program Keselamatan Dalam Pengawasan Penyelenggaraan Perkeretaapian Tahun Anggaran 2024 dengan pagu anggaran sebesar Rp. 2.420.617.000,- (Dua Milyar Empat Ratus Dua Puluh Juta Enam Ratus Tujuh Belas Ribu Rupiah).

A. Ruang Lingkup

Ruang lingkup pekerjaan Pembangunan Sistem Informasi Program Pengawasan Penyelenggaraan Perkeretaapian adalah sebagai berikut:

1. Perencanaan
   a. Melakukan pengumpulan data terkait personal auditor dan Inspektur Perkeretaapian;
   b. Melakukan pengumpulan kebutuhan user (penerima manfaat) dalam Pembangunan Sistem Informasi Program Pengawasan Penyelenggaraan Perkeretaapian;
   c. Melakukan pengembangan spesifikasi kebutuhan dan verifikasinya kepada user;
2. Analisis Kebutuhan Informasi
   a. Pemetaan kebutuhan user;
   b. Pemetaan fitur/ modul software dalam Pembangunan Sistem Informasi Program Pengawasan Penyelenggaraan Perkeretaapian
3. Perancangan Sistem
   a. Melakukan pengembangan desain software system terhadap pemetaan kebutuhan-kebutuhan user ke dalam suatu bentuk software/ aplikasi'
   b. Melakukan konsultasi dalam Pembangunan sistem aplikasi/ software kepada Pusdatin Kementerian Perhubungan dan pemberi pekerjaan

4. Pengujian
   a. Melakukan testing terhadap aplikasi dengan penyediaan test plan dan test script oleh penyediaan sistem, sesuai skenario- skenario dari unit TI dan kelompok pengguna;
   b. Penyediaan bukti pengujian fungsional maupun fungsional dari penyedia sistem termasuk unit testing, user acceptance testing, system testing, integration testing, kompabilitas testing, error dan exception testing dan performance testing;
   c. Pengujian fungsional maupun non- fungsional oleh unit TI dan setiap kelompok pengguna dari satuan kerja
5. Implementasi
   Dalam hal ini, setelah dilakukan pengujian, perlu dilakukan implementasi oleh setiap kelompok pengguna dari satuan kerja. Implementasi dilakukan setelah pelaksanaan pelatihan untuk mengenalkan tahapan dan penggunaan sistem informasi yang dibangun. Pelaksanaan pelatihan dimaksud merupakan tanggung jawab dari Penyedia Jasa.
6. Pemeliharaan
   Pemeliharaan dilakukan selama 1 tahun setelah serah terima pekerjaan, oleh penerima pekerjaan sesuai dengan RAB dalam studi ini.

B. *Output* Kegiatan

Keluaran yang hendak dihasilkan dari kegiatan Pembangunan Sistem Informasi Program Keselamatan Dalam Pengawasan Penyelenggaraan Perkeretaapian dalam rangka program pengawasan penyelenggaraan perkeretaapian, sekurang- kurangnya terdiri dari:

1) Aplikasi yang sudah disepakati;
2) Dokumen teknis masing- masing aplikasi baik DFD, Bisnis Proses dan Struktur Database;
3) Buku Manual; dan
4) Video tutorial

C. Bisnis Proses

Sistem Informasi Program Keselamatan dalam Pengawasan Penyelenggaraan Perkeretaapuan merupakan sistem yang terdiri dari 3 (tiga) modul yaitu **Sistem informasi Audit, Sistem Informasi, Sistem Informasi Penilaian Sistem Keselamatan**. Sistem Pengawasan Keselamatan yang terintegrasi akan menggabungkan komponen sub- sub sistem ke dalam suatu sistem dan menjamin fungsi- fungsi dari sub sistem tersebut sebagai satu kesatuan sistem. Pengintegrasian sistem informasi merupakan salah satu konsep kunci dari sistem Informasi Manajemen. Berbagi sistem dapat saling berhubungan satu dengan yang lain dengan berbagai cara yang sesuai dengan keperluannya. Aliran informasi diantara sistem sangat bermanfaat bilda data dalam file suatu sistem diperlukan juga oleh sistem yang lainnya, atau output suatu sistem menjadi input bagi sistem lainnya.

Keuntungan dari integrasi sistem ini adalah membaiknya suatu arus informasi dalam sebuah organisasi. Suatu pelaporan biasanya memang memerlukan waktu, namun demikian akan semakin banyak informasi yang relevan dalam kegiatan manajerial yang dapat diperoleh bila diperlukan. Keuntungan ini merupakan alasan yang kuat untuk

mengutamakan (mengunggulkan) sistem informasi terintegrasi karena tujuan utama dari sistem informasi adalah memberikan informasi yang benar pada saat yang tepat. Integrasi data dan informasi dari sebuah sistem diperlukan karena:

1. Perencanaan, pengembangan dan Pembangunan, Sistem Informasi Program Pengawasan Penyelenggaraan Perkeretaapian secara online yang mampu memudahkan auditor/ inspektur menyimpan informasi;
2. Mempermudah pengumpulan data;
3. Mempercepat pemrosesan data dan penilaian, antara lain membantu mempercepat proses kegiatan audit/ inspeksi, sehingga akan meningkatkan efisiensi waktu, validitas informasi dan pengelolaan database yang akuntabel;
4. Mempercepat sistem pelaporan kegiatan Audit/ Inspeksi Perkeretaapian;
5. Pengembangan sistem database Audit/ Inspeksi Perkertaapian;
6. Sinkronisasi database;
7. Pembangunan aplikasi yang dapat diakses secara online 24 jam lewat PC maupun smartphone

Berdasarkan permasalahan/ potensi kendala dan harapan di atas dapat dipecahkan dengan pendekatan penataan proses bisnis, sebagai Upaya peningkatan kinerja dan pelayanan publik. Penataan proses bisnis dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem, proses, dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien dan terukur pada masing-masing unit kerja. Untuk melakukan penataan proses bisnis perlu adanya pemetaan proses bisnis sebagaimana yang telah diatur pada Peraturan Menteri Perhubungan nomor 50 tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Peta Proses Bisnis dan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Kementerian Perhubungan. Pada peraturan tersebut dinyatakan bahwa proses bisnis adalah sekumpulan aktivitas kerja terstruktur dan saling terkait yang menghasilkan keluaran sesuai dengan kebutuhan pengguna.

Berdasarkan pendekatan teknologi, upaya peningkatan pelayanan dapat dilakukan dengan integrasi data, terutama untuk pertukaran data yang melibatkan beberapa instansi (unit kerja).

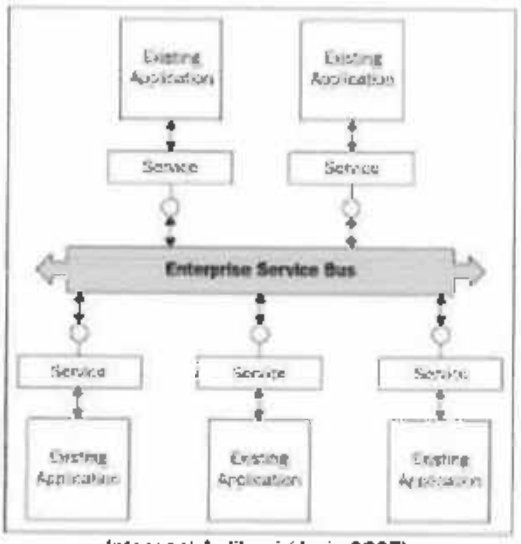

Integrasi Aplikasi (Juric,2007)

Untuk itu perlu adanya bisnis proses **Sistem Informasi Program Keselamatan Dalam Pengawasan Penyelenggaraan Perkeretaapian** yang mencakup 3 (tiga) modul tersebut, dengan ketentuan sebagai berikut:

1) Sistem dapat melakukan penyusunan dokumen oleh beberapa admin untuk setiap kegiatan audit, inspeksi, dan penilaian sistem keselamatan secara realtime;
2) Sistem dapat berkomunikasi dan menyimpan file/ data yang dimiliki oleh penyelenggara perkeretaapian/ instansi terkait;
3) Sistem dapat memberikan/ menampilkan data statistik progres untuk setiap kegiatan;
4) Sistem dapat berfungsi sebagai sistem pengawasan (monitoring dan evaluasi) terhadap tindak lanjut kegiatan audit, inspeksi, dan penilaian sistem keselamatan;
5) Sistem dapat dipergunakan sebagai pertimbangan pengambilan Keputusan

Manfaat yang ingin dicapai dengan Pembangunan **Sistem Informasi Program Keselamatan Dalam Pengawasan Penyelenggaraan Perkeretaapian** adalah:

1) Tersusunnya database dokumen secara terpusat (*data warehouse*)
2) Terjaminnya validasi data dan menghilangkan duplikasi/ redundancy data;
3) Kemudahan dalam mengakses data perkeretaapian untuk kepentingan inspektur dan auditor.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat digambarkan skema sistem pengawasan perkeretaapian yang akan menjadi acuan pembangunan aplikasi.

Dan secara Platform Aplikasi pada masing- masing modul yang efektif dan fungsional adalah sebagai berikut:

1) Platform Webbase sisi modul administrator, pimpinan Direktorat Keselamatan Perkeretaapian dan Balai Teknik Perkeretaapian;
2) Platform Mobile sisi modul pengawasan untuk pengawasan oleh Auditor dan Inspektur;
3) Platform Desktop untuk pengawasan operasional yang dapat diakses oleh penyelenggara perkeretaapian/ instansi terkait.

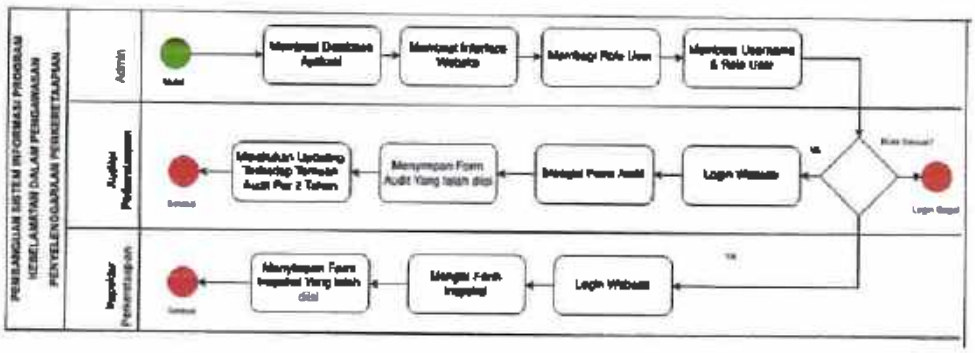

D. Tenaga Ahli

Pihak ketiga yang berkompeten dan telah melalui proses pelelangan. Dengan Tenaga Ahli yang dibutuhkan dalam menyusun kegiatan ini sebagai berikut:

8. Pemimpin Tim merupakan ahli dengan berpendidikan minimal S-2 di bidang Teknologi Informatika dengan pengalaman kerja minimal 5 tahun memiliki sertifikat keahlian informatika;
9. Project Manager merupakan ahli dengan berpendidikan minimal S-1 di bidang Teknologi Informatika dengan pengalaman 6 tahun sebagai Scrum master yaitu orang yang bertanggung jawab untuk memastikan bahwa prosses scrum dalam sebuah proyek dapat berjalan dengan lancar. Sebagai Scrum Master, bertanggun jawab untuk memastikan praktik agile dijalankan oleh semua tim dan menjadi penghubung antara product owner dan tim pengembang.
10. Designer merupakan ahli dengan berpendidikan minimal S-1 dibidang Desain Teknologi Informatika dengan pengalaman 3 tahun bertanggung jawab dalam membuat, merancang, ataupun menciptakan suatu karya dengan tujuan agar bisa memecahkan masalah (problem solving);
11. Programmer merupakan ahli dengan berpendidikan minimal D-3 dibidang Programmer Teknologi Informatika berpengalaman selama 3 tahun orang yang ahli dalam membuat suatu program yang dapat dibaca oleh komputer.
12. Ahli Pemrograman merupakan ahli dengan berpendidikan minimal S-1 bidang TI, yang memiliki pengalaman minimal 5 tahun yang dibuktikan dengan surat referensi, memiliki sertifikat keahlian dibidang pemrograman;
13. IT Networking merupakan ahli dengan berpendidikan minimal S-1 dibidang Programmer Teknologi Informatika berpengalaman selama 3 tahun orang yang ahli dalam membuat jaringan yang dapat digunakan oleh perangkat;
14. Quality Control merupakan ahli dengan berpendidikan minimal S-2 dibidang Programmer Teknologi Informatika berpengalaman selama 5 tahun orang yang ahli dalam melakukan penilaian terhadap kesesuaian spesifikasi dari suatu perangkat;
15. IT Consultant merupakan ahli dengan berpendidikan minimal S-2 dibidang Programmer Teknologi Informatika berpengalaman selama 5 tahun orang yang ahli dibindang teknologi informasi dibidang pemerintahan;
16. Auditor SMK3 + KP merupakan ahli dengan berpendidikan minimal S-2 dibidang Programmer Teknologi Informatika berpengalaman selama 5 tahun orang yang ahli dibidang audit sistem manajemen keselamatan, kesehatan kerja, serta keselamatan perkeretaapian.
17. Ahli Konstruksi Jalan Rel merupakan ahli dengan berpendidikan minimal S-2 dibidang Programmer Teknologi Informatika berpengalaman selama 5 tahun orang yang ahli pada prasarana perkeretaapian;
18. Ahli Persinyalan merupakan ahli dengan berpendidikan minimal S-2 dibidang Programmer Teknologi Informatika berpengalaman selama 5 tahun orang yang ahli dibidang fasilitas pengoperasian perkeretaapian;
19. Ahli Geologi merupakan ahli dengan berpendidikan minimal S-2 dibidang Programmer Teknologi Informatika berpengalaman selama 5 tahun orang yang ahli

dalam bidang geologi untuk pemetaan pada daerah yang berpotensi rawan bencana alam;

20. Ahli Sarana KA merupakan ahli dengan berpendidikan minimal S-2 dibidang Programmer Teknologi Informatika berpengalaman selama 5 tahun orang yang ahli dibidang sarana perkeretaapian.

E. Spesifikasi Teknis

b. Basis Aplikasi: Website
c. Bahasa pemrograman : PHP
d. Kerangka Framework Pengembangan : Codelgniter (CI)/ Laravel
e. Basis Data: MySQL
f. OS: Centos 7

F. Catatan Rekomendasi

Tim Reviu Pusat Data dan Teknologi Informasi mencatat rekomendasi untuk Pembangunan Sistem Informasi Program Keselamatan Dalam Pengawasan Penyelenggaraan Perkeretaapian Tahun Anggaran 2024 yang diusulkan oleh Direktorat Keselamatan Perkeretaapian – Direktorat Jenderal Perkeretaapian dengan catatan sebagai berikut :

1. Diwajibkan mengacu pada Perpres nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan KM nomor 112 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Di Lingkungan Kementerian Perhubungan;
2. Kegiatan ini wajib mengacu pada KM nomor 222 tahun 2020 tentang Rencana Induk Teknologi Informasi dan Komunikasi di lingkungan Kementerian Perhubungan Tahun 2020-2024 sebagai data dukung utama dalam kegiatan ini;
3. Berpedoman pada Arsitektur TIK dan KM nomor 106 Tahun 2023 tentang Peta Rencana SPBE Kementerian Perhubungan;
4. Sesuai Peraturan Presiden nomor 39 tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (SDI) dan KM nomor 150 tahun 2021 tentang Tata Kelola Data di lingkungan Kementerian Perhubungan, agar memenuhi Prinsip Tata Kelola Data Kementerian Perhubungan sebagai penunjang Satu Data Indonesia sehingga pengusul kegiatan sebagai produsen data wajib menerapkan Prinsip Satu Data Indonesia (SDI) yang mencakup Standar Data dan Metadata, Kode Referensi/ Data Induk serta Interoperabilitas guna mengintegrasikan data ke Pusdatin serta menyiapkan *web service* integrasi untuk dapat berbagi pakai;
5. Dalam proses pengembangan aplikasi harus menggunakan Sistem Operasi, *development tools* terkini dan memanfaatkan infrastruktur TIK berbagi pakai berupa *Government Cloud* atau Pusat Data Nasional (PDN);
6. Dengan berpedoman pada prinsip SDLC KP nomor 536 Tahun 2016 tentang Panduan Teknis Penerapan *System Development Life Cycle* (SDLC) Sistem Informasi di Lingkungan Kementerian Perhubungan dan KM nomor 107 Tahun 2023 tentang Kebijakan dan Standar Sistem Manajemen Keamanan Informasi di Lingkungan Kementerian Perhubungan, kegiatan tersebut wajib melakukan *User Acceptance Test* (UAT), *System Integration Test* (SIT), *Vulnerability Assessment* (VA) dan *Penetration Testing* (Pentest);
7. Agar memperhatikan terkait Aset Tak Berwujud (ATB) dalam rangka tertib inventaris APBN;

8. Menerapkan standar biaya berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan KM nomor 6 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan dan Penetapan Harga Perkiraan Sendiri untuk Pengadaan Jasa Konsultansi Non konstruksi di Lingkungan Kementerian Perhubungan.

Jakarta, Januari 2024

SEKRETARIAT DITJEN PERKERETAAPIAN	DIREKTORAT KESELAMATAN PERKERETAAPIAN	PUSDATIN
Andi Guntur Asapa	**Gunadi Raharjo**	**R. Rachmat Herwannuri**
NIP. 198407242007121001	NIP. 19811208 200604 1 002	NIP. 19700814 199903 1 001

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
SEKRETARIAT JENDERAL
PUSAT DATA DAN TEKNOLOGI INFORMASI

Gedung Karya Lt.25
Jl. Medan Merdeka Barat No.8
Jakarta 10110

Telp. : 3456703, 3811308
Contact Center : 151

e-Mail : pusdatin@kemenhub.go.id
Website : http://www.kemenhub.go.id

CATATAN HASIL REVIU
ATAS USULAN KEGIATAN
PEMBANGUNAN SISTEM INFORMASI PROGRAM KESELAMATAN DALAM PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PERKERETAAPIAN
TAHUN ANGGARAN 2024
DIREKTORAT KESELAMATAN PERKERETAAPIAN
DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

Berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 9 tahun 2023 tentang Pedoman Reviu Teknologi Informasi dan Komunikasi di Lingkungan Kementerian Perhubungan, bersama ini kami sampaikan Catatan Hasil Reviu sebagai berikut :

DATA UMUM

Kegiatan Pembangunan Sistem Informasi Program Keselamatan Dalam Pengawasan Penyelenggaraan Perkeretaapian Tahun Anggaran 2024 dengan pagu anggaran sebesar Rp. 2.420.617.000,- (Dua Milyar Empat Ratus Dua Puluh Juta Enam Ratus Tujuh Belas Ribu Rupiah).

A. Ruang Lingkup

Ruang lingkup pekerjaan Pembangunan Sistem Informasi Program Pengawasan Penyelenggaraan Perkeretaapian adalah sebagai berikut:

1. Perencanaan
   a. Melakukan pengumpulan data terkait personal auditor dan inspektur Perkeretaapian;
   b. Melakukan pengumpulan kebutuhan user (penerima manfaat) dalam Pembangunan Sistem Informasi Program Pengawasan Penyelenggaraan Perkeretaapian;
   c. Melakukan pengembangan spesifikasi kebutuhan dan verifikasinya kepada user;
2. Analisis Kebutuhan Informasi
   a. Pemetaan kebutuhan user:
   b. Pemetaan fitur/ modul software dalam Pembangunan Sistem Informasi Program Pengawasan Penyelenggaraan Perkeretaapian
3. Perancangan Sistem
   a. Melakukan pengembangan desain software system terhadap pemetaan kebutuhan-kebutuhan user ke dalam suatu bentuk software/ aplikasi'
   b. Melakukan konsultasi dalam Pembangunan sistem aplikasi/ software kepada Pusdatin Kementerian Perhubungan dan pemberi pekerjaan

4. Pengujian
   a. Melakukan testing terhadap aplikasi dengan penyediaan test plan dan test script oleh penyediaan sistem, sesuai skenario- skenario dari unit TI dan kelompok pengguna;
   b. Penyediaan bukti pengujian fungsional maupun fungsional dari penyedia sistem termasuk unit testing, user acceptance testing, system testing, integration testing, kompabilitas testing, error dan exception testing dan performance testing;
   c. Pengujian fungsional maupun non- fungsional oleh unit TI dan setiap kelompok pengguna dari satuan kerja
5. Implementasi
   Dalam hal ini, setelah dilakukan pengujian, perlu dilakukan implementasi oleh setiap kelompok pengguna dari satuan kerja. Implementasi dilakukan setelah pelaksanaan pelatihan untuk mengenalkan tahapan dan penggunaan sistem informasi yang dibangun. Pelaksanaan pelatihan dimaksud merupakan tanggung jawab dari Penyedia Jasa.
6. Pemeliharaan
   Pemeliharaan dilakukan selama 1 tahun setelah serah terima pekerjaan, oleh penerima pekerjaan sesuai dengan RAB dalam studi ini.

B. *Output* Kegiatan

Keluaran yang hendak dihasilkan dari kegiatan Pembangunan Sistem Informasi Program Keselamatan Dalam Pengawasan Penyelenggaraan Perkeretaapian dalam rangka program pengawasan penyelenggaraan perkeretaapian, sekurang- kurangnya terdiri dari:

1) Aplikasi yang sudah disepakati;
2) Dokumen teknis masing- masing aplikasi baik DFD, Bisnis Proses dan Struktur Database;
3) Buku Manual; dan
4) Video tutorial

C. Bisnis Proses

Sistem Informasi Program Keselamatan dalam Pengawasan Penyelenggaraan Perkeretaapuan merupakan sistem yang terdiri dari 3 (tiga) modul yaitu **Sistem informasi Audit, Sistem Informasi, Sistem Informasi Penilaian Sistem Keselamatan**. Sistem Pengawasan Keselamatan yang terintegrasi akan menggabungkan komponen sub- sub sistem ke dalam suatu sistem dan menjamin fungsi- fungsi dari sub sistem tersebut sebagai satu kesatuan sistem. Pengintegrasian sistem informasi merupakan salah satu konsep kunci dari sistem Informasi Manajemen. Berbagi sistem dapat saling berhubungan satu dengan yang lain dengan berbagai cara yang sesuai dengan keperluannya. Aliran informasi diantara sistem sangat bermanfaat bilda data dalam file suatu sistem diperlukan juga oleh sistem yang lainnya, atau output suatu sistem menjadi input bagi sistem lainnya.

Keuntungan dari integrasi sistem ini adalah membaiknya suatu arus informasi dalam sebuah organisasi. Suatu pelaporan biasanya memang memerlukan waktu, namun demikian akan semakin banyak informasi yang relevan dalam kegiatan manajerial yang dapat diperoleh bila diperlukan. Keuntungan ini merupakan alasan yang kuat untuk

mengutamakan (mengunggulkan) sistem informasi terintegrasi karena tujuan utama dari sistem informasi adalah memberikan informasi yang benar pada saat yang tepat. Integrasi data dan informasi dari sebuah sistem diperlukan karena:

1. Perencanaan, pengembangan dan Pembangunan, Sistem Informasi Program Pengawasan Penyelenggaraan Perkeretaapian secara online yang mampu memudahkan auditor/ inspektur menyimpan informasi;
2. Mempermudah pengumpulan data;
3. Mempercepat pemrosesan data dan penilaian, antara lain membantu mempercepat proses kegiatan audit/ inspeksi, sehingga akan meningkatkan efisiensi waktu, validitas informasi dan pengetilaan database yang akuntabel;
4. Mempercepat sistem pelaporan kegiatan Audit/ Inspeksi Perkeretaapian;
5. Pengembangan sistem database Audit/ Inspeksi Perkertaapian;
6. Sinkronisasi database;
7. Pembangunan aplikasi yang dapat diakses secara online 24 jam lewat PC maupun smartphone

Berdasarkan permasalahan/ potensi kendala dan harapan di atas dapat dipecahkan dengan pendekatan penataan proses bisnis, sebagai Upaya peningkatan kinerja dan pelayanan publik. Penataan proses bisnis dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem, proses, dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien dan terukur pada masing-masing unit kerja. Untuk melakukan penataan proses bisnis perlu adanya pemetaan proses bisnis sebagaimana yang telah diatur pada Peraturan Menteri Perhubungan nomor 50 tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Peta Proses Bisnis dan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Kementerian Perhubungan. Pada peraturan tersebut dinyatakan bahwa proses bisnis adalah sekumpulan aktivitas kerja terstruktur dan saling terkait yang menghasilkan keluaran sesuai dengan kebutuhan pengguna.

Berdasarkan pendekatan teknologi, upaya peningkatan pelayanan dapat dilakukan dengan integrasi data, terutama untuk pertukaran data yang melibatkan beberapa instansi (unit kerja).

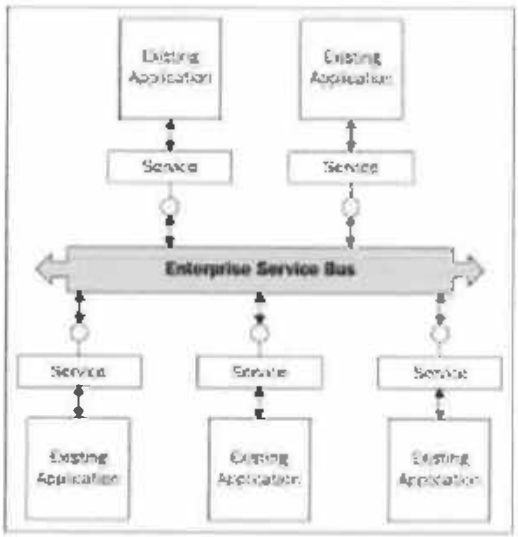

Integrasi Aplikasi (Junc,2007)

Untuk itu perlu adanya bisnis proses **Sistem Informasi Program Keselamatan Dalam Pengawasan Penyelenggaraan Perkeretaapian** yang mencakup 3 (tiga) modul tersebut, dengan ketentuan sebagai berikut:

1) Sistem dapat melakukan penyusunan dokumen oleh beberapa admin untuk setiap kegiatan audit, inspeksi, dan penilaian sistem keselamatan secara realtime;
2) Sistem dapat berkomunikasi dan menyimpan file/ data yang dimiliki oleh penyelenggara perkeretaapian/ instansi terkait;
3) Sistem dapat memberikan/ menampilkan data statistik progres untuk setiap kegiatan;
4) Sistem dapat berfungsi sebagai sistem pengawasan (monitoring dan evaluasi) terhadap tindak lanjut kegiatan audit, inspeksi, dan penilaian sistem keselamatan;
5) Sistem dapat dipergunakan sebagai pertimbangan pengambilan Keputusan

Manfaat yang ingin dicapai dengan Pembangunan **Sistem Informasi Program Keselamatan Dalam Pengawasan Penyelenggaraan Perkeretaapian** adalah:

1) Tersusunnya database dokumen secara terpusat (*data warehouse*)
2) Terjaminnya validasi data dan menghilangkan duplikasi/ redundancy data;
3) Kemudahan dalam mengakses data perkeretaapian untuk kepentingan inspektur dan auditor.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat digambarkan skema sistem pengawasan perkeretaapian yang akan menjadi acuan pembangunan aplikasi.

Dan secara Platform Aplikasi pada masing- masing modul yang efektif dan fungsional adalah sebagai berikut:

1) Platform Webbase sisi modul administrator, pimpinan Direktorat Keselamatan Perkeretaapian dan Balai Teknik Perkeretaapian;
2) Platform Mobile sisi modul pengawasan untuk pengawasan oleh Auditor dan Inspektur;
3) Platform Desktop untuk pengawasan operasional yang dapat diakses oleh penyelenggara perkeretaapian/ instansi terkait.

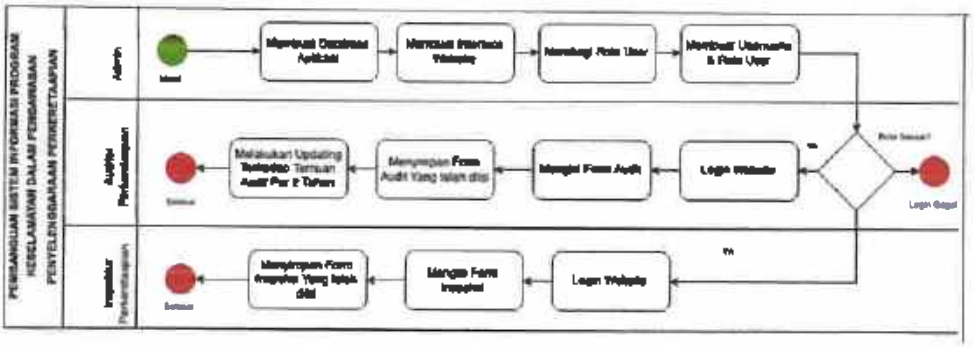

D. Tenaga Ahli

Pihak ketiga yang berkompeten dan telah melalui proses pelelangan. Dengan Tenaga Ahli yang dibutuhkan dalam menyusun kegiatan ini sebagai berikut:

8. Pemimpin Tim merupakan ahli dengan berpendidikan minimal S-2 di bidang Teknologi Informatika dengan pengalaman kerja minimal 5 tahun memiliki sertifikat keahlian informatika;
9. Project Manager merupakan ahli dengan berpendidikan minimal S-1 di bidang Teknologi Informatika dengan pengalaman 6 tahun sebagai Scrum master yaitu orang yang bertanggung jawab untuk memastikan bahwa prosses scrum dalam sebuah proyek dapat berjalan dengan lancar. Sebagai Scrum Master, bertanggun jawab untuk memastikan praktik agile dijalankan oleh semua tim dan menjadi penghubung antara product owner dan tim pengembang.
10. Designer merupakan ahli dengan berpendidikan minimal S-1 dibidang Desain Teknologi Informatika dengan pengalaman 3 tahun bertanggung jawab dalam membuat, merancang, ataupun menciptakan suatu karya dengan tujuan agar bisa memecahkan masalah (problem solving);
11. Programmer merupakan ahli dengan berpendidikan minimal D-3 dibidang Programmer Teknologi Informatika berpengalaman selama 3 tahun orang yang ahli dalam membuat suatu program yang dapat dibaca oleh komputer.
12. Ahli Pemrograman merupakan ahli dengan berpendidikan minimal S-1 bidang TI, yang memiliki pengalaman minimal 5 tahun yang dibuktikan dengan surat referensi, memiliki sertifikat keahlian dibidang pemrograman;
13. IT Networking merupakan ahli dengan berpendidikan minimal S-1 dibidang Programmer Teknologi Informatika berpengalaman selama 3 tahun orang yang ahli dalam membuat jaringan yang dapat digunakan oleh perangkat;
14. Quality Control merupakan ahli dengan berpendidikan minimal S-2 dibidang Programmer Teknologi Informatika berpengalaman selama 5 tahun orang yang ahli dalam melakukan penilaian terhadap kesesuaian spesifikasi dari suatu perangkat;
15. IT Consultant merupakan ahli dengan berpendidikan minimal S-2 dibidang Programmer Teknologi Informatika berpengalaman selama 5 tahun orang yang ahli dibindang teknologi informasi dibidang pemerintahan;
16. Auditor SMK3 + KP merupakan ahli dengan berpendidikan minimal S-2 dibidang Programmer Teknologi Informatika berpengalaman selama 5 tahun orang yang ahli dibidang audit sistem manajemen keselamatan, kesehatan kerja, serta keselamatan perkeretaapian.
17. Ahli Konstruksi Jalan Rel merupakan ahli dengan berpendidikan minimal S-2 dibidang Programmer Teknologi Informatika berpengalaman selama 5 tahun orang yang ahli pada prasarana perkeretaapian;
18. Ahli Persinyalan merupakan ahli dengan berpendidikan minimal S-2 dibidang Programmer Teknologi Informatika berpengalaman selama 5 tahun orang yang ahli dibidang fasilitas pengoperasian perkeretaapian;
19. Ahli Geologi merupakan ahli dengan berpendidikan minimal S-2 dibidang Programmer Teknologi Informatika berpengalaman selama 5 tahun orang yang ahli

dalam bidang geologi untuk pemetaan pada daerah yang berpotensi rawan bencana alam;

20. Ahli Sarana KA merupakan ahli dengan berpendidikan minimal S-2 dibidang Programmer Teknologi Informatika berpengalaman selama 5 tahun orang yang ahli dibidang sarana perkeretaapian.

E. Spesifikasi Teknis

b. Basis Aplikasi: Website
c. Bahasa pemrograman : PHP
d. Kerangka Framework Pengembangan : Codelgniter (CI)/ Laravel
e. Basis Data: MySQL
f. OS: Centos 7

F. Catatan Rekomendasi

Tim Reviu Pusat Data dan Teknologi Informasi mencatat rekomendasi untuk Pembangunan Sistem Informasi Program Keselamatan Dalam Pengawasan Penyelenggaraan Perkeretaapian Tahun Anggaran 2024 yang diusulkan oleh Direktorat Keselamatan Perkeretaapian – Direktorat Jenderal Perkeretaapian dengan catatan sebagai berikut :

1. Diwajibkan mengacu pada Perpres nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan KM nomor 112 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Di Lingkungan Kementerian Perhubungan;
2. Kegiatan ini wajib mengacu pada KM nomor 222 tahun 2020 tentang Rencana Induk Teknologi Informasi dan Komunikasi di lingkungan Kementerian Perhubungan Tahun 2020-2024 sebagai data dukung utama dalam kegiatan ini;
3. Berpedoman pada Arsitektur TIK dan KM nomor 106 Tahun 2023 tentang Peta Rencana SPBE Kementerian Perhubungan;
4. Sesuai Peraturan Presiden nomor 39 tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (SDI) dan KM nomor 150 tahun 2021 tentang Tata Kelola Data di lingkungan Kementerian Perhubungan, agar memenuhi Prinsip Tata Kelola Data Kementerian Perhubungan sebagai penunjang Satu Data Indonesia sehingga pengusul kegiatan sebagai produsen data wajib menerapkan Prinsip Satu Data Indonesia (SDI) yang mencakup Standar Data dan Metadata, Kode Referensi/ Data Induk serta Interoperabilitas guna mengintegrasikan data ke Pusdatin serta menyiapkan *web service* integrasi untuk dapat berbagi pakai;
5. Dalam proses pengembangan aplikasi harus menggunakan Sistem Operasi, *development tools* terkini dan memanfaatkan infrastruktur TIK berbagi pakai berupa *Government Cloud* atau Pusat Data Nasional (PDN);
6. Dengan berpedoman pada prinsip SDLC KP nomor 536 Tahun 2016 tentang Panduan Teknis Penerapan *System Development Life Cycle* (SDLC) Sistem Informasi di Lingkungan Kementerian Perhubungan dan KM nomor 107 Tahun 2023 tentang Kebijakan dan Standar Sistem Manajemen Keamanan Informasi di Lingkungan Kementerian Perhubungan, kegiatan tersebut wajib melakukan *User Acceptance Test* (UAT), *System Integration Test* (SIT), *Vulnerability Assessment* (VA) dan *Penetration Testing* (Pentest);
7. Agar memperhatikan terkait Aset Tak Berwujud (ATB) dalam rangka tertib inventaris APBN;

8. Menerapkan standar biaya berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan KM nomor 6 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan dan Penetapan Harga Perkiraan Sendiri untuk Pengadaan Jasa Konsultansi Non konstruksi di Lingkungan Kementerian Perhubungan.

Jakarta, Januari 2024

SEKRETARIAT DITJEN PERKERETAAPIAN	DIREKTORAT KESELAMATAN PERKERETAAPIAN	PUSDATIN
Andi Guntur Asapa	**Gunadi Raharjo**	**R. Rachmat Herwannuri**
NIP. 198407242007121001	NIP. 19811208 200604 1 002	NIP. 19700814 199903 1 001

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
SEKRETARIAT JENDERAL
PUSAT DATA DAN TEKNOLOGI INFORMASI

Gedung Karya Lt.25
Jl. Medan Merdeka Barat No.8
Jakarta 10110

Telp. : 3456703, 3811308
Contact Center : 151

e-Mail : pusdatin@k*m*nhub.go.id
Website : http://www.kemenhub.go.id

Nomor : TI.005/11/9 PDTI.2024
Klasifikasi : Biasa
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Penyampaian Rekomendasi Hasil Reviu dan *Clearance* Kegiatan **Management Studio Geodatabase** Lanjutan Tahun Anggaran 2024

Jakarta, 01 April 2024

Yth. 1. Sekretaris Direktorat Jenderal Perkeretaapian;
2. Direktur Lalu Lintas Dan Angkutan Kereta Api.

Menindaklanjuti Surat:

1. Menindaklanjuti surat Sekretaris Direktorat Jenderal Perkeretaapian nomor TI. 101/1/6/K1/DJKA/2023 tanggal 24 Oktober 2023 hal **Usulan Kegiatan TIK di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian** Tahun 2029;
2. Menindaklanjuti Surat Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana Kementerian PAN-RB nomor: 271/DJAI/PR.01.01/03/2024, B/507/KT.03/2024 dan 04669/D1.11/03/2024 tanggal 19 Maret 2024 hal Penyampaian Hasil Evaluasi Anggaran Belanja SPBE Tahun 2024 di Lingkup Kementerian Perhubungan;
3. Menindaklanjuti Surat Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Kominfo nomor: 271/DJAI/PR.01.01/03/2024, **B/507/KT.03/2024 dan 04669/D1.11/03/2024 tanggal 19 Maret 2024** hal Penyampaian Hasil Evaluasi Anggaran Belanja SPBE Tahun 2024 di Lingkup Kementerian Perhubungan;
4. Menindaklanjuti Surat Deputi Bidang Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan nomor: 271/DJAI/PR.01.01/03/2024, B/507/KT.03/2024 dan 04669/D1.11/03/2024 tanggal 19 Maret 2024 hal Penyampaian Hasil Evaluasi Anggaran Belanja SPBE Tahun 2024 di Lingkup Kementerian Perhubungan.

telah dilakukan reviu kegiatan TIK oleh Pusat Data dan Teknologi Informasi **(Pusdatin)**.

Sesuai dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KM. 9 Tahun 2023 tentang Pedoman Reviu Teknologi Informasi dan Komunikasi di Lingkungan Kementerian Perhubungan, dengan ini kami sampaikan bahwa Kegiatan Management Studio Geodatabase Lanjutan Tahun Anggaran 2024 **dapat dilanjutkan** dengan memperhatikan catatan hasil reviu dan surat hasil rekomendasi *clearance* TIK Tahun Anggaran 2024 yang dikeluarkan oleh KemenPAN-RB, Kemenkominfo dan Kementerian PPN/BAPPENAS sebagaimana terlampir pada surat ini.

Rekomendasi Reviu TIK ini berlaku sepanjang Tahun Anggaran 2024 untuk Kegiatan Management Studio Geodatabase Lanjutan dengan pagu anggaran sebesar Rp. 967.000.000,- (Sembilan Ratus Enam Puluh Tujuh Juta Rupiah) sesuai data dukung yang disampaikan ke Pusdatin sejak surat ini ditandatangani.

Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Direktorat Lalu Lintas Dan Angkutan Kereta Api bertanggungjawab sepenuhnya terhadap pelaksanaan kegiatan sesuai catatan hasil reviu untuk Kegiatan Management Studio Geodatabase Lanjutan.

Demikian disampaikan atas perhatian dan kerjasama Saudara, diucapkan terima kasih.

Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi,

PUSAT DATA DAN TEKNOLOGI INFORMASI

Raymond Ivan, H.A.S, S.T.
NIP. 19671213 199603 1 001

Tembusan:
1. Sekretaris Jenderal;
2. Direktur Jenderal Perkeretaapian;
3. Inspektur Jenderal;
4. Staf Ahli Bidang Teknologi dan Energi Perhubungan.

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
SEKRETARIAT JENDERAL
PUSAT DATA DAN TEKNOLOGI INFORMASI

Gedung Karya Lt.25
Jl. Medan Merdeka Barat No.8
Jakarta 10110

Telp. : 3456703, 3811308
Contact Center : 151

e-Mail : pusdatin@kemenhub.go.id
Website : http://www.kemenhub.go.id

CATATAN HASIL REVIU
ATAS USULAN KEGIATAN
MANAJEMEN *STUDIO GEODATABASE* LANJUTAN
TAHUN ANGGARAN 2024
DIREKTORAT LALU LINTAS DAN ANGKUTAN KERETA API
DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

Berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 9 tahun 2023 tentang Pedoman Reviu Teknologi Informasi dan Komunikasi di Lingkungan Kementerian Perhubungan, bersama ini kami sampaikan Catatan Hasil Reviu sebagai berikut :

DATA UMUM

Kegiatan Manajemen *Studio Geodatabase* Lanjutan Tahun Anggaran 2024 dengan pagu anggaran sebesar Rp. 967.000.000,- (Sembilan Ratus Enam Puluh Tujuh Juta Rupiah).

A. Ruang Lingkup

Ruang lingkup kegiatan Manajemen *Studio Geodatabase* Lanjutan adalah sebagai berikut:

1. Perencanaan
   a. Melakukan identifikasi kebutuhan *stakeholder* yang terlibat dalam proses bisnis rencana pengembangan jaringan jalur kereta api
   b. Melakukan *benchmarking* terhadap aplikasi- aplikasi yang ada di lingkungan Kementerian Perhubungan
2. Analisis kebutuhan informasi
   a. Melakukan analisa terhadap SOP atau proses bisnis rencana pengembangan jaringan jalur kereta api;
   b. Mengumpulkan data dan dokumen terkait rencana pengembangan jaringan jalur kereta api
3. Perancangan
   a. Melakukan perancangan *database* dengan mempertimbangkan integrasi data yang sudah terbangun di lingkungan Direktorat Jenderal Pekeretaapian maupun di lingkungan Kementerian Perhubungan yang dikelola oleh Pusat Data dan Teknologi Informasi
   b. Melakukan perancangan antarmuka sistem informasi rencana pengembangan jaringan jalur kereta api yang dapat diakses dari berbagai perangkat
   c. Melakukan perancangan API (*Application Programming Interface*) *Web Service* disesuaikan dengan kebutuhan integrasi data untuk keperluan berbagi pakai dengan aplikasi/ sistem lain yang sudah terbangun di lingkungan Kementerian Perhubungan maupun Kementerian/ Lembaga lain
   d. Melakukan perancangan sistem keamanan informasi

4. Pengujian
   a. Melakukan pengujian terhadap sistem informasi dengan penyediaan *test plan* dan *test script* oleh penyedia sistem, sesuai dengan skenario- skenario dari unit TI dan kelompok pengguna
   b. Penyediaan bukti pengujian fungsional dan nonfungsional dari penyedia sistem termasuk *unit testing, user acceptance test, system testing, integration testing, compatibilities testing, error and exception testing, penetration testing*, dan *performance testing*.
   c. Pengujian fungsional maupun non fungsional oleh unit TI dan setiap kelompok pengguna dari satuan kerja
5. Implementasi sistem
   a. Melakukan pemasangan sistem informasi rencana pengembangan jaringan jalur kereta api pada server yang telah ditentukan
   b. Melakukan bimbingan teknis dan sosialisasi kepada para pemangku kepentingan
6. Pemeliharaan
   a. Melakukan monitoring dan maintenance sistem selama uji coba penerapan sistem
   b. Membuat berita acara serah terima sistem dan source code

B. *Output* Kegiatan

Output kegiatan Manajemen *Studio Geodatabase* Lanjutan harus memuat:

a. Laporan;
b. Dokumentasi kegiatan;
c. Sistem Informasi Rencana Pengembangan Jaringan Jalur Kereta Api;
d. Menyediakan *Web Service* API lengkap dengan dokumentasinya untuk kebutuhan pertukaran data sesuai kebutuhan;
e. SOP dan petunjuk penggunaan berupa buku dan video tutorial Sistem Informasi Rencana Pengembangan Jaringan Jalur Kereta Api

C. Bisnis Proses

Sistem Informasi Rencana Pengembangan Jaringan Jalur Kereta Api menggunakan pemodelan dengan diagram konteks sebagai bisnis proses sistem seperti yang terlihat pada gambar berikut:

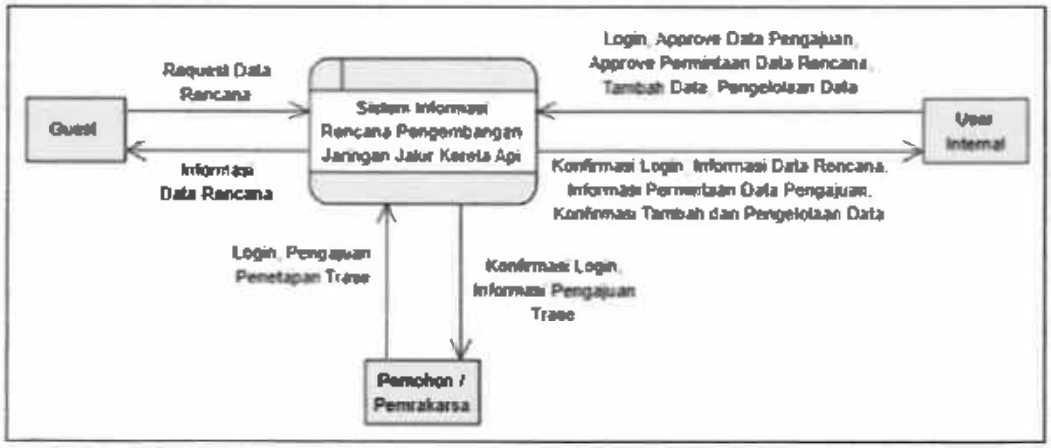

D. Tenaga Ahli

Tenaga ahli yang dibutuhkan untuk kegiatan pembangunan sistem informasi rencana pengembangan jaringan jalur kereta api memiliki kualifikasi sebagai berikut:

No.	Tenaga Ahli	Pengalaman	Pendidikan Minimal	Uraian Tugas
1	Ketua Tim/Ahli Informatika	≥ 9 tahun	S2 Manajemen Informatika / Teknik Komputer / Teknik Informatika	- Penanggung jawab utama - Mengkoordinasikan dan mengelola tenaga ahli - Membuat jadwal kegiatan, memonitor progres pekerjaan yang dilakukan tenaga ahli - Melakukan perancangan sistem dan *problem solving*
2	Ahli Web Desain	≥ 8 tahun	S1 Teknik Informatika / Teknik Komputer / Ilmu Komputer	- Merancang antarmuka sistem sehingga menarik dan mudah digunakan
3	Ahli Pemrograman	≥ 9 tahun	S1 Teknik Informatika / Teknik Komputer / Ilmu Komputer	- Perancangan dan pembangunan sistem - Perancangan skema integrasi melalui *web service*
4	Ahli Database	≥ 9 tahun	S1 Teknik Informatika / Teknik Komputer / Ilmu Komputer	- Perancangan dan pembuatan database - Perancangan struktur data
5	Ahli Sistem Administration	≥ 7 tahun	S1 Teknik Informatika / Teknik Komputer / Ilmu Komputer	- Perancangan kebutuhan *server* untuk menjalankan sistem informasi - Melakukan *testing, debugging* dan *deploying* sistem
6	Sekretaris	≥ 3 tahun	D3 Sekretaris	- Memberikan dukungan administrasi dan tugas-tugas perkantoran

E. Spesifikasi Teknis

1) Kebutuhan Server

Sistem informasi rencana pengembangan jaringan jalur kereta api membutuhkan *Web-Server* dengan spesifikasi minimal sebagai berikut:

Sistem Operasi	***Linux***
Web Server	***Apache***
Database	***MySQL latest version***
Bahasa Pemrograman	***PHP min 8.x.x / Laravel Framework***
Storage	**2TB**

2) Keamanan Sistem

Untuk standar keamanan sistem yang akan dilakukan adalah:

a. *Captcha* pada login;
b. Penerapan enkripsi;
c. Validasi input;
d. Penanganan API dan web service;
e. Satu user tidak dapat digunakan untuk login secara bersamaan pada perangkat yang berbeda;
f. *Auto log out* saat *idle time* (5/10 menit).

F. Catatan Rekomendasi

Tim Reviu Pusat Data dan Teknologi Informasi mencatat rekomendasi untuk Manajemen *Studio Geodatabase* Lanjutan Tahun Anggaran 2024 yang diusulkan oleh Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api - Direktorat Jenderal Perkeretaapian dengan catatan sebagai berikut :

1. Agar melaksanakan Surat Edaran Menteri Komunikasi dan Informatika nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Penggunaan Layanan Komputasi Awan Pihak Ketiga Bagi Kementerian/Lembaga Tahun Anggaran 2021;
2. Unit kerja wajib menyusun dan menyampaikan hasil kajian dan analisa pertumbuhan data serta *transaction per second* dalam periode 1 tahun kedepan untuk mendapatkan perkiraan perhitungan kebutuhan *resource Data Center (DC)* atau *Disaster Recovery Center (DRC)* yang dijelaskan dalam skema arsitektur infrastruktur, sehingga dapat memperhitungkan kebutuhan *server* (*cpu, memory* dan *storage*) yang akan diajukan ke Pusat Data Nasional melalui Pusdatin Kementerian Perhubungan;
3. Menerapkan standar biaya berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan nomor KM nomor 6 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan dan Penetapan Harga Perkiraan Sendiri untuk Pengadaan Jasa Konsultansi Non Konstruksi di Lingkungan Kementerian Perhubungan;
4. Berkoordinasi dengan Pusat Data dan Teknologi Informasi dalam rangka pemanfaatan Pusat Data Nasional (PDN) yang dikelola oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika, serta melakukan perencanaan dan pelaksanaan migrasi sistem secara bertahap, diantaranya dapat difungsikan sebagai *system backup / system development / system production* dari layanan digital Kementerian Perhubungan saat ini. Selanjutnya mengusulkan anggaran dan menyiapkan sumber daya yang diperlukan, untuk pelaksanaan pemanfaatan PDN dimaksud;

5. Berkoordinasi dengan Pusat Data dan Teknologi Informasi dalam rangka pemanfaatan layanan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah di tingkat Nasional;
6. Berkoordinasi dengan Pusat Data dan Teknologi Informasi dalam rangka pelaksanaan aspek keamanan informasi selama proses pengembangan infrastruktur TIK, hingga layanan digital beroperasi.

Jakarta, Januari 2024

SEKRETARIAT DITJEN PERKERETAAPIAN	DIREKTORAT LALU LINTAS DAN ANGKUTAN KERETA API	PUSDATIN
Andi Guntur Asapa	**Hendrialdi**	**R. Rachmat Herwannuri**
NIP. 198407242007121001	NIP. 19700729 199403 1 003	NIP. 19700814 199903 1 001

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
SEKRETARIAT JENDERAL
PUSAT DATA DAN TEKNOLOGI INFORMASI

Gedung Karya Lt.25
Jl. Medan Merdeka Barat No.8
Jakarta 10110

Telp. : 3456703, 3811308
Contact Center : 151

e-Mail : pusdatin@kemenhub.go.id
Website : http://www.kemenhub.go.id

CATATAN HASIL REVIU
ATAS USULAN KEGIATAN
MANAJEMEN *STUDIO GEODATABASE* LANJUTAN
TAHUN ANGGARAN 2024
DIREKTORAT LALU LINTAS DAN ANGKUTAN KERETA API
DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

Berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 9 tahun 2023 tentang Pedoman Reviu Teknologi Informasi dan Komunikasi di Lingkungan Kementerian Perhubungan, bersama ini kami sampaikan Catatan Hasil Reviu sebagai berikut :

DATA UMUM

Kegiatan Manajemen *Studio Geodatabase* Lanjutan Tahun Anggaran 2024 dengan pagu anggaran sebesar Rp. 967.000.000,- (Sembilan Ratus Enam Puluh Tujuh Juta Rupiah).

A. Ruang Lingkup

Ruang lingkup kegiatan Manajemen *Studio Geodatabase* Lanjutan adalah sebagai berikut:

1. **Perencanaan**
   a. Melakukan identifikasi kebutuhan *stakeholder* yang terlibat dalam proses bisnis rencana pengembangan jaringan jalur kereta api
   b. Melakukan *benchmarking* terhadap aplikasi- aplikasi yang ada di lingkungan Kementerian Perhubungan
2. **Analisis kebutuhan informasi**
   a. Melakukan analisa terhadap SOP atau proses bisnis rencana pengembangan jaringan jalur kereta api;
   b. Mengumpulkan data dan dokumen terkait rencana pengembangan jaringan jalur kereta api
3. **Perancangan**
   a. Melakukan perancangan *database* dengan mempertimbangkan integrasi data yang sudah terbangun di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian maupun di lingkungan Kementerian Perhubungan yang dikelola oleh Pusat Data dan Teknologi Informasi
   b. Melakukan perancangan antarmuka sistem informasi rencana pengembangan jaringan jalur kereta api yang dapat diakses dari berbagai perangkat
   c. Melakukan perancangan API (*Application Programming Interface*) *Web Service* disesuaikan dengan kebutuhan integrasi data untuk keperluan berbagi pakai dengan aplikasi/ sistem lain yang sudah terbangun di lingkungan Kementerian Perhubungan maupun Kementerian/ Lembaga lain
   d. Melakukan perancangan sistem keamanan informasi

4. Pengujian
   a. Melakukan pengujian terhadap sistem informasi dengan penyediaan *test plan* dan *test script* oleh penyedia sistem, sesuai dengan skenario- skenario dari unit TI dan kelompok pengguna
   b. Penyediaan bukti pengujian fungsional dan nonfungsional dari penyedia sistem termasuk *unit testing, user acceptance test, system testing, integration testing, compatibilities testing, error and exception testing, penetration testing*, dan *performance testing*.
   c. Pengujian fungsional maupun non fungsional oleh unit TI dan setiap kelompok pengguna dari satuan kerja
5. Implementasi sistem
   a. Melakukan pemasangan sistem informasi rencana pengembangan jaringan jalur kereta api pada server yang telah ditentukan
   b. Melakukan bimbingan teknis dan sosialisasi kepada para pemangku kepentingan
6. Pemeliharaan
   a. Melakukan monitoring dan maintenance sistem selama uji coba penerapan sistem
   b. Membuat berita acara serah terima sistem dan source code

B. *Output* Kegiatan

Output kegiatan Manajemen *Studio Geodatabase* Lanjutan harus memuat:

a. Laporan;
b. Dokumentasi kegiatan;
c. Sistem Informasi Rencana Pengembangan Jaringan Jalur Kereta Api;
d. Menyediakan *Web Service* API lengkap dengan dokumentasinya untuk kebutuhan pertukaran data sesuai kebutuhan;
e. SOP dan petunjuk penggunaan berupa buku dan video tutorial Sistem Informasi Rencana Pengembangan Jaringan Jalur Kereta Api

C. Bisnis Proses

Sistem Informasi Rencana Pengembangan Jaringan Jalur Kereta Api menggunakan pemodelan dengan diagram konteks sebagai bisnis proses sistem seperti yang terlihat pada gambar berikut:

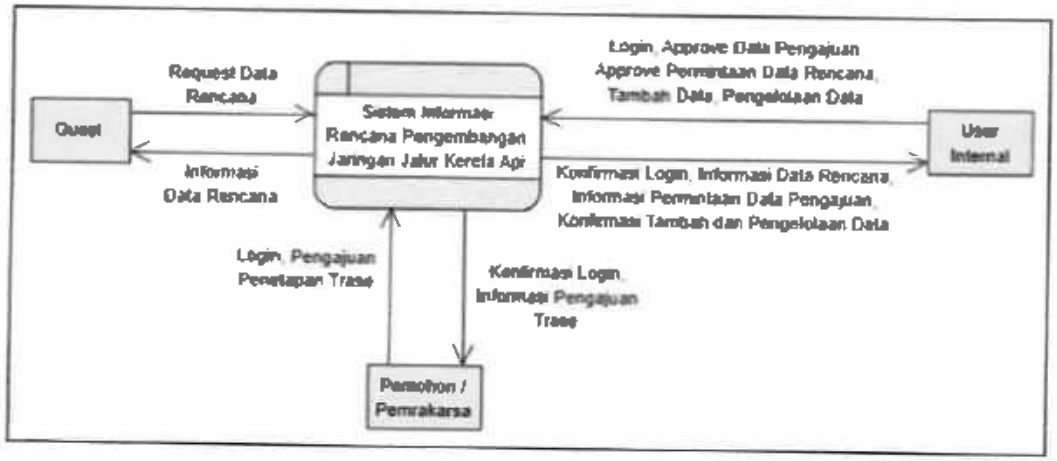

D. Tenaga Ahli

Tenaga ahli yang dibutuhkan untuk kegiatan pembangunan sistem informasi rencana pengembangan jaringan jalur kereta api memiliki kualifikasi sebagai berikut:

No.	Tenaga Ahli	Pengalaman	Pendidikan Minimal	Uraian Tugas
1	Ketua Tim/Ahli Informatika	≥ 9 tahun	S2 Manajemen Informatika / Teknik Komputer / Teknik Informatika	- Penanggung jawab utama - Mengkoordinasikan dan mengelola tenaga ahli - Membuat jadwal kegiatan, memonitor progres pekerjaan yang dilakukan tenaga ahli - Melakukan perancangan sistem dan *problem solving*
2	Ahli Web Desain	≥ 8 tahun	S1 Teknik Informatika / Teknik Komputer / Ilmu Komputer	- Merancang antarmuka sistem sehingga menarik dan mudah digunakan
3	Ahli Pemrograman	≥ 9 tahun	S1 Teknik Informatika / Teknik Komputer / Ilmu Komputer	- Perancangan dan pembangunan sistem - Perancangan skema integrasi melalui *web service*
4	Ahli Database	≥ 9 tahun	S1 Teknik Informatika / Teknik Komputer / Ilmu Komputer	- Perancangan dan pembuatan database - Perancangan struktur data
5	Ahli Sistem Administration	≥ 7 tahun	S1 Teknik Informatika / Teknik Komputer / Ilmu Komputer	- Perancangan kebutuhan *server* untuk menjalankan sistem informasi - Melakukan *testing, debugging* dan *deploying* sistem
6	Sekretaris	≥ 3 tahun	D3 Sekretaris	- Memberikan dukungan administrasi dan tugas-tugas perkantoran

E. **Spesifikasi Teknis**

1) Kebutuhan Server

Sistem informasi rencana pengembangan jaringan jalur kereta api membutuhkan *Web-Server* dengan spesifikasi minimal sebagai berikut:

Sistem Operasi	*Linux*
Web Server	*Apache*
Database	*MySQL latest version*
Bahasa Pemrograman	*PHP min 8.x.x / Laravel Framework*
Storage	2TB

2) Keamanan Sistem

Untuk standar keamanan sistem yang akan dilakukan adalah:

a. *Captcha* pada login;
b. Penerapan enkripsi;
c. Validasi input;
d. Penanganan API dan web service;
e. Satu user tidak dapat digunakan untuk login secara bersamaan pada perangkat yang berbeda;
f. *Auto log out* saat *idle time* (5/10 menit).

F. **Catatan Rekomendasi**

Tim Reviu Pusat Data dan Teknologi Informasi mencatat rekomendasi untuk Manajemen *Studio Geodatabase* Lanjutan Tahun Anggaran 2024 yang diusulkan oleh Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api - Direktorat Jenderal Perkeretaapian dengan catatan sebagai berikut :

1. Agar melaksanakan Surat Edaran Menteri Komunikasi dan Informatika nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Penggunaan Layanan Komputasi Awan Pihak Ketiga Bagi Kementerian/Lembaga Tahun Anggaran 2021;
2. Unit kerja wajib menyusun dan menyampaikan hasil kajian dan analisa pertumbuhan data serta *transaction per second* dalam periode 1 tahun kedepan untuk mendapatkan perkiraan perhitungan kebutuhan *resource Data Center (DC)* atau *Disaster Recovery Center (DRC)* yang dijelaskan dalam skema arsitektur infrastruktur, sehingga dapat memperhitungkan kebutuhan *server* (*cpu, memory* dan *storage*) yang akan diajukan ke Pusat Data Nasional melalui Pusdatin Kementerian Perhubungan;
3. Menerapkan standar biaya berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan nomor KM nomor 6 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan dan Penetapan Harga Perkiraan Sendiri untuk Pengadaan Jasa Konsultansi Non Konstruksi di Lingkungan Kementerian Perhubungan;
4. Berkoordinasi dengan Pusat Data dan Teknologi Informasi dalam rangka pemanfaatan Pusat Data Nasional (PDN) yang dikelola oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika, serta melakukan perencanaan dan pelaksanaan migrasi sistem secara bertahap, diantaranya dapat difungsikan sebagai *system backup / system development / system production* dari layanan digital Kementerian Perhubungan saat ini. Selanjutnya mengusulkan anggaran dan menyiapkan sumber daya yang diperlukan, untuk pelaksanaan pemanfaatan PDN dimaksud;

5. Berkoordinasi dengan Pusat Data dan Teknologi Informasi dalam rangka pemanfaatan layanan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah di tingkat Nasional;
6. Berkoordinasi dengan Pusat Data dan Teknologi Informasi dalam rangka pelaksanaan aspek keamanan informasi selama proses pengembangan infrastruktur TIK, hingga layanan digital beroperasi.

Jakarta, Januari 2024

SEKRETARIAT DITJEN PERKERETAAPIAN	DIREKTORAT LALU LINTAS DAN ANGKUTAN KERETA API	PUSDATIN
Andi Guntur Asapa	**Hendrialdi**	**R. Rachmat Herwannuri**
NIP. 198407242007121001	NIP. 19700729 199403 1 003	NIP. 19700814 199903 1 001

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
SEKRETARIAT JENDERAL
PUSAT DATA DAN TEKNOLOGI INFORMASI

Gedung Karya Lt.25
Jl. Medan Merdeka Barat No.8
Jakarta 10110

Telp. : 3456703, 3811308
Contact Center : 151

e-Mail : pusdatin@kemenhub.go.id
Website : http://www.kemenhub.go.id

Nomor : TI.005/11/10 PDTI.2024 Jakarta, 01 April 2024
Klasifikasi : Biasa
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Penyampaian Rekomendasi Hasil Reviu dan *Clearance* Kegiatan **Pemeliharaan Aplikasi Perizinan** Online Tahun Anggaran 2024

Yth. 1. Sekretaris Direktorat Jenderal Perkeretaapian;
2. Direktur Lalu Lintas Dan Angkutan Kereta Api.

Menindaklanjuti Surat:

1. Menindaklanjuti surat Sekretaris Direktorat Jenderal Perkeretaapian nomor TI. 101/1/6/K1/DJKA/2023 tanggal 24 Oktober 2023 hal **Usulan Kegiatan TIK di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian** Tahun 2030;
2. Menindaklanjuti Surat Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana Kementerian PAN-RB nomor: 271/DJAI/PR.01.01/03/2024, B/507/KT.03/2024 dan 04669/D1.11/03/2024 tanggal 19 Maret 2024 hal Penyampaian Hasil Evaluasi Anggaran Belanja SPBE Tahun 2024 di Lingkup Kementerian Perhubungan;
3. Menindaklanjuti Surat Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Kominfo nomor: 271/DJAI/PR.01.01/03/2024, **B/507/KT.03/2024 dan 04669/D1.11/03/2024 tanggal 19 Maret 2024** hal Penyampaian Hasil Evaluasi Anggaran Belanja SPBE Tahun 2024 di Lingkup Kementerian Perhubungan;
4. Menindaklanjuti Surat Deputi Bidang Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan nomor: 271/DJAI/PR.01.01/03/2024, B/507/KT.03/2024 dan 04669/D1.11/03/2024 tanggal 19 Maret 2024 hal Penyampaian Hasil Evaluasi Anggaran Belanja SPBE Tahun 2024 di Lingkup Kementerian Perhubungan.

telah dilakukan reviu kegiatan TIK oleh Pusat Data dan Teknologi Informasi **(Pusdatin)**.

Sesuai dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KM. 9 Tahun 2023 tentang Pedoman Reviu Teknologi Informasi dan Komunikasi di Lingkungan Kementerian Perhubungan, dengan ini kami sampaikan bahwa Kegiatan Pemeliharaan Aplikasi Perizinan Online Tahun Anggaran 2024 **dapat dilanjutkan** dengan memperhatikan catatan hasil reviu dan surat hasil rekomendasi *clearance* TIK Tahun Anggaran 2024 yang dikeluarkan oleh KemenPAN-RB, Kemenkominfo dan Kementerian PPN/BAPPENAS sebagaimana terlampir pada surat ini.

Rekomendasi Reviu TIK ini berlaku sepanjang Tahun Anggaran 2024 untuk Kegiatan Pemeliharaan Aplikasi Perizinan Online dengan pagu anggaran sebesar Rp. 271.000.000,- (Dua Ratus Tujuh Puluh Satu Juta Rupiah) sesuai data dukung yang disampaikan ke Pusdatin sejak surat ini ditandatangani.

Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Direktorat Lalu Lintas Dan Angkutan Kereta Api bertanggungjawab sepenuhnya terhadap pelaksanaan kegiatan sesuai catatan hasil reviu untuk Kegiatan Pemeliharaan Aplikasi Perizinan Online.

Demikian disampaikan atas perhatian dan kerjasama Saudara, diucapkan terima kasih.

Kepala Pusat Data dan
Teknologi Informasi,

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
PUSAT DATA DAN TEKNOLOGI INFORMASI
SEKRETARIAT JENDERAL

Raymond Ivan, H.A.S, S.T.
NIP. 19671213 199603 1 001

Tembusan:
1. Sekretaris Jenderal;
2. Direktur Jenderal Perkeretaapian;
3. Inspektur Jenderal;
4. Staf Ahli Bidang Teknologi dan Energi Perhubungan.

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
SEKRETARIAT JENDERAL
PUSAT DATA DAN TEKNOLOGI INFORMASI

Gedung Karya Lt.25
Jl. Medan Merdeka Barat No.8
Jakarta 10110

Telp. : 3456703, 3811308
Contact Center : 151

e-Mail : pusdatin@kemenhub.go.id
Website : http://www.kemenhub.go.id

CATATAN HASIL REVIU
ATAS USULAN KEGIATAN PEMELIHARAAN APLIKASI PERIZINAN *ONLINE* TAHUN ANGGARAN 2024 DIREKTORAT LALU LINTAS DAN ANGKUTAN KERETA API DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

Berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 9 tahun 2023 tentang Pedoman Reviu Teknologi Informasi dan Komunikasi di Lingkungan Kementerian Perhubungan, bersama ini kami sampaikan Catatan Hasil Reviu sebagai berikut :

DATA UMUM

Kegiatan Pemeliharaan Aplikasi Perizinan *Online* Tahun Anggaran 2024 dengan pagu anggaran sebesar Rp. 271.000.000,- (Dua Ratus Tujuh Puluh Satu Juta Rupiah).

A. Ruang Lingkup

Pemeliharaan Aplikasi Perizinan *Online* Tahun Anggaran 2024 memfokuskan pada *updating* data dan integrasi, pemeliharaan sistem, serta peningkatan keamanan. Ruang lingkup kegiatan sebagai berikut:

1. *Updating* dan analisis kebutuhan data/ informasi:
   a. Mengupdate bahasa pemrograman/ teknologi terkini/ terbaru;
   b. Melakukan inventarisasi sistem informasi/ aplikasi yang akan diintegrasikan;
   c. Melakukan analisa terhadap sistem informasi/ aplikasi dan *database* yang akan diintegrasikan termasuk untuk mengatur hak akses Aplikasi Perizinan Penyelenggaraan Perkeretaapian *Online*;
   d. Melakukan desain kebutuhan fitur aplikasi;
   e. Integarasi dengan Portal Aplikasi DJKA (*Super Apps* DJKA), integrasi data melalui ESB, integrasi dengan Aplikasi *Online Single Submission* (OSS) dan Aplikasi SIMPONI;
   f. Penerapan SSO Kemenhub.
2. Pemeliharaan:
   a. Melakukan pemeliharaan perangkat lunak terhadap Aplikasi Perizinan Penyelenggaraan Perkeretaapian *Online*;
   b. Melakukan *backup basis data* Aplikasi Perizinan Penyelenggaraan Perkeretaapian *Online*;
   c. Memastikan proses bisnis dan fitur pada aplikasi perizinan *online* berjalan dengan baik dan handal.

3. Peningkatan keamanan dan kinerja Aplikasi Perizinan *Online*;
   a. Melakukan pengujian kinerja jaringan Aplikasi Perizinan Penyelenggaraan Perkeretaapian *Online*;
   b. Melakukan pengujian keamanan Aplikasi Perizinan Penyelenggaraan Perkeretaapian *Online*.

B. *Output* Kegiatan

Keluaran (*output*) yang diharapkan dari kegiatan ini adalah Aplikasi Perizinan Penyelenggaraan Perkeretaapian *Online* yang terintegrasi dengan OSS dan SIMPONI, aman, handal dan mudah diakses oleh Badan Usaha dan unit kerja pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian guna mendukung memproses perizinan penyelenggaraan perkeretaapian serta untuk memfasilitasi regulator dan badan usaha agar terhubung dengan semua *stakeholder*.

C. Bisnis Proses

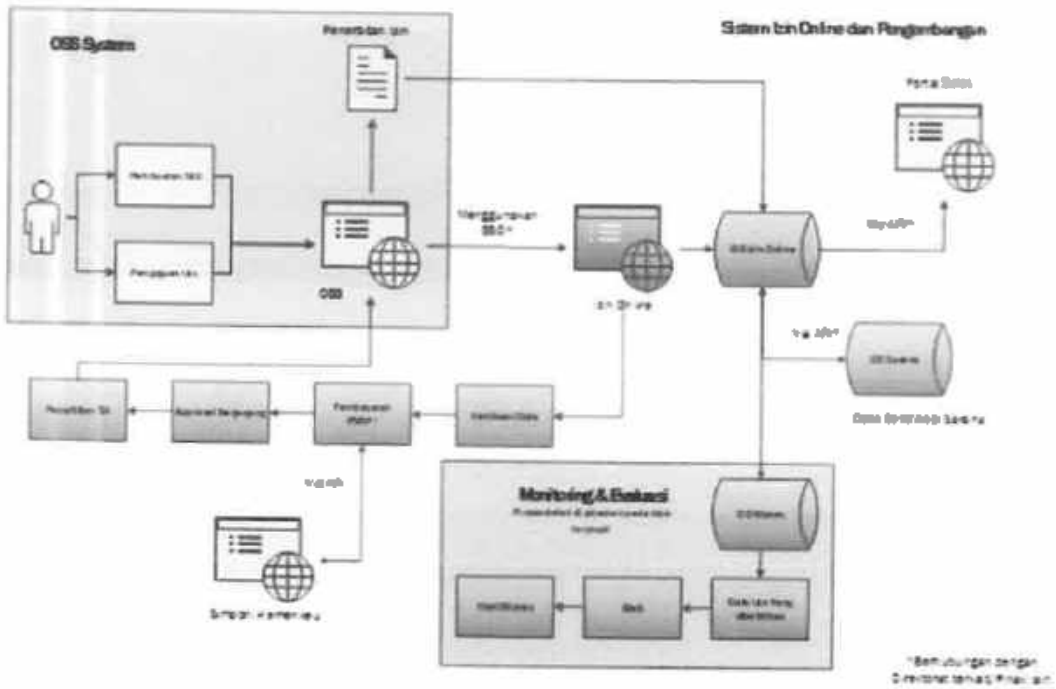

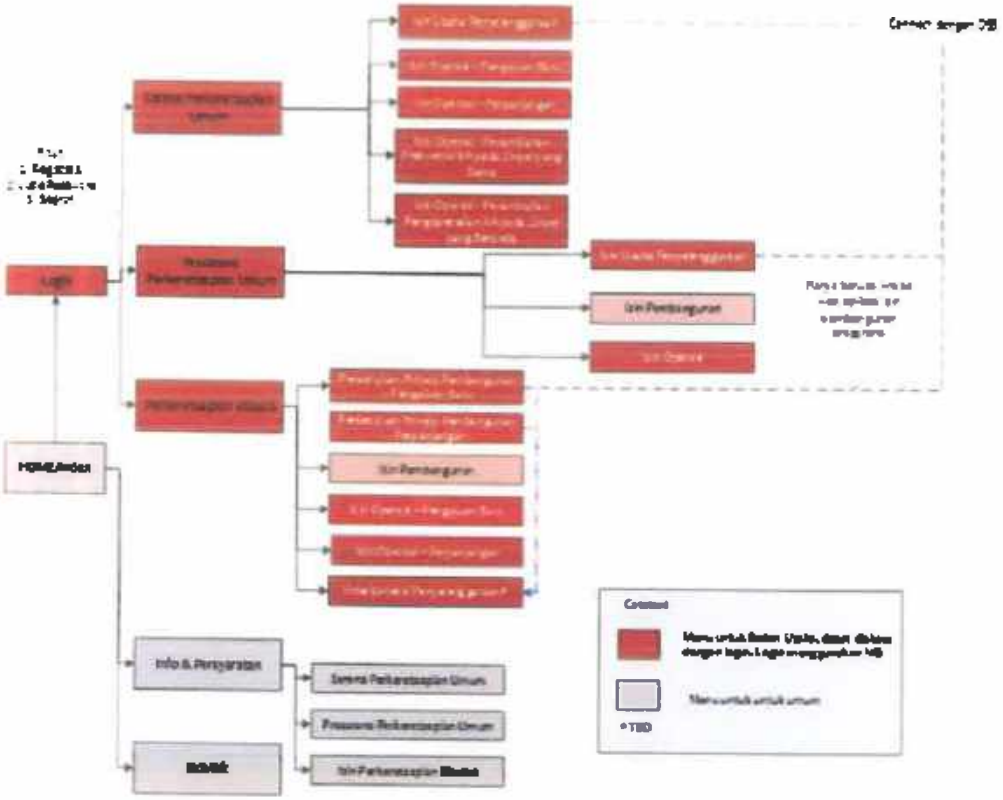

D. Tenaga Ahli

Tenaga yang dibutuhkan untuk melaksanakan kegiatan ini adalah tenaga ahli dan sub professional dengan kualifikasi sebagai berikut:

No	Posisi	Pendidikan	Pengalaman Minimal	Keterangan
1	Pemrograman Perangkat Lunak	S1 Teknik Informatika/ Manajemen Sistem Informasi/ Komputer	5 Tahun	• Menganalisa dan Mengatasi berbagai kesalahan atau bug pada aplikasi • Mengupdate Bahasa pemrograman / teknologi terbaru / terkini • Melakukan integrasi dengan aplikasi lainnya di lingkungan OJKA, OSS dan Simponi • Melakukan *testing* fitur – fitur dalam aplikasi • Mendefinisikan kebutuhan aplikasi • Membuat kode program
2	Ahli Keamanan TIK (Security Engineer)	S1 Teknik Informatika/ Sistem Informasi/ Komputer	2 Tahun	• Pemantauan dan sistem jaringan dan teknologi informasi menimbulkan risiko signifikan mengganggu keamanan jaringan • Dukungan untuk menemukan peluang dari titik lemah sistem dan dapat menyelesaikan setiap masalah yang muncul • Pengembangan dapat dilakukan pada standar keamanan sistem yang berlaku • Melakukan pengujian pada firmware dan firewall yang telah sepenuhnya disetel ke standar saat ini

3	Ahli database (database Administrator)	S1 Teknik Informatika/ Sistem Informasi/ Komputer	5 Tahun	• Melakukan pekerjaan umum dan administratif berkaitan dengan database, seperti mengelola data, tabel dan database • Memonitor dan memperbaiki performa database • Memantau dan Mengelola seluruh data yang berada di ekosistem data warehouse • Menganalisis, meninjau, dan mengaudit kelayakan seluruh database secara berkala, baik dari segi kecepatan, keamanan, maupun aspek-aspek lain • Mendukung integrasi dan penggunaan database terhadap platform atau aplikasi yang ada

E. Spesifikasi Teknis

Aplikasi Perizinan Online menggunakan Operating system (OS) dan Software sebagai berikut:

Operating System	:	Linux - Ubuntu 8 - LAMP
Web server	:	Apache
Database	:	MySQL (Sesuai dengan LAMP)
Bahasa Program/Framework	:	PHP 7 / Laravel versi 6, JavaScript
Protokol transfer data	:	HTTPS SSL

Untuk keamanan aplikasi yang akan dilakukan adalah:

1. *Captcha* pada *login*
2. *Encrypted* dan http *only cookies*
3. Satu *user name* tidak dapat digunakan *login* disaat bersamaan
4. *Auto log out* saat *idle time* (5/10 menit)

F. Catatan Rekomendasi

Tim Reviu Pusat Data dan Teknologi Informasi mencatat rekomendasi untuk Pemeliharaan Aplikasi Perizinan *Online* Tahun Anggaran 2024 yang diusulkan oleh Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api - Direktorat Jenderal Perkeretaapian dengan catatan sebagai berikut :

1. Agar melaksanakan Surat Edaran Menteri Komunikasi dan Informatika nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Penggunaan Layanan Komputasi Awan Pihak Ketiga Bagi Kementerian/Lembaga Tahun Anggaran 2021;
2. Unit kerja wajib menyusun dan menyampaikan hasil kajian dan analisa pertumbuhan data serta *transaction per second* dalam periode 1 tahun kedepan untuk mendapatkan perkiraan perhitungan kebutuhan *resource Data Center (DC)* atau *Disaster Recovery Center (DRC)* yang dijelaskan dalam skema arsitektur infrastruktur, sehingga dapat memperhitungkan kebutuhan *server* (*cpu, memory* dan *storage*) yang akan diajukan ke Pusat Data Nasional melalui Pusdatin Kementerian Perhubungan;
3. Menerapkan standar biaya berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan nomor KM nomor 6 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan dan Penetapan Harga Perkiraan Sendiri untuk Pengadaan Jasa Konsultansi Non Konstruksi di Lingkungan Kementerian Perhubungan;
4. Berkoordinasi dengan Pusat Data dan Teknologi Informasi dalam rangka pemanfaatan Pusat Data Nasional (PDN) yang dikelola oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika, serta melakukan perencanaan dan pelaksanaan migrasi sistem secara bertahap, diantaranya dapat difungsikan sebagai *system backup / system development / system production* dari layanan digital Kementerian Perhubungan saat ini. Selanjutnya mengusulkan anggaran dan menyiapkan sumber daya yang diperlukan, untuk pelaksanaan pemanfaatan PDN dimaksud;
5. Berkoordinasi dengan Pusat Data dan Teknologi Informasi dalam rangka pemanfaatan layanan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah di tingkat Nasional;
6. Berkoordinasi dengan Pusat Data dan Teknologi Informasi dalam rangka pelaksanaan aspek keamanan informasi selama proses pengembangan infrastruktur TIK, hingga layanan digital beroperasi.

Jakarta, Januari 2024

SEKRETARIAT DITJEN PERKERETAAPIAN	DIREKTORAT LALU LINTAS DAN ANGKUTAN KERETA API	PUSDATIN
Andi Guntur Asapa	**Rosita**	**R. Rachmat Herwannuri**
NIP. 198407242007121001	NIP. 19800119 200112 2 001	NIP. 19700814 199903 1 001

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
SEKRETARIAT JENDERAL
PUSAT DATA DAN TEKNOLOGI INFORMASI

Gedung Karya Lt.25
Jl. Medan Merdeka Barat No.8
Jakarta 10110

Telp. : 3456703, 3811308
Contact Center : 151

e-Mail : pusdatin@kemenhub.go.id
Website : http://www.kemenhub.go.id

CATATAN HASIL REVIU
ATAS USULAN KEGIATAN PEMELIHARAAN APLIKASI PERIZINAN *ONLINE* TAHUN ANGGARAN 2024 DIREKTORAT LALU LINTAS DAN ANGKUTAN KERETA API DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

Berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 9 tahun 2023 tentang Pedoman Reviu Teknologi Informasi dan Komunikasi di Lingkungan Kementerian Perhubungan, bersama ini kami sampaikan Catatan Hasil Reviu sebagai berikut :

DATA UMUM

Kegiatan Pemeliharaan Aplikasi Perizinan *Online* Tahun Anggaran 2024 dengan pagu anggaran sebesar Rp. 271.000.000,- (Dua Ratus Tujuh Puluh Satu Juta Rupiah).

A. Ruang Lingkup

Pemeliharaan Aplikasi Perizinan *Online* Tahun Anggaran 2024 memfokuskan pada *updating* data dan integrasi, pemeliharaan sistem, serta peningkatan keamanan. Ruang lingkup kegiatan sebagai berikut:

1. *Updating* dan analisis kebutuhan data/ informasi:
   a. Mengupdate bahasa pemrograman/ teknologi terkini/ terbaru;
   b. Melakukan inventarisasi sistem informasi/ aplikasi yang akan diintegrasikan;
   c. Melakukan analisa terhadap sistem informasi/ aplikasi dan *database* yang akan diintegrasikan termasuk untuk mengatur hak akses Aplikasi Perizinan Penyelenggaraan Perkeretaapian *Online*;
   d. Melakukan desain kebutuhan fitur aplikasi;
   e. Integarasi dengan Portal Aplikasi DJKA (*Super Apps* DJKA), integrasi data melalui ESB, integrasi dengan Aplikasi *Online Single Submission* (OSS) dan Aplikasi SIMPONI;
   f. Penerapan SSO Kemenhub.
2. Pemeliharaan:
   a. Melakukan pemeliharaan perangkat lunak terhadap Aplikasi Perizinan Penyelenggaraan Perkeretaapian *Online*;
   b. Melakukan *backup basis data* Aplikasi Perizinan Penyelenggaraan Perkeretaapian *Online*;
   c. Memastikan proses bisnis dan fitur pada aplikasi perizinan *online* berjalan dengan baik dan handal.

3. Peningkatan keamanan dan kinerja Aplikasi Perizinan *Online*;
   a. Melakukan pengujian kinerja jaringan Aplikasi Perizinan Penyelenggaraan Perkeretaapian *Online*;
   b. Melakukan pengujian keamanan Aplikasi Perizinan Penyelenggaraan Perkeretaapian *Online*.

B. *Output* Kegiatan

Keluaran (*output*) yang diharapkan dari kegiatan ini adalah Aplikasi Perizinan Penyelenggaraan Perkeretaapian *Online* yang terintegrasi dengan OSS dan SIMPONI, aman, handal dan mudah diakses oleh Badan Usaha dan unit kerja pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian guna mendukung memproses perizinan penyelenggaraan perkeretaapian serta untuk memfasilitasi regulator dan badan usaha agar terhubung dengan semua *stakeholder*.

C. Bisnis Proses

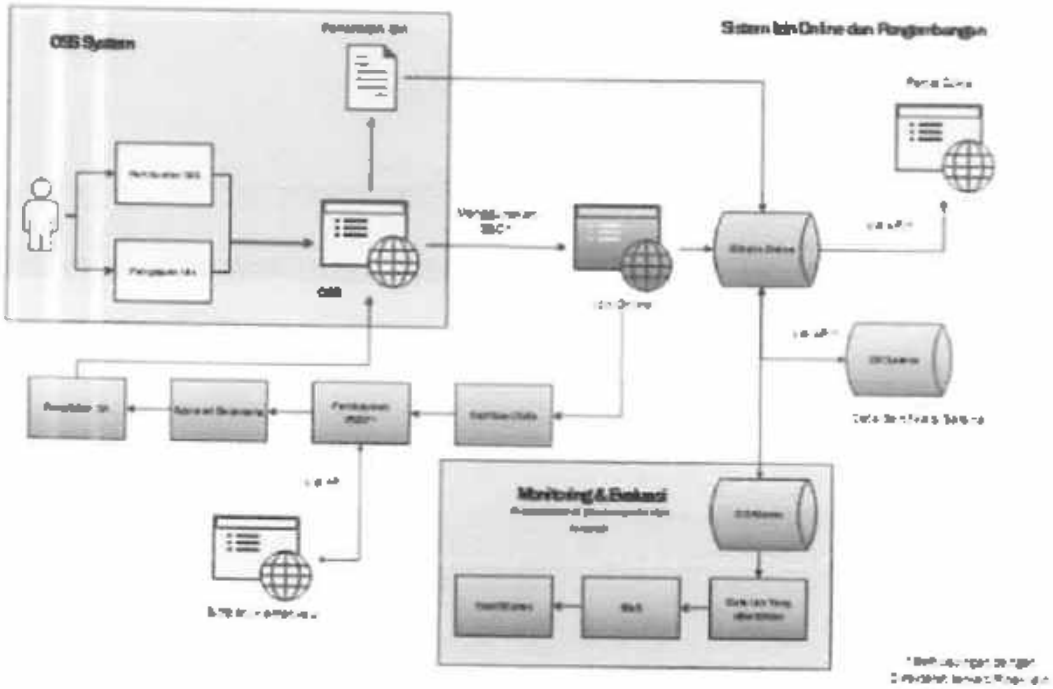

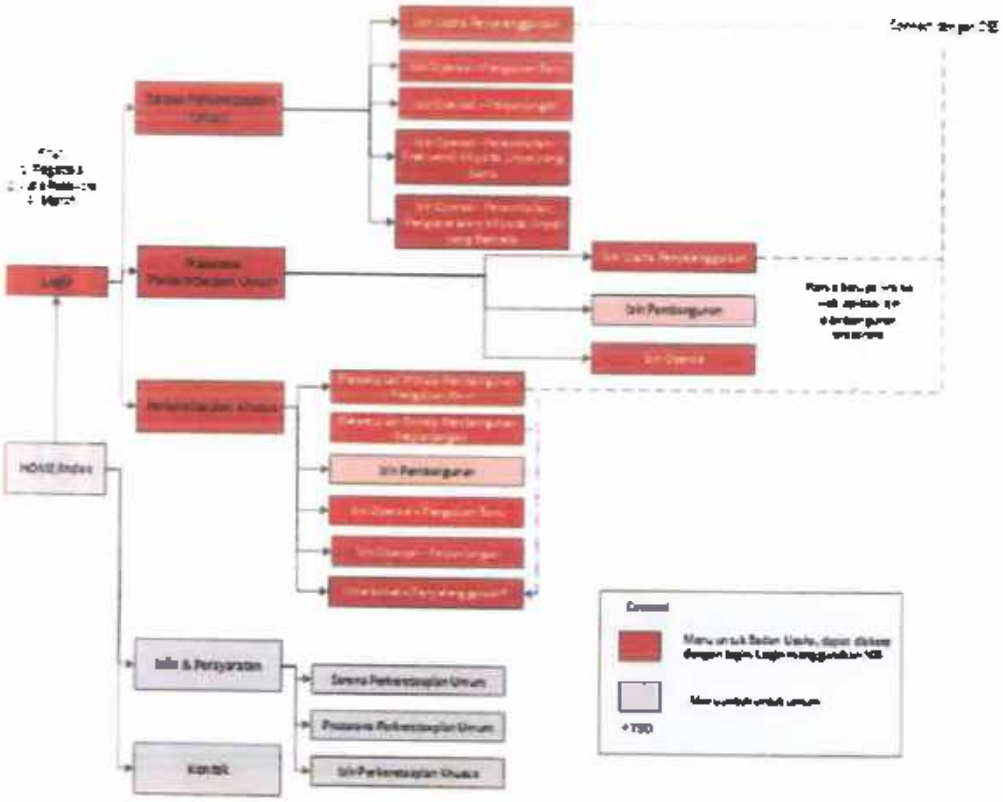

D. Tenaga Ahli

Tenaga yang dibutuhkan untuk melaksanakan kegiatan ini adalah tenaga ahli dan sub professional dengan kualifikasi sebagai berikut:

No	Posisi	Pendidikan	Pengalaman Minimal	Keterangan
1	Pemrograman Perangkat Lunak	S1 Teknik Informatika/ Manajemen Sistem Informasi/ Komputer	5 Tahun	• Menganalisa dan Mengatasi berbagai kesalahan atau bug pada aplikasi • Mengupdate Bahasa pemrograman / teknologi terbaru / terkini • Melakukan integrasi dengan aplikasi lainnya di lingkungan DJKA, OSS dan Simponi • Melakukan *testing* fitur – fitur dalam aplikasi • Mendefinisikan kebutuhan aplikasi • Membuat kode program
2	Ahli Keamanan TIK (Security Engineer)	S1 Teknik Informatika/ Sistem Informasi/ Komputer	2 Tahun	• Pemantauan dan sistem jaringan dan teknologi informasi menimbulkan risiko signifikan mengganggu keamanan jaringan • Dukungan untuk menemukan peluang dari titik lemah sistem dan dapat menyelesaikan setiap masalah yang muncul • Pengembangan dapat dilakukan pada standar keamanan sistem yang berlaku • Melakukan pengujian pada firmware dan firewall yang telah sepenuhnya disetel ke standar saat ini

3	Ahli database (database Administrator)	S1 Teknik Informatika/ Sistem Informasi/ Komputer	5 Tahun	• Melakukan pekerjaan umum dan administratif berkaitan dengan database, seperti mengelola data, tabel dan database • Memonitor dan memperbaiki performa database • Memantau dan Mengelola seluruh data yang berada di ekosistem data warehouse • Menganalisis, meninjau, dan mengaudit kelayakan seluruh database secara berkala, baik dari segi kecepatan, keamanan, maupun aspek-aspek lain • Mendukung integrasi dan penggunaan database terhadap platform atau aplikasi yang ada

E. Spesifikasi Teknis

Aplikasi Perizinan Online menggunakan Operating system (OS) dan Software sebagai berikut:

Operating System	:	Linux - Ubuntu 8 - LAMP
Web server	:	Apache
Database	:	MySQL (Sesuai dengan LAMP)
Bahasa Program/Framework	:	PHP 7 / Laravel versi 6, JavaScript
Protokol transfer data	:	HTTPS SSL

Untuk keamanan aplikasi yang akan dilakukan adalah:

1. *Captcha* pada *login*
2. *Encrypted* dan http *only cookies*
3. Satu *user name* tidak dapat digunakan *login* disaat bersamaan
4. *Auto log out* saat *idle time* (5/10 menit)

F. Catatan Rekomendasi

Tim Reviu Pusat Data dan Teknologi Informasi mencatat rekomendasi untuk Pemeliharaan Aplikasi Perizinan *Online* Tahun Anggaran 2024 yang diusulkan oleh Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api - Direktorat Jenderal Perkeretaapian dengan catatan sebagai berikut :

1. Agar melaksanakan Surat Edaran Menteri Komunikasi dan Informatika nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Penggunaan Layanan Komputasi Awan Pihak Ketiga Bagi Kementerian/Lembaga Tahun Anggaran 2021;
2. Unit kerja wajib menyusun dan menyampaikan hasil kajian dan analisa pertumbuhan data serta *transaction per second* dalam periode 1 tahun kedepan untuk mendapatkan perkiraan perhitungan kebutuhan *resource Data Center (DC)* atau *Disaster Recovery Center (DRC)* yang dijelaskan dalam skema arsitektur infrastruktur, sehingga dapat memperhitungkan kebutuhan *server* (*cpu, memory* dan *storage*) yang akan diajukan ke Pusat Data Nasional melalui Pusdatin Kementerian Perhubungan;
3. Menerapkan standar biaya berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan nomor KM nomor 6 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan dan Penetapan Harga Perkiraan Sendiri untuk Pengadaan Jasa Konsultansi Non Konstruksi di Lingkungan Kementerian Perhubungan;
4. Berkoordinasi dengan Pusat Data dan Teknologi Informasi dalam rangka pemanfaatan Pusat Data Nasional (PDN) yang diketola oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika, serta melakukan perencanaan dan pelaksanaan migrasi sistem secara bertahap, diantaranya dapat difungsikan sebagai *system backup / system development / system production* dari layanan digital Kementerian Perhubungan saat ini. Selanjutnya mengusulkan anggaran dan menyiapkan sumber daya yang diperlukan, untuk pelaksanaan pemanfaatan PDN dimaksud;
5. Berkoordinasi dengan Pusat Data dan Teknologi Informasi dalam rangka pemanfaatan layanan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah di tingkat Nasional;
6. Berkoordinasi dengan Pusat Data dan Teknologi Informasi dalam rangka pelaksanaan aspek keamanan informasi selama proses pengembangan infrastruktur TIK, hingga layanan digital beroperasi.

Jakarta, Januari 2024

SEKRETARIAT DITJEN PERKERETAAPIAN	DIREKTORAT LALU LINTAS DAN ANGKUTAN KERETA API	PUSDATIN
Andi Guntur Asapa	**Rosita**	**R. Rachmat Herwannuri**
NIP. 198407242007121001	NIP. 19800119 200112 2 001	NIP. 19700814 199903 1 001

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
SEKRETARIAT JENDERAL
PUSAT DATA DAN TEKNOLOGI INFORMASI

Gedung Karya Lt.25
Jl. Medan Merdeka Barat No.8
Jakarta 10110

Telp. : 3456703, 3811308
Contact Center : 151

e-Mail : pusdatin@kemenhub.go.id
Website : http://www.kemenhub.go.id

Nomor : TI.005/11/11 PDTI.2024
Klasifikasi : Biasa
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Penyampaian Rekomendasi Hasil Reviu dan *Clearance* Kegiatan Pengelolaan Website Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun Anggaran 2024

Jakarta, 01 April 2024

Yth. Sekretaris Direktorat Jenderal Perkeretaapian.

Menindaklanjuti Surat:

1. Menindaklanjuti surat Sekretaris Direktorat Jenderal Perkeretaapian nomor TI. 101/1/6/K1/DJKA/2023 tanggal 24 Oktober 2023 hal Usulan Kegiatan TIK di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2031;
2. Menindaklanjuti Surat Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana Kementerian PAN-RB nomor: 271/DJAI/PR.01.01/03/2024, B/507/KT.03/2024 dan 04669/D1.11/03/2024 tanggal 19 Maret 2024 hal Penyampaian Hasil Evaluasi Anggaran Belanja SPBE Tahun 2024 di Lingkup Kementerian Perhubungan;
3. Menindaklanjuti Surat Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Kominfo nomor: 271/DJAI/PR.01.01/03/2024, B/507/KT.03/2024 dan 04669/D1.11/03/2024 tanggal 19 Maret 2024 hal Penyampaian Hasil Evaluasi Anggaran Belanja SPBE Tahun 2024 di Lingkup Kementerian Perhubungan;
4. Menindaklanjuti Surat Deputi Bidang Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan nomor: 271/DJAI/PR.01.01/03/2024, B/507/KT.03/2024 dan 04669/D1.11/03/2024 tanggal 19 Maret 2024 hal Penyampaian Hasil Evaluasi Anggaran Belanja SPBE Tahun 2024 di Lingkup Kementerian Perhubungan.

telah dilakukan reviu kegiatan TIK oleh Pusat Data dan Teknologi Informasi (Pusdatin).

Sesuai dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KM. 9 Tahun 2023 tentang Pedoman Reviu Teknologi Informasi dan Komunikasi di Lingkungan Kementerian Perhubungan, dengan ini kami sampaikan bahwa Kegiatan Pengelolaan Website Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun Anggaran 2024 **dapat dilanjutkan** dengan memperhatikan catatan hasil reviu dan surat hasil rekomendasi *clearance* TIK Tahun Anggaran 2024 yang dikeluarkan oleh KemenPAN-RB, Kemenkominfo dan Kementerian PPN/BAPPENAS sebagaimana terlampir pada surat ini.

Rekomendasi Reviu TIK ini berlaku sepanjang Tahun Anggaran 2024 untuk Kegiatan Pengelolaan Website Direktorat Jenderal Perkeretaapian dengan pagu anggaran sebesar Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah) sesuai data dukung yang disampaikan ke Pusdatin sejak surat ini ditandatangani.

Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian bertanggungjawab sepenuhnya terhadap pelaksanaan kegiatan sesuai catatan hasil reviu untuk Kegiatan Pengelolaan Website Direktorat Jenderal Perkeretaapian.

Demikian disampaikan atas perhatian dan kerjasama Saudara, diucapkan terima kasih.

Kepala Pusat Data dan
Teknologi Informasi,

PUSAT DATA
DAN TEKNOLOGI INFORMASI

Raymond Ivan, H.A.S, S.T.
NIP. 19671213 199603 1 001

Tembusan:
1. Sekretaris Jenderal;
2. Direktur Jenderal Perkeretaapian;
3. Inspektur Jenderal;
4. Staf Ahli Bidang Teknologi dan Energi Perhubungan.

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
SEKRETARIAT JENDERAL
PUSAT DATA DAN TEKNOLOGI INFORMASI

Gedung Karya Lt.25
Jl. Medan Merdeka Barat No.8
Jakarta 10110

Telp : 3456703, 3811308
Contact Center : 151

e-Mail : pusdatin@kemenhub.go.id
Website : http://www.kemenhub.go.id

CATATAN HASIL REVIU
ATAS USULAN KEGIATAN PENGELOLAAN WEBSITE DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN TAHUN ANGGARAN 2024 SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

Berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 9 tahun 2023 tentang Pedoman Reviu Teknologi Informasi dan Komunikasi di Lingkungan Kementerian Perhubungan, bersama ini kami sampaikan Catatan Hasil Reviu sebagai berikut :

DATA UMUM

Kegiatan Pengelolaan Website Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun Anggaran 2024 – Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian dengan pagu anggaran sebesar Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah).

A. Ruang Lingkup

Secara garis besar lingkup kegiatan ini meliputi:

1. Melakukan inventarisasi dan identifikasi kebutuhan data dan informasi serta layout/ tampilan yang perlu diperbaharui dalam website Direktorat Jenderal Perkeretaapian;
2. Melakukan penanganan terhadap permasalahan/ error system yang terjadi termasuk penanganan kerentanan sistem;
3. Melakukan analisa teknis, monitoring keamanan terhadap *availability* sistem website secara berkala seperti melakukan beberapa pengujian fungsionalitas, uji kegunaan, uji *error*, uji kompabilitas dan uji kinerja;
4. Menyediakan data dan informasi pada website dengan dua Bahasa (Indonesia dan Inggris) secara berkelanjutan;
5. Mengelola fitur data dan informasi pada website seperti infografis/ banner, profil unit kerja, pembangunan, regulasi, kebijakan dan pelaporan, berita (artikel, foto, video), podcast, pengumuman, data perkeretaapian dalam angka/ statistic, agenda/ jadwal kegiatan unit kerja;
6. Mengelola seluruh layanan bidang perkertaapian yang dapat diakses public;
7. Menyediakan fitur/ fasilitas yang ramah untuk kaum disabilitas dalam penggunaan website Direktorat Jenderal Perkeretaapian;
8. Mengelola *microsite/ subsite* masing- masing unit kerja Direktorat dan Balai di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian dengan menu dan tampilan yang bersifat dinamis sesuai kebutuhan;

9. Melakukan *updating* website Direktorat Jenderal Perkeretaapian sesuai dengan prioritas kebutuhan dan peningkatan/ *update* keamanan sistem termasuk pengelolaan *backend* dan *database* website Direktorat Jenderal Perkeretaapian.

B. *Output* Kegiatan

Keluaran (*Output*) yang diharapkan dari kegiatan ini adalah terselenggaranya pengelolaan website Direktorat Jenderal Perkeretaapian yang handal dan *update*, dilengkapi fitur dua Bahasa dan ramah untuk kaum disabilitas serta didukung sistem keamanan yang baik guna mendukung kinerja organisasi Direktorat Jenderal Perkeretaapian dengan penyediaan media komunikasi public terkait data dan informasi penyelenggaraan perkeretaapian serta dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sebagai regulator transportasi perkeretaapian.

C. Bisnis Proses

Uraian proses bisnis pengembangan Website Direktorat Jenderal Perkeretaapian dalam bentuk diagram use case pada gambar berikut:

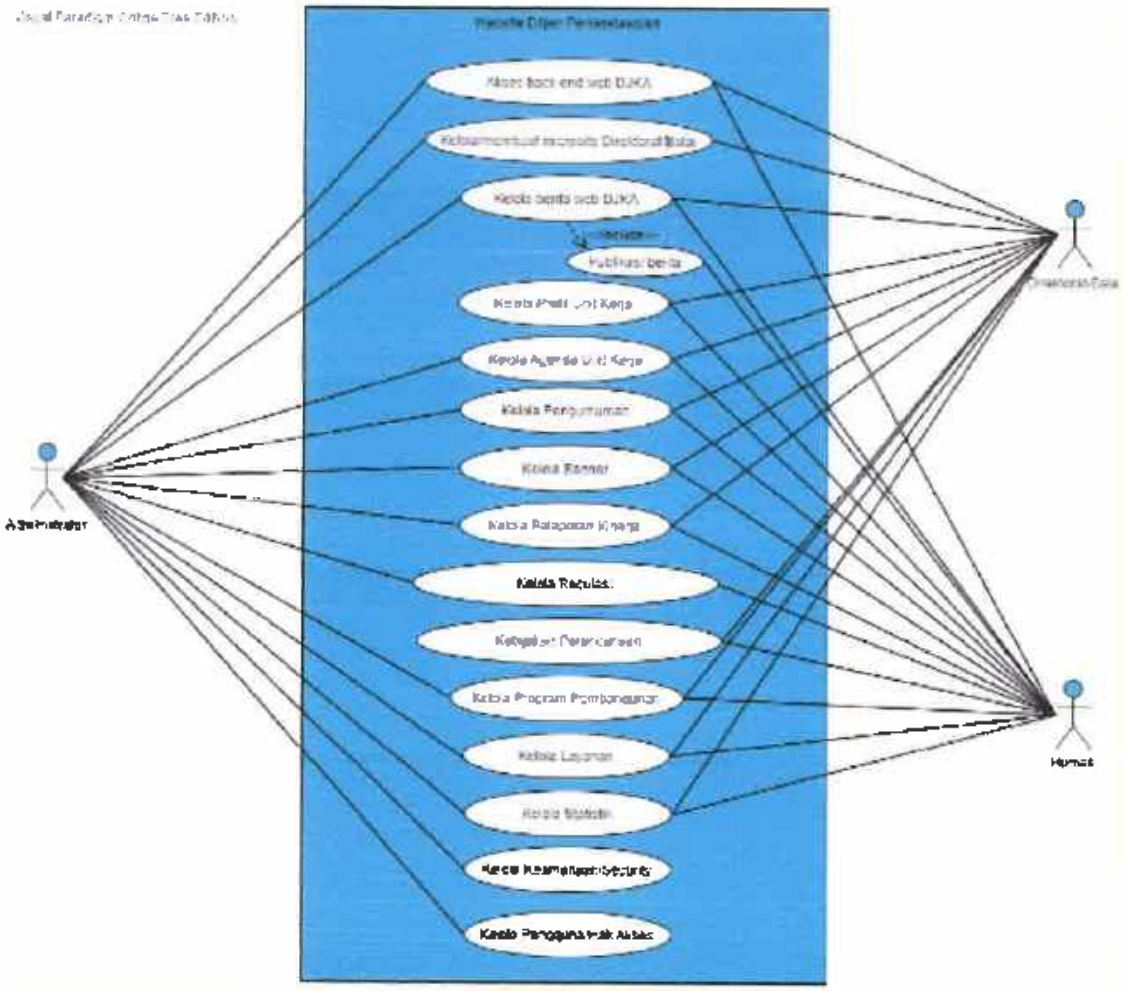

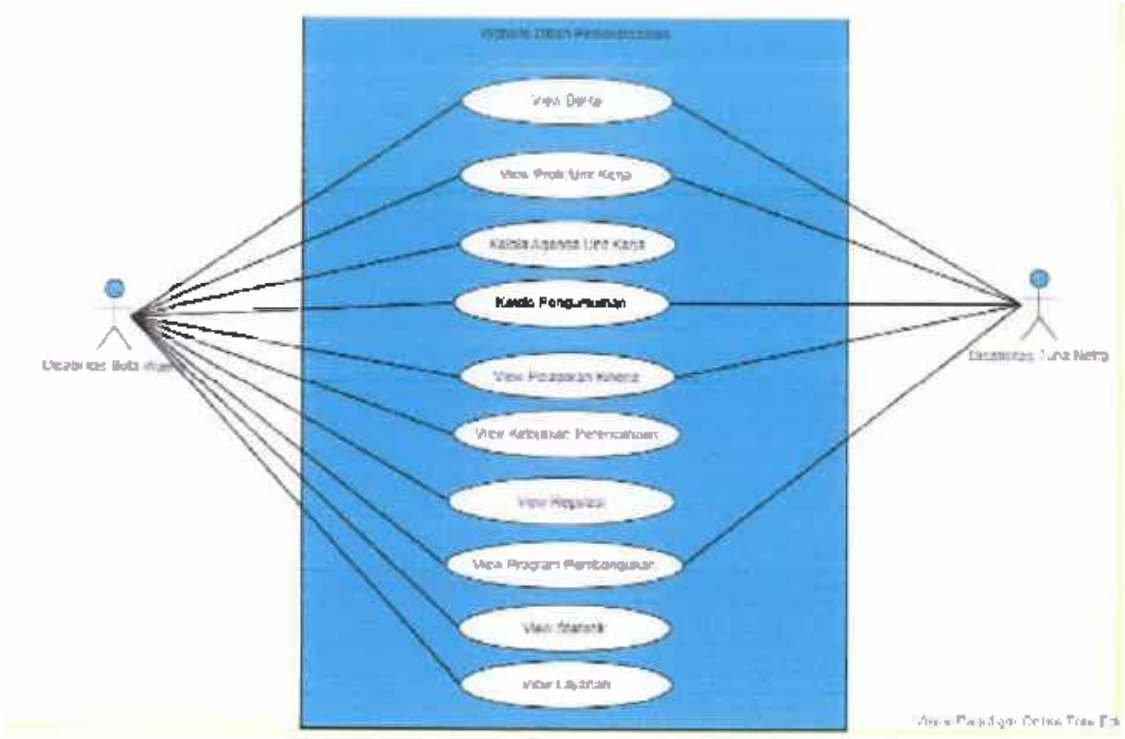

Website Direktorat Jenderal Perkeretaapian merupakan layanan Government to Citizen (G2C) yang telah terintegrasi dengan aplikasi internal dan eksternal Kementerian Perhubungan, terdiri dari layanan informasi public terkait data dan informasi transportasi perkeretaapian, program/ kegiatan, layanan Ditjen Perkeretaapian termasuk Badan Layanan Umum, layanan angkutan Motor Gratis (MOTIS) pada masa angkutan Lebaran, layanan perizinan, layanan sertifikasi dan layanan lainnya yang dipublikasikan kepada masyarakat umum.

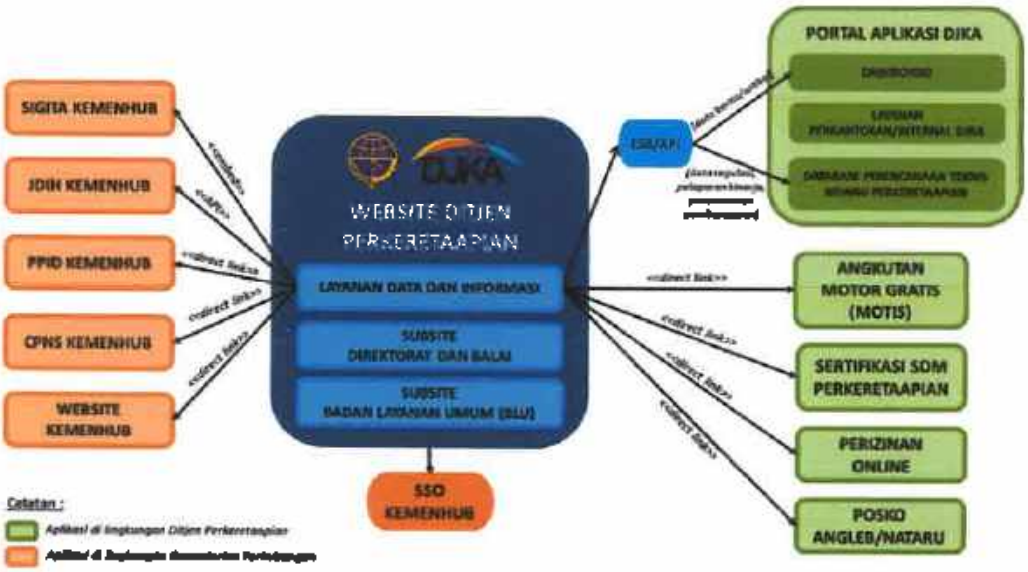

D. Tenaga Ahli

Tenaga yang dibutuhkan untuk melaksanakan kegiatan ini adalah tenaga ahli/ terampil dengan kualifikasi sebagai berikut:

Tugas dan tanggung jawab masing- masing tenaga ahli adalah sebagai berikut:

No	Posisi	Pendidikan	Pengalaman Minimal	MM
1.	Pemrogram Perangkat Lunak	S1 Teknik Informatika/Sistem Informasi/Komputer	3 Tahun	6
2.	Penterjemah/Sekretaris Dwibahasa	S1 Sastra Inggris/Bahasa Inggris	1 Tahun	5

Tugas dan tanggung jawab masing- masing tenaga ahli adalah sebagai berikut:

NO	POSISI	URAIAN PEKERJAAN
1.	Pemrogram Perangkat Lunak	• Melakukan perencanaan kebutuhan *database*, merancang struktur manajemen database, melakukan *troubleshooting* terhadap kesalahan dalam pengeksekusian sistem *database*. • Melakukan *coding* sesuai dengan bahasa pemrograman yang dibutuhkan sesuai dengan lingkup kegiatan dan alur proses bisnis, melakukan *debugging* semua kode, menghapus *bugs/error* dan melakukan pengujian program yang telah dibuat.
2.	Penterjemah/Sekretaris Dwibahasa	• Melakukan terjemahan konten website (berita artikel, berita gambar, dan lainnya ke dalam format Bahasa Inggris).

E. Spesifikasi Teknis

Berikut ini merupakan spesifikasi teknis Website Direkorat Jenderal Perkeretaapian:

1. Bahasa pemrograman : PHP 8.0;
2. *Framework* aplikasi : Yii2;
3. Database: MySQL 8.1;
4. *Operating System* (OS) : Ubuntu 22;
5. Spesifikasi kebutuhan server : CPU 8 vCPU, RAM 16 GB, DISK 512 GB.

F. Catatan Rekomendasi

Tim Reviu Pusat Data dan Teknologi Informasi mencatat rekomendasi untuk Kegiatan Pengelolaan Website Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun Anggaran 2024 yang diusulkan oleh Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian – Direktorat Jenderal perkeretaapian dengan catatan sebagai berikut :

1. Diwajibkan mengacu pada Perpres nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan KM nomor 112 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Di Lingkungan Kementerian Perhubungan;
2. Kegiatan ini wajib mengacu pada KM nomor 222 tahun 2020 tentang Rencana Induk Teknologi Informasi dan Komunikasi di lingkungan Kementerian Perhubungan Tahun 2020-2024 sebagai data dukung utama dalam kegiatan ini;

3. Berpedoman pada Arsitektur TIK dan KM nomor 106 Tahun 2023 tentang Peta Rencana SPBE Kementerian Perhubungan;
4. Sesuai Peraturan Presiden nomor 39 tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (SDI) dan KM nomor 150 tahun 2021 tentang Tata Kelola Data di lingkungan Kementerian Perhubungan, agar memenuhi Prinsip Tata Kelola Data Kementerian Perhubungan sebagai penunjang Satu Data Indonesia sehingga pengusul kegiatan sebagai produsen data wajib menerapkan Prinsip Satu Data Indonesia (SDI) yang mencakup Standar Data dan Metadata, Kode Referensi/ Data Induk serta Interoperabilitas guna mengintegrasikan data ke Pusdatin serta menyiapkan *web service* integrasi untuk dapat berbagi pakai;
5. Dalam proses pengembangan aplikasi harus menggunakan Sistem Operasi, *development tools* terkini dan memanfaatkan infrastruktur TIK berbagi pakai berupa *Government Cloud* atau Pusat Data Nasional (PDN);
6. Dengan berpedoman pada prinsip SDLC KP nomor 536 Tahun 2016 tentang Panduan Teknis Penerapan *System Development Life Cycle* (SDLC) Sistem Informasi di Lingkungan Kementerian Perhubungan dan KM nomor 107 Tahun 2023 tentang Kebijakan dan Standar Sistem Manajemen Keamanan Informasi di Lingkungan Kementerian Perhubungan, kegiatan tersebut wajib melakukan *User Acceptance Test* (UAT), *System Integration Test* (SIT), *Vulnerability Assessment* (VA) dan *Penetration Testing* (Pentest);
7. Agar memperhatikan terkait Aset Tak Berwujud (ATB) dalam rangka tertib inventaris APBN;
8. Menerapkan standar biaya berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan KM nomor 6 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan dan Penetapan Harga Perkiraan Sendiri untuk Pengadaan Jasa Konsultansi Non konstruksi di Lingkungan Kementerian Perhubungan.

Jakarta, Januari 2024

SEKRETARIAT	**PUSDATIN**
DITJEN PERKERETAAPIAN	
Andi Guntur Asapa	**R. Rachmat Herwannuri**
NIP. 198407242007121001	NIP. 19700814 199903 1 001

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
SEKRETARIAT JENDERAL
PUSAT DATA DAN TEKNOLOGI INFORMASI

Gedung Karya Lt.25
Jl. Medan Merdeka Barat No.8
Jakarta 10110

Telp. : 3456703, 3811308
Contact Center : 151

e-Mail : pusdatin@kemenhub.go.id
Website : http://www.kemenhub.go.id

CATATAN HASIL REVIU
ATAS USULAN KEGIATAN
PENGELOLAAN WEBSITE DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN TAHUN ANGGARAN 2024
SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN
DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

Berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 9 tahun 2023 tentang Pedoman Reviu Teknologi Informasi dan Komunikasi di Lingkungan Kementerian Perhubungan, bersama ini kami sampaikan Catatan Hasil Reviu sebagai berikut :

DATA UMUM

Kegiatan Pengelolaan Website Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun Anggaran 2024 – Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian dengan pagu anggaran sebesar Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah).

A. Ruang Lingkup

Secara garis besar lingkup kegiatan ini meliputi:

1. Melakukan inventarisasi dan identifikasi kebutuhan data dan informasi serta layout/ tampilan yang perlu diperbaharui dalam website Direktorat Jenderal Perkeretaapian;
2. Melakukan penanganan terhadap permasalahan/ error system yang terjadi termasuk penanganan kerentanan sistem;
3. Melakukan analisa teknis, monitoring keamanan terhadap *availability* sistem website secara berkala seperti melakukan beberapa pengujian fungsionalitas, uji kegunaan, uji *error*, uji kompabilitas dan uji kinerja;
4. Menyediakan data dan informasi pada website dengan dua Bahasa (Indonesia dan Inggris) secara berkelanjutan;
5. Mengelola fitur data dan informasi pada website seperti infografis/ banner, profil unit kerja, pembangunan, regulasi, kebijakan dan pelaporan, berita (artikel, foto, video), podcast, pengumuman, data perkeretaapian dalam angka/ statistic, agenda/ jadwal kegiatan unit kerja;
6. Mengelola seluruh layanan bidang perkertaapian yang dapat diakses public;
7. Menyediakan fitur/ fasilitas yang ramah untuk kaum disabilitas dalam penggunaan website Direktorat Jenderal Perkeretaapian;
8. Mengelola *microsite/ subsite* masing- masing unit kerja Direktorat dan Balai di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian dengan menu dan tampilan yang bersifat dinamis sesuai kebutuhan;

9. Melakukan *updating* website Direktorat Jenderal Perkeretaapian sesuai dengan prioritas kebutuhan dan peningkatan/ *update* keamanan sistem termasuk pengelolaan *backend* dan *database* website Direktorat Jenderal Perkeretaapian.

B. *Output* Kegiatan

Keluaran (*Output*) yang diharapkan dari kegiatan ini adalah tersclenggaranya pengelolaan website Direktorat Jenderal Perkeretaapian yang handal dan *update*, dilengkapi fitur dua Bahasa dan ramah untuk kaum disabilitas serta didukung sistem keamanan yang baik guna mendukung kinerja organisasi Direktorat Jenderal Perkeretaapian dengan penyediaan media komunikasi public terkait data dan informasi penyelenggaraan perkeretaapian serta dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sebagai regulator transportasi perkeretaapian.

C. Bisnis Proses

Uraian proses bisnis pengembangan Website Direktorat Jenderal Perkeretaapian dalam bentuk diagram use case pada gambar berikut:

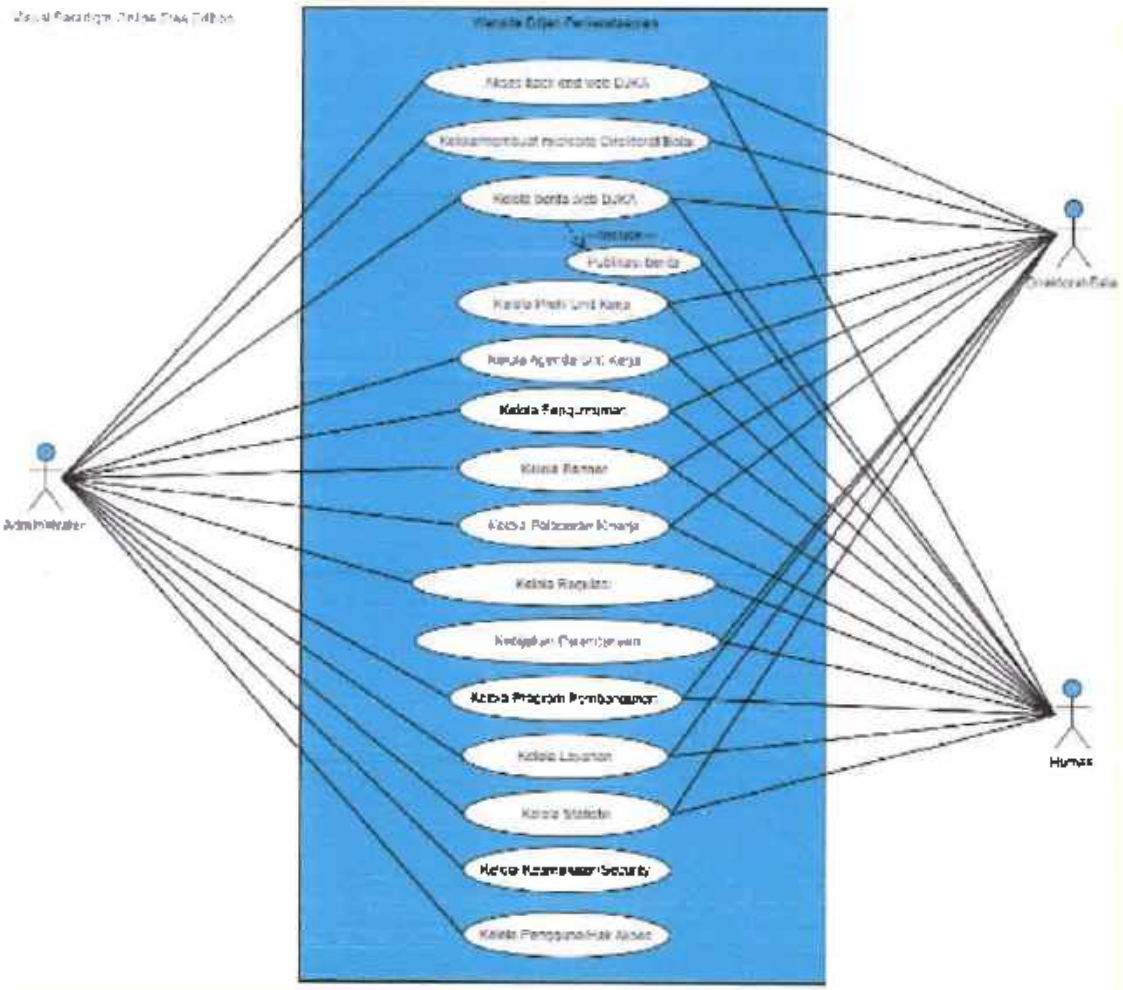

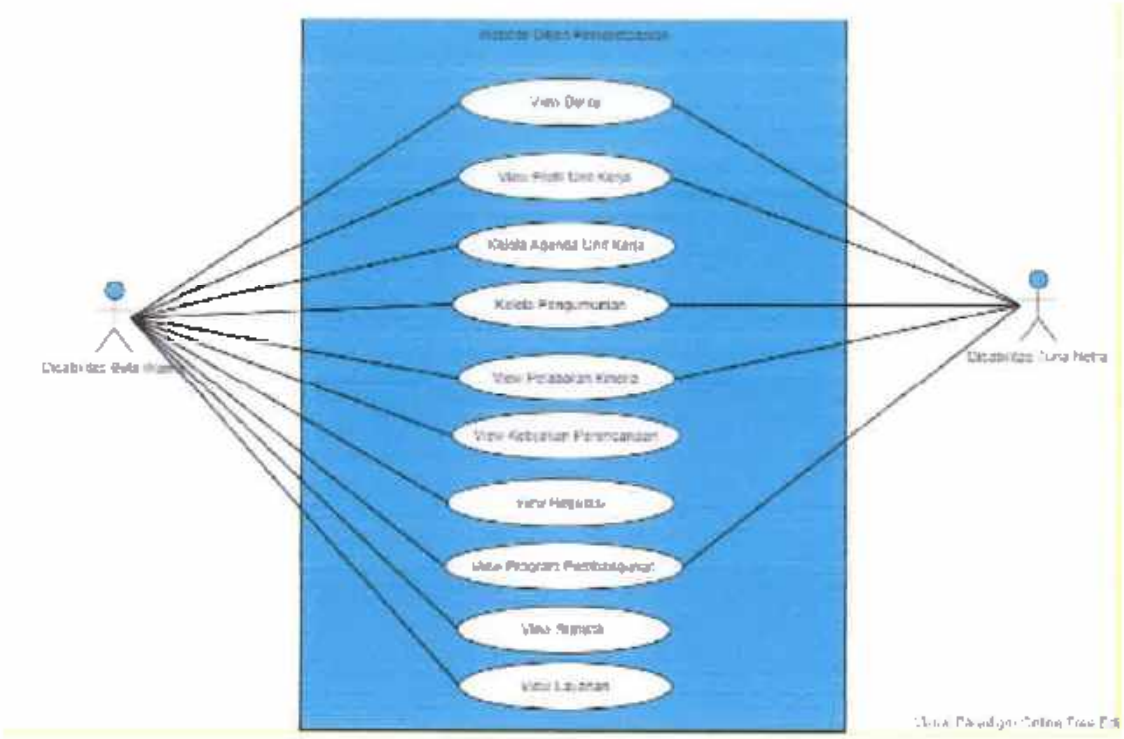

Website Direktorat Jenderal Perkeretaapian merupakan layanan Government to Citizen (G2C) yang telah terintegrasi dengan aplikasi internal dan eksternal Kementerian Perhubungan, terdiri dari layanan informasi public terkait data dan informasi transportasi perkeretaapian, program/ kegiatan, layanan Ditjen Perkeretaapian termasuk Badan Layanan Umum, layanan angkutan Motor Gratis (MOTIS) pada masa angkutan Lebaran, layanan perizinan, layanan sertifikasi dan layanan lainnya yang dipublikasikan kepada masyarakat umum.

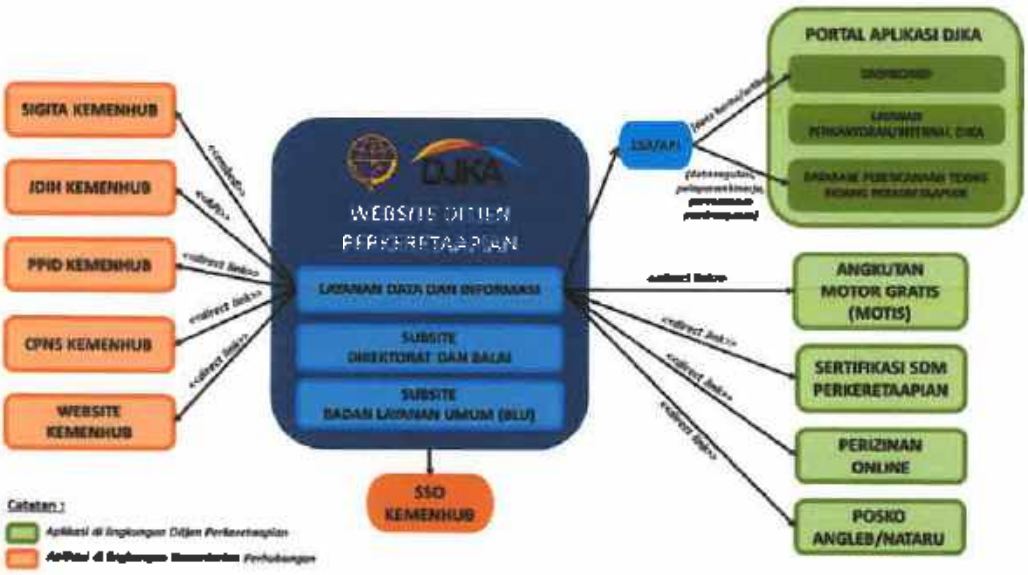

D. Tenaga Ahli

Tenaga yang dibutuhkan untuk melaksanakan kegiatan ini adalah tenaga ahli/ terampil dengan kualifikasi sebagai berikut:

Tugas dan tanggung jawab masing- masing tenaga ahli adalah sebagai berikut:

No	Posisi	Pendidikan	Pengalaman Minimal	MM
1.	Pemrogram Perangkat Lunak	S1 Teknik Informatika/Sistem Informasi/Komputer	3 Tahun	6
2.	Penterjemah/Sekretaris Dwibahasa	S1 Sastra Inggris/Bahasa Inggris	1 Tahun	5

Tugas dan tanggung jawab masing- masing tenaga ahli adalah sebagai berikut:

NO	POSISI	URAIAN PEKERJAAN
1.	Pemrogram Perangkat Lunak	• Melakukan perencanaan kebutuhan *database*, merancang struktur manajemen database. melakukan *troubleshooting* terhadap kesalahan dalam pengeksekusian sistem *database*. • Melakukan *coding* sesuai dengan bahasa pemrograman yang dibutuhkan sesuai dengan lingkup kegiatan dan alur proses bisnis, melakukan *debugging* semua kode, menghapus *bugs/error* dan melakukan pengujian program yang telah dibuat.
2.	Penterjemah/Sekretaris Dwibahasa	• Melakukan terjemahan konten website (berita artikel, berita gambar, dan lainnya ke dalam format Bahasa Inggris).

E. Spesifikasi Teknis

Berikut ini merupakan spesifikasi teknis Website Direkorat Jenderal Perkeretaapian:

1. Bahasa pemrograman : PHP 8.0;
2. *Framework* aplikasi : Yii2;
3. Database: MySQL 8.1;
4. *Operating System* (OS) : Ubuntu 22;
5. Spesifikasi kebutuhan server : CPU 8 vCPU, RAM 16 GB, DISK 512 GB.

F. Catatan Rekomendasi

Tim Reviu Pusat Data dan Teknologi Informasi mencatat rekomendasi untuk Kegiatan Pengelolaan Website Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun Anggaran 2024 yang diusulkan oleh Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian – Direktorat Jenderal perkeretaapian dengan catatan sebagai berikut :

1. Diwajibkan mengacu pada Perpres nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan KM nomor 112 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Di Lingkungan Kementerian Perhubungan;
2. Kegiatan ini wajib mengacu pada KM nomor 222 tahun 2020 tentang Rencana Induk Teknologi Informasi dan Komunikasi di lingkungan Kementerian Perhubungan Tahun 2020-2024 sebagai data dukung utama dalam kegiatan ini;

3. Berpedoman pada Arsitektur TIK dan KM nomor 106 Tahun 2023 tentang Peta Rencana SPBE Kementerian Perhubungan;
4. Sesuai Peraturan Presiden nomor 39 tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (SDI) dan KM nomor 150 tahun 2021 tentang Tata Kelola Data di lingkungan Kementerian Perhubungan, agar memenuhi Prinsip Tata Kelola Data Kementerian Perhubungan sebagai penunjang Satu Data Indonesia sehingga pengusul kegiatan sebagai produsen data wajib menerapkan Prinsip Satu Data Indonesia (SDI) yang mencakup Standar Data dan Metadata, Kode Referensi/ Data Induk serta Interoperabilitas guna mengintegrasikan data ke Pusdatin serta menyiapkan *web service* integrasi untuk dapat berbagi pakai;
5. Dalam proses pengembangan aplikasi harus menggunakan Sistem Operasi, *development tools* terkini dan memanfaatkan infrastruktur TIK berbagi pakai berupa *Government Cloud* atau Pusat Data Nasional (PDN);
6. Dengan berpedoman pada prinsip SDLC KP nomor 536 Tahun 2016 tentang Panduan Teknis Penerapan *System Development Life Cycle* (SDLC) Sistem Informasi di Lingkungan Kementerian Perhubungan dan KM nomor 107 Tahun 2023 tentang Kebijakan dan Standar Sistem Manajemen Keamanan Informasi di Lingkungan Kementerian Perhubungan, kegiatan tersebut wajib melakukan *User Acceptance Test* (UAT), *System Integration Test* (SIT), *Vulnerability Assessment* (VA) dan *Penetration Testing* (Pentest);
7. Agar memperhatikan terkait Aset Tak Berwujud (ATB) dalam rangka tertib inventaris APBN;
8. Menerapkan standar biaya berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan KM nomor 6 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan dan Penetapan Harga Perkiraan Sendiri untuk Pengadaan Jasa Konsultansi Non konstruksi di Lingkungan Kementerian Perhubungan.

Jakarta, Januari 2024

SEKRETARIAT	**PUSDATIN**
DITJEN PERKERETAAPIAN	
Andi Guntur Asapa	**R. Rachmat Herwanuri**
NIP. 198407242007121001	NIP. 19700814 199903 1 001

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
SEKRETARIAT JENDERAL
PUSAT DATA DAN TEKNOLOGI INFORMASI

Gedung Karya Lt.25
Jl. Medan Merdeka Barat No.8
Jakarta 10110

Telp. : 3456703, 3811308
Contact Center : 151

e-Mail : pusdatin@kemenhub.go.id
Website : http://www.kemenhub.go.id

Nomor : TI.005/15/16 PDTI.2024
Klasifikasi : Biasa
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Penyampaian Rekomendasi Hasil Reviu dan *Clearance* Kegiatan Pengembangan Portal Aplikasi Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun Anggaran 2024

Jakarta, 14 Mei 2024

Yth. Sekretaris Direktorat Jenderal Perkeretaapian

Menindaklanjuti Surat:

1. Menindaklanjuti surat Sekretaris Direktorat Jenderal Perkeretaapian nomor TI. 101/1/6/K1/DJKA/2023 tanggal 24 Oktober 2023 hal Usulan Kegiatan TIK di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2024;
2. Menindaklanjuti Surat Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana Kementerian PAN-RB nomor: 485/DJAI/PR.01.01/05/2024, B/784/KT.03/2024 dan 07472/D1.11/05/2024 tanggal 07 Mei 2024 hal Penyampaian Hasil Evaluasi Anggaran Belanja SPBE Tahun 2024 di Lingkup Kementerian Perhubungan;
3. Menindaklanjuti Surat Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Kominfo nomor: 485/DJAI/PR.01.01/05/2024, B/784/KT.03/2024 dan 07472/D1.11/05/2024 tanggal 07 Mei 2024 hal Penyampaian Hasil Evaluasi Anggaran Belanja SPBE Tahun 2024 di Lingkup Kementerian Perhubungan;
4. Menindaklanjuti Surat Deputi Bidang Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan nomor: 485/DJAI/PR.01.01/05/2024, B/784/KT.03/2024 dan 07472/D1.11/05/2024 tanggal 07 Mei 2024 hal Penyampaian Hasil Evaluasi Anggaran Belanja SPBE Tahun 2024 di Lingkup Kementerian Perhubungan.

telah dilakukan reviu kegiatan TIK oleh Pusat Data dan Teknologi Informasi (Pusdatin).

Sesuai dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KM. 9 Tahun 2023 tentang Pedoman Reviu Teknologi Informasi dan Komunikasi di Lingkungan Kementerian Perhubungan, dengan ini kami sampaikan bahwa Kegiatan Pengembangan Portal Aplikasi Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun Anggaran 2024 **dapat dilanjutkan** dengan memperhatikan catatan hasil reviu dan surat hasil rekomendasi *clearance* TIK Tahun Anggaran 2024 yang dikeluarkan oleh KemenPAN-RB, Kemenkominfo dan Kementerian PPN/BAPPENAS sebagaimana terlampir pada surat ini.

Rekomendasi Reviu TIK ini berlaku sepanjang Tahun Anggaran 2024 untuk Kegiatan Pengembangan Portal Aplikasi Direktorat Jenderal Perkeretaapian dengan pagu anggaran sebesar Rp. 1.500.000.000,- (Satu Milyar Lima Ratus Juta Rupiah) sesuai data dukung yang disampaikan ke Pusdatin sejak surat ini ditandatangani.

Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian bertanggungjawab sepenuhnya terhadap pelaksanaan kegiatan sesuai catatan hasil reviu untuk Kegiatan Pengembangan Portal Aplikasi Direktorat Jenderal Perkeretaapian.

Demikian disampaikan atas perhatian dan kerjasama Saudara, diucapkan terima kasih.

Kepala Pusat Data dan
Teknologi Informasi,

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
PUSAT DATA
DAN TEKNOLOGI INFORMASI
SEKRETARIAT JENDERAL

Raymond Ivan, H.A.S, S.T.
NIP. 196 1213 199603 1 001

Tembusan:
1. Sekretaris Jenderal;
2. Direktur Jenderal Perkeretaapian;
3. Inspektur Jenderal;
4. Staf Ahli Bidang Teknologi dan Energi Perhubungan.

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
SEKRETARIAT JENDERAL
PUSAT DATA DAN TEKNOLOGI INFORMASI

Gedung Karya Lt.25
Jl. Medan Merdeka Barat No.8
Jakarta 10110

Telp. : 3456703, 3811308
Contact Center : 151

e-Mail : pusdatin@kemenhub.go.id
Website : http://www.kemenhub.go.id

CATATAN HASIL REVIU
ATAS USULAN KEGIATAN PENGEMBANGAN PORTAL APLIKASI DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN TAHUN ANGGARAN 2024 SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

Berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 9 tahun 2023 tentang **Pedoman Reviu Teknologi Informasi dan Komunikasi di Lingkungan Kementerian Perhubungan,** bersama ini kami sampaikan Catatan Hasil Reviu sebagai berikut :

DATA UMUM

Kegiatan **Pengembangan Portal Aplikasi Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun Anggaran 2024 – Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian dengan pagu anggaran sebesar Rp.** 1.500.000.000,- (Satu Milyar Lima Ratus Juta Rupiah).

A. Ruang Lingkup

Pengembangan Portal Aplikasi Direktorat Jenderal Perkeretaapian meliputi:

1. Pengembangan portal aplikasi dengan teknologi microservices atau arsitektur berorientasi layanan.
2. Penerapan *Single Sign On* (SSO) Kemenhub untuk integrasi akses dengan aplikasi teknis di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian dan aplikasi di lingkungan Kementerian Perhubungan serta dengan pihak eksternal/ *stakeholders* bidang perkeretaapian.
3. Pengembangan *Enterprise Service Bus* (ESB) untuk mendukung pengelolaan dan penyajian data teknis perkeretaapian yang terintegrasi.
4. Pengembangan fitur Tanda Tangan Elektronik (TTE) yang sudah terintegrasi dengan portal TTE Kementerian Perhubunga dan BSrE untuk memenuhi kebutuhan layanan dukungan manajemen di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian.
5. Pengembangan fitur media penyimpanan data teknis unit kerja dan pegawai berupa D-*Drive/ Cloud* agar data mudah dishare dan diakses pengguna/ pegawai yang memiliki akun portal.
6. Pengembangan dashboard dan persetujuan pimpinan terpusat untuk mempermudah pimpinan dalam memantau/ monitoring hal- hal strategis dengan data, informasi dan laporan secara realtime/ update. Penyajian dashboard dapat lebih informatif dan lengkap mencakup integrasi data teknis dengan sistem informasi/ aplikasi di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian maupun eksternal/ *stakeholders* bidang perkeretaapian.

7. Pengembangan fitur dukungan manajemen/ operasional layanan unit kerja dengan integrasi sistem/ aplikasi teknis di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian guna pemanfaatan internal Direktorat Jenderal Perkeretaapian dan eskternal/ *stakeholders* bidang perkeretaapian.
8. Pengembangan Portal Aplikasi agar tampilan *mobile friendly* serta terintegrasi dengan media e-mail dan chat/ media komunikasi lainnya antar pengguna Portal Aplikasi.
9. Pengelolaan media dokumentasi perencanaan teknis/ kebijakan/ pelaporan/ SOP/ lainnya di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian agar mudah diakses pimpinan/ pegawai termasuk integrasi dengan JDIH Kementerian Perhubungan dan Website.
10. Pengelolaan *rule* dan *user* manajemen terkait dengan pengguna portal berupa database pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian (ASN termasuk P3K, PPNPN) yang terintegrasi dengan Sistem Informasi Kepegawaian Kementerian Perhubungan.
11. Peningkatan kinerja dan update keamanan Portal Aplikasi Direktorat Jenderal Perkeretaapian

Selain hal di atas, juga mencakup updating data dan integrasi, peningkatan kinerja sistem, serta peningkatan keamanan. Ruang lingkup kegiatan sebagai berikut:

1. Updating dan analisis kebutuhan data/ informasi:
   a. Melakukan inventarisasi sistem informasi/ aplikasi yang akan diintegrasikan
   b. Melakukan analisa terhadap sistem informasi/ aplikasi dan database yang akan diintegrasikan termasuk untuk mengatur hal akses portal aplikasi
   c. Melakukan desain kebutuhan fitur aplikasi aplikasi
2. Pemeliharaan:
   a. Melakukan pemeliharaan perangkat lunak terhadap Portal Aplikasi Direktorat Jenderal Perkeretaapian;
   b. Melakukan backup basis data Portal Aplikasi.
3. Peningkatan keamanan dan kinerja Portal Aplikasi:
   a. Melakukan pengujian kinerja Portal Aplikasi secara berkala;
   b. Melakukan pengujian dan update keamanan Portal Aplikasi secara berkala.

B. *Output* Kegiatan

Keluaran (*Output*) yang diharapkan dari kegiatan ini adalah tersedianya Portal Aplikasi Direktorat Jenderal Perkeretaapian sebagai integrator dan *SuperApps* yang terintegrasi, aman dan mudah akses oleh unit kerja dan pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian guna mendukung efektifitas kinerja unit kerja serta menyediakan sistem informasi untuk membantu dalam pelaporan, penyediaan data dan pengambilan kebijakan Pimpinan di lingkunga Direktorat Jenderal Perkeretaapian termasuk penyediaan layanan regulator bidang perkeretaapian bagi *stakeholders* terkait.

C. Bisnis Proses

Gambaran Portal Aplikasi Direktorat Jenderal Perkeretaapian saat ini sebagai berikut:

1. Menyajikan integrasi data teknis dari sistem informasi/ aplikasi di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian, baik berupa integrasi aplikasi langsung maupun aplikasi yang sudah ada pada masing- masing unit direktorat teknis di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian dalam bentuk *dashboard*/ pelaporan;
2. Menyediakan layanan dukungan manajemen seluruh unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian;
3. Menyajikan *database* kepegawaian Direktorat Jenderal Perkeretaapian untuk keperluan administrasi kepegawaian yang terintegrasi dengan Sistem Informasi Kepegawaian (SIK) di lingkungan Kementerian Perhubungan.

Berikut ini merupakan uraian proses bisnis dan keterkaitan Portal Aplikasi Direktorat Jenderal Perkeretaapian dengan sistem TIK di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian dan di lingkup Unit Eselon I;

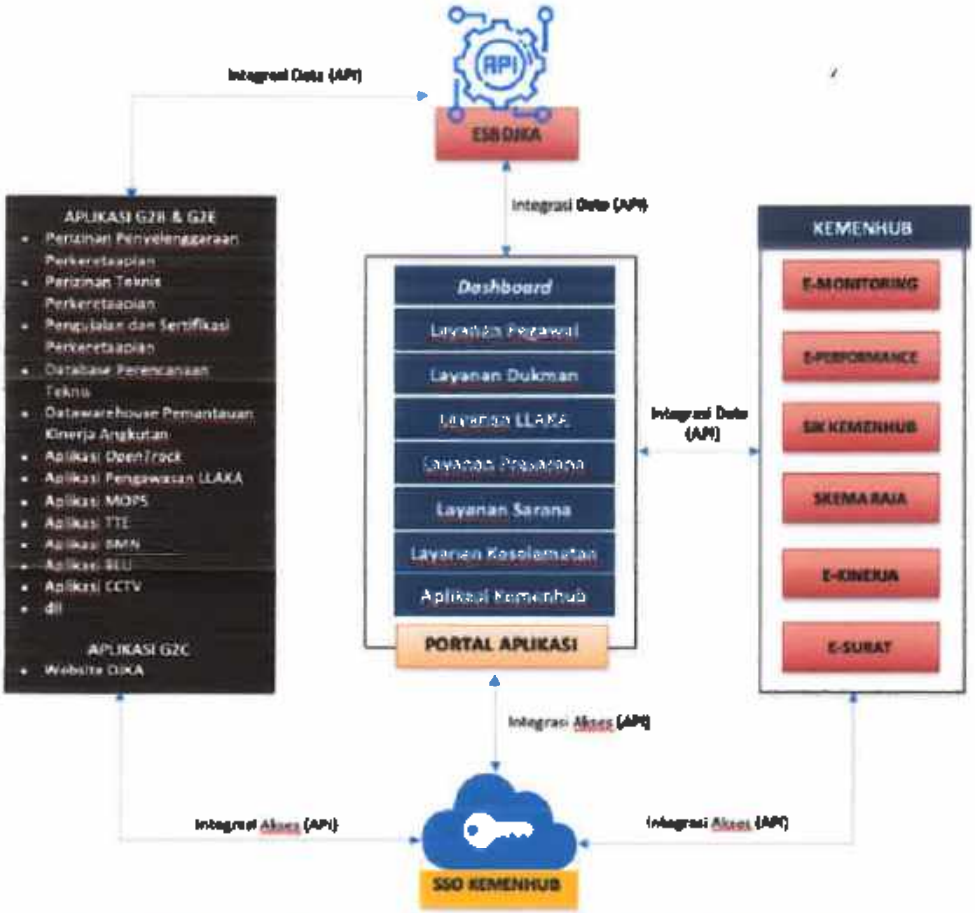

Gambar Skema Integrasi Portal Aplikasi Ditjen Perkeretaapian

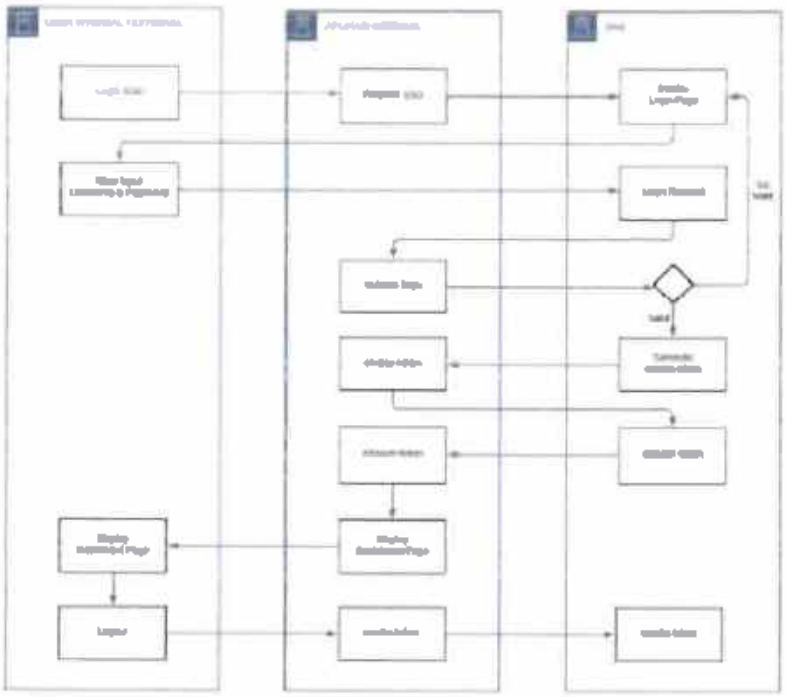

Gambar Skema Integrasi SSO Kementerian Perhubungan

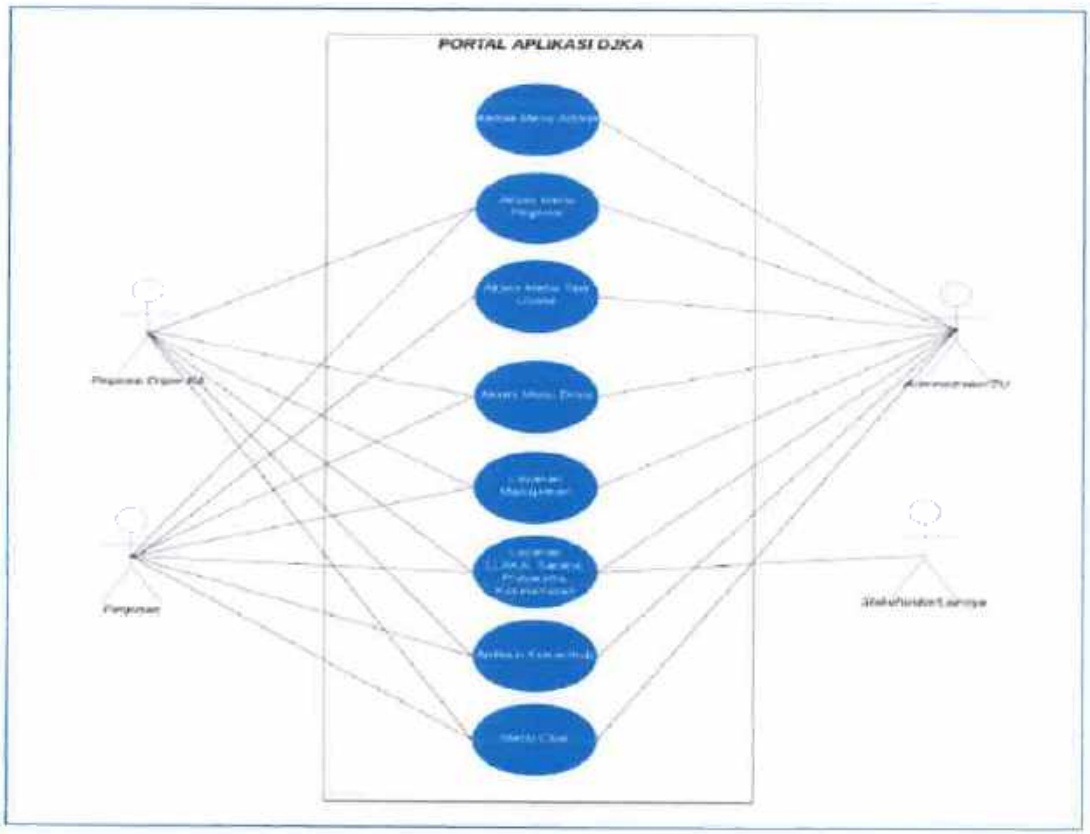

Gambar *Use Case* Proses Bisnis Portal Aplikasi Ditjen Perkeretaapian

D. Tenaga Ahli

Tenaga yang dibutuhkan untuk melaksanakan kegiatan ini adalah tenaga ahli dan sub professional dengan kualifikasi sebagai berikut:

No	Posisi	Pendidikan	Pengalaman Minimal	MM
1.	Ahli Perencana Arsitektur TIK (Ketua Tim)	S1 Teknik Informatika/ Manajemen Sistem Informasi/ Komputer	11 Tahun	9
2.	Ahli Sistem Analis	S1 Teknik Informatika/ Sistem Informasi/ Komputer	11 Tahun	9
3.	Pemrogram Perangkat Lunak	S1 Teknik Informatika/ Sistem Informasi/ Komputer	3 Tahun	8 (2 orang)
4.	Pemprogram Basis Data	S1 Teknik Informatika/ Sistem Informasi/ Komputer	3 Tahun	8 (2 orang)
5.	Ahli Keamanan Perangkat Lunak	S1 Teknik Informatika/ Sistem Informasi/ Komputer	3 Tahun	5
6.	Ahli Desain Grafis	S1 Desain Grafis/Desain Komunikasi Visual	3 Tahun	3
7.	Operator Komputer	D3 Teknik Informatika/ Sistem Informasi/ Komputer	1 Tahun	9
8.	Sekretaris	D3 Sekretaris/Administrasi	1 Tahun	9

Tugas dan tanggung jawab masing- masing tenaga ahli adalah sebagai berikut:

No	Posisi	Uraian Pekerjaan
1.	Ahli Perencana Arsitektur TIK	• Memastikan bahwa arsitektur TIK yang dirancang dapat mengoptimalkan kinerja sistem dan dapat dengan mudah berkembang sesuai dengan pertumbuhan kebutuhan. • Memastikan keamanan informasi dan sistem dengan merancang kontrol akses, mengidentifikasi potensi risiko keamanan, dan mengimplementasikan praktik keamanan yang tepat. • Merencanakan strategi dan solusi untuk pemulihan bencana dan kontinuitas bisnis, termasuk backup data, rencana pemulihan, dan penanganan kegawatan. • Merencanakan dan mengintegrasikan berbagai aplikasi dan sistem agar dapat beroperasi secara sinergis dan efektif. • Melakukan perencanaan proyek, pengelolaan sumber daya, jadwal, dan koordinasi dengan tim terkait.
2.	Ahli Sistem Analis	• Melakukan analisis menyeluruh terhadap kebutuhan dan persyaratan teknologi informasi dan komunikasi untuk proyek. • Merancang arsitektur sistem yang efektif dan efisien untuk memenuhi kebutuhan proyek. Ini mencakup desain infrastruktur jaringan, sistem penyimpanan data, keamanan informasi, integrasi aplikasi, dan komponen-komponen lain yang diperlukan. • Memilih teknologi, perangkat keras, perangkat lunak, dan platform yang sesuai dengan kebutuhan proyek dan memastikan interkonektivitas yang baik.

No	Posisi	Uraian Pekerjaan
3	Pemrogram Perangkat Lunak	• Menulis kode dan mengimplementasikan program komputer pada banyak sistem dalam bisnis. • Mengoptimasikan pengkodean dalam sistem. • Berkolaborasi dengan pengembang perangkat lunak lain dalam pembuatan program. • Melakukan debugging, yaitu mengidentifikasi dan menghapus bug dan error dalam pengkodean.
4	Pemprogram Basis Data	• Mengidentifikasi kebutuhan *user* dan mengelola database. • Memastikan bahwa database dapat beroperasi secara efisien dan tanpa *error*. • Membuat dan melakukan tes terhadap modifikasi struktur database ketika diperlukan. • Mengelola database dan memperbarui *permissions*. • Menggabungkan database lama dengan yang baru. • Mencadangkan dan mengembalikan data untuk mencegah kehilangan data *(data loss)*.
5	Ahli Keamanan Perangkat Lunak	• Melakukan konfigurasi *firewall* di seluruh Sistem Operasi. • Melakukan pengujian penetrasi untuk mengidentifikasi kerentanan. • Membuat algoritma yang mengatur proses untuk otentikasi, otorisasi dan enkripsi. • Menganalisis kebijakan keamanan data terbaru dan menerapkannya untuk melindungi data.
6	Ahli Desain Grafis	• Membuat konsep dan ide-ide desain awal berdasarkan kebutuhan, termasuk pemilihan warna, tipografi, dan elemen-elemen visual lainnya. • Merancang elemen-elemen grafis, seperti ikon, dan elemen visual lainnya menggunakan perangkat lunak desain grafis seperti *Adobe Photoshop, Illustrator, atau InDesign*. • Memilih dan mengatur jenis huruf (*font*) yang sesuai dan mengatur tata letak (*layout*) agar pesan dapat disampaikan dengan jelas dan efektif. • Mengedit dan memanipulasi gambar, foto, dan grafik sesuai dengan kebutuhan proyek, termasuk *retouching, cropping*, dan manipulasi lainnya. • Menggunakan kreativitas untuk menghasilkan desain grafis yang menarik, unik, dan berkesan sesuai dengan *brief* proyek.
7	Operator Komputer	• Mencatat dan mendokumentasikan pekerjaan yang telah dilakukan, termasuk perubahan-perubahan yang telah dilakukan pada sistem. • Mencetak dokumen, surat, laporan, atau materi lainnya, serta mengatur pengarsipan dokumen elektronik atau fisik. • Memberikan pelatihan dasar kepada pengguna akhir dalam penggunaan perangkat lunak.

No	Posisi	Uraian Pekerjaan
8	Sekretaris	• Mengelola, mengatur, dan mengarsipkan dokumen-dokumen proyek seperti rencana proyek, laporan status, perubahan perangkat lunak, dan dokumen lainnya • Membantu dalam perencanaan jadwal proyek, termasuk mengatur pertemuan tim, merencanakan jadwal pembaruan, dan mengingatkan anggota tim tentang tenggat waktu yang mendekat. • Mengatur pertemuan tim proyek, termasuk pengaturan tempat, waktu, dan sumber daya yang diperlukan. • Membantu dalam menyusun laporan status kegiatan yang mencakup perkembangan kegiatan, kendala, dan pencapaian.

E. Spesifikasi Teknis

Spesifikasi Teknis Software:

Server Side Programming	Javascript
Client Side Programming	React JS 18.0.2
Programming Framework	Express JS 4.18.2 & React JS 18.0.2
Web Server	NGINX 1.24.0
Operating Sistem	Rocky Linux 9
Database Management System (DBMS)	PostgreSQL 12.15

Spesifikasi Teknis *Hardware*:

CPU	8 vCPU
RAM	32 GB
HDD	2 TB

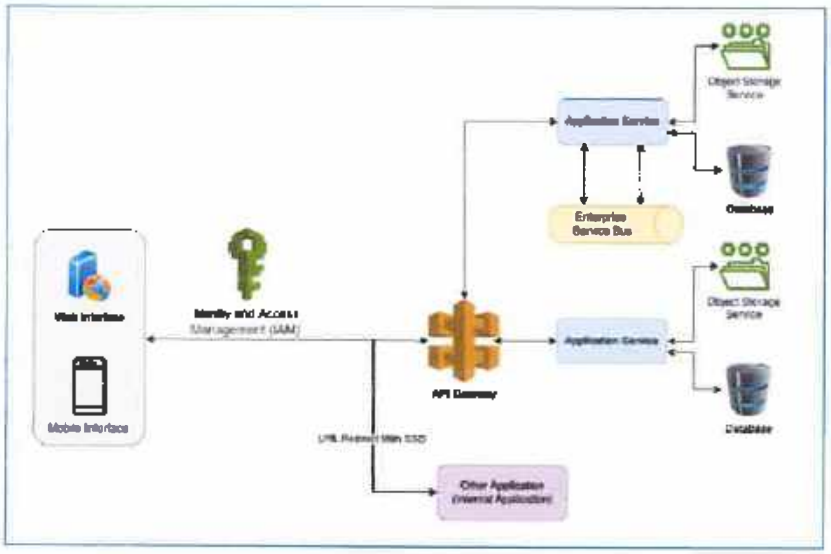

Gambar Rancangan Arsitektur Sistem Portal Aplikasi Ditjen Perkeretaapian

F. Catatan Rekomendasi

Tim Reviu Pusat Data dan Teknologi Informasi mencatat rekomendasi untuk Kegiatan Pengembangan Portal Aplikasi Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun Anggaran 2024 yang diusulkan oleh Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian – Direktorat Jenderal Perkeretaapian dengan catatan sebagai berikut :

1. Diwajibkan mengacu pada Perpres nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan KM nomor 112 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Di Lingkungan Kementerian Perhubungan;
2. Kegiatan ini wajib mengacu pada KM nomor 222 tahun 2020 tentang Rencana Induk Teknologi Informasi dan Komunikasi di lingkungan Kementerian Perhubungan Tahun 2020-2024 sebagai data dukung utama dalam kegiatan ini;
3. Berpedoman pada Arsitektur TIK dan KM nomor 106 Tahun 2023 tentang Peta Rencana SPBE Kementerian Perhubungan;
4. Sesuai Peraturan Presiden nomor 39 tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (SDI) dan KM nomor 150 tahun 2021 tentang Tata Kelola Data di lingkungan Kementerian Perhubungan, agar memenuhi Prinsip Tata Kelola Data Kementerian Perhubungan sebagai penunjang Satu Data Indonesia sehingga pengusul kegiatan sebagai produsen data wajib menerapkan Prinsip Satu Data Indonesia (SDI) yang mencakup Standar Data dan Metadata, Kode Referensi/ Data Induk serta Interoperabilitas guna mengintegrasikan data ke Pusdatin serta menyiapkan *web service* integrasi untuk dapat berbagi pakai;
5. Dalam proses pengembangan aplikasi harus menggunakan Sistem Operasi, *development tools* terkini dan memanfaatkan infrastruktur TIK berbagi pakai berupa *Government Cloud* atau Pusat Data Nasional (PDN);
6. Dengan berpedoman pada prinsip SDLC KP nomor 536 Tahun 2016 tentang Panduan Teknis Penerapan *System Development Life Cycle* (SDLC) Sistem Informasi di Lingkungan Kementerian Perhubungan dan KM nomor 107 Tahun 2023 tentang Kebijakan dan Standar Sistem Manajemen Keamanan Informasi di Lingkungan Kementerian Perhubungan, kegiatan tersebut wajib melakukan *User Acceptance Test* (UAT), *System Integration Test* (SIT), *Vulnerability Assessment* (VA) dan *Penetration Testing* (Pentest);
7. Agar memperhatikan terkait Aset Tak Berwujud (ATB) dalam rangka tertib inventaris APBN;
8. Menerapkan standar biaya berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan KM nomor 6 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan dan Penetapan Harga Perkiraan Sendiri untuk Pengadaan Jasa Konsultansi Non konstruksi di Lingkungan Kementerian Perhubungan.

Jakarta, Januari 2024

SEKRETARIAT DITJEN PERKERETAAPIAN	PUSDATIN
Andi Guntur Asapa	**R. Rachmat Herwannuri**
NIP. 19840724200712100l	NIP. 19700814 199903 1 001

KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA

JALAN JENDERAL SUDIRMAN KAV. 69, JAKARTA 12190, TELEPON (021) 7398381 - 7398382, FAKSIMILE (021) 7398323
SITUS http ://www.menpan.go.id

Nomor : 485/DJAI/PR.01.01/05/2024 Jakarta, 07 Mei 2024
Nomor : B/784/KT.03/2024
Nomor : 07472/D1.11/05/2024
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Penyampaian Hasil Evaluasi Anggaran Belanja SPBE Tahun 2024 di Lingkup Kementerian Perhubungan

Yth.

1. **Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan;**
2. **Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan**

Di

Tempat

Menindaklanjuti Surat dari Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan Nomor TI.006/1/2/SKJ/2024 Tanggal 29 Januari 2024 Perihal Permohonan Clearance Tahap I Kegiatan TIK Tahun Anggaran 2024 di Lingkungan Kementerian Perhubungan, bersama ini kami sampaikan:

1. Evaluasi anggaran SPBE (*clearance*) Tahun Anggaran 2024 dilaksanakan dengan memperhatikan:
   a. Surat Bersama Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Menteri Keuangan sesuai Surat Bersama Menteri Keuangan dan Menteri PPN/ Bappenas No. S-287/MK.02/2023 dan B.292/M.PPN/D.8/PP.04.02/04/2023 tanggal 10 April 2023 terkait Pagu Indikatif Belanja Kementerian/Lembaga dan Dana Alokasi Khusus TA 2024;
   b. Surat Edaran Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Komunikasi dan Informatika, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 21 , Nomor 8 dan Nomor 1 Tahun 2023

Catatan

Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BsrE, BSSN dan dapat diverifikasi keasliannya di https://tte.kominfo.go.id/verifyPDF

Balai Sertifikasi Elektronik

tanggal 13 November 2023 tentang Mekanisme dan Persyaratan dalam Pelaksanaan Evaluasi Anggaran (Clearance) Belanja Instansi Pusat Tahun Anggaran 2024 dalam Kerangka Implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;

2. Kegiatan evaluasi (*clearance*) anggaran dimaksud telah dilaksanakan melalui pembahasan secara bersama dengan kementerian/lembaga anggota Tim Koordinasi SPBE dan SDI, melalui aplikasi https://ega-spbe.layanan.go.id, dengan memperhatikan:
   a. Prinsip pelaksanaan SPBE yakni efektivitas, keterpaduan, kesinambungan, efisiensi, akuntabilitas, interoperabilitas, dan keamanan;
   b. Kerangka kerja arsitektur SPBE, dalam rangka memastikan integrasi SPBE secara nasional antara lain terkait aspek pembangunan/pengadaan infrastruktur TIK baru atau aplikasi baru yang bersifat umum, pengadaan server baru dan/atau pusat data (*data center*) baru, (*data center/disaster recovery center*), dan penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE;
   c. Kementerian PPN/ Bappenas selaku Koordinator Satu Data Indonesia berfokus untuk reviu pemenuhan Prinsip Satu Data Indonesia dari aplikasi/ platform/belanja data dalam rangka mendorong keterpaduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian pembangunan pemerintah yang didukung oleh data yang akurat,mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses, dan dibagipakaikan, serta dikelola secara seksama, terintegrasi, dan berkelanjutan; dan menghindari terjadinya duplikasi data. Salah satu aspek keterpaduan dan efisiensi yang penting untuk diperkuat adalah belanja TIK Pemerintah khususnya belanja TIK yang menghasilkan data;
   d. Tugas dan fungsi Kementerian PAN-RB dan Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk Belanja Aplikasi dan Infrastruktur, dan Kementerian PPN/ Bappenas untuk Belanja Data;

   Rekomendasi dari hasil evaluasi digunakan sebagai bahan pertimbangan rencana pembangunan/pengadaan/pemeliharaan infrastruktur TIK atau aplikasi, pengadaan server, pengadaan pusat data, pengembangan/*upgrade* infrastruktur

Catatan

Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan oleh **BsrE, BSSN** dan dapat diverifikasi keasliannya di **https://tte.kominfo.go.id/verifyPDF**

Balai Sertifikasi Elektronik

TIK, kegiatan pendataan yang sudah ada di lingkungan Kementerian Perhubungan.

3. Berdasarkan hal-hal tersebut diatas disampaikan, rekomendasi Anggaran Belanja TA 2024 terkait SPBE untuk Kementerian Perhubungan sebagai berikut:
   a. Pembangunan, pengembangan, dan/atau pemeliharaan aplikasi yang direkomendasikan dapat dilanjutkan sebagaimana tertera pada lampiran I surat ini;
   b. Pembangunan, pengembangan, dan/atau pemeliharaan infrastruktur TIK yang direkomendasikan dapat dilanjutkan sebagaimana tertera pada lampiran II surat ini;
   c. Untuk pembangunan/pengembangan aplikasi dan infrastruktur TIK, Kementerian Perhubungan agar melakukan:
      1. Penerapan integrasi proses bisnis antar unit kerja di dalam pemanfaatan aplikasi, sehingga dapat menjadi layanan terintegrasi di lingkungan Kementerian Perhubungan sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangan instansi yang selaras dengan arsitektur SPBE.
      2. Koordinasi dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika dalam rangka pemanfaatan infrastruktur TIK berbagi pakai berupa *Government Cloud* dan pemanfaatan Pusat Data Nasional (PDN), serta melakukan migrasi secara bertahap, dimulai dengan pemanfaatan sebagai *backup system* dan fungsi *system development* dari layanan digital Kementerian Perhubungan saat ini. Selanjutnya mengusulkan anggaran dan menyiapkan sumber daya yang diperlukan, untuk pelaksanaan pemanfaatan infrastruktur TIK dimaksud;
      3. Koordinasi dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika dalam rangka pemanfaatan layanan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah di Tingkat Nasional;
      4. Koordinasi dengan Badan Siber dan Sandi Negara dalam rangka pelaksanaan aspek keamanan informasi selama proses pengembangan infrastruktur TIK, hingga layanan digital beroperasi;
      5. Penerapan integrasi/interoperabilitas data, agar data pada pembangunan dan pengembangan aplikasi dapat dibagipakaikan antar unit kerja dan antar kementerian/lembaga dan pemerintah daerah, untuk mewujudkan

Catatan

Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BsrE, BSSN dan dapat diverifikasi keasliannya di https://tte.kominfo.go.id/verifyPDF

Balai Sertifikasi Elektronik

Satu Data di lingkup Kementerian Perhubungan dan menjadi bagian dari Satu Data Indonesia;

6. Koordinasi dengan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Bappenas dalam rangka pemenuhan Prinsip Satu Data Indonesia dan penyesuaian Referensi Arsitektur Data dan Informasi untuk kesesuaian RAD dengan tujuan Pemanfaatan Data serta selaras dengan kewenangan instansi sebagai sumber data dan pengolah data;

Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka kami sampaikan permohonan kepada Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan untuk selanjutnya memperhatikan hasil rekomendasi kepada Kementerian Perhubungan, agar dapat memberikan persetujuan mata anggaran untuk kegiatan yang direkomendasikan sebagaimana yang dimaksud pada angka 3. Rincian rekomendasi dapat diakses melalui aplikasi https://ega-spbe.layanan.go.id.

Demikian surat ini disampaikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana	Direktur Jenderal Aplikasi Informatika	Deputi Bidang Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan
Ditandatangani secara elektronik oleh Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana Nanik Murwati	Ditandatangani secara elektronik oleh Direktur Jendral Aplikasi Informatika Semuel Abrijani Pangerapan	Ditandatangani secara elektronik oleh Deputi Bidang Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan Erwin Dimas

Tembusan Yth:

1. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
2. Menteri Komunikasi dan Informatika.
3. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional / Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

Catatan

Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan oleh **BsrE, BSSN** dan dapat diverifikasi keasliannya di **https://tte.kominfo.go.id/verifyPDF**

Balai Sertifikasi Elektronik

LAMPIRAN I
NOMOR : 485/DJAI/PR.01.01/05/2024
NOMOR : B/784/KT.03/2024
NOMOR : 07472/D1.11/05/2024
TANGGAL : 07 Mei 2024

HASIL REKOMENDASI EVALUASI ANGGARAN (*CLEARANCE*)
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

DAFTAR APLIKASI YANG DIREKOMENDASIKAN UNTUK DILANJUTKAN

NO	UNIT KERJA	NAMA KEGIATAN/KRO/RO	APLIKASI	ANGGARAN
1.	022.13. Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek	4649. Pelayanan Transportasi Jabodetabek / 4649.CAN. Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi / 4649.CAN.003. Aplikasi TIK Bidang Intelligent Transport Systems (ITS)	(Pengembangan) Aplikasi Peta Interaktif	197,000,000
2.	022.13. Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek	4649. Pelayanan Transportasi Jabodetabek / 4649.CAN. Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi / 4649.CAN.003. Aplikasi TIK Bidang Intelligent Transport Systems (ITS)	(Pengembangan) Aplikasi Database Perlengkapan Jalan	198,000,000
3.	022.03. Ditjen Perhubungan Darat	4640. Penunjang Teknis Transportasi Darat / 4640.CBT. Prasarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi / 4640.CBT.005. Prasarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	[Peningkatan] Sistem Layanan Bukti Lulus Uji Elektronik	1,213,800,000
4.	022.05. Ditjen Perhubungan Udara	4646. Keselamatan dan Keamanan Transportasi Udara / 4646.CAN. Sarana Bidang Teknologi Informasi dan	(Pengadaan) Aplikasi Sistem Pelaporan Penyebaran Informasi	200,000,000

Catatan

Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan oleh **BsrE, BSSN** dan dapat diverifikasi keasliannya di **https://tte.kominfo.go.id/verifyPDF**

Balai Sertifikasi Elektronik

		Komunikasi / 4646.CAN.001. Sarana Teknologi Informasi dan Komunikasi Transportasi Udara	Insiden Siber	
5.	022.03. Ditjen Perhubungan Darat	4640. Penunjang Teknis Transportasi Darat / 4640.CBT. Prasarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi / 4640.CBT.005. Prasarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	[Pengembangan] Fitur dan Integrasi Terminal Online System	987,300,000
6.	022.03. Ditjen Perhubungan Darat	4640. Penunjang Teknis Transportasi Darat / 4640.CBT. Prasarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi / 4640.CBT.005. Prasarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	[Pengelolaan Operasional] Sistem MitraDarat	845,250,000
7.	022.03. Ditjen Perhubungan Darat	4640. Penunjang Teknis Transportasi Darat / 4640.CBT. Prasarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi / 4640.CBT.005. Prasarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	[Pengelolaan dan Pengembangan] Sistem Manajemen Armada Angkutan Jalan	1,442,400,000
8.	022.03. Ditjen Perhubungan Darat	4640. Penunjang Teknis Transportasi Darat / 4640.CBT. Prasarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi / 4640.CBT.005. Prasarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	Fleet Manajement System Operasional Angkutan Perkotaan dengan Skema BTS	30,785,682,000
9.	022.04. Ditjen Perhubungan Laut	4661. Penunjang Teknis Transportasi Laut / 4661.CDS. OM Prasarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi / 4661.CDS.001. OM Software	(Pengembangan) Aplikasi SEHATI – Bag. Organisasi dan Humas	6,484,065,000
10.	022.02. Inspektorat Jenderal	4665. Pengelolaan Sistem Informasi dan Teknologi Pengawasan / 4665.FAB. Sistem Informasi Pemerintahan / 4665.FAB.963. Layanan Data dan Informasi	(Pengembangan) Sistem Informasi Pengawasan	200,000,000
11.	022.05. Ditjen	4646. Keselamatan dan Keamanan Transportasi Udara	(Pengembangan) Sistem Perijinan	5,000,000,000

Catatan

Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan oleh **BsrE, BSSN** dan dapat diverifikasi keasliannya di **https://tte.kominfo.go.id/verifyPDF**

Balai Sertifikasi Elektronik

	Perhubungan Udara	/ 4646.CAN. Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi / 4646.CAN.001. Sarana Teknologi Informasi dan Komunikasi Transportasi Udara	Online beserta Pusat Keamanan Jaringan	
12.	022.13. Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek	4649. Pelayanan Transportasi Jabodetabek / 4649.CAN. Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi / 4649.CAN.001. Aplikasi TIK Bidang Angkutan	Digitalisasi Monitoring Distribusi Angkutan Barang Berbasis Truk di Wilayah Jabodetabek	1,200,000,000
13.	022.08. Ditjen Perkeretaapian	4602. Pengelolaan Sistem Informasi dan Teknologi Transportasi Perkeretaapian / 4602.FAB. Sistem Informasi Pemerintahan / 4602.FAB.001. Sistem Informasi	(Pengembangan) Portal Aplikasi Direktorat Jenderal Perkeretaapian	1,500,000,000
14.	022.12. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan	3996. Pendidikan Transportasi / 3996.DCB. Pelatihan Bidang Infrastruktur / 3996.DCB.011. Diklat Teknis Bidang Transportasi Laut	Modernisasi BLU	440,000,000
15.	022.04. Ditjen Perhubungan Laut	4658. Keselamatan dan Keamanan Transportasi Laut / 4658.CBT. Prasarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi / 4658.CBT.001. Software	(Pengembangan dan Penambahan Perangkat) Sistem Informasi SID Berbasis Smart Card	9,000,000,000

Catatan

Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan oleh **BsrE, BSSN** dan dapat diverifikasi keasliannya di **https://tte.kominfo.go.id/verifyPDF**

Balai Sertifikasi Elektronik

LAMPIRAN II
NOMOR : 485/DJAI/PR.01.01/05/2024
NOMOR : B/784/KT.03/2024
NOMOR : 07472/D1.11/05/2024
TANGGAL : 07 Mei 2024

HASIL REKOMENDASI EVALUASI ANGGARAN (*CLEARANCE*)
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

DAFTAR INFRASTRUKTUR YANG DIREKOMENDASIKAN UNTUK DILANJUTKAN

NO	UNIT KERJA	NAMA KEGIATAN/KRO/RO	INFRASTRUKTUR	ANGGARAN
1.	022.04. Ditjen Perhubungan Laut	4659. Pelayanan Transportasi Laut / 4659.CBT. Prasarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi / 4659.CBT.002. Hardware	Pengadaan Penguatan Infrastruktur Sistem Informasi Lalu Lintas Angkutan Laut	1,000,000,000
2.	022.03. Ditjen Perhubungan Darat	4640. Penunjang Teknis Transportasi Darat / 4640.CBT. Prasarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi / 4640.CBT.005. Prasarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	Pengadaan Perangkat Load Balancer Direktorat Jenderal Perhubungan Darat	7,894,930,000
3.	022.03. Ditjen Perhubungan Darat	4638. Pelayanan Transportasi Darat / 4638.CAC. Sarana Bidang Konektivitas Darat / 4638.CAC.028. Pengembangan Sistem Layanan Transportasi Darat	Pengadaan dan Pemasangan Perangkat Local Port Service (LPS) di Pelabuhan Penyeberangan Padang Bai - Lembar	11,060,040,000
4.	022.03. Ditjen Perhubungan Darat	4638. Pelayanan Transportasi Darat / 4638.CAC. Sarana Bidang Konektivitas Darat / 4638.CAC.028.	Pemeliharaan Local Port Service	974,370,000

Catatan

Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan oleh **BsrE, BSSN** dan dapat diverifikasi keasliannya di **https://tte.kominfo.go.id/verifyPDF**

Balai Sertifikasi Elektronik

		Pengembangan Sistem Layanan Transportasi Darat	(LPS) Merak dan Bakauheni	
5.	022.03. Ditjen Perhubungan Darat	4638. Pelayanan Transportasi Darat / 4638.CAC. Sarana Bidang Konektivitas Darat / 4638.CAC.028. Pengembangan Sistem Layanan Transportasi Darat	Pengadaan dan Pemasangan Peralatan Local Port Service pada Pelabuhan Penyeberangan Jangkar	3,253,000,000
6.	022.03. Ditjen Perhubungan Darat	4638. Pelayanan Transportasi Darat / 4638.CAC. Sarana Bidang Konektivitas Darat / 4638.CAC.028. Pengembangan Sistem Layanan Transportasi Darat	Pemeliharaan Peralatan Local Port Service Pelabuhan Ketapang dan Gilimanuk	717,636,000
7.	022.03. Ditjen Perhubungan Darat	4638. Pelayanan Transportasi Darat / 4638.CAC. Sarana Bidang Konektivitas Darat / 4638.CAC.028. Pengembangan Sistem Layanan Transportasi Darat	Pengadaan dan Pemasangan Local Port Service (LPS) Pelabuhan Penyeberangan Kariangau-Penajam	11,060,040,000
8.	022.03. Ditjen Perhubungan Darat	4638. Pelayanan Transportasi Darat / 4638.CAC. Sarana Bidang Konektivitas Darat / 4638.CAC.028. Pengembangan Sistem Layanan Transportasi Darat	Pengadaan dan Pemasangan Perangkat Local Port Service (LPS) Sensor Di Pelabuhan Penyeberangan Telaga Punggur - Tanjung Uban	7,627,920,000
9.	022.03. Ditjen Perhubungan Darat	4638. Pelayanan Transportasi Darat / 4638.CAC. Sarana Bidang Konektivitas Darat / 4638.CAC.028. Pengembangan Sistem Layanan Transportasi Darat	Pengadaan dan Pemasangan Perangkat Local Port Service (LPS) Di Pelabuhan Penyeberangan Kayangan - Pototano	11,655,000,000
10.	022.03. Ditjen Perhubungan Darat	4638. Pelayanan Transportasi Darat / 4638.CAC. Sarana Bidang Konektivitas Darat / 4638.CAC.028. Pengembangan Sistem Layanan Transportasi Darat	Pengadaan dan Pemasangan Local Port Service (LPS) di 2 Titik Lokasi di Pelabuhan Penyeberangan Bolok	5,856,360,000

Catatan

Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan oleh **BsrE, BSSN** dan dapat diverifikasi keasliannya di **https://tte.kominfo.go.id/verifyPDF**

Balai Sertifikasi Elektronik

11.	022.03. Ditjen Perhubungan Darat	4638. Pelayanan Transportasi Darat / 4638.CAC. Sarana Bidang Konektivitas Darat / 4638.CAC.028. Pengembangan Sistem Layanan Transportasi Darat	Pengadaan dan Pemasangan Perangkat Local Port Service (LPS) Di Pelabuhan Penyeberangan Bajoe - Kolaka	8,855,850,000
12.	022.03. Ditjen Perhubungan Darat	4638. Pelayanan Transportasi Darat / 4638.CAC. Sarana Bidang Konektivitas Darat / 4638.CAC.028. Pengembangan Sistem Layanan Transportasi Darat	Pengadaan dan Pemasangan Perangkat Local Port Service (LPS) di Pelabuhan Penyeberangan Tanjung Api Api - Tanjung Kalian	11,395,260,000
13.	022.04. Ditjen Perhubungan Laut	4658. Keselamatan dan Keamanan Transportasi Laut / 4658.CBT. Prasarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi / 4658.CBT.002. Hardware	(Pengembangan dan Penambahan Perangkat) Sistem Informasi SID Berbasis Smart Card	9,000,000,000
14.	022.04. Ditjen Perhubungan Laut	4658. Keselamatan dan Keamanan Transportasi Laut / 4658.CBT. Prasarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi / 4658.CBT.002. Hardware	(Pengembangan dan Penambahan Perangkat) Sistem Informasi SID Berbasis Smart Card	9,000,000,000

Catatan

Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan oleh **BsrE, BSSN** dan dapat diverifikasi keasliannya di **https://tte.kominfo.go.id/verifyPDF**

Balai Sertifikasi Elektronik

KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA RI
DIREKTORAT JENDERAL APLIKASI INFORMATIKA

KOMINFO

Indonesia Terhubung: Makin Digital, Makin Maju
Jl. Medan Merdeka Barat No. 9, Jakarta 10110 Telp./Fax. (021) 3503735 www.kominfo.go.id

Nomor : 485/DJAI/PR.01.01/05/2024 Jakarta, 07 Mei 2024
Nomor : B/784/KT.03/2024
Nomor : 07472/D1.11/05/2024
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Penyampaian Hasil Evaluasi Anggaran Belanja SPBE Tahun 2024 di Lingkup Kementerian Perhubungan

Yth.

1. **Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan;**
2. **Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan**

Di

Tempat

Menindaklanjuti Surat dari Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan Nomor TI.006/1/2/SKJ/2024 Tanggal 29 Januari 2024 Perihal Permohonan Clearance Tahap I Kegiatan TIK Tahun Anggaran 2024 di Lingkungan Kementerian Perhubungan, bersama ini kami sampaikan:

1. Evaluasi anggaran SPBE (*clearance*) Tahun Anggaran 2024 dilaksanakan dengan memperhatikan:
   a. Surat Bersama Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Menteri Keuangan sesuai Surat Bersama Menteri Keuangan dan Menteri PPN/ Bappenas No. S-287/MK.02/2023 dan B.292/M.PPN/D.8/PP.04.02/04/2023 tanggal 10 April 2023 terkait Pagu Indikatif Belanja Kementerian/Lembaga dan Dana Alokasi Khusus TA 2024;
   b. Surat Edaran Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Komunikasi dan Informatika, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 21 , Nomor 8 dan Nomor 1 Tahun 2023

Catatan
Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BsrE, BSSN dan dapat diverifikasi keasliannya di https://tte.kominfo.go.id/verifyPDF

Balai Sertifikasi Elektronik

tanggal 13 November 2023 tentang Mekanisme dan Persyaratan dalam Pelaksanaan Evaluasi Anggaran (Clearance) Belanja Instansi Pusat Tahun Anggaran 2024 dalam Kerangka Implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;

2. Kegiatan evaluasi (*clearance*) anggaran dimaksud telah dilaksanakan melalui pembahasan secara bersama dengan kementerian/lembaga anggota Tim Koordinasi SPBE dan SDI, melalui aplikasi https://ega-spbe.layanan.go.id, dengan memperhatikan:
   a. Prinsip pelaksanaan SPBE yakni efektivitas, keterpaduan, kesinambungan, efisiensi, akuntabilitas, interoperabilitas, dan keamanan;
   b. Kerangka kerja arsitektur SPBE, dalam rangka memastikan integrasi SPBE secara nasional antara lain terkait aspek pembangunan/pengadaan infrastruktur TIK baru atau aplikasi baru yang bersifat umum, pengadaan server baru dan/atau pusat data (*data center*) baru, (*data center/disaster recovery center*), dan penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE;
   c. Kementerian PPN/ Bappenas selaku Koordinator Satu Data Indonesia berfokus untuk reviu pemenuhan Prinsip Satu Data Indonesia dari aplikasi/ platform/belanja data dalam rangka mendorong keterpaduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian pembangunan pemerintah yang didukung oleh data yang akurat,mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses, dan dibagipakaikan, serta dikelola secara seksama, terintegrasi, dan berkelanjutan; dan menghindari terjadinya duplikasi data. Salah satu aspek keterpaduan dan efisiensi yang penting untuk diperkuat adalah belanja TIK Pemerintah khususnya belanja TIK yang menghasilkan data;
   d. Tugas dan fungsi Kementerian PAN-RB dan Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk Belanja Aplikasi dan Infrastruktur, dan Kementerian PPN/ Bappenas untuk Belanja Data;

Rekomendasi dari hasil evaluasi digunakan sebagai bahan pertimbangan rencana pembangunan/pengadaan/pemeliharaan infrastruktur TIK atau aplikasi, pengadaan server, pengadaan pusat data, pengembangan/*upgrade* infrastruktur

Catatan

Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BsrE, BSSN dan dapat diverifikasi keasliannya di https://tte.kominfo.go.id/verifyPDF

Balai Sertifikasi Elektronik

TIK, kegiatan pendataan yang sudah ada di lingkungan Kementerian Perhubungan.

3. Berdasarkan hal-hal tersebut diatas disampaikan, rekomendasi Anggaran Belanja TA 2024 terkait SPBE untuk Kementerian Perhubungan sebagai berikut:
   a. Pembangunan, pengembangan, dan/atau pemeliharaan aplikasi yang direkomendasikan dapat dilanjutkan sebagaimana tertera pada lampiran I surat ini;
   b. Pembangunan, pengembangan, dan/atau pemeliharaan infrastruktur TIK yang direkomendasikan dapat dilanjutkan sebagaimana tertera pada lampiran II surat ini;
   c. Untuk pembangunan/pengembangan aplikasi dan infrastruktur TIK, Kementerian Perhubungan agar melakukan:
      1. Penerapan integrasi proses bisnis antar unit kerja di dalam pemanfaatan aplikasi, sehingga dapat menjadi layanan terintegrasi di lingkungan Kementerian Perhubungan sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangan instansi yang selaras dengan arsitektur SPBE.
      2. Koordinasi dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika dalam rangka pemanfaatan infrastruktur TIK berbagi pakai berupa *Government Cloud* dan pemanfaatan Pusat Data Nasional (PDN), serta melakukan migrasi secara bertahap, dimulai dengan pemanfaatan sebagai *backup system* dan fungsi *system development* dari layanan digital Kementerian Perhubungan saat ini. Selanjutnya mengusulkan anggaran dan menyiapkan sumber daya yang diperlukan, untuk pelaksanaan pemanfaatan infrastruktur TIK dimaksud;
      3. Koordinasi dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika dalam rangka pemanfaatan layanan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah di Tingkat Nasional;
      4. Koordinasi dengan Badan Siber dan Sandi Negara dalam rangka pelaksanaan aspek keamanan informasi selama proses pengembangan infrastruktur TIK, hingga layanan digital beroperasi;
      5. Penerapan integrasi/interoperabilitas data, agar data pada pembangunan dan pengembangan aplikasi dapat dibagipakaikan antar unit kerja dan antar kementerian/lembaga dan pemerintah daerah, untuk mewujudkan

Catatan
Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BsrE, BSSN dan dapat diverifikasi keasliannya di https://tte.kominfo.go.id/verifyPDF
Balai Sertifikasi Elektronik

Satu Data di lingkup Kementerian Perhubungan dan menjadi bagian dari Satu Data Indonesia;

6. Koordinasi dengan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Bappenas dalam rangka pemenuhan Prinsip Satu Data Indonesia dan penyesuaian Referensi Arsitektur Data dan Informasi untuk kesesuaian RAD dengan tujuan Pemanfaatan Data serta selaras dengan kewenangan instansi sebagai sumber data dan pengolah data;

Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka kami sampaikan permohonan kepada Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan untuk selanjutnya memperhatikan hasil rekomendasi kepada Kementerian Perhubungan, agar dapat memberikan persetujuan mata anggaran untuk kegiatan yang direkomendasikan sebagaimana yang dimaksud pada angka 3. Rincian rekomendasi dapat diakses melalui aplikasi https://ega-spbe.layanan.go.id.

Demikian surat ini disampaikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana	Direktur Jenderal Aplikasi Informatika	Deputi Bidang Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan
Ditandatangani secara elektronik oleh Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana Nanik Murwati	Ditandatangani secara elektronik oleh Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Semuel Abrijani Pangerapan	Ditandatangani secara elektronik oleh Deputi Bidang Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan Erwin Dimas

Tembusan Yth:

1. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
2. Menteri Komunikasi dan Informatika.
3. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional / Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

Catatan

Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE, BSSN dan dapat diverifikasi keasliannya di https://tte.kominfo.go.id/verifyPDF

Balai Sertifikasi Elektronik

LAMPIRAN I
NOMOR : 485/DJAI/PR.01.01/05/2024
NOMOR : B/784/KT.03/2024
NOMOR : 07472/D1.11/05/2024
TANGGAL : 07 Mei 2024

HASIL REKOMENDASI EVALUASI ANGGARAN (*CLEARANCE*)
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

DAFTAR APLIKASI YANG DIREKOMENDASIKAN UNTUK DILANJUTKAN

NO	UNIT KERJA	NAMA KEGIATAN/KRO/RO	APLIKASI	ANGGARAN
1.	022.13. Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek	4649. Pelayanan Transportasi Jabodetabek / 4649.CAN. Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi / 4649.CAN.003. Aplikasi TIK Bidang Intelligent Transport Systems (ITS)	(Pengembangan) Aplikasi Peta Interaktif	197,000,000
2.	022.13. Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek	4649. Pelayanan Transportasi Jabodetabek / 4649.CAN. Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi / 4649.CAN.003. Aplikasi TIK Bidang Intelligent Transport Systems (ITS)	(Pengembangan) Aplikasi Database Perlengkapan Jalan	198,000,000
3.	022.03. Ditjen Perhubungan Darat	4640. Penunjang Teknis Transportasi Darat / 4640.CBT. Prasarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi / 4640.CBT.005. Prasarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	[Peningkatan] Sistem Layanan Bukti Lulus Uji Elektronik	1,213,800,000
4.	022.05. Ditjen Perhubungan Udara	4646. Keselamatan dan Keamanan Transportasi Udara / 4646.CAN. Sarana Bidang Teknologi Informasi dan	(Pengadaan) Aplikasi Sistem Pelaporan Penyebaran Informasi	200,000,000

Catatan

Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BsrE, BSSN dan dapat diverifikasi keasliannya di https://tte.kominfo.go.id/verifyPDF

Balai Sertifikasi Elektronik

		Komunikasi / 4646.CAN.001. Sarana Teknologi Informasi dan Komunikasi Transportasi Udara	Insiden Siber	
5.	022.03. Ditjen Perhubungan Darat	4640. Penunjang Teknis Transportasi Darat / 4640.CBT. Prasarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi / 4640.CBT.005. Prasarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	[Pengembangan] Fitur dan Integrasi Terminal Online System	987,300,000
6.	022.03. Ditjen Perhubungan Darat	4640. Penunjang Teknis Transportasi Darat / 4640.CBT. Prasarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi / 4640.CBT.005. Prasarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	[Pengelolaan Operasional] Sistem MitraDarat	845,250,000
7.	022.03. Ditjen Perhubungan Darat	4640. Penunjang Teknis Transportasi Darat / 4640.CBT. Prasarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi / 4640.CBT.005. Prasarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	[Pengelolaan dan Pengembangan] Sistem Manajemen Armada Angkutan Jalan	1,442,400,000
8.	022.03. Ditjen Perhubungan Darat	4640. Penunjang Teknis Transportasi Darat / 4640.CBT. Prasarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi / 4640.CBT.005. Prasarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	Fleet Manajement System Operasional Angkutan Perkotaan dengan Skema BTS	30,785,682,000
9.	022.04. Ditjen Perhubungan Laut	4661. Penunjang Teknis Transportasi Laut / 4661.CDS. OM Prasarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi / 4661.CDS.001. OM Software	(Pengembangan) Aplikasi SEHATI – Bag. Organisasi dan Humas	6,484,065,000
10.	022.02. Inspektorat Jenderal	4665. Pengelolaan Sistem Informasi dan Teknologi Pengawasan / 4665.FAB. Sistem Informasi Pemerintahan / 4665.FAB.963. Layanan Data dan Informasi	(Pengembangan) Sistem Informasi Pengawasan	200,000,000
11.	022.05. Ditjen	4646. Keselamatan dan Keamanan Transportasi Udara	(Pengembangan) Sistem Perijinan	5,000,000,000

Catatan

Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BsrE, BSSN dan dapat diverifikasi keasliannya di https://tte.kominfo.go.id/verifyPDF

Balai Sertifikasi Elektronik

	Perhubungan Udara	/ 4646.CAN. Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi / 4646.CAN.001. Sarana Teknologi Informasi dan Komunikasi Transportasi Udara	Online beserta Pusat Keamanan Jaringan	
12.	022.13. Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek	4649. Pelayanan Transportasi Jabodetabek / 4649.CAN. Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi / 4649.CAN.001. Aplikasi TIK Bidang Angkutan	Digitalisasi Monitoring Distribusi Angkutan Barang Berbasis Truk di Wilayah Jabodetabek	1,200,000,000
13.	022.08. Ditjen Perkeretaapian	4602. Pengelolaan Sistem Informasi dan Teknologi Transportasi Perkeretaapian / 4602.FAB. Sistem Informasi Pemerintahan / 4602.FAB.001. Sistem Informasi	(Pengembangan) Portal Aplikasi Direktorat Jenderal Perkeretaapian	1,500,000,000
14.	022.12. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan	3996. Pendidikan Transportasi / 3996.DCB. Pelatihan Bidang Infrastruktur / 3996.DCB.011. Diklat Teknis Bidang Transportasi Laut	Modernisasi BLU	440,000,000
15.	022.04. Ditjen Perhubungan Laut	4658. Keselamatan dan Keamanan Transportasi Laut / 4658.CBT. Prasarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi / 4658.CBT.001. Software	(Pengembangan dan Penambahan Perangkat) Sistem Informasi SID Berbasis Smart Card	9,000,000,000

Catatan

Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BsrE, BSSN dan dapat diverifikasi keasliannya di https://tte.kominfo.go.id/verifyPDF

Balai Sertifikasi Elektronik

LAMPIRAN II
NOMOR : 485/DJAI/PR.01.01/05/2024
NOMOR : B/784/KT.03/2024
NOMOR : 07472/D1.11/05/2024
TANGGAL : 07 Mei 2024

HASIL REKOMENDASI EVALUASI ANGGARAN (*CLEARANCE*)
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

DAFTAR INFRASTRUKTUR YANG DIREKOMENDASIKAN UNTUK DILANJUTKAN

NO	UNIT KERJA	NAMA KEGIATAN/KRO/RO	INFRASTRUKTUR	ANGGARAN
1.	022.04. Ditjen Perhubungan Laut	4659. Pelayanan Transportasi Laut / 4659.CBT. Prasarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi / 4659.CBT.002. Hardware	Pengadaan Penguatan Infrastruktur Sistem Informasi Lalu Lintas Angkutan Laut	1,000,000,000
2.	022.03. Ditjen Perhubungan Darat	4640. Penunjang Teknis Transportasi Darat / 4640.CBT. Prasarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi / 4640.CBT.005. Prasarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	Pengadaan Perangkat Load Balancer Direktorat Jenderal Perhubungan Darat	7,894,930,000
3.	022.03. Ditjen Perhubungan Darat	4638. Pelayanan Transportasi Darat / 4638.CAC. Sarana Bidang Konektivitas Darat / 4638.CAC.028. Pengembangan Sistem Layanan Transportasi Darat	Pengadaan dan Pemasangan Perangkat Local Port Service (LPS) di Pelabuhan Penyeberangan Padang Bai - Lembar	11,060,040,000
4.	022.03. Ditjen Perhubungan Darat	4638. Pelayanan Transportasi Darat / 4638.CAC. Sarana Bidang Konektivitas Darat / 4638.CAC.028.	Pemeliharaan Local Port Service	974,370,000

Catatan

Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BsrE, BSSN dan dapat diverifikasi keasliannya di https://tte.kominfo.go.id/verifyPDF

Balai Sertifikasi Elektronik

		Pengembangan Sistem Layanan Transportasi Darat	(LPS) Merak dan Bakauheni	
5.	022.03. Ditjen Perhubungan Darat	4638. Pelayanan Transportasi Darat / 4638.CAC. Sarana Bidang Konektivitas Darat / 4638.CAC.028. Pengembangan Sistem Layanan Transportasi Darat	Pengadaan dan Pemasangan Peralatan Local Port Service pada Pelabuhan Penyeberangan Jangkar	3,253,000,000
6.	022.03. Ditjen Perhubungan Darat	4638. Pelayanan Transportasi Darat / 4638.CAC. Sarana Bidang Konektivitas Darat / 4638.CAC.028. Pengembangan Sistem Layanan Transportasi Darat	Pemeliharaan Peralatan Local Port Service Pelabuhan Ketapang dan Gilimanuk	717,636,000
7.	022.03. Ditjen Perhubungan Darat	4638. Pelayanan Transportasi Darat / 4638.CAC. Sarana Bidang Konektivitas Darat / 4638.CAC.028. Pengembangan Sistem Layanan Transportasi Darat	Pengadaan dan Pemasangan Local Port Service (LPS) Pelabuhan Penyeberangan Kariangau-Penajam	11,060,040,000
8.	022.03. Ditjen Perhubungan Darat	4638. Pelayanan Transportasi Darat / 4638.CAC. Sarana Bidang Konektivitas Darat / 4638.CAC.028. Pengembangan Sistem Layanan Transportasi Darat	Pengadaan dan Pemasangan Perangkat Local Port Service (LPS) Sensor Di Pelabuhan Penyeberangan Telaga Punggur - Tanjung Uban	7,627,920,000
9.	022.03. Ditjen Perhubungan Darat	4638. Pelayanan Transportasi Darat / 4638.CAC. Sarana Bidang Konektivitas Darat / 4638.CAC.028. Pengembangan Sistem Layanan Transportasi Darat	Pengadaan dan Pemasangan Perangkat Local Port Service (LPS) Di Pelabuhan Penyeberangan Kayangan - Pototano	11,655,000,000
10.	022.03. Ditjen Perhubungan Darat	4638. Pelayanan Transportasi Darat / 4638.CAC. Sarana Bidang Konektivitas Darat / 4638.CAC.028. Pengembangan Sistem Layanan Transportasi Darat	Pengadaan dan Pemasangan Local Port Service (LPS) di 2 Titik Lokasi di Pelabuhan Penyeberangan Bolok	5,856,360,000

Catatan

Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BsrE, BSSN dan dapat diverifikasi keasliannya di https://tte.kominfo.go.id/verifyPDF

Balai Sertifikasi Elektronik

11.	022.03. Ditjen Perhubungan Darat	4638. Pelayanan Transportasi Darat / 4638.CAC. Sarana Bidang Konektivitas Darat / 4638.CAC.028. Pengembangan Sistem Layanan Transportasi Darat	Pengadaan dan Pemasangan Perangkat Local Port Service (LPS) Di Pelabuhan Penyeberangan Bajoe - Kolaka	8,855,850,000
12.	022.03. Ditjen Perhubungan Darat	4638. Pelayanan Transportasi Darat / 4638.CAC. Sarana Bidang Konektivitas Darat / 4638.CAC.028. Pengembangan Sistem Layanan Transportasi Darat	Pengadaan dan Pemasangan Perangkat Local Port Service (LPS) di Pelabuhan Penyeberangan Tanjung Api Api - Tanjung Kalian	11,395,260,000
13.	022.04. Ditjen Perhubungan Laut	4658. Keselamatan dan Keamanan Transportasi Laut / 4658.CBT. Prasarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi / 4658.CBT.002. Hardware	(Pengembangan dan Penambahan Perangkat) Sistem Informasi SID Berbasis Smart Card	9,000,000,000
14.	022.04. Ditjen Perhubungan Laut	4658. Keselamatan dan Keamanan Transportasi Laut / 4658.CBT. Prasarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi / 4658.CBT.002. Hardware	(Pengembangan dan Penambahan Perangkat) Sistem Informasi SID Berbasis Smart Card	9,000,000,000

Catatan

Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BsrE, BSSN dan dapat diverifikasi keasliannya di https://tte.kominfo.go.id/verifyPDF

Balai Sertifikasi Elektronik

KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

Jalan Taman Suropati Nomor 2, Jakarta 10310
Telepon (+6221) 31936207, 3905650; Faksimile (+6221) 3145374
www.bappenas.go.id

Nomor : 485/DJAI/PR.01.01/05/2024 Jakarta, 07 Mei 2024
Nomor : B/784/KT.03/2024
Nomor : 07472/D1.11/05/2024
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Penyampaian Hasil Evaluasi Anggaran Belanja SPBE Tahun 2024 di Lingkup Kementerian Perhubungan

Yth.

1. **Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan;**
2. **Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan**

Di

Tempat

Menindaklanjuti Surat dari Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan Nomor TI.006/1/2/SKJ/2024 Tanggal 29 Januari 2024 Perihal Permohonan Clearance Tahap I Kegiatan TIK Tahun Anggaran 2024 di Lingkungan Kementerian Perhubungan, bersama ini kami sampaikan:

1. Evaluasi anggaran SPBE (*clearance*) Tahun Anggaran 2024 dilaksanakan dengan memperhatikan:
   a. Surat Bersama Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Menteri Keuangan sesuai Surat Bersama Menteri Keuangan dan Menteri PPN/ Bappenas No. S-287/MK.02/2023 dan B.292/M.PPN/D.8/PP.04.02/04/2023 tanggal 10 April 2023 terkait Pagu Indikatif Belanja Kementerian/Lembaga dan Dana Alokasi Khusus TA 2024;
   b. Surat Edaran Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Komunikasi dan Informatika, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 21 , Nomor 8 dan Nomor 1 Tahun 2023

Catatan

Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan oleh **BsrE, BSSN** dan dapat diverifikasi keasliannya di **https://tte.kominfo.go.id/verifyPDF**

Balai Sertifikasi Elektronik

tanggal 13 November 2023 tentang Mekanisme dan Persyaratan dalam Pelaksanaan Evaluasi Anggaran (Clearance) Belanja Instansi Pusat Tahun Anggaran 2024 dalam Kerangka Implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;

2. Kegiatan evaluasi (*clearance*) anggaran dimaksud telah dilaksanakan melalui pembahasan secara bersama dengan kementerian/lembaga anggota Tim Koordinasi SPBE dan SDI, melalui aplikasi https://ega-spbe.layanan.go.id, dengan memperhatikan:
   a. Prinsip pelaksanaan SPBE yakni efektivitas, keterpaduan, kesinambungan, efisiensi, akuntabilitas, interoperabilitas, dan keamanan;
   b. Kerangka kerja arsitektur SPBE, dalam rangka memastikan integrasi SPBE secara nasional antara lain terkait aspek pembangunan/pengadaan infrastruktur TIK baru atau aplikasi baru yang bersifat umum, pengadaan server baru dan/atau pusat data (*data center*) baru, (*data center/disaster recovery center*), dan penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE;
   c. Kementerian PPN/ Bappenas selaku Koordinator Satu Data Indonesia berfokus untuk reviu pemenuhan Prinsip Satu Data Indonesia dari aplikasi/ platform/belanja data dalam rangka mendorong keterpaduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian pembangunan pemerintah yang didukung oleh data yang akurat,mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses, dan dibagipakaikan, serta dikelola secara seksama, terintegrasi, dan berkelanjutan; dan menghindari terjadinya duplikasi data. Salah satu aspek keterpaduan dan efisiensi yang penting untuk diperkuat adalah belanja TIK Pemerintah khususnya belanja TIK yang menghasilkan data;
   d. Tugas dan fungsi Kementerian PAN-RB dan Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk Belanja Aplikasi dan Infrastruktur, dan Kementerian PPN/ Bappenas untuk Belanja Data;

   Rekomendasi dari hasil evaluasi digunakan sebagai bahan pertimbangan rencana pembangunan/pengadaan/pemeliharaan infrastruktur TIK atau aplikasi, pengadaan server, pengadaan pusat data, pengembangan/*upgrade* infrastruktur

Catatan

Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan oleh **BsrE, BSSN** dan dapat diverifikasi keasliannya di **https://tte.kominfo.go.id/verifyPDF**

Balai Sertifikasi Elektronik

TIK, kegiatan pendataan yang sudah ada di lingkungan Kementerian Perhubungan.

3. Berdasarkan hal-hal tersebut diatas disampaikan, rekomendasi Anggaran Belanja TA 2024 terkait SPBE untuk Kementerian Perhubungan sebagai berikut:
   a. Pembangunan, pengembangan, dan/atau pemeliharaan aplikasi yang direkomendasikan dapat dilanjutkan sebagaimana tertera pada lampiran I surat ini;
   b. Pembangunan, pengembangan, dan/atau pemeliharaan infrastruktur TIK yang direkomendasikan dapat dilanjutkan sebagaimana tertera pada lampiran II surat ini;
   c. Untuk pembangunan/pengembangan aplikasi dan infrastruktur TIK, Kementerian Perhubungan agar melakukan:
      1. Penerapan integrasi proses bisnis antar unit kerja di dalam pemanfaatan aplikasi, sehingga dapat menjadi layanan terintegrasi di lingkungan Kementerian Perhubungan sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangan instansi yang selaras dengan arsitektur SPBE.
      2. Koordinasi dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika dalam rangka pemanfaatan infrastruktur TIK berbagi pakai berupa *Government Cloud* dan pemanfaatan Pusat Data Nasional (PDN), serta melakukan migrasi secara bertahap, dimulai dengan pemanfaatan sebagai *backup system* dan fungsi *system development* dari layanan digital Kementerian Perhubungan saat ini. Selanjutnya mengusulkan anggaran dan menyiapkan sumber daya yang diperlukan, untuk pelaksanaan pemanfaatan infrastruktur TIK dimaksud;
      3. Koordinasi dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika dalam rangka pemanfaatan layanan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah di Tingkat Nasional;
      4. Koordinasi dengan Badan Siber dan Sandi Negara dalam rangka pelaksanaan aspek keamanan informasi selama proses pengembangan infrastruktur TIK, hingga layanan digital beroperasi;
      5. Penerapan integrasi/interoperabilitas data, agar data pada pembangunan dan pengembangan aplikasi dapat dibagipakaikan antar unit kerja dan antar kementerian/lembaga dan pemerintah daerah, untuk mewujudkan

Catatan

Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan oleh **BsrE, BSSN** dan dapat diverifikasi keasliannya di **https://tte.kominfo.go.id/verifyPDF**

Balai Sertifikasi Elektronik

Satu Data di lingkup Kementerian Perhubungan dan menjadi bagian dari Satu Data Indonesia;

6. Koordinasi dengan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Bappenas dalam rangka pemenuhan Prinsip Satu Data Indonesia dan penyesuaian Referensi Arsitektur Data dan Informasi untuk kesesuaian RAD dengan tujuan Pemanfaatan Data serta selaras dengan kewenangan instansi sebagai sumber data dan pengolah data;

Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka kami sampaikan permohonan kepada Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan untuk selanjutnya memperhatikan hasil rekomendasi kepada Kementerian Perhubungan, agar dapat memberikan persetujuan mata anggaran untuk kegiatan yang direkomendasikan sebagaimana yang dimaksud pada angka 3. Rincian rekomendasi dapat diakses melalui aplikasi https://ega-spbe.layanan.go.id.

Demikian surat ini disampaikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana	Direktur Jenderal Aplikasi Informatika	Deputi Bidang Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan
Ditandatangani secara elektronik oleh Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana	Ditandatangani secara elektronik oleh Direktur Jendral Aplikasi Informatika	Ditandatangani secara elektronik oleh Deputi Bidang Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan
Nanik Murwati	Semuel Abrijani Pangerapan	Erwin Olmas

Tembusan Yth:

1. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
2. Menteri Komunikasi dan Informatika.
3. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional / Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

Catatan

Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan oleh **BsrE, BSSN** dan dapat diverifikasi keasliannya di **https://tte.kominfo.go.id/verifyPDF**

Balai Sertifikasi Elektronik

LAMPIRAN I
NOMOR : 485/DJAI/PR.01.01/05/2024
NOMOR : B/784/KT.03/2024
NOMOR : 07472/D1.11/05/2024
TANGGAL : 07 Mei 2024

HASIL REKOMENDASI EVALUASI ANGGARAN (*CLEARANCE*)
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

DAFTAR APLIKASI YANG DIREKOMENDASIKAN UNTUK DILANJUTKAN

NO	UNIT KERJA	NAMA KEGIATAN/KRO/RO	APLIKASI	ANGGARAN
1.	022.13. Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek	4649. Pelayanan Transportasi Jabodetabek / 4649.CAN. Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi / 4649.CAN.003. Aplikasi TIK Bidang Intelligent Transport Systems (ITS)	(Pengembangan) Aplikasi Peta Interaktif	197,000,000
2.	022.13. Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek	4649. Pelayanan Transportasi Jabodetabek / 4649.CAN. Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi / 4649.CAN.003. Aplikasi TIK Bidang Intelligent Transport Systems (ITS)	(Pengembangan) Aplikasi Database Perlengkapan Jalan	198,000,000
3.	022.03. Ditjen Perhubungan Darat	4640. Penunjang Teknis Transportasi Darat / 4640.CBT. Prasarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi / 4640.CBT.005. Prasarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	[Peningkatan] Sistem Layanan Bukti Lulus Uji Elektronik	1,213,800,000
4.	022.05. Ditjen Perhubungan Udara	4646. Keselamatan dan Keamanan Transportasi Udara / 4646.CAN. Sarana Bidang Teknologi Informasi dan	(Pengadaan) Aplikasi Sistem Pelaporan Penyebaran Informasi	200,000,000

Catatan

Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan oleh **BsrE, BSSN** dan dapat diverifikasi keasliannya di **https://tte.kominfo.go.id/verifyPDF**

Balai Sertifikasi Elektronik

		Komunikasi / 4646.CAN.001. Sarana Teknologi Informasi dan Komunikasi Transportasi Udara	Insiden Siber	
5.	022.03. Ditjen Perhubungan Darat	4640. Penunjang Teknis Transportasi Darat / 4640.CBT. Prasarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi / 4640.CBT.005. Prasarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	[Pengembangan] Fitur dan Integrasi Terminal Online System	987,300,000
6.	022.03. Ditjen Perhubungan Darat	4640. Penunjang Teknis Transportasi Darat / 4640.CBT. Prasarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi / 4640.CBT.005. Prasarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	[Pengelolaan Operasional] Sistem MitraDarat	845,250,000
7.	022.03. Ditjen Perhubungan Darat	4640. Penunjang Teknis Transportasi Darat / 4640.CBT. Prasarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi / 4640.CBT.005. Prasarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	[Pengelolaan dan Pengembangan] Sistem Manajemen Armada Angkutan Jalan	1,442,400,000
8.	022.03. Ditjen Perhubungan Darat	4640. Penunjang Teknis Transportasi Darat / 4640.CBT. Prasarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi / 4640.CBT.005. Prasarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	Fleet Manajement System Operasional Angkutan Perkotaan dengan Skema BTS	30,785,682,000
9.	022.04. Ditjen Perhubungan Laut	4661. Penunjang Teknis Transportasi Laut / 4661.CDS. OM Prasarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi / 4661.CDS.001. OM Software	(Pengembangan) Aplikasi SEHATI – Bag. Organisasi dan Humas	6,484,065,000
10.	022.02. Inspektorat Jenderal	4665. Pengelolaan Sistem Informasi dan Teknologi Pengawasan / 4665.FAB. Sistem Informasi Pemerintahan / 4665.FAB.963. Layanan Data dan Informasi	(Pengembangan) Sistem Informasi Pengawasan	200,000,000
11.	022.05. Ditjen	4646. Keselamatan dan Keamanan Transportasi Udara	(Pengembangan) Sistem Perijinan	5,000,000,000

Catatan

Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan oleh **BsrE, BSSN** dan dapat diverifikasi keasliannya di **https://tte.kominfo.go.id/verifyPDF**

Balai Sertifikasi Elektronik

	Perhubungan Udara	/ 4646.CAN. Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi / 4646.CAN.001. Sarana Teknologi Informasi dan Komunikasi Transportasi Udara	Online beserta Pusat Keamanan Jaringan	
12.	022.13. Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek	4649. Pelayanan Transportasi Jabodetabek / 4649.CAN. Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi / 4649.CAN.001. Aplikasi TIK Bidang Angkutan	Digitalisasi Monitoring Distribusi Angkutan Barang Berbasis Truk di Wilayah Jabodetabek	1,200,000,000
13.	022.08. Ditjen Perkeretaapian	4602. Pengelolaan Sistem Informasi dan Teknologi Transportasi Perkeretaapian / 4602.FAB. Sistem Informasi Pemerintahan / 4602.FAB.001. Sistem Informasi	(Pengembangan) Portal Aplikasi Direktorat Jenderal Perkeretaapian	1,500,000,000
14.	022.12. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan	3996. Pendidikan Transportasi / 3996.DCB. Pelatihan Bidang Infrastruktur / 3996.DCB.011. Diklat Teknis Bidang Transportasi Laut	Modernisasi BLU	440,000,000
15.	022.04. Ditjen Perhubungan Laut	4658. Keselamatan dan Keamanan Transportasi Laut / 4658.CBT. Prasarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi / 4658.CBT.001. Software	(Pengembangan dan Penambahan Perangkat) Sistem Informasi SID Berbasis Smart Card	9,000,000,000

Catatan

Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan oleh **BsrE, BSSN** dan dapat diverifikasi keasliannya di **https://tte.kominfo.go.id/verifyPDF**

Balai Sertifikasi Elektronik

LAMPIRAN II
NOMOR : 485/DJAI/PR.01.01/05/2024
NOMOR : B/784/KT.03/2024
NOMOR : 07472/D1.11/05/2024
TANGGAL : 07 Mei 2024

HASIL REKOMENDASI EVALUASI ANGGARAN (*CLEARANCE*)
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

DAFTAR INFRASTRUKTUR YANG DIREKOMENDASIKAN UNTUK DILANJUTKAN

NO	UNIT KERJA	NAMA KEGIATAN/KRO/RO	INFRASTRUKTUR	ANGGARAN
1.	022.04. Ditjen Perhubungan Laut	4659. Pelayanan Transportasi Laut / 4659.CBT. Prasarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi / 4659.CBT.002. Hardware	Pengadaan Penguatan Infrastruktur Sistem Informasi Lalu Lintas Angkutan Laut	1,000,000,000
2.	022.03. Ditjen Perhubungan Darat	4640. Penunjang Teknis Transportasi Darat / 4640.CBT. Prasarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi / 4640.CBT.005. Prasarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	Pengadaan Perangkat Load Balancer Direktorat Jenderal Perhubungan Darat	7,894,930,000
3.	022.03. Ditjen Perhubungan Darat	4638. Pelayanan Transportasi Darat / 4638.CAC. Sarana Bidang Konektivitas Darat / 4638.CAC.028. Pengembangan Sistem Layanan Transportasi Darat	Pengadaan dan Pemasangan Perangkat Local Port Service (LPS) di Pelabuhan Penyeberangan Padang Bai - Lembar	11,060,040,000
4.	022.03. Ditjen Perhubungan Darat	4638. Pelayanan Transportasi Darat / 4638.CAC. Sarana Bidang Konektivitas Darat / 4638.CAC.028.	Pemeliharaan Local Port Service	974,370,000

Catatan

Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan oleh **BsrE, BSSN** dan dapat diverifikasi keasllannya di **https://tte.kominfo.go.id/verifyPDF**

Balai Sertifikasi Elektronik

		Pengembangan Sistem Layanan Transportasi Darat	(LPS) Merak dan Bakauheni	
5.	022.03. Ditjen Perhubungan Darat	4638. Pelayanan Transportasi Darat / 4638.CAC. Sarana Bidang Konektivitas Darat / 4638.CAC.028. Pengembangan Sistem Layanan Transportasi Darat	Pengadaan dan Pemasangan Peralatan Local Port Service pada Pelabuhan Penyeberangan Jangkar	3,253,000,000
6.	022.03. Ditjen Perhubungan Darat	4638. Pelayanan Transportasi Darat / 4638.CAC. Sarana Bidang Konektivitas Darat / 4638.CAC.028. Pengembangan Sistem Layanan Transportasi Darat	Pemeliharaan Peralatan Local Port Service Pelabuhan Ketapang dan Gilimanuk	717,636,000
7.	022.03. Ditjen Perhubungan Darat	4638. Pelayanan Transportasi Darat / 4638.CAC. Sarana Bidang Konektivitas Darat / 4638.CAC.028. Pengembangan Sistem Layanan Transportasi Darat	Pengadaan dan Pemasangan Local Port Service (LPS) Pelabuhan Penyeberangan Kariangau-Penajam	11,060,040,000
8.	022.03. Ditjen Perhubungan Darat	4638. Pelayanan Transportasi Darat / 4638.CAC. Sarana Bidang Konektivitas Darat / 4638.CAC.028. Pengembangan Sistem Layanan Transportasi Darat	Pengadaan dan Pemasangan Perangkat Local Port Service (LPS) Sensor Di Pelabuhan Penyeberangan Telaga Punggur - Tanjung Uban	7,627,920,000
9.	022.03. Ditjen Perhubungan Darat	4638. Pelayanan Transportasi Darat / 4638.CAC. Sarana Bidang Konektivitas Darat / 4638.CAC.028. Pengembangan Sistem Layanan Transportasi Darat	Pengadaan dan Pemasangan Perangkat Local Port Service (LPS) Di Pelabuhan Penyeberangan Kayangan - Pototano	11,655,000,000
10.	022.03. Ditjen Perhubungan Darat	4638. Pelayanan Transportasi Darat / 4638.CAC. Sarana Bidang Konektivitas Darat / 4638.CAC.028. Pengembangan Sistem Layanan Transportasi Darat	Pengadaan dan Pemasangan Local Port Service (LPS) di 2 Titik Lokasi di Pelabuhan Penyeberangan Bolok	5,856,360,000

Catatan

Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan oleh **BsrE, BSSN** dan dapat diverifikasi keasliannya di **https://tte.kominfo.go.id/verifyPDF**

Balai Sertifikasi Elektronik

11.	022.03. Ditjen Perhubungan Darat	4638. Pelayanan Transportasi Darat / 4638.CAC. Sarana Bidang Konektivitas Darat / 4638.CAC.028. Pengembangan Sistem Layanan Transportasi Darat	Pengadaan dan Pemasangan Perangkat Local Port Service (LPS) Di Pelabuhan Penyeberangan Bajoe - Kolaka	8.855,850,000
12.	022.03. Ditjen Perhubungan Darat	4638. Pelayanan Transportasi Darat / 4638.CAC. Sarana Bidang Konektivitas Darat / 4638.CAC.028. Pengembangan Sistem Layanan Transportasi Darat	Pengadaan dan Pemasangan Perangkat Local Port Service (LPS) di Pelabuhan Penyeberangan Tanjung Api Api - Tanjung Kalian	11.395,260,000
13.	022.04. Ditjen Perhubungan Laut	4658. Keselamatan dan Keamanan Transportasi Laut / 4658.CBT. Prasarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi / 4658.CBT.002. Hardware	(Pengembangan dan Penambahan Perangkat) Sistem Informasi SID Berbasis Smart Card	9.000,000,000
14.	022.04. Ditjen Perhubungan Laut	4658. Keselamatan dan Keamanan Transportasi Laut / 4658.CBT. Prasarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi / 4658.CBT.002. Hardware	(Pengembangan dan Penambahan Perangkat) Sistem Informasi SID Berbasis Smart Card	9,000,000,000

Catatan

Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan oleh **BsrE, BSSN** dan dapat diverifikasi keasliannya di **https://tte.kominfo.go.id/verifyPDF**

Balai Sertifikasi Elektronik

FORM MONITORING REKOMENDASI KEGIATAN TIK TAHUN 2024

PERIODE SEMESTER I 2024

SATUAN KERJA : KANTOR PUSAT DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

I.	**REKOMENDASI PUSTIKOMHUB TERHADAP KEGIATAN TIK**		
1.	Nama Kegiatan	:	Pengembangan Portal Aplikasi Direktorat Jenderal Perkeretaapian
2.	Nilai Pagu Anggaran	:	Rp. 1.500.000.000,-
3.	Waktu Pelaksanaan Kegiatan	:	9 bulan atau 270 hari kalender
4.	Status Reviu	:	Dapat Dilaksanakan
5.	Catatan Rekomendasi	:	1. Diwajibkan mengacu pada Perpres nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan KM nomor 112 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Kementerian Perhubungan. 2. Dalam penyusunan kegiatan wajib mengacu pada KM nomor 222 tahun 2020 tentang Rencana Induk Teknologi Informasi dan Komunikasi di lingkungan Kementerian Perhubungan Tahun 2020-2024 sebagai data dukung utama. 3. Berpedoman pada Arsitektur TIK dan KM nomor 106 Tahun 2023 tentang Peta Rencana SPBE Kementerian Perhubungan. 4. Sesuai Peraturan Presiden nomor 39 tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (SDI) dan KM nomor 150 tahun 2021 tentang Tata Kelola Data di lingkungan Kementerian Perhubungan, agar memenuhi Prinsip Tata Kelola Data Kementerian Perhubungan sebagai penunjang Satu Data Indonesia sehingga pengusul kegiatan sebagai produsen data wajib menerapkan Prinsip Satu Data Indonesia (SDI) yang mencakup Standar Data dan Metadata, Kode Referensi/Data Induk serta Interoperabilitas guna mengintegrasikan data ke Pusdatin serta menyiapkan *web service* integrasi untuk dapat berbagi pakai. 5. Dalam proses pengembangan aplikasi harus menggunakan Sistem Operasi, *development tools* terkini dan memanfaatkan infrastruktur TIK berbagi pakai berupa *Government Cloud* atau Pusat Data Nasional (PDN). 6. Berpedoman pada prinsip SDLC KP nomor 536 Tahun 2016 tentang Panduan Teknis Penerapan *System Development Life Cycle* (SDLC) Sistem Informasi di lingkungan Kementerian Perhubungan dan KM nomor 107 Tahun 2023 tentang Kebijakan dan Standar Sistem

			Manajemen Keamanan Infromasi di lingkungan Kementerian Perhubungan, kegiatan tersebut wajib melakuakan *User Acceptance Test* (UAT), *System Integration Test* (SIT), *Vulnerability Assessment* (VA) dan *Penetration Testing* (Pentest). 7. Agar memperhatikan terkait Aset Tak Berwujud (ATB) dalam rangka tertib inventaris APBN. 8. Menerapkan standar biaya berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan KM nomor 6 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan dan Penetapan Harga Perkiraan Sendiri untuk Pengadaan Jasa Konsultasi Non Konstruksi di Lingkungan Kementerian Perhubungan.
II.	**REALISASI PELAKSANAAN KEGIATAN TIK**		
DAPAT DILAKSANAKAN			
1.	Nilai Kontrak	:	Rp. 1.319.179.500,-
2.	Nama Vendor	:	PT. METANOUVA INFROMATIKA
3.	Realisasi Waktu Pelaksanaan	:	15 Mei 2024 s.d 10 Desember 2024
4.	Teknologi Yang Digunakan	:	Bahasa Pemrograman : JavaScript Framework : Express JS 4.18.2 & React JS 18.0.2 Webserver : NGINX 1.24.0 Database : Postgre SQL 12.15 Sistem Operasi : Rocky Linux 9
5.	Tindak Lanjut Hasil Catatan Rekomendasi	:	1. Terkait dengan SPBE, pelaksanaan kegiatan telah mengacu pada Perpres Nomor 95 Tahun 2018 dan KM 112 Tahun 2022. 2. Ketentuan terkait RITIK Kemenhub telah digunakan dalam KAK sebagai acuan pelaksanaan kegaitan. 3. Dalam pelaksanaan kegiatan telah mengacu pada Arsitektur TIK dan KM nomor 106 Tahun 2023 tentang Peta Rencana SPBE Kementerian Perhubungan. 4. Dalam pelaksanaan kegiatan, terdapat integrasi data dengan sistem informasi lainnya sehingga menggunakan standar data, memenuhi kaidah interoperabilitas data termasuk menggunakan kode referensi/data induk. Selain itu, pelaksanaan kegiatan menggunakan web service untuk integrasi dari data master yang dihasilkan/diproduksi unit terkait untuk dapat berbagi pakai. 5. Pengembangan Portal Aplikasi Ditjen Perkeretaapian telah menggunakan teknologi *cloud* Alfresco, Sistem Operasi Rocky Linux versi terkini 9 dan didukung dengan teknologi bahasa pemrograman, *framework*,

	database versi terbaru sebagai bentuk peningkatan keamanan aplikasi. 6. Dalam pelaksanaan kegiatan sudah berkoordinasi dan berpedoman pada prinsip SDLC sesuai KP 536 Tahun 2016 diantaranya dalam proses integrasi dan penggunaan data center Kemenhub. Selanjutnya diakhir kegiatan Portal Aplikasi Ditjen Perkeretaapian akan dilakukan tahapan *User Acceptance Test* (UAT) dan *Penetration Testing* yang akan berkoordinasi dengan Pusdatin Perhubungan. 7. Pelaksanaan kegiatan memperhatikan pengelolaan terkait Aset Tak Berwujud bidang TIK. 8. Dalam pelaksanaan kegiatan telah mengacu pada standar biaya berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan KM nomor 6 Tahun 2023.
6.	Keselarasan/kesesuaian antara Rekomendasi Pusdatin Perhubungan dengan Realisasi Pelaksanaan Kegiatan TIK: ● Pengembangan Portal Aplikasi Direktorat Jenderal Perkeretaapian telah selaras dengan rekomendasi Pustikomhub, mengacu KM 222 Tahun 2020 tentang Rencana Induk Teknlogi Informasi dan Komunikasi di Lingkungan Kementerian Perhubungan tahun 2020-2024, Arsitektur TIK dan KM nomor 106 Tahun 2023 tentang Peta Rencana SPBE Kementerian Perhubungan, mendorong portal untuk implementasi kebijakan Satu Data bidang perkeretaapian termasuk berkoordinasi dengan Pusdatin Perhubungan untuk integrasi data (API) dan SSO Kemenhub/SSO Hubnet serta meningkatkan keamanan aplikasi. ● Progres pekerjaan pada Semester I tahun 2024 yang telah dilakukan antara lain : - Integrasi Portal Aplikasi Ditjen Perkeretaapian dengan SSO Kemenhub/Hubnet. - Pengembangan Modul Chat pada Portal Aplikasi Ditjen Perkeretaapian. - Penyusunan SOP Integrasi Portal Aplikasi Ditjen Perkeretaapian dengan aplikasi lainnya. - *Operation support* dan *maintenance issue*. - Peningkatan keamanan Portal Aplikasi Ditjen Perkeretaapian.
TIDAK DAPAT DILAKSANAKAN	
1.	Kondisi saat ini : -
TIDAK DAPAT DIBERIKAN REKOMENDASI	
1.	Kondisi saat ini : -

Koordinator Kelompok
Evalausi dan Pelaporan

ANDI GUNTUR ASAPA, ST, MT
Penata Tingkat I (III/d)
NIP 198407242007121001

FORM MONITORING REKOMENDASI KEGIATAN TIK TAHUN 2024

PERIODE SEMESTER I 2024

SATUAN KERJA : KANTOR PUSAT DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

I.	**REKOMENDASI PUSTIKOMHUB TERHADAP KEGIATAN TIK**		
1.	Nama Kegiatan	:	Pengelolaan Website Direktorat Jenderal Perkeretaapian
2.	Nilai Pagu Anggaran	:	Rp. 200.000.000,-
3.	Waktu Pelaksanaan Kegiatan	:	6 bulan atau 180 hari kalender
4.	Status Reviu	:	Dapat Dilaksanakan
5.	Catatan Rekomendasi	:	1. Diwajibkan mengacu pada Perpres nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan KM nomor 112 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Kementerian Perhubungan. 2. Dalam penyusunan kegiatan wajib mengacu pada KM nomor 222 tahun 2020 tentang Rencana Induk Teknologi Informasi dan Komunikasi di lingkungan Kementerian Perhubungan Tahun 2020-2024 sebagai data dukung utama. 3. Berpedoman pada Arsitektur TIK dan KM nomor 106 Tahun 2023 tentang Peta Rencana SPBE Kementerian Perhubungan. 4. Sesuai Peraturan Presiden nomor 39 tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (SDI) dan KM nomor 150 tahun 2021 tentang Tata Kelola Data di lingkungan Kementerian Perhubungan, agar memenuhi Prinsip Tata Kelola Data Kementerian Perhubungan sebagai penunjang Satu Data Indonesia sehingga pengusul kegiatan sebagai produsen data wajib menerapkan Prinsip Satu Data Indonesia (SDI) yang mencakup Standar Data dan Metadata, Kode Referensi/Data Induk serta Interoperabilitas guna mengintegrasikan data ke Pusdatin serta menyiapkan *web service* integrasi untuk dapat berbagi pakai. 5. Dalam proses pengembangan aplikasi harus menggunakan Siste,m Operasi, *development tools* terkini dan memanfaatkan infrastruktur TIK berbagi pakai berupa *Government Cloud* atau Pusat Data Nasional (PDN). 6. Berpedoman pada prinsip SDLC KP nomor 536 Tahun 2016 tentang Panduan Teknis Penerapan *System Development Life Cycle* (SDLC) Sistem Informasi di lingkungan Kementerian Perhubungan dan KM nomor 107 Tahun 2023 tentang Kebijakan dan Standar Sistem

			Manajemen Keamanan Infromasi di lingkungan Kementerian Perhubungan, kegiatan tersebut wajib melakuakan *User Acceptance Test* (UAT), *System Integration Test* (SIT), *Vulnerability Assessment* (VA) dan *Penetration Testing* (Pentest). 7. Agar memperhatikan terkait Aset Tak Berwujud (ATB) dalam rangka tertib inventaris APBN. 8. Menerapkan standar biaya berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan KM nomor 6 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan dan Penetapan Harga Perkiraan Sendiri untuk Pengadaan Jasa Konsultasi Non Konstruksi di Lingkungan Kementerian Perhubungan.
II.	**REALISASI PELAKSANAAN KEGIATAN TIK**		
DAPAT DILAKSANAKAN			
1.	Nilai Kontrak	:	Rp. 191.031.000,-
2.	Nama Vendor	:	CV. TORCHE INDONESIA
3.	Realisasi Waktu Pelaksanaan	:	15 Maret 2024 s.d 10 September 2024
4.	Teknologi Yang Digunakan	:	Bahasa Pemrograman : PHP 8.0. Framerwork : Yii2 Webserver : Apache 2.4.52 Database : MySQL 8.1 Sistem Operasi : Ubuntu 22
5.	Tindak Lanjut Hasil Catatan Rekomendasi	:	1. Terkait dengan SPBE, pelaksanaan kegiatan telah mengacu pada Perpres Nomor 95 Tahun 2018 dan KM 112 Tahun 2022. 2. Ketentuan terkait RITIK Kemenhub telah digunakan dalam KAK sebagai acuan pelaksanaan kegaitan. 3. Dalam pelaksanaan kegiatan telah mengacu pada Arsitektur TIK dan KM nomor 106 Tahun 2023 tentang Peta Rencana SPBE Kementerian Perhubungan. 4. Dalam pelaksanaan kegiatan, terdapat integrasi data dengan sistem informasi lainnya sehingga menggunakan standar data, memenuhi kaidah interoperabilitas data termasuk menggunakan kode referensi/data induk. Website Ditjen Perkeretaapian telah menyediakan API untuk integrasi/berbagi data. 5. Proses pengelolaan Website Ditjen Perkeretaapian telah menggunakan teknologi Sistem Operasi Ubuntu versi terkini 22 dan didukung dengan teknologi bahasa pemrograman, *framework*, *database* versi terbaru sebagai bentuk peningkatan keamanan aplikasi. 6. Dalam pelaksanaan kegiatan sudah berkoordinasi dan berpedoman pada prinsip SDLC sesuai KP 536 Tahun

	2016 diantaranya dalam proses integrasi dan penggunaan data center Kemenhub. Selanjutnya diakhir kegiatan Website Ditjen Perkeretaapian akan dilakukan tahapan *User Acceptance Test* (UAT) dan *Penetration Testing* yang akan berkoordinasi dengan Pusdatin Perhubungan. 7. Pelaksanaan kegiatan memperhatikan pengelolaan terkait Aset Tak Berwujud bidang TIK. 8. Dalam pelaksanaan kegiatan telah mengacu pada standar biaya berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan KM nomor 6 Tahun 2023.
6.	Keselarasan/kesesuaian antara Rekomendasi Pusdatin Perhubungan dengan Realisasi Pelaksanaan Kegiatan TIK : ● Pengelolaan Website Ditjen Perkeretaapian telah selaras dengan rekomendasi Pusdatin Perhubungan serta mengacu KM 222 Tahun 2020 tentang Rencana Induk Teknlogi Informasi dan Komunikasi di Lingkungan Kementerian Perhubungan tahun 2020-2024, Arsitektur TIK dan KM nomor 106 Tahun 2023 tentang Peta Rencana SPBE Kementerian Perhubungan. Pengembangan website merupakan sebagai media komunikasi publik secara resmi dengan juga berkoordinasi dengan Pusdatin Perhubungan terkait peningkatan keamanan sistem. ● Progres pekerjaan pada Semester I tahun 2024 yang telah dilakukan antara lain : - Integrasi Website Ditjen Perkeretaapian dengan SSO Kemenhub/Hubnet. - Recovery pasca insiden serangan *cyber.* - Memperbaiki bug dan penyempurnaan fitur pada Website Ditjen Perkeretaapian. - Progres dwibahasa terhadap konten Website Ditjen Perkeretaapian. - Menindaklanjuti hasil *Vulnerabillity Assesment* (VA). - Redesign tampilan halaman utama Website Ditjen Perkeretaapian.
TIDAK DAPAT DILAKSANAKAN	
1.	Kondisi saat ini : -
TIDAK DAPAT DIBERIKAN REKOMENDASI	
1.	Kondisi saat ini : -

Koordinator Kelompok
Evalausi dan Pelaporan

ANDI GUNTUR ASAPA, ST, MT
Penata Tingkat I (III/d)
NIP 198407242007121001

FORM MONITORING REKOMENDASI KEGIATAN TIK TAHUN 2024

PERIODE SEMESTER I 2024

SATUAN KERJA : KANTOR PUSAT DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

I.	**REKOMENDASI PUSTIKOMHUB TERHADAP KEGIATAN TIK**		
1.	Nama Kegiatan	:	Reviu *Roadmap* Teknologi Infromasi dan Komunikasi Direktorat Jenderal Perkeretaapian
2.	Nilai Pagu Anggaran	:	Rp. 1.000.000.000,-
3.	Waktu Pelaksanaan Kegiatan	:	7 bulan atau 280 hari kalender
4.	Status Reviu	:	Dapat Dilaksanakan
5.	Catatan Rekomendasi	:	1. Diwajibkan mengacu pada Perpres Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) dan KM 112 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Kementerian Perhubungan. 2. Dalam penyusunan kegiatan wajib mengacu pada KM 222 tahun 2020 tentang Rencana Induk Teknologi Informasi dan Komunikasi di lingkungan Kementerian Perhubungan Tahun 2020-2024 sebagai data dukung utama dalam kegaitan ini. 3. Berpedoman pada Arsitektur TIK dan KM nomor 106 Tahun 2023 tentang Peta Rencana SPBE Kementerian Perhubungan.
II.	**REALISASI PELAKSANAAN KEGIATAN TIK**		
	DAPAT DILAKSANAKAN		
1.	Nilai Kontrak	:	Rp. 794.316.000,-
2.	Nama Vendor	:	PT. TRI CIPTA INTERNASIONAL
3.	Realisasi Waktu Pelaksanaan	:	30 Mei 2024 s.d 25 Desember 2024
4.	Teknologi Yang Digunakan	:	-
5.	Tindak Lanjut Hasil Catatan Rekomendasi	:	1. Terkait dengan SPBE, pelaksanaan kegiatan telah mengacu pada Perpres Nomor 95 Tahun 2018 dan KM 112 Tahun 2022. 2. Ketentuan terkait RITIK Kemenhub telah digunakan dalam KAK sebagai acuan pelaksanaan kegaitan. 3. Reviu Roadmap TIK disusun mengacu/mendetilan dari Arsitektur TIK dan KM nomor 106 Tahun 2023 tentang Peta Rencana SPBE Kementerian Perhubungan.
6.	Keselarasan/kesesuaian antara Rekomendasi Pusdatin Perhubungan dengan Realisasi Pelaksanaan Kegiatan TIK :		

	● Penyusunan Reviu *Roadmap* Teknologi Infromasi dan Komunikasi Direktorat Jenderal Perkeretaapian sudah selaras dengan rekomendasi Pusdatin berpedoman pada Perpres 95 Tahun 2018, KM 112 Tahun 20222, RITIK Kemenhub 2020-2024 dan merupakan pendetilan dari Arsitektur TIK dan KM nomor 106 Tahun 2023 tentang Peta Rencana SPBE Kementerian Perhubungan. ● Progres pekerjaan pada Semester I tahun 2024 yang telah dilakukan antara lain : - Inventatis peraturan perundang-undangan terkait penyelenggaraan SPBE termasuk pengelolaan TIK di tingkat Nasional dan Kementerian Perhubungan. - Evaluasi awal dan gap analysis terkait kondisi dan kebutuhan TIK termasuk identifikasi potensi dan permasalahan penyelenggaraan SPBE untuk seluruh unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian berdasarkan dokumen dan wawancara dengan unit kerja. - Mengkaji ulang roadmap TIK dengan kondisi saat ini. - Melakukan benchmarking dengan mengundang Pusdatin Kementerian PUPT, PT.MRT Jakarta, PT. LRT Jabodebek, PT. KCIC, PT. Railink, PT. Angkasa Pura II. - Melakukan analisa kebutuhan pengembangan TIK, target arsitektur TIK.
TIDAK DAPAT DILAKSANAKAN	
1.	Kondisi saat ini : -
TIDAK DAPAT DIBERIKAN REKOMENDASI	
1.	Kondisi saat ini : -

Koordinator Kelompok
Evalausi dan Pelaporan

ANDI GUNTUR ASAPA, ST, MT
Penata Tingkat I (III/d)
NIP 198407242007121001

No. ST	:	KP.004/28/21/K1/DJKA/2024
Lokasi	:	Jakarta

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

LAPORAN

RAPAT KOORDINASI PEMANFAATAN DAN MONITORING PROGRES KEGIATAN TIK DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN SERTA PEMENUHAN DATA DUKUNG CAPAIAN SPBE DAN TIK KEMENTERIAN PERHUBUNGAN PERIODE TAHUN 2014-2024

DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

JUNI 2024

RAPAT KOORDINASI PEMANFAATAN DAN MONITORING PROGRES KEGIATAN TIK DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN SERTA PEMENUHAN DATA DUKUNG CAPAIAN SPBE DAN TIK KEMENTERIAN PERHUBUNGAN PERIODE TAHUN 2014-2024

A. DASAR PENUGASAN

1. Surat Undangan Sekretaris Direktorat Jenderal Perkeretaapian Nomor: TI.006/1/1/K1/DJKA/2024 tanggal 31 Mei 2024.
2. Surat Perintah Tugas Sekretaris Direktorat Jenderal Perkeretaapian Nomor: KP.004/28/21/K1/DJKA/2024 tanggal 5 Juni 2024.

B. PELAKSANAAN KEGIATAN

1. Tempat : Hotel Millennium Sirih Jakarta dan Aplikasi *Zoom Meetings*
2. Tanggal : Kamis s.d Jum'at / 6 s.d 7 Juni 2024
3. Peserta Rapat :
    a) Direktorat Tata Kelola Aplikasi Infromatika, Kementerian Kominfo (Narasumber);
    b) Pusat Data dan Teknologi Informasi Kementerian Perhubungan (Narasumber);
    c) Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api;
    d) Direktorat Prasarana Perkeretaapian;
    e) Direktorat Sarana Perkeretaapian;
    f) Direktorat Keselamatan Perkeretaapian;
    g) Bagian Keuangan, Setditjen Perkeretaapian;
    h) Bagian SDM dan Umum, Setditjen Perkeretaapian;
    i) Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Jakarta;
    j) Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Bandung;
    k) Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Semarang;
    l) Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Surabaya;
    m) Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Medan;
    n) Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Padang;
    o) Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Palembang;
    p) Balai Pengujian Perkeretaapian;

q) Balai Perawatan Perkeretaapian;
r) Balai Pengelola Kereta Api Ringan Sumatera Selatan;
s) Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan;
t) Satker Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perkeretaapian;
u) Pegawai Pranata Komputer di Lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapia;
v) Tim Pengelola Tim Direktorat Jenderal Perkeretaapian;
w) Tim Pengelola Website Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2024;
x) Tim Teknis Pengelola :
    a. Aplikasi Perizinan Penyelenggaraan Perkeretaapian;
    b. Aplikasi Sertifikasi Kelaikan Sarana Perkeretaapian;
    c. Aplikasi Penetapan Identitas Sarana Perkeretaapian;
    d. Aplikasi Sertifikasi kompetensi SDM Perkeretaapian
    e. Aplikasi Layanan BLU Balai Pengujian Perkeretaapian;
    f. Aplikasi Angkutan Motis Direktorat Jenderal Perkeretaapian;
    g. Aplikasi Posko Penyelenggaraan Angleb dan Nataru;
    h. Aplikasi Steaming CCTV di Stasiun;
    i. Aplikasi MOP5.

4. Kegiatan – kegiatan yang dilaksanakan sebagai berikut:
    a) Penjelasan narasumber terkait Kebijakan Reviu dan Clearance terkait Kegiatan TIK;
    b) Penjelasan narasumber terkait Arsitektur SPBE Kementerian Perhubungan serta Dukungan Strategi Penyederhanaan Aplikasi;
    c) Pembahasan Permintaan Data Capaian SPBE dan TIK Kementerian Perhubungan Periode Tahun 2014-2024 serta Pemenuhan Data Dukung Arsitektur SPBE;
    d) Pembahasan Pemanfaatan serta Monitoring Progres Kegiatan TIK Tahun 2022-2024;
    e) Koordinasi Pengelolaan Website Direktorat Jenderal Perkeretaapian;
    f) Pembahasan Rencana Pengembangan Portal Aplikasi Direktorat Jenderal Perkeretaapian sebagai Super Apps termasuk Integrasi Persetujuan Perizinan/Sertifikasi.
    g) Penutupan.

C. POKOK – POKOK PEMBAHASAN

1. Rapat ini diselenggarakan dalam rangka koordinasi pemanfaatan dan monitoring progres kegiatan TIK di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian serta pemenuhan data dukung capaian SPBE dan TIK Kementerian Perhubungan periode tahun 2014-2024.
2. **Sesi I Pemaparan oleh Narasumber Kominfo terkait Kebijakan Pelaksanaan Evaluasi Anggaran (*Clearance*) Belanja SPBE Kementerian/Lembaga, hal yang menjadi pembahasan antara lain :**
   a) Tahun ini merupakan tahun ke-4 pelaksanaan *clearance* kegiatan TIK Tahun Anggaran 2025, diharapkan dengan adanya *clearance* terciptanya keterpaduan Pembangunan SPBE di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah dengan mengacu pada Perpres 95 Tahun 2018.
   b) Hal yang melatarbelakangi adanya proses *clearance* belanja TIK yaitu :
      1) Belum adanya keterpaduan dalam perencanaan dan pengganggaran belanja TIK di Instansi Pemerintah. Perencanaan dan penggaran belanja TIK masih dilakukan masing-masing oleh unit kerja dan dapat berdampak adanya overlapping dengan belanja TIK dari unit kerja lain/instansi Pemerintah lainnya.
      2) Penyusunana rencana dan anggaran belanja TIK instansi pemerintah belum sepenuhnya diselaraskan dengan Arsitektur SPBE dan Peta Rencana SPBE isntansi pemerintah seta belum diselaraskan dengan kebijakan SPBE Nasional.
      3) Terdapat pengadaan infrastruktur TIK dan pengadaan aplikasi dilakukan masing-masing instansi pemerintah dan belum terpadu. Hal ini berdampak in-efisiensi anggaran belanja TIK instansi pemerintah, rendahnya utilisasi infrastruktur TIK dan aplikasi yang diadakan, duplikasi aplikasi yang dibangun/dikembangkan, tidak mudahnya dilakukan integrasi infrastruktur dan aplikasi yang dibangun antar instasi pemerintah.
      4) Belum optimalnya pemanfaatan infrastruktur SPBE Nasional (Pusat Data Nasional, Jaringan Infra Pemerintah, Sistem Penghubung Layanan Pemerintah).

5) Belum optimalnya pemanfaatan aplikasi umum SPBE oleh instansi pemerintah seperti pemanfaatan aplikasi umum SRIKANDI (aplikasi kearsipan dinamis).
6) Terdapat duplikasi data SPBE yang dihasilkan dari layanan yang diselenggarakan/aplikasi yang dibangun/dikembangkan dan data SPBE belum sesuai dengan standar data, metadata, kodereferensi data yang ditetapkan oleh Pembina Data Nasional. Hal ini berdampak tidak mudahnya untuk dilakukan interoperabilitas data antar instansi pemerintah.

c) Mengacu pada Surat Bersama Menteri Keuangan (S-346/MK.02/2024) dan Menteri PPN/Ka.Bappenas (B.201/D.8/PP.04.03/04/2024) perihal Pagu Indikatif Belanja Kementerian/Lembaga dan Dana Alokasi Khusus TA 2024, bahwa dalam rangaka mendukung SPBE, SDO, dan Program Digitalisasi Nasional maka kegiatan Pembangunan/pengadaan sistem IT baru atau aplikasi baru yang bersifat umum, pengadaan server baru da/atau pusat data baru, penyelenggaraan aplikasi khusus, survei, pendataan, pemetaan dan pengumpulan data dalam bentuk lainnya, pengolahan, produksi dan pembelian data harus mendapatkan rekomendasi (*clearance*) dari Kementerian yang membidangi pelaksanaan SPBE dan SDI.
d) Terdapat perbedaan kriteria kegiatan belanja TIK untuk *clearance* TA 2024 dengan 2025, untuk tahun anggaran 2025 sudah di kategorikan lebih spesifik menjadi :
1) Pembangunan/pengembangan, pemeliharaan, dan pengelolaan aplikasi SPBE;
2) Penyediaan, pengelolaan, dan pemeliharaan infrastruktur SPBE;
3) Pengadaan lainnya yang bersifat non teknis dalam rangka untuk penyusunan kebijakan, rekomendasi kebijakan, dan/atau dokumen strategis mendukung transformasi digital pemerintahan;
4) Pendataan (Sensus, survei, registrasi, kompilasi, produk administrasi), pemetaam, produksi, pembelian data dan pengumulan data dalam bentuk lainnya.

e) Jenis Belanja Infrastruktur yang perlu mendapatkan *clearance* antara lain :

1) Pembangunan baru, pengembangan, penambahan kapasitas dan/atau pemeliharaan Pusat Data (Data Center/DC) dan Pusat Pemulihan Bencana;
2) Penambahan Sewa Rak Colocation
3) Perpanjangan Sewa Rak Colocation
4) Pengadaan baru layanan komputasi awan
5) Perpanjangan operasional layanan komputasi awan
6) Penambahan kapasitas/resource layanan komputasi awan
7) Pengadaan baru dan/atau perpanjangan sewa lisensi, kecuali lisensi terkait kebutuhan perkantoran dan aplikasi multimedia/desain grafis
8) Pembangunan dan pengembangan pusat kendali dan/atau pusat komputasi
9) Pengadaan untuk penyediaan dan pengelolaan Jaringan Intra Kementerian/Lembaga
10) Pengadaan untuk penyediaan dan pengelolaan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah
11) Pengadaan layanan migrasi ke Pusat Data Nasional
12) Pengadaan jasa pengelolaan layanan (*managed service*) infrastruktur

f) Jenis Belanja Aplikasi yang perlu mendapatkan *clearance* antara lain :
1) Pembangunan dan/atau pengembangan Aplikasi Umum SPBE
2) Pembangunan dan/atau pengembangan aplikasi yang bersinggungan/sejenis dengan Aplikasi Umum yang telah ditetapkan
3) Pembangunan dan/atau pengembangan aplikasi yang bersinggungan/sejenis dengan Aplikasi Umum yang belum ditetapkan
4) Pembangunan dan/atau pengembangan aplikasi yang mendukung inisiatif strategis Arsitektur SPBE Nasional
5) Pembangunan dan/atau pengembangan aplikasi yang bersinggungan/sejenis dengan aplikasi yang mendukung inisiatif strategis Arsitektur SPBE Nasional
6) Pembangunan dan/atau pengembangan Aplikasi Khusus
7) Pengadaan jasa pengelolaan layanan (*managed service*) aplikasi

g) Jenis Belanja Data Statistika, Data Spasial, maupun data lainnya yang perlu mendapatkan *clearance* antara lain :

1) Pelaksanaan survei, registrasi/pendataan, dan kompilasi produk administrasi (kompromin)
2) Pelaksanaan kegiatan pemetaan atau produksi Data Geospasial
3) Aktivitas dalam rangka produksi/pengumpulan Data
4) Pembelian/sewa/perjanjian berbayar lain dalam rangka permintaan data kepada pihak lain

h) Jenis Belanja Pelaksanaan non teknis, rekomendasi kebijakan atau dokumen strategis sejenis yang perlu mendapatkan *clearance* antara lain :
1) Penyusunan Arsitektur SPBE Kementerian/Lembaga
2) Penyusunan Peta Rencana SPBE Kementerian/Lembaga
3) Penyusunan Dokumen Tata Kelola dan Manajemen TIK lainnya

i) Pengalokasian belanja TIK menggunakan KRO dan RO yang sesuai yaitu :
1) Data dan Informasi Publik (BMA/QMA)
2) Sarana dan Prasarana Bidang TIK (CAN/RAN/CBT/RBT)
3) OM Sarana dan Prasarana Bidang TIK (CCL/RCL/CDS/RDS)
4) Sistem Infromasi Pemerintahan (FAB/UAB)

j) Unsur Tata Kelola SPBE terdiri dari Rencana Induk SPBE Nasional, Arsitektur SPBE, Peta Rencana SPBE, Rencana dan Anggaran SPBE, Proses Bisnis, Layanan SPBE, Data dan Informasi, Aplikasi SPBE, Infrastruktur SPBE, dan Keamanan SPBE.

k) Arsitektur SPBE merupakan kerangka dasar yang mendeskripsikan integrasi proses bisnis, data dan infromasi, infrastruktur SPBE, aplikasi SPBE, dan keamanan SPBE untuk menghasilkan layanan SPBE yang terintegrasi. Arsitektur SPBE disusul untuk jangka waktu 5 tahun berdasarkan Rencana Induk SPBE Nasional dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional serta dilakukan reviu secara berkala.

l) Arsitektur SPBE terdiri dari 6 domain yaitu Arsitektur Proses Bisnis, Arsitektur Data dan Informasi, Arsitektur Infrastruktur, Arsitektur Aplikasi, Arsitektur Keamanan, dan Arsitektur Layanan.

m) Peta Rencana SPBE merupaka dokumen yang mendeskripsikan arah dan Langkah penyimpanan dan pelaksanaan SPBE yang terintegrasi dalam bentuk program dan/atau kegiatan SPBE Nasional. Peta Rencana SPBE disusun untuk jangka waktu 5 tahun berdasarkan arsitektur SPBE Nasional dan Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Nasional serta dilakukan reviu paruh waktu 2 tahun terakhir pelaksanaan atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

n) Ruang lingkup peta rencana SPBE terdiri dari tata Kelola SPBE, manajemen SPBE, layanan SPBE, infrastruktur SPBE, aplikasi SPBE, keamanan SPBE, dan audit TIK SPBE.

o) Sesi Diskusi :

1) Mengacu arahan Presiden terkait dengan SPBE Summit masih banyak aplikasi yang dibangun secara silo, tidak terintegrasi, dan/atau tidak diselesaikan. Terkait mengembangkan aplikasi yang ada diperkenankan sepanjang masih dalam kategori aplikasi khusus (mendukung tugas dan fungsi instansi pemerintah). Dipastikan kembali aplikasi tertuang pada dokumen arsitektur SPBE dan tidak redundan, duplikasi, *overlapping* baik pada satu instansi maupun dengan instansi lainnya, serta dibangun tidak sesuai dengan tugas dan fungsinya.
2) Jika instansi membangun suatu aplikasi yang sejenis tidak diperkenankan dikarenakan sebagaimana pada Peraturan Presiden SPBE menjelaskan bahwa pimpinan instansi harus mencegah atau menghentikan pembangunan dan atau pengembangan aplikasi sejenis.
3) Terkait belanja TIK yang tidak perlu tahapan *clearance* yaitu lisensi, multimedia, desian grafis, belanja alat pengolah data (sebagi contohlaptop, pc, dll), dan *bandwidth*. Namun walaupun tidak melalui tahapan *clearance,* tetap harus dilakukan reviu di internal instansi.
4) Sejauh ini belum ada larangan dalam menggunakan media baru untuk mendapatkan layanan baru akses internet sebagai contoh starlink.
5) Terkait isu TKDN biasanya kebijakan masing-masing instansi, unsur TKDN biasanya dipergunakan untuk belanja seperti peralatan laptop, pc, dan lainnya, sedangkan untuk server masih impor.
6) Terkait tanda daftar masih diusulkan di tahun 2025, hal tersebut merupakan amanat dari SPBE PP 71 bahwa setiap instansi pusat dalam membangun/mengembangkan aplikasinya harus mendaftarkan aplikasi/sistem informasinya. Hal tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 10 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Sistem Elektronik Instansi Penyelenggara Negara, untuk

melihat bahwa aplikasi yang dijalankan tersimpan di repositori Aplikasi SPBE Kominfo dan bisa menjadi bagian dari kominfo dalam hal monitoring dan evaluasi dalam rangka keterpaduan pembangunan aplikasi.

7) Misalkan kegiatan yang sudah mendapatkan clearance, namun pada pelaksanaannya anggarannya disesuaikan dengan lingkup pekerjaan diperkecil. Hal tersebut tidak diperkenankan, jika demikian harus clearance ulang.

3. **Sesi II Pemaparan oleh Narasumber Pusdatin Perhubungan terkait Penyederhanaan Aplikasi Kemenhub dan Pengisian Arsitektur SPBE Kementerian Perhubungan, hal yang menjadi pembahasan antara lain :**

a) Hal yang menjadi latar belakang penyederhanaan aplikasi Kementerian perhubungan yaitu adanya arahan Presiden dalam siding SPBE Summit pada tanggal 27 Mei 2024 bahwa :

1) Mulai tahun 2024 berhenti membuat platform atau aplikasi baru.
2) Penguatan *digital public infrastructure* dan transformasi terhadap *government technology (govtech).*
3) Dukungan terhadap Portal Nasional Terintegrasi (INA Digital).
4) Penyiapan ASN dengan kompetensi digital.
5) Sosialisasi terhadap upaya transformasi digital .
6) Integrasi, interoperabilitas, dan berbagi pakai data. Jangan ada sikap egosentris terkait kepemilikan data.

b) Adapun arahan Menteri Perhubungan dalam menindaklanjuti arahan Presiden dalam SPBE Summit, perlu ada penyederhanaan aplikasi di Kementerian Perhubungan yaitu dengan mekanisme penyederhanaan didiskusikan dengan sub sektor. BKT dan Pusdatin kolaborasi untuk pendalaman. Perlunya pemanfaatan data untuk penguatan pemantauan layanan sektor transportasi sebagai contoh Ditjen Hubdat (Perizinan dan Kelaikan Jalan), Ditjen Hubla (Tertib PNBP), Ditjen Hubud (Perizinan), Ditjen Perkeretaapian (Kelaikan dan Keselamatan).

c) Acuan/dasar hukum terkait penyederhanaan aplikasi yaitu adanya Surat Deputi V Kemenko Marves Nomor 166/D5/TI.00/III/2023 terkait moratorium pembuatan aplikasi baru di 7 Kementerian/Lembaga, penyederhanaan proses bisnis dan pemangkasan seluruh aplikasi layanan G2C

menjadi 1 aplikasi per K/L dan seluruh layanan G2B menjadi 1 aplikasi per K/L terintegrasi dengan OSS.

d) Regulasi terkait penyederhanaan aplikasi Kementerian Perhubungan terdapat pada Surat Edaran Sesien SE SKJ Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pembangunan dan Pengembangan SPBE Di Lingkungan Kementerian Perhubungan, prinsip surat edaran berisi Moratorium Pengembangan Aplikasi Baru, Pengembangan Layanan SPBE Berorientasi Kebutuhan Atas Data Dan Informasi, Penguatan Evaluasi, Peran Produsen, Berbagi pakai dan Interoperabilitas Data, Penyusunan Arsitektur SPBE (Oleh Wali Data Unit), Kewajiban Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Kemenhub (HUBNET), Penguatan Penerapan Satu Data Indonesia di Kementerian Perhubungan.

e) Klasifikasi aplikasi berdasarkan sasaran layanan HUBNET terbagi menjadi 4 yaitu :
   1) Government to Employee (G2E) : Layanan kepada ASN seperti i-Counting, Manajemen Personil Transportasi.
   2) Government to Government (G2G) : Layanan kepada Pemerintah seperti SPLP, SDI, GovTech (SRIKANDI, SAKTI, LPSE).
   3) Government to Business (G2B) : Layanan kepada Pelaku Usaha seperti OSS (Perizinan Berusaha Berbasis Risiko), Perizinan Berusaha, NLE, Sertifikasi, Penegakan Hukum.
   4) Government to Citizen (G2C) : Layanan kepada Masyarakat SEPERTI Prosedur Pendidikan BPSDMP Informasi Publik Pengaduan Masyarakat

f) Skema penyederhanaan aplikasi menggunakan SSO Kemenhub dan HUBNET sebagai berikut :

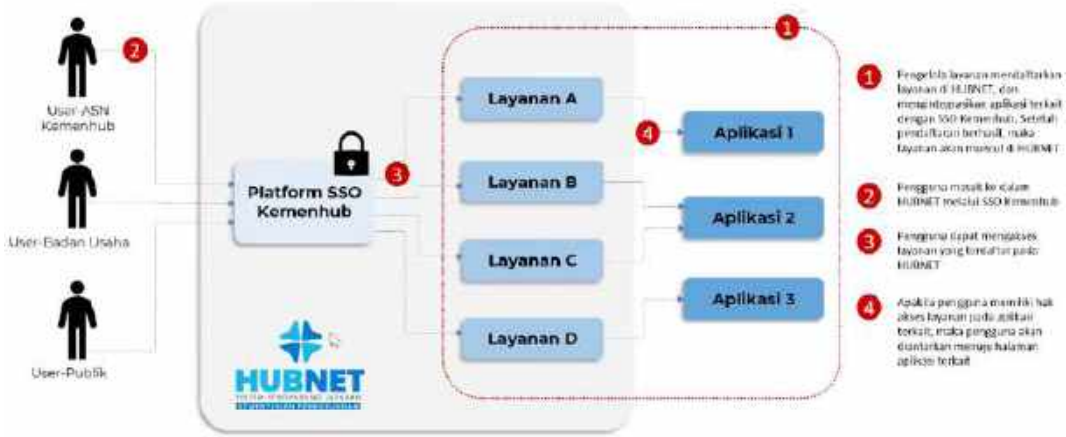

g) Jika dilingkungan Ditjen Perkeretaapian terdapat aplikasi yang telah rutin digunakan dapat didorong untuk diintegrasikan/diimpelementasikan dengan HUBNET Kemenhub.

h) Arahan Menteri Perhubungan agar ada penguatan pemantauan layanan internal maupun publik. Sebagai contoh ilustrasi penguatan pemantauan pada layanan transpotasi

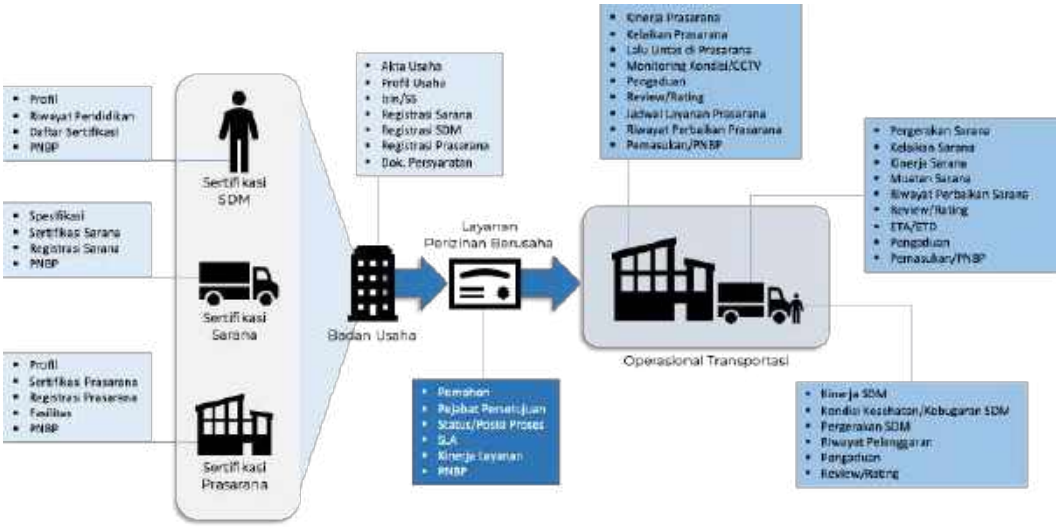

Penguatan pemantauan penting dilakukan untuk mengantisipasi munculnya pertanyaan yang timbul dari pimpinan.

i) Prinsip pengembangan aplikasi yaitu memperhatikan moratorium, integrasi aplikasi dengan aplikasi eksisting yang relevan, menambahkan modul baru pada aplikasi eksisting, dan perluasan pemanfaatan aplikasi untuk fungsi yang sama pada unit kerja lain.

j) Hal penting dalam pengembangan apliaksi yaitu meringankan beban kerja, mempercepat proses, pendekatan bersifat akomodatif dan memberi solusi bagi hambatan, tantangan, permasalahan, meningkatkan keterpaduan melalui jaminan integrasi dan interoperabilitas, prinsip *single source of truth* dan akuntabilitas, menghasilkan data / informasi / *insight* yang bermanfaat untuk berbagai lingkup pengguna (*multi beneficiaries*).

k) Saat ini sedang meningkatkan nilai kematangan evaluasi RB sebagaimana Permenpan 9 Tahun 2023 target tahun 2024 yaitu 4. Saat ini nilai arsitektur SPBE 1 yaitu sudah memiliki arsitektur *as-is*.

l) Kerangka Arsitektur SPBE terdiri dari 6 domain yaitu domain Proses Bisnis, Layanan, Data dan Informasi, Aplikasi, Infrastruktur, dan Keamanan.

m) Arsitektur SPBE ynag dimiliki oleh instansi periu dikelompokkan sehingga arsitektur SPBE dapat saling terintegrasi

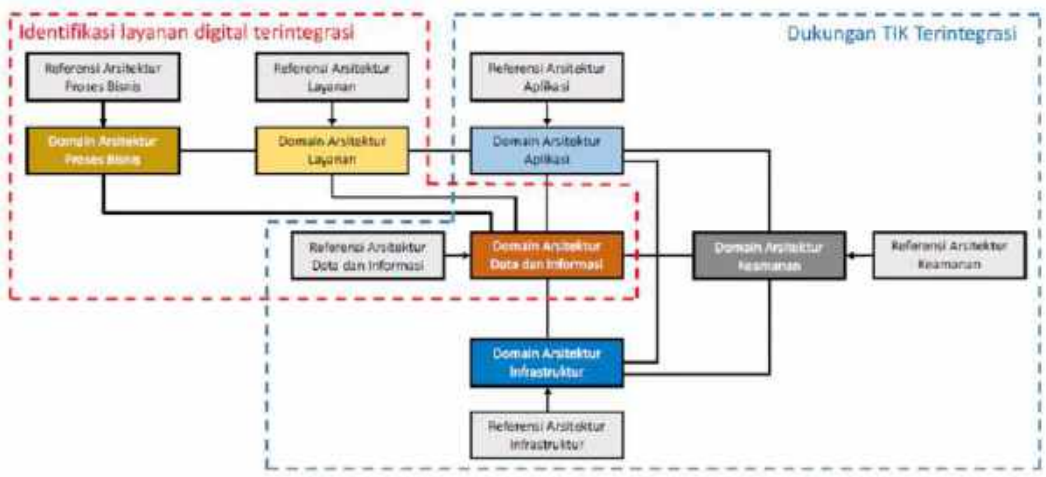

Keterkaitan Antar Komponen dalam Arsitektur SPBE (Perpres No. 132 Tahun 2022)

n) Berikut ini keterkaitan atau proses implementasi Arsitektur SPBE dengan proses *clearance* pada SIA-SPBE

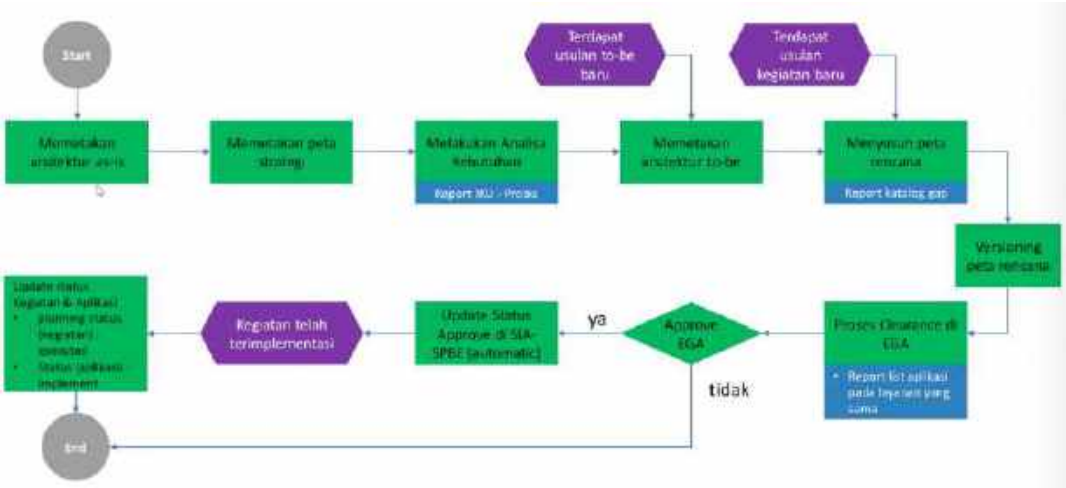

o) Mengacu pada permohonan data Pusdatin terkait pengisian data Arsitektur SPBE di link https://lnk.dephub.go.id/daduk arsitektur SPBE DJKA terdiri dari 2 dokumen yaitu dokumen asesmen infrastruktur dan worksheet isian arsitektur SPBE.

p) Dokumen asesmen infrastruktur diisi jika unit kerja memiliki pusdat data diluat dari Pusat Data yang dikelola oleh Pusdatin. Sedangkan worksheet isian arsitektur SPBE berisi 6 domain yang perlu dilengkapi.

q) Pada *sheet* Proses Bisnis unit kerja perlu mengidentifikasikan proses bisnis unit kerja saat ini dan rencana pengembangan/penyederhanaan proses bisnis masa mendatang. Komponen yang perlu diisi seperti nama bisnis/proses

bisnis, uraian bisnis, sasaran strategis, IKU, nilai IKU target, nilai IKU terealisasi, unit kerja, potensi manfaat, potensi ekonomi, potensi risiko, mitigasi risiko, dan proses bisnis mendukung tugas dan fungsi organisasi yang mana.

r) Pada *sheet* Layanan unit kerja perlu mengidentifikasikan seluruh layanan yang ada pada unit kerja tidak hanya layanan TIK saat ini dan rencana pengembangan/penyederhanaan layanan masa mendatang. Komponen yang perlu diisi seperti nama layanan, tujuan layanan, fungsi layanan, unit pelaksana/unit kerja, target layanan, potensi manfaat, potensi ekonomi, potensi risiko, mitigasi risiko, dan proses bisnis mendukung tugas dan fungsi organisasi yang mana.

s) Pada *sheet* Aplikasi unit kerja perlu mengidentifikasikan seluruh aplikasi yang ada pada unit kerja dan rencana penyederhanaan masa depan. Komponen yang perlu diisi seperti nama aplikasi, status apliaksi, uraian aplikasi, fungsi aplikasi, layanan, luaran, inputan data, supplier data, luaran data, basis aplikasi, komp[utasi awan, perangkat keras, sistem penghubung layanan, jaringan intra pemerintah, tipe lisensi aplikasi, Bahasa pemrograman, nama basis data, unit pengembang, dan unit operasional teknologi.

t) Pada *sheet* Data dan Infromasi unit kerja perlu mengidentifikasikan seluruh Data da Informasi yang ada pada unit kerja dan rencana akusisi/penghapusan data masa mendatang. Komponen yang perlu diisi seperti nama data, uraian data, tujuan data, sifat data, jenis data, validitas data, produsen data, wali data, input, output, interoperabilitas, layanan.

u) Pada *sheet* Infrastruktur unit kerja perlu mengidentifikasikan seluruh Infrastruktur yang ada pada unit kerja seperti pusat data, pusat komputasi, pusat kendali, jaringan infra pemerintah, SPLP, perangkat keras server, perangkat keras media penyimpanan, perangkat keras jaringan, perangkat keras keamanan, perangkat keras periferal, perangkat lunak platform, dan komputasi awan.

v) Pada *sheet* Keamanan unit kerja perlu mengidentifikasikan seluruh Keamanan yang ada pada unit kerja seperti SOP, Penerapan Keamanan, Edukasi Kesadaran keamanan, Identifikasi kerentanan keamanan, Penanganan insiden keamanan, Kegiatan peningkatan keamanan, dan Kelaikan keamanan.

w) Sesi Diskusi :

1) Pengisian Arsitektur SPBE pada *worksheet* Proses Bisnis dapat menggambarkan proses bisnis eselon I, dapat mengacu pada tugas dan fungsi organisasi.
2) Pada kondisi *as is,* sasaran strategis mengacu pada sasaran strategis Sekretaris Jenderal.
3) Pada kolom Nilai IKU yang ditargetkan diisi target ditahun 2024, sedangkan Nilai IKU Teralisasi diisi dengan realisasi IKU tahun 2023.
4) Pada kolom unit kerja diisi dengan unit kerja Esleon I.
5) Pengisian pada *worksheet* ini sampai pada level Eslon I (sifatnya general) tidak terlalu detail ke bawah, jika ada perubahan atau penyesuaian akan kesulitan merubah data tersebut.
6) Pada *worksheet* layanan diisi berdasasarkan layanan organiasasi dan yang menunjang proses bisnis.
7) Kedepannya jika layanan sudah diisi akan dilakukan gap analisis mana saja yang sudah digital dan mana saja yang belum digital.
8) Pada *worksheet* Aplikasi diisi seluruh aplikasi yang ada pada unit kerja, jika aplikasi sudah dibangun namun kondisi saat ini belum rilis atau launching maka status aplikasi dapat diisi tidak digunakan.
9) Kolom layanan pada *worksheet* aplikasi mengacu pada nama layanan pada *worksheet* layanan.
10) Pada worksheet Aplikasi, kolom Perangkat keras agar disebutkan tipe server atau spesifikasi server sesuai dengan *worksheet* infrastruktur yang sudah diidentifikasi.
11) Jika terdapat aplikasi yang nantikan akan disimplifikasi maka pada tabel *to be* aplikasi tersebut tetap diidentifikasikan detil namun status diubah menjadi tidak aktif.
12) Aplikasi yang diinvetaris Pusdatinhub ada 19 domain sedangkan yang dilaporkan pada Rapim ada 14 domain di Direktorat Jenderal Perkeretaapian agar dapat dicek kembali selisihnya.
13) Pada worksheet data dan informasi agar dapat mengisi dapat dan infromasi yang ada atau yang dihasilkan dalam organisasi.

14) Sifat data terdiri dari terbuka (semua orang bisa mengakses), tertutup (hanya untuk internal), terbatas (tergantung dengan kebutuhan). Jenis data terdiri data statistik, data geospasial (GIS), data keuangan atau data lainnya. Validitas data suatu data masih valid sampai kapan. Penghasil data/produsen data yang menghasilkan data. Penanggung jawab/wali data dapat diisi Pusdatin Perhubungan namun tidak menutup kemungkinan wali data lainnya akan di kaji ulang lagi terkait kolom isian.
15) Pada *worksheet* infrastruktur bagian pusat data tidak perlu diisi dikarenakan sebagian besar sudah diakomodir pada pusat data yang dikelola oleh Pusdatin Perhubungan. Pada bagian perangkat keras server diisi spesifikasi server yang dimiliki DJKA.
16) Pada *worksheet* infrastruktur tidak wajib diisi semua karena sifatnya opsional.
17) Balai Pengujian Perkeretaapian memiliki server sendiri sehingga perlu mengisi workseet infrastruktur serta dokumen asesmen infrastruktur terkait pengelolaan server yang mana pada prinsipnya data dan informasi yang ada Direktorat Teknis sudah mencakup data dan informasi yang ada di Balai Teknik dan Pengelola.
18) Pada *worksheet* Keamanan dapat diisi informasi SOP terkait Keamanan Sistem Infrormasi serta terkait pelaksanaan Audit/Sistem Manajemen Keamanan Informasi (SMKI).
19) Terkait edukasi kesadaran keamanan diisi jika unit kerja melaksanakan kegiatan tersebut bukan menghadiri kegiatan.
20) Arahan Pusdatin agar mengacu pada SE Sekjen Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pembangunan dan Pengembangan SPBE Di Lingkungan Kementerian Perhubungan terdapat beberapa beberapa poin dalah satunya adalah terkait moratorium pembangunan aplikasi baru. Dikarenakan sudah tidak dapat dibangun aplikasi baru, diperkenankan pengembangan aplikasi eksisting dan mengintegrasikan. Pusdatin tidak memperkenankan ada domain baru. Terkait pengembangan aplikasi eksisting sekarang eranya paradigma data. Mengacu pada clearance tahun ini sudah mulai efektif clearance data, diharapkan dari sisi

pemohon agar melakukan pendalaman apasaja list datanya yang menjadi input dan output.

x) Tanggapan terkait Progres Pengisian Worksheet Isian Arsitektur SPBE Direktorat Teknis Perkeretaapian:

1) Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api
   - Baru mengisi sheet aplikasi akan dilengkapi untuk sheet lainnya.
   - Pada sheet keamanan akan ditambahkan audit yang telah dilakukan Setditjen Perkeretaapian dan terkait tindak lanjut insiden keamanan.
   - Posko akan dilakukan pengembangan tahun 2025 akan dimasukan pada rencana pengembangan/*to be.*
   - Management Service Studio Geodatabase agar dihapus dari list.
   - Agar ditambahkan Datawarehouse Angkutan pada sheet aplikasi.
   - Data dan layanan informasi refrensinya bisa dari data statistik, tusi dan hasil rapat EPSS.
2) Direktorat Prasarana Perkeretaapian
   - Probis masih dalam pembahasan agar dapat berkoordinasi dengan Tim MR untuk pengisian.
   - Proses bisnis dan layanan untuk organisasi secara keseluruhan bukan terkait TIK saja untuk menginventarisasi yang belum tercover aplikasi.
   - Pada sheet domain layanan diisi keseluruhan yang dilaksanakan unit kerja, saat ini baru mengisi 3 layanan dan belum lengkap semua kolom.
   - Aplikasi yang masih pembangunan sementara diisi tidak digunakan.
   - Penyederhanaan aplikasi menjadi 3 aplikasi saja, Sistem Informasi Kelaikan Fasilitas Operasi, Aplikasi Master Data Jalan Rel, Aplikasi Master Data Jembatan Keretea Api menjadi satu bagian dalam MOP5.
   - Data dan Informasi yang bukan dari Dit. Prasarana seperti data perpotongan, persinggungan dan perlintasan sebidang dapat dimasukkan asalkan digunakan dalam layanan dari Dit. Prasarana walaupun bukan produsen datanya.
   - Infrastruktur tidak punya sendiri menggunakan Server Direktorat Jenderal Perkeretaapian dan untuk keamanan belum pernah ada audit dan belum melaksanakan edukasi kesadaran keamanan.
3) Direktorat Sarana Perkeretaapian

- Penetapan Identitas Sarana progres baru selesai uji keamanan (VA) agar tetap dimasukan dalam list aplikasi dengan diberi keterangan pada uraian aplikasi.
- Mekanisme perawatan (aplikasi SIMULTAN) agar ditambahkan juga pada list aplikasi rencana pengembangan dimasukan menjadi satu pada aplikasi sarana.
- Data dan informasi kebanyakan masih manual agar tetap diinventarisir selama digunakan dalam proses bisnis.
- Audit dari ITSA BSSN dapat ditambahkan pada sheet Keamanan Informasi.

4) Direktorat Keselamatan Perkeretaapian

- Probis dan Layanan akan diisi sementara dengan RO/KRO.
- Aplikasi yang aktif sertifikasi SDM dan aplikasi SIMKA yang merupakan *rebranding* dari Tanggap Darurat KA (tanggapdarurat-ka.kemenhub.go.id) dalam pengisian kecelakaan kereta api.
- Aplikasi yang sedang dibangun *database* perlintasan sebidang secara digital agar diperbaiki nomenklaturnya pada *sheet* aplikasi.
- Uraian aplikasi agar disesuaikan sesuai dengan perkembangan aplikasi tidak sama setiap tahunnya.
- Ada audit keamanan terkait keselamatan tidak perlu dimasukan hanya terkait keamanan informasi TIK seperti Uji Keamanan (VA, Pentest) dan insiden keamanan informasi yang dialami.
- Sistem Informasi Daerah Rawan Bencana, Rawan Kecelakaan, Rawan Gangguan Keamanan berupa aplikasi desktop (seperti ArcGIS).
- Diharapkan agar tetap dilaksanakan untuk sertifikasi SDM sesuai anggaran apabila ada perubahan anggaran dapat mengajukan *reviu* dan *clearance* ulang.

4. **Sesi III Pembahasan Capaian TIK Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2014 s.d. 2024 dan Pembahasan Daftar Pemanfaatan Aplikasi di Lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian, hal yang menjadi pembahasan antara lain:**

a) Data sementara yang dihimpun berasal dari Pusdatinhub baik itu studi, aplikasi dan infrastruktur dari aplikasi SIRIU Pusdatinhub.

b) Studi TIK hanya bersifat tambahan inventarisir sebenarnya yang diminta hanya aplikasi dan infrastruktur.
c) Isian *worksheet* seperti isian form monitoring Triwulanan atau Semesteran dari Pusdatinhub.
d) Data Capaian Infrastruktur sementara diisi dari Laporan Monitoring Triwulanan.
e) Mekanisme *clearance* mulai dilakukan dari tahun 2021 sebelumnya hanya sampai dengan Reviu Tingkat II.
f) Agar masing-masing unit kerja mengecek kembali hasil inventarisasinya dan apabila masih belum lengkap agar dilengkapi.
g) Terkait tahun pembangunan yang masih tanda tanya karena masih meminta keterangan dari Satker apabila sebelum 2014 tidak dimasukan dalam list.
h) Aplikasi MOP5 dan Sertifikasi SDM dibangun tahun 2018, Sistem Informasi Pengujian SDM dan Pengadaan Server Balai Pengujian Perkeretaapian pada tahun 2017.
i) Studi dari Dit. Prasarana Perkeretaapian tahun 2020 dan 2021 masuk ke *sheet* Aplikasi semua.
j) Studi terkait Penyusunan Tata cara perawatan sarana perkeretaapian dan aplikasi E-Maintance dari Balai Perawatan masih perlu dicek kembali.
k) Aplikasi Database Perencanaan Teknis statusnya aktif dan sudah integrasi ke Portal Aplikasi Direktorat Jenderal Perkeretaapian.
l) Aplikasi Direktorat Prasarana Perkeretaapian MOP5, Master Data Jalan Rel Kereta Api, Master Data Jembatan Kereta Api dan Sistem Informasi Kelaikan Fasilitas Operasi statusnya tidak aktif masih dalam pengembangan.
m) Aplikasi Penetapan Identitas Sarana dibangun tahun 2023 status tidak aktif baru selesai uji keamanan.
n) Aplikasi BLU Balai Pengujian status tahap integrasi dengan aplikasi SISAKA dan Sertifikasi SDM.
o) Agar dapat ditambahkan di menu utama Hubnet untuk Aplikasi BLU Balai Pengujian.
p) Aplikasi SIMKA agar ditmbahkan dalam list yang diinventarisir.
q) Agar diisikan tahun dikembangkan dan *outcome* dari aplikasi yang sudah dibangun dan kolom-kolom yang masih kosong.

5. **Sesi IV Pembahasan Pemanfaatan serta Monitoring Progres Kegiatan TIK Tahun 2022-2024, hal yang menjadi pembahasan antara lain :**

a) Monitoring Progres Pemanfaatan Aplikasi Tahun 2022, sebagai berikut:

NO	UNIT KERJA	KEGIATAN TIK	ANGGARAN	STATUS
1	Direktorat LLKA	Management Service Geodatabase Virtual	987.000.000	Terkena Blokir/AA
2	Direktorat Keselamatan	Sistem Informasi Akreditasi Kelembagaan	556.000.000	Terkena Blokir/AA
3	Direktorat Sarana Perkeretaapian	Pembangunan Aplikasi Sertifikasi Kelaikan Sarana Perkeretaapian	650.904.000	Selesai Dilaksanakan
4	Direktorat Prasarana Perkeretaapian	Pembangunan Sistem Informasi Manajemen Material dan Perguclangan Prasarana Perkeretaapian	-	Swakelola (Tidak Aktif)
		Pengembangan Aplikasi Perizinan Perpotongan dan Persinggungan Jalur Kerta Api dengan Bangunan Lain Berbasis Teknologi Informasi	586.968.000	Selesai Dilaksanakan (Tidak Aktif)
		Pembangunan Aplikasi Sertifikasi Prasarana Perkeretaapian dengan Memanfaatkan Teknologi Informasi	592.795.500	Selesai Dilaksanakan (BA VA belum keluar)
		Pengadaan Jasa Konsultasi Penyediaan Master Data Jembatan Kereta Api untuk Analisa Tingkat Pelayanan Multi Skala	1.563.157.500	Selesai Dilaksanakan (BA VA belum keluar)
5	Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian	Pengelolaan Portal Aplikasi Direktorat Jenderal Perkeretaapian	193.750.000	Selesai Dilaksanakan
		Pengelolaan Website Direktorat Jenderal Perkeretaapian	195.138.000	Selesai Dilaksanakan
		Pembangunan Enterprise Service Bus (ESB) Direktorat Jenderal Perkeretaapian	194.472.000	Selesai Dilaksanakan

Ada sedikit koreksi pada inventarisasi kegiatan TIK Aplikasi Direktorat Sarana Perkeretaapian dari Pembangunan menjadi Pengembangan Aplikasi Sertifikasi Kelaikan Sarana Perkeretaapian.

b) Monitoring Progres Pemanfaatan Aplikasi Tahun 2023, sebagai berikut:

NO	UNIT KERJA	KEGIATAN TIK	ANGGARAN	STATUS
1	Direktorat LLKA	Pembangunan Aplikasi Pengawasan Lalu Lintas Kereta Api	298.760.000	Selesai Dilaksanakan
		Pengembangan Aplikasi Perizinan Penyelenggaraan Perkeretaapian Online	1.505.499.000	Selesai Dilaksanakan
		Bandwidth dan Jaringan Pemantauan Perjalanan Kereta Api	4.355.021.000	Selesai Dilaksanakan
2	Direktorat Keselamatan	Pembangunan Sistem Informasi Program Keselamatan Dalam Pengawasan Penyelenggaraan Perkeretaapian	2.428.980.000	Terdampak Blokir/AA
		Pembangunan Database Perlintasan Secara Digital	1.182.336.000	Terdampak Blokir/AA
3	Direktorat Sarana Perkeretaapian	Pembangunan Sistem Aplikasi Penetapan Identitas Sarana Perkeretaapian Berbasis Digital	1.250.000.000	Selesai Dilaksanakan
4	Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian	Pengelolaan Portal Aplikasi Direktorat Jenderal Perkeretaapian	199.000.000	Selesai Dilaksanakan
		Pengembangan Website Direktorat Jenderal Perkeretaapian	662.000.000	Selesai Dilaksanakan
		Pengembangan Aplikasi Database Perencanaan Teknis Bidang Perkeretaapian	199.000.000	Selesai Dilaksanakan
5	Balai Pengujian Perkeretaapian	Pembangunan Aplikasi Layanan BLU Balai Pengujian Perkeretaapian	1.672.489.000	Selesai Dilaksanakan

Pembangunan Aplikasi Pengawasan Lalu Lintas Kereta Api dipecah jadi 3 paket kegiatan yaitu Probis, Arsitektur dan Pembangunan Aplikasi agar disampaikan hasil outputnya ke Setditjen Perkeretaapian.

c) Monitoring Progres Aplikasi Tahun 2024 Semester I, sebagai berikut:

NO	UNIT KERJA	KEGIATAN TIK	ANGGARAN	STATUS
1	Direktorat LLKA	Perawatan Alat Pemantauan di Stasiun KA dan Perlintasan Sebidang Tahun Anggaran 2024	1. 575.563.000	Proses Pelaksanaan
		Pemeliharaan Aplikasi Perizinan Online Tahun Anggaran 2024	271,000.000	Proses Pelaksanaan (Sudah Selesai Pengujian Keamanan)
		Management studio Geodatabase Lanjutan Tahun Anggaran 2024	967,000.000	Terdampak Blokir/AA
		Bandwidth dan Jaringan Pemantauan Perjalanan Kereta Api	2.779,458.000	Proses Pelaksanaan
2	Direktorat Keselamatan	Pengembangan Sistem Informasi Sertifikasi SDM Perkeretaapian Tahun Anggaran 2024	447.552.000	Anggaran dialihkan Ke Kegiatan Lain
		Penyusunan Database Perlintasan secara Digital Tahun Anggaran 2024	1.182.335.000	Proses Pelaksanaan (Proses Pengumpulan Data dan Survei Lokasi)
		Pembangunan Sistem Informasi Program Keselamatan dalam Pengawasan Penyelenggaraan Perkeretaapian Tahun Anggaran 2024	2.420.617.000	Terdampak Blokir/AA
3	Direktorat Sarana Perkeretaapian	Pemeliharaan aplikasi sertifikasi kelaikan sarana perkeretaapian tahun anggaran 2024	98.900.000	Proses Pelaksanaan (Remediasi ITSA)
		Pembaruan Aplikasi ANSYS Dalam Rangka Pelaksanaan Rancang Bangun Sarana Perkeretaapian Tahun Anggaran 2024	2.200.000.000	Terdampak Blokir/AA
4	Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian	Pengelolaan Website Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun Anggaran 2024	200.000.000	Proses Pelaksanaan
		Pengembangan Portal Aplikasi Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2024	1.600.000.000	Proses Pelaksanaan
		Reviu Roadmap TIK Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun Anggaran 2024	1.000.000.000	Persiapan Pelaksanaan (Kontrak 30 Mei 2024)

1) Direktorat LLAKA
   - Perizinan Online, belum terlaksana masih proses pelelangan di akhir bulan Juni 2024 baru berkontrak. Ruang lingkup seperti *updating* bahasa pemrograman, integrasi dengan aplikasi lain dan portal DJKA sebagai *super apps*, peningkatan keamanan aplikasi. Pada versi 3 sudah selesai uji keamanan dan sudah support Hubnet, sedang proses menyusun surat dari Dir. Lalin ke Kapusdatin terkait pemindahakn IP Internal.
   - Perawatan Alat Pemantauan di Stasiun KA dan Bandwidth Jaringan Pemantauan, saat ini sedang berlangsung hingga akhir tahun (11 bulan), untuk kedua kegiatan mengakomodir kegiatan Lebaran dan Nataru. Agar dapat diusulkan 12 bulan serta dilaporkan evaluasi utilitas dan pemanfaatannya. Operator Perkeretaapian lain juga perlu ditambahkan dalam pemantauan sesuai arahan pimpinan serta tidak perlu lagi melakukan *clearance* justifikasi/laporan pemanfaatan dan disampaikan kebutuhan idealnya.
2) Direktorat Keselamatan Perkeretaapian
   - Penyusunan *database* perlintasan digital berkontrak bulan Juni, direncanakan studi pendahulan pada tanggal 4 Juli 2024. Sistem baru ini agar terintegarsi dengan SIGITA dan menstandarkan data dari aplikasi (data berisi titik koordinat, kepemilikan aset di wilayah Jabodetabek, dan lainnya).

- Agar Pengembangan Sistem Informasi Sertifikasi SDM Perkeretaapian dapat diusulkan kembali apabila terdapat relokasi anggaran.

3) Direktorat Sarana Perkeretaapian
   - Pemeliharaan Aplikasi SISAKA memasuki masa akhir 3 bulan, progres saat ini sudah ditindaklanjuti temuan dari BSSN dan masih menunggu pengecekan ulang dari BSSN.
   - SISAKA ke depan akan terintegrasi dengan data penetapan indentitas sarana, setelahnya data sarana diproduksi langsung oleh penetapan indentitas sarana.
   - Sudah disiapkan satu API lagi khusus yang menggunakan parameter filter sehingga tidak semua data di *load* untuk mengakomodir kebutuhan integrasi dengan Hubnet.
   - Dokumentasi dan tindak lanjut rekomendasi *clearance* agar dapat disampaikan pada aplikasi SIRIU.

6. **Sesi V Pembahasan Pagu Indikasi Usulan Kegiatan TIK Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun Anggaran 2025, hal yang menjadi pembahasan antara lain :**

a) Indikasi Kegiatan TIK Tahun 2025 diutamakan untuk Pengembangan (berdasarkan roadmap aplikasi), Pengelolaan dan penyederhanaan/ integrasi aplikasi pada unit kerja masing-masing.

b) Indikasi Usulan Kegiatan TIK TA 2025 Dit. LLAKA, sebagai berikut:

Unit Kerja	RO/KRO	Usulan Kegiatan
Direktorat LLAKA	4602.BMA.001.051 (*Pengelolaan Data dan Infromasi*)	1. Perancangan Proses Bisnis Server Lalu Lintas Kereta Api (Rp. 198.357.000) 2. Perancangan Arsitektur Server Lalu Lintas Kereta Api (Rp. 197.469.000) 3. Penyediaan Peralatan Pengolah Data dan Sistem Infromasi Lalu Lintas Kereta Api (Rp. 199.590.000) 4. Penyediaan Peralatan Survei Lalu Lintas Kereta Api (Rp. 190.376.000) 5. Penyediaan Peralatan Infografis Lalu Lintas Kereta Api (Rp. 197.469.000)
	4602.CDS.001.051 (*OM Prasarana Bidang TIK*)	1. Bandwidth dan Jaringan Pemantauan Perjalanan Kereta Api (Rp. 2.877.897.000) 2. Perawatan Alat Pemantauan di Stasiun KA dan Perlintasan Sebidang (Rp. 1.654.341.000)
	4602.FAB.001.052 (*Sistem Informasi*)	1. Perancangan Arsitektur Sistem Permohonan Penetapan Lintas Pelayanan (Rp. 99.234.000) 2. Perancangan Proses Bisnis Sistem Permohonan Penetapan Lintas Pelayanan (Rp. 99.234.000) 3. Perancangan Arsitektur Pengembangan Modul Aplikasi Posko Pusat DJKA (Rp. 99.234.000) 4. Perancangan Proses Bisnis Pengembangan Modul Aplikasi Posko Pusat DJKA (Rp. 99.234.000)

1) Kegiatan Perancanangan Proses Bisnis dan Arsitektur agar dijadikan satu kegiatan, kegiatan Server Lalu Lintas Kereta Api dapat diusulkan dengan prioritas 2.

2) Agar disusun kajian kebutuhan Server nanti dari Pusdatinhub yang akan menindaklanjuti apakah ditempatkan di PDN/Server Pudatin/Server DJKA. Terkait Penyediaan peralatan pengelolah data, peralatan survei dan peralatan infografis agar didetailkan lingkupnya.
3) Kegiatan usulan Pengembangan Modul Aplikasi Posko Pusat DJKA dapat diusulkan dengan prioritas 1 di Semeter 2 tahun ini dengan menyatukan kegiatan Perencanaan Probis dan Arsitektur.

c) Indikasi Usulan Kegiatan TIK TA 2025 dari Dit. Sarana Perkeretaapian, Dit. Keselamatan Perkeretaapian, BTP Palembang, Balai Pengujian Perkeretaapian dan Setditjen Perkeretaapian, sebagai berikut:

Unit Kerja	RO/KRO	Usulan Kegiatan
Direktorat Sarana Perkeretaapian	4602.FAB.001.052 (*Sistem Informasi*)	Pengembangan/upgrade Aplikasi Sertifikasi Kelaikan Sarana Perkeretaapian SISAKA (Rp. 198.000.000)
Direktorat Keselamatan Perkeretaapian	4602.FAB.001.052 (*Sistem Informasi*)	Pembangunan Sistem Informasi Akreditasi Kelembagaan (Rp. 869.382.000)
BTP Palembang	4602.CAN.003.051 (*Pengadaan Software*)	Sistem Informasi Manajemen Pengelolaan Data (Rp. 148.542.000)
Balai Pengujian	4644.FAB.001.052 (*Sistem Informasi*)	Pengembangan Aplikasi Pengujian Perkeretaapian (Rp. 499.500.000)
Setditjen Perkeretaapian	4602.FAB.001.052 (*Sistem Informasi*)	1. Pengembangan Website Direktorat Jenderal Perkeretaapian (Rp. 700.000.000) 2. Pengelolaan Portal Aplikasi Direktorat Jenderal Perkeretaapian (Rp. 200.000.000) 3. Pengelolaan ESB Direktorat Jenderal Perkeretaapian (Rp. 200.000.000)

1) Dit. Sarana Perkeretaapian, ruang lingkup terkait adanya penambahan jenis permohonan (uji berkala dan uji tahunan) sesuai aturan terbaru, pembaharuan fitur-fitur yang tidak dapat mendukung data produksi yang besar terutama fitur filternya.
2) Dit. Keselamatan Perkertaapian, sertifikasi SDM ada data berdasarkan *gender* agar dapat dimanfaatkan sebagai bagian dari pengembangan, untuk nomenklatur usulan kegaitan agar disesuaikan kembali.
3) BTP Palembang, pembelian lisensi *cloud drive* dan aplikasi pengelolaan data agar diperjelas lisensi untuk apa saja, karena untuk lisensi perkantoran tidak perlu *clearance*.
4) Balai Pengujian Perkeretaapian, agar diinfokan lingkup pengembangan secara detail.

7. **Sesi VI Koordinasi Pengelolaan Website Direktorat Jenderal Perkeretaapian**

a) Tim Pengelola Website Tahun 2024 SKnya sudah ditandatangi oleh Dirjen Perkertaapian, teknis web ada di Bagian Perencanaan dan konten ada di Bagian Hukum/Humas.
b) Partisipasi aktif masih sangat sedikit dibandingkan 2023, masing-masing unit kerja agar berperan aktif terutama penulisan artikel:

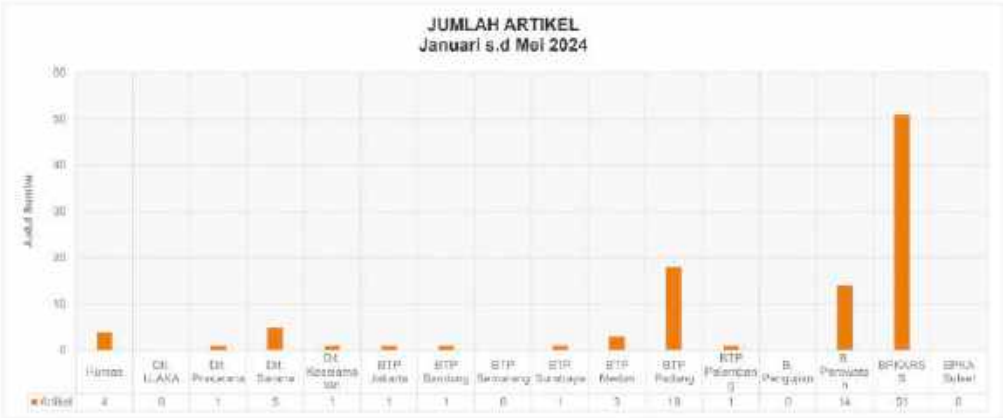

c) BPKARSS tertinggi pertama dalam hal penulisan artiket disusul BTP Padang dan Balai Perawatan Perkeretaapian.
d) Tema Strategis DJKA tahun 2024 ada 2 yaitu Teknologi dan Konektivitas Perkeretaapian di Indonesia dan Serba Serbi Perkeretaapian di Indonesia.
e) Hasil tindak lanjut VA Severity Medium sudah ditindaklanjuti semua, Severity Low masih berposes.
f) Progres integrasi BIOS BPKARSS sudah terintegrasi katergori jumlah penumpang, data SDM, Dana Kelolaan dan IKM.
g) Kendala dalam pengelolaan website Ditjen Perkeretaapian, sebagai berikut:

1) Kendala pada operator Humas Pusat, notifikasi terkait approval berita tidak ada berita yang butuh approval sedangkan berita yang telah di buat oleh Balai/Direktorat status masih draft
2) Berita Direktorat/Balai publikasi pada halaman front end menjadi backdate tahun 2023. Adanya perbedaan tanggal create dan tanggal publish.
3) Unit kerja gagal upload pelaporan kinerja informasi error "Terjadi kesalahan dari server"
4) Pada menu Regulasi terdapat beberapa peraturan yang tidak ada (kendala pada API JDIH)
5) Humas Pusat membuat artikel namun tidak teruplоad/terpublish
6) Kendala akses website dikarenakan adanya tahap remidiasi dari Pusdatin

h) Sesi Diskusi:
1) Balai Pengujian Perkeretaapian sudah mengirimkan dua artikel melalui API namun belum tampil di *backend* sehingga tidak terhitung.
2) Foto yang diupload tidak simetris ke bawah untuk struktur organisasi tidak mengikuti ukuran aslinya.
3) Notifikasi publikasi artikel tidak muncul di Bagian Humas sehingga tidak terpublikasi.
4) Menambah gambar langsung di artikel masih tidak bisa dan terdapat *error*.
5) BPKA Sulawesi Selatan belum pernah *upload* karena tidak bisa akses ke *backend* dari awal tahun.
6) Agar ditambahkan menu panduan untuk mengenal dan mempelajari fungsi-fungsi *backend* aplikasi supaya PIC baru dapat melanjutkan tanpa kendala.
7) Agar dapat mengakomodir penambahan submenu baru pada menu pelaporan untuk memisahkan pelaporan bersadarkan subkategori.
8) Agar dapat dicek kembali terkait kendala *upload* video dengan progres yang sudah 90% namun terjadi gagal *upload*.
9) Celah keamanan ditemukenali dari *frontend* pada kolom komentar unit kerja BPKARSS sehingga tim pengembang website mengusulkan tema baru yang serupa dan *inline* dengan desain Kemenhub.

10) Akan dilakukan *hardening* dari *template-template Operating System* pada Server Ditjen Perkeretaapian.
11) *Userways* agar diaktifkan karena sudah termasuk dalam anggaran, saat ini ada kendala terkait pembayaran sudah terdebet tapi tidak terbeli untuk licensenya sedang ditindaklanjuti oleh Tim *Support Userways*.

8. **Sesi VII Pembahasan Rencana Pengembangan Portal Aplikasi Direktorat Jenderal Perkeretaapian sebagai Super Apps termasuk Integrasi Persetujuan Perizinan/Sertifikasi, hal yang menjadi pembahasan antara lain :**
   a) Diharapkan portal akan dijadikan Superapps akan mendukung turdalwas dan dapat terintegrasi dengan aplikasi teknis maupun HUBNET Kemenhub.
   b) Portal Aplikasi Ditjen Perkeretaapian perlu dilakukan branding ulang dikarenakan rancu seperti website atau aplikasi layanan umum.
   c) Perlunya peran serta Direktorat dan Balai untuk integrasi aplikasi. Aplikasi di lingkungan Direktorat dan Balai agar dapat terintegrasi pada Portal Ditjen Perkeretaapian, SSO Kemenhub, SSO HUBNET, dan ESB DJKA.
   d) Masukkan/evaluasi/kendala dari Direktorat/Bagian/Balai terkait Portal Aplikasi Ditjen Perkeretaapian antara lain :
      1) Tandatangan pimpinan sering sekali berubah saat pilih direktur namun munculnya KPA;
      2) Pencarian surat masih sulit dilakukan;
      3) Surat keluar masih double, terkadang pimpinan sudah disposisi namun masih muncul kembali;
      4) Saat input surat tidak bisa dikarenakan nomor sudah tersedia namun saat dicek nomor surat tidak ada.
      5) Usulan role baru pegawai TU Direktorat Prasarana untuk tag nomor surat.
      6) Terkendala untuk PLH dikarenakan masa PLH telah berakhir namun masih berjalan.
      7) Diusulkan surat hanya dapat dihapus oleh pembuat surat/pengirim surat, TU tidak dipernankan untuk menghapus surat masuk.
      8) Disposisi dari direktorat lain masuk ke Direktorat Sarana namun tidak masuk ke admin persuratan.

9) Tujuan surat terkadang error, seharusnya ke Kepala Tata Usaha namun terkirim ke PPK.
10) Admin TU unit kerja tidak bisa melihat surat disposisi dari Dirjen pada pimpinannya, sehingga harus menggunakan akun Portal pimpinan sehingga notifikasi sudah terbaca.
11) Saat TU input surat tampilan ada di halaman ke 2 atau ke 3 seharusnya tampil di halaman pertama sehingga mempermudah pencarian.
12) Rekap absensi terkadang gagal, data yang terdownload terkadang kurang sehingga harus dicek satu per satu.
13) *Share link* dari drive personal terbatas hanya sampai 24 jam saja diusulkan bisa dipilih menjadi 2 pilihan yaitu default (24 jam) dan 1 bulan.
14) BTP Jakarta terkendala akses surat lama tahun 2021.
15) Tombol disposisi terkadang tidak muncul.
16) Skemaraja dan E-Kinerja pada saat akses melalui portal gagal SSO dikarenakan HUBNET masih belum stabil.

D. KESIMPULAN

1. Kegiatan TIK yang telah mendapatkan hasil *clearance* TA 2024 tetap dapat dilaksanakan tidak terpengaruh direktif Presiden asalkan berupa aplikasi khusus sesuai untuk mendukung Tusi.
2. Agar masing-masing unit kerja melengkapi isian pada Worksheet Data Dukung Arsitektur SPBE Direktorat Jenderal Perkeretapiaan sesuai hasil pembahasan rapat.
3. Masing-masing unit kerja agar mengecek kembali dan melengkapi isian capaian TIK Direktorat Jenderal Perkeretaapian tahun 2014 s.d. 2024 dan Daftar Pemanfaatan Aplikasi di Lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian.
4. Agar menindaklanjuti hasil pembahasan indikasi Usulan Kegiatan TIK Direktorat Jenderal Perkeretaapian tahun 2025.
5. Diharapkan peran aktif masing-masing unit kerja untuk penulisan artikel di Website Direktorat Jenderal Perkeretaapian.
6. Diharapkan dukungan dari masing-masing unit kerja untuk mendukung Portal Aplikasi DJKA sebagai Super Apps baik dalam hal integrasi akses (SSO Hubnet) dan integrasi data melalui ESB Direktorat Jenderal Perkeretaapian.

E. PENUTUP

Demikian laporan ini buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 10 Juni 2024

NOTULENSI

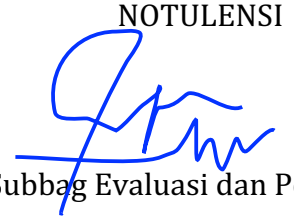

(Subbag Evaluasi dan Pelaporan)

DOKUMENTASI

LAMPIRAN

CATATAN/HASIL PEMBAHASAN INDIKASI USULAN KEGIATAN TIK TAHUN 2025

NO.	INDIKASI USULAN KEGIATAN TIK	CATATAN/HASIL PEMBAHASAN
1	***Perancangan Proses Bisnis dan Arsitektur Server Lalu Lintas Kereta Api (Direktorat LLAKA, 2 kegiatan)***	• Perlu diperjelas maksud dan tujuan pelaksanaan studi TIK yang fokus pada kebutuhan server, serta disarankan agar digabungkan menjadi 1 kegiatan agar efisien (tidak 2 kajian terpisah); • Prinsipnya unit kerja diminta untuk mengoptimalkan pemanfaatan server yang dikelola Pusdatin termasuk Pusat Data Nasional (PDN) yang dikelola Kementerian Kominfo. • ***Kegiatan Prioritas 2***, serta perlu dicek pencantuman pada konsep Arsitektur dan Peta Rencana SPBE Tahun 2025-2029.
2	***Penyediaan Peralatan Pengolah Data dan Sistem Informasi Lalu Lintas Kereta Api, Penyediaan Peralatan Survei Lalu Lintas Kereta Api dan Penyediaan Peralatan Infografis Lalu Lintas Kereta Api (Direktorat LLAKA, 3 kegiatan)***	• Perlu diperjelas lingkup kegiatannya, apakah merupakan pengadaan peralatan pengolah data untuk layanan perkantoran. Apabila masuk lingkup peralatan layanan perkantoran maka judul usulan kegiatan perlu direviu/diperbaiki serta kegiatan tidak perlu dilakukan reviu dan *clearance*. • ***Kegiatan Prioritas 2***, serta perlu dicek pencantuman pada konsep Arsitektur dan Peta Rencana SPBE Tahun 2025-2029.
3	***Bandwidth dan Jaringan Pemantauan Perjalanan Kereta Api dan Perawatan Alat Pemantauan di Stasiun KA dan Perlintasan Sebidang (Direktorat LLAKA, 2 kegiatan)***	• Usulan kegiatan *bandwidth* tidak perlu diusulkan *clearance* namun tetap diminta direviu untuk memastikan pemanfaatan yang optimal. • Terdapat kebutuhan penambahan bandwidth dan peralatan pemantauan di stasiun/lokasi strategis lainnya untuk peningkatan pengawasan lalu lintas dan angkutan kereta api selama 12 bulan serta juga mencakup pengawasan pada operasional kereta api lainnya (MRT Jakarta, LRT Jakarta, KCJB, lainnya). Terkait dengan kebutuhan tersebut, agar dicek kembali besaran anggaran yang diusulkan. • ***Kegiatan Prioritas 1***, serta perlu dicek pencantuman pada konsep Arsitektur dan Peta Rencana SPBE Tahun 2025-2029.
4	**Perancangan Arsitektur dan Proses Bisnis Sistem Permohonan Penetapan Lintas Pelayanan (Direktorat LLAKA, 2 kegiatan)**	• Perlu diperjelas maksud dan tujuan pelaksanaan studi TIK yang fokus pada perencanaan sistem TIK, serta disarankan agar digabungkan menjadi 1 kegiatan agar efisien (tidak 2 kajian terpisah); • Prinsipnya agar mendukung penyederhanaan aplikasi dan moratorium pembangunan aplikasi baru, namun hasil kajian dapat dimanfaatkan untuk penambahan fungsi layanan pada Portal Aplikasi Direktorat Jenderal Perkeretaapian.

NO.	INDIKASI USULAN KEGIATAN TIK	CATATAN/HASIL PEMBAHASAN
		• ***Kegiatan Prioritas 2***, serta perlu dicek pencantuman pada konsep Arsitektur dan Peta Rencana SPBE Tahun 2025-2029.
5	***Perancangan Arsitektur dan Proses Bisnis Pengembangan Modul Aplikasi Posko Pusat DJKA (Direktorat LLAKA, 2 kegiatan)***	• Perlu diperjelas maksud dan tujuan pelaksanaan studi TIK yang fokus pada perencanaan untuk pengembangan sistem TIK, serta disarankan agar digabungkan menjadi 1 kegiatan agar efisien (tidak 2 kajian terpisah); • Prinsipnya agar mendukung penyederhanaan aplikasi dan pengembangan dilaksanakan untuk mendukung integrasi data dengan operator serta penambahan fungsi layanan pada Portal Aplikasi Direktorat Jenderal Perkeretaapian. • ***Kegiatan Prioritas 1***, serta perlu dicek pencantuman pada konsep Arsitektur dan Peta Rencana SPBE Tahun 2025-2029.
6	***Pengembangan/Upgrade Aplikasi Sertifikasi Kelaikan Sarana Perkeretaapian (Direktorat Sarana Perkeretaapian)***	• Perlu diperjelas lingkup pengembangan Aplikasi Sertifikasi Kelaikan Sarana Perkeretaapian pada Tahun 2025 termasuk kebutuhan penyesuaian terhadap peraturan terbaru; • Prinsipnya agar mendukung penyederhanaan aplikasi dan pengembangan juga mendukung integrasi data dengan badan usaha serta penambahan fungsi layanan pada Portal Aplikasi Direktorat Jenderal Perkeretaapian. • ***Kegiatan Prioritas 1***, serta perlu dicek pencantuman pada konsep Arsitektur dan Peta Rencana SPBE Tahun 2025-2029.
7	***Pembangunan Sistem Informasi Akreditasi Kelembagaan (Direktorat Keselamatan Perkeretaapian)***	• Pembangunan sistem informasi/aplikasi baru tidak disarankan dimana terdapat kebijakan penyederhanaan aplikasi dan moratorium pembangunan aplikasi baru. Untuk itu, fungsi layanan tersebut agar mengoptimalkan aplikasi yang sudah ada dan juga mendukung integrasi data serta penambahan fungsi layanan pada Portal Aplikasi Direktorat Jenderal Perkeretaapian. • ***Kegiatan Prioritas 2***, serta perlu dicek pencantuman pada konsep Arsitektur dan Peta Rencana SPBE Tahun 2025-2029.
8	***Sistem Informasi Manajemen Pengelolaan Data (BTP Palembang)***	• Perlu diperjelas lingkup kegiatannya, apakah merupakan pengadaan lisensi pengolah data untuk layanan perkantoran. Apabila masuk lingkup peralatan layanan perkantoran maka judul usulan kegiatan perlu direviu/diperbaiki serta kegiatan tidak perlu dilakukan reviu dan *clearance*. • ***Kegiatan Prioritas 2***, serta perlu dicek pencantuman pada konsep Arsitektur dan Peta Rencana SPBE Tahun 2025-2029.

NO.	INDIKASI USULAN KEGIATAN TIK	CATATAN/HASIL PEMBAHASAN
9	**Pengembangan Aplikasi Pengujian Perkeretaapian (Balai Pengujian)**	• Perlu diperjelas lingkup pengembangan Aplikasi Pengujian Perkeretaapian pada Tahun 2025; • Prinsipnya agar mendukung penyederhanaan aplikasi dan pengembangan juga mendukung integrasi data dengan unit kerja/instansi terkait, fitur BLU yang bisa digunakan oleh unit BLU lainnya serta penambahan fungsi layanan pada Portal Aplikasi Direktorat Jenderal Perkeretaapian. • ***Kegiatan Prioritas 1***, serta perlu dicek pencantuman pada konsep Arsitektur dan Peta Rencana SPBE Tahun 2025-2029.

LAMPIRAN

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN 5

PERSENTASE PEMENUHAN PUBLIKASI DITJEN PERKERETAAPIAN

Lampiran Nota Dinas
Nomor :
Tanggal :

Capaian Publikasi di Lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian

A. Rekapitulasi Siaran Pers di Lingkungan Ditjen Perkeretaapian

No	Nomor Siaran Pers	Judul
1.	01/SP/01/DJKA/2024	Kecelakaan KA di Bandung Evakuasi Terus Dilakukan oleh Tim Gabungan
2.	02/SP/01/DJKA/2024	Lakukan Evaluasi Insiden Perkeretaapian, DJKA Berkomitmen Tingkatkan Keselamatan Perjalanan Kereta Api
3.	03/SP/01/DJKA/2024	Dukung Operasional Jalur Ganda Mojokerto-Sepanjang, DJKA Kebut Pengerjaan Fly Over Krian dan Fly Over Kedinding
4.	04/SP/01/DJKA/2024	Jalur Ganda Mojokerto-Sepanjang Dilanjutkan Hingga Wonokromo, DJKA Siapkan Langkah Mitigasi Dampak Pembangunan
5.	05/SP/02/DJKA/2024	Percepat Perawatan Eskalator Stasiun Bekasi DJKA Pastikan Rampung Bulan Ini
6.	06/SP/03/DJKA/2024	Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang, DJKA Dorong Masyarakat Beralih dari Kendaraan Pribadi
7.	07/SP/03/DJKA/2024	Angkutan Motor Gratis (MOTIS) Kembali Digelar, DJKA Perpanjang Lintas Pelayanan Hingga Jawa Timur
8.	8/SP/03/DJKA/2024	Perawatan Eskalator Stasiun Manggarai Rampung, DJKA Pastikan Eskalator Peron 11 dan 12 Dapat Layani Penumpang
9.	9/SP/04/DJKA/2024	Hampir 9500 Orang Manfaatkan Kereta Api Pertama di Sulawesi untuk Angkutan Lebaran
10.	10/SP/04/DJKA/2024	Program Motis 2024 Resmi Ditutup, Berhasil Angkut Lebih Dari 12.000 Motor Pemudi
11.	11/SP/06/DJKA/2024	Ajak Investor Bangun Perkeretaapian Indonesia, DJKA Tawarkan KA Perkotaan Bandung Hingga IKN
12.	12/SP/06/DJKA/2024	Akan Terintegrasi dengan Stasiun Sentral Manggarai, LRT Jakarta Fase 1B Ditargetkan Rampung Kuartal Ketiga 2026
13.	13/SP/06/DJKA/2024	Indonesia beserta Negara-negara ASEAN lainnya, Berharap Dampak Positif bagi Negara ASEAN di sektor transportasi dalam pengurangan emisi karbon

B. Rekapitulasi Publikasi Sosial Media di Lingkungan Ditjen Perkeretaapian periode Triwulan II Tahun 2024

No	Uraian	Keterangan
1.	Rekapitulasi Publikasi pada Instagram	Jumlah postingan sosial media 133 postingan
2.	Rekapitulasi Publikasi pada Tweeter	Jumlah postingan sosial media 50 postingan

Jakarta, Juli 2024

Koordinator Humas dan KSLN
Ditjen Perkeretaapian

DIAN ANGGRAENI
Penata Tk. I (III/d)
NIP. 19820303 200812 2 003

LAMPIRAN

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN 6

NILAI AKIP DITJEN PERKERETAAPIAN

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO. 8
JAKARTA 10110

TELP: +62 813-600- 3838

WEBSITE : http://djka.dephub.go.id/
EMAIL : dirjenka@kemenhub.go.id

KEPUTUSAN SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN
NOMOR : KP-KI DJKA 21 Tahun 2024

TENTANG

TIM EVALUASI PENILAIAN MANDIRI IMPLEMENTASI
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DI LINGKUNGAN
SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN TAHUN 2024

SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka pelaksanaan evaluasi internal implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), maka dibutuhkan pembentukan Tim untuk melakukan evaluasi internal sebagaimana dimaksud secara berjenjang di lingkungan Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian;

b. bahwa jabatan dan nama yang tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dipandang mampu melaksanakan tugas sebagai Tim Evaluasi Internal Implementasi SAKIP di lingkungan Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Direktorat Jenderal Perkeretaapian tentang Pembentukan Tim Evaluasi Internal Implementasi SAKIP di Lingkungan Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2024.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4722);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 80);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2022 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 33);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Tahun 2014 Nomor 1842);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Tahun 2021 Nomor 1569);
8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 112 Tahun 2017 tentang Pedoman Dan Proses Perencanaan di Lingkungan Kementerian Perhubungan (Berita Negara Tahun 2017 Nomor 1710);

9. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 85 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Tahun 2020 Nomor 1402);
10. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 17 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Tahun 2022 Nomor 815).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM EVALUASI INTERNAL IMPLEMENTASI SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN TAHUN 2024.

KESATU : Membentuk Tim Evaluasi Internal Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di lingkungan Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2024 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Evaluasi Internal Implementasi SAKIP sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

a. Pengarah:

   Memberikan arahan kepada Penanggungjawab dan Tim Evaluasi untuk melaksanakan evaluasi internal terkait implementasi SAKIP di lingkungan Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian sesuai ketentuan yang berlaku.

b. Penanggungjawab:

1) Bertanggungjawab dalam pelaksanaan evaluasi internal implementasi SAKIP di lingkungan Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian;
2) Melaporkan hasil evaluasi internal dimaksud kepada Sekretaris Direktorat Jenderal Perkeretaapian selaku Pengarah.

c. Tim Evaluasi:

1) Melakukan persiapan rencana kerja termasuk pengumpulan kebutuhan data/informasi serta penyamaan persepsi di internal Tim untuk pelaksanaan evaluasi internal implementasi SAKIP di lingkungan Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian;
2) Menganalisa dan melakukan evaluasi terhadap isian Lembar Kerja Evaluasi serta dokumen pendukung sesuai variabel penilaian mencakup:
   a) Komponen, terdiri dari Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal.
   b) Sub-komponen, terdiri dari penilaian Keberadaan Kualitas, dan Pemanfaatan pada setiap komponen.
   c) Kriteria, merupakan gambaran kondisi yang perlu dicapai di setiap subkomponen untuk dapat dinilai apakah kondisi tersebut sudah atau belum dicapai dan dapat digambarkan atau tidak.
3) Melakukan koordinasi dan konsolidasi dengan sub unit kerja yang menjadi objek penilaian dan evaluasi.
4) Melakukan kompilasi hasil evaluasi dan menyusun laporan termasuk rekomendasi untuk langkah lanjut peningkatan implementasi SAKIP sesuai ketentuan yang berlaku guna selanjutnya dilaporkan kepada Penanggungjawab.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan kegiatan Tim Evaluasi Internal Implementasi SAKIP di lingkungan Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian dibebankan pada DIPA Satuan Kerja Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun Anggaran 2024.

KEEMPAT : Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : JAKARTA
Pada tanggal : 10 Juni 2024

SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL
PERKERETAAPIAN,

Ir. JUJUN ENDAH WAHJUNINGRUM, M.T., QGIA
NIP 196507031991032001

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Para Kepala Bagian di Lingkungan Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian;
2. Yang bersangkutan.

Lampiran Surat Keputusan Sekretaris
Direktorat Jenderal Perkeretaapian
Nomor : KP-KI DJKA 21 Tahun 2024
Tanggal : 10 Juni 2024

TIM EVALUASI INTERNAL IMPLEMENTASI
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DI LINGKUNGAN
SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN TAHUN 2024

NO.	POSISI	URAIAN
I.	PENGARAH	Sekretaris Direktorat Jenderal Perkeretaapian
II.	PENANGGUNG JAWAB	Kepala Bagian Perencanaan
III.	TIM EVALUASI	
A.	Ketua	Koordinator Kelompok Evaluasi dan Pelaporan, Bagian Perencanaan
B.	Wakil Ketua	Koordinator Kelompok Rencana, Bagian Perencanaan
C.	Anggota	1. Koordinator Kelompok Program, Bagian Perencanaan
		2. Koordinator Kelompok Pelaksana Anggaran, Bagian Keuangan
		3. Koordinator Kelompok SDM dan Organisasi, Bagian SDM dan Umum
		4. Koordinator Kelompok Perancang Peraturan Perundang-Undangan, Bagian Hukum
		5. Yurnaliza, Bagian Perencanaan
		6. Viki Okissa Saifudin, Bagian Perencanaan
		7. Trinanda Meinar Ariani, Bagian Perencanaan
		8. Mustika Merdeka Riyanti, Bagian Perencanaan
		9. M. Sofyan Hadi Mustofa, Bagian SDM dan Umum
		10. Indra Purnama Effendi, Bagian Hukum
		11. Nadia Balkis, Bagian Keuangan

NO.	POSISI	URAIAN
D.	Sekretariat	1. Gunawan Wicaksonno, Bagian Perencanaan
		2. I Made Bagas P.S., Bagian Perencanaan

SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL
PERKERETAAPIAN,

Ir. JUJUN ENDAH WAHJUNINGRUM, M.T., QGIA
NIP 196507031991032001

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO. 8
JAKARTA 10110
TELP: +62 813-600- 3638
WEBSITE : http://djka.dephub.go.id/
EMAIL : ditjenka@kemenhub.go.id

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERKERETAAPIAN

NOMOR : KP-DJKA 129 TAHUN 2024

TENTANG

TIM EVALUASI PENILAIAN MANDIRI IMPLEMENTASI SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN TAHUN 2024

DIREKTUR JENDERAL PERKERETAAPIAN,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka pelaksanaan evaluasi internal implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), maka dibutuhkan pembentukan Tim untuk melakukan evaluasi internal sebagaimana dimaksud secara berjenjang di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian;

b. bahwa jabatan dan nama yang tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dipandang mampu melaksanakan tugas sebagai Tim Evaluasi Internal Implementasi SAKIP di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Perkeretaapian tentang Pembentukan Tim Evaluasi Internal Implementasi SAKIP di Lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2024.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4722);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 80);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2022 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 33);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Tahun 2014 Nomor 1842);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Tahun 2021 Nomor 1569);
8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 112 Tahun 2017 tentang Pedoman Dan Proses Perencanaan di Lingkungan Kementerian Perhubungan (Berita Negara Tahun 2017 Nomor 1710);

9. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 85 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Tahun 2020 Nomor 1402);
10. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 17 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Tahun 2022 Nomor 815).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERKERETAAPIAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM EVALUASI INTERNAL IMPLEMENTASI SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN TAHUN 2024.

KESATU : Membentuk Tim Evaluasi Internal Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2024 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Evaluasi Internal Implementasi SAKIP sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

a. Pengarah:
   Memberikan arahan kepada Penanggungjawab dan Tim Evaluasi untuk melaksanakan evaluasi internal terkait implementasi SAKIP di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian sesuai ketentuan yang berlaku.
b. Penanggungjawab:

1) Bertanggungjawab dalam pelaksanaan evaluasi internal implementasi SAKIP di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian;
2) Melaporkan hasil evaluasi internal dimaksud kepada Direktur Jenderal Perkeretaapian selaku Pengarah.

c. Tim Evaluasi:
1) Melakukan persiapan rencana kerja termasuk pengumpulan kebutuhan data/informasi serta penyamaan persepsi di internal Tim untuk pelaksanaan evaluasi internal implementasi SAKIP di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian;
2) Menganalisa dan melakukan evaluasi terhadap isian Lembar Kerja Evaluasi serta dokumen pendukung sesuai variabel penilaian mencakup:
a) Komponen, terdiri dari Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal.
b) Sub-komponen, terdiri dari penilaian Keberadaan Kualitas, dan Pemanfaatan pada setiap komponen.
c) Kriteria, merupakan gambaran kondisi yang perlu dicapai di setiap subkomponen untuk dapat dinilai apakah kondisi tersebut sudah atau belum dicapai dan dapat digambarkan atau tidak.
3) Melakukan koordinasi dan konsolidasi dengan sub unit kerja yang menjadi objek penilaian dan evaluasi.
4) Melakukan kompilasi hasil evaluasi dan menyusun laporan termasuk rekomendasi untuk langkah lanjut peningkatan implementasi SAKIP sesuai ketentuan yang berlaku guna selanjutnya dilaporkan kepada Penanggungjawab.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan kegiatan Tim Evaluasi Internal Implementasi SAKIP di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian dibebankan pada DIPA Satuan Kerja Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun Anggaran 2024.

KEEMPAT : Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : JAKARTA
Pada tanggal : 21 Juni 2024

DIREKTUR JENDERAL PERKERETAAPIAN,

Ir. MOHAMAD RISAL WASAL, A.TD., M.M., IPM
NIP 196706081990031005

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Para Direktur di Lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian;
2. Yang bersangkutan.

Lampiran Surat Keputusan
Direktur Jenderal Perkeretaapian
Nomor : KP.DJKA 129 TAHUN 2024
Tanggal : 21 JUNI 2024

TIM EVALUASI PENILAIAN MANDIRI IMPLEMENTASI
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DI LINGKUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN TAHUN 2024

NO.	POSISI	URAIAN
I.	PENGARAH	Direktur Jenderal Perkeretaapian
II.	PENANGGUNG JAWAB	Sekretaris Direktorat Jenderal Perkeretaapian
III.	TIM EVALUASI	
A.	Ketua	Kepala Bagian Perencanaan
B.	Wakil Ketua	Kepala Bagian SDM dan Umum
C.	Anggota	1. Koordinator Kelompok Evaluasi dan Pelaporan, Bagian Perencanaan
		2. Koordinator Kelompok Verifikasi Anggaran, Bagian Keuangan
		3. Koordinator Kelompok Perjanjian dan Advokasi Hukum
		4. Koordinator Kelompok Tata Usaha, Bagian SDM dan Umum
		5. Koordinator Kelompok Tata Usaha, Direktorat LLAKA
		6. Koordinator Kelompok Tata Usaha, Direktorat Prasarana Perkeretaapian
		7. Koordinator Kelompok Tata Usaha, Direktorat Sarana Perkeretaapian
		8. Koordinator Kelompok Tata Usaha, Direktorat Keselamatan Perkeretaapian
		9. Novie Hasta Wahyudi, Bagian Perencanaan
		10. Gunawan, Bagian Perencanaan
		11. Merinda P., Bagian Perencanaan
		12. Andre Budi Dharmawan, Direktorat LLAKA
		13. Ridlwan Imam Muttaqin, Direktorat Prasarana Perkeretaapian
		14. Johannes Angga Prima, Direktorat Sarana Perkeretaapian
		15. Robby Nugraha, Direktorat Keselamatan Perkeretaapian

		16. Eric Van Chrisman, BTP Jakarta
		17. Riswantara, BTP Bandung
		18. Burhanudin Nurseto Pratomo, BTP Semarang
		19. Ranti Ahmad Alrasyid, BTP Surabaya
		20. Harmita Morgan, BTP Medan
		21. Alfajri Prima Novel, BTP Padang
		22. Supandiansyah, BTP Palembang
		23. Khoirun Nisaa, Balai Pengujian Perkeretaapian
		24. Yayang Nirmala P., Balai Perawatan Perkeretaapian
		25. Ariq Ghazy Abrary, BPKAR Sumatera Selatan
		26. Dwi Indriyani, BPKA Sulawesi Selatan
D.	Sekretariat	1. Indah Dwi A., Bagian Perencanaan
		2. Taufik Alamsyah, Bagian Perencanaan

DIREKTUR JENDERAL PERKERETAAPIAN,

Ir. MOHAMAD RISAL WASAL, A.TD., M.M., IPM
NIP 196706081990031005

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO. 8
JAKARTA 10110
TELP: +62 813-6001- 383
WEBSITE : djka.kemenhub.go.id
EMAIL : ditjenka@kemenhub.go.id

Nomor : PR.205/1/24/KI/DJKA/2024 Jakarta, 13 Mei 2024
Klasifikasi : Biasa
Lampiran : Satu berkas
Hal : Undangan Rapat

Yth. Daftar Terlampir

Dalam rangka persiapan evaluasi implementasi SAKIP Tahun 2024 oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan pada unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian, dengan ini dimohon kehadirannya dalam rapat yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Selasa – Rabu / 21 s.d 22 Mei 2024
Pukul : Rincian Jadwal Terlampir
Tempat : Bogor, Jawa Barat
Acara : 1. Koordinasi dan Penjelasan Tahapan Penilaian Mandiri Implementasi SAKIP Tahun 2024
2. Monitoring Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Implementasi SAKIP Tahun 2023
Pimpinan Rapat : Sesditjen Perkeretaapian/Kepala Bagian Perencanaan

Atas perhatian dan kehadirannya diucapkan terima kasih.

Plh. Sekretaris Direktorat Jenderal
Perkeretaapian,

Frederik Pongtuluran
NIP 197502252006041001

Tembusan:
1. Direktur Jenderal Perkeretaapian;
2. Sesditjen Perkeretaapian.

Lampiran Surat Undangan

Nomor : PR.205/1/24/K1/DJKA/2024
Tanggal : 13 Mei 2024

1. Asisten Deputi Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan dan Evaluasi Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan II Kementerian PANRB (narasumber);
2. Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api;
3. Direktur Prasarana Perkeretaapian;
4. Direktur Sarana Perkeretaapian;
5. Direktur Keselamatan Perkeretaapian;
6. Kepala Bagian Keuangan, Setditjen Perkeretaapian;
7. Kepala Bagian Hukum, Setditjen Perkeretaapian;
8. Kepala Bagian SDM dan Umum, Setditjen Perkeretaapian;
9. Kepala Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Jakarta;
10. Kepala Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Bandung;
11. Kepala Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Semarang;
12. Kepala Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Surabaya;
13. Kepala Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Medan;
14. Kepala Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Padang;
15. Kepala Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Palembang;
16. Kepala Balai Pengujian Perkeretaapian;
17. Kepala Balai Perawatan Perkeretaapian;
18. Kepala Balai Pengelola Kereta Api Ringan Sumatera Selatan;
19. Kepala Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan.

Plh. Sekretaris Direktorat Jenderal
Perkeretaapian,

Frederik Pongtuluran
NIP 197502252006041001

JADWAL ACARA
KOORDINASI PENILAIAN MANDIRI IMPLEMENTASI SAKIP TAHUN 2024
PADA UNIT KERJA DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

WAKTU	ACARA	KETERANGAN
Selasa, 21 Mei 2024		
09.00 – 12.00	• Evaluasi Implementasi SAKIP berdasarkan Peraturan Menteri PANRB Nomor PM 88 Tahun 2021 • Penjelasan Lembar Kerja Evaluasi dan Kebutuhan Data Dukung: o Komponen Perencanaan Kinerja o Komponen Pengukuran Kinerja	Narasumber: Kementerian PANRB Peserta : Seluruh unit kerja
12.00 – 13.00	ISTIRAHAT	
13.00 – 15.00	• Penjelasan Lembar Kerja Evaluasi dan Kebutuhan Data Dukung: o Komponen Pelaporan Kinerja o Komponen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal • Pembahasan Kebutuhan Kuisioner/Data Dukung Lainnya	Narasumber: Kementerian PANRB Peserta : Seluruh unit kerja
15.00 – 15.30	ISTIRAHAT	
15.30 – 17.30	Monitoring Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Implementasi SAKIP Tahun 2023	Peserta : Seluruh unit kerja
Rabu, 22 Mei 2024		
09.00 – 11.30	Penjelasan Pemanfaatan SILAKI pada Portal Aplikasi Direktorat Jenderal Perkeretaapian terkait Fitur Evaluasi Implementasi SAKIP	Peserta : Seluruh unit kerja
11.30 – 13.00	ISTIRAHAT	
13.00 – 15.00	Penilaian Mandiri Implementasi SAKIP Tahun 2024 Masing-Masing Unit Kerja	Peserta : Seluruh unit kerja
15.00 – 15.30	ISTIRAHAT	
15.30 – 17.30	Lanjutan Penilaian Mandiri Implementasi SAKIP Tahun 2024 Masing-Masing Unit Kerja	Peserta : Seluruh unit kerja

No. ST	:	KP.004/24/8/K1/DJKA/2024
Lokasi	:	Bogor

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

LAPORAN

RAPAT KOORDINASI PENILAIAN MANDIRI IMPLEMENTASI SAKIP TAHUN 2024 PADA UNIT KERJA DI LINGKUNGAN DITJEN PERKERETAAPIAN

DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

MEI 2024

Rapat Koordinasi Penilaian Mandiri Implementasi SAKIP Tahun 2024
pada Unit Kerja di Lingkungan Ditjen Perkeretaapian

A. DASAR PENUGASAN

1. Surat Undangan Plh. Sekretaris Direktorat Jenderal Perkeretaapian Nomor: PR.205/1/24/K1/DJKA /2024 tanggal 13 Mei 2024;
2. Surat Tugas Sekretaris Direktorat Jenderal Perkeretaapian Nomor: KP.004/24/8/K1/DJKA/2024 tanggal 20 Mei 2024.

B. PELAKSANAAN KEGIATAN

1. Pimpinan : Koordinator Kel. Evaluasi dan Pelaporan
2. Hari/Tanggal : Selasa s.d. Rabu, 21 s.d. 22 Mei 2024
3. Pukul : 09.00 WIB s.d. Selesai
4. Tempat : Hotel Salak Heritage Bogor
5. Peserta : *Perwakilan dari :*
    a) KemenpanRB (Narasumber);
    b) Dit. LLAKA;
    c) Dit. Prasarana;
    d) Dit. Sarana;
    e) Dit. Keselamatan;
    f) Bagian-Bagian Setditjen Perkeretaapian;
    g) Balai-Balai di lingkungan Ditjen Perkeretaapian.
6. Kegiatan – kegiatan yang dilaksanakan sebagai berikut:
    a. Evaluasi Implementasi SAKIP berdasarkan Peraturan Menteri PANRB Nomor PM 88 Tahun 2021 oleh Narasumber;
    b. Penjelasan Lembar Kerja Evaluasi dan Kebutuhan Data Dukung Komponen Perencanaan Kinerja dan Komponen Pengukuran Kinerja;
    c. Penjelasan Lembar Kerja Evaluasi dan Kebutuhan Data Dukung Komponen Pelaporan Kinerja dan Komponen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal;
    d. Penjelasan Pemanfaatan SILAKI pada Portal Aplikasi Direktorat Jenderal Perkeretaapian terkait Fitur Evaluasi Implementasi SAKIP;

e. Monitoring Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Implementasi SAKIP Tahun 2023;
f. Pembahasan Kebutuhan Kuisioner atau Data Dukung Lainnya yang dibutuhkan untuk memenuhi kriteria;
g. Penilaian Mandiri Implementasi SAKIP Tahun 2024 Masing-Masing Unit Kerja.

C. POKOK – POKOK PEMBAHASAN

1. Rapat diselenggarakan dalam rangka Koordinasi dan Penjelasan Tahapan Penilaian Mandiri Implementasi SAKIP tahun 2024 dan Monitoring Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Implementasi SAKIP Tahun 2023.
2. Pengarahan Evaluasi SAKIP Tahun 2024:
   a) Saat ini Kementerian Perhubungan sedang melakukan revisi PM 55 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kementerian Perhubungan dimana pada RPM baru menerangkan bahwa perlu dilakukan evaluasi mandiri terlebih dahulu.
   b) Pada rapat ini diharapkan KemenPANRB dapat menyampaikan masukan dari penyelenggaraan Evaluasi SAKIP Tahun 2023.
3. Pemaparan Materi dari Narasumber Kementerian PUPR:
   a) Evaluasi Implementasi SAKIP dilakukan guna:
      1) Memperoleh informasi terkait implementasi SAKIP
      2) Menilai tingkat implementasi SAKIP
      3) Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan implementasi SAKIP
      4) Memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil Evaluasi atas
      5) Implementasi SAKIP periode sebelumnya
   b) Evaluasi Implementasi SAKIP Tahun 2024 ditargetkan selesai pada bulan September 2024 dan akan dilakukan awarding.
   c) Evaluasi Implementasi SAKIP dilakukan oleh APIP internal masing-masing Kementerian/Lembaga sedangkan KemenPANRB akan memeriksa Tindak Lanjut yang sudah dilakukan oleh masing-masing unit kerja.
   d) KemenPANRB akan melakukan visitasi pada unit kerja yang berpotensi untuk mendapatkan kenaikan nilai. Visitasi biasanya dilakukan secara *zoom* dan jika dirasa belum cukup akan dilakukan kunjungan.

e) Beberapa catatan terkait Evaluasi Implementasi SAKIP Kementerian Perhubungan Tahun 2023:
   1) Komponen perencanaan kinerja masih memerlukan perbaikan.
   2) Terdapat beberapa IKK pada Dimensi dan targetnya belum sesuai, persentase dihitung pembilang dan penyebut berbeda.
   3) Ada beberapa unit kerja yang staff nya tidak memahami PK atasannya.
   4) Diperlukan perhatiaan pada parameter kualitas dan implementasi.
f) Sesi Diskusi:
   1) Analisis efisiensi sumber daya tidak harus terkait dengan SDM, bisa terkait anggaran atau hal-hal lain. Untuk di KemenPANRB belum pernah dilakukan efisiensi SDM karena dirasa masih kekurangan SDM. Dalam analisis efisiensi minimal dapat menganalisis dengan analisis efisiensi kinerjanya.
   2) LHE KemenPANRB menggunakan batas capaian kinerja *on the right track* 90-110%. Inspektorat Jenderal Kemenhub menyesuaikan dengan LHE KemenPANRB.
   3) Data dukung terkait pada komponen 2.C.2 Pengukuran Kinerja telah menjadi dasar dalam penempatan/penghapusan Jabatan baik struktural maupun fungsional dapat menggunakan hasil assesment pejabat Eselon II.
   4) Terkait ketepatan waktu upload dokumen pada e-SAKIP Reviu untuk Renstra yang diperiksa yaitu dokumen reviu/revisi terakhir, tapi untuk dokumen yang disusun per tahun yang dijadikan acuan merupakan dokumen terakhir (RKT, PK dan lain-lain).
   5) Terkait dengan wawancara tidak ada format khusus dari Kemen PANRB dan bisa dikoordinasikan dengan Inspektorat Jenderal.
   6) Terkait dengan IKK Persentase Fasilitas Operasi dengan Teknologi Handal (%) pada tahun 2023 terdapat sinkronisasi data sehingga jumlah penyebut mengalami peningkatan dan berdampak pada menurunnya target tahun 2024, disaranakan untuk dilakukan perubahan formulasi dan definisi sehingga bisa menjadi justifikasi pada tim evaluator dari APIP.

7) Terkait dengan kriteria target menantang dari KemenPANRB menganggap sudah menantang jika target minimal sama dengan capaian tahun ini.
8) Terkait dengan Indikator Kinerja perlu ditetapkan dengan Keputusan Dirjen masing-masing Eselon I.
9) Terkait dengan crosscutting, keterlibatan unit kerja lain dalam menunjang kinerja di Ditjen Perkeretaapian (unit kerja). Misal IKK Ditjen Perkeretaapian yang dipengaruhi oleh IKK Ditjen Perhubungan Darat. Bisa juga berdasarkan antar eselon II atau balai. Kenapa dimulai dari crosscutting internal, agar diketahui bahwa tidak ada unit kerja yang bisa mencapai IKK sendiri, melainkan diperlukan koordinasi dengan unit kerja lain.
10) Terkait dengan kriteria Informasi dalam laporan kinerja selalu mempengaruhi perubahan budaya kinerja organisasi. Pada KemenPANRB berupa Rapat Pimpinan mingguan terkait evaluasi internal kinerja. Tidak harus hal-hal yang baru.
11) SAKIP dan Indeks RB sebenarnya memiliki goal untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan. Perbaikan tata kelola tidak harus perbaikan secara besar-besaran, misal dengan adanya perbaikan SOP.

4. Persiapan Evaluasi Implementasi:
   a) Perubahan KM masih dalam proses
   b) RPM, eselon II membentuk tim untuk evaluasi dan melakukan evaluasi kemudian melaporkan kepada eselon I. Kemudian Eselon I membuat tim sendiri.
   c) Pada tahun sebelumnya dilaksanakan secara paralel.
   d) Dimohon usulan 2 orang untuk SK PM Evaluasi. Tahun ini diharapkan evaluasi bisa secara paralel berjalan.
   e) Pada tahun sebelumnya bulan Mei 2023 Inspektorat Jenderal mulai melakukan evaluasi dan indikasi kegiatan akan maju berjalan.
   f) Subkomponen kualitas dan pemanfaatan, upaya yang bisa dihargai (inovasi) menjadi perhatian.
   g) Pada lampiran Rancangan KM sudah dilengkapi dengan langkah kerja dan evidence, diharapkan bisa menjadi acuan dalam pelaksanaan PM.

5. Pembahasan Komponen LKE Evaluasi SAKIP:
    a) Sub Komponen 1.A
        1) Dokumen Perencanaan RKT agar menjadi perhatian karena pada tahun sebelumnya terdapat beberapa unit kerja yang tidak memiliki.
        2) Data dukung yang dibutuhkan diantaranya Renstra, RPJP, RKT, PK, Renaksi, DIPA/POK.
    b) Sub Komponen 1.B
        1) Semua dokumen perencanaan agar diformalkan.
        2) Diperlukan data dukung Renaksi PK yang di upload secara terpisah pada e-SAKIP Reviu.
        3) Indikator kinerja perlu memenuhi kriteria SMART-C.
        4) 1.B.5 Data dukung lain yang diperlukan Manual IKU (2 Revisi), pedoman SAKIP.
        5) Terdapat beberapa penambahan form sesuai dengan RPM Evaluasi SAKIP yang sedang disusun.
        6) MPH bisa mengacu dengan dokumen penilaian pegawai yang digunakan sebelum aplikasi E-Kinerja.
    c) Sub Komponen 1.C
        1) Sejauh ini tidak ada unit kerja yang rata-rata persentase capaian yang di atas 120% namun perlu di cek kembali capaian kinerja yang diatas 110%.
        2) Pada triwulan I 2024 terdapat beberapa IKK yang capaiannya diatas 110% dan sudah direkomendasikan untuk adanya revisi PK.
        3) Perlu disiapkan kuesioner evaluasi SAKIP dan MPH.
    d) Diskusi untuk Komponen 1
        1) SK Tim PM SAKIP perlu disusun terpisah dikarenakan pada SK Penyelenggaraan SAKIP hanya memuat kebutuhan evaluasi kinerja. Anggota tim bisa sama mengingat keterbatasan SDM, namun diusahakan anggota tim evaluasi SAKIP pada Eselon II tidak sama dengan anggota tim evaluasi SAKIP pada Eselon I.
        2) Terdapat kendala hilangnya upload data RKT Tahun 2024.
        3) MPPH sementara dapat menggunakan matriks penilaian pegawai dan menu intervensi pada aplikasi E-Kinerja.
        4) Format 10

Format-10

KERTAS KERJA EVALUASI

INDIKATOR KINERJA

No	IKU/IKK	Kriteria SMART					
		Spesifik (Y/T)	Measurable (Y/T)	Achievable (Y/T)	Relevance (Y/T)	Timebound (Y/T)	Cukup (Y/T)
1							
2							
3							
4							
5							
dst							

Keterangan:

Y= Ya

T= Tidak

5) Format 11

Format-11

KERTAS KERJA EVALUASI ...

TARGET PERENCANAAN KINERJA

No	IKU/IKK	Tahun...		Tahun sebelumnya		Kriteria		
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Dapat Dicapai (Y/T)	Menantang (Y/T	Realistis (Y/T)
1								
2								
3								
4								
5								
dst								

Keterangan:

Y= Ya

T= Tidak

6) Form 10 dan Form 11 agar disiapkan.

e) Sub Komponen 2.A

1) Pedoman teknis yang mengatur tentang pengukuran kinerja dan pengumpulan data kinerja.
2) Untuk Renstra 2015-2019 perlu dimasukan juga karena masuk periode lima tahun terakhir.
3) Memuat SOP tentang Pengumpulan Data Kinerja yang jelas apabila terpisah lebih baik namun apabila gabungan tidak masalah.

f) Sub Komponen 2.B

1) Nomor 2.b.1 s.d. 2.b.3 kebanyakan berupa dokumentasi keterlibatan pimpinan dalam capaian kinerja.
2) Data dukung terdapat pada lampiran LKIP.
3) 2.b.6 dan 2.b.7, telah memanfaatkan aplikasi berupa screenshoot pengukuran kinerja melalui aplikasi *e-Performance* dan aplikasi lain (SILAKI).

g) Sub Komponen 2.C
1) 2.c.1, belum mengacu pada monitoring renaksi atas PK, pengukuran kinerja individu belum ogranisasi.
2) 2.c.2, surat usulan promosi jabatan, hasil assesment dan mutasi.
3) 2.c.3, *bezzeting* pegawai merupakan data pegawai yang dimiliki saat ini dan tidak harus ada *refocusing*.
4) 2.c.9 dan 2.c.10 berupa kueisoner pemahanan pimpinan dan pegawai terkait hasil pengukuran kinerja.

h) Diskusi untuk Komponen 2
1) 2.c.1 Belum ada surat edaran atau ketentuan dari capaian kinerja organisasi berkaitan dengan tunjangan kinerja individu dan penilaian dianggap memenuhi sebagai pengukuran kinerja individu diperkuat SE dan rapat-rapat terkait integrasi yang mana integrasi antara e-Performance dan e-Kinerja masih berproses termasuk peraturannya.
2) 2.b.1 Matriks paraf berjenjang dokumen monitoring bisa ditambahkan sebagai data dukung.
3) 2.a.3 SOP pengumpulan data bisa umum atau spesifik yang penting dalamnya ada tahapan pengumpulan datanya dan terdapat nama PIC serta waktu penyampaiannya.

i) Sub Komponen 3.A
1) 3.a.1 Dokumen LAKIP lima tahun terakhir
2) 3.a.2 Ada 20 dokumen untuk Laporan TW lima tahun terakhir
3) 3.a.3 Data dukung sama dengan nomor 3.a.1
4) 3.a.4 Belum ada 5 tahun terakhir
5) 3.a.5 Pengembangan ESR data hilang diberi screenshoot tahun lalu dan tahun 2024 (bukti penguploadan)

6) 3.a.6 Surat penyampaian Laporan Kinerja Dirjen Ke Menteri dan seterusnya (Atasan Langsung)

j) Sub Komponen 3.B
   1) 3.b.1 Pending 2-5 tidak terpenuhi
   2) 3.b.2 PM 85, buku SAKIP, LAKIP, ND tentang kegiatan capaian kinerja
   3) 3.b.5 Matriks perbandingan realisasi kinerja pada LAKIP
   4) 3.b.7 Highlight analsis dan evaluasi keberhasilan atau kegagalan pada LAKIP

k) Sub Komponen 3.C
   1) 3.c.1, Arahan pimpinan dari portal atau disposisi langsung
   2) 3.c.2, SKP, Hasil Kuesioner
   3) 3.c.4, Revisi Monitoring Renaksi, DIPA, dan POK.
   4) 3.c.6, PK 2023 awal disandingkan dengan LAKIP.
   5) 3.c.7, Perubahan kinerja contoh rapat rutin, apel data dukung foto, dokumentasi rapat staf rutin dan absensi fingerprint.

l) Diskusi Komponen 3

   Memenuhui keberadaan 5 tahun diberikan nilai AA kalau hanya satu tahun diberi nilai A. Untuk Renstra 2015-2019 juga dimasukan.

m) Sub Komponen 4.A
   1) 4.a.1, Peraturan tentang pedoman evaluasi AKIP masih disusun dapat menggunakan SE Itjen termasuk Buku SAKIP.
   2) 4.a.2, masing-masing membuat LKE yang telah ditandatangi pimpinan dan tim evalutor internal dan LHE yang bertandatangan.
   3) 4.a.3, berjenjang Eselon II dan Balai selesai perlu dilaporkan ke Dirjen.

n) Sub Komponen 4.B
   1) 4.b.2, agar membentuk SK Tim Evaluasi AKIP dan melaksanakan rapat internal terlebih dahulu. Untuk Satker BLU evaluasi internal dilakukan oleh SPI.
   2) 4.b.4, proses evaluasi SAKIP tidak terpaku pada aplikasi.
   3) 4.b.5, masih menggunakan SILAKI seperti tahun sebelumnya.

o) Sub Komponen 4.C

1) 4.c.1, Berita Acara Pemantauan Tindak Lanjut atas Rekomendasi Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Format 12 akan dikonsepkan dan Hasil rapat saat ini bisa dijadikan sebagai data dukung.
2) 4.c.4, Perbandingan efisiensi antara tahun lalu dengan saat ini.

p) Diskusi Komponen 4
1) Satu surat atau form dari Dirjen sudah mewakili tapi data dukungnya sudah masing-masing unit kerja.
2) SOP apabila setelah reviu masih relevan tidak perlu diubah tetapi agar dilampirkan hasil reviunya masih sesuai atau tidak.
3) Publikasi di E-SAKIP untuk Renstra paling lambat Februari 2024 dan RKT paling lambat di Januari 2024 di upload.

6. Pembentukan Tim Evaluasi AKIP Internal masing-masing Unit Kerja Eselon II/Unit Kerja Mandiri Tahun 2024 (Pastikan anggota Tim pernah mengikuti Bimtek SAKIP).
7. Tahapan Evaluasi Implementasi SAKIP Tahun 2024, sebagai berikut:

8. Masih ada 6 unit kerja yang belum menyampaikan Surat Tindak Lanjut Hasil Evaluasi SAKIP dan data dukungnya.
9. Pemanfaatan SILAKI pada Portal Aplikasi DJKA untuk fitur evaluasi impelementasi SAKIP, sebagai berikut:
   a) Terdapat pembaruan domain pada aplikasi SILAKI yang sudah menjadi bagian dari domain portal https://portal.djka.kemenhub.go.id/silaki.
   b) Aplikasi SILAKI dapat diakses dari menu layanan manajemen Portal Aplikasi DJKA dengan memilih menu SILAKI otomatis masuk dengan *SSO*.
   c) Dokumen yang dapat diupload secara berbarengan pada aplikasi SILAKI maksimal 20 file sekaligus dengan batasan size file 2 GB secara kumulatif.

d) Diharapkan aplikasi SILAKI dapat merecord proses PM mulai dari pengajuan sampai hasil pleno.

e) Agar dikosongkan pada dashboard SILAKI terkait unit kerja *sample* karena belum ditentukan untuk Tahun 2024.

f) Agar dicek kembali terkait backup data yang sudah berjalan untuk menghindari kemungkinan terjadinya kehilangan data yang sudah diunggah.

10. Pembahasan Monitoring Tindak Lanjut atas Rekomendasi Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Tahun 2023, sebagai berikut:

a) Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api, sudah ada konsep Tindak Lanjut atas Rekomendasi namun ada IKK yang menantang targetnya dibawah realisasi perjalanan KA berdasarkan GAPEKA, agar dilaksanakan Revisi PK terhadap target yang belum memenuhi kriteria menantang. Pelaksanaan reviu LKIP dapat mengacu pada reviu LKIP yang dilaksanakan Setditjen Perkeretaapian pada Januari 2024.

b) Direktorat Prasrana Perkeretaapian:

- Secara umum tindak lanjut rekomendasi sudah dilaksanakan hanya terdapat beberapa data dukung yang hilang di ESR akibat gangguan/*update* sistem.
- Dibutuhkan dukungan dokumentasi pelaksanaan benchmark SAKIP dari Setditjen Perkeretaapian.
- Pencapaian kinerja agar tetap dilakukan monitoring untuk memenuhi kriteria *On The Right Track* (OTR).

c) Direktorat Sarana Perkeretaapian:

- Pelaksanaan reviu LKIP mengacu pada reviu LKIP yang dilaksanakan Setditjen Perkeretaapian pada Januari 2024.
- Publikasi dokumen Monitoring Triwulan IV Tahun 2023, Monitoring bulan Oktober, November, Desember 2023 hilang karena terdapat gangguan sistem pada E-SAKIP REVIU.

d) Direktorat Keselamatan Perkeretaapian:

- Melakukan Percepatan Nota Dinas terkait penyampaian tindak lanjut hasil evaluasi implementasi SAKIP ke Setditjen Perkeretaapian.
- Melengkapi Data Dukung tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi implementasi SAKIP.

e) BTP Kelas I Jakarta, tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi implementasi SAKIP tahun 2023 sudah ditindaklanjuti secara tuntas.
f) BTP Kelas I Bandung, tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi implementasi SAKIP tahun 2023 sudah ditindaklanjuti secara tuntas dan sudah disampaikan melalui surat ke Setditjen Perkeretaapian.
g) BTP Kelas I Semarang:
    - Kategori menantang sesuai dengan arahan KemenpanRB minimal sama dengan tahun lalu.
    - Terdapat perubahan kategori TQI saat ini sedang dalam tahap pembahasan.
h) BTP Kelas I Surabaya, sudah ditindaklanjuti hasil evaluasi rekomendasi secara tuntas namun perlu diperjelas 1 IKK yang tidak tercapai terkait upaya-upaya yang sudah dilakukan (indikator keselamatan).
i) BTP Kelas I Medan:
    - Publikasi dokumen hilang karena terdapat gangguan sistem pada E-SAKIP REVIU agar diberi tanggapan dan bukti screenshoot upload sebelumnya atau laporan rapat pembahasan.
    - Kriteria menantang minimal sama dengan tahun lalu sesuai arahan KemenpanRB.
j) BTP Kelas II Padang, semua rekomendasi sudah ditindaklanjuti secara tuntas, dengan catatan:
    - Publikasi dokumen hilang karena terdapat gangguan sistem pada E-SAKIP REVIU agar diberi tanggapan dan bukti screenshoot upload sebelumnya atau laporan rapat pembahasan.
    - Kriteria menantang minimal sama dengan tahun lalu sesuai arahan KemenpanRB.
    - Efisiensi SDM sebenarnya masih kurang
k) BTP Kelas II Palembang, terdapat satu rekomendasi yang masih berproses terkait upaya yang bisa dihargai atau inovasi terkait perencanaan kinerja, pengukuran kinerja dan pelaporan kinerja, dengan catatan:
    - Agar disandingkan untuk data dukung realisasi tahun 2023 dengan penetapan target di tahun 2024 agar terlihat peningkatannya.

- Terkait rekomendasi nomor 7 agar diuraikan mana yang sudah dan yang belum.

l) BPKARSS:
- Publikasi dokumen hilang karena terdapat gangguan sistem pada E-SAKIP REVIU agar diberi tanggapan dan bukti screenshoot upload sebelumnya.
- Reviu LAKIP agar disertakan baik internal maupun eksternal.
- Data dukung SMART dan kriteria menantang dapat ditambahkan dari form 10 dan form 11.

m) BPKA Sulsel:
- Dalam menetapkan target IKK dalam Perjanjian Kinerja kriteria menantang dapat sama dengan tahun sebelumnya sesuai arahan KemenPANRB.
- Target 2024 agar mempertimbangkan capaian tahun 2023.
- Analisa efisiensi SDM agar dikorelasikan dengan capaian kinerja.
- Dokumen Anggaran yang diperlukan DIPA dan POK.

n) Balai Pengujian:
- Dokumen Perencanaan Kinerja dan Pelaporan Kinerja telah dipublikasi dengan lengkap dan tepat waktu.
- Rekomendasi terkait upaya yang bisa dihargai menggunakan e-Kinerja sebagai pelaporan kinerja dapat dianggap tuntas.

o) Balai Perawatan, semua rekomendasi telah ditindaklanjuti dengan catatatan:
- Agar dalam melakukan revisi target pada indikator kualitas pelaksanaan anggaran selain memperhatikan realisasi tahun sebelumnya juga memperhatikan upaya perbaikan.
- Agar ditambahkan dokumentasi reviu rapat pembahasan internal yang dilaksanakan Balai Perawatan seperti pembahasan laporan kinerja tahunan.

11. Pembahasan terkait kebutuhan kuesioner untuk memenhui kriteria dengan tata cara pengisian memilih alternatif jawaban sesuai skala satu sampai lima dan uraian secara singkat jawaban yang diketahui untuk tahun lalu 2.c.9 dan 2.c.10 tahun ini ada penambahan 1.c.7 dan 3.c.2, dengan konsep pertanyaan sebagai berikut:

Daftar Pertanyaan 1.c.7:

a) Apakah anda mengetahui dan memahami dokumen perencanaan kinerja yang ada pada unit organisasi anda ?

1	2	3	4	5
Tidak Paham	Kurang Paham	Cukup Paham	Paham	Sangat Paham

b) Apakah anda mengetahui dan memahami indikator kinerja unit kerja anda yang telah ditetapkan?

1	2	3	4	5
Tidak Paham	Kurang Paham	Cukup Paham	Paham	Sangat Paham

c) Apakah anda mengetahui dan memahami target kinerja yang ditetapkan pada Unit kerja anda?

1	2	3	4	5
Tidak Paham	Kurang Paham	Cukup Paham	Paham	Sangat Paham

d) Apakah indikator kinerja individu anda mendukung kinerja organisasi anda?

e) Apa komitmen anda dalam mencapai kinerja individu guna mendukung kinerja organisasi?

Daftar Pertanyaan 2.c.9:

Setiap unit/satuan kerja memahami dan peduli atas hasil pengukuran kinerja.

a) Apakah anda mengetahui aplikasi yang digunakan untuk mengukur capaian kinerja organisasi ?

1	2	3	4	5
Tidak Paham	Kurang Paham	Cukup Paham	Paham	Sangat Paham

b) Apakah anda mengetahui dan memahami apa itu aplikasi E-Performance?

1	2	3	4	5
Tidak Paham	Kurang Paham	Cukup Paham	Paham	Sangat Paham

c) Kapan waktu pengisian aplikasi E-Performance?
d) Siapa sajakah yang wajib pengisian aplikasi E-Performance?
e) Mengapa harus pengisian aplikasi E-Performance?
f) Bagaimana cara pengisian aplikasi E-Performance?

Daftar Pertanyaan 2c.10:

Setiap pegawai memahami dan peduli atas hasil pengukuran kinerja.

a) Apakah anda mengetahui dan memahami Aplikasi E-KINERJA Kemenhub?

1	2	3	4	5
Tidak Paham	Kurang Paham	Cukup Paham	Paham	Sangat Paham

b) Apakah anda memahami bahwa kinerja pegawai mendukung pencapaian terhadap kinerja organisasi?

1	2	3	4	5
Tidak Paham	Kurang Paham	Cukup Paham	Paham	Sangat Paham

c) Kapan waktu pengisian Aplikasi E-KINERJA Kemenhub?
d) Siapa sajakah yang wajib mengisi Aplikasi E-KINERJA Kemenhub?
e) Mengapa harus melakukan pengisian Aplikasi E-KINERJA Kemenhub?
f) Bagaimana cara pengisian Aplikasi E-KINERJA Kemenhub?

Daftar Pertanyaan 3.c.2:

Penyajian informasi dalam laporan kinerja menjadi kepedulian seluruh pegawai.

a) Apakah anda mengetahui dan memahami apa itu LKIP ?

1	2	3	4	5
Tidak Paham	Kurang Paham	Cukup Paham	Paham	Sangat Paham

b) Apakah Dokumen LKIP telah dipublikasikan dan dapat diakses seluruh pegawai ?
c) Siapa sajakah yang wajib melakukan penyusunan LKIP ?
d) Apakah ada mengetahui dasar penyusunan LKIP ?
e) Apakah kendala dan permasalahan pencapaian kinerja telah diuraikan dalam LKIP ?
f) Apakah anda mengetahui bahwa rekomendasi dari Laporan Kinerja telah ditindaklanjuti ?

D. KESIMPULAN

1. Agar masing-masing unit kerja melengkapi isian berita acara dan link data dukungnya.
2. Wawancara akan menggunakan *Google Form* yang bertanda tangan berdasarkan pertanyaan kuesioner yang telah difinalisasi.
3. Agar unit kerja mulai mengisi LKE SAKIP pada aplikasi SILAKI untuk semua komponen apabila ada yang ingin didiskusikan lanjut dapat menyampaikan pada WAG Pelaporan Kinerja.
4. Masing-masing unit kerja agar melengkapi link nama Anggota Tim Evaluasi PM Implementasi SAKIP Tahun 2024 untuk Tingkat Eselon I yang anggotanya harus berbeda dari anggota Tim Evaluasi SAKIP Internal.

E. PENUTUP

Demikian laporan ini buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 23 Mei 2024

NOTULENSI

(Kel. Evaluasi dan Pelaporan)

DOKUMENTASI

KEPATUHAN PENGISIAN E-PERFORMANCE DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN PER UNIT KERJA

Filter By: 2024 Proses

No	Unit Kerja	Rekapitulasi Pengisian E-Performance (Bulan)											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN	✓	✓	✓	✓	✓	✓	▭	▭	▭	▭	▭	▭
2	DIREKTORAT LALU LINTAS DAN ANGKUTAN KERETA API	✓	✓	✓	✓	✓	✓	▭	▭	▭	▭	▭	▭
3	DIREKTORAT PRASARANA	✓	✓	✓	✓	✓	✓	▭	▭	▭	▭	▭	▭
4	DIREKTORAT SARANA	✓	✓	✓	✓	✓	✓	▭	▭	▭	▭	▭	▭
5	DIREKTORAT KESELAMATAN	✓	✓	✓	✓	✓	✓	▭	▭	▭	▭	▭	▭
6	BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN WILAYAH JAKARTA DAN BANTEN	✓	✓	✓	✓	✓	✓	▭	▭	▭	▭	▭	▭
7	BALAI TEKNIK PEREKERETAAPIAN WILAYAH JAWA BAGIAN BARAT	✓	✓	✓	✓	✓	✓	▭	▭	▭	▭	▭	▭
8	BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN WILAYAH JAWA BAGIAN TENGAH	✓	✓	✓	✓	✓	✓	▭	▭	▭	▭	▭	▭
9	BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN WILAYAH JAWA BAGIAN TIMUR	✓	✓	✓	✓	✓	✓	▭	▭	▭	▭	▭	▭
10	BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN WILAYAH SUMATERA BAGIAN UTARA	✓	✓	✓	✓	✓	✓	▭	▭	▭	▭	▭	▭
11	BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN WILAYAH SUMATERA BAGIAN BARAT	✓	✓	✓	✓	✓	✓	▭	▭	▭	▭	▭	▭
12	BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN WILAYAH SUMATERA BAGIAN SELATAN	✓	✓	✓	✓	✓	✓	▭	▭	▭	▭	▭	▭
13	BALAI PENGUJIAN PERKERETAAPIAN	✓	✓	✓	✓	✓	✓	▭	▭	▭	▭	▭	▭
14	BALAI PERAWATAN PERKERETAAPIAN	✓	✓	✓	✓	✓	✓	▭	▭	▭	▭	▭	▭
15	BALAI PENGELOLA KERETA API RINGAN SUMATERA SELATAN	✓	✓	✓	✓	✓	✓	▭	▭	▭	▭	▭	▭
16	BALAI PENGELOLA KERETA API SULAWESI SELATAN	✓	✓	✓	✓	✓	✓	▭	▭	▭	▭	▭	▭
17	DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN	✓	✓	✓	✓	✓	✓	▭	▭	▭	▭	▭	▭

Keterangan

- ✓ Tepat Waktu & Lengkap
- ✓ Tepat Waktu & Sebagian Lengkap
- ▭ Tepat Waktu & Data Dukung Tidak Ada
- ✓ Tidak Tepat Waktu & Lengkap
- ✓ Tidak Tepat Waktu & Sebagian Lengkap
- ▭ Tidak Tepat Waktu & Data Dukung Tidak Ada
- ▭ Belum Mengisi

KEPATUHAN PENYUSUNAN MONITORING RENAKSI DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN PER UNIT KERJA

Filter By: 2024 Proses

No	Unit Kerja	Rekapitulasi Pengisian Monitoring Rencana Aksi (Bulan)											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
2	DIREKTORAT LALU LINTAS DAN ANGKUTAN KERETA API	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
3	DIREKTORAT PRASARANA	✓	✓	✓	✓	✓							
4	DIREKTORAT SARANA	✓	✓	✓	✓	✓	✓	–					
5	DIREKTORAT KESELAMATAN	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
6	BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN WILAYAH JAKARTA DAN BANTEN	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
7	BALAI TEKNIK PEREKERETAAPIAN WILAYAH JAWA BAGIAN BARAT	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
8	BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN WILAYAH JAWA BAGIAN TENGAH	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
9	BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN WILAYAH JAWA BAGIAN TIMUR	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
10	BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN WILAYAH SUMATERA BAGIAN UTARA	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
11	BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN WILAYAH SUMATERA BAGIAN BARAT												
12	BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN WILAYAH SUMATERA BAGIAN SELATAN	✓	✓	✓	✓								
13	BALAI PENGUJIAN PERKERETAAPIAN	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
14	BALAI PERAWATAN PERKERETAAPIAN	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
15	BALAI PENGELOLA KERETA API RINGAN SUMATERA SELATAN	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
16	BALAI PENGELOLA KERETA API SULAWESI SELATAN	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
16	DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN	✓	✓	✓	✓	✓	✓						

Keterangan

- ✓ Tepat Waktu & Disetujui
- ✓ Tepat Waktu & Belum Disetujui
- – Tepat Waktu & Belum Diajukan
- ✓ Tidak Tepat Waktu & Disetujui
- ✓ Tidak Tepat Waktu & Belum Disetujui
- – Tidak Tepat Waktu & Belum Diajukan
- Belum Mengisi

LAMPIRAN

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN 7

TINGKAT MATURITAS SPIP DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

No. ST	:	KP.004/20/12/K1/DJKA/2024
Lokasi	:	Jakarta

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

LAPORAN RAPAT
ASISTENSI/KONSULTASI TERKAIT PENYELESAIAN PENGISIAN DAN PEMENUHAN DATA DUKUNG PADA KKE PENILAIAN MANDIRI MATURITAS PENYELENGGARAAN SPIP UNIT KERJA DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN
MEI 2024

ASISTENSI/KONSULTASI TERKAIT PENYELESAIAN PENGISIAN DAN PEMENUHAN DATA DUKUNG PADA KKE PENILAIAN MANDIRI MATURITAS PENYELENGGARAAN SPIP UNIT KERJA DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

A. DASAR PENUGASAN

1. Surat Undangan Sekretaris Direktorat Jenderal Perkeretaapian Nomor: PR.205/1/6/K1/DJKA/2024 tanggal 23 April 2024 perihal Undangan Rapat.
2. Surat Perintah Tugas Sekretaris Direktorat Jenderal Perkeretaapian Nomor: KP.004/20/12/K1/DJKA/2024 tanggal 30 April 2024.

B. PELAKSANAAN KEGIATAN

1. Tempat : Yuan Garden Hotel dan Aplikasi *Zoom Meetings*
2. Tanggal : Kamis s.d Sabtu / 2 s.d 4 Mei 2024
3. Pimpinan Rapat : Kepala Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan, Bagian Perencanaan, Setditjen Perkeretaapian
4. Peserta Rapat :
   a. Direktur Pengawasan Infrastruktur, Tata Ruang dan Perhubungan, BPKP;
   b. Tim Penjaminan Kualitas Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP, Inspektorat Jenderal, Kementerian Perhubungan;
   c. Perwakilan Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api;
   d. Perwakilan Direktorat Prasarana Perkeretaapian;
   e. Perwakilan Direktorat Sarana Perkeretaapian;
   f. Perwakilan Direktorat Keselamatan Perkeretaapian;
   g. Perwakilan Bagian Keuangan, Setditjen Perkeretaapian;
   h. Perwakilan Bagian Hukum, Setditjen Perkeretaapian;
   i. Perwakilan Bagian SDM dan Umum, Setditjen Perkeretaapian;
   j. Perwakilan BTP Kelas I Jakarta;
   k. Perwakilan BTP Kelas I Bandung;
   l. Perwakilan BTP Kelas I Semarang;
   m. Perwakilan BTP Kelas I Surabaya;
   n. Perwakilan BTP Kelas I Medan;
   o. Perwakilan BTP Kelas II Padang;
   p. Perwakilan BTP Kelas II Palembang;
   q. Perwakilan Balai Pengujian Perkeretaapian;
   r. Perwakilan Balai Perawatan Perkeretaapian;
   s. Perwakilan BPKAR Sumatera Selatan;
   t. Perwakilan BPKA Sulawesi Selatan;
   u. Perwakilan KPA/PPK Satker Kantor Pusat Ditjen Perkeretaapian;
   v. Tim Penilaian Mandiri Maturitas SPIP di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian.
5. Kegiatan – kegiatan yang dilaksanakan sebagai berikut:

a. Persiapan penjaminan kualitas terhadap Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi;
b. Cek progres dan asistensi/konsultasi terkait penyelesaian pengisian Kertas Kerja dan Penyiapan Data Dukung Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggeraan SPIP untuk unsur **Lingkungan Pengendalian** pada sub unsur (Kertas Kerja 3.1):
   1) Penegakkan Integritas dan Nilai Etika;
   2) Komitmen terhadap Kompetensi;
   3) Kepemimpinan yang kondusif;
   4) Pembentukan Struktur Organisasi yang sesuai dengan kebutuhan;
   5) Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat;
   6) Penyusunan dan Penerapan Kebijakan yang Sehat tentang Pembinaan SDM;
   7) Hubungan Kerja yang baik dengan Instansi Pemerintah terkait.

   Unsur Penialaian Risiko pada sub unsur:
   1) Identifikasi Risiko;
   2) Analisis Risiko.
c. Cek progres dan asistensi/konsultasi terkait penyelesaian pengisian Kertas Kerja dan Penyiapan Data Dukung Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggeraan SPIP untuk unsur **Kegiatan Pengendalian** pada sub unsur (Kertas Kerja 3.1):
   1) Reviu atas Kinerja Instansi Pemerintah;
   2) Pembinaan Sumber Daya Manusia;
   3) Pengendalian atas Pengelolaan Sistem Informasi;
   4) Pengendalian Fisik atas Aset;
   5) Penetapan dan Reviu atas Indikator dan Ukuran Kinerja;
   6) Pemisahan Fungsi;
   7) Otorisasi atas Transaksi dan Kejadian yang Penting;
   8) Pencatatan yang Akurat dan Tepat Waktu aatas Transaksi dan Kejadian;
   9) Pembatasan Akses atas Sumber Daya dan Pencatatannya;
   10) Akuntabilitas terhadap atas Sumber Daya dan Pencatatannya;
   11) Dokumentasi yang Baik atas SPI serta Transaksi dan Kejadian Penting.
d. Cek progres dan asistensi/konsultasi terkait penyelesaian pengisian Kertas Kerja dan Penyiapan Data Dukung Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggeraan SPIP untuk unsur **Informasi dan Komunikasi** pada sub unsur (Kertas Kerja 3.1):
   1) Informasi yang relevan;
   2) Komunikasi yang efektif;

   Unsur Pemantauan pada sub unsur:
   1) Pemantauan berkelanjutan;
   2) Evaluasi terpisah;

e. Cek Progres Pelaporan Penyelenggaraan Manajemen Risiko Unit Kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian;
f. Penyelesaian pengisian dan pemenuhan data dukung pada KKE Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Unit Kerja Setditjen Perkeretaapian;
g. Penutupan.

C. POKOK – POKOK PEMBAHASAN

1. Pendahuluan

a. Rapat diselenggarakan dalam rangka finalisasi pengisian dan pemenuhan data dukung pada kertas kerja evaluasi (KKE) Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perkertaapian.
b. Pemaparan dari Itjen terkait Persiapan Penjaminan Kualitas terhadap penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP Tahun 2024:
   1) Berdasarkan timeline penilaian mandiri SPIP Tahun 2024 saat ini seharusnya sudah masuk Kompilasi Data PM yang dilakukan mulai dari 29 April s.d. 20 Mei 2024 dengan timeline lengkap sebagai berikut:

   2) Alokasi anggaran Satker yang melakukan PM Tahun 2023

NO	UNIT ESELON I	JUMLAH SATKER	PAGU AWAL (BERDASARKAN SATKER SPIP)	PERSENTASE (TERHADAP PAGU SELURUH SATKER)
1	SEKRETARIAT JENDERAL	12	Rp. 487.460.269.700,00	90,08%
2	INSPEKTORAT JENDERAL	1	Rp. 96.646.131.000,00	100,00%
3	DITJEN PERHUBUNGAN DARAT	24	Rp. 4.445.757.001.000,00	76,77%
4	DITJEN PERHUBUNGAN LAUT	63	Rp . 4.873.061.517.000,00	53,01%
5	DITJEN PERHUBUNGAN UDARA	73	Rp. 5.779.385.873.000,00	82,64%
6	DITJEN PERKERETAAPIAN	16	Rp. 7.344.665.225.000,00	100,00%
7	BADAN KEBIJAKAN TRANSPORTASI	5	Rp. 164.691.139.000,00	100,00%
8	BPSDM PERHUBUNGAN	23	Rp. 2.516.611.579.000,00	68,61%
9	BADAN PENGELOLA TRANS. JABODETABEK	1	Rp. 259.712.953.000,00	100,00%
	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN	**218**	**Rp 25.967.991.687.700,00**	**76,26%**

   3) Jumlah satker yang melaksanakan penjaminan kualitas tahun 2024 sebanyak 169 Satker.
   4) Skema penanggung jawab kertas kerja SPIP untuk tingkat Satker hanya menyusun KK 2 dan KK 5.2 untuk lebih detail sebagai berikut:

5) Hasil penilaian maturitas SPIP Kementerian Perhubungan Tahun 2021-2023, sebagai berikut:

KOMPONEN PENILAIAN	TAHUN 2021			TAHUN 2022			TAHUN 2023		
	PM	PK	EVALUASI	PM	PK	EVALUASI	PM	PK	EVALUASI
Penetapan Tujuan	2,000	2,000	-	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	1,800
Struktur & Proses	0,881	0,838	-	0,777	0,753	0,649	0,785	0,571	0,501
Pencapaian Tujuan	1,095	0,855	-	0,960	0,825	0,825	1,125	0,915	0,900
MRI	3,86	3,26	-	3,48	3,19	3,00	3,46	3,06	2,77
IEPK	2,96	2,78	-	2,58	2,07	2,07	3,18	1,50	1,46
Kapabilitas APIP	3	3	-	2	2	3	3	3	3,00
HASIL	3,976	3,693	-	3,737	3,578	3,474	3,955	3,486	3,201

6) Target Level Maturitas SPIP Tahun 2024 adalah Terdefinisi (Level 3), penjelasan masing-masing level maturitas SPIP sebagai berikut:
   a) Rintisan (Level 1), Organisasi belum mampu mendefinisikan kinerjanya, termasuk strategi pencapaian kinerja dan pengendaliannya.
   b) Berkembang (Level 2), Organisasi telah mampu mendefinisikan kinerjanya dengan baik, namun strategi pencapaian kinerjanya masih belum relevan serta pelaksanaan pengendalian masih sebatas pemenuhan.
   c) Terdefinisi (Level 3), Organisasi telah mampu mendefinisikan kinerjanya dengan baik dan strategi pencapaian kinerjanya telah relevan dan terintegrasi, serta pengendalian telah dilaksanakan namun belum efektif.
   d) Terkelola dan Terukur (Level 4), Organisasi telah mampu mendefinisikan kinerjanya dengan baik dan strategi pencapaian kinerjanya telah relevan dan terintegrasi, struktur dan proses pengendalian telah efektif namun belum adaptif terhadap perubahan lingkungan organisasi.
   e) Optimum (Level 5), Organisasi mampu mendefinisikan kinerjanya dengan baik dan strategi pencapaian kinerjanya telah relevan dan terintegrasi, dengan struktur dan proses pengendalian telah efektif

untuk memastikan pencapaian tujuan organisasi, serta adaptif terhadap perubahan lingkungan organisasi.

7) Terdapat Koreksi penilaian pada kertas kerja SPIP Maturitas Tahun 2023 untuk KK 5.2 yang diatas 200%.
8) Perlu menyusun risk register dan melakukan pengalokasian anggaran terkait Pelaksanaan Manajemen Risiko setelah ditetapkannya pedoman/kebijakan/prosedur terkait dengan Manajemen Risiko di lingkungan Kementerian Perhubungan dengan target waktu 31 Mei 2024.
9) Area of Improvement (AoI) Kementerian Perhubungan Tahun 2022/2023 secara lengkap sebagai berikut:

No.	Komponen/Unsur/ Subunsur	No.	Area of Improvement (AoI)	Rencana Aksi	Penanggung Jawab	Target Waktu
2	**STRUKTUR DAN PROSES**					
2.1	**Lingkungan Pengendalian**		Perlu menyusun risk register dan melakukan pengalokasian anggaran terkait Pelaksanaan Manajemen Risiko setelah ditetapkannya pedoman/kebijakan/prosedur terkait dengan Manajemen Risiko di lingkungan Kementerian Perhubungan		SELURUH UNIT ESELON I	31 Mei 2024
2.1.2	Komitmen terhadap Kompetensi (1.2)		Evaluasi belum dilaksakan oleh sebagian besar unit kerja di Setjen, evaluasi yang dilakukan oleh Biro SDMO terkait dengan Standar kompetensi belum terdapat bukti dan dokumentasi telah dilakukan evaluasi secara berkala dan terdokumentasi dengan baik, serta hasil evaluasi telah ditindaklanjuti	Melakukan evaluasi secara berkala dan hasil evaluasi ditindaklanjuti serta mendokumentasikan	1. Biro SDMO 2. Para Sesditjen/Bagian SDM	31 Mei 2024
2.1.3	Kepemimpinan yang Kondusif (1.3)	1.	Perlu Menyusun Risk Register berdasarkan kebijakan manajemen risiko di lingkungan Kementerian Perhubungan	Menyusun risk register setelah setelah ditetapkannya Peraturan terkait Manajemen Risiko di lingkungan Kemenhub	SELURUH UNIT ESELON I	31 Mei 2024
		2.	Penganggaran baru sebatas untuk kegiatan evaluasi SPIP bukan terkait dengan pelaksanaan Manajemen Risiko.	Mengalokasikan anggaran dalam rangka penerapan kebijakan Manajemen Risiko	SELURUH UNIT ESELON I	31 Mei 2024
		3.	Unit kerja belum melakukan identifikasi dan analisis risiko, penyusunan profil risiko, implementasi RTP, kegiatan monitoring dan reviu dalam rencana kerja/DPA/DIPA, kedepan Risk Register	Menjadikan Manajemen Risiko sebagai indikator kinerja masing-masing Unit Kerja serta penyusunan Profile risiko perlu dimonitor, dilaksanakan dan lakukan pemantauan	SELURUH UNIT ESELON I	31 Mei 2024
2.1.8	Hubungan Kerja yang Baik dengan Instansi Pemerintah Terkait (1.8)		Pelaksanaan kerjasama dan mekanisme kerja antar unit/organisasi/mitra kerja beserta implementasinya belum dilakukan evaluasi secara berkala, evaluasi belum dilaksanakan untuk menangani hambatan koordinasi/kerjasama dan belum adanya tindak lanjut atas hasil evaluasi yang telah dilaksanakan	Melaksanakan evaluasi secara berkala atas pelaksanaan kerjasama dan mekanisme kerja antar unit/organisasi/mitra kerja beserta implementasinya. Hasil evaluasi digunakan untuk menangani hambatan koordinasi/kerjasama dan melaksanakan tindak lanjut atas hasil evaluasi yang telah dilaksanakan		31 Mei 2024

No.	Komponen/Unsur/ Subunsur	No.	Area of Improvement (AoI)	Rencana Aksi	Penanggung Jawab	Target Waktu
2	**STRUKTUR DAN PROSES**					
2.2	**Penilaian Risiko**	2.	Masih terdapat Penetapan Target indikator Kinerja Kegiatan yang belum sesuai dengan Perjanjian Kinerja yang telah ditetapkan.	Melakukan penyesuaian target kinerja sesuai capaian di tahun sebelumnya	SELURUH UNIT ESELON I	31 Mei 2024
2.4	**Informasi dan Komunikasi**	1.	Perlu dilakukan sosialisasi system Whistle Blowing (Aplikasi SIMADU) dan sosialisasi pedoman/kebijakan/prosedur Manajemen Risiko kepada seluruh Unit Kerja di Lingkungan Kementerian Perhubungan	Melakukan sosialisasi dan publikasi atas peringatnya Whistle Blowing serta melakukan evaluasi secara berkala atas keandalan sistem Whistle Blowing.	Sesditjen	31 Mei 2024
		2.	Perlu dilakukan sosialisasi kebijakan Manajemen Risiko	melakukan sosialisasi dan publikasi terkait kebijakan Manajemen Risiko	SELURUH UNIT ESELON I	31 Mei 2024
2.5	**Pemantauan**		Perlu Menyusun pedoman review dan Pemantauan terhadap proses setelah ditetapkannya pedoman/kebijakan/prosedur terkait dengan Manajemen Risiko di lingkungan Kementerian Perhubungan	Menyusun pedoman reviu dan pemantauan atas proses Manajemen Risiko.	ITJEN	31 Mei 2024
2.5.2	Evaluasi Terpisah (5.2)		Menyusun pedoman reviu atas proses Manajemen Risiko		ITJEN	31 Mei 2024

10) Dirjen Perkeretaapian melakukan percepatan Revisi Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 156 Tahun 2018 tentang Pedoman Perhitungan Biaya Perawatan dan Pengoperasian Prasarana Perkeretaapian Milik Negara serta berkoordinasi dengan Biro Hukum Kementerian Perhubungan dengan target 31 Mei 2024.
11) Terkait Kertas Kerja yang perlu diisi adalah yang dikuningkan (KK 2.1, KK 2.2, KK 3.1, KK 5.2) yang akan dinilai pada PM dan PK.

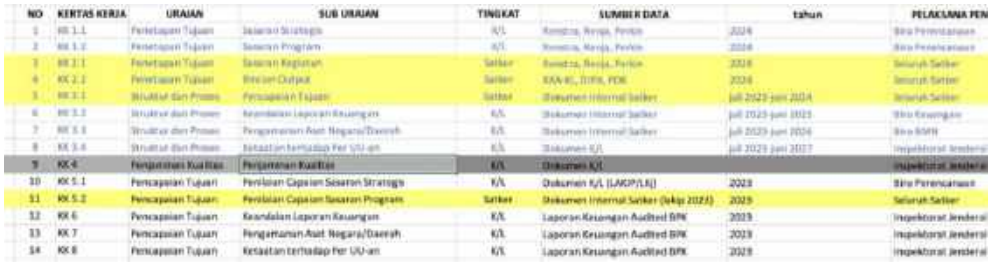

NO	KERTAS KERJA	URAIAN	SUB URAIAN	TINGKAT	SUMBER DATA	tahun	PELAKSANA PEN
1	KK 1.1	Penetapan Tujuan	Sasaran Strategis	K/L	Renstra, Renja, Perkin	2024	Biro Perencanaan
2	KK 1.2	Penetapan Tujuan	Sasaran Program	K/L	Renstra, Renja, Perkin	2024	Biro Perencanaan
3	KK 2.1	Penetapan Tujuan	Sasaran Kegiatan	Satker	Renstra, Renja, Perkin	2024	Seluruh Satker
4	KK 2.2	Penetapan Tujuan	Rincian Output	Satker	RKA-KL, DIPA, POK	2024	Seluruh Satker
5	KK 3.1	Struktur dan Proses	Pencapaian Tujuan	Satker	Dokumen Internal Satker	juli 2023-juni 2024	Seluruh Satker
6	KK 3.2	Struktur dan Proses	Keandalan Laporan Keuangan	K/L	Dokumen Internal Satker	juli 2023-juni 2025	Biro Keuangan
7	KK 3.3	Struktur dan Proses	Pengamanan Aset Negara/Daerah	K/L	Dokumen Internal Satker	juli 2023-juni 2026	Biro BMN
8	KK 3.4	Struktur dan Proses	Ketaatan terhadap Per UU-an	K/L	Dokumen K/L	juli 2023-juni 2027	Inspektorat Jenderal
9	KK 4	Pengelolaan Kualitas	Pengelolaan Kualitas	K/L	Dokumen K/L		Inspektorat Jenderal
10	KK 5.1	Pencapaian Tujuan	Penilaian Capaian Sasaran Strategis	K/L	Dokumen K/L (LAKIP/LKj)	2023	Biro Perencanaan
11	KK 5.2	Pencapaian Tujuan	Penilaian Capaian Sasaran Program	Satker	Dokumen Internal Satker (bkgs 2023)	2023	Seluruh Satker
12	KK 6	Pencapaian Tujuan	Keandalan Laporan Keuangan	K/L	Laporan Keuangan Audited BPK	2023	Inspektorat Jenderal
13	KK 7	Pencapaian Tujuan	Pengamanan Aset Negara/Daerah	K/L	Laporan Keuangan Audited BPK	2023	Inspektorat Jenderal
14	KK 8	Pencapaian Tujuan	Ketaatan terhadap Per UU-an	K/L	Laporan Keuangan Audited BPK	2023	Inspektorat Jenderal

a) KK 2.1 untuk kolom Sasaran Program Relevan dengan Sastra dan Menggambarkan Tugas dan Fungsi bisa diisi sesuai dengan Indikator Kerja Kegiatan dan ditulis ya. Kolom 12 menilai kolom 8, kolom 13 menilai kolom 9, kolom 14 menilai kolom 10, kolom 16 menilai kolom 11. Header kolom warna abu-abu tidak perlu diisi.
b) KK 2.2 nama rincian output kolom 10 sumber data dari RO dalam DIPA, kolom 11 Sumber data dari RO dalam POK, kolom 14 nilai anggaran harus dimasukan sesuai IKKnya. Kolom 15 menilai kolom 11, kolom 16 menilai kolom 12, kolom 18 menilai kolom 13.
c) Terdapat sedikit perbedaan Kertas Kerja dari Biroren dengan yang di share Itjen yaitu tidak ada kolom Sasaran Rincian Output dan Nilai Anggaran.
d) Capaian yang masih anomali agar direviu kembali PKnya di akhir tahun untuk merubah target sehingga tidak ada capain kinerja yang anomali (lebih dari 150%).
e) KK 3.1 Kode Parameter hanya SPIP dapat dimulai dari bawah (GRADE E) jika kode parameter terdapat MRI atau IEPK dapat langsung memilih GRADE yang terpenuhi.
f) Agar ditambahkan Pasal pada uraian hasil pengujian terkait kebijakan tidak hanya menyebutkan Peraturannya saja dan data dukungnya terkait pasal terkait saja tidak semua halaman dimasukkan.
g) Daftar hadir biasanya yang dinilai terlebih dahulu Pemilik Risikonya sebagai contoh.
h) KK 5.2 hanya memindahkan isian LAKIP capaian 2023 pada masing-masing unit kerja.
i) Cara menguji nilai kecukupan indikator di level PKnya melihat mulai dari Renstra sampai turunannya dan target sudah sesuai atau tidak. Revisi target di luar Kementerian Perhubungan seperti PNBP boleh direviu maksimal 1 kali.
j) Untuk KK 2.1 terkait kolom Unit Kerja dapat diisi nama Satkernya meskipun sasaran programnya Eselon I.

c. Pada rapat juga dilakukan konfirmasi Progres Pengisian SPIP masing-masing unit kerja di lingkungan Ditjen Perkeretaapian.
d. Pemaparan dari BPKP terkait SPIP Kemenhub dan DJKA, sebagai berikut:
   1) Penilaian Maturitas SPIP tahun 2023 menurun akibat pinalti diharapkan sudah dilakukan mitigasi agar hal serupa tidak berulang.

2) Terdapat 15 (lima belas) indikator penilaian tahun 2023 dari instansi lain yang menjadi pertimbangan di dalam penilaian setiap parameter SPIP Terintegrasi, yaitu:
   a) Persentase Penyederhanaan Struktur Organisasi N/A (menpan)
   b) Tingkat Keberhasilan Pembangunan ZI N/A (menpan)
   c) Nilai SAKIP 77,58
   d) Indeks Perencanaan Pembangunan N/A (bappenas)
   e) Indeks Pengelolaan Arsip 83,29
   f) Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) 94,12
   g) Indeks Pengelolaan Aset 2,85
   h) Tingkat Kematangan Penyelenggaraan Statistik Sektoral N/A (BPS)
   i) Indeks Kematangan Pembinaan UKPBJ 76,8
   j) Indeks Sistem Merit 258,5 (Kategori III)
   k) Indeks Pelayanan Publik 4,55
   l) Indeks SPBE 3,33
   m) Opini atas Laporan Keuangan K/L/D WTP
   n) Survey Penilaian Integritas (SPI) 75,18
   o) Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) 96,6
3) Hasil Evaluasi Kementerian Perhubungan, sebagai berikut:

KOMPONEN PENILAIAN	PM	PK	Evaluasi
1 NILAI MATURITAS PENYELENGGARAAN SPIP TERINTEGRASI	3.992	3.486	3.201
PENETAPAN TUJUAN	2.000	2.000	1.800
STRUKTUR DAN PROSES	0.822	0.571	0.501
PENCAPAIAN TUJUAN	1.170	0.915	0.900
2 NILAI MANAJEMEN RISIKO INDEKS (MRI)	3.47	3.06	2.77
PERENCANAAN	2.00	2.00	1.80
KAPABILITAS	0.60	0.33	0.28
HASIL	0.87	0.72	0.69
3 NILAI IEPK	3.18	1.50	1.46
KAPABILITAS PENGELOLAAN RISIKO KORUPSI	1.54	0.65	0.68
PENERAPAN STRATEGI PENCEGAHAN	1.08	0.53	0.46
PENANGANAN KEJADIAN KORUPSI	0.56	0.33	0.33
4 KAPABILITAS APIP	3.00	3.00	3.00
Sampling Satker (582 Satker)	218	140	70

4) Banyak catatan di KK3.1 terkait masalah pengelolaan risiko tahun 2023 diharapkan tahun ini dapat lebih baik lagi, berikut detail lengkap yang perlu ditingkatkan/dipenuhi kriterianya:
   a) 1.3 Kepemimpinan yang Kondusif (anggaran terhadap manajemen Risiko, Pengambilan keputusan operasional dan strategis mempertimbangkan risiko, kinerja penerapan manajemen risiko sudah digunakan sebagai indikator kinerja pada dokumen perencanaan seluruh UPR);
   b) 1.8 Hubungan Kerja yang Baik dengan Instansi Pemerintah Terkait (mengidentifikasi, menilai, dan mengelola risiko (termasuk implikasi dari transfer risiko) terkait kemitraan);

c) 2.1 Identifikasi Risiko (manajemen risiko telah diterapkan secara konsisten & terintegrasi dengan proses bisnis dan proses perencanaan);
d) 2.2 Analisis Risiko (Evaluasi atas Risiko serta Rencana tindak Pengendalian Risiko);
e) 5.1 Pemantauan Berkelanjutan (reviu atas seluruh risiko operasional unit kerja dan strategis unit kerja);
f) 5.2 Evaluasi Terpisah (reviu independen terhadap proses manajemen risiko, pedoman reviu risiko yang terstandart, serta tindak lanjut atas reviu independent).

5) Hasil Evaluasi Area of Improvement (AOI) tahun 2023, sebagai berikut:
a) Memperbaiki indikator dan target kinerja agar berorientasi pada outcome dan memenuhi kriteria SMART;
b) Mengimplementasikan kebijakan dan sistem antikorupsi mencakup tiga prinsip dalam pengelolaan risiko korupsi, yakni cegah, deteksi dan respon.

2. **Pemabahsan KKE 3.1 bersama Tim BPKP**

No.	Uraian Unsur / Sub Unsur	Catatan Hasil Pembahasan KKE 3.1 bersama Tim BPKP
A	**LINGKUNGAN PENGENDALIAN**	
1.1	**Penegakan Integritas dan Nilai Etika**	1. Disarankan untuk menambahkan data dukung Usulan Pegawai Teladan/Pegawai Berprestasi 2. Disarankan untuk menabmahkan data dukung terkait tindakan korektif pasca kejadian OOT (SE pimpinan, penandatanganan kembali Pakta Integritas) 3. Terkait *punishment* diharapkan ada dasar hukum yang jelas sehingga mekanisme pelaksanaannya memiliki acuan yang kuat, contohnya menggunakan PP 94 Tahun 2021 4. Data dukung terkait *punishment* sebaiknya ditambahkan, jenis pelanggaran kecil pun bisa diajukan seperti pemotongan Tukin akibat terlambat.
1.2	**Komitmen terhadap Kompetensi**	1. Disarankan untuk menambahkan data hasil diklat sehingga bukan hanya berupa data usulan diklat melainkan mengetahui siapa saja yang lulus diklat tersebut. 2. Disarankan untuk menambahkan Peta Jabatan dan Pemenuhan Standar Kompetensi pada Grade C.

No.	Uraian Unsur / Sub Unsur	Catatan Hasil Pembahasan KKE 3.1 bersama Tim BPKP
		3. Disarankan untuk menambahkan dokumen analisis kompetensi umum/khusus yang dimanfaatkan untuk perancangan pembangunan/pengembangan SDM.
1.3	**Kepemimpinan yang Kondusif**	**1.3.1 - Pimpinan K/L/D menciptakan lingkungan kerja yang kondusif untuk pencapaian tujuan organisasi** **Grade D** a. Screenshot pada JDIH bisa dijadikan media sosilasisasi terkait peraturan. b. Disarankan untuk menambahkan Nota Dinas terkait sebagai bentuk lain komunikasi disposisi. **Grade C** Disarankan bisa menambahkan dokumen pemanfaatan terkait Manajemen Risiko (dokumen Manajemen Risiko). **1.3.2 - Pimpinan K/L/D mengalokasikan sumber daya untuk penerapan manajemen risiko** **Grade D** a. Dokumen Peserta yang mengikuti Diklat terkait Manajemen Risiko bisa ditambahkan. b. Disarankan untuk menambahkan Dokumen POK. c. Disarankan untuk menambahkan Dokumen Sertifikasi SDM. d. Apabila memungkinkan bisa meningkatkan Grade menjadi Grade C **1.3.3 - Pimpinan K/L/D menggunakan informasi terkait risiko dalam pengambilan keputusan** **Grade C** a. Apabila ada keterangan dokumen MRI, maka disarankan untuk langsung memilih grade yang bisa dipenuhi. b. Disarankan untuk menambahkan dokumen yang menyatakan pemanfaatan pengambilan keputusan terkait Risiko oleh pimpinan (Laporan Rapat Manajemen Risiko). c. Piagam Manajemen Risiko. d. Laporan Manajamen Risiko.

No.	Uraian Unsur / Sub Unsur	Catatan Hasil Pembahasan KKE 3.1 bersama Tim BPKP
		1.3.4 - Pimpinan K/L/D mendorong penerapan manajemen risiko, melalui penggunaan kinerja penerapan manajemen risiko sebagai indikator penilaian kinerja **Grade C** a. Dokumen PK Berjenjang (indikator kinerja pemenuhan penyelenggaraan SPIP). b. Disarankan untuk menambahkan PK Unit Kerja (Indikator Kinerja). c. Laporan Monitoring Capaian Kinerja Triwulan (opsional). d. Laporan Tahunan (opsional).
1.4	**Struktur Organisasi Sesuai Kebutuhan**	**Grade C** 1. Disarankan untuk menambahkan dokumen Proses Bisnis yang dijabarkan dengan SOP. 2. Dokumen terkait bukti-bukti pelaksanaan SOP-SOP tersebut. 3. Dokumen Analisis Beban Kerja bisa ditambahkan. 4. Bisa juga untuk menambahkan dokumen SKP dan Laporan Bulanan. 5. SK Penetapan sesuai struktur organisasi yang ada diharapkan untuk dilampirkan. **Grade D** Hasil kuisioner terkait Struktur Organisasi yang sesuai kebutuhan diharapkan bisa dilampirkan dan dioptimalkan. **Grade E** Pembaharuan/updating peraturan terkait agar tidak lagi menggunakan peraturan yang sudah tidak berlaku.
1.5	**Pendelegasian Wewenang dan Tanggung Jawab yang Tepat**	**Grade C** 1. Surat Penunjukan PLH/PLT 2. Laporan pertanggungjawaban dari penunjukan PLH/PLT 3. Penetapan SK seperti SK CPNS, SK Kenaikan Pangkat, SK Pensiun, SK Jabatan Struktural dan SK Mutasi. **Grade D** Peraturan-peraturan terkait pendelegasian wewenang sesuai Struktur Organisasi.

No.	Uraian Unsur / Sub Unsur	Catatan Hasil Pembahasan KKE 3.1 bersama Tim BPKP
		Grade E Pembaharuan/updating peraturan terkait agar tidak lagi menggunakan peraturan yang sudah tidak berlaku.
1.6	**Penyusunan dan Penerapan Kebijakan yang sehat tentang Pembinaan SDM**	**1.6.1 Penerapan kebijakan manajemen dan praktik pembinaan SDM sehingga dapat digunakan secara maksimal untuk mencapai tujuan organisasi** **Grade C** a. Bisa ditambahkan dokumen terkait Informasi penerimaan pegawai. b. Bisa melampirkan SK CPNS. c. Usulan mengikuti diklat. d. Bisa ditambahkan SK Kenaikan Jabatan. e. Bisa ditambahkan SK Pensiun **Grade D** a. Hasil kuisioner diharapkan bisa dilampirkan dan dioptimalkan. b. Kebijakan bisa disosialisasi melalui Nota Dinas ataupun screenshot yang membuktikan sudah diupload di JDIH. **1.6.2 Pegawai telah mendapatkan fasilitas untuk meningkatkan kompetensi dan keterampilan terkait manajemen risiko (MRI)** **Grade D** a. Dokumentasi pelaksanaan rapat yang menyatakan sudah mengikuti diklat Manajemen Risiko (Laporan Rapat). b. Bila ada bisa ditambahkan kuisioner terkait peningkatan kompetensi dan keterampilan Manajemen Risiko. c. Bila diperlukan untuk unit kerja bisa melakukan *inhouse training/*Bimtek dengan pengajar yang telah tersertifikasi Manajemen Risiko. d. Usulan Diklat dan Surat Tugas mengikuti pelatihan peningkatan kompetensi manajemen risiko. **1.6.3 - Pegawai memiliki kesadaran terkait manajemen risiko (MRI)** **Grade C** a. Mengoptimalkan kuisioner terkait kesadaran Manajemen Risiko.

No.	Uraian Unsur / Sub Unsur	Catatan Hasil Pembahasan KKE 3.1 bersama Tim BPKP
		b. Dokumen Kebijakan terkait Manajemen Risiko seperti PM 25 Tahun 2008 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Di Lingkungan Kementerian Perhubungan. c. Laporan Manajemen Risiko (Daftar Risiko, Peta Risiko dan RTP).
1.7	Perwujudan Peran APIP yang Efektf	Diisi oleh APIP
1.8	Hubungan Kerja yang Baik dengan Instansi Pemerintah Terkait	**1.8.1 Pimpinan K/L/D menjalin hubungan kerja yang baik (kemitraan) dengan instansi lain terkait dengan upaya pencapaian tujuan organisasi.** a. Kebijakan terkait Keuangan, BMN, RKA, SPIP dan SAKIP. b. Bisa ditambahkan kebijakan-kebijakan yang melibatkan kemitraan instansi lain dalam menjalankan Tugas dan Fungsi, contohnya kebijakan IMO, PSO, Perlintasan Sebidang, Perintis dan lainnya. c. Dokumen RKA. d. Dokumen BMN. **1.8.2 Dalam rangka menciptakan hubungan kerja yang baik, K/L/D telah mengidentifikasi, menilai, dan mengelola risiko (termasuk implikasi dari transfer risiko) terkait kemitraan** **Grade D** a. Dokumen terkait risiko kemitraan perlu dihighlgiht terkait identifikasi dan pengelolaan risiko. b. Terkait perjanjian kerja sama kemitraan perlu mengimplementasikan kerahasian data. **Grade E** a. PM 25 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kementerian Perhubungan. b. KM 69 Tahun 2023 Tentang Manajemen Risiko di Lingkungan Kementerian Perhubungan. c. Pedoman Teknis Penerapan Manajemen Risiko yang ditetapkan dalam Keputusan Direktur Jenderal Perkeretaapian Nomor: KP DJKA 259 TAHUN 2023

No.	Uraian Unsur / Sub Unsur	Catatan Hasil Pembahasan KKE 3.1 bersama Tim BPKP
B	**PENILAIAN RISIKO**	
2.1	Identifikasi Risiko	**2.1.1 K/L/D telah memiliki Kebijakan Manajemen Risiko (MRI)** **Grade C** **a.** PM 25 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kementerian Perhubungan. **b.** KM 69 Tahun 2023 Tentang Manajemen Risiko di Lingkungan Kementerian Perhubungan. c. Pedoman Teknis Penerapan Manajemen Risiko yang ditetapkan dalam Keputusan Direktur Jenderal Perkeretaapian Nomor: KP DJKA 259 TAHUN 2023 d. Penetapan konteks manajemen risiko (konteks risiko strategis dan Operasional) e. Piagam dan Identifikasi Risiko **2.1.2 Risiko telah teridentifikasi dan dituangkan dalam register risiko (MRI)** **Grade C** a. 2/3 pegawai pada unit kerja memahami proses bisnis Unit Kerja, hal ini dibuktikan dengan output hasil kuisioner. b. Penetapan konteks manajemen risiko (konteks risiko strategis dan Operasional) c. Dokumen Manajemen Risiko Tahun 2024. d. RTP penyebab sebagian besar dapat dipahami oleh 50-70% sampling pegawai. **2.1.3 Proses manajemen risiko telah melekat pada proses bisnis K/L/D (MRI)** a. Piagam Manajemen Risiko b. Dokumen Manajemen Risiko Tahun 2024 (Daftar Risiko, Peta Risiko, Rencana Tindak Pengendalian Kegiatan Tahun 2024). c. Laporan UMR dan UPR Unit Kerja Tahun 2024. d. Bila memungkinkan bisa menambahkan laporan anggaran khusus. e. Laporan Triwulan. f. Laporan Monitoring Risiko.
2.2	Analisis Risiko	**2.2.1 Seluruh risiko telah dianalisis dampak dan tingkat keterjadiannya (MRI)** a. Dokumen Penetapan Konteks.

No.	Uraian Unsur / Sub Unsur	Catatan Hasil Pembahasan KKE 3.1 bersama Tim BPKP
		b. Dokumen Manajemen Risiko (Format 5 – Profil Risiko, Format 8 – Rencana Penanganan Risiko, Format 9 – Daftar Pemantauan, Format 10 – Pemantauan Penanganan Risiko). c. Dokumen Penilaian Risiko. d. Sertifikasi orang-orang yang memiliki kompetensi diketahui dari telah memiliki sertifikat Manajemen Risiko ditambahkan. **2.2.2 K/L/D telah menentukan prioritas risiko (MRI)** **Grade C** a. KM Nomor 69 Tahun 2023 tentang Manajemen Risiko di Lingkungan Kementerian Perhubungan. b. KP 259 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Penerapan Manajemen Risiko di Lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian. c. Dokumen Identifikasi, Analisis Dan Evaluasi Risiko. d. Laporan Kegiatan Rapat SPIP **2.2.3 K/L/D telah menentukan rencana tindak pengendalian (MRI)** **Grade C** a. Penetapan Konteks Manajemen Risiko. b. Laporan Pemantauan RTP. c. Laporan UMR dan UPR TW I unit kerja. d. Laporan Triwulan. **2.2.4 Tindak pengendalian telah diimplementasikan (MRI)** **Grade C** a. Daftar Pemantauan Risiko b. Laporan Triwulan III dan Triwulan IV Tahun 2023 c. Laporan Pemantauan Penanganan Risiko TW I Tahun 2024 d. Perlu dipastikan Tindak pengendalian terhadap risiko operasional unit kerja dan <60% RTP terhadap risiko strategis unit kerja (sampling) yang direncanakan. **2.2.5 Tindak pengendalian efektif menurunkan risiko (MRI)** **Grade C** **a.** Piagam Risiko Unit Kerja

No.	Uraian Unsur / Sub Unsur	Catatan Hasil Pembahasan KKE 3.1 bersama Tim BPKP
		b. Laporan Pemantauan Penanganan Risiko TW I Tahun 2024
C	**KEGIATAN PENGENDALIAN**	
3.1	Reviu atas Kinerja	**Grade C** a. LKIP Unit Kerja. b. Laporan Monitoring Capaian Kinerja Triwulan III dan IV Tahun 2023 dan Triwulan I Tahun 2024. **Grade D** a. Kuisioner terkait Kebijakan terkait Reviu atas Kinerja Pegawai. b. Komunikasi terkait publikasi kebijakan minimal melalui screenshot **Grade E** a. Peraturan terkait Reviu Kinerja terkait SAKIP dan Pemanfaatan Hasil Pengukuran serta Pelaporan Kinerja dalam Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Direktorat Jenderal Perkeretaapian b. SOP-SOP terkait kinerja pegawai
3.2	Pembinaan SDM	**Grade C** a. Disarankan menambahkan dokumen Peta Kompetensi Pegawai b. Disarankan melampirkan *timeline* diklat (kalender diklat) c. Bisa melampirkan contoh pegawai yang mengikuti **Grade D** a. Pemahaman SDM melalui dokumen Kuisioner b. Minimal melampirkan dokumen screenshot bahwa peraturan tersebut sudah dikomunikasikan **Grade E** a. Melampirkan kebijakan yang mengatur pembinaan SDM untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi.
3.3	Pengendalian atas Pengelolaan Sistem Informasi	**Grade C** a. Dilampirkan hasil analisis atau laporan penggunaan/pemanfaatan aplikasi yang telah dibuat sesuai dengan tujuan awal atau tidak (laporan *ouput* penggunaan aplikasi). b. Bila tidak ada SK terkait pengelola sistem informasi, bisa menggunakan dokumen lain yang menyatakan bahwa hak akses atas kewenangan pengendalian

No.	Uraian Unsur / Sub Unsur	Catatan Hasil Pembahasan KKE 3.1 bersama Tim BPKP
		Sistem Informasi telah dilakukan (screenshot tidak masalah). c. Laporan rapat mengenai evaluasi pemanfaatan sistem informasi di lingkungan Ditjen Perkeretaapian (untuk pengembangan). **Grade D** a. Melampirkan kuisioner pegawai sebagai bentuk komunikasi terkait kebijakan pengelolaan sistem informasi. b. Screenshot publikasi peraturan terkait pengelolaan sistem informasi. **Grade E** a. Dipastikan kembali SOP yang dilampirkan terkait pengelolaan Sistem Informasi sudah tepat dan dihighlight. b. Kebijakan TIK ditingkat Kemneterian seperti Dokumen Arsitektur SPBE, terkait kontingensi dan sebagainya.
3.4	Pengendalian Fisik atas Aset	**Untuk grade C, D dan E pengklasifikasian data di tiap grade bisa berdasarkan kategori:** a. Pengamanan fisik (contohnya data pembatasan tanah, data pemagaran bangunan dan lainnya); b. Administrasi (contohnya data catatan aset, data BPKB kendaraandan); c. Hukum (contohnya data sertifikasi). **Grade D** Pengkomunikasian membutuhkan kuisioner
3.5	Penetapan dan Reviu atas Indikator dan Ukuran Kinerja	**Grade C** a. Bisa ditambahkan lampiran Laporan TW I Tahun 2024 b. Penambahan dokumen TL Laporan TW I c. Bisa ditambahkan Penetapan SK Indikator Berjenjang **Grade D** a. Kuisioner terkait pemahaman penetapan dan reviu atas indikator dan ukuran kinerja bsia dilampirkan b. Revisi PK terakhir tahun 2023 bisa ditambahkan (reviu oleh pimpinan)

No.	Uraian Unsur / Sub Unsur	Catatan Hasil Pembahasan KKE 3.1 bersama Tim BPKP
		Data dukung tambahan bisa melampirkan Evaluasi Paruh Waktu sebagai bentuk sudah dilakukan reviu atas indikator dan ukuran kinerja.
3.6	Pemisahan Fungsi	**Grade C** a. Data dukung tidak hanya terbatas di kegiatan keuangan administrasi, sebaiknya menambahkan data dukung terkait pelaksanaan tugas dan fungsi unit kerja, contohnya dokumen perizinan, dokumen sertifikasi, persetujuan gambar design, dan lainnya. b. Dokumen struktur Manajemen Risiko bisa menggambarkan contoh pemisahan tugas dan fungsi organisasi (ada yang berperan sebagai UPR dan UMR). **Grade D** Pemisahan agenda sosialisasi per tahub 2023 dan 2024 (menambahkan dokumen undangan, dokumentasi kegaiatan dan laporan rapat).
3.7	Otorisasi atas Transaksi dan Kejadian yang Penting	**Grade C** a. Mirip dengan sub unsur pemisahan fungsi namun bedanya ada pada skala prioritas pada kejadian urgent atau penting. b. Contoh dokumen dukungnya bisa berupa dokumen perizinan, dokumen transaksi penting dan lainnya. c. Dokumen Manajemen Risiko yang memuat informasi Profil Risiko. **Grade E** Terkait dokumen SK dipastikan kembali sudah memuat penjelasan wewenang yang menjabarkan otorisasinya.
3.8	Pencatatan yang Akurat dan Tepat Waktu atas Transaksi dan Kejadian	**Grade C** a. Dokumen Laporan, Surat, BA, serta dokumentasi terkait PNBP. b. Dokumen Laporan Keuangan seperti DIPA, SP2D, dokumen CaLK dan BA terkait Laporan Keuangan. c. Pada dokumen Pencatatan Laporan Keuangan diharapkan konsisten tepat waktu dan dilakukan **highlight** sebagai bukti pencatatan dilakukan tepat waktu **Grade D** a. Screenshot komunikasi peraturan melalui JDIH

No.	Uraian Unsur / Sub Unsur	Catatan Hasil Pembahasan KKE 3.1 bersama Tim BPKP
		b. Dokumentasi sosialiasi kegiatan terkait PNBP, kegiatan Laporan Keuangan, kegiatan Laporan BMN dan kegiatan operasional. Bisa juga terkait perizinan dan hal-hal teknis lainnya. **Grade E** Kebijakan-kebijakan terkait pencatatan transaksi keuangan (PNBP, BMN, dan Laporan Keuangan) serta kebijakan teknis operasional organisasi.
3.9	Pembatasan Akses atas Sumber Daya dan Pencatatannya	**Grade C** a. Penambahan screenshot login page sebagai bentuk pembatasan hak akses. b. Penambahan screenshot menu/fitur dari user dengan tingkatan hak akses yang berbeda. c. Penambahan bukti dokumentasi pembatasan hak akses ruangan (contohnya akses finger ruangan atau akses ke server). d. Bisa ditambahkan bukti dokumentasi hak akses ke brankas. **Grade D** Dokumen sosialiasi terkait bisa melampirkan laporan kegiatan dan tidak hanya terbatas pada screenshot.
3.10	Akuntabilitas terhadap Sumber Daya dan Pencatatannya	**Grade C** a. Periode data dukung harap diperhatikan kembali agar range waktunya menjadi Juli 2023 s.d Juni 2024 b. Laporan LKIP Tahun 2023. c. Laporan Capaian Kinerja Triwulan Tahun 2023 s.d Triwulan I Tahun 2024. d. Perjanjian Kinerja Tahun 2024. e. BA terkait. **Grade D** Bisa ditambahkan dokumen komunikasi berupa laporan rapat sosialisasi atau nota dinas. **Grade E** a. Kebijakan/PM yang dilampirkan sebaiknya dijelaskan substansinya. b. Kumpulan SK terkait akuntabilitas bisa ditambahkan.
3.11	Dokumentasi yang Baik atas SPI serta Transaksi dan Kejadian Penting	**Grade C** a. Bisa ditambahkan List Daftar Surat Masuk/Surat Keluar yang membuktikan pendokumentasian transaksi/kejadian penting sudah menggunakan media

No.	Uraian Unsur / Sub Unsur	Catatan Hasil Pembahasan KKE 3.1 bersama Tim BPKP
		Grade D a. Kuisioner terkait harap dilampirkan b. Dokumen sosialisasi/nota dinas penyampaian bisa ditambahkan.
D	**INFORMASI DAN KOMUNIKASI**	
4.1	Informasi yang Relevan	**4.1.1 - Tersedianya informasi yang relevan untuk kebutuhan internal dan eksternal** **Grade C** Pada aplikasi milik DJKA seperti web portal, penyampaian informasi yang relevan perlu dipastikan agar mudah diakses oleh pegawai, hal ini dibuktikan dengan screenshot aplikasi yang memuat informasi relevan. **Grade D** Media sosialisasi terkait kebijakan yang berhubungan dengan pelayanan informasi ditambahkan, bisa menggunakan screenshot. **Grade E** Rincikan lebih lanjut terkait kebijakan apa saja yang berkaitan dengan informasi yang relevan, misalnya seperti SOP layanan Internal. **4.1.2- Pimpinan K/L/D membangun sistem pengaduan (MRI)** a. Screenshot aplikasi pengaduan diberikan penjelasan. b. Bukti sosialisasi terkait aplikasi sistem pengaduan, bisa berupa kuisioner ataupun laporan kegiatan sosialisasi. c. Kebijakan terkait penerapan sistem pengaduan dilampirkan dengan **PM 53 Tahun 2014** Tentang Penanganan dan Tindak Lanjut Pengaduan pelanggaran Whistleblower di lingkungan Kementerian Perhubungan serta **KP 1420 Tahun 2018** Tentang Pengelolaan Layanan Contact Center 151 Kementerian Perhubungan. **4.1.3- Strategi dan kebijakan manajemen risiko telah dikomunikasikan (MRI)** Kuisioner terkait Strategi dan kebijakan manajemen risiko telah dikomunikasikan sehingga > 60% pegawai sample pada tingkat operasional unit kerja telah menunjukan pengetahuan akan strategi dan kebijakan yang telah ditetapkan

No.	Uraian Unsur / Sub Unsur	Catatan Hasil Pembahasan KKE 3.1 bersama Tim BPKP
		4.1.4 - Register risiko dan rencana tindak pengendalian telah dikomunikasikan ke pihak terkait (MRI) **Grade C** a. Dokumentasi Rapat Pemabahasan Manajemen Risiko yang menjelaskan koordinasi antar UMR dan UPR. b. Laporan UMR dan UMR TW I Tahun 2024 c. KM 69 Tahun 2023
4.2	Komunikasi yang Efektif	**Grade C** Screenshot output Laporan Kinerja yang telah dipublikasi melalui website. **Grade D** Data dukung kuisioner mengenai pemahaman audience melalui komunikasi yang efektif. **Grade E** Kebijakan terkait perlu diupdate.
E	**PEMANTAUAN**	
5.1	Pemantauan Berkelanjutan	**5.1.1 - Pimpinan K/L/D/penanggungjawab program dan kegiatan/penanggungjawab operasional mengevaluasi secara berkala pengendalian intern yang telah dilakukan dalam rangka mencapai tujuan organisasi.** **Grade C** a. Monitoring Renaksi Bulanan Tahun 2024. b. Laporan Monitoring Kinerja Triwulanan II, Triwulan III dan Triwulan IV tahun 2023 serta Triwulan I Tahun 2024. c. Laporan LKIP Tahun 2023. d. Laporan UMR dan UPR Triwulan I Tahun 2024 **Grade D** a. Kuisioner Survey IKM oleh stakeholder. b. Pemantauan RTP Manajemen Risiko. **Grade E** Kebijakan terkait Bahwa pemantauan pelaksanaan kinerja telah dilakukan secara triwulanan dan tahunan. **5.1.2 - Proses manajemen risiko telah direviu (MRI)** **Grade C** Dokumen Manajemen Risiko (Laporan UMR dan UPR)

No.	Uraian Unsur / Sub Unsur	Catatan Hasil Pembahasan KKE 3.1 bersama Tim BPKP
		5.1.3 - Pemantauan/monitoring terhadap risiko telah dilakukan (MRI) a. Laporan UMR dan UPR b. Daftar Pemantauan Risiko dan kegiatan pengendalian
5.2	Evaluasi Terpisah	**5.2.1 - Evaluasi terpisah dilakukan oleh pegawai dengan keahlian tertentu yang disyaratkan dan dapat melibatkan APIP atau auditor eksternal untuk menilai kinerja sistem pengendalian intern, mengidentifikasi kelemahan pengendalian, menentukan penyebab dari kegagalan aktivitas pengendalian, serta pengaruhnya terhadap pencapaian tujuan instansi.** a. Laporan SPIP. b. Laporan SAKIP. c. Laporan terkait Program-program prioritas nasional. d. Dokumen audit BPKP terhadap PSN. e. Dokumen Reviu RKA oleh APIP **5.2.2 - Terdapat reviu independen terhadap proses manajemen risiko (MRI)** a. Data dukung Hasil Reviu Inspektorat Jenderal atas Penyelenggaraan Manajemen Risiko atau SPIP b. Surat Pemilik Risiko, UPR dan UMR terkait Pemantauan Risiko dan Kegiatan Pengendalian Triwulan 1 2024

3. **Kesimpulan dan Tindak Lanjut**
   a. Perlu dipastikan kembali agar data dukung yang diupload adalah dari bulan Juli 2023 s.d Juni 2024.
   b. Penulisan pada kolom isian KKE 3.1 disepakati untuk kategori SPIP dimulai dari Grade C, Grade D dan Grade E.
   c. Untuk penulisan data kategori MRI dipastikan untuk memilih satu grade saja.
   d. Pengisian data diharapkan bisa diselesaikan pada 6 Mei 2024.

D. PENUTUP

Demikian laporan ini buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 7 Mei 2024
Notulensi

(Kelompok Evaluasi dan Pelaporan)

DOKUMENTASI

No. ST	:	KP.004/29/15/K1/DJKA/2024
Lokasi	:	Jakarta

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

LAPORAN
PEMBAHASAN DAN KOORDINASI PELAKSANAAN PENJAMINAN KUALITAS TERHADAP HASIL PENILAIAN MANDIRI MATURITAS SPIP TAHUN 2024

DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN
JUNI 2024

PEMBAHASAN DAN KOORDINASI PELAKSANAAN PENJAMINAN KUALITAS TERHADAP HASIL PENILAIAN MANDIRI MATURITAS SPIP TAHUN 2024

A. DASAR PENUGASAN

1. Surat Undangan Sekretaris Direktorat Jenderal Perkeretaapian Nomor: PS.319/1/8/K1/DJKA/2024 tanggal 8 Juni 2024 perihal Undangan Rapat.
2. Surat Perintah Tugas Sekretaris Direktorat Jenderal Perkeretaapian Nomor: KP.004/29/15/K1/DJKA/2024tanggal 10 Juni 2024

B. PELAKSANAAN KEGIATAN

1. Tempat : Maia Hotel Jakarta dan Aplikasi *Zoom Meetings*
2. Tanggal : Selasa s.d Rabu / 11 s.d 12 Juni 2024
3. Peserta Rapat :
   a. Tim Penjaminan Kualitas Penilaian Maturitas SPIP, Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan;
   b. Perwaktilan Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan KA;
   c. Perwakilan Direktorat Prasarana Perkeretaapian;
   d. Perwakilan Direktorat Sarana Perkeretaapian;
   e. Perwakilan Direktorat Keselamatan Perkeretaapian;
   f. Perwakilan Bagian Keuangan, Setditjen Perkeretaapian;
   g. Perwakilan Bagian Hukum, Setditjen Perkeretaapian;
   h. Perwakilan Bagian SDM dan umum, Setditjen Perkeretaapian;
   i. Perwakilan Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Jakarta;
   j. Perwakilan Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Bandung;
   k. Perwakilan Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Semarang;
   l. Perwakilan Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Surabaya;
   m. Perwakilan Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Medan;
   n. Perwakilan Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Padang;
   o. Perwakilan Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Palembang;
   p. Perwakilan Balai Pengujian Perkeretaapian;
   q. Perwakilan Balai Perawatan Perkeretaapian;
   r. Perwakilan Balai Pengelola Kereta Api Ringan Sumatera Selatan;
   s. Perwakilan Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan.
4. Kegiatan – kegiatan yang dilaksanakan sebagai berikut:
   a. Registrasi;
   b. Pembahasan Isian Kertas Kerja Evaluasi dan Dokumen Pendukung Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP oleh Tim Penjaminan Kualitas untuk Kertas Kerja Evaluasi 2 Penilaian Strategi Pencapaian Sasaran Strategis dan Kertas Kerja 5.2 Penilaian Capaian Output/Outcome;

c. Pembahasan Isian Kertas Kerja Evaluasi dan Dokumen Pendukung Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP oleh Tim Penjaminan Kualitas untuk Kertas Kerja Evaluasi 3.1 Struktur dan Proses terkait unsur Lingkungan Pengendalian, Penilaian Risiko, Kegiatan Pengendalian, Informasi dan Komunikasi dan Pemantauan
d. Penyusunan laporan kegiatan.

C. POKOK – POKOK PEMBAHASAN

1. **Penyampaian materi dari Perwakilan Bagian Perencanaan, Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian.**
   a. Sebagai acuan dalam membantu unit kerja dalam melaksanakan seluruh siklus penyelenggaraan SPIP yang meliputi analisis tujuan, perumusan lingkungan pengendalian yang diharapkan, identifikasi risiko, analisis risiko, evaluasi pengendalian terpasang, serta penyusunan rencana tindak pengendalian yang berisikan rencana revisi kebijakan dan prosedur, pengomunikasian revisi pengendalian, dan monitoring evaluasi hasil revisi pengendalian, maka penyelenggaraan SPIP mengacu pada beberapa peraturan diantaranya:
      1) PP 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintahan;
      2) PP 60 tahun 2008 tentang SPIP;
      3) Perka BPKP Nomor 5 tahun 2021;
      4) PM 25 tahun 2018 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan SPIP di Lingkungan Kemenhub;
      5) KM 205 Tahun 2022 tentang Pedoman Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP di Lingkungan Kemenhub;
      6) KM 69 Tahun 2023 tentang Manajemen Risiko di lingkungan Kementerian Perhubungan.
   b. Pada tahun 2023 Hasil Penjaminan Kualitas (PK) oleh APIP sebesar 3,486 dan ditargetkan tahun 2024 sebesar 3,600 dimana pada level 3 (terdefinisi) dengan jumlah Satuan Kerja di Ditjen Perkeretaapian yang berpartisipasi tetap berjumlah 16 Satker.
   c. *Timeline* Tahapan Penilaian Mandiri SPIP Terintegrasi Tahun 2024 sebagai berikut:

d. Adapun Tahapan Penilaian Mandiri SPIP Terintegrasi Tahun 2024 yang telah dilakukan adalah sebagai berikut:
   1) *Kick Off Meeting* telah dilakukan pada 1 Februari 2024;
   2) Koordinasi dan Bimbingan Teknis Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi Tahun 2024 telah dilakukan pada 21-23 Februari 2024;
   3) Asistensi dan Finalisasi Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi Tahun 2024 telah dilakukan pada 2-3 Mei 2024;
   4) Pengumpulan KKE dan data dukung kepada Biro Perencanaan telah dilakukan pada 6-8 Mei 2024;
   5) Rapat Pleno PM Maturitas SPIP telah dilakukan pada 15-16 Mei 2024.
e. Hasil rapat Pleno PM Maturitas SPIP Kementerian Perhubungan tahun 2024 dilaksanakan terhadap 335 satker dan disimpulkan bahwa:
   1) Nilai SPIP : 4,093
   2) Nilai MRI : 4,181
   3) Nilai IEPK : 3,790
   4) Kapabilitas APIP : 3,000

2. **Pembahasan Isian Kertas Kerja Evaluasi dan Dokumen Pendukung Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP oleh Tim Penjaminan Kualitas**
   a. Dalam pembahasan Isian Kertas Kerja Evaluasi dan Dokumen Pendukung Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP menggunakan metode berkelompok untuk mempermudah dalam proses diskusi. Pembagian dibagi menjadi 4 kelompok dengan masing – masing kelompok terdiri dari satu orang perwakilan dari tim Penjamin Kualitas. Adapun pembagianya sebagai berikut:

   b. Ditemukenali beberapa hasil catatan dan masukan selama pembahasan dari Kelompok 1 yang terdiri dari unit kerja Setditjen Perkeretaapian, BTP Kelas I Semarang, BTP Kelas II Palembang, Balai Pengujian Perkeretaapian sebagai berikut:

No	Sub unsur	Catatan Hasil Pembahasan
A	**LINGKUNGAN PENGENDALIAN**	
1.1	Penegakan Integritas dan Nilai Etika	1. Setditjen perlu menambahkan penjelasan mengenai laporan UPG, Bisa naik grade menjadi B dengan memindahkan data dukung SE -1 DJKA Tahun 2023 tentang Larangan Memamerkan Harta dan Kemewahan Bagi Aparatur Sipil Negara di lingkungan DJKA, Surat Direktur Jenderal Perkeretaapian HK.404/I/I/DJKA/2024 tanggal 12 Februari hal Pengendalian Gratifikasi di lingkungan DJKA, Surat Direktur Jenderal Perkeretaapian UM.006/2/5/DJKA/2024 tanggal 2 April 2024 hal Himbauan Pencegahan Korupsi dan Pengendalian Gratifikasi Hari Raya di lingkungan DJKA beserta laporan rapat atau hasil evaluasi sebelum SE tersebut tersusun 2. Balai Peujian agar menambahkan laporan rapat pimpinan dan Semua Grade E disamakan dengan Sesdit, narasi dan data dukungnya, apabila terdapat kebijakan internal dalam unit kerja masing-masing dapat dimasukan untuk melengkapi 3. BTP Semarang agar menambahkan laporan rapat pimpinan dan Semua Grade E disamakan dengan Sesdit, narasi dan data dukungnya, apabila terdapat kebijakan internal dalam unit kerja masing-masing dapat dimasukan untuk melengkapi
1.2	Komitmen terhadap Kompetensi	1. Data dukung untuk Grade D bukan sekedar *screenshot*, melainkan bukti sosialisasi atau nodin penyampaian dari Setditjen ke semua unit kerja untuk menerapkan kebijakan tersebut 2. Grade C dapat ditambahkan dengan sertifikat kompetensi yang ada, apabila hanya menampilkan sample maka harus mencantumkan rekapan dari seluruh jumlah pegawai (contoh dalam LKIP), dan agar dapat dijelaskan pada narasi KKE 3. Untuk Setditjen dapat naik grade menjadi B dengan data dukung tambahan seperti usulan jabatan sebelum diajukan ke PAN RB (contoh

No	Sub unsur	Catatan Hasil Pembahasan
		pengusulan Inspektur) dan agar dapat dijelaskan dalam narasi KKE
1.3	Kepemimpinan yang Kondusif	1. Pengisian grade D dapat mencantumkan laporan Rapim 2. Sub unsur 1.3.1 dapat naik grade menjadi B dengan menambahkan laporan monitoring evaluasi pengendalian internal seperti laporan MR Triwulan I baik oleh UPR maupun UMR 3. Pada 1.3.3 Grade C agar dapat dijelaskan dalam narasi KKE bahwa "Pengambilan keputusan unit kerja (strategis dan operasional) telah mempertimbangkan risiko sebagaimana tertuang dalam form 8 (pemantauan RTP) yang tercantum dalam laporan pengelola risiiko unit kerja Setditjen Perkeretaapian periode Triwulan I Tahun 2024" 4. Masing-masing unit kerja pada Grade C agar dapat dijelaskan dalam narasi KKE bahwa "Sebagaimana Km 69 Tahun 2023 menjelaskan bahwa Menteri akan memberikan kepada unit kerja yang secara konsisten menerapkan Manajemen Risiko" dengan data dukung *ScreenShoot* KM 69 terkait pemberian reward pada hal 18
1.4	Struktur Organisasi Sesuai Kebutuhan	Untuk sementara semua unit kerja agar memasukan saja konsep probis yang ada terlebih dahulu sebagai data dukung, namun sebenarnya apabila belum ada proses bisnis seharusnya tidak dapat berada pada grade C
1.5	Pendelegasian Wewenang dan Tanggung Jawab yang Tepat	1. Data dukung grade D dan C boleh sama 2. Contoh data dukung yang ada seperti pendelegasian PIPK, MR, dan penunjukan SK KPA ke PPK
1.6	Penyusunan dan Penerapan Kebijakan yang sehat tentang Pembinaan SDM	**1.6.1** 1. Grade E terkait SOP Penerimaan PPNPN 2. Data dukung grade D dan C boleh sama 3. Untuk Setditjen Perkeretaapian apabila akan naik grade menjadi B maka dibutuhkan hasil evaluasi terkait pengelolaan SDM (contoh pemakaian tenaga *outsorcing dan* perlunya peningkatan SDM terkait pengoperasian KCJB sehingga SDM KA perlu mengikuti diklat atau magang. Hal ini dapat dijelaskan dalam narasi KKE bahwa

No	Sub unsur	Catatan Hasil Pembahasan
		"Terhadap alih teknologi baru dengan adanya pembangunan dan pengoperasian Kereta Cepat Jakarta-Bandung, ditemukenali dari hasil evaluasi bahwa SDM Ditjen Perkeretaapian perlu dilakukan peningkatan kompetensi melalui Diklat dan Magang guna transfer knowledge kereta api cepat" **1.6.2** Pengisian grade C harus memasukan data dukung semua sertifikat MR yang ada dan dijelaskan dalam narasi KKE bahwa "persentase jumlah pegawai dan jumlah yang memiliki sertifikat serta yang telah mengikuti Bimtek ataupun yang telah mengikuti sosialisasi **1.6.3** Agar dapat dibuktikan dengan hasil kuesioner minimal hasil 80% keatas dari jumlah pegawai telah memahami
1.8	Hubungan Kerja yang Baik dengan Instansi Pemerintah Terkait	**1.8.1** 1. Data dukung grade D dapat berupa PKS bukan *screenshot* 2. Data dukung grade C berupa Pelaksanaan MoU **1.8.2** 1. Data dukung grade E terkait SOP atau kebijakan hubungan Kerjasama 2. Pada grade D harus cek kembali profil risiko apakah sudah tertuang risiko dengan pihak eksternal 3. Untuk Setditjen pada grade D agar dinarasikan dalam KKE bahwa "Telah tertuang dalam profil risiko sebagaimana terlampir (form 5) terhadap risiko kemitraan mengenai keamanan akun Untuk Setditjen Grade C dijelaskan bahwa "Tidak terdapat/belum ditemukan kebocoran kerahasiaan data berdasarkan hasil kemitraan"
B	**PENILAIAN RISIKO**	
2.1	Identifikasi Risiko	**2.1.2** Diusulkan agar dapat naik grade B dengan penjelasan bahwa "Kualitas identifikasi risiko dan register risiko memadai dengan dilaksanakan pendampingan pada saat

No	Sub unsur	Catatan Hasil Pembahasan
		penyusunan /identifikasi dan register risiko" yang dibuktikan dengan data dukung Laporan Rapat pembahasan profil risiko Bersama BPKP ataupun lainnya **2.1.3** Dikarenakan proses bisnis belum ada maka turun menjadi grade E
2.2	Analisis Risiko	**2.2.1** Dalam narasi KKE agar tulisan "operasional" sebaiknya dihapus **2.2.2** Dalam narasi KKE agar dijelaskan bahwa urutan prioritas risiko tertuang dalam form 8 Dalam narasi KKE agar dijelaskan bahwa urutan prioritas risiko tertuang dalam form 8 **2.2.3** Dalam narasi KKE agar dijelaskan bahwa urutan prioritas risiko tertuang dalam form 8
C	**KEGIATAN PENGENDALIAN**	
3.1	Reviu atas Kinerja	Grade C tambahkan notulensi pembahasan laporan monitoring yang membahas upaya peningkatan kinerja, dan ditambahkan dokumen reviu LKIP
3.2	Pembinaan SDM	Sesuai dengan sub unsur 1.2 bahwa naik menjadi grade B
3.6	Pemisahan Fungsi	Grade C tambahkan narasi terkait pemisahan fungsi pada pejabat pengelola keuangan dan SK Tim TIK
3.7	Otorisasi atas Transaksi dan Kejadian yang Penting	Untuk Setditjen Grade C tambahkan SK Pengelola BMN
D	**INFORMASI DAN KOMUNIKASI**	
4.1	Informasi yang Relevan	**4.1.4** Grade C agar menambahkan nota dinas penyampaian profil risiko yang telah disusun dan ditetapkan dari pemilik risiko kepada masing-masing penanggung jawab
E	**PEMANTAUAN**	
5.1	Pemantauan Berkelanjutan	**5.1.1** Penjelasana narasi KKE agar ditambahkan bahwa dalam pelaksanaan penyusunan risiko telah dilakukan pendampingan

No	Sub unsur	Catatan Hasil Pembahasan
		terhadap (form 5), dan sudah tersedianya tanda tangan berjenjang dari masing-masing penanggung jawab dengan menambahkan Laporan rapat hasil pendampingan penyusunan profil risiko **5.1.2** Penjelasana narasi KKE agar ditambahkan bahwa dalam pelaksanaan penyusunan risiko telah dilakukan pendampingan terhadap (form 5), dan sudah tersedianya tanda tangan berjenjang dari masing-masing penanggung jawab dengan menambahkan Laporan rapat hasil pendampingan penyusunan profil risiko
5.2	Evaluasi Terpisah	**5.2.1** Narasi dalam KKE agar dirubah bahwa telah dilakukan evaluasi terpisah antara lain SAKIP oleh tim evaluasi sesuai SK, dan SPIP yang disampaikan ke APIP untuk evaluasi SPIP **5.2.2** 1. Narasi dalam KKE dapat disesuaikan dengan ketersediaan data dukung 2. Untuk Setditjen dapat ditambahkan terkait hasil rerview independen dari Sesdit kepada unit kerja dibawahnya atas pemantauan Manajemen Risiko (data dukung berupa Laporan Perjadin dan BA) Untuk Balai Pengujian dapat ditambahkan terkait hasil rerview independen dari Sesdit kepada Balai Pengujian atas pemantauan Manajemen Risiko (data dukung berupa BA, apabila ada laporan rapat dapat ditambahkan)

c. Ditemukenali beberapa hasil catatan dan masukan selama pembahasan dari Kelompok 2 yang terdiri dari unit kerja Direktorat Prasarana Perkeretaapian, Direktorat Keselamatan Perkeretaapian, BTP Kelas I Medan, BPKA Sulawesi Selatan sebagai berikut:

No.	Sub nsur	Catatan Hasil Pembahasan
A	**LINGKUNGAN PENGENDALIAN**	
1.1	Penegakan Integritas dan Nilai Etika	1. Direktorat Prasarana agar lengkapi data dukung grade C 2. BPKA Sulsel agar lengkapi data dukung C dan D

No.	Sub nsur	Catatan Hasil Pembahasan
1.2	Komitmen terhadap Kompetensi	Catatan untuk semua agar menyediakan *sampling* yang sesuai 6 pegawai yang terdiri dari 2 pegawai struktural, 2 pegawai koordinator/eselon IV, 2 staf agar disesuaikan dengan kualifikasi pegawai dengan ijazah, diklat yang sudah diikuti, anjab dan hasil asesmen (untuk balai minimal 3)
1.3	Kepemimpinan yang Kondusif	Sub unsur 1.3.1 BPKA Sulsel dilengkapi data dukung grade dibawahnya
1.4	Struktur Organisasi Sesuai Kebutuhan	Catatan untuk semua agar melampirkan proses bisnis, bzting pegawai (dokumen anjab)
1.5	Pendelegasian Wewenang dan Tanggung Jawab yang Tepat	BPKA Sulsel agar lebih merapihkan data dukung
1.6	Penyusunan dan Penerapan Kebijakan yang sehat tentang Pembinaan SDM	**Sub unsur 1.6.1** 1. Direktorat Prasarana agar melengkapi data dukung 2. BPKA Sulsel agar disusun data dukung berdasarkan gradenya. 3. Catatan untuk semua tambahkan rekap absensi bulan Januari s.d Mei 2024 di Grade C 4. Catatan untuk semua tambahkan tambahkan kebijakan untuk absen di Grade E **Sub unsur 1.6.2** 1. Direktorat Prasarana agar melengkapi data dukung garde C 2. BTP Medan agar melengkapi data dukung grade C serta menambahkan usulan diklat bimtek, melampirkan rekapitulasi kompetensi pegawai di DUK. 3. BPKA Sulsel agar melengkapi data dukung grade C serta menambahkan usulan diklat bimtek MR 4. Catatan untuk semua Grade C tambahkan usulan pegawai untuk diklat/bimtek terkait MR. kalau ada kegiatan/sosialisasi kegiatan MR masukkan laporan dan daftar hadir **Sub unsur 1.6.3**

No.	Sub nsur	Catatan Hasil Pembahasan
		1. Direktorat Prasarana agar lengkapi data dukung C 2. BTP Medan agar melengkapi sertifikat kompetensi pegawai terkait MR 3. BPKA Sulsel agar melengkapi sertifikat kompetensi pegawai terkait MR
1.7	Perwujudan Peran APIP yang Efektf	Mengikuti syarat level kapabilitas APIP, APIP yang akan mengisikan sub unsur ini
1.8	Hubungan Kerja yang Baik dengan Instansi Pemerintah Terkait	**Sub unsur 1.8.1** 1. Direktorat Prasarana agar melengkapi data dukung grade C, D, E,. 2. Direktorat Keselamatan agar melengkapi data dukung grade C,D, E. 3. BPKA Sulsel agar melengkapi data dukung kerjasama dengan instansi lain. **Sub unsur 1.8.2** 1. Direktorat Prasarana agar melengkapi data dukung C. 2. Direktorat Keselamatan narasi yang digunakan untuk grade D namun data dukung yang dipenuhi grade C. BPKA Sulsel agar melampirkan pengelolaan risiko kerjasama
B	**PENILAIAN RISIKO**	
2.1	Identifikasi Risiko	**Sub unsur 2.1.2** Direktorat Keselamatan data dukung tidak bisa diakses oleh tim evaluator **Sub unsur 2.1.3** Catatan untuk semua agar melampirkan proses bisnis.
2.2	Analisis Risiko	**Sub unsur 2.2.1** BPKA Sulsel agar menyesuaikan grade KKE dengan grade data dukungnya serta lengkapi data dukungnya. **Sub unsur 2.2.5** BPKA Sulsel agar menyesuaikan grade KKE dengan grade data dukungnya serta lengkapi data dukungnya
C	**KEGIATAN PENGENDALIAN**	
3.1	Reviu atas Kinerja	BPKA Sulsel agar melengkapi data dukungnya
3.2	Pembinaan SDM	BPKA Sulsel agar melengkapi data dukungnya

No.	Sub nsur	Catatan Hasil Pembahasan
3.3	Pengendalian atas Pengelolaan Sistem Informasi	BPKA Sulsel agar melengkapi data dukungnya
3.4	Pengendalian Fisik atas Aset	Catatan untuk semua agar melengkapi dakung kebijakan/SOP Pengelolan BMN serta melengkapi data dukung D dan E
C	**KEGIATAN PENGENDALIAN**	
3.5	Penetapan dan Reviu atas Indikator dan Ukuran Kinerja	BPKA Sulsel agar melengkapi data dukung
3.6	Pemisahan Fungsi	BPKA Sulsel agar melengkapi data dukung
3.7	Otorisasi atas Transaksi dan Kejadian yang Penting	BPKA Sulsel agar melengkapi data dukung
3.8	Pencatatan yang Akurat dan Tepat Waktu atas Transaksi dan Kejadian	Direktorat Prasarana Prasarana agar melengkapi data dukung grade C,D,E serta melampirkan dokumentasi sosialisasi kebijakan
3.9	Pembatasan Akses atas Sumber Daya dan Pencatatannya	Direktorat Prasarana Prasarana agar melengkapi data dukung
3.10	Akuntabilitas terhadap Sumber Daya dan Pencatatannya	Direktorat Prasarana Prasarana agar melengkapi data dukung
3.11	Dokumentasi yang Baik atas SPI serta Transaksi dan Kejadian Penting	Direktorat Prasarana Prasarana agar melengkapi data dukung, grade D tambahkan sosialisasi portal
D	**INFORMASI DAN KOMUNIKASI**	
4.1	Informasi yang Relevan	**Sub unsur 4.1.1** Direktorat Prasarana agar melengkapi data dukung grade CDE **Sub unsur 4.1.2** 1. Direktorat Prasarana agar melengkapi data dukung grade C 2. Tambahkan dokumen UPG 3. Tambahkan SOP terkait pengaduan 4. Rekap/laporan terkait pengaduan 5. Kebijakan penanganan pengaduan **Sub unsur 4.1.3** Direktorat Prasarana agar melengkapi data dukung grade C **Sub unsur 4.1.4** Direktorat Prasarana agar melengkapi data dukung grade C

No.	Sub nsur	Catatan Hasil Pembahasan
4.2	Komunikasi yang Efektif	1. Direktorat Prasarana agar melengkapi data dukung 2. BPKA Sulsel agar melengkapi data dukung
E	**PEMANTAUAN**	
5.1	Pemantauan Berkelanjutan	**Sub unsur 5.1.1** Direktorat Prasarana agar melengkapi data dukung **Sub unsur 5.1.2** 1. Direktorat Prasarana agar melengkapi data dukung grade C 2. BTP Medan data dukung grade C tapi di KKE grade D agar melengkapi dokumen reviu operasional 3. BPKA Sulsel data dukung grade C tapi di KKE grade D agar melengkapi dokumen reviu operasional **Sub unsur 5.1.3** 1. BTP Medan data dukung grade C tapi di KKE grade D agar melampirkan laporan monitoring risiko 2. BPKA Sulsel data dukung grade C tapi di KKE grade D agar melampirkan laporan monitoring risiko
5.2	Evaluasi Terpisah	**Sub unsur 5.2.1** 1. Direktorat Prasarana agar melengkapi data dukung 2. BPKA Sulsel data dukung grade C tapi di KKE grade D **Sub unsur 5.2.2** BTP Medan dan BPKA Sulsel pada KKE grade A namun data dukung grade C

d. Ditemukenali beberapa hasil catatan dan masukan selama pembahasan dari Kelompok 3 yang terdiri dari unit kerja Direktorat Sarana Perkeretaapian, BTP Kelas I Bandung, BTP Kelas II Padang, Balai Perawatan Perkeretaapian sebagai berikut:

No.	Sub unsur	Catatan Hasil Pembahasan
A	**LINGKUNGAN PENGENDALIAN**	
1.1	Penegakan Integritas dan Nilai Etika	1. Dit Sarana : Sudah sesuai 2. BTP Padang : Perlu penambahan PK Berjenjang Tahun 2024 3. BTP Bandung, BTP Padang dan Balai Perawatan perlu penyesuaian link data dukung untuk grade D & E
1.2	Komitmen terhadap Kompetensi	BTP Bandung, BTP Padang dan Balai Perawatan perlu penyesuaian link data dukung untuk grade D & E
1.3	Kepemimpinan yang Kondusif	**Sub unsur 1.3.1** 1. Dit Sarana : Untuk sub unsur 1.3.1 perlu ditambahkan data dukung kegiatan terkait MR (Undangan Bimtek/Pembahasan) dan Sertifikat MR Pegawai 2. BTP Bandung : Perlu ditambahkan penerapan MR dalam kinerja (seperti dalam kontrak pekerjaan yang mencakup penanganan/konsekuensi jika terjadi keterlambatan pekerjaan) 3. BTP Bandung, BTP Padang dan Balai Perawatan perlu penyesuaian link data dukung untuk grade D & E **Sub unsur 1.3.2** Sudah sesuai **Sub unsur 1.3.3** Sudah sesuai
1.4	Struktur Organisasi Sesuai Kebutuhan	1. BTP Bandung, BTP Padang dan Balai Perawatan perlu penyesuaian link data dukung untuk grade D & E 2. BTP Bandung: Penambahan dokumen Analisi Jabatan 3. Saat ini belum ada proses bisnis di lingkungan Ditjen Perkeretaapian
1.5	Pendelegasian Wewenang dan Tanggung Jawab yang Tepat	1. BTP Bandung, BTP Padang dan Balai Perawatan perlu penyesuaian link data dukung untuk grade D & E

No.	Sub unsur	Catatan Hasil Pembahasan
		2. Untuk Grade C, agar ditambahkan ND/ disposisi dan telah ditindak lanjuti dari pihak yang mendapat disposisi
A	**LINGKUNGAN PENGENDALIAN**	
1.6	Penegakan Integritas dan Nilai Etika	1. BTP Bandung, BTP Padang dan Balai Perawatan perlu penyesuaian link data dukung untuk grade D & E 2. Untuk BTP Bandung agar ditambahkan pegawai yang memiliki sertifikasi MR agar bisa sebagian besar
1.7	Perwujudan Peran APIP yang Efektf	Diisi oleh APIP
B	**PENILAIAN RISIKO**	
2.1	Identifikasi Risiko	Untuk BTP Padang agar ditambahkan piagam MR dengan lampirannya
2.2	Analisis Risiko	Untuk BTP Padang Subunsur 2.2.3 -2.2.5 agar ditambahkan Laporan UPR dan UMR Triwulan I 2024
C	**KEGIATAN PENGENDALIAN**	
3.1	Reviu atas Kinerja	BTP Bandung, BTP Padang dan Balai Perawatan perlu penyesuaian link data dukung untuk grade D & E
3.2	Pembinaan SDM	BTP Bandung, BTP Padang dan Balai Perawatan perlu penyesuaian link data dukung untuk grade D & E
3.3	Pengendalian atas Pengelolaan Sistem Informasi	BTP Bandung, BTP Padang dan Balai Perawatan perlu penyesuaian link data dukung untuk grade D & E
3.4	Pengendalian Fisik atas Aset	BTP Bandung, BTP Padang dan Balai Perawatan perlu penyesuaian link data dukung untuk grade D & E
3.5	Penetapan dan Reviu atas Indikator dan Ukuran Kinerja	1. BTP Bandung, BTP Padang dan Balai Perawatan perlu penyesuaian link data dukung untuk grade D & E

No.	Sub unsur	Catatan Hasil Pembahasan
		2. Untuk BTP Bandung agar ditambahkan Lapbul Individu
3.6	Pemisahan Fungsi	BTP Bandung, BTP Padang dan Balai Perawatan perlu penyesuaian link data dukung untuk grade D & E
3.7	Otorisasi atas Transaksi dan Kejadian yang Penting	1. BTP Bandung, BTP Padang dan Balai Perawatan perlu penyesuaian link data dukung untuk grade D & E 2. Untuk BTP Padang agar ditambahkan data dukung pada grade C
3.8	Pencatatan yang Akurat dan Tepat Waktu atas Transaksi dan Kejadian	BTP Bandung, BTP Padang dan Balai Perawatan perlu penyesuaian link data dukung untuk grade D & E
3.9	Pembatasan Akses atas Sumber Daya dan Pencatatannya	1. BTP Bandung, BTP Padang dan Balai Perawatan perlu penyesuaian link data dukung untuk grade D & E 2. Untuk BTP Padang agar ditambahkan data dukung pada grade C
3.10	Akuntabilitas terhadap Sumber Daya dan Pencatatannya	BTP Bandung, BTP Padang dan Balai Perawatan perlu penyesuaian link data dukung untuk grade D & E
3.11	Dokumentasi yang Baik atas SPI serta Transaksi dan Kejadian Penting	1. Dit. Sarana untuk data dukung grade D & E masih kosong, agar dilengkapi 2. BTP Bandung, BTP Padang dan Balai Perawatan perlu penyesuaian link data dukung untuk grade D & E
D	**INFORMASI DAN KOMUNIKASI**	
4.1	Informasi yang Relevan	**Sub unsur 4.1.1** BTP Bandung, BTP Padang dan Balai Perawatan perlu penyesuaian link data dukung untuk grade D & E **Sub unsur 4.1.4** Untuk BTP Padang dan Balai Perawatan agar ditambahkan data dukung Laporan UPR dan UMR Triwulan I 2024

No.	Sub unsur	Catatan Hasil Pembahasan
4.2	Komunikasi yang Efektif	1. BTP Bandung, BTP Padang dan Balai Perawatan perlu penyesuaian link data dukung untuk grade D & E 2. Agar ditambahkan dokumentasi (undangan/laporan) kegiatan koordimasi dengan pihak eksternal (dapat berupa kegiatan coffee morning atau kegiatan lainnya)
E	**PEMANTAUAN**	
5.1	Pemantauan Berkelanjutan	**Sub unsur 5.1.1** BTP Bandung, BTP Padang dan Balai Perawatan perlu penyesuaian link data dukung untuk grade D & E **Sub unsur 5.1.2** BTP Padang agar ditambahkan dokumen Piagam MR dan lampirannya **Sub unsur 5.1.3** Sudah sesuai
5.2	Evaluasi Terpisah	**Sub unsur 5.2.1** Sudah sesuai **Sub unsur 5.2.2** Untuk Balai Perawatan agar ditambahkan data dukung selain PK (LMCK dan LKIP)

e. Ditemukenali beberapa hasil catatan dan masukan selama pembahasan dari Kelompok 4 yang terdiri dari unit kerja Direktorat LLAKA, BTP Kelas I Jakarta, BTP Kelas I Surabaya, BPKAR Sumatera Selatansebagai berikut:

No.	Sub unsur	Catatan Hasil Pembahasan
A	**LINGKUNGAN PENGENDALIAN**	
1.1	Penegakan Integritas dan Nilai Etika	1. Dit. LLAKA agar melengkapi data dukung Grade C meliputi: a. Data dukung *reward* seperti usulan data pegawai yang mengikuti diklat/beasiswa b. Data dukung *punishment* dipastikan kembali rekap pemotongan tunjangan kinerjanya agar sesuai. c. Laporan UKI Triwulan I Tahun 2024

No.	Sub unsur	Catatan Hasil Pembahasan
		2. BTP Jakarta agar melengkapi data dukung Grade C terkait SOP *Reward* dan *Punishment.* 3. Dit. LLAKA, BTP Jakarta, BTP Surabaya dan BPKAR Sumsel diharapkan agar melengkapi Pakta Integritas (setiap pergantian pimpinan). 4. Seluruh unit kerja disarankan untuk menambahkan data dukung Usulan Pegawai Teladan/Pegawai Berprestasi. 5. Disarankan untuk melampirkan LHKPN tiap pejabat
1.2	Komitmen terhadap Kompetensi	1. BTP Jakarta agar melengkapi data dukung Analisis beban kerja dan Analisis Jabatan belum dilampirkan. 2. BPKAR Sumsel agar melengkapi data dukung Analisis Jabatan.
1.3	Kepemimpinan yang Kondusif	1.3.1 Dit. LLAKA, BTP Jakarta, BTP Surabaya dan BPKAR Sumsel diharapkan agar melengkapi dokumen terkait *reward and punishment.* 1.3.2 BTP Surabaya dan BPKAR Sumsel agar melengkapi data dukung Penyelenggaraan Bimtek Manajemen Risiko, Sertifikasi Manajemen Risiko dan SK Tim Penyelenggara. 1.3.3 BTP Jakarta Karena MRI, langsung saja memilih grade C, serta perlu dicek kembali terkait kelengkapan data dukung 1.3.4 BTP Jakarta dan BTP Surabaya Karena MRI, langsung saja memilih grade C, serta perlu dicek kembali terkait kelengkapan data dukung
1.4	Struktur Organisasi Sesuai Kebutuhan	BTP Jakarta, BTP Surabaya, BPKAR Sumsel Agar melengkapi Dokumen Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja serta Dokumen Standar Kompetensi Jabatan.
1.5	Pendelegasian Wewenang dan Tanggung Jawab yang Tepat	Sudah sesuai dan tidak ada catatan
A	**LINGKUNGAN PENGENDALIAN**	
1.6	Penegakan Integritas dan Nilai Etika	**1.6.1** Sudah sesuai dan tidak ada catatan **1.6.2 - MRI** BTP Jakarta dan BPKAR Sumsel.

No.	Sub unsur	Catatan Hasil Pembahasan
		Isian Grade tidak sinkron dengan skor yang dipilih (grade D namun skor 3). Bisa dinaikan menjadi grade C dengan melampirkan data dukung berupa: 1. Program Sertifikasi/Pelatihan pegawai 2. Dokumentasi dan Laporan Kegiatan Pelatihan/Sertifikasi 3. Sertifikat QRMO, QRMA, dan QRMP 4. Dokumentasi sosialisasi penerapan dan penyusunan dokumen manajemen risiko Unit Kerja **1.6.3** Sudah sesuai dan tidak ada catatan
1.7	Perwujudan Peran APIP yang Efektf	Diisi oleh APIP
1.8	Hubungan Kerja yang Baik dengan Instansi Pemerintah Terkait	**1.8.1** **Dit. LLAKA, BTP Jakarta, BTP Surabaya, BPKAR Sumsel** 1. Disarankan untuk menambahkan dokumen Rapat Koordinasi dan Bimtek Teknis 2. Melampirkan data dukung terkait kerjasama kemitraan **1.8.2** **Dit. LLAKA, BTP Jakarta, BTP Surabaya, BPKAR Sumsel** 1. SOP Penyelenggaraan Kerjasama 2. Profil risiko yang berkaitan dengan hubungan mitra lain, 3. Usulan risiko baru terkait risiko kemitraan Pengisian grade BTP Jakarta tidak sinkron (mengisi grade D namun skor 3).
B	**PENILAIAN RISIKO**	
2.1	Identifikasi Risiko	**2.1.1 - MRI** **BTP Jakarta** Karena MRI cukup pilih salah satu grade **BTP Jakarta, BTP Surabaya, BPKAR Sumsel** Dapat ditambahkan data dukung Laporan UMR dan Laporan UPR **2.1.2** Sudah sesuai dan tidak ada catatan **2.1.3** Sudah sesuai dan tidak ada catatan

No.	Sub unsur	Catatan Hasil Pembahasan
2.2	Analisis Risiko	Sudah sesuai dan tidak ada catatan
C	**KEGIATAN PENGENDALIAN**	
3.1	Reviu atas Kinerja	Seluruh Unit kerja dapat menambahkan data dukung Evaluasi Akhir Periode Renstra
3.2	Pembinaan SDM	Dapat melampirkan data dukung usulan diklat AMDAL ataupun usulan diklat lainnya seperti Diklat terkait Tugas dan Fungsi.
3.3	Pengendalian atas Pengelolaan Sistem Informasi	BTP Jakarta, BTP Surabaya, BPKAR Sumsel Bisa dinaikan ke grade C dengan data dukung tambahan: 1. SOP Pengelolaan Permohonan Informasi dan Dokumentasi; 2. SOP Pemantauan dan Pengisian Pelaporan Data Kinerja Melalui Aplikasi e-Performance; 3. SOP Pengelolaan Portal Aplikasi DJKA (Pengembangan Fitur dan Modul); 4. SOP Penggunaan Aplikasi SIK; SOP Pengelolaan TIK (Website DJKA).
C	**KEGIATAN PENGENDALIAN**	
3.4	Pengendalian Fisik atas Aset	Sudah sesuai dan tidak ada catatan
3.5	Penetapan dan Reviu atas Indikator dan Ukuran Kinerja	Seluruh unit kerja agar Menambahkan Laporan Capaian Kinerja TW I 2024 diharapkan bisa ditambahkan.
3.6	Pemisahan Fungsi	Sudah sesuai dan tidak ada catatan
3.7	Otorisasi atas Transaksi dan Kejadian yang Penting	Sudah sesuai dan tidak ada catatan
3.8	Pencatatan yang Akurat dan Tepat Waktu atas Transaksi dan Kejadian	BTP Jakarta, BTP Surabaya, BPKAR Sumsel Agar ditambahkan kegiatan keuangan seperti: 1. Laporan Bulanan Satuan Kerja Tahun 2023 2. Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2023 3. DIPA Satuan Kerja TA 2024 4. Laporan Posisi BMN di Neraca per Desember 2023 5. Berita Acara Rekonsiliasi Laporan Keuangan dan Laporan BMN TA 2023 Daftar Rincian Kas di Rekening Bendahara Pengeluaran Satker PLLPAKA
3.9	Pembatasan Akses atas Sumber Daya dan Pencatatannya	BPKAR Sumsel agar menambahkan 1. SK Tim Aplikasi SAKTI

No.	Sub unsur	Catatan Hasil Pembahasan
		2. Pedoman penggunaan aplikasi SAKTI
3.10	Akuntabilitas terhadap Sumber Daya dan Pencatatannya	Tidak ada catatan
3.11	Dokumentasi yang Baik atas SPI serta Transaksi dan Kejadian Penting	BTP Jakarta, BTP Surabaya, BPKAR Sumsel Menambahkan CaLK yang bertandatangan.
D	**INFORMASI DAN KOMUNIKASI**	
4.1	Informasi yang Relevan	**4.1.1 MRI** Tidak ada catatan **4.1.2** Karena MRI, terkait penerapan sistem pengaduan (SIMADU) sebaiknya pilih langsung grade C dan data dukung dipindahkan. **4.1.3** Seluruh unit kerja diharapkan untuk menambahkan data dukung terkait Bimtek/Sosialisasi Manajemen Risiko. **4.1.4** Seluruh unit kerja diharapkan dapat menambahkan 1. Surat penyampaian Laporan UPR dan UMR 2. Dokumen Daftar Risiko, Peta Risiko dan Rencana Tindak Pengendalian 3. Laporan Pemilik Risiko Setditjen KA TW I Tahun 2024. KM 69 Tahun 2023 tentang Manajemen Risiko di lingkungan Kementerian Perhubungan
4.2	Komunikasi yang Efektif	Sudah sesuai dan tidak ada catatan
E	**PEMANTAUAN**	
5.1	Pemantauan Berkelanjutan	**Sub unsur 5.1.1** Sudah sesuai dan tidak ada catatan **Sub unsur 5.1.2** Seluruh unit kerja agar melampirkan catatan yang menyatakan bahwa UMR telah membaca dan menyetujui laporan Unit Pengelola Risiko, untuk sementara bisa menggunakan catatan manual. **Sub unsur 5.1.3** Sudah sesuai dan tidak ada catatan
5.2	Evaluasi Terpisah	**Sub unsur 5.2.1**

No.	Sub unsur	Catatan Hasil Pembahasan
		BPKAR Sumsel dan BTP Surabaya Agar melampirkan Hasil Penjaminan Kualitas SPIP Tahun 2023 dari Itjen, untuk narasi bisa mencontoh dari Dit. LLAKA. **Sub unsur 5.2.2** Sudah sesuai dan tidak ada catatan

3. **Sesi diskusi dengan masing – masing unit kerja terkait catatan Tim Penjaminan Kualitas.**
   a. Perwakilan Direktorat Prasarana Perkeretaapian menyampaikan beberapa hal diantaranya:
      1) Sudah melakukan reviu ulang dengan Itjen, secara paralel dalam pemenuhan data dukung.
      2) Pada Sub unsur 1.2 Komitmen terhadap kompetensi terdapat Catatan untuk semua agar menyediakan sampling yang sesuai 6 pegawai yang terdiri dari 2 pegawai struktural, 2 pegawai administrator, 2 staf agar disesuaikan dengan kualifikasi pegawai dengan ijazah, diklat yang sudah diikuti, anjab dan hasil asesmen (sample minimal untuk Direktorat 6 pegawai dan Balai 3 pegawai), Ditpras masih berprogres.
      3) Pada Sub unsur 1.4.1 diminta melengkapi bezeting pegawai (Kebutuhan jumlah pegawai dengan realisasi/yang dibutuhkan).
      4) Pada sub unsur 1.6.1 diminta ditambahkan kuesioner SDM (terhadap pemahaman MR di lingkungan pegawai).
      5) Pada sub unsur 1.6.3 diusulkan grade B, dengan data dukung SDM MR yang tidak masuk kedalam SK (usulan pengajuan MR sudah dihitung upaya, termasuk sosialisasi KM 69 di internal).
      6) Pada sub unsur 2.1.3 masih menggunakan probis yang lama/RO/KRO.
      7) Pada sub unsur 3.4.1 terkait Pengendalian Fisik atas Aset, SOP terkait dengan BMN perlu ditambahkan.
      8) Pada sub unsur 1.8.2 terkait Hubungan Kerja yang Baik dengan Instansi Pemerintah Terkait melampirkan bentuk reviu dengan K/L lain tidak bisa dinilai (hanya mengusulkan Kerjasama dan diusulkan menggunakan IMO KAI).
      9) Terkait dengan laporan pengaduan, pedoman terhadap surat dari Direktur untuk tidak menerima gratifikasi yang tertera pada surat (berupa nomor pengaduan dll), tidak spesifik harus SIMADU.
   b. Perwakilan SDM dan Umum menyampaikan beberapa hal diantaranya:
      1) Terkait dengan data DUK sudah ada pada SIK, namun tidak menjelaskan kompetensi masing – masing, hanya dapat menampillkan Riwayat kompetensi dimana hal tersebut kurang lengkap, saat ini dalam proses pembuatan surat tindaklanjut agar masing – masing pegawai dapat mengupdate data SIK.

2) Probis saat ini sudah disusun dan identifikasi sampai dengan level 3, perlu dilakukan reviu oleh masing – masing direktorat dan UPT (teknis) dan ditargetkan selesai pada bulan September 2024.
3) Terkait data dukung probis untuk sementara dapat dilampirkan draft/konsep probis terakhis atau terupdate. Terkait dengan probis Dukungan Manajemen sudah ada di Biro SDM.
4) Terkait dengan *buzzeting* SDM akan dikoordinasikan kepada semua unit kerja

c. Perwakilan Bagian Humas menyampaikan bahwa terkait dengan pengaduan dapat menggunakan media 151 dan pada website (DJKA/PPID). Terkait dengan hasil laporan aduan per unit kerja akan dikoordinasikan terlebih dahulu.
d. Direktorat Keselamatan Perkeretaapian menyampaikan beberapa hal diantaranya:
   1) Pada sub unsur 1.6.2 diminta melengkapi Nota Dinas usulan diklat, laporan Bimtek MR/sosialisasi KM 69 tahun 2023 beserta dokumentasi (menggunakan laporan dari Setditjen) dan dapat menambahkan kegiatan GRC pada tahun, rapat pembahasan terkait MR.
   2) Pada sub unsur 3.4.1 diminta untuk melengkapi SOP pengelolaan BMN. Dimana saat ini sementara menggunakan SOP sementara dapat menggunakan dari bagian keuangan.
   3) Pada sub unsur 4.1.2 diminta untuk melampirkan UPG TW I – IV 2023.
e. Balai Teknik Perkeretaapian kelas I Medan menyampaikan beberapa hal diantaranya:
   1) Masih berprogres dalam pemenuhan dokumen data dukung sesuai dengan yang tertera pada KKE.
   2) Pada subu nsur 1.2 terkait kesesuaian kompetensi dengan jabatan pegawai dimana pada UPT/Balai dapat menyesuaikan sampling minimal 3 dimana 1 struktural dan 2 staf. Namun apabila Direktorat Teknis perlu 6 sampel dimana terdiri dari 2 struktural, 2 adminstrator, 2 staf.
   3) Pada sub unsur 1.4 diminta untuk melengkapi peta probis, risalah rapat penyusunan probis, bezzeting. Saat ini masih dalam pemenuhan data dukung tersebut.
   4) Pada sub unsur 1.6.1 diminta menambahkan kebijakan absensi dan rekap Januari – Mei 2024 .
   5) Pada sub unsur 1.6.2 melampirkan usulan diklat MR, rekapan , kuisioner MR dll.
   6) Pada subunsur 1.6.2 diminta sertifikat MR perlu ditambahkan sebagai data dukung.
   7) Secara detail catatan hampir sama dengan pembahasan.
f. BPKA Sulawesi Selatan menyampaikan beberapa hal diantaranya:
   1) Masih berprogres terkait dengan pemenuhan data dukung sesuai dengan spreadsheet pada KKE.

2) Terkendala pada Resiko terkait dengan dokumen risiko terhadap risiko kemitraan. Terdapat risiko terhadap KPBU, dimana risiko tersebut dapat di highlight. Pada kontrak dapat dicek terkait dengan antisipasi risiko pada Kerjasama/kontrak

g. Perwakilan Direktorat Sarana Perkeretaapian menyampaikan beberapa hal diantaranya:
   1) Pada Sub unsur 1.3.2 Sudah ditindaklanjuti dengan melampirkan Bimtek Diklat Manajemen Risiko (termasuk undangan).
   2) Pada Sub unsur 4.1 mengenai Informasi yang relevan data dukung hanya pada Grade C diminta untuk menambahkan grade E dan D. Namun ditemukenali seharusnya kode parameter tersebut MRI, namun yang tertera pada KKE kode parameter SPIP.
h. Perwakilan Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Bandung menyampaikan beberapa hal diantaranya:
   1) Link data dukung belum sinkron, perlu penyesuaian link dan sudah diperbaiki termasuk Perlu penyesuaian folder data dukung.
   2) Pada sub unsur 1.2 Komitmen terhadap Kompetensi data dukung/penjelasan untuk grade D yaitu standar kompetensi telah dikomunikasikan dan dipahami oleh seluruh pegawai (termasuk pimpinan, penanggungjawab pengelolaan SDM) sesuai dengan tusinya dapat menambahkan Screenshoot/sosialisasi,berbentuk nota dinas (SK penetapan jabatan pelaksana fungsional, apakah memenuhi kompetensi).
   3) Pada sub unsur 1.3 perlu penambahan SOP terkait dengan pengelolaan aset.
   4) Pada sub unsur 1.5 Pendelegasian Wewenang dan Tanggung Jawab yang Tepat pada Grade D dapat ditambahkan disposisi pimpinan yang ditindak lanjatu berupa undangan yang telah ditindaklanjuti dengan melampirkan laporan.
   5) Pada sub unsur 1.8.2 Hubungan Kerja yang Baik dengan Instansi Pemerintah Terkait Diusulkan Grade C dengan melampirkan acuan kerja sama seperti surat kontrak dengan penyedia. Namun akan dicek kembali terkait dengan narasi – narasi penanganan risiko terhadap kemitraan.
i. Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Padang menyampaikan saat ini masih dalam pemenuhan Data dukung . Terdapat Kendala teknis yaitu link data dukung tidak bisa terbaca pada KKE dari evaluator. Terkait dengan SOP perlu dilakukan reviu namun masih menunggu penetapan probis terlebih dahulu. Terkait dengan apel pagi belum melakukan kegiatan apel pagi. Mengenai apel pagi belum ada kebijakan terkait kewajiban untuk melakukan kegiatan apel pagi, masih menggunakan kebijakan masing – masing unit kerja.
j. Balai Perawatan Perkeretaapian menyampaikan bahwa terdapat Kendala teknis yaitu link data dukung tidak bisa terbaca pada KKE dari evaluator. Saat ini masih dalam progres pemenuhan data dukung sesuai dengan narasi yang ada pada lembar KKE.

k. Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api menyampaikan beberap hal diantaranya:
   1) Saat ini masih berprogres dalam pemenuhan/melengkapi data dukung .
   2) Data dukung *reward* seperti usulan data pegawai yang mengikuti diklat/beasiswa telah ditambahkan berupa usulan diklat regulator dan beasiswa S2.
   3) Data dukung *punishment* dipastikan kembali rekap pemotongan tunjangan kinerjanya agar sesuai ditambahkan data dukung berupa rekap absensi dan tukin.
   4) PM 38 tahun 2021 perihal Pengadaan Badan Usaha Dalam Penyelenggaraan Prasarana Perkeretaapian Umum dapat ditambahkan pada sub unsur Hubungan Kerja yang Baik dengan Instansi Pemerintah terkait.
   5) Diperlukan penambahan terhadap beberapa SOP terkait dengan penyelenggaraan Kerjasama seperti SOP penyusunan dokumen Amdal (berhubungan dengan Pemprov, KLHK, dan *stakeholder* lain), SOP Pelaksanaan PSO, SOP izin usaha dan izin operasi.
   6) Profil risiko yang berkaitan dengan hubungan mitra lain diusulkan terhadap peristiwa risiko, diantaranya kegagalan memperoleh izin lingkungan hidup dan penlok dan rendahnya peminat angkutan barang dapat dihighlight untuk sementara waktu.
   7) Identifikasi risiko pada sub unsur 21 Dapat ditambahkan data dukung berupa Laporan UMR dan Laporan UPR dan sudah diakomodir.
   8) Sub unsur 5.1 terkait pemantauan berkelanjutan dapat ditambahkan lembar catatan *reviu* oleh UMR kepada UPR terhadap pelaksanaan manajemen risiko.
l. Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Jakarta menyampaikan beberapa hal diantaranya:
   1) Saat ini masih berprogres dalam pemenuhan/melengkapi data dukung
   2) Pada Sub unsur 1.1 terkait Penegakan Integritas dan Nilai Etika BTP Jakarta telah melengkapi data dukung Grade C terkait reward dan punishment dan LHKPN tiap pejabat masih dalam proses koordinasi.
   3) Data dukung Analisis beban kerja dan Analisis Jabatan sudah dilampirkan
   4) Beberapa Sub unsur dapat naik sampai dengan Grade C dengan data dukung menyesuaikan dari Direktorat teknis diantaranya sub unsur 3.3, 3.4, 3.8.
   5) Untuk pengisian KK 2.2 RO BTP Jakarta dan BTP Sby masih kosong, diharapkan dapat melengkapi uraian kegiatan terkait Konektivitas Prasarana. Kegiatan dapat berupa perencanaan/pembangunan prasarana yang menghubungkan simpul tranpsortasi. Harap agar memperhatikan nilai anggaran agar tetap sesuai dengan DIPA/POK.
m. Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Surabaya menyampaikan beberapa hal diantaranya:

1) Saat ini masih berprogres dalam pemenuhan/melengkapi data dukung
2) Pada Sub unsur 1.1 Penegakan Integritas dan Nilai Etika masih berprogres pemenuhan Pakta integritas seluruh pegawai.
3) Beberapa Sub unsur dapat naik sampai dengan Grade C dengan data dukung menyesuaikan dari Direktorat teknis diantaranya sub unsur 3.3, 3.4, 3.8.
4) SOP terkait Pengendalian atas Pengelolaan Sistem Informasi telah dipenuhi sebagian dengan menggunakan SOP balai dan beberapa dari SOP Direktorat Teknis.
5) Sub unsur 3.1 Dokumentasi yang Baik atas SPI serta Transaksi dan Kejadian Penting telah ditambahkan CaLK yang telah ditandatangani oleh pimpinan.
6) Untuk pengisian KK 2.2 RO BTP Jakarta dan BTP Sby masih kosong, diharapkan dapat melengkapi uraian kegiatan terkait Konektivitas Prasarana. Kegiatan dapat berupa perencanaan/pembangunan prasarana yang menghubungkan simpul tranpsortasi. Harap agar memperhatikan nilai anggaran agar tetap sesuai dengan DIPA/POK.

n. BPKARSS menyampaikan beberapa hal diantaranya:
1) Saat ini masih berprogres dalam pemenuhan/melengkapi data dukung .
2) Dokumen Standar Kompetensi Jabatan sudah ada konsep dan menunggu tandatangan dari pimpinan.
3) Pada sub unsur 1.8 Hubungan Kerja yang Baik dengan Instansi Pemerintah Terkai Disarankan untuk menambahkan dokumen Rapat Koordinasi dan Bimtek Teknis danMelampirkan data dukung terkait kerjasama kemitraan
4) Beberapa Sub unsur dapat naik sampai dengan Grade C dengan data dukung menyesuaikan dari Direktorat teknis diantaranya sub unsur 3.3, 3.4, 3.8.

o. Balai Pengujian Perkeretaapian menyampaikan beberapa hal diantaranya:
1) Probis yang telah dirumuskan bersama Itjen dapat dilampirkan sebagai data dukung termasuk tahapan – tahapan pembahasan dan probis lama.
2) Pada Sub unsur 1.3 Itjen menanyakan terkait dengan SK Pembatasan akses terhadap Aplikasi SISAKA terkait dengan laporan hasil pengujian yang telah dilakukan oleh Balai Pengujian Perkeretaapian pada aplikasi SISAKA.
3) 1.8.1 Setiap grade diminta dijelaskan secara bertahap.
4) Terkait dengan Kerjasama dengan instansi lain dapat dilampirkan terkait MoU yang telah dilakukan oleh Balai Pengujian Perkeretaapian mengingat Balai Pengujian sudah BLU.

p. Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Semarang menyampaikan beberapa hal diantaranya:
1) Secara umum sama dengan catatan dijabarkan, masih dalam pemenuhan data dukung sesuai dengan catatan Itjen.
2) RO konektivitas masih dikosongkan karena pada tahun 2024 dikarenakan tidak ada kegiatan. perlu dicek kembali kepada anggaran swakelola

(persiapan dokumen perencanaan, pengujian, pengawasan terhadap prasarana, AMDAL, dll).

3) Pada Sub unsur 1.1 integritas diminta melampirkan notulensi atau surat edaran setelah ada kejadian terkena hukum (berupa himbauan terkait integritas agar tidak terulang kembali). Saat ini melampirkan notulensi rapat yg berhubungan dengan integritas.
4) Pada Sub unsur 1.6.1 diminta melengkapi SOP *outsourching* dari awal sampai tanda tangan kontrak.
5) Pada Sub unsur 1.8.1 diminta untuk pelimpahan aset dapat didasarkan kepada MoU/perjanjian yang jelas.

q. Perwakilan Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian menyampaikan beberapa hal diantaranya:
   1) Masih berprogres dalam pengumpulan data dukung.
   2) Terdapat masukan pendetailan terhadap narasi yang ada pada *spreadsheet* KKE dan telah ditindaklanjuti.
   3) Terdapat beberapa Sub unsur yang diarahkan untuk naik menjadi Grade B dan dalam proses pemenuhan data dukung tersebut.
   4) Kelengkapan data dukung terhadap peraturan tidak hanya berupa *screenshoot* namun dapat dilampirkan mengenai sosialisai yang dilaksanakan secara internal terhadap peraturan tersebut maupun nota dinas/surat penyampaian perihal aturan tersebut.

D. **Kesimpulan dan Tindak Lanjut**

a. Masing – masing unit kerja agar melengkapi data dukung sesuai dengan hasil pembahasan dengan Tim Penjaminan Kualitas termasuk saling melengkapi terhadap masukan/perbaikan data dukung dari setiap kelompok dan perubahan/perbaikan pada lembar KKE agar dapat diberi *shading/*penanda.
b. Pada KK 2.2 RO diharapkan dapat melengkapi uraian kegiatan terkait Konektivitas Prasarana. Kegiatan dapat berupa perencanaan/pembangunan prasarana yang menghubungkan simpul tranpsortasi atau kegiatan dukungan manajemen, kegiatan swakelola.
c. AOI tahun 2024 untuk dapat diinventarisasi oleh masing – masing unit kerja.
d. Masing – masing unit kerja agar memaksimalkan isian Sub unsur sampai dengan level 3 atau Grade C.
e. Perbaikan sesuai dengan masukan/evaluasi oleh Tim Penjaminan Kualitas dapat ditindaklanjuti maksimal pada tanggal 13 Juni 2024 untuk proses lanjut rapat pleno PK SPIP.

D. PENUTUP

Demikian laporan ini buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 12 Juni 2024
NOTULENSI

(Kelompok Evaluasi dan Pelaporan)

Dokumentasi

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
INSPEKTORAT JENDERAL

JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO. 8
JAKARTA 10110

TELP : (021) 3456919
3813154
3507656

FAX : (021) 3813154
TLX : 44310 DEPHUB IA

Nomor : KP.904 / 5 / 10 / ITJEN / 2024
Klasifikasi : –
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Penyampaian Hasil Penjaminan Kualitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (PK SPIP) Terintegrasi di Lingkungan Kementerian Perhubungan TA. 2024

Jakarta, 21 Juni 2024

Yth. Sekretaris Jenderal

Dalam rangka menjamin hasil Penilaian Mandiri tingkat kematangan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Kementerian Perhubungan dan sesuai Surat Kepala Biro Perencanaan UM.006/5/19/STJ/2024 tanggal 17 Mei 2024 Perihal Penyampaian Hasil Penilaian Mandiri (PM) SPIP Terintegrasi di Lingkungan Kementerian Perhubungan Tahun 2024, disampaikan bahwa Inspektorat Jenderal selaku Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) telah melakukan kegiatan Penjaminan Kualitas SPIP Terintegrasi di lingkungan Kementerian Perhubungan Tahun 2024.

1. Beberapa hal yang dapat disampaikan dari rangkaian kegiatan PK SPIP tersebut sebagai berikut:
   a. Dasar pelaksanan Penjaminan Kualitas mengacu pada:
      1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
      2) Peraturan Kepala BPKP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah.
   b. Penjaminan Kualitas telah dilaksanakan pada tanggal 12 s.d 15 Juni 2024 terhadap 178 dari 335 unit kerja atau 53,13% unit kerja yang telah melakukan Penilaian Mandiri SPIP Terintegrasi pada 9 (Sembilan) entitas eselon I, atau sebesar 74,48% dari total nilai anggaran Kementerian Perhubungan.
   c. Nilai Maturitas Penyelenggaraan SPIP Kementerian Perhubungan yang telah dilakukan Penjaminan Kualitas adalah **3,835** atau **Level 3** (terdefinisi). Secara lengkap disampaikan Surat Pernyataan Penjaminan Kualitas, Berita Acara Pleno Penjaminan Kualitas, dan Matrik Rekapitulasi sesuai Format Lampiran I Peraturan Kepala BPKP Nomor 5 Tahun 2021 sebagaimana terlampir.
2. Nilai Maturitas SPIP yang disajikan dalam laporan ini merupakan skor penjaminan kualitas penilaian mandiri maturitas SPIP oleh Inspektorat Jenderal, yang selanjutnya akan dilakukan evaluasi oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) selaku *Quality Assurance* (QA) dan Pembina SPIP Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah.

Sesuai...

Sesuai dengan *timeline* pelaksanaan SPIP diharapkan Sekretariat Jenderal u.p. Biro Perencanaan selaku Koordinator Tim Penilaian Mandiri Tingkat Kementerian dapat menyampaikan Laporan Hasil Penilaian Mandiri SPIP yang telah dilakukan Penjaminan Kualitas kepada Deputi Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Perekonomian dan Kemaritiman BPKP u.p. Direktur Bidang Infrastruktur, Tata Ruang, dan Perhubungan, paling lambat tanggal 30 Juni 2024.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

Inspektur Jenderal,

Arif Toha
NIP. 196703201992031003

Tembusan:
1. Kepala Biro Perencanaan;
2. Sekretaris Inspektorat Jenderal;
3. Inspektur I.

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
INSPEKTORAT JENDERAL

JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO. 8
JAKARTA 10110

TELP : (021) 3456919
3813154
3507656

FAX : (021) 3813154
TLX : 44310 DEPHUB IA

PERNYATAAN TELAH DILAKUKAN PENJAMINAN KUALITAS ATAS HASIL PENILAIAN MANDIRI MATURITAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) PADA KEMENTERIAN PERHUBUNGAN TAHUN 2021

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, kami selaku Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) pada **Kementerian Perhubungan** melakukan penjaminan kualitas atas penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).

Penjaminan kualitas dilakukan dengan tujuan untuk memastikan bahwa proses pelaksanaan penilaian dan hasil penilaian telah sesuai dengan Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 05 Tahun 2021 tentang Pedoman Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP.

Penjaminan kualitas dilakukan secara profesional sehingga terhadap kondisi yang tidak sesuai dengan pedoman dapat langsung diperbaiki secara berkelanjutan sampai dengan penilaian selesai dilakukan.

Berdasarkan penjaminan kualitas yang kami lakukan, baik proses penilaian maupun hasil penilaian **telah sesuai** dengan pedoman yang ditetapkan, dengan catatan koreksi selama proses penjaminan kualitas terlampir.

Jakarta, 21 Juni 2024

Inspektur Jenderal

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
INSPEKTORAT JENDERAL

Arif Toha
NIP. 196703201992031003

PENILAIAN MANDIRI MATURITAS PENYELENGGARAAN SPIP TERINTEGRASI
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
Periode penilaian sampai dengan 30 Juni 2024

PENYIMPULAN NILAI MATURITAS PENYELENGGARAAN SPIP TERINTEGRASI

Komponen, Unsur, dan Subunsur	Skor	Bobot Unsur	Bobot Komponen	Nilai Unsur	Nilai Komponen	Nilai Akhir
PENETAPAN TUJUAN						
Kualitas Sasaran Strategis	5,000	50,00%		2,500		
Kualitas Strategi Pencapaian Sasaran Strategis	5,000	50,00%		2,500		
SUB JUMLAH PENETAPAN TUJUAN		100,00%		**5,000**		
BOBOT PENETAPAN TUJUAN			**40,00%**		**2,000**	
STRUKTUR DAN PROSES						
Lingkungan Pengendalian						
Penegakan Integritas dan Nilai Etika (1.1)	3,063	3,75%		0,115		
Komitmen terhadap Kompetensi (1.2)	3,000	3,75%		0,113		
Kepemimpinan yang Kondusif (1.3)	2,732	3,75%		0,102		
Pembentukan Struktur Organisasi yang Sesuai dengan Kebutuhan (1.4)	3,250	3,75%		0,122		
Pendelegasian Wewenang dan Tanggung Jawab yang Tepat (1.5)	3,000	3,75%		0,113		
Penyusunan dan Penerapan Kebijakan yang Sehat tentang Pembinaan SDM (1.6)	2,583	3,75%		0,097		
Perwujudan Peran APIP yang Efektif (1.7)	3,000	3,75%		0,113		
Hubungan Kerja yang Baik dengan Instansi	3,125	3,75%		0,117		
Penilaian Risiko						
Identifikasi Risiko (2.1)	3,000	10,00%		0,300		
Analisis Risiko (2.2)	2,950	10,00%		0,295		
Kegiatan Pengendalian						
Reviu atas Kinerja Instansi Pemerintah (3.1)	3,750	2,27%		0,085		
Pembinaan Sumber Daya Manusia (3.2)	3,250	2,27%		0,074		
Pengendalian atas Pengelolaan Sistem Informasi (3.3)	3,750	2,27%		0,085		
Pengendalian Fisik atas Aset (3.4)	3,250	2,27%		0,074		
Penetapan dan Reviu atas Indikator dan Ukuran	3,250	2,27%		0,074		
Pemisahan Fungsi (3.6)	3,000	2,27%		0,068		
Otorisasi atas Transaksi dan Kejadian yang Penting	2,750	2,27%		0,063		
Pencatatan yang Akurat dan Tepat Waktu atas Transaksi dan Kejadian (3.8)	3,250	2,27%		0,074		
Pembatasan Akses atas Sumber Daya dan	3,000	2,27%		0,068		
Akuntabilitas terhadap Sumber Daya dan	3,000	2,27%		0,068		
Dokumentasi yang Baik atas SPI serta Transaksi dan Kejadian Penting (3.11)	2,500	2,27%		0,057		
Informasi dan Komunikasi						
Informasi yang Relevan (4.1)	3,000	5,00%		0,150		
Komunikasi yang Efektif (4.2)	3,250	5,00%		0,163		
Pemantauan						
Pemantauan Berkelanjutan (5.1)	2,833	7,50%		0,213		
Evaluasi Terpisah (5.2)	2,875	7,50%		0,216		
SUB JUMLAH STRUKTUR DAN PROSES				3,016		
BOBOT STRUKTUR DAN PROSES			**30,00%**		**0,905**	
PENCAPAIAN TUJUAN						
Efektivitas dan Efisiensi						

Capaian *Outcome*	4,000	20,00%		0,800		
Capaian *Output*	4,000	10,00%		0,400		
Keandalan Laporan Keuangan						
Opini LK	3,000	25,00%		0,750		
Pengamanan atas Aset						
Catatan Pengamanan Aset	3,000	25,00%		0,750		
Ketaatan pada Peraturan						
Temuan Ketaatan - BPK	2,000	20,00%		0,400		
SUB JUMLAH PENCAPAIAN TUJUAN		100,00%		3,100		
BOBOT PENCAPAIAN TUJUAN			**30,00%**		**0,93**	
MATURITAS PENYELENGGARAAN SPIP TERINTEGRASI						**3,835**

MANAJEMEN RISIKO INDEKS (MRI)	**3,847**

AREA/KOMPONEN	BOBOT	SKOR	NILAI			
PERENCANAAN	**40,00%**		**2,000**			
KUALITAS PERENCANAAN	40,00%	5,000	2,000			
KAPABILITAS	**30,00%**		**0,881**			
KEPEMIMPINAN	5,00%	2,875	0,144			
KEBIJAKAN MANAJEMEN RISIKO	5,00%	3,250	0,163			
SUMBER DAYA MANUSIA	5,00%	2,500	0,125			
KEMITRAAN	2,50%	3,250	0,081			
PROSES MANAJEMEN RISIKO	12,50%	2,950	0,369			
HASIL	**30,00%**		**0,966**			
AKTIVITAS PENANGANAN RISIKO	18,75%	2,750	0,516			
OUTCOMES	11,25%	4,000	0,450			
TOTAL	**100,00%**		**3,847**			

INDEKS EFEKTIVITAS PENGENDALIAN KORUPSI (IEPK)	**3,000**

PILAR	BOBOT	SKOR	NILAI			
KAPABILITAS PENGELOLAAN RISIKO KORUPSI	**48%**		**1,440**			
KEBIJAKAN ANTIKORUPSI	9,60%	3,000	0,288			
SEPERANGKAT SISTEM ANTIKORUPSI	7,20%	3,000	0,216			
DUKUNGAN SUMBER DAYA	7,20%	3,000	0,216			
POWER (KUASA & WEWEWANG)	14,40%	3,000	0,432			
PEMBELAJARAN ANTIKORUPSI	9,60%	3,000	0,288			
PENERAPAN STRATEGI PENCEGAHAN	**36%**		**1,080**			
ASESMEN DAN MITIGASI RISIKO KORUPSI	9,00%	3,000	0,270			
SALURAN PELAPORAN INTERNAL YANG	3,60%	3,000	0,108			
KEPEMIMPINAN ETIS	9,00%	3,000	0,270			
INTEGRITAS ORGANISASIONAL	7,20%	3,000	0,216			
IKLIM ETIS PRINSIP	7,20%	3,000	0,216			
PENANGANAN KEJADIAN KORUPSI	**16%**		**0,480**			
INVESTIGASI	8,00%	3,000	0,240			
TINDAKAN KOREKTIF	8,00%	3,000	0,240			
TOTAL	**100%**		**3,000**			

KAPABILITAS APIP	**3,000**

BERITA ACARA PLENO PENJAMINAN KUALITAS (PK) SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH TERINTEGRASI KEMENTERIAN PERHUBUNGAN TAHUN 2024

Pada hari ini Jumat, tanggal 14 Juni 2024 bahwa Tim Penjaminan Kualitas (PK) Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada tingkat Kementerian Perhubungan sesuai surat Inspektur I Nomor: PS.303/2/18/Itjen/2024 tanggal 10 Juni 2024 perihal Undangan Pelaksanaan Pleno Penjaminan Kualitas (PK) Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi di Lingkungan Kementerian Perhubungan telah mengadakan rapat Pleno Penjaminan Kualitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi Kementerian Perhubungan Tahun 2024 dengan hasil sebagai berikut :

A. Rapat dihadiri oleh seluruh Tim Penjaminan Kualitas (PK) Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada Lingkungan Kementerian Perhubungan dalam hal ini perwakilan dari masing-masing Unit Eselon I;

B. Sesuai Surat Kepala Biro Perencanaan Nomor : UM.006/5/19/STJ/2024 tanggal 17 Mei 2024 tentang Penyampaian Hasil Penilaian Mandiri (PM) SPIP Terintegrasi Terdapat 335 (Tiga Ratus Tiga Puluh Lima) Satker Unit Kerja;

C. Tim Penjaminan Kualitas telah melakukan kegiatan Penjaminan Kualitas (PK) pada 178 (Seratus Tujuh Puluh Delapan) Unit Kerja yang telah melakukan penilaian mandiri atau 74,48 Persen dari total nilai anggaran Kementerian Perhubungan;

D. Bahwa telah disepakati hasil Penjaminan Kualitas (PK) pada tingkat Kementerian Perhubungan sebagai berikut:

1. Nilai SPIP : 3,835
2. Nilai MRI : 3,847
3. Nilai IEPK : 3,000
4. Kapabilitas APIP : 3,000

D. Dari rincian Penjaminan Kualitas (PK) tersebut diatas, bahwa masing-masing Tim secara berjenjang bertanggung jawab penuh terhadap hasil Penilaian Kualitas yang disampaikan kepada Inspektorat I selaku Koordinator dalam Pelaksanaan Penilaian Kualitas Tingkat Kementerian Perhubungan.

Demikian berita acara hasil Pleno Penjaminan Kualitas ini dibuat sebagaimana mestinya serta dapat ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku.

NO	PERWAKILAN TIM	NAMA	TANDA TANGAN
1	KOORDINATOR PELAKSANA	Yudhawan, S.E., M.Si., QIA., CRMO.	
2	KETUA POKJA SPIP	Roy Bernardo Simanjuntak, S.Si.T., M.Sc. CRMO.	
3	KETUA TIM PENJAMINAN KUALITAS SETJEN	M. Imanullah Dacholfany, S.T., C.Fr.A.	
4	KETUA TIM PENJAMINAN KUALITAS ITJEN,BPTJ,BKT	Muhammad Nur Huda, S.Si.T., M.M.Tr., C.Fr.A.	
5.	KETUA TIM PENJAMINAN KUALITAS DITJEN PHB DARAT	Ary Hidayatullah, S.Kom.	
6.	KETUA TIM PENJAMINAN KUALITAS DITJEN PHB LAUT	Pebri Setiawan, S.ST., M.MTr., CGAA.	
7.	KETUA TIM PENJAMINAN KUALITAS DITJEN PHB UDARA	Prima Adriyani, S.T., CRMO.	
8.	KETUA TIM PENJAMINAN KUALITAS DITJEN PERKERETAAPIAN	Anggun Trisiswani, S.E., M.E., CRMO.	
9.	KETUA TIM PENJAMINAN KUALITAS BPSDM	Sandy Dimas Permadi, S.T., M.M.Tr., C.Fr.A.	

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

GEDUNG KARYA
JL. MERDEKA BARAT NO.8
JAKARTA 10110

TELP : 0813 6001 3838

WEBSITE : http://djka.dephub.go.id
EMAIL : ditjenka@kemenhub.go.id

Nomor : PR.205/1/20/KI/DJKA/2024

Jakarta, 5 April 2024

Klasifikasi : Biasa

Lampiran : Satu berkas

Hal : Laporan Pemilik Risiko Unit Kerja Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian Periode Triwulan I Tahun 2024

Yth.
1. Direktur Jenderal Perkeretaapian;
2. Kepala Biro Perencanaan selaku Unit Manajemen Risiko Kementerian Perhubungan.

Menindaklanjuti Keputusan Menteri Perhubungan KM Nomor 69 Tahun 2023 Tentang Manajemen Risiko di Lingkungan Kementerian Perhubungan, bersama ini disampaikan Laporan Penyelenggaraan Manajemen Risiko di lingkungan Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian untuk Triwulan I Tahun 2024 sebagaimana terlampir.

Atas perhatian dan perkenan petunjuk lanjut diucapkan terima kasih.

Sekretaris Direktorat Jenderal Perkeretaapian,

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

Juju Endah Wahjuningrum
NIP 196507031991032001

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

GEDUNG KARYA
JL. MERDEKA BARAT NO.8
JAKARTA 10110

TELP : 0813 6001 3838

WEBSITE : http://djka.dephub.go.id
EMAIL : ditjenka@kemenhub.go.id

Nomor : UM. 006/1/1/K1.2/DJKA/2024
Klasifikasi : Biasa
Lampiran : Satu berkas
Hal : Laporan Unit Pengelola Risiko di Lingkungan Sekertariat Direktorat JenderalPerkeretaapian Periode Triwulan I Tahun 2024

Jakarta, 4 April 2024

Yth.
1. Sekretaris Direktorat Jenderal Perkeretaapian;
2. Kepala Bagian Perencanaan selaku Unit Manajemen Risiko Direktorat Jenderal Perkeretaapian.

Menindaklanjuti Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 69 Tahun 2023 tentang Manajemen Risiko di Lingkungan Kementerian Perhubungan, bersama ini disampaikan Laporan Penyelenggaraan Manajemen Risiko di lingkungan Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian Triwulan I Tahun 2024 dengan uraian sebagai berikut:

1. Dasar Penugasan

Keputusan Sekretaris Direktorat Jenderal Perkeretaapian Nomor : KP-K1 DJKA 26 Tahun 2023 tentang Pembentukan Unit Pengelola Risiko di Tingkat Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2024 tanggal 16 November 2023.

2. Tujuan Penugasan

Kegiatan penyusunan Laporan Penyelenggaraan Manajemen Risiko bertujuan sebagai implementasi fungsi komunikasi dan pemantauan oleh Pemilik Risiko dan melaporkan hal-hal yang membutuhkan solusi/rekomendasi kepada Unit Manajemen Risiko untuk membantu Pemilik Risiko dalam mencapai tujuan.

3. Ruang Lingkup Penugasan

Kegiatan pemantauan Manajemen Risiko di lingkungan Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian dilakukan terhadap kejadian risiko dan kegiatan pengendalian yang dilaksanakan sampai dengan Triwulan I Tahun 2024.

4. Hasil Pemantauan Manajemen Risiko sampai dengan Triwulan I Tahun 2024 sebagai berikut:

a. Identifikasi Risiko
Jumlah risiko yang telah teridentifikasi sebanyak 94 risiko (populasi risiko). Daftar risiko yang telah teridentifikasi dapat dilihat pada Lampiran 1 (Format - 5).

b. Jumlah usulan risiko baru sebanyak 0 risiko yang diusulkan kepada UMR. Daftar usulan risiko sebagai berikut:

No.	Nama Usulan Risiko	Usulan Kode Risiko
	- *NIHIL* -	

c. Analisis Risiko
   1) Jumlah risiko yang belum ada pengendalian eksisting sebanyak 1 risiko atau 1% dari jumlah/populasi risiko. Jumlah risiko yang sudah ada pengendalian eksisting namun belum memadai (masih berada di atas selera risiko) sebanyak 42 risiko atau 44,68% dari jumlah/populasi risiko.
   2) Daftar analisis risiko dapat dilihat pada Lampiran 1 (Format - 5).

d. Evaluasi Risiko
   Jumlah risiko yang berada di atas selera risiko sebanyak 43 risiko (45,74% dari 94 risiko). Daftar risiko prioritas unit kerja dapat dilihat pada Lampiran 1 (Format - 5).

e. Penanganan Risiko
   1) Jumlah rencana penanganan risiko yang direncanakan sampai dengan Triwulan I Tahun 2024 sebanyak 31 kegiatan. Daftar rencana tindak penanganan risiko dapat dilihat pada Lampiran 2 (Format - 8).
   2) Jumlah penanganan risiko yang telah terealisasi sampai dengan Triwulan I Tahun 2024 sebanyak 31 atau 100% dari 31 kegiatan.
   3) Penanganan risiko yang telah dilaksanakan sebelum rencana sebanyak 0 kegiatan yang seharusnya dilaksanakan pada Triwulan berikutnya.
   4) Daftar penanganan yang belum terealisasi sebanyak 0 atau 0% dari 31 kegiatan. Daftar pemantauan penanganan risiko dapat dilihat pada Lampiran 3 (Format - 9).

f. Pemantauan Keterjadian Risiko
   Jumlah kejadian risiko yang muncul sampai dengan Triwulan I sebanyak 2 kejadian. Daftar pemantauan keterjadian risiko dapat dilihat pada Lampiran 4 (Format - 10).

Atas perhatian dan perkenan petunjuk lanjut Ibu Sesditjen diucapkan terima kasih.

Kepala Bagian Keuangan selaku
Koordinator Pengelola Risiko Tingkat
Sekretariat Direktorat Jenderal
Perkeretaapian,

Irvan Ariestiana
NIP 197906232005021002

FORMULIR PROFIL RISIKO (IDENTIFIKASI, ANALISIS DAN EVALUASI RISIKO)

Nama Unit Pengelola Risiko : **Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian**
Priode Penerapan MR : **Triwulan I Tahun 2024**
Sasaran (dalam PK) : **SK 1 - Termanfaatkannya Kebijakan Pembinaan dan peningkatan Perkeretaapian**
SK 2 - Terlaksananya Perumusan Regulasi dan Kebijakan dalam Penyelenggaraan Perkeretaapian
SK 3 - Tersedianya SDM Perkeretaapian yang kompeten dan profesional
SK 4 - Sistem Informasi dan Teknologi yang Andal
SK 5 - Dukungan Publik terhadap Penyelenggaraan Perkeretaapian
SK 6 - Terwujudnya Good Governance dan Clean Government di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian

Bisnis Proses		Pernyataan Risiko					Sistem Pengendalian yang ada		Level			eputusan Mitig	Prioritas
No	Uraian	Kode Risiko	Peristiwa	Penyebab	Dampak	Kategori	Uraian	E/KE/TE	Kemungkinan	Dampak	Risiko	Y/T	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Layanan Dukungan Manajemen Internal (Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal) - AKIP	E.5.1.MD.17	Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tematik DJKA tidak terlaksana dengan maksimal.	1. Penyusunan rencana aksi yang tidak sesuai dengan target capaian RB Tematik DJKA; 2. Adanya kondisi yang tidak mendukung dalam pencapaian target (anggaran tidak mencukupi, adanya wabah penyakit seperti Covid-19, dsb.).	Tidak terpenuhinya target indeks RB dan SAKIP.	Risiko Operasional	Belum Ada Pengendalian Eksisting	TE	Cukup sering: 6 s.d. 9 kali	92% > Capaian IKU > 87%	Sedang [14]	Ya	1
2	Layanan Dukungan Manajemen Internal (Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal) - AKIP	E.4.1.MD.1	Usulan Unit Kerja Menuju WBK-WBBM tidak disetujui oleh Kementerian PANRB.	Tidak terpenuhinya persyaratan dan data dukung dalam Pembangunan WBK-WBBM (LKE Pembangunan	Tidak terpenuhinya target indeks RB dan SAKIP.	Risiko Kepatuhan	Rutin melaksanakan konsultasi dan koordinasi dalam pembangunan ZI terhadap unit kerja yang di nominasikan kepada	KE	Cukup sering: 6 s.d. 9 kali	92% > Capaian IKU > 87%	Sedang [14]	Ya	2
3	Layanan Manajemen Kinerja Internal (Layanan Perencanaan dan Penganggaran) - AKIP	E.4.2.MN.1	Ketidaksesuaian Kriteria Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA).	Kurangnya pemahaman SDM dalam penyusunan RKA yang sesuai ketentuan.	Nilai SAKIP (komponen perencanaan kinerja) tidak dapat terpenuhi (dokumen perencanaan penganggaran/RKA tidak sesuai ketentuan dan tidak mendukung kinerja organisasi).	Risiko Kepatuhan	Sosialisi dan Bimtek penyusunan RKA	KE	Cukup sering: 6 s.d. 9 kali	87% > Capaian IKU > 80%	Tinggi [17]	Ya	3
4	Layanan Manajemen Kinerja Internal (Layanan Perencanaan dan Penganggaran) - AKIP	E.5.2.MR.1	Progress Kelengkapan Data Dukung Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) yang rendah pada Aplikasi e-Planning.	Dokumen Data Dukung Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) belum selesai disusun serta belum ditandatangani pejabat terkait.	Nilai AKIP (komponen perencanaan kinerja) tidak dapat terpenuhi (usulan pelaksanaan kegiatan tertunda karena dokumen perencanaan anggaran/RKA tidak dapat dimanfaatkan secara tepat waktu).	Risiko Operasional	1. Koordinasi dengan PIC masing-masing Balai/Satker melalui komunikasi via whatsapp atau telepon; 2. Pemantauan progress penyusunan data dukung RKA secara intensif dan berkala dengan agenda rapat;	KE	Sering: 10 kali s.d. 12	92% > Capaian IKU > 87%	Tinggi [16]	Ya	4

Bisnis Proses		Pernyataan Risiko					Sistem Pengendalian yang ada		Level			Keputusan Mitigasi	Prioritas
No	Uraian	Kode Risiko	Peristiwa	Penyebab	Dampak	Kategori	Uraian	E/KE/TE	Kemungkinan	Dampak	Risiko	Y/T	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5	Layanan Manajemen Kinerja Internal (Layanan Perencanaan dan Penganggaran) - AKIP	E.5.3.MD.3	Penyusunan Rencana Strategis Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2025-2029 tidak valid.	1. Tidak memperhitungkan dinamika perubahan kebijakan dan lingkngan strategis yang dapat memengaruhi implementasi Renstra sehingga dapat merugikan validitasnya; 2. Minimnya keterlibatan masing-masing Bagian di lingkungan Setditjen Perkeretaapian; 3. Data atau informasi yang diperoleh tidak akurat; 4. Penetapan target dan indikator kinerja yang tidak memenuhi kriteria SMART, menantang, realistis dan achieveable.	Nilai AKIP (komponen perencanaan kinerja) tidak terpenuhi.	Risiko Operasional	Koordinasi dengan PIC terkait, Pembahasan Kerangka Isu Strategis, Kerangka Pendanaan, Kerangka Regulasi dan Kerangka Kelambagaan Rencana Strategis Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian	KE	Sering: 10 kali s.d. 12	92% > Capaian IKU > 87%	Tinggi [16]	Ya	5
6	Layanan Manajemen Kinerja Internal (Layanan Perencanaan dan Penganggaran) - AKIP	E.5.4.MN.2	Dokumen Renstra tidak disusun sesuai dengan ketentuan dan substansi yang dibutuhkan.	Tim penyusun tidak memiliki kompetensi dasar tentang perencanaan strategis dan perkeretaapian.	Nilai SAKIP tidak memenuhi target (aspek kualitas perencanaan kinerja) karena kualitas perencanaan kinerja tahunan tidak valid.	Risiko Operasional	Bimbingan teknis dengan narasumber dari akademisi dan instansi pembina (Bappenas) serta dari Direktorat teknis terkait perkeretaapian	KE	Jarang: 2 kali s.d. 5 kali	87% > Capaian IKU > 80%	Sedang [13]	Ya	6
7	Layanan Manajemen Kinerja Internal (Layanan Perencanaan dan Penganggaran) - AKIP	E.5.5.MD.5	Renstra Ditjen Perkeretaapian dan Setditjen Perkeretaapian tidak sesuai ketentuan dan terlambat penyelesaiannya.	1. Tidak sesuainya dokumen data dukung penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Ditjen Perkeretaapian dan Setditjen Perkeretaapian dengan kebutuhan organisasi; 2. Keterlambatan penyediaan data dukung penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Ditjen Perkeretaapian dan Setditjen Perkeretaapian.	Nilai SAKIP (komponen perencanaan kinerja) tidak dapat terpenuhi.	Risiko Operasional	Rapat koordinasi/konsolidasi data dalam penyusunan Renstra	E	Jarang: 2 kali s.d. 5 kali	92% > Capaian IKU > 87%	Rendah [11]	Tidak	7
8	Layanan Manajemen Kinerja Internal (Layanan Perencanaan dan Penganggaran) - AKIP	E.4.3.MN.2	Ketidaksesuaian dalam Penyusunan Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) bidang Perkeretaapian.	Kurangnya Pemahaman SDM dalam Penyusunan Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) bidang Perkeretaapian disusun berdasarkan target dalam RPJM/Renstra/RIPNAS/direktif.	Nilai SAKIP (komponen perencanaan kinerja) tidak dapat terpenuhi.	Risiko Kepatuhan	Nilai SAKIP (komponen perencanaan kinerja) tidak dapat terpenuhi.	E	Cukup sering: 6 s.d. 9 kali	97% > Capaian IKU > 92%	Rendah [10]	Tidak	8

Bisnis Proses		Pernyataan Risiko					Sistem Pengendalian yang ada		Level			Keputusan Mitigasi	Prioritas
No	Uraian	Kode Risiko	Peristiwa	Penyebab	Dampak	Kategori	Uraian	E/KE/TE	Kemungkinan	Dampak	Risiko	Y/T	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
9	Layanan Manajemen Kinerja Internal (Layanan Perencanaan dan Penganggaran) - AKIP	E.5.6.MD.6	Kurang Efektifnya Penyelenggaraan Sosialisasi dan Bimtek Rencana Kerja Anggaran (RKA).	Penyelenggaraan Sosialisasi dan Bimtek Rencana Kerja Anggaran (RKA) dihadiri oleh sebagian peserta dari Direktorat atau Satker/Balai terkait.	Nilai SAKIP (komponen perencanaan kinerja) tidak dapat terpenuhi (dokumen perencanaan penganggaran/RKA tidak sesuai ketentuan dan tidak mendukung kinerja organisasi).	Risiko Operasional	1. Penyampaian informasi terkait Sosialisasi dan Bimtek RKA jauh sebelum waktu pelaksanaan; 2. Target peserta yang mengikuti Sosialisasi dan Bimtek RKA terdiri dari seleuruh satker/balai dan direktorat; 3. Penyampaian materi dan panduan terkait Bimtek RKA kepada seluruh peserta.	E	Cukup sering: 6 s.d. 9 kali	97% > Capaian IKU > 92%	Rendah [10]	Tidak	9
10	Layanan Manajemen Kinerja Internal (Layanan Perencanaan dan Penganggaran) - AKIP	E.4.4.MR.1	Keterlambatan Penginputan Data Dukung Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA).	Data Dukung Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) belum lengkap dibuat atau belum ditandatangan Pejabat terkait.	Nilai SAKIP (komponen perencanaan kinerja) tidak dapat terpenuhi (usulan pelaksanaan kegiatan tertunda karena dokumen perencanaan anggaran/RKA tidak dapat dimanfaatkan secara tepat waktu).	Risiko Kepatuhan	Menyelenggarakan rapat progress penginputan data dukung Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) secara berkala dan berkoordinasi intensif dengan Balai/Satker terkait	E	Cukup sering: 6 s.d. 9 kali	97% > Capaian IKU > 92%	Rendah [10]	Tidak	10
11	Layanan Manajemen Kinerja Internal (Layanan Perencanaan dan Penganggaran) - AKIP	E.4.5.MR.2	Keterlambatan dalam Penyusunan Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) bidang Perkeretaapian.	Dokumen Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) bidang Perkeretaapian belum selesai dibuat atau belum ditandatangan pejabat terkait.	Nilai SAKIP tidak memenuhi target (aspek kualitas perencanaan kinerja) karena kualitas perencanaan kinerja tahunan tidak valid.	Risiko Kepatuhan	1. Penyelenggaraan rapat sosialisasi penyusunan Renja dan RKT; 2. Pemantauan berkala dan koordinasi intensif dengan Direktorat atau Balai/Satker terkait.	E	Jarang: 2 kali s.d. 5 kali	97% > Capaian IKU > 92%	Rendah [7]	Tidak	11

Bisnis Proses		Pernyataan Risiko					Sistem Pengendalian yang ada		Level			Keputusan Mitigasi	Prioritas
No	Uraian	Kode Risiko	Peristiwa	Penyebab	Dampak	Kategori	Uraian	E/KE/TE	Kemungkinan	Dampak	Risiko	Y/T	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
12	Layanan Manajemen Kinerja Internal (Layanan Pemantauan dan Evaluasi) - AKIP	E.5.7.MD.8	Perencanaan, pengukuran dan pelaporan kinerja tidak tepat waktu.	1. Data kinerja yang disampaikan tidak valid/tidak tersedia; 2. Kompilasi dan analisis data termasuk penyusunan laporan (narasi) terlambat disampaikan unit kerja; 3. SDM penyusun laporan tidak memahami terkait substansi perencanaan dan pelaporan kinerja.	Nilai SAKIP Ditjen Perkeretaapian dan Setditjen Perkeretaapian tidak memenuhi target.	Risiko Operasional	1. Pembentukan SK Tim SAKIP; 2. Bimbingan teknis terkait SAKIP secara berkala; 3. Rapat pembahasan penyusunan perencanaan dan pelaporan kinerja dengan seluruh unit kerja (Direktorat, Balai, Bagian); 4. Penyampaian surat tindak lanjut hasil rapat perencanaan dan pelaporan kinerja; 5. Monitoring dan evaluasi pemenuhan dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja secara berkala.	KE	Cukup sering: 6 s.d. 9 kali	92% > Capaian IKU > 87%	Sedang [14]	Ya	12
13	Layanan Manajemen Kinerja Internal (Layanan Pemantauan dan Evaluasi) - AKIP	E.4.6.MN.3	Capaian kinerja tidak memenuhi target tahunan pada Perjanjian Kinerja.	Pemantauan kinerja tidak dilaksanakan rutin/berkala (bulanan/triwulan) oleh unit kerja.	Nilai SAKIP Ditjen Perkeretaapian dan Setditjen Perkeretaapian tidak memenuhi target.	Risiko Kepatuhan	1. Rapat pembahasan berkala; 2. Monitoring pemantauan kinerja setiap bulan/triwulan termasuk surat	E	Jarang: 2 kali s.d. 5 kali	92% > Capaian IKU > 87%	Rendah [11]	Tidak	13
14	Layanan Manajemen Kinerja Internal (Layanan Pemantauan dan Evaluasi) - AKIP	E.5.8.MD.14	Perencanaan kinerja belum sesuai dengan ketentuan.	1. Target kinerja yang ditetapkan tidak memenuhi kriteria achievable, menantang dan realistis serta tidak sinkron antar unit kerja; 2. Keterbatasan SDM yang memahami SAKIP; 3. Pimpinan belum terlibat sepenuhnya dalam perencanaan kinerja.	Nilai SAKIP Ditjen Perkeretaapian dan Setditjen Perkeretaapian tidak memenuhi target.	Risiko Operasional	1. Pembentukan SK Tim SAKIP; 2. Bimbingan teknis terkait SAKIP secara berkala; 3. Rapat pembahasan perencanaan kinerja; 4. Penandatanganan Perjanjian Kinerja oleh pimpinan secara langsung.	E	Jarang: 2 kali s.d. 5 kali	92% > Capaian IKU > 87%	Rendah [11]	Tidak	14

Bisnis Proses		Pernyataan Risiko					Sistem Pengendalian yang ada		Level			Keputusan Mitigasi	Prioritas
No	Uraian	Kode Risiko	Peristiwa	Penyebab	Dampak	Kategori	Uraian	E/KE/TE	Kemungkinan	Dampak	Risiko	Y/T	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
15	Layanan Manajemen Kinerja Internal (Layanan Pemantauan dan Evaluasi) - AKIP	E.5.9.MR.4	Evaluasi akuntabilitas internal belum sesuai dengan ketentuan.	1. Data dukung tidak valid dan tidak lengkap/rinci; 2. Keterbatasan SDM yang memahami SAKIP; 3. Keterlibatan pimpinan dalam pelaksanaan	Nilai SAKIP Ditjen Perkeretaapian dan Setditjen Perkeretaapian tidak memenuhi target.	Risiko Operasional	1. Pembentukan SK Tim Evaluasi SAKIP; 2. Bimbingan teknis terkait SAKIP secara berkala; 3. Rapat pembahasan	E	Jarang: 2 kali s.d. 5 kali	92% > Capaian IKU > 87%	Rendah [11]	Tidak	15
16	Layanan Manajemen Kinerja Internal (Layanan Pemantauan dan Evaluasi) - AKIP	E.5.10.MD.1	Pengukuran kinerja belum sesuai dengan ketentuan.	1. Substansi/analisa dalam pelaporan tidak valid dan tidak lengkap/rinci; 2. Keterbatasan SDM yang memahami SAKIP; 3. Hasil Pengukuran belum dapat dimanfaatkan dalam penyesuaian Strategi, Kebijakan, Aktivitas dan Anggaran dalam mencapai kinerja.	Nilai SAKIP Ditjen Perkeretaapian dan Setditjen Perkeretaapian tidak memenuhi target.	Risiko Operasional	1. Pembentukan SK Tim SAKIP; 2. Bimbingan teknis terkait SAKIP secara berkala; 3. Rapat pembahasan pelaporan kinerja; 4. Monitoring dan evaluasi berkala.	E	Jarang: 2 kali s.d. 5 kali	92% > Capaian IKU > 87%	Rendah [11]	Tidak	16
17	Layanan Manajemen Kinerja Internal (Layanan Pemantauan dan Evaluasi) - AKIP	E.5.11.MR.7	Pelaporan kinerja belum sesuai dengan ketentuan.	1. Pengumpulan data kinerja tidak lengkap dan tidak valid; 2. Substansi/analisa dalam pelaporan tidak valid dan tidak lengkap/rinci; 3. Publikasi dokumen pelaporan tidak tepat waktu;	Nilai SAKIP Ditjen Perkeretaapian dan Setditjen Perkeretaapian tidak memenuhi target.	Risiko Operasional	1. Pembentukan SK Tim SAKIP; 2. Bimbingan teknis terkait SAKIP secara berkala; 3. Rapat pembahasan pelaporan kinerja; 4. Penetapan template pelaporan menggunakan	E	Cukup sering: 6 s.d. 9 kali	97% > Capaian IKU > 92%	Rendah [10]	Tidak	17
18	Layanan Manajemen Kinerja Internal (Layanan Pemantauan dan Evaluasi) - AKIP	E.5.12.MN.1	Penilaian SAKIP berbeda antara tim evaluator.	Penilaian bersifat subjektif tim evaluator	Nilai SAKIP Ditjen Perkeretaapian dan Setditjen Perkeretaapian tidak memenuhi target.	Risiko Operasional	Koordinasi dengan balai terkait jangka waktu pengusulan dokumen administratif badan layanan umum	E	Jarang: 2 kali s.d. 5 kali	97% > Capaian IKU > 92%	Rendah [7]	Tidak	18
19	Layanan Manajemen Kinerja Internal (Layanan Pemantauan dan Evaluasi) - AKIP	E.5.13.MD.1	Penyusunan evaluasi Renstra tidak menampilkan data/informasi yang seragam antar unit kerja	Penyelesaian pengukuran capaian kinerja yang berbeda-beda	Dokumen evaluasi Renstra tidak dapat dimanfaatkan untuk perencanaan kinerja	Risiko Operasional	Rapat pembahasan diantaranya menyepakati batas cut off hasil pengukuran capaian kinerja	E	Cukup sering: 6 s.d. 9 kali	97% > Capaian IKU > 92%	Rendah [10]	Tidak	19
20	Layanan Manajemen Kinerja Internal (Layanan Perencanaan dan Penganggaran) - AKIP	E.4.7.MR.3	Keterlambatan Penyampaian Data Dukung Laporan Triwulan Monitoring	Perbedaan Persepsi dan Kesalahan Pengisian Form Laporan Triwulan Monitoring Pinjaman	Penyampaian Laporan Triwulan Monitoring Pinjaman Hibah Luar Negeri tidak tepat	Risiko Kepatuhan	Koordinasi dengan PIC terkait	E	Jarang: 2 kali s.d. 5 kali	97% > Capaian IKU > 92%	Rendah [7]	Tidak	20
21	Layanan Manajemen Kinerja Internal (Layanan Pemantauan dan Evaluasi) - AKIP	E.5.14.MD.1	Monitoring perencanaan dan pengendalian bidang perkeretaapian terlambat/tidak dilaksanakan/tidak optimal	1. Komposisi tim monev tidak lengkap; 2. Jadwal pelaksanaan monev bersamaan dengan kegiatan lain; 3. Laporan hasil monitoring tidak dimanfaatkan oleh pimpinan.	Tidak terlaksananya kegiatan monitoring perencanaan dan pengendalian bidang perkeretaapian	Risiko Operasional	1. Mengatur jadwal bersama tim untuk monitoring perencanaan dan pengendalian; 2. Penyusunan laporan hasil monitoring.	KE	Cukup sering: 6 s.d. 9 kali	87% > Capaian IKU > 80%	Tinggi [17]	Ya	21

Bisnis Proses		Pernyataan Risiko					Sistem Pengendalian yang ada		Level			putusan Mitig	Prioritas
No	Uraian	Kode Risiko	Peristiwa	Penyebab	Dampak	Kategori	Uraian	E/KE/TE	Kemungkinan	Dampak	Risiko	Y/T	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
22	Layanan Manajemen Kinerja Internal (Layanan Pemantauan dan Evaluasi) - AKIP	E.5.15.MD.1	Inkonsistensi Data antar Laporan Kinerja dan Publikasi lainnya	Pelaporan memerlukan waktu untuk pengumpulan dan pengolahan data dimana terdapat batas waktu dalam pelaporan kinerja	Tidak optimalnya dukungan data dan informasi publik terkait penyelenggaraan perkeretaapian	Risiko Operasional	1. Melakukan rapat koordinasi pelaporan kinerja guna sinkronisasi data antar unit kerja; 2. Validasi data oleh pejabat penanggung jawab data unit kerja.	KE	Sering: 10 kali s.d. 12	92% > Capaian IKU > 87%	Tinggi [16]	Ya	22
23	Layanan Manajemen Kinerja Internal (Layanan Pemantauan dan Evaluasi) - AKIP	E.5.16.MR.9	Data untuk bahan rapat pimpinan tidak valid	1. Data/materi yang disampaikan unit kerja tidak update; 2. Keterbatasan waktu penyusunan karena undangan atau pemberitahuan rapat mendadak; 3. Terkendala koordinasi lintas unit kerja sehingga sulit mendapatkan data/materi.	Pengambilan keputusan/kebijakan tidak akuntabel	Risiko Operasional	Koordinasi dari Bagian Perencanaan (sebagai simpul data) dengan PIC penyusun bahan masing-masing Bagian dan Direktorat	KE	Cukup sering: 6 s.d. 9 kali	92% > Capaian IKU > 87%	Sedang [14]	Ya	23
24	Layanan Manajemen Kinerja Internal (Layanan Perencanaan dan Penganggaran) - AKIP	E.5.17.MD.1	Pengusulan rencana pendanaan kerjasama luar negeri kurang komprehensif	Data dukung (DIPK, DUK, dokumen kajian serta dokumen lainnya yang dipersyaratkan) pengusulan kegiatan tidak lengkap	Kegiatan PHLN tidak terlaksana sesuai target	Risiko Operasional	Penyampaian informasi dan konfirmasi lebih awal kepada unit kerja yang mengusulkan kegiatan PHLN perihal persyaratan data dukung yang dibutuhkan	KE	Jarang: 2 kali s.d. 5 kali	87% > Capaian IKU > 80%	Sedang [13]	Ya	24
25	Layanan Manajemen Kinerja Internal (Layanan Pemantauan dan Evaluasi) - AKIP	E.5.18.MD.1	Monitoring kegiatan PHLN tidak terlaksana dengan baik	Terdapat isu/kendala yang tidak terbahas saat perencanaan dan monitoring kegiatan PHLN	Kegiatan PHLN tidak terlaksana sesuai target	Risiko Operasional	Menyusun daftar pembahasan isu/kendala sebelum pelaksanaan monitoring	KE	Jarang: 2 kali s.d. 5 kali	87% > Capaian IKU > 80%	Sedang [13]	Ya	25
26	Layanan Manajemen Kinerja Internal (Layanan Pemantauan dan Evaluasi) - SPIP	E.5.19.MN.3	Penilaian, pemantauan dan pelaporan Manajemen Risiko tidak dilaksanakan sesuai ketentuan	1. Kurangnya SDM (Pengelola Risiko) yang memiliki pemahaman/kompetensi terkait MR; 2. Kurangnya kesadaran SDM terkait pentingnya manajemen risiko.	Tingkat maturitas SPIP terintegrasi tidak memenuhi target	Risiko Operasional	1. Pendidikan/Pelatihan/Bimtek/Seminar terkait Manajemen Risiko; 2. Sosialisasi terkait Manajemen Risiko pada masing-masing pegawai; 3. Koordinasi dengan PIC masing-masing Bagian/Balai/Direktorat.	KE	Sering: 10 kali s.d. 12	92% > Capaian IKU > 87%	Tinggi [16]	Ya	26
27	Layanan Manajemen Kinerja Internal (Layanan Pemantauan dan Evaluasi) - SPIP	E.5.20.MR.5	Pengisian Kertas Kerja Penilaian Mandiri Maturitas SPIP tidak lengkap	Data dukung penilaian mandiri maturitas SPIP tidak terdokumentasi dengan baik	Tingkat Maturitas SPIP Terintegrasi tidak memenuhi target	Risiko Operasional	1. Membuat google drive sebagai tempat penyimpanan data dukung; 2. Peningkatan monitoring secara berkala dengan lembaran monitoring pengumpulan data dukung.	KE	Cukup sering: 6 s.d. 9 kali	92% > Capaian IKU > 87%	Sedang [14]	Ya	27

Bisnis Proses		Pernyataan Risiko					Sistem Pengendalian yang ada		Level			putusan Mitig	Prioritas
No	Uraian	Kode Risiko	Peristiwa	Penyebab	Dampak	Kategori	Uraian	E/KE/TE	Kemungkinan	Dampak	Risiko	Y/T	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
28	Layanan Dukungan Manajemen Internal (Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal) - SPIP	E.4.8.MN.4	Pelaporan Pelaksanaan Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) di lingkungan DJKA tidak dilaporkan secara berkala kepada Itjen selaku UPG Instansi	Kurangnya kesadaran/pemahaman Unit Kerja untuk melaporkan pelaksanaan UPG setiap triwulan dalam setahun	Tidak terlaksananya pengendalian intern dalam rangka penilaian SPIP	Risiko Kepatuhan	1. Melakukan Sosialisasi minimal 1 kali dalam 1 tahun; 2. Menandatangani pernyataan gratifikasi setiap semesternya.	KE	Cukup sering: 6 s.d. 9 kali	92% > Capaian IKU > 87%	Sedang [14]	Ya	28
29	Layanan Manajemen Kinerja Internal (Layanan Manajemen Keuangan) - SPIP	E.1.1.MN.1	Kurangnya aspek good governance dan clean government dalam pelaksanaan kegiatan dan anggaran	Rendahnya integritas dan kompetensi SDM pengelola anggaran	Tingkat maturitas SPIP terintegrasi tidak memenuhi target	Risiko Hukum	Monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran secara berkala	E	Sangat jarang: < 2 kali	Pihak terpidana adalah Pejabat Eselon I, II atau pejabat yang setara, dan atau Putusan Perdata: 10M < x ≤ 100M Administratif: tergugat merupakan Menteri	Rendah [8]	Tidak	29

Bisnis Proses		Pernyataan Risiko					Sistem Pengendalian yang ada		Level			Keputusan Mitigasi	Prioritas
No	Uraian	Kode Risiko	Peristiwa	Penyebab	Dampak	Kategori	Uraian	E/KE/TE	Kemungkinan	Dampak	Risiko	Y/T	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
30	Layanan Manajemen Kinerja Internal (Layanan Manajemen Keuangan) - SPIP	E.4.9.MD.2	Tidak tuntasnya rekomendasi atas temuan Itjen, BPK dan BPKP	1. Data dukung tidak terpenuhi untuk tindak lanjut rekomendasi temuan Itjen, BPKP dan BPK; 2. Kurangnya kesadaran Balai/Satker untuk menyelesaikan rekomendasi tindak lanjut dari Auditor (Pemeriksa Internal maupun Eksternal)	Tingkat kepatuhan dan sistem pengendalian intern kurang optimal	Risiko Kepatuhan	1. Melakukan Koordinasi dan Monitoring kepada Balai/Satker terkait tindak lanjut atas rekomendasi temuan Itjen, BPK dan BPKP 2. Surat Edaran kepada Balai/Satker untuk menindaklanjuti temuan dan rekomendasi yang belum selesai	KE	Sering: 10 kali s.d. 12	92% > Capaian IKU > 87%	Tinggi [16]	Ya	30
31	Layanan Dukungan Manajemen Internal (Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal) - SPIP	E.6.1.MD.1	Pegawai tidak mempunyai integritas dan tidak disiplin	Kurangnya pelaksanaan pembinaan mental dan spiritual pegawai	Kinerja dan reputasi organisasi menurun	Risiko Reputasi	Sosialisasi dan koordinasi dengan pihak terkait	KE	Jarang: 2 kali s.d. 5 kali	Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) dengan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) kurang dari 25 - 64,99 (25 ≤ x ≤ 64,99)	Sedang [13]	Ya	31
32	Layanan Manajemen Kinerja Internal (Layanan Manajemen Keuangan) - PNBP	E.5.21.EX.1	Target PNBP tidak sesuai usulan.	Penambahan target PNBP dari hasil rapat bersama dengan Sekjen/Kemenkeu/DPR.	Tidak tercapainya target PNBP.	Risiko Operasional	Mengoptimalkan realiassi PNBP yang ada.	KE	Cukup sering: 6 s.d. 9 kali	87% > Capaian IKU > 80%	Tinggi [17]	Ya	32
33	Layanan Manajemen Kinerja Internal (Layanan Manajemen Keuangan) - PNBP	E.6.2.MN.1	Pemanfaatan BMN belum optimal.	Belum terlaksananya sertifikasi terhadap aset prasarana perkeretaapian karena terdapat dua pengakuan aset antara DJKA dan PT. KAI.	Tidak tercapainya target PNBP.	Risiko Reputasi	Sertifikasi lahan BMN perkeretaapian	KE	Sering: 10 kali s.d. 12	Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) dengan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah 76,61 – 88,30 (76,61 ≤ x ≤ 88,30)	Sedang [12]	Ya	33
34	Layanan Manajemen Kinerja Internal (Layanan Manajemen Keuangan) - PNBP	E.4.10.MD.3	Pemanfaatan BMN belum dapat diproses.	1. Permohonan belum memenuhi persyaratan pemanfaatan BMN sesuai ketentuan; 2. Kurangnya koordinasi	Tidak tercapainya target PNBP.	Risiko Kepatuhan	Berita acara tinjauan lapangan bersama	KE	Sering: 10 kali s.d. 12	97% > Capaian IKU > 92%	Sedang [12]	Ya	34
35	Layanan Manajemen Kinerja Internal (Layanan Manajemen Keuangan) - PNBP	E.6.3.MN.2	Kesalahan pencantuman jenis akun PNBP.	Kesalahan penginputan dikarenakan SDM kurang teliti.	Tidak tercapainya target PNBP.	Risiko Reputasi	Koordinasi rutin dengan Balai terkait.	E	Jarang: 2 kali s.d. 5 kali	97% > Capaian IKU > 92%	Rendah [7]	Tidak	35
36	Layanan Manajemen Kinerja Internal (Layanan Manajemen Keuangan) - PNBP	E.5.22.MC.1	Adanya perubahan saldo dalam persediaan dan aset yang tidak sesuai dengan pencatatan awal.	Aplikasi SAKTI dalam transaksi aset dan persediaan mengalami bug system atau dalam proses updating system	Pencatatan aset tidak valid/tidak sesuai.	Risiko Operasional	Koordinasi dengan DJPB/ KPPN terkait dengan pembaharuan sistem	E	Jarang: 2 kali s.d. 5 kali	97% > Capaian IKU > 92%	Rendah [7]	Tidak	36
37	Layanan Manajemen Kinerja Internal (Layanan Manajemen Keuangan) - PNBP	E.4.12.MN.6	Penyampaian dokumen administrasi badan layanan umum tidak tepat waktu	Kurangnya pemahaman Balai dalam menyusun dokumen administrasi badan layanan umum.	Tidak berjalannya fungsi BLU.	Risiko Kepatuhan	Koordinasi dengan balai terkait jangka waktu pengusulan dokumen administratif badan layanan umum	E	Jarang: 2 kali s.d. 5 kali	97% > Capaian IKU > 92%	Rendah [7]	Tidak	37

Bisnis Proses		Pernyataan Risiko					Sistem Pengendalian yang ada		Level			eputusan Mitig	Prioritas
No	Uraian	Kode Risiko	Peristiwa	Penyebab	Dampak	Kategori	Uraian	E/KE/TE	Kemungkinan	Dampak	Risiko	Y/T	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
38	Layanan Manajemen Kinerja Internal (Layanan Manajemen Keuangan) - ANGGARAN	E.6.4.MN.3	Ketidaksesuaian pencantuman target pada RPD	Kurang memahaminya operator dalam menentukan target RPD	Tidak Tercapainya Target Nilai Kinerja Anggaran	Risiko Reputasi	Evaluasi Pelaksanaan Anggaran	KE	Cukup sering: 6 s.d. 9 kali	Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) dengan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah 65 - 76,60 (65 ≤ x ≤ 76,60)	Sedang [14]	Ya	38
39	Layanan Manajemen Kinerja Internal (Layanan Manajemen Keuangan) - ANGGARAN	E.4.13.MR.4	Pelaksanaan project tidak sesuai rencana /project tidak dapat dilaksanakan	*Readiness criteria* (aspek administrasi dan teknis) tidak siap	Target kualitas pelaksanaan anggaran tidak terpenuhi (capaian komponen penyerapan anggaran dan komponen capaian output rendah)	Risiko Kepatuhan	1. Percepatan revisi administrasi DIPA (untuk kegiatan SBSN dengan skema luncuran, pengembalian pinjam pagu, dll); 2. Percepatan proses penetapan kontra tahun jamak (perpanjangan, rekomposisi); 3. Percepatan progres	KE	Jarang: 2 kali s.d. 5 kali	87% > Capaian IKU > 80%	Sedang [13]	Ya	39
40	Layanan Manajemen Kinerja Internal (Layanan Manajemen Keuangan) - ANGGARAN	E.4.14.MD.4	Kontrak pekerjaan tertunda	1. Dokumen tender tidak sesuai ketentuan; 2. Pelaksanaan tender tidak sesuai rencana; 3. Kesiapan SDM Pengelola Anggaran.	Target kualitas pelaksanaan anggaran tidak terpenuhi (komponen penyerapan anggaran dan komponen capaian output rendah)	Risiko Kepatuhan	1. Persiapan dokumen administrasi dan teknis yang sesuai ketentuan; 2. Koordinasi aktif untuk permohonan Pokja guna percepatan pelaksanaan tender.	KE	Jarang: 2 kali s.d. 5 kali	87% > Capaian IKU > 80%	Sedang [13]	Ya	40
41	Layanan Manajemen Kinerja Internal (Layanan Manajemen Keuangan) - ANGGARAN	E.5.23.MR.6	Penyerapan anggaran rendah	1. Dokumen perencanaan teknis/lahan belum siap; 2. Keterlambatan lelang akibat penolakan Pokja Biro LPPBMN dan dokumen lelang; 3. Lamanya proses administrasi (permohonan MYC, permohonan kontrak, penetapan pemenang, dll).	Tidak Tercapainya Target Kualitas Pelaksanaan Anggaran/Nilai Kinerja Anggaran	Risiko Operasional	1. Rapat kesiapan pelaksanaan anggaran; 2. Percepatan dokumen tender; 3. Koordinasi persiapan kegiatan dengan Satker (memastikan kesiapan perencanaan teknis, lahan, lainnya) serta stakeholder lainnya terkait percepatan administrasi; 4. Monitoring dan Evaluasi Pelaksananaan Anggaran.	KE	Sering: 10 kali s.d. 12	97% > Capaian IKU > 92%	Sedang [12]	Ya	41
42	Layanan Manajemen Kinerja Internal (Layanan Manajemen Keuangan) - ANGGARAN	E.4.15.MN.7	Terdapat kesalahan penggunaan akun dalam pembayaran belanja	1. Kurang pahamnya pengetahuan personil terkait akun yang seharusnya digunakan; 2. Sering bergantinya personil yang menangani proses pencairan anggaran belanja.	Target terwujudnya Good Governance dan Clean Government tidak terpenuhi karena pembayaran belanja tidak akuntabel.	Risiko Kepatuhan	Mengadakan Sosialiasasi terkait Bagan Akun Standar kepada Balai/Satker di Lingkungan Ditjen Perkeretaapian	E	Cukup sering: 6 s.d. 9 kali	97% > Capaian IKU > 92%	Rendah [10]	Tidak	42

Bisnis Proses		Pernyataan Risiko					Sistem Pengendalian yang ada		Level			putusan Mitig	Prioritas
No	Uraian	Kode Risiko	Peristiwa	Penyebab	Dampak	Kategori	Uraian	E/KE/TE	Kemungkinan	Dampak	Risiko	Y/T	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
43	Layanan Sarana dan Prasarana Internal (Layanan Prasarana Internal) - PERKANTORAN	E.5.24.MY.1	Kegiatan pendukung layanan manajemen keuangan tidak dapat dilaksanakan.	Alokasi anggaran tidak mencukupi.	Kinerja layanan manajemen keuangan tidak optimal.	Risiko Operasional	Revisi anggaran	E	Jarang: 2 kali s.d. 5 kali	97% > Capaian IKU > 92%	Rendah [7]	Tidak	43
44	Layanan Sarana dan Prasarana Internal (Layanan Prasarana Internal) - PERKANTORAN	E.6.5.MD.2	Proses usulan revisi anggaran ditolak	Penyampaian data dukung tidak sesuai dan tidak tepat waktu	Target persentase kualitas pelaksanaan anggaran tidak terpenuhi karena penyerapan anggaran tidak optimal.	Risiko Reputasi	Koordinasi dengan satker dan balai yang mengajukan revisi anggaran	E	Jarang: 2 kali s.d. 5 kali	Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) dengan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah 76,61 – 88,30 (76,61 ≤ x ≤ 88,30)	Rendah [7]	Tidak	44
45	Layanan Manajemen Kinerja Internal (Layanan Manajemen Keuangan) - ANGGARAN	E.6.6.MN.4	Pelaksanaan kegiatan manajemen keuangan tidak sesuai dengan jadwal kegiatan	Adanya penugasan lain dari pimpinan.	Kinerja layanan manajemen keuangan tidak optimal.	Risiko Reputasi	Revisi jadwal kegiatan	E	Jarang: 2 kali s.d. 5 kali	Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) dengan minimal Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah 88,31(x ≥ 88,31)	ngat Rendah [	Tidak	45
46	Layanan Sarana dan Prasarana Internal (Layanan Prasarana Internal) - PERKANTORAN	E.2.1.MC.1	Terjadinya kebakaran di Kantor Pusat Ditjen Perkeretaapian	1. Kondisi fasilitas kelistrikan yang tidak aman. 2. Pengecekan kondisi gedung, bangunan dan fasilitas kantor jarang dilakukan.	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan perkantoran tidak mencapai target (akibat adanya kerugian material dan operasional perkantoran tidak dapat berlangsung)	Risiko Bencana	Himbauan untuk memperhatikan kondisi gedung, bangunan dan fasilitas perkantoran.	KE	Sangat jarang: < 2 kali	80% > Capaian IKU > 70%	ngat Tinggi [2	Ya	46
47	Layanan Sarana dan Prasarana Internal (Layanan Prasarana Internal) - PERKANTORAN	E.5.25.MR.7	Hasil renovasi gedung dan bangunan tidak sesuai kebutuhan/tidak ergonomis	Desain renovasi tidak memperhatikan kenyamanan dan keselamatan pegawai	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan perkantoran rendah karena operasional perkantoran terganggu/tidak dapat berjalan dengan optimal	Risiko Operasional	Melakukan perencanaan dan rapat secara berkala dengan pihak vendor dan stakeholder terkait serta melakukan jadwal pemantauan selama progres pekerjaan	E	Sangat jarang: < 2 kali	92% > Capaian IKU > 87%	ngat Rendah [	Tidak	47
48	Layanan Sarana dan Prasarana Internal (Layanan Sarana Internal) - PERKANTORAN	E.5.26.MY.2	Jumlah kendaraan operasional tidak mencukupi jumlah yang direncanakan/dibutuhkan	Anggaran pengadaan kendaraan tidak mencukupi/tersedia	Terganggunya operasional perkantoran.	Risiko Operasional	1. Sewa kendaraan operasional; 2. Usulan pengadaan kendaraan operasional baru dengan terlebih dahulu mengusulkan pengahapusan aset kendaraan operasional.	E	Cukup sering: 6 s.d. 9 kali	97% > Capaian IKU > 92%	Rendah [10]	Tidak	48

Bisnis Proses		Pernyataan Risiko					Sistem Pengendalian yang ada		Level			Keputusan Mitigasi	Prioritas
No	Uraian	Kode Risiko	Peristiwa	Penyebab	Dampak	Kategori	Uraian	E/KE/TE	Kemungkinan	Dampak	Risiko	Y/T	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
49	Layanan Sarana dan Prasarana Internal (Layanan Sarana Internal) - PERKANTORAN	E.5.27.MC.2	Kendaraan operasional tidak dapat digunakan.	1. Kerusakan pada mesin/sparepart karena operasional sehari-hari; 2. Perawatan kendaraan tidak dilaksanakan secara rutin; 3. Anggaran perawatan tidak mencukupi.	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan perkantoran tidak mencapai target karena adanya gangguan operasional.	Risiko Operasional	Melakukan pemeriksaan dan pemeliharaan rutin pada kendaraan operasional	E	Jarang: 2 kali s.d. 5 kali	97% > Capaian IKU > 92%	Rendah [7]	Tidak	49
50	Layanan Dukungan Manajemen Internal (Layanan Perkantoran) - PERKANTORAN	E.5.28.MV.3	Terlambatnya pembayaran gaji dan tunjangan kinerja pegawai.	Terjadi pemotongan anggaran untuk gaji dan tunjangan pegawai.	Tingkat kepuasan layanan perkantoran rendah.	Risiko Operasional	Melakukan pemantauan pada anggaran belanja Pegawai dan mengajukan revisi anggaran belanja pegawai lebih awal.	E	Jarang: 2 kali s.d. 5 kali	92% > Capaian IKU > 87%	Rendah [11]	Tidak	50
51	Layanan Dukungan Manajemen Internal (Layanan Perkantoran) - PERKANTORAN	E.5.29.MD.1	Fasilitas perkantoran tidak memenuhi kebutuhan pegawai dalam melaksanakan tugas (rusak atau tidak tersedia).	1. Perawatan fasilitas kantor tidak dilaksanakan sesuai ketentuan/jadwal; 2. Pengadaan fasilitas kantor tidak dilaksanakan sesuai kebutuhan.	Tingkat kepuasan layanan perkantoran (rumah tangga/umum) rendah.	Risiko Operasional	1. Melakukan pemeliharaan secara berkala dan berkoordinasi dengan tim Biro Umum terkait kerusakan fasilitas perkantoran/gedung; 2. Inventarisasi kebutuhan pegawai terkait fasilitas perkantoran; 3. Usulan dan pelaksanaan kegiatan untuk pengadaan fasilitas perkantoran.	E	Jarang: 2 kali s.d. 5 kali	92% > Capaian IKU > 87%	Rendah [11]	Tidak	51
52	Layanan Dukungan Manajemen Internal (Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal) - PERKANTORAN	E.5.30.MN.4	Prosedur persuratan / kearsipan tidak berjalan dengan baik diantaranya menyebabkan arsip hilang atau rusak	Pengelolaan persuratan/kearsipan yang belum terintegrasi secara elektronik (mulai dari proses pembuatan surat, penandatanganan, pengiriman, termasuk penyimpanan dokumen (kearsipan) yang tidak efisien dan tidak terstruktur)	Tingkat kepuasan layanan perkantoran (ketatausahaan) rendah.	Risiko Operasional	Dokumen persuratan/ arsip dipindai selanjutnya diinput pada aplikasi Portal DJKA, sambil menunggu aplikasi SRIKANDI digunakan secara penuh	E	Jarang: 2 kali s.d. 5 kali	92% > Capaian IKU > 87%	Rendah [11]	Tidak	52
53	Layanan Dukungan Manajemen Internal (Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal) - PERKANTORAN	E.5.31.MN.5	Tata laksana ketatausahaan yang belum sesuai dengan ketentuan.	SDM pelaksana belum memahami terkait manajemen pelayanan pimpinan dan ketentuan tata naskah dinas.	Tingkat kepuasan layanan perkantoran (ketatausahaan) rendah.	Risiko Operasional	Melaksanakan sosialisasi dan monitoring bagi pegawai yang menangani ketatausahaan di lingkungan DJKA	E	Cukup sering: 6 s.d. 9 kali	97% > Capaian IKU > 92%	Rendah [10]	Tidak	53

Bisnis Proses		Pernyataan Risiko					Sistem Pengendalian yang ada		Level			Keputusan Mitigasi	Prioritas
No	Uraian	Kode Risiko	Peristiwa	Penyebab	Dampak	Kategori	Uraian	E/KE/TE	Kemungkinan	Dampak	Risiko	Y/T	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
54	Layanan Dukungan Manajemen Internal (Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal) - PERKANTORAN	E.5.32.MN.6	Kegiatan keprotokolan tidak berjalan dengan lancar/ tidak teratur.	Petugas kurang berkoordinasi.	Tingkat kepuasan layanan perkantoran (ketatausahaan) rendah.	Risiko Operasional	Memberikan sosialisasi terkait SOP keprotokolan	E	Jarang: 2 kali s.d. 5 kali	97% > Capaian IKU > 92%	Rendah [7]	Tidak	54
55	Layanan Dukungan Manajemen Internal (Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal) - PERKANTORAN	E.5.33.MR.8	Tidak terpenuhinya perlengkapan kantor	1. Terjadi kerusakan pada perlengkapan perkantoran; 2. Permintaan perlengkapan perkantoran dari unit kerja yang tidak sesuai dengan rencana.	Terhambatnya operasional administrasi di lingkungan unit kerja	Risiko Operasional	1. Menyusun prioritas pemberian perlengkapan kantor dan melakukan penyediaan untuk unit kerja yang krusial seperti Tata Usaha pada Sekretaris dan Direktur Jenderal Perkeretaapian. 2. Menyusun SOP dan Form permintaan barang serta membuat sistem informasi terkait pemesanan perlengkapan Melakukan perawatan secara berkala pada perlengkapan perkantoran.	E	Cukup sering: 6 s.d. 9 kali	97% > Capaian IKU > 92%	Rendah [10]	Tidak	55
56	Layanan Dukungan Manajemen Internal (Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi) -	E.4.17.MN.9	Kurangnya koordinasi terkait kegiatan pembangunan di wilayah kerja UPT	Kurangnya pemahaman akan pentingnya koordinasi antar UPT dengan Kantor Pusat	Program kerja Pemerintah kurang tersampaikan dengan baik kepada masyarakat	Risiko Kepatuhan	Mengadakan Bimtek Kehumasan	E	Jarang: 2 kali s.d. 5 kali	92% > Capaian IKU > 87%	Rendah [11]	Tidak	56
57	Layanan Dukungan Manajemen Internal (Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi) -	E.6.7.MN.5	Informasi yang dibutuhkan pemohon/masyarakat tidak dapat disediakan.	1. Sulitnya mendapatkan informasi dari unit kerja terkait, baik pusat maupun UPT di Lingkungan DJKA; 2. Belum meratanya pemahaman tentang informasi yang dikecualikan.	Tidak terpenuhinya kebutuhan publikasi bidang perkeretaapian (keterbukaan informasi publik tidak berjalan baik.	Risiko Reputasi	Mengadakan Bimtek terkait PPID	E	Jarang: 2 kali s.d. 5 kali	Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) dengan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah 65 - 76,60 (65 ≤ x ≤ 76,60)	Rendah [11]	Tidak	57
58	Layanan Dukungan Manajemen Internal (Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi) -	E.5.34.MR.9	Pemenuhan permohonan informasi yang kurang lengkap.	Data dukung tidak terdokumentasi dengan baik.	Target persentase pemenuhan publikasi tidak dapat terpenuhi karena tertundanya pemberian informasi kepada pemohon informasi.	Risiko Operasional	Mengirimkan surat/nota dinas terkait permohonan informasi ke unit kerja yang bersangkutan	E	Cukup sering: 6 s.d. 9 kali	97% > Capaian IKU > 92%	Rendah [10]	Tidak	58
59	Layanan Dukungan Manajemen Internal (Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi) -	E.4.18.MN.1	Kurangnya informasi terkait kerjasama luar negeri.	Terhambatnya koordinasi dengan UPT dan Direktorat Teknis terkait potensi kerjasama luar negeri.	Tertundanya proses kerjasama luar negeri.	Risiko Kepatuhan	Mengadakan konsinyering update kertas posisi kerjasama luar negeri di Lingkungan DJKA	E	Cukup sering: 6 s.d. 9 kali	97% > Capaian IKU > 92%	Rendah [10]	Tidak	59

Bisnis Proses		Pernyataan Risiko					Sistem Pengendalian yang ada		Level			putusan Mitig	Prioritas
No	Uraian	Kode Risiko	Peristiwa	Penyebab	Dampak	Kategori	Uraian	E/KE/TE	Kemungkinan	Dampak	Risiko	Y/T	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
60	Layanan Dukungan Manajemen Internal (Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi) -	E.5.35.MN.7	Data terkait bahan publikasi yang belum terupdate.	Terkendala koordinasi lintas unit kerja.	Target persentase pemenuhan publikasi tidak terpenuhi karena tertundanya publikasi.	Risiko Operasional	Tersedianya link update kegiatan publikasi	E	Cukup sering: 6 s.d. 9 kali	97% > Capaian IKU > 92%	Rendah [10]	Tidak	60
61	Sistem Informasi Pemerintahan (Sistem Informasi) -	E.4.19.MD.9	Usulan kegiatan TIK ditolak/tidak memperoleh clearance dari Tim SPBE Nasional.	Data dukung tidak sesuai ketentuan KM 9 Tahun 2023 dan tidak masuk dalam Peta Rencana SPBE Kementerian Perhubungan (KM 106 Tahun 2023).	Pemenuhan Rencana Induk TIK tidak tercapai.	Risiko Kepatuhan	Rapat pembahasan termasuk reviu tingkat I, sosialisasi KM 9 Tahun 2023, koordinasi dengan Pusdatin terkait Peta Rencana SPBE. Kementerian Perhubungan	KE	Cukup sering: 6 s.d. 9 kali	87% > Capaian IKU > 80%	Tinggi [17]	Ya	61
62	Sistem Informasi Pemerintahan (Sistem Informasi) -	E.5.36.MC.3	Aplikasi rusak atau data bocor/hilang akibat serangan cyber/hack	1. Teknologi sistem informasi/aplikasi tidak update ke versi terbaru; 2. Terdapat celah	Pemanfaatan sistem informasi/aplikasi tidak optimal/andal.	Risiko Operasional	1. Koordinasi dengan Pusdatin terkait WAF aplikasi dan Agent monitoring;	KE	Jarang: 2 kali s.d. 5 kali	87% > Capaian IKU > 80%	Sedang [13]	Ya	62
63	Sistem Informasi Pemerintahan (Sistem Informasi) -	E.5.37.MC.4	Sistem TIK di lingkungan Ditjen Perkeretaapian (Website, Portal Aplikasi, lainnya) tidak dapat diakses	Server Ditjen Perkeretaapian down	Pemanfaatan sistem informasi/aplikasi tidak optimal/andal.	Risiko Operasional	Koordinasi dengan Pusdatin, pengecekan oleh Tim Pengelola TIK Ditjen Perkeretaapian	KE	Jarang: 2 kali s.d. 5 kali	87% > Capaian IKU > 80%	Sedang [13]	Ya	63
64	Sistem Informasi Pemerintahan (Sistem Informasi) -	E.5.38.MD.1	Aplikasi tidak optimal pemanfaatannya dikarenakan adanya gangguan sistem.	Programmer tidak kooperatif dan tidak ada jaminan sesusai kontrak.	Pemanfaatan sistem informasi/aplikasi tidak optimal/andal.	Risiko Operasional	1. Koordinasi langsung dengan programmer; 2. Perbaikan secara swakelola oleh tim pengelola TIK.	KE	Jarang: 2 kali s.d. 5 kali	87% > Capaian IKU > 80%	Sedang [13]	Ya	64
65	Sistem Informasi Pemerintahan (Sistem Informasi) -	E.5.39.MN.9	Pengembangan terlambat diselesaikan dan masa kontrak telah selesai.	Kompetensi dari konsultan yang kurang memadai	Pemenuhan Rencana Induk TIK tidak tercapai.	Risiko Operasional	Melakukan pendetailan spesifikasi tenaga ahli teknis dan persyaratan sertifikasi.	E	Jarang: 2 kali s.d. 5 kali	92% > Capaian IKU > 87%	Rendah [11]	Tidak	65
66	Sistem Informasi Pemerintahan (Sistem Informasi) -	E.5.40.MD.1	Aplikasi yang dibangun tidak sesuai dengan ketentuan di KAK/Pusdatin.	1. Penafsiran mengenai KAK dari konsultan dan pihak DJKA berbeda. 2. Programmer tidak kooperatif.	Pemenuhan Rencana Induk TIK tidak tercapai.	Risiko Operasional	1. Rapat pembahasan/asistensi secara berkala dengan mengikutsertakan Pusdatin; 2. Penerapan sanksi sesuai kontrak.	E	Jarang: 2 kali s.d. 5 kali	92% > Capaian IKU > 87%	Rendah [11]	Tidak	66
67	Sistem Informasi Pemerintahan (Sistem Informasi) -	E.5.41.MN.9	Pengelolaan dan pengembangan sistem TIK masih tergantung pada konsultan/programmer pihak ketiga	Kompetensi dari SDM DJKA masih kurang memadai dalam membantu pengelolaan dan pengembangan Sistem TIK secara swakelola	Pengelolaan dan pengembangan Sistem TIK tidak optimal sesuai kebutuhan	Risiko Operasional	Koordinasi pegawai pranata komputer untuk membantu pengelolaan dan pengembangan sistem TIK	E	Jarang: 2 kali s.d. 5 kali	92% > Capaian IKU > 87%	Rendah [11]	Tidak	67

Bisnis Proses		Pernyataan Risiko					Sistem Pengendalian yang ada		Level			eputusan Mitig	Prioritas
No	Uraian	Kode Risiko	Peristiwa	Penyebab	Dampak	Kategori	Uraian	E/KE/TE	Kemungkinan	Dampak	Risiko	Y/T	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
68	Sistem Informasi Pemerintahan (Sistem Informasi) -	E.5.42.MD.1	Aplikasi yang dibangun tidak digunakan secara maksimal.	Belum ada sosialiasi/bimtek yang dilakukan secara berkala.	Pemanfaatan sistem informasi/aplikasi tidak optimal/andal.	Risiko Operasional	1. Melakukan sosialisasi/bimtek aplikasi baru; 2. Pembuatan manual book penggunaan aplikasi; 3. Penguatan dasar hukum pemanfaaatan aplikasi.	E	5% < x ≤ 10%	97% > Capaian IKU > 92%	Rendah [7]	Tidak	68
69	Layanan Dukungan Manajemen Internal (Layanan Data dan Informasi) -	E.4.20.MD.6	Penyediaan informasi layanan data tidak update/valid dan terlambat	1. SOP pengelolaan untuk update data tidak dilaksanakan oleh produsen data; 2. Data dari Direktorat/Balai tidak terintegrasi sehingga menimbulkan duplikasi data; 3. Belum memadainya proses cleansing data untuk mengidentifikasi data yang tidak valid; 4. Kesalahan dalam pengelolaan data.	Data tidak dapat dimanfaatkan/ tidak dapat dijadikan acuan untuk pengambilan keputusan oleh Pimpinan.	Risiko Kepatuhan	1. Penyampaian Nodin permintaan data dan koordinasi melalui whatsapp dengan PIC; 2. Rapat koordinasi untuk sinkronisasi data dan sosialisasi SOP.	KE	Cukup sering: 6 s.d. 9 kali	92% > Capaian IKU > 87%	Sedang [14]	Ya	69

Bisnis Proses		Pernyataan Risiko					Sistem Pengendalian yang ada		Level			Keputusan Mitigasi	Prioritas
No	Uraian	Kode Risiko	Peristiwa	Penyebab	Dampak	Kategori	Uraian	E/KE/TE	Kemungkinan	Dampak	Risiko	Y/T	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
70	Layanan Dukungan Manajemen Internal (Layanan Data dan Informasi) -	E.5.43.MN.1	Kehilangan/kebocoran data pada Portal Aplikasi Ditjen Perkeretaapian	1. Pencurian data aplikasi/aplikasi ter-hack; 2. Teknologi yang digunakan belum versi ter-update.	Data/informasi pegawai/unit kerja Ditjen Perkeretaapian disalahgunakan oleh pihak yang tidak berwenang.	Risiko Operasional	1. Koordinasi dengan Pusdatin terkait WAF aplikasi dan Agent monitoring; 2. Backup data sacara berkala.	KE	Jarang: 2 kali s.d. 5 kali	87% > Capaian IKU > 80%	Sedang [13]	Ya	70
71	Layanan Dukungan Manajemen Internal (Layanan Data dan Informasi) -	E.5.44.MN.1	Informasi/berita pada Website Ditjen Perkeretaapian tidak update/valid dan terlambat	1. Keterlambatan publikasi berita/informasi pada website DJKA oleh PIC/Tim Humas; 2. Kesalahan penginputan data/informasi pada website DJKA.	Informasi/Berita pada Website Ditjen Perkeretaapian tidak dapat dimanfaatkan oleh masyarakat	Risiko Operasional	1. Tersedianya manual book penggunaan website DJKA; 2. Rapat koordinasi/bimtek pengelolaan Website DJKA.	E	Jarang: 2 kali s.d. 5 kali	97% > Capaian IKU > 92%	Rendah [7]	Tidak	71
72	Layanan Manajemen SDM Internal (Layanan SDM) -	E.5.45.MN.1	Pelaksanaan tugas dan fungsi pada unit kerja belum berjalan maksimal	1. Tidak didukung SDM yang kompeten; 2. Kurangnya minat pegawai untuk mengikuti diklat.	Kinerja dan reputasi organisai menurun.	Risiko Operasional	Melaksanakan kegiatan diklat komptensi dan menyampaikan penawaran dan usulan peserta diklat dari unit kerja penyelenggara	KE	Cukup sering: 6 s.d. 9 kali	87% > Capaian IKU > 80%	Tinggi [17]	Ya	72
73	Layanan Manajemen SDM Internal (Layanan SDM) -	E.5.46.MY.4	Minimnya pelaksanaan diklat untuk peningkatan kompetensi ASN terkait diklat manajerial	Kurangnya anggaran pelaksanaan diklat	Tidak terpenuhinya kebutuhan ASN Ditjen Perkeretaapian yang kompeten/memiliki keahlian tertentu	Risiko Operasional	Kerjasama dengan unit kerja penyelenggara dalam pelaksanaan kegiatan diklat kompetensi dan menyampaikan penawaran kepada pegawai yang berminat	KE	Cukup sering: 6 s.d. 9 kali	87% > Capaian IKU > 80%	Tinggi [17]	Ya	73
74	Layanan Manajemen SDM Internal (Layanan SDM) -	E.5.48.MN.1	Layanan kepegawaian (kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, ujian dinas, database kepegawaian, penyusunan laporan kinerja pegawai, dan lainnya) tidak dilaksanakan dengan baik	1. Minimnya pemahaman SDM pembina; 2. Kurangnya pelaksanaan sosialisasi / pembinaan kepada pegawai; 3. Database pegawai kurang lengkap/tidak update; 4. Anggaran terbatas.	Tingkat kepuasan layanan perkantoran (kepegawaian) rendah	Risiko Operasional	1. Koordinasi dengan TU Balai dan Direktorat; 2. Menyusun database kepegawaian / update data SIK secara berkala; 3. Bimtek layanan kepegawaian.	KE	Cukup sering: 6 s.d. 9 kali	92% > Capaian IKU > 87%	Sedang [14]	Ya	74
75	Layanan Manajemen SDM Internal (Layanan SDM) -	E.5.49.MN.1	Tidak optimalnya penyelenggaraan jabatan fungsional tertentu bidang perkeretaapian /inpassing	Minimnya minat pegawai untuk diklat / jabatan fungsional tertentu bidang perkeretaapian	Tidak terpenuhinya kebutuhan ASN Ditjen Perkeretaapian yang kompeten/memiliki keahlian tertentu	Risiko Operasional	Sosialisasi dan penawaran uji kompetensi tahap 2 kepada ASN Ditjen Perkeretaapian	KE	Cukup sering: 6 s.d. 9 kali	92% > Capaian IKU > 87%	Sedang [14]	Ya	75

Bisnis Proses		Pernyataan Risiko					Sistem Pengendalian yang ada		Level			eputusan Mitiga	Prioritas
No	Uraian	Kode Risiko	Peristiwa	Penyebab	Dampak	Kategori	Uraian	E/KE/TE	Kemungkinan	Dampak	Risiko	Y/T	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
76	Layanan Dukungan Manajemen Internal (Layanan Hukum) -	E.1.3.MD.1	Tidak optimalnya/terlambat/tidak dilakukan pengendalian dan pengawasan terhadap izin teknis	Pendelegasian tugas pada Balai Teknik Perkeretaapian yang belum berjalan dengan optimal	Terjadinya pelanggaran terhadap izin teknis yang sudah diterbitkan (kekosongan hukum, ketidaksesuaian kondisi)	Risiko Hukum	Bagian Hukum melakukan pendataan izin teknis yang akan habis masa berlakunya dan meneruskan ke setiap BTP melalui surat agar melakukan pengawasan terhadap izin teknis dimaksud.	KE	Sering: 10 kali s.d. 12	Pihak terpidana adalah Pejabat Eselon III, IV, atau pejabat yang setara, pejabat fungsional, dan pejabat fungsional umum, dan atau Putusan Perdata: 1M< x < 10M Administratif: tergugat merupakan Pejabat Eselon I, atau pejabat yang setara.	Tinggi [16]	Ya	76
77	Layanan Dukungan Manajemen Internal (Layanan Hukum) -	E.5.50.MN.1	Sidang ditunda jika tidak ada perwakilan kuasa hukum.	Terbatasnya jumlah personil lulusan sarjana hukum yang dapat menjadi	Penyelesaian kasus hukum menjadi lebih lama.	Risiko Operasional	Koordinasi dengan Biro Hukum terkait kehadiran di persidangan	KE	Cukup sering: 6 s.d. 9 kali	92% > Capaian IKU > 87%	Sedang [14]	Ya	77
78	Layanan Dukungan Manajemen Internal (Layanan Hukum) -	E.5.51.MN.1	Substansi penyusunan peraturan perundang-undangan tidak lengkap/tidak sesuai	Naskah akademis penyusunan peraturan perundang-undangan tidak memadai	Terlambatnya pemenuhan target peraturan perundang-undangan.	Risiko Operasional	Koordinasi dengan unit kerja yang mengusulkan penyusunan peraturan perundang-undangan terkait naskah akademis	KE	Cukup sering: 6 s.d. 9 kali	92% > Capaian IKU > 87%	Sedang [14]	Ya	78
79	Layanan Dukungan Manajemen Internal (Layanan Hukum) -	E.4.21.MN.1	Tidak optimalnya/terlambat/tidak dilakukan pengendalian dan pengawasan	Keterbatasan waktu dan SDM untuk melakukan pengendalian dan pengawasan ke lapangan.	Terjadinya pelanggaran terhadap izin teknis yang sudah diterbitkan (kekosongan hukum, ketidaksesuaian	Risiko Kepatuhan	Koordinasi dengan Balai Teknik Perkeretaapian dengan bersurat untuk melakukan Pengendalian dan Pengawasan Produk	KE	Cukup sering: 6 s.d. 9 kali	92% > Capaian IKU > 87%	Sedang [14]	Ya	79
80	Layanan Dukungan Manajemen Internal (Layanan Hukum) -	E.6.8.MC.1	Produk hukum hilang/tidak terdokumentasi dengan baik	Media untuk penyimpanan dokumen terbatas dan akses antar unit kerja belum terintegrasi. Sistem	Reputasi Ditjen Perkeretaapian menurun	Risiko Reputasi	Menyediakan google drive.	E	Jarang: 2 kali s.d. 5 kali	Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) dengan Indeks Kepuasan	Rendah [11]	Tidak	80
81	Layanan Dukungan Manajemen Internal (Layanan Hukum) -	E.1.4.MN.3	Terhambatnya penyusunan legal opinion	Data dukung untuk penyusunan legal opinion kurang lengkap	Rekomendasi kebijakan pimpinan tidak valid	Risiko Hukum	Koordinasi dengan Direktorat atau Balai untuk kebutuhan data dukung	E	Jarang: 2 kali s.d. 5 kali	Pihak terpidana adalah Pejabat Eselon III, IV, atau pejabat yang setara, pejabat fungsional, dan pejabat fungsional umum, dan atau Putusan Perdata: 1M< x < 10M Administratif: tergugat merupakan Pejabat Eselon I, atau pejabat yang setara.	Rendah [11]	Tidak	81

Bisnis Proses		Pernyataan Risiko					Sistem Pengendalian yang ada		Level			eputusan Mitig	Prioritas
No	Uraian	Kode Risiko	Peristiwa	Penyebab	Dampak	Kategori	Uraian	E/KE/TE	Kemungkinan	Dampak	Risiko	Y/T	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
82	Layanan Dukungan Manajemen Internal (Layanan Hukum) -	E.1.5.MN.4	Pelaksanaan kegiatan sosialisasi peraturan perundang-undangan diundur dari rencana	Pimpinan berhalangan karena ada kegiatan lain yang lebih mendesak.	Implementasi terhadap amanah peraturan perundang-undangan tidak berjalan baik.	Risiko Hukum	Konfirmasi kesediaan waktu kepada pimpinan jauh hari sebelum kegiatan dilaksanakan	E	Cukup sering: 6 s.d. 9 kali	Putusan Perdata:100 juta < x ≤1M Administratif:	Rendah [10]	Tidak	82
83	Layanan Dukungan Manajemen Internal (Layanan Hukum) -	E.1.6.EX.1	Penyusunan draft perjanjian kerjasama tidak dapat difinalisasi.	Penyampaian masukan dan tanggapan draf dari pihak Badan Usaha membutuhkan waktu yang	Penandatanganan Perjanjian Kerjasama menjadi tertunda.	Risiko Hukum	Memberikan deadline penyampaian masukan dan tanggapan draf perjanjian	E	Cukup sering: 6 s.d. 9 kali	Putusan Perdata:100 juta < x ≤1M Administratif:	Rendah [10]	Tidak	83
84	Layanan Dukungan Manajemen Internal (Layanan Hukum) -	E.5.52.MN.1	Tertundanya rapat pembahasan peraturan perundang-undangan.	Kesulitan menyesuaikan jadwal antar unit kerja yang terkait.	Terlambatnya pemenuhan target peraturan perundang-undangan	Risiko Operasional	Koordinasi dengan unit kerja terkait sinkronisasi jadwal pembahasan penyusunan peraturan perundang-undangan.	E	Cukup sering: 6 s.d. 9 kali	97% > Capaian IKU > 92%	Rendah [10]	Tidak	84
85	Pemenuhan Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria (Penyusunan Pedoman Teknis Bidang Prasarana Perkeretaapian) -	E.5.53.MY.6	Penundaan/pembatalan kegiatan penyusunan kajian kebijakan/standar/pedoman teknis terkait perkeretaapian (NSPK bidang perkeretaapian)	Kebijakan Recofusing Anggaran sehingga dibatalkannya pelaksanaan kegiatan penyusunan kajian kebijakan/stadar/pedoman teknis terkait perkeretaapian (NSPK bidang perkeretaapian)	Tidak terpenuhinya perumusan regulasi dan kebijakan (NSPK) dalam penyelenggaraan perkeretaapian	Risiko Operasional	1. Mengusulkan kembali kegiatan penyusunan kajian kebijakan/stadar/pedoman teknis (NSPK bidang perkeretaapian) pada periode tahun berikutnya atau dengan optimalisasi anggaran tahun berjalan; 2. Koordinasi dengan bagian keuangan pengusulan kembali kegiatan yang terdampak refocusing anggaran.	KE	Cukup sering: 6 s.d. 9 kali	87% > Capaian IKU > 80%	Tinggi [17]	Ya	85
86	Pemenuhan Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria (Penyusunan Pedoman Teknis Bidang Prasarana Perkeretaapian) -	E.3.1.MD.1	Hasil kajian kebijakan/stadar/pedoman teknis terkait perkeretaapian (NSPK bidang perkeretaapian) tidak valid/tidak dapat digunakan/tidak berkualitas	1. Manipulasi data hasil survei/wawancara; 2. Kurangnya keterlibatan pemangku kepentingan/stakeholder terkait; 3. Penyedia tidak mematuhi pedoman atau standar metodologi penelitian yang ditetapkan pada TOR/KAK.	Tidak tercapainya target pemenuhan perumusan regulasi dan kebijakan (NSPK) dalam penyelenggaraan perkeretaapian	Risiko Kecurangan	1. Melakukan pendampingan pada survey/pengumpulan data; 2. Mengikutsertakan stakeholder dalam rapat pembahasan dalam seluruh tahapan proses penyusunan studi/kajian; 3. Melakukan asistensi/pembahasan secara berkala.	E	Sangat jarang: < 2 kali	87% > Capaian IKU > 80%	Rendah [8]	Tidak	86
87	Pemenuhan Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria (Penyusunan Pedoman Teknis Bidang Prasarana Perkeretaapian) -	E.5.54.MD.1	Terlambatnya pelaksanaan lelang kajian kebijakan/standar/pedoman teknis terkait perkeretaapian (NSPK bidang perkeretaapian)	Ditolaknya permohonan pelaksanaan pengadaan barang/jasa oleh Biro LPBMN akibat kurang lengkapnya data dukung	Tidak tercapainya target pemenuhan perumusan regulasi dan kebijakan (NSPK) dalam penyelenggaraan perkeretaapian	Risiko Operasional	Melakukan penyusunan dan pengecekan kelengkapan data dukung yang diperlukan sebelum diajukan permohonan pelaksanaan pengadaan barang/jasa kepada Biro LPBMN	E	Sangat jarang: < 2 kali	92% > Capaian IKU > 87%	ngat Rendah [	Tidak	87

Bisnis Proses		Pernyataan Risiko					Sistem Pengendalian yang ada		Level			putusan Mitig	Prioritas
No	Uraian	Kode Risiko	Peristiwa	Penyebab	Dampak	Kategori	Uraian	E/KE/TE	Kemungkinan	Dampak	Risiko	Y/T	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
88	Penyusunan Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana (Rencana Induk, Evaluasi Kemanfaatan) -	E.5.55.MY.7	Penundaan/pembatalan kegiatan penyusunan studi /kajian terkait pembinaan dan peningkatan konektivitas perkeretaapian	Kebijakan Recofusing Anggaran sehingga dibatalkannya pelaksanaan kegiatan penyusunan kajian/studi	Tidak tersusunnya rekomendasi kebijakan terkait pembinaan dan peningkatan konektivitas perkeretaapian	Risiko Operasional	Mengusulkan kembali kegiatan penyusunan dokumen kebijakan/studi perencanaan pada periode tahun berikutnya atau dengan optimalisasi anggaran tahun berjalan	KE	Cukup sering: 6 s.d. 9 kali	87% > Capaian IKU > 80%	Tinggi [17]	Ya	88
89	Penyusunan Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana (Rencana Induk, Evaluasi Kemanfaatan) -	.5.56.MD.1	Rekomendasi kebijakan tidak diterima /tidak dimanfaatkan oleh stakeholder strategis	Ketidaksesuaian dengan ekspektasi/harapan/rencana yang telah dimiliki stakeholder terkait	Tidak tersusunnya rekomendasi kebijakan terkait pembinaan dan peningkatan konektivitas	Risiko Operasional	Mengikutsertakan stakeholder dalam rapat pembahasan dalam seluruh tahapan proses penyusunan studi/kajian	KE	Cukup sering: 6 s.d. 9 kali	92% > Capaian IKU > 87%	Sedang [14]	Ya	89
90	Penyusunan Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana (Rencana Induk, Evaluasi Kemanfaatan) -	.5.57.MN.1	Tim Pengarah/Tim Pendamping menolak hasil kajian/studi karena tidak sesuai dengan TOR dan KAK	1. Tenaga Ahli tidak memahami TOR dan KAK; 2. Pelaksanaan survey dan data tidak valid; 3. Analisa tidak dapat dipertanggungjawabkan.	Tidak tersusunnya rekomendasi kebijakan terkait pembinaan dan peningkatan konektivitas perkeretaapian	Risiko Operasional	1. Seleksi Tim pelaksana pekerjaan penyusun kebijakan/kajian sesuai kontrak; 2. Pendampingan pada survey/pengumpulan data; 3. Asistensi/pembahasan secara berkala.	E	Sangat jarang: < 2 kali	87% > Capaian IKU > 80%	Rendah [8]	Tidak	90
91	Penyusunan Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana (Rencana Induk, Evaluasi Kemanfaatan) -	.5.58.MD.1	Terlambatnya pelaksanaan lelang kajian terkait pembinaan dan peningkatan konektivitas perkeretaapian	Ditolaknya permohonan pelaksanaan pengadaan barang/jasa terkait pembinaan dan peningkatan konektivitas perkeretaapian oleh Biro LPBMN akibat kurang lengkapnya data dukung	Tidak tersusunnya rekomendasi kebijakan terkait pembinaan dan peningkatan konektivitas perkeretaapian	Risiko Operasional	Melakukan penyusunan dan pengecekan kelengkapan data dukung yang diperlukan sebelum diajukan permohonan pelaksanaan pengadaan barang/jasa kepada Biro LPBMN	E	Sangat jarang: < 2 kali	92% > Capaian IKU > 87%	ngat Rendah [	Tidak	91
92	Penyusunan Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana (Rencana Induk, Evaluasi Kemanfaatan) -	E.6.9.MN.6	Hasil kajian kebijakan/standar/pedoman teknis (NSPK bidang perkeretaapian) tidak independen	1. Adanya konflik kepentingan; 2. Adanya tekanan/desakan politik yang berlebihan terhadap hasil kajian kebijakan/standar/pedoman teknis.	Tidak tercapainya target pemenuhan perumusan regulasi dan kebijakan (NSPK) dalam penyelenggaraan perkeretaapian karena independensi dan kredibilitas pimpinan/instansi diragukan oleh stakeholder terkait dan masyarakat.	Risiko Reputasi	1. Asistensi/pembahasan secara berkala; 2. Mengikutsertakan stakeholder dalam rapat pembahasan dalam seluruh tahapan proses penyusunan kajian kebijakan.	E	Sangat jarang: < 2 kali	Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) dengan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) kurang dari 25 - 64,99 ($25 \leq x \leq 64,99$)	Rendah [8]	Tidak	92

Bisnis Proses		Pernyataan Risiko					Sistem Pengendalian yang ada		Level			eputusan Mitiga	Prioritas
No	Uraian	Kode Risiko	Peristiwa	Penyebab	Dampak	Kategori	Uraian	E/KE/TE	Kemungkinan	Dampak	Risiko	Y/T	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
93	Layanan Dukungan Manajemen Internal (Layanan Data dan Informasi) -	E.4.21.MD.7	Pemenuhan Data Perkeretaapian (statistik, geospasial) terlambat disampaikan kepada Pusdatin	Data yang disampaikan tidak valid/berbeda dari sumber lain yang diperoleh, Direktorat terlambat/tidak melakukan pemutakhiran data	Terlambatnya pemenuhan dan publikasi data transportasi Kementerian Perhubungan yang juga digunakan untuk dasar pengambilan kebijakan	Risiko Kepatuhan	Penyampaian permintaan data dan rapat pembahasan berkala	KE	Cukup sering: 6 s.d. 9 kali	92% > Capaian IKU > 87%	Sedang [14]	Ya	93
94	Layanan Manajemen Kinerja Internal (Layanan Manajemen Keuangan) - PNBP	.4.22.MN.1	Laporan Pengawasan dan Pengendalian Eselon I terkait pengelolaan BMN tidak tepat waktu.	1. Keterbatasan pengetahuan SDM; 2. Balai/Satker belum mengajukan Penetapan Status Penggunaan BMN.	Tidak disetujuinya penggunaan BMN oleh Kementerian Keuangan.	Risiko Kepatuhan	Sosialisasi, Surat teguran kepada Balai/ Satker	E	Jarang: 2 kali s.d. 5 kali	97% > Capaian IKU > 92%	Rendah [7]	Tidak	94

RENCANA PENANGANAN RISIKO

Nama Unit Pemilik Risiko : **Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian**
Tahun : **2024**

Prioritas	Kode Risiko	Rencana Penanganan Risiko					Level Risiko Harapan Setelah Mitigasi Risiko		
		Opsi Penanganan Risiko	Uraian Penanganan Risiko	Target Output	Jadwal Implementasi	Pengelola Risiko	Level Kemungkinan	Level Dampak	Level Risiko
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	E.5.1 - Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tematik DJKA tidak terlaksana dengan maksimal.	Mengurangi kemungkinan	1. Revisi terhadap rencana aksi RB Tematik di lingkungan DJKA; 2. Perbaikan/penyesuaian terhadap program RB Tematik terhadap tema-tema yang diangkat.	Target Rencana Aksi dan Pelaksanaan dari LKE RB Tematik	1. Mulai: 01-01-2024 Akhir: 30-09-2024 2. Mulai: 01-01-2024 Akhir: 30-09-2024	Bagian Sumber Daya Manusia dan Umum	2 - Jarang: 2 kali s.d. 5 kali	3 - 92% > Capaian IKU > 87%	Rendah [11]
2	E.4.1 - Usulan Unit Kerja Menuju WBK-WBBM tidak disetujui oleh Kementerian PANRB.	Mengurangi kemungkinan	1. Melakukan sosialisasi terhadap unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian dalam rangka Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK-WBBM; 2. Melakukan monitoring terhadap pemenuhan data dukung pengisian LKE Pembangunan ZI.	Predikat WBK atau WBBM terhadap Unit Kerja yang di nominasikan di lingkungan DJKA	1. Mulai: 01-04-2024 Akhir: 30-11-2024 2. Mulai: 01-04-2024 Akhir: 30-11-2024	Bagian Sumber Daya Manusia dan Umum	2 - Jarang: 2 kali s.d. 5 kali	3 - 92% > Capaian IKU > 87%	Rendah [11]
3	E.4.2 - Ketidaksesuaian Kriteria Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA).	Mengurangi kemungkinan	1. Usulan Penyertaan Diklat Penyusun RKA (Diklat Implementasi Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran dan Diklat Perumusan Klasifikasi Rincian Output/Rincian Output); 2. Menyusun SOP yang mengatur terkait pengusulan anggaran kegiatan yang bersifat Direktif/Mitigasi/Adaptasi.	1. 2 Kegiatan Diklat; 2. SOP terkait pengusulan anggaran kegiatan yang bersifat Direktif/Mitigasi/Adaptasi.	1. Mulai: 01-07-2024 Akhir: 31-12-2024 2. Mulai: 01-07-2024 Akhir: 31-12-2024	Bagian Perencanaan	1 - Sangat jarang: < 2 kali	4 - 87% > Capaian IKU > 80%	Rendah [8]

Prioritas	Kode Risiko	Rencana Penanganan Risiko					Level Risiko Harapan Setelah Mitigasi Risiko		
		Opsi Penanganan Risiko	Uraian Penanganan Risiko	Target Output	Jadwal Implementasi	Pengelola Risiko	Level Kemungkinan	Level Dampak	Level Risiko
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	E.5.2 - Progress Kelengkapan Data Dukung Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) yang rendah pada Aplikasi e-Planning.	Mengurangi kemungkinan	Menyelenggarakan Rapat koordinasi bersama Direktorat Teknis dan Balai di lingkungan Ditjen Perkeretaapian untuk pemenuhan dan pengesahan data dukung	2 Kegiatan Rapat koordinasi	Mulai: 01-04-2024 Akhir: 31-12-2024	Bagian Perencanaan	2 - Jarang: 2 kali s.d. 5 kali	3 - 92% > Capaian IKU > 87%	Rendah [11]
5	E.5.3 - Penyusunan Rencana Strategis Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2025-2029 tidak valid.	Mengurangi kemungkinan	1. Koordinasi intensif dengan Unit Kerja di Lingkungan Setditjen Perkeretaapian; 2. Menyusun matriks *followup* yang harus diisi oleh masing-masing bagian secara berkala	1 Dokumen (Dokumen Matriks *Followup*)	1. Mulai: 01-06-2024 Akhir: 31-12-2024 2. Mulai: 01-06-2024 Akhir: 31-12-2024	Bagian Perencanaan	2 - Jarang: 2 kali s.d. 5 kali	3 - 92% > Capaian IKU > 87%	Rendah [11]
6	E.5.4 - Dokumen Renstra tidak disusun sesuai dengan ketentuan dan substansi yang dibutuhkan.	Mengurangi kemungkinan	Mengikutsertakan tim penyusun Renstra untuk mengikuti Diklat terkait perencanaan strategis dan teknis perkeretaapian baik di bidang LLAKA, Prasarana, Sarana dan Keselamatan bekerja sama dengan lembaga diklat	3 Kegiatan diklat	Mulai: 01-01-2024 Akhir: 30-06-2024	Bagian Perencanaan	1 - Sangat jarang: < 2 kali	4 - 87% > Capaian IKU > 80%	Rendah [8]
12	E.5.7 - Perencanaan, pengukuran dan pelaporan kinerja tidak tepat waktu.	Mengurangi kemungkinan	1. Penyampaian ND/Surat kepada unit kerja yang tidak memenuhi kebutuhan data kinerja sesuai ketentuan; 2. Pengoptimalan Google Docs untuk penyusunan pelaporan termasuk penyajian data; 3. Pembinaan secara langsung pada unit kerja yang hasil penilaian pelaporan masih rendah.	1. ND/Surat Penyapaian kepada unit kerja; 2. Link Google Docs; 3. 1 Kegiatan.	1. Mulai: 01-04-2024 Akhir: 31-12-2024; 2. Mulai: 01-04-2024 Akhir: 31-12-2024; 3. Mulai: 01-07-2024 Akhir: 31-12-2024;	Bagian Perencanaan	2 - Jarang: 2 kali s.d. 5 kali	3 - 92% > Capaian IKU > 87%	Rendah [11]

Prioritas	Kode Risiko	Rencana Penanganan Risiko					Level Risiko Harapan Setelah Mitigasi Risiko		
		Opsi Penanganan Risiko	Uraian Penanganan Risiko	Target Output	Jadwal Implementasi	Pengelola Risiko	Level Kemungkinan	Level Dampak	Level Risiko
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
21	E.5.14 - Monitoring perencanaan dan pengendalian bidang perkeretaapian terlambat/tidak dilaksanakan/tidak optimal	Mengurangi kemungkinan	1. Jadwal Tim Monitoring perencanaan dan pengendalian bidang perkeretaapian ke masing-masing lokasi pekerjaan yang menjadi prioritas; 2. Penyampaian hasil monitoring perencanaan dan pengendalian kepada unit kerja terkait.	1. Jadwal Monitoring; 2. Surat tindak lanjut hasil monitoring perencanaan dan pengendalian.	1. Mulai: 01-04-2024 Akhir: 31-12-2024 2. Mulai: 01-04-2024 Akhir: 31-12-2024	Bagian Perencanaan	1 - Sangat jarang: < 2 kali	4 - 87% > Capaian IKU > 80%	Rendah [8]
22	E.5.15 - Inkonsistensi Data antar Laporan Kinerja dan Publikasi lainnya	Mengurangi kemungkinan	Pengoptimalan Sistem TIK/Database di lingkungan Ditjen Perkeretaapian serta koordinasi rencana pelaporan digital dengan BUPP dan BUPS	Pemanfaatan Sistem TIK/Database	Mulai: 01-09-2024 Akhir: 31-12-2024	Bagian Perencanaan	2 - Jarang: 2 kali s.d. 5 kali	3 - 92% > Capaian IKU > 87%	Rendah [11]
23	E.5.16 - Data untuk bahan rapat pimpinan tidak valid	Mengurangi kemungkinan	Reviu SOP koordinasi penugasan lintas bidang terkait bahan rapat pimpinan	Reviu SOP	Mulai: 01-04-2024 Akhir: 31-05-2024	Bagian Perencanaan	2 - Jarang: 2 kali s.d. 5 kali	3 - 92% > Capaian IKU > 87%	Rendah [11]
24	E.5.17 - Pengusulan rencana pendanaan kerjasama luar negeri kurang komprehensif	Mengurangi kemungkinan	1. Dilakukan rapat pembahasan pada H-7 Deadline bersama unit kerja terkait; 2. Membuat drive tabel ceklis persyaratan data dukung dan folder data dukung pengusulan dan bersurat resmi untuk pengisian pada drive tersebut.	1. Laporan Rapat Hasil Pembahasan serta List Kelengkapan Data Dukung; 2. Surat pengusulan dan drive data dukung.	1. Mulai: 01-01-2024 Akhir: 30-11-2024 2. Mulai: 01-01-2024 Akhir: 30-11-2024	Bagian Perencanaan	1 - Sangat jarang: < 2 kali	4 - 87% > Capaian IKU > 80%	Rendah [8]

Prioritas	Kode Risiko	Rencana Penanganan Risiko					Level Risiko Harapan Setelah Mitigasi Risiko		
		Opsi Penanganan Risiko	Uraian Penanganan Risiko	Target Output	Jadwal Implementasi	Pengelola Risiko	Level Kemungkinan	Level Dampak	Level Risiko
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
25	E.5.18 - Monitoring kegiatan PHLN tidak terlaksana dengan baik	Mengurangi kemungkinan	Melakukan penyusunan risalah/BA rapat pembahasan Monev yang ditandatangani oleh masing-masing KPA/PPK yang berisi komitmen rencana tindak lanjut atas isu	Risalah/BA Rapat Pembahasan dan rencana tindak lanjut yang ditandatangani masing-masing KPA/PPK	Mulai: 01-04-2024 Akhir: 31-12-2024	Bagian Perencanaan	1 - Sangat jarang: < 2 kali	4 - 87% > Capaian IKU > 80%	Rendah [8]
26	E.5.19 - Penilaian, pemantauan dan pelaporan Manajemen Risiko tidak dilaksanakan sesuai ketentuan	Mengurangi kemungkinan	1. Penandatanganan Piagam MR secara simbolis termasuk penetapan Fom 1,5,8 sesuai dengan KM 69 Tahun 2023; 2. Sosialisasi Sistem Informasi MR yang dikelola oleh Itjen Kemenhub; 3. Roadshow/pengecekan langsung ke Balai di lingkungan Ditjen Perkeretaapian untuk evaluasi penerapan MR sesuai dengan KM 69 Tahun 2023.	1. 1 Dokumen 2. 1 Laporan Kegiatan 3. 2 Laporan Kegiatan	1. Mulai: 01-01-2024 Akhir: 31-01-2024 2. Mulai: 01-02-2024 Akhir: 30-03-2024 3. Mulai: 01-09-2024 Akhir: 31-12-2024	Bagian Perencanaan	2 - Jarang: 2 kali s.d. 5 kali	3 - 92% > Capaian IKU > 87%	Rendah [11]
27	E.5.20 - Pengisian Kertas Kerja Penilaian Mandiri Maturitas SPIP tidak lengkap	Mengurangi kemungkinan	Asistensi dengan Itjen dan BPKP	1 Laporan Kegiatan	Mulai: 01-04-2024 Akhir: 31-05-2024	Bagian Perencanaan	2 - Jarang: 2 kali s.d. 5 kali	3 - 92% > Capaian IKU > 87%	Rendah [11]
28	E.4.8 - Pelaporan Pelaksanaan Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) di lingkungan DJKA tidak dilaporkan secara berkala kepada Itjen selaku UPG Instansi	Mengurangi kemungkinan	1. Monitoring pelaksanaan pelaporan gratifikasi di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian; 2. Penyampaian surat edaran pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian; 3. Penyampaian himbauan pencegahan korupsi dan gratifikasi hari besar di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian.	1. 1 Laporan hasil monitoring 2. 1 Surat Edaran 3. 1 Surat Himbauan	1. Mulai: 01-04-2024 Akhir: 31-06-2024 2. Mulai: 01-01-2024 Akhir: 31-03-2024 3. Mulai: 01-04-2024 Akhir: 31-06-2024	Bagian Sumber Daya Manusia dan Umum	2 - Jarang: 2 kali s.d. 5 kali	3 - 92% > Capaian IKU > 87%	Rendah [11]

Prioritas	Kode Risiko	Rencana Penanganan Risiko					Level Risiko Harapan Setelah Mitigasi Risiko		
		Opsi Penanganan Risiko	Uraian Penanganan Risiko	Target Output	Jadwal Implementasi	Pengelola Risiko	Level Kemungkinan	Level Dampak	Level Risiko
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
30	E.4.9 - Tidak tuntasnya rekomendasi atas temuan Itjen, BPK dan BPKP	Mengurangi kemungkinan	Pemutakhiran data Tindak Lanjut temuan Itjen, BPKP dan BPK secara berkala setiap Triwulan	Berita Acara	Mulai: 01-01-2024 Akhir: 31-12-2024	Bagian Keuangan	2 - Jarang: 2 kali s.d. 5 kali	3 - 92% > Capaian IKU > 87%	Rendah (11)
31	E.6.1 - Pegawai tidak mempunyai integritas dan tidak disiplin	Mengurangi kemungkinan	Program pelatihan dan pembinaan yang berfokus pada aspek mental dan spiritual karyawan	Program pelatihan dan pembinaan mental dan spiritual	Mulai: 01-01-2024 Akhir: 31-12-2024	Bagian Sumber Daya Manusia dan Umum	1 - Sangat jarang: < 2 kali	4 - Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) dengan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) kurang dari 25 - 64,99 (25 ≤ x ≤ 64,99)	Rendah (8)
32	E.5.21 - Target PNBP tidak sesuai usulan.	Mengurangi kemungkinan	1. Menggali potensi penerimaan PNBP yang belum terpungut; 2. Mengusulkan revisi kenaikan tarif PNBP pada jenis PNBP tertentu.	Target PNBP terpenuhi.	1. Mulai: 01-01-2024 Akhir: 29-02-2024 2. Mulai: 01-04-2024 Akhir: 31-12-2024	Bagian Keuangan	1 - Sangat jarang: < 2 kali	4 - 87% > Capaian IKU > 80%	Rendah (8)

Prioritas	Kode Risiko	Rencana Penanganan Risiko					Level Risiko Harapan Setelah Mitigasi Risiko		
		Opsi Penanganan Risiko	Uraian Penanganan Risiko	Target Output	Jadwal Implementasi	Pengelola Risiko	Level Kemungkinan	Level Dampak	Level Risiko
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
33	E.6.2 - Pemanfaatan BMN belum optimal.	Mengurangi kemungkinan	Analisis data aset BMN berupa tanah sesuai dengan PP 57 Tahun 1990	Dokumen Analisis Verifikasi ROW	Mulai: 01-01-2024 Akhir: 31-03-2024	Bagian Keuangan	3 - Cukup sering: 6 s.d. 9 kali	2 - Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) dengan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah 76,61 – 88,30 (76,61 ≤ x ≤ 88,30)	Rendah (10)
34	E.4.10 - Pemanfaatan BMN belum dapat diproses.	Mengurangi kemungkinan	Koordinasi terkait pemanfaatan BMN dengan pemohon	Persetujuan pemanfaatan BMN	Mulai: 01-07-2024 Akhir: 31-12-2024	Bagian Keuangan	3 - Cukup sering: 6 s.d. 9 kali	2 - 97% > Capaian IKU > 92%	Rendah (10)
38	E.6.4 - Ketidaksesuaian pencantuman target pada RPD	Mengurangi kemungkinan	Sosialisasi operator/pengelola anggaran untuk menentukan target RPD	1 Kegiatan	Mulai: 01-01-2024 Akhir: 31-03-2024	Bagian Keuangan	2 - Jarang: 2 kali s.d. 5 kali	3 - Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) dengan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah 65 - 76,60 (65 ≤ x ≤ 76,60)	Rendah (11)

Prioritas	Kode Risiko	Rencana Penanganan Risiko					Level Risiko Harapan Setelah Mitigasi Risiko		
		Opsi Penanganan Risiko	Uraian Penanganan Risiko	Target Output	Jadwal Implementasi	Pengelola Risiko	Level Kemungkinan	Level Dampak	Level Risiko
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
39	E.4.13 - Pelaksanaan project tidak sesuai rencana /project tidak dapat dilaksanakan	Mengurangi kemungkinan	Perbaikan *Readiness criteria* usulan kegiatan bidang perkeretaapian melalui revisi PM 112 Tahun 2017	Usulan Revisi PM 112 Tahun 2017.	Mulai: 01-10-2024 Akhir: 31-12-2024	Bagian Keuangan Bagian Perencanaan	2 - Jarang: 2 kali s.d. 5 kali	3 - 92% > Capaian IKU > 87%	Rendah [11]
40	E.4.14 - Kontrak pekerjaan tertunda	Mengurangi kemungkinan	1. Percepatan perbaikan rekomendasi hasil reviu dokumen tender; 2. Bimtek/Diklat Pengelola Anggaran (PPK/Pengadaan Barang dan Jasa).	1. Berita Acara Hasil Reviu; 2. Sertifikat mengikuti bimtek/diklat.	1. Mulai: 01-01-2024 Akhir: 31-03-2024 2. Mulai: 01-01-2024 Akhir: 31-03-2024	1. Bagian Keuangan/Satker 2. Bagian Sumber Daya Manusia dan Umum	1 - Sangat jarang: < 2 kali	4 - 87% > Capaian IKU > 80%	Rendah [8]
41	E.5.23 - Penyerapan anggaran rendah	Mengurangi kemungkinan	1. Revisi/Pengalihan anggaran untuk kegiatan yang lebih prioritas; 2. Percepatan perbaikan rekomendasi hasil reviu dokumen tender; 3. Monitoring laporan harian penyerapan anggaran, serta melakukan pemutakhiran halaman III DIPA secara rutin per Triwulan.	1. Usulan Revisi Anggaran 2. Berita Acara 3. 2 Laporan	1. Mulai: 01-04-2024 Akhir: 31-12-2024 2. Mulai: 01-01-2024 Akhir: 31-03-2024 3. Mulai: 01-04-2024 Akhir: 31-12-2024	1. Bagian Keuangan 2. Satker 3. Bagian Keuangan	3 - Cukup sering: 6 s.d. 9 kali	2 - 97% > Capaian IKU > 92%	Rendah [10]

Prioritas	Kode Risiko	Rencana Penanganan Risiko					Level Risiko Harapan Setelah Mitigasi Risiko		
		Opsi Penanganan Risiko	Uraian Penanganan Risiko	Target Output	Jadwal Implementasi	Pengelola Risiko	Level Kemungkinan	Level Dampak	Level Risiko
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
46	E.2.1 - Terjadinya kebakaran di Kantor Pusat Ditjen Perkeretaapian	Mengurangi kemungkinan	Berpartisipasi dalam pelatihan/simulasi penanganan kebakaran	1 Kegiatan	Mulai: 01-10-2024 Akhir: 31-12-2024	Bagian Sumber Daya Manusia dan Umum	1 - Sangat jarang: < 2 kali	4 - 87% > Capaian IKU > 80%	Rendah [8]
61	E.4.19 - Usulan kegiatan TIK ditolak/tidak memperoleh clearance dari Tim SPBE Nasional.	Mengurangi kemungkinan	1. Melakukan pemantauan data dukung clearance usulan kegiatan TIK secara intensif dan berkala dengan agenda rapat/meeting; 2. Menyusun dokumen justifikasi.	Memperoleh clearance dari Tim SPBE Nasional sesuai jumalah usulan Usulan kegiatan TIK TA 2025	1. Mulai: 01-01-2024 Akhir: 30-06-2024 2. Mulai: 01-01-2024 Akhir: 31-03-2024	Bagian Perencanaan	1 - Sangat jarang: < 2 kali	4 - 87% > Capaian IKU > 80%	Rendah [8]
62	E.5.36 - Aplikasi rusak atau data bocor/hilang akibat serangan cyber/hack	Mengurangi kemungkinan	Update teknologi/framework menjadi versi terkini serta menyesuaikan dengan standart teknologi/keamanan pada sistem sebagaimana kebijakan manajemen keamanan informasi	Termanfaatnya sistem TIK	Mulai: 01-10-2024 Akhir: 31-12-2024	Bagian Perencanaan	1 - Sangat jarang: < 2 kali	4 - 87% > Capaian IKU > 80%	Rendah [8]

Prioritas	Kode Risiko	Rencana Penanganan Risiko					Level Risiko Harapan Setelah Mitigasi Risiko		
		Opsi Penanganan Risiko	Uraian Penanganan Risiko	Target Output	Jadwal Implementasi	Pengelola Risiko	Level Kemungkinan	Level Dampak	Level Risiko
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
63	E.5.37 - Sistem TIK di lingkungan Ditjen Perkeretaapian (Website,Portal Aplikasi,lainnya) tidak dapat diakses	Mengurangi kemungkinan	1. Pemantauan utilitas server secara berkala dengan tools monitoring; 2. Backup/recovery data rutin oleh sistem server.	1. Dokumentasi pemantauan utilitas server; 2. Dokumentasi Backup data.	1. Mulai: 01-01-2024 Akhir: 31-12-2024 2. Mulai: 01-01-2024 Akhir: 31-12-2024	Bagian Perencanaan	1 - Sangat jarang: < 2 kali	4 - 87% > Capaian IKU > 80%	Rendah [8]
64	E.5.38 - Aplikasi tidak optimal pemanfaatannya dikarenakan adanya gangguan sistem.	Mengurangi kemungkinan	Perbaikan dokumen KAK dengan dilengkapi perjanjian maintenance/garansi dalam waktu tertentu	Dokumen KAK	Mulai: 01-03-2024 Akhir: 31-09-2024	Bagian Perencanaan	1 - Sangat jarang: < 2 kali	4 - 87% > Capaian IKU > 80%	Rendah [8]
69	E.4.20 - Penyediaan informasi layanan data tidak update/valid dan terlambat	Mengurangi kemungkinan	1. Reviu SOP/prosedur pengelolaan data; 2. Penyelenggaraan Bimtek pengelolaan data; 3. Pemanfaatan Enterprise Service Bus (ESB) Ditjen Perkeretaapian.	1. Tersedianya 1 SOP yang update; 2. Terlaksananya 1 kegiatan Bimtek; 3. Termanfaatnya 1 sistem TIK.	1. Mulai: 01-06-2024 Akhir: 31-12-2024 2. Mulai: 01-02-2024 Akhir: 31-09-2024 3. Mulai: 01-06-2024 Akhir: 31-12-2024	Bagian Perencanaan	2 - Jarang: 2 kali s.d. 5 kali	3 - 92% > Capaian IKU > 87%	Rendah [11]

Prioritas	Kode Risiko	Rencana Penanganan Risiko					Level Risiko Harapan Setelah Mitigasi Risiko		
		Opsi Penanganan Risiko	Uraian Penanganan Risiko	Target Output	Jadwal Implementasi	Pengelola Risiko	Level Kemungkinan	Level Dampak	Level Risiko
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
70	E.5.43 - Kehilangan/kebocoran data pada Portal Aplikasi Ditjen Perkeretaapian	Mengurangi kemungkinan	Update teknologi/framework menjadi versi terkini serta menyesuaikan dengan standar teknologi/keamanan sebagaimana kebijakan manajemen keamanan informasi pada sistem Portal Aplikasi Ditjen Perkeretaapian	Update 1 sistem TIK	Mulai: 01-04-2024 Akhir: 31-12-2024	Bagian Perencanaan	1 - Sangat jarang: < 2 kali	4 - 87% > Capaian IKU > 80%	Rendah [8]
72	E.5.45 - Pelaksanaan tugas dan fungsi pada unit kerja belum berjalan maksimal	Mengurangi kemungkinan	1. Setiap pegawai diwajibkan mengikuti pelatihan dalam 1 tahun sebanyak 20 JP (Memetakan Kebutuhan Diklat menunjang pelaksanaan tugas); 2. MoU dengan Universitas/Sekolah Tinggi untuk penyelenggaraan Diklat Teknis Perkeretaapian.	Laporan Jumlah Pegawai DJKA yang mengikuti Diklat Teknis Bidang Perkeretaatpian/Manejerial	1. Mulai: 01-01-2024 Akhir: 31-12-2024 2. Mulai: 01-7-2024 Akhir: 31-12-2024	Bagian Sumber Daya Manusia dan Umum	1 - Sangat jarang: < 2 kali	4 - 87% > Capaian IKU > 80%	Rendah [8]
73	E.5.46 - Minimnya pelaksanaan diklat untuk peningkatan kompetensi ASN terkait diklat manajerial	Mengurangi kemungkinan	Memetakan kebutuhan diklat manajerial dan mengusulkan penyertaan diklat kepada Biro SDM/BPSDMP	Pegawai Ditjen KA yang memiliki kompetensi Manajerial	Mulai: 01-01-2024 Akhir: 31-12-2024	Bagian Sumber Daya Manusia dan Umum	1 - Sangat jarang: < 2 kali	4 - 87% > Capaian IKU > 80%	Rendah [8]

Prioritas	Kode Risiko	Rencana Penanganan Risiko					Level Risiko Harapan Setelah Mitigasi Risiko		
		Opsi Penanganan Risiko	Uraian Penanganan Risiko	Target Output	Jadwal Implementasi	Pengelola Risiko	Level Kemungkinan	Level Dampak	Level Risiko
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
74	E.5.48 - Layanan kepegawaian (kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, ujian dinas, database kepegawaian, penyusunan laporan kinerja pegawai, dan lainnya) tidak dilaksanakan dengan baik	Mengurangi kemungkinan	Melakukan Sosialisasi dan survey kepuasan pegawai terkait layanan kepegawaian	1 kegiatan Sosialisasi	Mulai: 01-03-2024 Akhir: 31-10-2024	Bagian Sumber Daya Manusia dan Umum	2 - Jarang: 2 kali s.d. 5 kali	3 - 92% > Capaian IKU > 87%	Rendah (11)
75	E.5.49 - Tidak optimalnya penyelenggaraan jabatan fungsional tertentu bidang perkeretaapian /inpassing	Mengurangi kemungkinan	Setiap pegawai diwajibkan mengikuti pelatihan dalam 1 tahun sebanyak 20 JP	Pegawai Ditjen KA ygang memiliki komptensi teknis/tertentu	Mulai: 01-01-2024 Akhir: 31-12-2024	Bagian Sumber Daya Manusia dan Umum	2 - Jarang: 2 kali s.d. 5 kali	3 - 92% > Capaian IKU > 87%	Rendah (11)
76	E.1.3 - Tidak optimalnya/terlambat/tidak dilakukan pengendalian dan pengawasan terhadap izin teknis	Mengurangi kemungkinan	Sosialisasi terkait peraturan perpotongan dan/atau persinggungan antara jalur KA dengan bangunan lain	1 Kegiatan	Mulai: 01-09-2024 Akhir: 31-12-2024	Bagian Hukum	2 - Jarang: 2 kali s.d. 5 kali	3 - Pihak terpidana adalah Pejabat Eselon III, IV, atau pejabat yang setara, pejabat fungsional, dan pejabat fungsional umum, dan atau Putusan Perdata: 1M< x < 10M Administratif: tergugat merupakan Pejabat Eselon I, atau pejabat yang setara.	Rendah (11)

Prioritas	Kode Risiko	Rencana Penanganan Risiko					Level Risiko Harapan Setelah Mitigasi Risiko		
		Opsi Penanganan Risiko	Uraian Penanganan Risiko	Target Output	Jadwal Implementasi	Pengelola Risiko	Level Kemungkinan	Level Dampak	Level Risiko
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
77	E.5.50 - Sidang ditunda jika tidak ada perwakilan kuasa hukum.	Mengurangi kemungkinan	1. Koordinasi dengan Biro Hukum ketika berhalangan hadir di persidangan, agar Biro Hukum dapat mewakili; 2. Membuat surat kuasa substitusi kepada Balai	1. Laporan proses persidangan; 2. Surat Kuasa Substitusi Kepada Balai.	1. Mulai: 01-01-2024 Akhir: 31-12-2024 2. Mulai: 01-01-2024 Akhir: 31-12-2024	Bagian Hukum	2 - Jarang: 2 kali s.d. 5 kali	3 - 92% > Capaian IKU > 87%	Rendah [11]

Prioritas	Kode Risiko	Rencana Penanganan Risiko					Level Risiko Harapan Setelah Mitigasi Risiko		
		Opsi Penanganan Risiko	Uraian Penanganan Risiko	Target Output	Jadwal Implementasi	Pengelola Risiko	Level Kemungkinan	Level Dampak	Level Risiko
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
78	E.5.51 - Substansi penyusunan peraturan perundang-undangan tidak lengkap/tidak sesuai	Mengurangi kemungkinan	Peningkatan koordinasi dengan unit kerja terkait kesiapan naskah akademis untuk usulan revisi peraturan perundang-undangan	Naskah akademis yang sesuai ketentuan	Mulai: 01-02-2024 Akhir: 30-09-2024	Bagian Hukum	2 - Jarang: 2 kali s.d. 5 kali	3 - 92% > Capaian IKU > 87%	Rendah [11]
79	E.4.21 - Tidak optimalnya/terlambat/tidak dilakukan pengendalian dan pengawasan terhadap izin teknis	Mengurangi kemungkinan	1. Update data perizinan yang telah berlangsung selama 5 tahun (akan/sudah berakhir) yang untuk dilakukan perpanjangan izin secara berkala dengan memgoptimalkan peran Balai; 2. Menyusun jadwal untuk melakukan pengawasan dan berkoordinasi dengan unit kerja terkait (Ditpras dan BTP) terkait lokasi mana saja yang akan ditinjau sesuai dengan SK perizinan.	1. Data Perizinan yang akan/ sudah berakhir masa peizinannya; 2. Berita Acara sebagai dasar untuk menidaklanjuti perizinan yang telah berlangsung selama 5 tahun untuk dilakukan perpanjangan izin.	1. Mulai: 01-08-2024 Akhir: 31-12-2024 2. Mulai: 01-08-2024 Akhir: 31-12-2024	Bagian Hukum	2 - Jarang: 2 kali s.d. 5 kali	3 - 92% > Capaian IKU > 87%	Rendah [11]
85	E.5.53 - Penundaan/pembatalan kegiatan penyusunan kajian kebijakan/standar/pedoman teknis terkait perkeretaapian (NSPK bidang perkeretaapian)	Mengurangi kemungkinan	Percepatan pelaksanaan lelang dan kontrak kegiatan penyusunan kajian kebijakan/standar/pedoman teknis (NSPK bidang perkeretaapian)	Dokumen kontrak kegiatan kajian kebijakan/standar/pedoman teknis (NSPK bidang perkeretaapian)	Mulai: 01-01-2024 Akhir: 30-06-2024	Bagian SDM/Satker Bagian Hukum/Satker	1 - Sangat jarang: < 2 kali	4 - 87% > Capaian IKU > 80%	Rendah [8]

Prioritas	Kode Risiko	Rencana Penanganan Risiko					Level Risiko Harapan Setelah Mitigasi Risiko		
		Opsi Penanganan Risiko	Uraian Penanganan Risiko	Target Output	Jadwal Implementasi	Pengelola Risiko	Level Kemungkinan	Level Dampak	Level Risiko
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
88	E.5.55 - Penundaan/pembatalan kegiatan penyusunan studi /kajian terkait pembinaan dan peningkatan konektivitas perkeretaapian	Mengurangi kemungkinan	Percepatan pelaksanaan lelang dan kontrak kegiatan penyusunan studi/kajian terkait pembinaan dan peningkatan konektivitas perkeretaapian	Dokumen kontrak kegiatan studi/kajian	Mulai: 01-01-2024 Akhir: 30-06-2024	Bagian Perencanaan/Satker	1 - Sangat jarang: < 2 kali	4 - 87% > Capaian IKU > 80%	Rendah [8]
89	E.5.56 - Rekomendasi kebijakan tidak diterima /tidak dimanfaatkan oleh stakeholder eksternal terkait (Pemda, Badan Usaha, lainnya)	Mengurangi kemungkinan	Melakukan monitoring terhadap tindak lanjut rekomendasi stakeholder terkait disetiap tahapan pelaporan	Matriks monitoring tindak lanjut	Mulai: 01-10-2024 Akhir: 31-12-2024	Bagian Perencanaan	2 - Jarang: 2 kali s.d. 5 kali	3 - 92% > Capaian IKU > 87%	Rendah [11]
93	E.4.21 - Pemenuhan Data Perkeretaapian (statistik, geospasial) terlambat disampaikan kepada Pusdatin	Mengurangi kemungkinan	1. Peningkatan monitoring secara berkala dengan lembaran monitoring pemutakhiran data; 2. Pengoptimalan database perkeretaapian pada Portal Aplikasi DJKA	Lembar cheklist monitoring pemutakhiran data	1. Mulai: 01-06-2024 Akhir: 31-12-2024 2. Mulai: 01-10-2024 Akhir: 31-12-2024	Bagian Perencanaan	2 - Jarang: 2 kali s.d. 5 kali	3 - 92% > Capaian IKU > 87%	Rendah [11]

DAFTAR PEMANTAUAN PELAKSANAAN PENANGANAN RISIKO

Nama Unit Pemilik Risiko : **Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian**
Tahun : **2024**
Triwulan : I

Prioritas	Kode Risiko/Pernyataan Risiko	Penanganan Risiko	Penanggung Jawab	Target Output	Realisasi Output	Target Waktu	Realisasi Waktu	Hambatan/Kendala	Link Data Dukung	Keterangan/Status (Sudah/Belum)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	E.5.1 - Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tematik DJKA tidak terlaksana dengan maksimal.	1. Revisi terhadap rencana aksi RB Tematik di lingkungan DJKA; 2. Perbaikan/penyesuaian terhadap program RB Tematik terhadap tema-tema yang diangkat.	Bagian Sumber Daya Manusia dan Umum	Target Rencana Aksi dan Pelaksanaan dari LKE RB Tematik	3 Dokumen (Dokumen Surat Pengisian, LKE RB Tematik DJKA 2024 dan dokumen rapat pembahasan dengan Biro SDM dan BKIP terhadap program RB Tematik).	1. Mulai: 01-01-2024 Akhir: 30-09-2024 2. Mulai: 01-01-2024 Akhir: 30-09-2024	01-Jan-2024 s.d 31-Mar-2024	Tidak ada kendala	https://bit.ly/datadukungMR_TWI_SDMU	**Sudah** 1. Pada TW 1 sudah dilakukan revisi terhadap rencana aksi RB Tematik. 2. Telah dilaksanakan rapat pembahasan dengan Biro SDM dan hasil rapat disampaikan bahwa masih perlu dilakukan perbaikan/penyesuaian terhadap program RB Tematik.
6	E.5.4 - Dokumen Renstra tidak disusun sesuai dengan ketentuan dan substansi yang dibutuhkan.	Mengikutsertakan tim penyusun Renstra untuk mengikuti Diklat terkait perencanaan strategis dan teknis perkeretaapian baik di bidang LLAKA, Prasarana, Sarana dan Keselamatan bekerja sama dengan lembaga diklat	Bagian Perencanaan	3 Kegiatan diklat	1 Kegiatan (Bimbingan Teknis Bidang Lalu Lintas dan Angkutan KA pada Penyusunan Dokumen Renstra)	Mulai: 01-01-2024 Akhir: 30-06-2024	01-Mar-2024 s.d 31-Mar-2024	1. Tidak terdapat kendala; 2. Diklat Bidang Sarana dan Keselamatan rencana realisasi pada TW II Tahun 2024	https://tinyurl.com/DakungE54	**Sudah**
24	E.5.17 - Pengusulan rencana pendanaan kerjasama luar negeri kurang komprehensif	1. Dilakukan rapat pembahasan pada H-7 Deadline bersama unit kerja terkait; 2. Membuat drive tabel ceklis persyaratan data dukung dan folder data dukung pengusulan dan bersurat resmi untuk pengisian pada drive tersebut.	Bagian Perencanaan	1. Laporan Rapat Hasil Pembahasan serta List Kelengkapan Data Dukung; 2. Surat pengusulan dan drive data dukung.	1. 1 Kegiatan (Telah dilaksanakan rapat pengusulan kegiatan untuk Bluebook 2025-2029 - usulan dukungan pembiayaan perkeretaapian metropolitan Bandung) 2. 1 Dokumen (Telah dibuatkan tabel checklist)	1. Mulai: 01-01-2024 Akhir: 30-11-2024 2. Mulai: 01-01-2024 Akhir: 30-11-2024	01-Jan-2024 s.d 31-Mar-2024	Checklist belum terisi secara lengkap karena masih pembahasan awal	https://tinyurl.com/DakungE517	**Sudah**
26	E.5.19 - Penilaian, pemantauan dan pelaporan Manajemen Risiko tidak dilaksanakan sesuai ketentuan	1. Penandatanganan Piagam MR secara simbolis termasuk penetapan Form 1,5,8 sesuai dengan KM 69 Tahun 2023; 2. Sosialisasi Sistem Informasi MR yang dikelola oleh Itjen Kemenhub.	Bagian Perencanaan	1. 1 Dokumen 2. 1 Laporan Kegiatan	2 Kegiatan (Kegaitan Penandatanganan PK secara simbolis termasuk penetapan Form 1,5,8 dan Sosialisasi Pemanfaatan Aplikasi SIMARKO yang dikelola oleh Itjen Kemenhub)	1. Mulai: 01-01-2024 Akhir: 31-01-2024 2. Mulai: 01-02-2024 Akhir: 30-03-2024	01-Jan-2024 s.d 31-Mar-2024	Tidak ada kendala	https://tinyurl.com/DakungE519	**Sudah**

Prioritas	Kode Risiko/Pernyataan Risiko	Penanganan Risiko	Penanggung Jawab	Target Output	Realisasi Output	Target Waktu	Realisasi Waktu	Hambatan/Kendala	Link Data Dukung	Keterangan/Status (Sudah/Belum)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
28	E.4.8 - Pelaporan Pelaksanaan Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) di lingkungan DJKA tidak dilaporkan secara berkala kepada Itjen selaku UPG Instansi	1. Monitoring pelaksanaan pelaporan gratifikasi di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian; 2. Penyampaian surat edaran pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian; 3. Penyampaian himbauan pencegahan korupsi dan gratifikasi hari besar di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian.	Bagian Sumber Daya Manusia dan Umum	1. 1 Laporan hasil monitoring 2. 1 Surat Edaran 3. 1 Surat Himbauan	1 Surat Edaran pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian	1. Mulai: 01-04-2024 Akhir: 31-06-2024 2. Mulai: 01-01-2024 Akhir: 31-03-2024 3. Mulai: 01-04-2024 Akhir: 31-06-2024	01-Jan-2024 s.d 31-Mar-2024	Tidak ada kendala	https://bit.ly/datadukungMR_TWI_SDMU	**Sudah**
30	E.4.9 - Tidak tuntasnya rekomendasi atas temuan Itjen, BPK dan BPKP	Pemutakhiran data Tindak Lanjut temuan Itjen, BPKP dan BPK secara berkala setiap Triwulan	Bagian Keuangan	Berita Acara	12 Berita Acara	Mulai: 01-01-2024 Akhir: 31-12-2024	01-Feb-2024 s.d 31-Mar-2024	1. Pada rapat kegiatan pemantauan tindak lanjut rekomendasi pada LHA maupun LHP belum dapat tuntas seluruhnya dikarenakan masih adanya data dukung yang belum dipenuhi oleh Satker/Balai; 2. Batas waktu tindak lanjut 60 hari sejak LHA terbit.	https://tinyurl.com/DakungE49	**Sudah** 1. Telah dilaksanakan Pemantauan Tindak Lanjut Temuan Inspektorat Jenderal Untuk Wilayah Jakarta pada tanggal 27 - 29 Februari 2024 sesuai surat undangan Sesditjen Perkeretaapian Nomor : PS.302/1/K1/DJKA/2024 tanggal 21 Februari 2024 Hal Undangan; 2. Telah dilaksanakan Pemantauan Tindak Lanjut Laporan Hasil Audit (LHA) ITJEN dan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI pada tanggal 5 - 6 Maret 2024 sesuai undangan rapat Sesitjen Nomor : PS.316/1/3/ITJEN/2024 tanggal 21 Februari 2024 Hal : Undangan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan; 3. Telah dilaksanakan Pemantauan Tindak Lanjut Laporan Hasil Audit (LHA) ITJEN dan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI pada tanggal 26 - 28 Maret 2024 sesuai undangan rapat Sesitjen Nomor : UM.207/4/8/ITJEN/2024 tanggal 22 Maret 2024 Hal : Undangan Kegiatan;
31	E.6.1 - Pegawai tidak mempunyai integritas dan tidak disiplin	Program pelatihan dan pembinaan yang berfokus pada aspek mental dan spiritual karyawan	Bagian Sumber Daya Manusia dan Umum	Program pelatihan dan pembinaan mental dan spiritual	3 Dokumen (Dokumentasi Apel Pagi, Capacity Building dan Siraman Rohani)	Mulai: 01-01-2024 Akhir: 31-12-2024	01-Feb-2024 s.d 31-Mar-2024	Tidak ada kendala	https://bit.ly/datadukungMR_TWI_SDMU	**Sudah**
32	E.5.21 - Target PNBP tidak sesuai usulan.	Menggali potensi penerimaan PNBP yang belum terpungut	Bagian Keuangan	Target PNBP terpenuhi.	1 Kegiatan (Rapat terkait Progres Realisasi PNBP Triwulan I Tahun 2024 dan Proyeksi penerimaan PNBP sampai akhir tahun	Mulai: 01-01-2024 Akhir: 29-02-2024	21-Mar-2024 s.d 22-Mar-2024	Kendala yang sedang dihadapi saat ini yaitu Revisi PP 15 tentang tarif PNBP pada Kementerian Perhubungan yang masih berproses di tingkat PAK	https://drive.google.com/drive/folders/1MXrgOuTnKQD8eroLIRG1x-r063_PRyU?usp=drive_link	**Sudah** 1. Telah dilaksanakan Rekonsiliasi laporan PNBP TW. I bersama seluruh Balai dan Satker di Lingkungan DJKA tanggal 25 Maret 2024 2.Melakukan Monitoring potensi penerimaan atas PNBP/ BLU pada Balai / Satker
33	E.6.2 - Pemanfaatan BMN belum optimal.	Analisis data aset BMN berupa tanah sesuai dengan PP 57 Tahun 1990	Bagian Keuangan	Dokumen Analisis Verifikasi ROW	1 Kegiatan (Rapat koordinasi tanggal 30 Januari 2024 yang dihadiri oleh DJKA, DJKN dan PT KAI untuk membahas sertifikasi)	Mulai: 01-01-2024 Akhir: 31-03-2024	01-Jan-2024 s.d 31-Mar-2024	1. Masih terdapatnya tanah sepanjang jalur KA yang dikuasai oleh pihak lain; 2. Terdapat kendala keterbatasan jumlah sumber daya manusia dalam pelaksanaan sertifikasi; 3. Target penyelesaian sertifikasi 29.130 bidang tanah.	https://tinyurl.com/DakungE62	**Sudah**

Prioritas	Kode Risiko/Pernyataan Risiko	Penanganan Risiko	Penanggung Jawab	Target Output	Realisasi Output	Target Waktu	Realisasi Waktu	Hambatan/Kendala	Link Data Dukung	Keterangan/Status (Sudah/Belum)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
38	E.6.4 - Ketidaksesuaian pencantuman target pada RPD	Sosialisasi operator/pengelola anggaran untuk menentukan target RPD	Bagian Keuangan	1 Kegiatan	1 Kegiatan (Sosialisasi meningkatkan capaian pelaksanaan anggaran dan nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) dengan mengundang DJPB Kemenkeu)	Mulai: 01-01-2024 Akhir: 31-03-2024	07-Mar-2024 s.d 09-Mar-2024	Tidak ada kendala	https://drive.google.com/drive/folders/1tHlV7lNijlKR92dB9wl2sg-hWYlVtmlU?usp=drive_link	**Sudah**
40	E.4.14 - Kontrak pekerjaan tertunda	1. Percepatan perbaikan rekomendasi hasil reviu dokumen tender; 2. Bimtek/Diklat Pengelola Anggaran (PPK/Pengadaan Barang dan Jasa).	1. Bagian Keuangan/Satker 2. Bagian Sumber Daya Manusia dan Umum	1. Berita Acara Hasil Reviu; 2. Sertifikat mengikuti bimtek/diklat.	1. 1 Berita Acara hasil reviu dokumen tender; 2. 2 Dokumen (Surat Tugas Diklat PPK Tipe C dan laporan kegiatan sosialisasi standar biaya masukan dan perjalanan dinas).	1. Mulai: 01-01-2024 Akhir: 31-03-2024 2. Mulai: 01-01-2024 Akhir: 31-03-2024	01-Jan-2024 s.d 29-Feb-2024	Tidak ada kendala	1. https://tinyurl.com/DakungE414 2. Dokumen Pendukung Diklat PPK Tipe C : https://bit.ly/43L6XKQ dan Dokumen pendukung sosialisasi Standar Biaya Masukan dan Perjalanan Dinas : https://bit.ly/4al31TC	**Sudah**

Prioritas	Kode Risiko/Pernyataan Risiko	Penanganan Risiko	Penanggung Jawab	Target Output	Realisasi Output	Target Waktu	Realisasi Waktu	Hambatan/Kendala	Link Data Dukung	Keterangan/Status (Sudah/Belum)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
41	E.5.23 - Penyerapan anggaran rendah	Percepatan perbaikan rekomendasi hasil reviu dokumen tender.	1. Bagian Keuangan 2. Satker 3. Bagian Keuangan	1. Usulan Revisi Anggaran 2. Berita Acara 3. 2 Laporan	Dokumen Berita Acara hasil reviu dokumen tender	Mulai: 01-01-2024 Akhir: 31-03-2024	01-Jan-2024 s.d 31-Mar-2024	Tidak ada kendala	https://tinyurl.com/DakungE523	Sudah
61	E.4.19 - Usulan kegiatan TIK ditolak/tidak memperoleh clearance dari Tim SPBE Nasional.	1. Melakukan pemantauan data dukung clearance usulan kegiatan TIK secara intensif dan berkala dengan agenda rapat/meeting; 2. Menyusun dokumen justifikasi.	Bagian Perencanaan	Memperoleh clearance dari Tim SPBE Nasional sesuai jumalah usulan Usulan kegiatan TIK TA 2025	1. 12 Dokumen (Surat Hasil Lolos Clearance Tim SPBE Nasional); 2. 1 Dokumentasi (Dokumen Rapat Koordinasi dengan Tim SPBE Nasional	1. Mulai: 01-01-2024 Akhir: 30-06-2024 2. Mulai: 01-01-2024 Akhir: 31-03-2024	01-Jan-2024 s.d 31-Mar-2024	Tidak ada kendala	https://tinyurl.com/DakungE419	Sudah
63	E.5.37 - Sistem TIK di lingkungan Ditjen Perkeretaapian (Website,Portal Aplikasi,lainnya) tidak dapat diakses	1. Pemantauan utilitas server secara berkala dengan tools monitoring; 2. Backup/recovery data rutin oleh sistem server.	Bagian Perencanaan	1. Dokumentasi pemantauan utilitas server; 2. Dokumentasi Backup data.	1. 1 Dokumen (Telah dilakukan monitoring utilitas server dibuktikan dengan adanya dokumen pemantauan); 2. 1 Kegiatan (backup/recovery data secara rutin pada server).	1. Mulai: 01-01-2024 Akhir: 31-12-2024 2. Mulai: 01-01-2024 Akhir: 31-12-2024	01-Jan-2024 s.d 31-Mar-2024	Tidak ada kendala	https://tinyurl.com/DakungE537	Sudah
64	E.5.38 - Aplikasi tidak optimal pemanfaatannya dikarenakan adanya gangguan sistem.	Perbaikan dokumen KAK dengan dilengkapi perjanjian maintenance/garansi dalam waktu tertentu	Bagian Perencanaan	Dokumen KAK	2 Dokumen (Dokumen KAK kegiatan telah dilengkapi dengan perjanjian maintenance/garansi)	Mulai: 01-03-2024 Akhir: 31-09-2024	01-Jan-2024 s.d 29-Feb-2024	Tidak ada kendala	https://tinyurl.com/DakungE538	Sudah
69	E.4.20 - Penyediaan informasi layanan data tidak update/valid dan terlambat	Penyelenggaraan Bimtek pengelolaan data	Bagian Perencanaan	Terlaksananya 1 kegiatan Bimtek	1 Kegiatan (Telah dilakukan Rapat Koordinasi serta pembinaan dari BPS terkait pengelolaan Data)	Mulai: 01-02-2024 Akhir: 31-09-2024	01-Feb-2024 s.d 31-Mar-2024	Tidak ada kendala (SOP pengelolaan data dalam proses dengan Pusdatin)	https://tinyurl.com/DakungE420	Sudah
72	E.5.45 - Pelaksanaan tugas dan fungsi pada unit kerja belum berjalan maksimal	Setiap pegawai diwajibkan mengikuti pelatihan dalam 1 tahun sebanyak 20 JP (Memetakan Kebutuhan Diklat menunjang pelaksanaan tugas)	Bagian Sumber Daya Manusia dan Umum	Laporan Jumlah Pegawai DJKA yang mengikuti Diklat Teknis Bidang Perkeretaatpian/Manejerial	1 Dokumen Surat Pemanggilan Peserta Diklat Teknis	Mulai: 01-01-2024 Akhir: 31-12-2024	01-Jan-2024 s.d 29-Feb-2024	Telah dilaksanakan Diklat Kompetensi bekerjasama dengan Lembaga Pendidikan (Ditkes), pelaksanaan diklat sedang berlangsung	https://bit.ly/datadukungMR_TWI_SDMU	Sudah
73	E.5.46 - Minimnya pelaksanaan diklat untuk peningkatan kompetensi ASN terkait diklat manajerial	Memetakan kebutuhan diklat manajerial dan mengusulkan penyertaan diklat kepada Biro SDM/BPSDMP	Bagian Sumber Daya Manusia dan Umum	Pegawai Ditjen KA yang memiliki kompetensi Manajerial	2 dokumen (rekap pegawai yang sudah mengikuti diklat manajerial dan PP 17 tahun 2020)	Mulai: 01-01-2024 Akhir: 31-12-2024	01-Jan-2024 s.d 29-Feb-2024	Data dukung: hasil uji kompetensi, PP 17 Tahun 2020 (kewajiban diklat 20 JP per tahun)	https://bit.ly/datadukungMR_TWI_SDMU	Sudah

Prioritas	Kode Risiko/Pernyataan Risiko	Penanganan Risiko	Penanggung Jawab	Target Output	Realisasi Output	Target Waktu	Realisasi Waktu	Hambatan/Kendala	Link Data Dukung	Keterangan/Status (Sudah/Belum)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
74	E.5.48 - Layanan kepegawaian (kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, ujian dinas, database kepegawaian, penyusunan laporan kinerja pegawai, dan lainnya) tidak dilaksanakan dengan baik	Melakukan Sosialisasi dan survey kepuasan pegawai terkait layanan kepegawaian	Bagian Sumber Daya Manusia dan Umum	1 kegiatan Sosialisasi	2 dokumen (laporan kegiatan sosialisasi SOP Satuan Pelayanan, Tata Naskah, SBM, Pengelolaan Arsip dan Publik Speaking pada bulan 31 Januari - 2 Februari 2024 dan surat tugas pemetaan kompetensi CACT bulan Februari - Maret 2024)	Mulai: 01-03-2024 Akhir: 31-10-2024	01-Jan-2024 s.d 31-Mar-2024	1. Telah dilakukan survey kepuasan layanan kepegawaian pada bulan Januari 2024	https://bit.ly/datadukungMR_TWI_SDMU	Sudah
75	E.5.49 - Tidak optimalnya penyelenggaraan jabatan fungsional tertentu bidang perkeretaapian /inpassing	Setiap pegawai diwajibkan mengikuti pelatihan dalam 1 tahun sebanyak 20 JP	Bagian Sumber Daya Manusia dan Umum	Pegawai Ditjen KA ygang memiliki komptensi teknis/tertentu	2 dokumen (pengumuman hasil uji kompetensi tahap 2 Jabatan fungsional bidang perkeretaapian dan Surat Pemanggilan Diklat Teknis)	Mulai: 01-01-2024 Akhir: 31-12-2024	01-Jan-2024 s.d 31-Mar-2024	Tidak ada kendala	https://bit.ly/datadukungMR_TWI_SDMU	Sudah
77	E.5.50 - Sidang ditunda jika tidak ada perwakilan kuasa hukum.	1. Koordinasi dengan Biro Hukum ketika berhalangan hadir di persidangan, agar Biro Hukum dapat mewakili; 2. Membuat surat kuasa substitusi kepada Balai	Bagian Hukum	1. Laporan proses persidangan; 2. Surat Kuasa Substitusi Kepada Balai.	1. 1 Dokumen (Pada Triwulan I 2024 telah diikuti 3 persidangan); 2. 1 Surat Kuasa Substitusi (Surat Kuasa Substitusi kepada Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Medan untuk mewakili persidangan).	1. Mulai: 01-01-2024 Akhir: 31-12-2024 2. Mulai: 01-01-2024 Akhir: 31-12-2024	01-Jan-2024 s.d 31-Mar-2024	Tidak ada kendala	https://drive.google.com/drive/folders/1b66qQ7GjSFnwL73wJfPgno97eR43bmYs?usp=drive_link	Sudah
78	E.5.51 - Substansi penyusunan peraturan perundang-undangan tidak lengkap/tidak sesuai	Peningkatan koordinasi dengan unit kerja terkait kesiapan naskah akademis untuk usulan revisi peraturan perundang-undangan	Bagian Hukum	Naskah akademis yang sesuai ketentuan	1 Kegiatan (Telah dilaksanakan percepatan penyusunan RPM Trem Otonom (Progres pembahasan tingkat internal DJKA dengan melibatkan BKT dan Akademisi))	Mulai: 01-02-2024 Akhir: 30-09-2024	01-Feb-2024 s.d 31-Mar-2024	Tidak ada kendala	link draft naskah akademik https://bit.ly/DraftPembahasanPeraturanPerUUan dan link dokumen naskah akademik trem otonom https://tinyurl.com/NATremOtonom	Sudah
85	E.5.53 - Penundaan/pembatalan kegiatan penyusunan kajian kebijakan/standar/pedoman teknis terkait perkeretaapian (NSPK bidang perkeretaapian)	Percepatan pelaksanaan lelang dan kontrak kegiatan penyusunan kajian kebijakan/standar/pedoman teknis (NSPK bidang perkeretaapian)	Bagian SDM/Satker Bagian Hukum/Satker	Dokumen kontrak kegiatan kajian kebijakan/standar/pedoman teknis (NSPK bidang perkeretaapian)	2 Dokumen (Surat permohonan pembentukan Pokja lelang dari PPK kepada Biro LPPBMN dan SK Pokja kegiatan)	Mulai: 01-01-2024 Akhir: 30-06-2024	01-Jan-2024 s.d 31-Jan-2024	Pada tahun 2024 terdapat perubahan mekanisme penetapan Pokja sehingga mempengaruhi durasi proses lelang/seleksi menjadi lebih lama	https://tinyurl.com/DakurueE553	Sudah

Prioritas	Kode Risiko/Pernyataan Risiko	Penanganan Risiko	Penanggung Jawab	Target Output	Realisasi Output	Target Waktu	Realisasi Waktu	Hambatan/Kendala	Link Data Dukung	Keterangan/Status (Sudah/Belum)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
88	E.5.55 - Penundaan/pembatalan kegiatan penyusunan studi /kajian terkait pembinaan dan peningkatan konektivitas perkeretaapian	Percepatan pelaksanaan lelang dan kontrak kegiatan penyusunan studi/kajian terkait pembinaan dan peningkatan konektivitas perkeretaapian	Bagian Perencanaan/Satker	Dokumen kontrak kegiatan studi/kajian	2 Dokumen (Surat permohonan pembentukan Pokja lelang dari PPK kepada Biro LPPBMN dan SK Pokja kegiatan)	Mulai: 01-01-2024 Akhir: 30-06-2024	01-Jan-2024 s.d 31-Jan-2024	1. Pada tahun 2024 terdapat 2 kegiatan terdampak AA dan terhadap 2 kegiatan tersebut telah diusulkan kembali pada RKA Pagu Kebutuhan tahun 2025 2. Pada tahun 2024 terdapat perubahan mekanisme penetapan Pokja sehingga mempengaruhi durasi proses lelang/seleksi menjadi lebih lama	https://tinyurl.com/DukungE555	**Sudah**

DAFTAR PEMANTAUAN PELAKSANAAN PENANGANAN RISIKO

Nama Unit Pemilik Risiko : **Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian**
Tahun : **2024**
Triwulan : **I**

Prioritas	Kode Risiko/Pernyataan Risiko	Penanganan Risiko	Penanggung Jawab	Target Output	Realisasi Output	Target Waktu	Realisasi Waktu	Hambatan/Kendala	Link Data Dukung	Keterangan/Status (Sudah/Belum)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	E.5.1 - Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tematik DJKA tidak terlaksana dengan maksimal.	1. Revisi terhadap rencana aksi RB Tematik di lingkungan DJKA; 2. Perbaikan/penyesuaian terhadap program RB Tematik terhadap tema-tema yang diangkat.	Bagian Sumber Daya Manusia dan Umum	Target Rencana Aksi dan Pelaksanaan dari LKE RB Tematik	3 Dokumen (Dokumen Surat Pengisian, LKE RB Tematik DJKA 2024 dan dokumen rapat pembahasan dengan Biro SDM dan BKIP terhadap program RB Tematik).	1. Mulai: 01-01-2024 Akhir: 30-09-2024 2. Mulai: 01-01-2024 Akhir: 30-09-2024	01-Jan-2024 s.d 31-Mar-2024	Tidak ada kendala	https://bit.ly/dataduku ngMR_TWI_SDMU	**Sudah** 1. Pada TW 1 sudah dilakukan revisi terhadap rencana aksi RB Tematik. 2. Telah dilaksanakan rapat pembahasan dengan Biro SDM dan hasil rapat disampaikan bahwa masih perlu dilakukan perbaikan/penyesuaian terhadap program RB Tematik.
6	E.5.4 - Dokumen Renstra tidak disusun sesuai dengan ketentuan dan substansi yang dibutuhkan.	Mengikutsertakan tim penyusun Renstra untuk mengikuti Diklat terkait perencanaan strategis dan teknis perkeretaapian baik di bidang LLAKA, Prasarana, Sarana dan Keselamatan bekerja sama dengan lembaga diklat	Bagian Perencanaan	3 Kegiatan diklat	1 Kegiatan (Bimbingan Teknis Bidang Laiu Lintas dan Angkutan KA pada Penyusunan Dokumen Renstra)	Mulai: 01-01-2024 Akhir: 30-06-2024	01-Mar-2024 s.d 31-Mar-2024	1. Tidak terdapat kendala; 2. Diklat Bidang Sarana dan Keselamatan rencana realisasi pada TW II Tahun 2024	https://tinyurl.com/DakungE54	**Sudah**
24	E.5.17 - Pengusulan rencana pendanaan kerjasama luar negeri kurang komprehensif	1. Dilakukan rapat pembahasan pada H-7 Deadline bersama unit kerja terkait; 2. Membuat drive tabel ceklis persyaratan data dukung dan folder data dukung pengusulan dan bersurat resmi untuk pengisian pada drive tersebut.	Bagian Perencanaan	1. Laporan Rapat Hasil Pembahasan serta List Kelengkapan Data Dukung; 2. Surat pengusulan dan drive data dukung.	1. 1 Kegiatan (Telah dilaksanakan rapat pengusulan kegiatan untuk Bluebook 2025-2029 - usulan dukungan pembiayaan perkeretaapian metropolitan Bandung) 2. 1 Dokumen (Telah dibuatkan tabel checklist)	1. Mulai: 01-01-2024 Akhir: 30-11-2024 2. Mulai: 01-01-2024 Akhir: 30-11-2024	01-Jan-2024 s.d 31-Mar-2024	Checklist belum terisi secara lengkap karena masih pembahasan awal	https://tinyurl.com/DakungE517	**Sudah**
26	E.5.19 - Penilaian, pemantauan dan pelaporan Manajemen Risiko tidak dilaksanakan sesuai ketentuan	1. Penandatanganan Piagam MR secara simbolis termasuk penetapan Form 1,5,8 sesuai dengan KM 69 Tahun 2023; 2. Sosialisasi Sistem Informasi MR yang dikelola oleh Itjen Kemenhub.	Bagian Perencanaan	1. 1 Dokumen 2. 1 Laporan Kegiatan	2 Kegiatan (Kegaitan Penandatanganan PK secara simbolis termasuk penetapan Form 1,5,8 dan Sosialisasi Pemanfaatan Aplikasi SIMARKO yang dikelola oleh Itjen Kemenhub)	1. Mulai: 01-01-2024 Akhir: 31-01-2024 2. Mulai: 01-02-2024 Akhir: 30-03-2024	01-Jan-2024 s.d 31-Mar-2024	Tidak ada kendala	https://tinyurl.com/DakungE519	**Sudah**

Prioritas	Kode Risiko/Pernyataan Risiko	Penanganan Risiko	Penanggung Jawab	Target Output	Realisasi Output	Target Waktu	Realisasi Waktu	Hambatan/Kendala	Link Data Dukung	Keterangan/Status (Sudah/Belum)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
28	E.4.8 - Pelaporan Pelaksanaan Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) di lingkungan DJKA tidak dilaporkan secara berkala kepada Itjen selaku UPG Instansi	1. Monitoring pelaksanaan pelaporan gratifikasi di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian; 2. Penyampaian surat edaran pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian; 3. Penyampaian himbauan pencegahan korupsi dan gratifikasi hari besar di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian.	Bagian Sumber Daya Manusia dan Umum	1. 1 Laporan hasil monitoring 2. 1 Surat Edaran 3. 1 Surat Himbauan	1 Surat Edaran pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian	1. Mulai: 01-04-2024 Akhir: 31-06-2024 2. Mulai: 01-01-2024 Akhir: 31-03-2024 3. Mulai: 01-04-2024 Akhir: 31-06-2024	01-Jan-2024 s.d 31-Mar-2024	Tidak ada kendala	https://bit.ly/datadukungMR_TWI_SDMU	Sudah
30	E.4.9 - Tidak tuntasnya rekomendasi atas temuan Itjen, BPK dan BPKP	Pemutakhiran data Tindak Lanjut temuan Itjen, BPKP dan BPK secara berkala setiap Triwulan	Bagian Keuangan	Berita Acara	12 Berita Acara	Mulai: 01-01-2024 Akhir: 31-12-2024	01-Feb-2024 s.d 31-Mar-2024	1. Pada rapat kegiatan pemantauan tindak lanjut rekomendasi pada LHA maupun LHP belum dapat tuntas seluruhnya dikarenakan masih adanya data dukung yang belum dipenuhi oleh Satker/Balai; 2. Batas waktu tindak lanjut 60 hari sejak LHA terbit.	https://tinyurl.com/DakungE49	Sudah 1. Telah dilaksanakan Pemantauan Tindak Lanjut Temuan Inspektorat Jenderal Untuk Wilayah Jakarta pada tanggal 27 - 29 Februari 2024 sesuai surat undangan Sesditjen Perkeretaapian Nomor : PS.302/1/K1/DJKA/2024 tanggal 21 Februari 2024 Hal Undangan; 2. Telah dilaksanakan Pemantauan Tindak Lanjut Laporan Hasil Audit (LHA) ITJEN dan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI pada tanggal 5 - 6 Maret 2024 sesuai undangan rapat Sesitjen Nomor : PS.316/1/3/ITJEN/2024 tanggal 21 Februari 2024 Hal : Undangan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan; 3. Telah dilaksanakan Pemantauan Tindak Lanjut Laporan Hasil Audit (LHA) ITJEN dan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI pada tanggal 26 - 28 Maret 2024 sesuai undangan rapat Sesitjen Nomor : UM.207/4/8/ITJEN/2024 tanggal 22 Maret 2024 Hal : Undangan Kegiatan;
31	E.6.1 - Pegawai tidak mempunyai integritas dan tidak disiplin	Program pelatihan dan pembinaan yang berfokus pada aspek mental dan spiritual karyawan	Bagian Sumber Daya Manusia dan Umum	Program pelatihan dan pembinaan mental dan spiritual	3 Dokumen (Dokumentasi Apel Pagi, Capacity Building dan Siraman Rohani)	Mulai: 01-01-2024 Akhir: 31-12-2024	01-Feb-2024 s.d 31-Mar-2024	Tidak ada kendala	https://bit.ly/datadukungMR_TWI_SDMU	Sudah
32	E.5.21 - Target PNBP tidak sesuai usulan.	Menggali potensi penerimaan PNBP yang belum terpungut	Bagian Keuangan	Target PNBP terpenuhi.	1 Kegiatan (Rapat terkait Progres Realisasi PNBP Triwulan I Tahun 2024 dan Proyeksi penerimaan PNBP sampai akhir tahun	Mulai: 01-01-2024 Akhir: 29-02-2024	21-Mar-2024 s.d 22-Mar-2024	Kendala yang sedang dihadapi saat ini yaitu Revisi PP 15 tentang tarif PNBP pada Kementerian Perhubungan yang masih berproses di tingkat PAK	https://drive.google.com/drive/folders/1MXrgQuTnKQDBereURG1x-c063_PRvU?usp=drive_link	Sudah 1. Telah dilaksanakan Rekonsiliasi laporan PNBP TW. I bersama seluruh Balai dan Satker di Lingkungan DJKA tanggal 25 Maret 2024 2.Melakukan Monitoring potensi penerimaan atas PNBP/ BLU pada Balai / Satker
33	E.6.2 - Pemanfaatan BMN belum optimal.	Analisis data aset BMN berupa tanah sesuai dengan PP 57 Tahun 1990	Bagian Keuangan	Dokumen Analisis Verifikasi ROW	1 Kegiatan (Rapat koordinasi tanggal 30 Januari 2024 yang dihadiri oleh DJKA, DJKN dan PT KAI untuk membahas sertifikasi)	Mulai: 01-01-2024 Akhir: 31-03-2024	01-Jan-2024 s.d 31-Mar-2024	1. Masih terdapatnya tanah sepanjang jalur KA yang dikuasai oleh pihak lain; 2. Terdapat kendala keterbatasan jumlah sumber daya manusia dalam pelaksanaan sertifikasi; 3. Target penyelesaian sertifikasi 29.130 bidang tanah.	https://tinyurl.com/DakungE62	Sudah

Prioritas	Kode Risiko/Pernyataan Risiko	Penanganan Risiko	Penanggung Jawab	Target Output	Realisasi Output	Target Waktu	Realisasi Waktu	Hambatan/Kendala	Link Data Dukung	Keterangan/Status (Sudah/Belum)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
38	E.6.4 - Ketidaksesuaian pencantuman target pada RPD	Sosialisasi operator/pengelola anggaran untuk menentukan target RPD	Bagian Keuangan	1 Kegiatan	1 Kegiatan (Sosialisasi meningkatkan capaian pelaksanaan anggaran dan nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) dengan mengundang DJPB Kemenkeu)	Mulai: 01-01-2024 Akhir: 31-03-2024	07-Mar-2024 s.d 09-Mar-2024	Tidak ada kendala	https://drive.google.com/drive/folders/1tHlV7lNijIKR92dB9wiZsg-hWYlVLmiU?usp=drive_link	**Sudah**
40	E.4.14 - Kontrak pekerjaan tertunda	1. Percepatan perbaikan rekomendasi hasil reviu dokumen tender; 2. Bimtek/Diklat Pengelola Anggaran (PPK/Pengadaan Barang dan Jasa).	1. Bagian Keuangan/Satker 2. Bagian Sumber Daya Manusia dan Umum	1. Berita Acara Hasil Reviu; 2. Sertifikat mengikuti bimtek/diklat.	1. 1 Berita Acara hasil reviu dokumen tender; 2. 2 Dokumen (Surat Tugas Diklat PPK Tipe C dan laporan kegiatan sosialisasi standar biaya masukan dan perjalanan dinas).	1. Mulai: 01-01-2024 Akhir: 31-03-2024 2. Mulai: 01-01-2024 Akhir: 31-03-2024	01-Jan-2024 s.d 29-Feb-2024	Tidak ada kendala	1. https://tinyurl.com/DakungE414 2. Dokumen Pendukung Diklat PPK Tipe C : https://bit.ly/43L6XKQ dan Dokumen pendukung sosialisasi Standar Biaya Masukan dan Perjalanan Dinas : https://bit.ly/4al31TC	**Sudah**

Prioritas	Kode Risiko/Pernyataan Risiko	Penanganan Risiko	Penanggung Jawab	Target Output	Realisasi Output	Target Waktu	Realisasi Waktu	Hambatan/Kendala	Link Data Dukung	Keterangan/Status (Sudah/Belum)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
41	E.5.23 - Penyerapan anggaran rendah	Percepatan perbaikan rekomendasi hasil reviu dokumen tender.	1. Bagian Keuangan 2. Satker 3. Bagian Keuangan	1. Usulan Revisi Anggaran 2. Berita Acara 3. 2 Laporan	Dokumen Berita Acara hasil reviu dokumen tender	Mulai: 01-01-2024 Akhir: 31-03-2024	01-Jan-2024 s.d 31-Mar-2024	Tidak ada kendala	https://tinyurl.com/DakungE523	Sudah
61	E.4.19 - Usulan kegiatan TIK ditolak/tidak memperoleh clearance dari Tim SPBE Nasional.	1. Melakukan pemantauan data dukung clearance usulan kegiatan TIK secara intensif dan berkala dengan agenda rapat/meeting; 2. Menyusun dokumen justifikasi.	Bagian Perencanaan	Memperoleh clearance dari Tim SPBE Nasional sesuai jumalah usulan Usulan kegiatan TIK TA 2025	1. 12 Dokumen (Surat Hasil Lolos Clearance Tim SPBE Nasional); 2. 1 Dokumentasi (Dokumen Rapat Koordinasi dengan Tim SPBE Nasional	1. Mulai: 01-01-2024 Akhir: 30-06-2024 2. Mulai: 01-01-2024 Akhir: 31-03-2024	01-Jan-2024 s.d 31-Mar-2024	Tidak ada kendala	https://tinyurl.com/DakungE419	Sudah
63	E.5.37 - Sistem TIK di lingkungan Ditjen Perkeretaapian (Website,Portal Aplikasi,lainnya) tidak dapat diakses	1. Pemantauan utilitas server secara berkala dengan tools monitoring; 2. Backup/recovery data rutin oleh sistem server.	Bagian Perencanaan	1. Dokumentasi pemantauan utilitas server; 2. Dokumentasi Backup data.	1. 1 Dokumen (Telah dilakukan monitoring utilitas server dibuktikan dengan adanya dokumen pemantauan); 2. 1 Kegiatan (backup/recovery data secara rutin pada server).	1. Mulai: 01-01-2024 Akhir: 31-12-2024 2. Mulai: 01-01-2024 Akhir: 31-12-2024	01-Jan-2024 s.d 31-Mar-2024	Tidak ada kendala	https://tinyurl.com/DakungE537	Sudah
64	E.5.38 - Aplikasi tidak optimal pemanfaatannya dikarenakan adanya gangguan sistem.	Perbaikan dokumen KAK dengan dilengkapi perjanjian maintenance/garansi dalam waktu tertentu	Bagian Perencanaan	Dokumen KAK	2 Dokumen (Dokumen KAK kegiatan telah dilengkapi dengan perjanjian maintenance/garansi)	Mulai: 01-03-2024 Akhir: 31-09-2024	01-Jan-2024 s.d 29-Feb-2024	Tidak ada kendala	https://tinyurl.com/DakungE538	Sudah
69	E.4.20 - Penyediaan informasi layanan data tidak update/valid dan terlambat	Penyelenggaraan Bimtek pengelolaan data	Bagian Perencanaan	Terlaksananya 1 kegiatan Bimtek	1 Kegiatan (Telah dilakukan Rapat Koordinasi serta pembinaan dari BPS terkait pengelolaan Data)	Mulai: 01-02-2024 Akhir: 31-09-2024	01-Feb-2024 s.d 31-Mar-2024	Tidak ada kendala (SOP pengelolaan data dalam proses dengan Pusdatin)	https://tinyurl.com/DakungE420	Sudah
72	E.5.45 - Pelaksanaan tugas dan fungsi pada unit kerja belum berjalan maksimal	Setiap pegawai diwajibkan mengikuti pelatihan dalam 1 tahun sebanyak 20 JP (Memetakan Kebutuhan Diklat menunjang pelaksanaan tugas)	Bagian Sumber Daya Manusia dan Umum	Laporan Jumlah Pegawai DJKA yang mengikuti Diklat Teknis Bidang Perkeretaatpian/Manajerial	1 Dokumen Surat Penanggilan Peserta Diklat Teknis	Mulai: 01-01-2024 Akhir: 31-12-2024	01-Jan-2024 s.d 29-Feb-2024	Telah dilaksanakan Diklat Kompetensi bekerjasama dengan Lembaga Pendidikan (Ditkes), pelaksanaan diklat sedang berlangsung	https://bit.ly/datadukungMR_TWI_SDMU	Sudah
73	E.5.46 - Minimnya pelaksanaan diklat untuk peningkatan kompetensi ASN terkait diklat manajerial	Memetakan kebutuhan diklat manajerial dan mengusulkan penyertaan diklat kepada Biro SDM/BPSDMP	Bagian Sumber Daya Manusia dan Umum	Pegawai Ditjen KA yang memiliki kompetensi Manajerial	2 dokumen (rekap pegawai yang sudah mengikuti diklat manajerial dan PP 17 tahun 2020)	Mulai: 01-01-2024 Akhir: 31-12-2024	01-Jan-2024 s.d 29-Feb-2024	Data dukung: hasil uji kompetensi, PP 17 Tahun 2020 (kewajiban diklat 20 JP per tahun)	https://bit.ly/datadukungMR_TWI_SDMU	Sudah

Prioritas	Kode Risiko/Pernyataan Risiko	Penanganan Risiko	Penanggung Jawab	Target Output	Realisasi Output	Target Waktu	Realisasi Waktu	Hambatan/Kendala	Link Data Dukung	Keterangan/Status (Sudah/Belum)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
74	E.5.48 - Layanan kepegawaian (kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, ujian dinas, database kepegawaian, penyusunan laporan kinerja pegawai, dan lainnya) tidak dilaksanakan dengan baik	Melakukan Sosialisasi dan survey kepuasan pegawai terkait layanan kepegawaian	Bagian Sumber Daya Manusia dan Umum	1 kegiatan Sosialisasi	2 dokumen (laporan kegiatan sosialisasi SOP Satuan Pelayanan, Tata Naskah, SBM, Pengelolaan Arsip dan Publik Speaking pada bulan 31 Januari - 2 Februari 2024 dan surat tugas pemetaan kompetensi CACT bulan Februari - Maret 2024)	Mulai: 01-03-2024 Akhir: 31-10-2024	01-Jan-2024 s.d 31-Mar-2024	1. Telah dilakukan survey kepuasan layanan kepegawaian pada bulan Januari 2024	https://bit.ly/datadukungMR_TWI_SDMU	Sudah
75	E.5.49 - Tidak optimalnya penyelenggaraan jabatan fungsional tertentu bidang perkeretaapian /inpassing	Setiap pegawai diwajibkan mengikuti pelatihan dalam 1 tahun sebanyak 20 JP	Bagian Sumber Daya Manusia dan Umum	Pegawai Ditjen KA ygang memiliki komptensi teknis/tertentu	2 dokumen (pengumuman hasil uji kompetensi tahap 2 Jabatan fungsional bidang perkeretaapian dan Surat Pemanggilan Diklat Teknis)	Mulai: 01-01-2024 Akhir: 31-12-2024	01-Jan-2024 s.d 31-Mar-2024	Tidak ada kendala	https://bit.ly/datadukungMR_TWI_SDMU	Sudah
77	E.5.50 - Sidang ditunda jika tidak ada perwakilan kuasa hukum.	1. Koordinasi dengan Biro Hukum ketika berhalangan hadir di persidangan, agar Biro Hukum dapat mewakili; 2. Membuat surat kuasa substitusi kepada Balai	Bagian Hukum	1. Laporan proses persidangan; 2. Surat Kuasa Substitusi Kepada Balai.	1. 1 Dokumen (Pada Triwulan I 2024 telah diikuti 3 persidangan); 2. 1 Surat Kuasa Substitusi (Surat Kuasa Substitusi kepada Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Medan untuk mewakili persidangan).	1. Mulai: 01-01-2024 Akhir: 31-12-2024 2. Mulai: 01-01-2024 Akhir: 31-12-2024	01-Jan-2024 s.d 31-Mar-2024	Tidak ada kendala	https://drive.google.com/drive/folders/1b66qQ7GiSFrwJ73wJfPgno97eR43bmY;?usp=drive_link	Sudah
78	E.5.51 - Substansi penyusunan peraturan perundang-undangan tidak lengkap/tidak sesuai	Peningkatan koordinasi dengan unit kerja terkait kesiapan naskah akademis untuk usulan revisi peraturan perundang-undangan	Bagian Hukum	Naskah akademis yang sesuai ketentuan	1 Kegiatan (Telah dilaksanakan percepatan penyusunan RPM Trem Otonom (Progres pembahasan tingkat internal DJKA dengan melibatkan BKT dan Akademisi))	Mulai: 01-02-2024 Akhir: 30-09-2024	01-Feb-2024 s.d 31-Mar-2024	Tidak ada kendala	link draft naskah akademik https://bit.ly/DraftPembahasanPeraturanPerUUan dan link dokumen naskah akademik trem otonom https://tinyurl.com/NATremOtonom	Sudah
85	E.5.53 - Penundaan/pembatalan kegiatan penyusunan kajian kebijakan/standar/pedoman teknis terkait perkeretaapian (NSPK bidang perkeretaapian)	Percepatan pelaksanaan lelang dan kontrak kegiatan penyusunan kajian kebijakan/standar/pedoman teknis (NSPK bidang perkeretaapian)	Bagian SDM/Satker Bagian Hukum/Satker	Dokumen kontrak kegiatan kajian kebijakan/standar/pedoman teknis (NSPK bidang perkeretaapian)	2 Dokumen (Surat permohonan pembentukan Pokja lelang dari PPK kepada Biro LPPBMN dan SK Pokja kegiatan)	Mulai: 01-01-2024 Akhir: 30-06-2024	01-Jan-2024 s.d 31-Jan-2024	Pada tahun 2024 terdapat perubahan mekanisme penetapan Pokja sehingga mempengaruhi durasi proses lelang/seleksi menjadi lebih lama	https://tinyurl.com/DakungE553	Sudah

Prioritas	Kode Risiko/Pernyataan Risiko	Penanganan Risiko	Penanggung Jawab	Target Output	Realisasi Output	Target Waktu	Realisasi Waktu	Hambatan/Kendala	Link Data Dukung	Keterangan/Status (Sudah/Belum)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
88	E.5.55 - Penundaan/pembatalan kegiatan penyusunan studi /kajian terkait pembinaan dan peningkatan konektivitas perkeretaapian	Percepatan pelaksanaan lelang dan kontrak kegiatan penyusunan studi/kajian terkait pembinaan dan peningkatan konektivitas perkeretaapian	Bagian Perencanaan/Satker	Dokumen kontrak kegiatan studi/kajian	2 Dokumen (Surat permohonan pembentukan Pokja lelang dari PPK kepada Biro LPPBMN dan SK Pokja kegiatan)	Mulai: 01-01-2024 Akhir: 30-06-2024	01-Jan-2024 s.d 31-Jan-2024	1. Pada tahun 2024 terdapat 2 kegiatan terdampak AA dan terhadap 2 kegiatan tersebut telah diusulkan kembali pada RKA Pagu Kebutuhan tahun 2025 2. Pada tahun 2024 terdapat perubahan mekanisme penetapan Pokja sehingga mempengaruhi durasi proses lelang/seleksi menjadi lebih lama	https://tinyurl.com/DakungE555	Sudah

PEMANTAUAN TERHADAP PERITIWA RISIKO

Nama Unit Pemilik Risiko : **Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian**
Tahun : **2024**
Triwulan : **I**

Kode	Uraian Peristiwa	Pernyataan Risiko	Waktu Kejadian	Tempat Kejadian	Skor Dampak	Pemicu Peristiwa	Kode Penyebab	Unit Pengelola Risiko
1	2	3	4	5	6	7	8	9
E.5.36.MC.3	Aplikasi rusak atau data bocor/hilang akibat serangan cyber/hack	Website Ditjen Perkeretaapian tidak dapat diakses	01 Maret 2024	Kantor pusat	Sedang [13]	Terdapat celah keamanan pada *upload file* dan serangan *brute force*	- (kode penyebab sama dengan identifikasi awal)	1. Bagian Perencanaan 2. Bagian Keuangan
E.5.55.MY.7	Penundaan/pembatalan kegiatan penyusunan studi /kajian terkait pembinaan dan peningkatan konektivitas perkeretaapian	Pagu anggaran kegiatan penyusunan studi /kajian terkait pembinaan dan peningkatan konektivitas perkeretaapian terblokir	January 2024	Kantor pusat	Tinggi [17]	Terdapat kebijakan Automatic Adjustment sesuai dengan surat Menteri Keuangan Nomor S-1082/MK.02/2023 tanggal 29 Desember 2023 tentang Automatic Adjustment Belanja Kementerian/Lembaga TA 2024	EX (Eksternal)	Bagian Keuangan

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO. 8
JAKARTA 10110

TELP: +62 813-6001-3838

WEBSITE : djka.kemenhub.go.id
EMAIL : ditjenka@kemenhub.goid

Nomor : UM.006/1/1/KA.1/DJKA/2024

Klasifikasi : Biasa

Lampiran : Satu berkas

Hal : Laporan Unit Manajemen Risiko di Lingkungan Setditjen Perkeretaapian Periode Triwulan I Tahun 2024

Jakarta, 5 April 2024

Yth. Sekretaris Direktorat Jenderal Perkeretaapian

selaku Unit Manajemen Risiko Tingkat Direktorat Jenderal Perkeretaapian

Berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 69 Tahun 2023 tentang Manajemen Risiko di Lingkungan Kementerian Perhubungan, dengan ini disampaikan Laporan Pemantauan atas Penyelenggaraan Manajemen Risiko pada Unit Pemilik Risiko Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian Triwulan I Tahun 2024 dengan uraian sebagai berikut:

1. **Dasar Penugasan**

   Keputusan Direktur Jenderal Perkeretaapian Nomor : KP-DJKA 259 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Penerapan Manajemen Risiko di Lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2023.

2. **Tujuan Penugasan**

   Kegiatan penyusunan Laporan Pemantauan Manajemen Risiko bertujuan untuk memberikan umpan balik kepada Pemilik Risiko yang memerlukan solusi/rekomendasi dari Unit Manajemen Risiko/Bagian Perencanaan dalam rangka pencapaian tujuan.

3. **Ruang Lingkup Penugasan**

   Kegiatan pemantauan Manajemen Risiko dilakukan terhadap Unit Pengelola Risiko di lingkungan Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian pada Triwulan I Tahun 2024.

4. **Hasil Pemantauan Manajemen Risiko sampai dengan Triwulan I Tahun 2024 sebagai berikut:**

a. Jumlah risiko yang teridentifikasi sebanyak 94 risiko.

b. Jumlah usulan/tambahan risiko yang teridentifikasi sebanyak 0 risiko. Daftar usulan sebagai berikut:

No.	Nama Usulan Risiko	Usulan Kode Risiko
1.	- *NIHIL* -	

c. Daftar pengendalian yang ada/eksisting:

1) Jumlah risiko yang belum ada pengendalian eksisting sebanyak 1 risiko atau 1% dari jumlah risiko;

2) Jumlah risiko yang sudah ada pengendalian eksisting namun belum efektif/memadai sebanyak 42 risiko atau 44,68% dari jumlah risiko.

d. Jumlah risiko yang berada di atas selera risiko sebanyak 43 risiko (45,74% dari 94 risiko).

e. Jumlah penanganan risiko yang direncanakan sampai dengan Triwulan I Tahun 2024 sebanyak 31 kegiatan. Sedangkan jumlah penanganan Risiko yang telah terealisasi sebanyak 31 atau 100% dari 31 keglatan.

f. Jumlah kejadian risiko yang muncul sampai dengan Triwulan I Tahun 2024 sebanyak 2 kejadian.

Atas perkenan dan petunjuk lanjut Ibu Sesditjen diucapkan terima kasih.

Kepala Bagian Perencanaan
selaku Unit Manajemen Risiko Tingkat
Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian,

Frederik Pongtuluran
NIP 197502252006041001

Tembusan:
Inspektur Investigasi, Inspektorat Jenderal
Kementerian Perhubungan

FORMULIR PROFIL RISIKO (IDENTIFIKASI, ANALISIS DAN EVALUASI RISIKO)

Nama Unit Pengelola Risiko : **Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian**
Priode Penerapan MR : **Triwulan I Tahun 2024**
Sasaran (dalam PK) : **SK 1 - Termanfaatkannya Kebijakan Pembinaan dan peningkatan Perkeretaapian**
SK 2 - Terlaksananya Perumusan Regulasi dan Kebijakan dalam Penyelenggaraan Perkeretaapian
SK 3 - Tersedianya SDM Perkeretaapian yang kompetan dan profesional
SK 4 - Sistem Informasi dan Teknologi yang Andal
SK 5 - Dukungan Publik terhadap Penyelanggaraan Perkeretaapian
SK 6 - Terwujudnya Good Governance dan Clean Government di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian

Bisnis Proses		Pernyataan Risiko					Sistem Pengendalian yang ada		Level			Keputusan Mitigasi	Prioritas
No	Uraian	Kode Risiko	Peristiwa	Penyebab	Dampak	Kategori	Uraian	E/KE/TE	Kemungkinan	Dampak	Risiko	Y/T	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Layanan Dukungan Manajemen Internal (Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal) - AKIP	E.5.1.MD.17	Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tematik DJKA tidak terlaksana dengan maksimal.	1. Penyusunan rencana aksi yang tidak sesuai dengan target capaian RB Tematik DJKA; 2. Adanya kondisi yang tidak mendukung dalam pencapaian target (anggaran tidak mencukupi, adanya wabah penyakit seperti Covid-19, dsb.).	Tidak terpenuhinya target indeks RB dan SAKIP.	Risiko Operasional	Belum Ada Pengendalian Eksisting	TE	Cukup sering: 6 s.d. 9 kali	92% > Capaian IKU > 87%	Sedang [14]	Ya	1
2	Layanan Dukungan Manajemen Internal (Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal) - AKIP	E.4.1.MD.1	Usulan Unit Kerja Menuju WBK-WBBM tidak disetujui oleh Kementerian PANRB.	Tidak terpenuhinya persyaratan dan data dukung dalam Pembangunan WBK-WBBM (LKE Pembangunan	Tidak terpenuhinya target indeks RB dan SAKIP.	Risiko Kepatuhan	Rutin melaksanakan konsultasi dan koordinasi dalam pembangunan ZI terhadap unit kerja yang di nominasikan kepada	KE	Cukup sering: 6 s.d. 9 kali	92% > Capaian IKU > 87%	Sedang [14]	Ya	2
3	Layanan Manajemen Kinerja Internal (Layanan Perencanaan dan Penganggaran) - AKIP	E.4.2.MN.1	Ketidaksesuaian Kriteria Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA).	Kurangnya pemahaman SDM dalam penyusunan RKA yang sesuai ketentuan.	Nilai SAKIP (komponen perencanaan kinerja) tidak dapat terpenuhi (dokumen perencanaan penganggaran/RKA tidak sesuai ketentuan dan tidak mendukung kinerja organisasi).	Risiko Kepatuhan	Sosialisi dan Bimtek penyusunan RKA	KE	Cukup sering: 6 s.d. 9 kali	87% > Capaian IKU > 80%	Tinggi [17]	Ya	3
4	Layanan Manajemen Kinerja Internal (Layanan Perencanaan dan Penganggaran) - AKIP	E.5.2.MR.1	Progress Kelengkapan Data Dukung Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) yang rendah pada Aplikasi e-Planning.	Dokumen Data Dukung Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) belum selesai disusun serta belum ditandatangani pejabat terkait.	Nilai AKIP (komponen perencanaan kinerja) tidak dapat terpenuhi (usulan pelaksanaan kegiatan tertunda karena dokumen perencanaan anggaran/RKA tidak dapat dimanfaatkan secara tepat waktu).	Risiko Operasional	1. Koordinasi dengan PIC masing-masing Balai/Satker melalui komunikasi via whetsapp atau telepon; 2. Pemantauan progress penyusunan data dukung RKA secara intensif dan berkala dengan agenda rapat;	KE	Sering: 10 kali s.d. 12	92% > Capaian IKU > 87%	Tinggi [16]	Ya	4

Bisnis Proses		Pernyataan Risiko					Sistem Pengendalian yang ada		Level			Keputusan Mitigasi	Prioritas
No	Uraian	Kode Risiko	Peristiwa	Penyebab	Dampak	Kategori	Uraian	E/KE/TE	Kemungkinan	Dampak	Risiko	Y/T	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5	Layanan Manajemen Kinerja Internal (Layanan Perencanaan dan Penganggaran) - AKIP	E.5.3.MD.3	Penyusunan Rencana Strategis Sekretariat Direktorat Jenderal Perketaapian Tahun 2025-2029 tidak valid.	1. Tidak memperhitungkan dinamika perubahan kebijakan dan lingkngan strategis yang dapat memengaruhi implementasi Renstra sehingga dapat merugikan validkasnya; 2. Minimnya keterlibatan masing-masing Bagian di lingkungan Setditjen Perkeretaapian; 3. Data atau informasi yang diperoleh tidak akurat; 4. Penetapan target dan indikator kinerja yang tidak memenuhi kriteria SMART, menantang, realistis dan achieveable.	Nilai AKIP (komponen perencanaan kinerja) tidak terpenuhi.	Risiko Operasional	Koordinasi dengan PIC terkait, Pembahasan Kerangka Isu Strategis, Kerangka Pendanaan, Kerangka Regulasi dan Kerangka Kelembagaan Rencana Strategis Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian	KE	Sering: 10 kali s.d. 12	92% > Capaian IKU > 87%	Tinggi [16]	Ya	5
6	Layanan Manajemen Kinerja Internal (Layanan Perencanaan dan Penganggaran) - AKIP	E.5.4.MN.2	Dokumen Renstra tidak disusun sesuai dengan ketentuan dan substansi yang dibutuhkan	Tim penyusun tidak memiliki kompetensi dasar tentang perencanaan strategis dan perkeretaapian.	Nilai SAKIP tidak memenuhi target (aspek kualitas perencanaan kinerja) karena kualitas perencanaan kinerja tahunan tidak valid.	Risiko Operasional	Bimbingan teknis dengan narasumber dari akademisi dan instansi pembina (Bappenas) serta dari Direktorat teknis terkait perkeretaapian	KE	Jarang: 2 kali s.d. 5 kali	87% > Capaian IKU > 80%	Sedang [13]	Ya	6
7	Layanan Manajemen Kinerja Internal (Layanan Perencanaan dan Penganggaran) - AKIP	E.5.5.MD.5	Renstra Ditjen Perkeretaapian dan Setditjen Perkeretaapian tidak sesuai ketentuan dan terlambat penyelesaiannya.	1. Tidak sesuainya dokumen data dukung penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Ditjen Perkeretaapian dan Setditjen Perkeretaapian dengan kebutuhan organisasi, 2. Keterlambatan penyediaan data dukung penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Ditjen Perkeretaapian dan Setditjen Perkeretaapian.	Nilai SAKIP (komponen perencanaan kinerja) tidak dapat terpenuhi.	Risiko Operasional	Rapat koordinasi/konsolidasi data dalam penyusunan Renstra	E	Jarang: 2 kali s.d. 5 kali	92% > Capaian IKU > 87%	Rendah [11]	Tidak	7
8	Layanan Manajemen Kinerja Internal (Layanan Perencanaan dan Penganggaran) - AKIP	E.4.3.MN.2	Ketidaksesuaian dalam Penyusunan Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) bidang Perkeretaapian.	Kurangnya Pemahaman SDM dalam Penyusunan Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) bidang Perkeretaapian disusun berdasarkan target dalam RPJM/Renstra/RIPNAS/direktif.	Nilai SAKIP (komponen perencanaan kinerja) tidak dapat terpenuhi.	Risiko Kepatuhan	Nilai SAKIP (komponen perencanaan kinerja) tidak dapat terpenuhi.	E	Cukup sering: 6 s.d. 9 kali	97% > Capaian IKU > 92%	Rendah [10]	Tidak	8

Bisnis Proses		Pernyataan Risiko					Sistem Pengendalian yang ada		Level			Keputusan Mitigasi	Prioritas
No	Uraian	Kode Risiko	Peristiwa	Penyebab	Dampak	Kategori	Uraian	E/KE/TE	Kemungkinan	Dampak	Risiko	Y/T	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
9	Layanan Manajemen Kinerja Internal (Layanan Perencanaan dan Penganggaran) - AKIP	E.5.6.MD.6	Kurang Efektifnya Penyelenggaraan Sosialisasi dan Bimtek Rencana Kerja Anggaran (RKA).	Penyelenggaraan Sosialisasi dan Bimtek Rencana Kerja Anggaran (RKA) dihadiri oleh sebagian peserta dari Direktorat atau Satker/Balai terkait.	Nilai SAKIP (komponen perencanaan kinerja) tidak dapat terpenuhi (dokumen perencanaan penganggaran/RKA tidak sesuai ketentuan dan tidak mendukung kinerja organisasi).	Risiko Operasional	1. Penyampaian informasi terkait Sosialisasi dan Bimtek RKA jauh sebelum waktu pelaksanaan; 2. Target peserta yang mengikuti Sosialisasi dan Bimtek RKA terdiri dari seluruh satker/balai dan direktorat; 3. Penyampaian materi dan panduan terkait Bimtek RKA kepada seluruh peserta.	E	Cukup sering: 6 s.d. 9 kali	97% > Capaian IKU > 92%	Rendah [10]	Tidak	9
10	Layanan Manajemen Kinerja Internal (Layanan Perencanaan dan Penganggaran) - AKIP	E.4.4.MR.1	Keterlambatan Penginputan Data Dukung Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA).	Data Dukung Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) belum lengkap dibuat atau belum ditandatangan Pejabat terkait.	Nilai SAKIP (komponen perencanaan kinerja) tidak dapat terpenuhi (usulan pelaksanaan kegiatan tertunda karena dokumen perencanaan anggaran/RKA tidak dapat dimanfaatkan secara tepat waktu).	Risiko Kepatuhan	Menyelenggarakan rapat progress penginputan data dukung Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) secara berkala dan berkoordinasi intensif dengan Balai/Satker terkait	E	Cukup sering: 6 s.d. 9 kali	97% > Capaian IKU > 92%	Rendah [10]	Tidak	10
11	Layanan Manajemen Kinerja Internal (Layanan Perencanaan dan Penganggaran) - AKIP	E.4.5.MR.2	Keterlambatan dalam Penyusunan Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) bidang Perkeretaapian.	Dokumen Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) bidang Perkeretaapian belum selesai dibuat atau belum ditandatangan pejabat terkait.	Nilai SAKIP tidak memenuhi target (aspek kualitas perencanaan kinerja) karena kualitas perencanaan kinerja tahunan tidak valid.	Risiko Kepatuhan	1. Penyelenggaraan rapat sosialisasi penyusunan Renja dan RKT, 2. Pemantauan berkala dan koordinasi intensif dengan Direktorat atau Balai/Satker terkait.	E	Jarang: 2 kali s.d. 5 kali	97% > Capaian IKU > 92%	Rendah [7]	Tidak	11
12	Layanan Manajemen Kinerja Internal (Layanan Pemantauan dan Evaluasi) - AKIP	E.5.7.MD.8	Perencanaan, pengukuran dan pelaporan kinerja tidak tepat waktu.	1. Data kinerja yang disampaikan tidak valid/tidak tersedia; 2. Kompilasi dan analisis data termasuk penyusunan laporan (narasi) terlambat disampaikan unit kerja; 3. SDM penyusun laporan tidak memahami terkait substansi perencanaan dan pelaporan kinerja.	Nilai SAKIP Ditjen Perkeretaapian dan Setditjen Perkeretaapian tidak memenuhi target.	Risiko Operasional	1. Pembentukan SK Tim SAKIP; 2. Bimbingan teknis terkait SAKIP secara berkala; 3. Rapat pembahasan penyusunan perencanaan dan pelaporan kinerja dengan seluruh unit kerja (Direktorat, Balai, Bagian); 4. Penyampaian surat tindak lanjut hasil rapat perencanaan dan pelaporan kinerja; 5. Monitoring dan evaluasi pemenuhan dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja secara berkala.	KE	Cukup sering: 6 s.d. 9 kali	92% > Capaian IKU > 87%	Sedang [14]	Ya	12

Bisnis Proses		Pernyataan Risiko					Sistem Pengendalian yang ada		Level			eputusan Mitig	Prioritas
No	Uraian	Kode Risiko	Peristiwa	Penyebab	Dampak	Kategori	Uraian	E/KE/TE	Kemungkinan	Dampak	Risiko	Y/T	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
13	Layanan Manajemen Kinerja Internal (Layanan Pemantauan dan Evaluasi) - AKIP	E.4.6.MN.3	Capaian kinerja tidak memenuhi target tahunan pada Perjanjian Kinerja.	Pemantauan kinerja tidak dilaksanakan rutin/berkala (bulanan/triwulan) oleh unit kerja.	Nilai SAKIP Ditjen Perkeretaapian dan Setditjen Perkeretaapian tidak memenuhi target	Risiko Kepatuhan	1. Rapat pembahasan berkala; 2. Monitoring pemantauan kinerja setiap bulan/triwulan termasuk surat	E	Jarang: 2 kali s.d. 5 kali	92% > Capaian IKU > 87%	Rendah (11)	Tidak	13
14	Layanan Manajemen Kinerja Internal (Layanan Pemantauan dan Evaluasi) - AKIP	E.5.6.MD.14	Perencanaan kinerja belum sesuai dengan ketentuan.	1. Target kinerja yang ditetapkan tidak memenuhi kriteria achievable, menantang dan realistis serta tidak sinkron antar unit kerja; 2. Keterbatasan SDM yang memahami SAKIP; 3. Pimpinan belum terlibat sepenuhnya dalam perencanaan kinerja.	Nilai SAKIP Ditjen Perkeretaapian dan Setditjen Perkeretaapian tidak memenuhi target.	Risiko Operasional	1. Pembentukan SK Tim SAKIP; 2. Bimbingan teknis terkait SAKIP secara berkala; 3. Rapat pembahasan perencanaan kinerja; 4. Penandatanganan Perjanjian Kinerja oleh pimpinan secara langsung.	E	Jarang: 2 kali s.d. 5 kali	92% > Capaian IKU > 87%	Rendah (11)	Tidak	14

Bisnis Proses		Pernyataan Risiko					Sistem Pengendalian yang ada		Level			putusan Mitiga	Prioritas
No	Uraian	Kode Risiko	Peristiwa	Penyebab	Dampak	Kategori	Uraian	E/KE/TE	Kemungkinan	Dampak	Risiko	Y/T	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
15	Layanan Manajemen Kinerja Internal (Layanan Pemantauan dan Evaluasi) - AKIP	E.5.9.MR.4	Evaluasi akuntabilitas internal belum sesuai dengan ketentuan.	1. Data dukung tidak valid dan tidak lengkap/rinci; 2. Keterbatasan SDM yang memahami SAKIP; 3. Keterlibatan pimpinan dalam pelaksanaan	Nilai SAKIP Ditjen Perkeretaapian dan Setditjen Perkeretaapian tidak memenuhi target.	Risiko Operasional	1. Pembentukan SK Tim Evaluasi SAKIP; 2. Bimbingan teknis terkait SAKIP secara berkala; 3. Rapat pembahasan	E	Jarang: 2 kali s.d. 5 kali	92% > Capaian IKU > 87%	Rendah [11]	Tidak	15
16	Layanan Manajemen Kinerja Internal (Layanan Pemantauan dan Evaluasi) - AKIP	E.5.10.MD.1	Pengukuran kinerja belum sesuai dengan ketentuan.	1. Substansi/analisa dalam pelaporan tidak valid dan tidak lengkap/rinci; 2. Keterbatasan SDM yang memahami SAKIP; 3. Hasil Pengukuran belum dapat dimanfaatkan dalam penyesuaian Strategi, Kebijakan, Aktivitas dan Anggaran dalam mencapai kinerja.	Nilai SAKIP Ditjen Perkeretaapian dan Setditjen Perkeretaapian tidak memenuhi target.	Risiko Operasional	1. Pembentukan SK Tim SAKIP; 2. Bimbingan teknis terkait SAKIP secara berkala; 3. Rapat pembahasan pelaporan kinerja; 4. Monitoring dan evaluasi berkala.	E	Jarang: 2 kali s.d. 5 kali	92% > Capaian IKU > 87%	Rendah [11]	Tidak	16
17	Layanan Manajemen Kinerja Internal (Layanan Pemantauan dan Evaluasi) - AKIP	E.5.11.MR.7	Pelaporan kinerja belum sesuai dengan ketentuan.	1. Pengumpulan data kinerja tidak lengkap dan tidak valid; 2. Substansi/analisa dalam pelaporan tidak valid dan tidak lengkap/rinci; 3. Publikasi dokumen pelaporan tidak tepat waktu;	Nilai SAKIP Ditjen Perkeretaapian dan Setditjen Perkeretaapian tidak memenuhi target.	Risiko Operasional	1. Pembentukan SK Tim SAKIP; 2. Bimbingan teknis terkait SAKIP secara berkala; 3. Rapat pembahasan pelaporan kinerja; 4. Penetapan template pelaporan menggunakan	E	Cukup sering: 6 s.d. 9 kali	97% > Capaian IKU > 92%	Rendah [10]	Tidak	17
18	Layanan Manajemen Kinerja Internal (Layanan Pemantauan dan Evaluasi) - AKIP	E.5.12.MN.1	Penilaian SAKIP berbeda antara tim evaluator.	Penilaian bersifat subjektif tim evaluator	Nilai SAKIP Ditjen Perkeretaapian dan Setditjen Perkeretaapian tidak memenuhi target.	Risiko Operasional	Koordinasi dengan balai terkait jangka waktu pengusulan dokumen administratif badan layanan umum	E	Jarang: 2 kali s.d. 5 kali	97% > Capaian IKU > 92%	Rendah [7]	Tidak	18
19	Layanan Manajemen Kinerja Internal (Layanan Pemantauan dan Evaluasi) - AKIP	E.5.13.MD.1	Penyusunan evaluasi Renstra tidak menampilkan data/informasi yang seragam antar unit kerja	Penyelesaian pengukuran capaian kinerja yang berbeda-beda	Dokumen evaluasi Renstra tidak dapat dimanfaatkan untuk perencanaan kinerja	Risiko Operasional	Rapat pembahasan diantaranya menyepakati batas cut off hasil pengukuran capaian kinerja	E	Cukup sering: 6 s.d. 9 kali	97% > Capaian IKU > 92%	Rendah [10]	Tidak	19
20	Layanan Manajemen Kinerja Internal (Layanan Perencanaan dan Penganggaran) - AKIP	E.4.7.MR.3	Keterlambatan Penyampaian Data Dukung Laporan Triwulan Monitoring	Perbedaan Persepsi dan Kesalahan Pengisian Form Laporan Triwulan Monitoring Pinjaman Hibah	Penyampaian Laporan Triwulan Monitoring Pinjaman Hibah Luar Negeri tidak tepat	Risiko Kepatuhan	Koordinasi dengan PIC terkait	E	Jarang: 2 kali s.d. 5 kali	97% > Capaian IKU > 92%	Rendah [7]	Tidak	20
21	Layanan Manajemen Kinerja Internal (Layanan Pemantauan dan Evaluasi) - AKIP	E.5.14.MD.1	Monitoring perencanaan dan pengendalian bidang perkeretaapian terhambat/tidak dilaksanakan/tidak optimal	1. Komposisi tim monev tidak lengkap; 2. Jadwal pelaksanaan monev bersamaan dengan kegiatan lain; 3. Laporan hasil monitoring tidak dimanfaatkan oleh pimpinan.	Tidak terlaksananya kegiatan monitoring perencanaan dan pengendalian bidang perkeretaapian	Risiko Operasional	1. Mengatur jadwal bersama tim untuk monitoring perencanaan dan pengendalian; 2. Penyusunan laporan hasil monitoring.	KE	Cukup sering: 6 s.d. 9 kali	87% > Capaian IKU > 80%	Tinggi [17]	Ya	21

Bisnis Proses		Pernyataan Risiko					Sistem Pengendalian yang ada		Level			Keputusan Mitigasi	Prioritas
No	Uraian	Kode Risiko	Peristiwa	Penyebab	Dampak	Kategori	Uraian	E/KE/TE	Kemungkinan	Dampak	Risiko	Y/T	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
22	Layanan Manajemen Kinerja Internal (Layanan Pemantauan dan Evaluasi) - AKIP	E.S.15.MD.1	Inkonsistensi Data antar Laporan Kinerja dan Publikasi lainnya	Pelaporan memerlukan waktu untuk pengumpulan dan pengolahan data dimana terdapat batas waktu dalam pelaporan kinerja	Tidak optimalnya dukungan data dan informasi publik terkait penyelenggaraan perkeretaapian	Risiko Operasional	1. Melakukan rapat koordinasi pelaporan kinerja guna sinkronisasi data antar unit kerja; 2. Validasi data oleh pejabat penanggung jawab data unit kerja.	KE	Sering: 10 kali s.d. 12	92% > Capaian IKU > 87%	Tinggi (16)	Ya	22
23	Layanan Manajemen Kinerja Internal (Layanan Pemantauan dan Evaluasi) - AKIP	E.S.16.MR.5	Data untuk bahan rapat pimpinan tidak valid	1. Data/materi yang disampaikan unit kerja tidak update; 2. Keterbatasan waktu penyusunan karena undangan atau pemberitahuan rapat mendadak; 3. Terkendala koordinasi lintas unit kerja sehingga sulit mendapatkan data/materi.	Pengambilan keputusan/kebijakan tidak akuntabel	Risiko Operasional	Koordinasi dari Bagian Perencanaan (sebagai simpul data) dengan PIC penyusun bahan masing-masing Bagian dan Direktorat	KE	Cukup sering: 6 s.d. 9 kali	92% > Capaian IKU > 87%	Sedang (14)	Ya	23
24	Layanan Manajemen Kinerja Internal (Layanan Perencanaan dan Penganggaran) - AKIP	E.S.17.MD.1	Pengusulan rencana pendanaan kerjasama luar negeri kurang komprehensif	Data dukung (DIPK, DUK, dokumen kajian serta dokumen lainnya yang dipersyaratkan) pengusulan kegiatan tidak lengkap	Kegiatan PHLN tidak terlaksana sesuai target	Risiko Operasional	Penyampaian informasi dan konfirmasi lebih awal kepada unit kerja yang mengusulkan kegiatan PHLN perihal persyaratan data dukung yang dibutuhkan	KE	Jarang: 2 kali s.d. 5 kali	87% > Capaian IKU > 80%	Sedang (13)	Ya	24
25	Layanan Manajemen Kinerja Internal (Layanan Pemantauan dan Evaluasi) - AKIP	E.S.18.MD.1	Monitoring kegiatan PHLN tidak terlaksana dengan baik	Terdapat isu/kendala yang tidak terbahas saat perencanaan dan monitoring kegiatan PHLN	Kegiatan PHLN tidak terlaksana sesuai target	Risiko Operasional	Menyusun daftar pembahasan isu/kendala sebelum pelaksanaan monitoring	KE	Jarang: 2 kali s.d. 5 kali	87% > Capaian IKU > 80%	Sedang (13)	Ya	25
26	Layanan Manajemen Kinerja Internal (Layanan Pemantauan dan Evaluasi) - SPIP	E.S.19.MN.3	Penilaian, pemantauan dan pelaporan Manajemen Risiko tidak dilaksanakan sesuai ketentuan	1. Kurangnya SDM (Pengelola Risiko) yang memiliki pemahaman/kompetensi terkait MR; 2. Kurangnya kesadaran SDM terkait pentingnya manajemen risiko.	Tingkat maturitas SPIP terintegrasi tidak memenuhi target	Risiko Operasional	1. Pendidikan/Pelatihan/Bimtek/Seminar terkait Manajemen Risiko; 2. Sosialisasi terkait Manajemen Risiko pada masing-masing pegawai; 3. Koordinasi dengan PIC masing-masing Bagian/Balai/Direktorat.	KE	Sering: 10 kali s.d. 12	92% > Capaian IKU > 87%	Tinggi (16)	Ya	26
27	Layanan Manajemen Kinerja Internal (Layanan Pemantauan dan Evaluasi) - SPIP	E.S.20.MR.5	Pengisian Kertas Kerja Penilaian Mandiri Maturitas SPIP tidak lengkap	Data dukung penilaian mandiri maturitas SPIP tidak terdokumentasi dengan baik	Tingkat Maturitas SPIP Terintegrasi tidak memenuhi target	Risiko Operasional	1. Membuat google drive sebagai tempat penyimpanan data dukung; 2. Peningkatan monitoring secara berkala dengan lembaran monitoring pengumpulan data dukung.	KE	Cukup sering: 6 s.d. 9 kali	92% > Capaian IKU > 87%	Sedang (14)	Ya	27

Bisnis Proses		Pernyataan Risiko					Sistem Pengendalian yang ada		Level			putusan Mitig	Prioritas
No	Uraian	Kode Risiko	Peristiwa	Penyebab	Dampak	Kategori	Uraian	E/KE/TE	Kemungkinan	Dampak	Risiko	Y/T	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
28	Layanan Dukungan Manajemen Internal (Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal) - SPIP	E.4.8.MN.4	Pelaporan Pelaksanaan Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) di lingkungan DJKA tidak dilaporkan secara berkala kepada Ijen selaku UPG Instansi	Kurangnya kesadaran/pemahaman Unit Kerja untuk melaporkan pelaksanaan UPG setiap triwulan dalam setahun	Tidak terlaksananya pengendalian intern dalam rangka penilaian SPIP	Risiko Kepatuhan	1. Melakukan Sosialisasi minimal 1 kali dalam 1 tahun; 2. Menandatangani pernyataan gratifikasi setiap semestemya.	KE	Cukup serung: 6 s.d. 9 kali	92% > Capaian IKU > 87%	Sedang (14)	Ya	28
29	Layanan Manajemen Kinerja Internal (Layanan Manajemen Keuangan) - SPIP	E.1.1.MN.1	Kurangnya aspek good governance dan clean government dalam pelaksanaan kegiatan dan anggaran	Rendahnya integritas dan kompetensi SDM pengelola anggaran	Tingkat maturitas SPIP terintegrasi tidak memenuhi target	Risiko Hukum	Monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran secara berkala	E	Sangat jarang: < 2 kali	Pihak terpidana adalah Pejabat Eselon I, II atau pejabat yang setara, dan atau Putusan Perdata: 10M < x ≤ 100M Administratif: tergugat merupakan Menteri	Rendah (8)	Tidak	29

Bisnis Proses		Pernyataan Risiko					Sistem Pengendalian yang ada		Level			Keputusan Mitigasi	Prioritas
No	Uraian	Kode Risiko	Peristiwa	Penyebab	Dampak	Kategori	Uraian	E/KE/TE	Kemungkinan	Dampak	Risiko	Y/T	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
30	Layanan Manajemen Kinerja Internal (Layanan Manajemen Keuangan) - SPIP	E.4.9.MD.2	Tidak tuntasnya rekomendasi atas temuan Itjen, BPK dan BPKP	1. Data dukung tidak terpenuhi untuk tindak lanjut rekomendasi temuan Itjen, BPKP dan BPK; 2. Kurangnya kesadaran Balai/Satker untuk menyelesaikan rekomendasi tindak lanjut dari Auditor (Pemeriksa internal maupun Eksternal)	Tingkat kepatuhan dan sistem pengendalian intern kurang optimal	Risiko Kepatuhan	1. Melakukan Koordinasi dan Monitoring kepada Balai/Satker terkait tindak lanjut atas rekomendasi temuan Itjen, BPK dan BPKP 2. Surat Edaran kepada Balai/Satker untuk menindaklanjuti temuan dan rekomendasi yang belum selesai	KE	Sering: 10 kali s.d 12	92% > Capaian IKU > 87%	Tinggi (16)	Ya	30
31	Layanan Dukungan Manajemen Internal (Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal) - SPIP	E.6.1.MD.1	Pegawai tidak mempunyai integritas dan tidak disiplin	Kurangnya pelaksanaan pembinaan mental dan spiritual pegawai	Kinerja dan reputasi organisasi menurun	Risiko Reputasi	Sosialisasi dan koordinasi dengan pihak terkait	KE	Jarang: 2 kali s.d. 5 kali	Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) dengan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) kurang dari 25 - 64,99 (25 ≤ x ≤ 64,99)	Sedang (13)	Ya	31
32	Layanan Manajemen Kinerja Internal (Layanan Manajemen Keuangan) - PNBP	E.5.2.1.EX.1	Target PNBP tidak sesuai usulan.	Penambahan target PNBP dari hasil rapat bersama dengan Sekjen/Kemenkeu/DPR.	Tidak tercapainya target PNBP.	Risiko Operasional	Mengoptimalkan realisasi PNBP yang ada.	KE	Cukup sering: 6 s.d. 9 kali	87% > Capaian IKU > 80%	Tinggi (17)	Ya	32
33	Layanan Manajemen Kinerja Internal (Layanan Manajemen Keuangan) - PNBP	E.6.2.MN.1	Pemanfaatan BMN belum optimal.	Belum terlaksananya sertifikasi terhadap aset prasarana perkeretaapian karena terdapat dua pengakuan aset antara DJKA dan PT. KAI.	Tidak tercapainya target PNBP.	Risiko Reputasi	Sertifikasi lahan BMN perkeretaapian	KE	Sering: 10 kali s.d. 12	Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) dengan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah 76,61 – 88,30 (76,61 ≤ x ≤ 88,30)	Sedang (12)	Ya	33
34	Layanan Manajemen Kinerja Internal (Layanan Manajemen Keuangan) - PNBP	E.4.10.MD.3	Pemanfaatan BMN belum dapat diproses.	1. Permohonan belum memenuhi persyaratan pemanfaatan BMN sesuai ketentuan; 2. Kurangnya koordinasi	Tidak tercapainya target PNBP.	Risiko Kepatuhan	Berita acara tinjauan lapangan bersama	KE	Sering: 10 kali s.d. 12	97% > Capaian IKU > 92%	Sedang (12)	Ya	34
35	Layanan Manajemen Kinerja Internal (Layanan Manajemen Keuangan) – PNBP	E.6.3.MN.2	Kesalahan pencantuman jenis akun PNBP.	Kesalahan penginputan dikarenakan SDM kurang teliti.	Tidak tercapainya target PNBP.	Risiko Reputasi	Koordinasi rutin dengan Balai terkait.	E	Jarang: 2 kali s.d. 5 kali	97% > Capaian IKU > 92%	Rendah (7)	Tidak	35
36	Layanan Manajemen Kinerja Internal (Layanan Manajemen Keuangan) - PNBP	E.5.22.MC.1	Adanya perubahan saldo dalam persediaan dan aset yang tidak sesuai dengan pencatatan awal.	Aplikasi SAKTI dalam transaksi aset dan persediaan mengalami bug system atau dalam proses updating system	Pencatatan aset tidak valid/tidak sesuai.	Risiko Operasional	Koordinasi dengan DJPB/ KPPN terkait dengan pembaharuan sistem	E	Jarang: 2 kali s.d. 5 kali	97% > Capaian IKU > 92%	Rendah (7)	Tidak	36
37	Layanan Manajemen Kinerja Internal (Layanan Manajemen Keuangan) - PNBP	E.4.12.MN.6	Penyampaian dokumen administrasi badan layanan umum tidak tepat waktu	Kurangnya pemahaman Balai dalam menyusun dokumen administrasi badan layanan umum.	Tidak berjalannya fungsi BLU.	Risiko Kepatuhan	Koordinasi dengan balai terkait jangka waktu pengusulan dokumen administratif badan layanan umum	E	Jarang: 2 kali s.d. 5 kali	97% > Capaian IKU > 92%	Rendah (7)	Tidak	37

Bisnis Proses		Pernyataan Risiko					Sistem Pengendalian yang ada		Level			Keputusan Mitigasi	Prioritas
No	Uraian	Kode Risiko	Peristiwa	Penyebab	Dampak	Kategori	Uraian	E/KE/TE	Kemungkinan	Dampak	Risiko	Y/T	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
38	Layanan Manajemen Kinerja Internal (Layanan Manajemen Keuangan) - ANGGARAN	E.6.4.MN.3	Ketidaksesuaian pencantuman target pada RPD	Kurang memahaminya operator dalam menentukan target RPD	Tidak Tercapainya Target Nilai Kinerja Anggaran	Risiko Reputasi	Evaluasi Pelaksanaan Anggaran	KE	Cukup sering: 6 s.d. 9 kali	Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) dengan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah 65 - 76,60 (65 ≤ x ≤ 76,60)	Sedang (14)	Ya	38
39	Layanan Manajemen Kinerja Internal (Layanan Manajemen Keuangan) - ANGGARAN	E.4.13.MR.4	Pelaksanaan project tidak sesuai rencana /project tidak dapat dilaksanakan	*Readiness criteria* (aspek administrasi dan teknis) tidak siap	Target kualitas pelaksanaan anggaran tidak terpenuhi (capaian komponen penyerapan anggaran dan komponen capaian output rendah)	Risiko Kepatuhan	1. Percepatan revisi administrasi DIPA (untuk kegiatan SBSN dengan skema luncuran, pengembalian pinjam pagu, dll); 2. Percepatan proses penetapan kontra tahun jamak (perpanjangan, rekomposisi); 3. Percepatan progres	KE	Jarang: 2 kali s.d. 5 kali	87% > Capaian IKU > 80%	Sedang (15)	Ya	39
40	Layanan Manajemen Kinerja Internal (Layanan Manajemen Keuangan) - ANGGARAN	E.4.14.MD.4	Kontrak pekerjaan tertunda	1. Dokumen tender tidak sesuai ketentuan; 2. Pelaksanaan tender tidak sesuai rencana; 3. Kesiapan SDM Pengelola Anggaran.	Target kualitas pelaksanaan anggaran tidak terpenuhi (komponen penyerapan anggaran dan komponen capaian output rendah)	Risiko Kepatuhan	1. Persiapan dokumen administrasi dan teknis yang sesuai ketentuan; 2. Koordinasi aktif untuk permohonan Pokja guna percepatan pelaksanaan tender.	KE	Jarang: 2 kali s.d. 5 kali	87% > Capaian IKU > 80%	Sedang (13)	Ya	40
41	Layanan Manajemen Kinerja Internal (Layanan Manajemen Keuangan) - ANGGARAN	E.5.23.MR.6	Penyerapan anggaran rendah	1. Dokumen perencanaan teknis/lahan belum siap; 2. Keterlambatan lelang akibat penolakan Pokja Biro LPPBMN dan dokumen telang; 3. Lamanya proses administrasi (permohonan MYC, permohonan kontrak, penetapan pemenang, dll).	Tidak Tercapainya Target Kualitas Pelaksanaan Anggaran/Nilai Kinerja Anggaran	Risiko Operasional	1. Rapat kesiapan pelaksanaan anggaran; 2. Percepatan dokumen tender; 3. Koordinasi persiapan kegiatan dengan Satker (memastikan kesiapan perencanaan teknis, lahan, lainnya) serta stakeholder lainnya terkait percepatan administrasi; 4. Monitoring dan Evaluasi Pelaksananaan Anggaran.	KE	Sering: 10 kali s.d. 12	97% > Capaian IKU > 92%	Sedang (12)	Ya	41
42	Layanan Manajemen Kinerja Internal (Layanan Manajemen Keuangan) - ANGGARAN	E.4.15.MN.7	Terdapat kesalahan penggunaan akun dalam pembayaran belanja	1. Kurang pahamnya pengetahuan personil terkait akun yang seharusnya digunakan; 2. Sering bergantinya personil yang menangani proses pencairan anggaran belanja	Target terwujudnya Good Governance dan Clean Government tidak terpenuhi karena pembayaran belanja tidak akuntabel.	Risiko Kepatuhan	Mengadakan Sosialisasi terkait Bagan Akun Standar kepada Balai/Satker di Lingkungan Ditjen Perkeretaapian	E	Cukup sering: 6 s.d. 9 kali	97% > Capaian IKU > 92%	Rendah (10)	Tidak	42
43	Layanan Sarana dan Prasarana Internal (Layanan Prasarana Internal) - PERKANTORAN	E.5.24.MY.1	Kegiatan pendukung layanan manajemen keuangan tidak dapat dilaksanakan.	Alokasi anggaran tidak mencukupi.	Kinerja layanan manajemen keuangan tidak optimal.	Risiko Operasional	Revisi anggaran	E	Jarang: 2 kali s.d. 5 kali	97% > Capaian IKU > 92%	Rendah (7)	Tidak	43

Bisnis Proses		Pernyataan Risiko					Sistem Pengendalian yang ada		Level			putusan Mitig	Prioritas
No	Uraian	Kode Risiko	Peristiwa	Penyebab	Dampak	Kategori	Uraian	E/KE/TE	Kemungkinan	Dampak	Risiko	Y/T	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
44	Layanan Sarana dan Prasarana Internal (Layanan Prasarana Internal) - PERKANTORAN	E.6.5.MD.2	Proses usulan revisi anggaran ditolak	Penyampaian data dukung tidak sesuai dan tidak tepat waktu	Target persentase kualitas pelaksanaan anggaran tidak terpenuhi karena penyerapan anggaran tidak optimal.	Risiko Reputasi	Koordinasi dengan satker dan balai yang mengajukan revisi anggaran	E	Jarang: 2 kali s.d. 5 kali	Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) dengan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah 76.61 – 88,30 (76,61 ≤ x ≤ 88,30)	Rendah [7]	Tidak	44
45	Layanan Manajemen Kinerja Internal (Layanan Manajemen Keuangan) - ANGGARAN	E.6.6.MN.4	Pelaksanaan kegiatan manajemen keuangan tidak sesuai dengan jadwal kegiatan	Adanya penugasan lain dari pimpinan	Kinerja layanan manajemen keuangan tidak optimal.	Risiko Reputasi	Revisi jadwal kegiatan	E	Jarang: 2 kali s.d. 5 kali	Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) dengan minimal Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah 88,31(x ≥ 88,31)	ngat Rendah [	Tidak	45
46	Layanan Sarana dan Prasarana Internal (Layanan Prasarana Internal) - PERKANTORAN	E.2.1.MC.1	Terjadinya kebakaran di Kantor Pusat Ditjen Perkeretaapian	1. Kondisi fasilitas kelistrikan yang tidak aman. 2. Pengecekan kondisi gedung, bangunan dan fasilitas kantor jarang dilakukan.	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan perkantoran tidak mencapai target (akibat adanya kerugian material dan operasional perkantoran tidak dapat berlangsung)	Risiko Bencana	Himbauan untuk memperhatikan kondisi gedung, bangunan dan fasilitas perkantoran.	KE	Sangat Jarang: < 2 kali	80% > Capaian IKU > 70%	angat Tinggi [2	Ya	46
47	Layanan Sarana dan Prasarana Internal (Layanan Prasarana Internal) - PERKANTORAN	E.5.25.MR.7	Hasil renovasi gedung dan bangunan tidak sesuai kebutuhan/tidak ergonomis	Desain renovasi tidak memperhatikan kenyamanan dan keselamatan pegawai	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan perkantoran rendah karena operasional perkantoran terganggu/tidak dapat berjalan dengan optimal	Risiko Operasional	Melakukan perencanaan dan rapat secara berkala dengan pihak vendor dan stakeholder terkait serta melakukan jadwal pemantauan selama progres pekerjaan	E	Sangat Jarang: < 2 kali	92% > Capaian IKU > 87%	ngat Rendah [	Tidak	47
48	Layanan Sarana dan Prasarana Internal (Layanan Sarana Internal) - PERKANTORAN	E.5.26.MY.2	Jumlah kendaraan operasional tidak mencukupi jumlah yang direncanakan/diburuhkan	Anggaran pengadaan kendaraan tidak mencukupi/tersedia	Terganggunya operasional perkantoran.	Risiko Operasional	1. Sewa kendaraan operasional; 2. Usulan pengadaan kendaraan operasional baru dengan terlebih dahulu mengusulkan pengahapusan aset kendaraan operasional.	E	Cukup sering: 6 s.d 9 kali	97% > Capaian IKU > 92%	Rendah [10]	Tidak	48
49	Layanan Sarana dan Prasarana Internal (Layanan Sarana Internal) - PERKANTORAN	E.5.27.MC.2	Kendaraan operasional tidak dapat digunakan.	1. Kerusakan pada mesin/sparepart karena operasional sehari-hari; 2. Perawatan kendaraan tidak dilaksanakan secara rutin; 3. Anggaran perawatan tidak mencukupi.	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan perkantoran tidak mencapai target karena adanya gangguan operasional.	Risiko Operasional	Melakukan pemeriksaan dan pemeliharaan rutin pada kendaraan operasional	E	Jarang: 2 kali s.d. 5 kali	97% > Capaian IKU > 92%	Rendah [7]	Tidak	49

Bisnis Proses		Pernyataan Risiko					Sistem Pengendalian yang ada		Level			Keputusan Mitigasi	Prioritas
No	Uraian	Kode Risiko	Peristiwa	Penyebab	Dampak	Kategori	Uraian	E/KE/TE	Kemungkinan	Dampak	Risiko	Y/T	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
50	Layanan Dukungan Manajemen Internal (Layanan Perkantoran) - PERKANTORAN	E.5.29.MY.3	Terlambatnya pembayaran gaji dan tunjangan kinerja pegawai.	Terjadi pemotongan anggaran untuk gaji dan tunjangan pegawai.	Tingkat kepuasan layanan perkantoran rendah.	Risiko Operasional	Melakukan pemantauan pada anggaran belanja Pegawai dan mengajukan revisi anggaran belanja pegawai lebih awal.	E	Jarang: 2 kali s.d. 5 kali	92% > Capaian IKU > 87%	Rendah [11]	Tidak	50
51	Layanan Dukungan Manajemen Internal (Layanan Perkantoran) - PERKANTORAN	E.5.29.MD.1	Fasilitas perkantoran tidak memenuhi kebutuhan pegawai dalam melaksanakan tugas (rusak atau tidak tersedia).	1. Perawatan fasilitas kantor tidak dilaksanakan sesuai ketentuan/jadwal; 2. Pengadaan fasilitas kantor tidak dilaksanakan sesuai kebutuhan.	Tingkat kepuasan layanan perkantoran (rumah tangga/umum) rendah.	Risiko Operasional	1. Melakukan pemeliharaan secara berkala dan berkoordinasi dengan tim Biro Umum terkait kerusakan fasilitas perkantoran/gedung; 2. Inventarisasi kebutuhan pegawai terkait fasilitas perkantoran; 3. Usulan dan pelaksanaan kegiatan untuk pengadaan fasilitas perkantoran.	E	Jarang: 2 kali s.d. 5 kali	92% > Capaian IKU > 87%	Rendah [11]	Tidak	51
52	Layanan Dukungan Manajemen Internal (Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal) - PERKANTORAN	E.5.30.MN.4	Prosedur persuratan / kearsipan tidak berjalan dengan baik diantaranya menyebabkan arsip hilang atau rusak	Pengelolaan persuratan/kearsipan yang belum terintegrasi secara elektronik (mulai dari proses pembuatan surat, penandatanganan, pengiriman, termasuk penyimpanan dokumen (kearsipan) yang tidak efisien dan tidak terstruktur)	Tingkat kepuasan layanan perkantoran (ketatausahaan) rendah.	Risiko Operasional	Dokumen persuratan/ arsip dipindai selanjutnya diinput pada aplikasi Portal DIKA, sambil menunggu aplikasi SRIKANDI digunakan secara penuh	E	Jarang: 2 kali s.d. 5 kali	92% > Capaian IKU > 87%	Rendah [11]	Tidak	52
53	Layanan Dukungan Manajemen Internal (Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal) - PERKANTORAN	E.5.31.MN.5	Tata laksana ketatausahaan yang belum sesuai dengan ketentuan.	SDM pelaksana belum memahami terkait manajemen pelayanan pimpinan dan ketentuan tata naskah dinas.	Tingkat kepuasan layanan perkantoran (ketatausahaan) rendah.	Risiko Operasional	Melaksanakan sosialisasi dan monitoring bagi pegawai yang menangani ketatausahaan di lingkungan DIKA	E	Cukup sering: 6 s.d. 9 kali	97% > Capaian IKU > 92%	Rendah [10]	Tidak	53

Bisnis Proses		Pernyataan Risiko					Sistem Pengendalian yang ada		level			putusan Mitig	Prioritas
No	Uraian	Kode Risiko	Peristiwa	Penyebab	Dampak	Kategori	Uraian	E/KE/TE	Kemungkinan	Dampak	Risiko	Y/T	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
54	Layanan Dukungan Manajemen Internal (Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal) - PERKANTORAN	E.S.32.MN.6	Kegiatan keprotokolan tidak berjalan dengan lancar/ tidak teratur.	Petugas kurang berkoordinasi.	Tingkat kepuasan layanan perkantoran (ketatausahaan) rendah.	Risiko Operasional	Memberikan sosialisasi terkait SOP keprotokolan	E	Jarang: 2 kali s.d. 5 kali	97% > Capaian IKU > 92%	Rendah [7]	Tidak	54
55	Layanan Dukungan Manajemen Internal (Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal) - PERKANTORAN	E.S.33.MR.5	Tidak terpenuhinya perlengkapan kantor	1. Terjadi kerusakan pada perlengkapan perkantoran; 2. Permintaan perlengkapan perkantoran dari unit kerja yang tidak sesuai dengan rencana.	Terhambatnya operasional administrasi di lingkungan unit kerja	Risiko Operasional	1. Menyusun prioritas pemberian perlengkapan kantor dan melakukan penyediaan untuk unit kerja yang krusial seperti Tata Usaha pada Sekretaris dan Direktur Jenderal Perkeretaapian. 2. Menyusun SOP dan Form permintaan barang serta membuat sistem informasi terkait pemesanan perlengkapan. Melakukan perawatan secara berkala pada perlengkapan perkantoran.	E	Cukup sering: 6 s.d. 9 kali	97% > Capaian IKU > 92%	Rendah [10]	Tidak	55
56	Layanan Dukungan Manajemen Internal (Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi) -	E.4.17.MN.5	Kurangnya koordinasi terkait kegiatan pembangunan di wilayah kerja UPT	Kurangnya pemahaman akan pentingnya koordinasi antar UPT dengan Kantor Pusat	Program kerja Pemerintah kurang tersampaikan dengan baik kepada masyarakat	Risiko Kepatuhan	Mengadakan Bimtek Kehumasan	E	Jarang: 2 kali s.d. 5 kali	92% > Capaian IKU > 87%	Rendah [11]	Tidak	56
57	Layanan Dukungan Manajemen Internal (Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi) -	E.6.7.MN.5	Informasi yang dibutuhkan pemohon/masyarakat tidak dapat disediakan.	1. Sulitnya mendapatkan informasi dari unit kerja terkait, baik pusat maupun UPT di Lingkungan DJKA; 2. Belum meratanya pemahaman tentang informasi yang dikecualikan.	Tidak terpenuhinya kebutuhan publikasi bidang perkeretaapian (keterbukaan informasi publik tidak berjalan baik.	Risiko Reputasi	Mengadakan Bimtek terkait PPID	E	Jarang: 2 kali s.d. 5 kali	Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) dengan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah 65 - 76,60 (65 ≤ x ≤ 76,60)	Rendah [11]	Tidak	57
58	Layanan Dukungan Manajemen Internal (Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi) -	E.S.34.MR.9	Pemenuhan permohonan informasi yang kurang lengkap.	Data dukung tidak terdokumentasi dengan baik.	Target persentase pemenuhan publikasi tidak dapat terpenuhi karena tertundanya pemberian informasi kepada pemohon informasi.	Risiko Operasional	Mengirimkan surat/nota dinas terkait permohonan informasi ke unit kerja yang bersangkutan	E	Cukup sering: 6 s.d. 9 kali	97% > Capaian IKU > 92%	Rendah [10]	Tidak	58
59	Layanan Dukungan Manajemen Internal (Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi) -	E.4.18.MN.1	Kurangnya informasi terkait kerjasama luar negeri.	Terhambatnya koordinasi dengan UPT dan Direktorat Teknis terkait potensi kerjasama luar negeri.	Tertundanya proses kerjasama luar negeri	Risiko Kepatuhan	Mengadakan konsinyering update kertas posisi kerjasama luar negeri di Lingkungan DJKA	E	Cukup sering: 6 s.d. 9 kali	97% > Capaian IKU > 92%	Rendah [10]	Tidak	59
60	Layanan Dukungan Manajemen Internal (Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi) -	E.S.35.MN.2	Data terkait bahan publikasi yang belum terupdate.	Terkendala koordinasi lintas unit kerja.	Target persentase pemenuhan publikasi tidak terpenuhi karena tertundanya publikasi.	Risiko Operasional	Tersedianya link update kegiatan publikasi	E	Cukup sering: 6 s.d. 9 kali	97% > Capaian IKU > 92%	Rendah [10]	Tidak	60

Bisnis Proses		Pernyataan Risiko					Sistem Pengendalian yang ada		level			eputusan Mitig	Prioritas
No	Uraian	Kode Risiko	Peristiwa	Penyebab	Dampak	Kategori	Uraian	E/KE/TE	Kemungkinan	Dampak	Risiko	Y/T	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
61	Sistem Informasi Pemerintahan (Sistem Informasi) -	E.4.19.MD.5	Usulan kegiatan TIK ditolak/tidak memperoleh clearance dari Tim SPBE Nasional.	Data dukung tidak sesuai ketentuan KM 9 Tahun 2023 dan tidak masuk dalam Peta Rencana SPBE Kementerian Perhubungan (KM 106 Tahun 2023).	Pemenuhan Rencana Induk TIK tidak tercapai.	Risiko Kepatuhan	Rapat pembahasan termasuk reviu tingkat I, sosialisasi KM 9 Tahun 2023, koordinasi dengan Pusdatin terkait Peta Rencana SPBE, Kementerian Perhubungan	KE	Cukup sering: 6 s.d. 9 kali	87% > Capaian IKU > 80%	Tinggi [17]	Ya	61
62	Sistem Informasi Pemerintahan (Sistem Informasi) -	E.5.36.MC.3	Aplikasi rusak atau data bocor/hilang akibat serangan cyber/hack	1. Teknologi sistem informasi/aplikasi tidak update ke versi terbaru; 2. Terdapat celah	Pemanfaatan sistem informasi/aplikasi tidak optimal/andal.	Risiko Operasional	1. Koordinasi dengan Pusdatin terkait WAF aplikasi dan Agent monitoring;	KE	Jarang: 2 kali s.d. 5 kali	87% > Capaian IKU > 80%	Sedang [13]	Ya	62
63	Sistem Informasi Pemerintahan (Sistem Informasi) -	E.5.37.MC.4	Sistem TIK di lingkungan Ditjen Perkeretaapian (Website,Portal Aplikasi,lainnya) tidak dapat diakses	Server Ditjen Perkeretaapian down	Pemanfaatan sistem informasi/aplikasi tidak optimal/andal.	Risiko Operasional	Koordinasi dengan Pusdatin, pengecekan oleh Tim Pengelola TIK Ditjen Perkeretaapian	KE	Jarang: 2 kali s.d. 5 kali	87% > Capaian IKU > 80%	Sedang [13]	Ya	63
64	Sistem Informasi Pemerintahan (Sistem Informasi) -	E.5.38.MD.1	Aplikasi tidak optimal pemanfaatannya dikarenakan adanya gangguan sistem.	Programmer tidak kooperatif dan tidak ada jaminan sesuai kontrak.	Pemanfaatan sistem informasi/aplikasi tidak optimal/andal.	Risiko Operasional	1. Koordinasi langsung dengan programmer; 2. Perbaikan secara swakelola oleh tim pengelola TIK.	KE	Jarang: 2 kali s.d. 5 kali	87% > Capaian IKU > 80%	Sedang [13]	Ya	64
65	Sistem Informasi Pemerintahan (Sistem Informasi) -	E.5.39.MN.3	Pengembangan terlambat diselesaikan dan masa kontrak telah selesai.	Kompetensi dari konsultan yang kurang memadai	Pemenuhan Rencana Induk TIK tidak tercapai.	Risiko Operasional	Melakukan pendetailan spesifikasi tenaga ahli teknis dan persyaratan sertifikasi.	E	Jarang: 2 kali s.d. 5 kali	92% > Capaian IKU > 87%	Rendah [11]	Tidak	65
66	Sistem Informasi Pemerintahan (Sistem Informasi) -	E.5.40.MD.1	Aplikasi yang dibangun tidak sesuai dengan ketentuan di KAK/Pusdatin.	1. Penafsiran mengenai KAK dari konsultan dan pihak DJKA berbeda. 2. Programmer tidak kooperatif.	Pemenuhan Rencana Induk TIK tidak tercapai.	Risiko Operasional	1. Rapat pembahasan/asistensi secara berkala dengan mengikutsertakan Pusdatin; 2. Penerapan sanksi sesuai kontrak.	E	Jarang: 2 kali s.d. 5 kali	92% > Capaian IKU > 87%	Rendah [11]	Tidak	66
67	Sistem Informasi Pemerintahan (Sistem Informasi) -	E.5.41.MN.3	Pengelolaan dan pengembangan sistem TIK masih tergantung pada konsultan/programmer pihak ketiga	Kompetensi dari SDM DJKA masih kurang memadai dalam membantu pengelolaan dan pengembangan Sistem TIK secara swakelola	Pengelolaan dan pengembangan Sistem TIK tidak optimal sesuai kebutuhan	Risiko Operasional	Koordinasi pegawai pranata komputer untuk membantu pengelolaan dan pengembangan sistem TIK	E	Jarang: 2 kali s.d. 5 kali	92% > Capaian IKU > 87%	Rendah [11]	Tidak	67
68	Sistem Informasi Pemerintahan (Sistem Informasi) -	E.5.42.MD.1	Aplikasi yang dibangun tidak digunakan secara maksimal.	Belum ada sosialisasi/bimtek yang dilakukan secara berkala.	Pemanfaatan sistem informasi/aplikasi tidak optimal/andal.	Risiko Operasional	1. Melakukan sosialisasi/bimtek aplikasi baru; 2. Pembuatan manual book penggunaan aplikasi; 3. Penguatan dasar hukum pemanfaaatan aplikasi.	E	5% < x ≤ 10%	97% > Capaian IKU > 92%	Rendah [7]	Tidak	68

Bisnis Proses		Pernyataan Risiko					Sistem Pengendalian yang ada		Level			Keputusan Mitigasi	Prioritas
No	Uraian	Kode Risiko	Peristiwa	Penyebab	Dampak	Kategori	Uraian	E/KE/TE	Kemungkinan	Dampak	Risiko	Y/T	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
69	Layanan Dukungan Manajemen Internal (Layanan Data dan Informasi) -	E.4.20.MD.6	Penyediaan informasi layanan data bdak update/valid dan terlambat	1. SOP pengelolaan untuk update data tidak dilaksanakan oleh produsen data; 2. Data dari Direktorat/Balai tidak terintegrasi sehingga menimbulkan duplikasi data; 3. Belum memadainya proses cleansing data untuk mengidentifikasi data yang tidak valid; 4. Kesalahan dalam pengelolaan data.	Data tidak dapat dimanfaatkan/ tidak dapat dijadikan acuan untuk pengambilan keputusan oleh Pimpinan.	Risiko Kepatuhan	1. Penyampaian Nodin permintaan data dan koordinasi melalui whatsapp dengan PIC; 2. Rapat koordinasi untuk sinkronisasi data dan sosialisasi SOP.	KE	Cukup sering: 6 s.d. 9 kali	92% > Capaian IKU > 87%	Sedang (14)	Ya	69

Bisnis Proses		Pernyataan Risiko					Sistem Pengendalian yang ada		Level			eputusan Mitig	Prioritas
No	Uraian	Kode Risiko	Peristiwa	Penyebab	Dampak	Kategori	Uraian	E/KE/TE	Kemungkinan	Dampak	Risiko	Y/T	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
70	Layanan Dukungan Manajemen Internal (Layanan Data dan Informasi) -	E.S.43.MN.1	Kehilangan/kebocoran data pada Portal Aplikasi Ditjen Perkeretaapian	1. Pencurian data aplikasi/aplikasi ter-hack; 2. Teknologi yang digunakan belum versi ter-update.	Data/informasi pegawai/unit kerja Ditjen Perkeretaapian disalahgunakan oleh pihak yang tidak berwenang.	Risiko Operasional	1. Koordinasi dengan Pusdatin terkait WAF aplikasi dan Agent monitoring; 2. Backup data secara berkala.	KE	Jarang: 2 kali s.d. 5 kali	87% > Capaian IKU > 80%	Sedang [13]	Ya	70
71	Layanan Dukungan Manajemen Internal (Layanan Data dan Informasi) -	E.S.44.MN.1	Informasi/berita pada Website Ditjen Perkeretaapian tidak update/valid dan terlambat	1. Keterlambatan publikasi berita/informasi pada website DJKA oleh PIC/Tim Humas; 2. Kesalahan penginputan data/informasi pada website DJKA.	Informasi/Berita pada Website Ditjen Perkeretaapian tidak dapat dimanfaatkan oleh masyarakat	Risiko Operasional	1. Tersedianya manual book penggunaan website DJKA; 2. Rapat koordinasi/bimtek pengelolaan Website DJKA.	E	Jarang: 2 kali s.d. 5 kali	97% > Capaian IKU > 92%	Rendah [7]	Tidak	71
72	Layanan Manajemen SDM Internal (Layanan SDM) -	E.S.45.MN.1	Pelaksanaan tugas dan fungsi pada unit kerja belum berjalan maksimal	1. Tidak didukung SDM yang kompeten; 2. Kurangnya minat pegawai untuk mengikuti diklat.	Kinerja dan reputasi organisasi menurun.	Risiko Operasional	Melaksanakan kegiatan diklat kompetensi dan menyampaikan penawaran dan usulan peserta diklat dari unit kerja penyelenggara	KE	Cukup sering: 6 s.d 9 kali	87% > Capaian IKU > 80%	Tinggi [17]	Ya	72
73	Layanan Manajemen SDM Internal (Layanan SDM) -	E.S.46.MY.4	Minimnya pelaksanaan diklat untuk peningkatan kompetensi ASN terkait diklat manajerial	Kurangnya anggaran pelaksanaan diklat	Tidak terpenuhinya kebutuhan ASN Ditjen Perkeretaapian yang kompeten/memiliki keahlian tertentu	Risiko Operasional	Kerjasama dengan unit kerja penyelenggara dalam pelaksanaan kegiatan diklat kompetensi dan menyampaikan penawaran kepada pegawai yang berminat	KE	Cukup sering: 6 s.d. 9 kali	87% > Capaian IKU > 80%	Tinggi [17]	Ya	73
74	Layanan Manajemen SDM Internal (Layanan SDM) -	E.S.48.MN.1	Layanan kepegawaian (kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, ujian dinas, database kepegawaian, penyusunan laporan kinerja pegawai, dan lainnya) tidak dilaksanakan dengan baik	1. Minimnya pemahaman SDM pembina; 2. Kurangnya pelaksanaan sosialisasi / pembinaan kepada pegawai; 3. Database pegawai kurang lengkap/tidak update; 4. Anggaran terbatas.	Tingkat kepuasan layanan perkantoran (kepegawaian) rendah	Risiko Operasional	1. Koordinasi dengan TU Balai dan Direktorat; 2. Menyusun database kepegawaian / update data SIK secara berkala; 3. Bimtek layanan kepegawaian.	KE	Cukup sering: 6 s.d. 9 kali	92% > Capaian IKU > 87%	Sedang [14]	Ya	74
75	Layanan Manajemen SDM Internal (Layanan SDM) -	E.S.49.MN.1	Tidak optimalnya penyelenggaraan jabatan fungsional tertentu bidang perkeretaapian /inpassing	Minimnya minat pegawai untuk diklat / jabatan fungsional tertentu bidang perkeretaapian	Tidak terpenuhinya kebutuhan ASN Ditjen Perkeretaapian yang kompeten/memiliki keahlian tertentu	Risiko Operasional	Sosialisasi dan penawaran uji kompetensi tahap 2 kepada ASN Ditjen Perkeretaapian	KE	Cukup sering: 6 s.d. 9 kali	92% > Capaian IKU > 87%	Sedang [14]	Ya	75

Bisnis Proses		Pernyataan Risiko					Sistem Pengendalian yang ada		Level			Keputusan Mitigasi	Prioritas
No	Uraian	Kode Risiko	Peristiwa	Penyebab	Dampak	Kategori	Uraian	E/KE/TE	Kemungkinan	Dampak	Risiko	Y/T	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
76	Layanan Dukungan Manajemen Internal (Layanan Hukum) -	E.1.3.MD.1	Tidak optimalnya/terlambat/tidak dilakukan pengendalian dan pengawasan terhadap izin teknis	Pendelegasian tugas pada Balai Teknik Perkeretaapian yang belum berjalan dengan optimal	Terjadinya pelanggaran terhadap izin teknis yang sudah diterbitkan (kekosongan hukum, ketidaksesuaian kondisi)	Risiko Hukum	Bagian Hukum melakukan pendataan izin teknis yang akan habis masa berlakunya dan meneruskan ke setiap BTP melalui surat agar melakukan pengawasan terhadap izin teknis dimaksud.	KE	Sering: 10 kali s.d. 12	Pihak terpidana adalah Pejabat Eselon III, IV, atau pejabat yang setara, pejabat fungsional, dan pejabat fungssional umum, dan atau Putusan Perdata: 1M< x < 10M Administratif: tergugat merupakan Pejabat Eselon I, atau pejabat yang setara.	Tinggi [16]	Ya	76
77	Layanan Dukungan Manajemen Internal (Layanan Hukum) -	E.5.50.MN.1	Sidang ditunda jika tidak ada perwakilan kuasa hukum.	Terbatasnya jumlah personil lulusan sarjana hukum yang dapat menjadi	Penyelesaian kasus hukum menjadi lebih lama.	Risiko Operasional	Koordinasi dengan Biro Hukum terkait kehadiran di persidangan	KE	Cukup sering: 6 s.d. 9 kali	92% > Capaian IKU > 87%	Sedang [14]	Ya	77
78	Layanan Dukungan Manajemen Internal (Layanan Hukum) -	E.5.51.MN.1	Substansi penyusunan peraturan perundang-undangan tidak lengkap/tidak sesuai	Naskah akademis penyusunan peraturan perundang-undangan tidak memadai	Terlambatnya pemenuhan target peraturan perundang-undangan.	Risiko Operasional	Koordinasi dengan unit kerja yang mengusulkan penyusunan peraturan perundang-undangan terkait naskah akademis	KE	Cukup sering: 6 s.d. 9 kali	92% > Capaian IKU > 87%	Sedang [14]	Ya	78
79	Layanan Dukungan Manajemen Internal (Layanan Hukum) -	E.4.21.MN.1	Tidak optimalnya/terlambat/tidak dilakukan pengendalian dan pengawasan	Keterbatasan waktu dan SDM untuk melakukan pengendalian dan pengawasan ke lapangan.	Terjadinya pelanggaran terhadap izin teknis yang sudah diterbitkan (kekosongan hukum, ketidaksesuaian	Risiko Kepatuhan	Koordinasi dengan Balai Teknik Perkeretaapian dengan bersurat untuk melakukan Pengendalian dan Pengawasan Produk	KE	Cukup sering: 6 s.d. 9 kali	92% > Capaian IKU > 87%	Sedang [14]	Ya	79
80	Layanan Dukungan Manajemen Internal (Layanan Hukum) -	E.6.8.MC.1	Produk hukum hilang/tidak terdokumentasi dengan baik	Media untuk penyimpanan dokumen terbatas dan akses antar unit kerja belum terintegrasi. Sistem	Reputasi Ditjen Perkeretaapian menurun	Risiko Reputasi	Menyediakan google drive.	E	Jarang: 2 kali s.d. 5 kali	Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) dengan Indeks Kepuasan	Rendah [11]	Tidak	80
81	Layanan Dukungan Manajemen Internal (Layanan Hukum) -	E.1.4.MN.3	Terhambatnya penyusunan legal opinion	Data dukung untuk penyusunan legal opinion kurang lengkap	Rekomendasi kebijakan pimpinan tidak valid	Risiko Hukum	Koordinasi dengan Direktorat atau Balai untuk kebutuhan data dukung	E	Jarang: 2 kali s.d. 5 kali	Pihak terpidana adalah Pejabat Eselon III, IV, atau pejabat yang setara, pejabat fungsional, dan pejabat fungsional umum, dan atau Putusan Perdata: 1M< x < 10M Administratif: tergugat merupakan Pejabat Eselon I, atau pejabat yang setara.	Rendah [11]	Tidak	81

Bisnis Proses		Pernyataan Risiko					Sistem Pengendalian yang ada		Level			Keputusan Mitigasi	Prioritas
No	Uraian	Kode Risiko	Peristiwa	Penyebab	Dampak	Kategori	Uraian	E/KE/TE	Kemungkinan	Dampak	Risiko	Y/T	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
82	Layanan Dukungan Manajemen Internal (Layanan Hukum) -	E.1.5.MN.4	Pelaksanaan kegiatan sosialisasi peraturan perundang-undangan diundur dari rencana	Pimpinan berhalangan karena ada kegiatan lain yang lebih mendesak.	Implementasi terhadap amanah peraturan perundang-undangan tidak berjalan baik.	Risiko Hukum	Konfirmasi kesediaan waktu kepada pimpinan jauh hari sebelum kegiatan dilaksanakan	E	Cukup sering: 6 s.d. 9 kali	Putusan Perdata:100 juta < x ≤1M Administratif:	Rendah [10]	Tidak	82
83	Layanan Dukungan Manajemen Internal (Layanan Hukum) -	E.1.6.EX.1	Penyusunan draft perjanjian kerjasama tidak dapat difinalisasi.	Penyampaian masukan dan tanggapan draf dari pihak Badan Usaha membutuhkan waktu yang lama	Penandatanganan Perjanjian Kerjasama menjadi tertunda	Risiko Hukum	Memberikan deadline penyampaian masukan dan tanggapan draf perjanjian	E	Cukup sering: 6 s.d. 9 kali	Putusan Perdata:100 juta < x ≤1M Administratif:	Rendah [10]	Tidak	83
84	Layanan Dukungan Manajemen Internal (Layanan Hukum) -	E.5.52.MN.1	Tertundanya rapat pembahasan peraturan perundang-undangan.	Kesulitan menyesuaikan jadwal antar unit kerja yang terkait.	Terlambatnya pemenuhan target peraturan perundang-undangan	Risiko Operasional	Koordinasi dengan unit kerja terkait sinkronisasi jadwal pembahasan penyusunan peraturan perundang-undangan.	E	Cukup sering: 6 s.d. 9 kali	97% > Capaian IKU > 92%	Rendah [10]	Tidak	84
85	Pemenuhan Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria (Penyusunan Pedoman Teknis Bidang Prasarana Perkeretaapian) -	E.5.53.MY.6	Penundaan/pembatalan kegiatan penyusunan kajian kebijakan/standar/pedoman teknis terkait perkeretaapian (NSPK bidang perkeretaapian)	Kebijakan Recofusing Anggaran sehingga dibatalkannya pelaksanaan kegiatan penyusunan kajian kebijakan/stadar/pedoman teknis terkait perkeretaapian (NSPK bidang perkeretaapian)	Tidak terpenuhinya perumusan regulasi dan kebijakan (NSPK) dalam penyelanggaraan perkeretaapian	Risiko Operasional	1. Mengusulkan kembali kegiatan penyusunan kajian kebijakan/stadar/pedoman teknis (NSPK bidang perkeretaapian) pada periode tahun berikutnya atau dengan optimalisasi anggaran tahun berjalan; 2. Koordinasi dengan bagian keuangan pengusulan kembali kegiatan yang terdampak refocusing anggaran.	KE	Cukup sering: 6 s.d. 9 kali	87% > Capaian IKU > 80%	Tinggi [17]	Ya	85
86	Pemenuhan Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria (Penyusunan Pedoman Teknis Bidang Prasarana Perkeretaapian) -	E.3.1.MD.1	Hasil kajian kebijakan/stadar/pedoman teknis terkait perkeretaapian (NSPK bidang perkeretaapian) tidak valid/tidak dapat digunakan/tidak berkualitas	1. Manipulasi data hasil survei/wawancara; 2. Kurangnya keterlibatan pemangku kepentingan/stakeholder terkait; 3. Penyedia tidak mematuhi pedoman atau standar metodologi penelitian yang ditetapkan pada TOR/KAK.	Tidak tercapainya target pemenuhan perumusan regulasi dan kebijakan (NSPK) dalam penyelenggaraan perkeretaapian	Risiko Kecurangan	1. Melakukan pendampingan pada survey/pengumpulan data; 2. Mengikutsertakan stakeholder dalam rapat pembahasan dalam seluruh tahapan proses penyusunan studi/kajian; 3. Melakukan asistensi/pembahasan secara berkala.	E	Sangat jarang: < 2 kali	87% > Capaian IKU > 80%	Rendah [8]	Tidak	86
87	Pemenuhan Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria (Penyusunan Pedoman Teknis Bidang Prasarana Perkeretaapian) -	E.5.54.MD.1	Terlambatnya pelaksanaan lelang kajian kebijakan/standar/pedoman teknis terkait perkeretaapian (NSPK bidang perkeretaapian)	Ditolaknya permohonan pelaksanaan pengadaan barang/jasa oleh Biro LPBMN akibat kurang lengkapnya data dukung	Tidak tercapainya target pemenuhan perumusan regulasi dan kebijakan (NSPK) dalam penyelenggaraan perkeretaapian	Risiko Operasional	Melakukan penyusunan dan pengecekan kelengkapan data dukung yang diperlukan sebelum diajukan permohonan pelaksanaan pengadaan barang/jasa kepada Biro LPBMN	E	Sangat jarang: < 2 kali	92% > Capaian IKU > 87%	angat Rendah [	Tidak	87

Bisnis Proses		Pernyataan Risiko					Sistem Pengendalian yang ada		Level			Keputusan Mitigasi	Prioritas
No	Uraian	Kode Risiko	Peristiwa	Penyebab	Dampak	Kategori	Uraian	E/KE/TE	Kemungkinan	Dampak	Risiko	Y/T	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
88	Penyusunan Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana (Rencana Induk, Evaluasi Kemanfaatan) -	E.5.55.MY.7	Penundaan/pembatalan kegiatan penyusunan studi /kajian terkait pembinaan dan peningkatan konektivitas perkeretaapian	Kebijakan Recofusing Anggaran sehingga dibatalkannya pelaksanaan kegiatan penyusunan kajian/studi	Tidak tersusunnya rekomendasi kebijakan terkait pembinaan dan peningkatan konektivitas perkeretaapian	Risiko Operasional	Mengusulkan kembali kegiatan penyusunan dokumen kebijakan/studi perencanaan pada periode tahun berikutnya atau dengan optimalisasi anggaran tahun berjalan	KE	Cukup sering: 6 s.d. 9 kali	87% > Capaian IKU > 80%	Tinggi [17]	Ya	88
89	Penyusunan Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana (Rencana Induk, Evaluasi Kemanfaatan) -	E.5.56.MD.1	Rekomendasi kebijakan tidak diterima /tidak dimanfaatkan oleh stakeholder eksternal	Ketidaksesuaian dengan ekspektasi/harapan/rencana yang telah dimiliki stakeholder terkait	Tidak tersusunnya rekomendasi kebijakan terkait pembinaan dan peningkatan konektivitas	Risiko Operasional	Mengikutsertakan stakeholder dalam rapat pembahasan dalam seluruh tahapan proses penyusunan studi/kajian	KE	Cukup sering: 6 s.d. 9 kali	92% > Capaian IKU > 87%	Sedang [14]	Ya	89
90	Penyusunan Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana (Rencana Induk, Evaluasi Kemanfaatan) -	E.5.57.MN.1	Tim Pengarah/Tim Pendamping menolak hasil kajian/studi karena tidak sesuai dengan TOR dan KAK	1. Tenaga Ahli tidak memahami TOR dan KAK; 2. Pelaksanaan survey dan data tidak valid; 3. Analisa tidak dapat dipertanggungjawabkan.	Tidak tersusunnya rekomendasi kebijakan terkait pembinaan dan peningkatan konektivitas perkeretaapian	Risiko Operasional	1. Seleksi Tim pelaksana pekerjaan penyusun kebijakan/kajian sesuai kontrak; 2. Pendampingan pada survey/pengumpulan data; 3. Asistensi/pembahasan secara berkala.	E	Sangat jarang: < 2 kali	87% > Capaian IKU > 80%	Rendah [8]	Tidak	90
91	Penyusunan Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana (Rencana Induk, Evaluasi Kemanfaatan) -	E.5.58.MD.1	Terlambatnya pelaksanaan lelang kajian terkait pembinaan dan peningkatan konektivitas perkeretaapian	Ditolaknya permohonan pelaksanaan pengadaan barang/jasa terkait pembinaan dan peningkatan konektivitas perkeretaapian oleh Biro LPBMN akibat kurang lengkapnya data dukung	Tidak tersusunnya rekomendasi kebijakan terkait pembinaan dan peningkatan konektivitas perkeretaapian	Risiko Operasional	Melakukan penyusunan dan pengecekan kelengkapan data dukung yang diperlukan sebelum diajukan permohonan pelaksanaan pengadaan barang/jasa kepada Biro LPBMN	E	Sangat jarang: < 2 kali	92% > Capaian IKU > 87%	angat Rendah [	Tidak	91
92	Penyusunan Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana (Rencana Induk, Evaluasi Kemanfaatan) -	E.6.9.MN.6	Hasil kajian kebijakan/standar/pedoman teknis (NSPK bidang perkeretaapian) tidak independen	1. Adanya konflik kepentingan; 2. Adanya tekanan/desakan politik yang berlebihan terhadap hasil kajian kebijakan/standar/pedoman teknis.	Tidak tercapainya target pemenuhan perumusan regulasi dan kebijakan (NSPK) dalam penyelenggaraan perkeretaapian karena independensi dan kredibilitas pimpinan/instansi diragukan oleh stakeholder terkait dan masyarakat.	Risiko Reputasi	1. Asistensi/pembahasan secara berkala; 2. Mengikutsertakan stakeholder dalam rapat pembahasan dalam seluruh tahapan proses penyusunan kajian kebijakan.	E	Sangat jarang: < 2 kali	Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) dengan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) kurang dari 25 – 64,99 (25 ≤ x ≤ 64,99)	Rendah [8]	Tidak	92
93	Layanan Dukungan Manajemen Internal (Layanan Data dan Informasi) -	E.4.21.MD.7	Pemenuhan Data Perkeretaapian (statistik, geospasial) terlambat disampaikan kepada Pusdalin	Data yang disampaikan tidak valid/berbeda dari sumber lain yang diperoleh, Direktorat terlambat/tidak melakukan pemutakhiran data	Terlambatnya pemenuhan dan publikasi data transportasi Kementerian Perhubungan yang juga digunakan untuk dasar pengambilan kebijakan	Risiko Kepatuhan	Penyampaian permintaan data dan rapat pembahasan berkala	KE	Cukup sering: 6 s.d. 9 kali	92% > Capaian IKU > 87%	Sedang [14]	Ya	93

Bisnis Proses		Pernyataan Risiko					Sistem Pengendalian yang ada		Level			eputusan Mitig	Prioritas
No	Uraian	Kode Risiko	Peristiwa	Penyebab	Dampak	Kategori	Uraian	E/KE/TE	Kemungkinan	Dampak	Risiko	Y/T	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
94	Layanan Manajemen Kinerja Internal (Layanan Manajemen Keuangan) - PNBP	.4.22.MN.1	Laporan Pengawasan dan Pengendalian Eselon I terkait pengelolaan BMN tidak tepat waktu.	1. Keterbatasan pengetahuan SDM; 2. Balai/Satker belum mengajukan Penetapan Status Penggunaan BMN.	Tidak disetujuinya penggunaan BMN oleh Kementerian Keuangan.	Risiko Kepatuhan	Sosialisasi, Surat teguran kepada Balai/ Satker	E	Jarang: 2 kali s.d. 5 kali	97% > Capaian IKU > 92%	Rendah [7]	Tidak	94

RENCANA PENANGANAN RISIKO

Nama Unit Pemilik Risiko : **Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian**
Tahun : **2024**

Prioritas	Kode Risiko	Rencana Penanganan Risiko					Level Risiko Harapan Setelah Mitigasi Risiko		
		Opsi Penanganan Risiko	Uraian Penanganan Risiko	Target Output	Jadwal Implementasi	Pengelola Risiko	Level Kemungkinan	Level Dampak	Level Risiko
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	E.5.1 - Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tematik DJKA tidak terlaksana dengan maksimal.	Mengurangi kemungkinan	1. Revisi terhadap rencana aksi RB Tematik di lingkungan DJKA; 2. Perbaikan/penyesuaian terhadap program RB Tematik terhadap tema-tema yang diangkat.	Target Rencana Aksi dan Pelaksanaan dari LKE RB Tematik	1. Mulai: 01-01-2024 Akhir: 30-09-2024 2. Mulai: 01-01-2024 Akhir: 30-09-2024	Bagian Sumber Daya Manusia dan Umum	2 - Jarang: 2 kali s.d. 5 kali	3 - 92% > Capaian IKU > 87%	Rendah (11)
2	E.4.1 - Usulan Unit Kerja Menuju WBK WBBM tidak disetujui oleh Kementerian PANRB.	Mengurangi kemungkinan	1. Melakukan sosialisasi terhadap unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian dalam rangka Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK-WBBM; 2. Melakukan monitoring terhadap pemenuhan data dukung pengisian LKE Pembangunan ZI.	Predikat WBK atau WBBM terhadap Unit Kerja yang di nominasikan di lingkungan DJKA	1. Mulai: 01-04-2024 Akhir: 30-11-2024 2. Mulai: 01-04-2024 Akhir: 30-11-2024	Bagian Sumber Daya Manusia dan Umum	2 - Jarang: 2 kali s.d. 5 kali	3 - 92% > Capaian IKU > 87%	Rendah (11)
3	E.4.2 - Ketidaksesuaian Kriteria Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA).	Mengurangi kemungkinan	1. Usulan Penyertaan Diklat Penyusun RKA (Diklat Implementasi Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran dan Diklat Perumusan Klasifikasi Rincian Output/Rincian Output); 2. Menyusun SOP yang mengatur terkait pengusulan anggaran kegiatan yang bersifat Direktif/Mitigasi/Adaptasi.	1. 2 Kegiatan Diklat; 2. SOP terkait pengusulan anggaran kegiatan yang bersifat Direktif/Mitigasi/Adaptasi.	1. Mulai: 01-07-2024 Akhir: 31-12-2024 2. Mulai: 01-07-2024 Akhir: 31-12-2024	Bagian Perencanaan	1 - Sangat jarang: < 2 kali	4 - 87% > Capaian IKU > 80%	Rendah (8)

Prioritas	Kode Risiko	Rencana Penanganan Risiko					Level Risiko Harapan Setelah Mitigasi Risiko		
		Opsi Penanganan Risiko	Uraian Penanganan Risiko	Target Output	Jadwal Implementasi	Pengelola Risiko	Level Kemungkinan	Level Dampak	Level Risiko
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	E.5.2 - Progress Kelengkapan Data Dukung Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) yang rendah pada Aplikasi e-Planning.	Mengurangi kemungkinan	Menyelenggarakan Rapat koordinasi bersama Direktorat Teknis dan Balai di lingkungan Ditjen Perkeretaapian untuk pemenuhan dan pengesahan data dukung	2 Kegiatan Rapat koordinasi	Mulai: 01-04-2024 Akhir: 31-12-2024	Bagian Perencanaan	2 - Jarang: 2 kali s.d. 5 kali	3 - 92% > Capaian IKU > 87%	Rendah (11)
5	E.5.3 - Penyusunan Rencana Strategis Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2025-2029 tidak valid.	Mengurangi kemungkinan	1. Koordinasi intensif dengan Unit Kerja di Lingkungan Setditjen Perkeretaapian; 2. Menyusun matriks *followup* yang harus diisi oleh masing-masing bagian secara berkala	1 Dokumen (Dokumen Matriks *Followup*)	1. Mulai: 01-06-2024 Akhir: 31-12-2024 2. Mulai: 01-06-2024 Akhir: 31-12-2024	Bagian Perencanaan	2 - Jarang: 2 kali s.d. 5 kali	3 - 92% > Capaian IKU > 87%	Rendah **(11)**
6	E.5.4 - Dokumen Renstra tidak disusun sesuai dengan ketentuan dan substansi yang dibutuhkan.	Mengurangi kemungkinan	Mengikutsertakan tim penyusun Renstra untuk mengikuti Diklat terkait perencanaan strategis dan teknis perkeretaapian baik di bidang LLAKA, Prasarana, Sarana dan Keselamatan bekerja sama dengan lembaga diklat	3 Kegiatan diklat	Mulai: 01-01-2024 Akhir: 30-06-2024	Bagian Perencanaan	1 - Sangat Jarang: < 2 kali	4 - 87% > Capaian IKU > 80%	Rendah **(8)**
12	E.5.7 - Perencanaan, pengukuran dan pelaporan kinerja tidak tepat waktu.	Mengurangi kemungkinan	1. Penyampaian ND/Surat kepada unit kerja yang tidak memenuhi kebutuhan data kinerja sesuai ketentuan; 2. Pengoptimalan Google Docs untuk penyusunan pelaporan termasuk penyajian data; 3. Pembinaan secara langsung pada unit kerja yang hasil penilaian pelaporan masih rendah.	1. ND/Surat Penyapaian kepada unit kerja; 2. Link Google Docs; 3. 1 Kegiatan.	1. Mulai: 01-04-2024 Akhir: 31-12-2024. 2. Mulai: 01-04-2024 Akhir: 31-12-2024; 3. Mulai: 01-07-2024 Akhir: 31-12-2024;	Bagian Perencanaan	2 - Jarang: 2 kali s.d. 5 kali	3 - 92% > Capaian IKU > 87%	Rendah **(11)**

Prioritas	Kode Risiko	Rencana Penanganan Risiko					Level Risiko Harapan Setelah Mitigasi Risiko		
		Opsi Penanganan Risiko	Uraian Penanganan Risiko	Target Output	Jadwal Implementasi	Pengelola Risiko	Level Kemungkinan	Level Dampak	Level Risiko
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
21	E.5.14 - Monitoring perencanaan dan pengendalian bidang perkeretaapian terlambat/tidak dilaksanakan/tidak optimal	Mengurangi kemungkinan	1. Jadwal Tim Monitoring perencanaan dan pengendalian bidang perkeretaapian ke masing-masing lokasi pekerjaan yang menjadi prioritas; 2. Penyampaian hasil monitoring perencanaan dan pengendalian kepada unit kerja terkait.	1. Jadwal Monitoring; 2. Surat tindak lanjut hasil monitoring perencanaan dan pengendalian.	1. Mulai: 01-04-2024 Akhir: 31-12-2024 2. Mulai: 01-04-2024 Akhir: 31-12-2024	Bagian Perencanaan	1 - Sangat Jarang: < 2 kali	4 - 87% > Capaian IKU > 80%	Rendah [8]
22	E.5.15 - Inkonsistensi Data antar Laporan Kinerja dan Publikasi lainnya	Mengurangi kemungkinan	Pengoptimalan Sistem TIK/Database di lingkungan Ditjen Perkeretaapian serta koordinasi rencana pelaporan digital dengan BUPP dan BUPS	Pemanfaatan Sistem TIK/Database	Mulai: 01-09-2024 Akhir: 31-12-2024	Bagian Perencanaan	2 - Jarang: 2 kali s.d. 5 kali	3 - 92% > Capaian IKU > 87%	Rendah [11]
23	E.5.16 - Data untuk bahan rapat pimpinan tidak valid	Mengurangi kemungkinan	Reviu SOP koordinasi penugasan lintas bidang terkait bahan rapat pimpinan	Reviu SOP	Mulai: 01-04-2024 Akhir: 31-05-2024	Bagian Perencanaan	2 - Jarang: 2 kali s.d. 5 kali	3 - 92% > Capaian IKU > 87%	Rendah [11]
24	E.5.17 - Pengusulan rencana pendanaan kerjasama luar negeri kurang komprehensif	Mengurangi kemungkinan	1. Dilakukan rapat pembahasan pada H-7 Deadline bersama unit kerja terkait; 2. Membuat drive tabel cakdis persyaratan data dukung dan folder data dukung pengusulan dan bersurat resmi untuk pengisian pada drive tersebut.	1. Laporan Rapat Hasil Pembahasan serta List Kelengkapan Data Dukung; 2. Surat pengusulan dan drive data dukung.	1. Mulai: 01-01-2024 Akhir: 30-11-2024 2. Mulai: 01-01-2024 Akhir: 30-11-2024	Bagian Perencanaan	1 - Sangat jarang: < 2 kali	4 - 87% > Capaian IKU > 80%	Rendah [8]

Prioritas	Kode Risiko	Rencana Penanganan Risiko					Level Risiko Harapan Setelah Mitigasi Risiko		
		Opsi Penanganan Risiko	Uraian Penanganan Risiko	Target Output	Jadwal Implementasi	Pengelola Risiko	Level Kemungkinan	Level Dampak	Level Risiko
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
25	E.5.18 - Monitoring kegiatan PHLN tidak terlaksana dengan baik	Mengurangi kemungkinan	Melakukan penyusunan risalah/BA rapat pembahasan Monev yang ditandatangani oleh masing-masing KPA/PPK yang berisi komitmen rencana tindak lanjut atas isu	Risalah/BA Rapat Pembahasan dan rencana tindak lanjut yang ditandatangani masing-masing KPA/PPK	Mulai: 01-04-2024 Akhir: 31-12-2024	Bagian Perencanaan	1 - Sangat jarang: < 2 kali	4 - 87% > Capaian IKU > 80%	Rendah (8)
26	E.5.19 - Penilaian, pemantauan dan pelaporan Manajemen Risiko tidak dilaksanakan sesuai ketentuan	Mengurangi kemungkinan	1. Penandatanganan Piagam MR secara simbolis termasuk penetapan Fom 1,5,8 sesuai dengan KM 69 Tahun 2023; 2. Sosialisasi Sistem Informasi MR yang dikelola oleh Itjen Kemenhub; 3. Roadshow/pengecekan langsung ke Balai di lingkungan Ditjen Perkeretaapian untuk evaluasi penerapan MR sesuai dengan KM 69 Tahun 2023.	1. 1 Dokumen 2. 1 Laporan Kegiatan 3. 2 Laporan Kegiatan	1. Mulai: 01-01-2024 Akhir: 31-01-2024 2. Mulai: 01-02-2024 Akhir: 30-03-2024 3. Mulai: 01-09-2024 Akhir: 31-12-2024	Bagian Perencanaan	2 - Jarang: 2 kali s.d. 5 kali	3 - 92% > Capaian IKU > 87%	Rendah [11]
27	E.5.20 - Pengisian Kertas Kerja Penilaian Mandiri Maturitas SPIP tidak lengkap	Mengurangi kemungkinan	Asistensi dengan Itjen dan BPKP	1 Laporan Kegiatan	Mulai: 01-04-2024 Akhir: 31-05-2024	Bagian Perencanaan	2 - Jarang: 2 kali s.d. 5 kali	3 - 92% > Capaian IKU > 87%	Rendah [11]
28	E.4.8 - Pelaporan Pelaksanaan Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) di lingkungan DJKA tidak dilaporkan secara berkala kepada Itjen selaku UPG Instansi	Mengurangi kemungkinan	1. Monitoring pelaksanaan pelaporan gratifikasi di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian; 2. Penyampaian surat edaran pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian; 3. Penyampaian himbauan pencegahan korupsi dan gratifikasi hari besar di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian.	1. 1 Laporan hasil monitoring 2. 1 Surat Edaran 3. 1 Surat Himbauan	1. Mulai: 01-04-2024 Akhir: 31-06-2024 2. Mulai: 01-01-2024 Akhir: 31-03-2024 3. Mulai: 01-04-2024 Akhir: 31-06-2024	Bagian Sumber Daya Manusia dan Umum	2 - Jarang: 2 kali s.d. 5 kali	3 - 92% > Capaian IKU > 87%	Rendah [11]

Prioritas	Kode Risiko	Rencana Penanganan Risiko					Level Risiko Harapan Setelah Mitigasi Risiko		
		Opsi Penanganan Risiko	Uraian Penanganan Risiko	Target Output	Jadwal Implementasi	Pengelola Risiko	Level Kemungkinan	Level Dampak	Level Risiko
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
30	E.4.9 - Tidak tuntasnya rekomendasi atas temuan itjen, BPK dan BPKP	Mengurangi kemungkinan	Pemutakhiran data Tindak Lanjut temuan itjen, BPKP dan BPK secara berkala setiap Triwulan	Berita Acara	Mulai: 01-01-2024 Akhir: 31-12-2024	Bagian Keuangan	2 - Jarang: 2 kali s.d. 5 kali	3 - 92% > Capaian IKU > 87%	Rendah (11)
31	E.6.1 - Pegawai tidak mempunyai integritas dan tidak disiplin	Mengurangi kemungkinan	Program pelatihan dan pembinaan yang berfokus pada aspek mental dan spiritual karyawan	Program pelatihan dan pembinaan mental dan spiritual	Mulai: 01-01-2024 Akhir: 31-12-2024	Bagian Sumber Daya Manusia dan Umum	1 - Sangat jarang: < 2 kali	4 - Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) dengan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) kurang dari 25 - 64,99 (25 ≤ x ≤ 64,99)	Rendah (8)
32	E.5.21 - Target PNBP tidak sesuai usulan.	Mengurangi kemungkinan	1. Menggali potensi penerimaan PNBP yang belum terpungut; 2. Mengusulkan revisi kenaikan tarif PNBP pada jenis PNBP tertentu.	Target PNBP terpenuhi.	1. Mulai: 01-01-2024 Akhir: 29-02-2024 2. Mulai: 01-04-2024 Akhir: 31-12-2024	Bagian Keuangan	1 - Sangat jarang: < 2 kali	4 - 87% > Capaian IKU > 80%	Rendah (8)

Prioritas	Kode Risiko	Rencana Penanganan Risiko					Level Risiko Harapan Setelah Mitigasi Risiko		
		Opsi Penanganan Risiko	Uraian Penanganan Risiko	Target Output	Jadwal Implementasi	Pengelola Risiko	Level Kemungkinan	Level Dampak	Level Risiko
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
33	E.6.2 - Pemanfaatan BMN belum optimal.	Mengurangi kemungkinan	Analisis data aset BMN berupa tanah sesuai dengan PP 57 Tahun 1990	Dokumen Analisis Verifikasi ROW	Mulai: 01-01-2024 Akhir: 31-03-2024	Bagian Keuangan	3 - Cukup sering: 6 s.d. 9 kali	2 - Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) dengan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah 76,61 – 88,30 (76,61 ≤ x ≤ 88,30)	Rendah (10)
34	E.4.10 - Pemanfaatan BMN belum dapat diproses.	Mengurangi kemungkinan	Koordinasi terkait pemanfaatan BMN dengan pemohon	Persetujuan pemanfaatan BMN	Mulai: 01-07-2024 Akhir: 31-12-2024	Bagian Keuangan	3 - Cukup sering: 6 s.d. 9 kali	2 - 97% > Capaian IKU > 92%	Rendah (10)
38	E.6.4 - Ketidaksesuaian pencantuman target pada RPD	Mengurangi kemungkinan	Sosialisasi operator/pengelola anggaran untuk menentukan target RPD	1 Kegiatan	Mulai: 01-01-2024 Akhir: 31-03-2024	Bagian Keuangan	2 - Jarang: 2 kali s.d. 5 kali	3 - Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) dengan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah 65 - 76,60 (65 ≤ x ≤ 76,60)	Rendah (11)

Prioritas	Kode Risiko	Rencana Penanganan Risiko					Level Risiko Harapan Setelah Mitigasi Risiko		
		Opsi Penanganan Risiko	Uraian Penanganan Risiko	Target Output	Jadwal Implementasi	Pengelola Risiko	Level Kemungkinan	Level Dampak	Level Risiko
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
39	E.4.13 - Pelaksanaan project tidak sesuai rencana /project tidak dapat dilaksanakan	Mengurangi kemungkinan	Perbaikan *Readiness criteria* usulan kegiatan bidang perkeretaapian melalui revisi PM 112 Tahun 2017	Usulan Revisi PM 112 Tahun 2017.	Mulai: 01-10-2024 Akhir: 31-12-2024	Bagian Keuangan Bagian Perencanaan	2 - Jarang: 2 kali s.d. 5 kali	3 - 92% > Capaian IKU > 87%	Rendah (11)
40	E.4.14 - Kontrak pekerjaan tertunda	Mengurangi kemungkinan	1. Percepatan perbaikan rekomendasi hasil reviu dokumen tender; 2. Bimtek/Diklat Pengelola Anggaran (PPK/Pengadaan Barang dan Jasa).	1. Berita Acara Hasil Reviu; 2. Sertifikat mengikuti bimtek/diklat.	1. Mulai: 01-01-2024 Akhir: 31-03-2024 2. Mulai: 01-01-2024 Akhir: 31-03-2024	1. Bagian Keuangan/Satker 2. Bagian Sumber Daya Manusia dan Umum	1 - Sangat Jarang: < 2 kali	4 - 87% > Capaian IKU > 80%	Rendah (8)
41	E.5.23 - Penyerapan anggaran rendah	Mengurangi kemungkinan	1. Revisi/Pengalihan anggaran untuk kegiatan yang lebih prioritas; 2. Percepatan perbaikan rekomendasi hasil reviu dokumen tender; 3. Monitoring laporan harian penyerapan anggaran, serta melakukan pemutakhiran halaman III DIPA secara rutin per Triwulan.	1. Usulan Revisi Anggaran 2. Berita Acara 3. 2 Laporan	1. Mulai: 01-04-2024 Akhir: 31-12-2024 2. Mulai: 01-01-2024 Akhir: 31-03-2024 3. Mulai: 01-04-2024 Akhir: 31-12-2024	1. Bagian Keuangan 2. Satker 3. Bagian Keuangan	3 - Cukup sering: 6 s.d. 9 kali	2 - 97% > Capaian IKU > 92%	Rendah (10)

Prioritas	Kode Risiko	Rencana Penanganan Risiko					Level Risiko Harapan Setelah Mitigasi Risiko		
		Opsi Penanganan Risiko	Uraian Penanganan Risiko	Target Output	Jadwal Implementasi	Pengelola Risiko	Level Kemungkinan	Level Dampak	Level Risiko
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
46	E.2.1 - Terjadinya kebakaran di Kantor Pusat Dhjen Perkeretaapian	Mengurangi kemungkinan	Berpartisipasi dalam pelatihan/simulasi penanganan kebakaran	1 Kegiatan	Mulai: 01-10-2024 Akhir: 31-12-2024	Bagian Sumber Daya Manusia dan Umum	1 - Sangat jarang: < 2 kali	4 - 87% > Capaian IKU > 80%	Rendah (8)
61	E.4.19 - Usulan kegiatan TIK ditolak/tidak memperoleh clearance dari Tim SPBE Nasional.	Mengurangi kemungkinan	1. Melakukan pemantauan data dukung clearance usulan kegiatan TIK secara intensif dan berkala dengan agenda rapat/meeting; 2. Menyusun dokumen justifikasi.	Memperoleh clearance dari Tim SPBE Nasional sesuai jumalah usulan Usulan kegiatan TIK TA 2025	1. Mulai: 01-01-2024 Akhir: 30-06-2024 2. Mulai: 01-01-2024 Akhir: 31-03-2024	Bagian Perencanaan	1 - Sangat jarang: < 2 kali	4 - 87% > Capaian IKU > 80%	Rendah (8)
62	E.5.36 - Aplikasi rusak atau data bocor/hilang akibat serangan cyber/hack	Mengurangi kemungkinan	Update teknologi/framework menjadi versi terkini serta menyesuaikan dengan standart teknologi/keamanan pada sistem sebagaimana kebijakan manajemen keamanan informasi	Termanfaatnya sistem TIK	Mulai: 01-10-2024 Akhir: 31-12-2024	Bagian Perencanaan	1 - Sangat jarang: < 2 kali	4 - 87% > Capaian IKU > 80%	Rendah (8)

Prioritas	Kode Risiko	Rencana Penanganan Risiko					Level Risiko Harapan Setelah Mitigasi Risiko		
		Opsi Penanganan Risiko	Uraian Penanganan Risiko	Target Output	Jadwal Implementasi	Pengelola Risiko	Level Kemungkinan	Level Dampak	Level Risiko
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
63	E.5.37 - Sistem TIK di lingkungan Ditjen Perkeretaapian (Website,Portal Aplikasi,lainnya) tidak dapat diakses	Mengurangi kemungkinan	1. Pemantauan utilitas server secara berkala dengan tools monitoring; 2. Backup/recovery data rutin oleh sistem server.	1. Dokumentasi pemantauan utilitas server; 2. Dokumentasi Backup data.	1. Mulai: 01-01-2024 Akhir: 31-12-2024 2. Mulai: 01-01-2024 Akhir: 31-12-2024	Bagian Perencanaan	1 - Sangat jarang: < 2 kali	4 - 87% > Capaian IKU > 80%	Rendah (8)
64	E.5.38 - Aplikasi tidak optimal pemanfaatannya dikarenakan adanya gangguan sistem.	Mengurangi kemungkinan	Perbaikan dokumen KAK dengan dilengkapi perjanjian maintenance/garansi dalam waktu tertentu	Dokumen KAK	Mulai: 01-03-2024 Akhir: 31-09-2024	Bagian Perencanaan	1 - Sangat jarang: < 2 kali	4 - 87% > Capaian IKU > 80%	Rendah (8)
69	E.4.20 - Penyediaan informasi layanan data tidak update/valid dan terlambat	Mengurangi kemungkinan	1. Reviu SOP/prosedur pengelolaan data; 2. Penyelenggaraan Bimtek pengelolaan data; 3. Pemanfaatan Enterprise Service Bus (ESB) Ditjen Perkeretaapian.	1. Tersedianya 1 SOP yang update; 2. Terlaksananya 1 kegiatan Bimtek; 3. Termanfaatnya 1 sistem TIK.	1. Mulai: 01-06-2024 Akhir: 31-12-2024 2. Mulai: 01-02-2024 Akhir: 31-09-2024 3. Mulai: 01-06-2024 Akhir: 31-12-2024	Bagian Perencanaan	2 - Jarang: 2 kali s.d. 5 kali	3 - 92% > Capaian IKU > 87%	Rendah (11)

Prioritas	Kode Risiko	Rencana Penanganan Risiko					Level Risiko Harapan Setelah Mitigasi Risiko		
		Opsi Penanganan Risiko	Uraian Penanganan Risiko	Target Output	Jadwal Implementasi	Pengelola Risiko	Level Kemungkinan	Level Dampak	Level Risiko
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
70	E.5.43 - Kehilangan/kebocoran data pada Portal Aplikasi Ditjen Perkeretaapian	Mengurangi kemungkinan	Update teknologi/framework menjadi versi terkini serta menyesuaikan dengan standar teknologi/keamanan sebagaimana kebijakan manajemen keamanan informasi pada sistem Portal Aplikasi Ditjen Perkeretaapian	Update 1 sistem TIK	Mulai: 01-04-2024 Akhir: 31-12-2024	Bagian Perencanaan	1 - Sangat jarang: < 2 kali	4 - 87% > Capaian IKU > 80%	Rendah (8)
72	E.5.45 - Pelaksanaan tugas dan fungsi pada unit kerja belum berjalan maksimal	Mengurangi kemungkinan	1. Setiap pegawai diwajibkan mengikuti pelatihan dalam 1 tahun sebanyak 20 JP (Memetakan Kebutuhan Diklat menunjang pelaksanaan tugas); 2. MoU dengan Universitas/Sekolah Tinggi untuk penyelenggaraan Diklat Teknis Perkeretaapian.	Laporan Jumlah Pegawai DJKA yang mengikuti Diklat Teknis Bidang Perkeretaatpian/Manejerial	1. Mulai: 01-01-2024 Akhir: 31-12-2024 2. Mulai: 01-7-2024 Akhir: 31-12-2024	Bagian Sumber Daya Manusia dan Umum	1 - Sangat jarang: < 2 kali	4 - 87% > Capaian IKU > 80%	Rendah (8)
73	E.5.46 - Minimnya pelaksanaan diklat untuk peningkatan kompetensi ASN terkait diklat manajerial	Mengurangi kemungkinan	Memetakan kebutuhan diklat manajerial dan mengusulkan penyertaan diklat kepada Biro SDM/BPSDMP	Pegawai Ditjen KA yang memiliki kompetensi Manajerial	Mulai: 01-01-2024 Akhir: 31-12-2024	Bagian Sumber Daya Manusia dan Umum	1 - Sangat jarang: < 2 kali	4 - 87% > Capaian IKU > 80%	Rendah (8)

Prioritas	Kode Risiko	Rencana Penanganan Risiko					Level Risiko Harapan Setelah Mitigasi Risiko		
		Opsi Penanganan Risiko	Uraian Penanganan Risiko	Target Output	Jadwal Implementasi	Pengelola Risiko	Level Kemungkinan	Level Dampak	Level Risiko
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
74	E.5.48 - Layanan kepegawaian (kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, ujian dinas, database kepegawaian, penyusunan laporan kinerja pegawai, dan lainnya) tidak dilaksanakan dengan baik	Mengurangi kemungkinan	Melakukan Sosialisasi dan survey kepuasan pegawai terkait layanan kepegawaian	1 kegiatan Sosialisasi	Mulai: 01-03-2024 Akhir: 31-10-2024	Bagian Sumber Daya Manusia dan Umum	2 - Jarang: 2 kali s.d. 5 kali	3 - 92% > Capaian IKU > 87%	Rendah [11]
75	E.5.49 - Tidak optimalnya penyelenggaraan jabatan fungsional tertentu bidang perkeretaapian /inpassing	Mengurangi kemungkinan	Setiap pegawai diwajibkan mengikuti pelatihan dalam 1 tahun sebanyak 20 JP	Pegawai Ditjen KA yang memiliki komptensi teknis/tertentu	Mulai: 01-01-2024 Akhir: 31-12-2024	Bagian Sumber Daya Manusia dan Umum	2 - Jarang: 2 kali s.d. 5 kali	3 - 92% > Capaian IKU > 87%	Rendah [11]
76	E.1.3 - Tidak optimalnya/terlambat/tidak dilakukan pengendalian dan pengawasan terhadap izin teknis	Mengurangi kemungkinan	Sosialisasi terkait peraturan perpotongan dan/atau persinggungan antara jalur KA dengan bangunan lain	1 Kegiatan	Mulai: 01-09-2024 Akhir: 31-12-2024	Bagian Hukum	2 - Jarang: 2 kali s.d. 5 kali	3 - Pihak terpidana adalah Pejabat Eselon III, IV, atau pejabat yang setara, pejabat fungsional, dan pejabat fungsional umum, dan atau Putusan Perdata: 1M< x < 10M Administratif: tergugat merupakan Pejabat Eselon I, atau pejabat yang setara.	Rendah [11]

Prioritas	Kode Risiko	Rencana Penanganan Risiko					Level Risiko Harapan Setelah Mitigasi Risiko		
		Opsi Penanganan Risiko	Uraian Penanganan Risiko	Target Output	Jadwal Implementasi	Pengelola Risiko	Level Kemungkinan	Level Dampak	Level Risiko
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
77	E.5.50 - Sidang ditunda jika tidak ada perwakilan kuasa hukum.	Mengurangi kemungkinan	1. Koordinasi dengan Biro Hukum ketika berhalangan hadir di persidangan, agar Biro Hukum dapat mewakili; 2. Membuat surat kuasa substitusi kepada Balai	1. Laporan proses persidangan; 2. Surat Kuasa Substitusi Kepada Balai.	1. Mulai: 01-01-2024 Akhir: 31-12-2024 2. Mulai: 01-01-2024 Akhir: 31-12-2024	Bagian Hukum	2 - Jarang: 2 kali s.d. 5 kali	3 - 92% > Capaian IKU > 87%	Rendah [11]

Prioritas	Kode Risiko	Rencana Penanganan Risiko					Level Risiko Harapan Setelah Mitigasi Risiko		
		Opsi Penanganan Risiko	Uraian Penanganan Risiko	Target Output	Jadwal Implementasi	Pengelola Risiko	Level Kemungkinan	Level Dampak	Level Risiko
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
78	E.5.51 - Substansi penyusunan peraturan perundang-undangan tidak lengkap/tidak sesuai	Mengurangi kemungkinan	Peningkatan koordinasi dengan unit kerja terkait kesiapan naskah akademis untuk usulan revisi peraturan perundang-undangan	Naskah akademis yang sesuai ketentuan	Mulai: 01-02-2024 Akhir: 30-09-2024	Bagian Hukum	2 - Jarang: 2 kali s.d. 5 kali	3 - 92% > Capaian IKU > 87%	Rendah [11]
79	E.4.21 - Tidak optimalnya/terlambat/tidak dilakukan pengendalian dan pengawasan terhadap izin teknis	Mengurangi kemungkinan	1. Update data perizinan yang telah berlangsung selama 5 tahun (akan/sudah berakhir) yang untuk dilakukan perpanjangan izin secara berkala dengan memgoptimalkan peran Balai; 2. Menyusun jadwal untuk melakukan pengawasan dan berkoordinasi dengan unit kerja terkait (Ditpras dan BTP) terkait lokasi mana saja yang akan ditinjau sesuai dengan SK perizinan.	1. Data Perizinan yang akan/ sudah berakhir masa peizinannya; 2. Berita Acara sebagai dasar untuk menidaklanjuti perizinan yang telah berlangsung selama 5 tahun untuk dilakukan perpanjangan izin.	1. Mulai: 01-08-2024 Akhir: 31-12-2024 2. Mulai: 01-08-2024 Akhir: 31-12-2024	Bagian Hukum	2 - Jarang: 2 kali s.d. 5 kali	3 - 92% > Capaian IKU > 87%	Rendah [11]
85	E.5.53 - Penundaan/pembatalan kegiatan penyusunan kajian kebijakan/standar/pedoman teknis terkait perkeretaapian (NSPK bidang perkeretaapian)	Mengurangi kemungkinan	Percepatan pelaksanaan lelang dan kontrak kegiatan penyusunan kajian kebijakan/standar/pedoman teknis (NSPK bidang perkeretaapian)	Dokumen kontrak kegiatan kajian kebijakan/standar/pedoman teknis (NSPK bidang perkeretaapian)	Mulai: 01-01-2024 Akhir: 30-06-2024	Bagian SDM/Satker Bagian Hukum/Satker	1 - Sangat jarang: < 2 kali	4 - 87% > Capaian IKU > 80%	Rendah [8]

Prioritas	Kode Risiko	Rencana Penanganan Risiko					Level Risiko Harapan Setelah Mitigasi Risiko		
		Opsi Penanganan Risiko	Uraian Penanganan Risiko	Target Output	Jadwal Implementasi	Pengelola Risiko	Level Kemungkinan	Level Dampak	Level Risiko
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
88	E.5.55 - Penundaan/pembatalan kegiatan penyusunan studi /kajian terkait pembinaan dan peningkatan konektivitas perkeretaapian	Mengurangi kemungkinan	Percepatan pelaksanaan lelang dan kontrak kegiatan penyusunan studi/kajian terkait pembinaan dan peningkatan konektivitas perkeretaapian	Dokumen kontrak kegiatan studi/kajian	Mulai: 01-01-2024 Akhir: 30-06-2024	Bagian Perencanaan/Satker	1 - Sangat jarang: < 2 kali	4 - 87% > Capaian IKU > 80%	Rendah (8)
89	E.5.56 - Rekomendasi kebijakan tidak diterima /tidak dimanfaatkan oleh stakeholder eksternal terkait (Pemda, Badan Usaha, lainnya)	Mengurangi kemungkinan	Melakukan monitoring terhadap tindak lanjut rekomendasi stakeholder terkait disetiap tahapan pelaporan	Matriks monitoring tindak lanjut	Mulai: 01-10-2024 Akhir: 31-12-2024	Bagian Perencanaan	2 - Jarang: 2 kali s.d. 5 kali	3 - 92% > Capaian IKU > 87%	Rendah (11)
93	E.4.21 - Pemenuhan Data Perkeretaapian (statistik, geospasial) tertambat disampaikan kepada Pusdatin	Mengurangi kemungkinan	1. Peningkatan monitoring secara berkala dengan lembaran monitoring pemutakhiran data; 2. Pengoptimalan database perkeretaapian pada Portal Aplikasi DJKA	Lembar checklist monitoring pemutakhiran data	1. Mulai: 03-06-2024 Akhir: 31-12-2024 2. Mulai: 01-10-2024 Akhir: 31-12-2024	Bagian Perencanaan	2 - Jarang: 2 kali s.d. 5 kali	3 - 92% > Capaian IKU > 87%	Rendah (11)

formg

DAFTAR PEMANTAUAN PELAKSANAAN PENANGANAN RISIKO

Nama Unit Pemilik Risiko : **Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian**
Tahun : **2024**
Triwulan : I

Prioritas	Kode Risiko/Pernyataan Risiko	Penanganan Risiko	Penanggung Jawab	Target Output	Realisasi Output	Target Waktu	Realisasi Waktu	Hambatan/Kendala	Link Data Dukung	Keterangan/Status (Sudah/Belum)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	E.5.1 - Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tematik DJKA tidak terlaksana dengan maksimal.	1. Revisi terhadap rencana aksi RB Tematik di lingkungan DJKA; 2. Perbaikan/penyesuaian terhadap program RB Tematik terhadap tema-tema yang diangkat.	Bagian Sumber Daya Manusia dan Umum	Target Rencana Aksi dan Pelaksanaan dari LKE RB Tematik	3 Dokumen (Dokumen Surat Pengisian, LKE RB Tematik DJKA 2024 dan dokumen rapat pembahasan dengan Biro SDM dan BKIP terhadap program RB Tematik).	1. Mulai: 01-01-2024 Akhir: 30-09-2024 2. Mulai: 01-01-2024 Akhir: 30-09-2024	01-Jan-2024 s.d 31-Mar-2024	Tidak ada kendala	https://bit.ly/datadukungMR_TW1_SDMU	**Sudah** 1. Pada TW 1 sudah dilakukan revisi terhadap rencana aksi RB Tematik. 2. Telah dilaksanakan rapat pembahasan dengan Biro SDM dan hasil rapat disampaikan bahwa masih perlu dilakukan perbaikan/penyesuaian terhadap program RB Tematik.
6	E.5.4 - Dokumen Renstra tidak disusun sesuai dengan ketentuan dan substansi yang dibutuhkan.	Mengikutsertakan tim penyusun Renstra untuk mengikuti Diklat terkait perencanaan strategis dan teknis perkeretaapian baik di bidang LLAKA, Prasarana, Sarana dan Keselamatan bekerja sama dengan lembaga diklat	Bagian Perencanaan	3 Kegiatan diklat	1 Kegiatan (Bimbingan Teknis Bidang Lalu Lintas dan Angkutan KA pada Penyusunan Dokumen Renstra)	Mulai: 01-01-2024 Akhir: 30-06-2024	01-Mar-2024 s.d 31-Mar-2024	1. Tidak terdapat kendala; 2 Diklat Bidang Sarana dan Keselamatan rencana realisasi pada TW II Tahun 2024	https://tinyurl.com/DakungE54	**Sudah**
24	E.5.17 - Pengusulan rencana pendanaan kerjasama luar negeri kurang komprehensif	1. Dilakukan rapat pembahasan pada H-7 Deadline bersama unit kerja terkait; 2. Membuat drive tabel ceklis persyaratan data dukung dan folder data dukung pengusulan dan bersurat resmi untuk pengisian pada drive tersebut.	Bagian Perencanaan	1. Laporan Rapat Hasil Pembahasan serta List Kelengkapan Data Dukung; 2. Surat pengusulan dan drive data dukung.	1. 1 Kegiatan (Telah dilaksanakan rapat pengusulan kegiatan untuk Bluebook 2025-2029 - usulan dukungan pembiayaan perkeretaapian metropolitan Bandung) 2. 1 Dokumen (Telah dibuatkan tabel checklist)	1. Mulai: 01-01-2024 Akhir: 30-11-2024 2. Mulai: 01-01-2024 Akhir: 30-11-2024	01-Jan-2024 s.d 31-Mar-2024	Checklist belum terisi secara lengkap karena masih pembahasan awal	https://tinyurl.com/DakungE517	**Sudah**
26	E.5.19 Penilaian, pemantauan dan pelaporan Manajemen Risiko tidak dilaksanakan sesuai ketentuan	1. Penandatanganan Piagam MR secara simbolis termasuk penetapan Form 1,5,8 sesuai dengan KM 69 Tahun 2023; 2. Sosialisasi Sistem Informasi MR yang dikelola oleh Itjen Kemenhub.	Bagian Perencanaan	1. 1 Dokumen 2. 1 Laporan Kegiatan	2 Kegiatan (Kegaitan Penandatanganan PK secara simbolis termasuk penetapan Form 1,5,8 dan Sosialisasi Pemanfaatan Aplikasi SIMARKO yang dikelola oleh Itjen Kemenhub)	1. Mulai: 01-01-2024 Akhir: 31-01-2024 2. Mulai: 01-02-2024 Akhir: 30-03-2024	01 Jan-2024 s.d 31-Mar-2024	Tidak ada kendala	https://tinyurl.com/DakungE519	**Sudah**

Prioritas	Kode Risiko/Pernyataan Risiko	Penanganan Risiko	Penanggung Jawab	Target Output	Realisasi Output	Target Waktu	Realisasi Waktu	Hambatan/Kendala	Link Data Dukung	Keterangan/Status (Sudah/Belum)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
28	E.4.8 - Pelaporan Pelaksanaan Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) di lingkungan DJKA tidak dilaporkan secara berkala kepada Itjen selaku UPG Instansi	1. Monitoring pelaksanaan pelaporan gratifikasi di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian; 2. Penyampaian surat edaran pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian, 3. Penyampaian himbauan pencegahan korupsi dan gratifikasi hari besar di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian.	Bagian Sumber Daya Manusia dan Umum	1. 1 Laporan hasil monitoring 2. 1 Surat Edaran 3. 1 Surat Himbauan	1 Surat Edaran pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian	1. Mulai: 01-04-2024 Akhir: 31-06-2024 2. Mulai: 01-01-2024 Akhir: 31-03-2024 3. Mulai: 01-04-2024 Akhir: 31-06-2024	01-Jan-2024 s.d 31-Mar-2024	Tidak ada kendala	https://bit.ly/datadukungMR_TWI_SDMU	Sudah
30	E.4.9 - Tidak tuntasnya rekomendasi atas temuan Itjen, BPKP dan BPK	Pemutakhiran data Tindak Lanjut temuan Itjen, BPKP dan BPK secara berkala setiap Triwulan	Bagian Keuangan	Berita Acara	12 Berita Acara	Mulai: 01-01-2024 Akhir: 31-12-2024	01-Feb-2024 s.d 31-Mar-2024	1. Pada rapat kegiatan pemantauan tindak lanjut rekomendasi pada LHA maupun LHP belum dapat tuntas seluruhnya dikarenakan masih adanya data dukung yang belum dipenuhi oleh Satker/Balai, 2. Batas waktu tindak lanjut 60 hari sejak LHA terbit.	https://tinyurl.com/DakungE69	Sudah 1. Telah dilaksanakan Pemantauan Tindak Lanjut temuan Inspektorat Jenderal Untuk Wilayah Jakarta pada tanggal 27 - 29 Februari 2024 sesuai surat undangan Sesditjen Perkeretaapian Nomor : PS.302/1/K1/DJKA/2024 tanggal 21 Februari 2024 Hal Undangan; 2. Telah dilaksanakan Pemantauan Tindak Lanjut Laporan Hasil Audit (LHA) ITJEN dan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI pada tanggal 5 - 6 Maret 2024 sesuai undangan rapat Sesitjen Nomor : PS.316/1/3/ITJEN/2024 tanggal 21 Februari 2024 Hal : Undangan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan; 3. Telah dilaksanakan Pemantauan Tindak Lanjut Laporan Hasil Audit (LHA) ITJEN dan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI pada tanggal 26 - 28 Maret 2024 sesuai undangan rapat Sesitjen Nomor : UM.207/4/8/ITJEN/2024 tanggal 22 Maret 2024 Hal - Undangan Kegiatan;
31	E.6.1 - Pegawai tidak mempunyai integritas dan tidak disiplin	Program pelatihan dan pembinaan yang berfokus pada aspek mental dan spiritual karyawan	Bagian Sumber Daya Manusia dan Umum	Program pelatihan dan pembinaan mental dan spiritual	3 Dokumen (Dokumentasi Apel Pagi, Capacity Building dan Siraman Rohani)	Mulai: 01-01-2024 Akhir: 31-12-2024	01-Feb-2024 s.d 31-Mar-2024	Tidak ada kendala	https://bit.ly/datadukungMR_TWI_SDMU	Sudah
32	E.5.21 - Target PNBP tidak sesuai usulan.	Menggali potensi penerimaan PNBP yang belum terpungut	Bagian Keuangan	Target PNBP terpenuhi.	1 Kegiatan (Rapat terkait Progres Realisasi PNBP Triwulan I Tahun 2024 dan Proyeksi penerimaan PNBP sampai akhir tahun	Mulai: 01-01-2024 Akhir: 29-02-2024	21-Mar-2024 s.d 22-Mar-2024	Kendala yang sedang dihadapi saat ini yaitu Revisi PP 15 tentang tarif PNBP pada Kementerian Perhubungan yang masih berproses di tingkat PAK	https://drive.google.com/drive/folders/1MXreQuTnKQDBereUBG1xc063_PRvUJ?usp=drive_link	Sudah 1. Telah dilaksanakan Rekonsiliasi laporan PNBP TW. I bersama seluruh Balai dan Satker di Lingkungan DJKA tanggal 25 Maret 2024 2 Melakukan Monitoring potensi penerimaan atas PNBP/ BLU pada Balai / Satker
33	E.6.2 - Pemanfaatan BMN belum optimal.	Analisis data aset BMN berupa tanah sesuai dengan PP 57 Tahun 1990	Bagian Keuangan	Dokumen Analisis Verifikasi ROW	1 Kegiatan (Rapat koordinasi tanggal 30 Januari 2024 yang dihadiri oleh DJKA, DJKN dan PT KAI untuk membahas sertifikasi)	Mulai: 01-01-2024 Akhir: 31-03-2024	01-Jan-2024 s.d 31-Mar-2024	1. Masih terdapatnya tanah sepanjang jalur KA yang dikuasai oleh pihak lain; 2. Terdapat kendala keterbatasan jumlah sumber daya manusia dalam pelaksanaan sertifikasi; 3. Target penyelesaian sertifikasi 29.130 bidang tanah.	https://tinyurl.com/Dakung467	Sudah

Prioritas	Kode Risiko/Pernyataan Risiko	Penanganan Risiko	Penanggung Jawab	Target Output	Realisasi Output	Target Waktu	Realisasi Waktu	Hambatan/Kendala	Link Data Dukung	Keterangan/Status (Sudah/Belum)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
38	E.6.4 - Ketidaksesuaian pencantuman target pada RPD	Sosialisasi operator/pengelola anggaran untuk menentukan target RPD	Bagian Keuangan	1 Kegiatan	1 Kegiatan (Sosialisasi meningkatkan capaian pelaksanaan anggaran dan nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) dengan mengundang DJPB Kemenkeu)	Mulai: 01-01-2024 Akhir: 31-03-2024	07-Mar-2024 s.d 09-Mar-2024	Tidak ada kendala	https://drive.google.com/drive/folders/1tHlV7INjiKR92dB9wlZsg-hWYVLmlJ?usp=drive_link	Sudah
40	E.4.14 - Kontrak pekerjaan tertunda	1. Percepatan perbaikan rekomendasi hasil reviu dokumen tender; 2. Bimtek/Diklat Pengelola Anggaran (PPK/Pengadaan Barang dan Jasa).	1. Bagian Keuangan/Satker 2. Bagian Sumber Daya Manusia dan Umum	1. Berita Acara Hasil Reviu; 2. Sertifikat mengikuti bimtek/diklat	1. 1 Berita Acara hasil reviu dokumen tender; 2. 2 Dokumen (Surat Tugas Diklat PPK Tipe C dan laporan kegiatan sosialisasi standar biaya masukan dan perjalanan dinas).	1. Mulai: 01-01-2024 Akhir: 31-03-2024 2. Mulai: 01-01-2024 Akhir: 31-03-2024	01-Jan-2024 s.d 29-Feb-2024	Tidak ada kendala	1. https://tinyurl.com/DakungE414 2. Dokumen Pendukung Diklat PPK Tipe C : https://bit.ly/43L6KKQ dan Dokumen pendukung sosialisasi Standar Biaya Masukan dan Perjalanan Dinas : https://bit.ly/4al31TC	Sudah

Prioritas	Kode Risiko/Pernyataan Risiko	Penanganan Risiko	Penanggung Jawab	Target Output	Realisasi Output	Target Waktu	Realisasi Waktu	Hambatan/Kendala	Link Data Dukung	Keterangan/Status (Sudah/Belum)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
61	E.5.25 - Penyerapan anggaran rendah	Percepatan perbaikan rekomendasi hasil reviu dokumen tender.	1. Bagian Keuangan 2. Satker 3. Bagian Keuangan	1. Usulan Revisi Anggaran 2. Berita Acara 3. 2 Laporan	Dokumen berita Acara hasil reviu dokumen tender	Mulai: 01-01-2024 Akhir: 31-03-2024	01-Jan-2024 s.d 31-Mar-2024	Tidak ada kendala	https://tinyurl.com/DakungE513	Sudah
61	E.4.19 - Usulan kegiatan TIK ditolak/tidak memperoleh clearance dari Tim SPBE Nasional	1. Melakukan pemantauan data dukung clearance usulan kegiatan TIK secara intensif dan berkala dengan agenda rapat/meeting; 2. Menyusun dokumen justifikasi.	Bagian Perencanaan	Memperoleh clearance dari Tim SPBE Nasional sesuai jumlah usulan Usulan kegiatan TIK TA 2025	1. 12 Dokumen (Surat Hasil Lolos Clearance Tim SPBE Nasional), 2. 1 Dokumentasi (Dokumen Rapat Koordinasi dengan Tim SPBE Nasional	1. Mulai: 01-01-2024 Akhir: 30-06-2024 2. Mulai: 01-01-2024 Akhir: 31-03-2024	01-Jan-2024 s.d 31-Mar-2024	Tidak ada kendala	https://tinyurl.com/DakungE419	Sudah
63	E.5.37 - Sistem TIK di lingkungan Ditjen Perkeretaapian (Website,Portal Aplikasi,lainnya) tidak dapat diakses	1. Pemantauan utilitas server secara berkala dengan tools monitoring; 2. Backup/recovery data rutin oleh sistem server.	Bagian Perencanaan	1. Dokumentasi pemantauan utilitas server; 2. Dokumentasi Backup data.	1. 1 Dokumen (Telah dilakukan monitoring utilitas server dibuktikan dengan adanya dokumen pemantauan); 2. 1 Kegiatan (backup/recovery data secara rutin pada server)	1. Mulai: 01-01-2024 Akhir: 31-12-2024 2. Mulai: 01-01-2024 Akhir: 31-12-2024	01-Jan-2024 s.d 31-Mar-2024	Tidak ada kendala	https://tinyurl.com/DakungE537	Sudah
64	E.5.38 – Aplikasi tidak optimal pemanfaatannya dikarenakan adanya gangguan sistem	Perbaikan dokumen KAK dengan dilengkapi perjanjian maintenance/garansi dalam waktu tertentu	Bagian Perencanaan	Dokumen KAK	2 Dokumen (Dokumen KAK kegiatan telah dilengkapi dengan perjanjian maintenance/garansi)	Mulai: 01-03-2024 Akhir: 31-09-2024	01-Jan-2024 s.d 29-Feb-2024	Tidak ada kendala	https://tinyurl.com/DakungE538	Sudah
69	E.4.20 - Penyediaan informasi layanan data tidak update/valid dan terlambat	Penyelenggaraan Bimtek pengelolaan data	Bagian Perencanaan	Terlaksananya 1 kegiatan Bimtek	1 Kegiatan (Telah dilakukan Rapat Koordinasi serta pembinaan dari BPS terkait pengelolaan Data)	Mulai: 01-02-2024 Akhir: 31-09-2024	01-Feb-2024 s.d 31-Mar-2024	Tidak ada kendala (SOP pengelolaan data dalam proses dengan Pusdatin)	https://tinyurl.com/DakungE420	Sudah
72	E.5.45 - Pelaksanaan tugas dan fungsi pada unit kerja belum berjalan maksimal	Setiap pegawai diwajibkan mengikuti pelatihan dalam 1 tahun sebanyak 20 JP (Memetakan Kebutuhan Diklat menunjang pelaksanaan tugas)	Bagian Sumber Daya Manusia dan Umum	Laporan Jumlah Pegawai DJKA yang mengikuti Diklat Teknis Bidang Perkeretaapian/Manajerial	1 Dokumen Surat Pemanggilan Peserta Diklat Teknis	Mulai: 01-01-2024 Akhir: 31-12-2024	01-Jan-2024 s.d 29-Feb-2024	Telah dilaksanakan Diklat Kompetensi bekerjasama dengan Lembaga Pendidikan (Diklat), pelaksanaan diklat sedang berlangsung	https://bit.ly/datadukungMR_TWI_SDMU	Sudah
73	E.5.46 - Minimnya pelaksanaan diklat untuk peningkatan kompetensi ASN terkait diklat manajerial	Memetakan kebutuhan diklat manajerial dan mengusulkan penyelenggaraan diklat kepada Biro SDM/BPSDMP	Bagian Sumber Daya Manusia dan Umum	Pegawai Ditjen KA yang memiliki kompetensi Manajerial	2 dokumen (rekap pegawai yang sudah mengikuti diklat manajerial dan PP 17 tahun 2020)	Mulai: 01-01-2024 Akhir: 31-12-2024	01-Jan-2024 s.d 29-Feb-2024	Data dukung: hasil uji kompetensi, PP 17 Tahun 2020 (kewajiban diklat 20 JP per tahun)	https://bit.ly/datadukungMR_TWI_SDMU	Sudah

Prioritas	Kode Risiko/Pernyataan Risiko	Penanganan Risiko	Penanggung Jawab	Target Output	Realisasi Output	Target Waktu	Realisasi Waktu	Hambatan/Kendala	Link Data Dukung	Keterangan/Status (Sudah/Belum)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
74	E.S.48 - Layanan kepegawaian (kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, ujian dinas, database kepegawaian, penyusunan laporan kinerja pegawai, dan lainnya) tidak dilaksanakan dengan baik	Melakukan Sosialisasi dan survey kepuasan pegawai terkait layanan kepegawaian	Bagian Sumber Daya Manusia dan Umum	3 kegiatan Sosialisasi	3 dokumen (laporan kegiatan sosialisasi SOP Saluran Pelayanan, Tata Naskah, SBM, Pengelolaan Arsip dan Public Speaking pada bulan 31 Januari - 2 Februari 2024 dan surat tugas pemetaan kompetensi CACT bulan Februari - Maret 2024)	Mulai: 01-03-2024 Akhir: 31-10-2024	01-Jan-2024 s.d 31-Mar-2024	1. Telah dilakukan survey kepuasan layanan kepegawaian pada bulan Januari 2024	https://bit.ly/datadukungMR_TWI_SDMU	Sudah
75	E.S.49 - Tidak optimalnya penyelenggaraan jabatan fungsional tertentu bidang perkeretaapian /inpassing	Setiap pegawai diwajibkan mengikuti pelatihan dalam 1 tahun sebanyak 20 JP	Bagian Sumber Daya Manusia dan Umum	Pegawai Ditjen KA yang memiliki kompetensi teknis/tertentu	2 dokumen (pengumuman hasil uji kompetensi tahap 2 Jabatan fungsional bidang perkeretaapian dan Surat Pemanggilan Diklat Teknis)	Mulai: 01-01-2024 Akhir: 31-12-2024	01-Jan-2024 s.d 31-Mar-2024	Tidak ada kendala	https://bit.ly/datadukungMR_TWI_SDMU	Sudah
77	E.S.50 - Sidang ditunda jika tidak ada penyaklan kuasa hukum.	1. Koordinasi dengan Biro Hukum ketika berhalangan hadir di persidangan, agar Biro Hukum dapat mewakili; 2. Membuat surat kuasa substitusi kepada Balai	Bagian Hukum	1. Laporan proses persidangan; 2. Surat Kuasa Substitusi Kepada Balai.	1. 1 Dokumen (Pada Triwulan I 2024 telah dikuti 3 persidangan); 2. 1 Surat Kuasa Substitusi (Surat Kuasa Substitusi kepada Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Medan untuk mewakili persidangan).	1. Mulai: 01-01-2024 Akhir: 31-12-2024 2. Mulai: 01-01-2024 Akhir: 31-12-2024	01-Jan-2024 s.d 31-Mar-2024	Tidak ada kendala	https://drive.google.com/drive/folders/1b66aQ7GSfrwL73wJfPgno92eR43bmYs?usp=drive_link	Sudah
78	E.S.51 - Substansi penyusunan peraturan perundang-undangan tidak lengkap/tidak sesuai	Peningkatan koordinasi dengan unit kerja terkait kelapan naskah akademis untuk usulan revisi peraturan perundang-undangan	Bagian Hukum	Naskah akademis yang sesuai ketentuan	1 Kegiatan (Telah dilaksanakan persepatan penyusunan RPM Trem Otonom (Progres pembahasan tingkat internal DJKA dengan melibatkan BKT dan Akademisi))	Mulai: 01-02-2024 Akhir: 30-09-2024	01-Feb-2024 s.d 31-Mar-2024	Tidak ada kendala	link draft naskah akademik https://bit.ly/DraftPembahasanPeraturanPertUsaha dan link dokumen naskah akademik trem otonom https://tinyurl.com/NATremOtonom	Sudah
85	E.S.53 - Penundaan/pembatalan kegiatan penyusunan kajian kebijakan/standar/pedoman teknis terkait perkeretaapian (NSPK bidang perkeretaapian)	Percepatan pelaksanaan lelang dan kontrak kegiatan penyusunan kajian kebijakan/standar/pedoman teknis (NSPK bidang perkeretaapian)	Bagian SDM/Satker Bagian Hukum/Satker	Dokumen kontrak kegiatan kajian kebijakan/standar/pedoman teknis (NSPK bidang perkeretaapian)	2 Dokumen (Surat permohonan pembentukan Pokja lelang dari PPK kepada Biro LPPBMN dan SK Pokja kegiatan)	Mulai: 01-01-2024 Akhir: 30-06-2024	01-Jan-2024 s.d 31-Jan-2024	Pada tahun 2024 terdapat perubahan mekanisme penetapan Pokja sehingga mempengaruhi durasi proses lelang/seleksi menjadi lebih lama	https://tinyurl.com/DukungE53	Sudah

Prioritas	Kode Risiko/Pernyataan Risiko	Penanganan Risiko	Penanggung Jawab	Target Output	Realisasi Output	Target Waktu	Realisasi Waktu	Kendala/Kendala	Link Data Dukung	Keterangan/Status (Sudah/Belum)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
88	K.5.55 - Penundaan/pembatalan kegiatan penyusunan studi /kajian terkait pembinaan dan peningkatan konektivitas perkeretaapian	Percepatan pelaksanaan lelang dan kontrak kegiatan penyusunan studi/kajian terkait pembinaan dan peningkatan konektivitas perkeretaapian	Bagian Perencanaan/Satke r	Dokumen kontrak kegiatan studi/kajian	2 Dokumen (Surat permohonan pembentukan Pokja lelang dan PPK kepada Biro LPPBMN dan SK Pokja kegiatan)	Mulai: 02-01-2024 Akhir: 30-06-2024	01-Jan-2024 s.d 31-Jan-2024	1. Pada tahun 2024 terdapat 2 kegiatan terdampak AA dan terhadap 2 kegiatan tersebut telah diusulkan kembali pada RKA Pagu Kebutuhan tahun 2025 2. Pada tahun 2024 terdapat perubahan mekanisme penetapan Pokja sehingga mempengaruhi durasi proses lelang/seleksi menjadi lebih lama	https://tinyurl.com/tjuk unaf555	Sudah

PEMANTAUAN TERHADAP PERITIWA RISIKO

Nama Unit Pemilik Risiko : Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian
Tahun : 2024
Triwulan : I

Kode	Uraian Peristiwa	Pernyataan Risiko	Waktu Kejadian	Tempat Kejadian	Skor Dampak	Pemicu Peristiwa	Kode Penyebab	Unit Pengelola Risiko
1	2	3	4	5	6	7	8	9
E.5.36.MC.3	Aplikasi rusak atau data bocor/hilang akibat serangan cyber/hack	Website Ditjen Perkeretaapian tidak dapat diakses	01 Maret 2024	Kantor pusat	Sedang [13]	Terdapat celah keamanan pada *upload file* dan serangan *brute force*	- (kode penyebab sama dengan identifikasi awal)	1. Bagian Perencanaan 2. Bagian Keuangan
E.5.55.MY.7	Penundaan/pembatalan kegiatan penyusunan studi /kajian terkait pembinaan dan peningkatan konektivitas perkeretaapian	Pagu anggaran kegiatan penyusunan studi /kajian terkait pembinaan dan peningkatan konektivitas perkeretaapian terblokir	January 2024	Kantor pusat	Tinggi [17]	Terdapat kebijakan Automatic Adjustment sesuai dengan surat Menteri Keuangan Nomor S-1082/MK.02/2023 tanggal 29 Desember 2023 tentang Automatic Adjustment Belanja Kementerian/Lembaga TA 2024	EX (Eksternal)	Bagian Keuangan

REVIU USULAN RISIKO BARU

Nama Unit Pemilik Risiko : Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian
Tahun : 2024
Triwulan : I

No.	Usulan Pernyataan Risiko	Unit Pemilik Risiko Pengusul	Status Reviu		Alasan jika Ditolak	Link Dokumen Pendukung
			Diterima	Ditolak		
1	2	3	4	5	6	7
1.	*- N I H I L -*					

DAFTAR RENCANA PENANGANAN RISIKO YANG BELUM TEREALISASI

Tahun : 2024
Triwulan : I

No	Rencana Penanganan Risiko	Target Waktu	Pernyataan Risiko	Kode Penyebab	Penanggung jawab	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
1.	*- N I H I L -*					

LAMPIRAN

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN 8

PERSENTASE REALISASI PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP) BIDANG PERKERETAAPIAN

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

GEDUNG KARYA
JL. MERDEKA BARAT NO.8
JAKARTA 10110

TELP : 0813 6001 3838

WEBSITE : http://djka.dephub.go.id/
EMAIL : ditjenka@kemenhub.go.id

NOTA DINAS

Nomor : 0512 / KI.2 / VII / 2024

Yth.	:	Sekretaris Direktorat Jenderal Perkeretaapian
Dari	:	Kepala Bagian Keuangan
Hal	:	Tindak Lanjut Pemenuhan Data Dukung Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan Tahun 2024 Bagian Keuangan.
Tanggal	:	17 Juli 2024

Menunjuk surat Sekretaris Direktorat Jenderal Perkeretaapian Nomor: UM.207/4/KI/DJKA/2024 tanggal 16 Juli 2024 perihal Tindak Lanjut Rapat Implementasi SAKIP dan Pembahasan Kinerja Triwulan II Tahun 2024, bahwa dalam rangka penyusunan Laporan Monitoring Kinerja Triwulan II Tahun 2024 sesuai tugas dan fungsi Bagian Keuangan dengan hormat bersama ini terlampir dilaporkan dokumen pendukung monitoring dan evaluasi berkala berdasarkan referensi aplikasi terkait sebagai berikut:

1. Laporan Target & Realisasi PNBP Tahun Anggaran 2024 berdasarkan aplikasi Sistem Informasi PNBP Online (SIMPONI) DJA Kemenkeu, sebagai data Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) 8 - Persentase Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Bidang Perkeretaapian; dan
2. Laporan Realisasi Belanja berdasarkan aplikasi Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM-SPAN) DJPB Kemenkeu, sebagai data Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) 9 - Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran Ditjen Perkeretaapian.

Atas perhatian dan arahan lebih lanjut dari Ibu Sekretaris Direktorat Jenderal Perkeretaapian diucapkan terima kasih.

Irvan Ariestiana
NIP 197906232005021002

Tembusan:
Kepala Bagian Perencanaan

KEMENTERIAN KEUANGAN R.I
DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN
SISTEM INFORMASI PNBP ONLINE (SIMPONI)

LAPORAN TARGET & REALISASI PNBP PER AKUN (SUMBER DATA TPNBP-SPAN-SIMPONI)
TAHUN ANGGARAN 2024

KEMENTERIAN/LEMBAGA : 022 - KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
UNIT ESELON I : 08 - Ditjen Perkeretaapian
PERIODE LAPORAN : JANUARI s.d. JUNI

SATUAN KERJA	AKUN	TARGET - SUMBER DATA TPNBP (Rp)	REALISASI - SUMBER DATA SPAN (Rp)	REALISASI - SUMBER DATA SIMPONI (Rp)
445572 - PENGEMBANGAN DAN PENINGKATAN FASILITAS KESELAMATAN PERKERETAAPIAN	425122 - Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	0,00	98.583.000,00	98.583.000,00
	425287 - Pendapatan Pengujian, Sertifikasi dan Kalibrasi di Bidang Perhubungan	1.200.000.000,00	513.750.000,00	513.750.000,00
467005 - BALAI PENGELOLA KERETA API RINGAN SUMATERA SELATAN	424119 - Pendapatan Jasa Penyediaan Barang dan Jasa Lainnya	19.069.206.000,00	9.130.930.000,00	0,00
	424312 - Pendapatan Hasil Kerja Sama Lembaga/Badan Usaha	9.267.336.000,00	387.500.000,00	0,00
	424911 - Pendapatan Jasa Layanan Perbankan BLU	0,00	66.319.756,00	0,00
	424923 - Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Ruangan	0,00	126.300.000,00	0,00
	425911 - Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0,00	22.431.170,00	0,00
	425912 - Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	0,00	990.611.938,00	190.740.000,00
467006 - BALAI PENGELOLA KERETA API SULAWESI SELATAN	425131 - Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	20.000.000,00	0,00	0,00
	425151 - Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi	479.320.000,00	230.556.000,00	230.556.000,00
	425699 - Pendapatan Jasa Lainnya	0,00	1.352.471.000,00	1.352.471.000,00
	425811 - Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	0,00	870.710.793,00	0,00
	425911 - Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0,00	106,00	0,00
	425912 - Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	0,00	547.669.519,00	0,00
	425913 - Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu	0,00	16.743.278.239,00	132.187.511,00

SATUAN KERJA	AKUN	TARGET - SUMBER DATA TPNBP (Rp)	REALISASI - SUMBER DATA SPAN (Rp)	REALISASI - SUMBER DATA SIMPONI (Rp)
467309 - BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN KELAS I JAKARTA	425131 - Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	11.347.894.000,00	0,00	0,00
	425811 - Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	0,00	98.256.272,00	0,00
	425911 - Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0,00	792,00	0,00
	425913 - Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu	0,00	1.757.092.637,00	0,00
467321 - BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN KELAS I SEMARANG	425131 - Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	0,00	34.881,00	0,00
	425699 - Pendapatan Jasa Lainnya	0,00	52.616.000,00	52.616.000,00
	425811 - Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	0,00	19.740.000,00	19.740.000,00
	425911 - Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0,00	6.207.591,00	0,00
	425912 - Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	0,00	75.416.973,00	343.000,00
	425913 - Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu	0,00	51.552.590,00	51.552.590,00
467337 - BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN KELAS I SURABAYA	425129 - Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	100.000.000,00	0,00	0,00
	425911 - Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0,00	1.507.100,00	1.507.100,00
467345 - BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN KELAS I MEDAN	425122 - Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	0,00	6.666.666,00	6.666.666,00
	425131 - Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	0,00	13.304.745,00	13.230.000,00
	425699 - Pendapatan Jasa Lainnya	0,00	220.761.000,00	220.761.000,00
	425811 - Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	0,00	0,00	0,00
	425911 - Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0,00	1.061,00	0,00
	425912 - Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	0,00	40.772.590,00	40.772.590,00
	425913 - Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu	0,00	646.320.000,00	326.320.000,00
467352 - BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN KELAS II PADANG	425122 - Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	0,00	10.500.000,00	10.500.000,00
	425131 - Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	0,00	99.660,00	0,00
	425699 - Pendapatan Jasa Lainnya	0,00	163.730.000,00	163.730.000,00
	425911 - Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0,00	1.405,00	0,00

SATUAN KERJA	AKUN	TARGET - SUMBER DATA TPNBP (Rp)	REALISASI - SUMBER DATA SPAN (Rp)	REALISASI - SUMBER DATA SIMPONI (Rp)
	425912 - Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	0,00	573.495.728,00	0,00
	425915 - Penerimaan Kembali Belanja Subsidi Tahun Anggaran Yang Lalu	0,00	791.068.121,00	791.068.121,00
467364 - BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN KELAS II PALEMBANG	425122 - Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	0,00	217.581.000,00	217.581.000,00
	425911 - Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0,00	2.590.000,00	0,00
467373 - BALAI PERAWATAN PERKERETAAPIAN	425131 - Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	30.331.460.000,00	10.360.000,00	10.360.000,00
	425132 - Pendapatan Sewa Peralatan dan Mesin	2.295.390.000,00	1.086.948.682,00	1.086.948.682,00
	425151 - Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi	9.193.100.000,00	285.610.000,00	285.610.000,00
	425911 - Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0,00	665.000,00	665.000,00
	425912 - Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	0,00	149.101.004,00	149.101.004,00
467385 - BALAI PENGUJIAN PERKERETAAPIAN	424119 - Pendapatan Jasa Penyediaan Barang dan Jasa Lainnya	55.007.525.000,00	34.260.006.225,00	0,00
	424312 - Pendapatan Hasil Kerja Sama Lembaga/Badan Usaha	1.924.250.000,00	0,00	0,00
	424911 - Pendapatan Jasa Layanan Perbankan BLU	0,00	163.947.482,00	0,00
467462 - PENGEMBANGAN LALU LINTAS DAN PENINGKATAN ANGKUTAN KERETA API	425512 - Pendapatan Penggunaan Prasarana Perkeretaapian/Track Access Charge	1.101.061.822.000,00	244.233.559.805,00	244.233.559.805,00
	425519 - Pendapatan Jasa Transportasi Lainnya	331.750.000,00	267.000.000,00	267.000.000,00
	425811 - Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	0,00	425.136.120,00	0,00
	425912 - Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	0,00	100.559.340,00	0,00
467478 - PENGEMBANGAN DAN PENINGKATAN SARANA PERKERETAAPIAN	425151 - Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi	0,00	11.910.000,00	11.910.000,00
	425287 - Pendapatan Pengujian, Sertifikasi dan Kalibrasi di Bidang Perhubungan	1.422.000.000,00	861.550.000,00	861.550.000,00
	425912 - Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	0,00	10.360.000,00	10.360.000,00
467484 - PENGEMBANGAN, PENINGKATAN DAN PERAWATAN PRASARANA PERKERETAAPIAN	425287 - Pendapatan Pengujian, Sertifikasi dan Kalibrasi di Bidang Perhubungan	132.500.000,00	71.850.000,00	71.850.000,00
	425519 - Pendapatan Jasa Transportasi Lainnya	1.050.000.000,00	973.260.000,00	973.260.000,00

SATUAN KERJA	AKUN	TARGET - SUMBER DATA TPNBP (Rp)	REALISASI - SUMBER DATA SPAN (Rp)	REALISASI - SUMBER DATA SIMPONI (Rp)
	425811 - Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	0,00	155.215.004,00	0,00
	425912 - Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	0,00	593.349.955,00	0,00
	425913 - Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu	0,00	664.652.191,00	664.652.191,00
467504 - KANTOR PUSAT DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN	425122 - Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	0,00	753.000.000,00	753.000.000,00
	425131 - Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	17.000.000.000,00	1.798.734.952,00	1.798.734.952,00
	425912 - Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	0,00	169.130.958,00	169.130.958,00
467515 - BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN KELAS I BANDUNG	425122 - Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	0,00	4.567.890,00	4.567.890,00
	425129 - Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	100.000.000,00	0,00	0,00
	425811 - Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	0,00	839.900.893,00	238.644.000,00
	425913 - Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu	0,00	2.408.252.284,00	0,00
Total		1.261.333.553.000,00	326.129.056.118,00	256.025.580.060,00

LAMPIRAN

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN 9

PERSENTASE KUALITAS PELAKSANAAN ANGGARAN DITJEN PERKERETAAPIAN

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

REALISASI BELANJA SATKER PER JENIS BELANJA

Bulan : 01 s.d. 06

NO	Kode | Nama Satker	Keterangan	Jenis Belanja									Total
			Pegawai	Barang	Modal	Beban Bunga	Subsidi	Hibah	BanSos	LainLain	Transfer	
1	445572 | PENGEMBANGAN DAN PENINGKATAN FASILITAS KESELAMATAN PERKERETAAPIAN	PAGU	0	49,883,750,000	2,515,545,000	0	0	0	0	0	0	52,399,295,000
		REALISASI	0.00%	12,657,437,987 (25.37%)	2,464,250,000 (97.96%)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	15,121,687,987 (28.86%)
		SISA	0	37,226,312,013	51,295,000	0	0	0	0	0	0	37,277,607,013
2	467005 | BALAI PENGELOLA KERETA API RINGAN SUMATERA SELATAN	PAGU	4,581,174,000	340,066,010,000	8,858,648,000	0	0	0	0	0	0	353,505,832,000
		REALISASI	3,926,054,495 (85.70%)	85,465,107,167 (25.13%)	192,143,220 (2.17%)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	89,583,304,882 (25.34%)
		SISA	655,119,505	254,600,902,833	8,666,504,780	0	0	0	0	0	0	263,922,527,118
3	467006 | BALAI PENGELOLA KERETA API SULAWESI SELATAN	PAGU	10,065,915,000	332,687,655,000	288,050,396,000	0	0	0	0	0	0	630,803,966,000
		REALISASI	6,762,417,876 (67.18%)	89,478,266,604 (26.90%)	49,545,387,992 (17.20%)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	145,786,072,472 (23.11%)
		SISA	3,303,497,124	243,209,388,396	238,505,008,008	0	0	0	0	0	0	485,017,893,528
4	467309 | BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN KELAS I JAKARTA	PAGU	7,418,742,000	227,208,743,000	1,865,980,955,000	0	0	0	0	0	0	2,100,608,440,000
		REALISASI	6,092,354,270 (82.12%)	10,611,744,457 (4.67%)	169,615,541,200 (9.09%)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	186,319,639,927 (8.87%)
		SISA	1,326,387,730	216,596,998,543	1,696,365,413,800	0	0	0	0	0	0	1,914,288,800,073
5	467321 | BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN KELAS I SEMARANG	PAGU	10,978,406,000	342,440,030,000	1,517,964,417,000	0	0	0	0	0	0	1,871,382,853,000
		REALISASI	7,622,067,749 (69.43%)	11,506,526,626 (3.36%)	142,702,269,804 (9.40%)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	161,830,864,179 (8.65%)
		SISA	3,356,338,251	330,933,503,374	1,375,262,147,196	0	0	0	0	0	0	1,709,551,988,821
6	467337 | BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN KELAS I SURABAYA	PAGU	7,129,878,000	263,214,954,000	622,452,950,000	0	0	0	0	0	0	892,797,782,000
		REALISASI	5,456,041,748 (76.52%)	7,734,761,693 (2.94%)	98,028,004,470 (15.75%)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	111,218,807,911 (12.46%)
		SISA	1,673,836,252	255,480,192,307	524,424,945,530	0	0	0	0	0	0	781,578,974,089
7	467345 | BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN KELAS I MEDAN	PAGU	6,763,550,000	168,088,724,000	1,190,817,405,000	0	0	0	0	0	0	1,365,669,679,000
		REALISASI	5,870,168,980 (86.79%)	9,561,835,589 (5.69%)	119,455,575,683 (10.03%)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	134,887,580,252 (9.88%)
		SISA	893,381,020	158,526,888,411	1,071,361,829,317	0	0	0	0	0	0	1,230,782,098,748

tanggal cetak : 16-07-24 17:25:01 oleh : E02208

8	467352 | BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN KELAS II PADANG	PAGU	5,814,462,000	61,163,932,000	289,014,554,000	0	0	0	0	0	0	355,992,948,000
		REALISASI	3,726,276,539 (64.09%)	11,711,517,878 (19.15%)	32,852,523,446 (11.37%)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	48,290,317,863 (13.56%)
		SISA	2,088,185,461	49,452,414,122	256,162,030,554	0	0	0	0	0	0	307,702,630,137
9	467364 | BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN KELAS II PALEMBANG	PAGU	7,025,360,000	444,794,540,000	497,988,930,000	0	0	0	0	0	0	949,808,830,000
		REALISASI	4,970,850,467 (70.76%)	5,977,750,472 (1.34%)	71,802,142,076 (14.42%)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	82,750,743,015 (8.71%)
		SISA	2,054,509,533	438,816,789,528	426,186,787,924	0	0	0	0	0	0	867,058,086,985
10	467373 | BALAI PERAWATAN PERKERETAAPIAN	PAGU	7,210,937,000	50,820,931,000	94,902,838,000	0	0	0	0	0	0	152,934,706,000
		REALISASI	5,983,182,944 (82.97%)	10,833,720,162 (21.32%)	45,904,785,881 (48.37%)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	62,721,688,987 (41.01%)
		SISA	1,227,754,056	39,987,210,838	48,998,052,119	0	0	0	0	0	0	90,213,017,013
11	467385 | BALAI PENGUJIAN PERKERETAAPIAN	PAGU	9,066,414,000	48,224,774,000	29,172,561,000	0	0	0	0	0	0	86,463,749,000
		REALISASI	5,607,079,814 (61.84%)	14,912,147,247 (30.92%)	9,558,010,000 (32.76%)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	30,077,237,061 (34.79%)
		SISA	3,459,334,186	33,312,626,753	19,614,551,000	0	0	0	0	0	0	56,386,511,939
12	467462 | PENGEMBANGAN LALU LINTAS DAN PENINGKATAN ANGKUTAN KERETA API	PAGU	0	101,885,653,000	0	0	0	0	0	0	0	101,885,653,000
		REALISASI	0.00%	25,833,018,267 (25.35%)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	25,833,018,267 (25.35%)
		SISA	0	76,052,634,733	0	0	0	0	0	0	0	76,052,634,733
13	467478 | PENGEMBANGAN DAN PENINGKATAN SARANA PERKERETAAPIAN	PAGU	0	53,563,307,000	90,929,098,000	0	0	0	0	0	0	144,492,405,000
		REALISASI	0.00%	9,468,978,381 (17.68%)	845,074,995 (0.93%)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	10,314,053,376 (7.14%)
		SISA	0	44,094,328,619	90,084,023,005	0	0	0	0	0	0	134,178,351,624
14	467484 | PENGEMBANGAN, PENINGKATAN DAN PERAWATAN PRASARANA PERKERETAAPIAN	PAGU	0	68,511,566,000	682,652,250,000	0	0	0	0	0	0	751,163,816,000
		REALISASI	0.00%	17,847,710,660 (26.05%)	374,344,448,505 (54.84%)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	392,192,159,165 (52.21%)
		SISA	0	50,663,855,340	308,307,801,495	0	0	0	0	0	0	358,971,656,835
15	467504 | KANTOR PUSAT DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN	PAGU	66,368,423,000	113,364,214,000	10,972,404,000	0	0	0	0	0	0	190,705,041,000
		REALISASI	41,229,119,583 (62.12%)	27,352,491,094 (24.13%)	3,471,098,150 (31.63%)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	72,052,708,827 (37.78%)
		SISA	25,139,303,417	86,011,722,906	7,501,305,850	0	0	0	0	0	0	118,652,332,173

16	467515 | BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN KELAS I BANDUNG	PAGU REALISASI	8,850,178,000 6,827,968,662 (77.15%)	243,694,079,000 6,653,335,227 (2.73%)	415,910,160,000 98,600,958,248 (23.71%)	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	668,454,417,000 112,082,262,137 (16.77%)
		SISA	2,022,209,338	237,040,743,773	317,309,201,752	0	0	0	0	0	0	556,372,154,863
GRAND TOTAL		**PAGU REALISASI**	**151,273,439,000 104,073,583,127 (68.80%)**	**2,909,612,862,000 357,606,349,511 (12.29%)**	**7,608,183,111,000 1,219,382,213,670 (16.03%)**	**0 (0.00%)**	**0 (0.00%)**	**0 (0.00%)**	**0 (0.00%)**	**0 (0.00%)**	**0 (0.00%)**	**10,669,069,412,000 1,681,062,146,308 (15.76%)**
		SISA	**47,199,855,873**	**2,552,006,512,489**	**6,388,800,897,330**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8,988,007,265,692**

No.	Unit Kerja	RO	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	TVRO	Satuan	Persentase Progres	RVRO	RVRO/TVRO	Persentase Capaian Per RO	Capaian per KRO	Capaian x Alokasi	Total Efisiensi Anggaran	RVRO/TVRO
1	Setditjen Perkeretaapian	Studi Kelayakan (Feasibility Study)	Rp7.166.891.000,00	Rp637.609.245,00	5	RekomendasiKebijakan	51,66%	2,58	0,52	51,66%	51,66%	Rp 3.702.415.891	Rp 3.064.806.646	51,66%
2	Setditjen Perkeretaapian	Pedoman Teknis Bidang Prasarana Perkeretaapian	Rp3.022.421.000,00	Rp230.690.079,00	1	NSPK	51,66%	0,52	0,52	51,66%	51,66%	Rp 1.561.382.689	Rp 1.330.692.610	51,66%
3	Setditjen Perkeretaapian	Kebijakan Perencanaan	Rp3.000.108.000,00	Rp0,00	1	RekomendasiKebijakan	50,66%	0,51	0,51	50,66%	50,66%	Rp 1.519.854.713	Rp 1.519.854.713	50,66%
4	Setditjen Perkeretaapian	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal.	Rp2.728.231.000,00	Rp616.861.190,00	1	Layanan	50,66%	0,51	0,51	50,66%	50,66%	Rp 1.382.121.825	Rp 765.260.635	50,66%
5	Setditjen Perkeretaapian	Layanan Hukum	Rp1.837.415.000,00	Rp507.570.460,00	1	Layanan	50,66%	0,51	0,51	50,66%	50,66%	Rp 930.834.439	Rp 423.263.979	50,66%
6	Setditjen Perkeretaapian	Layanan Hukum	Rp2.595.419.000,00	Rp497.680.830,00	1	Layanan	50,66%	0,51	0,51	50,66%	50,66%	Rp 1.314.839.265	Rp 817.158.435	50,66%
7	Setditjen Perkeretaapian	Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi	Rp11.503.441.000,00	Rp2.913.072.238,00	1	Layanan	50,66%	0,51	0,51	50,66%	50,66%	Rp 5.827.643.211	Rp 2.914.570.973	50,66%
8	Setditjen Perkeretaapian	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	Rp10.371.641.000,00	Rp2.954.925.889,00	1	Layanan	50,66%	0,51	0,51	50,66%	50,66%	Rp 5.254.273.331	Rp 2.299.347.442	50,66%
9	Setditjen Perkeretaapian	Layanan Data dan Informasi	Rp1.223.109.000,00	Rp126.413.800,00	1	Layanan	50,66%	0,51	0,51	50,66%	50,66%	Rp 619.627.019	Rp 493.213.219	50,66%
10	Setditjen Perkeretaapian	Layanan Perkantoran	Rp93.714.495.000,00	Rp50.432.883.034,00	1	Layanan	50,66%	0,51	0,51	50,66%	50,66%	Rp 47.475.763.167	-Rp 2.957.119.867	50,66%
11	Setditjen Perkeretaapian	Layanan Sarana Internal	Rp3.599.730.000,00	Rp2.104.730.000,00	23	Unit	62,33%	14,34	0,62	62,33%	62,33%	Rp 2.243.711.709	Rp 138.981.709	62,33%
12	Setditjen Perkeretaapian	Layanan Prasarana Internal	Rp14.172.674.000,00	Rp1.366.368.150,00	1	Unit	50,66%	0,51	0,51	50,66%	50,66%	Rp 7.179.876.648	Rp 5.813.508.498	50,66%
13	Setditjen Perkeretaapian	Layanan SDM	Rp5.011.220.000,00	Rp1.839.157.058,00	1045	Orang	50,33%	525,95	0,50	50,33%	50,33%	Rp 2.522.147.026	Rp 682.989.968	50,33%
14	Setditjen Perkeretaapian	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	Rp5.196.353.000,00	Rp656.619.014,00	1	Dokumen	50,66%	0,51	0,51	50,66%	50,66%	Rp 2.632.472.430	Rp 1.975.853.416	50,66%
15	Setditjen Perkeretaapian	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	Rp11.131.503.000,00	Rp3.027.203.308,00	1	Dokumen	50,66%	0,51	0,51	50,66%	50,66%	Rp 5.639.219.420	Rp 2.612.016.112	50,66%
16	Setditjen Perkeretaapian	Layanan Manajemen Keuangan	Rp12.125.863.000,00	Rp3.819.829.042,00	1	Dokumen	50,66%	0,51	0,51	50,66%	50,66%	Rp 6.142.962.196	Rp 2.323.133.154	50,66%
17	Setditjen Perkeretaapian	Sistem Informasi	Rp2.304.527.000,00	Rp321.145.200,00	1	Layanan	50,66%	0,51	0,51	50,66%	50,66%	Rp 1.167.473.378	Rp 846.328.178	50,66%
18	Direktorat LLAKA	Studi Perencanaan Teknis Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api	Rp13.876.852.000,00	Rp2.004.220.650,00	3	RekomendasiKebijakan	15,16%	0,45	0,15	15,16%	15,16%	Rp 2.103.730.763	Rp 99.510.113	15,16%
19	Direktorat LLAKA	Pedoman Teknis Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api	Rp3.054.265.000,00	Rp704.905.049,00	5	NSPK	23,50%	1,18	0,24	23,50%	23,50%	Rp 717.752.275	Rp 12.847.226	23,50%
20	Direktorat LLAKA	Angkutan Sepeda Motor Melalui Kereta Api	Rp11.974.667.000,00	Rp11.060.351.000,00	1	layanan	100,00%	1,00	1,00	100,00%	100,00%	Rp 11.974.667.000	Rp 914.316.000	100,00%
21	Direktorat LLAKA	Operasi Prasarana Perkeretaapian	Rp1.015.152.000,00	Rp466.659.846,00	1	Paket	77,67%	0,78	0,78	77,67%	77,67%	Rp 788.468.558	Rp 321.808.712	77,67%
22	Direktorat LLAKA	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	Rp3.186.481.000,00	Rp756.857.000,00	2	Dokumen	23,80%	0,48	0,24	23,80%	23,80%	Rp 758.382.478	Rp 1.525.478	23,80%
23	Direktorat LLAKA	Studi Penyusunan Dokumen Analisis Dampak Lingkungan (Andal) Jalur Kereta Api Bandara Sultan Aji Muhammad Sepinggan	Rp2.756.000.000,00	Rp0,00	1	RekomendasiKebijakan	3,40%	0,03	0,03	3,40%	3,40%	Rp 93.704.000	Rp 93.704.000	3,40%
24	Direktorat LLAKA	Studi Penyusunan Dokumen Analisis Dampak Lingkungan (Andal) Jalur Kereta Api Perkotaan Balikpapan menuju Kawasan Inti	Rp3.614.695.000,00	Rp0,00	1	RekomendasiKebijakan	3,40%	0,03	0,03	3,40%	3,40%	Rp 122.899.630	Rp 122.899.630	3,40%
25	Direktorat LLAKA	Penyelenggaraan Layanan Kereta Api Perintis lintas Makassar - Parepare	Rp33.733.346.000,00	Rp1.531.123.716,00	1	layanan	4,55%	0,05	0,05	4,55%	4,55%	Rp 1.534.867.243	Rp 3.743.527	4,55%

No.	Unit Kerja	RO	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	TVRO	Satuan	Persentase Progres	RVRO	RVRO/TVRO	Persentase Capaian Per RO	Capaian per KRO	Capaian x Alokasi	Total Efisiensi Anggaran	RVRO/TVRO
26	Direktorat LLAKA	Pengelolaan Data dan Informasi	Rp680.564.000,00	Rp47.898.360,00	1	layanan	15,15%	0,15	0,15	15,15%	15,15%	Rp 103.105.446	Rp 55.207.086	15,15%
27	Direktorat LLAKA	OM Prasarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	Rp4.355.021.000,00	Rp1.044.785.000,00	1	Titik/Lokasi	24,10%	0,24	0,24	24,10%	24,10%	Rp 1.049.560.061	Rp 4.775.061	24,10%
28	Direktorat LLAKA	Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi	Rp168.985.000,00	Rp24.319.050,00	1	Layanan	14,60%	0,15	0,15	14,60%	14,60%	Rp 24.671.810	Rp 352.760	14,60%
29	Direktorat LLAKA	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	Rp1.734.809.000,00	Rp751.559.655,00	1	Layanan	43,54%	0,44	0,44	43,54%	43,54%	Rp 755.335.839	Rp 3.776.184	43,54%
30	Direktorat LLAKA	Layanan Perkantoran	Rp4.522.179.000,00	Rp2.145.132.489,00	1	Layanan	80,76%	0,81	0,81	80,76%	80,76%	Rp 3.652.111.760	Rp 1.506.979.271	80,76%
31	Direktorat LLAKA	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	Rp1.524.414.000,00	Rp216.030.460,00	1	Dokumen	15,80%	0,16	0,16	15,80%	15,80%	Rp 240.857.412	Rp 24.826.952	15,80%
32	Direktorat LLAKA	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	Rp14.238.440.000,00	Rp5.009.686.100,00	1	Dokumen	35,65%	0,36	0,36	35,65%	35,65%	Rp 5.076.003.860	Rp 66.317.760	35,65%
33	Direktorat LLAKA	Layanan Manajemen Keuangan	Rp211.783.000,00	Rp69.489.892,00	1	Dokumen	52,00%	0,52	0,52	52,00%	52,00%	Rp 110.127.160	Rp 40.637.268	52,00%
34	Direktorat LLAKA	Sistem Informasi	Rp1.238.000.000,00	Rp0,00	1	Layanan	7,30%	0,07	0,07	7,30%	7,30%	Rp 90.374.000	Rp 90.374.000	7,30%
35	Direktorat Prasarana		Rp22.038.544.000,00	Rp2.326.841.100,00	1	Rekomendasi Kebijakan	27,56%	0,28	0,28	27,56%	27,56%	Rp 6.073.822.726	Rp 3.746.981.626	27,56%
36	Direktorat Prasarana	Pedoman Teknis Bidang Prasarana Perkeretaapian	Rp19.317.065.000,00	Rp252.189.000,00	1	NSPK	8,31%	0,08	0,08	8,31%	8,31%	Rp 1.605.248.102	Rp 1.353.059.102	8,31%
37	Direktorat Prasarana	Infrastruktur Perkeretaapian	Rp4.882.250.000,00	Rp1.089.000.000,00	1	km	32,31%	0,32	0,32	32,31%	32,31%	Rp 1.577.454.975	Rp 488.454.975	32,31%
38	Direktorat Prasarana	Perawatan dan Pengoperasian Prasarana Perkeretaapian (IMO)	Rp12.830.411.000,00	Rp0,00	1	Paket	7,00%	0,07	0,07	7,00%	7,00%	Rp 898.128.770	Rp 898.128.770	7,00%
39	Direktorat Prasarana	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	Rp11.142.541.000,00	Rp1.064.551.572,00	1	Layanan	9,55%	0,10	0,10	9,55%	9,55%	Rp 1.064.112.666	-Rp 438.907	9,55%
40	Direktorat Prasarana	Engineering Services For Jakarta Mass Rapid Transit East-West Line Project Phase I Stage I	Rp100.000.000,00	Rp0,00	1	Rekomendasi Kebijakan	3,00%	0,03	0,03	3,00%	3,00%	Rp 3.000.000	Rp 3.000.000	3,00%
41	Direktorat Prasarana	Engineering Services Of Jakarta Mass Rapid Transit East - West Line Project Phase I Stage II	Rp100.000.000,00	Rp0,00	1	Rekomendasi Kebijakan	3,00%	0,03	0,03	3,00%	3,00%	Rp 3.000.000	Rp 3.000.000	3,00%
42	Direktorat Prasarana	Surabaya Regional Railway Line (Phase I)	Rp100.000.000,00	Rp0,00	1	Paket	3,00%	0,03	0,03	3,00%	3,00%	Rp 3.000.000	Rp 3.000.000	3,00%
43	Direktorat Prasarana		Rp22.888.544.000,00	Rp4.953.363.650,00	1	RekomendasiKebijakan	41,56%	0,42	0,42	41,56%	41,56%	Rp 9.512.478.886	Rp 4.559.115.236	41,56%
44	Direktorat Prasarana	Pedoman Teknis Bidang Prasarana Perkeretaapian	Rp18.467.065.000,00	Rp642.079.000,00	1	NSPK	33,31%	0,33	0,33	33,31%	33,31%	Rp 6.151.379.352	Rp 5.509.300.352	33,31%
45	Direktorat Prasarana	Infrastruktur Perkeretaapian	Rp4.882.250.000,00	Rp1.119.000.000,00	1	km	45,31%	0,45	0,45	45,31%	45,31%	Rp 2.212.147.475	Rp 1.093.147.475	45,31%
46	Direktorat Prasarana	Perawatan dan Pengoperasian Prasarana Perkeretaapian (IMO)	Rp31.756.661.000,00	Rp0,00	1	Paket	21,00%	0,21	0,21	21,00%	21,00%	Rp 6.668.898.810	Rp 6.668.898.810	21,00%
47	Direktorat Prasarana	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	Rp11.142.541.000,00	Rp2.476.273.587,00	1	Layanan	46,55%	0,47	0,47	46,55%	46,55%	Rp 5.186.852.836	Rp 2.710.579.249	46,55%
48	Direktorat Prasarana	Engineering Services For Jakarta Mass Rapid Transit East-West Line Project Phase I Stage I	Rp33.100.000.000,00	Rp9.864.430.610,00	1	RekomendasiKebijakan	80,00%	0,80	0,80	80,00%	80,00%	Rp 26.480.000.000	Rp 16.615.569.390	80,00%
49	Direktorat Prasarana	Engineering Services Of Jakarta Mass Rapid Transit East - West Line Project Phase I Stage II	Rp100.000.000,00	Rp0,00	1	RekomendasiKebijakan	7,00%	0,07	0,07	7,00%	7,00%	Rp 7.000.000	Rp 7.000.000	7,00%
50	Direktorat Prasarana	Surabaya Regional Railway Line (Phase I)	Rp100.000.000,00	Rp0,00	1	Paket	7,00%	0,07	0,07	7,00%	7,00%	Rp 7.000.000	Rp 7.000.000	7,00%

No.	Unit Kerja	RO	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	TVRO	Satuan	Persentase Progres	RVRO	RVRO/TVRO	Persentase Capaian Per RO	Capaian per KRO	Capaian x Alokasi	Total Efisiensi Anggaran	RVRO/TVRO
51	Direktorat Prasarana	Pengadaan Rel dan Wesel R.54	Rp538.959.717.000,00	Rp355.723.121.700,00	1	km	81,81%	0,82	0,82	81,81%	81,81%	Rp 440.922.944.478	Rp 85.199.822.778	81,81%
52	Direktorat Sarana	Sertifikasi Sarana Perkeretaapian	Rp2.980.047.000,00	Rp749.302.822,00	8500	produk	27,10%	2303,50	0,27	27,10%	27,10%	Rp 807.592.737	Rp 58.289.915	27,10%
53	Direktorat Sarana	Pedoman Teknis Bidang Sarana Perkeretaapian	Rp4.830.128.000,00	Rp249.806.621,00	7	NSPK	11,40%	0,80	0,11	11,40%	11,40%	Rp 550.634.592	Rp 300.827.971	11,40%
54	Direktorat Sarana	Sarana Kerja Bidang Konektivitas Perkeretaapian	Rp90.036.898.000,00	Rp0,00	3	Unit	3,40%	0,10	0,03	3,40%	3,40%	Rp 3.061.254.532	Rp 3.061.254.532	3,40%
55	Direktorat Sarana	Operasi Sarana Perkeretaapian	Rp4.000.000.000,00	Rp580.990.515,00	15	Unit	21,40%	3,21	0,21	21,40%	21,40%	Rp 856.000.000	Rp 275.009.485	21,40%
56	Direktorat Sarana	Perawatan Peralatan Pengujian Sarana Perkeretaapian	Rp24.276.115.000,00	Rp3.807.422.200,00	29	Unit	19,20%	5,57	0,19	19,20%	19,20%	Rp 4.661.014.080	Rp 853.591.880	19,20%
57	Direktorat Sarana	Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	Rp870.000.000,00	Rp822.874.995,00	58	Unit	94,58%	54,86	0,95	94,58%	94,58%	Rp 822.846.000	-Rp 28.995	94,58%
58	Direktorat Sarana	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	Rp210.916.000,00	Rp7.480.000,00	1	Layanan	7,40%	0,07	0,07	7,40%	7,40%	Rp 15.607.784	Rp 8.127.784	7,40%
59	Direktorat Sarana	Layanan Perkantoran	Rp3.717.896.000,00	Rp1.395.809.226,00	1	Layanan	38,10%	0,38	0,38	38,10%	38,10%	Rp 1.416.518.376	Rp 20.709.150	38,10%
60	Direktorat Sarana	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	Rp2.198.064.000,00	Rp212.187.337,00	1	Dokumen	15,10%	0,15	0,15	15,10%	15,10%	Rp 331.907.664	Rp 119.720.327	15,10%
61	Direktorat Sarana	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	Rp8.856.518.000,00	Rp2.444.775.400,00	1	Dokumen	31,10%	0,31	0,31	31,10%	31,10%	Rp 2.754.377.098	Rp 309.601.698	31,10%
62	Direktorat Sarana	Layanan Manajemen Keuangan	Rp216.923.000,00	Rp44.215.160,00	1	Dokumen	28,10%	0,28	0,28	28,10%	28,10%	Rp 60.955.363	Rp 16.740.203	28,10%
63	Direktorat Sarana	Sistem Informasi	Rp2.298.900.000,00	Rp0,00	1	Layanan	2,40%	0,02	0,02	2,40%	2,40%	Rp 55.173.600	Rp 55.173.600	2,40%
64	Direktorat Keselamatan	Akreditasi Kelembagaan Perkeretaapian	Rp440.244.000,00	Rp48.440.667,00	1	Lembaga	37,83%	0,38	0,38	37,83%	37,83%	Rp 166.544.305	Rp 118.103.638	37,83%
65	Direktorat Keselamatan	Sertifikat Kompetensi SDM Perkeretaapian	Rp8.943.662.000,00	Rp2.610.983.740,00	1	Orang	29,84%	0,30	0,30	29,84%	29,84%	Rp 2.668.788.741	Rp 57.805.001	29,84%
66	Direktorat Keselamatan	Studi Pedoman Teknis Bidang Keselamatan dan Keamanan Perkeretaapian	Rp3.115.912.000,00	Rp53.387.320,00	1	NSPK	3,70%	0,04	0,04	3,70%	3,70%	Rp 115.288.744	Rp 61.901.424	3,70%
67	Direktorat Keselamatan	Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	Rp620.550.000,00	Rp581.950.000,00	1	Unit	100,00%	1,00	1,00	100,00%	100,00%	Rp 620.550.000	Rp 38.600.000	100,00%
68	Direktorat Keselamatan	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	Rp1.249.319.000,00	Rp591.288.842,00	1	Layanan	47,33%	0,47	0,47	47,33%	47,33%	Rp 591.302.683	Rp 13.841	47,33%
69	Direktorat Keselamatan	Layanan Perkantoran	Rp4.696.815.000,00	Rp2.007.487.607,00	1	Layanan	47,57%	0,48	0,48	47,57%	47,57%	Rp 2.234.274.896	Rp 226.787.289	47,57%
70	Direktorat Keselamatan	Layanan Sarana Internal	Rp1.894.995.000,00	Rp1.882.300.000,00	1	Unit	100,00%	1,00	1,00	100,00%	100,00%	Rp 1.894.995.000	Rp 12.695.000	100,00%
71	Direktorat Keselamatan	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	Rp14.944.084.000,00	Rp3.981.117.006,00	1	Dokumen	34,05%	0,34	0,34	34,05%	34,05%	Rp 5.088.460.602	Rp 1.107.343.596	34,05%
72	Direktorat Keselamatan	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	Rp11.976.305.000,00	Rp3.246.307.685,00	1	Dokumen	38,00%	0,38	0,38	38,00%	38,00%	Rp 4.550.995.900	Rp 1.304.688.215	38,00%
73	Direktorat Keselamatan	Layanan Manajemen Keuangan	Rp466.905.000,00	Rp118.425.120,00	1	Dokumen	44,60%	0,45	0,45	44,60%	44,60%	Rp 208.239.630	Rp 89.814.510	44,60%
74	Direktorat Keselamatan	Sistem Informasi	Rp4.050.504.000,00	Rp0,00	1	Layanan	6,04%	0,06	0,06	6,04%	6,04%	Rp 244.650.442	Rp 244.650.442	6,04%
75	BTP Kelas I Jakarta	Perawatan dan Pengoperasian Prasarana Perkeretaapian (IMO)	Rp4.078.929.000,00	Rp125.442.545,00	1	Paket	40,00%	0,40	0,40	40,00%	40,00%	Rp 1.631.571.600	Rp 1.506.129.055	40,00%

No.	Unit Kerja	RO	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	TVRO	Satuan	Persentase Progres	RVRO	RVRO/TVRO	Persentase Capaian Per RO	Capaian per KRO	Capaian x Alokasi	Total Efisiensi Anggaran	RVRO/TVRO
76	BTP Kelas I Jakarta	Operasi Prasarana Perkeretaapian	Rp3.378.732.000,00	Rp1.535.571.275,00	1	Paket	47,00%	0,47	0,47	47,00%	47,00%	Rp 1.588.004.040	Rp 52.432.765	47,00%
77	BTP Kelas I Jakarta	Paket A (Pembangunan Fasilitas Perkeretaapian untuk Manggarai s/d Jatinegara) (Tahap II)	Rp9.362.472.000,00	Rp9.361.146.001,00	1	km	100,00%	1,00	1,00	100,00%	100,00%	Rp 9.362.472.000	Rp 1.325.999	100,00%
78	BTP Kelas I Jakarta	Pembangunan Fasilitas Perkeretaapian untuk Manggarai - Jatinegara (Paket A Tahap III)	Rp686.672.100.000,00	Rp1.826.989.590,00	1	km	18,00%	0,18	0,18	18,00%	18,00%	Rp 123.600.978.000	Rp 121.773.988.410	18,00%
79	BTP Kelas I Jakarta	Peningkatan Stasiun Rangkasbitung	Rp221.847.016.000,00	Rp27.295.872.564,00	1	Unit	40,00%	0,40	0,40	40,00%	40,00%	Rp 88.738.806.400	Rp 61.442.933.836	40,00%
80	BTP Kelas I Jakarta	Peningkatan Sistem Elektrifikasi Perkeretaapian di Jabodetabek	Rp494.792.918.000,00	Rp80.112.686.008,00	1	Paket	37,00%	0,37	0,37	37,00%	37,00%	Rp 183.073.379.660	Rp 102.960.693.652	37,00%
81	BTP Kelas I Jakarta	Peningkatan Jalur KA dan Fasilitas Operasi Jakarta Kota - Tanjung Priok	Rp59.462.720.000,00	Rp0,00	1	km	19,00%	0,19	0,19	19,00%	19,00%	Rp 11.297.916.800	Rp 11.297.916.800	19,00%
82	BTP Kelas I Jakarta	Peningkatan Stasiun Tanah Abang Tahap I	Rp391.870.535.000,00	Rp49.904.263.361,00	1	Unit	20,00%	0,20	0,20	20,00%	20,00%	Rp 78.374.107.000	Rp 28.469.843.639	20,00%
83	BTP Kelas I Jakarta	Perawatan dan Pengoperasian Prasarana Perkeretaapian (IMO)	Rp198.486.060.000,00	Rp489.934.300,00	1	Paket	29,00%	0,29	0,29	29,00%	29,00%	Rp 57.560.957.400	Rp 57.071.023.100	29,00%
84	BTP Kelas I Jakarta	Pengelolaan Data dan Informasi	Rp222.000.000,00	Rp32.536.320,00	1	layanan	32,33%	0,32	0,32	32,33%	32,33%	Rp 71.772.600	Rp 39.236.280	32,33%
85	BTP Kelas I Jakarta	Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi	Rp746.000.000,00	Rp358.588.856,00	2	Layanan	50,33%	1,01	0,50	50,33%	50,33%	Rp 375.461.800	Rp 16.872.944	50,33%
86	BTP Kelas I Jakarta	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	Rp12.875.724.000,00	Rp5.341.455.864,00	16	Layanan	47,33%	7,57	0,47	47,33%	47,33%	Rp 6.094.080.169	Rp 752.624.305	47,33%
87	BTP Kelas I Jakarta	Layanan Perkantoran	Rp11.700.391.000,00	Rp8.055.291.488,00	1	Layanan	65,00%	0,65	0,65	65,00%	65,00%	Rp 7.605.254.150	-Rp 450.037.338	65,00%
88	BTP Kelas I Jakarta	Layanan Sarana Internal	Rp1.291.194.000,00	Rp576.361.176,00	1	Unit	40,00%	0,40	0,40	40,00%	40,00%	Rp 516.477.600	-Rp 59.883.576	40,00%
89	BTP Kelas I Jakarta	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	Rp675.500.000,00	Rp92.391.120,00	2	Dokumen	40,00%	0,80	0,40	40,00%	40,00%	Rp 270.200.000	Rp 177.808.880	40,00%
90	BTP Kelas I Jakarta	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	Rp2.682.465.000,00	Rp988.062.793,00	6	Dokumen	45,00%	2,70	0,45	45,00%	45,00%	Rp 1.207.109.250	Rp 219.046.457	45,00%
91	BTP Kelas I Jakarta	Layanan Manajemen Keuangan	Rp463.684.000,00	Rp223.987.486,00	2	Dokumen	50,33%	1,01	0,50	50,33%	50,33%	Rp 233.372.157	Rp 9.384.671	50,33%
92	BTP Kelas I Bandung	Studi Lingkungan	Rp2.141.579.000,00	Rp0,00	1	RekomendasiKebijakan	20,00%	0,20	0,20	20,00%	20,00%	Rp 428.315.800	Rp 428.315.800	20,00%
93	BTP Kelas I Bandung	Infrastruktur Perkeretaapian	Rp237.600.000,00	Rp141.881.800,00	1	km	79,70%	0,80	0,80	79,70%	79,70%	Rp 189.367.200	Rp 47.485.400	79,70%
94	BTP Kelas I Bandung	Perawatan dan Pengoperasian Prasarana Perkeretaapian (IMO)	Rp3.417.902.000,00	Rp102.137.800,00	1	Paket	22,90%	0,23	0,23	22,90%	22,90%	Rp 782.699.558	Rp 680.561.758	22,90%
95	BTP Kelas I Bandung	Operasi Prasarana Perkeretaapian	Rp3.019.132.000,00	Rp1.036.283.570,00	1	Paket	54,32%	0,54	0,54	54,32%	54,32%	Rp 1.639.992.502	Rp 603.708.932	54,32%
96	BTP Kelas I Bandung	Pembangunan Jalur Ganda KA antara Kiaracondong - Cicalengka Tahap 2 Segmen Kiaracondong - Gedebage dan Segmen	Rp199.710.983.000,00	Rp69.178.982.506,00	9,3	km	39,60%	3,68	0,40	39,60%	39,60%	Rp 79.085.549.268	Rp 9.906.566.762	39,60%
97	BTP Kelas I Bandung	Pembangunan Jalur Ganda KA Bogor - Sukabumi Lintas Bogor - Yogyakarta	Rp72.984.829.000,00	Rp18.131.156.189,00	1	km	29,84%	0,30	0,30	29,84%	29,84%	Rp 21.778.672.974	Rp 3.647.516.785	29,84%
98	BTP Kelas I Bandung	Peningkatan Underpass BH 421 Jatibarang	Rp58.491.069.000,00	Rp0,00	1	Unit	5,00%	0,05	0,05	5,00%	5,00%	Rp 2.924.553.450	Rp 2.924.553.450	5,00%
99	BTP Kelas I Bandung	Pembangunan Prasarana Perkeretaapian pada Jalur Ganda KA Segmen Padalarang - Bandung Lintas Bogor - Yogyakarta Tahap II	Rp81.225.000.000,00	Rp10.777.137.753,00	1	Paket	18,27%	0,18	0,18	18,27%	18,27%	Rp 14.839.807.500	Rp 4.062.669.747	18,27%
100	BTP Kelas I Bandung	Perawatan dan Pengoperasian Prasarana Perkeretaapian (IMO)	Rp220.003.473.000,00	Rp0,00	1	Paket	5,00%	0,05	0,05	5,00%	5,00%	Rp 11.000.173.650	Rp 11.000.173.650	5,00%

No.	Unit Kerja	RO	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	TVRO	Satuan	Persentase Progres	RVRO	RVRO/TVRO	Persentase Capaian Per RO	Capaian per KRO	Capaian x Alokasi	Total Efisiensi Anggaran	RVRO/TVRO
101	BTP Kelas I Bandung	Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	Rp377.100.000,00	Rp371.800.000,00	37	Unit	100,00%	37,00	1,00	100,00%	100,00%	Rp 377.100.000	Rp 5.300.000	100,00%
102	BTP Kelas I Bandung	Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi	Rp174.765.000,00	Rp35.879.500,00	2	Layanan	40,53%	0,81	0,41	40,53%	40,53%	Rp 70.832.255	Rp 34.952.755	40,53%
103	BTP Kelas I Bandung	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	Rp6.820.231.000,00	Rp2.262.735.942,00	6	Layanan	53,18%	3,19	0,53	53,18%	53,18%	Rp 3.626.998.846	Rp 1.364.262.904	53,18%
104	BTP Kelas I Bandung	Layanan Perkantoran	Rp14.195.298.000,00	Rp8.715.408.322,00	1	Layanan	81,39%	0,81	0,81	81,39%	81,39%	Rp 11.553.553.042	Rp 2.838.144.720	81,39%
105	BTP Kelas I Bandung	Layanan Sarana Internal	Rp60.000.000,00	Rp0,00	1	Unit	20,00%	0,20	0,20	20,00%	20,00%	Rp 12.000.000	Rp 12.000.000	20,00%
106	BTP Kelas I Bandung	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	Rp608.323.000,00	Rp1.983.000,00	2	Dokumen	20,33%	0,41	0,20	20,33%	20,33%	Rp 123.672.066	Rp 121.689.066	20,33%
107	BTP Kelas I Bandung	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	Rp3.493.987.000,00	Rp1.075.992.105,00	9	Dokumen	50,80%	4,57	0,51	50,80%	50,80%	Rp 1.774.945.396	Rp 698.953.291	50,80%
108	BTP Kelas I Bandung	Layanan Manajemen Keuangan	Rp452.140.000,00	Rp95.572.500,00	6	Dokumen	41,14%	2,47	0,41	41,14%	41,14%	Rp 186.010.396	Rp 90.437.896	41,14%
109	BTP Kelas I Bandung	Layanan Reformasi Kinerja	Rp1.041.006.000,00	Rp155.312.733,00	2	Dokumen	34,96%	0,70	0,35	34,96%	34,96%	Rp 363.935.698	Rp 208.622.965	34,96%
110	BTP Kelas I Semarang	Infrastruktur Perkeretaapian	Rp519.308.000,00	Rp454.106.000,00	0,1	km	87,44%	0,09	0,87	87,44%	87,44%	Rp 454.082.915	-Rp 23.085	87,44%
111	BTP Kelas I Semarang	Perawatan dan Pengoperasian Prasarana Perkeretaapian (IMO)	Rp4.194.798.000,00	Rp70.599.826,00	1	Paket	3,50%	0,04	0,04	3,50%	3,50%	Rp 146.817.930	Rp 76.218.104	3,50%
112	BTP Kelas I Semarang	Operasi Prasarana Perkeretaapian	Rp4.661.118.000,00	Rp1.415.037.654,00	1	Paket	30,36%	0,30	0,30	30,36%	30,36%	Rp 1.415.115.425	Rp 77.771	30,36%
113	BTP Kelas I Semarang	Penyelenggaraan Layanan Kereta Api Perintis lintas Purwosari - Wonogiri	Rp9.197.540.000,00	Rp2.299.385.000,00	1	layanan	25,00%	0,25	0,25	25,00%	25,00%	Rp 2.299.385.000	Rp -	25,00%
114	BTP Kelas I Semarang	Pembangunan Jalur Ganda KA antara Solo - Semarang Tahap I Segmen Solo Balapan - Kalioso	Rp364.323.672.000,00	Rp92.233.637.504,00	3,4	km	25,32%	0,86	0,25	25,32%	25,32%	Rp 92.246.753.750	Rp 13.116.246	25,32%
115	BTP Kelas I Semarang	Pembangunan Jalur KA Elevated antara Solo Balapan - Kadipiro	Rp58.203.123.000,00	Rp1.048.472.700,00	2,3	km	2,10%	0,05	0,02	2,10%	2,10%	Rp 1.222.265.583	Rp 173.792.883	2,10%
116	BTP Kelas I Semarang	Peningkatan Sistem Persinyalan dan Telekomunikasi Lintas Cirebon - Kroya segmen Prupuk - Purwokerto	Rp314.489.609.000,00	Rp0,00	56,6	km	1,20%	0,68	0,01	1,20%	1,20%	Rp 3.773.875.308	Rp 3.773.875.308	1,20%
117	BTP Kelas I Semarang	Peningkatan Jalur KA antara Maos - Cilacap	Rp57.029.283.000,00	Rp21.790.023.000,00	21	km	38,21%	8,02	0,38	38,21%	38,21%	Rp 21.790.889.034	Rp 866.034	38,21%
118	BTP Kelas I Semarang	Peningkatan Sistem Persinyalan dan Telekomunikasi Lintas Cirebon - Semarang segmen Tegal - Pekalongan	Rp468.841.977.000,00	Rp0,00	60,2	km	1,20%	0,72	0,01	1,20%	1,20%	Rp 5.626.103.724	Rp 5.626.103.724	1,20%
119	BTP Kelas I Semarang	Peningkatan Jalur KA lintas Solo - Wonogiri	Rp102.212.712.000,00	Rp26.803.121.300,00	32	km	26,22%	8,39	0,26	26,22%	26,22%	Rp 26.800.173.086	-Rp 2.948.214	26,22%
120	BTP Kelas I Semarang	Pembangunan Gardu Listrik Delanggu	Rp60.000.000.000,00	Rp0,00	1	Unit	1,20%	0,01	0,01	1,20%	1,20%	Rp 720.000.000	Rp 720.000.000	1,20%
121	BTP Kelas I Semarang	Perawatan dan Pengoperasian Prasarana Perkeretaapian (IMO)	Rp302.281.592.000,00	Rp0,00	1	Paket	1,60%	0,02	0,02	1,60%	1,60%	Rp 4.836.505.472	Rp 4.836.505.472	1,60%
122	BTP Kelas I Semarang	Penanganan Rintang Jalan Segmen Kawunganten-Jeruklegi lintas Banjar-Kroya dan Peningkatan 2 Unit Jembatan KA Segmen	Rp90.468.829.000,00	Rp0,00	1	Paket	1,60%	0,02	0,02	1,60%	1,60%	Rp 1.447.501.264	Rp 1.447.501.264	1,60%
123	BTP Kelas I Semarang	Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	Rp480.100.000,00	Rp291.052.000,00	40	Unit	60,72%	24,29	0,61	60,72%	60,72%	Rp 291.516.720	Rp 464.720	60,72%
124	BTP Kelas I Semarang	Layanan Hukum	Rp738.481.000,00	Rp131.421.526,00	1	Layanan	49,98%	0,50	0,50	49,98%	49,98%	Rp 369.092.804	Rp 237.671.278	49,98%
125	BTP Kelas I Semarang	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	Rp4.823.973.000,00	Rp1.551.843.734,00	1	Layanan	49,98%	0,50	0,50	49,98%	49,98%	Rp 2.411.021.705	Rp 859.177.971	49,98%

No.	Unit Kerja	RO	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	TVRO	Satuan	Persentase Progres	RVRO	RVRO/TVRO	Persentase Capaian Per RO	Capaian per KRO	Capaian x Alokasi	Total Efisiensi Anggaran	RVRO/TVRO
126	BTP Kelas I Semarang	Layanan Perkantoran	Rp22.909.481.000,00	Rp12.191.563.754,00	1	Layanan	49,98%	0,50	0,50	49,98%	49,98%	Rp 11.450.158.604	-Rp 741.405.150	49,98%
127	BTP Kelas I Semarang	Layanan Sarana Internal	Rp713.804.000,00	Rp81.857.300,00	214	Unit	11,47%	24,55	0,11	11,47%	11,47%	Rp 81.873.319	Rp 16.019	11,47%
128	BTP Kelas I Semarang	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	Rp863.203.000,00	Rp63.289.322,00	1	Dokumen	49,98%	0,50	0,50	49,98%	49,98%	Rp 431.428.859	Rp 368.139.537	49,98%
129	BTP Kelas I Semarang	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	Rp3.663.250.000,00	Rp1.072.359.977,00	1	Dokumen	49,98%	0,50	0,50	49,98%	49,98%	Rp 1.830.892.350	Rp 758.532.373	49,98%
130	BTP Kelas I Semarang	Layanan Manajemen Keuangan	Rp387.000.000,00	Rp95.700.833,00	1	Dokumen	49,98%	0,50	0,50	49,98%	49,98%	Rp 193.422.600	Rp 97.721.767	49,98%
131	BTP Kelas I Semarang	Layanan Reformasi Kinerja	Rp380.000.000,00	Rp234.242.537,00	1	Dokumen	49,98%	0,50	0,50	49,98%	49,98%	Rp 189.924.000	-Rp 44.318.537	49,98%
132	BTP Kelas I Surabaya	Studi Lingkungan	Rp915.127.000,00	Rp0,00	1	RekomendasiKebijakan	50,00%	0,50	0,50	50,00%	50,00%	Rp 457.563.500	Rp 457.563.500	50,00%
133	BTP Kelas I Surabaya	Infrastruktur Perkeretaapian	Rp500.000.000,00	Rp152.825.000,00	1	km	49,98%	0,50	0,50	49,98%	49,98%	Rp 249.900.000	Rp 97.075.000	49,98%
134	BTP Kelas I Surabaya	Perawatan dan Pengoperasian Prasarana Perkeretaapian (IMO)	Rp4.050.790.000,00	Rp13.396.000,00	1	Paket	50,00%	0,50	0,50	50,00%	50,00%	Rp 2.025.395.000	Rp 2.011.999.000	50,00%
135	BTP Kelas I Surabaya	Operasi Prasarana Perkeretaapian	Rp3.658.233.000,00	Rp1.314.837.981,00	1	Paket	49,98%	0,50	0,50	49,98%	49,98%	Rp 1.828.384.853	Rp 513.546.872	49,98%
136	BTP Kelas I Surabaya	Pembangunan Jalur Ganda KA Mojokerto - Sepanjang	Rp126.523.144.000,00	Rp71.648.504.000,00	33	km	100,00%	33,00	1,00	100,00%	100,00%	Rp 126.523.144.000	Rp 54.874.640.000	100,00%
137	BTP Kelas I Surabaya	Peningkatan Jalur KA lintas Surabaya - Banyuwangi Segmen Jember - Kalisat	Rp345.780.070.000,00	Rp25.729.675.470,00	17	km	57,00%	9,69	0,57	57,00%	57,00%	Rp 197.094.639.900	Rp 171.364.964.430	57,00%
138	BTP Kelas I Surabaya	Peningkatan 2 Unit Jembatan KA Segmen Kras-Ngadiluwih dan Segmen Temuguruh-Singojuruh	Rp57.796.809.000,00	Rp0,00	1	Unit	50,00%	0,50	0,50	50,00%	50,00%	Rp 28.898.404.500	Rp 28.898.404.500	50,00%
139	BTP Kelas I Surabaya	Peningkatan Sistem Telekomunikasi Segmen Kertosono - Talun Lintas Kertosono - Ketapang Tahap I	Rp88.900.000.000,00	Rp0,00	1	km	35,00%	0,35	0,35	35,00%	35,00%	Rp 31.115.000.000	Rp 31.115.000.000	35,00%
140	BTP Kelas I Surabaya	Perawatan dan Pengoperasian Prasarana Perkeretaapian (IMO)	Rp239.592.951.000,00	Rp0,00	1	Paket	45,00%	0,45	0,45	45,00%	45,00%	Rp 107.816.827.950	Rp 107.816.827.950	45,00%
141	BTP Kelas I Surabaya	Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	Rp150.000.000,00	Rp0,00	10	Unit	0,00%	0,00	- ,0	0,00%	0,00%	Rp -	Rp -	0,00%
142	BTP Kelas I Surabaya	Layanan Hukum	Rp139.650.000,00	Rp42.215.200,00	1	Layanan	49,98%	0,50	0,50	0,00%	0,00%	Rp -	-Rp 42.215.200	49,98%
143	BTP Kelas I Surabaya	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	Rp3.246.273.000,00	Rp948.655.805,00	1	Layanan	49,98%	0,50	0,50	0,00%	0,00%	Rp -	-Rp 948.655.805	49,98%
144	BTP Kelas I Surabaya	Layanan Perkantoran	Rp17.078.754.000,00	Rp10.025.083.099,00	1	Layanan	49,98%	0,50	0,50	0,00%	0,00%	Rp -	-Rp 10.025.083.099	49,98%
145	BTP Kelas I Surabaya	Layanan Sarana Internal	Rp1.035.300.000,00	Rp229.000.000,00	1	Unit	30,00%	0,30	0,30	0,00%	0,00%	Rp -	-Rp 229.000.000	30,00%
146	BTP Kelas I Surabaya	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	Rp674.104.000,00	Rp49.863.100,00	1	Dokumen	49,98%	0,50	0,50	0,00%	0,00%	Rp -	-Rp 49.863.100	49,98%
147	BTP Kelas I Surabaya	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	Rp2.046.432.000,00	Rp787.313.187,00	1	Dokumen	49,98%	0,50	0,50	0,00%	0,00%	Rp -	-Rp 787.313.187	49,98%
148	BTP Kelas I Surabaya	Layanan Manajemen Keuangan	Rp505.824.000,00	Rp186.592.550,00	1	Dokumen	49,98%	0,50	0,50	0,00%	0,00%	Rp -	-Rp 186.592.550	49,98%
149	BTP Kelas I Surabaya	Layanan Reformasi Kinerja	Rp204.321.000,00	Rp94.984.200,00	1	Dokumen	49,98%	0,50	0,50	0,00%	0,00%	Rp -	-Rp 94.984.200	49,98%
150	BTP Kelas I Medan	Studi Lingkungan	Rp1.500.000.000,00	Rp0,00	1	RekomendasiKebijakan	0,60%	0,01	0,01	0,00%	0,00%	Rp -	Rp -	0,60%

No.	Unit Kerja	RO	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	TVRO	Satuan	Persentase Progres	RVRO	RVRO/TVRO	Persentase Capaian Per RO	Capaian per KRO	Capaian x Alokasi	Total Efisiensi Anggaran	RVRO/TVRO
151	BTP Kelas I Medan	Infrastruktur Perkeretaapian	Rp1.400.000.000,00	Rp517.850.000,00	1	km	36,99%	0,37	0,37	0,00%	0,00%	Rp -	-Rp 517.850.000	36,99%
152	BTP Kelas I Medan	Perawatan Sarana Perkeretaapian	Rp400.000.000,00	Rp82.432.296,00	2	Unit	26,95%	0,54	0,27	0,00%	0,00%	Rp -	-Rp 82.432.296	26,95%
153	BTP Kelas I Medan	Perawatan dan Pengoperasian Prasarana Perkeretaapian (IMO)	Rp3.418.227.000,00	Rp170.207.857,00	1	Paket	6,70%	0,07	0,07	0,00%	0,00%	Rp -	-Rp 170.207.857	6,70%
154	BTP Kelas I Medan	Operasi Prasarana Perkeretaapian	Rp2.908.077.000,00	Rp853.290.597,00	1	Paket	35,06%	0,35	0,35	0,00%	0,00%	Rp -	-Rp 853.290.597	35,06%
155	BTP Kelas I Medan	Penyelenggaraan Layanan Kereta Api Perintis lintas Muara Satu-Kutablang	Rp17.923.742.000,00	Rp3.584.748.400,00	1	layanan	27,00%	0,27	0,27	0,00%	0,00%	Rp -	-Rp 3.584.748.400	27,00%
156	BTP Kelas I Medan	Penyelenggaraan Layanan Kereta Api Perintis lintas Tebing Tinggi - Lalang	Rp8.712.521.000,00	Rp0,00	1	layanan	0,60%	0,01	0,01	0,00%	0,00%	Rp -	Rp -	0,60%
157	BTP Kelas I Medan	Penyelenggaraan Layanan Kereta Api Perintis lintas Binjai - Besitang - Sei Liput	Rp17.000.000.000,00	Rp0,00	1	layanan	0,60%	0,01	0,01	0,00%	0,00%	Rp -	Rp -	0,60%
158	BTP Kelas I Medan	Penyelenggaraan Layanan Kereta Api Perintis antara Rantauprapat - Pondok S5	Rp15.089.367.000,00	Rp0,00	1	layanan	0,60%	0,01	0,01	0,00%	0,00%	Rp -	Rp -	0,60%
159	BTP Kelas I Medan	Peningkatan Jalur KA Lintas Kisaran - Rantauprapat Tahap I Segmen Kisaran - Mambang Muda	Rp100.218.137.000,00	Rp15.360.479.374,00	1	km	35,44%	0,35	0,35	0,00%	0,00%	Rp -	-Rp 15.360.479.374	35,44%
160	BTP Kelas I Medan	Pembangunan Jalur KA Antara Medan-Binjai	Rp741.405.680.000,00	Rp103.577.246.309,00	6,8	km	51,34%	3,49	0,51	0,00%	0,00%	Rp -	-Rp 103.577.246.309	51,34%
161	BTP Kelas I Medan	Pekerjaan Utilitas dan Penyempurnaan lintas Bandar Tinggi-Kuala Tanjung	Rp5.325.433.000,00	Rp0,00	1	km	6,00%	0,06	0,06	0,00%	0,00%	Rp -	Rp -	6,00%
162	BTP Kelas I Medan	Peningkatan Jalur KA Segmen Labuan - Belawan Lintas Medan - Belawan Tahap II	Rp144.830.569.000,00	Rp0,00	1	km	10,00%	0,10	0,10	0,00%	0,00%	Rp -	Rp -	10,00%
163	BTP Kelas I Medan	Peningkatan Jambatan BH 343 Segmen Kisaran - Tanjung Balai	Rp42.000.000.000,00	Rp0,00	1	Unit	6,00%	0,06	0,06	0,00%	0,00%	Rp -	Rp -	6,00%
164	BTP Kelas I Medan	Peningkatan Jalur KA Lintas Kisaran - Rantau Prapat Tahap II (Mambang Muda - Padang Halaban)	Rp152.504.362.000,00	Rp0,00	1	km	0,00%	0,00	- ,0	0,00%	0,00%	Rp -	Rp -	0,00%
165	BTP Kelas I Medan	Perawatan dan Pengoperasian Prasarana Perkeretaapian (IMO)	Rp87.879.067.000,00	Rp0,00	1	Paket	6,00%	0,06	0,06	0,00%	0,00%	Rp -	Rp -	6,00%
166	BTP Kelas I Medan	Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	Rp402.000.000,00	Rp0,00	27	Unit	6,00%	1,62	0,06	0,00%	0,00%	Rp -	Rp -	6,00%
167	BTP Kelas I Medan	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	Rp5.839.705.000,00	Rp2.006.235.352,00	1	Layanan	41,04%	0,41	0,41	0,00%	0,00%	Rp -	-Rp 2.006.235.352	41,04%
168	BTP Kelas I Medan	Layanan Perkantoran	Rp11.095.266.000,00	Rp7.541.790.193,00	1	Layanan	67,97%	0,68	0,68	0,00%	0,00%	Rp -	-Rp 7.541.790.193	67,97%
169	BTP Kelas I Medan	Layanan Sarana Internal	Rp549.224.000,00	Rp0,00	10	Unit	3,00%	0,30	0,03	0,00%	0,00%	Rp -	Rp -	3,00%
170	BTP Kelas I Medan	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	Rp802.675.000,00	Rp41.148.024,00	1	Dokumen	24,98%	0,25	0,25	0,00%	0,00%	Rp -	-Rp 41.148.024	24,98%
171	BTP Kelas I Medan	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	Rp3.539.394.000,00	Rp776.460.733,00	1	Dokumen	42,63%	0,43	0,43	0,00%	0,00%	Rp -	-Rp 776.460.733	42,63%
172	BTP Kelas I Medan	Layanan Manajemen Keuangan	Rp354.499.000,00	Rp101.971.689,00	1	Dokumen	31,42%	0,31	0,31	0,00%	0,00%	Rp -	-Rp 101.971.689	31,42%
173	BTP Kelas I Medan	Layanan Reformasi Kinerja	Rp571.734.000,00	Rp276.916.219,00	1	Dokumen	48,43%	0,48	0,48	0,00%	0,00%	Rp -	-Rp 276.916.219	48,43%
174	BTP Kelas II Padang	Studi Lingkungan	Rp500.000.000,00	Rp0,00	1	RekomendasiKebijakan	0,00%	0,00	- ,0	0,00%	0,00%	Rp -	Rp -	0,00%
175	BTP Kelas II Padang	Infrastruktur Perkeretaapian	Rp4.000.000.000,00	Rp0,00	1	km	0,00%	0,00	- ,0	0,00%	0,00%	Rp -	Rp -	0,00%

No.	Unit Kerja	RO	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	TVRO	Satuan	Persentase Progres	RVRO	RVRO/TVRO	Persentase Capaian Per RO	Capaian per KRO	Capaian x Alokasi	Total Efisiensi Anggaran	RVRO/TVRO
176	BTP Kelas II Padang	Perawatan dan Pengoperasian Prasarana Perkeretaapian (IMO)	Rp2.361.272.000,00	Rp153.823.145,00	1	Paket	6,51%	0,07	0,07	0,00%	0,00%	Rp -	-Rp 153.823.145	6,51%
177	BTP Kelas II Padang	Perawatan Prasarana Perkeretaapian	Rp2.358.460.000,00	Rp482.254.690,00	1	Paket	20,45%	0,20	0,20	0,00%	0,00%	Rp -	-Rp 482.254.690	20,45%
178	BTP Kelas II Padang	Operasi Prasarana Perkeretaapian	Rp5.486.945.000,00	Rp2.385.801.909,00	1	Paket	43,48%	0,43	0,43	0,00%	0,00%	Rp -	-Rp 2.385.801.909	43,48%
179	BTP Kelas II Padang	Penyelenggaraan Layanan Kereta Api Perintis lintas Lubuk Alung - Kayu Tanam	Rp14.400.000.000,00	Rp4.100.518.551,00	1	layanan	28,48%	0,28	0,28	0,00%	0,00%	Rp -	-Rp 4.100.518.551	28,48%
180	BTP Kelas II Padang	Peningkatan Jalur KA Lintas Padang - Bukit Putus - Pauh Lima	Rp84.137.054.000,00	Rp32.841.223.446,00	5,16	km	39,03%	2,01	0,39	0,00%	0,00%	Rp -	-Rp 32.841.223.446	39,03%
181	BTP Kelas II Padang	Perawatan dan Pengoperasian Prasarana Perkeretaapian (IMO)	Rp25.933.671.000,00	Rp0,00	1	Paket	0,00%	0,00	- ,0	0,00%	0,00%	Rp -	Rp -	0,00%
182	BTP Kelas II Padang	Penanganan Rintang Jalan dan Peningkatan 5 unit Jembatan KA lintas Lubuk Alung -Kayu Tanam	Rp199.500.000.000,00	Rp0,00	1	Paket	0,00%	0,00	- ,0	0,00%	0,00%	Rp -	Rp -	0,00%
183	BTP Kelas II Padang	Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	Rp306.000.000,00	Rp0,00	5	Unit	0,00%	0,00	- ,0	0,00%	0,00%	Rp -	Rp -	0,00%
184	BTP Kelas II Padang	Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi	Rp492.688.000,00	Rp163.417.704,00	1	Layanan	33,17%	0,33	0,33	0,00%	0,00%	Rp -	-Rp 163.417.704	33,17%
185	BTP Kelas II Padang	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	Rp4.233.997.000,00	Rp1.731.476.406,00	1	Layanan	40,89%	0,41	0,41	0,00%	0,00%	Rp -	-Rp 1.731.476.406	40,89%
186	BTP Kelas II Padang	Layanan Perkantoran	Rp7.799.861.000,00	Rp4.884.463.941,00	1	Layanan	62,62%	0,63	0,63	0,00%	0,00%	Rp -	-Rp 4.884.463.941	62,62%
187	BTP Kelas II Padang	Layanan Sarana Internal	Rp60.000.000,00	Rp0,00	1	Unit	0,00%	0,00	- ,0	0,00%	0,00%	Rp -	Rp -	0,00%
188	BTP Kelas II Padang	Layanan SDM	Rp221.080.000,00	Rp83.420.633,00	1	Orang	37,73%	0,38	0,38	0,00%	0,00%	Rp -	-Rp 83.420.633	37,73%
189	BTP Kelas II Padang	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	Rp895.300.000,00	Rp201.722.690,00	1	Dokumen	22,53%	0,23	0,23	0,00%	0,00%	Rp -	-Rp 201.722.690	22,53%
190	BTP Kelas II Padang	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	Rp2.175.602.000,00	Rp947.654.818,00	1	Dokumen	43,56%	0,44	0,44	0,00%	0,00%	Rp -	-Rp 947.654.818	43,56%
191	BTP Kelas II Padang	Layanan Manajemen Keuangan	Rp1.131.018.000,00	Rp317.666.852,00	1	Dokumen	28,09%	0,28	0,28	0,00%	0,00%	Rp -	-Rp 317.666.852	28,09%
192	BTP Kelas II Palembang	Infrastruktur Perkeretaapian	Rp1.000.000.000,00	Rp0,00	1	km	0,00%	0,00	- ,0	0,00%	0,00%	Rp -	Rp -	0,00%
193	BTP Kelas II Palembang	Perawatan Sarana Perkeretaapian	Rp100.000.000,00	Rp0,00	2	Unit	0,00%	0,00	- ,0	0,00%	0,00%	Rp -	Rp -	0,00%
194	BTP Kelas II Palembang	Perawatan dan Pengoperasian Prasarana Perkeretaapian (IMO)	Rp3.244.404.000,00	Rp111.607.684,00	1	Paket	3,44%	0,03	0,03	0,00%	0,00%	Rp -	-Rp 111.607.684	3,44%
195	BTP Kelas II Palembang	Operasi Prasarana Perkeretaapian	Rp2.572.981.000,00	Rp1.492.735.999,00	1	Paket	58,02%	0,58	0,58	0,00%	0,00%	Rp -	-Rp 1.492.735.999	58,02%
196	BTP Kelas II Palembang	Peningkatan Persinyalan Elektrik KA Lintas Tarahan-Martapura Tahap I	Rp120.000.000.000,00	Rp0,00	1	Unit	0,00%	0,00	- ,0	0,00%	0,00%	Rp -	Rp -	0,00%
197	BTP Kelas II Palembang	Perawatan dan Pengoperasian Prasarana Perkeretaapian (IMO)	Rp425.823.186.000,00	Rp0,00	1	Paket	0,00%	0,00	- ,0	0,00%	0,00%	Rp -	Rp -	0,00%
198	BTP Kelas II Palembang	Penanganan Daerah Rawan dan Jembatan Lintas Prabumulih -Tarahan	Rp91.805.938.000,00	Rp35.378.848.079,00	1	km	38,54%	0,39	0,39	0,00%	0,00%	Rp -	-Rp 35.378.848.079	38,54%
199	BTP Kelas II Palembang	Peningkatan Jalur KA, Penanganan Rintang Jalan, dan Peningkatan 2 unit Jembatan KA lintas Tarahan - Tanjung Enim	Rp283.555.842.000,00	Rp35.992.329.627,00	1	Paket	12,69%	0,13	0,13	0,00%	0,00%	Rp -	-Rp 35.992.329.627	12,69%
200	BTP Kelas II Palembang	Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	Rp162.650.000,00	Rp0,00	4	Unit	0,00%	0,00	- ,0	0,00%	0,00%	Rp -	Rp -	0,00%

No.	Unit Kerja	RO	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	TVRO	Satuan	Persentase Progres	RVRO	RVRO/TVRO	Persentase Capaian Per RO	Capaian per KRO	Capaian x Alokasi	Total Efisiensi Anggaran	RVRO/TVRO
201	BTP Kelas II Palembang	Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi	Rp531.866.000,00	Rp88.692.899,00	1	Layanan	24,99%	0,25	0,25	0,00%	0,00%	Rp -	-Rp 88.692.899	24,99%
202	BTP Kelas II Palembang	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	Rp4.105.871.000,00	Rp1.709.927.392,00	7	Layanan	41,65%	2,92	0,42	0,00%	0,00%	Rp -	-Rp 1.709.927.392	41,65%
203	BTP Kelas II Palembang	Layanan Perkantoran	Rp10.005.060.000,00	Rp6.117.944.597,00	2	Layanan	61,15%	1,22	0,61	0,00%	0,00%	Rp -	-Rp 6.117.944.597	61,15%
204	BTP Kelas II Palembang	Layanan Prasarana Internal	Rp800.000.000,00	Rp0,00	1	Unit	0,00%	0,00	- ,0	0,00%	0,00%	Rp -	Rp -	0,00%
205	BTP Kelas II Palembang	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	Rp591.732.000,00	Rp36.933.240,00	1	Dokumen	24,99%	0,25	0,25	24,99%	24,99%	Rp 147.873.827	Rp 110.940.587	24,99%
206	BTP Kelas II Palembang	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	Rp4.207.448.000,00	Rp1.347.566.809,00	1	Dokumen	32,03%	0,32	0,32	32,03%	32,03%	Rp 1.347.645.594	Rp 78.785	32,03%
207	BTP Kelas II Palembang	Layanan Manajemen Keuangan	Rp638.893.000,00	Rp275.249.217,00	1	Dokumen	43,08%	0,43	0,43	43,08%	43,08%	Rp 275.235.104	-Rp 14.113	43,08%
208	BTP Kelas II Palembang	Layanan Reformasi Kinerja	Rp662.959.000,00	Rp198.907.472,00	1	Dokumen	34,15%	0,34	0,34	34,15%	34,15%	Rp 226.400.499	Rp 27.493.027	34,15%
209	Balai Pengujian Perkeretaapian	Sertifikasi Sarana Perkeretaapian	Rp17.061.141.000,00	Rp3.676.334.804,00	1	produk	48,98%	0,49	0,49	48,98%	48,98%	Rp 8.356.546.862	Rp 4.680.212.058	48,98%
210	Balai Pengujian Perkeretaapian	Sertifikat Kelaikan Prasarana Perkeretaapian	Rp15.273.192.000,00	Rp9.587.203.577,00	3	produk	39,33%	1,18	0,39	39,33%	39,33%	Rp 6.006.946.414	-Rp 3.580.257.163	39,33%
211	Balai Pengujian Perkeretaapian	Sertifikat Kompetensi SDM Perkeretaapian	Rp16.484.213.000,00	Rp4.039.851.366,00	1	Orang	37,41%	0,37	0,37	37,41%	37,41%	Rp 6.166.744.083	Rp 2.126.892.717	37,41%
212	Balai Pengujian Perkeretaapian	Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	Rp420.000.000,00	Rp416.885.000,00	1	Unit	100,00%	1,00	1,00	100,00%	100,00%	Rp 420.000.000	Rp 3.115.000	100,00%
213	Balai Pengujian Perkeretaapian	Perawatan Peralatan Pengujian Sarana Perkeretaapian	Rp7.480.613.000,00	Rp650.992.000,00	5	Unit	48,24%	2,41	0,48	48,24%	48,24%	Rp 3.608.647.711	Rp 2.957.655.711	48,24%
214	Balai Pengujian Perkeretaapian	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	Rp11.074.494.000,00	Rp1.832.626.645,00	5	Layanan	26,98%	1,35	0,27	26,98%	26,98%	Rp 2.987.898.481	Rp 1.155.271.836	26,98%
215	Balai Pengujian Perkeretaapian	Layanan Sarana Internal	Rp1.080.000.000,00	Rp508.600.000,00	1	Unit	92,57%	0,93	0,93	92,57%	92,57%	Rp 999.756.000	Rp 491.156.000	92,57%
216	Balai Pengujian Perkeretaapian	Sistem Informasi Pemerintahan	Rp850.000.000,00	Rp0,00	1	Layanan	10,33%	0,10	0,10	10,33%	10,33%	Rp 87.805.000	Rp 87.805.000	10,33%
217	Balai Pengujian Perkeretaapian	Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	Rp272.199.000,00	Rp265.150.000,00	40	Unit	100,00%	40,00	1,00	100,00%	100,00%	Rp 272.199.000	Rp 7.049.000	100,00%
218	Balai Pengujian Perkeretaapian	Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi	Rp127.270.000,00	Rp59.711.000,00	1	Layanan	58,16%	0,58	0,58	58,16%	58,16%	Rp 74.020.232	Rp 14.309.232	58,16%
219	Balai Pengujian Perkeretaapian	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	Rp2.996.252.000,00	Rp1.797.010.385,00	7	Layanan	70,94%	4,97	0,71	70,94%	70,94%	Rp 2.125.541.169	Rp 328.530.784	70,94%
220	Balai Pengujian Perkeretaapian	Layanan Perkantoran	Rp11.687.502.000,00	Rp6.858.975.379,00	1	Layanan	62,34%	0,62	0,62	62,34%	62,34%	Rp 7.285.988.747	Rp 427.013.368	62,34%
221	Balai Pengujian Perkeretaapian	Layanan Sarana Internal	Rp51.700.000,00	Rp0,00	1	Unit	59,09%	0,59	0,59	59,09%	59,09%	Rp 30.549.530	Rp 30.549.530	59,09%
222	Balai Pengujian Perkeretaapian	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	Rp674.102.000,00	Rp129.813.242,00	1	Dokumen	33,06%	0,33	0,33	33,06%	33,06%	Rp 222.858.121	Rp 93.044.879	33,06%
223	Balai Pengujian Perkeretaapian	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	Rp401.579.000,00	Rp98.002.554,00	1	Dokumen	36,76%	0,37	0,37	36,76%	36,76%	Rp 147.620.440	Rp 49.617.886	36,76%
224	Balai Pengujian Perkeretaapian	Layanan Manajemen Keuangan	Rp447.836.000,00	Rp111.009.880,00	1	Dokumen	41,57%	0,42	0,42	41,57%	41,57%	Rp 186.165.425	Rp 75.155.545	41,57%
225	Balai Pengujian Perkeretaapian	Layanan Reformasi Kinerja	Rp81.656.000,00	Rp45.073.400,00	1	Dokumen	58,09%	0,58	0,58	58,09%	58,09%	Rp 47.433.970	Rp 2.360.570	58,09%

No.	Unit Kerja	RO	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	TVRO	Satuan	Persentase Progres	RVRO	RVRO/TVRO	Persentase Capaian Per RO	Capaian per KRO	Capaian x Alokasi	Total Efisiensi Anggaran	RVRO/TVRO
226	Balai Perawatan Perkeretaapian	Studi Pedoman Teknis Bidang Keselamatan dan Keamanan Perkeretaapian	Rp114.550.000,00	Rp0,00	2	NSPK	18,40%	0,37	0,18	18,40%	18,40%	Rp 21.077.200	Rp 21.077.200	18,40%
227	Balai Perawatan Perkeretaapian	Operasi Peralatan Pengujian Sarana Perkeretaapian	Rp28.099.118.000,00	Rp5.399.240.212,00	1	Unit	39,20%	0,39	0,39	39,20%	39,20%	Rp 11.014.854.256	Rp 5.615.614.044	39,20%
228	Balai Perawatan Perkeretaapian	Perawatan Peralatan Pengujian Sarana Perkeretaapian	Rp2.356.900.000,00	Rp0,00	21	Unit	8,39%	1,76	0,08	8,39%	8,39%	Rp 197.743.910	Rp 197.743.910	8,39%
229	Balai Perawatan Perkeretaapian	Operasi Prasarana Perkeretaapian	Rp4.783.547.000,00	Rp693.187.005,00	1	Paket	34,48%	0,34	0,34	34,48%	34,48%	Rp 1.649.367.006	Rp 956.180.001	34,48%
230	Balai Perawatan Perkeretaapian	Pembangunan Fasilitas Balai Perawatan Perkeretaapian Tahap II	Rp93.516.409.000,00	Rp45.211.613.000,00	1	Paket	52,65%	0,53	0,53	52,65%	52,65%	Rp 49.236.389.339	Rp 4.024.776.339	52,65%
231	Balai Perawatan Perkeretaapian	Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	Rp652.855.000,00	Rp380.700.000,00	1	Unit	76,58%	0,77	0,77	76,58%	76,58%	Rp 499.956.359	Rp 119.256.359	76,58%
232	Balai Perawatan Perkeretaapian	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	Rp5.092.764.000,00	Rp1.291.288.834,00	1	Layanan	43,74%	0,44	0,44	43,74%	43,74%	Rp 2.227.574.974	Rp 936.286.140	43,74%
233	Balai Perawatan Perkeretaapian	Layanan Data dan Informasi	Rp50.000.000,00	Rp19.150.000,00	1	Layanan	50,00%	0,50	0,50	50,00%	50,00%	Rp 25.000.000	Rp 5.850.000	50,00%
234	Balai Perawatan Perkeretaapian	Layanan Perkantoran	Rp14.441.483.000,00	Rp8.162.032.422,00	2	Layanan	58,33%	1,17	0,58	58,33%	58,33%	Rp 8.423.717.034	Rp 261.684.612	58,33%
235	Balai Perawatan Perkeretaapian	Layanan Sarana Internal	Rp368.745.000,00	Rp312.472.881,00	1	Unit	99,99%	1,00	1,00	99,99%	99,99%	Rp 368.708.126	Rp 56.235.244	99,99%
236	Balai Perawatan Perkeretaapian	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	Rp247.729.000,00	Rp55.362.081,00	1	Dokumen	41,65%	0,42	0,42	41,65%	41,65%	Rp 103.179.129	Rp 47.817.048	41,65%
237	Balai Perawatan Perkeretaapian	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	Rp2.132.310.000,00	Rp646.902.712,00	1	Dokumen	45,82%	0,46	0,46	45,82%	45,82%	Rp 977.024.442	Rp 330.121.730	45,82%
238	Balai Perawatan Perkeretaapian	Layanan Manajemen Keuangan	Rp313.356.000,00	Rp174.621.586,00	1	Dokumen	62,49%	0,62	0,62	62,49%	62,49%	Rp 195.816.164	Rp 21.194.578	62,49%
239	Balai Perawatan Perkeretaapian	Layanan Reformasi Kinerja	Rp764.940.000,00	Rp375.118.254,00	5	Dokumen	68,55%	3,43	0,69	68,55%	68,55%	Rp 524.366.370	Rp 149.248.116	68,55%
240	BPKAR Sumatera Selatan	Perawatan dan Pengoperasian Prasarana Perkeretaapian (IMO)	Rp71.500.000.000,00	Rp0,00	1	Paket	5,00%	0,05	0,05	5,00%	5,00%	Rp 3.575.000.000	Rp 3.575.000.000	5,00%
241	BPKAR Sumatera Selatan	Perawatan Prasarana Perkeretaapian	Rp33.500.000.000,00	Rp0,00	1	Paket	4,00%	0,04	0,04	4,00%	4,00%	Rp 1.340.000.000	Rp 1.340.000.000	4,00%
242	BPKAR Sumatera Selatan	Operasi Prasarana Perkeretaapian	Rp118.542.759.000,00	Rp41.410.530.871,00	1	Paket	41,96%	0,42	0,42	41,96%	41,96%	Rp 49.740.541.676	Rp 8.330.010.805	41,96%
243	BPKAR Sumatera Selatan	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	Rp26.979.649.000,00	Rp3.978.060.245,00	1	Dokumen	14,74%	0,15	0,15	14,74%	14,74%	Rp 3.976.800.263	-Rp 1.259.982	14,74%
244	BPKAR Sumatera Selatan	Penyelenggaraan Layanan Perintis LRT Sumatera Selatan	Rp84.037.847.000,00	Rp36.039.926.570,00	1	layanan	59,42%	0,59	0,59	59,42%	59,42%	Rp 49.935.288.687	Rp 13.895.362.117	59,42%
245	BPKAR Sumatera Selatan	Kebijakan Perencanaan	Rp4.608.390.000,00	Rp161.219.666,00	2	RekomendasiKebijakan	9,97%	0,20	0,10	9,97%	9,97%	Rp 459.456.483	Rp 298.236.817	9,97%
246	BPKAR Sumatera Selatan	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal.	Rp1.335.820.000,00	Rp751.795.204,00	1	Layanan	56,24%	0,56	0,56	56,24%	56,24%	Rp 751.265.168	-Rp 530.036	56,24%
247	BPKAR Sumatera Selatan	Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi	Rp829.898.000,00	Rp151.886.356,00	3	Layanan	18,30%	0,55	0,18	18,30%	18,30%	Rp 151.871.334	-Rp 15.022	18,30%
248	BPKAR Sumatera Selatan	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	Rp2.221.908.000,00	Rp1.110.395.841,00	1	Layanan	50,00%	0,50	0,50	50,00%	50,00%	Rp 1.110.954.000	Rp 558.159	50,00%
249	BPKAR Sumatera Selatan	Layanan Perkantoran	Rp5.949.643.000,00	Rp4.504.015.484,00	1	Layanan	75,66%	0,76	0,76	75,66%	75,66%	Rp 4.501.499.894	-Rp 2.515.590	75,66%
250	BPKAR Sumatera Selatan	Layanan Sarana Internal	Rp470.052.000,00	Rp0,00	1	Unit	4,00%	0,04	0,04	4,00%	4,00%	Rp 18.802.080	Rp 18.802.080	4,00%

No.	Unit Kerja	RO	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	TVRO	Satuan	Persentase Progres	RVRO	RVRO/TVRO	Persentase Capaian Per RO	Capaian per KRO	Capaian x Alokasi	Total Efisiensi Anggaran	RVRO/TVRO
251	BPKAR Sumatera Selatan	Layanan SDM	Rp425.040.000,00	Rp152.325.792,00	239	Orang	35,87%	85,73	0,36	35,87%	35,87%	Rp 152.461.848	Rp 136.056	35,87%
252	BPKAR Sumatera Selatan	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	Rp500.000.000,00	Rp0,00	1	Dokumen	4,00%	0,04	0,04	4,00%	4,00%	Rp 20.000.000	Rp 20.000.000	4,00%
253	BPKAR Sumatera Selatan	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	Rp2.192.652.000,00	Rp1.141.702.327,00	4	Dokumen	51,07%	2,04	0,51	51,07%	51,07%	Rp 1.119.787.376	-Rp 21.914.951	51,07%
254	BPKAR Sumatera Selatan	Layanan Manajemen Keuangan	Rp412.174.000,00	Rp184.284.626,00	2	Dokumen	47,51%	0,95	0,48	47,51%	47,51%	Rp 195.823.867	Rp 11.539.241	47,51%
255	BPKA Sulawesi Selatan	Infrastruktur Perkeretaapian	Rp2.300.000.000,00	Rp920.130.150,00	1	km	42,00%	0,42	0,42	42,00%	42,00%	Rp 966.000.000	Rp 45.869.850	42,00%
256	BPKA Sulawesi Selatan	Perawatan Peralatan Pengujian Sarana Perkeretaapian	Rp2.704.168.000,00	Rp149.978.100,00	1	Unit	51,00%	0,51	0,51	51,00%	51,00%	Rp 1.379.125.680	Rp 1.229.147.580	51,00%
257	BPKA Sulawesi Selatan	Operasi Prasarana Perkeretaapian	Rp48.281.466.000,00	Rp16.701.919.056,00	1	Paket	50,40%	0,50	0,50	50,40%	50,40%	Rp 24.333.858.864	Rp 7.631.939.808	50,40%
258	BPKA Sulawesi Selatan	Kewajiban Pembayaran atas Ketersediaan Layanan (Availability Payment) (Dukungan/Pendamping KPBU)	Rp267.490.000.000,00	Rp66.872.454.546,00	60	Paket	50,40%	30,24	0,50	50,40%	50,40%	Rp 134.814.960.000	Rp 67.942.505.454	50,40%
259	BPKA Sulawesi Selatan	Pembangunan Prasarana Perkeretaapian untuk Mendukung Pengoperasian Kereta Api Makassar - Parepare antara Mandai - Palanro	Rp174.327.796.000,00	Rp48.249.377.712,00	1	Paket	48,00%	0,48	0,48	48,00%	48,00%	Rp 83.677.342.080	Rp 35.427.964.368	48,00%
260	BPKA Sulawesi Selatan	Pembangunan Jalan Akses dan Fasilitas Pendukung Stasiun lintas Makassar-Parepare	Rp109.000.000.000,00	Rp0,00	1	Paket	48,00%	0,48	0,48	48,00%	48,00%	Rp 52.320.000.000	Rp 52.320.000.000	48,00%
261	BPKA Sulawesi Selatan	Kebijakan Perencanaan	Rp2.507.061.000,00	Rp0,00	1	RekomendasiKebijakan	50,40%	0,50	0,50	50,40%	50,40%	Rp 1.263.558.744	Rp 1.263.558.744	50,40%
262	BPKA Sulawesi Selatan	Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	Rp640.600.000,00	Rp192.800.000,00	45	Unit	40,00%	18,00	0,40	40,00%	40,00%	Rp 256.240.000	Rp 63.440.000	40,00%
263	BPKA Sulawesi Selatan	Layanan Hukum	Rp62.845.000,00	Rp22.690.000,00	1	Layanan	50,00%	0,50	0,50	50,00%	50,00%	Rp 31.422.500	Rp 8.732.500	50,00%
264	BPKA Sulawesi Selatan	Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi	Rp789.582.000,00	Rp29.770.000,00	1	Layanan	50,00%	0,50	0,50	50,00%	50,00%	Rp 394.791.000	Rp 365.021.000	50,00%
265	BPKA Sulawesi Selatan	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	Rp5.698.280.000,00	Rp2.148.414.973,00	1	Layanan	50,00%	0,50	0,50	50,00%	50,00%	Rp 2.849.140.000	Rp 700.725.027	50,00%
266	BPKA Sulawesi Selatan	Layanan Perkantoran	Rp13.811.699.000,00	Rp9.076.271.482,00	1	Layanan	65,71%	0,66	0,66	65,71%	65,71%	Rp 9.075.667.413	-Rp 604.069	65,71%
267	BPKA Sulawesi Selatan	Layanan Sarana Internal	Rp282.000.000,00	Rp183.080.130,00	1	Unit	64,92%	0,65	0,65	64,92%	64,92%	Rp 183.074.400	-Rp 5.730	64,92%
268	BPKA Sulawesi Selatan	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	Rp792.566.000,00	Rp269.672.750,00	2	Dokumen	50,20%	1,00	0,50	50,20%	50,20%	Rp 397.868.132	Rp 128.195.382	50,20%
269	BPKA Sulawesi Selatan	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	Rp1.172.831.000,00	Rp401.170.600,00	1	Dokumen	50,00%	0,50	0,50	50,00%	50,00%	Rp 586.415.500	Rp 185.244.900	50,00%
270	BPKA Sulawesi Selatan	Layanan Manajemen Keuangan	Rp509.134.000,00	Rp214.849.300,00	1	Dokumen	50,00%	0,50	0,50	50,00%	50,00%	Rp 254.567.000	Rp 39.717.700	50,00%
271	BPKA Sulawesi Selatan	Layanan Reformasi Kinerja	Rp433.938.000,00	Rp353.497.800,00	1	Dokumen	81,46%	0,81	0,81	81,46%	81,46%	Rp 353.485.895	-Rp 11.905	81,46%
	Jumlah		**10.649.813.185.000**	**1.668.392.795.955**									**945.148.763.323**	

8.915.760.892.570

Catatan :

CRO hanya memperhitungkan RO yang telah terkonfirmasi KPPN

Efisiensi (total efisiensi /alokasi anggaran) **8,87%**

Nilai Efisiensi **72,19%**

$$NE = 50\% + \left(\frac{E}{20} \times 50\right)$$

Keterangan:
NE : Nilai efisiensi
E : Efisiensi

KONSISTENSI DAN PENYERAPAN

Bulan	Ke-	RPD	Realisasi Anggaran (RA)	RPD Kumulatif	RA Kumulatif	Tingkat Konsistensi per Bulan (Min. 0%, Maks. 100%)	Konsistensi pada Bulan...	%
Januari	1	134.430.274.591	169.537.525.392	134.430.274.591	169.537.525.392	73,88%	73,88%	1,72%
Februari	2	776.708.253.194	283.304.374.733	911.138.527.785	452.841.900.125	49,70%	61,79%	4,58%
Maret	3	1.123.453.009.084	229.231.034.654	2.034.591.536.868	682.072.934.779	33,52%	52,37%	6,90%
April	4	779.908.974.017	278.072.062.315	2.814.500.510.886	960.144.997.094	34,11%	47,81%	9,72%
Mei	5	649.746.327.191	441.207.208.455	3.464.246.838.076	1.401.352.205.549	40,45%	46,33%	14,18%
Juni	6	890.867.295.902	332.700.086.881	4.355.114.133.978	1.734.052.292.430	39,82%	45,2%	17,55%
Juli	7	833.254.321.077		5.188.368.455.056	1.734.052.292.430	33,42%	43,56%	17,55%
Agustus	8	724.429.813.075		5.912.798.268.130	1.734.052.292.430	29,33%	41,78%	17,55%
September	9	963.416.967.904		6.876.215.236.034	1.734.052.292.430	25,22%	39,94%	17,55%
Oktober	10	1.001.825.617.787		7.878.040.853.821	1.734.052.292.430	22,01%	38,15%	17,55%
November	11	580.397.376.013		8.458.438.229.834	1.734.052.292.430	20,50%	36,54%	17,55%
Desember	12	1.422.186.952.620		9.880.625.182.453	1.734.052.292.430	17,55%	34,96%	17,55%
JUMLAH		**9.880.625.182.453**	**1.734.052.292.430**					

Variabel	Nilai	Bobot	Total
Penyerapan	17,55%	9,70%	1,70%
Konsistensi	45,25%	18,20%	8,24%
CRO	27,05%	43,50%	11,77%
Efisiensi	72,19%	28,60%	20,65%
Nilai Efisiensi	8,87%	-	-
NILAI KINERJA ANGGARAN (NKA)			**42,35%**

Hitungan Capaian Sasaran Program (CSP) dan Capaian Output Program (COP)

Periode Triwulan II 2024

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian
1	Rasio Konektivitas Antar Wilayah	Rasio	0,46	0,45	97,83%
2	Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi Kereta Api (rate of accident)	Kejadian Kecelakaan/ 1 Juta Km Tempuh	0,09	0,09	98,68%
3	Persentase On Time Performance (OTP) Transportasi Kereta Api	%	90,50	95,17	105,16%
4	Pemenuhan Target Angkutan Penumpang Kereta Api	%	78,80	68,11	86,43%
5	Pemenuhan Target Barang Penumpang Kereta Api	%	77,80	64,43	82,81%
6	Persentase pengoperasian jalur KA yang sesuai dengan TQI	%	94,00	93,93	99,93%
7	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Publik Bidang Perkeretaapian	Nilai	3,70	3,74	101,08%
Rata-Rata Capaian Kinerja Triwulan II 2024					**95,99%**

Catatan :

1) Perolehan nilai CSP dan COP menggunakan pendekatan rata-rata capaian kinerja dari tiap Indikator

Formula Perhitungan Realisasi NKA Eselon I

No	Periode	NK Manfaat & Implementasi					Rata-Rata NKA Satker*	Realisasi NKA
		Aspek Manfaat (CSP)	Aspek Implementasi					
			Penyerapan	Konsistensi	COP	Efisiensi		
1	Triwulan I	93,01%	6,90%	52,37%	93,01%	52,87%	22,33%	**53,14%**
2	Triwulan II	95,99%	17,55%	45,25%	95,99%	72%	25,23%	**56,67%**
3	Triwulan III							0,00%
4	Triwulan IV							0,00%

Catatan :

** Menggunakan pendekatan nilai Rata-Rata NKA Satker pada Triwulan II Tahun 2023*

Ditjen Perkeretaapian

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

Nilai Kinerja Anggaran

Sangat Kurang

Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran

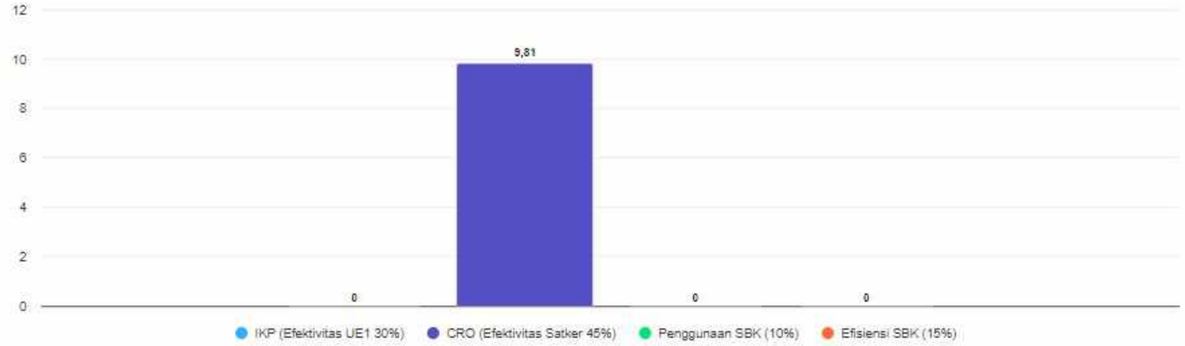

Juli

Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran

Progress Rincian Output

Data Anomali

Kondisi	Keterangan	Jumlah RO	Persentase

LAMPIRAN

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN 10

TINGKAT KEPUASAN PELAYANAN PERKANTORAN

Pertanyaan	Tidak Baik	Kurang Baik	Cukup	Baik	Sangat Baik	Total
1. Pendapat Responden tentang Kepuasaan Layanan SDM/Kepegawaian [Layanan kepangkatan dan gaji pegawai (kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, dan lainnya)]	1	7	46	133	49	236
1. Pendapat Responden tentang Kepuasaan Layanan SDM/Kepegawaian [Layanan pengembangan kompetensi pegawai (tugas belajar, kekuatertiasan pendidikan dan pelatihan manajerial pegawai, dan lainnya)]	0	11	52	128	45	236
1. Pendapat Responden tentang Kepuasaan Layanan SDM/Kepegawaian [Layanan mutasi dan jenjang karir pegawai]	1	13	64	121	37	236
1. Pendapat Responden tentang Kepuasaan Layanan SDM/Kepegawaian [Layanan pengaduan dan tindak lanjutnya terkait kepegawaian]	2	8	59	125	42	236
1. Pendapat Responden tentang Kepuasaan Layanan SDM/Kepegawaian [Layanan pembinaan/sosialisasi terkait kepegawaian]	1	6	52	132	45	236
1. Pendapat Responden tentang Kepuasaan Layanan SDM/Kepegawaian [Layanan kepegawaian lainnya (arsip/data kepegawaian, ijin cuti, penyesuaian ijasah, ujian dinas, dan lainnya)]	1	6	51	128	50	236
1. Pendapat Responden tentang Kepuasaan Layanan SDM/Kepegawaian [Kemampuan dan sikap Petugas (Tim SDM) dalam memberikan layanan kepegawaian]	2	5	49	127	53	236
Catatan dan Masukan terhadap Layanan SDM/Kepegawaian	0	0	1	1	0	
2. Pendapat Responden tentang Kepuasaan Layanan Tata Usaha [Layanan surat menyurat di lingkungan Ditjen Perkeretaapian]	0	4	50	129	53	236
2. Pendapat Responden tentang Kepuasaan Layanan Tata Usaha [Layanan pengelolaan keamsipan di lingkungan Ditjen Perkeretaapian]	0	5	52	134	45	236
2. Pendapat Responden tentang Kepuasaan Layanan Tata Usaha [Layanan keprotokolan pimpinan di lingkungan Ditjen Perkeretaapian]	0	4	48	140	44	236
2. Pendapat Responden tentang Kepuasaan Layanan Tata Usaha [Layanan pengaduan dan tindak lanjutnya terkait tata usaha]	0	5	54	138	39	236
2. Pendapat Responden tentang Kepuasaan Layanan Tata Usaha [Layanan pembinaan/sosialisasi terkait tata usaha]	0	5	54	134	43	236
2. Pendapat Responden tentang Kepuasaan Layanan Tata Usaha [Layanan tata usaha lainnya (ekspedisi, penggandaan, dan lainnya)]	0	5	56	132	43	236
2. Pendapat Responden tentang Kepuasaan Layanan Tata Usaha [Kemampuan dan sikap Petugas (Tim TU) dalam memberikan layanan tata usaha]	0	3	47	133	53	236
Catatan dan Masukan terhadap Layanan Tata Usaha	0	0	1		1	
3. Pendapat Responden tentang Kepuasaan Layanan Rumah Tangga/Umum [Kondisi fungsi dan kelengkapan fasilitas Kantor Pusat Ditjen Perkeretaapian (ruang kerja, ruang rapat, dan lainnya)]	0	5	51	132	48	236
3. Pendapat Responden tentang Kepuasaan Layanan Rumah Tangga/Umum [Kondisi kebersihan, keindahan/kerapian dan kenyamanan fasilitas Kantor Pusat Ditjen Perkeretaapian (ruang kerja, ruang rapat, dan lainnya)]	0	2	43	132	59	236
3. Pendapat Responden tentang Kepuasaan Layanan Rumah Tangga/Umum [Layanan keamanan dan ketertiban di lingkungan Kantor Pusat Ditjen Perkeretaapian]	0	4	44	129	59	236
3. Pendapat Responden tentang Kepuasaan Layanan Rumah Tangga/Umum [Layanan penanggulangan darurat akibat bencana di Kantor Pusat Ditjen Perkeretaapian]	0	3	58	130	45	236
3. Pendapat Responden tentang Kepuasaan Layanan Rumah Tangga/Umum [Layanan pengadaan barang milik negara untuk fasilitas perkantoran dalam pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan Ditjen Perkeretaapian]	0	6	54	130	46	236
3. Pendapat Responden tentang Kepuasaan Layanan Rumah Tangga/Umum [Layanan Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) di lingkungan Kantor Pusat Ditjen Perkeretaapian]	0	3	49	128	56	236
3. Pendapat Responden tentang Kepuasaan Layanan Rumah Tangga/Umum [Layanan pengaduan dan tindak lanjutnya terkait Rumah Tangga/Umum]	0	6	55	131	44	236
3. Pendapat Responden tentang Kepuasaan Layanan Rumah Tangga/Umum [Layanan pembinaan/sosialisasi terkait Rumah Tangga/Umum]	1	6	56	125	48	236
3. Pendapat Responden tentang Kepuasaan Layanan Rumah Tangga/Umum [Layanan Rumah tangga/Umum lainnya (kesehatan pegawai/MCU, fasilitas transportasi pegawai, pakaian dinas, ATK, dan lainnya)]	0	6	47	136	45	236
3. Pendapat Responden tentang Kepuasaan Layanan Rumah Tangga/Umum [Kemampuan dan sikap Petugas (Tim RT/Umum) dalam memberikan layanan umum/rumah tangga]	0	4	44	138	50	236
Catatan dan Masukan terhadap Layanan Rumah Tangga / Umum	0	0	1	3	2	

Uraian	Tidak Baik	Kurang Baik	Cukup	Baik	Sangat Baik	Total	Top Two	Skala 4
1. Pendapat Responden tentang Kepuasaan Layanan SDM/Kepegawaian	8	56	373	894	321	1.652	0,96	3,81
2. Pendapat Responden tentang Kepuasaan Layanan Tata Usaha	0	31	351	949	320	1.652	0,98	3,91
3. Pendapat Responden tentang Kepuasaan Layanan Rumah Tangga/Umum	1	47	501	1.311	500	2.360	0,98	3,90
								3,87

Jakarta, Juli 2024
Koordinator Kelompok Rumah Tangga

WARDOYO, S.E., M.M.
Penata Tingkat I (III/d)
NIP 19820818 2010121005

Kesiapan Fasilitas Perkantoran

Ruang Rapat Direktur Jenderal Perkeretaapian dan Ruang Rapat Sekretaris Direktorat Jenderal Perkeretaapian

Kesiapan Fasilitas Perkantoran

Ruang Rapat Majapahit Untuk Kegiatan Serah Terima Jabatan di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian

Kesiapan Fasilitas Perkantoran

Kesiapan Ruang Rapat Majapahit Untuk Kegiatan Rapat Pimpinan

LAMPIRAN V

Dokumentasi Pembahasan Capaian Kinerja
Triwulan I Tahun 2024

No. ST	:	KP.004/36/7/K1/DJKA/2024
Lokasi	:	Jakarta

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

LAPORAN RAPAT
PEMBAHASAN PELAPORAN KINERJA TRIWULAN II TAHUN 2024 DAN KOORDINASI SERTA PEMBAHASAN EVALUASI IMPLEMENTASI AKIP PADA UNIT KERJA DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN
JULI 2024

LAPORAN RAPAT PEMBAHASAN PELAPORAN KINERJA TRIWULAN II TAHUN 2024 DAN KOORDINASI SERTA PEMBAHASAN EVALUASI IMPLEMENTASI AKIP PADA UNIT KERJA DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

A. DASAR PENUGASAN

1. Surat Sekretaris Direktorat Jenderal Perkeretaapian Nomor: PS.006/1/7/K1/DJKA/2024 tanggal 3 Juli 2024 perihal Undangan Rapat Pembahasan Pelaporan Kinerja Triwulan II Tahun 2024 dan Koordinasi serta Pembahasan Evaluasi Implementasi AKIP pada Unit Kerja Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2024.
2. Surat Perintah Tugas Sekretaris Direktorat Jenderal Perkeretaapian Nomor: KP.004/36/7/K1/DJKA/2024 tanggal 9 Juli 2024.

B. PELAKSANAAN KEGIATAN

1. Tempat : Maia Hotel Jakarta
2. Tanggal : Rabu s.d Jumat, 10 s.d 12 Juli 2024
3. Peserta Rapat :
   a. Direktur Sistem Penganggaran DJA, Kemenkeu (narasumber);
   b. Tim Evaluasi Implementasi SAKIP, Itjen Kemenhub;
   c. Perwakilan Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api;
   d. Perwakilan Direktorat Prasarana Perkeretaapian;
   e. Perwakilan Direktorat Sarana Perkeretaapian;
   f. Perwakilan Direktorat Keselamatan Perkeretaapian;
   g. Perwakilan Bagian Keuangan, Setditjen Perkeretaapian;
   h. Perwakilan Bagian Hukum, Setditjen Perkeretaapian;
   i. Perwakilan Bagian SDM dan Umum, Setditjen Perkeretaapian;
   j. Perwakilan Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Jakarta;
   k. Perwakilan Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Bandung;
   l. Perwakilan Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Semarang (unit sampel);
   m. Perwakilan Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Surabaya (unit sampel);
   n. Perwakilan Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Medan;
   o. Perwakilan Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Padang;
   p. Perwakilan Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Palembang;
   q. Perwakilan Balai Pengujian Perkeretaapian (unit sampel);
   r. Perwakilan Balai Perawatan Perkeretaapian;
   s. Perwakilan Balai Pengelola Kereta Api Ringan Sumatera Selatan;
   t. Perwakilan Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan;
   u. Tim Evaluasi Penilaian Mandiri Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian.
4. Kegiatan – kegiatan yang dilaksanakan sebagai berikut:
   a. Evaluasi Implementasi SAKIP pada Unit Eselon I Direktorat Jenderal Perkeretaapian serta Unit Sampel (pembahasan secara pararel terhadap

isian LKE dan data dukung masing- masing unit kerja) pada komponen Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal.

b. Tindak Lanjut/Perbaikan Isian LKE dan Data Dukung sesuai Hasil Evaluasi oleh masing-masing unit kerja termasuk Unit Eselon I Direktorat Jenderal Perkeretaapian.
c. Penjelasan Perhitungan Nilai Kinerja Anggaran (NKA) pada Aplikasi Monev Kementerian Keuangan.
d. Pembahasan Capaian Kinerja serta Penyusunan Laporan Monitoring Kinerja Triwulan II Tahun 2024 seluruh unit kerja Eselon II dan Eselon III di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian.
e. Pembahasan Progres Pengisian Aplikasi e-Monev Bappenas, e-SAKIP Reviu, e-Performance dan SILAKI seluruh unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian.
f. Pembahasan Konsep Laporan Monitoring Kinerja Triwulan II Tahun 2024 Direktorat Jenderal Perkeretaapian.

C. POKOK – POKOK PEMBAHASAN

1. Pada tanggal 10 s.d 12 Juli 2024 telah dilaksanakan rapat pembahasan terkait evaluasi implementasi SAKIP dan pelaporan kinerja Triwulan II Tahun 2024 yang dihadiri oleh Tim Evaluator SAKIP Inspektorat Jenderal, perwakilan dari Direktorat, Bagian dan Balai di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian serta narasumber dari Direktorat Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan.
2. **Pembahasan Hasil Evaluasi SAKIP bersama Tim Evaluator Itjen**
   a. Direktorat Jenderal Perkeretaapian telah melaksanakan evaluasi internal terhadap implementasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2024 baik di tingkat unit kerja maupun di tingkat Eselon I dan diperoleh nilai evaluasi internal sebesar 85,58. Hasil evaluasi tersebut telah disampaikan kepada Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan melalui surat Direktur Jenderal Perkeretaapian Nomor PS.306/1/1/DJKA/2024 tanggal 5 Juli 2024 perihal Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Tahun 2024 pada Direktorat Jenderal Perkeretaapian.

Unit Kerja	Hasil Evaluasi Tahun 2023	Hasil Evaluasi Internal Tahun 2024	
		Tingkat Unit Kerja	Tingkat Eselon I
Ditjen Perkeretaapian (Eselon I)	82,45	85,30	85,30

No.	Komponen	Bobot	Nilai Akuntabilitas Kinerja	
			Tahun 2023 (Penilaian Final oleh Itjen)	Tahun 2024 (Penilaian Mandiri/ Evaluasi Internal Eselon I)
1	Perencanaan Kinerja	30,00	24,09	25,11
2	Pengukuran Kinerja	30,00	25,05	26,35
3	Pelaporan Kinerja	15,00	12,30	12,87
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25,00	21,25	21,25
Nilai Akuntabilitas Kinerja			**82,70**	**85,58**
Predikat			**A**	**A**

   b. Hasil Evaluasi Internal Akuntabilitas Kinerja Unit Kerja Direktorat Jenderal Perkeretaapian dengan hasil sebagai berikut:

No.	Unit Kerja	Hasil Evaluasi Tahun 2023	Hasil Evaluasi Internal Tahun 2024	
			Tingkat Unit Kerja	Tingkat Eselon I
1	Setditjen Perkeretaapian	83,35	85,30	87,55
2	Direktorat LLAKA	83,35	88,95	88,15
3	Direktorat Prasarana Perkeretaapian	83,95	89,95	89,05
4	Direktorat Sarana Perkeretaapian	80,50	84,85	86,65
5	Direktorat Keselamatan Perkeretaapian	82,15	90,60	86,65
6	BTP Jakarta	80,35	81,85	83,05
7	BTP Bandung	81,70	85,90	83,05
8	BTP Semarang	80,45	81,50	83,95
9	BTP Surabaya	82,45	88,35	84,85
10	BTP Medan	81,70	81,70	83,95
11	BTP Padang	82,45	87,55	85,60
12	BTP Palembang	81,85	82,75	83,05
13	Balai Pengujian Perkeretaapian	81,85	82,90	83,95
14	Balai Perawatan Perkeretaapian	82,45	83,20	83,35
15	BPKAR Sumatera Selatan	78,55	82,75	83,95
16	BPKA Sulawesi Selatan	79,75	82,00	83,35

c. Berdasarkan surat tugas Inspektur II Kementerian Perhubungan Nomor ST-ITJEN 1/4-011B Tahun 2024, Inspektorat Jenderal sedang melakukan evaluasi terhadap Lembar Hasil Evaluasi (LHE) dan Lembar Kerja Evaluasi (LKE) sesuai SE I Itjen Tahun 2024 pada unit kerja Eselon I dan beberapa unit kerja sampel di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian yang terdiri dari:
   1) Direktorat Prasarana Perkeretaapian;
   2) Direktorat Keselamatan Perkeretaapian;
   3) BTP Kelas I Semarang;
   4) BTP Kelas I Surabaya;
   5) Balai Pengujian Perkeretaapian.

d. Telah dilakukan evaluasi LKE bersama tim Inspektorat Jenderal dan Evaluator Unit Kerja sampel dengan pembagian kelompok seperti berikut ini:

Evaluator			
Bu Puji (1)	Pak Ayis (2)	Pak Bekti (3)	Pak Nurfachrudin (4)
Unit Kerja Sample			
DJKA - Novi Dit Prasarana - Meri	Dit Keselamatan - Eric Adam	BTP Surabaya - Ridlwan BTP Semarang - Rasyid	Balai Pengujian - Ammar, Yayang
Unit Kerja Mengikuti			
BTP Padang - Arfie	BTP Jakarta - Mita	BTP Bandung - Supandiansyah	BTP Palembang - Nisa
BPKARS - Dwi	BTP Medan - Johannes	Dit LLAKA - Riswan	Balai Perawatan - Fajri
	Dit Sarana - Roby/ Yurnaliza	Setditjen - Andre	BPKA Sulsel - Taufik

e. Berdasarkan catatan sementara Inspektorat Jenderal, terdapat beberapa kriteria pada komponen perencanaan kinerja yang perlu perbaikan data dukung diantaranya melengkapi persetujuan pimpinan, melengkapi dokumen SKP dan MPPH, memastikan ketersediaan dokumen periode 5 tahun terakhir, dan lainnya. Selain itu, juga perlu diskusi lanjut terkait upaya yang patut dihargai/inovasi dalam penyelenggaraan SAKIP maupun peningkatan kinerja unit kerja.

f. Sesuai hasil koordinasi, Tim Evaluator Inspektorat Jenderal merencanakan evaluasi lanjutan termasuk observasi/wawancara/pendalaman guna finalisasi penilaian evaluasi implementasi SAKIP Direktorat Jenderal Perkeretaapian pada tanggal 15-19 Juli 2024 bertempat di BTP Kelas I Surabaya dengan mengikutsertakan Setditjen Perkeretaapian dan 4 unit sampel lainnya.

3. **Pemaparan Perhitungan Nilai Kinerja Anggaran (NKA) pada Aplikasi Monev Kementerian Keuangan oleh narasumber dari Direktorat Sistem Penganggaran Kementerian Keuangan, hal yang menjadi pembahasan antara lain:**
   a. Pentingnya pengendalian, pemantauan dan evaluasi kinerja anggaran pada instansi pemerintah untuk menghubungkan berbagai indikator pembangunan sebagi dampak pelaksanaan kebijakan pemeritah. Evaluasi kinerja anggaran merupakan salah satu instrument penganggaran berbasis kinerja untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi dan relevansi informasi kinerja, serta mengidentifikasi faktor-faktor pendukung dan kendala dalam rangka peningkatan kinerja dan penyusunan kebijakan. Manfaat dari evaluasi kinerja anggaran yaitu reviu baseline, alokasi anggaran, peningkatan kualitas informasi kinerja serta pemberian reward dan punishment.
   b. Menindaklanjuti amanat dalam Bab VIII pasal 242 ayat (4) dan pasal 246 ayat (9) PMK 62 tahun 2023, telah ditetapkan KMK 466 Tahun 2023 terkait Pedoman Teknis Pelaksanaan PPKA dan EKA Perencanaan Anggaran, dengan demikian di tahun 2024 untuk perhitungan NKA dapat diacu menggunakan peraturat terbaru. Pada peraturan terbaru ini menghilangkan irisan penilaian berupa penyerapan anggaran dan konsistensi RPD menjadi fokus pemantauan di DJPB (Penilaian Kinerja Pelaksanaan Anggaran/IKPA) serta DJA (Penialain Kinerja Perencanaan Anggaran/EKA) fokus pada efektivitas dan efisiensi. Selain itu adanya penguatan sinergi dan peran yaitu DJA fokus pada aspek perencanaan anggaran, DJPB fokus pada aspek pelaksanaan anggaran, serta Hasil monev DJA dan DJPB dipertukarkan dan ditindaklanjuti guna peningkatan kualitas belanja.
   c. Pada kebijakan KMK 466 Tahun 2023 terdapat pengendalian dan pemantauan kinerja anggaran Dimana dilakukan secara berkala dan menyeluruh selama periode aktivitas/1 tahun sepanjang siklus proses pelaksanaan anggaran. Dalam hal pengendalian dan pemantauan berfokus pada kepatuhan terhadap regulasi perencanaan anggaran terhadap standar biaya, pembatasan alokasi untuk belanja tertentu, pengalokasian untuk sumber dana tertentu, budget tertentu, hasil sinkronisasi belanja pusat-daerah, dan kebijakan penganggaran tahun berkenaan. Dari hasil pengendalian dan pemantauan terdapat tindak lanjutnya yaitu Kementerian Keuangan melakukan penyesuaian belanja K/L dan BUN melalui Revisi Anggaran (bisa terjadi adanya Revisi Informasi Kinerja, Penggeseran Anggaran, Blokir atau Pencadangan).

d. Terkait kegiatan pengendalian dan pemantauan juga dilakukan oleh K/L dalam hal ini untuk eselon I Ditjen Perkeretaapian yaitu memanstikan ketersediaan, kejelasan, keterukuran, dan relevansi infromasi kinerja atas seluruh indikator kinerja program pada unit eselon I dan seluruh rincian output satker di bawah kewenangannya.
e. Dikarenakan adanya kebijakan baru KMK 466 Tahun 2023, untuk penilaian indikator penilaian kinerja perencanaan anggaran Kementerian/Lembaga mengalami perubahan sebagai berikut:

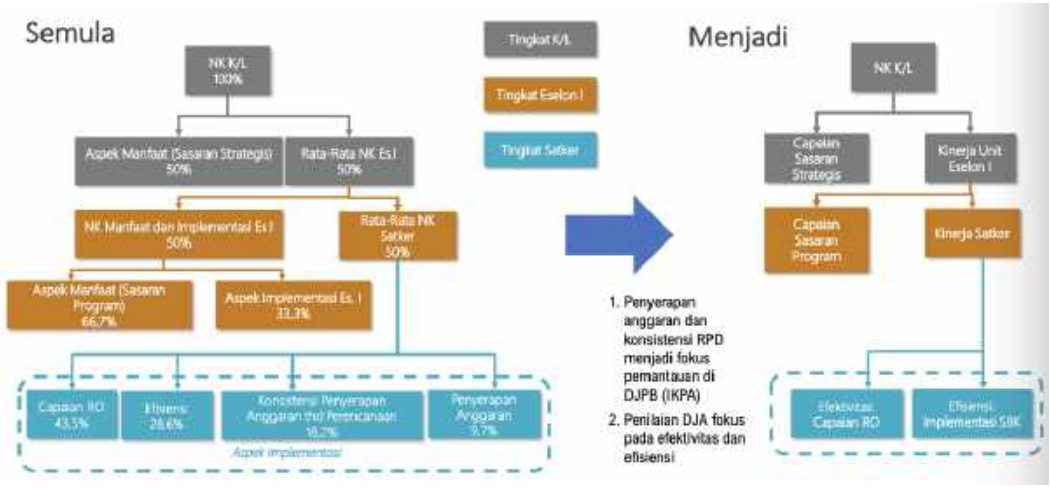

Hanya berfokus pada efektivitas Capaian RO dan efisiensi implementasi SBK untuk di level satker, kemudian nilai tersebut akan diangkat menjadi nilai agregasi nilai eselon I ditambahkan dengan capaian sasaran program. Penyerapan anggaran dan konsistensi RPD menjadi fokus pemantauan di DJPB (IKPA) dan penilaian DJA fokus pada efektivitas dan efisiensi.

f. Berikut ini rincian baru untuk pembobotan penilaian kinerja perencanaan anggaran:

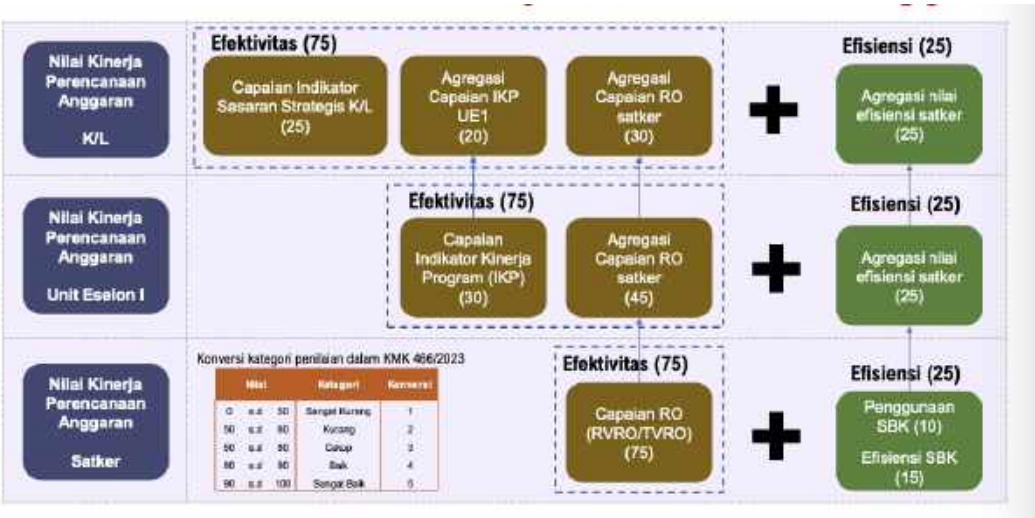

Untuk penilaian kinerja perencanaan anggaran level satker dihitung pada efektivitas dengan bobot 75% diperoleh dari Capaian Rincian Output (RVRO/TVRO) ditambahkan dengan efisiensi dengan bobor 25% diperoleh dari Penggunaan Standar Biaya Keluaran (10%) dan Efisiensi Standar Biaya Keluaran (15%), sedangkan untuk level Eselon I nilai dihitung dari efektivitas

dengan bobot 75% diperoleh dari Capaian IKP (30%) dan Agregasi Capaian RO satker (45%) ditambahkan dengan efisiensi dengan bobor 25% diperoleh dari agregasi nilai efisiensi satker (25%).

g. Pengukuran nilai efektivitas level satker dilakukan dengan menghitung rata-rata acapaian per RO pada satker. Dimana capaian RO untuk level Satker dilaporkan secara berkala mengikuti ketentuan pelaporan yang diatur oleh DJPB. Berikut ini rumus pengukuran nilai efektivitas satker:

$$CRO = \left(\left(\sum_{i=1}^{n} \frac{RVRO_i}{TVRO_i} \right) x \frac{1}{n} \right) \times 100\%$$

Keterangan:

CRO	:	Capaian RO tingkat Satker
$RVRO_i$	:	Realisasi Volume RO i
$TVRO_i$	:	Target Volume RO i
n	:	Jumlah RO

h. Untuk pengukuran efisiensi level satker mendorong implementasi SBK (25%) terdiri dari Penggunaan SBK (10%), RO tersebut dianggap menggunakan SBK, jika indeks biaya RO dalam PMK SBK lebih dari/sama dengan indeks biaya RO antara realisasi anggaran dibagi realisasi volume RO. Cara pengitungannya yaitu dengan membandingkan jumlah RO yang menggunakan SBKK dalam RKA-K/L dibandingkan dengan jumlah RO yang telah ditetapkan menjadi SBKK serta jumlah RO yang menggunakan standar biaya keluaran umum (SBKU) dalam RKA-K/L dibandingkan dengan jumlah RO yang memenuhi kriteria untuk menggunakan SBKU.

Menghitung Jumlah RO yang memenuhi kondisi berikut:

$$\text{Indeks dalam PMK SBK} \geq \frac{Penyerapan\ Anggaran\ di\ RO}{Realisasi\ Volume\ RO}$$

DJA akan melakukan pemetaan atas RO yang memenuhi kriteria SBKU terlebih dahulu sebelum menilai penggunaan SBKU menggunakan formula di atas. Terkait penilaian Efisiensi SBK (15%)

Menghitung tingkat efisiensi pada RO SBK dengan formula sebagai berikut

$$\text{Indeks dalam PMK SBK} > \frac{Penyerapan\ Anggaran\ di\ RO}{Realisasi\ Volume\ RO}$$

Jika indeks biaya RO dalam PMK SBK lebih dari indeks biaya RO antara realisasi anggaran dibagi realisasi volume RO dengan ketentuan sebagai berikut:

1) Efisiensi Alokasi Per RO yang diperhitungkan paling besar 20% dan paling kecil 0%.
2) Efisiensi Alokasi Per RO SBKU yang bernilai lebih dari 20% diperhitungkan maksimal sebesar 20%, sedangkan Efisiensi Alokasi Per RO SBKU kurang dari 0% akan diperhitungkan sebesar 0%.
3) Efisiensi Alokasi Per RO SBKK bernilai lebih dari 20% serta kurang dari 0% akan diperhitungkan 0%.

i. Berikut ini merupakan contoh penilaian kinerja level Satker:

j. *Passing grade* dalam *reward* dan *punishment* menggeser paradigma penilaian kinerja akhir tahun, perubahan dilakukan agar K/L unit satker tidak hanya fokus pada nilai, tetapi juga pada pending matters dan perbaikan berkelanjutan. Nilai dikonversi menggunakan kategori kualitatif menjadi 1 s.d 5 atau Sangat Kurang s.d Sangat Baik.

k. Skema baru kebiajkan pemberian penghargaan dan pengenaan sanksi yang semula pemberian rewrd & punishment berdasarkan nilai tertinggi variabel EKA, PPNB dan IKPA, EKA dibobot 60% sedangkan IKPA dibobot 40%, nilai digabungkan EKA-IKPA diranking berdasarkan kategori K/L pagu besar, pagu sedang, dan pagu kecil. Skema penilaian baru menjadi rekap Nikai Kinerja = Perencanaan Anggaran (50%) dari SMART ditambah (+) Pelaksanaan Anggaran 50% dari IKPA, kemudian K/L yang memperoleh NKA yang Sangat Baik dan bagi K/L yang memiliki tusi PPB (Percepatan Pelaksanaan Berusaha) memperoleh nilai Sangat Baik lolos menjadi kandidat K/L yang akan diberi intensif. Intensif diberikan kepada 3 K/L dengan kinerja pengelolaan PNBP terbaik, 3 K/L dengan nilai sinkronisasi belanja K/L dan TKD terbaik serta 3 K/L dengan proporsi penggunaan PDN terbesar.

l. Kewajiban pelaporan kinerja dalam rangka evaluasi dan penilaian kinerja perencanaan anggaran, untuk input capaian RO diinput oleh satker setiap 2 hari kerja setiap awal bulannya pada aplikasi SAKTI. Input sasaran program untuk capaiannya diinput uleh unit esleon I menjadi Nilai Kinerja Anggaran Unit Eselon I dapat diinput di tanggal 1 Januari s.d 28 Februari Tahun+1. Saat ini sedang dikembangkan aplikasinya, input diaplikasi SAKTI, sebelum menginput capiannya perlu menginput manualnya.

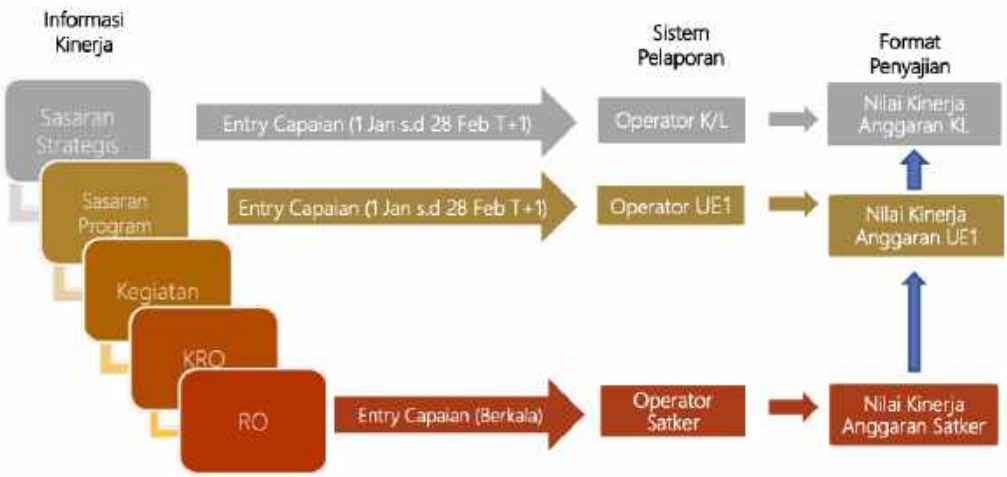

m. Telah terintegrasi aplikasi Monev Sakti dengan MonevKeu, yang mana Monev SAKTI sebagai single entry point/semua penginputan capaian dan kinerja dan MonevKeu single monitoring.

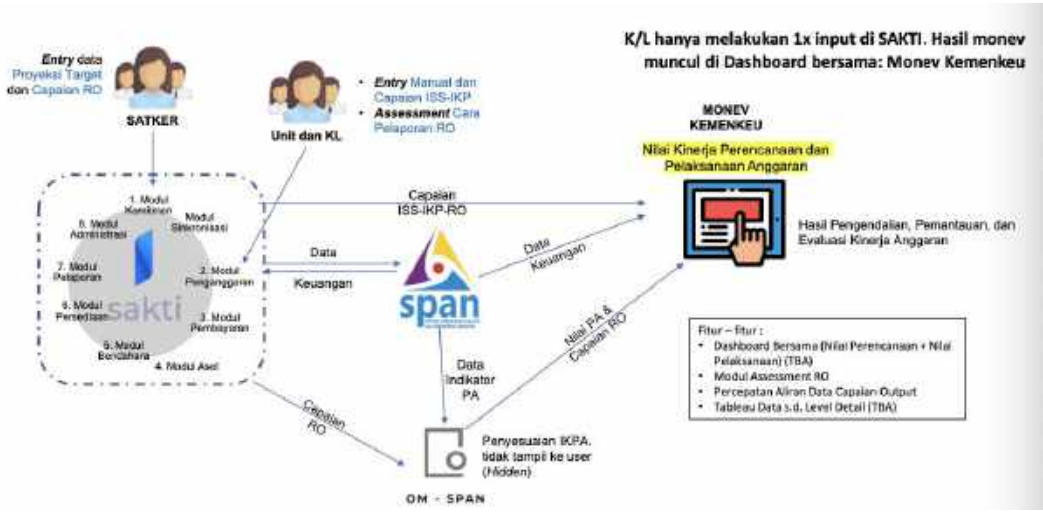

n. Berikut ini merupakan dashboard Monev Kemenkeu, diagram yang terdiri dari 3 warna yaitu biru menunjukkan Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran berasal dari SMART, ungu menunjukkan Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran berasal dari IKPA, sedangnya yang putih akan terisi jika seluruh variabel sudah terbuka karena sampai saat ini hanya bisa bisa menginput Capaian RO.

o. Jika satker terdapat kendala tidak dapat menginput capaian RO pada aplikasi SAKTI karena ada perubahan infromasi kinerja maka perlu dilakukan assessment RO. Assessment RO tidak dapat dilakukan oleh satker, sehingga perlu dilakukan koordinasi dengan level eselon I dan DJA. Jika assessment RO tidak dilakukan maka RO yang dilakukan revisi tidak bisa diinput capaiannya pada aplikasi SAKTI.

p. Hasil assessment RO tidak dapat dilakukan revisi maksudnya adalah hasil assessment RO yang telah disetujui oleh DJA tidak dapat dilakukan revisi, maka saat dilakukan assessment saat di sepanjang tahun perlu kehati-hatian karena akan berpengatuh pada inputan RO yang akan dilakukan.

q. DJA telah melakukan identifikasi penggunaan SBKU tahun berjalan, dan menetapkan mana saja RO yang menurut DJA perlu menggunakan SBKU secara nomenklatur dan komponen POK. Tahun ini seluruh RO yang diwajibkan menggunakan SBKU akan ditetapkan dalam surat Dirjen Anggaran dimana akan digunakan sebagai dasar penilaian kinerja perencanaan anggaran, Pada Lampiran II surat Dirjen Anggaran, penetapan ragam-RO pada unit eselon I tertentu yang diwajibkan menggunakan SBKU yaitu Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi menjadi SBKU Kehumasan dan Informasi.

r. Ditemukan tidak ada Satker Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perkeretaapian yang menggunakan SBKU Perencanaan Anggaran dan Penganggaran, Laporan Kinerja, dan Layanan BMN.

s. Ditemukan juga Rincian Output SBKK berdasarkan PMK 113 Tahun 2023 tentang SBK Tahun 2024, Ditjen Perkeretaapian tidak memiliki RO yang ditetapkan sebagai SBKK pada tahun 2024.

t. Berikut merupakan simulasi perhitungan nilai kinerja perencanaan anggaran

u. Saat ini aplikasi MonevKeu sudah tidak ada pengumputan sekarang seluruh penginputan sudah ada di aplikasi SAKTI. Aplikasi MonevKeu menjadi aplikasi reporting/monitoring.

v. Tugas yang dilakukan satker harus mengisi proyeksi target bulanan dan capiaan rincian output pada modul komitmen, sedangkan untuk level Eselon I diwajibkan untuk mengisi manual dan capaian indikator sasaran strategis dan indikator kegiatan program pada modul penganggaran. Untuk level eselon I, aplikasi masih tahap development ketika sudah bisa diinputkan akan diinfo lebih lanjut. Pada level Eselon I perlu melakukan assessment cara pelaporan RO, meskiput di tahun 2024 sudah diinput pada monevKeu untuk tahun 2025 nanti menggunakan aplikasi SAKTI modul penganggaran.

w. Aplikasi Monev Kemenkeu sudah dapat melihat nilai kinerja perencanaan dan pelaksanaan anggaran yang sebelumnya harus membuka 2 aplikasi dan menghitung kinerja anggaran.

x. Data capaian RO sudah terintegrasi dengan e-Monev Bappenas. Laporan Semester dan Tahunan unit kerja akan Kemenkeu ambil dari hasil upload laporan kinerja yang sudah diupload pada e-SAKIP Reviu.

y. Assessment RO level satker dilakukan oleh unit Eselon I, divalidasi oleh K/L dan disapprove oleh DJA.

z. Saat ini capaian output pada aplikasi SAKTI masih delay 1 bulan tombol kirim muncul pada 5 hari kerja di bulan berikutnya sehingga ini mempengaruhi aliran data, ditahun berikutnya akan tampilkan 2 capaian yg disimpan dan kirim namun yang menjadi perhitungan merupakan yang dikirim.

Berikut ini merupakan dashboard Monev Kemenkeu, dapat diakses ke halaman monev.kemenkeu.go.id

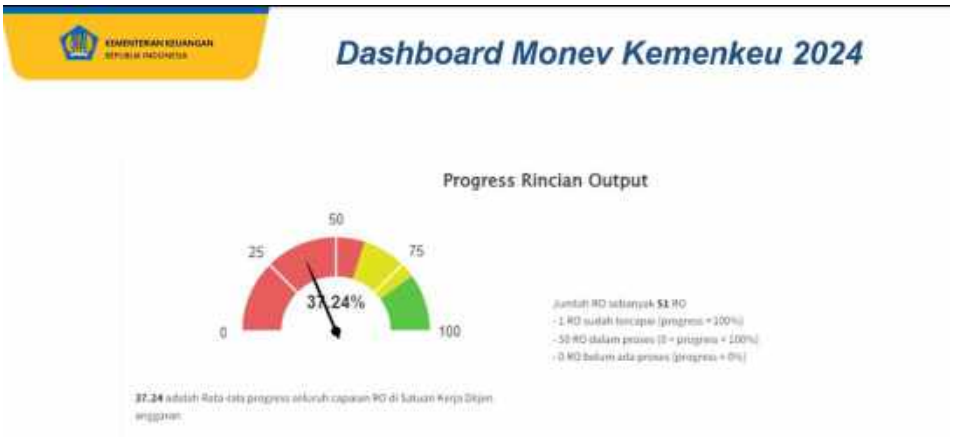

Setelah pemaparan dari Narasumber, ada beberapa diskusi terkait diantaranya:

a. Terkait dengan integrasi aplikasi SAKTI dengan SMART waktu yang tepat untuk bisa melihat akumulasi dan realisasi dari sisi sistem dapat membatau

capaian sebagai contoh dibulan Juni di 5 hari kerja bulan berikutnya dan paling cepat minggu ke-2 bulan berikutnya.

b. Satker yang tidak ada SBK tidak mendapatkan nilai efisiensi hanya mendaptkan nilai Capaian RO. Agar ditahun 2025 dapat disesuaikan setidaknya setiap 1 satker memiliki 1 SBK.
c. Menu Monitoring RO SBK masih dalam tahap pengembangan dan tidak tampil di seluruh user, akan ditindaklanjuti pada internal DJA apakah perlu ditampilkan di seluruh user atau tidak.
d. Pada DIPA Direktorat Prasarana masing-masing RO memiliki target 1 contoh 1 layanan/1 dokumen/1 tahun, Direktorat Prasarana ingin melakukan revisi DIPA di tahun berjalan sehingga bisa mengupdate nilai Capian RO. Isu di Direktorat Prasraana capaian RO di perencanaan anggaran rendah karena tidak bisa mengisikan realisasi volume karena hanya 1 dan di akhir tahun, namun progres sudah diisi secara berkala. Masukkan dari DJA boleh dilakukan revisi namun tetap berkoordinasi dengan DJA pic Kementerian Perhubungan dan Anggaran Bidang untuk melakukan revisi atas target tersebut. Untuk nilai perencanaan anggaran fokus di akhir tahun bukan periode berjalan.
e. Pada grafik Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran/IKPA cenderung dinamis/naik turun grafiknya karena nilainya bulanan, sedangkan pada grafik Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran pada nilai CRO merupakan nilai yang kumulatif, sedangkan untuk nilai Efisiensi SBK baru terlihat diakhir tahun.
f. Jika masih menggunakan rumus yang lama perhitungan masih menggunakan manual dengan cara tarik data manual tiap bulannya dimasukkan kedalam format excel, dikarenakan tidak bisa sesuai dengan dashboard pada Monev Kemenkeu. Kalau menggunakan perhitungan baru hanya tinggal screenshoot dashboard Monev Kemenkeu untuk data dukungnya.
g. Kelemahan jika masih menggunakan formulasi perhitungan yang lama yaitu dikhawatirkan masih adanya kesalahan perhitungan oleh unit kerja sehingga nilai menjadi tidak valid, sedangkan jika menggunakan perhitungan formulasi baru capaian menjadi rendah.

4. **Pembahasan Progres Pengisian Aplikasi e-Monev Bappenas, e-SAKIP Reviu, e-Performance dan SILAKI pada masing-masing unit kerja di lingkungan Ditjen Perkeretaapian, hal yang menjadi pembahasan antara lain:**
   a. Terkait pengisian pelaporan melalui e-SAKIP Reviu tahun 2024 masih terdapat beberapa Direktorat dan Balai yang belum meng-upload dokumen pedoman teknis perencaan, pedoam teknis pengukuran dan pengumpulan data, pedoman teknis evaluasi internal, DIPA, cascading, TL LHE AKIP Internal, serta IKK. Berikut ini hasil inventaris pengisian/pemenuhan dokumen pada aplikasi e-SAKIP Reviu yang dikelola oleh KemenPANRB.

No	Unit Kerja	Data Kinerja 2024										
		Rencana Strategis 2020-2024	IKK	RKT 2024	PK 2024	Renaksi	DIPA	Cascading	TL LHE AKIP Internal	Pedoman Teknis Perencanaan	Pedoman teknis Pengukuran dan Pengumpulan data	Pedoman Teknis Evaluasi Internal
1	Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v
2	Direktorat Lalu Lintas Angkutan KA	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	
3	Direktorat Prasarana Perkeretaapian	v	v	v	v	v	v		v	v	v	
4	Direktorat Sarana Perkeretaapian	v	v	v	v	v	v			v	v	
5	Direktorat Keselamatan Perkeretaapian	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	
6	Balai Teknik Perkeretaapian Jakarta	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	
7	Balai Teknik Perkeretaapian Bandung	v	v	v	v	v						
8	Balai Teknik Perkeretaapian Semarang	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	
9	Balai Teknik Perkeretaapian Surabaya	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	
10	Balai Teknik Perkeretaapian Medan	v	v	v	v	v	v	v		v	v	
11	Balai Teknik Perkeretaapian Padang	v	v	v	v	v	v					
12	Balai Teknik Perkeretaapian Palembang	v	v	v	v	v	v		v	v	v	
13	Balai Pengujian Perkeretaapian	v	v	v	v	v	v	v	v			
14	Balai Perawatan Perkeretaapian	v	v	v	v	v	v	v	v			
15	BPKAR Sumatera Selatan	v	v	v	v	v	v		v			
16	BPKA Sulawesi Selatan	v		v	v	v	v	v	v	v	v	
17	Direktorat Jenderal Perkeretaapian	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v

CATATAN:
- Pedoman Teknis Perencanaan: PM 112 Tahun 2017 tentang Pedoman dan Proses Perencanaan Di Lingkungan Kementerian Perhubungan
- Pedoman Teknis Evaluasi Internal: SE ITJEN 1 Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Unit Kerja Eselon I Kemenhub

Update 9 Juli 2024

KETERANGAN:
V : Lengkap
- : Tidak Ada Pengisian

Masing-masing unit kerja yang masih belum melenggapi data dukung agar dapat melengkapi dokumen sebagaimana arahan narasumber KemenPANRB sebelumnya. Serta terdapat unit kerja yang masih belum meng-*upload* data dukung monitoring rencana aksi periode Januari s.d Juni 2024, agar dapat meng-*upload* pada menu Rencana Aksi.

b. Terkait pemantaian pengisian aplikasi e-Performance tahun 2024, pada bulan Juni BTP Medan belum mengisi sehingga dibutuh percepatan pengisian aplikasi e-Performance dikarenakan menjadi salah satu penilaian Biro Perencanaan. Masing-masing unit kerja perlu memperhatikan pengisian aplikasi e-Performance dikarenakan masih terdapat beberapa pengisian aplikasi tepat waktu namun pengisian capaian baru sebagian, keterangan dan rencana selanjutnya tidak terisi, dokumen pendukung belum terupload.

B. PEMANTAUAN PENGISIAN APLIKASI *E-PERFORMANCE* TAHUN 2024

Update 10 Juli 2024

c. Terkait pengisian monitoring rencana aksi pada aplikasi SILAKI masih terdapat beberapa unit kerja yang belum mengisi, agar memenuhi data monitoring rencana aksi sebagai bentuk adanya bentuk perubahan dalam pelaporan kinerja.

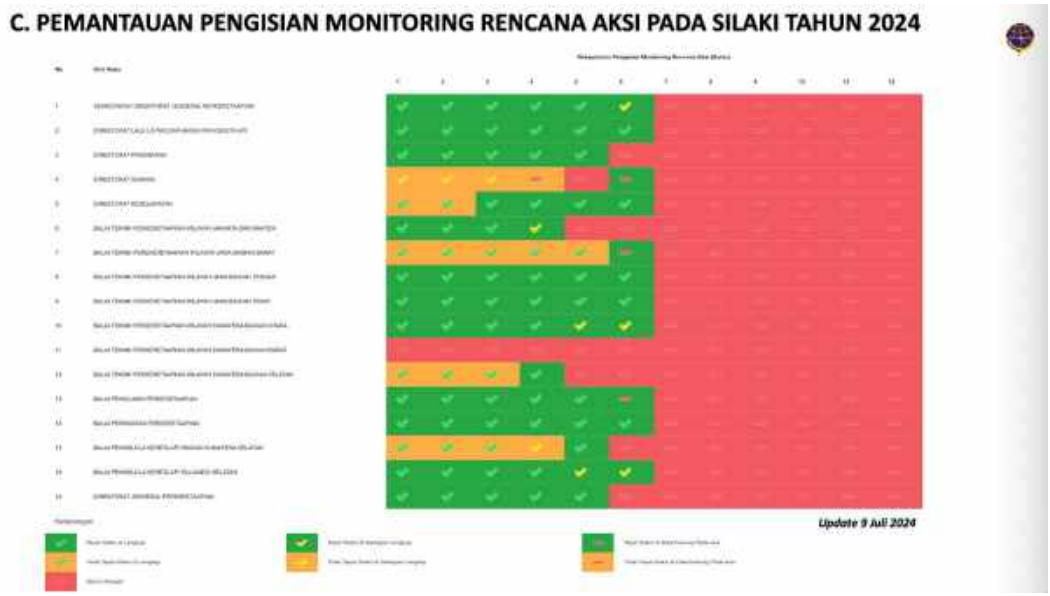

d. Terkait pengisian aplikasi e-Monev Bappenas pada bulan Januari s.d Maret belum check list dikarenakan masih terdapat unit kerja yang belum melengapi isian e-Moneb Bappenas.

5. **Pembahasan Capaian Kinerja serta Penyusunan Laporan Monitoring Kinerja Triwilan II Tahun 2024 masing-masing unit kerja di lingkungan Ditjen Perkeretaapian, hal yang menjadi pembahasan antara lain:**
   a. Terkait outline laporan triwulan dan format lampiran agar mengacu pada Peraturan Menteri Perhubungan nomor PM 95 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
   b. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pelaporan kinerja antara lain:
      1) Pada Upaya Pengingkatan Kinerja, pengukuran kinerja mempengaruhi penyesuaian Strategi, Kebijakan, Aktivitas dan Anggaran dalam mencapai kinerja.
      2) Pada Upaya Pengingkatan Kinerja, pengukuran kinerja mempengaruhi penyesuaian (refocusing) organisasi.
      3) Pada Upaya Pengingkatan Kinerja, informasi dalam laporan kinerja berkala digunakan dalam penyesuaian aktivitas dan penggunaan anggaran untuk mencapai kinerja.
      4) Dokumen laporan kinerja menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja di level nasional/internasional (benchmark kinerja) pada analisa harus lebih dari 1 indikator kinerja.
      5) Dokumen laporan kinerja menginfokan efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja pada analisa untuk SDM dan anggaran.
      6) Untuk analisa, diperlukan informasi capaian/realisasi fisik masing-masing unit kerja.
      7) Untuk analisa, memperhatikan evaluasi terhadap prediksi capaian kinerja yang tidak On The Right Track.

8) Untuk dokumen pendukung, setiap unit/satuan kerja/pegawai memahami dan peduli atas hasil pengukuran kinerja termasuk pemantauan atas pengukuran capaian kinerja secara berjenjang.
9) Untuk tindak lanjut rekomendasi, menampilkan upaya perubahan Budaya Kinerja dan yang patut dihargai pada pelaporan kinerja.

c. Evaluasi terhadap capaian kinerja masing-masing unit kerja diperoleh dari capaian kinerja berdasarkan Laporan Monitoring Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2024 yaitu perhitungan rata-rata perbandingan antara realisasi kinerja dengan target kinerja Triwulan I Tahun 2024 masing-masing indikator kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan pada Perjanjian Kinerja Tahun 2024.
d. Berdasarkan hasil evaluasi, diidentifikasi indikator kinerja yang berkinerja rendah (<90%) diantaranya:
1) Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran yang mengacu pada Nilai Kinerja Anggaran sesuai PMK Nomor 22/PMK.02/2021 (BTP Palembang, Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan).
2) Persentase Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Bidang Perkeretaapian (Direktorat Keselamatan Perkeretaapian, BTP Jakarta).
3) Tingkat Kepuasan Pelayanan Perkantoran (Setditjen Perkeretaapian).
4) Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Perkeretaapian/SMKP (Direktorat Keselamatan Perkeretaapian).
5) Pemenuhan Target Angkutan Kereta Api (BTP Padang).

e. Beberapa rekomendasi untuk upaya peningkatan kinerja diantaranya:
1) Melakukan evaluasi pelaksanaan anggaran secara intensif terhadap seluruh unit kerja guna peningkatan penyerapan anggaran sesuai RPD/prognosa.
2) Peningkatan pendapatan PNBP melalui percepatan sertifikasi SDM perkeretaapian serta pengoptimalan pemanfaatan aset bangunan dan lahan dengan skema konsesi didukung penyelesaian inventarisasi dan sertifikasi aset/barang milik negara.
3) Percepatan penyusunan proses bisnis dan reviu SOP bidang dukungan manajemen.
4) Percepatan finalisasi hasil audit SMKP.
5) Pengawasan berkala terhadap layanan angkutan KA dalam pemenuhan SPM termasuk pengawasan terhadap layanan KA PSO dan KA perintis.
6) Diperlukan revisi rencana aksi pada Perjanjian Kinerja Tahun 2024 dikarenakan capaian kinerja Triwulan I 2024 tidak memenuhi kriteria *on the right track.*

f. Pelaksanaan evaluasi terhadap kepatuhan pelaporan kinerja Triwulan I Tahun 2024 mencakup evaluasi pemenuhan Laporan Monitorng Capaian Kinerja serta kepatuhan pemanfaatan aplikasi pelaporan kinerja yang diamanahkan oleh Kementerian PANRB (e-SAKIP reviu), Kementerian Perhubungan (e-Performance) dan internal Direktorat Jenderal Perkeretaapian (Sistem Pelaporan Kinerja pada Portal Aplikasi).

g. Evaluasi terhadap kepatuhan dalam penyusunan Laporan Monitorng Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2024 dilaksanakan dengan mengacu pada Permenhub nomor PM 85 tahun 2020 tentang Penyelenggaraan SAKIP, kertas kerja evaluasi SAKIP dari Kementerian PANRB serta SOP pemberian reward and punishment terhadap capaian kinerja unit kerja, dengan kriteria sebagai berikut:
   1) Pemenuhan pelaporan kinerja dengan tepat waktu.
   2) Pemenuhan informasi kinerja dan pemanfaatan informasi kinerja.

h. Beberapa hal yang mayoritas masih memerlukan peningkatan kepatuhan diantaranya:
   1) Data Dukung Capaian Kinerja yang Valid;
   2) Dokumentasi Pembahasan Kinerja di Internal Unit Kerja;
   3) Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya (SDM dan Anggaran).

6. **Pembahasan Capaian Kinerja Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api**

a. Capaian kinerja sementara Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api

No	IKK	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Persentase Rekomendasi Kebijakan Bidang Jaringan Perkeretaapian yang telah Ditindaklanjuti	80	95	119
2	Persentase Pencapaian Kerjasama Pembangunan Infrastruktur Perkeretaapian	69	69	100
3	Persentase Realisasi Perjalanan Kereta Api berdasarkan GAPEKA	88	96,84	110
4	Persentase Kedatangan dan Keberangkatan Kereta Api Tepat Waktu	90,50	94,88	105
5	Persentase Pemenuhan Target Angkutan Kereta Api	35,42	38,13	107,63
6	Persentase Pemenuhan NSPK BIdang LLAKA	93	102	110
7	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Publik yang diselenggarakan oleh Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api	3,7	3,68	99,55
8	Persentase Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Direktorat LLAKA	49,99	22,20	44,41
9	Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan KA	24,37	32,92	105
10	Nilai AKIP Direktorat LLAKA	-	-	-
11	Tingkat Maturitas SPIP Direktorat LLAKA	-	-	-

b. Perhitungan angkutan perintis akan menggunakan data yang sudah diverifikasi dan mendapatkan BA dari PT. KAI dan tim verifikasi dari Balai.

c. Tambahan Rekomendasi Kebijakan Bidang Jaringan Perkeretaapian yang telah Ditindaklanjuti capaian FS Tanah Abang. Yang dilakukan penetapan di Dit LLAKA yaitu policy brief.

d. Gapeka terdapat penambahan pada KA Papandan (Gambir - Garut) sebanyak 2 KA/hari, KA Pangandaran (Gambir - Banjar) sebanyak 2 KA/hari dan LRT Jabodebek sebanyak 260 KA/hari pada hari libur/akhir pekan. Frekuensi Perka KA Whoosh sejak Maret 2024 sebanyak 40 KA/hari pada hari kerja dan 44 KA/hari pada hari libur/akhir pekan.
e. Responden survey IKM pada triwulan II menurun dari triwulan I.
f. NKA agar menyesuaikan dari hasil kesepakatan.
g. Terkait IKK yang sudah tercapai di atas 100% agar pada rekomendasi ditambahkan kebutuhan revisi PK.
h. Agar dapat dijabarkan dampak dari relaksasi AA.

7. **Pembahasan Capaian Kinerja Direktorat Prasarana Perkeretaapian**

a. Capaian kinerja sementara Direktorat Prasarana Perkeretaapian

No	IKK	Target	Realisasi	Capaian
1	Rasio Keterhubungan Jalur Kereta Api Antar Wilayah	0,450	0,45	100
2	Persentase Pengoperasian Jalur Ka Yang Sesuai Dengan TQI Kategori I Dan II	93,85	93,93	100,09
3	Persentase Fasilitas Operasi Kereta Api Dengan Teknologi Handal	64,09	64,09	100
4	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Terhadap Pelayanan Publik Yang Diselenggarakan Oleh Direktorat Prasarana Perkeretaapian	3,7	3,83	103,51
5	Persentase Pemenuhan Sertifikasi Kelaikan Prasarana Perkeretaapian	97,68	99,06	101,41
6	Persentase Pemenuhan NSPK Bidang Prasarana Perkeretaapian	91,89	94,59	102,94
7	Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran Direktorat Prasarana Perkeretaapian	37,75	Perlu dilakukan perhitungan	
8	Persentase Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Bidang Perkeretaapian	40,40	207,89	514,58
9	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Direktorat Prasarana Perkeretaapian	83,95	-	-
10	Tingkat Maturitas SPIP Direktorat Prasarana Perkeretaapian	-	-	-

b. Keterhubungan dengan PKW Sawah Lunto belum dapat dipastikan pada tahun 2024 bisa terpenuhi pengujian.
c. Sedangkan untuk keperluan anggaran MTT di PKW Lhoksumawe akan dialokasikan jika ada temuan pada saat pengujian terdapat kebutuhan MTT. Saat ini masih dalam proses revisi dokumen oleh Satker terkait.
d. Ketapang masih terdapat kendala konstruksi dan belum diketahui apakah dapat terselesaikan pada tahun 2024. Saat ini sedang dalam proses lelang reviu DED dan proses penyusunan DED membutuhkan waktu sekitar 4 bulan.

e. Pengukuran TQI periode I tahun 2024 dianggap tidak valid, dikarenakan disampaikan 5 kategori dan panjang jalur terukur melebihi panjang jalur total. Perubahan data TQI dikarenakan PT. KAI mengeluarkan Peraturan Direktur Utama Baru, saat ini PT. KAI diminta untuk melakukan penyesuaian mengikuti kategori sebelumnya.
f. Pengukuran yang melebihi panjang jalur keseluruhan, indikasi dikarenakan PT. KAI juga melakukan pengukuran pada jalan menuju Depo.
g. Pengukuran mandiri oleh Ditjen Perkeretaapian belum dapat dilakukan pada tahun 2024. Sebelumnya sudah dilakukan uji coba tapi Direktorat Prasarana masih mempelajari hasil pengukuran tersebut dan harapannya nanti dapat diaplikasi untuk tekniologi fasilitas lainnya.
h. Pengukuran TQI akan ditunggu sampai tanggal 20 Juli 2024. Jika belum mendapat update laporan akan menggunakan data periode I tahun 2024.
i. Penambahan fasop handal yang ditargetkan pada tahun 2024 yaitu Cicalengka dan Kalioso.
j. Data PNBP menggunakan data SPAN.
k. PMK 155 melaporkan realisasi dan proyeksi per bulan kepada Setditjen Perkeretaapian. Diperlukan dokumentasi laporan monitoring dari Bagian Keuangan. Hal ini bisa menjadi perubahan aktivitas pada laporan triwulan Setditjen Perkeretaapian.

8. **Pembahasan Capaian Kinerja Direktorat Sarana Perkeretaapian**

a. Capaian kinerja sementara Direktorat Sarana Perkeretaapian

No	IKK	Target	Realisasi	Capaian
1	Persentase rekomendasi kebijakan bidang fasilitas sarana yang telah ditindaklanjuti	66,67	66,67	100
2	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Publik yang diselenggarakan oleh Direktorat Sarana Perkeretaapian	3,4	3,63	106,76
3	Persentase Pemenuhan sarana perkeretaapian milik negara	91,75	92,78	101,12
4	Persentase Pemenuhan sertifikat kelaikan sarana perkeretaapian	23,81	54,50	228,88
5	Persentase sarana perkeretaapian yang dilakukan Rampcheck dengan hasil baik/ temuan minor	90	95,7	106,33
6	Persentase Pemenuhan NSPK bidang Sarana Perkeretaapian	88,89	88,89	100
7	Persentase kualitas pelaksanaan anggaran Direktorat Sarana Perkeretaapian	20,08	33,74	168,03
8	Persentase Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Direktorat Sarana perkeretaapian	50	62,15	124,3
9	Nilai AKIP Direktorat Sarana Perkeretaapian	-	-	-

No	IKK	Target	Realisasi	Capaian
10	Tingkat Maturitas SPIP Direktorat Sarana Perkeretaapian	-	-	-

b. Untuk IKK Persentase rekomendasi kebijakan bidang fasilitas sarana yang telah ditindaklanjuti direkomendasikan untuk dievaluasi agar juga mencakup tindak lanjutnya.
c. Rampcheck yang sudah telaksana yaitu Rampchek angkutan lebaran dan angkutan batu bara (KA Barang di Palembang dan Lampung) yang dilaksanakan pada Mei-Juni 2024.
d. Untuk pengisian aplikasi e-Monev dan Silaki masih dalam proses.

9. **Pembahasan Capaian Kinerja Direktorat Keselamatan Perkeretaapian**

a. Capaian kinerja sementara Direktorat Keselamatan Perkeretaapian

No	IKK	Target	Realisasi	Capaian
1	Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Perkeretaapian (SMKP)	87,50	75	85,7
2	Pemenuhan Sertifikasi Kompetensi SDM Regulator Perkeretaapian	84,26	79,63	94,50
3	Pemenuhan Sertifikasi Kompetensi SDM Operator Perkeretaapian	139,31	137,8	98,91
4	Rekomendasi Keamanan dan Keselamatan yang Menjadi Kebijakan *Stakeholder*/Sudah Diimplementasikan/Ditindaklanjuti	59,6	55,2	90,6
5	Pemenuhan NSPK Bidang Keamanan dan Keselamatan Perkeretaapian	79,49	79,48	99,98
6	Pemenuhan Akreditasi Lembaga Perkeretaapian	66,67	66,67	100
7	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Terhadap Pelayanan Publik yang Diselenggarakan Direktorat Keselamatan Perkeretaapian	3,85	3,9	101,2
8	Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran Direktorat Keselamatan Perkeretaapian	27,7	53,49	193,1
9	Persentase Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Bidang Keselamatan Perkeretaapian	20,18	51,02	252,8
10	Nilai AKIP Direktorat Keselamatan Perkeretaapian	-	-	-
11	Tingkat Maturitas SPIP Direktorat Keselamatan Perkeretaapian	-	-	-

b. Untuk IKK SMKP, audit dikatakan telah selesai ketika Operator telah menyampaikan tindak lanjut. Agar dapat disampikan surat pada tanggal 5 Mei 2024 tersebut.
c. Keterlambatan sertifikasi SDM dikarenakan adanya antrian pada proses pengujian di Balai Pengujian hal ini dikarenakan keterbatasan SDM Penguji.

d. Untuk IKM perlu dianalisis komponen mana-mana saja yang rendah nilanya.

10. **Pembahasan Capaian Kinerja BTP Medan**

a. Capaian kinerja sementara BTP Medan

No	IKK	Target	Realisasi	Capaian
1	Rasio konektivitas wilayah kerja Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Medan	0,44	0,44	100%
2	Persentase pengoperasian jalur KA yang sesuai dengan TQI kategori I dan II dil wilayah kerja Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Medan	91,5	89,7	98%
3	Persentase fasilitas operasi dengan teknologi handal di wilayah kerja Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Medan	51,7	53,44	103,37%
4	Pemenuhan target angkutan KA di wilayah kerja Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Medan	54,5	56,02	102,8%
5	Persentase realisasi perjalanan kereta api perintis di wilayah kerja Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Medan	58	58	100%
6	Tingkat keselamatan transportasi perkeretaapian di Wilayah Kerja Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Medan	100	99,9	99,9%
7	Persentase Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Bidang Perkeretaapian di Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Medan	0	100	100%
8	Persentase kualitas pelaksanaan anggaran Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Medan	36,38	29,6	0%
9	Nilai AKIP Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Medan	81,75	81,75	100%
10	Tingkat Maturitas SPIP Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Medan	-	3	100

b. Fasilitas Operasi terdapat penambahan pada Rantauprapat namun saat ini belum siap operasi.

c. Untuk IKK Nilai AKIP agar diperiksa kembali apakah pada triwulan III sudah ada target jika belum ada maka capaian dikosongkan

d. Untuk perhitungan NKA sudah menggunakan bobot dan diusulkan untuk penilaian efisiensi pada akhir tahun saja.

e. Untuk aplikasi emonev masih dalam proses pengisian untuk aplikasi lain sudah dilengkapi.

f. Untuk perubahan layanan KA Bandara Kualanamu menjadi KA Srilelawangsa agar dikonfirmasi apakah layanan KA Bandara masih akan berjalan.

g. Terkait angkutan, Direktorat LLAKA sudah memfasilitasi untuk pelaporan kinerja agar dapat di upload ND BA Angkutan Perintis.

11. **Pembahasan Capaian Kinerja Balai Perawatan**

a. Capaian kinerja sementara Balai Perawatan.

No	IKK	Target	Realisasi	Capaian
1	Persentase sarana perkeretaapian milik negara yang siap operasi	95	99,28	99,28
2	Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran Balai Perawatan Perkeretaapian	25,99	-	-
3	Persentase Realisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Balai Perawatan Perkeretaapian	11,35	9,63	84,84
4	Nilai AKIP Balai Perawatan Perkeretaapian	-	-	-
5	Tingkat Maturitas SPIP Balai Perawatan Perkeretaapian	-	-	-

b. Perawatan sarana agar dapat dilengkapi lokasi dan detail perawatan lainnya.
c. Untuk NKA agar diperiksa kembali, seharusnya sudah ada realisasi dan sudah ada capaian CRO nya.
d. Terkait PNBP ada keterlambatan pengajuan sehingga masih di bawah target. Sebelumya sudah dilakukan pembahasan dan diperkirakan sampai akhir tahun tecapai 75%.
e. Untuk IKK Persentase sarana perkeretaapian milik negara yang siap operasi seharusnya penanggung jawabnya masing-masing Kepala Seksi.

12. **Pembahasan Capaian Kinerja BTP Semarang**

a. Capaian kinerja sementara BTP Semarang

No	IKK	Target	Realisasi	Capaian
1	Rasio Konektivitas Wilayah Kerja Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Semarang	0,42	0,42	100
2	Persentase pengoperasian jalur KA yang sesuai dengan TQI Kategori I dan II di Wilayah Kerja Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Semarang	99,50	99,46	99,96
3	Persentase fasilitas operasi dengan teknologi handal di Wilayah Kerja Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Semarang	86,67	86,67	100
4	Pemenuhan target angkutan KA di wilayah kerja Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Semarang	138	142,35	103,22
5	Persentase realisasi perjalanan kereta api perintis di wilayah kerja Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Semarang	50	50	100
6	Tingkat Keselamatan Transportasi Perkeretaapian di Wilayah Balai Teknik Perkeretaapian Semarang	100	100	100
7	Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran Balai Teknik Perkeretapian Semarang	15	58,07	387
8	Persentase Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Balai Teknik Perkeretaapian Semarang	50	40,95	81,90

No	IKK	Target	Realisasi	Capaian
9	Nilai AKIP Balai Teknik Perkeretaapian Semarang	-	-	-
10	Tingkat Maturitas SPIP Balai Teknik Perkeretaapian Semarang	-	-	-

b. Pelabuhan Tanjung Mas saat ini masih dalam tahap tindak lanjut hasil pengujian untuk kemudian dilakukan pengujian ulang, agar dapat tetap disampaikan progresnya dalam laporan kinerja.
c. Terdapat wacana perpanjangan layanan KA BIAS hingga Kabupaten Wonogiri.
d. Kegiatan IMO belum dilaksanakan di BTP.
e. Efisiensi terhitung tinggi karena banyak kegiatan MYC yang akan selesai.
f. Realisasi PNBP dibawah target karena pendapatan KA Perintis masuk pada bulan Juli 2024.
g. Terkait crosscutting pada SE 1 2024 Inspektorat Jenderal pada dokumen Renstra sehingga dianggap tidak semua indikator bisa dipenuhi. Dapat berupa analisis pada dokumen LKIP.
h. Untuk ND penyampaian data dukung dari masing-masing subdirektorat/seksi diusulkan untuk masuk ke dalam komponen evaluasi capaian berdasarkan laporan monitoring triwulan.
i. Untuk pengisian angkutan agar dapat diperiksa kembali karena ada perbedaan antara paparan dan spreadsheet dari Direktorat LLAKA.

13. **Pembahasan Capaian Kinerja BPKA Sulawesi Selatan**

a. Capaian kinerja sementara BPKA Sulawesi Selatan

No	IKK	Target	Realisasi	Capaian
1	Rasio Konektivitas Wilayah Kerja BPKA Sulawesi Selatan	0.24	0.24	100%
2	Presentase fasilitas operasi dengan teknologi handal diwilayah kerja Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan	100	100	100%
3	Pemenuhan Target angkutan kereta api Sulawesi selatan	49,82	61.93%	124%
4	Persentase kedatangan dan keberangkatan kereta api sulsel secara tepat waktu	94,5	94.97	100%
5	Presentase penurunan kecelakaan kereta api di wilayah kerja Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan	100	100	100%
6	Presentase kualitas pelaksanaan anggaran Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan	30	51.37%	171%
7	Nilai AKIP Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan	-	-	-
8	Tingkat Maturitas SPIP Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan	-	-	-
9	Persentase Realisasi Penerimaan Negera Bukan Pajak (PNBP) Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan	50	3670.25%	7341%

b. Saat ini proses booking tiket angkutan di BPKA Sulsel masih dilakukan secara manual pada hari yang sama di stasiun. Saat ini sudah menjadi temuan dari Inspektorat Jenderal.
c. Untuk tahun 2023 terdapat temuan karena IKK pada indikator kinerja berbeda dengan IKK pada Kepdirjen penetapan indikator (indikator TQI dan IKM).
d. Untuk indikator IKM disarankan mengikuti survey manual yang dilakukan oleh BPKARS.

14. **Pembahasan Capaian Kinerja BTP Surabaya**

a. Capaian kinerja sementara BTP Surabaya

No	IKK	Target	Realisasi	Capaian
1	Rasio Konektivitas Wilayah Kerja Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Surabaya	0.375	0.375	100
2	Persentase pengoperasian jalur KA yang sesuai dengan TQI Kategori I dan II di Wilayah Kerja Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Surabaya	98,4	98,6	100,21
3	Persentase fasilitas operasi dengan teknologi handal di Wilayah Kerja Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Surabaya	42,7	42,7	100
4	Pemenuhan target angkutan KA di wilayah kerja Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Surabaya	132	132	100
5	Tingkat keselamatan transportasi perkeretaapian di wilayah kerja Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Surabaya	100	97,06	
6	Persentase kualitas pelaksanaan anggaran Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Surabaya	44,25	0	73,91
7	Persentase Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	-	100 (Rp1.507.100)	0
8	Penilaian AKIP Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Surabaya	-	0	0
9	Tingkat Maturitas SPIP Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Surabaya	-	0	0

b. Konstruksi pelabuhan ketapang kemungkinan dilakukan pada tahun 2024
c. Untuk kegiatan peningkatan persinyalan juga terkendala DED dan diusulkan penghapusan kegiatan
d. Data angkutan masih ada perbedaan dengan spreadsheet Direktorat LLAKA agar dapat disesuaikan.

15. **Pembahasan Capaian Kinerja Balai Pengujian Perkeretaapian**

a. Capaian kinerja sementara Balai Pengujian Perkeretaapian

No	IKK	Target	Realisasi	Capaian
1	Persentase Pemenuhan Pengujian Kelaikan Sarana Perkeretaapian	87,83	92,58	105,41
2	Persentase Pemenuhan Pengujian Kompetensi SDM Perkeretaapian	53,51	55,71	104,11
3	Persentase Pemenuhan Pengujian Kelaikan Prasarana Perkeretaapian	90,68	91,46	100,86

No	IKK	Target	Realisasi	Capaian
4	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Publik yang diselenggarakan Balai Pengujian Perkeretaapian	3,66	3,86	105,46
5	Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran Balai Pengujian Perkeretaapian	42,50	48,06	113,08
6	Persentase Realisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Bidang Perkeretaapian	45,15	60,47	133,93
7	Nilai AKIP Balai Pengujian Perkeretaapian	-	-	-
8	Tingkat Maturitas SPIP Balai Pengujian Perkeretaapian	-	-	-

b. Untuk perhitungan capaian merupakan hitungan kumulatif dari tahun 2020 namun dalam analisa agar dapat dijelaskan pencapaian target pada tahun 2024.
c. Saat ini capaian pengujian prasarana masih 63 unit dari target 140 unit, agar dapat menjadi perhatian.
d. NKA agar dapat didetailkan perhitungannya.
e. IKM agar dapat menyampaikan masukan analisa untuk Eselon I.

16. **Pembahasan Capaian Kinerja BPKAR Sumatera Selatan**
    a. Terdapat penurunan realisasi perjalanan KA dikarenakan pemadaman di Kota Palembang
    b. Perhitungan nilai IKM disarankan untuk mengikutsertakan hasil survey dari PPTB juga.
    c. Untuk perhitungan NKA, nilai efisiensi agar dicek kembali maksimal nilainya
    d. Pengisian aplikasi kinerja agar dapat dilengkapi.
17. **Pembahasan Capaian Kinerja BTP Palembang**
    a. Capaian kinerja sementara BTP Palembang

No	IKK	Target	Realisasi	Capaian
1	Rasio Konektivitas di Wilayah Kerja Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Palembang	0,71	0,71	100%
2	Persentase pengoperasian jalur KA yang sesuai dengan TQI ketegori I dan II di Wilayah Kerja Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Palembang	92,10%	90,62%	98,39%
3	Persentase fasilitas operasi dengan teknologi handal di Wilayah Kerja Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Palembang	25,30%	25,30%	100%
4	Pemenuhan target angkutan kereta api di Wilayah Kerja Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Palembang	100%	80,28%	102,30
5	Persentase Tingkat Keselamatan Transportasi perkeretaapian di Wilayah Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Palembang	100	100	100%

No	IKK	Target	Realisasi	Capaian
6	Persentase kualitas pelaksanaan anggaran Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Palembang	93,90%	26,56	117,93
7	Nilai AKIP Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Palembang	81,90	-	-
8	Tingkat Marturitas SPIP Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Palembang	3	-	-

b. Untuk IKK Rasio Konektivitas di Wilayah Kerja Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Palembang jika capaian masih sama dengan baseline disarankan tetap harus ada anggaran pada anggaran tersebut. Dapat berupa kegiatan pendukung.
c. Terdapat beberapa penambahan fasilitas elektrik hasil dari pekerjaan PT. KAI namun belum dihitung sebagai capaian dikarenakan belum ada perizinannya.
d. Sampai saat ini tidak terjadi kecelakaan KA, kejadian berupa temperan.

18. **Pembahasan dari BTP Jakarta**

a. Capaian Kinerja sementara BTP Jakarta Triwulan II 2024

No	IKK	Target TW II	Realisasi TW II	Capaian
1	Rasio Konektivitas wilayah kerja Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Jakarta	0,62	0,62	100%
2	Persentase pengoperasian jalur KA yang sesuai dengan TQI kategori I dan II di wilayah Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Jakarta	90,80%	91,97%	101,29%
3	Persentase fasilitas operasi dengan teknologi handal di wilayah kerja Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Jakarta	98,72%	98,75%	100,03%
4	Pemenuhan target angkutan kereta api di wilayah kerja Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Jakarta	72,77%	72,83%	100,08%
5	Persentase penurunan kecelakaan keretaapi di wilayah kerja Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Jakarta	100%	99,74%	99,74%
6	Persentase Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Bidang Perkeretaapian	50%	16,34%	32,69%
7	Persentase kualitas pelaksanaan anggaran Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Jakarta	30,16%	30,06%	99,66%
8	Nilai AKIP Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Jakarta	-	-	-
9	Tingkat Maturitas SPIP Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Jakarta	-	-	-

b. Pada IKK Rasio Konektivitas untuk Triwulan II tidak ada kegiatan pendukung yang dilakukan BTP Jakarta sehingga diharapkan untuk seluruh IKK agar

melakukan/melampirkan kegiatan pendukung (misalnya swakelola atau lainnya) pada penyajian Laporan Monitoring Capaian Kinerja Triwulan.

c. Untuk Persentase Pengoperasian Jalur KA yang sesuai dengan TQI Kategori I dan II adalah 91,79% (619,746 Kmsp) dengan Panjang Jalur KA terukur 673,652 Kmsp. Data ini menggunakan Jalur Terukur periode IV 2023.
d. Pada IKK Fasilitas operasi dengan teknologi handal, kegiatan pendukungnya antara lain:
    1) Peningkatan Stasiun Rangkasbitung (progres kumulatif 32,19%)
        a) Diperlukannya kesepakatan Pengelolaan Stasiun (pengoperasian, perawatan, dan pengusahaan) setelah Pembangunan selesai, sehingga dilakukan tindak lanjut dengan menyusun Draft PKS antara DJKA – KAI, menunggu konfirmasi terkait pejabat yang memiliki kewenangan untuk menandatangani PKS.
        b) Diperlukan dukungan pemda untuk perbaikan aksesbilitas menuju stasiun dan penertiban pedagang serta pengaturan angkutan lanjutan, sehingga perlu melakukan koordinasi dengan Pemda secara lebih intens.
    2) Peningkatan Jalur KA dan Fasilitas Operasi Jakarta Kota - Tanjung Priok (progres 0%)

        Diperlukan penyesuaiaan pekerjaan terhadap ruang lingkup dan ketersediaan anggaran dan berkoordianasi kepada Pemprov DKI Jakarta terkait pekerjaan yang dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta untuk mendukung Stasiun JIS.
    3) Pembangunan Fasilitas Perkeretaapian untuk Manggarai - Jatinegara Tahap III (MYC 2023-2024) – progres fisik 0,53%
        a) Diperlukannya percepatan proses lelang.
        b) Koordinasi dengan Biro LPPBMN terkait percepatan pengumuman tender serta koordinasi dengan Direktorat Prasarana terkait Penyiapan Dokumen Tender.
        c) Percepatan DED Pekerjaan MA01 s/d Jatinegara, konstruksi mendukung tahapan operasi DDT at Grade Manggarai – Jatinegara.
        d) Mengingat sisa waktu pelaksanaan konstruksi yang tidak bisa diselesaikan di tahun ini, telah diajukan usulan perpanjangan MYC melalui surat Dirjen Perkeretaapian No: KU.001/2/8/DJKA/2024 tanggal 28 Mei 2024 Perihal Penyampaian Data Dukung Usulan Dispensasi Pekerjaan Tahun Tunggal dan Kontrak Tahun Jamak bersumber dana SBSN di lingkungan DJKA yang melebihi Tahun Anggaran 2024.
    4) Peningkatan Stasiun Tanah Abang Tahap I (MYC 2023-2024) – progres fisik 4,4%
        a) Menunggu MOU dan PKS ditandatangani Sekda Pemprov DKI.
        b) Sudah dilakukan pengajuan perizinan BBWS Citarum per 4 Juni 2024.

c) Telah dilaksanakan pengukuran dan pematokan Bersama antara DJKA, DKI dan Pemprov DKI
d) Pemprov DKI Jakarta sedang berproses menerbitkan Peta Informasi Garis Sempadan Bangunan (GSB).

5) Perawatan Prasarana Perkeretaapian (IMO)

Perawatan Prasana Perkeretaapian (IMO)		PAGU 2024	REALISASI	KETERANGAN
a.	Jasa Konsultansi Pengawasan IMO di Wilayah Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Jakarta (IMO)	3.082.449.000		Menunggu SOP dan Keputusan Menteri Terkait Pelaksanaan IMO di Balai
b.	Konsultan Inhouse Pekerjaan Perawatan dan Perbaikan 6 Stasiun dan Bangunan Lainnya di Wilayah Kerja BTP Kelas I Jakarta	197.400.000	19.740.000	On progress
c.	Perpanjangan Serifikasi (Uji Riksa) 6 Stasiun dan Bangunan Lainnya di Wilayah Kerja BTP Kelas I Jakarta	194.600.000		On progress
d.	Pengoperasian dan Perawatan Perkeretaapian Milik Negara (IMO)	182.741.204.000		Menunggu SOP dan Keputusan Menteri Terkait Pelaksanaan IMO di Balai
e.	Perawatan dan Perbaikan 6 Stasiun dan Bangunan Lainnya di Wilayah Kerja Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Jakarta	15.744.856.000	489.934.300	On progress

6) Tahun 2024 terdapat penambahan 2 stasiun KCJB (St. Halim dan St. Karawang).
7) Total sinyal interlocking berbasis elektrik tahun 2024 di BTP Kelas I Jakarta sebesar 79 unit dari total 80 unit.
8) Untuk Peningkatan Sistem Elektrifikasi Perkeretaapian di Jabodetabek terdapat beberapa kegiatan pendukung yaitu Peningkatan 4 Gardu Traksi dan Listrik Aliran Atas Lintas Jakarta Kota - Bogor (GT Bogor, GT Cilebut, GT Citayam dan GT Universitas Indonesia), Peningkatan 3 Gardu Traksi dan Listrik Aliran Atas Lintas Jakarta Kota - Bekasi (GT Gondangdia, GT Buaran New dan GT Kranji), Peningkatan 3 Gardu Traksi dan Listrik Aliran Atas Lintas Bekasi - Cikarang (GT Bekasi, GT Tambun, dan GT Telagamurni), serta Supervisi Pekerjaan Gardu Traksi dan Listrik Aliran Atas.
9) Peningkatan Sistem Elektrifikasi Perkeretaapian di Jabodetabek meliputi:

a) Gardu & LAA Gondangdia, Buaran, Kranji.
b) Gardu & LAA Bekasi, Tambun, Telaga Murni.
c) Gardu & LAA Bogor, Cilebut, Citayam, UI.
d) Target Penyelesaian Pekerjaan Parsial meliputi Lintas Jakarta – Kota Bekasi dan Bekasi – Cikarang pada Desember 2024 dan Lintas Jakarta Kota – Bogor usulan pepanjangan MYC.

e. Pada IKK Pemenuhan target angkutan kereta api di wilayah kerja Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Jakarta Realisasi kumulatif angkutan pnp s.d. Triwulan II Tahun 2024 adalah 1.083.725.905 Orang (33,11%) dan angkutan barang 17.854.086 ton (39,71%) total keseluruhan 72,83% dengan Capaian 100,08%. Untuk Realisasi Tw II (s.d. Bulan Juni) Tahun 2024, untuk Angkutan Penumpang 194.928.242 Orang dan untuk Angkutan Barang 1.728.401 Ton.
f. Pada IKK Persentase penurunan kecelakaan keretaapi di wilayah kerja Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Jakarta untuk realisasi Triwulan II Tahun 2024 yaitu 99,74% dikarenakan terdapat kejadian kecelakaan KA berupa anjlokan KA pada Sabtu 13 April 2024, pukul 07.00 WIB di jalur hulu petak St. Kampung Bandan – Rajawali. Jumlah keberangkatan KA s/d Juni yaitu 378.241 Perjalanan Kereta Api.
g. Pada IKK PNBP (realisasi kinerja TW II sebesar 16,63% dari target TW II 50,00%), realisasi PNBP BTP Kelas I Jakarta s.d. Triwulan II pada Tahun 2024 yaitu sebesar Rp 1.855.349.701,- dengan rincian:
   1) PNBP BTP Kelas I Jakarta di Triwulan I pada Tahun 2024 yaitu sebesar Rp 1.795.436.548,- dan
   2) PNBP BTP Kelas I Jakarta di Triwulan II pada Tahun 2024 yaitu sebesar Rp 59.913.153,- sebagai berikut:
      a) Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu senilai Rp 48,-
      b) Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah senilai Rp 59.912.361,-
      c) Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu senilai Rp 744,-
h. Pada IKK Persentase kualitas pelaksanaan anggaran Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Jakarta berdasarkan eMonev Kemenkeu yaitu 30,06%. Untuk realisasi penyerapan pada aplikasi E-Monitoring yaitu sebesar 8,89%.
i. Pada IKK AKIP, Nilai AKIP BTP Kelas I Jakarta pada tahun 2023 yaitu 80,35, sedangkan nilai AKIP BTP Jakarta Tahun 2024 belum ada. Posisi saat ini telah menyusun LMCK TW I 2024 serta penyesuaian anggaran dengan kegiatan di POK 2024, sampai revisi 7.
j. Pada IKK SPIP, Berdasarkan Tahun 2023 tingkat maturitas SPIP yaitu Level 3. Untuk SPIP sudah dilakukan pengisian KKE 2, 3.1 dan 5.2 serta telah dibuat SK Pembentukan Satgas Maturitas SPIP Tahun 2024 dan SK Tim Penilai Mandiri Maturitas SPIP Tahun 2024.

19. **Pembahasan dari BTP Bandung**

a. Capaian Kinerja sementara BTP Jakarta Triwulan II 2024

No	IKK	Target TW II	Realisasi TW II	Capaian
1	Rasio Konektivitas wilayah kerja Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Bandung	0,55	0,55	100%
2	Persentase pengoperasian jalur KA yang sesuai dengan TQI kategori I dan II di wilayah Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Bandung	87%	86,78%	100%
3	Persentase fasilitas operasi dengan teknologi handal di wilayah kerja Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Jakarta	70,65%	70,21%	99%
4	Pemenuhan target angkutan kereta api di wilayah kerja Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Bandung	45%	48,19%	107%
5	Tingkat Keselamatan Transportasi Perkeretaapian di wilayah Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Bandung	100%	96,81%	97%
6	Persentase kualitas pelaksanaan anggaran Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Bandung	36,24%	51,53%	142%
7	Persentase Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Bidang Perkeretaapian	0%	-	0%
8	Nilai AKIP Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Bandung	-	-	-
9	Tingkat Maturitas SPIP Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Bandung	-	-	-

b. Pada IKK Rasio Konektivitas tercapai 100% dikarenakan tidak ada pekerjaan pembangunan Jalur KA yang menghubungkan jalur yang belum terhubung. Kegiatan Pendukung pada IKK ini adalah Penyusunan Dokumen AMDAL Pembangunan Jalur KA Pelabuhan Patimban dengan progres sebagai berikut:
   1) Adanya pergeseran anggaran penyusunan Dokumen AMDAL ke kegiatan Penyelesaian Pengadaan Lahan Pembangunan Fly Over Pusdikom sebesar Rp. 237.600.000,-
   2) Direncanakan adanya pengalihan anggaran untuk mendukung penyelesaian pekerjaan Pembangunan Skybridge Stasiun Bandung.

c. Pada IKK Persentase pengoperasian jalur KA yang sesuai dengan TQI kategori I dan II terdapat 2 kegiatan pendukung dengan progres sebagai berikut:
   1) Progres fisik Pembangunan Jalur Ganda KA Kiaracondong – Cicalengka Tahap 2 sampai dengan akhir Juni 2024 Rencana 90,19% dengan Realisasi 90,04%. Target penyelesaian ultimate pada Oktober 2024.
   2) Progres Fisik Pembangunan Jalur Ganda KA Lintas Bogor – Sukabumi sampai dengan akhir Juni 2024 Rencana 99,5957% dengan realisasi 99,4040%.

3) Data TQI sudah sesuai dengan data Direktorat Prasarana dengan menggunakan data periode Triwulan IV Tahun 2023.

d. Pada IKK Persentase fasilitas operasi dengan teknologi handal didapatkan Progress Fisik pekerjaan Pembangunan Sistem Persinyalan dan Telekomunikasi Jalur Ganda KA Antara Kiaracondong - Cicalengka Tahap 2 sampai dengan akhir Juni 2024 rencana 94,56% aktual 93,95% sehingga mempengaruhi Capaian TW II hingga 70,21%. Akan dilakukan percepatan *staging* tahapan pekerjaan di stasiun kiaracondong (proses penyelesaian dan target selesai pada Agustus 2024) dan Stasiun Cicalengka (proses penyelesaian dan target selesai pada Oktober 2024). Untuk pekerjaan persinyalan jalur ganda lintas Stasiun Haurpugur – Cicalengka dan persinyalan ultimate di Stasiun Cicalengka, target selesai di bulan Oktober 2024.
e. Pada IKK Pemenuhan target angkutan kereta api, angkutan penumpang pada triwulan ke II (akhir Juni 2024) sebanyaK 12.712.772 penumpang atau 60% dari jumlah kumulatif target renstra, sedangkan angkutan barang sebanyak 151,263 ton atau 36% dari jumlah kumulatif target renstra. Sehingga presentase angkutan BTP Bandung sebesar 48,19%. Jumlah penumpang sudah memenuhi namun jumlah angkutan barang masih minim, ada perbedaan data sebesar 100 ton angkutan barang, sehingga tidak sinkron data pada laporan dan *spreadsheet* milik Dit. LLAKA sehingga diharapkan menampilkan rinciannya dan melakukan sinkronisasi data.
f. Pada IKK Tingkat Keselamatan Transportasi Perkeretaapian Jumlah perjalanan KA sampai akhir Juni yaitu 62.807 perjalanan. Namun Selama Triwulan II (akhir Juni) terdapat 2 Kecelakaan yang terjadi pada bulan Januari dan Februari masing-masing sebanyak 1 kecelakaan (termasuk kebakaran kereta di Cirebon) sehingga capaian sebesar 97%. Namun Direktorat Keselamatan Perkeretaapian menyampaikan bahwa yang terdata hanya ada 1 kecelakaan sehingga sebaiknya BTP Bandung menyampaikan laporan resmi (bersurat) terkait kecelakaan tersebut dengan melampirkan analisa kejadian. Untuk meningkatkan keselamatan transportasi KA selama triwulan II melaksanakan kegiatan monitoring dan pemantauan bidang Sarana dan Prasarana KA pada wilayah kerja BTP Bandung, Sosialisasi dan Promosi Keselamatan perkeretaapian, serta akan menyelenggarakan Bimbingan Teknis Structure Helath Jembatan, Terowongan dan Konsep Pemeliharan Fasilitas Operasi.
g. Pada IKK Persentase kualitas pelaksanaan anggaran perlu diuraikan kembali rincian perhitungan CRO, Konsistensi Data dan detail perhitungan efisiensinya hingga mencapai realisasi 142%.
h. Pada IKK PNBP tidak ada capaian namun ada realisasi sebesar Rp. 3,25 Milyar sehingga akan diupdate saat Revisi I PK BTP Bandung nanti.

Uraian	2024	
	Anggaran	Realisasi
Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	100.000.000	-
Pendapatan dari Penjualan Peralatan Mesin		4.567.890
Pendapatan Denda		839.900.893
Penerimaan kembali Belanja Modal TAYL		2.408.252.284
Jumlah	**100.000.000**	**3.252.721.067**

i. Untuk IKK AKIP pada bulan Juni 2024telah dilakukan Evaluasi Internal Implementasi Penyelenggaraan SAKIP 2024 BTP Bandung dengan hasil sementara sebesar 85,90 dengan predikat A (Memuaskan).

j. Pada IKK SPIP pada progres yang telah dilakukan yaitu mengikuti rapat pembahasan dan koordinasi pelaksanaan penjaminan kualitas terhadap hasil penilaian mandiri maturitas SPIP Tahun 2024 pada tanggal 11 s.d 12 Juni 2024 di Jakarta.

20. **Pembahasan dari BTP Padang**

a. Capaian Kinerja sementara BTP Padang Triwulan II 2024

No	IKK	Target TW II	Realisasi TW II	Capaian TW II
1	Rasio Konektivitas wilayah kerja Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Bandung	0,50	0,50	100%
2	Persentase pengoperasian jalur KA yang sesuai dengan TQI kategori I dan II di wilayah alai Teknik Perkeretaapian Kelas II Padang	67,29%	83,89%	124,54%
3	Pemenuhan target angkutan KA di wilayah Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Padang	71,78%	73,66%	102,61%
4	Persentase realisasi perjalanan KA perintis di wilayah Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Padang	49,73%	24,66%	100%
5	Tingkat Keselamatan Transportasi Perkeretaapian di wilayah Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Padang	100%	100%	100%
6	Persentase kualitas ketepatan pelaksanaan anggaran Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Padang	36,44%	18,55%	95,32%
7	Nilai AKIP Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Padang	-	-	-
8	Tingkat Maturitas SPIP Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Padang	-	-	-

b. Terkait aplikasi pelaporan kinerja, sudah diinput pada aplikasi *e-performance*, sedangkan pada aplikasi e-monev dan SILAKI sedang berprogres.

c. Pada IKK Rasio Konektivitas, wilayah yang sudah terkoneksi antara lain Perkotaan Padang – Padang Pariaman, Kota Pariaman, Bandara BIM dan Pelabuhan Teluk Bayur. Sedangkan wilayah yang belum terkoneksi yaitu Kota

Padang Panjang, Kota Bukittinggi, Kota Solok dan Kota Sawahlunto. Upaya pengajuan pengujian jalur KA Sawahlunto – Muara Kalaban belum memberikan hasil sehingga Balai mengharapkan kebijakan dari Direktorat Teknis.

d. Pada IKK Persentase pengoperasian jalur KA yang sesuai dengan TQI kategori I dan II, data TQI Triwulan I 2024 baru dikeluarkan oleh PT. menggunkan data 5 kategori (*very good, good, fair, poor, very poor*) dan data bersifat masih belum valid sehingga hasilnya turun. Disarankan untuk menggunakan data periode Triwulan IV Tahun 2023.
e. Pada IKK Pemenuhan target angkutan KA capaian Triwulan II 2024 adalah sebagai berikut:

	April	Mei	Juni
Penumpang	130.968	160.760	161.055
Barang	159.863	76.992	177.922
Capaian	114,72	166,66	98,89

Pada akhir Juni ada beberapa pembatalan perjalanan KA dikarenakan perawatan berkala. Dit. LLAKA menyampaikan agar melakukan penyamaan data dengan isian pada *Spreadsheet* milik Dit. LLAKA.

f. Pada IKK Persentase realisasi perjalanan KA perintis di wilayah Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Padang target 546 dan realisasi 546 sehingga periode Triwulan II tercapai. Informasi KA Lembah Anai:
   1) Tidak terjadi pembatalan perjalanan;
   2) Terdapat Penggantian Sarana pada Railbus KA Lembah Anai yakni menggunakan sarana pengganti 1 Lok + 1 K3 + 1 Kmp3 pada bulan Februari 2024 dikarenakan railbus Lembah Anai menunggu uji pertama setelah pemasangan genset auxiliary;
   3) KA Lembah Anai relasi Duku – BIM (PP) dari tanggal 1 Januari 2024 s.d 29 Februari 2024 dibatalkan mengingat tidak adanya jalur langsir untuk lokomotif di Stasiun BIM.
g. Pada IKK Tingkat Keselamatan Transportasi Perkeretaapian hingga Maret 2024 tidak terjadi kecelakaan KA (tabrakan KA dengan KA, Anjlokan, Terguling, Terbakar) di wilayah kerja BTP Padang, akan tetapi terjadi kecelakaan lalu lintas di perlintasan sebidang sebanyak 14 kejadian (temperan KA dengan mobil). Masukkan dari Dit. Keselamatan agar BTP Padang melaporkan monitoring laporan keselamatan untuk memudahkan *update* data perlintasan/kecelakaan di perlintasan terutama untuk periode bulan Juni agar segera mengirimkan laporan monitoring keselamatan.
h. Pada IKK Persentase kualitas ketepatan pelaksanaan anggaran data NKA masih menggunakan nilai sementara.
i. Untuk IKK PNBP belum ditetapkan di target PK Awal, namun nanti pada Revisi I PK Tahun 2024 akan diajukan

j. Pada IKK Nilai AKIP Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Padang disarankan sebaiknya menyampaikan progres-progres kegiatan apa saja yang sudah dilakukan.

21. **Pembahasan dari Bagian Keuangan, Setditjen Perkeretaapian**

a. Terkait pelaksanaan anggaran, penyerapan anggaran masih jauh dari RPD awal dengan uraian penyebab diantaranya:

1) Tertundanya kontrak pekerjaan yang kemungkinan disebabkan kebutuhan dokumen tender yang tidak sesuai ketentuan dan Pelaksanaan Tender yang tidak sesuai rencana. Tindak lanjut yang bisa dilakukan yaitu Persiapan dokumen administrasi dan teknis sesuai ketentuan serta koordinasi aktif untuk permohonan Pokja dan Percepatan Tendernya (minimal tender tidak mengikat).

2) Pelaksanaan *Project* tidak sesuai dengan Program (project tidak dapat dilaksanakan / tidak dapat diselesaikan sampai akhir tahun anggaran 2024). Hal ini kemungkinan disebabkan oleh Kesiapan *readiness criteria* aspek administrasi dan aspek teknis. Untuk aspek administrasi dapat dilakukan usulan Revisi DPP SBSN 2024 untuk pekerjaan dengan skema tahun tunggal yang memiliki risiko tidak dapat diselesaikan proyek nya sampai akhir tahun 2024. Sedangkan untuk aspek teknis dapat dilakukan Percepatan progres penyusunan dokumen perencanaan teknis (DED) dan pengadaan/penertiban lahan serta *Exercise refocusing*/realokasi anggaran untuk pekerjaan dengan urgensi dan tingkat strategis yang tinggi dengan kelengkapan data dukung yang tersedia.

3) Deviasi negatif progress atas rencana realisasi anggaran yang kemungkinan disebabkan progres fisik tidak sesuai dengan rencana (terdapat kendala/tantangan eksternal dalam pelaksanaan pekerjaan). Tindak lanjut yang bisa dilakukan antara lain asistensi teknis yang intensif dari Direktorat Teknis kepada seluruh satuan kerja dan monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran secara berkala.

4) Terkait kegiatan yang tidak dapat terselesaikan sampai akhir tahun, sesuai hasil rapat pimpinan agar tetap dijalankan semaksimal mungkin, jika tidak selesai akan diperpanjang ke tahun 2025 *(MYC)*.

b. Diharapkan masing-masing Unit Kerja melakukan *crosscheck* data PNBP dengan data yang diberikan oleh bagian keuangan (perhatikan kolom realisasi) pada gambar berikut:

PNBP DJKA SEMESTER I TA 2024

Row Labels	TARGET	Sum of REALISASI - SUMBER DATA SPAN	%
445572 - PENGEMBANGAN DAN PENINGKATAN FASILITAS KESELAMATAN PERKERETAAPIAN	**1.200.000.000**	**612.333.000**	**51,03%**
425122 - Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	-	98.583.000	
425287 - Pendapatan Pengujian, Sertifikasi dan Kalibrasi di Bidang Perhubungan	1.200.000.000	513.750.000	
467005 - BALAI PENGELOLA KERETA API RINGAN SUMATERA SELATAN	**28.336.542.000**	**10.724.092.864**	**37,85%**
424119 - Pendapatan Jasa Penyediaan Barang dan Jasa Lainnya	19.069.206.000	9.130.930.000	
424312 - Pendapatan Hasil Kerja Sama Lembaga/Badan Usaha	9.267.336.000	387.500.000	
424911 - Pendapatan Jasa Layanan Perbankan BLU	-	66.319.756	
424923 - Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Ruangan	-	126.300.000	
425911 - Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	-	22.431.170	
425912 - Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	-	990.611.938	
467006 - BALAI PENGELOLA KERETA API SULAWESI SELATAN	**499.320.000**	**19.744.685.657**	**3954,31%**
425131 - Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	20.000.000	-	
425151 - Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi	479.320.000	230.556.000	
425699 - Pendapatan Jasa Lainnya	-	1.352.471.000	
425811 - Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	-	870.710.793	
425911 - Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	-	106	
425912 - Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	-	547.669.519	
425913 - Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu	-	16.743.278.239	
467309 - BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN KELAS I JAKARTA	**11.347.894.000**	**1.855.349.701**	**16,35%**
425131 - Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	11.347.894.000	-	
425811 - Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	-	98.256.272	
425911 - Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	-	792	
425913 - Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu	-	1.757.092.637	
467321 - BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN KELAS I SEMARANG	**-**	**205.568.035**	**-**
425131 - Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	-	34.881	
425699 - Pendapatan Jasa Lainnya	-	52.616.000	
425811 - Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	-	19.740.000	
425911 - Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	-	6.207.591	
425912 - Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	-	75.416.973	
425913 - Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu	-	51.552.590	
467337 - BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN KELAS I SURABAYA	**100.000.000**	**1.507.100**	**1,51%**
425129 - Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	100.000.000	-	
425911 - Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	-	1.507.100	
467345 - BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN KELAS I MEDAN	**-**	**927.826.062**	**-**
425122 - Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	-	6.666.666	
425131 - Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	-	13.304.745	
425699 - Pendapatan Jasa Lainnya	-	220.761.000	
425811 - Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	-	-	
425911 - Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	-	1.061	
425912 - Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	-	40.772.590	
425913 - Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu	-	646.320.000	
467352 - BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN KELAS II PADANG	**-**	**1.538.894.914**	**-**
425122 - Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	-	10.500.000	
425131 - Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	-	99.660	
425699 - Pendapatan Jasa Lainnya	-	163.730.000	
425911 - Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	-	1.405	
425912 - Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	-	573.495.728	
425915 - Penerimaan Kembali Belanja Subsidi Tahun Anggaran Yang Lalu	-	791.068.121	
467364 - BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN KELAS II PALEMBANG	**-**	**220.171.000**	**-**
425122 - Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	-	217.581.000	
425911 - Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	-	2.590.000	
467373 - BALAI PERAWATAN PERKERETAAPIAN	**41.819.950.000**	**1.532.684.686**	**3,66%**
425131 - Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	30.331.460.000	10.360.000	
425132 - Pendapatan Sewa Peralatan dan Mesin	2.295.390.000	1.086.948.682	
425151 - Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi	9.193.100.000	285.610.000	
425911 - Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	-	665.000	
425912 - Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	-	149.101.004	
467385 - BALAI PENGUJIAN PERKERETAAPIAN	**56.931.775.000**	**34.423.953.707**	**60,47%**
424119 - Pendapatan Jasa Penyediaan Barang dan Jasa Lainnya	55.007.525.000	34.260.006.225	
424312 - Pendapatan Hasil Kerja Sama Lembaga/Badan Usaha	1.924.250.000	-	
424911 - Pendapatan Jasa Layanan Perbankan BLU	-	163.947.482	
467462 - PENGEMBANGAN LALU LINTAS DAN PENINGKATAN ANGKUTAN KERETA API	**1.101.393.572.000**	**245.026.255.265**	**22,25%**
425512 - Pendapatan Penggunaan Prasarana Perkeretaapian/Track Access Charge	1.101.061.822.000	244.233.559.805	
425519 - Pendapatan Jasa Transportasi Lainnya	331.750.000	267.000.000	
425811 - Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	-	425.136.120	
425912 - Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	-	100.559.340	
467478 - PENGEMBANGAN DAN PENINGKATAN SARANA PERKERETAAPIAN	**1.422.000.000**	**883.820.000**	**62,15%**
425151 - Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi	-	11.910.000	
425287 - Pendapatan Pengujian, Sertifikasi dan Kalibrasi di Bidang Perhubungan	1.422.000.000	861.550.000	
425912 - Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	-	10.360.000	
467484 - PENGEMBANGAN, PENINGKATAN DAN PERAWATAN PRASARANA PERKERETAAPIAN	**1.182.500.000**	**2.458.327.150**	**207,89%**
425287 - Pendapatan Pengujian, Sertifikasi dan Kalibrasi di Bidang Perhubungan	132.500.000	71.850.000	
425519 - Pendapatan Jasa Transportasi Lainnya	1.050.000.000	973.260.000	
425811 - Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	-	155.215.004	
425912 - Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	-	593.349.955	
425913 - Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu	-	664.652.191	
467504 - KANTOR PUSAT DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN	**17.000.000.000**	**2.720.865.910**	**16,01%**
425122 - Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	-	753.000.000	
425131 - Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	17.000.000.000	1.798.734.952	
425912 - Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	-	169.130.958	
467515 - BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN KELAS I BANDUNG	**100.000.000**	**3.252.721.067**	**3252,72%**
425122 - Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	-	4.567.890	
425129 - Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	100.000.000	-	
425811 - Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	-	839.900.893	
425913 - Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu	-	2.408.252.284	
Total	**1.261.333.553.000**	**326.129.056.118**	**25,86%**

Diharapkan dari Bagian Keuangan untuk menyampaikan data dukung terkait melalui Nota Dinas sesuai format pada SE-1 Itjen Tahun 2024.

22. **Pembahasan dari Bagian Hukum, Setditjen Perkeretaapian**
    a. Terkait Sosial Media selama periode Januari s.d April 2024 telah diproduksi 100 konten sosial media. Selama periode Mei 2024 telah diproduksi 20 konten, serta pada Juli 2024 telah diproduksi juga 20 konten sosial media (berupa phototext, infografis, video dan kuis). Selain itu telah dilakukan juga kegiatan *online reputation management* dan digital activity lainnya (seperti kuis). Untuk siaran pers pada Triwulan II 2024 ada sebanyak 5 release (total dari Januari ada 12 release).
    b. Terkait Peraturan dan Regulasi pada Triwulan II 2024 ada 2 regulasi yang telah terbit antara lain:
        1) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 8 Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Direktorat Jenderal Perkeretaapian telah ditetapkan pada 11 Juni 2024 dan tanggal pengundangan pada 28 Juni 2024.
        2) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 122 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 62 Tahun 2013 tentang Pedoman Perhitungan Biaya Penggunaan Prasarana Perkeretaapian yang ditetapkan pada 25 Juni 2024 dan diundangkan pada 4 Juli 2024.
    c. Telah dilakukan Harmonisasi RPM Perhubungan tentang Sertfikasi Tenaga Pelaksana Pembangunan Prasarana Perkeretaapian pada 9 Juli 2024.
    d. Pada 10 Juli 2024 telah dilakukan pembahasan Lampiran PP 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraaan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko di Bidang Perkeretaapian
    e. Ada 11 judul regulasi yang masih dalam proses.
    f. Ada 1 Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan Tentang Tata Cara, Standar Peralatan Dan SDM Petugas Penanganan Kecelakaan Kereta Api dan Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan Tentang Tata Cara, Standar Peralatan dan SDM Petugas Pemeriksa dan Analisis Kecelakaan Kereta Api sudah diajukan oleh Dit. Keselamatan Perkeretaapian dan sudah masuk ke dalam *draft* Bagian Hukum dan akan segera dilakukan pembahasan.
    g. Terkait peraturan/regulasi Trem Otonom (ART) ada 2 progres yang masih berproses di Direktorat Sarana. Perlu di konfirmasi oleh Bagian Hukum ada berapa jumlah regulasi/peraturan terkait Trem Otonom.
    h. Diharapkan Bagian Hukum membuat ND Pengantar yang berisikan data dukung terkait sesuai format pada SE-1 Itjen Tahun 2024.
23. **Pembahasan dari Bagian SDM dan Umum, Setditjen Perkeretaapian**
    a. Terkait data pengembangan kompetensi Triwulan II 2024, Diklat PKA dan PKP akan diupdate (diklat PKA sedang berlangsung 25 Juni s.d 13 Nov dan PKP tanggal 1 Juli s.d 20 November). Untuk diklat Manajemen Risiko sudah berjalan pada bulan Juli 2024 dan akan dilakukan update.
    b. Untuk Diklat Inspektur sebagian besar lebih dihandle oleh Dit. Keselamatan.

c. Diharapkan Bagian SDM dan Umum membuat ND Pengantar yang berisikan data dukung terkati sesuai format pada SE-1 Itjen Tahun 2024.
d. Dibutuhkan *update* data terkait fungsional inspektur perkeretaapian termasuk data-data SDM.
e. Disarankan juga agar Bagian SDM dan Umum memberikan data dukung terkait dokumentasi kegiatan-kegiatan pendukung Tata Usaha, Umum dan Rumah Tangga. Selain itu juga diharapkan ada data terkait Layanan Rumah Tangga (yang kinerjanya diukur dari kuisioner).

24. **Kesimpulan**
    a. Berdasarkan hasil penelusuran DJA, pada DIPA/POK Tahun 2024 belum diterapkan secara optimal SBK pada output (KRO/RO) dimana hanya ada pada 1 kegiatan di Satker Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perkeretaapian, sedangkan di unit kerja lain belum menggunakan SBK. Untuk itu, NKA unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian masih rendah dikarenakan belum ditetapkan/digunakan SBK pada masing-masing output sehingga nilai maksimum yang dapat diperoleh sebesar 75 pada akhir tahun.
    b. Disepakati bahwa perhitungan capaian kinerja IKK Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran masih mengacu pada Kepdirjen Perkeretaapian Nomor KP-DJKA 10 Tahun 2023 tentang Indikator Kinerja Program dan Indikator Kinerja Kegiatan Unit Kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian (NKA mengacu PMK Nomor 22/PMK.02/2021), sedangkan untuk perhitungan NKA sebagaimana butir 2) sesuai PMK Nomor 62 Tahun 2023 akan diusulkan untuk digunakan pada pengukuran kinerja periode Tahun 2025 - 2029.
    c. Terkait Evalausi SAKIP diharapkan bisa segera difinalisasi dan melengkapi data dukung terkait terutama terkait Surat dan Nota Dinas. Selain itu uraian penyesuaian strategi dan budaya kinerja harap ditindaklanjuti oleh masing-masing Unit Kerja sesuai arahan Itjen pada rapat sebelumnya.
    d. Diharapkan tiap Unit Kerja dapat membuat 3 format surat yang berisikan:
        1) Surat berisikan lampiran paparan/dokumentasi Pra Evaluasi SAKIP;
        2) Surat ke Sesditjen terkait Hasil Evaluasi Internal mengacu nilai pada aplikasi SILAKI;
        3) Untuk Unit Kerja Sampel diharapkan dapat melengkapi data dukung terkait LKE SAKIP agar dilengkapi sesuai catatan Itjen (untuk Unit Kerja non sampel diharapkan dapat menyusaikan).
    e. Mayoritas unit kerja membutuhkan Revisi PK sehingga nanti akan diagendakan jadwal terkait Revisi PK tersebut.
    f. Masing-masing unit kerja diharap dapat segera melengkapi pengisian aplikasi pelaporan kinerja baik aplikasi e-Performance, e-SAKIP Reviu, e-Monev Bappenas dan SILAKI terutama periode Triwulan II 2024.
    g. Laporan Monitoring Kinerja Triwulan II Tahun 2024 disusun dengan mengacu PM 85 Tahun 2020 dan target pada Perjanjian Kinerja Tahun 2024 yang telah ditetapkan dengan memperhatikan:

1) Nomenklatur dan tata cara perhitungan indikator kinerja berdasarkan Kepdirjen Perkeretaapian Nomor KP-DJKA 10 Tahun 2023.
2) Hasil evaluasi kepatuhan pelaporan terhadap Laporan Monitoring Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2024.
3) Kelengkapan outline dan substansi pelaporan berdasarkan hasil pembahasan dan pedoman SAKIP di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian.
4) Substansi/kriteria evaluasi dan evidence pada Surat Edaran Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan Nomor SE 1 Tahun 2024.
5) Penyusunan Laporan Monitoring Kinerja Triwulan II Tahun 2024 agar dilaporkan kepada Direktur Jenderal Perkeretaapian serta di*upload* pada aplikasi e-SAKIP Reviu dan SILAKI pada Portal Aplikasi Ditjen Perkeretaapian ***paling lambat 25 Juli 2024***.

h. Hal-hal yang perlu perbaikan/penambahan pada pelaporan diantaranya:
1) Analisa perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja di level nasional/internasional (benchmark kinerja) untuk beberapa indikator kinerja (lebih dari 1 atau 50% dari jumlah indikator kinerja).
2) Perbaikan analisa keberhasilan/kegagalan pencapaian kinerja agar lebih detail sesuai kegiatan pendukung yang dilaksanakan termasuk data crosscutting.
3) Pendetailan rekomendasi/upaya peningkatan kinerja diantaranya terkait penyesuaian strategi, kebijakan, aktivitas, anggaran, organisasi, penempatan pegawai/jabatan.
4) Melengkapi analisis efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja (anggaran dan SDM).
5) Melengkapi uraian perubahan/peningkatan budaya kinerja unit kerja.
6) Dokumentasi dan laporan pembahasan internal unit kerja yang menunjukkan kepedulian dan pemahaman dari pimpinan dan pegawai terkait pengukuran dan pelaporan kinerja, termasuk nota dinas/ penyampaian data capaian kinerja dari sub unit kerja/berjenjang.

i. Data realisasi angkutan kereta api baik penumpang dan barang perlu disinkronisasi antara Balai Teknik Perkeretaapian/Balai Pengelola Kereta Api dengan Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Kereta api.

j. Data TQI Kategori I dan II masih menunggu perbaikan pelaporan dari PT. KAI (paling lambat tanggal 20 Juli 2024) dikarenakan adanya perubahan kategori TQI dan perbedaan panjang jalur terukur, sehingga untuk sementara menggunakan data pengukuran periode IV Tahun 2023.

k. Terdapat data fasilitas operasi dengan teknologi handal yang perlu dikonsolidasikan antara Direktorat Prasarana Perkeretaapian dengan Balai Teknik Perkeretaapian/Balai Pengelola Kereta Api khususnya di wilayah Sumatera Selatan dan Lampung dimana terdapat data hasil peningkatan fasilitas operasi yang dilakukan PT. KAI.

l. Data kecelakaan kereta api agar sinkron dengan data Direktorat Keselamatan Perkeretaapian termasuk diperlukan analisa/indikasi awal terkait penyebab kecelakaan guna rekomendasi periode berikutnya.
m. Data realisasi PNBP agar mengacu pada aplikasi SPAN Kementerian Keuangan serta dikoordinasikan dengan Bagian Keuangan Setditjen Perkeretaapian guna proses monitoring dan evaluasi berkala.
n. Perhitungan Nilai Kinerja Anggaran (NKA) mengacu pada Kepdirjen Perkeretaapian Nomor KP-DJKA 10 Tahun 2023 dimana perhitungan masih mengacu pada PMK Nomor 22/PMK.02/2021.
o. Bahan paparan saat pembahasan dapat diakses melalui tautan **https://drive.google.com/drive/folders/1VLHG47YVX1PQPBMEZ_h_tIMS8qFGVhWW?usp=sharing.**

D. PENUTUP

Demikian laporan ini buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 12 Juli 2024
Notulensi

(Kelompok Evaluasi dan Pelaporan)

DOKUMENTASI

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO. 8
JAKARTA 10110

TELP : (021) 3506204, 3856836
3505557, 3505558
3505559, 3506526

FAX : (021) 3860758
3813972

NOTA DINAS

Nomor: 0566/K1.1/VII/2024

Yth.	:	Sekretaris Direktorat Jenderal Perkeretaapian
Dari	:	Kepala Bagian Perencanaan
Hal	:	Tindak Lanjut Pemenuhan Data Dukung Pelaporan Kinerja Triwulan II Tahun 2024 Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian
Tanggal	:	19 Juli 2024

Menindaklanjuti surat dari Sekretaris Direktorat Jenderal Perkeretaapian Nomor: UM.207/7/4/DJKA/2024 tanggal 16 Juli 2024 perihal Tindak Lanjut Rapat Pembahasan Pelaporan Kinerja Triwulan II Tahun 2024, disampaikan bahwa Bagian Perencanaan dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya mendukung capaian indikator kinerja pada Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian, diantaranya sebagai berikut:

1. Presentase Rekomendasi Kebijakan Pembinaan dan Peningkatan Konektivitas Perkeretaapian yang telah ditindaklanjuti.
2. Persentase Pemenuhan Rencana Induk Teknologi Informasi dan Komunikasi Bidang Perkeretaapian;
3. Nilai AKIP Direktorat Jenderal Perkeretaapian;
4. Tingkat Maturitas SPIP Direktorat Jenderal Perkeretaapian.

Berkenaan dengan hal tersebut, bersama ini terlampir disampaikan data dukung capaian kinerja Triwulan II dari Bagian Perencanaan untuk mendukung indikator kinerja dimaksud.

Atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

Frederik Pongtuluran
NIP 197502252006041001

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO.8
JAKARTA 10110

TELP: +62 813-6001- 3838

WEBSITE : djka.kemenhub.go.id
EMAIL : ditjenka@kemenhub.go.id

NOTA DINAS
Nomor 566/KI-3/VII/2024

Yth. : Sekretaris Direktorat Jenderal Perkeretaapian

Dari : Plh. Kepala Bagian Hukum

Hal : Tindak Lanjut Pemenuhan Data Dukung Pelaporan Kinerja Triwulan II Bagian Hukum

Tanggal : 19 Juli 2024

Menindaklanjuti surat dari Sekretaris Direktorat Jenderal Perkeretaapian Nomor : UM.207/7/4/K1/DJKA/2024 tanggal 16 Juli 2024 perihal Tindak Lanjut Rapat Evaluasi Implementasi SAKIP dan Pembahasan Pelaporan Kinerja Triwulan II Tahun 2024, disampaikan bahwa Bagian Hukum dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya mendukung capaian indikator kinerja pada Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian, yaitu presentase capaian Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan yang sedang dalam pembahasan ataupun yang akan dibahas, presentase kegiatan pendampingan hukum di lingkungan Ditjen Perkeretaapian dan capaian publikasi di lingkungan Ditjen Perkeretaapian.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, terlampir disampaikan data dukung capaian kinerja Triwulan II dari Bagian Hukum untuk mendukung indikator kinerja dimaksud.

Atas perkenan arahan dan petunjuk lanjut diucapkan terima kasih.

Irawati Sjurman, S.H., M.H.
NIP 196811271994032003

Tembusan :
Kepala Bagian Perencanan

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

GEDUNG KARYA
JL. MERDEKA BARAT NO.8
JAKARTA 10110

TELP : 0813 6001 3838

WEBSITE : http://djka.dephub.go.id/
EMAIL : ditjenka@kemenhub.go.id

NOTA DINAS

Nomor : 0512 / KI.2 / VII / 2024

Yth.	:	Sekretaris Direktorat Jenderal Perkeretaapian
Dari	:	Kepala Bagian Keuangan
Hal	:	Tindak Lanjut Pemenuhan Data Dukung Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan Tahun 2024 Bagian Keuangan.
Tanggal	:	17 Juli 2024

Menunjuk surat Sekretaris Direktorat Jenderal Perkeretaapian Nomor: UM.207/4/KI/DJKA/2024 tanggal 16 Juli 2024 perihal Tindak Lanjut Rapat Implementasi SAKIP dan Pembahasan Kinerja Triwulan II Tahun 2024, bahwa dalam rangka penyusunan Laporan Monitoring Kinerja Triwulan II Tahun 2024 sesuai tugas dan fungsi Bagian Keuangan dengan hormat bersama ini terlampir dilaporkan dokumen pendukung monitoring dan evaluasi berkala berdasarkan referensi aplikasi terkait sebagai berikut:

1. Laporan Target & Realisasi PNBP Tahun Anggaran 2024 berdasarkan aplikasi Sistem Informasi PNBP Online (SIMPONI) DJA Kemenkeu, sebagai data Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) 8 - Persentase Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Bidang Perkeretaapian; dan
2. Laporan Realisasi Belanja berdasarkan aplikasi Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM-SPAN) DJPB Kemenkeu, sebagai data Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) 9 - Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran Ditjen Perkeretaapian.

Atas perhatian dan arahan lebih lanjut dari Ibu Sekretaris Direktorat Jenderal Perkeretaapian diucapkan terima kasih.

Irvan Ariestiana
NIP 197906232005021002

Tembusan:
Kepala Bagian Perencanaan

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO. 8
JAKARTA 10110
TELP: +62 813-6001- 3838
WEBSITE : djka.kemenhub.go.id
EMAIL : ditjenka@kemenhub.go.id

NOTA DINAS
Nomor : 795 /K1.4/VII/2024

Yth.	:	Kepala Bagian Perencanaan
Dari	:	Plh. Kepala Bagian SDM dan Umum
Hal	:	Tindak Lanjut Pemenuhan Data Dukung Pelaporan Kinerja Triwulan II Bagian SDM dan Umum
Tanggal	:	17 Juli 2024

Menindaklanjuti surat dari Sekretaris Direktorat Jenderal Perkeretaapian Nomor: UM.207/7/4/K1/DJKA/2024 tanggal 16 Juli 2024 perihal Tindak Lanjut Rapat Evaluasi Implementasi SAKIP dan Pembahasan Pelaporan Kinerja Triwulan II Tahun 2024, disampaikan bahwa Bagian SDM dan Umum dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya mendukung capaian Indikator kinerja pada Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian, yaitu Persentase ASN Ditjen Perkeretaapian yang Memiliki Sertifikat Kompetensi/Keahlian, Tingkat Kepuasan Pelayanan Perkantoran dan Daftar Nama Pegawai yang Telah Lulus Uji Kompetensi dan Siap Dilantik ke Dalam Jabatan Fungsional Bidang Perkeretaapian di Lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian. Berkenaan dengan hal tersebut, bersama ini terlampir disampaikan data dukung capaian kinerja Triwulan II dari Bagian SDM dan Umum untuk mendukung indikator kinerja dimaksud.

Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

A. Zaky, S.T., M.T.
NIP 197607152005021002

Tembusan :
1. Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian
2. Kepala Bagian SOM dan Umum